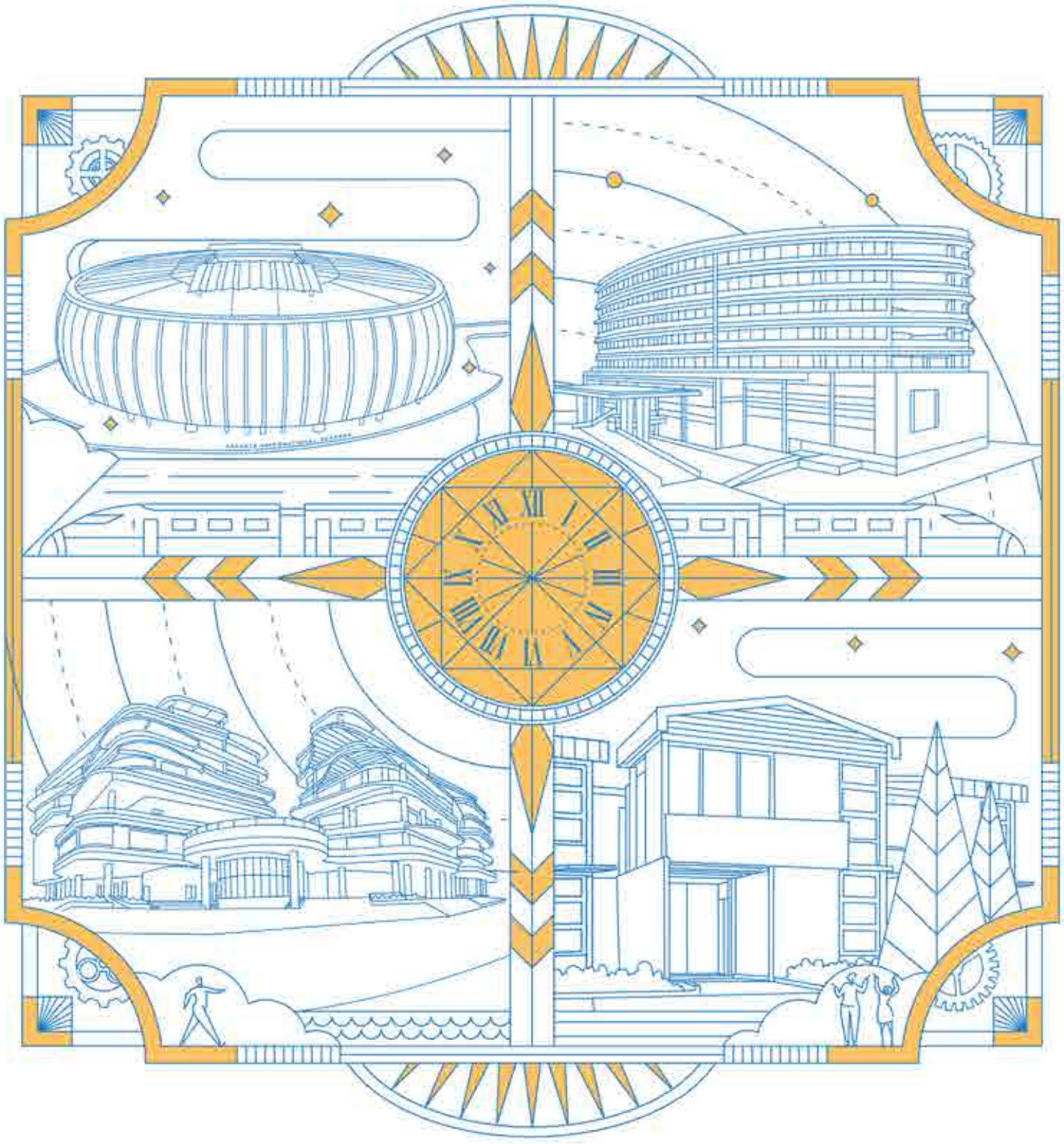


MEMPERKOKOH FONDASI, MENGUATKAN ARAH PERTUMBUHAN

Solidifying the Foundation, Strengthening the Path to Growth

Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan
Method of Preparation and About the Annual Report

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2025 diterbitkan bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2025, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang kinerja, risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga membantu Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan perkembangannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2025 fiscal year is published and integrated with the Sustainability Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2025 fiscal year, which jointly form an inseparable entity to provide a comprehensive overview of the Company's performance, risks, opportunities, and future prospects, so as aiming Shareholders and Stakeholders in understanding the Company's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2025 mengangkat tema "Memperkokoh Fondasi, Menguatkan Arah Pertumbuhan". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis di sepanjang tahun 2025 serta mempertimbangkan keberlanjutan bisnis Perseroan.

The 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adopts the theme "Solidifying the Foundation, Strengthening the Path to Growth." This theme was selected based on in-depth analysis and assessment of facts and business developments throughout 2025, while also considering the Company's business sustainability.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2025 disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2025 fiscal year is prepared based on the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, and OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Laporan Tahunan ini juga mencakup pengungkapan keterbukaan yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), yang mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (SEOJK) serta disusun dengan memperhatikan aspek *best practice* sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) maupun *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), sekaligus mengacu pada kriteria penilaian *Annual Report Award* (ARA) oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Pengungkapan pelaksanaan GCG juga memuat kebijakan SMAP di internal Perseroan serta *Corporate Rating* yang dikeluarkan oleh lembaga rating independen.

This Annual Report also includes more in-depth and comprehensive disclosures regarding the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, referring to the Corporate Governance Guidelines for Public Companies (SEOJK), and is prepared by taking into account best practices as set out in the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), as well as referring to the assessment criteria of the Annual Report Award (ARA) by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The disclosure of GCG implementation also includes the Anti-Bribery Management System (SMAP) policy within the Company, as well as Corporate Ratings issued by independent rating agencies.

Dalam laporan tahunan ini, penyebutan satuan mata uang dinyatakan dalam "Rupiah", "Rp", atau "IDR" yang merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

In this Annual Report, currency is presented in "Rupiah", "Rp", or "IDR", referring to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penyebutan kata "WEGE" dan "Perseroan atau Perusahaan" didefinisikan sebagai PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang Konstruksi Bangunan Gedung, Modular, dan Konsesi.

The terms "WEGE" and "the Company" refer to PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, which primarily operates in building construction, modular construction, and concession businesses.

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2025 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca serta dicetak dengan kualitas yang baik.

The 2025 Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk is presented in two languages, Indonesian and English, using readable font types and sizes and printed in high quality.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun buku 2025 disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Perseroan pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 kepada regulator.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Sedangkan, pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

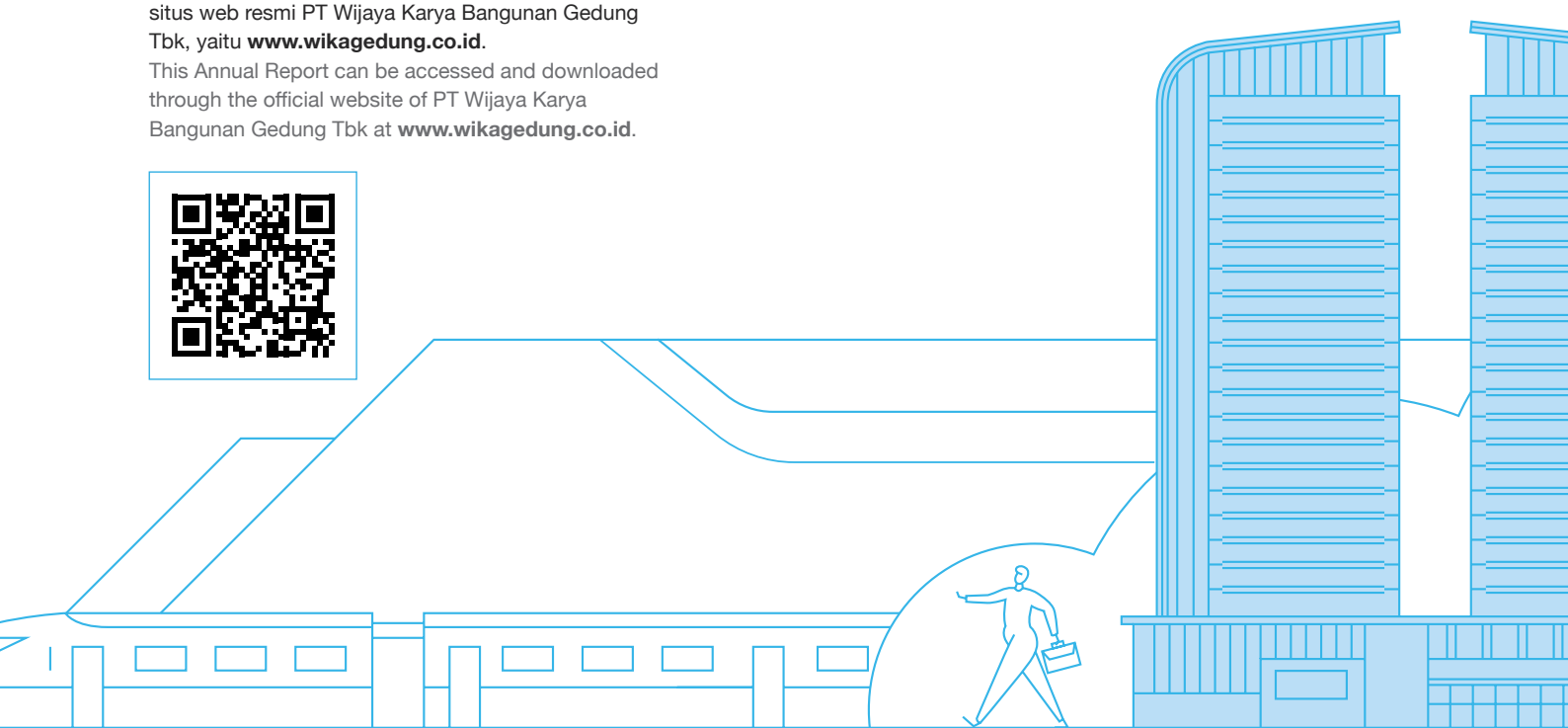
Oleh karena itu, Perseroan tidak menjamin bahwa pernyataan atau informasi prospektif tersebut menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ataupun akan membawa hasil tertentu sesuai harapan. Hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan.

The Annual Report of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2025 fiscal year is prepared to fulfill reporting requirements on the Company's performance for the period from January 1, 2025 to December 31, 2025 to the regulator.

This Annual Report contains statements regarding financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are categorized as forward-looking statements under applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements involve risks and uncertainties and may cause actual developments to differ materially from those reported. Forward-looking statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions as well as the relevant business environment, which may result in actual developments differing materially from those reported.

Therefore, the Company does not guarantee that such forward-looking statements or information will serve as a primary basis for decision-making or will lead to specific outcomes as expected. Actual future results may differ due to factors beyond the Company's control.

Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh melalui situs web resmi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, yaitu **www.wikagedung.co.id**.
This Annual Report can be accessed and downloaded through the official website of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk at **www.wikagedung.co.id**.



Penjelasan Tema
Theme Explanation



MEMPERKOKOH FONDASI, MENGUATKAN ARAH PERTUMBUHAN

Solidifying the Foundation, Strengthening the Path to Growth

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika bagi industri konstruksi nasional. Di tengah ketidakpastian global, penyesuaian kebijakan fiskal, serta meningkatnya selektivitas pasar, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) terus menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas sebagai perusahaan konstruksi gedung terkemuka di Indonesia. Mengusung tema "Memperkokoh Fondasi, Menguatkan Arah Pertumbuhan", Perseroan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fundamental bisnis melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko yang disiplin, efisiensi operasional, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi konstruksi berbasis inovasi.

Sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang berfokus pada pembangunan gedung bertingkat, fasilitas publik, kawasan hunian, serta bangunan berbasis *green building*, WEGE terus mengembangkan keunggulan kompetitif melalui penerapan *Building Information Modeling* (BIM), modular *construction*, dan digitalisasi proses bisnis. Sepanjang tahun 2025, Perseroan menjaga kualitas portofolio proyek secara selektif dan *prudent*, memperkuat pendekatan dan selektivitas pasar swasta dan kawasan industri, serta tetap mengambil peran dalam pembangunan proyek strategis nasional, termasuk dukungan terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

The year 2025 was a dynamic period for the national construction industry. Amid global uncertainty, fiscal policy adjustments, and increasing market selectivity, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) continued to demonstrate resilience and adaptability as a leading building construction company in Indonesia. By adopting the theme "Solidifying the Foundation, Strengthening the Path to Growth," the Company reaffirms its commitment to strengthening business fundamentals through enhanced governance, disciplined risk management, operational efficiency, and the development of human capital and innovation-based construction technology.

As a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk focusing on high-rise buildings, public facilities, residential areas, and green building-based construction, WEGE continues to develop its competitive advantages through the implementation of Building Information Modeling (BIM), modular construction, and digitalization of business processes. Throughout 2025, the Company maintained a selective and prudent project portfolio, strengthening the approach to and selectivity in the private sector and industrial estate markets, and continued to play a role in national strategic projects, including support for the development of the Nusantara Capital City (IKN).

Dalam mendukung keberlanjutan transformasi tersebut, Perseroan terus memperkuat praktik tata kelola perusahaan dengan mengadopsi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk penyelarasan dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001 juga terus diperkuat guna memastikan terciptanya lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Penguatan tata kelola ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham, mitra usaha, serta pemangku kepentingan lainnya di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

In supporting the sustainability of this transformation, the Company continues to strengthen corporate governance practices by adopting Good Corporate Governance (GCG) principles, including alignment with the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The implementation of the ISO 37001-based Anti-Bribery Management System (SMAP) is also continuously strengthened to ensure a transparent, accountable, and high-integrity business environment. This governance enhancement is a key factor in maintaining the trust of shareholders, business partners, and other stakeholders amid an increasingly competitive industry landscape.

Berlandaskan nilai-nilai AKHLAK sebagai *core values* BUMN, WEGE secara konsisten mengembangkan "Rumah Transformasi" sebagai kerangka strategis dalam mengarahkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Melalui inisiatif tersebut, Perseroan menitikberatkan pada penguatan struktur keuangan, optimalisasi kebijakan manajemen risiko, peningkatan produktivitas melalui implementasi BIM dan industrialisasi konstruksi, serta pengembangan model bisnis yang lebih adaptif dan berbasis keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Guided by AKHLAK values as the core values of SOEs, WEGE consistently develops the "Transformation House" as a strategic framework to drive healthy and sustainable business growth. Through this initiative, the Company emphasizes strengthening financial structures, optimizing risk management policies, increasing productivity through BIM implementation and construction industrialization, and developing more adaptive and sustainability-based business models. This approach is not only focused on achieving short-term targets but also on creating long-term value aligned with the Company's Long-Term Plan (RJPP).

Perjalanan transformasi menjadi dasar bagi Perseroan untuk menjaga ketahanan operasional di tengah tekanan kinerja 2025. Fondasi yang diperkuat melalui tata kelola yang baik, disiplin finansial, inovasi teknologi, serta integrasi prinsip ESG menjadi modal utama bagi WEGE untuk terus tumbuh secara terukur. Dengan fondasi yang semakin kokoh dan arah pertumbuhan yang semakin jelas, Perseroan optimistis dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

The Company's transformation journey has served as a key foundation for maintaining operational resilience amid performance pressures throughout 2025. A strengthened foundation through good governance, financial discipline, technological innovation, and integration of ESG principles serves as the Company's main capital to continue growing in a measured manner. With a stronger foundation and a clearer growth direction, the Company is optimistic about creating sustainable added value for shareholders, customers, employees, and all stakeholders in supporting sustainable national development.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity



2024
Memperkokoh Fondasi, Menguatkan Arah Pertumbuhan
Solidifying the Foundation, Strengthening the Patch to Growth

Industri konstruksi global tengah mengalami transformasi signifikan sebagai respons terhadap tantangan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, dan dampak perubahan iklim, sehingga menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Perseroan melakukan berbagai inisiatif transformasi strategis untuk memperkuat pertumbuhan yang lebih efisien dan inovatif, termasuk penyempurnaan visi dan misi pada usia ke-16 sebagai landasan arah kebijakan jangka panjang dalam menjawab tantangan industri. Transformasi juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi, melalui implementasi *Building Information Modeling* (BIM) secara menyeluruh untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi proyek, serta penerapan *Enterprise Resource Planning* (ERP) berbasis *System Application and Processing* (SAP) guna mengoptimalkan kontrol biaya dan efektivitas pengelolaan operasional berbasis data.

The global construction industry is undergoing significant transformation in response to economic challenges, geopolitical uncertainty, and the impacts of climate change, requiring companies to continuously adapt in order to remain competitive and sustainable. In facing these dynamics, the Company has undertaken a number of strategic transformation initiatives to strengthen more efficient and innovative growth, including refining its vision and mission at its 16th anniversary as a foundation for long-term policy direction in addressing industry challenges. The transformation also focuses on leveraging technology through the comprehensive implementation of Building Information Modeling (BIM) to enhance project integration and efficiency, as well as the adoption of Enterprise Resource Planning (ERP) based on System Application and Processing (SAP) to optimize cost control and the effectiveness of data-driven operational management.



2023
15th Years of Devotion: Be the Change
15 Tahun Pengabdian: Jadilah Perubahan

15 tahun pengabdian di industri konstruksi Gedung bukan sebuah perjalanan yang mudah. Perubahan gradual Perusahaan selayaknya sebuah metamorfosis, yang terjadi untuk merespon beragam dinamika yang terjadi di lingkungan ekonomi dan bisnis konstruksi bangunan serta selaras dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Proses transformasi yang melibatkan segenap insan Perusahaan mampu menorehkan berbagai prestasi yang patut dibanggakan sebagai bagian dari pengabdian Perusahaan di industri konstruksi bangunan gedung.

The Company's 15 years of serving the building industry not been an easy journey. The gradual changes of the company are like a metamorphosis that takes place in response to various dynamics that occur in the economic environment and in the building construction business as well as in accordance with the progress and evolution of technology. The transformation process, which involved all the Company's employees, has resulted in various achievements that the Company can be proud of as part of its devotion to the building construction industry.

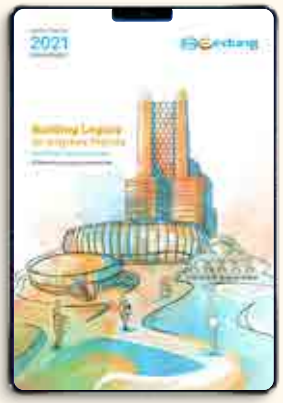


2022
Towards Responsive Unity Sustainable Teamwork (TRUST)

Menuju Kerjasama Tim yang Responsif, Bersatu dan Berkelanjutan

Kami berkomitmen untuk membangun TRUST dengan semua pemangku kepentingan kami, termasuk klien, mitra, dan karyawan. Responsif berarti memberikan layanan yang cepat dan efisien, selalu memprioritaskan kebutuhan klien kami. Bersatu artinya dengan bekerja bersama sebagai tim, kami dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memberikan hasil yang lebih baik untuk klien kami. Berkelanjutan mendorong kami memahami pentingnya melindungi lingkungan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Sebagai sebuah tim, kami dapat memberikan proyek berkualitas tinggi dan menciptakan hubungan yang langgeng dengan klien kami.

We are committed to building TRUST with all our stakeholders, including customers, partners and employees. Responsive means providing fast, efficient service, always prioritizing customer needs. United means that by working together as a team, we will be able to achieve greater success and deliver better results for our customers. Sustainability means that we understand the importance of protecting the environment and creating sustainable solutions. As a team, we are able to deliver high quality projects and build long lasting relationships with our clients.



2021
Building Legacy to Engrave History

Terus Berkarya dan Mengukir Sejarah

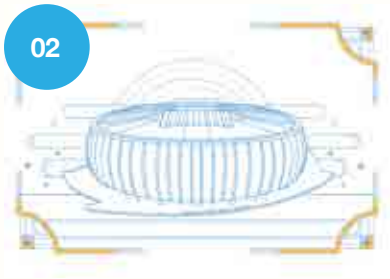
Tahun 2021 mencatat sejarah baru bagi Perusahaan dengan rampungnya pekerjaan struktur atap baja dan *retractable roof* proyek megastruktur Jakarta International Stadium (JIS). Selain itu, Perusahaan juga merampungkan Pit *Building* untuk ajang *World Superbike* Mandalika. Kedua proyek megastruktur ini melengkapi daftar Panjang portfolio mahakarya Perusahaan yang bernilai sejarah dan bertaraf internasional. Keberhasilan yang tak terlepas dari keahlian, kolaborasi, serta komitmen untuk Terus Berkarya dan Mengukir Sejarah.

In 2021, The Company engraved another history by completing the installation of retractable roof for its megastructure project, Jakarta International Stadium (JIS). The Company also completed the Pit Building for the World Superbike Mandalika. These two megastructure projects add to the list of the Company's historical and international masterpieces. Such achievements which manifest expertise, collaboration, and commitment to continue Building Legacy to Engrave History

Daftar Isi
Table of Contents



Ikhtisar Utama
Performance Highlights



Laporan Manajemen
Management Report

2	Metode Penyusunan dan Tentang Laporan Tahunan Method of Preparation and About the Annual Report
3	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
4	Penjelasan Tema Theme Explanation
6	Kesinambungan Tema Theme Continuity
8	Daftar Isi Table of Contents
12	Keunggulan Kompetitif WEGE Wege Competitive Advantages
14	Komitmen dan Implementasi ESG Commitment and Implementation of ESG
16	Penerapan Keberlanjutan WEGE Sepanjang Tahun 2025 WEGE Sustainability Implementation Throughout 2025
20	Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk Modular WEGE Sustainability Support through Wege Modular Products
21	Modular WEGE WEGE Modular
28	Pencapaian WEGE 2025 WEGE Achievements in 2025
30	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
34	Ikhtisar Kinerja Performance Highlights
36	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights
39	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position
41	Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash Flows
42	Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya Financial Ratios and Other Important Ratios
44	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
48	Ikhtisar Organisasi Organizational Highlights
49	Ikhtisar Saham Shares Information
52	Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) Information on Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Stock Listings (Delisting)
52	Informasi Tentang Aksi Korporasi Information on Corporate Actions
53	Informasi Efek Lainnya Information on Other Securities
57	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
73	Laporan Direksi Board of Directors Report
86	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 Statement Letter of Board of Directors and Board of Commissioners for the Accountability of 2025 Annual Report
90	Informasi Umum Perusahaan General Information
92	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
95	Informasi Perubahan Nama Emiten Pada Tahun Buku Information on Changes in the Issuer's Name in the Fiscal Year
96	Jejak Langkah Milestones
98	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
102	Makna Logo Perusahaan Meaning of the Company Logo
103	Kegiatan dan Bidang Usaha Business Activities and Lines of Business
106	Wilayah Operasional Operational Areas
107	Daftar Keanggotaan Organisasi atau Asosiasi List of Memberships in Organizations or Associations
108	Struktur Organisasi Perusahaan Organizational Structure of The Company
110	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
118	Profil Direksi Board of Directors Profile
126	Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir Changes in The Composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners That Occurred After the End of the Fiscal Year
128	Profil Pejabat Eksekutif Executive Officers Profile
136	Peristiwa Penting Significant Events
143	Sumber Daya Manusia Human Capital
164	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition
170	Struktur Group Perusahaan Company Group Structure
171	Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates, And Joint Ventures
178	Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology Of Shares Issuance And/Or Listing
179	Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities
180	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professionals
182	Informasi pada Website Perusahaan Information on The Company Website
188	Teknologi Informasi Information Technology

03



Profil Perusahaan
Company Profile

199	*Building Information Modeling* (BIM) Building Information Modeling (BIM)
211	Manajemen Pengetahuan dan Inovasi Knowledge Management and Innovation
220	Tinjauan Perekonomian Economic Overview
227	Tinjauan Industri Konstruksi Construction Industry Overview
232	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview By Business Segment
244	Tinjauan Keuangan Financial Overview
253	Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income
259	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Debt Repayment Capability and Receivables Collectibility Level
262	Portofolio Kontrak Baru Perusahaan The Company's New Contract Portfolio
268	Struktur Modal Capital Structure
269	Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure Management Policy
269	Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Basis For Selecting Capital Structure Management Policy
270	Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure
270	Realisasi Investasi Barang Modal Capital Expenditure Realization
271	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After The Date of The Auditor's Report

04



Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Supporting Review

272	Kebijakan Dividen dan Pembagiannya Dividend Policy and Distribution
274	Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Information on Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)
274	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Use of Proceeds From The Public Offering
278	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/Or Debt/Capital Restructuring
278	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated/Related Parties
285	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations That Have Significant Impact on The Company
285	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan Changes in Accounting Policies and Their Impact on The Company
285	Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan The Impact of Price Changes that Affect the Company›s Revenue and Financial Performance
286	Informasi Tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing Information on the Impact of Foreign Exchange Rates
286	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa Financial Information Containing Extraordinary Events

05



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

286	Kontribusi Pajak Terhadap Negara Tax Contribution to the State
287	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
291	Perbandingan antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next 1 (One) Year
295	Prospek Usaha Business Prospects
300	Informasi Keberlangsungan Usaha Information on Business Continuity
302	Laporan Pemeringkat Perusahaan oleh Lembaga Rating Company Rating Report by the Rating Agency
303	*Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan Company Key Performance Indicator (KPI)
304	Rencana Jangka Panjang Perusahaan Company Long Term Plan
305	Rumah Transformasi WEGE WEGE House of Transformation
310	Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Statement On The Implementation Of Corporate Governance
314	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan Implementation Of Sustainable Corporate Governance
322	Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance* Corporate Governance Structure And Mechanisms
325	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (GMS)
356	Dewan Komisaris Board Of Commissioners
372	Komisaris Independen Independent Commissioner

06



Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

374	Direksi Board of Directors
388	Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi Transparency Of Information Related To Board Of Commissioners And The Board of Directors
407	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of Board of Commissioners
450	Organ Pendukung Direksi Supporting Organs of Board of Directors
467	Komite Lain di bawah Direksi Other Committees Under Board of Directors
468	Auditor Eksternal External Auditor
474	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
481	Manajemen Risiko Risk Management
501	Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Legal Cases with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors, and Members of Board of Commissioners
503	Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait Disclosures of Administrative Sanctions by Relevant Authorities
503	Informasi Tentang Sanksi Perkara Pajak Information About Tax Case Sanctions
503	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access To Company Information and Data
507	Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance
508	Kode Etik Code of Conduct
518	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees

07



Komitmen Keberlanjutan
Sustainability Commitment

519	Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Share Ownership Policy of Board of Commissioners and Board of Directors
520	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (ABMS)
535	Kebijakan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* Whistleblowing System Policy
539	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
541	Pengendalian Gratifikasi Gratification Control
545	Hubungan dengan Kreditur Relations With Creditors
546	Tata Kelola Pengadaan dan Kemitraan Procurement and Partnership Governance
549	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions
550	Keterlibatan dalam Aktivitas Politik Involvement in Political Activities
550	Pencegahan Transaksi Orang dalam (Insider Trading) Prevention of Insider Trading
552	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Management of State Officials' Wealth Report (LHKPN)
554	Transparansi Praktik *Bad Governance* Transparency of Bad Governance Practices
555	Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Implementation of Aspects and Principles of Corporate Governance In Accordance with Financial Services Authority Regulations

08



Laporan Keuangan
Financial Report

559	Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 Implementation of the 8 (Eight) Principles of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021
586	Komitmen Dan Kebijakan Pelaksanaan Program Keberlanjutan Di Lingkup Perusahaan Commitment And Policy For Implementing Sustainability Programs Within The Company
588	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2025 Sustainability Performance Highlights For 2025
592	Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Support Towards The Sustainable Development Goals
593	*Benchmarking* Dan ESG *Assessment* (S&P Global CSA *Readiness*) Benchmarking And ESG Assessment (S&P Global CSA Readiness)
602	Laporan Keuangan Financial Report
728	Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Cross-Reference No. 16/ SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies
748	Penerapan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
811	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) General Guidelines for Indonesian Corporate Governance
828	Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA) Annual Report Award (ARA) Criteria Reference



Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada

Keunggulan Kompetitif WEGE
Wege Competitive Advantages

01



Total Solution Contractor

Menyediakan layanan konstruksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir (*design and build*), melalui strategi *backward-forward integration* serta mengintegrasikan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.
Providing integrated construction services from upstream to downstream (design and build), through a backward-forward integration strategy and integrating innovative and sustainable technologies.

02



Pioneer

WEGE sebagai pionir *Modular construction* di Indonesia. WEGE telah mengembangkan dan menerapkan teknologi *modular construction* di berbagai jenis proyek, dengan keunggulan pada efisiensi waktu, kualitas, serta keberlanjutan bangunan yang ramah lingkungan.
WEGE as a pioneer of Modular construction in Indonesia. WEGE has developed and implemented modular construction technology in various types of projects, with advantages in time efficiency, quality, and sustainability of environmentally friendly buildings.

03



Track Record in Building Construction

WEGE memiliki rekam jejak yang terbukti dan terpercaya dalam konstruksi bangunan gedung dengan berbagai tipe, ukuran, segmen, dan tingkat kompleksitas. Sejak awal pendirian pada tahun 2008 hingga tahun 2025, WEGE berhasil memperoleh kontrak baru sebanyak 419 proyek dengan total nilai proyek mencapai Rp57,6 triliun. Dari capaian perolehan proyek baru, sebesar 92,6% berasal dari eksternal, sementara 7,4% berasal dari internal melalui entitas induk. Dengan berbagai pemberi kerja (*owner*), 43,6% proyek berasal dari swasta, 27,2% dari pemerintah, dan 29,2% dari BUMN. Sementara itu, berdasarkan tipe proyek yang dikerjakan, 39,1% merupakan proyek *residential*, 12,5% *commercial*, 19.1% *office*, dan 29,4% *public facilities*.
WEGE has a proven and trusted track record in building construction of various types, sizes, segments, and levels of complexity. Since its inception in 2008 until 2025, WEGE has successfully obtained 419 new contracts for projects with a total project value reaching Rp57.6 trillion. Of the new project acquisition achievements, 92.6% came from external sources, while 7.4% came from internal sources through the parent entity. With a variety of owners, 43.6% of projects came from the private sector, 27.2% from the government, and 29.2% from state-owned enterprises. Meanwhile, based on the type of projects undertaken, 39.1% were residential projects, 12.5% were commercial, 19.1% were office, and 29.4% were public facilities.

04



Leadership

Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi tantangan serta kemampuan strategis dalam mengelola *human capital* guna mewujudkan visi bisnis ke depan.
Having strong leadership in facing challenges and strategic capabilities in managing human capital to realize the future business vision.

04

Sustainable Future

Sebagai pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan, WEGE mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi dan operasional bisnis, menjadikannya salah satu keunggulan kompetitif utama. Pada aspek lingkungan, WEGE berfokus pada pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan material ramah lingkungan. Dalam aspek sosial, WEGE mendukung kesejahteraan karyawan, masyarakat lokal, keberagaman *(diversity)*, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui infrastruktur strategis. Di bidang tata kelola, WEGE menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menjunjung tinggi transparansi, praktik antikorupsi, serta penciptaan nilai ekonomi yang memberikan dampak positif bagi sosial dan lingkungan.
As a leader in sustainable development, WEGE integrates Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business strategy and operations, making it one of its main competitive advantages. In the environmental aspect, WEGE focuses on carbon emission reduction, energy efficiency, and environmentally friendly materials. In the social aspect, WEGE supports the welfare of employees, local communities, diversity, and supports the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) through strategic infrastructure. In the area of governance, WEGE implements Good Corporate Governance (GCG) by upholding transparency, anti-corruption practices, and the creation of economic value that has a positive impact on society and the environment.

05

Building Information Modeling (BIM)

WEGE sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh ISO 19650-1:2018 dan ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark™ dari PT BSI (British Standards Institute) Group Indonesia dalam penerapan *Building Information Modeling* (BIM). WEGE telah menerapkan teknologi BIM di berbagai proyek, yang mampu memberikan gambaran menyeluruh secara tiga dimensi tentang proyek yang akan dikerjakan. Dengan pemanfaatan BIM, WEGE dapat menyusun perencanaan secara lebih akurat serta meminimalisir risiko pada setiap tahapan pengerjaan proyek.
WEGE as the first company in Indonesia to obtain ISO 19650-1:2018 and ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark™ from PT BSI (British Standards Institute) Group Indonesia in the application of Building Information Modelling (BIM). WEGE has implemented BIM technology in various projects, which is able to provide a comprehensive 3-dimensional picture of the project to be worked on. By utilizing BIM, WEGE can plan more accurately and minimize risks at every stage of the project

06

Government of Indonesia as the Ultimate Shareholder

- WEGE secara tidak langsung memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, selaku entitas induk Perseroan.
- Akses terhadap sumber pendanaan dari Bank BUMN, perjanjian kerja sama dalam rangka kegiatan usaha Perseroan dengan BUMN lain, entitas anak, serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang.
- WEGE relationship through capital participation by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as the majority shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, as the parent entity of the Company.
- Access to funding sources from state-owned banks, cooperation agreements in the context of the Company's business activities with other state-owned enterprises, subsidiaries, and authorized government agencies and institutions.

Dalam menjalankan praktik keberlanjutan, WIKA Gedung menjadikan visi dan misi Perusahaan sebagai fondasi yang menegaskan kontribusinya dalam menciptakan ruang hidup yang lebih berkualitas. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi yang diterapkan secara nyata dalam operasi sehari-hari, sekaligus menjadi arahan strategis perusahaan dalam membangun nilai keberlanjutan yang berkelanjutan.

In implementing sustainability practices, WIKA Gedung utilizes the company's vision and mission as a foundation, affirming its contribution to creating higher-quality living spaces. This vision is translated into a mission that is concretely applied in daily operations and serves as the company's strategic direction in building sustainable value.

Melalui strategi yang dijalankan secara konsisten, WIKA Gedung berupaya memperkuat keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui dua prinsip utama:

Through consistently implemented strategies, WIKA Gedung strives to strengthen its competitive advantage, realized through two key principles:

Bernilai
Valuable

Perusahaan mampu mengubah setiap risiko atau potensi ancaman menjadi peluang usaha yang menghasilkan manfaat bagi keberlangsungan bisnis.
The Company is able to turn every risk or potential threat into a business opportunity that benefits business continuity.

Memiliki Sumber Daya yang Kompetitif
Competitive Resources

Perusahaan memiliki kapasitas untuk terus beradaptasi dalam dinamika lingkungan bisnis yang ditandai kondisi VUCA – *Volatile* (bergejolak), *Uncertain* (tidak pasti), *Complex* (kompleks), dan *Ambiguous* (ambigu).
The Company has the capacity to continuously adapt to the dynamics of the business environment, which is characterized by VUCA conditions – Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous.

(sumber: Laporan *Sustainability Report* WG Tahun buku 2025)
Source: WG Sustainability Report for Fiscal Year 2025

Komitmen dan Implementasi ESG
Commitment and Implementation of ESG

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) mengeluarkan kebijakan keberlanjutan pada tanggal 5 April 2024 sebagai bentuk komitmennya dalam menerapkan keberlanjutan di seluruh lini bisnis dan aktivitas operasionalnya. Dalam rangka menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, WEGE mengintegrasikan strateginya terhadap prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), melalui:

1. Menyediakan/menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, menjadi mitra terpercaya bagi para pemangku kepentingan, serta menjalankan sistem manajemen lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya;
2. Memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatannya serta bertanggung jawab terhadap *Construction Lifestyle*;
3. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis serta patuh terhadap hukum yang berlaku;

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) issued a sustainability policy on April 5, 2024, as a commitment to implementing sustainability across all business lines and operational activities. In order to create long-term value for stakeholders, WEGE integrates its strategy with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, by:

1. Providing/producing quality products and services, being a trusted partner for stakeholders, and implementing environmental management systems in every operational activity;
2. Considering economic, social, and environmental impacts in its activities and being responsible for Construction Lifestyle;
3. Conducting business activities based on good corporate governance principles, business ethics, and compliance with prevailing laws;

4. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan nilai yang berkelanjutan serta senantiasa mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;
5. Menjalankan aspek keberlanjutan secara strategis di lingkungan bisnis.

Selaras dengan perubahan visi dan misi WEGE khususnya dalam tujuan keberlanjutan, WEGE memastikan bahwa penerapan keberlanjutan sepanjang tahun 2025 mencakup:

1. Lingkungan *(Environment)*
   a. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian target *Net Zero Emissions* agar berjalan sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) yang telah ditetapkan;
   b. Proaktif dalam mengelola strategi serta risiko transisi energi terbarukan dan solusi rendah karbon;
   c. Menerapkan kebijakan terkait efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati; dan
   d. Memprioritaskan keberlanjutan dalam strategi pengembangan produk ramah lingkungan yang memiliki daya saing tinggi.

2. Sosial *(Social)*
   a. Berfokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya karyawan, melalui peningkatan kompetensi dan pelatihan secara intensif serta penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman; dan
   b. Berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui penyediaan akses serta layanan yang optimal bagi seluruh pelanggan.

3. Tata Kelola *(Governance)*
   a. Membangun budaya keberlanjutan di seluruh aktivitas perusahaan;
   b. Mengembangkan strategi keberlanjutan melalui kebijakan dan arahan pembangunan berkelanjutan;
   c. Mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis perusahaan; dan
   d. Menjaga keberlangsungan bisnis dengan meningkatkan sistem tata kelola perusahaan, kualitas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjaga etika bisnis sesuai dengan regulasi yang berlaku

Keberlanjutan merupakan bagian dari strategi perjalanan transformasi perusahaan dan menjadi kunci transformasi strategi penguatan tata kelola yang berlangsung di Perseroan. Dalam menjalankan praktik keberlanjutan, WEGE secara konsisten mengevaluasi seluruh penerapan strategi keberlanjutan, kemudian diselaraskan dengan target yang tercantum dalam peta jalan transformasi perusahaan.

4. Innovating to increase growth and sustainable value creation, and promoting sustainable social and economic development;
5. Implementing sustainability aspects strategically in the business environment.

In conformity with the changes in WEGE's vision and mission, particularly regarding sustainability goals, WEGE ensures that sustainability implementation throughout 2025 includes:

1. Environment
   a. Monitoring the achievement of Net Zero Emissions target according to the established roadmap;
   b. Proactively managing strategies and risks for the transition to renewable energy and low-carbon solutions;
   c. Implementing policies related to energy efficiency, emissions reduction, waste management, and biodiversity conservation; and
   d. Prioritizing sustainability in the development strategy for environmentally friendly products with high competitiveness.

2. Social
   a. Focusing on developing human resources, particularly employees, through intensive competency development and trainings, as well as providing a safe and comfortable work environment; and
   b. Focusing on increasing customer satisfaction by providing optimal access and services for all customers.

3. Governance
   a. Building a culture of sustainability across all company activities;
   b. Developing a sustainability strategy through sustainable development policies and guidelines;
   c. Integrating ESG principles into all operational and strategic aspects of the company; and
   d. Maintaining business continuity by improving corporate governance systems, the quality of human rights compliance, and maintaining business ethics in accordance with applicable regulations.

Sustainability is an integral part of the Company's transformation journey strategy and serves as a key element in strengthening governance practices within the Company. In implementing sustainability practices, WEGE consistently evaluates the entire application of its sustainability strategies, aligning them with the targets outlined in the Company's transformation roadmap.

Penerapan Keberlanjutan WEGE Sepanjang Tahun 2025

WEGE Sustainability Implementation Throughout 2025

EKONOMI
ECONOMY

Komitmen
Commitment

WEGE berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 untuk Cakupan 1, 2, dan 3 melalui Kebijakan Keberlanjutan tanggal 5 April 2024.
WEGE is committed to achieving NZE by 2060 for Scope 1, 2 and 3 through its Sustainability Policy dated April 5, 2024.

Eko-Efisiensi Program
ECO-EFFICIENCY PROGRAM

7 **Unit Mobil Listrik**
Electric Car Unit

1 **Unit Motor Listrik**
Electric Motorcycle Unit

16% **Proyek Green Building**
Green Building Project

- Penerapan Sistem Modular dalam proyek WEGE melalui metode *Prefabricated Prefinished Volumetric Construction* (PPVC) yang ramah lingkungan dan mengusung prinsip *lean construction*
- Penggunaan lampu LED & Lampu Sensor
- Implementation of a Modular System in WEGE project using the environmentally friendly Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) method and lean construction principles
- Use of LED and Sensor Lights

Pengelolaan Emisi Karbon
Carbon Emissions Management

Scope 1	Scope 2	Scope 3
19.858,44 tCO2e	**4.301,64** tCO2e	**363,85** tCO2e
Stationary Combustion, Mobil Fuel and Refrigerant	Purchased Electricity	Material Transport and Business Travel

Penggunaan Energi
Energy Usage

405.367,56
Gigajoule (GJ)

Intensitas Energi per Pendapatan
Energy Intensity per Income

0,186
(GJ/Juta Rupiah)/(GJ/Million Rupiah)

Pelestarian Lingkungan & Konservasi
Environmental Preservation & Conservation

4.310 **Bibit Pohon** **4,310** Tree Seedlings

Penanaman Pohon Langka Dalam Program Penanaman Pohon Langka Endemik Nusantara, Sinergi Dengan Grup Wika Meliputi Sonokeling, Kemuning Hutan, Terap Hijau, Belimbing Papua, Randu Alas.
Planting of Rare Trees in the Endemic Rare Tree Planting Program in Indonesia, in Synergy with Wika Group, Includes Sonokeling, Kemuning Hutan, Terap Hijau, Belimbing Papua, and Randu Alas.

Program Zero Waste
Zero Waste Program

Inisiatif untuk mengurangi timbulan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan kembali, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar limbah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.
WEGE menerapkan Program *Zero Waste* melalui:

- *Bar Bending Schedule* untuk optimalisasi skema potongan besi
- *Monitoring waste concrete*
- Penggunaan BIM dalam pengendalian dokumen di lapangan
- *Monitoring* penggunaan kertas, air, listrik dan BBM
- Penggunaan kertas bekas untuk administrasi internal
- Digitalisasi surat dan administrasi

An initiative to reduce waste generation through sorting, recycling, and collaboration with various parties to prevent waste from ending up in landfills.
WEGE implements the Zero Waste Program through:

- Bar Bending Schedule to optimize the steel cutting scheme
- Monitoring waste concrete
- Use of BIM for field document control
- Monitoring paper, water, electricity, and fuel usage
- Use of waste paper for internal administration
- Digitizing letters and administration

Rata-Rata Jam Pelatihan Per Karyawan
Average Training Hours Per Employee

26,45
Jam/Hours

Program Kampung Iklim (Proklim) Kebun Jasmine, Bandung Mencapai Tingkatan Proklim Madya
The Kampung Iklim (Proklim) in Jasmine Garden, Bandung Reaches the Proklim Madya Level

Konservasi Fauna Beruang Madu, Balikpapan
Honey Bear Conservation, Balikpapan

Revitalisasi taman bermain Pusat Konservasi Beruang Madu di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai dukungan terhadap pusat pendidikan dan konservasi Beruang Madu di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) seluas 1,3 hektar dengan total 7 beruang madu.
The revitalization of the Sun Bear Conservation Center's playground within the Balikpapan Environmental Education Tourism Area (KWPLH) in East Kalimantan, in support of the Sun Bear education and conservation center in the 1.3-hectare Ibu Kota Nusantara (IKN) area, which is home to a total of seven sun bears.

Strategi Risiko Iklim
Climate Risk Strategy

Risiko Fisik
Potensi kerugian secara fisik yang disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim:
1. Kenaikan Permukaan Laut
2. Stress Panas pada Pekerja
3. Aksesibilitas Situs
4. Ketersediaan Sumber Daya Air

Physical Risks
Potential physical losses caused by the impacts of climate change:
1. Sea Level Rise
2. Heat Stress in Workers
3. Site Accessibility
4. Water Resource Availability

Risiko Transisi
Mengacu pada risiko yang terkait dengan transisi ekonomi rendah karbon:
1. Tekanan Investor
2. Preferensi Konsumen
3. Ketidakpastian Regulasi
4. Teknologi Baru

Transition Risks
Refer to risks associated with the low-carbon economic transition:
1. Investor Pressure
2. Consumer Preferences
3. Regulatory Uncertainty
4. Emerging Technologies

Total Konsumsi Air
Total Water Consumption

43.605.306 m³
43,605,306 m³

Biaya Lingkungan Hidup
Environmental Costs

Rp96.557.394

Mencakup biaya untuk penanaman pohon dan upaya konservasi.

Rp96,557,394
Includes costs for tree planting and conservation efforts.

WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 50001:2018 sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan
WEGE became the first construction company in Indonesia to achieve ISO 50001:2018 certification as a form of commitment to efficient and sustainable energy management.

SOSIAL
SOCIAL

Inklusi Keuangan
Financial Inclusion

- Modular
- SAP
- ERP WEGE
- *Building Information Modeling*
- Modular
- SAP
- ERP WEGE
- Building Information Modeling

Hak Asasi Manusia
Human Rights

- Penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP)
- Tidak terdapat kejadian pelanggaran HAM di WIKA Gedung
- Implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP)
- No human rights violations occurred at WIKA Gedung

Pengembangan Dan Evaluasi Karyawan
Employee Development and Evaluation

- Rp586.680.372 juta Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan
- 100% Karyawan mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja dalam rangka mendukung pengembangan karier
- Rp586,680,372 million Employee Competency Development Costs
- 100% Employees receive performance assessments and evaluations to support career development

Realisasi Dana CSR
CSR Fund Realization

Rp1.218.133.280
Rp1,218,133,280

meningkat
an increase
21.41% (YoY)

Building Future **Rp208.397.120**
Building Hope **Rp547.227.280**
Building Nature **Rp96.557.394**
Building Prosperity **Rp53.439.333**
Building Wellness **Rp29.012.715**
Report **Rp283.500.000**

Keberagaman Karyawan
Employee Diversity

11,96%
Jumlah Karyawan Perempuan terhadap total karyawan
11.96% of Female Employees to Total Employees

Sertifikasi Pekerja
Employee Certification

43% karyawan tersertifikasi terhadap total karyawan
43% of employees are certified compared to total number of employees.

Kesetaraan Gender
Gender Equality

88,04%
Karyawan Laki-Laki
Male Employees

11,96%
Karyawan Perempuan
Female Employees

0 **Kasus non-diskriminasi**
Cases of Non-Discrimination

Pengukuran dan Penilaian Dampak Program CSR
CSR Program Impact Measurement and Assessment

- Paud Modular/Preschool Modular: **3.42**
- Teras Braga: **4,56**
- Jasmine Integrated Farming: **6,62**

Angka tersebut dapat diartikan bahwa nilai investasi yang diberikan oleh WEGE setiap Rp1 menghasilkan nilai manfaat yang signifikan melalui Program CSR. Artinya program CSR Perseroan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.
These figures indicate that every Rp1 invested by WEGE generates significant benefits through the CSR Program. This means that the Company's CSR program has a positive impact on beneficiaries.

Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index

93,30%

Melebih target yang ditetapkan yaitu 87,5%
93.30% Exceeding the target of 87.5%

UMKM Binaan
Fostered MSMES

Jumlah UMKM Binaan: 60
Mendukung UMKM, baik dari karyawan internal maupun masyarakat eksternal, untuk meningkatkan perekonomian melalui pelatihan, sertifikasi, kesempatan mengikuti bazaar, dan berbagai kegiatan lainnya.

Number of Fostered MSMEs: 60
Supporting MSMEs, both internal employees and external community, to improve the economy through training, certification, opportunities to participate in bazaars, and various other activities.

Rata-Rata Jam Pelatihan per Karyawan
Average Training Hours per Employee

26,45 Jam
26.45 Hours

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Occupational Safety And Health (OHS)

Perseroan tidak melaksanakan pelatihan khusus terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara terpisah. Hal ini dikarenakan materi K3 telah terintegrasi dalam berbagai program pelatihan dan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tidak terdapat pencatatan khusus terkait jumlah jam pelatihan K3 secara terpisah.

The Company did not conduct separate Occupational Health and Safety (OHS) training programs. This is because OHS materials have been integrated into various training programs and the Company's operational activities; therefore, there is no separate record of the number of OHS training hours.

Kontribusi Kepada Masyarakat
Contribution to the Community

Peluncuran *Grand Design* CSR sebagai acuan strategis dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan
Launch of the CSR Grand Design as a strategic reference in managing corporate social responsibility programs.

Tingkat Turnover
Turnover Rate

7,08%

Pemberdayaan Disabilitas

0 Penerima Manfaat
- Total Penyandang Disabilitas
- Total Pelatihan atau Pendampingan
- Nilai Ekonomi yang Dihasilkan

Meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan advokasi dengan memanfaatkan daur ulang barang bekas menjadi produk bernilai ekonomi.

Empowerment of Persons With Disabilities

0 Beneficiaries
- Total Persons with Disabilities
- Total Training or Mentoring
- Economic Value Generated

Improving the skills and quality of life of persons with disabilities through training, mentoring, and advocacy programs by utilizing recycled waste materials to create products with economic value.

TATA KELOLA GOVERNANCE

SNI ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001:2013 Information Security Management System	SNI ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001:2018 Energy Management System	SNI ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018 Risk Management System	SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Kualitas SNI ISO 9001:2015 Quality Management System
SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System	SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System	Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Occupational Health and Safety Management System Award Certificate	SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

RATING

31,1

Sustainalytics Kategori High Risk*

*Sustainalytics High Risk Category Perseroan tercatat sebesar 31,1 dengan kategori *High Risk* berdasarkan penilaian tahun 2023. Penilaian berikutnya dijadwalkan pada Juli 2026, dengan hasil pemeringkatan terbaru diperkirakan akan diumumkan pada akhir tahun 2026.
*The Company's Sustainalytics score was recorded at 31.1, in the High Risk category, based on the 2023 assessment. The next assessment is scheduled for July 2026, with the latest rating results expected to be announced by the end of the year. 2026.

PENILAIAN IMPLEMENTASI GCG
GCG ASSESSMENT

skor/score

95,61 Level 4

ASEAN *Corporate Governance Scorecard Assessment* ACGS oleh IICD (Indonesia Institut for Corporate Directorship) Mencerminkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara menyeluruh dan sesuai dengan standar internasional.
ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment ACGS by IICD (Indonesia Institute for Corporate Directorship). Reflects the comprehensive implementation of Good Corporate Governance principles in accordance with international standards.

Keberagaman
Diversity

- 2 dari 4 anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen
- 1 orang anggota Dewan Komisaris merupakan Perempuan
- 2 of the 4 members of Board of Commissioners are Independent Commissioners
- 1 member of Board of Commissioners is a woman

Whistleblowing System

7

Pelaporan Pelanggaran
Violation Reports

Terbentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi
Establishment of an Integrated Governance Committee

Membentuk unit khusus penanggung jawab Keberlanjutan
Establishment of a special unit responsible for Sustainability

Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Kepatuhan Terhadap Hukum
Compliance With The Law

- Tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyebabkan sanksi/denda [GRI 2-27]
- Tidak terdapat kasus korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan
- No cases of non-compliance with regulations resulting in sanctions/fines [GRI 2-27]
- No cases of corruption within the company

Penerbitan Kebijakan Keberlanjutan
Issuance of Sustainability Policy

WIKA Gedung terus memperkuat penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan yang tidak hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga memastikan terciptanya nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Nilai tersebut diwujudkan melalui integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam setiap proses operasional dan strategi bisnis.

Komitmen ini semakin dipertegas dengan penerbitan Kebijakan Keberlanjutan WIKA Gedung pada tahun 2024 yang telah disahkan oleh Direktur Utama. Dokumen kebijakan tersebut menjadi pedoman utama yang mengarahkan seluruh langkah strategis keberlanjutan di seluruh lini perusahaan.

Kebijakan keberlanjutan mencakup komitmen untuk:
1. Menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, membangun kemitraan yang dapat dipercaya, dan melaksanakan sistem manajemen lingkungan di seluruh kegiatan operasional
2. Mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam seluruh kegiatan usaha serta menjalankan tanggung jawab pada *Construction Lifecycle*
3. Menjalankan bisnis berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum
4. Mengembangkan inovasi guna mendorong pertumbuhan dan menciptakan nilai keberlanjutan, sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan
5. Mengimplementasikan aspek keberlanjutan secara stratetis dalam setiap aktivitas bisnis

WIKA Gedung continues to strengthen the implementation of sustainable construction principles that not only pursue business performance but also ensure the creation of long-term value for all stakeholders. This value is realized through the integration of environmental, social, and governance (ESG) principles into every operational process and business strategy.

This commitment is further strengthened by the issuance of WIKA Gedung Sustainability Policy in 2024, which was ratified by the President Director. This policy document serves as the primary guideline guiding all strategic sustainability initiatives across the company.

The sustainability policy includes commitments to:
1. Providing high-quality products and services, building trustworthy partnerships, and implementing an environmental management system across all operational activities.
2. Considering the economic, social, and environmental impacts of all business activities and fulfilling responsibilities throughout the Construction Lifecycle.
3. Conducting business based on the principles of good corporate governance, business ethics, and compliance with legal requirements.
4. Developing innovation to drive growth and create sustainable value, while supporting sustainable social and economic development.
5. Strategically implementing sustainability aspects in all business activities.

(source: WEGE Sustainability Report 2025, pages 22-23)

PENGHARGAAN
AWARDS



KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

WIKA Gedung menyelenggarakan Stakeholder Engagement Forum 2025 sebagai ruang dialog yang mempertemukan beragam pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan.

WIKA Gedung held the 2025 Stakeholder Engagement Forum as a dialogue space that brought together various stakeholders, both internal and external to the Company.

SNI ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
SNI ISO 27001:2013 Information Security Management System

SNI ISO 50001:2018 Sistem Manajemen Energi
SNI ISO 50001:2018 Energy Management System

SNI ISO 31000:2018 Sistem Manajemen Risiko
SNI ISO 31000:2018 Risk Management System

SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Kualitas
SNI ISO 9001:2015 Quality Management System

SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System

Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen
Occupational Health and Safety Management System Award Certificate

SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Dukungan Keberlanjutan Melalui Produk Modular WEGE

Sustainability Support through Wege Modular Products



Villa Modular

Konstruksi modular merupakan salah satu inovasi dalam industri konstruksi yang memberikan kontribusi nyata terhadap upaya keberlanjutan. Metode ini dikenal lebih ramah lingkungan karena mampu mengurangi limbah konstruksi, menghemat konsumsi energi, serta meminimalkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, baik pada tahap produksi di *workshop*/pabrik *(off-site)* maupun saat proses pemasangan di lokasi proyek *(on-site).*

Sebagai pionir dalam pengembangan konstruksi modular di Indonesia, WEGE telah memulai pengembangan dan memperkenalkan produk konstruksi modular sejak tahun 2018 melalui pembentukan Divisi Modular. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi transformasi bisnis Perseroan yang berorientasi pada inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan.

Lebih dari sekadar inovasi teknis, pengembangan modular WEGE juga menjadi tonggak awal dalam integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam proses bisnis inti Perseroan. Melalui pendekatan *Backward Offsite Construction*, produk modular WEGE menawarkan solusi konstruksi yang lebih presisi, cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Dengan sistem konstruksi yang lebih terencana, terkontrol, dan terintegrasi, modular WEGE tidak hanya mendorong efisiensi dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi jejak karbon di seluruh siklus konstruksi. Hal ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Modular construction is one of the innovations in the construction industry that makes a real contribution to sustainability endeavors. This method is known to be more environmentally friendly because it can reduce construction waste, save energy consumption, and minimize disruption to the surrounding environment, both during the production stage in the workshop/factory (off-site) and during the installation process at the project location (on-site).

As a pioneer in the development of modular construction in Indonesia, WEGE has started developing and introducing modular construction products since 2018 through the establishment of the Modular Division. This initiative is part of the Company's business transformation strategy that is oriented towards innovation, efficiency, and sustainability.

More than just a technical innovation, the development of WEGE modular is also an initial milestone in the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into the Company's core business processes. Through the Backward Offsite Construction approach, WEGE modular products offer more precise, fast, efficient, and environmentally friendly construction solutions.

With a more planned, controlled, and integrated construction system, WEGE modular not only drives efficiency in terms of time and cost, but also contributes significantly to reducing the carbon footprint throughout the construction cycle. This is in conformity with the Company's commitment to supporting the achievement of the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060 as initiated by the Indonesian Government.

Modular WEGE

WEGE Modular



Offsite Construction

1. Kualitas lebih stabil
2. *Safety* meningkat
3. Proses pekerjaan lebih terukur & Minim gangguan

1. More stable quality
2. Safety increases
3. More measurable work processes with minimal disruption



Efisiensi Energi Energy Efficiency

1. Masa konstruksi cepat
2. Tidak banyak alat berat energi lebih rendah
3. Mengurangi emisi gas rumah kaca 17-30%

1. Fast construction period
2. Less heavy equipment, lower energy
3. Reduce greenhouse gas emissions by 17-30%



Ramah Lingkungan Environmentally Friendly

1. Minim limbah & sisa material
2. Minim polusi suara & udara
3. Dapat dipindah & digunakan kembali

1. Minimal waste & remaining materials
2. Minimal noise & air pollution
3. Can be moved & reused



Lokal Local

1. Karya anak bangsa (tim R&D) internal WEGE
2. Mengutamakan pemilihan material lokal
3. Difabrikasi di *workshop* WEGE sendiri

1. The work of children of the nation (WEGE's internal R&D team)
2. Prioritize the selection of local materials
3. Fabricated in WEGE's own workshop

Menurut studi oleh para akademisi dari University of Cambridge dan Edinburgh Napier University. Konstruksi Modular menghasilkan CO2 41-45% lebih rendah dibanding metode konvensional dalam membangun rumah.

According to a study by academics from the University of Cambridge and Edinburgh Napier University, Modular construction produces 41-45% less CO2 than conventional methods of building a house.

Mengapa kita harus mengubah cara kita membangun?

Karena saat ini dibutuhkan bangunan berkelanjutan (*Sustainable Building*) yang merupakan konsep desain dan konstruksi yang berfokus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya (*Lean Construction*).

Why should we change the way we build?

Today we need sustainable buildings (Sustainable Building) which is a design and construction concept that focuses on reducing negative impacts on the environment and increasing the efficiency of resource use (Lean Construction).

1. **Perubahan Iklim**
   Climate Change

   Suhu rata-rata permukaan bumi tahun 2023 meningkat 1,5°C yang berdampak pada kekeringan, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, bencana badai dan penurunan keanekaragaman hayati. (Sumber : news.un.org)
   The average surface temperature of the Earth rose by 1.5°C by 2023, resulting in droughts, water scarcity, fires, rising sea level, flooding, melting polar ice caps, catastrophic storms, and a decline in biodiversity. (Source: news.un.org)

2. **Tingginya Emisi Industri Konstruksi**
   High Emissions from the Construction Industry

   Bangunan beroperasi dan industri konstruksi menghasilkan 40% emisi CO2 global tahunan. (Sumber : architecture2030.org)
   Building operations and construction industry produce 40% of annual global CO2 emissions. (Source: architecture2030.org)

3. **Tingginya Sampah Industri Konstruksi**
   High Level of Construction Industry Waste

   Sampah industri konstruksi secara global mencapai 2 miliar metrik ton/tahun. Diperlukan aksi pengurangan limbah. (Sumber : Global waste generation statistics & facts, 2020)
   Globally, the construction industry generates 2 billion metric tons of waste annually. Waste reduction measures are needed. (Source: Global waste generation statistics & facts, 2020)

SISTEM MODULAR WEGE

Sistem konstruksi modular WEGE telah melalui serangkaian proses riset dan uji dari berbagai aspek serta merupakan karya anak bangsa yang patut dibanggakan. Proses Produksi sistem modular juga dilakukan dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah yang berlaku dan sudah melalui pengujian.

WEGE MODULAR SYSTEM

WEGE modular construction system has undergone a series of research and testing processes across various aspects and is a national masterpiece to be proud of. The modular system's production process also adheres to applicable standards and has undergone rigorous testing.



WEGE terus berinovasi dalam mengembangkan metode konstruksi yang adaptif dan berkelanjutan guna menjawab berbagai tantangan di industri konstruksi. Saat ini, Perseroan memiliki tiga tipe produk modular, yaitu:

WEGE continues to innovate by developing adaptive and sustainable construction methods to address various challenges in the construction industry. Currently, the Company offers three types of modular products:



MOLI (Modular Lite)

Sistem konstruksi modular ringan untuk maksimal 2 lantai, dengan perakitan tanpa alat berat. Dikirim berupa bagian terkecil atau batang rangka.

MOLI (Modular Lite)

Lightweight modular construction system for up to 2 floors, with assembly without heavy equipment. Delivered in the form of the smallest parts or trusses.



WG Flatpack

Sistem konstruksi modular cepat dan praktis untuk maksimal 4 lantai. Dikirim dalam bentuk panel atau modul lantai, modul atap, kolom dan panel dinding.

WG Flatpack

Fast and practical modular construction system for up to 4 floors. Delivered in the form of floor panels or modules, roof modules, columns and wall panels.



Volumetrik

Sistem konstruksi modular yang 90% dipabrikasi, untuk bangunan 5 lantai ke atas. Studi saat ini sudah mencapai 14 lantai. Dikirim dalam bentuk 3D satu ruangan lengkap dengan interior dan instalasi MEP terpasang.

Volumetrik

Modular construction system that is 90% prefabricated, for 5 floors buildings and above. Current studies have reached 14 floors. Delivered in 3D form of one room complete with interior and MEP installations installed.



MODULAR CIRCULAR

Modular Circular merupakan pendekatan dalam sistem konstruksi modular yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*), yaitu pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan melalui praktik daur ulang, penggunaan ulang (*reuse*), dan pengurangan limbah sejak tahap desain hingga akhir siklus hidup bangunan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung efisiensi material dan energi, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok serta menekan dampak lingkungan dari aktivitas konstruksi.

Sebagai bentuk implementasinya, Divisi Modular WEGE berkolaborasi dengan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya, baik dari segi *Research and Development* (R&D), pemasaran, substitusi material ramah lingkungan, maupun kegiatan publikasi dan *knowledge sharing* dalam rangka mengkampanyekan konstruksi yang ramah lingkungan (*eco-friendly construction*).

MODULAR CIRCULAR

Modular Circular is an approach in a modular construction system that emphasizes the principle of a circular economy, namely the efficient and sustainable use of resources through recycling, reuse, and waste reduction practices from the design stage to the end of the building's life cycle. This approach not only supports material and energy efficiency, but also strengthens the resilience of the supply chain and reduces the environmental impact of construction activities.

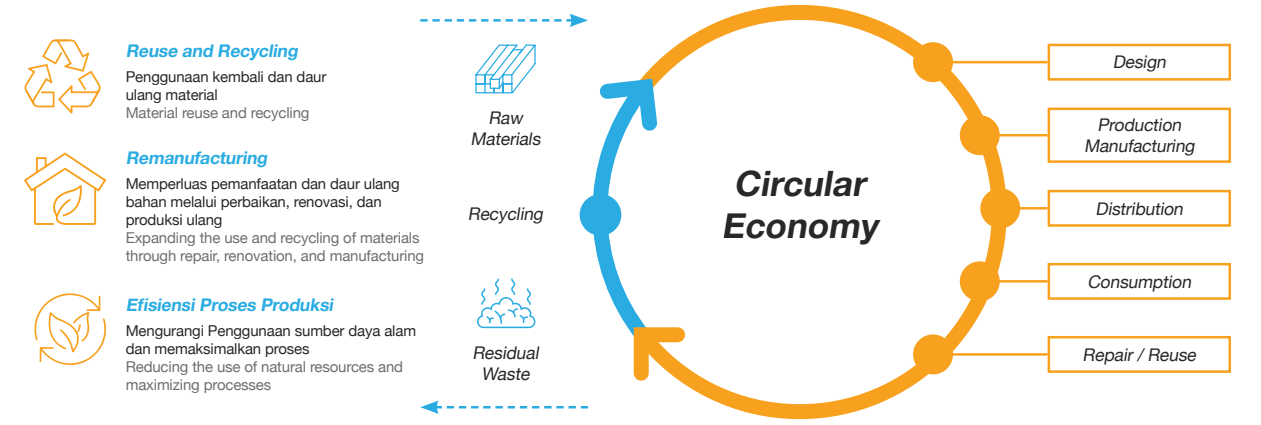
As the implementation, WEGE Modular Division collaborates with various competent parties in their fields, both in terms of Research and Development (R&D), marketing, environmentally friendly material substitution, as well as publication and knowledge sharing activities in order to campaign for environmentally friendly construction (eco-friendly construction).

Program Modular Circular

Konstruksi sirkular adalah strategi di mana penggunaan energi dan prinsip daur ulang menjadi dasar dalam pemilihan material dan metode dengan tujuan menekan penggunaan sumber daya dalam upaya mengurangi dampak terhadap iklim dan lingkungan (*Net Zero Emissions*).

Circular Modular Program

Circular construction is a strategy where the energy use and recycling principles are the basis for selecting materials and methods with the aim of reducing resource use in an undertaking to reduce impacts on climate and environment (Net Zero Emissions).



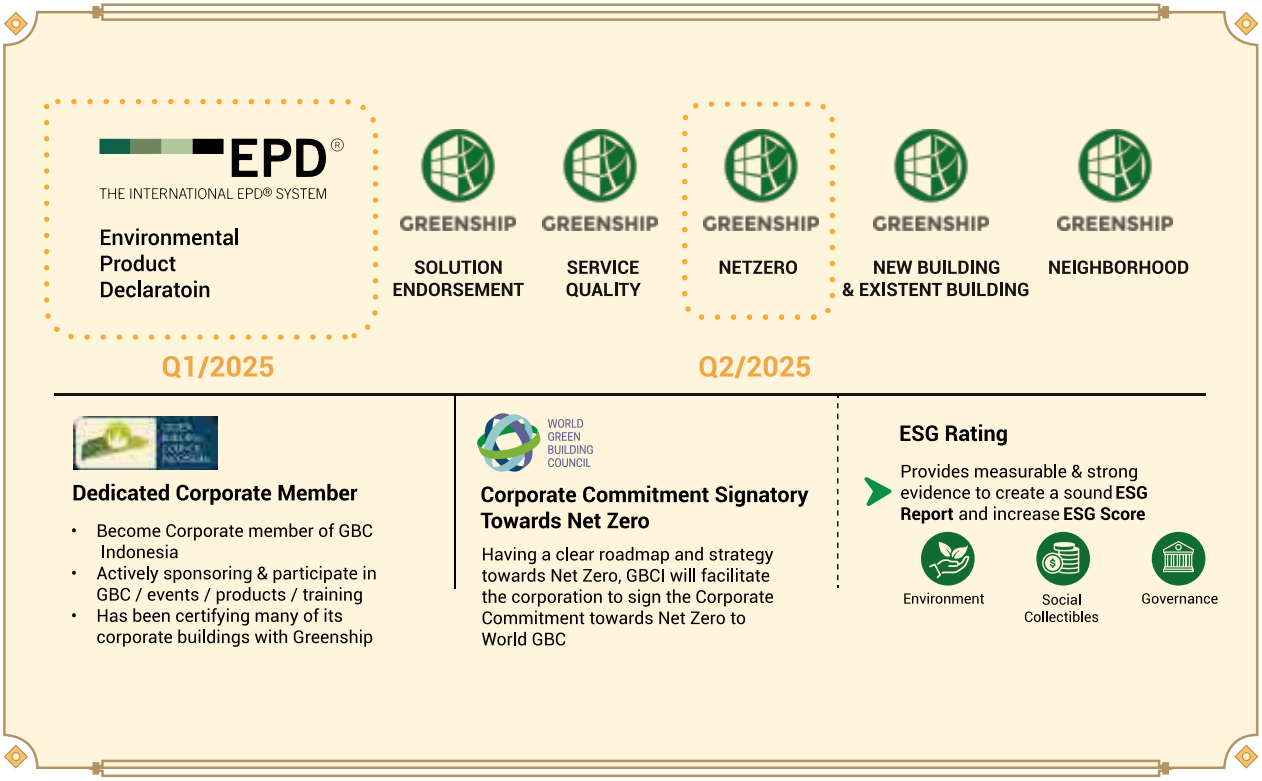
Modular Circular

Road to Net Zero Emissions



PROGRAM SERTIFIKASI NZE (WEGE x DEX)

NZE CERTIFICATION PROGRAM (WEGE x DEX)



NZE menjadi prioritas WEGE dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Untuk itu, WEGE berkomitmen dalam mengurangi jejak karbon untuk mencapai target NZE. Salah satu langkah penting yang dilakukan Perseroan dalam mencapai target tersebut adalah melalui program sertifikasi NZE.

NZE is a priority for WEGE in its efforts to address climate change. Therefore, WEGE is committed to reducing its carbon footprint to achieve its NZE targets. One of the Company's key steps in achieving this target is through the NZE certification program.

INDONESIA: *HOW OPTIMISED DESIGN IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY CAN REDUCE EMISSIONS*

INDONESIA: HOW OPTIMIZED DESIGN IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY CAN REDUCE EMISSIONS

Indonesia: How Optimised Design in the construction industry can reduce emmissions

The production and processing of metals, minerals, and other materials is a major contribu tor to climate change, in fact, according to the international Resou rce Panel (IRP), it accounts for almost one qua rter of the worldís greenhouse gas emissions. Going b eyond energy efficienct and using materials more effciently offers both environmental and economic benefits - and itís key to achieving the goals of the Paris Agreement

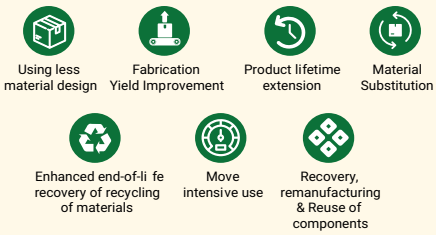
The Indonesian company WIKA Gedung reduces emissions by using less materials in their adapted construction process. While this is a small contribution in the grand scheme of things, the combined efforts of enterprises play a major role in a addressing climate change

Using less material by design

WIKA Gedung uses a modular system which many building pa rts are manufactured off-site and assembled on-site. This method saves up to 90% of time and uses less concrete and steel. This in turn means that the building foundations h ave to support less weight and therefore need less concrete as well. The lighter modules require less steel, while still gua ranteeing a safe and stable structu re that complies with standard building codes



In its 2020 report on resource efficiency and climate change, IRP set out s even strategies that public and private sector stakeholders can use to achieve greater material efficienct and foster climate action



An example of modular construction
in a two-s torey hospital built by WIKA Gedung, the modular construction method s aved around one third of the concrete used for the foundation of the structure, as well as 28% of steel compared to a conventional building. This avoided ~355 t CO_2e during construction - an important contribution to climate protection.



Approximately one third of concrete and steel saved



~355 t CO_2e*

* Equivalent to the GMG Emissions of 48 return flights from Jakarta to Berlin



In by making material efficiency part of your climate strategies.
Published by: Deutsche Gesellschaft f,r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices: Bonn and Eschborn, Germany
Address: Kothener Strafle 2-3, 10963 Berlin, Germany
www.giz.de/en

Project: Initiative Resource Efficiency and Climate Action (IREK II) on behalf of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV)
The project is part of the International Climate Initiati ve (IKI)
Responsible: Elisabeth D,r r, Head of Division
GIZ is responsible for the content of this publication.
Design/Layout: kippconcept GmbH, Bonn
Berlin 2024

Studi dilakukan di 4 negara
The study was conducted in 4 countries

Argentina
Argentina's Institute for Standardisation and Certification (CIRSOC)
How recycling of material in the construction industry can reduce emissions
Savings 21000 t Co2e

Indonesia
WIKA Gedung (Modular)
How optimized design in the construction industry can reduce emissions
Savings 355 t Co2e

Mexico
Rusave
How optimized design in the leather indust ry can reduce emissions
Savings 3900 kg Co2e

Ecuador
CKG Brand
How recycling of material in the construction industry can reduce emissions
Savings 3900 kg Co2e

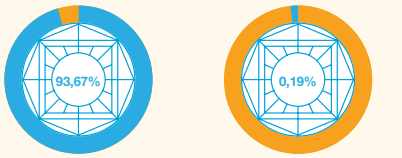
Metode konstruksi modular merupakan solusi atas tantangan tingginya emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor konstruksi. Modular WEGE berkomitmen untuk terus mengembangkan metode ini sebagai bagian dari kontribusi Perseroan dalam mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE). Sejalan dengan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), konstruksi yang berkelanjutan menjadi fokus utama Modular WEGE dalam membangun fondasi bagi kehidupan masa depan yang lebih baik serta mendorong terciptanya nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

The modular construction method is a solution to the challenge of high carbon emissions generated by the construction sector. Modular WEGE is committed to continuing to develop this method as part of the Company's contribution to supporting the achievement of the Net Zero Emissions (NZE) target. In line with the implementation of the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, a sustainable construction is the main focus of Modular WEGE in building the foundation for a better future life as well as encouraging the creation of long-term value for all stakeholders.

Pencapaian WEGE 2025
WEGE Achievements in 2025

Capaian Revenue Stream
Revenue Stream Achievements

Rp1,62 triliun / trillion



Pendapatan Konstruksi / Construction Revenue

Pendapatan Industri Modular / Modular Industry Revenue

Pendapatan Konsesi / Concession Revenue

Pendapatan Properti / Property Revenue

Laba/Rugi Bersih Tahun Berjalan
Net Profit (Loss) for the Year

(Rp630,25) miliar/billion

YoY 1.027,49%

Total Ekuitas
Total Equity

Rp1,971 triliun/trillion

24,36% YoY

Total Aset
Total Assets

Rp4,044 triliun/trillion

31,49% YoY

Saldo Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalents

Rp0,391 triliun/trillion

62,05% YoY

Capaian Rasio Keuangan
Financial Ratio Achievements

Marjin Laba Kotor
Gross Profit Margin

8,96%

meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 8,37%
increased compared to the 2024 achievement of 8.37%

Rasio Lancar
Current Ratio

172,5%

menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 175,51%
decreased compared to the 2024 achievement of 175.51%

Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas
Interest-Bearing Debt to Equity Ratio

0,07x

sama dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,18x
unchanged from the 2024 achievement of 0.18x

Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas
Debt to Equity Ratio

1,05x

menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 1,20x
decreased compared to the 2024 achievement of 1,20x

Capaian Perolehan Proyek
Project Acquisition Achievement

Kontrak Baru
New Contracts

Rp1.709 triliun/trillion

Sebanyak 11 proyek baru yang diperoleh di tahun 2025
A total of 11 new projects acquired in 2025

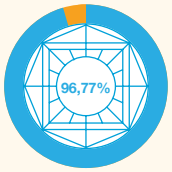
Kontrak Dihadapi
Order Book

Rp5.765 triliun/trillion

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Lini Bisnis
New Contract Acquisition by Line of Business

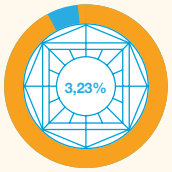
Konstruksi
Construction

Rp1,654 triliun/trillion



Industri Modular
Modular Industry

Rp53,175 miliar/billion



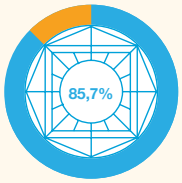
Corporate Rating
Net Profit for the Year

IdBBB	SEHAT SOUND	Kategori Layak Investasi Investment Grade Category

Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Pemberi Kerja (*Owner*)
New Contract Acquisition by Owner

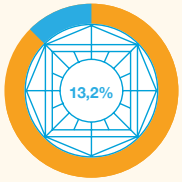
Pemerintah
Government

Rp1,464
triliun/trillion



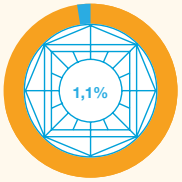
BUMN
State-Owned Enterprises

Rp225,360
miliar/billion



Swasta
Private Sector

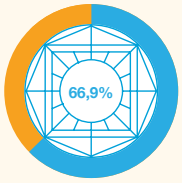
Rp18,975
miliar/billion



Perolehan Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Proyek
New Contract Acquisition by Project Type

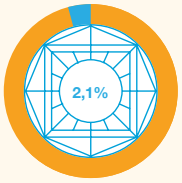
Perkantoran
Offices

Rp1,143
triliun/trillion



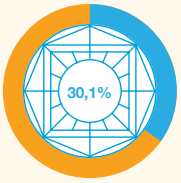
Residensial
Residential

Rp36
miliar/billion



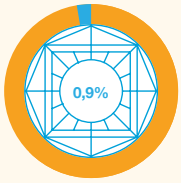
Fasilitas Publik
Public Facilities

Rp514
miliar/billion

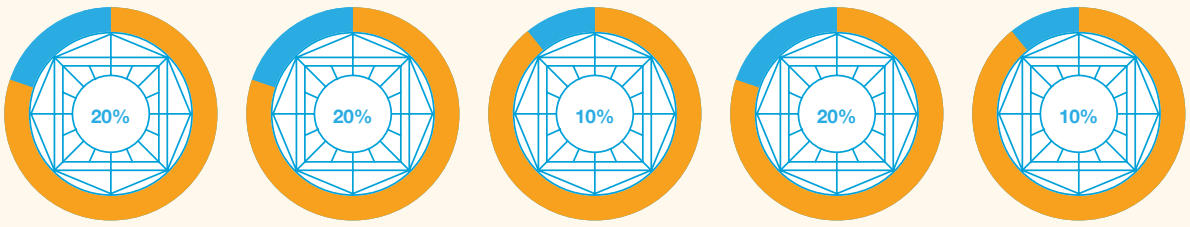


Komersial
Commercial

Rp15,9
miliar/billion



Dividend Payout Ratio



2021 2022 2023 2024 2025

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL EXTERNAL AWARDS AND RECOGNITION



Anugerah Inovasi Indonesia 2025 (Inovasi NETRO)
Indonesian Innovation Award 2025 (NETRO Innovation)

IDX Channel

10 Oktober 2025
October 10, 2025



CSA Awards 2025 (*Outstanding Company in the Infrastructure Sector & Analyst's Favorite Nominees*)

PAEI & CSA Community

27 November 2025
November 27, 2025



Brand Paling Populer Kategori Jasa Konstruksi & Infrastruktur (Anak Perusahaan BUMN Karya)
Most Popular Brand in the Construction & Infrastructure Services Category (Subsidiary of SOE Karya)

The Iconomics

9 Desember 2025
December 9, 2025

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2025

VALID CERTIFICATIONS IN 2025



ISO 9001:2015 – Quality Management System

Sucofindo

8 Maret 2025 - 7 Maret 2026
March 8, 2025 - March 7, 2026



ISO 14001:2015 – Environmental Management System

Sucofindo

8 Maret 2025 - 7 Maret 2026
March 8, 2025 - March 7, 2026



ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System

Sucofindo

8 Maret 2025 - 7 Maret 2026
March 8, 2025 - March 7, 2026



ISO 50001:2018 – Energy Management System

Sucofindo

18 Desember 2025 - 7 Maret 2026
December 18, 2025 - March 7, 2026



ISO 31000:2018 – Risk Management Guidelines

Sucofindo

17 Februari 2025 - 7 Maret 2026
February 17, 2025 - March 7, 2026



ISO 37001:2016 – Anti-Bribery Management System

Sucofindo

24 Februari 2025 - 10 Februari 2026
February 24, 2025 - February 10, 2026



SMK3 PP RI No. 50 Tahun 2012 – Occupational Safety and Health Management System

Sucofindo

17 Februari 2025 - 7 Maret 2026
February 17, 2025 - March 7, 2026



ISO 27001:2022 – Information Security Management System

TUV Nord

15 Desember 2022 - 14 Desember 2025
December 15, 2022 - December 14, 2025



ISO 21500:2021 – Guidance on Project Management

TUV Nord

10 Januari 2025 - 10 Januari 2026
January 10, 2025 - January 10, 2026



ISO 19650-1 & 19650-2:2018 – Building Information Modelling (BIM) Management System

BSI

8 Mei 2024 - 15 April 2027
Mei 8, 2024 - April 15, 2027



Jakarta International Stadium (JIS)

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlights



“Membangun fondasi kinerja yang adaptif dan berkelanjutan melalui strategi yang terukur dan eksekusi yang disiplin.”

“Building a foundation of adaptive and sustainable performance through measurable strategies and disciplined execution.”



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Highlights

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Pendapatan Usaha Revenue	1.623,56	3.673,53	3.979,71	2.366,26	3.168,20	(55,82) ↓	(15,39) ↓
Jasa Konstruksi Construction Services	1.520,80	3.368,26	3.782,58	2.084,28	3.089,72	(54,86) ↓	(16,24) ↓
Industri Industry	3,05	237,35	127,38	226,50	38,96	(98,71) ↓	(47,10) ↓
Konsesi Concession	59,60	67,10	52,87	46,29	17,68	(11,18) ↓	35,50 ↑
Properti Property	40,11	0,82	16,88	9,19	21,84	4.790,61 ↑	16,41 ↑
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(1.478,13)	(3.366,03)	(3.676,50)	(2.138,21)	(2.897,72)	(56,09) ↓	-
Laba Kotor Gross Profit	145,42	307,50	303,22	228,05	270,48	(52,71) ↓	(14,37) ↓
Beban Usaha Operating Expenses	(187,45)	(114,42)	(73,67)	(60,93)	(58,27)	63,82 ↑	33,92 ↑
Pendapatan Lainnya Other Income	157,98	135,06	123,38	277,99	231,87	16,97 ↑	(9,15) ↓
Beban Lainnya Other Expenses	(558,43)	(230,45)	(120,75)	(175,54)	(150,63)	142,29 ↓	38,76 ↓
Beban Keuangan Financial Expense	(17,52)	(28,25)	(66,40)	(56,46)	(63,52)	(37,99) ↓	(27,53) ↓
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expense	(39,06)	(96,41)	(114,63)	(66,43)	(96,75)	(59,48) ↓	(20,29) ↓
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(18,24)	(4,79)	(14,62)	1,39	0,00	280,58 ↓	- ↓
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	(112,95)	99,66	10,77	80,73	83,05	(213,34) ↑	- ↑
Laba (Rugi) Selisih Kurs Foreign Exchange Gain (Loss)	0,01	0,06	(0,78)	1,46	0,25	(85,96) ↓	(55,28) ↓
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	(630,25)	67,96	46,50	230,26	216,48	(1.027,49 ↓	- ↓
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income tax benefit (expenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,09)	- ↑	(100,00) ↓
Laba Tahun Berjalan Profit for the year	(630,25)	67,96	46,50	230,26	216,39	(1.027,49) ↑	-
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax	2,32	(11,35)	(4,60)	1,89	1,02	120,47 ↑	22,81 ↑
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit for the Year	(627,93)	56,60	41,90	232,15	217,41	(1.209,42) ↓	-

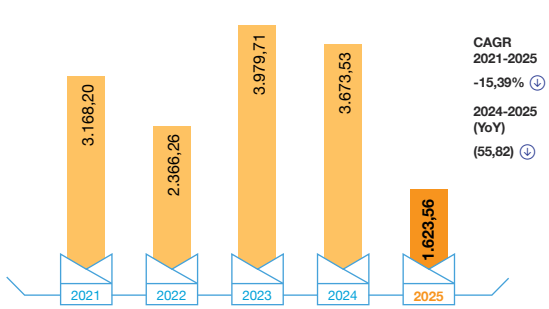
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	(630,36)	67,89	46,70	230,06	213,88	(1.028,46) ↓	-
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,11	0,07	(0,20)	0,20	2,51	65,80 ↑	-
Jumlah Total	(630,25)	67,96	46,50	230,26	216,39	(1.027,49) ↓	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Income for the Year Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	(628,04)	56,54	42,11	231,95	214,90	(1.210,87) ↓	-
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,11	0,07	(0,20)	0,20	2,51	65,80 ↑	-
Jumlah Total	(627,93)	56,60	41,90	232,15	217,41	(1.209,42) ↓	-
Laba bersih per Saham (Rupiah penuh) Net Income Per Share (in full Rupiah)	(65,86)	7,09	4,88	24,03	22,34	(1.028,77) ↓	-

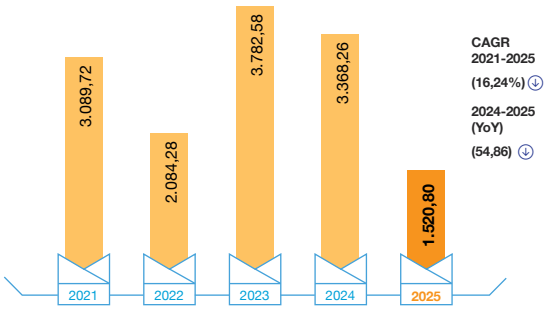
Pendapatan Segmen Usaha
Business Segment Revenue

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



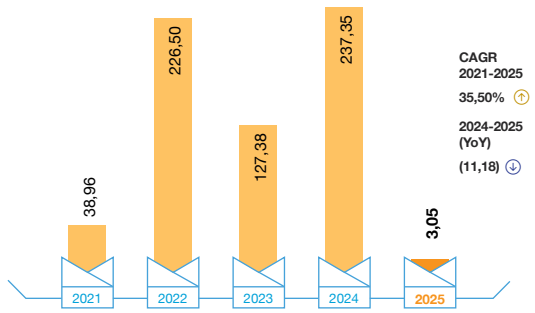
Pendapatan Segmen Jasa Konstruksi
Construction Services Segment Revenue

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



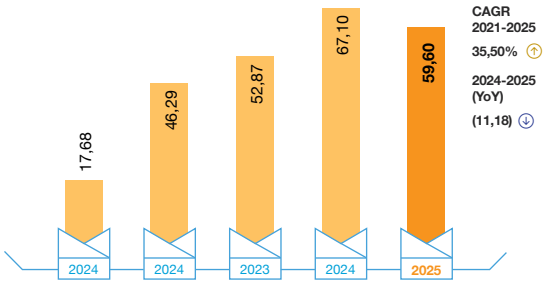
Pendapatan Segmen Industri
Revenue from the Industrial Segmen

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



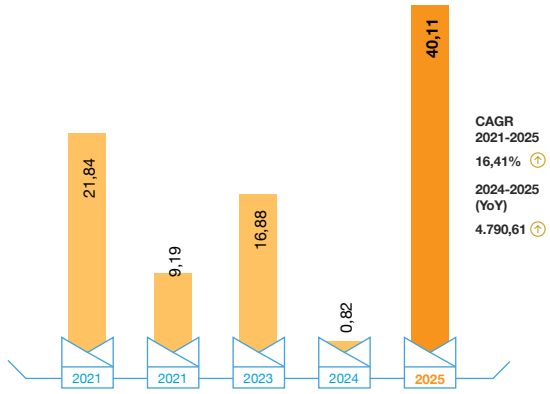
Pendapatan Segmen Konsesi
Revenue from the Concession Segment

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



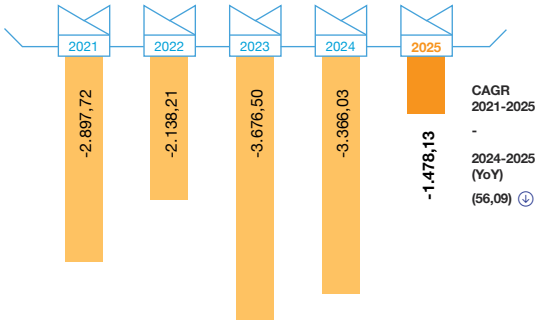
Pendapatan Segmen Properti
Revenue from Properti Segment

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



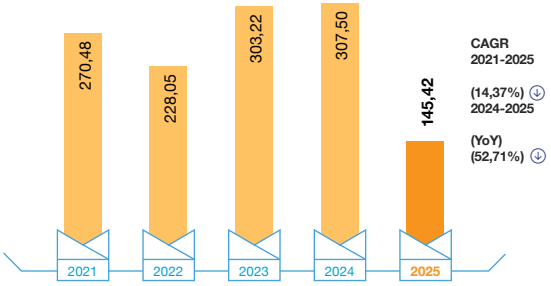
Beban Pokok Pendapatan
Cost of Revenues

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



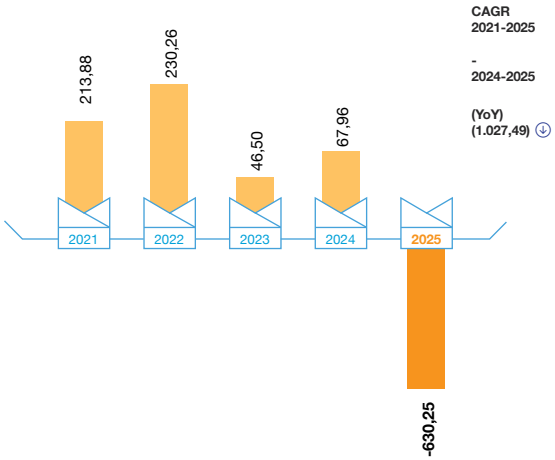
Laba Kotor
Gross Profit

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Laba Tahun Berjalan
Profit for the year

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



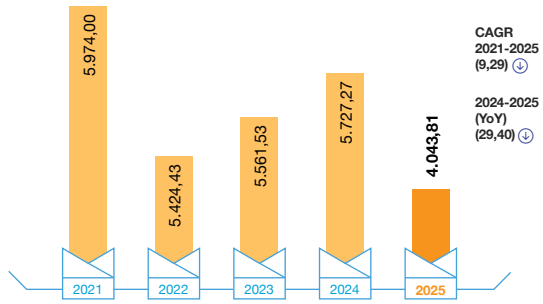
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Total Aset Lancar Total Current Assets	2.991,15	4.414,67	4.261,07	3.979,84	4.456,58	(32,25) ↓	(9,54) ↓
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	391,13	1.030,73	1.036,43	916,34	1.467,87	(62,05) ↓	(27,78) ↓
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.052,66	1.312,60	1.300,46	1.444,59	1.517,42	(19,81) ↓	(8,82) ↓
Penyertaan Saham Investment in Shares	3,55	3,55	3,55	127,30	127,30	0,00	(50,05) ↓
Properti Investasi Investment Properties	259,57	259,41	259,41	258,19	258,19	0,06	0,13
Aset Tetap Fixed Assets	38,94	47,48	71,32	93,03	142,14	(17,98) ↓	(27,98) ↓
Investasi Pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	-	18,24	23,03	37,65	0,00	-	-
Investasi Pada Ventura Bersama Investment in Joint Ventures	335,32	519,35	505,44	524,94	512,81	-	(10,18) ↓
Total Aset Total Assets	**4.043,81**	**5.727,27**	**5.561,53**	**5.424,43**	**5.974,00**	**(29,40)**	**(9,29) ↓**
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.733,97	2.515,36	2.205,58	2.007,72	3.062,98	(29,40) ↓	(13,52) ↓
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	338,59	605,95	797,21	876,70	529,43	(31,06) ↓	(10,59) ↓
Total Liabilitas Total Liabilities	**2.072,56**	**3.121,30**	**3.002,79**	**2.884,42**	**3.592,41**	**(33,60) ↓**	**(12,99) ↓**
Total Ekuitas Total Equity	**1.971,25**	**2.605,97**	**2.558,74**	**2.540,01**	**2.381,59**	**(24,36) ↓**	**(4,61) ↓**
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Equity Attributable to:							
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	1.969,13	2.603,97	2.556,81	2.537,87	2.346,11	(24,38) ↓	(4,32) ↓
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	2,12	2,00	1,93	2,13	35,48	6,00 ↑	(47,45) ↓
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas	**4.043,81**	**5.727,27**	**5.561,53**	**5.424,43**	**5.974,00**	**(29,40) ↓**	**(9,29) ↓**

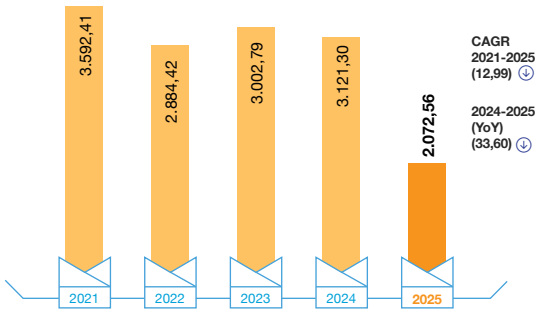
Total Aset
Total Assets

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



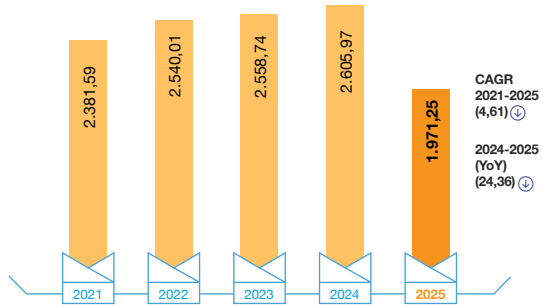
Total Liabilitas
Total Liabilities

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



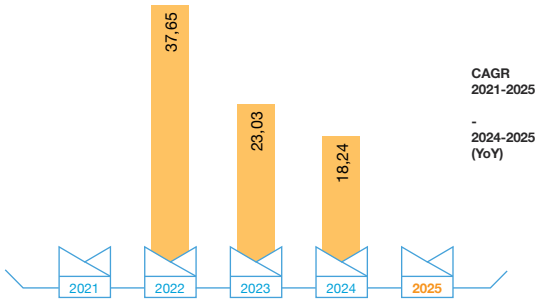
Total Ekuitas
Total Equities

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Investasi Pada Entitas Asosiasi
Investment in Associates

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Investasi Pada Ventura Bersama
Investment in Joint Ventures

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



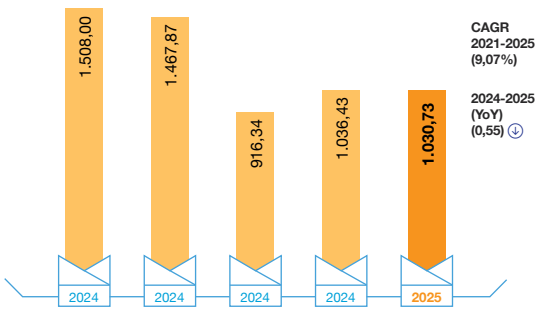
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statements of Cash Flows

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities	(445,15)	(256,58)	567,74	(597,87)	103,33	(73,49) ↓	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities	136,91	71,04	18,08	81,29	(97,36)	92,71 ↑	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities	(331,38)	179,76	(464,95)	(36,40)	(46,34)	(284,33) ↓	63,53
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents	(639,61)	(5,79)	120,87	(552,99)	(40,37)	(10.944,21) ↓	99,51
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Kas dan Setara Kas Effect of Foreign Exchange Rate Changes in Cash and Cash Equivalents	0,01	0,09	(0,78)	1,46	0,25	(88,89) ↓	(55,28)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	1.030,73	1.036,43	916,34	1.467,87	1.508,00	(0,55) ↓	(9,07)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at The End of Year	391,13	1.030,73	1.036,43	916,34	1.467,87	(62,05) ↓	(28,15)

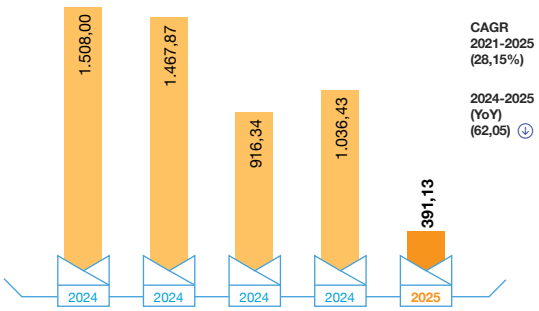
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun
Balance of Cash and Cash Equivalents at The End of Year

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)

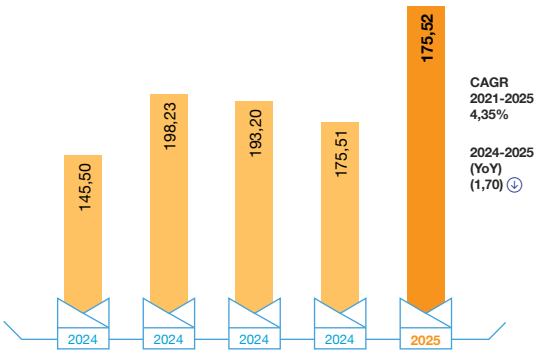


Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya
Financial Ratios and Other Important Ratios

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)							
Rasio Kas Cash ratio	22,54	40,98	46,99	45,64	47,92	(45,01)	(17,18)
Rasio Cepat Quick Ratio	129,58	161,59	174,99	179,75	134,94	(19,81)	(1,01)
Rasio Lancar Current ratio	172,52	175,51	193,20	198,23	145,50	(1,70)	4,35
Rasio Solvabilitas (kali) Solvability Ratio (times)							
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to equity ratio (DER)	1,05	1,20	1,17	1,14	1,51	(12,50)	(8,68)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset Debt to total assets ratio (DAR)	0,51	0,55	0,54	0,53	0,60	(7,27)	(3,98)
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	0,07	0,18	0,09	0,24	0,22	(61,11)	(24,90)
Rasio Utang Berbunga terhadap EBITDA Debt to EBITDA	(0,27)	1,64	0,86	1,64	1,42	(19,1)	(211.07)
Rasio EBITDA terhadap Interest EBITDA to Interest	31	9,84	3,93	6,49	5,93	21,16	90.47
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset Total equity to total assets ratio	0,49	0,45	0,46	0,47	0,40	8,89	5,20
Rasio Aktivitas Activity Ratio							
Kolektibilitas Piutang (hari) Collection Period (days)	52	54,17	63,83	83,15	65,05	(4,00)	(5,44)
Perputaran Total Aset (kali) Total Assets Turnover (times)	0,4	0,64	0,72	0,44	0,53	(37,50)	(6,79)
Perputaran Modal Kerja (kali) Working Capital Turnover (times)	1,2	1,93	1,94	1,20	2,27	(37,82)	(14,73)
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)							
Imbal Hasil terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	(31,96)	2,61	1,82	9,07	9,09	(1.324,52)	-
Imbal Hasil terhadap Aset Return on Assets (ROA)	(15,58)	1,19	0,84	4,24	3,62	(1.409,24)	-
Imbal Hasil terhadap Investasi Return on Investment (ROI)	(21,09)	2,99	3,47	6,60	3,85	-	-
Marjin (%) Margin (%)							
Marjin Laba Kotor Gross profit margin (GPM)	8,96	8,37	7,62	9,64	8,54	7,05	1,21
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin (OPM)	(2,58)	5,26	5,77	7,06	6,70	(149,05)	-
Marjin Laba Bersih Net profit margin (NPM)	(38,82)	1,85	1,17	9,73	6,83	(2.198,92)	-

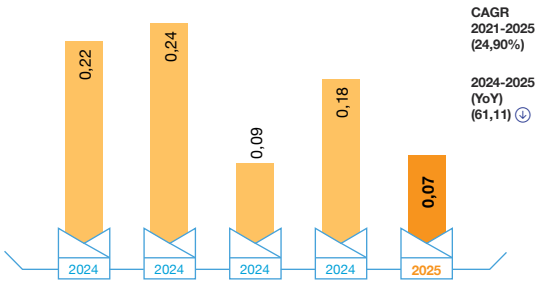
Rasio Lancar
Current Ratio

(%)



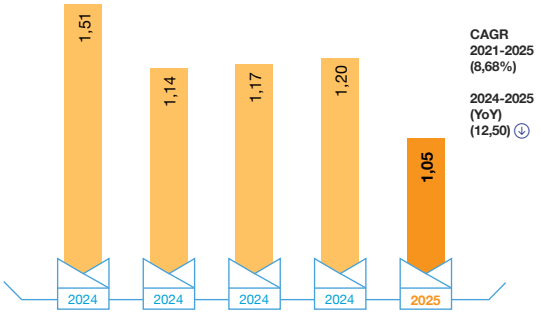
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas
Gearing Ratio

(Kali) (Times)



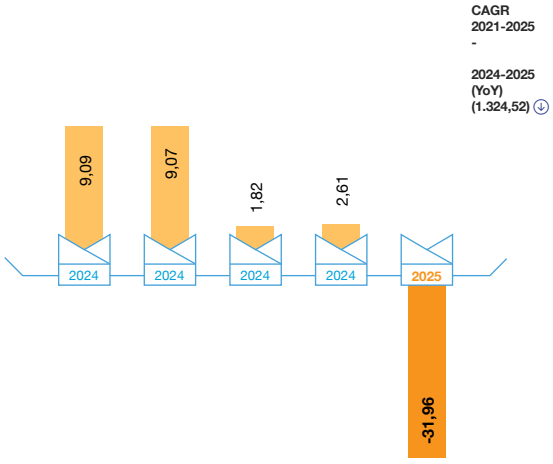
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas
Debt to Equity Ratio (DER)

(Kali) (Times)



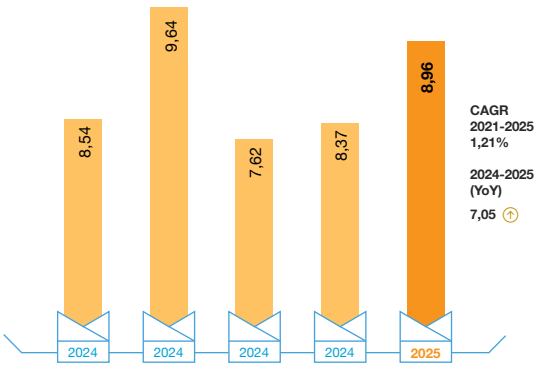
Imbal Hasil terhadap Ekuitas
Return on Equity (ROE)

(%)



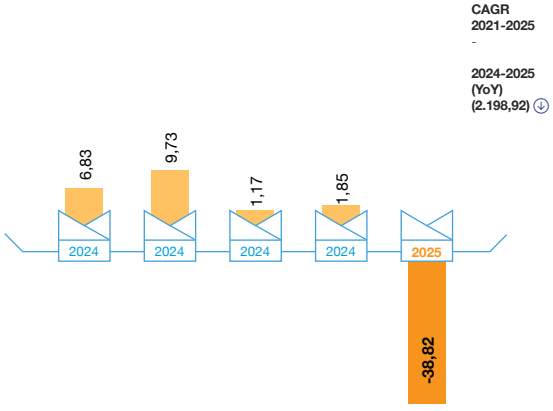
Marjin Laba Kotor
Gross Profit Margin (GPM)

(%)



Marjin Laba Bersih
Net Profit Margin (NPM)

(%)



Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Kinerja Operasional Berdasarkan Segmen Usaha
Operational Performance By Business Segment

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Kontrak Baru New Contracts							
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Segmen Usaha New Project Contract Value Based on Business Segment	1.709,095	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	(37.06)	(11.3)
Konstruksi Construction	1.653,92	2.102,23	5.045,80	4.943,09	2.123,45	(21.33)	(6.1)
Konsesi & Properti/Investasi Consessions & Property/ Investments	0,00	0,00	72,07	55,49	39,95	0.00	(100.0)
Industri - Modular Industry - Modular	55,17	613,19	16,46	451,01	205,63	(91.00)	(28.0)
Industri - WIKA Pracetak Gedung* Industry - WIKA Pracetak Gedung*	0,00	0,00	0,00	17,36	392,81	0.00	(100.0)
Kontrak Lama Carry Over							
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Segmen Usaha Value of Carry Over Contracts Based on Business Segment	4.056,14	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	(35,56)	(20.6)
Konstruksi Construction	3.953,87	6.202,42	6.781,81	7.282,55	9.869,48	(36.25)	(20.4)
Konsesi & Properti/Investasi Consessions & Property/ Investments	99,71	70,45	0,00	0,00	0,00	41.53	-
Industri- Modular Industry- Modular	2.55	21,19	173,35	167,41	0,74	(87.95)	36.3
Industri - WIKA Pracetak Gedung* Industry - WIKA Pracetak Gedung*	00	0,00	0,00	99,45	312,93	0.00	(100.0)

* Pada 25 Juli 2022, Perseroan menjual 2% kepemilikan saham pada WIKA Pracetak Gedung (WPG) kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), sehingga kepemilikan Perseroan berkurang dari 51% menjadi 49%. Perubahan ini mengubah status WPG dari Entitas Anak menjadi Entitas Asosiasi, yang berdampak pada pencatatan perolehan kontrak secara konsolidasian.
* On July 25, 2022, the Company sold 2% of its shares in WIKA Pracetak Gedung (WPG) to PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), reducing the Company's ownership from 51% to 49%. This change changed WPG's status from a Subsidiary to an Associated Entity, which impacted the recording of contract acquisitions on a consolidated basis.

Kinerja Operasional Berdasarkan Pemberi Kerja (*Owner*)
Operational Performance By Owner

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Kontrak Baru New Contracts							
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Pemberi Kerja *(Owner)* New Project Contract Value Based on Owner	1.709,095	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	(37.06)	(11.3)
Pemerintah Government	1.464,76	1.679,66	4.463,44	2.047,09	1.263,51	(12.8)	3.8
BUMN SOE	225,36	597,88	256,82	954,30	437,45	(62.3)	(15.3)
Swasta Private	18,98	437,89	414,07	2.465,56	1.060,88	(95.7)	(63.4)
Kontrak Lama Carry Over							
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner) Carry Over Contract Value Based on Owner	4.056,14	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	(35.6)	(20.6)
Pemerintah Government	1.987,95	4.281,63	1.650,54	890,20	1.609,63	(53.6)	5.4
BUMN SOE	1.347,79	1.063,32	2.207,61	4.362,34	6.180,43	26.8	(31.7)
Swasta Private	720,40	949,11	3.097,01	2.296,87	2.393,09	(24.1)	(25.9)

Kinerja Operasional Berdasarkan Jenis Proyek
Operational Performance By Type of Projects

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Kontrak Baru New Contracts							
Nilai Kontrak Proyek Baru Berdasarkan Jenis Proyek New Project Contract Values by Project Type	1.709,095	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	(37.06)	(11.3)
Perkantoran Office	1.142,69	817,68	994,45	1.617,43	123,48	39.75	74.4
Residensial Residential	36,20	702,52	1.951,88	398,98	917,87	(94.85)	(55.4)
Fasilitas Publik Public Facilities	514,28	1.195,22	2.105,68	2.957,15	1.450,33	(57.0)	(22.8)
Komersial Commercial	15,93	0,00	82,32	493,39	270,16	-	(50.7)

Kinerja Operasional Berdasarkan Jenis Proyek
Operational Performance By Type of Projects

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Kontrak Lama Carry Over							
Nilai Kontrak Proyek Lama Berdasarkan Jenis Proyek Carry Over Projects Value by Project Types	4.056,14	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	(35.6)	(20.6)
Perkantoran Office	1.359,61	1.626,86	1.269,27	222,22	996,94	(16.4)	8.1
Residensial Residential	1.353,61	2.703,32	2.614,30	5.253,43	5.790,31	(49.9)	(30.5)
Fasilitas Publik Public Facilities	1.142,80	1.878,31	2.607,45	2.004,56	3.184,25	(39.2)	(22.6)
Komersial Commercial	200,13	85,57	464,14	69,20	211,65	133.9	(1.4)

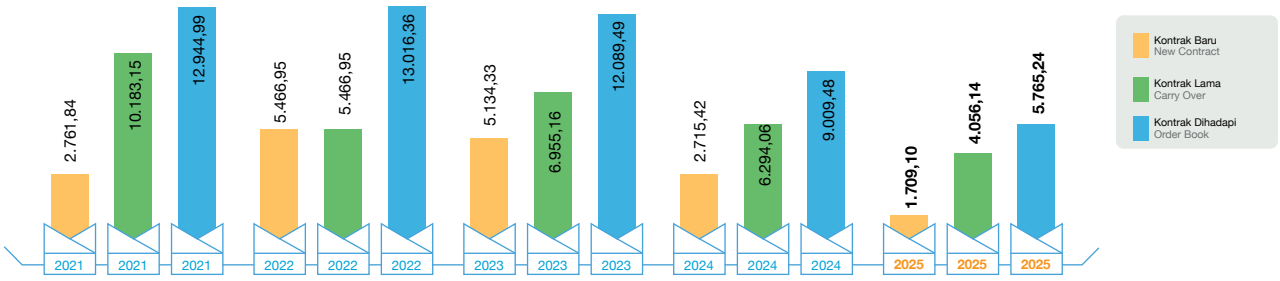
Kinerja Operasional Secara Keseluruhan
Overall Operational Performance

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in billions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Kinerja Operasional (Rp Miliar) Operational Performance (Rp Billion)							
Kontrak Baru New Contracts	1.709,10	2.715,42	5.134,33	5.466,95	2.761,84	(37.1)	(11.3)
Kontrak Lama Carry Over	4.056,14	6.294,06	6.955,16	7.549,41	10.183,15	(35.6)	(20.6)
Kontrak Dihadapi Order Book	5.765,24	9.009,48	12.089,49	13.016,36	12.944,99	(36.0)	(18.3)
Rasio *Order Book Burn Rate to Revenue* (Kali | Times**)**							
Kontrak Dihadapi Order Book	5.765,24	9.009,48	12.089,49	13.016,36	12.944,99	(36.0)	(18.3)
Jumlah Pendapatan Total Revenue	2.173,89	5.104,87	4.375,23	3.201,61	4.693,30	(57.4)	(17.5)
Pendapatan Non-JO *(Joint Operation)* Revenues Non JO (Joint Operation)	1.623,33	3.673,53	3.979,71	2.366,26	3.168,20	(85.0)	(35.4)
Pendapatan JO *(Joint Operation)* Revenues JO (Joint Operation)	550,33	1.431,35	395,52	835,35	1.525,10	13.4	1.6
Rasio *Order Book Burn Rate to Revenue*	37,71%	56,66%	36,19%	24,60%	36,26%	(33.5)	(1.0)

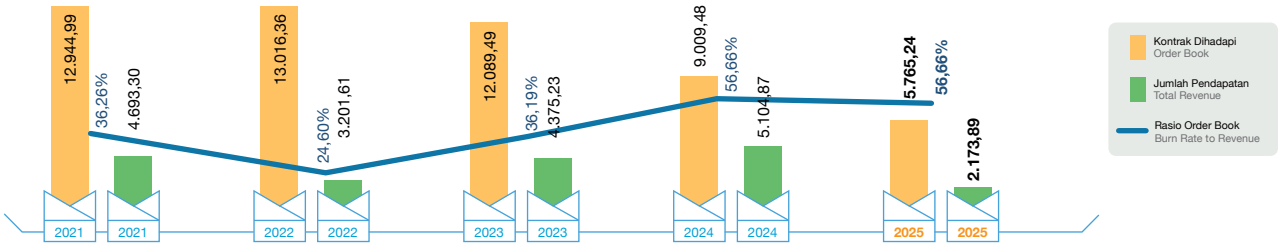
Kinerja Perolehan Proyek
Project Revenue Performance

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Rasio *Order Book Burn Rate to Revenue*
Rasio Order Book Burn Rate to Revenue

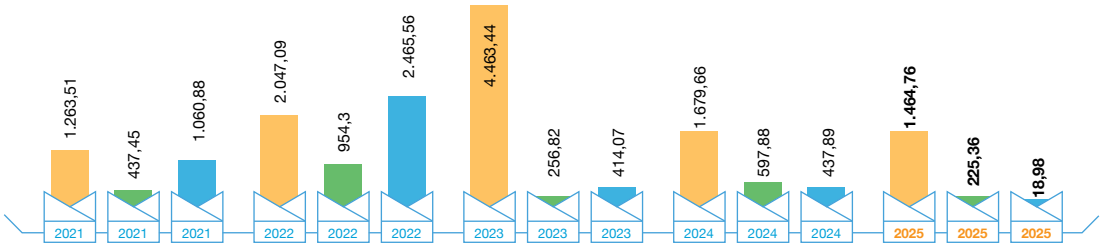
(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Kinerja Operasional Berdasarkan Pemberi Kerja *(Owner)*
Operational Performance Based On Employer (Owner)

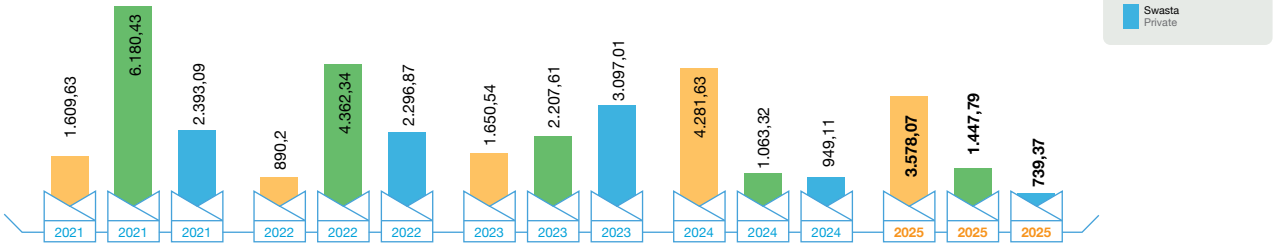
Kontrak Baru New Contracts

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Kontrak Lama Carry Over

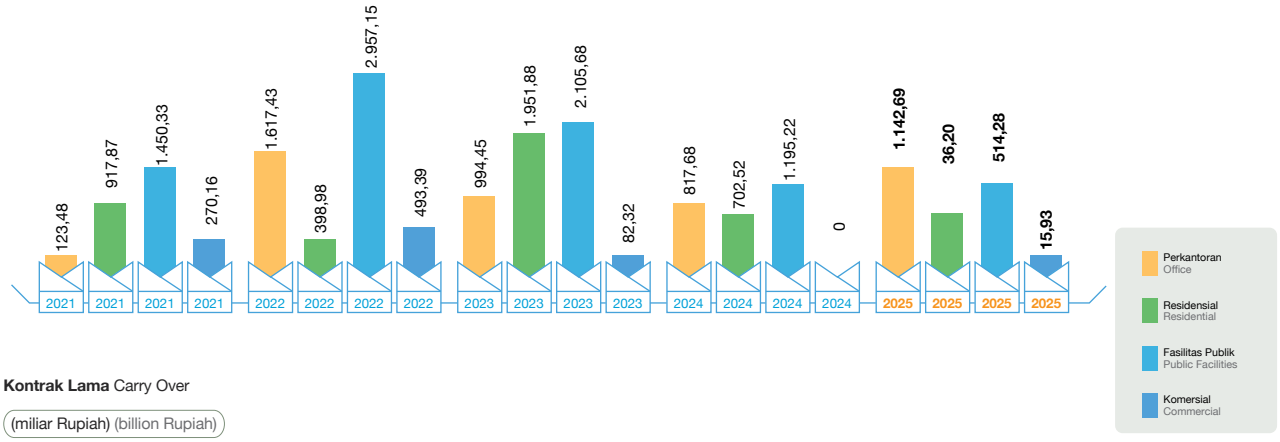
(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Kinerja Operasional Berdasarkan Jenis Proyek
Operational Performance by Project Type

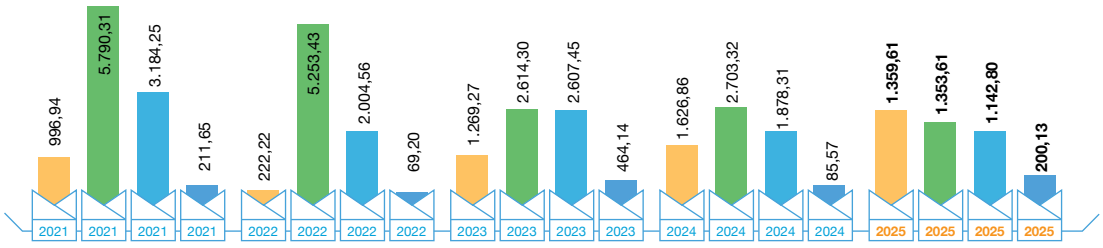
Kontrak Baru New Contracts

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Kontrak Lama Carry Over

(miliar Rupiah) (billion Rupiah)



Ikhtisar Organisasi
Organizational Highlights

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Jumlah Karyawan Total Employee	460	500	525	558	569
Penilaian Penerapan GCG GCG Assessment Score	95,61** (sangat baik) (very good) ASEAN Corporate Governance Scorecard	90,49** (sangat baik) (very good) ASEAN Corporate Governance Scorecard	89,61* (sangat baik) (very good) SK-16/S.MBU/2012	89,61 (sangat baik) (very good) SK-16/S.MBU/2012	88,03 (sangat baik) (very good) SK-16/S.MBU/2012
Penilaian Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index Score	93,30%	93,39%	93,50%	94,85%	94,12%

*) Sehubungan dengan diterbitkannya Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 mengenai Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, serta belum adanya keputusan pengganti yang ditetapkan, maka Perseroan tidak melaksanakan *assessment* penerapan GCG untuk Tahun Buku 2022 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023.

*) In connection with the issuance of a copy of the Decree of Secretary of Ministry of SOE of Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023 concerning the Revocation of the Decree of Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and the absence of a replacement decision, the Company did not carry out an assessment of GCG implementation for the 2022 Fiscal Year that should have been carried out in 2023.

**) Pada Tahun Buku 2024, Perseroan melaksanakan *assessment* penerapan GCG untuk Tahun Buku 2023 dengan mengacu pada indikator/Parameter Penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*

**) In the 2024 Fiscal Year, the Company carried out an assessment of GCG implementation for 2023 Fiscal Year by referring to the indicators/Assessment Parameters of the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Ikhtisar Saham
Shares Information

KODE SAHAM I STOCK CODE

WEGE

WEGE telah tercatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 30 November 2017.
WEGE has been listed and traded its shares on the Indonesia Stock Exchange since November 30, 2017.

Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO) dengan menawarkan sebanyak 2.872.000.000 saham biasa kepada masyarakat, yang dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Selanjutnya, saham Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penawaran umum tersebut disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company has conducted an Initial Public Offering (IPO) with a total of 2,872,000,000 common shares offered to the public, which has been declared effective in accordance with the Decree of Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. Furthermore, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code WEGE. Further information regarding the public offering can be found in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

INFORMASI KINERJA SAHAM

INFORMATION ON SHARES PERFORMANCE

2025	Harga Saham (Rp) Share Prices (Rp)				Jumlah Saham Beredar (juta lembar) Number of Shares Outstanding (million shares)	Volume Transaksi (Saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Market Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1st Quarter	66	71	56	56	9.572	92.889.800	536.03
Triwulan II 2nd Quarter	53	54	51	52	9.572	22.076.500	497.74
Triwulan III 3rd Quarter	72	73	70	70	9.572	15.270.200	670.04
Triwulan IV 4th Quarter	68	75	67	70	9.572	4.196.100	670.04

2024	Harga Saham (Rp) Share Prices (Rp)				Jumlah Saham Beredar (juta lembar) Number of Shares Outstanding (million shares)	Volume Transaksi (Saham) Transaction Volume (shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp-miliar) Market Capitalization (Rp-billion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I 1st Quarter	81	82	80	80	9.572	2.225.400	765.76
Triwulan II 2nd Quarter	57	59	56	58	9.572	1.223.800	555.18
Triwulan III 3rd Quarter	83	86	82	86	9.572	13.228.100	823.19
Triwulan IV 4th Quarter	63	64	62	64	9.572	247.100	612.61

DATA GRAFIK PERGERAKAN HARGA, VOLUME DAN KAPITALISASI PASAR SAHAM WEGE TAHUN 2024-2025

WEGE STOCK PRICE, VOLUME AND MARKET CAPITALIZATION MOVEMENT CHART DATA FOR 2024-2025

		Harga Price (Rp)	Volume	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
2025	Januari January	60	65.124.600	574.320.000.000
	Februari February	50	87.730.700	478.600.000.000
	Maret March	56	300.032.100	536.032.000.000
	April	61	203.077.700	583.892.000.000
	Mei May	64	122.596.700	612.608.000.000
	Juni June	52	115.724.000	497.744.000.000
	Juli July	51	216.652.700	488.172.000.000
	Agustus August	61	1.621.257.600	583.892.000.000
	September	70	3.044.333.900	670.040.000.000
	Oktober October	65	2.041.244.800	622.180.000.000
	November	68	299.489.500	650.896.000.000
	Desember December	70	1.120.440.700	670.040.000.000

		Harga Price (Rp)	Volume	Kapitalisasi Pasar Market Capitalization (Rp)
2024	Januari January	78	2.388.100	746.616.000.000
	Februari February	81	5.180.200	775.332.000.000
	Maret March	80	2.225.400	765.760.000.000
	April	71	9.777.600	679.612.000.000
	Mei May	66	7.883.300	631.752.000.000
	Juni June	58	1.223.800	555.176.000.000
	Juli July	65	2.953.500	622.180.000.000
	Agustus August	82	18.474.300	784.904.000.000
	September	86	13.228.100	823.192.000.000
	Oktober October	82	13.305.800	784.904.000.000
	November	73	1.647.900	698.756.000.000
	Desember December	64	247.100	612.608.000.000

GRAFIK PERGERAKAN HARGA, VOLUME, DAN KAPITALISASI PASAR SAHAM WEGE TAHUN 2024-2025

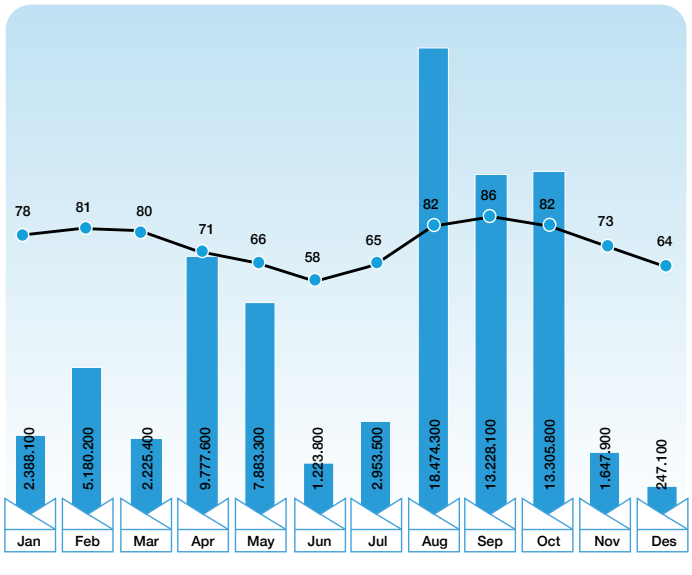
WEGE STOCK PRICE, VOLUME, AND MARKET CAPITALIZATION MOVEMENT CHART FOR 2024-2025

Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Triwulanan 2024-2025
Quarterly Stock Price and Volume Movement Chart For 2024-2025

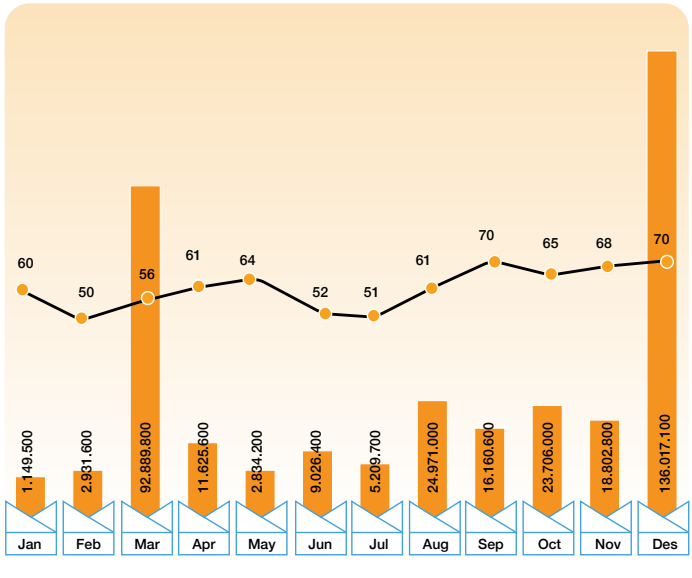
Uraian Description	2025				2024			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Harga Price	56	52	70	70	80	58	86	64
Volume	92.889.800	22.076.500	15.270.200	4.196.100	2.225.400	1.223.800	13.228.100	247.100

Grafik Pergerakan Harga Dan Kapitalisasi Pasar Triwulanan 2024-2025
Quarterly Price Action and Market Capitalization Chart For 2024-2025

Uraian Description	2025				2024			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Harga Price	56	52	70	70	80	58	86	64
Kapitalisasi Pasar Market Capitalization	536.03	497.74	670.04	670.04	765.760	555.176	823.192	612.608



2024



2025

Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Information on Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Delisting of Stock Listings (Delisting)

Perseroan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 tidak terdapat sanksi yang berdampak terhadap aktivitas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*) selama periode tersebut.

The Company reported that throughout 2025, there were no sanctions impacting the Company's share trading activities on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, there was no stock suspension or delisting during the period.

Informasi Tentang Aksi Korporasi

Information on Corporate Actions

Pada Tahun Buku 2025 Perseroan melaksanakan beberapa aksi korporasi. Yang pertama, melakukan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas kontribusi pemegang saham terhadap kinerja Perseroan. Keputusan pembagian dividen ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2025, di mana para pemegang saham menyetujui pembagian 10% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang Saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In the Fiscal Year 2025, the Company performed several corporate actions. First, the Company distributed cash dividends to shareholders as a form of return for shareholder contributions to the Company's performance. The dividend distribution decision was approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on May 21, 2025. The shareholders approved the distribution of 10% of the Company's net profit for the 2024 fiscal year, amounting to Rp6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-six million one hundred and twenty thousand rupiah), to be distributed as cash dividends to all registered Shareholders in accordance with applicable regulations.

Yang kedua, Perseroan melakukan perubahan pengurus sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 21 Mei 2025, Perseroan telah menyetujui pengangkatan kembali Bapak Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen dan Bapak Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I. Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif sejak 21 Mei 2025, untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secondly, the Company made changes to its management due to the expiration of terms of office of members of Board of Commissioners and Board of Directors for the previous period. Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders on May 21, 2025, the Company approved the reappointment of Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Bagus Tri Setyana as Director of Operations I. The reappointment was effective May 21, 2025, for a term in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Yang ketiga, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 November 2025, Perseroan telah menyetujui perubahan penggunaan sebagian dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan strategi pengembangan usaha Perseroan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Perubahan penggunaan dana hasil IPO tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan secara berkala melaporkan realisasi penggunaan dana hasil IPO sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Third, based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 28, 2025, the Company approved changes to the appropriation of a portion of proceeds from the Initial Public Offering (IPO). This change was made to align with the Company's operational needs and business development strategy, while still prioritizing the principles of prudence and good corporate governance.

The changes to the appropriation of IPO proceeds have been carried out in accordance with applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority regulations. The Company periodically reports on the appropriation of IPO proceeds as a form of transparency and accountability to shareholders and stakeholders.

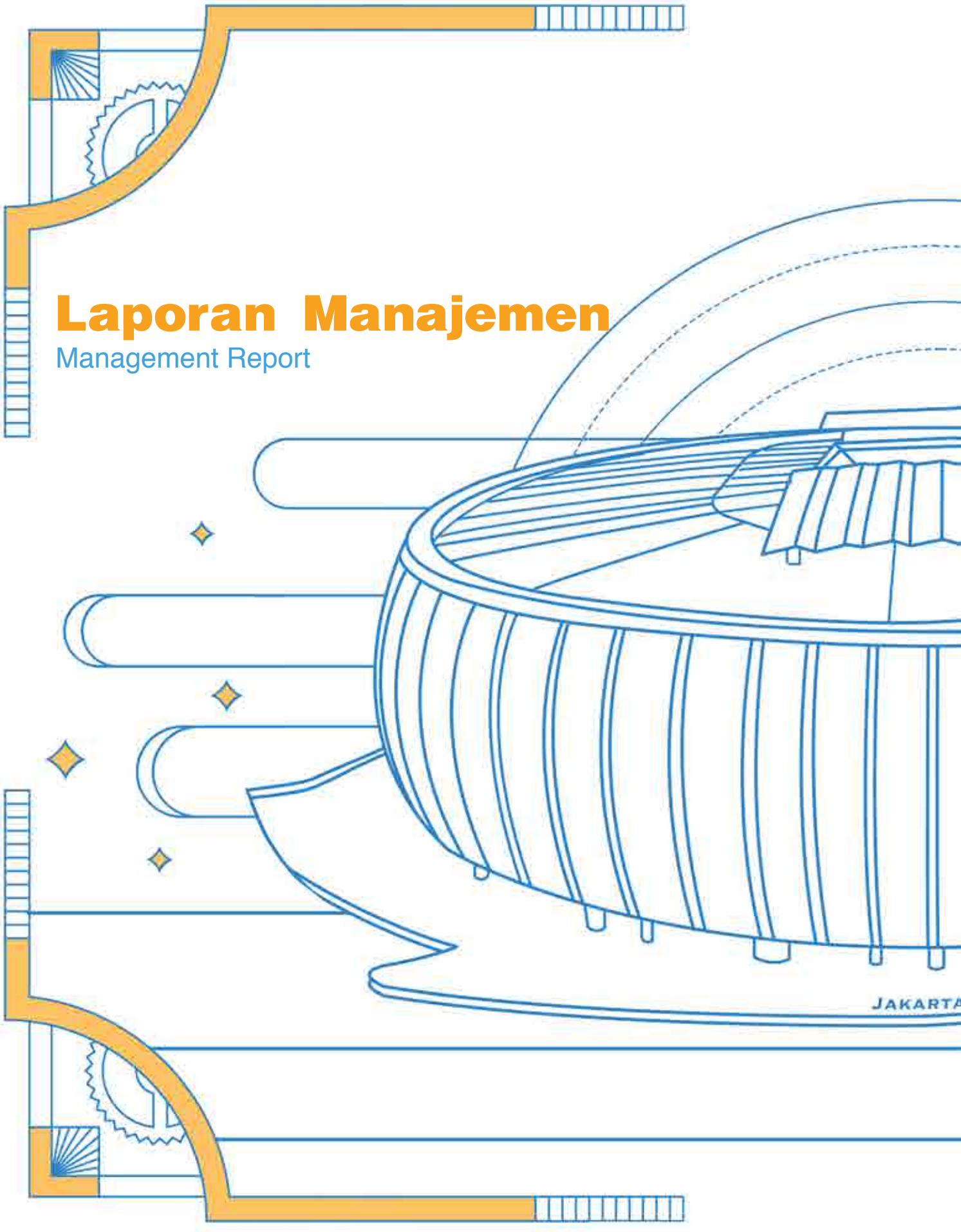
Informasi Efek Lainnya
Information on Other Securities

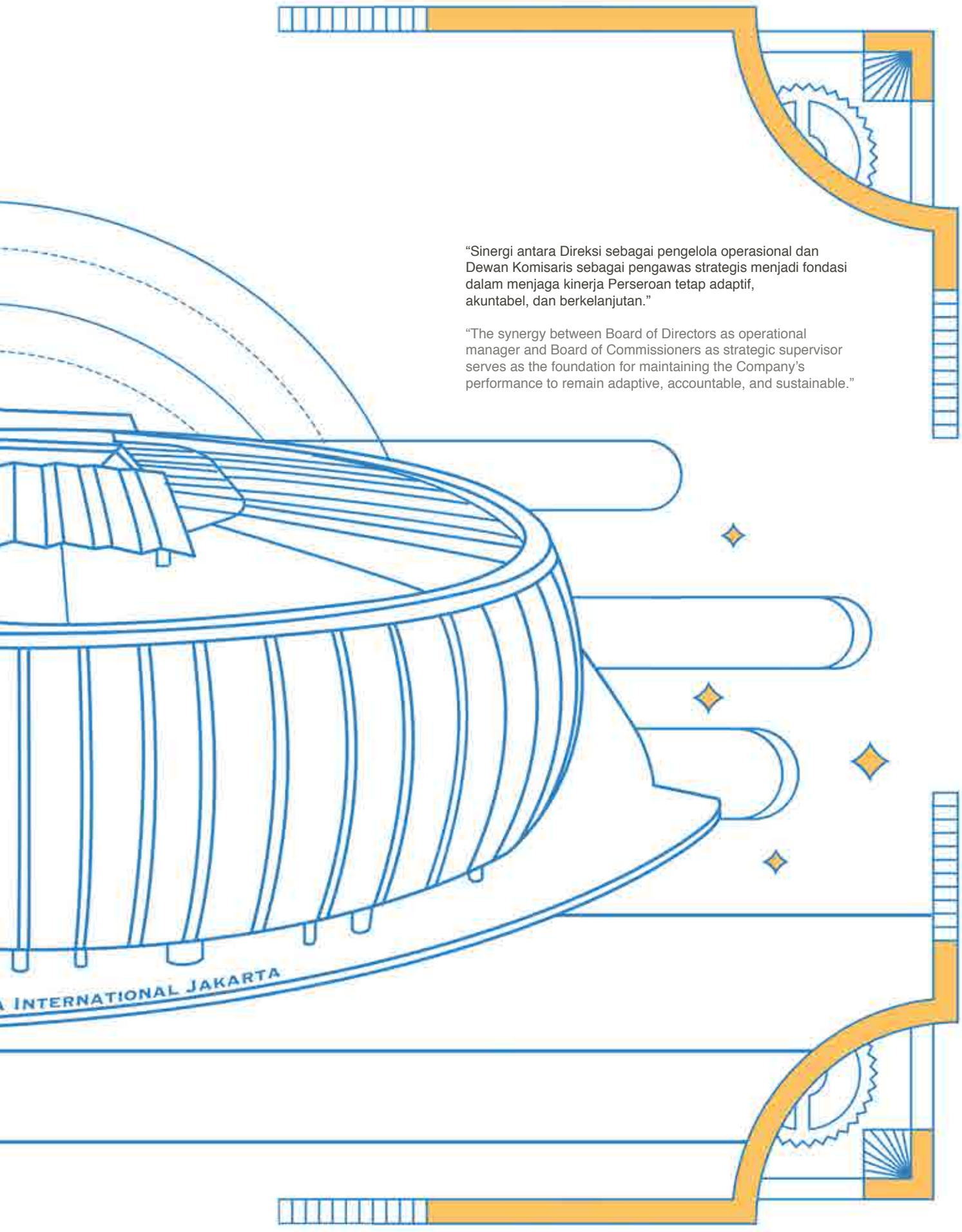
Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi terkait jumlah efek bersifat utang yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, maupun peringkat obligasi atau sukuk selama dua (2) tahun terakhir.

Throughout 2025, the Company did not issue bonds, sharia bonds, or convertible bonds, either domestically or internationally. Therefore, the Company is not obligated to provide information regarding the number of outstanding debt securities, interest rates/yields, maturity dates, or bond or sharia bond ratings for the past two (2) years.

Laporan Manajemen

Management Report





"Sinergi antara Direksi sebagai pengelola operasional dan Dewan Komisaris sebagai pengawas strategis menjadi fondasi dalam menjaga kinerja Perseroan tetap adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan."

"The synergy between Board of Directors as operational manager and Board of Commissioners as strategic supervisor serves as the foundation for maintaining the Company's performance to remain adaptive, accountable, and sustainable."



Joseph Prajogo

Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama

Independent Commissioner and Acting President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,
Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("WEGE" atau "Perseroan") dapat menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2025 di tengah dinamika dan tantangan industri yang semakin kompleks.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tekanan bagi Perseroan, ditandai dengan perlambatan aktivitas konstruksi, penyesuaian portofolio proyek, serta dampak dari berbagai faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi kinerja keuangan. Dalam kondisi tersebut, Perseroan tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha melalui penguatan fundamental operasional, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengelolaan risiko yang lebih disiplin.

Dewan Komisaris memandang bahwa dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi dan penataan kembali strategi bisnis. Kami menilai bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah strategis dalam merespons kondisi tersebut, termasuk melalui penguatan manajemen risiko, optimalisasi portofolio proyek, serta peningkatan efisiensi operasional.

Sejalan dengan peringatan hari jadi Perseroan, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada upaya penguatan fondasi bisnis guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Sinergi yang berkesinambungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan serta menjaga stabilitas operasional Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif memantau implementasi strategi Perseroan, mengevaluasi kinerja Direksi, serta memberikan arahan dan rekomendasi yang konstruktif. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, tren industri konstruksi, serta kebijakan pemerintah yang relevan, guna memastikan Perseroan tetap berada pada jalur yang *prudent* dan adaptif.

First, we extend our gratitude to Almighty God for His blessings and grace, which have enabled PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("WEGE" or "the Company") to carry out its business activities throughout 2025 amid increasingly complex industry dynamics and challenges.

The year 2025 was a period of significant pressure for the Company, marked by a slowdown in construction activities, adjustments to the project portfolio, and the impact of various external and internal factors affecting financial performance. Under these conditions, the Company continued striving to maintain business continuity through strengthening operational fundamentals, enhancing governance quality, and implementing more disciplined risk management.

Board of Commissioners views the dynamics throughout 2025 as an important momentum for the Company to consolidate and realign its business strategy. We assess that the Board of Directors has taken strategic steps in responding to these conditions, including strengthening risk management, optimizing the project portfolio, and improving operational efficiency.

In line with the Company's anniversary, Board of Commissioners places special attention on strengthening business fundamentals to ensure long-term sustainability. Continuous synergy between Board of Commissioners, Board of Directors, and all stakeholders is the key to addressing challenges and maintaining the Company's operational stability.

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners actively monitors the implementation of the Company's strategy, evaluates the performance of Board of Directors, and provides constructive direction and recommendations. Supervision is conducted by considering economic developments, construction industry trends, and relevant government policies to ensure the Company remains prudent and adaptive.

Di tengah dinamika kinerja tahun 2025, Dewan Komisaris terus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk memastikan bahwa Perseroan tetap berada pada jalur yang tepat dalam menjaga kinerja, tata kelola, dan keberlanjutan jangka panjang

Amidst the dynamic performance in 2025, the Board of Commissioners continues to effectively carry out its oversight function to ensure that the Company remains on the right path in maintaining performance, governance, and long-term sustainability



Dewan Komisaris juga menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris senantiasa berpegang pada prinsip independensi dan profesionalisme, serta berpedoman pada *Board Manual*, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk Tahun Buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Laporan ini mencakup penilaian terhadap kinerja Direksi, evaluasi atas efektivitas komite-komite di bawah Dewan Komisaris, pandangan terhadap prospek usaha Perseroan, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

PANDANGAN ATAS LINGKUNGAN EKONOMI DAN BISNIS

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih dibayangi oleh ketidakpastian yang cukup tinggi. Ketegangan geopolitik yang berlanjut, fragmentasi perdagangan global, serta dinamika inflasi dan suku bunga di berbagai negara menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Selain itu, perubahan arah kebijakan ekonomi di sejumlah negara pasca siklus pemilihan umum global turut memberikan dampak terhadap arus investasi serta aktivitas ekonomi lintas negara.

Kinerja ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung moderat dan tidak merata di berbagai kawasan. Negara-negara maju relatif masih menunjukkan ketahanan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelum pandemi. Sementara itu, negara-negara berkembang, termasuk kawasan Asia, menghadapi tantangan berupa perlambatan permintaan global, volatilitas pasar keuangan, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil, didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang terjaga. Namun demikian, proses transisi pemerintahan nasional pasca Pemilihan Umum 2024 serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan turut memengaruhi ritme pertumbuhan di beberapa sektor, termasuk sektor konstruksi dan infrastruktur.

Dewan Komisaris memandang bahwa sepanjang tahun 2025, sektor konstruksi nasional menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan prioritas belanja pemerintah, optimalisasi anggaran, serta meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor karya. Kondisi tersebut berdampak pada dinamika pasar proyek, tingkat persaingan, serta pola eksekusi proyek di industri konstruksi.

Selain itu, tekanan eksternal berupa volatilitas nilai tukar dan peningkatan biaya konstruksi turut memengaruhi kinerja pelaku usaha di sektor ini, termasuk Perseroan. Keterbatasan likuiditas di sektor konstruksi juga menjadi salah satu tantangan utama yang memerlukan pengelolaan yang lebih disiplin dan terukur.

Board of Commissioners also emphasizes the importance of implementing good corporate governance as a fundamental basis for maintaining business integrity and sustainability. In performing its duties, Board of Commissioners adheres to the principles of independence and professionalism, guided by the Board Manual, the Company's Articles of Association, Code of Corporate Governance, Financial Services Authority regulations, as well as laws and regulations in force.

On this occasion, on behalf of Board of Commissioners, please allow me to present the report on the implementation of supervisory and advisory functions to the Board of Directors for 2025 fiscal year as a form of accountability to shareholders and all stakeholders. This report includes an assessment of the Directors' performance, evaluation of the effectiveness of committees under Board of Commissioners, views on the Company's business outlook, and the implementation of good corporate governance.

VIEWS ON ECONOMIC AND BUSINESS ENVIRONMENT

Throughout 2025, the global economy remained overshadowed by high uncertainty. Ongoing geopolitical tensions, global trade fragmentation, and inflation and interest rate dynamics across countries affected global economic stability. Additionally, shifts in economic policy directions in several countries following global election cycles also impacted investment flows and cross-border economic activities.

Global economic performance in 2025 showed moderate and uneven growth across regions. Developed countries generally maintained resilience, albeit with slower growth compared to the pre-pandemic period. Meanwhile, developing countries, including those in Asia, faced challenges such as slowing global demand, financial market volatility, and adjustments in fiscal and monetary policies.

Amid these global dynamics, Indonesia's economy continues to show relatively stable performance, supported by sustained domestic consumption and investment. However, the transition of the national government following the 2024 General Election and adjustments in development policy directions affected growth rhythms in several sectors, including construction and infrastructure.

Board of Commissioners observes that throughout 2025, the national construction sector faced more complex challenges compared to the previous year. These were influenced by changes in government spending priorities, budget optimization, and increased prudence from the banking sector in channeling financing to construction companies. These conditions affected project market dynamics, competition levels, and project execution patterns within the industry.

In addition, external pressures such as exchange rate volatility and rising construction costs also affected industry players in this sector, including the Company. Liquidity constraints in the construction sector became one of the main challenges requiring more disciplined and measured management.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan berada dalam fase konsolidasi internal yang penting, dengan fokus pada penguatan fundamental operasional dan keuangan sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa Perseroan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga memandang bahwa Perseroan masih memiliki peluang untuk mempertahankan daya saing melalui diferensiasi bisnis, antara lain melalui pengembangan *modular construction* serta peningkatan efisiensi berbasis teknologi. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menciptakan nilai tambah serta meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang.

Meskipun tantangan jangka pendek masih cukup tinggi, prospek sektor infrastruktur nasional dalam jangka menengah dan panjang tetap menunjukkan potensi yang positif, sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menekankan pentingnya ketangkasan (*agility*), penguatan manajemen risiko, serta disiplin dalam eksekusi strategi sebagai faktor kunci dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA DIREKSI DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Pencapaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas upaya yang telah dilakukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis sepanjang tahun 2025 di tengah tekanan kinerja yang dihadapi Perseroan. Dalam kondisi yang penuh tantangan, Direksi telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlangsungan usaha serta merespons dinamika industri secara adaptif.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan upaya yang serius dalam merespons tantangan yang dihadapi, khususnya dalam menghadapi tekanan likuiditas dan dinamika industri konstruksi. Langkah-langkah yang diambil, seperti penguatan pengelolaan arus kas, pengetatan biaya, serta peningkatan kontrol terhadap pelaksanaan proyek, merupakan respons yang tepat terhadap kondisi yang dihadapi Perseroan.

Dewan Komisaris mencermati bahwa kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025 mengalami tekanan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian portofolio proyek, peningkatan beban non-operasional, serta dinamika pada investasi ventura bersama. Dalam hal ini, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap langkah-langkah strategis yang diambil Direksi guna memastikan respons yang tepat dan terukur.

In this context, Board of Commissioners believes the Company is in an important phase of internal consolidation, focusing on strengthening operational and financial fundamentals as a strategic step to ensure business continuity. These efforts are crucial to enable the Company to adapt to market changes while enhancing business resilience.

On the other hand, Board of Commissioners also sees opportunities for the Company to maintain competitiveness through business differentiation, including the development of modular construction and technology-based efficiency improvements. These initiatives are expected to drive added-value creation and improve future performance of the Company.

Although short-term challenges remain significant, the medium- and long-term prospects of the national infrastructure sector continue to show positive potential, in line with the needs of sustainable development and economic equality. In this regard, Board of Commissioners emphasizes the importance of agility, strengthened risk management, and disciplined strategy execution as key factors in navigating evolving dynamics.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE AND STRATEGY IMPLEMENTATION

Performance Achievement of Board of Directors and Its Assessment Basis

Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors for their efforts in formulating and implementing strategic measures throughout 2025 amid performance pressures faced by the Company. Under such challenging conditions, the Board of Directors has demonstrated a commitment to maintaining business continuity and responding adaptively to industry dynamics.

Board of Commissioners assesses that the Board of Directors have made serious efforts in addressing challenges, particularly in dealing with liquidity pressures and construction industry dynamics. The measures taken, such as strengthening cash flow management, tightening cost controls, and improving project execution oversight, were appropriate responses to the conditions faced by the Company.

Board of Commissioners also notes that the Company's financial performance in 2025 experienced significant pressure compared to the previous year. This decline was influenced by several factors, including project portfolio adjustments, increased non-operational expenses, and dynamics in joint venture investments. In this regard, Board of Commissioners actively supervised and evaluated strategic actions taken by the Board of Directors to ensure appropriate and measured responses.

Dari sisi operasional, Direksi telah melakukan berbagai upaya efisiensi, termasuk pengendalian Harga Pokok Pendapatan (HPP), optimalisasi pengelolaan arus kas (*cash flow*), serta peningkatan disiplin dalam pelaksanaan proyek. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan terhadap implementasi langkah-langkah tersebut agar tetap selaras dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) serta prinsip kehati-hatian (*prudential*).

From an operational perspective, the Board of Directors have carried out a number of efficiency measures, including controlling cost of revenue, optimizing cash flow management, and enhancing discipline in project execution. Board of Commissioners regularly monitors the implementation of these measures to ensure alignment with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and prudential principles.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan disiplin eksekusi, khususnya dalam pengelolaan risiko proyek dan pengambilan keputusan bisnis. Aspek ini menjadi area perhatian utama guna memastikan bahwa kinerja Perseroan dapat lebih berkelanjutan dan resilien ke depan.

Nevertheless, Board of Commissioners emphasizes the need to improve planning quality and execution discipline, particularly in managing project risks and business decision-making. This remains a key focus area in order to ensure more sustainable and resilient performance going forward.

Selain aspek keuangan, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap pengembangan *Human Capital* (HC) sebagai faktor kunci dalam menjaga daya saing Perseroan. Direksi didorong untuk terus meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, maupun penerapan praktik terbaik di industri konstruksi.

Beyond financial aspects, Board of Commissioners also pays attention to Human Capital development as a key factor in maintaining the Company's competitiveness. The Board of Directors is encouraged to continuously enhance workforce capabilities in terms of skills, knowledge, and adoption of best practices in the construction industry.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Dewan Komisaris menekankan pentingnya implementasi aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG), termasuk penguatan prinsip keberagaman (diversity) di lingkungan kerja. Perseroan terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan, termasuk peningkatan peran perempuan dalam berbagai lini operasional dan kepemimpinan.

As part of its sustainability commitment, Board of Commissioners highlights the importance of implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, including strengthening diversity principles in the workplace. The Company continues to promote an inclusive work environment by providing equal opportunities for all employees, including increasing the role of women across operational and leadership levels.

Dalam menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI), Dewan Komisaris mempertimbangkan berbagai aspek penilaian secara komprehensif, mencakup kinerja keuangan, efektivitas implementasi strategi, efisiensi operasional, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Seiring dengan dinamika kinerja Perseroan pada tahun 2025, Dewan Komisaris juga mendorong penyesuaian indikator kinerja agar lebih adaptif dan berorientasi pada perbaikan kinerja jangka menengah dan panjang.

In determining Key Performance Indicators (KPIs), Board of Commissioners considers comprehensive assessment aspects, including financial performance, strategy implementation effectiveness, operational efficiency, and stakeholder satisfaction. In line with the Company's performance dynamics in 2025, Board of Commissioners also encourages adjustments to performance indicators to be more adaptive and oriented toward medium- and long-term improvement.

Dewan Komisaris memandang bahwa langkah-langkah transformasi dan penyesuaian strategi yang telah dilakukan Perseroan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ke depan. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan arahan strategis guna memastikan bahwa setiap langkah perbaikan yang dilakukan Direksi dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan dampak positif terhadap pemulihan kinerja serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Board of Commissioners believes that the transformation measures and strategic adjustments undertaken by the Company have served as an important foundation for facing future challenges. Moving forward, Board of Commissioners will continue strengthening its supervisory function and providing strategic direction to ensure that all improvement initiatives taken by the Board of Directors are effective, measurable, and contribute positively to performance recovery and long-term value creation for shareholders and stakeholders.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Perseroan (*Board Manual*). Pengawasan yang dilakukan mencakup perumusan kebijakan strategis, penerapan strategi bisnis, hingga evaluasi atas implementasinya.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi strategis kepada Direksi dengan mempertimbangkan dinamika industri konstruksi serta perkembangan internal Perseroan yang diwarnai oleh tekanan kinerja. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris juga memperkuat intensitas pengawasan, khususnya terhadap aspek pengelolaan likuiditas, pengendalian risiko proyek, serta efektivitas implementasi strategi bisnis.

Tindakan pengawasan dilakukan melalui koordinasi yang intensif dan komunikasi yang aktif dengan Direksi, baik melalui mekanisme pelaporan maupun diskusi dalam forum rapat yang diselenggarakan secara berkala. Forum tersebut menjadi sarana utama bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi kinerja, memberikan arahan strategis, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil Direksi tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, dengan dukungan Sekretaris Dewan Komisaris. Peran dan tanggung jawab masing-masing komite telah diatur dalam Board Manual serta piagam komite terkait.

Sejalan dengan dinamika yang dihadapi Perseroan pada tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung fungsi pengawasan, khususnya dalam memperkuat pengendalian internal, manajemen risiko, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal secara berkala dengan tingkat kehadiran yang optimal, sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan. Setiap rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lainnya apabila Komisaris Utama berhalangan hadir.

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S STRATEGY AND PROVISION OF ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

Board of Commissioners has the primary role of supervising and providing advice to the Board of Directors regarding the management of the Company, as stipulated in the Company's Board Manual. The supervision carried out covers the formulation of strategic policies, implementation of business strategies, and evaluation of their execution.

Throughout 2025, Board of Commissioners actively provided direction, input, and strategic recommendations to the Board of Directors by considering the dynamics of the construction industry as well as the Company's internal developments, which were marked by performance pressures. In performing this function, Board of Commissioners also strengthened the intensity of its supervision, particularly in liquidity management, project risk control, and the effectiveness of business strategy implementation.

Supervisory actions were performed through intensive coordination and active communication with the Board of Directors, both through reporting mechanisms and discussions in regularly held meeting forums. These forums served as the primary means for Board of Commissioners to evaluate performance, provide strategic direction, and ensure that all policies adopted by the Board of Directors remained aligned with prudential principles and good corporate governance.

In effectively carrying out its supervisory function, Board of Commissioners is supported by its subordinate committees, namely the Audit Committee, the Nomination, Remuneration, and GCG Committee, and the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, with support from the Corporate Secretary of Board of Commissioners. The roles and responsibilities of each committee are regulated in the Board Manual and their respective charters.

In line with the dynamics faced by the Company in 2025, Board of Commissioners considers that the committees have effectively carried out their roles in supporting the supervisory function, particularly in strengthening internal control, risk management, and the implementation of good corporate governance.

Throughout 2025, Board of Commissioners held periodic internal meetings with optimal attendance levels, in accordance with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as the Company's Articles of Association. Each meeting was chaired by the President Commissioner or by another member of Board of Commissioners in the event that the President Commissioner was unable to attend.

Pelaksanaan tugas Komisaris Utama Perseroan yang dirangkap oleh Komisaris Independen tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan fokus pada penguatan fungsi pengawasan, pemberian arahan strategis, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direksi sebagai forum untuk membahas laporan kinerja, mengevaluasi implementasi strategi, serta mengidentifikasi berbagai risiko dan peluang usaha yang dihadapi Perseroan. Rapat gabungan ini menjadi sarana penting dalam menjaga keselarasan antara fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Intensitas pertemuan dan komunikasi yang aktif antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi faktor penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Dewan Komisaris, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya, senantiasa memberikan pandangan dan masukan yang konstruktif guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil Direksi dapat mendukung perbaikan kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Berdasarkan hasil pengawasan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi strategi Perseroan telah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus pada upaya perbaikan kinerja dan penguatan fundamental bisnis.

MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT OLEH DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi melalui berbagai forum formal, antara lain rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, serta rapat komite di bawah Dewan Komisaris.

Dalam forum-forum tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan strategis kepada Direksi, khususnya dalam merespons dinamika bisnis dan tekanan kinerja yang dihadapi Perseroan, antara lain meliputi:

1. Penguatan manajemen risiko, terutama dalam pengelolaan risiko proyek dan investasi;
2. Peningkatan disiplin dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengendalian arus kas dan efisiensi biaya;
3. Evaluasi dan penyesuaian portofolio proyek secara selektif dan terukur; serta
4. Penguatan arah transformasi bisnis Perseroan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.
5. Frekuensi dan intensitas komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi juga ditingkatkan sebagai respons terhadap dinamika yang dihadapi Perseroan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur.

The duties of the Company's President Commissioner, concurrently held by an Independent Commissioner, were carried out in accordance with applicable regulations, with a focus on strengthening the supervisory function, providing strategic direction, and ensuring accountability and transparency in the management of the Company.

In addition, Board of Commissioners also regularly held coordination meetings with the Board of Directors as a forum to discuss performance reports, evaluate strategy implementation, and identify various risks and business opportunities faced by the Company. These joint meetings serve as an important means of maintaining alignment between supervisory and management functions.

The intensity of meetings and active communication between Board of Commissioners and Board of Directors is an important factor in supporting strategic decision-making processes. Board of Commissioners, with the experience and competencies of its members, continuously provides constructive views and input to ensure that the actions taken by the Board of Directors support performance improvement and business sustainability.

Based on the results of supervision throughout 2025, Board of Commissioners assesses that the implementation of the Company's strategy has been carried out by upholding prudential principles and compliance with applicable laws and regulations, with a focus on improving performance and strengthening business fundamentals.

MECHANISM FOR PROVIDING ADVICE BY BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, Board of Commissioners actively carried out its supervisory and advisory functions to the Board of Directors through various formal forums, including Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, and committee meetings under the Board of Commissioners.

In these forums, Board of Commissioners provided strategic direction to the Board of Directors, particularly in responding to business dynamics and performance pressures faced by the Company, including:

1. Strengthening risk management, particularly in managing project and investment risks;
2. Enhancing discipline in financial management, including cash flow control and cost efficiency;
3. Evaluating and adjusting the project portfolio selectively and in a measured manner; and
4. Strengthening the direction of the Company's business transformation to improve competitiveness and sustainability.
5. The frequency and intensity of communication between Board of Commissioners and Board of Directors were also increased in response to the Company's dynamics, enabling decision-making processes to be executed more quickly, accurately, and in a measured manner.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI DAN DASAR PERTIMBANGANNYA

Momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif terjaga memberikan dasar bagi prospek sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi tetap menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi sebesar sekitar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang.

Namun demikian, Dewan Komisaris mencermati bahwa prospek industri konstruksi pada tahun 2025 dihadapkan pada sejumlah tantangan. Diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mendorong dilakukannya penyesuaian (*refocusing*) anggaran pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi alokasi belanja proyek serta memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi dalam jangka pendek.

Di sisi lain, dinamika industri yang semakin kompleks, termasuk peningkatan persaingan, perkembangan teknologi konstruksi, serta tantangan dalam ketersediaan sumber daya, menuntut pelaku usaha untuk lebih adaptif dan selektif dalam menjalankan strategi bisnisnya. Aspek tata kelola regulasi dan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang perlu diantisipasi guna menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Dalam merespons kondisi tersebut, Perseroan terus berupaya mengoptimalkan peluang usaha melalui berbagai strategi, antara lain penguatan pemasaran dengan fokus pada pasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah, serta sektor swasta yang lebih selektif. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan skema proyek berbasis investasi seperti *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan *Build-Lease-Transfer* (BLT) pada *captive market*.

Perseroan juga melanjutkan inisiatif transformasi melalui pengembangan inovasi, termasuk teknologi konstruksi modular (*Volumetric Modular*), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan *Human Capital*. Dari sisi operasional, strategi yang diterapkan difokuskan pada peningkatan profitabilitas, penguatan pengelolaan arus kas, serta penajaman segmentasi pelanggan. Sementara itu, dari sisi keuangan, Perseroan menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam pemilihan proyek dan pelanggan dengan mempertimbangkan kecukupan pendanaan serta keberlanjutan arus kas.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang dirumuskan Direksi telah disusun secara sistematis dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi pasar, kompetensi Perseroan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, pengembangan teknologi modular dipandang sebagai salah satu keunggulan kompetitif Perseroan dalam meningkatkan efisiensi proyek, baik dari sisi waktu maupun biaya.

VIEWS ON THE BUSINESS OUTLOOK PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF CONSIDERATION

The relatively stable momentum of national economic growth has laid a foundation for the prospects of construction and infrastructure sectors in Indonesia. In recent years, the construction sector has remained one of the main contributors to the national Gross Domestic Product (GDP), contributing approximately 10%. This indicates that the construction sector plays a strategic role in supporting national development, both within the framework of medium-term and long-term development plans.

However, Board of Commissioners notes that the prospects of construction industry in 2025 face several challenges. The issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 concerning Spending Efficiency in the implementation of the 2025 State and Regional Budgets has led to adjustments (refocusing) of infrastructure development budgets. This policy has the potential to affect project spending allocations and slow the growth of construction sector in the short term.

On the other hand, increasingly complex industry dynamics, including intensified competition, developments in construction technology, and challenges in resource availability, require business players to be more adaptive and selective in executing their business strategies. Regulatory and institutional governance aspects also remain important factors to anticipate in maintaining the Company's operational continuity.

In responding to these conditions, the Company continues to optimize business opportunities through various strategies, including strengthening marketing efforts focused on State-Owned Enterprises (SOEs), government, and more selective private sector markets. In addition, the Company is developing investment-based project schemes such as Build-Operate-Transfer (BOT) and Build-Lease-Transfer (BLT) within captive markets.

The Company also continues its transformation initiatives through innovation development, including modular construction technology (Volumetric Modular), as well as enhancing the quality of human resources through various Human Capital development programs. From an operational perspective, strategies are focused on improving profitability, strengthening cash flow management, and refining customer segmentation. Meanwhile, from a financial perspective, the Company adopts more selective policies in choosing projects and customers by considering funding adequacy and cash flow sustainability.

Board of Commissioners assesses that the strategies formulated by the Board of Directors have been systematically prepared and take into account a variety of aspects, including market conditions, the Company's competencies, and the optimization of available resources. In this context, modular technology development is viewed as one of the Company's competitive advantages in improving project efficiency, both in terms of time and cost.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memandang bahwa upaya transformasi bisnis yang dilakukan Perseroan, termasuk penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), merupakan fondasi penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

In addition, Board of Commissioners also views that the Company's business transformation efforts, including strengthening good corporate governance and implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles, serve as an important foundation for creating long-term value for shareholders and stakeholders.

Sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan, Perseroan mencatatkan perolehan proyek baru sepanjang tahun 2025 sebesar 11 proyek baru dengan total nilai sebesar Rp1,7triliun. Dengan tambahan kontrak tersebut, total nilai kontrak dihadapi dari seluruh proyek yang dikelola Perseroan mencapai Rp5,76 triliun.

In line with the established strategy, the Company recorded the acquisition of 11 new projects throughout 2025, with a total value of Rp1,7 trillion. With these additional contracts, total order book of all projects managed by the Company reached Rp5.76 trillion.

Melalui evaluasi terhadap proyeksi ekonomi global, nasional, serta dinamika industri, Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang dirumuskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 telah mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan peluang secara memadai. Namun demikian, Dewan Komisaris menekankan pentingnya implementasi strategi secara disiplin, adaptif, dan terukur guna memastikan perbaikan kinerja Perseroan ke depan.

Through evaluation of global and national economic projections as well as industry dynamics, Board of Commissioners assesses that the strategy outlined in the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) has adequately considered various risks and opportunities. However, the Board emphasizes the importance of disciplined, adaptive, and measurable implementation of strategies to ensure future performance improvement.

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 masih menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama terkait kondisi likuiditas industri, tingkat persaingan, serta ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa strategi yang disusun oleh Direksi telah mengarah pada perbaikan fundamental Perseroan, khususnya melalui:

1. Fokus pada proyek dengan profil risiko yang lebih sehat;
2. Penguatan efisiensi operasional; serta
3. Pengembangan bisnis modular sebagai keunggulan kompetitif.

Board of Commissioners views that the Company's business prospects in 2026 still face significant challenges, particularly related to industry liquidity conditions, competition levels, and global economic uncertainty. Nevertheless, Board of Commissioners believes that the strategies prepared by the Board of Directors are directed toward improving the Company's fundamentals, particularly through:

1. Focusing on projects with healthier risk profiles;
2. Strengthening operational efficiency; and
3. Developing modular business as a competitive advantage.

Dengan implementasi strategi yang konsisten dan disiplin, Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan memiliki peluang untuk melakukan perbaikan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan.

With consistent and disciplined strategy implementation, Board of Commissioners has the confident that the Company has the opportunity to gradually and sustainably improve its performance.

Ke depan, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di industri konstruksi, khususnya melalui pengembangan inovasi modular dan peningkatan efisiensi operasional, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Going forward, Board of Commissioners believes that the Company has the opportunity to strengthen its position in the construction industry, predominantly through modular innovation development and improved operational efficiency, while continuing to uphold prudential principles and good corporate governance.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Board of Commissioners' Views on the Implementation of Corporate Governance

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari budaya kerja Perseroan. Komitmen ini terus diperkuat guna mendukung keberlangsungan usaha serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company conducts its business activities based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). Consistent and sustainable implementation of GCG is not only intended to comply with regulatory requirements but has also become an integral part of the Company's corporate culture. This commitment continues to be strengthened to support business sustainability and create added value for all stakeholders.

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan GCG menjadi semakin penting, khususnya dalam menghadapi dinamika dan tekanan bisnis yang terjadi sepanjang tahun 2025. Dalam kondisi

Board of Commissioners views that the implementation of GCG is increasingly important, particularly in facing the business dynamics and pressures that occurred throughout 2025. Under such conditions,

tersebut, tata kelola yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi.

Dewan Komisaris mencatat bahwa Perseroan secara konsisten melakukan penguatan implementasi GCG, yang antara lain tercermin dari hasil penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Berdasarkan asesmen terakhir, hasil pencapaian Total *Corporate Governance Score* Perusahaan untuk penilaian tingkat 2 berdasarkan ASEAN Scorecard 2025 adalah sebesar 8 poin. Skor tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan pencapaian skor rata-rata untuk penilaian tingkat 2 pada Perusahaan publik (Tbk) atau emiten yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*) yang nilainya sebesar 4,36.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif memastikan bahwa Direksi dan seluruh organ Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Pengawasan dilakukan tidak hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada efektivitas implementasi tata kelola dalam mendukung pencapaian kinerja dan pengelolaan risiko.

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Perseroan sepanjang tahun 2025 telah berjalan secara memadai dan terus menunjukkan perbaikan. Perseroan telah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan implementasi manajemen risiko, serta mengoptimalkan fungsi *Whistleblowing System* sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi. Dewan Komisaris juga terlibat aktif dalam pengawasan penerapan GCG melalui fungsi komite-komite, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga, khususnya dalam kondisi Perseroan yang menghadapi tekanan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, Perseroan telah melakukan perubahan visi dan misi perusahaan pada akhir tahun 2024. Visi baru, yaitu "Menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan", dipandang oleh Dewan Komisaris sebagai langkah strategis yang relevan dalam menjawab tantangan industri serta memperkuat arah pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Selain itu, pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi di bawah Dewan Komisaris pada tahun 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam pengelolaan risiko dan integrasi tata kelola dengan entitas induk. Dewan Komisaris menilai bahwa keberadaan komite ini memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi komitmen Perseroan dalam mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam strategi bisnis. Implementasi ESG diyakini dapat memperkuat ketahanan bisnis serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

strong governance serves as the main foundation for maintaining accountability, transparency, and effective decision-making across all organizational levels.

Board of Commissioners notes that the Company has consistently strengthened the implementation of GCG, as reflected, among others, in the results of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) assessment conducted by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Based on the latest assessment, the Company's Total Corporate Governance Score for Level 2 assessment under the 2025 ASEAN Scorecard is 8 points. This score is higher compared to the average Level 2 score for public companies (Tbk) or issuers included in the top 100 market capitalization (Big Cap), which stands at 4.36.

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners actively ensures that the Board of Directors and all corporate organs have performed their duties and responsibilities in accordance with applicable GCG principles. Supervision is conducted not only in terms of compliance but also in terms of the effectiveness of governance implementation in supporting performance achievement and risk management.

Board of Commissioners assesses that the implementation of Good Corporate Governance principles within the Company throughout 2025 has been adequate and continues to show improvement. The Company has strengthened its internal control system, enhanced the implementation of risk management, and optimized the Whistleblowing System function as part of efforts to maintain integrity and transparency. Board of Commissioners is also actively involved in overseeing GCG implementation through its committees and ensures that accountability and transparency principles are upheld, especially under conditions where the Company is facing pressures.

As part of the efforts to strengthen governance, the Company revised its vision and mission at the end of 2024. The new vision, "To become a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem," is viewed by Board of Commissioners as a relevant strategic step in addressing industry challenges and strengthening the Company's long-term growth direction.

Furthermore, the establishment of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee under Board of Commissioners in 2024 represents an important step in strengthening the supervisory function, particularly in risk management and governance integration with the parent entity. Board of Commissioners considers that the existence of this committee adds value in improving the quality of supervision and strategic decision-making.

Board of Commissioners also appreciates the Company's commitment to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its business strategy. ESG implementation is believed to strengthen business resilience and support sustainable long-term value creation.

Dalam upaya penyempurnaan praktik GCG, Perseroan mengacu pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berdasarkan acuan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi GCG di lingkungan Perseroan telah berjalan secara efektif dan terus mengalami peningkatan.

In improving GCG practices, the Company refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and the Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG). Based on these references, Board of Commissioners assesses that GCG implementation within the Company has been effective and continues to improve.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang adaptif, transparan, dan berintegritas, serta budaya kepatuhan yang kuat sebagai fondasi utama dalam mendukung perbaikan kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Going forward, Board of Commissioners is committed to continuously encouraging the strengthening of adaptive, transparent, and integrity-driven corporate governance, as well as a strong compliance culture as the primary foundation in supporting performance improvement and business sustainability.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND RISK MANAGEMENT

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan secara berkesinambungan di seluruh lini Perseroan. Dewan Komisaris memahami bahwa pengendalian internal dan pengelolaan risiko memiliki peran krusial dalam memastikan kelangsungan usaha serta efektivitas operasional Perseroan, khususnya di tengah dinamika dan tekanan bisnis yang dihadapi sepanjang tahun 2025.

The internal control system is a supervisory mechanism that is applied continuously across all levels of the Company. Board of Commissioners understands that internal control and risk management play a crucial role in ensuring business continuity and operational effectiveness, particularly amid the dynamics and pressures faced throughout 2025.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dirancang dan diimplementasikan oleh Direksi. Pengawasan tersebut dilakukan antara lain melalui Komite Audit serta Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, yang berperan dalam menelaah berbagai eksposur risiko, termasuk risiko operasional, keuangan, serta pengendalian dan pengamanan teknologi informasi.

In carrying out its supervisory function, Board of Commissioners actively monitors the effectiveness of the Internal Control System (ICS) designed and implemented by the Board of Directors. Such supervision is conducted, among others, through the Audit Committee and the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, which review various risk exposures, including operational, financial, and information technology control and security risks.

Perseroan juga telah membangun sistem pengendalian internal yang memadai melalui fungsi audit internal, yang berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta menjaga keamanan aset dan kepentingan Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa fungsi ini berjalan secara independen dan efektif dalam mendukung proses pengawasan.

The Company has also established an adequate internal control system through its internal audit function, which ensures compliance with applicable policies and procedures and safeguards the Company's assets and interests. Board of Commissioners assesses that this function operates independently and effectively in supporting the supervisory process.

Sejalan dengan kondisi Perseroan pada tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap penguatan pengendalian internal, terutama dalam aspek pengelolaan proyek, pengendalian biaya, serta pengelolaan arus kas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta mampu memitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja Perseroan.

In line with the Company's conditions in 2025, Board of Commissioners places special attention on strengthening internal controls, particularly in project management, cost control, and cash flow management. This is intended to ensure that all operational activities are carried out in accordance with prudential principles and are capable of mitigating risks that may affect the Company's performance.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal Perseroan secara umum telah berjalan dengan memadai dan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan usaha. Namun demikian, Dewan Komisaris mendorong agar penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian internal terus dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan responsivitas terhadap dinamika risiko yang berkembang.

Based on periodic evaluations, Board of Commissioners assesses that the Company's internal control system has generally been adequate and capable of supporting business operations. However, Board of Commissioners encourages continuous refinement of internal control policies and procedures to enhance effectiveness and responsiveness to evolving dynamics of risks.

Dalam aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris turut berperan aktif dalam mengawasi implementasi manajemen risiko yang dijalankan oleh Direksi. Melalui Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris mengevaluasi kecukupan sistem manajemen risiko, serta memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko telah dilakukan secara komprehensif dan tepat waktu.

Perseroan telah mengadopsi pendekatan *Three Lines Model* yang mencakup lini operasional, fungsi manajemen risiko, serta audit internal, sebagai kerangka dalam mengelola risiko secara terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar fungsi, memitigasi potensi risiko secara lebih efektif, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan risiko.

Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi manajemen risiko Perseroan telah berjalan secara memadai dan terus mengalami penguatan, serta mendukung upaya Perseroan dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha. Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), salah satunya melalui implementasi *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini dirancang untuk menyediakan sarana pelaporan yang aman, mudah diakses, dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Dewan Komisaris memandang bahwa keberadaan WBS memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Dalam kondisi bisnis yang dinamis dan penuh tantangan seperti tahun 2025, penguatan sistem pelaporan pelanggaran menjadi semakin penting sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memitigasi potensi risiko *fraud*.

Perseroan telah mengembangkan kanal WBS berbasis digital yang terintegrasi untuk memfasilitasi pelaporan berbagai dugaan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan gratifikasi dan tindakan fraud lainnya. Pengelolaan WBS dilakukan secara terkoordinasi oleh Direksi dengan pengawasan dari Dewan Komisaris, serta didukung oleh fungsi kepatuhan dan tata kelola perusahaan guna memastikan proses pelaporan dan penanganan berjalan secara objektif dan kredibel.

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasi WBS, termasuk memastikan bahwa setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan investigasi yang independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai WBS kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan.

In terms of risk management, Board of Commissioners also plays an active role in overseeing the implementation of risk management carried out by the Board of Directors. Through the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, Board of Commissioners evaluates the adequacy of risk management system and ensures that risk identification, measurement, monitoring, control, and reporting processes are carried out comprehensively and in a timely manner.

The Company has adopted the Three Lines Model, which includes operational lines, risk management functions, and internal audit, as a framework for integrated risk management. This approach is expected to strengthen coordination among functions, mitigate potential risks more effectively, and prevent conflicts of interest in risk management.

Board of Commissioners is of the opinion that the Company's risk management has been implemented adequately and continues to strengthen, supporting the efforts to maintain operational stability and business sustainability. Going forward, Board of Commissioners will continue to encourage improvements in risk management quality to be more adaptive, integrated, and based on prudential principles.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

The Company is committed to strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG), one of which is through the Whistleblowing System (WBS). This system is designed to provide a secure, accessible, and reliable reporting channel for all stakeholders to report the occurrence of alleged violations within the Company.

Board of Commissioners views the WBS as having strategic role in fostering a work culture that is characterized by integrity, transparency, and accountability. In dynamic and challenging business conditions such as in 2025, strengthening the violation reporting system becomes increasingly important as part of the efforts to maintain stakeholder trust and mitigate potential fraud risks.

The Company has developed an integrated digital-based WBS channel to facilitate reporting of various alleged violations, including those related to gratuities and other fraudulent activities. The management of WBS is coordinated by the Board of Directors under the supervision of Board of Commissioners and supported by compliance and corporate governance functions to ensure that reporting and handling processes are objective and credible.

Board of Commissioners actively monitors the effectiveness of WBS implementation, including ensuring that every report received is followed up through independent verification and investigation processes in accordance with applicable regulations. Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to continuously improve the dissemination and understanding of the WBS among all employees and stakeholders.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan secara memadai dan efektif dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memperkuat sistem tata kelola perusahaan yang transparan dan berintegritas.

Ke depan, Dewan Komisaris mendorong penguatan implementasi WBS yang lebih adaptif, termasuk peningkatan kualitas pelaporan, perlindungan terhadap pelapor, serta integrasi dengan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, guna memastikan keberlanjutan praktik tata kelola yang baik di lingkungan Perseroan.

Overall, Board of Commissioners assesses that the implementation of WBS within the Company has been adequate and effective in supporting the creation of a work environment that is free from corruption, collusion, and nepotism, as well as strengthening a transparent and integrity-driven corporate governance system.

Going forward, Board of Commissioners encourages further strengthening of WBS implementation in a more adaptive manner, including improving reporting quality, protecting whistleblowers, and integrating the system with risk management and internal control systems to ensure the sustainability of good governance practices within the Company.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya Perseroan, Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung yang meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Keberadaan komite-komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek operasional Perseroan.

Setiap komite memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam pedoman kerja masing-masing, serta didukung oleh anggota yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidangnya. Komite-komite tersebut berperan aktif dalam memberikan telaah, evaluasi, serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait berbagai aspek strategis, operasional, dan tata kelola Perseroan.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite di bawahnya guna memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam menghadapi dinamika dan tekanan kinerja yang terjadi sepanjang tahun 2025. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kualitas rekomendasi yang diberikan, kontribusi terhadap penguatan tata kelola, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan strategis.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terkait efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan 30 (tiga puluh) kali rapat dengan agenda utama mencakup evaluasi kinerja keuangan Perseroan serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal.

Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi dan remunerasi, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG secara efektif dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, komite ini telah menyelenggarakan 23(dua puluh tiga) kali rapat yang membahas antara lain evaluasi kebijakan nominasi dan remunerasi, implementasi GCG, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory function over the Company's operations, Board of Commissioners is supported by supporting organs consisting of Corporate Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination, Remuneration, and GCG Committee, as well as Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The existence of these committees aims to enhance the effectiveness of supervision and ensure the implementation of good corporate governance principles across all aspects of the Company's operations.

Each committee has roles and responsibilities defined in their respective charters and is supported by members with competencies and expertise relevant to their fields. These committees actively provide reviews, evaluations, and recommendations to Board of Commissioners on various strategic, operational, and governance aspects of the Company.

Board of Commissioners periodically evaluates the performance of its committees to ensure the effectiveness of the supervisory function, particularly in addressing the dynamics and performance pressures experienced throughout 2025. The evaluation considers the quality of recommendations provided, contributions to governance strengthening, and support for strategic decision-making.

The Audit Committee is tasked with assisting Board of Commissioners in carrying out its supervisory function, particularly regarding the effectiveness of internal control systems, the quality of financial reporting, and the implementation of internal and external audits. Throughout 2025, the Audit Committee held 30 (thirty) meetings, with main agendas including evaluation of the Company's financial performance and the effectiveness of Internal Control System.

The Nomination, Remuneration, and GCG Committee is tasked with assisting Board of Commissioners in providing recommendations regarding nomination and remuneration policies, as well as ensuring the effective and sustainable implementation of GCG principles. Throughout 2025, this committee held 23 (twenty-three) meetings, discussing, among others, evaluation of nomination and remuneration policies, GCG implementation, and compliance with applicable regulations.

Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2024. Komite ini berperan dalam memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan tata kelola telah berjalan secara memadai dan selaras dengan kebijakan entitas induk. Sepanjang tahun 2025, komite ini telah melaksanakan koordinasi dan rapat bersama entitas dalam grup guna memperkuat sinergi serta konsistensi penerapan tata kelola.

In order to strengthen oversight of risk management and integrated governance, the Company established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024. This committee plays a role in ensuring that the implementation of risk management and governance is adequate and aligned with the policies of the parent entity. Throughout 2025, this committee conducted coordination and meetings with entities within the group to strengthen synergy and consistency in governance implementation.

Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris turut berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, khususnya dalam aspek administrasi, koordinasi, serta penyediaan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.

In addition, the Corporate Secretary of Board of Commissioners plays a role in supporting smooth execution of the Board of Commissioners' duties, particularly in administrative aspects, coordination, and the provision of information required for decision-making and supervisory processes.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara memadai serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung efektivitas pengawasan, penguatan tata kelola, serta pengelolaan risiko Perseroan.

Based on the evaluation results, Board of Commissioners assesses that all its supporting committees have performed their functions and responsibilities adequately and have made significant contributions in supporting the effectiveness of supervision, strengthening governance, and managing the Company's risks.

Ke depan, Dewan Komisaris akan terus mendorong peningkatan efektivitas peran komite-komite tersebut, khususnya dalam memberikan rekomendasi yang lebih strategis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika bisnis, guna mendukung perbaikan kinerja dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Going forward, Board of Commissioners will continue to encourage improvements in the effectiveness of these committees, particularly in providing recommendations that are more strategic, adaptive, and responsive to business dynamics, in order to support performance improvement and the sustainability of the Company's business.

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS

Pada Tahun Buku 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Struktur dan jumlah anggota Dewan Komisaris tetap sama dengan periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris selama tahun berjalan.

In the 2025 fiscal year, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. The structure and number of Board of Commissioners members remained the same as in the previous period, with no additions or dismissals of members during the year.

Namun demikian, Perseroan melaksanakan pengangkatan kembali terhadap Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama untuk periode kedua, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Pengangkatan kembali tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan dan untuk menjaga stabilitas fungsi pengawasan di tingkat Dewan Komisaris.

However, the Company reappointed Joseph Prajogo as an Independent Commissioner as well as Acting President Commissioner for a second term, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025. This reappointment was carried out to ensure leadership continuity and maintain the stability of the supervisory function at the Board of Commissioners level.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 tetap berjumlah empat (4) orang, yang terdiri dari dua (2) Komisaris Independen, dengan salah satunya merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, serta dua (2) Komisaris.

Accordingly, as of December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners remained at 4 (four) members, consisting of 2 (two) Independent Commissioners, one of whom concurrently serves as Acting President Commissioner, and 2 (two) Commissioners.

Rincian komposisi dan dasar pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada tabel berikut:

Details regarding the composition and basis of appointment of each member of Board of Commissioners are presented in the following table:

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris
Composition and Basis of Appointment of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	21 Mei 2025 - RUPST 2030 May 21, 2025 - 2030 AGMS	Periode – 2 2nd period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode – 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode – 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 Februari 2024 - RUPST 2029 February 29, 2024 - 2029 AGMS	Periode – 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024, confirmed in Deed No. 6 dated February 29, 2024.

Kompetensi, pengalaman, serta latar belakang pendidikan formal anggota Dewan Komisaris yang saling melengkapi menjadi kekuatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, serta memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional, prudent, dan selaras dengan visi dan misi Perseroan.

The competencies, experience, and formal educational backgrounds of Board of Commissioners members, which complement one another, constitute a key strength in carrying out their supervisory and advisory functions to the Board of Directors. Board of Commissioners remained committed to performing its oversight role optimally and ensuring that the Company is managed in a professional, prudent manner and in alignment with its vision and mission.

PENUTUP

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada para Pemegang Saham atas dukungan, kepercayaan, serta arahan yang konstruktif kepada Perseroan sepanjang tahun 2025.

Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas upaya dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2025, serta dalam menjaga keberlangsungan usaha melalui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan.

CLOSING REMARKS

On this occasion, Board of Commissioners would like to express an appreciation to the Shareholders for their support, trust, and constructive guidance to the Company throughout 2025.

Board of Commissioners would also like to convey an appreciation to the Board of Directors for their efforts and commitment in addressing numerous challenges faced by the Company during 2025, as well as in maintaining business continuity through the strategic measures undertaken.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan, khususnya dalam menghadapi dinamika industri konstruksi yang penuh tantangan.

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi Perseroan dalam melakukan konsolidasi dan penguatan fundamental bisnis. Pengalaman yang diperoleh pada tahun ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperbaiki kinerja serta meningkatkan daya saing Perseroan di masa mendatang.

Ke depan, Dewan Komisaris berharap agar seluruh insan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dapat terus memperkuat sinergi, meningkatkan disiplin eksekusi, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan komitmen tersebut, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan memiliki peluang untuk mencapai perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Gratitude is also extended to all levels of management and employees of the Company for their dedication, hard work, and contributions, particularly in navigating the challenging dynamics of the construction industry.

Board of Commissioners views year 2025 as an important period for the Company in consolidating and strengthening its business fundamentals. The experience gained during the year is expected to serve as a foundation for improving performance and enhancing the Company's competitiveness in the future.

Going forward, Board of Commissioners expected all PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk People will continue to strengthen synergy, improve execution discipline, and uphold integrity and professionalism in conducting business activities. With this commitment, Board of Commissioners believes that the Company has the opportunity to achieve sustainable performance improvement and create long-term value for all stakeholders.

Jakarta, 20 April 2026
Jakarta, April 20, 2026

Atas Nama Dewan Komisaris,
On Behalf of Board of Commissioners,



Joseph Prajogo
Komisaris Independen sekaligus
Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and
Acting President Commissioner



Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Laporan Direksi
Board of Directors Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,
Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2025 di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi industri konstruksi.

Let us extend our highest gratitude and praise to Almighty God for His blessings and grace, which have enabled the Company to carry out its business activities throughout 2025 amid the dynamics and challenges faced by the construction industry.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh tantangan bagi Perseroan, ditandai dengan penurunan aktivitas proyek, tekanan likuiditas di industri, serta penyesuaian strategi bisnis yang berdampak pada kinerja keuangan. Dalam kondisi tersebut, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan usaha melalui penguatan fundamental operasional, peningkatan efisiensi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bisnis.

The year 2025 was a challenging period for the Company, marked by a decline in project activities, liquidity pressures within the industry, and adjustments in business strategy that impacted financial performance. Under these conditions, the Company remains committed to maintaining business continuity through strengthening operational fundamentals, improving efficiency, and applying prudential principles in business management.

Pada kesempatan ini, saya mewakili Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus wujud komitmen Perseroan terhadap prinsip keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh informasi yang disajikan dalam laporan ini, khususnya yang berkaitan dengan kinerja operasional dan keuangan Perseroan, telah disusun secara transparan, akurat, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

On this occasion, I, on behalf of Board of Directors, present the Annual Report as a form of accountability as well as the Company's commitment to the principle of information transparency to shareholders, regulators, and all stakeholders. The entire information presented in this report, particularly those related to the Company's operational and financial performance, has been prepared transparently, accurately, and in accordance with applicable laws and regulations.

TINJAUAN LINGKUNGAN EKONOMI

ECONOMIC ENVIRONMENT OVERVIEW

Pentingnya Pengembangan Infrastruktur dalam Dinamika Sektor Konstruksi

Infrastruktur tetap menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda (*multiplier effect*), antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan konektivitas, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

The Importance of Infrastructure Development in the Dynamics of Construction Sector

Infrastructure remains one of the key pillars in driving national economic growth and enhancing Indonesia's global competitiveness. Infrastructure development generates a multiplier effect, among others job creation, improved connectivity, and the development of new economic growth centers.

Namun demikian, sepanjang tahun 2025, sektor konstruksi menghadapi dinamika yang lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah, termasuk refocusing anggaran infrastruktur, serta meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan dalam penyaluran pembiayaan, memberikan tekanan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi secara keseluruhan.

However, throughout 2025, the construction sector faced more complex dynamics compared to previous years. Adjustments in government fiscal policies, including the refocusing of infrastructure budgets, as well as increased prudence by the banking sector in extending financing, exerted pressure on the overall growth of the construction sector.

Penurunan pendapatan pada tahun 2025 menjadi momentum bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi dan transformasi, guna memperkuat daya saing serta memastikan pertumbuhan yang lebih berkualitas di masa mendatang

The decline in revenue in 2025 has become a momentum for the Company to consolidate and transform, in order to strengthen its competitiveness and ensure higher-quality growth in the future



Selain itu, faktor eksternal seperti volatilitas nilai tukar, peningkatan biaya material konstruksi, serta ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi kinerja industri. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas proyek, meningkatnya tingkat persaingan, serta pengetatan arus kas di industri konstruksi.

In addition, external factors such as exchange rate volatility, rising construction material costs, and global economic uncertainty also affected the performance of this industry. Such conditions resulted in declining project activity, intensified competition, and tighter cash flows within the construction sector.

Di sisi lain, tren urbanisasi dan pertumbuhan populasi tetap menjadi faktor pendorong permintaan jangka panjang terhadap pembangunan hunian, kawasan komersial, serta infrastruktur perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa prospek sektor konstruksi dalam jangka menengah dan panjang masih memiliki potensi yang positif, meskipun dalam jangka pendek menghadapi tekanan yang cukup signifikan.

On the other hand, urbanization trends and population growth continue to be the driving factors of long-term demand for residential, commercial, and urban infrastructure development. This indicates that the medium- and long-term prospects of the construction sector remain positive, despite significant short-term pressures.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaku industri konstruksi dituntut untuk lebih adaptif dan selektif dalam menjalankan strategi bisnis, termasuk dalam pemilihan proyek, pengelolaan risiko, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki.

In dealing with these conditions, construction industry players are required to be more adaptive and selective in implementing business strategies, including selecting projects, managing risks, and optimizing resources.

Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan yang Tepat

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap stabil dan resilien di tengah berbagai ketidakpastian global. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,11% (YoY), meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,03%. Kinerja ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Stable Growth Supported by Appropriate Policies

Throughout 2025, Indonesia's economy demonstrated stable and resilient performance amid global uncertainties. This is reflected in Gross Domestic Product (GDP) growth of 5.11% (YoY), an increase compared to 5.03% in 2024. This performance indicates that national economic stability has been maintained, supported by appropriate fiscal and monetary policies, as well as sustained investor confidence in Indonesia's economic prospects.

Secara nominal, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 mencapai nilai PDB sebesar Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4. Dari sisi spasial, aktivitas ekonomi masih didominasi oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 56,93% terhadap perekonomian nasional.

In nominal terms, Indonesia's economy in 2025 reached a GDP value of Rp23,821.1 trillion, with GDP per capita of Rp83.7 million or equivalent to USD 5,083.4. Spatially, economic activity was still dominated by Java Island, contributing 56.93% to the national economy.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh berbagai lapangan usaha, dengan sektor jasa lainnya mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh kinerja ekspor barang dan jasa yang meningkat sebesar 7,03%, mencerminkan perbaikan permintaan eksternal serta daya saing produk nasional.

From the production side, economic growth was driven by a number of business sectors, with the other services sector recording the highest growth at 9.93%. Meanwhile, from the expenditure side, growth was supported by the exports of goods and services, which increased by 7.03%, reflecting improved external demand and the competitiveness of national products.

Meskipun demikian, perekonomian global pada tahun 2025 masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian, antara lain ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang memengaruhi lanskap ekonomi global. Faktor-faktor tersebut turut memberikan tekanan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk sektor konstruksi.

Nevertheless, the global economy in 2025 continued to be overshadowed by uncertainties, including geopolitical tensions, financial market volatility, climate change, and technological developments affecting the global economic landscape. These factors also exerted pressure on various business sectors, including construction.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, investasi yang tetap tumbuh, serta pengelolaan kebijakan ekonomi yang prudent. Namun demikian, sektor konstruksi menghadapi tantangan tersendiri, antara lain akibat penyesuaian belanja infrastruktur, meningkatnya kehati-hatian dalam pembiayaan proyek, serta dinamika biaya konstruksi.

Amid these conditions, Indonesia's economy continued to demonstrate resilience, supported by stable domestic consumption, sustained investment growth, and prudent economic policy management. However, the construction sector faced its own challenges, including adjustments in infrastructure spending, increased caution in project financing, and fluctuations in construction costs.

Kondisi ini mendorong pelaku industri konstruksi, termasuk Perseroan, untuk lebih adaptif dalam merespons perubahan, dengan mengedepankan efisiensi operasional, selektivitas dalam pengambilan proyek, serta penguatan fundamental bisnis guna menjaga keberlanjutan usaha.

These conditions have driven construction industry players, including the Company, to be more adaptive in responding to changes by prioritizing operational efficiency, selective project acquisition, and strengthening business fundamentals to maintain sustainability.

Tingkat inflasi sepanjang tahun 2025 tercatat tetap terkendali dalam kisaran sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu sebesar 2,5% ± 1%, dengan realisasi inflasi sebesar 2,61% (YoY). Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang terjaga serta daya beli masyarakat yang relatif stabil di tengah dinamika ekonomi global.

Inflation throughout 2025 remained under control within the target range set by the Government and Bank Indonesia at 2.5% ± 1%, with realized inflation at 2.61% (YoY). This reflects stable price levels and relatively stable purchasing power amid global economic dynamics.

Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh implementasi kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis dan tepat sasaran, termasuk optimalisasi pengelolaan pendapatan negara serta efisiensi belanja pemerintah. Kebijakan tersebut turut berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

This inflation stability was supported by synergistic and well-targeted fiscal and monetary policy implementation, including the optimization of state revenue management and efficiency in government spending. These policies also played a role in maintaining national macroeconomic stability and supporting sustainable economic growth.

TINJAUAN LINGKUNGAN BISNIS

BUSINESS ENVIRONMENT OVERVIEW

Dinamika Industri Konstruksi di Tengah Tekanan Tahun 2025

Sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam tiga tahun terakhir periode 2022–2024, sektor konstruksi secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar, dengan kontribusi mencapai sekitar 10,09% terhadap PDB.

Dynamics of Construction Industry Amid 2025 Pressures

The construction sector plays a strategic role in national infrastructure development and contributes significantly to Indonesia's economy through GDP. Over the past three years (2022–2024), the sector has consistently been one of the largest contributors, accounting for approximately 10.09% of GDP.

Pada tahun 2024, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 7,02% (YoY), meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,91% (YoY). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun sektor swasta.

In 2024, the construction sector recorded growth of 7.02% (YoY), an increase compared to the growth of 4.91% (YoY) in 2023. This growth was driven by increased infrastructure development activities, both by the government and the private sector.

Namun demikian, memasuki tahun 2025, industri konstruksi menghadapi dinamika yang lebih menantang. Penyesuaian belanja infrastruktur pemerintah, meningkatnya kehati-hatian dalam pembiayaan proyek, serta tekanan terhadap biaya konstruksi menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja industri. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan aktivitas proyek serta meningkatnya tingkat persaingan di sektor konstruksi.

However, entering 2025, the industry faced more challenging dynamics. Adjustments in government infrastructure spending, increased prudence in project financing, and pressure on construction costs became key factors affecting industry performance. These conditions led to reduced project activity and heightened competition in the construction sector.

Di samping itu, tantangan struktural seperti ketersediaan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja terampil, serta perubahan regulasi tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri. Untuk menghadapi kondisi tersebut, industri konstruksi dituntut untuk lebih adaptif dan selektif dalam menjalankan strategi bisnis, termasuk dalam pengelolaan risiko, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi.

In addition, structural challenges such as raw material availability, the need for skilled labor, and regulatory changes remain factors that must be anticipated by business players in the industry. To address these conditions, the construction industry must be more adaptive and selective in executing business strategies, including risk management, operational efficiency, and technology utilization.

Dengan dinamika yang terjadi, pelaku industri konstruksi perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperkuat fundamental bisnis agar tetap mampu bertahan dan berdaya saing di tengah perubahan kondisi pasar.

Given the current dynamics, construction industry players need to prioritize the principle of prudence and strengthen business fundamentals to remain resilient and competitive amid changing market conditions.

ANALISA KINERJA PERUSAHAAN

Strategi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2025

Sebagai respons terhadap dinamika eksternal dan internal yang berkembang sepanjang tahun 2025, Direksi menetapkan strategi yang berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu stabilisasi keuangan, peningkatan kualitas operasional, dan penguatan fundamental bisnis. Strategi ini dirancang untuk menjaga kesinambungan usaha sekaligus memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi perkembangan industri aset keuangan digital yang semakin dinamis.

Pertama, Perusahaan menjalankan strategi stabilisasi keuangan melalui optimalisasi arus kas, pengelolaan liabilitas secara hati-hati, serta pengendalian biaya secara disiplin. Langkah ini menjadi krusial dalam menjaga kesehatan keuangan dan fleksibilitas operasional, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan investasi untuk pengembangan infrastruktur bisnis.

Kedua, dari sisi operasional, Perusahaan memperkuat penerapan manajemen risiko berbasis pendekatan terintegrasi, termasuk penguatan kontrol terhadap proses bisnis, keamanan sistem, serta keandalan layanan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan potensi risiko operasional yang dapat berdampak pada kinerja dan reputasi Perusahaan.

Ketiga, Perusahaan mendorong transformasi bisnis melalui penguatan infrastruktur teknologi dan digitalisasi proses operasional, guna meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan kualitas layanan. Strategi ini juga membuka peluang pengembangan produk dan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Seluruh langkah strategis tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi industri, profil risiko bisnis, serta arah perkembangan ekosistem aset keuangan digital yang semakin teregulasi dan berkelanjutan.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi

Direksi sebagai organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan memiliki peran sentral dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Seluruh kebijakan dan keputusan Direksi senantiasa diarahkan untuk kepentingan terbaik Perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan usaha. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP).

Strategi tersebut diimplementasikan melalui program kerja yang terstruktur dan terukur di seluruh unit organisasi, termasuk entitas anak. Direksi juga menetapkan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan strategi, disertai dengan proyeksi keuangan yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan Perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian target kinerja, pengelolaan risiko, serta optimalisasi sumber daya.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Company Strategy and Policy in 2025

In response to internal and external dynamics throughout 2025, Board of Directors established strategies focused on three main priorities: financial stabilization, operational quality improvement, and strengthening business fundamentals. This strategy is designed to maintain business continuity while strengthening the Company's position in a dynamic industry environment.

First, the Company implemented a financial stabilization strategy through cash flow optimization, prudent liability management, and disciplined cost control. These steps are crucial for maintaining financial health and operational flexibility, particularly in the face of market dynamics and investment needs for business infrastructure development.

Second, in terms of operations, the Company strengthened its risk management approach based on an integrated approach, including strengthening controls over business processes, system security, and service reliability. These efforts were undertaken to minimize potential operational risks that could impact the Company's performance and reputation.

Third, the Company encouraged business transformation by strengthening its technology infrastructure and digitizing operational processes to improve efficiency, scalability, and service quality. This strategy also opened up opportunities for the development of new products and services relevant to market needs. All of these strategic steps were formulated taking into account industry conditions, business risk profiles, and the development direction of an increasingly regulated and sustainable digital financial asset ecosystem.

The Role of Board of Directors in Strategy Formulation

Board of Directors, as the Company's organ with full authority and responsibility for managing the Company, plays a central role in formulating and implementing strategies. All policies and decisions made by Board of Directors are consistently directed toward the best interests of the Company, taking into account prudential principles, good corporate governance, and business sustainability. In carrying out its functions, Board of Directors formulates short-, medium-, and long-term strategies, which are outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the annual elaboration of the Long-Term Plan (RJP).

These strategies are implemented through structured and measurable work programs across all organizational units, including subsidiaries. Board of Directors also determines budget allocations that support the implementation of these strategies, accompanied by comprehensive financial projections as a basis for decision-making. This approach enables the Company to maintain a balance between achieving performance targets, managing risks, and optimizing resources.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian, Direksi secara berkala melakukan evaluasi atas implementasi strategi yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut mencakup pencapaian kinerja, efektivitas program kerja, serta perkembangan profil risiko Perusahaan. Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi melakukan penyesuaian dan penyempurnaan strategi secara berkelanjutan guna memastikan relevansi dengan dinamika industri dan kondisi pasar.

Selain itu, Direksi secara aktif melakukan kajian dan pemantauan terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Perusahaan. Langkah-langkah strategis yang adaptif dan responsif terus dikembangkan untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan efektif, Direksi menerapkan mekanisme pengendalian berbasis kinerja dan risiko. *Monitoring* dilakukan melalui:
1. Evaluasi rutin kinerja proyek dan keuangan
2. Pengawasan terhadap arus kas dan posisi likuiditas
3. Penerapan *early warning system* terhadap potensi deviasi proyek.

Selain itu, Perseroan juga membentuk tim lintas fungsi untuk mempercepat penyelesaian isu-isu kritis, khususnya terkait penagihan dan penyelesaian proyek. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk bersikap lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.

Pencapaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi tantangan yang cukup signifikan yang berdampak pada pencapaian kinerja operasional dan keuangan. Dinamika industri konstruksi, penurunan aktivitas proyek, serta tekanan terhadap likuiditas sektor menjadi faktor utama yang memengaruhi realisasi kinerja Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,62 triliun, atau mencapai 47.31% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp3,43 triliun. Pencapaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp3,67 triliun. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya volume proyek serta meningkatnya selektivitas dalam perolehan pekerjaan baru.

Dari sisi profitabilitas, Perseroan mencatatkan laba kotor sebesar Rp145,42 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp307,50 miliar. Sementara itu, Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp630,25 miliar, sehingga capaian kinerja tersebut belum memenuhi target laba bersih tahun buku 2025 yang ditetapkan sebesar Rp46,35 miliar. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya perolehan kontrak baru pada segmen jasa konstruksi serta meningkatnya beban usaha guna mendukung aktivitas operasional Perseroan di tengah dinamika industri yang masih menantang.

As part of its supervisory and control function, Board of Directors periodically evaluates the implementation of existing strategies. These evaluations cover performance achievements, the effectiveness of work programs, and the development of the Company's risk profile. Based on the evaluation results, Board of Directors continuously refines and enhances strategies to ensure their relevance to industry dynamics and market conditions.

In addition, Board of Directors actively conducts assessments and monitoring of various challenges and opportunities faced by the Company. Adaptive and responsive strategic measures continue to be developed to ensure the achievement of the Company's objectives and sustainable performance improvement.

In order to assure effective implementation of strategies, Board of Directors applies performance- and risk-based control mechanisms. Monitoring is carried out through:
1. Regular evaluation of project and financial performance
2. Supervision of cash flow and liquidity position
3. Implementation of an early warning system for potential project deviations

In addition, the Company has established cross-functional teams to accelerate the resolution of critical issues, particularly those related to collections and project completion. This approach enables the Company to be more responsive and adaptive in addressing dynamics in the field.

Performance Achievement and Realization in 2025

Throughout 2025, the Company faced significant challenges that affected the achievement of its operational and financial performance. The dynamics of construction industry, declining project activity, and liquidity pressures in the sector were the main factors influencing the Company's performance realization compared to the previous year.

The Company recorded operating revenues of Rp1.62 trillion, representing 47.31% of the established target of Rp3.43 trillion. This achievement declined compared to the 2024 realization of Rp3.67 trillion. The decrease was in line with the lower project volume and the Company's increased selectivity in securing new projects.

From a profitability perspective, the Company recorded a gross profit of Rp145.42 billion, lower than the Rp307.50 billion achieved in 2024. Meanwhile, the Company posted a net loss of Rp630.25 billion, resulting in performance that has not yet met the net profit target of Rp46.35 billion set for the 2025 financial year. This condition was primarily attributable to the decline in new contract acquisitions within the construction services segment, as well as higher operating expenses incurred to support the Company's operational activities amid challenging industry dynamics.

Kinerja Perseroan pada tahun 2025 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yang dipengaruhi oleh tekanan dari beban masa lalu, tantangan likuiditas, serta dinamika industri konstruksi. Penurunan kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan beban usaha serta tekanan dari komponen beban lainnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Perseroan telah menunjukkan upaya perbaikan melalui peningkatan disiplin operasional, pengendalian biaya, serta langkah-langkah percepatan arus kas. Strategi yang diterapkan pada tahun 2025 belum sepenuhnya menghasilkan dampak optimal dalam jangka pendek, namun telah membentuk fondasi penting bagi proses pemulihan kinerja Perseroan ke depan.

Sebagai langkah korektif, Perseroan melakukan berbagai inisiatif strategis, antara lain:
1. Reprioritisasi portofolio proyek;
2. Pengetatan seleksi proyek baru;
3. Percepatan penyelesaian proyek bermasalah; serta
4. Optimalisasi aset dan sumber daya.

Selain itu, Perseroan juga terus melakukan penyesuaian strategi bisnis melalui penguatan fundamental operasional, optimalisasi portofolio proyek, serta pengembangan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah, termasuk inovasi pada metode konstruksi dan pemanfaatan teknologi.

Dari sisi non-keuangan, Perseroan tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan kepada pelanggan, yang tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) sebesar 80,17%, sebagai indikator bahwa Perseroan tetap mampu memenuhi ekspektasi pelanggan di tengah kondisi yang menantang.

Ke depan, Perseroan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan guna memperkuat kinerja dan meningkatkan daya saing, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Tantangan yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Sepanjang tahun 2025, sektor konstruksi nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Kondisi makroekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, termasuk dinamika suku bunga global, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara utama, turut memberikan tekanan terhadap iklim investasi dan aktivitas proyek konstruksi.

Di sisi domestik, penyesuaian kebijakan fiskal, khususnya terkait belanja infrastruktur, serta meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan dalam penyaluran pembiayaan proyek, berdampak pada menurunnya aktivitas konstruksi secara umum. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya persaingan di industri serta tekanan terhadap arus kas pelaku usaha konstruksi, termasuk Perseroan.

The Company's performance in 2025 remained below the established targets, influenced by pressures from historical burdens, liquidity challenges, and the dynamics of construction industry. The decline in performance was also driven by increased operating expenses and pressures from other cost components, which significantly affected the Company's overall financial performance.

Nevertheless, the Company demonstrated improvement efforts through enhanced operational discipline, cost control, and measures to accelerate cash flow. The strategies implemented in 2025 have not yet fully delivered optimal short-term results but have laid an important foundation for the Company's performance recovery going forward.

As corrective measures, the Company undertook several strategic initiatives, including:
1. Reprioritizing the project portfolio
2. Tightening the selection of new projects
3. Accelerating the completion of problematic projects
4. Optimizing assets and resources

In addition, the Company continues to refine its business strategy through strengthening operational fundamentals, optimizing project portfolio, and developing value-added products and services, including innovations in construction methods and utilization of technology.

From a non-financial perspective, the Company remains committed to maintaining service quality to customers, as reflected in the Customer Satisfaction Index (CSI) achievement of 80.17%, indicating that the Company continues to meet customer expectations despite challenging conditions.

Going forward, the Company will continue to implement sustainable improvement measures to strengthen performance and enhance competitiveness, while upholding prudential principles and good corporate governance.

Challenges Faced and Mitigation Measures

Throughout 2025, the national construction sector faced increasingly complex challenges, stemming from both external and internal factors. Global macroeconomic conditions, still shrouded in uncertainty, including global interest rate dynamics, exchange rate volatility, and economic slowdowns in several key countries, are putting pressure on the investment climate and construction project activity.

Domestically, fiscal policy adjustments, particularly related to infrastructure spending, and increased banking sector caution in project financing disbursements, have resulted in a general decline in construction activity. This has led to increased competition in the industry and pressure on the cash flow of construction businesses, including the Company.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga material juga memberikan dampak terhadap peningkatan biaya operasional, terutama pada bahan baku dan peralatan konstruksi yang masih bergantung pada komponen impor. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tekanan margin serta potensi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.

Selain faktor eksternal, Perseroan juga menghadapi tantangan internal, termasuk tekanan dari beban masa lalu, kebutuhan perbaikan kualitas portofolio proyek, serta penguatan disiplin dalam pengelolaan risiko dan operasional. Dinamika ini menuntut Perseroan untuk melakukan penyesuaian strategi secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Di sisi lain, aspek regulasi yang dinamis serta kebutuhan akan tenaga kerja profesional yang kompeten tetap menjadi perhatian dalam menjaga kualitas pelaksanaan proyek dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Perseroan telah merumuskan dan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Reprioritisasi portofolio proyek dengan fokus pada proyek yang memiliki profil risiko dan arus kas yang lebih sehat;
2. Pengetatan seleksi proyek baru secara lebih selektif dan terukur;
3. Percepatan penyelesaian proyek bermasalah guna memperbaiki kinerja operasional dan keuangan;
4. Optimalisasi aset dan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
5. Penguatan pengelolaan arus kas serta pengendalian biaya secara disiplin;
6. Penerapan manajemen risiko secara komprehensif yang mengacu pada standar yang berlaku guna memitigasi risiko operasional, keuangan, dan hukum; serta
7. Pemanfaatan teknologi konstruksi dan inovasi operasional untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi industri yang menantang. Dengan strategi yang lebih adaptif dan disiplin dalam pelaksanaannya, Perseroan berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan di masa mendatang.

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Memasuki tahun 2026, Perseroan memandang prospek usaha di sektor konstruksi gedung dan properti masih memiliki peluang pertumbuhan yang positif seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur nasional, pengembangan kawasan komersial, industrial, serta meningkatnya kebutuhan pembangunan gedung yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan strategis nasional serta pertumbuhan investasi swasta diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan permintaan jasa konstruksi dan properti terpadu.

The weakening rupiah and fluctuating material prices have also increased operational costs, particularly for raw materials and construction equipment, which remain dependent on imported components. These conditions contribute to margin pressure and potential delays in project implementation.

In addition to external factors, the Company also faced internal challenges, including pressures from historical burdens, the need to improve the quality of its project portfolio, and the strengthening of discipline in risk and operational management. These dynamics require the Company to make more measured and sustainable strategic adjustments.

On the other hand, evolving regulatory requirements and the need for competent professional workforce remain important considerations in maintaining project quality and compliance with applicable regulations.

In response to these challenges, the Company has formulated and implemented several strategic measures, including:

1. Reprioritizing the project portfolio with a focus on projects that have healthier risk profiles and cash flows;
2. Tightening the selection of new projects in a more selective and measured manner;
3. Accelerating the completion of problematic projects to improve operational and financial performance;
4. Optimizing assets and resources to enhance efficiency and productivity;
5. Strengthening cash flow management and implementing disciplined cost control;
6. Implementing comprehensive risk management in accordance with applicable standards to mitigate operational, financial, and legal risks; and
7. Utilizing construction technology and operational innovation to improve project execution efficiency.

These measures are part of the Company's efforts to strengthen its business fundamentals and maintain business continuity amidst challenging industry conditions. With more adaptive strategies and disciplined execution, the Company strives to achieve gradual and sustainable performance improvement in the future.

BUSINESS OUTLOOK IN 2026

Entering 2026, the Company views the business outlook in the building construction and property sectors as remaining promising, supported by the continuation of national infrastructure development, the expansion of commercial and industrial areas, as well as the growing demand for buildings that emphasize efficiency and sustainability. Government support for national strategic projects and the growth of private sector investment are expected to serve as key drivers for increasing demand for integrated construction and property services.

Perseroan akan terus memperkuat daya saing melalui optimalisasi portofolio proyek, peningkatan kualitas pelaksanaan konstruksi, serta penerapan inovasi dan digitalisasi proses bisnis guna meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Perseroan juga akan memperluas peluang bisnis pada segmen yang memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pembangunan gedung hijau (green building), kawasan mixed-use, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan proyek berbasis industri.

Di tengah tantangan dinamika ekonomi global dan persaingan industri yang semakin kompetitif, Perseroan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dan selektivitas dalam perolehan proyek baru. Dengan pengalaman, kapabilitas, serta sinergi yang kuat dalam ekosistem WIKA Group, Perseroan optimistis dapat menjaga kesinambungan usaha, meningkatkan kinerja operasional, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahun 2026.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penguatan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten sebagai fondasi dalam menjaga keberlangsungan usaha. Penerapan prinsip GCG dilakukan secara berkelanjutan melalui peninjauan berkala atas kebijakan internal guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik yang relevan.

Perseroan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan implementasinya telah mengacu pada prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran di seluruh jenjang organisasi. Penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran dan fungsi masing-masing organ Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan memiliki organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi pemegang saham, Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 2 kali RUPS, yang terdiri dari satu kali RUPST pada tanggal 21 Mei 2025 dan satu kali RUPSLB pada tanggal 28 November 2025, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan perlindungan hak pemegang saham.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara aktif melalui berbagai forum formal, serta memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Di sisi lain, Direksi melaksanakan fungsi pengurusan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan strategi, kebijakan, dan ketentuan yang berlaku.

The Company will continue to strengthen its competitiveness through portfolio optimization, enhancement of construction execution quality, and the implementation of innovation and business process digitalization to improve operational efficiency. In addition, the Company will further expand business opportunities in segments with sustainable growth potential, including green buildings, mixed-use developments, healthcare and educational facilities, as well as industrial-based projects.

Amid global economic uncertainties and increasingly competitive industry dynamics, the Company remains committed to implementing prudent risk management and selective approaches in securing new projects. Supported by its experience, capabilities, and strong synergies within the WIKA Group ecosystem, the Company is optimistic about maintaining business sustainability, improving operational performance, and creating sustainable value for all stakeholders throughout 2026.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Strengthening the Implementation of Corporate Governance

The Company remains committed to consistently implementing good corporate governance as a foundation for safeguarding business continuity. The implementation of GCG principles is carried out continuously through periodic reviews of internal policies to ensure compliance with applicable laws and regulations and relevant best practices.

The Company ensures that all policies and their implementation adhere to GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness at all levels of the organization. Effective GCG implementation is expected to encourage professional, efficient, and sustainable management of the Company, while strengthening the roles and functions of each organs of the Company.

In accordance with the Articles of Association, the Company has two main organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The GMS is the highest decision-making forum for shareholders, the Board of Commissioners plays a supervisory role, and the Board of Directors is responsible for the management and operations of the Company.

Throughout 2025, the Company held two General Meetings of Shareholders (GMS), consisting of one AGMS on May 21, 2025, and one EGMS on November 28, 2025, while upholding the principles of transparency, equality, and protection of shareholder rights.

Board of Commissioners actively carries out its supervisory and advisory functions through various formal forums, and ensures that the Company's management is conducted in accordance with the principles of prudence and good governance. Meanwhile, Board of Directors carries out its management function by ensuring that all business activities are conducted in accordance with applicable strategies, policies, and regulations.

Dalam mendukung efektivitas penerapan GCG, Perseroan juga memperkuat peran komite-komite di bawah Dewan Komisaris serta fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan.

Perseroan terus memperkuat penerapan GCG sebagai fondasi dalam menjaga keberlangsungan usaha. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melakukan penguatan melalui berbagai inisiatif, antara lain:
1. Penguatan sistem pengendalian internal;
2. Peningkatan implementasi manajemen risiko berbasis *enterprise risk management*; serta
3. Optimalisasi *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan pelanggaran.

Selain itu, Perseroan juga terus menunjukkan komitmen dalam pencegahan *fraud* melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016, serta penguatan budaya kepatuhan melalui Kode Etik (*Code of Conduct*) yang berlaku bagi seluruh insan Perseroan.

Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dilakukan secara terstruktur dengan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan hukum yang memadai. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara objektif oleh fungsi terkait guna memastikan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Hasil asesmen GCG menunjukkan bahwa Perseroan tetap berada dalam kategori yang baik, dengan beberapa area perbaikan yang terus ditindaklanjuti secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perseroan juga mengacu pada standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Kedua pedoman tersebut menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan praktik tata kelola yang lebih efektif dan berstandar internasional.

Dengan penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan, Perseroan meyakini bahwa tata kelola yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan industri serta mendukung upaya perbaikan kinerja Perseroan ke depan.

Kriteria Utama Penilaian Kinerja Direksi

Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek strategis yang selaras dengan tujuan dan prioritas korporasi. Penilaian kinerja Direksi difokuskan pada pencapaian target Perseroan secara menyeluruh, efektivitas implementasi strategi bisnis, serta kontribusi Direksi dalam menciptakan nilai tambah dan menjaga keberlangsungan usaha.

In supporting the effectiveness of GCG implementation, the Company also strengthens the role of committees under the Board of Commissioners and the function of the Internal Control System (SPI) which periodically monitors and evaluates the adequacy of internal control, risk management, and compliance.

The Company continues to strengthen the implementation of GCG as a foundation for maintaining business continuity. Throughout 2025, the Company strengthened this through various initiatives, including:
1. Strengthening the internal control system;
2. Improving the implementation of enterprise-based risk management; and
3. Optimizing the Whistleblowing System as a means of reporting violations.

Furthermore, the Company continues to demonstrate its commitment to fraud prevention through the implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016, as well as strengthening a culture of compliance through a Code of Conduct that is applicable to the entire Company people.

The Whistleblowing System (WBS) is managed in a structured manner, ensuring the confidentiality of the whistleblower's identity and adequate legal protection. Every report received will be followed up objectively by the relevant function to ensure the resolution made is in accordance with good governance principles.

The results of GCG assessment indicate that the Company remains in the good category, with several areas of improvement being continuously followed up as part of its commitment to improving governance quality.

To improve the quality of GCG implementation, the Company also refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG). These two guidelines serve as a reference for evaluating and developing more effective and internationally standardized governance practices.

With consistent and sustainable GCG implementation, the Company believes that strong governance will serve as a key foundation in addressing industry challenges and supporting the Company's performance improvement efforts going forward.

Key Criteria For Board Of Directors Performance Appraisal

The Board of Directors' Key Performance Indicators (KPIs) is determined by considering strategic aspects aligned with corporate goals and priorities. The Board of Directors' performance appraisal focuses on the achievement of the Company's overall targets, the effectiveness of business strategy implementation, and the Board of Directors' contribution to creating added value and maintaining business continuity.

Pada tahun 2025, penilaian kinerja Direksi dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika bisnis dan tantangan yang dihadapi Perseroan. Evaluasi mencakup aspek kinerja keuangan, operasional, pengelolaan risiko, serta efektivitas implementasi strategi yang telah ditetapkan.

Seiring dengan kondisi industri yang menantang dan tekanan terhadap kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025, pencapaian KPI Direksi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penurunan aktivitas proyek, tekanan likuiditas, serta dampak dari beban masa lalu yang memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Meskipun demikian, Direksi telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam merespons kondisi tersebut, antara lain melalui penguatan pengelolaan arus kas, peningkatan efisiensi operasional, serta pengetatan seleksi proyek. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja yang diharapkan dapat memberikan dampak positif secara bertahap ke depan.

Selain pengukuran berbasis KPI korporat, penilaian juga dilakukan secara individual terhadap masing-masing anggota Direksi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain tingkat kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Perseroan, serta komitmen terhadap keputusan kolektif yang telah disepakati.

Hasil evaluasi kinerja Direksi, baik secara kolektif maupun individual, menjadi dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan terkait pengangkatan kembali maupun pemberhentian anggota Direksi pada periode mendatang.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung di Bawah Direksi

Perseroan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Namun demikian, keberadaan organ pendukung di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam mendukung fungsi pengelolaan Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, organ pendukung di bawah Direksi tetap berperan aktif dalam membantu Direksi, khususnya dalam mendukung operasional, pengendalian internal, serta pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, organ pendukung tersebut senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN TAHUN 2025

Pendekatan Adaptif untuk Keberlanjutan Jangka Panjang

Perseroan menyadari bahwa aktivitas bisnis dan operasional memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam seluruh aktivitas bisnis sebagai bagian dari penerapan

In 2025, the Board of Directors' performance appraisal was conducted comprehensively, taking into account business dynamics and the challenges faced by the Company. The evaluation covered aspects of financial performance, operational performance, risk management, and the effectiveness of the implementation of established strategies.

In line with challenging industry conditions and pressures on the Company's performance throughout 2025, the Board of Directors' KPI achievement remained below the established target. This was influenced by a number of factors, including decreased project activity, liquidity pressures, and the impact of historical burdens that impacted the Company's financial performance.

Nevertheless, Board of Directors has demonstrated significant efforts in responding to these conditions, including strengthening cash flow management, increasing operational efficiency, and tightening project selection. These steps are part of the performance improvement efforts that are expected to have a gradual positive impact going forward.

In addition to corporate KPI-based measurements, individual assessments are also conducted for each member of Board of Directors, taking into account several criteria, including attendance at Board of Directors meetings and coordination meetings with the Board of Commissioners, active participation in the decision-making process, compliance with Company regulations and policies, and commitment to agreed collective decisions.

The results of the Board of Directors' performance evaluations, both collectively and individually, serve as the basis for Shareholders' considerations in making decisions regarding the reappointment or dismissal of Board members in the future.

Assessment of Supporting Organs Under Board of Directors

The Company did not have any committees under Board of Directors for the period ended December 31, 2025. Nevertheless, the supporting organs under Board of Directors effectively carried out their duties and responsibilities in supporting the Company's management functions.

Throughout 2025, these supporting organs continued to play an active role in assisting Board of Directors, particularly in supporting operations, internal control, and the implementation of established strategies. In performing their functions, these supporting organs consistently upheld the principles of good corporate governance.

SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION STRATEGY 2025

Adaptive Approach for Long-Term Sustainability

The Company recognizes that its business and operational activities have significant impacts on environmental, social, and governance aspects. Therefore, the Company is committed to integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into all business activities as part of sustainable finance implementation

keuangan berkelanjutan dan upaya menjaga keberlangsungan usaha. Pada aspek lingkungan, Perseroan mendorong penerapan konstruksi berkelanjutan serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya guna meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional.

Pada aspek sosial, Perseroan secara konsisten melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat serta penciptaan nilai tambah bagi lingkungan sekitar. Sementara itu, pada aspek tata kelola, Perseroan memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh proses bisnis.

Komitmen terhadap penerapan ESG tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Perseroan dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya penguatan fundamental dan perbaikan kinerja Perseroan ke depan.

Aspek Lingkungan

Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, Perseroan terus mendorong efisiensi penggunaan sumber daya serta penerapan praktik konstruksi yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan teknologi konstruksi modular tetap menjadi salah satu fokus utama, mengingat potensinya dalam mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi waktu, serta menekan emisi dari aktivitas konstruksi.

Perseroan juga secara bertahap melanjutkan inisiatif penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik (*Electric Vehicle*/EV), serta mengedepankan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan dalam pelaksanaan proyek.

Aspek Sosial

Perseroan meyakini bahwa Sumber Daya Manusia merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi, peningkatan kapabilitas, serta penerapan prinsip keberagaman (*diversity*) dan kesetaraan (*equality*) tetap menjadi prioritas.

Perseroan terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai fungsi dan posisi strategis di lingkungan kerja. Hingga tahun 2025, komposisi karyawan perempuan tercatat sebesar 12% dari total karyawan.

Selain itu, Perseroan tetap melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terintegrasi dengan ISO 26000 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui empat pilar utama, yaitu WEGE Hijau, WEGE Sehat, WEGE Pintar, dan WEGE Peduli. Pelaksanaan program CSR difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan sosial.

Aspek Tata Kelola

Dalam aspek tata kelola, Perseroan terus memperkuat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Perseroan mengacu pada standar ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian risiko fraud.

and efforts to ensure business continuity. From an environmental perspective, the Company promotes sustainable construction practices and improves resource efficiency to minimize the environmental impact of its operations.

From a social perspective, the Company consistently implements Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on community empowerment and creating added value for surrounding communities. Meanwhile, from a governance perspective, the Company ensures the implementation of transparency, accountability, and integrity principles across all business processes.

This commitment to ESG implementation forms part of the Company's long-term strategy to create sustainable value, while also supporting the efforts to strengthen its fundamentals and improve performance going forward.

Environmental Aspect

In an effort to reduce environmental impact, the Company continues to promote resource efficiency and the implementation of more environmentally friendly construction practices. The development of modular construction technology remains one of the main focuses, given its potential to reduce waste, improve time efficiency, and lower emissions from construction activities.

The Company also gradually continues the initiatives to utilize electric vehicles (EVs) for operational purposes and prioritizes the use of more environmentally friendly materials in project execution.

Social Aspect

The Company believes that Human Capital are a key factor in supporting business sustainability. Therefore, competency development, capability enhancement, and the implementation of diversity and equality principles remain priorities.

The Company continues to encourage women's involvement across various functions and strategic positions within the workplace. As of 2025, female employees accounted for 12% of the total workforce.

In addition, the Company continues to implement CSR programs aligned with ISO 26000 and the Sustainable Development Goals (SDGs), through four main pillars: WEGE Hijau, WEGE Sehat, WEGE Pintar, and WEGE Peduli. These CSR programs are focused on initiatives that provide direct impact to communities and support social sustainability.

Governance Aspect

From a governance perspective, the Company continues to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the foundation for decision-making and business management. The Company refers to the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standards and implements the Anti-Bribery Management System (SMAP) ISO 37001 as part of its efforts to prevent and control fraud risks.

Perseroan juga terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko, termasuk dalam mengelola risiko terkait perubahan iklim, baik risiko fisik maupun risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi guna memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika bisnis dan regulasi.

The Company also continues to enhance the effectiveness of its risk management, including managing risks related to climate change, both physical risks and transition risks toward a low-carbon economy. Risk management is implemented in an integrated manner to ensure the Company's readiness in facing business and regulatory dynamics.

Untuk memastikan implementasi keberlanjutan berjalan secara konsisten, Perseroan menetapkan kebijakan strategis yang mencakup aspek operasional, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Dalam kondisi yang menantang, pendekatan keberlanjutan difokuskan pada penguatan fundamental, efisiensi, serta pengelolaan risiko yang lebih disiplin.

To ensure consistent implementation of sustainability, the Company establishes strategic policies covering operational, marketing, and financial management aspects. In challenging conditions, the sustainability approach is focused on strengthening fundamentals, improving efficiency, and exercising more disciplined risk management.

Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur, Perseroan meyakini bahwa penerapan prinsip keberlanjutan akan tetap menjadi pilar penting dalam mendukung proses pemulihan kinerja serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

With an adaptive and measured approach, the Company believes that the implementation of sustainability principles will remain a key pillar in supporting performance recovery and creating long-term value for all stakeholders.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pada Tahun Buku 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Struktur dan jumlah anggota Direksi tetap sama dengan periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pemberhentian anggota Direksi selama tahun berjalan.

In the 2025 fiscal year, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. The structure and number of members remained the same as in the previous period, with no additions or dismissals of Directors during the year.

Namun demikian, Perseroan melaksanakan pengangkatan kembali terhadap Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I untuk periode kedua, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Pengangkatan kembali tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan dan untuk menjaga stabilitas fungsi pengelolaan operasional di tingkat Direksi.

However, the Company reappointed Bagus Tri Setyana as Director of Operations I for a second term, based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025. This reappointment was carried out as part of leadership continuity and to maintain the stability of operational management functions at the Board level.

Adapun komposisi susunan Direksi Perseroan selengkapnya terdiri atas 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur, yaitu sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors consists of 1 (one) President Director and 4 (four) Directors, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	19 April 2022 - RUPST 2027 April 19, 2022 - 2027 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 19, 2022, confirmed in Deed No. 5 dated April 19, 2022.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) and Marketing	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	21 Mei 2025 - RUPST 2030 May 21, 2025 - 2030 AGMS	Periode - 2 2nd Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.

PENUTUP DAN APRESIASI

Saya mewakili jajaran Direksi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan, komitmen, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan yang telah diberikan kepada Perseroan sepanjang tahun 2025.

Kepada para pemegang saham, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan kepengurusan Perseroan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, nasihat, dan arahan yang konstruktif dalam mendukung upaya Perseroan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun ini.

Direksi juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah diberikan, khususnya dalam menghadapi dinamika industri konstruksi yang penuh tantangan.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh pembelajaran bagi Perseroan dalam melakukan konsolidasi dan penguatan fundamental bisnis. Pengalaman tersebut menjadi landasan penting bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ke depan, Perseroan akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja melalui penguatan strategi, disiplin operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Direksi meyakini bahwa Perseroan memiliki peluang untuk memperkuat daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

FINAL WORDS AND APPRECIATION

On behalf of Board of Directors, I would like to express our gratitude and appreciation for the trust, commitment, and support of all stakeholders extended to the Company throughout 2025

.

To the shareholders, Board of Directors extends its sincere thanks for the trust placed in us in carrying out the management and administration of the Company. We also express our appreciation to the Board of Commissioners for their supervision, advice, and constructive guidance in supporting the Company's efforts to navigate numerous challenges faced throughout the year.

Board of Directors also conveys an appreciation to all levels of management and employees for their dedication, hard work, and commitment, particularly in dealing with the challenging dynamics of the construction industry.

The year 2025 has been a period of valuable learning for the Company in undertaking consolidation and strengthening its business fundamentals. These experiences serve as a crucial foundation for the Company to achieve gradual and sustainable performance improvements in the future.

Going forward, the Company remains committed to improve its performance through strengthening strategy, maintaining operational discipline, and implementing good corporate governance. With the support of all stakeholders, Board of Directors believes that the Company has the opportunity to enhance its competitiveness and create sustainable long-term value.

Jakarta, 20 April 2026
Jakarta, April 20, 2026

Atas Nama Direksi,
On Behalf of Board of Directors,



Hadian Pramudita
Direktur Utama
Direktur Utama

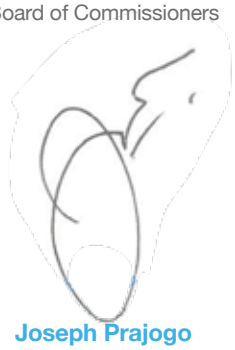
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 17 ayat (1) dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 April 2026
Jakarta, April 20, 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Joseph Prajogo
Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner concurrently serving as Acting President Commissioner



Suli Fatimah
Komisaris
Commissioner



Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris
Commissioner



Taufan Gestoro
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Statement Letter of Board of Directors and Board of Commissioners for the Accountability of 2025 Annual Report

According to the Financial Services Authority Regulation No.29/POJK.04/2016 on Annual Reports of Public Company article 17 paragraph (1) and good corporate governance principles, we, the undersigned, hereby declare that all information contained in the Annual Report 2025 of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk has been completely published and we are solely responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 20 April 2026
Jakarta, April 20, 2026

Direksi
Board of Directors

Hadian Pramudita
Direktur Utama
President Director

Hartanto Karti Raharjo
Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

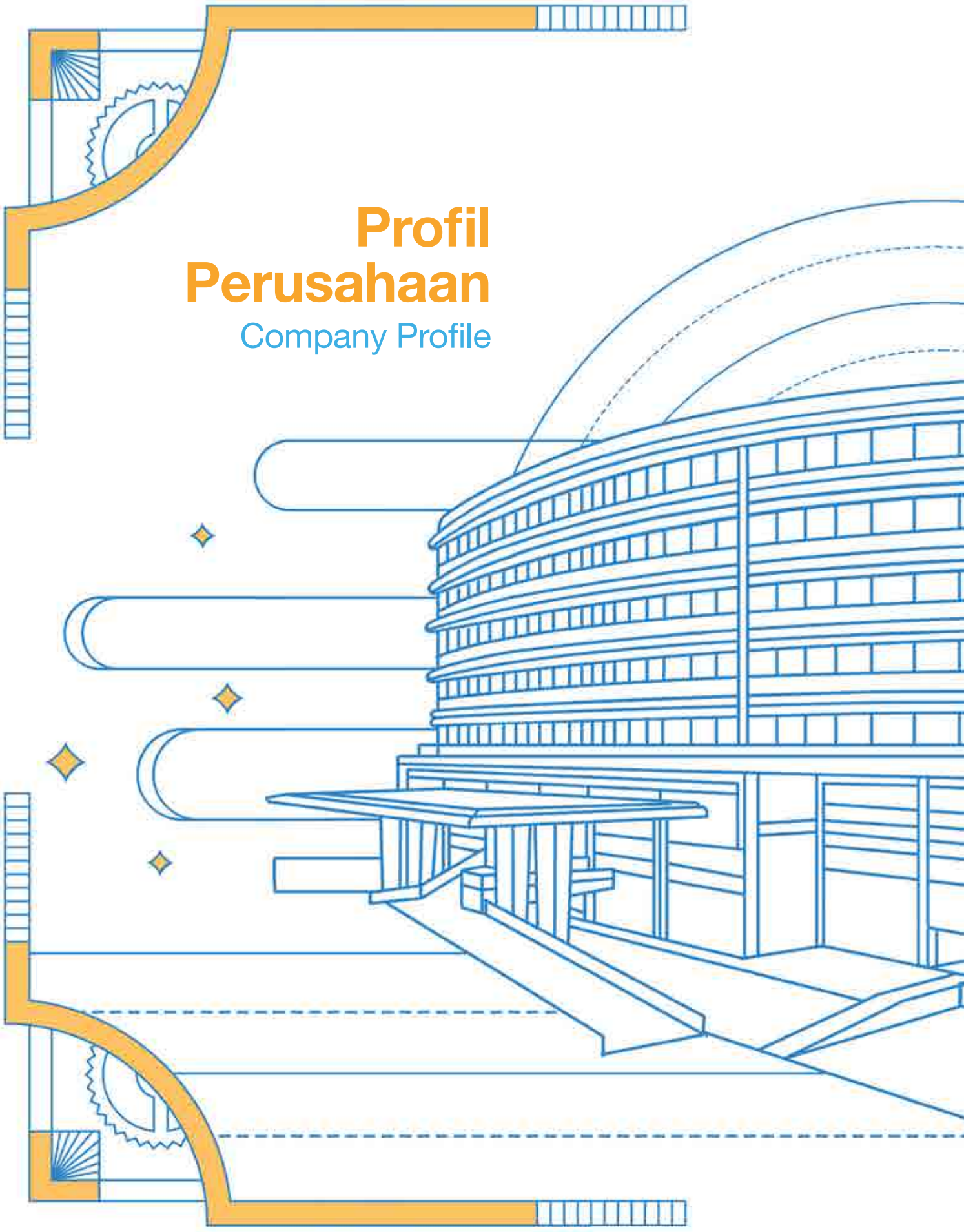
Tomo Dwi Hasputro
Direktur QHSE (*Quality, Health, Safety, Environment*) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing

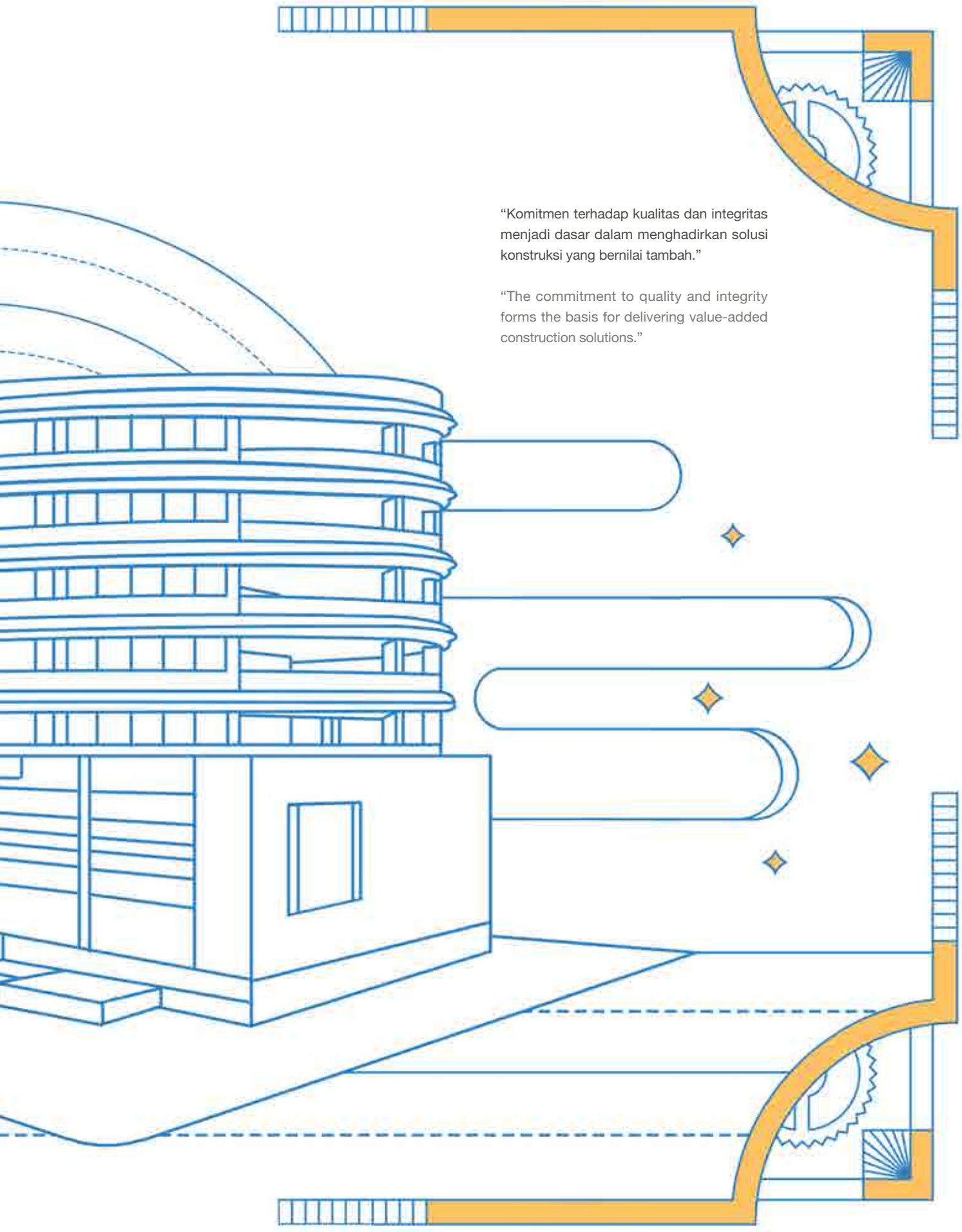
Bagus Tri Setyana
Direktur Operasi I
Director of Operations I

Dwi Purnomo
Direktur Operasi II
Director of Operations II

Profil Perusahaan

Company Profile

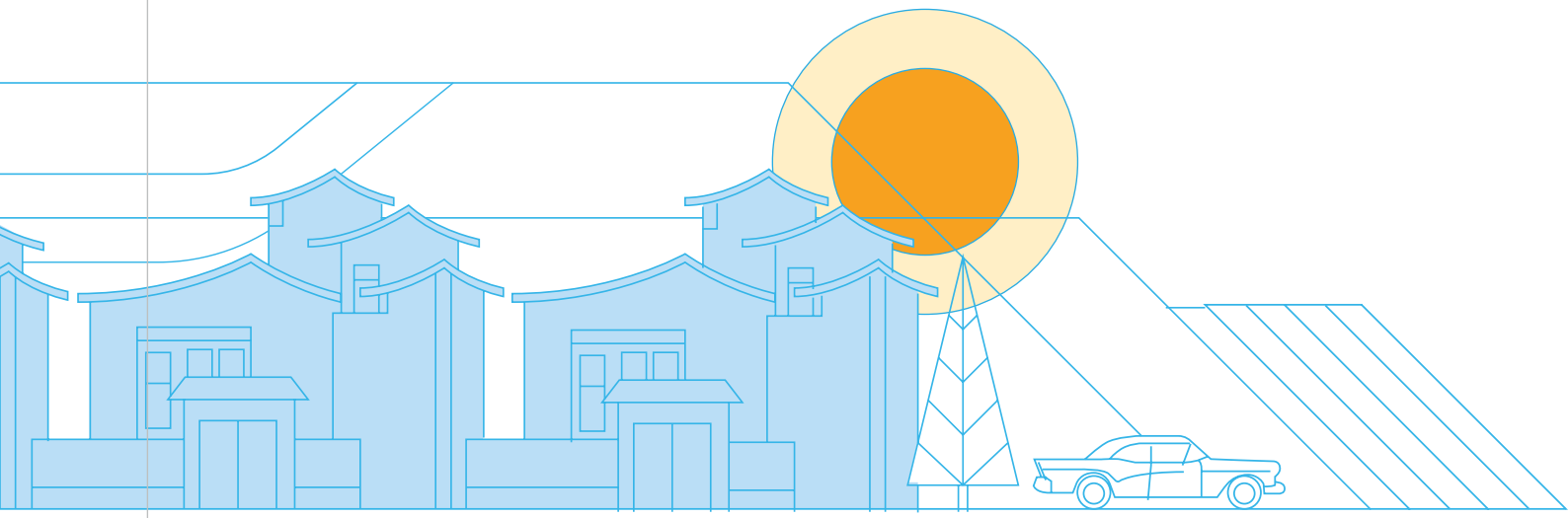




"Komitmen terhadap kualitas dan integritas menjadi dasar dalam menghadirkan solusi konstruksi yang bernilai tambah."

"The commitment to quality and integrity forms the basis for delivering value-added construction solutions."

Informasi Umum Perusahaan
General Information



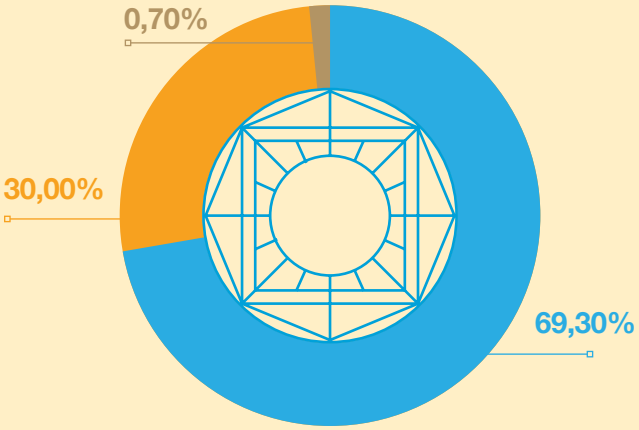
Nama Perusahaan Company Name	**PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk**
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 43 dated October 24, 2008
Bidang Usaha Line of Business	• Jasa Konstruksi Bangunan Gedung • Investasi dan Konsesi • Industri Modular • Building Construction Services • Investment and Concessions • Modular Industry
Domisili Domicile	Jakarta Timur, Indonesia East Jakarta, Indonesia
Tanggal Pendirian Date of Establishment	**24 Oktober 2008** October 24, 2008
Tanggal Pencatatan Saham Date of Stock Listing	30 November 2017 November 30, 2017
Kode Saham Stock Code	**WEGE**
Nama Bursa Name of Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
Modal Dasar Authorized Capital	Rp3.800.000.000.000 yang terbagi atas 38.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100 per lembar saham Rp3,800,000,000,000, divided into 38,000,000,000 shares with a par value of Rp100 each
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	Rp957.200.000.000 yang terbagi atas 9.572.000.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100 per lembar saham Rp957,200,000,000, divided into 9,572,000,000 shares with a par value of Rp100 each
Jumlah Karyawan Number of Employees	**460** karyawan per 31 Desember 2025/employees as of December 31, 2025

Kepemilikan Saham
Share Ownership

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6.633.000.000 lembar saham
6,633,000,000 shares

Publik
Public
2.872.000.000 lembar saham
2,872,000,000 shares

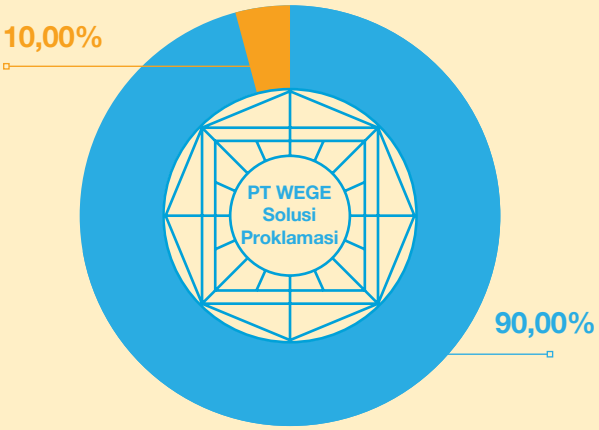
Koperasi Karyawan WIKA
WIKA Employee Cooperative
6.633.000.000 lembar saham
6,633,000,000 shares



Entitas Anak Perusahaan
Subsidiaries

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

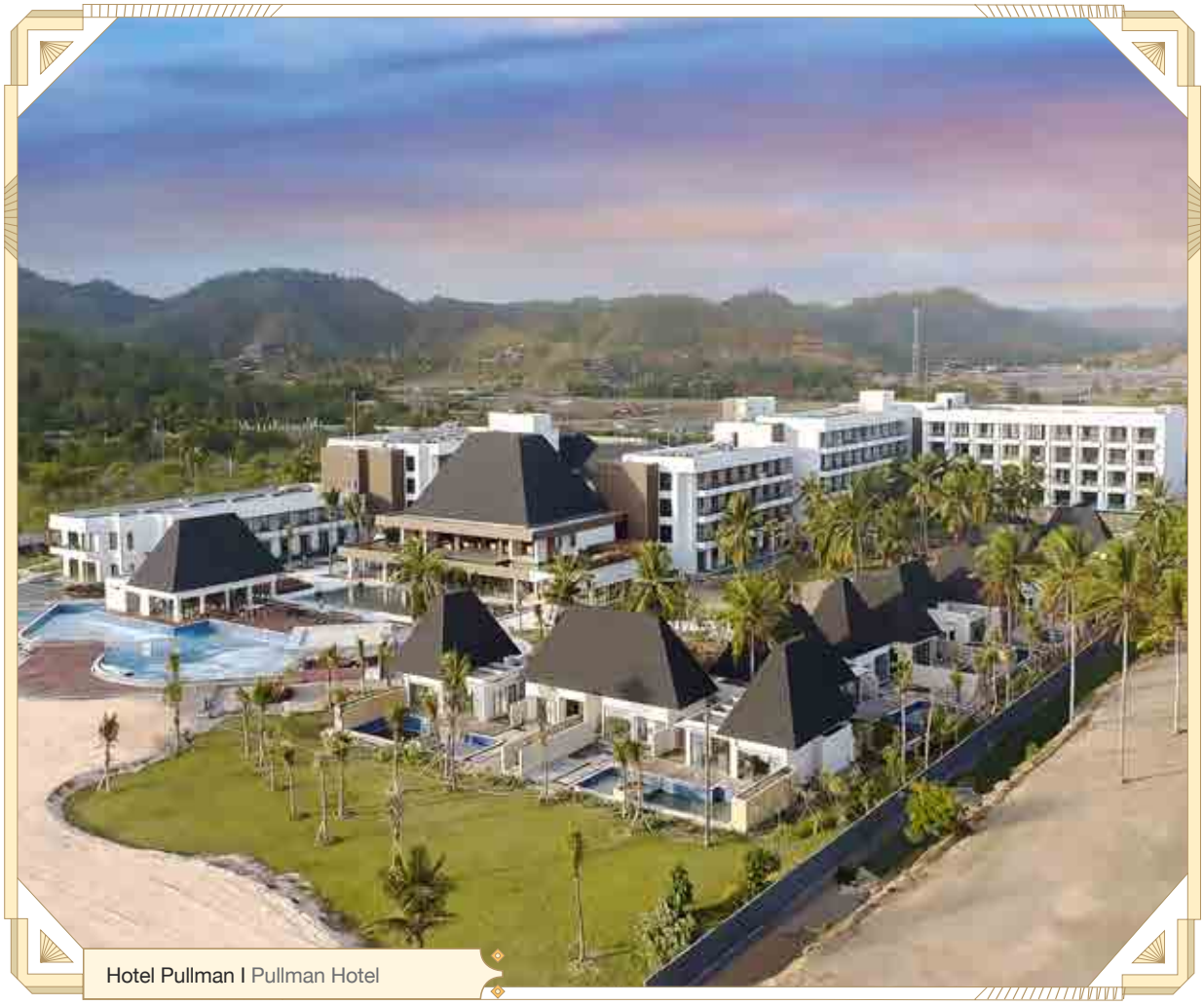


AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN

ACCESS TO THE COMPANY INCLUDING BRANCH OR REPRESENTATIVE OFFICES

Jaringan Kantor Office Network	**Alamat** Address	
Kantor Pusat Head Office	WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 RT/003 RW/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia Phone: (+62) 21 8590 8862, Faximile: (+62) 21 8590 4146, Email: corsec@wikagedung.co.id	
Entitas Anak Perusahaan Subsidiaries	**PT WEGE Solusi Proklamasi** WIKA Tower 1, Lantai 8 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 RT/003 RW/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia Phone: (+62)21 8516250, Email: pt.wegesolusiproklamasi@gmail.com	
Modular Factory	Komplek Industri Kembang Kuning Jalan Raya Narogong KM 26.5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat Phone: (+62) 21 8590 8862, Email: modular@wikagedung.id	
Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary	**Corporate Secretary** Purba Yudha Tama WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 lantai 7, Jakarta, Indonesia Email: corsec@wikagedung.co.id	**Hubungan Investor** (Khusus Pasar Modal) (Capital Market only) WIKA Tower 1, Lantai 7-10 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 lantai 7, Jakarta, Indonesia Email: investorrelations@wikagedung.id
Situs Web dan Kanal Media Sosial Website and Social Media Channels	Website : www.wikagedung.co.id Instagram : @ptwikagedungid Facebook : @ptwikagedungID Twitter/X : @ptwikagedungID	LinkedIn : @ptwikagedungid YouTube : @ptwikagedungid TikTok : @ptwikagedungID Spotify : WEGE Podcast

Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of the Company



Hotel Pullman I Pullman Hotel

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (selanjutnya disebut WEGE atau Perseroan) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-92223.AH.01.01 tanggal 1 Desember 2008.

Perseroan didirikan sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan fokus bisnis pada jasa konstruksi bangunan gedung yang membidik pasar swasta. Sementara itu, segmen pasar pemerintah dan BUMN ditangani oleh Departemen Bangunan Gedung WIKA.

Seiring perkembangannya, pada tahun 2013 Perseroan merambah bisnis properti dengan proyek pertamanya yaitu Apartemen Tamansari Tera. Selanjutnya, pada tahun 2015, Perseroan melanjutkan ekspansi dengan mengembangkan dan memasarkan Apartemen Tamansari Mahogany.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (hereinafter referred to as WEGE or the Company) is domiciled in South Jakarta, established based on Deed No. 43 dated October 24, 2008 made before Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-92223.AH.01.01 dated December 1, 2008.

The Company was established as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) with a business focus on building construction services targeting the private market. In the meantime, the government and State-owned Enterprises (SOE) market segments are ran by WIKA Building Department.

Along with its journey, in 2013 the Company entered the property business with its first project, namely the Tamansari Tera Apartment. Furthermore, in 2015, the Company continued its expansion by developing and marketing the Tamansari Mahogany Apartment.

Pada tahun 2016, Perseroan mendirikan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) sebagai entitas anak yang bergerak di bidang industri beton pracetak gedung. WPG berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0001918. AH.01.01 tanggal 17 Januari 2017.

In 2016, the Company established PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) as a subsidiary engaged in the precast concrete building industry. WPG is domiciled in South Jakarta and was established based on Deed No. 142 dated December 23, 2016, made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017.

Pada 25 Juli 2022, Perseroan melepas 2% kepemilikan sahamnya di WPG kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), sehingga kepemilikan Perseroan berkurang menjadi 49%. Perubahan struktur kepemilikan ini menyebabkan status WPG beralih dari Entitas Anak menjadi Entitas Asosiasi.

On July 25, 2022, the Company released 2% of its share ownership in WPG to PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), hence the Company's ownership was reduced to 49%. This alteration in ownership structure caused WPG's status to change from a Subsidiary Entity to an Associate Entity.

Pada tahun 2016, terjadi penggabungan Departemen Bangunan Gedung WIKA ke dalam Perseroan, sehingga cakupan bisnis yang sebelumnya berfokus pada pasar swasta berkembang mencakup segmen pemerintah dan BUMN. Integrasi ini semakin memperkuat kapasitas dan kapabilitas Perseroan dalam industri konstruksi bangunan gedung.

In 2016, WIKA Building Construction Department was merged into the Company, so as to the business scope that previously focused on the private market expanded to include the government and SOE segments. This integration further strengthened the Company's capacity and capabilities in the building construction industry.

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

In 2017, the Company carried out an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company has been declared effective based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were then listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code of WEGE.

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan menerbitkan sebanyak 2.872.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100,- per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp290,- per saham, sehingga total nilai penawaran mencapai Rp832.880.000.000.

In the Initial Public Offering, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which are New Shares issued from the Company's portfolio. The Company's shares have a nominal value of Rp100 per share and represent 30.00% of the Company's issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering. The Offering Price was set at Rp290 per share, the total offering value hence reached Rp832,880,000,000.

Pada tahun 2018, Perseroan membentuk Divisi Modular untuk memperluas kegiatan usaha di industri konstruksi teknologi modular. Langkah ini juga menandai awal penerapan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proses bisnis inti Perseroan. Sebagai bagian dari strategi *Backward Offsite Construction*, industri modular memberikan nilai tambah pada setiap bangunan dan kebutuhan ruang, dengan menawarkan kualitas yang lebih presisi, sistem konstruksi yang lebih cepat, serta ramah lingkungan.

In 2018, the Company established the Modular Division to expand its business activities in the modular technology construction industry. This step also marked the beginning of the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in the Company's core business processes. As part of the Backward Offsite Construction strategy, the modular industry adds value to every building and space requirement, by offering more precise quality, faster construction systems, and environmentally friendly.

Bisnis modular Perseroan terus berkembang setiap tahunnya, serta pemanfaatannya semakin dapat diandalkan dan teruji dalam pembangunan konstruksi gedung. Kontribusi signifikan dari modular ini terlihat jelas selama pandemi COVID-19, ketika Perseroan mengoptimalkan penggunaan teknologi modular untuk pembangunan beberapa rumah sakit darurat guna perawatan pasien di berbagai wilayah di Indonesia.

The Company's modular business line continues to grow every year, and its use is increasingly reliable and proven in building construction. The significant contribution of this modular was clearly seen during the COVID-19 pandemic, when the Company optimized the use of modular technology for the construction of several emergency hospitals for patient care in various regions in Indonesia.

Pada tahun 2018, Perseroan memperluas lini bisnisnya ke konsesi dengan meresmikan proyek konsesi pertama yaitu Hotel De Braga Bandung melalui skema BOT (*Build-Operate-Transfer*) dengan partner PT Sarinah.

In 2018, the Company expanded its business line to concessions by inaugurating the first concession project, namely Hotel De Braga Bandung through a BOT (Build-Operate-Transfer) scheme with partner PT Sarinah.

Pada tahun 2019, Perseroan mendirikan PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) sebagai entitas anak yang bergerak di bidang konstruksi, *real estate*, hotel, dan perparkiran. WSP berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0035258. AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi, serta tercatat dalam daftar WSP No. AHU-0116523.AH.01.11 pada tanggal 22 Juli 2019.

In 2019, the Company established PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) as a subsidiary engaged in construction, real estate, hotels, and parking. WSP is domiciled in East Jakarta and was established based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. This deed of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0035258.AH.01.01 of 2019 concerning the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company Legal Entity PT Wege Solusi Proklamasi, and is recorded in WSP list No. AHU-0116523.AH.01.11 on July 22, 2019.

Pada akhir tahun 2024, Perseroan mengambil langkah penting dengan melakukan perubahan terhadap Visi dan Misi, yang telah disusun dan dibahas dalam Rapat Direksi dan Manajemen, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Nomor : MJ.01.00/A. DIR.00003. WEGE/2024 tanggal 24 Desember 2024. Perubahan ini kemudian disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris yang melibatkan Direksi (Rakomdir), sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor : SE.01.03/A.KOM.00001/2025 tanggal 30 Desember 2024. Perubahan visi dan misi ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan industri dan tuntutan bisnis yang semakin dinamis, serta untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) yang berkelanjutan bagi Perseroan.

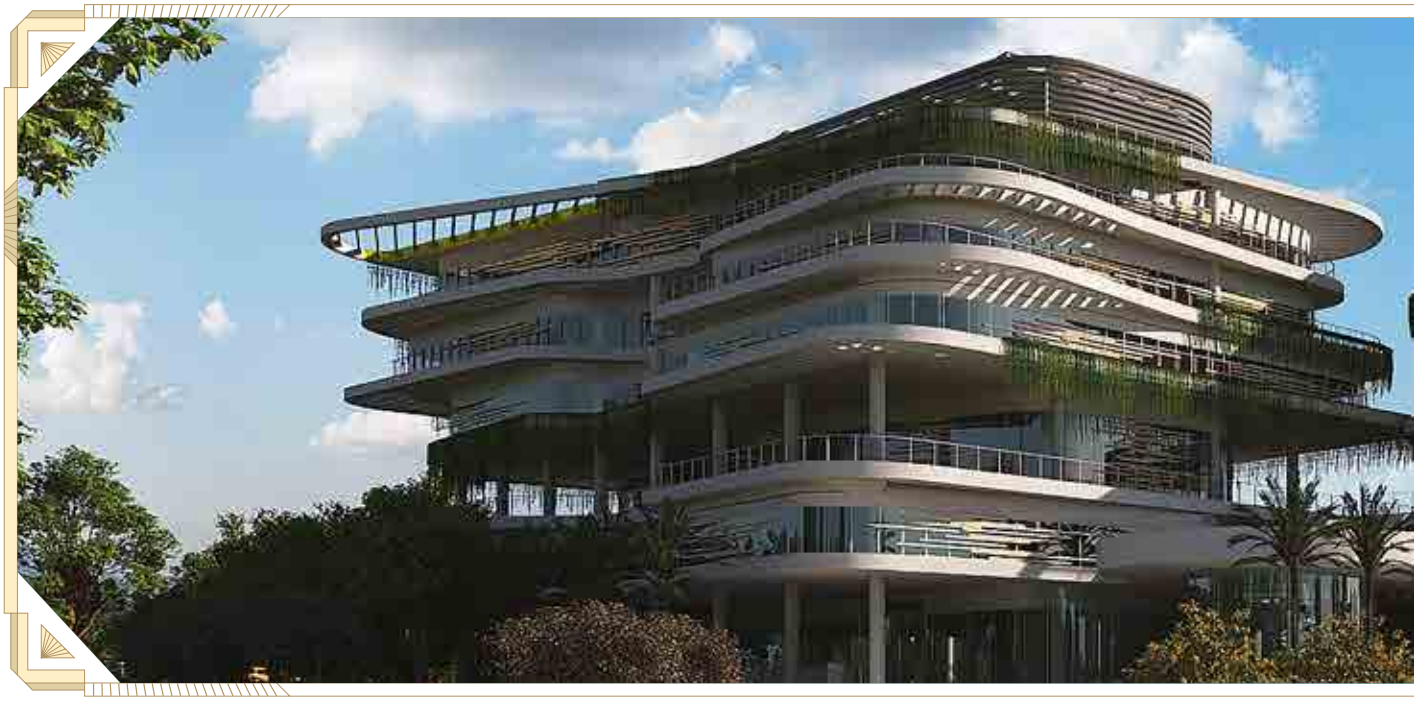
At the end of 2024, the Company took an important step by revising its Vision and Mission, which had been prepared and discussed in the Board of Directors and Management Meeting, as stated in the Minutes of Meeting Number: MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 dated December 24, 2024. This revision was subsequently approved in the Board of Commissioners Meeting involving the Board of Directors (Board Meeting), as stated in the Minutes of Meeting Number: SE.01.03/A.KOM.00001/2025 dated December 30, 2024. The changes to the vision and mission were made in response to industry challenges and increasingly dynamic business demands, as well as to achieve sustainable long-term sustainability for the Company.

Seiring dengan perkembangan bisnis, Perseroan terus berupaya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha dengan memperkuat bisnis utamanya di sektor jasa konstruksi bangunan gedung. Hal ini dilakukan melalui *backward integration*, yang mencakup pengembangan industri modular dan pracetak, serta *forward integration* melalui bisnis konsesi.

In line with its business developments, the Company continues to strive to improve performance and business sustainability by strengthening its core business in the building construction services sector. This is carried out through backward integration, which includes the development of modular and precast industries, as well as forward integration through concession businesses.

Meski berusia relatif lebih muda dibandingkan para pesaingnya, Perseroan telah menjadi partner pilihan dalam bidang konstruksi bangunan gedung yang mengedepankan *safety & quality* dalam menciptakan ruang (*space*) untuk kehidupan manusia yang lebih

Despite being relatively younger compared to its competitors, the Company has become a preferred partner in building construction by prioritizing safety and quality in creating spaces for a better human life. Various large-scale and highly complex construction projects



baik. Berbagai proyek konstruksi berskala besar dan kompleksitas tinggi telah berhasil diselesaikan, antara lain Dhoho International Airport Kediri, Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, pembangunan berbagai rumah sakit darurat COVID-19 menggunakan teknologi modular, serta berbagai proyek lainnya.

Pencapaian Perseroan dalam pembangunan berbagai jenis proyek, seperti perkantoran, residensial, fasilitas publik, dan komersial, merupakan hasil dari transformasi bisnis yang komprehensif. Pengembangan metode *offsite construction* modular yang efisien dan ramah lingkungan didorong oleh inovasi melalui penerapan teknologi *Building Information Modelling* (BIM) pada seluruh proyek, serta penerapan *System Applications and Products (SAP)*. Dengan langkah-langkah tersebut, per 31 Desember 2025, Perseroan berhasil memperoleh 419 kontrak baru dengan total nilai proyek mencapai Rp57,60 triliun, yang mencerminkan keberhasilan strategi dan komitmen Perseroan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan.

have been successfully completed, including Dhoho International Airport Kediri, Jakarta International Stadium, Jakarta International Velodrome, Jakarta International Equestrian Park, the construction of various COVID-19 emergency hospitals using modular technology, and many other projects.

The Company's achievements in developing various types of projects, such as office buildings, residential properties, public facilities, and commercial developments, are the result of a comprehensive business transformation. The development of efficient and environmentally friendly offsite modular construction methods is driven by innovation through the implementation of Building Information Modelling (BIM) technology across all projects, as well as the application of System Applications and Products (SAP). Through these initiatives, as of December 31, 2025, the Company successfully secured 419 new contracts with a total project value of Rp57.60 trillion, reflecting the success of its strategy and commitment to sustainable growth.

Informasi Perubahan Nama Emiten Pada Tahun Buku
Information on Changes in the Issuer's Name in the Fiscal Year

Sejak didirikan hingga penerbitan laporan tahunan ini, Perseroan tidak mengalami perubahan nama. Perseroan mengalami perubahan status menjadi perusahaan terbuka setelah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Selanjutnya, saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017. Dengan demikian, nama Perseroan yang digunakan hingga saat ini adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Since its establishment until the issuance of this annual report, the Company has not undergone any change in its name. The Company changed its status to a public company after being declared effective based on the Decree of Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. Subsequently, the Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017. Accordingly, the Company's name used to date remains PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



Jejak Langkah
Milestones

2008

WEGE didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dengan *core business* pada penyediaan jasa konstruksi bangunan gedung yang menyasar segmen pasar swasta.
WEGE was established under Deed No. 43 dated October 24, 2008, as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), with a core business providing building construction services targeting the private market segment.

2012

WEGE menjalankan transformasi strategis untuk meningkatkan pertumbuhan profitabilitas melalui penerapan strategi *Blue Ocean*, optimalisasi efisiensi biaya, serta peningkatan kapabilitas sumber day manusia.
WEGE is undertaking a strategic transformation to increase profitability through the implementation of a Blue Ocean strategy, optimizing cost efficiency, and enhancing human resource capabilities.

2013

WEGE memperluas bisnis ke sektor properti melalui proyek perdana, Apartemen Tamansari Tera.
WEGE expanded its business into the property sector through its debut project, the Tamansari Tera Apartments.

2014

WEGE memperoleh kontrak proyek superblock pertama, dengan nilai kontrak lebih dar satu triliun rupiah.
WEGE secured its first superblock project contract, with a contract value of over one trillion rupiah.

2016

- Terjadi penggabungan Departemen Bangunan Gedung WIKA ke dalam WEGE, sehingga cakupan bisnis yang sebelumnya berfokus pada pasar swasta berkembang mencakup segmen pemerintah dan BUMN. Penggabungan ini semakin memperkuat kapasitas dan kapabilitas WEGE dalam industri konstruksi bangunan gedung.
- WEGE bersama WTON mendirikan entitas anak yang bergerak di bidang industry pracetak berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016.
- WIKA Building Construction Department was merged into WEGE, expanding its business scope, previously focused on the private sector, to include government and state-owned enterprises (SOEs). This merger further strengthens WEGE's capacity and capabilities in the building construction industry.
- WEGE, together with WTON, established a subsidiary operating in the precast industry based on Deed No. 142 dated December 23, 2016.

2017

WEGE melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO) di Bursa Efek Indonesia, yang dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.
WEGE conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange, which was declared effective based on the Decree of Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017 with the stock code WEGE.

2018

WEGE memperluas bisnis ke sektor konstruksi teknologi modular melalui pembentukan Divisi Modular.
WEGE memperluas lini bisnisnya ke konsesi dengan meresmikan proyek konsesi pertama, Hotel De Braga Bandung.
WEGE expanded its business into the modular technology construction sector through the establishment of the Modular Division.
WEGE expanded its business into THE concessions by inaugurating its first concession project, Hotel De Braga Bandung.

2019

WEGE mendirikan PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, sebagai entitas anak yang bergerak di bidang konstruksi, *real estate*, hotel, dan perparkiran.
WEGE established PT Wege Solusi Proklamasi (WSP) based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, as a subsidiary engaged in construction, real estate, hotels, and parking.

2020

Pertumbuhan bisnis Modular WEGE dimulai dengan diterimanya pemesanan produk Modular FLATPACK dalam jumlah besar untuk pembangunan berbagai rumah sakit khusus penanganan COVID-19, yang berhasil diselesaikan dalam waktu singkat dan mencatatkan rekor nasional.
WEGE's modular business growth began with the receipt of a large order for FLATPACK modular products for the construction of several hospitals specifically for handling COVID-19, which were successfully completed in a short time, setting a national record.

2021

WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 19650:2018 BIM *Design and Construction* BSI Kitemark.
WEGE became the first construction company to obtain ISO 19650:2018 BIM Design and Construction BSI Kitemark certification.

2022

WEGE berhasil meraih proyek pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menggunakan teknologi modular, yaitu pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dengan kapasitas besar dan waktu penyelesaian yang cepat.
WEGE successfully secured the first project in the Indonesian capital city (IKN) using modular technology, namely the construction of a Construction Workers' Housing (HPK), with a large capacity and fast completion time.

2023

WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi ISO 50001:2018 mengenai Sistem Manajemen Energi (*Energy Management System*).
WEGE became the first construction company in Indonesia to obtain ISO 50001:2018 certification for Energy Management Systems.

2024

WEGE melakukan penguatan melalui perubahan Visi dan Misi guna merespons dinamika tantangan industri dan tuntutan bisnis, serta untuk memastikan tercapainya keberlanjutan (*sustainability*) bagi Perseroan.
WEGE is strengthening its position through changes to its Vision and Mission to respond to the dynamics of industry challenges and business demands, and to ensure the achievement of the Company's sustainability.

2025

WEGE release NETRO, sebuah inovasi sistem hunian modular pintar (*Smart Net-Zero Growing Modular House System*) yang mengintegrasikan arsitektur hijau dan efisiensi energi sebagai solusi perumahan masa depan yang berkelanjutan.
WEGE released NETRO, an innovative smart modular housing system (Smart Net-Zero Growing Modular House System) that integrates green architecture and energy efficiency as a sustainable future housing solution.

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

Pada tahun 2024, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk melakukan perubahan Visi dan Misi yang telah disusun dan dibahas dalam Rapat Direksi dan Manajemen, sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Nomor MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 tanggal 24 Desember 2024. Perubahan ini kemudian disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris yang melibatkan Direksi (Rakomdir), sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor SE.01.03/A.KOM.00001/2025 tanggal 30 Desember 2024.

In 2024, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk revised its Vision and Mission, which had been prepared and discussed in the Board of Directors and Management Meeting, as stated in the Minutes of Meeting Number: MJ.01.00/A.DIR.00003.WEGE/2024 dated December 24, 2024. This revision was subsequently approved in the Board of Commissioners Meeting involving the Board of Directors (Board Meeting), as stated in the Minutes of Meeting Number: SE.01.03/A.KOM.00001/2025 dated December 30, 2024.



Visi dan Penjelasan Visi
Vision and the Explanation

Menjadi mitra yang terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan

To be a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem

Visi dan misi Perseroan menjadi landasan utama dalam menjalankan arah strategis perusahaan untuk menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan. Visi dan misi tersebut diwujudkan melalui penguatan kepercayaan dan transparansi, penyediaan solusi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, serta integrasi teknologi untuk mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Perseroan juga secara aktif membangun ekosistem kolaboratif dengan mitra strategis guna meningkatkan kapabilitas dan daya saing, sekaligus menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari seluruh proses bisnis. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi enam faktor kunci sukses yang menjadi landasan pencapaian tujuan strategis, yaitu fokus pada pelanggan, inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan dan manajemen yang efektif, kemitraan strategis, serta keberlanjutan. Melalui penerapan faktor-faktor kunci sukses ini, Perseroan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan, memperkuat daya saing di pasar, serta memastikan pertumbuhan usaha yang sehat, adaptif, dan bertanggung jawab dalam jangka panjang

The Company's vision and mission serve as the primary foundation for implementing its strategic direction to become a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem. This vision and mission are realized through strengthening trust and transparency, providing solutions oriented to customer needs, and integrating technology to drive innovation and operational efficiency. The Company also actively builds a collaborative ecosystem with strategic partners to enhance capabilities and competitiveness, while placing sustainability at the core of all business processes. To realize this vision and mission, the Company has identified six key success factors that serve as the foundation for achieving its strategic objectives: customer focus, technological innovation, human resource development, effective leadership and management, strategic partnerships, and sustainability. Through the implementation of these key success factors, the Company is committed to creating sustainable added value for all stakeholders, strengthening competitiveness in the market, and ensuring healthy, adaptive, and responsible business growth in the long term.



Misi dan Penjelasan Misi
Mission and the Explanation

1. **Memperkuat kepercayaan dan transparansi**
2. **Memprioritaskan solusi untuk pelanggan**
3. **Mengintegrasikan teknologi untuk inovasi**
4. **Menciptakan ekosistem kolaboratif dengan mitra strategis**
5. **Berorientasi keberlanjutan sebagai inti proses operasi**

1. Strengthening trust and transparency
2. Prioritizing solutions for customers
3. Integrating technology for innovation
4. Creating a collaborative ecosystem with strategic partners
5. Sustainability-oriented as the core operating process

REVIU VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN

Visi dan Misi Perseroan telah ditetapkan dan diberlakukan melalui kajian yang mendalam serta melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, jajaran Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya. Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Visi dan Misi Perseroan masih relevan dengan perkembangan dan kondisi lingkungan bisnis di tahun 2025 serta arah dan tujuan bisnis Perseroan.

VISION AND MISSION REVIEW BY MANAGEMENT

The Company's Vision and Mission have been established and implemented through an in-depth review involving the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Company's management, and other stakeholders. As of the publication of this annual report, the Board of Commissioners and the Board of Directors assess that the Company's Vision and Mission remain relevant to developments and business conditions in 2025, as well as the Company's business direction and objectives.

BUDAYA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk membangun budaya perusahaan yang mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja melalui penerapan keyakinan (*beliefs*), nilai-nilai (*values*), serta perilaku dan sikap kerja yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Perseroan sebagai anak perusahaan
BUMN wajib menerapkan Nilai-Nilai Utama yang dikenal dengan singkatan AKHLAK.

Core values AKHLAK merupakan bagian dari transformasi *Human Capital* yang dirancang untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global sekaligus menciptakan ekosistem kerja yang mendukung pengembangan talenta unggul. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai perekat budaya kerja yang selaras dengan visi Perseroan dalam mendorong kinerja industri nasional.

Perseroan berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menerapkan *core values* AKHLAK di seluruh lapisan organisasi, guna memastikan budaya kerja yang mendukung keberlanjutan kinerja serta kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

CORPORATE CULTURE

The Company is committed to building a corporate culture that is able to support the improvement of performance quality through the implementation of beliefs, values, and work behaviors and attitudes that are in accordance with the Company's strategic objectives. Based on Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, concerning the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises, the Company, as a subsidiary of an SOE, is required to implement the Core Values known by the abbreviation AKHLAK.

AKHLAK core values are part of the Human Capital transformation designed to enhance the competitiveness of SOE at global level while creating a work ecosystem that supports the development of superior talent. These values serve as the unifying force of a work culture aligned with the Company's vision of driving national industrial performance.

The Company plays an active role in socializing and implementing AKHLAK core values at all levels of the organization, in order to ensure a work culture that supports sustainable performance and maximum contribution to the achievement of corporate goals.



PANDUAN PERILAKU "AKHLAK"

"AKHLAK" CONDUCT GUIDELINES

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Sentences	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Behavioral Guidelines
Amanah **Trustworthy**	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. We uphold the trust that has been placed in us.	1. Integritas 2. Tulus 3. Konsisten 4. Dapat Dipercaya 1. Integrity 2. Sincerity 3. Consistency 4. Trustworthiness	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan Tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika 1. Fulfill promises and commitments 2. Responsible for tasks, decisions and actions taken 3. Adhere to moral and ethical values
Kompeten **Competent**	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. We continuously learn and develop our capabilities.	1. Kinerja Terbaik 2. Sukses 3. Keberhasilan 4. Learning Agility 5. Ahli di Bidangnya 1. Best Performance 2. Success 3. Achievement 4. Learning Agility 5. Expertise in Own Field	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Improve own competencies to meet ever-changing challenges 2. Help others learn 3. Complete tasks with the highest quality

Nilai Inti Core Values	Kalimat Afirmatif Affirmative Sentences	Kata Kunci Keywords	Panduan Perilaku Behavioral Guidelines
Harmonis **Harmonious**	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. We care for one another and respect differences	1. Peduli (Caring) 2. Perbedaan (Diversity) 1. Caring 2. Diversity	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 1. Respect everyone regardless of their background 2. Enjoy helping others 3. Build a conducive work environment
Loyal	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. We are dedicated and prioritize the interests of the nation and the state.	1. Komitmen 2. Dedikasi (rela berkorban) 3. Kontribusi 1. Commitment 2. Dedication (willingness to make sacrifices) 3. Contribution	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika 1. Maintain the reputation of fellow employees, leaders, state-owned enterprises, and the state. 2. Be willing to make sacrifices to achieve greater goals. 3. Obey leaders as long as they do not conflict with the law or ethics.
Adaptif **Adaptive**	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. We continuously innovate and remain enthusiastic in driving and embracing change	1. Inovasi 2. Antusias terhadap Perubahan 3. Proaktif 1. Innovation 2. Enthusiasm for Change 3. Proactiveness	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif 1. Adapt quickly to be better. 2. Continuously improve oneself to keep up with technological developments. 3. Be proactive.
Kolaboratif **Collaborative**	Kami membangun kerja sama yang sinergis. We build synergistic collaboration.	1. Kesediaan bekerjasama 2. Sinergi untuk hasil yang lebih baik 1. Willingness to Collaborate 2. Synergy for Better Results	1. Memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 1. Provide opportunities for various parties to contribute 2. Be open to collaboration to generate added value 3. Encourage the utilization of various resources for common goals

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Perseroan secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi budaya "AKHLAK" di seluruh lingkungan kerja. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Human Capital Division guna memastikan pemahaman yang menyeluruh dan implementasi yang konsisten terhadap nilai-nilai AKHLAK, baik oleh seluruh insan Perseroan maupun pemangku kepentingan eksternal yang berinteraksi dengan Perseroan.

CORPORATE CULTURE SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION

The Company actively organizes socialization and internalization programs of "AKHLAK" culture throughout its work environment. These activities are coordinated by the Human Capital Division to ensure a comprehensive understanding and consistent implementation of AKHLAK values, both by all employees of the Company and external stakeholders who interact with the Company.



Penyematan Pin *Change Agent*
Awarding Pins for Change Agent

6 Oktober 2025 – Lantai 11 WIKA Tower 1
October 6, 2025 – 11th floor of WIKA Tower 1

Makna Logo Perusahaan
Meaning of the Company Logo





Logo Perusahaan berasal dari logo PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai Induk Perusahaan, dengan penambahan kata "Gedung" yang menunjukan identitas Perusahaan sebagai entitas usaha dalam menyediakan ruang bagi aktivitas manusia sebagai kontraktor gedung dalam pemahaman luas (*terintegrasi/ total solution*) dan pengembangannya baik secara *forward* dan *backward*.

The Company's logo is derived from the logo of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as the Parent Company, with the addition of the word "Gedung," which reflects the Company's identity as a business entity providing space for human activities as a building contractor in a broad sense (integrated/total solution), including both forward and backward development.



Warna biru pada logo menunjukan identitas khas WIKA Group. Selain itu, warna biru melambangkan inovasi dan teknologi, yang menjadi landasan utama bagi Perusahaan dalam seluruh aktivitasnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan nilai tambah.

The blue color in the logo represents the distinctive identity of WIKA Group. In addition, blue symbolizes innovation and technology, which serve as the main foundation for the Company in all its activities to enhance growth and create added value.



Huruf "G" dalam logo, yang berbentuk pita, melambangkan persembahan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Logo ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam menciptakan keterlibatan *(engagement)* melalui pendekatan "*Say, Stay, dan Strive*" yang diimplementasikan melalui penyediaan "*Quality in Product and Services*" serta kepedulian terhadap kehidupan (*Care for Life*).

The letter "G" in the logo, shaped like a ribbon, symbolizes the Company's dedication to its stakeholders. This logo reflects the Company's commitment to creating engagement through the "Say, Stay, and Strive" approach, implemented through the provision of "Quality in Products and Services" and a strong "Care for Life" philosophy.



Warna oranye pada logo melambangkan kreativitas, semangat, dan energi positif. Dengan filosofi ini, Perusahaan berkomitmen untuk menjadi mitra pilihan bagi para pemangku kepentingan utama melalui penciptaan nilai yang berkelanjutan dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

The orange color in the logo symbolizes creativity, enthusiasm, and positive energy. With this philosophy, the Company is committed to becoming the partner of choice for key stakeholders by creating sustainable value and making positive contributions to the surrounding environment.

Kegiatan dan Bidang Usaha
Business Activities and Lines of Business

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor : 3 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 ("Anggaran Dasar Perseroan"), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut :

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah melaksanakan usaha di bidang:
1. Industri konstruksi dan engineering;
2. Jasa pemborongan dengan pola progress termin maupun *turnkey/Build Operate Transfer* (BOT);
3. Pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;
4. Perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi;
5. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering pada khususnya sesuai dengan prinsipprinsip perseroan terbatas;
6. Realti: sebagai pengembang realti;
7. Properti: sebagai pengembang property;
8. Industri pendukung konstruksi bangunan Gedung;
9. Investasi: sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
10. Penyediaan ruang (*space provider*) pada sarana infrastruktur transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi masal (TOD), dan infrastruktur sosial (*healthcare*); dan
11. Pembangunan dan pengembangan kawasan (*city builder*).

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang jasa konstruksi bangunan gedung, yang meliputi:
1. Pekerjaan pembangunan gedung (seluruh sektor pembangunan) termasuk sarana dan prasarananya, baik yang dilakukan di lokasi proyek *(onsite)* maupun di luar lokasi proyek *(offsite).*
2. Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing gedung.
3. Jasa perencanaan, *feasibility study,* perancangan (desain), *quantity surveying, project management services, construction management services*, pengawasan, dan pekerjaan rancang bangun *(design and build).*

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE COMPANY'S LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Articles of Association as stated in the Deed of Resolution of Annual General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Number: 3 dated May 16, 2023, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree Number: AHU-0027786.AH.01.02 Year 2023 dated May 22, 2023 ("Articles of Association"), the purposes and objectives as well as business activities of the Company are as follows:

The purposes and objectives of the Company are to conduct business in the following areas:
1. Construction and engineering industry;
2. Contracting services under progress-based payment schemes and turnkey/Build Operate Transfer (BOT);
3. Management and leasing of buildings/integrated commercial areas
4. Trading and maintenance of construction equipment and materials;
5. Capability development services in construction and engineering in accordance with the principles of a limited liability company;
6. Realty: as a real estate developer;
7. Property: as a property developer;
8. Supporting industries for building construction;
9. Investment: as an investor, either directly or through equity participation in subsidiaries and/or joint ventures;
10. Provision of space (space provider) in transportation infrastructure such as airports, ports, mass transit (TOD), and social infrastructure (healthcare); and
11. Area development (city builder).

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE FISCAL YEAR

The Company's main business activities are in building construction services, which include:
1. Building construction works (all sectors), including facilities and infrastructure, carried out both onsite and offsite;
2. Mechanical, electrical, and plumbing (MEP) works;
3. Services including planning, feasibility studies, design, quantity surveying, project management services, construction management services, supervision, and design and build;

4. Pembelian/pengadaan lahan sebagai persediaan, pengembangan, pengelolaan, penjualan dan/atau penyewaan, di bidang properti, dan realti serta konsesi yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk fasilitas publik dan social diantaranya fasilitas kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, keagamaan dan/atau sarana dan prasarana publik.

Selain kegiatan utama, Perseroan juga menjalankan kegiatan pendukung berupa:
1. Layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan engineering;
2. Penyediaan jasa pengadaan/perdagangan penyewaan peralatan/material konstruksi;
3. Industri terkait di bidang konstruksi bangunan gedung; dan
4. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang Perseroan di atas.

PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

WEGE merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi yang bisnis utamanya (*core business*) pada jasa konstruksi bangunan gedung, didukung oleh *backward integration* melalui industri modular dan pracetak, serta *forward integration* melalui bisnis konsesi. Sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir, produk dan/atau jasa yang saat ini dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

JASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Perseroan menerapkan konsep bangunan gedung terintegrasi yang diawali dengan bisnis inti di sektor konstruksi bangunan gedung melalui strategi *Total Solution* Service, yang menawarkan layanan *end-to-end* mencakup studi kelayakan, perencanaan, perancangan, konstruksi, *operation and maintenance* serta pendanaan. Layanan ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, termasuk fondasi, struktur, MEP *(Mechanical, Electrical and Plumbing)*, *lighting*, arsitektur, interior, lansekap dan sebagainya. Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui solusi terintegrasi yang komprehensif dan efisien dalam satu paket layanan. Selain itu, Perseroan telah mengimplementasikan *lean construction* dengan mengawali transformasi melalui digitalisasi proses *engineering*.

OFFSITE CONSTRUCTION

Untuk mendukung bisnis inti di sektor konstruksi bangunan gedung, Perseroan memiliki strategi *backward offsite construction* dengan kegiatan usaha yang mencakup modular dan pracetak. Penerapan *offsite construction* ini merupakan bagian dari langkah Perseroan untuk memperkuat integrasi usaha melalui pengembangan lini bisnis yang lebih komprehensif.

Modular WEGE mengusung konsep konstruksi *offsite* yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, serta memberikan keuntungan dari segi waktu pengerjaan yang lebih cepat. Produkproduk modular, termasuk MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, dan Volumetrik, dirancang dengan sistem prefabrikasi modul-modul yang dapat dirangkai menjadi bangunan. Selain itu, Perseroan juga melalui perusahaan asosiasi, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG), memperkuat lini bisnis pracetak dengan menawarkan produk-produk seperti balok pracetak, kolom pracetak, dan komponen struktur pracetak.

4. Land acquisition for inventory, development, management, sale and/or leasing in property, realty, and concessions related to the provision of space for public and social facilities such as healthcare, education, cultural, sports, religious facilities, and/or public infrastructure.

In addition to its main activities, the Company also carries out supporting activities in the form of:
1. Capability development services in construction and engineering;
2. Procurement/trading and rental services of construction equipment/materials;
3. Industries related to building construction; and
4. Other businesses that support the Company's main and supporting activities.

PRODUCTS AND/OR SERVICES

WEGE is an integrated construction company whose core business lies in building construction services, supported by backward integration through modular and precast industries, as well as forward integration through concession businesses. In accordance with the latest Articles of Association, the Company's products and/or services are as follows:

BUILDING CONSTRUCTION SERVICES

The Company applies an integrated building concept starting from its core business in building construction through a Total Solution Service strategy, offering end-to-end services covering feasibility studies, planning, design, construction, operation and maintenance, and financing. These services include various works such as foundations, structures, MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), lighting, architecture, interior, landscaping, and more. This approach provides added value to customers through comprehensive and efficient integrated solutions in a single service package. In addition, the Company has implemented lean construction by initiating transformation through the digitalization of engineering processes.

OFFSITE CONSTRUCTION

To support its core business, the Company implements a backward integration strategy through offsite construction, covering modular and precast activities. This approach strengthens business integration through the development of more comprehensive business lines.

WEGE Modular adopts an environmentally friendly offsite construction concept, efficient in energy use, and offering faster project completion. Modular products, including MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, and Volumetric, are designed using prefabricated modules that can be assembled into buildings. In addition, through its associate company, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG), the Company strengthens its precast business by offering products such as precast beams, columns, and structural components.

Baik industri modular dan pracetak semakin menjadi pilihan utama dalam metode konstruksi modern, karena mengutamakan efisiensi waktu, penggunaan sumber daya yang optimal, dan tetap menjaga kualitas bangunan. Untuk mendukung inovasi berkelanjutan, Perseroan telah memperoleh sejumlah hak paten terkait produk-produk *offsite construction* dan melanjutkan riset dan pengembangan untuk menciptakan solusi konstruksi yang lebih unggul dan efisien.

Both modular and precast industries are increasingly becoming preferred methods in modern construction due to their efficiency in time, optimal resource utilization, and consistent quality. To support continuous innovation, the Company has obtained several patents related to offsite construction products and continues research and development to create superior and more efficient construction solutions.

CONCESSION

Business Stream Konsesi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mengembangkan bisnis ke sektor *forward*, dengan fokus pada pengelolaan aset-aset lahan milik pemerintah serta BUMN/BUMD melalui skema investasi *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Tujuan utama dari bisnis ini adalah untuk memperoleh seluruh pekerjaan konstruksi yang terkait dengan proyek konsesi dan investasi, sekaligus menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*) yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis.

Bisnis konsesi ini melanjutkan transformasi dari lini bisnis properti yang sebelumnya dijalankan oleh Perseroan. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha konsesi meliputi penyediaan dan pengelolaan berbagai infrastruktur khususnya bangunan gedung, seperti bangunan kebandarudaraan, rumah sakit, dan perkantoran, yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang serta pendapatan yang berkelanjutan bagi Perseroan.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan telah memiliki dua proyek konsesi, yaitu Apartemen Tamansari Mahogany yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat, berupa bangunan 2 Tower Apartemen serta Tamansari Prospero yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Selain itu, Perseroan memiliki proyek investasi yaitu Hotel De Braga di Bandung, yang dikerjakan bersama partner PT Sarinah dengan skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 25 tahun, serta proyek konsesi Graha Mantap di Menteng, Jakarta, yang dikerjakan bersama partner Bank Mandiri Taspen dengan skema BOT selama 30 tahun. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu proyek investasi, Fave Hotel yang berlokasi di Karawang.

CONCESSION

The concession business stream is part of the Company's effort to expand into forward integration, focusing on managing land assets owned by the government and SOEs/ROEs through Public Private Partnership (PPP) or Government and Business Entity Cooperation (KPBU) schemes. The main objective is to secure construction work related to concession and investment projects while generating recurring income to support business sustainability.

This concession business continues the transformation from the Company's previous property business line. The scope includes the provision and management of infrastructure, particularly building projects such as airport facilities, hospitals, and office buildings, aimed at delivering long-term benefits and sustainable income.

As of the end of 2025, the Company has two concession projects: Tamansari Mahogany Apartments in Karawang, West Java (2 apartment towers), and Tamansari Prospero in Sidoarjo, East Java.

In addition, the Company has investment projects including Hotel De Braga in Bandung, developed in partnership with PT Sarinah under a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme for 25 years, and Graha Mantap in Menteng, Jakarta, in collaboration with Bank Mandiri Taspen under a BOT scheme for 30 years. The Company also owns one investment project, Fave Hotel located in Karawang.



Wilayah Operasional
Operational Areas



OPERATION DIVISION

Area Operasi/ Operational Areas
- Provinsi DKI Jakarta/DKI Jakarta Province
- Provinsi Jawa Barat/West Java Province
- Provinsi Banten/Banten Province
- Provinsi Sumatera/Sumatra Province

OPERATION & CONCESSION DIVISION

Area Operasi/ Operational Areas
- Provinsi Kalimantan/Kalimantan Province
- Property Konsesi di seluruh Indonesia/ Concession properties across Indonesia

OPERATION & MODULAR DIVISION

Area Operasi/ Operational Areas
- Provinsi Jawa Timur/East Java Province
- Provinsi Bali/Bali Province
- Provinsi NTB/NTB Province
- Provinsi NTT/NTT Province
- Provinsi Yogyakarta/Yogyakarta Province
- Provinsi Sulawesi/Sulawesi Province
- Provinsi Maluku/Maluku Province
- Provinsi Papua/Papua Province
- Provinsi Jawa Tengah/Central Java Province
- Pabrik Modular/Modular factory

Daftar Keanggotaan Organisasi atau Asosiasi
List of Memberships in Organizations or Associations

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai asosiasi profesional dan organisasi terkait. Keanggotaan ini bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis, meningkatkan kapabilitas perusahaan, serta mempererat komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

As a company operating in the construction sector, the Company actively participates in various professional associations and related organizations. These memberships aim to expand business networks, enhance the Company's capabilities, and strengthen communication with stakeholders.

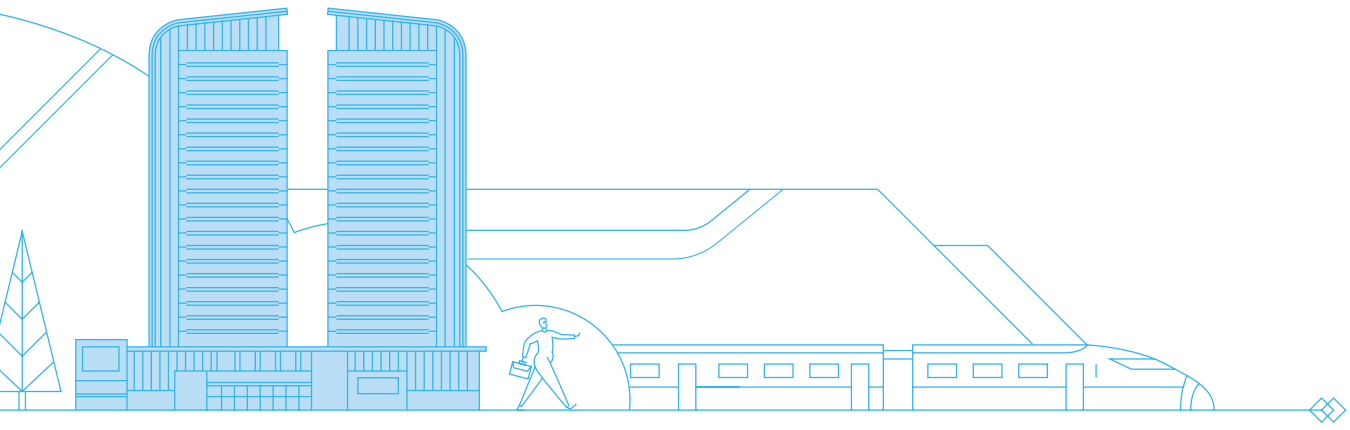
Partisipasi aktif Perseroan juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan upaya kolaboratif dalam mengatasi berbagai tantangan operasional, sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis.

The Company's active participation also reflects its commitment to Good Corporate Governance (GCG) principles and collaborative efforts in addressing operational challenges, while supporting the achievement of strategic objectives.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tercatat sebagai anggota dalam organisasi dan asosiasi berikut:

As of the end of 2025, the Company is registered as a member of the following organizations and associations:

No.	Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	Ruang Lingkup Scope of Activities	Posisi Keikutsertaan di Organisasi/Asosiasi Position in the Organization/ Association	Masa Berlaku Keanggotaan Membership Term
1.	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Indonesian National Construction Contractors Association (GAPENSI)	Nasional National	Anggota Member	31 Desember 2026 December 31, 2026
2.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Nasional National	Anggota Member	28 Maret 2026 March 28, 2026
3.	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) Indonesian National Association of Design and Construction Companies (GAPENRI)	Nasional National	Anggota Member	10 Oktober 2026 October 10, 2026
4.	Asosasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Indonesian Electrical and Mechanical Contractors Association (AKLI)	Nasional National	Anggota Member	31 Desember 2025 December 31, 2025
5.	Green Building Council	Nasional National	Anggota Member	9 Desember 2026 December 9, 2026



Struktur Organisasi Perusahaan
Organizational Structure of The Company

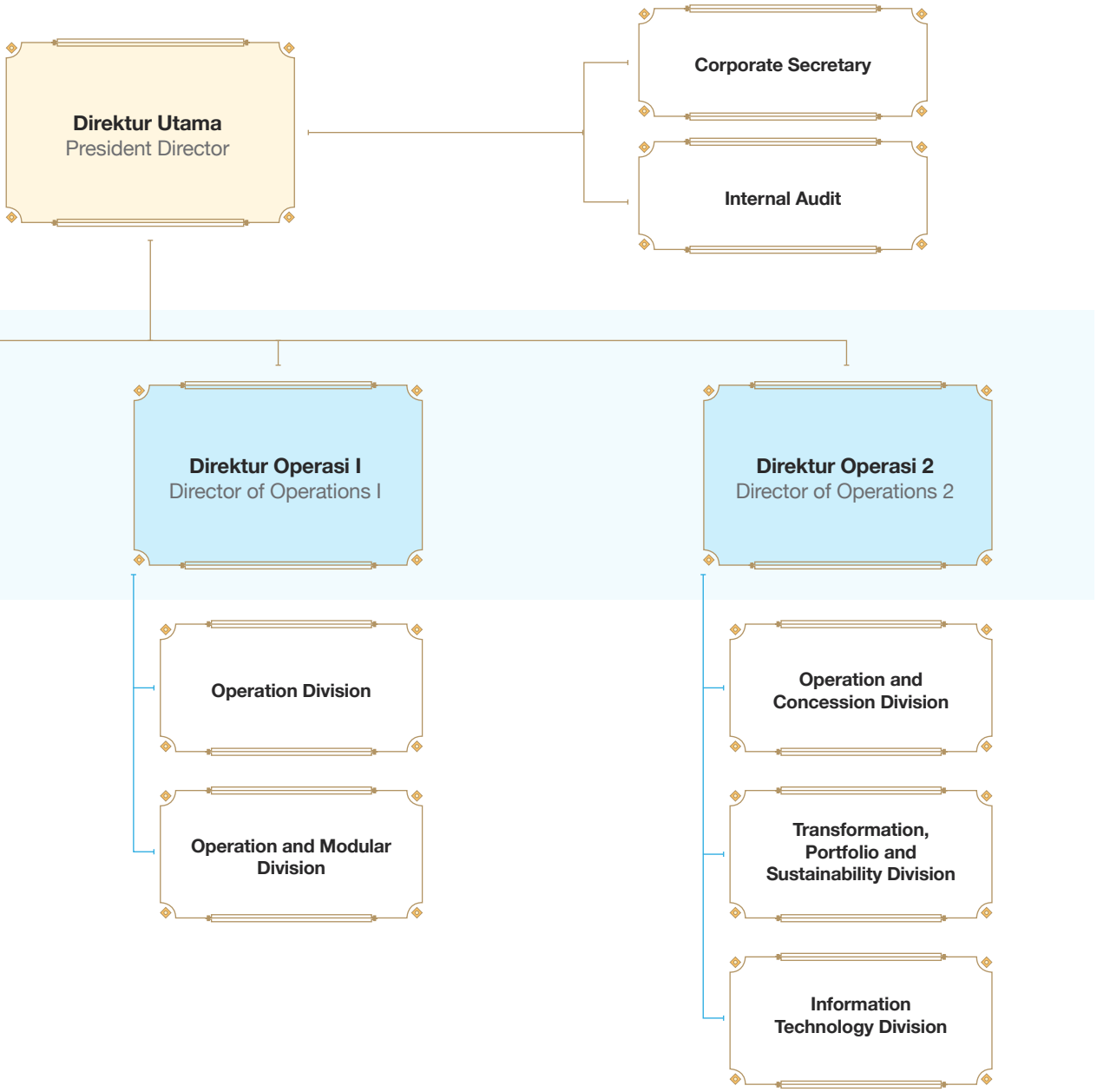
Struktur Organisasi WEGE per 31 Desember 2025, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.00011.WEGE/2025 tanggal 24 Maret 2025 Berikut struktur tata kelola dan organisasi WEGE:

December 31, 2025, was established through the Decree No. SK.01.01/A.DIR.00011.WEGE/2025 dated March 24, 2025. The following is WEGE's governance and organizational structure:

STRUKTUR ORGANISASI PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK PER 31 DESEMBER 2025

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK AS OF DECEMBER 31, 2025





Penetapan susunan Komite Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan SK Dewan Komisaris per tanggal 11 Juni 2024. Sementara itu, di atas organ Direksi terdapat organ RUPS dan Dewan Komisaris yang memiliki peran masing-masing. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite Penunjangnya.

Di tahun 2025, Komite penunjang Dewan Komisaris masih mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024. Komite penunjang Dewan Komisaris antara lain Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

The composition of Board of Commissioners' Committees was determined based on the Decree of Board of Commissioners dated June 11, 2024. Meanwhile, above the Board of Directors, there are the GMS and the Board of Commissioners, each with its own respective roles. In carrying out its supervisory duties, Board of Commissioners is assissted by the Secretary of Board of Commissioners and its Supporting Committees.

In 2025, the Committees supporting Board of Commissioners continue to refer to the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024. The supporting committees of Board of Commissioners include Audit Committee, Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Taufan Gestoro

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suli Fatimah

Komisaris
Commissioner



Joseph Prajogo

Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner and Acting President Commissioner

Danis Hidayat Sumadilaga

Komisaris
Commissioner



Joseph Prajogo

Komisaris Independen
sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama
Independent Commissioner
and Acting President Commissioner

Periode Jabatan/ Term of Office

28 Juli 2020 - RUPST 2025 (Periode Pertama)
21 Mei 2025 – RUPST 2030 (Periode Kedua)
July 28, 2020 - 2025 AGMS (First Term)
May 21, 2025 - 2030 AGMS (Second Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 54 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 54 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama/Legal Basis for First Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020.	Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on July 28, 2020, confirmed in Deed Number 51 dated July 28, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir/Legal Basis for Last Appointment

Pemberhentian dan Pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPST 2025 yang diselenggarakan pada 21 Mei 2025 dan diaktakan dengan Akta RUPST 2025 Nomor 2 Tanggal 23/Mei/2025.	Dismissal and reappointment as Independent Commissioner and Acting President Commissioner of the Company based on the 2025 AGMS held on May 21, 2025, and notarized by Deed Number 2 of the 2025 AGMS dated May 23, 2025.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Sarjana Akuntansi dari Universitas Atmajaya (1995).	Bachelor's degree in Accounting from Atmajaya University (1995).

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (2024) • Pelatihan Transforming, Developing, and Sustaining Company in the Era of Turbulance, Uncertainty, Novelty, and Agility dari Asosiasi Auditor Internal (2023) • Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)	• Qualified Risk Governance Professional Certification (2024) • Transforming, Developing, and Sustaining Companies in the Era of Turbulence, Uncertainty, Novelty, and Agility Training from the Internal Auditors Association (2023) • WIKA Group Internal Commissioner Briefing - Wikasatrian (2023)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang) • Komisaris Independen PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Direktur PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang). • Direktur PT Pandu Tunggal Permana (2011 - 2017).	• President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - present) • Independent Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Director of PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - present). • Director of PT Pandu Tunggal Permana (2011 - 2017).

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

• Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - sekarang) • Komisaris Independen PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Direktur PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - sekarang). • Ketua merangkap Anggota Komite Audit Perseroan (2024-sekarang) • Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan (2024-sekarang)	• President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2024 - present) • Independent Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi (2020 - 2024). • Director of PT Petro Inovasi Indonesia (2017 - present). • Chairman and Member of the Audit Committee of Company (2024 - Present) • Chairman of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee of Company (2024–Present)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 52 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 52 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia	West Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) dated May 10, 2023, confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Magister Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Tarumanegara (2018).	Master of Psychology, Department of Psychology, Tarumanegara University (2018).

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Strengtening Leadership for Transformation (2024) • Pelatihan Komisaris Profesional (2023) • Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)	• Strengthening Leadership for Transformation (2024) • Professional Commissioner Training (2023) • WIKA Group Internal Commissioner Training - Wikasatrian (2023)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Senior Vice President of Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 - sekarang) • Kepala Divisi Human Capital PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2023) • General Manager Manajemen Talenta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020)	• Senior Vice President of Human Capital Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 - present) • Head of Human Capital Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020-2023) • General Manager of Talent Management, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020))

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

• Senior Vice President Human Capital - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk • Anggota Komite Audit Perseroan (2024-sekarang)	• Senior Vice President Human Capital - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk • Member of the Audit Committee of Company (2024 - Present)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Suli Fatimah

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan/ Term of Office

10 Mei 2023 - RUPST 2028 (Periode Pertama)
May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Term)



Danis Hidayat Sumadilaga

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan/ Term of Office

10 Mei 2023 - 2028 AGMS (Periode Pertama)
May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 64 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 64 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

S3 Doktor Bidang Strategic Management, Universitas Indonesia (2016)	Doctorate in Strategic Management, University of Indonesia (2016)

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

Pembekalan Komisaris Internal WIKA Group - Wikasatrian (2023)	Internal Commissioner Training for WIKA Group - Wikasatrian (2023)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara (2024 - sekarang) • Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - 2024) • Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - sekarang) • Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018 - 2020)	• Acting Deputy for Facilities and Infrastructure, OIKN (Nusantara Capital City Authority) (2024 - present) • Head of Task Force for the Implementation of Nusantara Capital City Development, Ministry of Public Works and Public Housing (2021 - 2024) • Senior Lecturer, Senior Expert in Human Resource Development Human Resources, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 - present) • Director General of Human Settlements, Ministry of Public Works and Public Housing (2018 - 2020)

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

• Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara (2024 - sekarang) • Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - 2024) • Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020 - sekarang) • Anggota Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan (2024-sekarang)	• Acting Deputy for Facilities and Infrastructure, OIKN (Nusantara Capital City Authority) (2024 - present) • Head of Task Force for the Implementation of Nusantara Capital City Development, Ministry of Public Works and Public Housing (2021 - 2024) • Lead Expert Lecturer for Human Resources Development, Ministry of Public Works and Public Housing (2020 - present) • Member of the Integrated Risk Monitoring and Governance Committee of Company (2024–Present)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Taufan Gestoro

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode Jabatan/ Term of Office

29 Februari 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)
February 29, 2024 - 2029 AGMS (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 59 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 59 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024.	Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024, confirmed in Deed Number 6 dated February 29, 2024.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Pama Akademi Militer (1990)	Graduate of the Military Academy (1990)

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (2024)	Qualified Risk Governance Professional Certification (2024)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Direktur D BAIS TNI (Kep/818/VIII/2022) (2022)	• Director of the Indonesian National Armed Forces Information and Communications Agency (BAIS TNI) (Kep/818/VIII/2022) (2022)
• Danrem 173/PVB DAM XVII/CEN (2021)	• Commander of the 173rd Military District Command (PVB DAM XVII/CEN) (2021)
• WAASINTEL KASAD BID. INTELEK dan HUBLU (2020)	• Deputy Intelligence Officer of the Army Chief of Staff (KASAD) for the Intelligence Division INTELLECT AND HUBLU (2020)
• PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANAS) (2016)	• PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANAS) (2016)

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Ketua merangkap anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Perseroan (2024-sekarang)	Chair and Member of the Nomination, Remuneration, and GCG Committee (2024–Present)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada Tahun Buku 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Struktur dan jumlah anggota Dewan Komisaris tetap sama dengan periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pemberhentian anggota Dewan Komisaris selama tahun berjalan.

Namun demikian, Perseroan melaksanakan pengangkatan kembali terhadap Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama untuk periode kedua, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Pengangkatan kembali tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan dan untuk menjaga stabilitas fungsi pengawasan di tingkat Dewan Komisaris.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2025 tetap berjumlah empat (4) orang, yang terdiri dari dua (2) Komisaris Independen, dengan salah satunya merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama, serta dua (2) Komisaris. Rincian komposisi dan dasar pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan pada tabel berikut.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND REASONS FOR THE CHANGES

In the 2025 Fiscal Year, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners. The structure and number of Board of Commissioners members remained the same as in the previous period; therefore, there were no additions or dismissals of members during the year.

However, the Company reappointed Joseph Prajogo as an Independent Commissioner as well as Acting President Commissioner for a second term, based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders held in 2025. This reappointment was carried out to ensure leadership continuity and to maintain the stability of supervisory function at the Board of Commissioners level.

Accordingly, as of December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Commissioners remained at four (4) members, consisting of two (2) Independent Commissioners, one of whom concurrently serves as Acting President Commissioner, and two (2) Commissioners. Details of the composition and basis for appointment of each member of Board of Commissioners are presented in the following table.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Composition and Basis of Appointment of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	21 Mei 2025 - RUPST 2030 May 21, 2025 - 2030 AGMS	Periode - 2 2nd period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 1st period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat	Komisaris Commissioner	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 1st period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 Februari 2024 - RUPST 2029 February 29, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 1st period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024, confirmed in Deed No. 6 dated February 29, 2024.



Bandara Dhoho Kediri | Dhoho Kediri Airport

Profil Direksi
Board of Directors Profile



Bagus Tri Setyana

Direktur Operasi I
Director of Operations I

Dwi Purnomo

Direktur Operasi II
Director of Operations II



Tomo Dwi Hasputro

Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety,Environment) and Marketing

Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital and Risk Management



Hadian Pramudita

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan/ Term of Office

19 April 2022 - RUPST 2027 (Periode Pertama)
April 19, 2022 - 2027 AGMS (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 64 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 64 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia	South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022.	Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 19, 2022, confirmed in Deed Number 5 dated April 19, 2022.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung (2010).	Bachelor's Degree in Civil Engineering from Parahyangan University, Bandung (2010).

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Strategic Investment (2019) • Business Improvement Leaders (2018) • Developing Strategic Mindset Program (2018)	• Strategic Investment (2019) • Business Improvement Leaders (2018) • Developing Strategic Mindset Program (2018)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 - 2022). • Direktur I Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016 - 2017). • Direktur Pemasaran PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 - 2016).	• President Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017-2022). • Director I of Marketing and Business Development of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2016-2017). • Marketing Director of PT Wijaya Karya Beton Tbk (2012 - 2016).

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2025.	He does not hold concurrent positions as of December 31, 2025.

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Hartanto Karti Raharjo

Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Human Capital, and Risk Management

Periode Jabatan/ Term of Office

20 Mei 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)
May 20, 2024 - AGMS 2029 (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 54 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 54 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Yogyakarta, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024.	Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 20, 2024, confirmed in Deed Number 8 dated May 20, 2024.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Magister Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (2022)	Master of Management from the Islamic University of Indonesia (2022)

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Certified Risk Governance Professional (2024) • Integrated GRC for Sustainable Business (2022) • Directorship Program (2022)	• Certified Risk Governance Professional (2024) • Integrated GRC for Sustainable Business (2022) • Directorship Program (2022)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Manajer Divisi Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022 - 2024) • Manajer Biro Keuangan Korporasi PT Wijaya Karya Beton Tbk (2021 - 2022) • Manajer Bagian Evaluasi Hasil Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - 2021)	• Finance Division Manager, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2022-2024) • Corporate Finance Bureau Manager, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2021-2022) • Business Results Evaluation Division Manager, PT Wijaya Karya Beton Tbk (2020 - 2021)

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2025.	Does not hold any concurrent positions as of December 31, 2025.

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Kepemilikan saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025: 70.000 lembar saham (0,0007313%)	Owns 70,000 shares (0.0007313%) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Tomo Dwi Hasputro

Direktur QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) dan Pemasaran
Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing

Periode Jabatan/ Term of Office

29 Februari 2024 - RUPST 2029 (Periode Pertama)
February 29, 2024 - 2029 AGMS (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 49 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 49 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024.	Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed Number 8 dated May 20, 2024.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Sarjana Arsitektur, Universitas Soegijapranata, Semarang (2021)	Bachelor's Degree in Architecture, Soegijapranata University, Semarang (2021)

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Marketing Role Model Sharing Session (2021) • Pelatihan Quality Control Circle for Project Manager (2021) • Penataran Keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia (2020)	• Marketing Role Model Sharing Session (2021) • Quality Control Circle Training for Project Managers (2021) • Membership Training of the Indonesian Architects Association (2020)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Manajer Divisi Pemasaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024) • Manajer Divisi Operasi Konstruksi I PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2023) • Manajer Proyek Mega Jakarta International Stadium PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2022)	• Marketing Division Manager, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023-2024) • Construction Operations Division Manager I, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2022-2023) • Mega Jakarta International Stadium Project Manager, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2019 - 2022)

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2025.	He does not hold concurrent positions as of December 31, 2025.

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Bagus Tri Setyana

Direktur Operasi I
Director of Operations I

Periode Jabatan/ Term of Office

28 Juli 2020 - RUPST 2025 (Periode Pertama)
21 Mei 2025 – RUPST 2030 (Periode Kedua)
July 28, 2020 - 2025 AGMS (First Term)
May 21, 2025 - 2030 AGMS (Second Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 55 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 55 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Cimahi, Jawa Barat, Indonesia	Cimahi, West Java, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama/Legal Basis for First Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Juli 2020 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 51 tanggal 28 Juli 2020.	Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on July 28, 2020, confirmed in Deed Number 51 dated July 28, 2020.

Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir/Legal Basis for Last Appointment

Pemberhentian dan Pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan berdasarkan RUPST 2025 yang diselenggarakan pada 21 Mei 2025 dan diaktakan dengan Akta Nomor 2 Tanggal 23/ Mei/2025.	Dismissal and reappointment as Independent Commissioner and Acting President Commissioner of the Company based on the 2025 AGMS held on May 21, 2025, notarized by Deed Number 2 dated May 23, 2025.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Magister Teknik Sipil dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2010).	Master's degree in Civil Engineering from Pelita Harapan University, Jakarta (2010).

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Pelatihan Integrasi Lean Construction LPS - TAKT PLAN dan PPM (2023) • Pelatihan Executive Insight Leadership (2021) • Sertifikasi Program Profesi Insinyur (2019)	• Lean Construction Integration Training LPS - TAKT PLAN and PPM (2023) • Executive Insight Leadership Training (2021) • Professional Engineer Program Certification (2019)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• General Manajer Departemen Operasi 7 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020). • Manajer Divisi 7 Sipil Umum 3 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017 - 2020). • Manajer Proyek Pembangunan Jalan Tol Soreang Pasir Koja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016 - 2017).	• General Manager of Operations Department 7, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020). • Manager of Division 7, General Civil Engineering 3, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2017-2020). • Project Manager of Soreang Pasir Koja Toll Road Construction Project, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2016-2017).

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2025.	Does not hold any concurrent positions as of December 31, 2025.

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Kepemilikan saham PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025: 70.000 lembar saham (0,0007313%)	Owns 70,000 shares (0.0007313%) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.



Dwi Purnomo

Direktur Operasi II
Director of Operations II

Periode Jabatan/ Term of Office

10 Mei 2023 - RUPST 2028 (Periode Pertama)
May 10, 2023 - 2028 AGMS (First Term)

Data Pribadi/Personal Data

Warga Negara Indonesia Usia 45 tahun per 31 Desember 2025	Indonesian Citizen 45 years old as of December 31, 2025

Domisili/Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan/Legal Basis for Appointment

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023.	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed Number 2 dated May 10, 2023.

Riwayat Pendidikan/Educational Background

Sarjana Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret (2003)	Bachelor's Degree in Civil Engineering, Sebelas Maret University (2003)

Sertifikasi dan/atau Pelatihan /Certification and/or Training

• Corporate Finance (2021) • Pelatihan Manajemen Risiko (2019) • Sertifikasi ASEAN Chartered Professional Engineer (2015)	• Corporate Finance (2021) • Risk Management Training (2019) • ASEAN Chartered Professional Engineer Certification (2015)

Riwayat Pekerjaan/Employment History

• Direktur QHSE dan Pemasaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023 - 2024) • Direktur Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (2019 - 2023) • Manajer Proyek Masjid Raya Provinsi Jawa Barat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2018 - 2019)	• Director of QHSE and Marketing at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2023-2024) • President Director of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (2019-2023) • Project Manager for the Grand Mosque of West Java Province, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (2018 - 2019)

Rangkap Jabatan/Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2025.	He does not hold concurrent positions as of December 31, 2025.

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham.	Has no affiliations with any members of Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

Kepemilikan Saham/Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk per 31 Desember 2025.	Does not own any shares in PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2025.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada Tahun Buku 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan. Struktur dan jumlah anggota Direksi tetap sama dengan periode sebelumnya, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pemberhentian anggota Direksi selama tahun berjalan.

Namun demikian, Perseroan melaksanakan pengangkatan kembali terhadap Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I untuk periode kedua, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Pengangkatan kembali tersebut dilakukan sebagai bentuk keberlanjutan kepemimpinan dan untuk menjaga stabilitas fungsi pengelolaan operasional di tingkat Direksi.

Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 berjumlah lima (5) orang, yang terdiri dari : 1) Direktur Utama, 2) Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko, 3) Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran, 4) Direktur Operasi I, dan 5) Direktur Operasi II. Komposisi serta dasar pengangkatan Anggota Direksi tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS AND REASONS FOR THE CHANGES

In the 2025 Fiscal Year, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. The structure and number of Board of Directors members remained the same as in the previous period; therefore, there were no additions or dismissals of members during the year.

However, the Company reappointed Bagus Tri Setyana as Director of Operations I for a second term, based on the resolution of Annual General Meeting of Shareholders held in 2025. This reappointment was carried out to ensure leadership continuity and to maintain the stability of operational management functions at the Board of Directors level.

Accordingly, as of December 31, 2025, the composition of the Company's Board of Directors consisted of five (5) members, namely: (1) President Director, (2) Director of Finance, Human Capital, and Risk Management, (3) Director of QHSE (Quality, Health, Safety, Environment) and Marketing, (4) Director of Operations I, and (5) Director of Operations II. Further details on the composition and basis for appointment of each member of Board of Directors are presented in the following table.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Composition and Basis of Appointment of Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Period of Office	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	19 April 2022 - RUPST 2027 April 19, 2022 - 2027 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 19, 2022, confirmed in Deed No. 5 dated April 19, 2022.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur QHSE *(Quality, Health, Safety, Environment)* dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) and Marketing	20 Mei 2024 - RUPST 2029 May 20, 2024 - 2029 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	21 Mei 2025 - RUPST 2030 May 21, 2025 - 2030 AGMS	Periode - 2 2nd Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	10 Mei 2023 - RUPST 2028 May 10, 2023 - 2028 AGMS	Periode - 1 1st Period	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang Terjadi Setelah Tahun Buku Berakhir

Changes in The Composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners That Occurred After the End of the Fiscal Year

Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Until the issuance of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2025, there have been no changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.



PASPAMPRES Public Housing



Profil Pejabat Eksekutif

Executive Officers Profile



Purba Yudha Tama

Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, 42 tahun dan berdomisili di Tangerang. Meraih gelar Magister Applied Finance dari Universitas Binus, Jakarta (2023).

Menjabat sebagai Corporate Secretary sejak 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai General Manager Investor Relations WIKA (2020- 2022), Manajer Investor Relations WIKA (2019-2020), dan Ahli Madya 2 Investor Relations WIKA (2018-2019).

An Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in Tangerang. Holds a Master's degree in Applied Finance from Binus University, Jakarta (2023).

Serving as Corporate Secretary since July 27, 2022, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022.

Previous positions include General Manager of Investor Relations at WIKA (2020–2022), Manager of Investor Relations at WIKA (2019–2020), and Associate Expert 2 of Investor Relations at WIKA (2018–2019).



Andi Sugiarto

Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1994).

Menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR. WG.3603/2021.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah Kepala Satuan Pengawas Internal WIKA Rekayasan Konstruksi (2019), Kepala Pemeriksa Satuan Pengawas Internal WIKA (2019), dan Manajer Bidang Keuangan dan Human Capital Proyek Pembangunan Pipa Trasmisi Gas dari Gresik Semarang Divisi Industrial Plant WIKA (2015).

An Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta. Holds an Associate Degree in Accounting from Diponegoro University, Semarang (1994).

Serving as Head of Internal Audit since June 2, 2021, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021.

Previous positions include Head of Internal Audit Unit of WIKA Rekayasa Konstruksi (2019), Head of Internal Audit Unit at WIKA (2019), and Manager of Finance and Human Capital for the Gas Transmission Pipeline Project from Gresik to Semarang, Industrial Plant Division of WIKA (2015).



Dimas Dwi Cahyo

Vice President of Legal and Contract Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 39 tahun dan berdomisili di Bekasi.

Meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2015).

Menjabat sebagai Vice President of Legal and Contract Management Division sejak 1 Mei 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.00071.WEGE/2025.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manager of Legal Dept (2024), Kepala Bagian Legal (2021), dan Kepala Bagian Legal Korporasi (2018).

An Indonesian citizen, 39 years old, domiciled in Bekasi.

Holds a Master of Law degree from Gadjah Mada University (2015).

Serving as Vice President of Legal and Contract Management Division since May 1, 2025, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.00071.WEGE/2025.

Previous positions include Manager of Legal Department (2024), Head of Legal Division (2021), and Head of Corporate Legal Division (2018).



Hendrico

VP of Quality, Safety, Health, and Environtment

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sriwijaya, Palembang (1995).

Menjabat sebagai Vice President of Quality, Safety, Health, and Environtment sejak 12 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/ DIR.WG.062/2014.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Kepala Bagian engineering dan Sistem WEGE (2013), Kepala Bagian engineering WEGE (2009), dan Ahli Muda Engineering WIKA (2005).

An Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Sriwijaya University, Palembang (1995).

Serving as Vice President of Quality, Safety, Health, and Environtment since May 12, 2014, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/DIR.WG.062/2014.

Previous positions include Head of Engineering and System at WEGE (2013), Head of Engineering at WEGE (2009), and Junior Expert of Engineering at WIKA (2005).



Mohamad Fadila

Vice President Of Human Capital Division

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, dan berdomisili di Bekasi. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2005).

Menjabat sebagai Vice President of Human Capital Division sejak 1 November 2023 berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.01422/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Senior Manager Organizational Development (2023), General Manager Organizational Development (2020), dan General Manager Rekrutmen dan Pengharkatan (2020).

An Indonesian citizen, 45 years old, domiciled in Bekasi. Holds a Master's degree in Management from PPM School of Management (2005).

Serving as Vice President of Human Capital Division since November 1, 2023, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR. WG.01422/2023.

Previous positions include Senior Manager of Organizational Development (2023), General Manager of Organizational Development (2020), and General Manager of Recruitment and Staffing (2020).



Sigit Herlambang

VP of Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Magister Manajemen Konstruksi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2004).

Menjabat sebagai Vice President of Risk Management Division sejak 8 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.07991/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Koordinator Bidang Quantity Survey (2023), Manajer Divisi Konstruksi II (2023), dan Manajer Divisi Konstruksi III (2020).

An Indonesian citizen, 43 years old, domiciled in Jakarta. Holds a Master's degree in Construction Management from the University of Indonesia, Jakarta (2004).

Serving as Vice President of Risk Management Division since December 8, 2023, based on Board of Directors Decree No : SK.02.01/A.DIR.WG.07991/2023.

Previous positions include Quantity Survey Coordinator (2023), Manager of Construction Division II (2023), and Manager of Construction Division III (2020).



Gagah Prakoso Ari Bowo

Vice President of Information Technology Division

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, dan berdomisili di Jawa Barat. Meraih gelar Magister Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2010).

Menjabat sebagai Vice President of Information Technology Division sejak 29 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/DIR.WG.08136/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek UGM Paket 1 (2020), Manajer Proyek UGM Paket 3 (2019), dan Deputy Manajer Proyek Masjid Raya Jawa Barat (2018).

An Indonesian citizen, 42 years old, domiciled in West Java. Holds a Master's degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University (2010).

Serving as Vice President of Information Technology Division since October 29, 2022, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/DIR.WG.08136/2022.

Previous positions include Project Manager of UGM Package 1 (2020), Project Manager of UGM Package 3 (2019), and Deputy Project Manager of West Java Grand Mosque (2018).



Bakir

Vice President of Supply Chain Management Division

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, dan berdomisili di Jawa Tengah. Meraih gelar Magister Logistik dari Institut Teknologi Bandung (2019).

Menjabat sebagai Vice President of Supply Chain Management Division sejak 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR.WG.07256/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manager of Procurement Department (2024), Coordinator Quantity Survey EPCC WIKA (2023), dan Kepala Seksi QA/QC Proyek EPC Amonium Nitrat (2023).

An Indonesian citizen, 41 years old, domiciled in Central Java. Holds a Master's degree in Logistics from Bandung Institute of Technology (2019).

Serving as Vice President of Supply Chain Management Division since June 3, 2024, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.WG.07256/2024.

Previous positions include Manager of Procurement Department (2024), Quantity Survey Coordinator EPCC WIKA (2023), and Head of QA/QC Section of EPC Ammonium Nitrate Project (2023).



R. Wahyu Alibasya Wisnu W

Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002).

Menjabat sebagai Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division sejak 1 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.01902/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Biro Manajemen Risiko (2020), Manajer Divisi Modular WEGE (2018), Manajer Unit Tamansari Propero Divisi Property WEGE (2014), dan Kepala Bagian Talent WEGE (2014).

An Indonesian citizen, 47 years old, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2002).

Serving as Vice President of Transformation and Business Portfolio Development Division since April 1, 2024, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.WG.01902/2024.

Previous positions include Manager of Risk Management Bureau (2020), Manager of Modular Division at WEGE (2018), Manager of Tamansari Propero Unit, Property Division at WEGE (2014), and Head of Talent at WEGE (2014).



Sulhadi

Vice President of Finance Division

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, dan berdomisili di Jawa Tengah.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2023).

Menjabat sebagai Vice President of Finance Division sejak 1 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.01.01/A. DIR.00092/2025.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Senior Expert 2 - Enterprise Resource Planning Department - Transformation & Information Technology Division PT WIKA (Persero) (20 Juni 2022), Manajer Sub Divisi Keuangan PT WIKA (Persero) (22 Juni 2021), Manajer Biro Operasi Biro Keuangan Operasi Luar Negeri - Departemen Luar Negeri PT WIKA (Persero) (1 April 2019).

An Indonesian citizen, 54 years old, domiciled in Central Java.

Holds a Master's degree in Management from Bina Nusantara University (2023).

Serving as Vice President of Finance Division since June 1, 2025, based on Board of Directors Decree No.: SK.01.01/A.DIR.00092/2025.

Previous positions include Senior Expert 2 – Enterprise Resource Planning Department – Transformation & Information Technology Division at PT WIKA (Persero) (June 20, 2022), Finance Sub-Division Manager at PT WIKA (Persero) (June 22, 2021), and Operations Bureau Manager, Overseas Operations Finance Bureau – Overseas Department at PT WIKA (Persero) (April 1, 2019).



Andy Faisal

Vice President of Marketing Division

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, dan berdomisili di Banten.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2009).

Menjabat sebagai Vice President of Marketing Division sejak 15 Juli2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.08945/2024.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Bidang Pemasaran Wilayah II (2020), Manajer Bidang Administrasi Pemasaran (2019), dan Manajer Bidang Bisnis Pemasaran (2017).

An Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Banten.

Holds a Master's degree in Management from Muhammadiyah University Prof. Dr. Hamka (2009).

Serving as Vice President of Marketing Division since July 15, 2024, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR.08945/2024.

Previous positions include Manager of Marketing Region II (2020), Manager of Marketing Administration (2019), and Manager of Marketing Business (2017).



Budi Setyono

Vice President of Operation Division

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang (1997).

Menjabat sebagai Vice President of Operation Division sejak 2 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR. WG.08776/2022.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek RSUD Kalideres (2022), Manajer Proyek Rusun Padat Karya (2020), dan Manajer Proyek Gedung Serbaguna Wikasatrian (2019).

An Indonesian citizen, 53 years old, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Diponegoro University, Semarang (1997).

Serving as Vice President of Operation Division since January 2, 2023, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A.DIR. WG.08776/2022.

Previous positions include Project Manager of RSUD Kalideres (2022), Project Manager of Labor-Intensive Housing (2020), and Project Manager of Wikasatrian Multipurpose Building (2019).



Florentinus Wailanduw

VP of Engineering Division

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, dan berdomisili di Depok. Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro, Semarang (1998).

Menjabat sebagai Vice President of Engineering Division sejak 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. HC.WG.03579/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek BI Millennial (2022), Deputy Manajer Proyek Hotel Pullman (2022), dan Manajer Proyek RSUP Fatmawati (2021).

An Indonesian citizen, 50 years old, domiciled in Depok. Holds a Bachelor's degree in Architecture Engineering from Diponegoro University, Semarang (1998).

Serving as Vice President of Engineering Division since July 4, 2023, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A. HC.WG.03579/2023.

Previous positions include Project Manager of BI Millennial (2022), Deputy Project Manager of Hotel Pullman (2022), and Project Manager of RSUP Fatmawati (2021).



Khomensyah Nasution

VP of Operation and Concession Division

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, dan berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003).

Menjabat sebagai Vice President of Operation and Concession Division sejak 6 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A.DIR. WG.03584/2023.

Jabatan yang pernah diemban di Perusahaan adalah sebagai Manajer Proyek Benhil Hotel & Service Apartment (2022), Manajer Proyek Taman Ismail Marzuki (2019), dan Manajer Proyek Hotel & Office Benhil Central (2018).

An Indonesian citizen, 46 years old, domiciled in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2003).

Serving as Vice President of Operation and Concession Division since July 6, 2023, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A. DIR.WG.03584/2023.

Previous positions include Project Manager of Benhil Hotel & Service Apartment (2022), Project Manager of Taman Ismail Marzuki (2019), and Project Manager of Benhil Central Hotel & Office (2018).



Bagus Tri Setyana

Act as Substitue VP Operations & Modular Division

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun per 31 Desember 2025, dan berdomisili di Cimahi, Jawa Barat. Beliau meraih gelar Magister Teknik Sipil dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2010.

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi 1 berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada 21 Mei 2025, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025.

Sebelumnya, beliau memiliki pengalaman panjang di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, antara lain sebagai General Manager Operasi Departemen Operasi 7 (2020), Manajer Divisi 7 General Civil Engineering (2017–2020), serta Manajer Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang Paket 1 (2016–2017).

An Indonesian citizen, 55 years old, domiciled in Cimahi, West Java. Holds a Master's degree in Civil Engineering from Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2010).

Serving as Director of Operations 1 of the Company since May 21, 2025, based on the resolution of the GMS, as stated in Deed No. 2 dated May 23, 2025.

Previous positions include General Manager of Operations, Operations Department 7 at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2020), Manager of Division 7 General Civil Engineering (2017–2020), and Project Manager of Serang–Panimbang Toll Road Development Package 1 (2016–2017).

Peristiwa Penting
Significant Events

Januari/January



Penandatanganan Kontrak Tower UNDIP Tembalang: Pada 6 Januari 2025 di Semarang, WEGE dan UNDIP menandatangani kontrak rancang bangun Tower UNDIP Tembalang senilai Rp213 miliar dengan konsep *green building*.

UNDIP Tembalang Tower Contract Signing: On January 6, 2025, in Semarang, WEGE and UNDIP signed a Rp213 billion design and construction contract for UNDIP Tembalang Tower, embracing a green building concept.



Sosialisasi "*Fit to Work*" PMJ Land Tower: WEGE menggelar sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja "*Fit to Work*" pada 23 Januari 2025 di Proyek PMJ Land Tower untuk memperingati Bulan K3 Nasional.

PMJ Land Tower "Fit to Work" Socialization: WEGE held a "Fit to Work" occupational health and safety socialization event on January 23, 2025, at PMJ Land Tower Project to commemorate the National Occupational Health and Safety Month.

Februari/February



Aksi Donor Darah WIKA Group: Memperingati HUT ke-65 WIKA, WEGE menggelar aksi donor darah bertajuk "Setetes Darahmu, Sejuta Harapan untuk Hidup" pada 12 Februari 2025 di Kawasan Industri WIKA, Bogor.

WIKA Group Blood Drive: To commemorate WIKA's 65th anniversary, WEGE held a blood donation titled "A Drop of Your Blood, a Million Hopes for Life" on February 12, 2025, at WIKA Industrial Estate, Bogor.

Maret/March



Grand Launching Prototipe Netro: WEGE dan DEX merilis prototipe Netro, yakni sistem hunian modular cerdas berkonsep *net-zero* pertama di Indonesia, pada 11 Maret 2025 di Jakarta.

Netro Prototype Grand Launch: WEGE and DEX released the Netro prototype, Indonesia's first net-zero smart modular housing system, on March 11, 2025, in Jakarta.



Groundbreaking Menara Mandiri Kendari: Pada 16 Maret 2025, WEGE dan Bank Mandiri melaksanakan *groundbreaking* proyek pembangunan Menara Mandiri Area Kendari yang mengusung konsep ramah lingkungan.

Groundbreaking for Kendari Mandiri Tower: On March 16, 2025, WEGE and Bank Mandiri held the groundbreaking for Kendari Area Mandiri Tower development project, which promotes an environmentally friendly concept.



Groundbreaking Tower UNDIP Tembalang: WEGE dan UNDIP resmi memulai konstruksi Tower UNDIP Tembalang melalui seremoni *groundbreaking* pada 21 Maret 2025 di Semarang.

Groundbreaking for UNDIP Tembalang Tower: WEGE and UNDIP officially began construction of UNDIP Tembalang Tower with a groundbreaking ceremony on March 21, 2025, in Semarang.

April/April



Laporan Kinerja Q1: WEGE mengumumkan kinerja keuangan positif pada 30 April 2025, dengan mencatatkan pendapatan kuartal pertama sebesar Rp543,26 miliar yang mayoritas ditopang segmen jasa konstruksi.

Q1 Performance Report: WEGE announced positive financial performance on April 30, 2025, with first-quarter revenue of Rp543.26 billion, primarily driven by the construction services segment.

Mei/May



Peringkat PEFINDO: Pada 8 Mei 2025, WEGE berhasil meraih peringkat idBBB dengan prospek stabil dari PEFINDO, yang mencerminkan struktur modal konservatif dan model bisnis menguntungkan.

PEFINDO Rating: On May 8, 2025, WEGE achieved an idBBB rating with a stable outlook from PEFINDO, reflecting its conservative capital structure and profitable business model.



Grand Launching Penjualan Netro: WEGE secara resmi memulai penjualan produk hunian modular inovatif Netro melalui acara *Grand Launching* di Jakarta pada 9 Mei 2025 yang turut dihadiri Menko Infrastruktur AHY.

Netro Sales Grand Launch: WEGE officially began sales of its innovative modular residential product, Netro, at a Grand Launching event in Jakarta on May 9, 2025, which was also attended by Coordinating Minister for Infrastructure AHY.



RUPS Tahunan 2024: Melalui RUPST pada 21 Mei 2025, WEGE menetapkan pembagian dividen tunai sebesar 10% dari laba bersih Tahun Buku 2024, yakni senilai Rp6,79 miliar.

2024 Annual GMS: Through the AGMS on May 21, 2025, WEGE determined a cash dividend distribution of 10% of its net profit for the 2024 fiscal year, amounting to Rp6.79 billion.

Juni/June



Bantuan CSR Kebakaran Kapuk Muara: Sebagai wujud kepedulian sosial, WEGE menyalurkan bantuan logistik untuk para pengungsi korban kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara pada 12 Juni 2025.

Kapuk Muara Fire CSR Assistance: As a form of social responsibility, WEGE distributed logistical assistance to evacuees from the fire in Kapuk Muara, North Jakarta, on June 12, 2025.



Pameran ICI 2025: WEGE berpartisipasi memperkenalkan inovasi modular NETRO sebagai solusi infrastruktur berkelanjutan dalam ajang *International Conference on Infrastructure* (ICI) di Jakarta pada 11-12 Juni 2025.

ICI 2025 Exhibition: WEGE participated in introducing NETRO modular innovation as a sustainable infrastructure solution at the International Conference on Infrastructure (ICI) in Jakarta on June 11-12, 2025.



Peresmian Gedung InaTEWS BMKG Bali: Kepala BMKG meresmikan Gedung Pusat Backup BMKG (InaTEWS) Bali garapan WEGE yang dilengkapi teknologi peredam gempa *Lead Rubber Bearing* pada 14 Juni 2025 di Denpasar.

Inauguration of BMKG Bali InaTEWS Building: The Head of BMKG inaugurated BMKG Bali Backup Center (InaTEWS) Building, built by WEGE, equipped with Lead Rubber Bearing earthquake damping technology, on June 14, 2025, in Denpasar.



Penghargaan UMKM BUMN Award: WEGE bersama tiga UMKM binaannya berhasil meraih predikat *The Most Committed BUMN Pembina UMKM* di ajang UMKM BUMN Award 2025 pada 25 Juni 2025.

SOE MSMEs Award: WEGE, along with three MSMEs under its guidance, won the title of Most Committed SOE MSME Coach at the SOE MSMEs Award 2025 on June 25, 2025.

Juli/July



Peresmian Gedung Ina-MHEWS BMKG Jakarta: Pada 21 Juli 2025, WEGE meresmikan Gedung Ina-MHEWS BMKG Jakarta yang menggunakan teknologi *Base Isolator Tipe Friction Pendulum* pertama di Indonesia untuk fungsi *data center*.

Inauguration of BMKG Ina-MHEWS Building in Jakarta: On July 21, 2025, WEGE inaugurated BMKG Ina-MHEWS Building in Jakarta, which uses the first Friction Pendulum-Type Base Isolator technology in Indonesia for data center functions.



Laporan Kinerja Q2: Melalui laporan keuangannya pada 22 Juli 2025, WEGE mencatat peningkatan *gross profit margin* menjadi 11,87% sebagai hasil positif dari penerapan strategi efisiensi operasional.

Q2 Performance Report: Through its financial report on July 22, 2025, WEGE recorded an increase in gross profit margin to 11.87% as a positive result of the implementation of operational efficiency strategies

Agustus/August



Sertifikasi EPD Internasional: Produk WG Flatpack Modular WEGE resmi menjadi bangunan prefabrikasi pertama dari Indonesia yang meraih sertifikasi *Environmental Product Declaration* (EPD) internasional pada 29 Juli 2025.

International EPD Certification: WEGE's WG Flatpack Modular product officially became the first prefabricated building from Indonesia to receive international Environmental Product Declaration (EPD) certification on July 29, 2025.



Peresmian Gedung Labtek XV ITB: WEGE resmi merampungkan pembangunan Gedung Rekayasa Molekular dan Material Fungsional (Labtek XV) di ITB Bandung yang diresmikan pada 7 Agustus 2025.

Inauguration of ITB Labtek XV Building: WEGE officially completed the construction of Molecular Engineering and Functional Materials Building (Labtek XV) at ITB Bandung which was inaugurated on August 7, 2025.



Penandatanganan Marina Bay Lombok: WEGE menandatangani kontrak kerja pada 6 Agustus 2025 untuk membangun 50 unit *villa* berbasis Modular Lite (MoLi) di kawasan pesisir Marina Bay Lombok.

Marina Bay Lombok Signing: WEGE signed a work contract on August 6, 2025, to build 50 Modular Lite (MoLi)-based villas in the coastal area of Marina Bay Lombok.



Kunjungan GBCI dan CABR ke Netro: WEGE menerima kunjungan delegasi GBCI dan CABR China di rumah Netro Pulomas pada 7 Agustus 2025 untuk mendiskusikan percepatan sertifikasi *Green Building* dan *Net-Zero*.

GBCI and CABR Visit to Netro: WEGE hosted a delegation from GBCI and CABR China at Netro Pulomas residence on August 7, 2025, to discuss accelerating Green Building and Net-Zero certification.



Peresmian Gedung Prof. Setijadi UT: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meresmikan operasional Gedung Prof. Setijadi di Universitas Terbuka Pamulang yang sebelumnya dibangun oleh WEGE, pada 13 Agustus 2025.

Prof. Setijadi Building Inauguration: The Minister of Higher Education, Science, and Technology inaugurated Prof. Setijadi Building at Pamulang Open University, previously built by WEGE, on August 13, 2025.

September/September



Ajang Konstruksi Indonesia 2025: Dalam ajang Konstruksi Indonesia yang digelar 10-20 September 2025, WEGE memaparkan inovasi teknologi cerdas BAS dan CPC pada proyek Grha Pertamina sebagai wujud bangunan pintar.

Indonesia Construction Event 2025: In the Indonesia Construction event held from September 10-20, 2025, WEGE presented BAS and CPC smart technology innovations in Grha Pertamina project as a form of smart building.



Peluncuran Paviliun Parsavika: WEGE berkolaborasi dengan mitra lintas sektor meluncurkan Paviliun Parsavika di PIK 2 pada 19 September 2025 untuk menampilkan integrasi material ramah lingkungan dan modular.

Launch of Parsavika Pavilion: WEGE, in collaboration with cross-sector partners, launched Parsavika Pavilion at PIK 2 on September 19, 2025, showcasing the integration of environmentally friendly and modular materials.



Kunjungan Wamen PU ke BMKG: Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti meninjau langsung teknologi peredam gempa *Friction Pendulum* di Gedung Ina-MHEWS BMKG Kemayoran yang dibangun WEGE pada 26 September 2025.

Deputy Minister of Public Works' Visit to the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG): Deputy Minister of Public Works Diana Kusumastuti directly inspected the Friction Pendulum earthquake damping technology at BMKG Kemayoran Ina-MHEWS Building, built by WEGE on September 26, 2025



Topping Off RSUP dr. Soeradji Klaten: WEGE menyelesaikan tahap struktur utama Gedung Pusat Kanker di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten, yang ditandai dengan prosesi *topping off* pada 29 September 2025.

Topping Off of Dr. Soeradji Hospital, Klaten: WEGE completed the main structural phase of the Cancer Center Building at Dr. Soeradji Tirtonegoro Hospital, Klaten, marked by a topping off ceremony on September 29, 2025.



Investortrust CSR Awards: WEGE dianugerahi penghargaan Investortrust CSR Awards 2025 kategori Pendidikan pada 30 September 2025 atas inovasinya membangun fasilitas PAUD Modular.

Investortrust CSR Awards: WEGE was awarded the 2025 Investortrust CSR Awards in the Education category on September 30, 2025, for its innovation in building a Modular Early Childhood Education (PAUD) facility.

Oktober/October



Public Expose Update Kinerja Q3: WEGE menggelar konferensi pers pada 15 Oktober 2025 untuk menyampaikan *update* strategi efisiensi biaya serta komitmen keberlanjutan bisnis kepada publik.

Q3 Performance Update Public Expose: WEGE held a press conference on October 15, 2025, to share an update on its cost efficiency strategy and business sustainability commitments with the public.



Sertifikasi Pekerja HUT 17 WEGE: Sebagai bagian dari CSR HUT ke-17, WEGE menyelenggarakan program sertifikasi K3 bagi 50 pekerja proyek di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada 22 Oktober 2025.

WEGE 17th Anniversary Worker Certification: As part of its 17th Anniversary CSR program, WEGE held an OHS certification program for 50 project workers at Dr. Soeradji Tirtonegoro General Hospital, Klaten, on October 22, 2025.



Workshop Green Farming HUT 17 WEGE: WEGE bersama Jasmine Integrated Farming mengadakan lokakarya pembuatan pupuk alami dan pembagian bibit mangga bagi warga Margakaya, Karawang, pada 23 Oktober 2025 .

WEGE 17th Anniversary Green Farming Workshop: WEGE, together with Jasmine Integrated Farming, held a natural fertilizer production workshop and distributed mango seedlings to residents of Margakaya, Karawang, on October 23, 2025.



Penandatanganan Kontrak OJK Sumut: WEGE menandatangani kontrak proyek rancang bangun Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara senilai Rp144,37 miliar pada 28 Oktober 2025 di Jakarta.

North Sumatra OJK Contract Signing: WEGE signed a contract for the design and construction project of North Sumatra OJK Office Building, worth Rp144.37 billion, on October 28, 2025, in Jakarta.

November/November



Seminar Desain Tanpa Batas UNPAR: WEGE memaparkan peran teknologi manufaktur modular dan BIM dalam mewujudkan hunian adaptif pada seminar di UNPAR Bandung, 25 November 2025.

UNPAR's Limitless Design Seminar: WEGE presented the role of modular manufacturing technology and BIM in realizing adaptive housing at a seminar at UNPAR Bandung on November 25, 2025.



Penghargaan CSA Awards 2025: WEGE berhasil memenangkan penghargaan *Outstanding Company in the Infrastructure Sector* dalam ajang CSA Awards pada 27 November 2025 atas tata kelola dan profitabilitasnya.

CSA Awards 2025: WEGE won the Outstanding Company in the Infrastructure Sector award at the CSA Awards on November 27, 2025, for its governance and profitability.



Public Expose & RUPS-LB: Pada 28 November 2025, WEGE menyelenggarakan *Public Expose* dan RUPS Luar Biasa guna memaparkan strategi mitigasi bisnis di tengah ketatnya persaingan industri konstruksi.

Public Expose & Extraordinary GMS: On November 28, 2025, WEGE held a Public Expose and Extraordinary GMS to present its business mitigation strategies amidst intense competition in the construction industry.

Desember/December



Proyek Mess Transmigrasi Rempang: WEGE dipercaya membangun *Mess* Transmigrasi Patriot di Pulau Rempang menggunakan teknologi Modular Lite (MoLi) dengan nilai proyek Rp57,4 miliar.

Rempang Transmigration Mess Project: WEGE is trusted to build the Patriot Transmigration Mess on Rempang Island using Modular Lite (MoLi) technology with a project value of Rp57.4 billion.

Sumber Daya Manusia
Human Capital



Perseroan meyakini bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menghadapi persaingan bisnis serta dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat kapabilitas sebagai organisasi yang adaptif dan inovatif melalui pengelolaan *Human Capital* yang terintegrasi dengan proses bisnis, serta selaras dengan Visi dan Misi Perseroan.

Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan strategis organisasi hingga masa purnabakti karyawan. Proses tersebut mencakup tahapan rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, serta perencanaan dan pengembangan karier, yang dirancang untuk memastikan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Perseroan menyusun *Grand Design & Human Capital Development System* sebagai kerangka kerja utama dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga untuk membangun talenta yang siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan

The Company is fully aware that the quality of human capital is a key factor in facing business competition and increasingly rapid pace of technological development. Therefore, the Company continues to strengthen organizational capability as an adaptive and innovative entity through human capital management that is integrated with business processes and aligned with the Company's Vision and Mission.

Human capital management is carried out comprehensively, starting from strategic organizational planning to employees' retirement period. The process includes recruitment, competency development, performance management, as well as career planning and development, designed entirely to ensure that each employee can contribute optimally to the sustainability and growth of the Company's business.

To support this implementation, the Company has developed a Grand Design & Human Capital Development System as the main framework for structured and sustainable human capital management and development. This system is intended not only to meet short-term operational needs but also to create talent that is prepared to face future challenges and opportunities.

Adapun *Grand Design & Human Capital Development System* yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

GRAND DESIGN & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SYSTEM

Lingkungan Eksternal:

1. Kompetitor
2. Regulasi Pemerintah
3. Teknologi
4. Trend Market
5. Situasi Ekonomi
6. *Stakeholder*

STRATEGI BISNIS

Lingkungan Internal:

1. Nilai-nilai & Budaya Organisasi (AKHLAK)
2. Struktur Organisasi
3. Kapasitas & Kapabilitas Human Capital
4. *Stakeholder*

The Company's Grand Design & Human Capital Development System is as follows:

GRAND DESIGN & HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SYSTEM

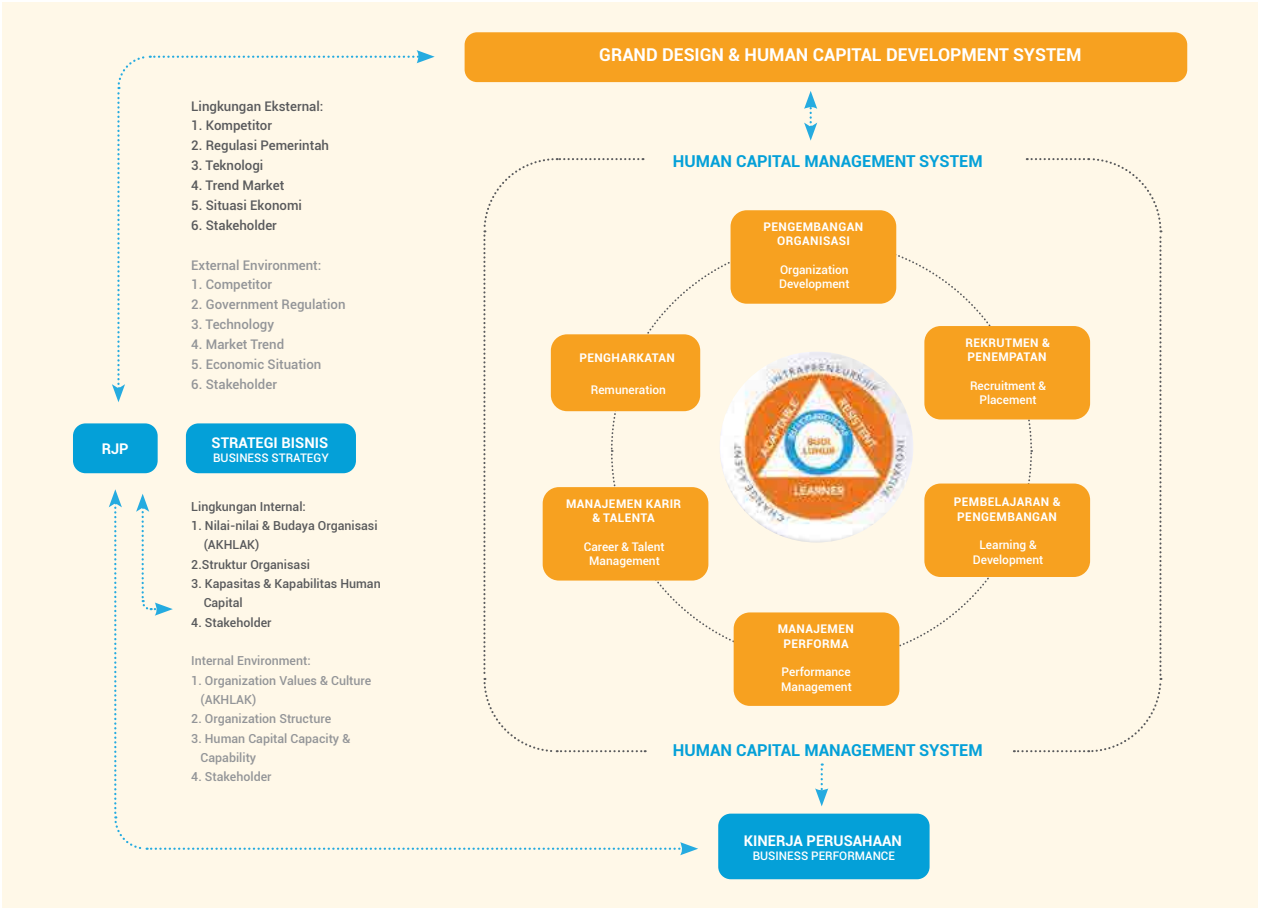
External Environment:

1. Competitors
2. Government Regulations
3. Technology
4. Market Trends
5. Economic Conditions
6. Stakeholders

BUSINESS STRATEGY

Internal Environment:

1. Organizational Values & Culture (AKHLAK)
2. Organizational Structure
3. Human Capital Capacity & Capability
4. Stakeholders



HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

Human Capital Management System (HCMS) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh WIKA Group untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh di seluruh entitas Grup, termasuk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE). Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai proses administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien, sekaligus menyediakan akses informasi kepegawaian yang akurat dan *real time* bagi karyawan maupun manajemen Perseroan.

Melalui pemanfaatan HCMS, Perseroan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi personalia, memperkuat akurasi data sumber daya manusia, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan *Human Capital*.

Karyawan dapat mengakses HCMS melalui situs internal Perseroan.

Informasi yang dapat diakses melalui aplikasi ini, diantaranya:
1. Data Pribadi Karyawan: Informasi dasar yang dimiliki setiap karyawan.
2. Manajemen Kinerja: Evaluasi kompetensi dan pencapaian kinerja karyawan.
3. Pelatihan dan Pengembangan: Informasi terkait program pelatihan yang telah diikuti.
4. Informasi Lainnya: Data tambahan yang relevan dengan kepegawaian. Selain itu, modul *Employee Self-Service* pada HCMS memungkinkan karyawan untuk mengajukan cuti, dinas, klaim, pinjaman, koperasi, serta memantau status surat perjalanan dinas secara mandiri.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

The Human Capital Management System (HCMS) is an integrated information system developed by WIKA Group to support comprehensive human capital management across all Group entities, including PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE). The system is designed to facilitate various personnel administration processes effectively and efficiently, while also providing accurate and real-time employee information access for both employees and Company management.

Through the utilization of HCMS, the Company enhances the quality of personnel administration services, strengthens the accuracy of human capital data, and supports more precise decision-making in human capital management.

Employees can access HCMS through the Company's internal site.

Information accessible through this application includes:
1. Employee Personal Data: Basic information of each employee.
2. Performance Management: Evaluation of employee competencies and performance achievements.
3. Training and Development: Information related to training programs that have been undertaken.
4. Other Information: Additional data relevant to employment.In addition, the Employee Self-Service module in HCMS enables employees to independently submit leave requests, official travel requests, claims, loans, cooperative services, and monitor the status of official travel documents.

PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI HCMS

Sebagai bagian dari pengembangan berbasis teknologi, *Human Capital Division* bekerja sama dengan *Information Technology Division* untuk menghadirkan sistem *Employee Battery* pada aplikasi My-WEGE. Sistem ini menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh karyawan, di antaranya:
1. *Individual Development Plan* (IDP)
2. *Performance Category*
3. *Mandatory Training Information*
4. *Individual Career Plan* (ICP)
5. *Assessment Report*
6. *Grading & Quadrant Remuneration*
7. *Employee Performance*
8. Kriteria Unjuk Kerja (KUK)
9. *Track Record* Jabatan

Sistem ini dirancang untuk mendorong transparansi, meningkatkan efisiensi proses, serta memberikan kemudahan akses informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, sekaligus memperkuat komitmen Perseroan terhadap pengembangan karyawan yang berkelanjutan.

HCMS INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM DEVELOPMENT

As part of technology-based development, the Human Capital Division collaborates with the Information Technology Division to introduce the Employee Battery system within My-WEGE application. This system provides various types of information accessible to employees, including:
1. Individual Development Plan (IDP)
2. Performance Category
3. Mandatory Training Information
4. Individual Career Plan (ICP)
5. Assessment Report
6. Grading & Quadrant Remuneration
7. Employee Performance
8. Key Performance Criteria (KUK)
9. Job Track Record

The system is designed to promote transparency, improve process efficiency, and provide ease of access to information in human capital management, while strengthening the Company's commitment to sustainable employee development.

HUMAN CAPITAL DIVISON

Human Capital Division WEGE berperan sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perseroan. Tanggung jawab tersebut mencakup keseluruhan siklus pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, hingga evaluasi efektivitas program kerja yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, sistem pengelolaan SDM juga diselaraskan dengan strategi bisnis Perseroan guna mendukung peningkatan daya saing serta percepatan pencapaian kinerja.

Sebagai fungsi pendukung strategis dalam pengembangan organisasi, Human Capital Division menjalankan peran yang disesuaikan dengan arah dan proses bisnis Perseroan. Melalui pendekatan yang terintegrasi, fungsi Human Capital diarahkan untuk memastikan ketersediaan talenta yang kompeten, adaptif, dan siap mendukung pertumbuhan usaha. Adapun fungsi utama Human Capital Division meliputi:

1. Perencanaan dan pemenuhan kapasitas *human capital* sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas Perseroan.
2. Meningkatkan keterlibatan (*engagement)* karyawan melalui inisiatif, strategi, dan program yang komprehensif.
3. Mengkaji dan mengimplementasikan konsep manajemen mutakhir, termasuk pengembangan budaya Perseroan, sistem remunerasi, hubungan industrial, serta pengelolaan *human capital* berbasis teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan kaderisasi, pengembangan, dan pemeliharaan *human capital* sesuai dengan arah perkembangan Perseroan.

STRUKTUR *HUMAN CAPITAL DIVISION*

Human Capital Division terdiri dari dua departemen utama, yaitu:

1. *Talent and Development Department*
   a. Pengembangan Organisasi
   b. Rekrutmen dan Penempatan
   c. Pembelajaran dan Pengembangan
   d. Manajemen Karir dan Talenta
2. *Compensation and Benefit Department*
   a. Manajemen Performa
   b. Sistem Pengharkatan
   c. Hubungan Industrial

Dengan struktur yang terorganisasi dan peran strategis tersebut, *Human Capital Division* Perseroan terus berupaya untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan melalui pengelolaan SDM yang terencana dan berkelanjutan.

REKRUTMEN DAN PENEMPATAN

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terencana merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan operasional serta pencapaian strategi jangka panjang Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menempatkan strategi rekrutmen dan penempatan tenaga kerja yang efektif sebagai prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Perseroan tidak hanya memastikan kecukupan jumlah tenaga kerja, tetapi juga kesesuaian penempatan berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal terhadap kinerja Perseroan.

HUMAN CAPITAL DIVISION

The Human Capital Division of WEGE serves as the work unit responsible for managing and developing human capital within the Company. Responsibilities cover the entire human capital management cycle, from manpower planning, competency development, performance management, to evaluation of program effectiveness. In practice, the Human Capital management system is aligned with the Company's business strategy to support competitiveness and accelerate performance achievement.

As a strategic supporting function in organizational development, the Human Capital Division carries out roles aligned with the Company's business direction and processes. Through an integrated approach, the Human Capital function is directed to ensure the availability of competent, adaptive talent capable of supporting business growth. The main functions of the Human Capital Division include:

1. Planning and fulfilling human capital capacity in accordance with the Company's needs and capabilities.
2. Enhancing employee engagement through comprehensive initiatives, strategies, and programs.
3. Reviewing and implementing advanced management concepts, including corporate culture development, remuneration systems, industrial relations, and technology-based human capital management.
4. Optimizing succession, development, and retention of human capital in line with the Company's growth direction.

STRUCTURE OF HUMAN CAPITAL DIVISION

The Human Capital Division consists of two main departments:

1. Talent and Development Department
   a. Organizational Development
   b. Recruitment and Placement
   c. Learning and Development
   d. Career and Talent Management
2. Compensation and Benefit Department
   a. Performance Management
   b. Remuneration System
   c. Industrial Relations

With this structured organization and strategic role, the Company's Human Capital Division continuously strives to support the achievement of long-term corporate objectives through planned and sustainable human capital management.

RECRUITMENT AND PLACEMENT

High-quality and well-planned human capital are one of the key factors in supporting operational success and the achievement of the Company's long-term strategy. In line with this, the Company positions effective recruitment and workforce placement strategies as the main priority to support business growth. The Company ensures not only an adequate number of employees but also proper placement based on duties, functions, and responsibilities, enabling optimal individual contributions to Company performance.

Sebagai bagian dari upaya perencanaan tersebut, Perseroan secara berkala melakukan kajian atas Rencana Kebutuhan SDM dengan mempertimbangkan potensi perolehan proyek baru, arah pengembangan bisnis jangka panjang, tingkat produktivitas, serta kapasitas dan kapabilitas organisasi. Kajian ini diselaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai dasar penetapan kebutuhan tenaga kerja. Pemenuhan kebutuhan SDM selanjutnya dilakukan melalui proses rekrutmen yang terstruktur dan komprehensif untuk memastikan tercapainya target organisasi secara berkelanjutan.

As part of the manpower planning, periodic reviews of the Human Capital Requirement Plan are conducted by considering potential new project acquisition, long-term business development direction, productivity levels, and organizational capacity and capability. This assessment is aligned with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as the basis for determining workforce requirements. The fulfillment of these needs is carried out through structured and comprehensive recruitment processes, aiming to ensure sustainable achievement of organizational targets.

Untuk menjaring talenta terbaik dari berbagai latar belakang, Perseroan mengimplementasikan proses seleksi yang sistematis, mencakup:

1. Seleksi Administrasi
2. Tes Psikologi
3. *Focus Group Discussion* (FGD)
4. Wawancara Teknis
5. Wawancara Personalia
6. Tes Kesehatan.

To attract top talent from diverse backgrounds, the Company implements a systematic selection process, including:

1. Administrative Screening
2. Psychological Test
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. Technical Interview
5. HR Interview
6. Medical Examination

Calon karyawan yang berhasil melewati proses seleksi diwajibkan mengikuti program *On The Job Training* (OJT) selama enam bulan. Program ini dirancang untuk membekali calon karyawan dengan pemahaman mendalam tentang sistem manajemen WEGE, nilai-nilai perusahaan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), serta keterampilan dasar melalui pelatihan di kelas dan praktik lapangan. Selain itu, program ini mencakup pembentukan kerja sama tim (*team building*), pelatihan kedisiplinan, dan penyusunan makalah yang harus dipresentasikan sebagai bagian dari evaluasi akhir. Selama program OJT, setiap calon pegawai akan didampingi oleh mentor yang memberikan arahan dan bimbingan secara langsung.

Candidates who pass the selection process are required to participate in an On-the-Job Training (OJT) program for six months. The program is designed to provide in-depth understanding of WEGE management system, corporate values AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative), as well as fundamental skills through classroom training and field practice. Apart from that, this program also includes team building, discipline training, and preparation of a paper to be presented as part of the final evaluation. During the OJT program, each candidate is guided by a mentor providing direct supervision and support.

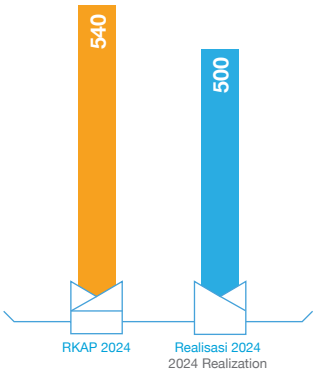
Untuk menjaga objektivitas hasil seleksi, Perseroan melibatkan lembaga independen dan tim rekrutmen yang terdiri dari perwakilan dari berbagai fungsi atau unit kerja. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan.

To ensure objectivity in the selection process, independent institutions and a recruitment team consisting of representatives from various functions or work units are involved. The process upholds Good Corporate Governance (GCG) principles, ensuring transparency and accountability at every stage.

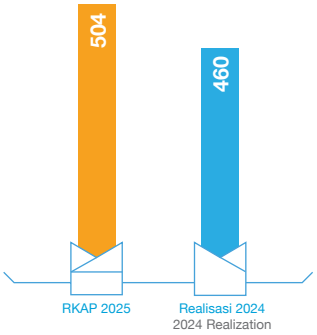
Sesuai RKAP, Perseroan menargetkan jumlah pegawai di tahun 2025 sebanyak 504 orang. Namun, realisasi jumlah pegawai di tahun 2025 tercatat sebanyak 460 orang. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mutasi dan promosi lintas WIKA Group, pegawai yang memasuki usia pensiun, serta pegawai yang mengundurkan diri.

In accordance with the RKAP, the Company targeted a total of 504 employees in 2025. However, the realized number of employees in 2025 was recorded at 460. The difference was influenced by several factors, including transfers and promotions within WIKA Group, employee retirements, and resignations.

REKRUTMEN PEGAWAI 2024-2025



EMPLOYEE RECRUITMENT IN 2024–2025



PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan dan pelatihan karyawan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan di berbagai aspek operasional, sekaligus mendukung pencapaian target bisnis secara berkelanjutan. Setiap tahun, Perseroan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terkoordinasi, terarah, dan terukur guna menciptakan tenaga kerja yang andal dan berdaya saing tinggi.

Perseroan juga meyakini bahwa penerapan prinsip kesetaraan kesempatan kerja merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan perusahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memberikan peluang yang setara kepada seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, maupun kondisi individu lainnya. Prinsip ini diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi dan keahlian, hingga penetapan jenjang karier dan kebijakan remunerasi.

Melalui program pelatihan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan operasional, Perseroan memastikan setiap karyawan memiliki akses yang setara untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, karyawan tidak hanya mampu memberikan kontribusi optimal bagi Perseroan, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan kerja yang terus berkembang

Pelatihan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan diikuti oleh para pejabat serta karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE DEVELOPMENT AND TRAINING

The Company is committed to carry out well-planned, systematic, and sustainable employee development and training program. This program aims to improve employee competency, skills, and knowledge across various operational aspects, while supporting sustainable achievement of business targets. Each year, the Company prioritizes human capital development through coordinated, targeted, and measurable training programs to create a reliable and highly competitive talents.

The Company also believes that implementing the principle of equal employment opportunity is a crucial element in driving inclusive and sustainable corporate growth. Therefore, the Company is committed to providing equal opportunities to all employees regardless of ethnicity, religion, race, social class, gender, or other individual circumstances. This principle is consistently applied at all stages of human capital management, starting from the recruitment process and competency and skills development, to career path determination and remuneration policies.

Through inclusive training programs based on operational needs, the Company ensures that every employee has equal access to develop their potential. Thus, employees are not only able to make optimal contributions to the Company but are also prepared to deal with changes and challenges in the ever-evolving work environment.

The following trainings were conducted throughout 2025 and attended by the Company's officers and employees:

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End	Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
1	Pelatihan Cubicost Modul Tme Batch 5 Cubicost Tme Module Training Batch 5	20 Januari 2025 January 20, 2025	21 Januari 2025 January 21, 2025	2	Pt Glodon Technical Indonesia	2
2	Pelatihan Bim Course Meep Autodesk Revit 5 Meep Autodesk Revit 5 Bim Course Training	10 Januari 2025 January 10, 2025	11 Januari 2025 January 11, 2025	2	Persatuan Insinyur Indonesia Indonesian Engineers Association	3
3	Pelatihan K3 Listrik Electrical Ohs Training	17 Januari 2025 January 17, 2025	17 Januari 2025 January 17, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2
4	Workshop Transaksi Input Data Sap Wg Bulan Desember 2024 Sap Wg Data Input Transaction Workshop December 2024	14 Januari 2025 January 14, 2025	17 Januari 2025 January 17, 2025	4	Information Technology Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	122
5	Wika Project Management Batch 31	31 Januari 2025 January 31, 2025	26 Maret 2025 March 26, 2025	17	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan	4
6	Supervisory Skill - Januari 2025 Supervisory Skill - January 2025	15 Januari 2025 January 15, 2025	24 Januari 2025 January 24, 2025	4	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	1
7	Akhlak Champ Tahun 2024 Akhlak Champ 2024	31 Januari 2025 January 31, 2025	1 Februari 2025 February 1, 2025	2	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	5
8	Pelatihan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Building Construction Management Training	3 Februari 2025 February 3, 2025	5 Februari 2025 February 5, 2025	3	Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	28
9	Webinar Understanding Takt Planning Webinar On Understanding Tact Planning	8 Februari 2025 February 8, 2025	8 Februari 2025 February 8, 2025	1	Iamkri	8
10	Workshop Risk Officer	19 Februari 2025 February 19, 2025	19 Februari 2025 February 19, 2025	1	Pmo & Risk Management Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	50
11	Itil® V4 Foundation With Case Di Multimatics	19 Februari 2025 February 19, 2025	21 Februari 2025 February 21, 2025	3	Multimatics	1
12	Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Level 1 Government Procurement Of Goods/Services Training And Certification Level 1	19 Februari 2025 February 19, 2025	8 Maret 2025 March 8, 2025	13	Lembaga Pengembangan Dan Konsultasi Nasional (Lpkn) National Development And Consultation Institute (Lpkn)	2
13	Workshop Hubungan Industrial Industrial Relations Workshop	19 Februari 2025 February 19, 2025	19 Februari 2025 February 19, 2025	1	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	2
14	Pelatihan Cubicost Batch 12 Cubicost Training Batch 12	26 Februari 2025 February 26, 2025	28 Februari 2025 February 28, 2025	3	Pt Glodon Technical Indonesia	3
15	Pelatihan Sistem Manajemen Wika Gedung Wika Gedung Management System Training	26 Februari 2025 February 26, 2025	26 Februari 2025 February 26, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	26
16	Financial Modelling & Valuation Analyst (Fmva®)	18 Februari 2025 February 18, 2025	18 Agustus 2025 August 18, 2025	33	Corporate Finance Institute	1

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End			
17	Satria Pratama Batch 30	4 Februari 2025 February 4, 2025	6 April 2025 April 6, 2025	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	3
18	Pelatihan Dan Sertifikasi Skema Manajer Bim Madya Intermediate Bim Manager Scheme Training And Certification	10 Februari 2025 February 10, 2025	14 Maret 2025 March 14, 2025	4	Lsp Wika	5
19	Pelatihan Awareness Iso She Iso She Awareness Training	18 Maret 2025 March 18, 2025	18 Maret 2025 March 18, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	22
20	Pelatihan Cubicost Batch 13 Cubicost Training Batch 13	25 Maret 2025 March 25, 2025	27 Maret 2025 March 27, 2025	3	Pt Glodon Technical Indonesia	2
21	Pelatihan Pemahaman Csi Csi Understanding Training	24 April 2025 April 24, 2025	24 April 2025 April 24, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	27
22	Perpanjangan Ska Ahli K3 Umum General Ohs Expert Certificate Extension	22 April 2025 April 22, 2025	22 April 2025 April 22, 2025	1	Pt Midiatama	6
23	Sertifikasi Teknisi Akuntansi Iv Muda Junior Accounting Technician Iv Certification	1 April 2025 April 1, 2025	1 April 2025 April 1, 2025	1	Pt Midiatama	2
24	Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (Crmp) - Mei 25 Certified Risk Management Professional (Crmp) Training And Certification - May 25	5 Mei 2025 May 5, 2025	25 Juni 2025 June 25, 2025	6	Pt Rap Indonesia	2
25	Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (Crgp) - Mei 25 Training And Certification For Certified Risk Governance Professional (Crgp) - May 25	14 Mei 2025 May 14, 2025	19 Mei 2025 May 19, 2025	3	Pt Rap Indonesia	2
26	Pelatihan Dan Sertifikasi Kemnaker Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja Training And Certification For The Ministry Of Manpower's Junior Work Environmental Ohs Experts	15 Mei 2025 May 15, 2025	22 Mei 2025 May 22, 2025	6	Midiatama	1
27	Pelatihan Pemahaman Cp-Ptkp Cp-Ptkp Understanding Training	25 Mei 2025 May 25, 2025	25 Mei 2025 May 25, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	26
28	Pelatihan Baseline Manajemen Energi Iso 50006:2023 Iso 50006:2023 Energy Management Baseline Training	11 Juni 2025 June 11, 2025	11 Juni 2025 June 11, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	20
29	Pelatihan Managing Result Batch 15 Managing Result Training Batch 15	3 Juni 2025 June 3, 2025	11 Juni 2025 June 11, 2025	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	3
30	Satria Pratama Batch 31	3 Juni 2025 June 3, 2025	5 Juni 2025 June 5, 2025	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	3

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End	Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
31	Seminar Nasional Analisis Dan Implikasi Penarikan Aset Para Koruptor Serta Dampak Terhadap Ekonomi Nasional National Seminar: Analysis And Implications Of Corruptors' Assets Withdrawal And Its Impact On The National Economy	12 Juni 2025 June 12, 2025	13 Juni 2025 June 13, 2025	2	Perkumpulan Anti Korupsi Dan Kriminalitas Indonesia (Pakksa) Indonesian Anti-Corruption And Crime Association (Pakksa)	1
32	Pelatihan Pesawat Angkat & Angkut (Paa) Training For Lifting & Transporting Aircraft (Paa)	19 Juni 2025 June 19, 2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	1	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	3
33	Pelatihan Masa Persiapan Purna Bakti (Mpp) Angkatan 9 Retirement Preparation Training (Mpp) Batch 9	24 Juni 2025 June 24, 2025	26 Juni 2025 June 26, 2025	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	5
34	Pelatihan Quality Control Circle Quality Control Circle Training	26 Juni 2025 June 26, 2025	26 Juni 2025 June 26, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	27
35	Peningkatan Kapabilitas Manajer Madya (Pkmm) Dasar Angkatan 13 Enhancement Of Basic Middle Managers (Pkmm) Batch 13	3 Juni 2025 June 3, 2025	3 Juli 2025 July 3, 2025	6	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	3
36	Pelatihan Sustainable Housing From A Europian Perspective Training On Sustainable Housing From A European Perspective	1 Juli 2025 July 1, 2025	18 Juli 2025 July 18, 2025	18	Delft University Of Technology	2
37	Wika Fundamentals Of Project Management (Wfpm) Batch 11	1 Juni 2025 June 1, 2025	1 Juli 2025 July 1, 2025	20	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	3
38	Finale Satria Pratama Angkatan 26 Satria Pratama Class 26 Final	24 Juli 2025 July 24, 2025	24 Juli 2025 July 24, 2025	1	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	3
39	Pelatihan Lifting & Rigging Lifting & Rigging Training	16 Juli 2025 July 16, 2025	16 Juli 2025 July 16, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	77
40	Pelatihan Airport Feasibility Study And Masterplan Airport Feasibility Study And Masterplan Training	16 Juli 2025 July 16, 2025	18 Juli 2025 July 18, 2025	3	Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia Indonesian Airport Experts Association	4
41	Workshop Internal Control Over Financial Reporting (Icofr) Internal Control Over Financial Reporting (Icofr) Workshop	7 Juli 2025 July 7, 2025	10 Juli 2025 July 10, 2025	4	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk Dan Park Russel International Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk And Park Russel International	23
42	Pelatihan Cubicost Batch 14 Cubicost Training Batch 14	23 Juli 2025 July 23, 2025	25 Juli 2025 July 25, 2025	3	Pt Glodon Technical Indonesia	3
43	Pelatihan Managing Result Batch 16 Managing Result Training Batch 16	22 Juli 2025 July 22, 2025	25 Juli 2025 July 25, 2025	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	5

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End			
44	Pelatihan Pengendalian Dokumen Document Control Training	31 Juli 2025 July 31, 2025	31 Juli 2025 July 31, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	25
45	Supervisory Skill Batch 9	29 Juli 2025 July 29, 2025	7 Agustus 2025 August 7, 2025	6	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	4
46	Pelatihan Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital Risk Mitigation In Digital Transformation Training	3 Juli 2025 July 3, 2025	4 Juli 2025 July 4, 2025	2	Pt Rap	1
47	Key User Training (Kut) Wika Digital Invoice	8 Agustus 2025 August 8, 2025	11 Agustus 2025 August 11, 2025	2	Information Technology Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	16
48	Short Course Haki 2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	1	Haki	3
49	Pelatihan Manajemen Kontrak Batch 30 Contract Management Training Batch 30	20 Agustus 2025 August 20, 2025	21 Agustus 2025 August 21, 2025	1	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	6
50	Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (Crmp) - Sept 25 Certified Risk Management Professional (Crmp) Training And Certification - September 25	15 September 2025 September 15, 2025	23 September 2025 September 23, 2025	5	Pt Rap	3
51	Pelatihan Esg Awareness - Direksi Esg Awareness Training - Board Of Directors	17 September 2025 September 17, 2025	17 September 2025 September 17, 2025	1	Pt Surveyor Indonesia	5
52	Pelatihan Esg Awareness - Vp Esg Awareness Training - Vp	16 September 2025 September 16, 2025	16 September 2025 September 16, 2025	1	Pt Surveyor Indonesia	15
53	Pelatihan Esg Awareness - Manager Esg Awareness Training - Manager	18 September 2025 September 18, 2025	18 September 2025 September 18, 2025	1	Pt Surveyor Indonesia	44
54	Pelatihan Alat Ukur Qpass Qpass Measurement Tool Training	11 September 2025 September 11, 2025	11 September 2025 September 11, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	40
55	Pelatihan Dan Seminar Konstruksi Ramping Iamkri Tahun 2025 Iamkri Lean Construction Training And Seminar 2025	9 September 2025 September 9, 2025	10 September 2025 September 10, 2025	2	Iamkri	6
56	User Acceptance Test (Uat) & Key User Training (Kut) Wika Integrated Smart E-Proc	19 September 2025 September 19, 2025	22 September 2025 September 22, 2025	2	Information Technology Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	14
57	Webinar Menakar Tanggung Jawab Hukum Anggota Direksi, Dewan Komisaris Dan Karyawan Kunci Bumn Dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan Webinar On Assessing The Legal Responsibility Of Members Of Board Of Directors, Board Of Commissioners, And Key Employees Of Soes In The Financial Report Manipulation Scandal	18 September 2025 September 18, 2025	18 September 2025 September 18, 2025	1	Pt Rap	3

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End	Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
58	Pelatihan Sni Iso 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Awareness Sni Iso 37001:2016 Anti-Bribery Awareness Management System Training	25 September 2025 September 25, 2025	21 Oktober 2025 October 21, 2025	3	Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	26
59	Pelatihan Dan Sertifikasi Ahli K3 Umum General Ohs Expert Training And Certification	22 September 2025 September 22, 2025	4 Oktober 2025 October 4, 2025	12	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Provinsi Dki Jakarta Center For Corporate Hygiene, Occupational Safety And Health Of Dki Jakarta Province	1
60	End User Training (Eut) Aplikasi Wika Digital Invoice End User Training (Eut) For Wika Digital Invoice Application	10 September 2025 September 10, 2025	10 September 2025 September 10, 2025	1	Information Technology Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	71
61	Pelatihan Managing Result Batch 17 Managing Result Training Batch 17	30 September 2025 September 30, 2025	8 Oktober 2025 October 8, 2025	4	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	10
62	Pelatihan Wika Project Management (I2li) Batch 10 Wika Project Management Training (I2li) Batch 10	19 September 2025 September 19, 2025	11 Oktober 2025 October 11, 2025	15	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	4
63	End User Training (Eut) Roll Out Aplikasi Wika Integrated Smart E-Proc End User Training (Eut) Roll Out Of Wika Integrated Smart E-Proc Application	15 Oktober 2025 October 15, 2025	16 Oktober 2025 October 16, 2025	2	Information Technology Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	3
64	Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (Crmo) - Okt 25 Certified Risk Management Officer (Crmo) Training And Certification - Oct 25	20 Oktober 2025 October 20, 2025	27 Oktober 2025 October 27, 2025	5	Pt Rap	1
65	Pelatihan Manajemen Konstruksi Bidang Gedung Building Construction Management Training	8 Oktober 2025 October 8, 2025	10 Oktober 2025 October 10, 2025	3	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	7
66	Pelatihan Business Continuity Based On Iso 22301 Iso 22301-Based Business Continuity Training	20 Oktober 2025 October 20, 2025	22 Oktober 2025 October 22, 2025	3	Pt Rap	2
67	Training Certified Human Resource Generalist (Chrg) Batch 20 Certified Human Resource Generalist (Chrg)	4 Oktober 2026 October 4, 2026	1 Februari 2026 February 1, 2026	16	Sdm List	1
68	Pelatihan Metode Kerja Finishing Basah Training Batch 20 Wet Finishing Work Method Training	24 Oktober 2025 October 24, 2025	24 Oktober 2025 October 24, 2025	1	Qshe Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	24
69	Pelatihan Corporate Finance Batch 12 Corporate Finance Training Batch 12	28 Oktober 2025 October 28, 2025	30 Oktober 2025 October 30, 2025	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	2

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date		Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
		Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End			
70	Pelatihan Leader As Coach Batch 21 Leader As Coach Training Batch 21	22 Oktober 2025 October 22, 2025	23 Oktober 2025 October 23, 2025	2	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	4
71	Pelatihan Feed Forwarder - Okt 25 Feed Forwarder Training - Oct 25	28 Oktober 2025 28 October 2025	29 Oktober 2025 October 29, 2025	2	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	2
72	Pelatihan Satria Pratama Angkatan 32 Satria Pratama Training Batch 32	28 Oktober 2025 28 October 2025	30 Oktober 2025 October 30, 2025	3	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	4
73	End User Training (Eut) Dashboard Project Performance	13 November 2025 November 13, 2025	14 November 2025 November 14, 2025	2	Information Technology Division Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	36
74	Glulam Timber Building Workshop	5 November 2025 November 5, 2025	6 November 2025 November 6, 2025	2	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2
75	Pelatihan & Sertifikasi Skk Teknisi Keuangan Utama Skk Training & Certification For Key Financial Technicians	29 November 2025 November 29, 2025	10 Desember 2025 December 10, 2025	8	Lsp Teknisi Akuntansi Lsp Accounting Technician	1
76	Pelatihan Asia Low Carbon Buildings Transition (Alcbt) Batch Ii Asia Low Carbon Buildings Transition (Alcbt) Training Batch Ii	5 November 2025 November 5, 2025	5 November 2025 November 5, 2025	1	Kementrian Pekerjaan Umum Dan Global Green Growth Institute Ministry Of Public Works And Global Green Growth Institute	2
77	Webinar Series 10: Introduction To The Integrated Program Management And Project Alliance	14 November 2025 November 14, 2025	14 November 2025 November 14, 2025	1	Ikatan Ahli Manajemen Konstruksi Ramping Indonesia (Iamkri) Indonesian Association Of Lean Construction Management Experts (Iamkri)	42
78	Key User Training (Kut) Digital Warehouse Entitas Anak Key User Training (Kut) Digital Warehouse Subsidiary Entity	24 November 2025 November 24, 2025	24 November 2025 November 24, 2025	1	Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk	9
79	Pelatihan Leader As Coach Batch 22 Leader As Coach Training Batch 22	25 November 2025 November 25, 2025	26 November 2025 November 26, 2025	2	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	8
80	Managing Result Batch 18	20 November 2025 November 20, 2025	28 November 2025 November 28, 2025	4	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan Wikasatrian Leadership Center	8

No	Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Date Tanggal Mulai Start	Tanggal Selesai End	Jumlah Hari Number of Days	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
81	Feed Forward Assessment Soft Competency	9 Desember 2025 December 9, 2025	23 Desember 2025 December 23, 2025	1	Pt Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	76
82	Pelatihan Dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (Crgp) - Des 25 Training And Certification Of Certified Risk Governance Professional (Crgp) - Dec 25	11 Desember 2025 December 11, 2025	17 Desember 2025 December 17, 2025	3	Pt Rap Indonesia	3

PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN

Program pengembangan Perseroan terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu pengembangan *soft skill*, *hard skill*, seminar, dan sertifikasi. Realisasi pelaksanaan program pengembangan sepanjang tahun 2025 berdasarkan kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAMS

The Company's development programs are divided into four main categories: soft skills development, hard skills development, seminars, and certification. The implementation of development programs throughout 2025 based on these categories can be seen in the following table and graph:

PENGEMBANGAN KARYAWAN 2024-2025 (ORANG/PESERTA)

EMPLOYEE DEVELOPMENT IN 2024-2025 (PERSONS/PARTICIPANTS)

Pengembangan Karyawan Employee Development	2025 Target Target	2025 Realisasi Realization	2024 Target Target	2024 Realisasi Realization
Soft Skill	172	153	427	365
Hard Skill	830	819	1.788	1.770
Seminar	60	60	352	351
Sertifikasi Certification	28	27	115	115
Jumlah Peserta Number of Participants	**1090**	**1059**	2.682	2.601

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perseroan telah merealisasikan alokasi biaya untuk pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan selama tahun 2025 sebesar Rp 586.680.372 Investasi ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Adapun rincian biaya pengembangan kompetensi karyawan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

EMPLOYEE COMPETENCE DEVELOPMENT COSTS

The Company has allocated Rp586,680,372 for employee training and development programs throughout 2025. This investment reflects the Company's commitment to continuously improving the competencies of its human capital.

The details of employee competency development costs throughout 2025 are as follows:

No	Program Program	Biaya (Rp) Costs(Rp)
1.	Pendidikan Reguler Regular Education	Rp263.220.280
2.	Pelatihan Dasar Basic Training	Rp198.340.410
3.	Asesmen dan Implementasi Budaya Culture Assessment and Implementation	Rp66.782.631
4.	Pengembangan Direksi dan Komisaris Development of Directors and Commissioners	Rp58.337.051
Jumlah Total		**Rp586.680.372**

RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEDEPAN

Dalam menghadapi dinamika industri konstruksi yang semakin kompetitif serta percepatan transformasi digital, Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing bisnis. Perencanaan pengembangan SDM yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi fondasi dalam memastikan ketersediaan talenta yang memiliki kompetensi teknis, kapabilitas manajerial, serta pola pikir adaptif yang selaras dengan arah strategis Perseroan.

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Human Capital 2026–2030, Perseroan menetapkan strategi pengembangan SDM yang terintegrasi untuk mendukung transformasi organisasi menuju model yang lebih adaptif dan ambidextrous. Fokus pengembangan diarahkan pada penguatan kapasitas tenaga kerja (*workforce capacity*), peningkatan kapabilitas dan kepemimpinan (*workforce capability), attract-retain*, serta penguatan fondasi pendukung SDM (HC enabler).

Dalam aspek kapasitas tenaga kerja, Perseroan mendorong penerapan prinsip lean *workforce* dan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan rasio tenaga kerja yang optimal serta efisiensi biaya SDM. Upaya ini bertujuan menciptakan organisasi yang lebih ramping, lincah, dan produktif, tanpa mengurangi kualitas kinerja maupun daya saing perusahaan.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan transformasi organisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan SDM yang kompeten, tetapi juga oleh kesinambungan kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kebijakan suksesi Direksi dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan talenta yang terintegrasi untuk memastikan tersedianya calon pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan sesuai kebutuhan strategis Perseroan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada dimensi kapabilitas pengembangan difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis dan digital, serta pembentukan *leadership pipeline* yang kuat. Perseroan memastikan ketersediaan tenaga kerja tersertifikasi, penguatan penguasaan teknologi dan sistem digital, serta kesiapan suksesi pada posisi-posisi kunci. Dengan pendekatan ini, Perseroan menargetkan terbentuknya SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan, siap memimpin, dan mampu mendorong inovasi bisnis.

Di bidang pengelolaan talenta yang berkelanjutan (*talent management*), strategi difokuskan pada penguatan talent pool unggul, peningkatan engagement karyawan, serta pengembangan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, asosiasi profesional, dan mitra eksternal lainnya. Perseroan menerapkan retensi talenta kunci, perencanaan suksesi yang sistematis, serta pengembangan jalur karier yang terstruktur guna mendukung implementasi kebijakan suksesi Direksi sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan ketersediaan kompetensi strategis di masa depan.

FUTURE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN

In responding to the increasingly competitive dynamics of the construction industry and the acceleration of digital transformation, the Company places human capital development as one of the key pillars in sustaining long-term business resilience and competitiveness. A structured and sustainable human capital development plan serves as the foundation for ensuring the availability of talent with strong technical expertise, managerial capabilities, and an adaptive mindset aligned with the Company's strategic direction.

In line with the 2026–2030 Human Capital Long-Term Plan, the Company has established an integrated human capital development strategy to support organizational transformation toward a more adaptive and ambidextrous operating model. The strategy focuses on strengthening workforce capacity, enhancing workforce capability and leadership, attracting and retaining talent, and reinforcing the Human Capital (HC) enablers that support sustainable organizational growth.

From a workforce capacity perspective, the Company promotes lean workforce principles and productivity enhancement through optimal workforce planning and efficient human capital cost management. These initiatives are aimed at building a leaner, more agile, and productive organization while maintaining high performance standards and strengthening the Company's competitive advantage.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Company believes that successful organizational transformation depends not only on the availability of competent human capital but also on leadership continuity across all organizational levels, including the Board of Directors. Accordingly, the Board of Directors succession policy is implemented as an integral part of the Company's talent management framework to ensure the availability of qualified leadership candidates possessing the competencies, integrity, experience, and leadership capabilities required to support the Company's long-term strategic objectives.

In support of this policy, capability development is focused on strengthening technical and digital competencies while establishing a robust leadership pipeline. The Company ensures the availability of certified professionals, enhances employees' digital and technological capabilities, and prepares successors for key leadership positions. Through this approach, the Company aims to develop a highly capable workforce that is adaptable to change, prepared to lead, and able to drive sustainable business innovation.

As part of its sustainable talent management strategy, the Company focuses on strengthening its talent pool, enhancing employee engagement, and expanding strategic partnerships with educational institutions, professional associations, and other external stakeholders. The Company also implements key talent retention initiatives, systematic succession planning, and structured career development programs to support the effective implementation of the Board of Directors succession policy while ensuring leadership continuity and the long-term availability of strategic capabilities.

Sebagai enabler, transformasi digital SDM terus dipercepat melalui implementasi sistem Human Capital berbasis digital, penguatan budaya organisasi yang kolaboratif dan inovatif, serta peningkatan *workforce resilience*. Perseroan juga secara konsisten membangun budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dan prinsip tata kelola yang baik, guna menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap dinamika bisnis.

As a key enabler, the Company continues to accelerate its digital human capital transformation through the implementation of integrated digital Human Capital systems, the cultivation of a collaborative and innovation-driven organizational culture, and the enhancement of workforce resilience. The Company also consistently fosters a work culture that reflects its corporate values and good corporate governance principles, creating an adaptive workplace capable of responding effectively to evolving business challenges.

MANAJEMEN PERFORMA

Penilaian kinerja merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan Perseroan serta pencapaian visi jangka panjang. Sistem penilaian ini dirancang untuk memastikan setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas atas peran, tanggung jawab, dan target kinerjanya, sekaligus menyediakan mekanisme evaluasi yang objektif, adil, dan transparan sebagai dasar pengembangan kompetensi. Melalui pendekatan berbasis kinerja, Perseroan mendorong peningkatan produktivitas serta penguatan kapabilitas individu secara berkelanjutan.

Dalam implementasi kebijakan remunerasi, setiap karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan secara berjenjang sesuai struktur organisasi. Penetapan KPI dilakukan setiap tahun dan diselaraskan dengan tahapan pencapaian rencana jangka panjang Perseroan. Target kinerja masing-masing karyawan dituangkan dalam Kesepakatan Karya (KK), yang pelaksanaannya dipantau melalui evaluasi berkala setiap semester. Hasil pemantauan tersebut kemudian dirangkum dalam Penilaian Karya (PK) pada akhir tahun sebagai salah satu dasar dalam peninjauan kebijakan remunerasi dan pengembangan karier.

Selain pencapaian target kinerja, Perseroan juga mempertimbangkan hasil Evaluasi Kompetensi (EK) serta asesmen psikologis dalam proses penilaian secara menyeluruh. Penetapan bobot antara EK dan PK disesuaikan dengan kebutuhan strategis Perseroan, di mana EK merepresentasikan tingkat penguasaan kompetensi teknis (*hard competency*), sementara PK mencerminkan capaian kinerja aktual. Pendekatan ini memastikan keseimbangan antara kualitas individu dan hasil kerja dalam penilaian kinerja karyawan.

Melalui sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dan berbasis data, Perseroan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan individu, penguatan budaya kinerja, serta pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkelanjutan.

Perseroan meyakini bahwa tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi merupakan faktor penting dalam mendorong motivasi, loyalitas, dan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten melaksanakan survei keterlibatan karyawan sebagai sarana untuk mengidentifikasi area perbaikan, memantau indikator kesehatan organisasi, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat guna memperkuat budaya kinerja dan keberlanjutan Perseroan.

PERFORMANCE MANAGEMENT

Performance evaluation is a key element in supporting the Company's growth and the achievement of long-term vision. The system is designed to ensure that each employee has a clear understanding of their roles, responsibilities, and performance targets, while also providing an objective, fair, and transparent evaluation mechanism as a basis for competency development. Through a performance-based approach, the Company encourages continuous productivity improvement and capability enhancement.

In the implementation of remuneration policy, each employee carries out duties and responsibilities based on Key Performance Indicators (KPIs) established hierarchically in accordance with the organizational structure. KPIs are set annually and aligned with the Company's long-term plan milestones. Individual performance targets are outlined in the Work Agreement (Kesepakatan Karya/KK), with implementation monitored through periodic evaluations conducted each semester. The results are summarized in the Performance Appraisal (Penilaian Karya/PK) at year-end as one of the bases for remuneration review and career development.

In addition to performance achievement, the Company also considers the Competency Evaluation (Evaluasi Kompetensi/EK) and psychological assessments in overall evaluation process. The weighting between EK and PK is adjusted based on strategic needs, where EK represents mastery of technical competencies (hard competencies), while PK reflects actual performance outcomes. This approach ensures a balance between individual quality and work results in employee performance evaluation.

Through an integrated, data-driven performance evaluation system, the Company aims to create a work environment that promotes individual growth, strengthens a performance-driven culture, and supports the sustainable achievement of strategic objectives.

The Company believes that a high level of employee engagement is a critical factor in driving motivation, loyalty, and optimal performance. Therefore, employee engagement surveys are conducted consistently to identify areas for improvement, monitor organizational health indicators, and formulate appropriate follow-up actions to strengthen performance culture and sustainability.

ENGAGEMENT SCORE 2025

Pada tahun 2025, hasil Survei Keterlibatan Karyawan mencatat skor keterlibatan sebesar 60%, yang mencerminkan bahwa 60% dari total 460 karyawan yang berpartisipasi dalam survei tergolong sebagai karyawan yang *"Engaged"*. Temuan ini menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan keterlibatan dan produktivitas karyawan, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di masa depan.

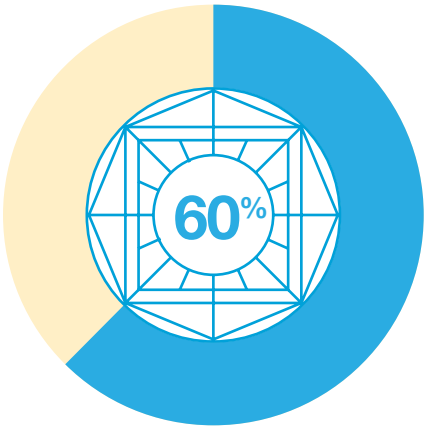
Terdapat 60% pegawai berada di kategori *"Engaged"* didalam Employee Engagement Survey 2025.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SCORE 2025

In 2025, the Employee Engagement Survey recorded an engagement score of 60%, indicating that 60% of the total 460 employees participating in the survey were categorized as "Engaged." This finding serves as a basis for formulating strategic policies aimed at increasing employee engagement and productivity, while strengthening the Company's competitiveness in the future.

A total of 60% of employees were categorized as "Engaged" in the 2025 Employee Engagement Survey.

DARI 460 KARYAWAN 60% ENGAGEMENT (276)
460 EMPLOYEES OF 60% ENGAGEMENT (276)



DEMOGRAFI KARYAWAN

Demografi karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan operasional serta pencapaian visi Perseroan. WEGE memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang, kompetensi, dan budaya kerja yang beragam serta unggul, yang menjadi aset strategis dalam mewujudkan tujuan jangka panjang Perseroan. Keberagaman tersebut turut memperkaya perspektif dan mendorong terciptanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia, WEGE secara konsisten mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengelolaan talenta yang terstruktur dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk membangun organisasi yang efektif, efisien, dan adaptif, sehingga mampu merespons dinamika industri serta mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

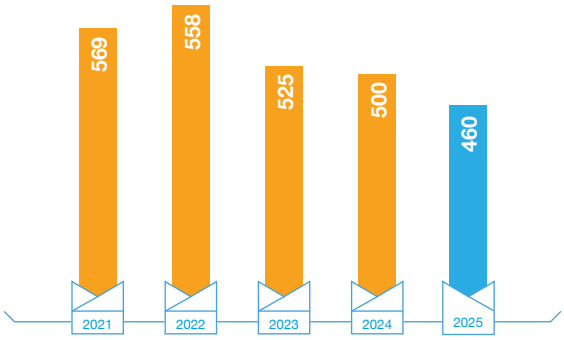
Employee demographics represent an important aspect in supporting operational success and the achievement of the Company's vision. WEGE has a diverse and highly capable workforce in terms of background, competencies, and work culture, which serves as a strategic asset in achieving long-term corporate objectives. This diversity enriches perspectives and encourages innovation in business activities.

As part of its commitment to human capital development, WEGE consistently promotes workforce quality improvement through structured and sustainable talent management. These efforts are directed toward building an effective, efficient, and adaptive organization capable of responding to industry dynamics and supporting sustainable business growth.

PERGERAKAN JUMLAH KARYAWAN DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR 2021-2025

EMPLOYEE MOVEMENT OVER THE LAST 5 (FIVE) YEARS (2021–2025)

Tahun Year	Jumlah Karyawan Number of Employees
2025	460
2024	500
2023	525
2022	558
2021	569



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EMPLOYMENT STATUS IN 2024-2025 (PERSONS)

Status Kepegawaian Employment Status	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
Organik Organic	135	13	148	145	18	163
Terampil Skilled	14	7	21	17	7	24
Pegawai Perusahaan Company Employees	256	35	291	278	35	313
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

TIDAK DIBEDAKAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NO DISTINCTION IS MADE BASED ON EMPLOYMENT STATUS

2025			2024		
Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
135	13	148	145	18	163
14	7	21	17	7	24
256	35	291	278	35	313
405	55	460	440	60	500

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EDUCATION LEVEL IN 2024-2025 (PEOPLE)

Tingkat Pendidikan Education Level	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
Strata 2 / Strata 3 Master Degree / Doctorate	47	12	59	35	11	46
Strata 1 Bachelor Degree	295	38	333	353	46	399
Diploma Diploma	60	5	65	49	3	52
SLTA High School	3	0	3	3	0	3
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON AGE RANGE IN 2024-2025 (PERSONS)

Rentang Usia Age Range	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
>55	1	0	1	1	0	1
46-55	71	7	78	70	10	80
36-45	140	21	161	142	20	162
25-35	193	27	220	227	30	257
<25	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON GENDER IN 2024-2025 (PERSONS)

Gender	2025		2024	
	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage
Pria Male	405	88,04%	440	88,00%
Wanita Female	55	11,96%	60	12,00%
Jumlah Total	**460**	**100%**	**500**	**100%**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENEMPATAN KERJA 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON GENDER IN 2024-2025 (PERSONS)

Penempatan Kerja Job Placement	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
Kantor Pusat Head Office	298	55	353	184	59	243
Proyek Project	107	0	107	256	1	257
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN (2024-2025)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON POSITION IN 2024-2025 (PERSONS)

Level Jabatan Position Level	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
Direksi Director	5	0	5	5	0	5
Vice President	14	0	14	14	1	15
Manager	57	10	67	60	7	67
Supervisor	155	28	183	225	31	256
Staff	174	17	191	136	21	157
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN SPESIALISASI KEAHLIAN 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EXPERTISE SPECIALIZATION IN 2024-2025 (PERSONS)

Spesialisasi Keahlian Expertise Specialization	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
Teknik Technical	307	34	341	335	38	373
Non Teknik Non-Technical	98	21	119	105	22	127
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA 2024-2025 (ORANG)

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON WORK PERIOD IN 2024-2025 (PERSONS)

Masa Kerja Work Period	2025			2024		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Amount
>30 tahun >30 years	4	0	4	4	0	4
26-30 tahun 26-30 years	4	1	5	6	2	8
21-25 tahun 21-25 years	9	1	10	5	2	7
16-20 tahun 16-20 years	51	1	52	54	1	55
11-15 tahun 11-15 years	114	12	126	109	14	123
6-10 tahun 6-10 years	201	31	232	199	25	224
0-5 tahun 0-5 years	22	9	31	63	16	79
Jumlah Total	**405**	**55**	**460**	**440**	**60**	**500**

TINGKAT PERPUTARAN KARYAWAN

Tingkat perputaran karyawan mencerminkan dinamika keluar masuknya tenaga kerja di suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selama tahun 2025, tingkat perputaran karyawan Perseroan tercatat sebesar 4,79%, relatif stabil dan tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024.

Meskipun penurunan tingkat perputaran di tahun 2025 relatif tidak signifikan, hal ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan kondusif, mendukung kesinambungan operasional bisnis, serta mempertahankan kepuasan dan keterlibatan karyawan.

PROGRAM PENSIUN

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan, WEGE senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan, termasuk saat memasuki masa pensiun. Perseroan memastikan tersedianya fasilitas perlindungan pasca kerja yang dirancang untuk mendukung kebutuhan dan kenyamanan karyawan setelah masa bakti berakhir.

Fasilitas tersebut meliputi:

1. Dana Pensiun Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun melalui:
   a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
   b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

2. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Seluruh karyawan Perseroan diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yang mencakup:
   a. Jaminan Hari Tua (JHT)
   b. Jaminan Pensiun (JP)
   c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   d. Jaminan Kematian (JKM)

3. Program Imbalan Pasca Bekerja Program ini diberikan kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bersama Serikat Pekerja, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perseroan menyediakan bantuan kesehatan bagi pensiunan dan pasangannya, melalui kepesertaan dalam asuransi umum maupun BPJS Kesehatan.

EMPLOYEE TURNOVER RATE

The employee turnover rate reflects the dynamics of employee turnover within a company over a specific period. During 2025, the Company's employee turnover rate was recorded at 4.79%, relatively stable and unchanged from 2024.

Although the decline in the turnover rate in 2025 was relatively insignificant, it reflects the Company's commitment to creating a stable and conducive work environment, supporting the continuity of business operations, and maintaining employee satisfaction and engagement.

RETIREMENT PROGRAM

As a token of appreciation for employee contributions, WEGE consistently prioritizes employee welfare, including during their retirement period. The Company ensures the availability of post-employment benefits designed to support employee needs and comfort after their service ends.

These facilities include:

1. The Company's Pension Fund provides pension fund programs through:
   a. Defined Benefit Pension Program (PPMP)
   b. Defined Contribution Pension Program (PPIP)

2. BPJS Ketenagakerjaan Social Security Program. All Company employees are enrolled in BPJS Ketenagakerjaan Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), which includes:

   a. Old Age Security (JHT)
   b. Pension Security (JP)
   c. Work Accident Security (JKK)
   d. Death Security (JKM)

3. Post-Employment Benefits Program. This program is provided to employees in accordance with the agreement with the Labor Union, as stated in the Collective Labor Agreement (PKB).

4. Health Care Insurance. The Company provides health care assistance to retirees and their spouses, through participation in general insurance and BPJS Kesehatan.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

WEGE berkomitmen untuk membangun dan memelihara hubungan industrial yang sehat dan harmonis melalui penciptaan sistem hubungan kerja yang konstruktif antara karyawan dan Perseroan. Hubungan kerja tersebut dilandasi oleh prinsip saling menghormati, keterbukaan, dan keadilan, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Komitmen ini diwujudkan melalui komunikasi yang intensif serta keterlibatan aktif karyawan dalam mendukung pencapaian target dan kinerja Perseroan.

Perseroan memandang karyawan sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Oleh karena itu, WEGE secara konsisten menjalankan komunikasi yang teratur dan berkesinambungan dengan seluruh karyawan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak berserikat, Perseroan juga memfasilitasi keberadaan serikat pekerja sebagai wadah resmi bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun masukan secara konstruktif.

Dalam rangka memperkuat hubungan kerja yang harmonis dan dinamis, WEGE secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara manajemen dan perwakilan serikat pekerja. Pertemuan tersebut menjadi sarana dialog dua arah untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan, sekaligus memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dijalankan secara seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung terciptanya hubungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan, WEGE telah menyusun dan menerapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman hubungan kerja antara karyawan dan Perseroan. PKB tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDUSTRIAL RELATIONS

WEGE is committed to building and maintaining healthy and harmonious industrial relations by creating a constructive working relationship system between employees and the Company. The employment relationship is based on the principles of mutual respect, openness, and fairness, with the goal of maintaining a balance between fulfilling the rights and fulfilling the obligations of each party. This commitment is demonstrated through intensive communication and active employee involvement in supporting the achievement of the Company's targets and performance.

The Company views employees as strategic partners in creating a conducive and productive work environment. Therefore, WEGE consistently maintains regular and ongoing communication with all employees. As a form of respect for the right to associate, the Company also facilitates the existence of labor unions as an official forum for employees to express aspirations, suggestions, and constructive input.

To strengthen harmonious and dynamic working relationships, WEGE regularly holds meetings between management and labor union representatives. These meetings serve as a forum for two-way dialogue to discuss various employment issues, while ensuring that the rights and obligations of both parties are carried out in a balanced manner and in accordance with applicable regulations.

To support the creation of a conducive and sustainable working relationship, WEGE has developed and implemented a Collective Labor Agreement (CLA) as a guideline for employment relationship between employees and the Company. The Collective Labor Agreement (CLA) not only regulates the rights and obligations of the parties but also serves as a mechanism for resolving industrial relations disputes through deliberation and in accordance with statutory provisions.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM WEGE PER 31 DESEMBER 2025

WEGE SHAREHOLDER COMPOSITION AS OF DECEMBER 31, 2025

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2025) Share Ownership at the Beginning of the Year (January 1, 2025)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2025) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2025)		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000
Koperasi Karyawan WIKA WIKA Employee Cooperative	67.000.000	0,70	6.700.000.000	67.000.000	0,70	6.700.000.000
Publik – masing masing di bawah 5% Public – each with less than 5% ownership	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000
Jumlah Total	**9.572.000.000**	**100,00**	**957.200.000.000**	**9.572.000.000**	**100,00**	**957.200.000.000**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN >5%

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP >5%

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2025) Share Ownership at the Beginning of the Year (January 1, 2025)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2025) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2025)		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Nilai Nominal** Nominal Value **(Rp)**
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000	6.633.000.000	69,30	663.300.000.000
Koperasi Karyawan WIKA WIKA Employee Cooperative	67.000.000	0,70	6.700.000.000	67.000.000	0,70	6.700.000.000
Publik – masing masing di bawah 5% Public – each with less than 5% ownership	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000	2.872.000.000	30,00	287.200.000.000

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP BY BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners		**Kepemilikan Saham WEGE Secara Langsung** Direct Ownership of WEGE Shares				**Kepemilikan Saham WEGE Secara Tidak Langsung** Indirect Ownership of WEGE Shares
		Kepemilikan Saham Tahun 2025 Share Ownership in 2025		**Kepemilikan Saham Tahun 2024** Share Ownership in 2024		
Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	
Direksi Board of Directors						
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director			-	-	Pemegang saham utama/ pengendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau selaku entitas induk Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sekaligus menjadi pemilik akhir WEGE. Selama tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan kepemilikan saham tidak langsung WEGE. The major/controlling shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, or the Company's parent entity, is the Republic of Indonesia, represented by the Government of the Republic of Indonesia/Ministry of State-Owned Enterprises (SOE), and is also the ultimate owner of WEGE. From 2024 to the end of 2025, there were no members of Board of Directors or Board of Commissioners with indirect shareholdings in WEGE.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management			-	-	-
Tomo Dwi Hasputro	Direktur QHSE dan Pemasaran Director of QHSE and Marketing			-	-	
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I			-	-	
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II			-	-	

Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners		Kepemilikan Saham WEGE Secara Langsung Direct Ownership of WEGE Shares				Kepemilikan Saham WEGE Secara Tidak Langsung Indirect Ownership of WEGE Shares
		Kepemilikan Saham Tahun 2025 Share Ownership in 2025		Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024		
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Joseph Prajogo	Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner					
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner					
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner					
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner					

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH INSTITUSI DAN INDIVIDU

Komposisi Kepemilikan Saham oleh Institusi dan Individu Per 31 Desember 2025

COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP BY INSTITUTIONS AND INDIVIDUALS

Composition of Share Ownership by Institutions and Individuals as of December 31, 2025

Klasifikasi Classification	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Institusi Lokal Local Institutions	47	7.504.254.215	78,39798
Institusi Asing Foreign Institutions	20	142.395.299	1,48762
Individu Lokal Local Individuals	18.038	1.921.194.686	20,07099
Individu Asing Foreign Individuals	23	4.155.800	0,04342
Jumlah Total	**18.128**	**9.572.000.000.**	**100,00000**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN BERDASARKAN STATUS

SHAREHOLDERS COMPOSITION AND OWNERSHIP PERCENTAGE BY STATUS

Status Pemegang Saham Shareholder Status	Kepemilikan Saham Tahun 2025 Share Ownership in 2025			Kepemilikan Saham Tahun 2024 Share Ownership in 2024		
	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemegang Saham Number of Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Pemodal Nasional National Investor						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1	6.633.000.000	69,30	1	6.633.000.000	69,30
Koperasi Karyawan WIKA WIKA Employee Cooperative	1	67.000.000	0.70	1	67.000.000	0,70
Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	18,038	1,921,194,686	20.07	15.226	1.908.960.886	19,94
Koperasi Cooperatives	3	394,773,300	4.12	2	353.031.900	3,69
Dana Pensiun Pension Funds	5	22,745,900	0.24	6	25.345.900	0,26
Asuransi Insurance	4	37,886,000	0.40	4	37.886.000	0,40
Bank Banks	1	15,000,000	0.16	1	15.000.000	0,16
Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	34	7,033,849,015	73.48	29	386.987.415	4,04
Reksadana Mutual Funds	-		-	-	-	-
Sub-Total	18,085	9,425,448,901	98.47	15.270	9.427.212.101	98,49
Pemodal Asing Foreign Investor						
Perorangan Asing Foreign Individuals	23	4,155,800	0.04	20	2.839.200	0,03
Badan Usaha Asing Foreign Business Entities	20	142,395,299	1.49	19	141.948.699	1,48
Sub-Total	43	146,551,099	1.53	39	144.787.899	1,51
Total	**18,128**	**9,572,000,000**	**100**	**15.309**	**9.572.000.000**	**100,00**

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR DAN PERSENTASE KEPEMILIKANNYA

COMPOSITION OF 20 TOP SHAREHOLDERS AND THEIR PERCENTAGE OWNERSHIP

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status Status	Domisili Domicile	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BUMN/Perusahaan Terbatas State-Owned Enterprise/Limited Liability CompanY	Domestik Domestic	6.633.000.000	69,30
	Pt Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	Domestik Domestic	339,578,514	3.55
	Koperasi Karya Mitra Satya	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	303,890,200	3.17
	Koperasi Karyawan Pt Wijaya Karya	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	67,000,000	0.70

No	Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Status Status	Domisili Domicile	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
	Haiyanto	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	57,092,900	0.60
	Caceis Bank, Ireland Branch / Nichejungl	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	55,137,800	0.58
	Endang Mulyono	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	31,425,400	0.33
	Sutanto	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	30,000,000	0.31
	Allan Galiano Lukman	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	27,100,000	0.28
	Danny Rachmad	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	26,047,600	0.27
	Koperasi Karya Mitra Satya	Koperasi Cooperative	Domestik Domestic	23,883,100	0.25
	Dbs Bank Ltd S/A Inclusif Value Fund	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	22,291,700	0.23
	Pershing Llc Main Custody Account	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	20,552,000	0.21
	Tjhin Adianto Chiwoso	Perorangan Indonesia Foreign Business Entity	Domestik Domestic	20,380,900	0.21
	Dana Pensiun Wijaya Karya Ppmp	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	Domestik Domestic	20,232,700	0.21
	Ervin Wijaya	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	20,042,100	0.21
	Pt. Jasa Raharja (Persero)	Asuransi Insurance	Domestik Domestic	19,761,100	0.21
	Stefanus Widjaja	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	19,631,000	0.21
	Harianto	Perorangan Indonesia Indonesian Individual	Domestik Domestic	18,720,000	0.20
	Dbs Bank Ltd S/A Pheim Asean All-Cap Equ	Badan Usaha Asing Foreign Business Entity	Asing Foreign	18,077,400	0.19

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI PERUSAHAAN, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

Pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tingkat pemilik individu, adalah sebagai berikut:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan entitas induk Perseroan dengan kepemilikan sebesar 69,30%, setara dengan 6.633.000.000 lembar saham.

Pemegang saham utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang juga merupakan entitas induk Perseroan, adalah Negara Republik Indonesia. Kepemilikan ini diwakili oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan kepemilikan sebesar 91,018% atau setara dengan 36.291.702.781 lembar saham per 31 Desember 2025. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik akhir dari Perseroan.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, UP TO INDIVIDUAL OWNERS

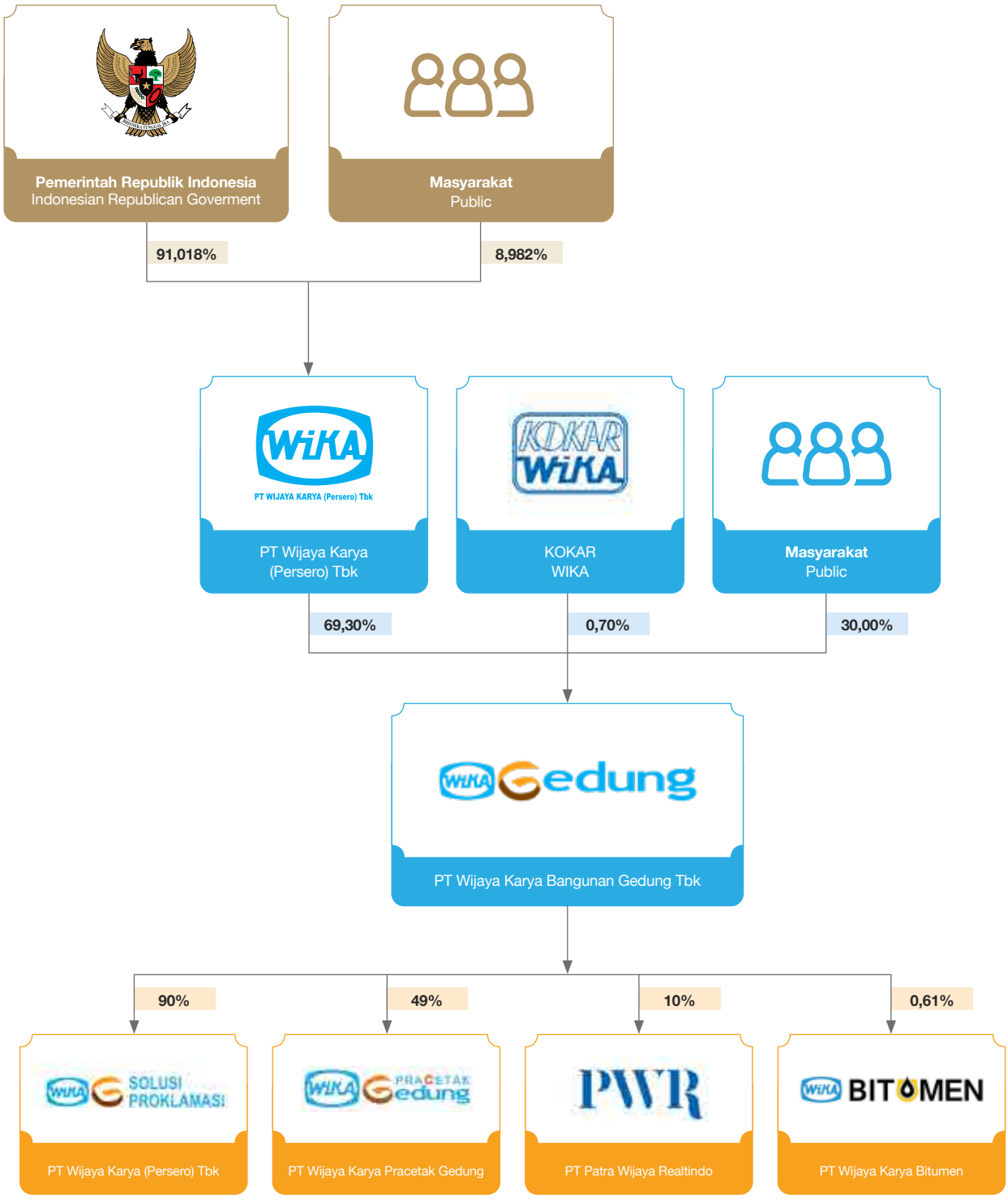
The major and controlling shareholders of the Company, both directly and indirectly down to the individual owner level, are as follows:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is the parent entity of the Company with 69.30% ownership, equivalent to 6,633,000,000 shares.

The major shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, which is also the parent entity of the Company, is the Republic of Indonesia. This ownership is represented by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (SOE), with 91.018% ownership, equivalent to 36,291,702,781 shares as of December 31, 2025. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner of the Company.

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Alamat Address	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 lt.1 Jakarta 13340 Indonesia. Phone : +6221 8067 9200 Faximile : +6221 2289 3830 www.wika.co.id WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 1st fl., Jakarta 13340 Indonesia. Telephone: +6221 8067 9200 Fax: +6221 2289 3830 www.wika.co.id	6.633.000.000	69,30
Kementerian Badan Usaha Milik Negara **Ministry of State-Owned Enterprises**	Kantor Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia. Phone: +6221 29935678 Faximile : +6221 29935740 www.bumn.go.id Ministry of State-Owned Enterprises Office, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Central Jakarta 10110 DKI Jakarta, Indonesia. Phone: +6221 29935678 Fax: +6221 29935740 www.bumn.go.id	36.291.702.781	91,018

Struktur Group Perusahaan
Company Group Structure



Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Subsidiaries, Associates, And Joint Ventures

ENTITAS ANAK / SUBSIDIARIES

PT Wege Solusi Proklamasi

Nama / Name	Bidang Usaha / Business Field	Kepemilikan Saham / Share Ownership % 2025	Kepemilikan Saham / Share Ownership % 2024	Waktu Pendirian / Date of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset (Rp Miliar) / Total Assets (Rp Billion) 2025	Jumlah Aset (Rp Miliar) / Total Assets (Rp Billion) 2024	Domisili / Domicile
PT Wege Solusi Proklamasi	Konstruksi, Real Estate, Hotel, Perparkiran. Construction, Real Estate, Hotel, Parking	90,00	90,00	28 Mei 2019 May 28, 2019	Beroperasi Operating	149,701	157,87	Indonesia

Profil Singkat PT Wege Solusi Proklamasi
Pendirian PT Wege Solusi Proklamasi

PT Wege Solusi Proklamasi (selanjutnya disebut WSP) berkedudukan di Jakarta Timur dan didirikan berdasarkan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0035258. AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wege Solusi Proklamasi, dan daftar WSP Nomor : AHU-0116523.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019.

WSP memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2019.

Brief Profile of PT Wege Solusi Proklamasi
Establishment of PT Wege Solusi Proklamasi

PT Wege Solusi Proklamasi (hereinafter referred to as WSP) is domiciled in East Jakarta and was established based on Deed No. 85 dated May 28, 2019, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta. This deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0035258.AH.01.01 of 2019 concerning the Ratification of the Establishment of Limited Liability Company PT Wege Solusi Proklamasi, and WSP Registration Number: AHU-0116523.AH.01.11 of 2019 dated July 22, 2019.

WSP commenced its commercial operations in 2019.

Bidang Usaha

PT Wege Solusi Proklamasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Konstruksi, Real Estate, Hotel dan Perparkiran. Selain itu, WSP juga berperan sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang menjalankan investasi melalui skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) WEGE-Mandiri pada proyek Graha Mantap.

Business Field

PT Wege Solusi Proklamasi is a company engaged in the Construction, Real Estate, Hotel, and Parking sectors. In addition, WSP also acts as a Special Purpose Vehicle (SPV) that manages investments through WEGE-Mandiri Build-Operate-Transfer (BOT) scheme in the Graha Mantap project.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2025, are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 Share Ownership as of December 31, 2025		
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan % Percentage of Ownership %	Rupiah Penuh (Rp) Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	100.000		25.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid-Up Capital:			
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	22.500	90	22.500.000.000
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2.500	10	2.500.000.000
Jumlah Total	25.000	100	25.000.000.000
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	75.000		75.000.000.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Composition of Board of Directors and Board of Commissioners

The composition of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Bagus Tri Setyana	Komisaris Commissioner
Bobby Parluhutan	Direktur Director

Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan PT Wege Solusi Proklamasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Financial Highlights

The financial highligts of PT Wege Solusi Proklamasi as of December 31, 2025, is as follows:

	2025	2024
Jumlah Aset Total Assets	149.701.103.283	157.866.279.953
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	128.531.509.226	137.314.562.101
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.169.594.057	20.551.717.852

ENTITAS ASOSIASI / ASSOCIATE ENTITIES

Nama / Name	Bidang Usaha / Business Field	Kepemilikan Saham / Share Ownership % 2025	Kepemilikan Saham / Share Ownership % 2024	Waktu Pendirian / Date of Establishment	Status Operasi / Operational Status	Jumlah Aset (Rp Miliar) / Total Assets (Rp Billion) 2025	Jumlah Aset (Rp Miliar) / Total Assets (Rp Billion) 2024	Domisili / Domicile
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	Perindustrian, Perdagangan, Jasa / Industry, Trade, Services	49,00	49,00	23 Desember 2016 / December 23, 2016	Beroperasi / Operating	248,19	339,98	Jakarta Selatan, Indonesia / South Jakarta, Indonesia
PT Patra Wijaya Realtindo	Pembangunan, Developer, Properti / Construction, Developer, Property	10,00	10,00	7 Agustus 2019 / August 7, 2019	Belum Beroperasi / Not Yet Operating	0	0	Jakarta Selatan, Indonesia / South Jakarta, Indonesia
PT Wijaya Karya Bitumen	Pertambangan dan Industri Aspal Alam / Mining and Natural Asphalt Industry	0,61	0,61	12 Mei 2013 / May 12, 2013	Beroperasi / Operating	0,22	0,35	Jakarta Selatan, Indonesia / South Jakarta, Indonesia

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

Profil Singkat PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG

Pendirian PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (selanjutnya disebut WPG) berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001918.AH.01.01 tanggal 17 Januari 2017.

WPG memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2017.

Bidang Usaha

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.

1. Bidang Usaha Perindustrian meliputi industri beton pracetak, antara lain produksi beton pracetak gedung dan perumahan berikut pemasangannya, komponen dan/atau material gedung dan perumahan lainnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kelancaran serta kontinuitas produksi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
2. Bidang Usaha Perdagangan meliputi penjualan beton pracetak gedung dan perumahan berikut pemasangannya, serta komponen dan/atau material gedung dan perumahan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Bidang Usaha Jasa meliputi jasa konstruksi, layanan keagenan untuk komponen dan/ atau material, serta perencanaan dan pengembangan produk dan sistem untuk bangunan gedung, perumahan, bangunan industry dan pergudangan.

Brief Profile of PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG

Establishment of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (hereinafter referred to as WPG) is domiciled in South Jakarta and was established based on Deed No. 142 dated December 23, 2016, drawn up before Sri Ismiyati, S.H., a Notary in Jakarta. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017.

WPG commenced its commercial operations in 2017.

Business Field

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung is a company engaged in the Industry, Trade, and Services sectors.

1. The Industry Business Sector includes the precast concrete industry, including the production of precast concrete for buildings and housing and its installation, components and/or other materials for buildings and housing, and other activities related to the smooth and continuous flow of production, both domestically and internationally.
2. The Trading Business Sector includes the sale of precast concrete for buildings and housing and its installation, as well as components and/or materials for buildings and housing, both domestically and internationally.
3. The Services Business Sector includes construction services, agency services for components and/or materials, and the planning and development of products and systems for buildings, housing, industrial buildings, and warehouses.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wijaya Karya Pracetak Gedung as of December 31, 2025, are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 Share Ownership as of December 31, 2025		
	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan % Percentage of Ownership %	Rupiah Penuh (Rp) Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	2.000.000.000		200.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid-Up Capital:			
PT Wijaya Karya Beton Tbk	255.000.000	51	25.500.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	245.000.000	49	24.500.000.000
Jumlah Total	**500.000.000**	**100**	**50.000.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	1.500.000.000		150.000.000.000

PT Patra Wijaya Realtindo

Profil Singkat PT Patra Wijaya Realtindo

Pendirian PT Patra Wijaya Realtindo

PT Patra Wijaya Realtindo (selanjutnya disebut PWR) didirikan pada tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 67, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0041018.AH.01.01.Tahun 2019 tertanggal 19 Agustus 2019.

Perseroan, bersama PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) dan PT Patra Jasa, membentuk sebuah perusahaan patungan (Joint Venture/JV) dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 10% untuk Perseroan, sementara sisanya dimiliki oleh PT Patra Jasa dan WIKA Realty. Pembentukan PT Patra Wijaya Realtindo bertujuan untuk mengoptimalkan aset PT Patra Jasa.

Bidang Usaha

PT Patra Wijaya Realtindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, developer, dan properti.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Brief Profile of PT Patra Wijaya Realtindo

Establishment of PT Patra Wijaya Realtindo

PT Patra Wijaya Realtindo (hereinafter referred to as PWR) was established on August 7, 2019, based on Deed of Establishment Number 67, drawn up before Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notary in Jakarta. This deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number: AHU-0041018.AH.01.01.Tahun 2019 dated August 19, 2019.

The Company, together with PT Wijaya Karya Realty (WIKA Realty) and PT Patra Jasa, formed a joint venture (JV) with a 10% shareholding for the Company, while the remainder was held by PT Patra Jasa and WIKA Realty. The establishment of PT Patra Wijaya Realtindo aimed to optimize PT Patra Jasa's assets.

Business Field

PT Patra Wijaya Realtindo is a company engaged in the construction, development, and property sectors.

Capital Structure and Shareholder Composition

PT Patra Wijaya Realtindo's capital structure and shareholder composition as of December 31, 2025, are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 Share Ownership as of December 31, 2025 Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan % Percentage of Ownership %	Rupiah Penuh (Rp) Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	50.000		50.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid-Up Capital:			
PT Patra Jasa	7.500	60,00	7.500.000.000
PT Wijaya Karya Realty	3.750	30,00	3.750.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.250	10,00	1.250.000.000
Jumlah Total	**12.500**	**100**	**12.500.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	37.500		37.500.000.000

PT Wijaya Karya Bitumen

Profil Singkat PT Wijaya Karya Bitumen

Pendirian PT Wijaya Karya Bitumen

PT Wijaya Karya Bitumen (selanjutnya disebut WIKA Bitumen), sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 1 tanggal 1 September 1984. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C2-931.HT.01.01.TH.1986 tanggal 7 Februari 1986.

Berdasarkan Akta Nomor 83 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh M. Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) resmi berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. Perubahan anggaran dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU- 05084.40.20.2014 tanggal 7 Juli 2014.

WIKA Bitumen memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2013.

Bidang Usaha

PT Wijaya Karya Bitumen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair termasuk perdagangan dan pengangkutan hasil produksi aspal.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan serta susunan pemegang saham PT Wijaya Karya Bitumen per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Brief Profile of PT Wijaya Karya Bitumen

Establishment of PT Wijaya Karya Bitumen

PT Wijaya Karya Bitumen (hereinafter referred to as WIKA Bitumen), formerly known as PT Sarana Karya (Persero), was established based on Notarial Deed No. 1 of Imas Fatimah, S.H., dated September 1, 1984. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-931. HT.01.01.TH.1986 dated February 7, 1986.

Based on Deed No. 83 dated June 30, 2014, drawn up by M. Nova Faisal, S.H., a Notary in Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) officially changed its name to PT Wijaya Karya Bitumen. This amendment to the articles of association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-05084.40.20.2014 dated July 7, 2014.

WIKA Bitumen commenced its commercial operations in 2013.

Business Field

PT Wijaya Karya Bitumen is a company engaged in the exploration, exploitation, and processing of asphalt rock and all bitumen, both solid and liquid, including the trading and transportation of asphalt products.

Capital Structure and Shareholder Composition

The capital structure and shareholder composition of PT Wijaya Karya Bitumen as of December 31, 2025, are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham per 31 Desember 2025 Share Ownership as of December 31, 2025 Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Kepemilikan % Percentage of Ownership %	Rupiah Penuh (Rp) Full Rupiah (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	570.000		570.000.000.000
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh: Issued and Fully Paid-Up Capital:			
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	257.862	99,39	257.862.000.000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	1.594	0,61	1.594.000.000
Jumlah Total	**259.456**	**100**	**259.456.000.000**
Saham dalam Portepel Shares in Portfolio	310.544		310.544.000.000

VENTURA BERSAMA ATAU KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Perseroan mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama, yaitu pengaturan di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak atas aset neto dari ventura tersebut. Pihak-pihak ini disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi, yang dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Per 31 Desember 2025, Perseroan secara konsolidasi mencatat investasi pada ventura bersama dengan rincian sebagai berikut:

JOINT VENTURE OR JOINT OPERATION (JO)

The Company classifies joint arrangements as joint ventures, i.e., arrangements in which the parties having joint control of the arrangement have rights to the net assets of the venture. These parties are referred to as joint venturers.

Joint venturers recognize their interests in joint ventures as investments, which are accounted for using the equity method in accordance with applicable accounting standards.

As of December 31, 2025, the Company recorded its investment in joint ventures on a consolidated basis as follows:

Ventura Bersama/KSO Joint Venture/JO	Proyek Project	Porsi Kepemilikan Ownership Portion	Status Status	Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp Juta) Profit (Loss) for the Year (Rp Million)	Saldo Akhir Investasi Ventura Bersama (Rp Juta) Ending Balance of Joint Venture Investment (Rp Million)	Aset (Rp Juta) Assets (Rp Million
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Shimizu Corporation	KSO BENHIL HOTEL SERVICE APARTEMENT	30% : 70%	Terminasi (Selesai) Termination (Completed)	2,417,569	686,090,256	16,485,644,272
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Jaya Konstruksi	KSO PMJ LAND	55% : 45%	Berjalan Ongoing	2,965,835,186	6,169,695,712	59,089,792,419
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Nindya Karya	KSO VENUE PON ACEH	55% : 45%	Selesai Completed	801,052	11,096,472,552	75,810,755,286
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya Tbk	KSO BMKG 2	90% : 10%	Selesai Completed	10,507,265,017	-	38,073,417,807
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pelitamaju Multiswakarsa	KSO TELKOM LANDMARK TOWER	70% : 30%	Selesai Completed	4,528,782,476	-	14,233,226,976
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya Tbk	KSO BI MANOKWARI	60% : 40%	Selesai Completed	(2,152,091,564)	775,539,467	34,489,574,381

Ventura Bersama/KSO Joint Venture/JO	**Proyek** Project	**Porsi Kepemilikan** Ownership Portion	**Status** Status	**Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp Juta)** Profit (Loss) for the Year (Rp Million)	**Saldo Akhir Investasi Ventura Bersama (Rp Juta)** Ending Balance of Joint Venture Investment (Rp Million)	**Aset (Rp Juta)** Assets (Rp Million
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya Tbk	PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG 1 DAN 2 ITB INNOVATION PARK (IIP) BANDUNG TEKNOPOLIS	60% : 40%	Selesai Completed	72,105,432	72,105,434	52,819,326,861
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Mutiara Masyhur Sejahtera	KSO KAHURIPAN - PROSPERO	60% : 40%	Berjalan Ongoing	113,640,280	184,112,024,127	257,543,059,075
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Brantas Abipraya	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA TNI (IKN)	65% : 35%	Selesai Completed	45,609,056	373,156,905	31,606,852,184
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Adhi	KSO DKUT GRESIK	40% : 60%	Berjalan Ongoing	6,432,540,488	3,867,559,677	113,492,433,759
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Apik	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA KONSTRUKSI 2 (IKN)	70% : 30%	Selesai Completed	259,496,807	628,772,195	65,468,820,243
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Brantas Abipraya	KSO GEREJA BASILIKA	60% : 40%	Berjalan Ongoing	17,697,977,676	-	234,690,586,885
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Nindya Karya : PT Wijaya Karya Tbk	GEDUNG DPR II IKN	50% : 35% : 15%	Berjalan Ongoing		-	387,360,870,321
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT FYP Karya Perdana	MESS TRANSMIGRASI PATRIOT	70% : 30%	Berjalan Ongoing	1,993,952,967	-	35,306,766,212
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya Tbk : PT Apik	SEKOLAH RAKYAT JAWA TENGAH	30% : 40% : 30%	Berjalan Ongoing	10,746,773	10,746,773	175,383,632,441
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya Tbk : PT Cipta Sentosa	SEKOLAH RAKYAT KALBAR	15% : 45% : 40%	Berjalan Ongoing		-	

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham
Chronology Of Shares Issuance And/Or Listing

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan menerbitkan sebanyak 2.872.000.000 saham biasa atas nama, yang seluruhnya merupakan Saham Baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham Perseroan memiliki nilai nominal Rp100,- per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp290,- per saham, sehingga total nilai penawaran mencapai Rp832.880.000.000.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES

In 2017, the Company conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company's IPO was declared effective based on the Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were subsequently listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017, under the ticker code WEGE.

In this Initial Public Offering, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which were New Shares issued from the Company's portfolio. The Company's shares have a par value of Rp100 per share and represent 30.00% of the Company's issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering. The Offering Price was set at Rp290 per share, bringing the total offering value to Rp832,880,000,000.

KRONOLOGIS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Secara ringkas, berikut adalah kronologis pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

CHRONOLOGY OF INITIAL PUBLIC OFFERING

The following is a brief chronology of the Company's Initial Public Offering.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan Number of Shares Offered	2.872.000.000 lembar saham 2,872,000,000 shares
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham Percentage of Initial Public Offering	30,00% 30.00%
Nilai Nominal Nominal Value	Rp100,- per saham Rp100 per share
Harga Penawaran Offering Price	Rp290,- per saham Rp290 per share
Jumlah Nilai Penawaran Umum Perdana Saham Total Initial Public Offering Amount	20 November 2017 November 20, 2017
Tanggal Efektif Effective Date	22 - 24 November 2017 November 22-24, 2017
Tanggal Penjatahan Allotment Date	28 November 2017 November 28, 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Subscription Refund Date	29 November 2017 November 29, 2017
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Electronic Share Distribution Date	29 November 2017 November 29, 2017
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia Share Listing Date on the Indonesia Stock Exchange	30 November 2017 November 30, 2017

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO), struktur modal saham dan susunan pemegang saham Perseroan, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDERS

With the sale of all shares offered in the Initial Public Offering (IPO), the Company's capital structure and shareholder composition, both before and after the Initial Public Offering, are as follows:

Keterangan Description	**Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham** Before Initial Public Offering			**Setelah Penawaran Umum Perdana Saham** After Initial Public Offering		
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	**Jumlah Nilai Nominal** Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares (shares)	**Jumlah Nilai Nominal** Nominal Value (Rp)	**Persentase Kepemilikan** Percentage of Ownership **(%)**
Modal Dasar Authorized Capital	12.000.000.000	1.200.000.000.000		12.000.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-Up Capital						
WIKA	6.633.000.000	663.300.000.000	99,00	6.633.000.000	663.300.000.000	69,30
Koperasi Karyawan WIKA WIKA Employee Cooperative	67.000.000	6.700.000.000	1,00	67.000.000	6.700.000.000	0,70
Publik Public	-	-	-	2.872.000.000	287.200.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Total Issued and Paid-Up Capital	**6.700.000.000**	**670.000.000.000**	**100,00**	**9.572.000.000**	**957.200.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel Shares in Portfolio	5.300.000.000	530.000.000.000		2.428.000.000	242.800.000.000	

*Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham
*With a nominal value of Rp100,- (one hundred Rupiah) per Share

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait efek tersebut, termasuk nama, tahun penerbitan, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan, peringkatnya, maupu informasi lain yang perlu disampaikan terkait efek tersebut.

Until the period ending December 31, 2025, the Company did not issue any other securities. Therefore, the Company does not provide information related to these securities, including the name, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, name of the exchange where the securities are listed, their rating, or other information required to be disclosed regarding these securities.

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	**KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan** KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
Alamat Address	2025
Periode Penugasan Assignment Period	01 November 2025 - 23 Februari 2026 November 1, 2025 - February 23, 2026
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Audit umum atas Laporan Keuangan WEGE, dan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 Reviu atas Evaluasi Kinerja (Key Performance Indicator) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 General Audit of WEGE's Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2025 Review of the Performance Evaluation (Key Performance Indicators) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year Ended December 31, 2025 Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a manifestation of the implementation of Statement on Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ended December 31, 2025
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	-
Biaya Jasa (Fee) Fee	Rp. 470.000.000

PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM
STOCK TRADING AND LISTING

Nama Name	**PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** Indonesia Stock Exchange (IDX)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 Fax: +62 21 515 4153 Website: www.idx.co.id E-mail: listing@idx.co.id Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. Tel: +62 21 515 0515 Fax: +62 21 515 4153 Website: www.idx.co.id E-mail: listing@idx.co.id
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Biaya pencatatan saham tahunan/Annual Listing Fee, dan informasi perdagangan. Annual Listing Fee and trading information.
Biaya Jasa (Fee) Fee	Rp250.000.000

KUSTODIAN / CUSTODIAN

Nama Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5 Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 529 91199 Website: www.ksei.co.id E-mail: helpdesk@ksei.co.id Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Floor, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 2855 Fax: +62 21 529 91199 Website: www.ksei.co.id E-mail: helpdesk@ksei.co.id
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Menyediakan jasa untuk mengadministrasikan Efek yang telah dikeluarkan, dan penyedia layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta distribusi hasil aksi korporasi. Provides services for administering issued securities, as well as providing custody and settlement services for securities transactions, and distributing proceeds from corporate actions.
Biaya Jasa (*Fee*) Fee	Rp10.000.000

BIRO ADMINISTRASI EFEK / SHARE REGISTRAR

Nama Name	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia Tel: +62 21 350 8077 Fax: +62 21 350 8078 E-mail: dm@datindo.com Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia Tel: +62 21 350 8077 Fax: +62 21 350 8078 E-mail: dm@datindo.com
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Pencatatan Daftar Pemegang Saham dan Jasa Administrasi di Pasar Modal Shareholder Registration and Capital Market Administration Services
Biaya Jasa (*Fee*) Fee	Rp40.000.000

NOTARIS / NOTARY

Nama Name	Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H
Alamat Address	Jakarta Timur East Jakarta
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS Perseroan), menjamin kepatuhan prosedural RUPS Perseroan, menghasilkan akta otentik sebagai alat bukti yang sah pada RUPS Perseroan. Provides legal legitimacy to resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS), ensures procedural compliance with the Company's GMS, and produces an authentic deed as valid evidence at the Company's GMS.
Biaya Jasa (*Fee*) RUPS GMS Fee	Rp45.000.000

Informasi pada Website Perusahaan

Information on The Company Website



Perseroan menyediakan situs web resmi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan melalui alamat www.wikagedung.co.id. Keberadaan situs web ini merupakan wujud komitmen Perseroan terhadap keterbukaan informasi, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkini terkait Perseroan secara transparan dan akurat.

Situs web resmi Perseroan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Situs ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan telah memenuhi amanat Pasal 6 POJK No. 8/POJK.04/2015, yang mengharuskan penyampaian informasi yang mencakup, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan adanya situs web ini, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan saluran komunikasi yang efektif, guna memfasilitasi pemangku kepentingan dalam mengakses informasi yang relevan, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

The Company provides an official website that is easily accessible to all stakeholders at www.wikagedung.co.id. The existence of this website demonstrates the Company's commitment to information transparency, ensuring that all stakeholders can access the latest information regarding the Company in a transparent and accurate manner.

The Company's official website is prepared in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites for Issuers or Public Companies. This website is presented in two languages, Indonesian and English, and meets the mandate of Article 6 of POJK No. 8/POJK.04/2015, which requires the disclosure of information that includes, among other things:

1. General Information on Issuers or Public Companies;
2. Information for Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

With this website, the Company is committed to providing an effective communication channel to facilitate stakeholders' access to relevant, comprehensive information that adheres to the principles of information transparency.

TABEL KETERBUKAAN INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION DISCLOSURE ON THE COMPANY'S WEBSITE

Nama Kanal Channel Name	**Konten** Content	
Info Perusahaan Company Info	• Tentang Kami • Visi, Misi dan Nilai Perusahaan a. Visi dan Misi b. Nilai Perusahaan • Struktur Perusahaan a. Struktur Group Perusahaan b. Struktur Organisasi Perusahaan • Manajemen a. Direksi b. Dewan Komisaris • Sambutan Direktur Utama • Sekretaris Perusahaan • Penghargaan dan Sertifikasi • Alamat dan Informasi Kontak	• About Us • Vision, Mission, and Corporate Values a. Vision and Mission b. Corporate Values • Company Structure a. Company Group Structure b. Company Organizational Structure • Management a. Board of Directors b. Board of Commissioners • Message from the President Director • Corporate Secretary • Awards and Certifications • Address and Contact Information
Lini Bisnis Lines of Business	1. Konstruksi a. Lingkup Usaha b. Proyek Berjalan c. Proyek Selesai 2. Investasi dan Konsesi a. Lingkup Usaha b. Proyek Berjalan c. Proyek Selesai 3. Modular a. Lingkup Usaha b. Proyek Berjalan c. Proyek Selesai 4. Pracetak Gedung a. Lingkup Usaha b. Proyek Berjalan c. Proyek Selesai	1. Construction a. Scope of Business b. Ongoing Projects c. Completed Projects 2. Investment and Concessions a. Scope of Business b. Ongoing Projects c. Completed Projects 3. Modular a. Scope of Business b. Ongoing Projects c. Completed Projects 4. Precast Buildings a. Scope of Business b. Ongoing Projects c. Completed Projects

Nama Kanal Channel Name	Konten Content	
Keberlanjutan Sustainability	• Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan • Human Capital • Tata Kelola Perusahaan	• Corporate Social Responsibility • Occupational Safety, Health, and Environment • Human Capital • Corporate Governance
Investor Investors	• Informasi Perseroan a. Tentang Kami b. Dewan Komisaris c. Direksi • nformasi Finansial a. Laporan Keuangan b. Ikhtisar Keuangan c. Presentasi Perseroan d. Laporan Tahunan e. Prospektus • Tata Kelola Perusahaan a. Rapat Umum Pemegang Saham b. Struktur dan Kebijakan GCG c. Kode Etik d. Komite Audit dan Risiko e. Komite Nominasi dan Remunerasi f. Sistem Pelaporan Pelanggaran • Keterbukaan Informasi a. Pengumuman Emiten b. Update Investor • Informasi Saham a. Grafik Interaktif b. Harga Historis c. Fundamental Saham d. Struktur Pemegang Saham e. Informasi Dividen • Permintaan Informasi a. Pemberitahuan Email b. Daftar Analis c. Unduh Dokumen d. Kontak Invetsor Relation (IR)	1. Company Information a. About Us b. Board of Commissioners c. Board of Directors 2. Financial Information a. Financial Statements b. Financial Highlights c. Company Presentation d. Annual Report e. Prospectus 3. Corporate Governance a. General Meeting of Shareholders b. GCG Structure and Policies c. Code of Conduct d. Audit and Risk Committee e. Nomination and Remuneration Committee f. Whistleblowing System 4. Information Disclosure a. Issuer Announcements b. Investor Updates 5. Stock Information a. Interactive Charts b. Historical Prices c. Stock Fundamentals d. Shareholder Structure e. Dividend Information 6. Information Requests a. Email Notifications b. Analyst List c. Document Downloads d. Investor Relations (IR) Contact
Media Media	• Media e. Berita f. Siaran Pers g. Presentasi h. Ebook i. Kliping j. Infografis • Press Kit k. 1. Logo WIKA Gedung l. 2. Logo Produk m. 3. Profil Perusahaan n. 4. Video Profil o. 5. Print Ads p. 6. Protokoler • Kegiatan Pers • Video Terkait	• Media a. News b. Press Releases c. Presentations d. Ebooks e. Clippings f. Infographics • Press Kits g. WIKA Building Logo h. Product Logos i. Company Profiles j. Profile Videos k. Print Ads l. Protocols • Press Activities • Videos
Good Corporate Governance (GCG)	• Ikhtisar • Komitmen GCG • Struktur GCG • Pedoman GCG • Manajemen Risiko • Whistle Blowing dan Gratifikasi • Pengadaan • Piagam Komite Audit • Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Peta GCG • Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal • ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) • Anggaran Dasar Perusahaan	• Overview • GCG Commitment • GCG Structure • GCG Guidelines • Risk Management • Whistleblowing and Gratification • Procurement • Audit Committee Charter • Anti-Bribery Management System • GCG Map • Capital Market Supporting Institutions and Professions • ACGS (ASEAN Corporate Governance Scorecard) • Company Articles of Association
Building Information Modeling (BIM)	• *Building Information Modeling* • Implementasi *Building Information Modeling* • Sertifikasi *Building Information Modeling*	• Building Information Modeling • Building Information Modeling Implementation • Building Information Modeling Certification
Karir *Career*	• Berkarir Bersama Kami • *Our People*	• Career With Us • Our People
Hubungi Kami Contact Us	Hubungi Kami *Contact Us*	

Situs web Perseroan juga telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Annual Report Award, antara lain:

The Company's website has also met the criteria set out in the Annual Report Award, including:

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Remarks
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information on Shareholder Down to the Individual Ultimate Owner	√	https://investor.wikagedung.co.id/shareholdings.html
Isi Kode Etik Contents of the Code of Conduct	√	https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS) Information	√	https://investor.wikagedung.co.id/gms.html
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	√	https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/struktur-perusahaan?q=struktur-group-perusahaan
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	v	https://investor.wikagedung.co.id/financials.html
Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) Separate Annual Financial Statements (last 5 years)	√	https://investor.wikagedung.co.id/financials.html
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of Board of Commissioners and Board Directors	√	https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/manajemen?q=dewan-komisaris https://www.wikagedung.co.id/info-perusahaan/manajemen?q=dewan-komisaris
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

√ = tersedia pada situs web Perusahaan available/on the Company website
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan/not yet available on the Company website

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Supporting Review





"Sinergi antara sumber daya manusia yang unggul dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam mendorong inovasi serta meningkatkan daya saing Perseroan secara berkelanjutan."

"The synergy between superior human capital and technology utilization is key to driving innovation and enhancing the Company's competitiveness in a sustainable manner."

Teknologi Informasi
Information Technology



Teknologi Informasi (TI) memegang peran strategis dalam mendukung operasional dan pertumbuhan Perseroan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keamanan data. Seiring dengan akselerasi transformasi digital, Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi pada sistem dan infrastruktur TI untuk mengoptimalkan proses bisnis, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Penerapan TI yang terintegrasi tidak hanya mendorong produktivitas internal, tetapi juga memperkuat daya saing Perseroan di industri konstruksi.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif dan efisiensi kerja melalui pemanfaatan TI yang inovatif dan adaptif. Komitmen tersebut didukung oleh optimalisasi peran sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sistem, serta penerapan pengembangan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis.

Information Technology (IT) plays a strategic role in supporting the Company's operations and growth, particularly in enhancing efficiency, accuracy, and data security. In line with the acceleration of digital transformation, the Company continuously invests in IT systems and infrastructure to optimize business processes, strengthen data-driven decision-making, and improve service quality for all stakeholders. The implementation of integrated IT not only drives internal productivity but also strengthens the Company's competitiveness in the construction industry.

As part of its long-term strategy, the Company is committed to continuously improving its competitive advantage and work efficiency through the utilization of innovative and adaptive IT. This commitment is supported by optimizing the role of human capital with specialized competencies in IT to manage and supervise systems, as well as applying technology development that responds to dynamic business needs.

Pengelolaan dan pengembangan TI Perseroan dilaksanakan secara terarah dengan mengacu pada visi dan misi dalam membangun ekosistem TI yang terintegrasi. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis utama, fungsi manajerial, serta fungsi pendukung, dengan tetap memperhatikan dinamika industri dan penerapan praktik terbaik yang berlaku.

VISI DAN MISI TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

Mengembangkan Teknologi Informasi sebagai Pelayanan yang Efisien, Efektif, Inovatif, dan Selaras dengan Proses Bisnis Perusahaan dengan Menerapkan Keamanan Digital.

Misi

1. **Eksploitasi dan eksplorasi benefit atas *improvement* proses bisnis berbasis TI**
   Identifikasi eksploitasi dan eksplorasi potensi benefit implementasi TI untuk meningkatkan kualitas proses bisnis, dalam rangka penurunan risiko bisnis, peningkatan efisiensi biaya, peningkatan mutu produk atau cara bisnis baru yang lebih efektif.
2. **Penyediaan Layanan Sistem Informasi Terintegrasi**
   Menyediakan layanan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis manajemen, proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung, merujuk kepada perkembangan dinamika bisnis dan *benchmarking industry.*
3. **Infrastruktur yang Aman dan Andal**
   Menyediakan layanan jaringan komunikasi, data center/*disaster recovery center* yang aman dan andal melalui adopsi platform teknologi yang memperhatikan aspek keberlangsungan layanan dan skalabilitas beban ke depan.
4. **Peningkatan kematangan Tata Kelola TI dan Data**
   Meningkatkan kematangan atau kapabilitas pengelolaan teknologi dan data, dalam rangka pemenuhan kepatuhan regulasi dan kebutuhan pemenangan persaingan industri.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Pengamanan Informasi dan Manajemen Layanan Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam pengelolaan keamanan data serta penyelenggaraan layanan teknologi informasi guna mendukung kelancaran operasional dan melindungi informasi strategis Perseroan. Seluruh jajaran pimpinan dan karyawan Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan melindungi informasi kritikal milik pelanggan, Perseroan, maupun karyawan.

Penerapan kebijakan ini ditujukan untuk mendukung keberhasilan seluruh unit bisnis Perseroan dengan memastikan perlindungan data yang memadai, keamanan operasional yang andal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menyediakan layanan Teknologi Informasi (TI) yang optimal dan selaras dengan kebutuhan bisnis, Perseroan mengelola fungsi TI melalui unit pengelolaan TI yang kompeten dan terintegrasi.

The management and development of the Company's IT are carried out in a structured manner, referring to its vision and mission in building an integrated IT ecosystem. This strategy is designed to enhance the effectiveness of core business processes, managerial functions, and supporting functions, while taking into account industry dynamics and the application of best practices.

INFORMATION TECHNOLOGY VISION AND MISSION

Vision

To develop Information Technology as an efficient, effective, innovative service that is aligned with the Company's business processes while implementing digital security.

Mission

1. **Exploitation and Exploration of Benefits from IT-Based Business Process Improvements**
   Identifying and exploring the potential benefits of IT implementation to improve the quality of business processes, reduce business risks, increase cost efficiency, enhance product quality, or create more effective business methods.
2. **Provision of Integrated Information System Services**
   Providing integrated information system services to support management processes, core business processes, and supporting business processes, in line with business dynamics and industry benchmarking.
3. **Secure and Reliable Infrastructure**
   Providing secure and reliable communication networks, data centers, and disaster recovery centers through the adoption of technology platforms that consider service continuity and future scalability.
4. **Enhancement of IT and Data Governance Maturity**
   Improving the maturity or capability of technology and data management to meet regulatory compliance and support competitiveness in the industry.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

The Company has established Information Security and IT Service Management Policies as guidelines for managing data security and delivering IT services to support smooth operations and protect the Company's strategic information. All management and employees are committed to safeguarding and protecting critical information belonging to customers, the Company, and employees.

The implementation of these policies aims to support the success of all business units by ensuring adequate data protection, reliable operational security, and compliance with applicable laws and regulations. To provide optimal IT services aligned with business needs, the Company manages IT functions through a competent and integrated IT management unit.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Penggunaan perangkat lunak berlisensi secara legal di seluruh lingkungan operasional Perseroan;
2. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang mengacu pada standar ISO 27001;
3. Penerapan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang mengacu pada standar ISO 20000-1; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi.

Tujuan keamanan informasi Perseroan ditetapkan, dipantau, dan ditinjau secara berkala guna memastikan keselarasan dengan kebutuhan bisnis Perseroan serta mendukung keberlanjutan operasional. Pengamanan informasi merupakan tanggung jawab seluruh pihak di lingkungan Perseroan, sementara manajemen layanan Teknologi Informasi (TI) menjadi tanggung jawab unit pengelola TI yang mencakup proses perencanaan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga operasional layanan TI.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen keamanan informasi melalui penyempurnaan proses, peningkatan kompetensi karyawan melalui program pelatihan, serta adopsi teknologi terkini. Kebijakan pengamanan informasi dan manajemen layanan TI diberlakukan secara menyeluruh di seluruh unit kerja Perseroan, termasuk bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan.

Kebijakan tersebut dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung kebutuhan operasional serta pencapaian tujuan strategis Perseroan, dan dikomunikasikan serta tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan.

KERANGKA KERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menerapkan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi (TI) yang berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, keamanan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar industri yang berlaku. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan investasi TI selaras dengan strategi bisnis Perseroan, mendukung keberlanjutan operasional, serta meningkatkan daya saing Perseroan di era digital. Melalui penerapan tata kelola TI yang terstruktur dan mengacu pada praktik terbaik, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem TI yang andal, inovatif, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tata kelola tersebut, Perseroan menetapkan proses governansi yang mencakup identifikasi, pengelolaan, dan pemantauan risiko-risiko utama di bidang TI, termasuk risiko gangguan layanan (*IT disruption*), keamanan siber (*cyber security*), serta kesiapan pemulihan bencana (*disaster recovery*). Proses ini dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, standar, dan prosedur yang mengatur pengelolaan insiden TI, perlindungan terhadap ancaman siber, serta mekanisme kesinambungan layanan teknologi informasi.

To realize this commitment, the Company consistently applies the following principles:

1. The use of legally licensed software across all operational environments;
2. Implementation of an Information Security Management System referring to ISO 27001 standards;
3. Implementation of an IT Service Management System referring to ISO 20000-1 standards; and
4. Compliance with laws and regulations related to Information Security Management Systems and IT Service Management Systems.

The Company's information security objectives are defined, monitored, and periodically reviewed to ensure alignment with business needs and to support operational sustainability. Information security is the responsibility of all parties within the Company, while IT service management is the responsibility of the IT management unit, covering planning, design, development, implementation, and operational processes.

The Company is committed to continuous improvement of its information security management system through process enhancements, employee competency development through training programs, and the adoption of the latest technologies. Information security and IT service management policies are implemented across all work units, including third parties collaborating with the Company.

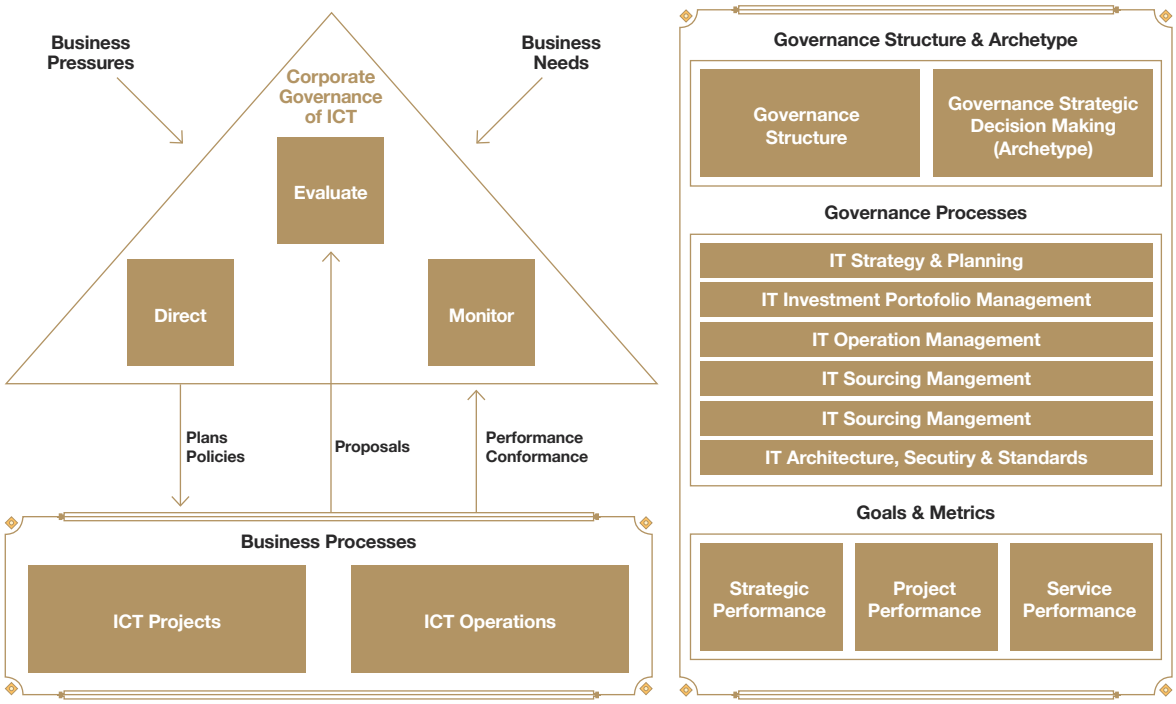
These policies are periodically evaluated to ensure their effectiveness in supporting operational needs and achieving the Company's strategic objectives, and are communicated and made available to all stakeholders.

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE FRAMEWORK

The Company implements an IT governance framework based on the principles of effectiveness, efficiency, security, and compliance with applicable laws and industry standards. This framework is designed to ensure that every IT initiative and investment aligns with the Company's business strategy, supports operational sustainability, and enhances competitiveness in the digital era. Through structured governance aligned with best practices, the Company is committed to continuously developing a reliable, innovative, and adaptive IT ecosystem to support sustainable business growth.

Within this governance framework, the Company establishes governance processes that include identifying, managing, and monitoring key IT risks, including IT disruption, cybersecurity, and disaster recovery readiness. These processes are implemented through the establishment of policies, standards, and procedures governing IT incident management, protection against cyber threats, and mechanisms for ensuring IT service continuity.

Kerangka Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Information Technology and Communication Governance Framework.



Perseroan secara berkala melakukan asesmen risiko TI untuk memastikan potensi gangguan operasional dan ancaman keamanan dapat diidentifikasi sejak dini dan dimitigasi secara efektif. Selain itu, Perseroan menerapkan pengendalian keamanan informasi, pengujian sistem, serta perencanaan dan simulasi disaster recovery guna memastikan ketersediaan dan keandalan sistem TI dalam kondisi darurat. Seluruh hasil identifikasi risiko, efektivitas pengendalian, serta kejadian signifikan terkait TI dilaporkan secara berkala kepada Direksi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan strategis, guna memastikan pengelolaan TI berjalan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Company regularly conducts IT risk assessments to ensure that potential operational disruptions and security threats can be identified early and effectively mitigated. Furthermore, the Company applies information security controls, system testing, and disaster recovery planning and simulations to ensure the availability and reliability of IT systems in emergency situations. All risk identification results, control effectiveness, and significant IT-related incidents are reported regularly to the Board of Directors as part of the oversight and strategic decision-making mechanisms, ensuring IT management is aligned with good corporate governance principles.

PENGELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan menempatkan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung efektivitas operasional serta pencapaian tujuan bisnis. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas proses bisnis dan kebutuhan akan sistem TI yang andal, Perseroan telah membentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan TI secara terintegrasi dan berkesinambungan.

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS MANAGEMENT

The Company positions the Information Technology (IT) as a key pillar in supporting operational effectiveness and achieving business objectives. In line with the increasing complexity of business processes and the need for reliable IT systems, the Company has established an organizational structure responsible for integrated and sustainable IT management and development.

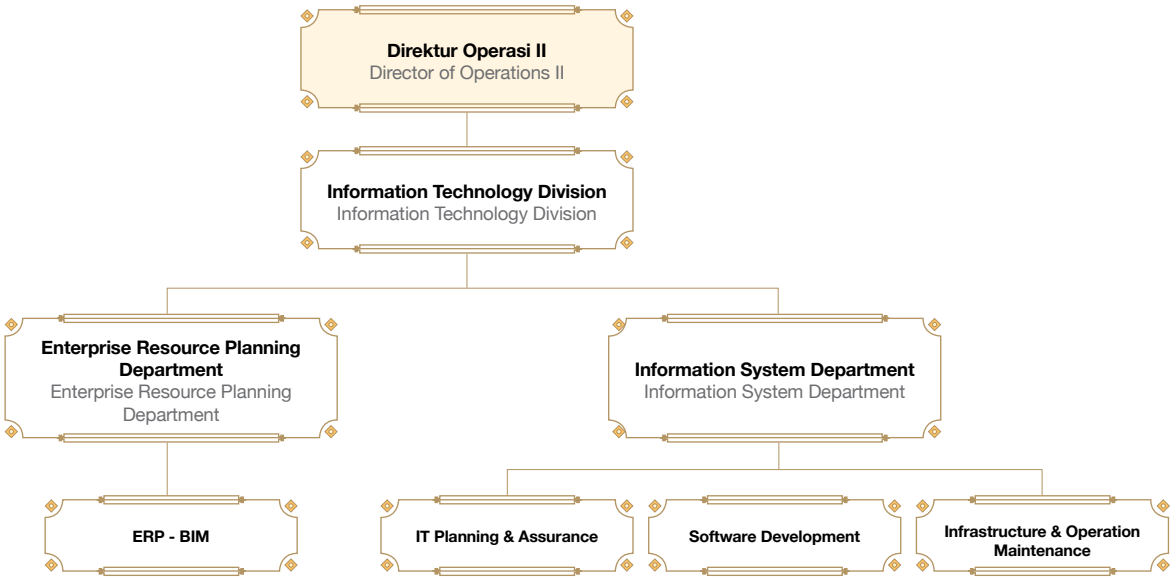
Pengelolaan sistem TI di lingkungan Perseroan dilaksanakan oleh Information Technology Division, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi II. Divisi ini memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan TI berjalan secara optimal, selaras dengan arah pengembangan bisnis Perseroan, serta responsif terhadap dinamika dan tantangan industri.

The Company's IT systems management is carried out by the Information Technology Division, which reports directly to the Director of Operations II. This division plays a strategic role in ensuring optimal IT management, aligned with the Company's business development direction, and responsive to industry dynamics and challenges.

Dalam rangka memperkuat tata kelola TI, Information Technology Division membawahi dua departemen, yaitu Enterprise Resource Planning Department dan Information System Department. Melalui struktur organisasi yang terarah dan mengacu pada praktik terbaik, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas TI guna meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta menjaga ketahanan bisnis secara berkelanjutan.

To strengthen IT governance, the Information Technology Division comprises two departments: the Enterprise Resource Planning Department and the Information Systems Department. Through a focused organizational structure aligned with best practices, the Company is committed to continuously developing IT capabilities to improve operational efficiency, strengthen competitiveness, and maintain sustainable business resilience.

Struktur Organisasi Pengelola Sistem Teknologi Informasi WEGE per 31 Desember 2025
WEGE Information Technology Systems Management Organizational Structure as of December 31, 2025



Adapun tugas dan tanggung jawab Information Technology Division sebagai pengelola sistem TI WEGE, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the Information Technology Division as WEGE IT system manager are as follows:

No	Posisi Position	Deskripsi Tanggung Jawab Job Description
1.	*Enterprise Resource Planning Department*	1. Mengelola, merencanakan, dan mengembangkan sistem ERP secara terintegrasi. 2. Memastikan sistem ERP mendukung efisiensi proses kerja di seluruh unit perusahaan. 3. Memantau pelaksanaan dan evaluasi sistem ERP, termasuk memberikan bantuan dan dukungan terkait. 1. Managing, planning, and developing an integrated ERP system. 2. Ensuring the ERP system supports efficient work processes across all company units. 3. Monitoring the implementation and evaluation of ERP system, including providing related assistance and support.
2.	*Information System Department*	1. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. 2. Menyediakan infrastruktur TI yang aman, andal, dan sesuai kebutuhan. 3. Menangani manajemen data dan keamanan informasi. 1. Developing and maintaining the information systems used by the company. 2. Providing a secure, reliable, and appropriate IT infrastructure. 3. Handling data management and information security.
3.	ERP-BIM	1. Melakukan analisis kebutuhan bisnis untuk penerapan ERP dan BIM (*Building Information Modeling*). 2. Berkoordinasi dengan pengguna dan tim TI untuk memastikan solusi ERP/BIM tepat guna. 3. Mengimplementasikan dan mengevaluasi keberhasilan penerapan sistem. 1. Conducting business needs analysis for ERP and Building Information Modeling (BIM) implementation. 2. Coordinating with users and the IT team to ensure the ERP/BIM solution is effective. 3. Implementing and evaluating the success of system implementation.

No	Posisi Position	Deskripsi Tanggung Jawab Job Description
4.	*IT Planning & Assurance*	1. Menyusun perencanaan dan kebijakan TI di perusahaan. 2. Mengawasi penerapan standar dan prosedur TI, termasuk audit dan quality assurance. 3. Mendukung pengembangan dan inovasi teknologi untuk mendukung kinerja perusahaan. 1. Developing IT plans and policies within the company. 2. Overseeing the implementation of IT standards and procedures, including audits and quality assurance. 3. Supporting technology development and innovation to support company performance.
5.	*Software Development*	1. Membangun dan memelihara aplikasi perangkat lunak sesuai kebutuhan bisnis. 2. Menyusun dokumentasi teknis dan melakukan uji kualitas (QA). 3. Melakukan pemecahan masalah (debugging) dan peningkatan fitur pada aplikasi yang sudah berjalan. 1. Building and maintaining software applications according to business needs. 2. Developing technical documentation and conducting quality assurance (QA) testing. 3. Debugging and enhancing features for existing applications.
6.	*Infrastructure & Operation Maintenance*	1. Menangani infrastruktur jaringan, server, dan perangkat keras lainnya. 2. Memberikan dukungan operasional, pemeliharaan, dan pemecahan masalah terkait TI. 3. Menjaga ketersediaan layanan dan memastikan sistem berfungsi optimal setiap saat. 1. Managing network infrastructure, servers, and other hardware. 2. Providing operational support, maintenance, and troubleshooting related to IT. 3. Maintaining service availability and ensuring optimal system function at all times.

PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka menghadirkan sistem Teknologi Informasi (TI) yang andal, aman, dan selaras dengan kebutuhan bisnis, Perseroan mengimplementasikan pengelolaan TI dengan mengacu pada standar serta prinsip tata kelola yang diakui secara internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional, memperkuat keamanan informasi, serta mengoptimalkan proses bisnis dalam mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan TI, Perseroan menerapkan beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. **COBIT *(Control Objectives for Information and Related Technologies)***
   Perseroan mengacu pada kerangka kerja COBIT untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI guna memastikan keselarasan antara pengelolaan TI dan strategi bisnis Perseroan. Penyusunan dan penerapan COBIT 4.1 mengacu pada Dokumen Audit COBIT Versi 4.1 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun 2022, yang digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengelolaan TI. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan proses peningkatan menuju penerapan COBIT 2019 melalui penilaian terhadap 24 proses tata kelola TI, dengan target peningkatan tingkat kematangan hingga mencapai nilai 3,20.

2. **ISO 27001**
   Dalam rangka memperkuat keamanan informasi, Perseroan menerapkan standar ISO 27001:2013 sebagai kerangka kerja yang komprehensif dalam pengelolaan risiko keamanan informasi. Penerapan standar ini memastikan bahwa sistem Teknologi Informasi (TI) Perseroan dilengkapi dengan mekanisme pengendalian yang efektif untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, termasuk pengelolaan aset informasi serta pengaturan dan pembatasan akses.

INFORMATION TECHNOLOGY IMPLEMENTATION

In order to provide a reliable and secure Information Technology (IT) systems that are aligned with business needs, the Company implements IT management based on internationally recognized governance standards and principles. This approach aims to improve operational effectiveness, strengthen information security, and optimize business processes to support the Company's sustainable growth.

In IT management, the Company applies the following key aspects:

1. **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)**
   The Company utilizes the COBIT framework to measure the maturity level of IT governance to ensure alignment between IT management and the Company's business strategy. The development and implementation of COBIT 4.1 refers to the 2022 COBIT Audit Document for PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, which serves as a reference for improving the effectiveness of IT control and management. Furthermore, the Company is also carrying out an improvement process towards implementing COBIT 2019 through an assessment of 24 IT governance processes, with a target of increasing the maturity level to 3.20.

2. **ISO 27001**
   To strengthen information security, the Company has applied the ISO 27001:2013 standard as a comprehensive framework for managing information security risks. The application of this standard ensures that the Company's Information Technology (IT) systems are equipped with effective control mechanisms to maintain data confidentiality, integrity, and availability, including information asset management and access regulation and restrictions.

3. **Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan**
   Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Perseroan senantiasa diselaraskan dengan arah pertumbuhan dan strategi bisnis guna mengakomodasi kebutuhan strategis Perseroan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun sistem TI yang mampu mendukung efisiensi operasional, meningkatkan daya saing, serta menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan dan pengembangan TI, Perseroan secara konsisten mengimplementasikan berbagai inisiatif yang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Inisiatif tersebut dirancang dan dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Technology Independence*, yaitu tidak bergantung pada teknologi atau platform tertentu;
2. *Ease of Use*, yaitu memastikan kemudahan penggunaan sistem bagi pengguna;
3. *Application Integration*, yaitu mendorong integrasi antar sistem informasi; dan
4. *Analytical Services*, yaitu penguatan kapabilitas layanan analitik guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Secara umum, fokus pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi Perseroan sepanjang tahun 2025 diarahkan pada beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Implementasi sistem SAP yang mencakup modul *Project System, Sales & Distribution, Material Management, Finance & Controlling*, serta *Human Capital Management;*
2. Persiapan integrasi antara sistem SAP dan ERP-WEGE guna meningkatkan keterpaduan proses bisnis;
3. Peningkatan keamanan informasi dengan mengacu pada standar ISO 27001;
4. Persiapan peningkatan versi serta peningkatan skor IT Maturity melalui penerapan kerangka kerja COBIT dalam tata kelola dan manajemen TI;
5. Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan jaringan komunikasi untuk memastikan keandalan operasional serta efisiensi sistem; dan
6. Digitalisasi proses operasional melalui penerapan tanda tangan digital serta sistem manajemen dokumen berbasis paperless guna meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja.

PROGRAM STRATEGIS 2025

Sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) serta *roadmap* Teknologi Informasi (TI) 2024–2028, Perseroan melalui Information *Technology Division* menyusun dan mengimplementasikan program strategis pengembangan TI pada tahun 2024. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing Perseroan, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Program strategis pengembangan Teknologi Informasi tersebut mencakup beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penerapan modul ERP BIM WG di seluruh proyek guna memperkuat integrasi dan konsistensi data;
2. Pengembangan aplikasi ERP untuk mengoptimalkan pengelolaan SCM.

3. **The Company's Long-Term Plan (RJP)**
   The Company's Information Technology (IT) development is consistently aligned with its growth direction and business strategy to accommodate its strategic needs. This approach aims to build an IT system capable of supporting operational efficiency, increasing competitiveness, and maintaining business sustainability amidst the ever-changing industry dynamics.

As part of its IT management and development strategy, the Company consistently implements various initiatives aligned with business needs. These initiatives are designed and developed with reference to the following principles:

1. Technology Independence, meaning independence from a specific technology or platform;
2. Ease of Use, meaning ensuring ease of system use for users;
3. Application Integration, meaning encouraging integration between information systems; and
4. Analytical Services, namely strengthening analytical service capabilities to support data-driven decision-making.

In general, the focus of the Company's Information Technology management and development throughout 2025 were directed towards the following key initiatives:

1. Implementation of the SAP system, which includes Project System, Sales & Distribution, Material Management, Finance & Controlling, and Human Capital Management modules;
2. Preparation for integration between SAP system and ERP-WEGE to improve business process integration;
3. Improving information security by referring to the ISO 27001 standard;
4. Preparation for version upgrades and improving IT Maturity scores through the implementation of COBIT framework for IT governance and management;
5. Strengthening Information Technology infrastructure and communication networks to ensure operational reliability and system efficiency; and
6. Digitizing operational processes through the implementation of digital signatures and a paperless document management system to improve work efficiency and accuracy.

2025 STRATEGIC PROGRAM

In line with the policy direction outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the 2024–2028 Information Technology (IT) roadmap, the Company, through its Information Technology Division, has prepared and implemented a strategic IT development program for 2024. This program is designed to improve operational efficiency, strengthen the Company's competitiveness, and support sustainable business growth.

The strategic Information Technology development program includes several key initiatives, as follows:

1. Implementation of ERP BIM WG module across all projects to strengthen data integration and consistency;
2. Development of ERP application to optimize SCM management.

3. Peningkatan kompetensi tim melalui program pelatihan dan sertifikasi Teknologi Informasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
4. Pengembangan aplikasi Legal dan Adkon terintegrasi dengan manrisk;
5. Digitalisasi proses bisnis melalui penambahan kapasitas infrastruktur, serta penerapan sistem paperless dan tanda tangan digital;
6. Persiapan pelaksanaan audit eksternal dalam rangka pencapaian tingkat kematangan TI (IT Maturity) dengan mengacu pada kerangka kerja COBIT 2019, serta pemenuhan standar ISO 27001:2022;
7. Pembangunan dashboard ERP WG sebagai sarana pemantauan kinerja dan alat bantu evaluasi manajemen.

3. Improving team competency through ongoing Information Technology training and certification programs;
4. Development of Legal and Adkon applications integrated with Risk Management;
5. Digitization of business processes by increasing infrastructure capacity, implementing a paperless system and digital signatures;
6. Preparation for external audits to achieve IT maturity, based on the COBIT 2019 framework and meeting the ISO 27001:2022 standard;
7. Development of an ERP WG dashboard as a performance monitoring and management evaluation tool.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk memastikan keberhasilan program pengembangan Teknologi Informasi (TI), Perseroan membentuk IT *Steering Committee* yang terdiri dari para pemangku kepentingan utama dengan pengetahuan dan kompetensi yang relevan di bidangnya masing-masing. Komite ini bertugas memberikan arahan strategis, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem TI berjalan selaras dengan strategi dan kebutuhan bisnis Perseroan.

IT *Steering Committee* berperan dalam mendukung inisiatif TI baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus memastikan keselarasan antara investasi TI dan tujuan strategis Perseroan. Selain itu, komite ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program TI guna menjamin kepatuhan terhadap kebijakan internal, standar operasional, serta praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola TI yang efektif, Perseroan juga menetapkan kebijakan dan regulasi pendukung guna mempercepat implementasi inisiatif digital, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta standar internasional di bidang teknologi informasi.

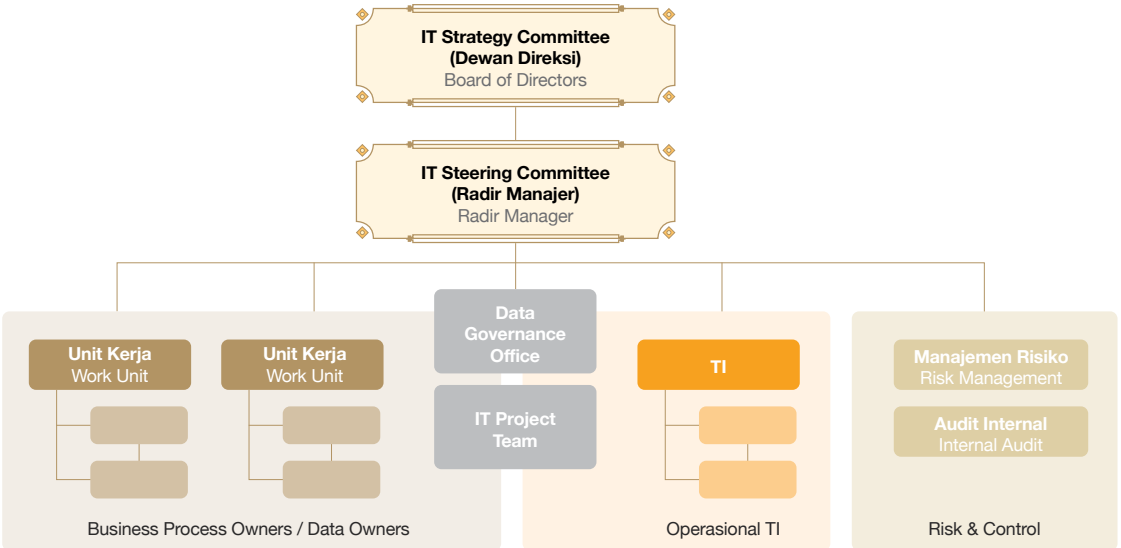
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

To ensure the success of Information Technology (IT) development program, the Company has established an IT Steering Committee consisting of key stakeholders with relevant knowledge and competencies in their respective fields. This committee is tasked with providing strategic direction, oversight, and ensuring that the planning, development, and implementation of IT systems align with the Company's strategy and business needs.

The IT Steering Committee plays a role in supporting IT initiatives in both the short and long term, while ensuring alignment between IT investments and the Company's strategic objectives. Furthermore, this committee oversees the implementation of IT programs to ensure compliance with internal policies, operational standards, and internationally accepted best practices.

As a manifestation of its commitment to effective IT governance, the Company has also established supporting policies and regulations to accelerate the implementation of digital initiatives, while adhering to the principles of Good Corporate Governance and international standards in the field of information technology.

Manajemen Teknologi Informasi WEGE Strategic
WEGE Information Technology Management Strategic



IT *MATURITY ASSESSMENT*

Sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas proses bisnis serta penerapan tata kelola yang terstruktur, Perseroan secara berkala melakukan penilaian tingkat kematangan Teknologi Informasi (IT *Maturity*). Berdasarkan hasil asesmen independen yang dilakukan pada tahun 2022, Perseroan memperoleh skor IT Maturity sebesar 3,03. Sejalan dengan fokus Perseroan pada implementasi sistem SAP sepanjang tahun 2024, penilaian resmi berikutnya direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dengan target peningkatan skor IT Maturity menjadi 3,20.

Pendekatan dan strategi pengelolaan TI Perseroan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian IT *Maturity* mencakup berbagai aspek utama, antara lain pengarahan, perencanaan dan kebijakan, akuntabilitas, pengukuran kinerja, pengembangan kompetensi, komunikasi, serta pemanfaatan teknologi dan otomatisasi. Asesmen independen yang direncanakan pada tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian serta peningkatan yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat kapabilitas dan integrasi sistem Teknologi Informasi guna meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkokoh daya saing dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah menetapkan *Roadmap* Teknologi Informasi (TI) untuk periode 2024–2028 sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem TI yang terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis. *Roadmap* ini memuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dan pengembangan TI, *Roadmap* tersebut memberikan arah yang jelas dan terstruktur terkait strategi investasi teknologi, modernisasi infrastruktur digital, serta penguatan sistem yang mendukung efektivitas operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Melalui implementasi yang sistematis dan berkesinambungan, Perseroan berkomitmen untuk terus mendorong inovasi teknologi, meningkatkan kapabilitas digital, serta memperkuat ketahanan sistem guna menghadapi dinamika industri dan percepatan transformasi digital.

IT MATURITY ASSESSMENT

As part of its efforts to ensure the effectiveness of business processes and the implementation of structured governance, the Company periodically assesses its Information Technology (IT) maturity level. Based on the results of an independent assessment conducted in 2022, the Company achieved an IT Maturity score of 3.03. In line with the Company's focus on implementing the SAP system throughout 2024, the next official assessment is planned for 2025, with a target of increasing the IT Maturity score to 3.20.

The Company's IT management approach and strategy consistently adhere to the principles of good corporate governance. The IT Maturity assessment covers a number of key aspects, including direction, planning and policy, accountability, performance measurement, competency development, communication, and the utilization of technology and automation. The independent assessment, planned for 2025, is expected to provide an objective overview of the Company's achievements and improvements.

Going forward, the Company will continue to strengthen its IT system capabilities and integration to improve operational efficiency, support data-driven decision-making, strengthen competitiveness, and drive sustainable business growth.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT ROADMAP

The Company has established an Information Technology (IT) Roadmap for 2024–2028 period as a strategic measure to strengthen an integrated and adaptive IT system to meet business needs. This Roadmap contains short- and long-term plans designed to support the sustainable achievement of the Company's vision, mission, and business objectives.

As a primary guideline for IT management and development, the Roadmap provides clear and structured direction regarding technology investment strategies, digital infrastructure modernization, and system strengthening that support operational effectiveness and data-driven decision-making.

Through systematic and continuous implementation, the Company is committed to continuously driving technological innovation, enhancing digital capabilities, and strengthening system resilience to face industry dynamics and the acceleration of digital transformation.

***Roadmap* Teknologi Informasi WEGE 2024 – 2028**

2024	2025	2026	2027	2028
• Digitalization Starter • IT Maturity: 3,00 - COBIT 2019 • ISO 27001:2013 Surveillance • Asset Settlement • Project Management • Leadership Training • L1 BIM Utilize • ERP Evaluation	• IT Governance • IT Maturity: 3,20 • ISO 27001:2022 Certification • Refinancing, Monetizing SPV • Engage, Ready to Work • L2 BIM Optimize (All Project) • ERP-SCM Implementation • SAP Implementation • WBS Training • Legal-Adkon-Manajemen Risiko Terintegrasi • Business Intelligence Feasibility Study	• ERP Optimization • IT Maturity: 3,25 • SOP Adapted • (Pedoman, Procedure, Instruksi Kerja) • ISO 27001:2022 Surveillance • ISO 20000 Certification • Customer Oriented Program • Engage, Sustainable Leadership • L2 BIM Utilize, L3 BIM Optimize • Business Intelligence • Preparation & Development	• ERP Optimization & Integration • IT Maturity: 3,30 • Dashboard Management/ Business Intelligence • Lean Manufacturing, Additive, 3D Modular • ISO 27001 Recertification • ISO 20000 Surveillance • Monetizing Asset, Bond • L3 BIM Optimize All Project • Business Intelligence Development & Implementation	• Data Driven Decision Making • IT Maturity: 3,35 • Big Data Research • Business Intelligence Evaluation • Lean Construction & Construction 4.0, Ecofriendly Material • ISO 20000 Surveillance • ISO 27001 Surveillance • Restructure, Monetizing Asset, Right Issue • Customer Centric Product • DFMA • L3 BIM Integration with ERP

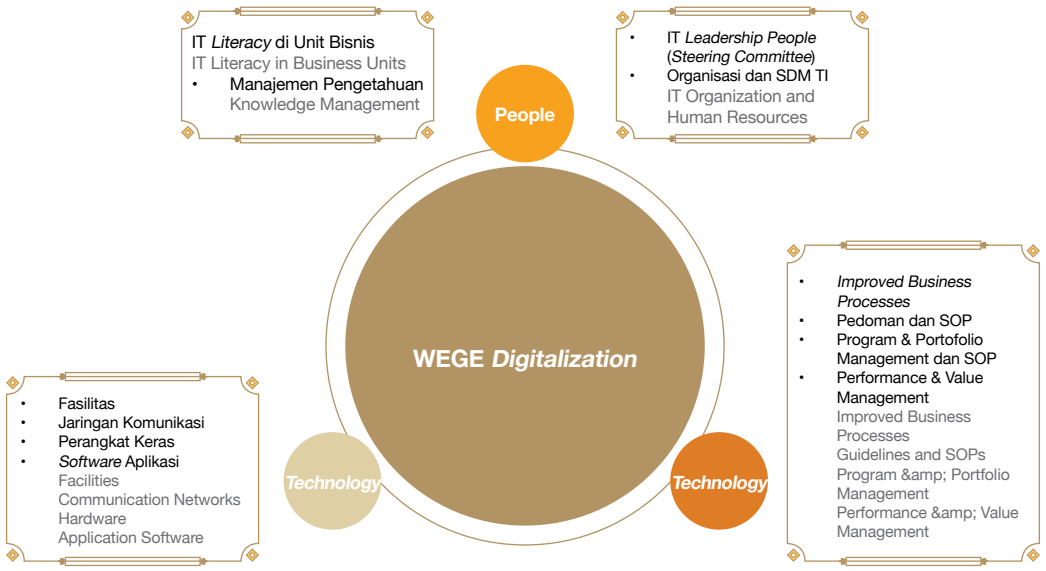
FRAMEWORK IMPLEMENTASI DIGITALISASI

Perseroan menerapkan *Framework Implementasi Digitalisasi* sebagai pedoman dalam pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pencapaian tujuan bisnis. Framework ini mengacu pada tiga pilar utama, yaitu *People, Process, dan Technology*, yang berperan penting dalam membangun tata kelola Teknologi Informasi yang efektif dan berkelanjutan.

DIGITALIZATION IMPLEMENTATION FRAMEWORK

The Company's Digitalization Implementation Framework serves as a guideline for developing an integrated digital ecosystem to improve operational efficiency and support the achievement of business goals. This framework refers to three main pillars: People, Process, and Technology, which play a crucial role in building effective and sustainable Information Technology governance.

Framework Implementasi Digitalisasi WEGE
WEGE Digitalization Implementation Framework



INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan secara berkelanjutan melakukan investasi di bidang Teknologi Informasi (TI) guna mendukung optimalisasi sistem dan infrastruktur yang selaras dengan strategi bisnis Perseroan. Perseroan meyakini bahwa pemanfaatan TI yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pertumbuhan bisnis, serta memperkuat daya saing di industri. Oleh karena itu, Perseroan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dan pengelolaan TI sebagai bagian dari strategi transformasi digital yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Perseroan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,55 miliar untuk pengembangan sistem informasi dan infrastruktur TI guna mendukung pelaksanaan program pengembangan sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan.

Investasi tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun ekosistem Teknologi Informasi yang andal, inovatif, dan terintegrasi guna mendukung efektivitas proses bisnis, meningkatkan ketahanan sistem, serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha Perseroan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Seiring dengan semakin strategisnya peran Teknologi Informasi (TI) dalam operasional Perseroan, TI tidak lagi dipandang semata sebagai fungsi pendukung, melainkan sebagai elemen kunci yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pemanfaatan teknologi secara optimal memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat daya saing di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan inovasi dan efektivitas pengelolaan TI, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan TI untuk tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta roadmap Teknologi Informasi. Rencana pengembangan tersebut mencakup beberapa fokus utama sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mengelola sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan sistem informasi bisnis yang terintegrasi *end-to-end*
2. Mengembangkan arsitektur data dan analitik bisnis sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan
3. Mendorong efisiensi dan standardisasi proses bisnis melalui digitalisasi dan otomasi
4. Menjamin keamanan dan kepatuhan sistem informasi Perusahaan
5. Menyelaraskan pengembangan sistem informasi dengan *roadmap* transformasi digital dan strategi keberlanjutan Perusahaan

INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

The Company continuously makes investments in Information Technology (IT) to support the optimization of systems and infrastructure aligned with its business strategy. The Company believes that effective IT utilization plays a critical role in improving operational efficiency, accelerating business growth, and strengthening competitiveness in the industry. Therefore, the Company allocates a dedicated budget for IT development and management as part of its ongoing digital transformation strategy.

In 2025, the Company allocated a budget of Rp14.55 billion for the development of information systems and IT infrastructure to support the implementation of development programs in accordance with the established roadmap.

This investment reflects the Company's commitment to building a reliable, innovative, and integrated Information Technology ecosystem to support business process effectiveness, enhance system resilience, and ensure the sustainability and growth of the Company's business amidst the ever-evolving industry dynamics.

FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN

As Information Technology (IT) plays an increasingly strategic role in the Company's operations, IT is no longer viewed merely as a support function but as a key element that directly contributes to the achievement of business objectives. Optimal utilization of technology enables the Company to improve operational efficiency, accelerate digital transformation, and strengthen competitiveness amidst the ever-evolving industry dynamics.

To maintain sustainable innovation and effective IT management, the Company has prepared an IT development plan for 2026, referring to the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Information Technology roadmap. This development plan includes the following key focuses:

1. Providing and managing an integrated end-to-end Enterprise Resource Planning (ERP) system and business information system.
2. Developing a data architecture and business analytics as a source of information and decision-making.
3. Driving efficiency and standardization of business processes through digitalization and automation.
4. Ensuring the security and compliance of the Company's information systems.
5. Aligning information system development with the Company's digital transformation roadmap and sustainability strategy.

Building Information Modeling (BIM)
Building Information Modeling (BIM)

Sebagai bagian dari upaya penguatan transformasi digital di industri konstruksi, Perseroan mengadopsi teknologi *Building Information Modeling* (BIM) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pada seluruh tahapan pelaksanaan proyek. BIM merupakan teknologi yang memungkinkan pemodelan dan simulasi informasi proyek secara terintegrasi dalam bentuk model tiga dimensi, sehingga mendukung perencanaan yang lebih presisi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta koordinasi lintas disiplin yang lebih efektif.

As part of its efforts to strengthen digital transformation in the construction industry, the Company is adopting Building Information Modeling (BIM) technology to improve efficiency, accuracy, and quality at all stages of project implementation. BIM is a technology that enables integrated modeling and simulation of project information in the form of three-dimensional models, thus supporting more precise planning, optimized resource utilization, and more effective cross-disciplinary coordination.

Perseroan mulai menerapkan BIM sejak tahun 2016, antara lain pada proyek Jakarta International Velodrome yang digunakan sebagai salah satu venue Asian Games 2018. Keberhasilan implementasi BIM pada proyek tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian proyek, tetapi juga menjadi pijakan awal bagi Perseroan dalam memperluas pemanfaatan teknologi BIM pada berbagai proyek konstruksi strategis lainnya.

The Company began implementing BIM in 2016, including on Jakarta International Velodrome project, which served as a venue for the 2018 Asian Games. The successful implementation of BIM on this project not only contributed to improved work quality and timely completion, but also served as a starting point for the Company to expand the use of BIM technology on various other strategic construction projects.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas dan tuntutan industri konstruksi, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan kapabilitas BIM melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, investasi pada teknologi pendukung, serta penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis serta penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

In line with the increasing complexity and demands of the construction industry, the Company continuously develops its BIM capabilities by enhancing human resource competencies, investing in supporting technology, and strengthening collaboration with stakeholders. These efforts reflect the Company's commitment to providing innovative, efficient, and sustainable construction solutions, while supporting business growth and creating long-term added value for all stakeholders.

SERTIFIKASI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Perseroan terus memperkuat komitmennya dalam penerapan teknologi *Building Information Modeling* (BIM) dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku. Sebagai salah satu capaian penting, Perseroan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikasi ISO 19650-1:2018 BSI Kitemark dan ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark dari BSI (British Standards Institution) Group Indonesia. Sertifikasi ini menegaskan bahwa Perseroan telah memenuhi standar tertinggi dalam pengelolaan informasi berbasis BIM, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek konstruksi.

BSI Kitemark merupakan sertifikasi tertinggi di bidang BIM yang diberikan oleh BSI Group, lembaga sertifikasi internasional resmi yang berasal dari Britania Raya. Pencapaian ini mencerminkan keunggulan Perseroan dalam menerapkan BIM secara terstruktur, efektif, dan selaras dengan standar global, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di industri konstruksi.

Dengan diraihnya sertifikasi tersebut, Perseroan semakin mengukuhkan posisinya sebagai pelopor penerapan BIM di Indonesia. Ke depan, Perseroan akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi BIM pada berbagai proyek strategis guna mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, serta keberlanjutan dalam industri konstruksi.

BUILDING INFORMATION MODELING CERTIFICATION

The Company continues to strengthen its commitment to implementing Building Information Modeling (BIM) technology by adhering to applicable international standards. As a significant achievement, the Company became the first company in Indonesia to obtain ISO 19650-1:2018 BSI Kitemark and ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark certification from BSI (British Standards Institution) Group Indonesia. This certification confirms that the Company has met the highest standards in BIM-based information management, from the planning stage to the implementation of construction projects.

The BSI Kitemark is the highest certification in the BIM field, awarded by BSI Group, an official international certification body based in the United Kingdom. This achievement reflects the Company's excellence in implementing BIM in a structured, effective manner, and in alignment with global standards, while strengthening its competitiveness in the construction industry.

With this certification, the Company further solidifies its position as a pioneer in BIM implementation in Indonesia. Going forward, the Company will continue to develop and optimize the use of BIM technology in various strategic projects to drive increased efficiency, innovation, and sustainability in the construction industry.

BSI *Kitemark Certificate Building Information Modeling*

BSI Kitemark Certificate Building Information Modeling



bsi.

Kitemark™ Certificate

This is to certify that:

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
WIKA Tower 1 LL7-10
Jl. D.I. Panjaitan Kav.9
Jakarta Timur
13340
Indonesia

Holds Certificate Number: KM 741362

In respect of:

BIM Delivery Phase
Achieved BIM for Design, Construction and Commissioning in accordance with ISO 19650-1:2018 and ISO 19650-2:2018 following the assessment of Project Delivery and Collaborative Working Maturity when working with project stakeholders

This grants the right and licence to use the Kitemark in accordance with the Kitemark Terms and Conditions governing the use of the Kitemark, as may be updated from time to time by BSI Assurance UK Ltd (the "Conditions"). All defined terms in this Certificate shall have the same meaning as in the Conditions.

The use of the Kitemark is authorized in respect of the Product(s) detailed on this Certificate provided at or from the above address.

For and on behalf of BSI: Shahin Barhoni, Group Product Certification Director

First Issued: 2021-04-16
Latest Issue: 2024-05-08

Effective Date: 2024-05-08
Expiry Date: 2027-04-15

Page: 1 of 2

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat transformasi digital dan penerapan tata kelola informasi proyek berbasis standar global, Perseroan telah memperoleh dan mempertahankan sertifikasi BSI Kitemark untuk ISO 19650-1:2018 dan ISO 19650-2:2018 yang diterbitkan oleh British Standards Institution (BSI) sebagai lembaga sertifikasi internasional terkemuka.

Perseroan telah memperoleh sertifikat dengan nomor KM 741362 yang berlaku hingga 15 April 2027, dan secara konsisten melaksanakan proses audit surveillance setiap tahun sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan penerapan standar dan peningkatan kualitas implementasi BIM di seluruh proyek. Hasil audit surveillance menunjukkan bahwa sistem manajemen informasi BIM Perseroan berjalan secara efektif dan selaras dengan persyaratan standar internasional.

As part of the Company's commitment to strengthening digital transformation and implementing global standards-based project information governance, the Company has obtained and maintains BSI Kitemark certification for ISO 19650-1:2018 and ISO 19650-2:2018, issued by the British Standards Institution (BSI), a leading international certification body.

The Company has obtained certificate number KM 741362, valid until April 15, 2027, and consistently conducts annual surveillance audits to ensure the continued application of standards and improve the quality of BIM implementation across all projects. The surveillance audit results demonstrate that the Company's BIM information management system is operating effectively and aligns with international standard requirements.

Glodon Certificate Building Information Modeling
Glodon Certificate Building Information Modeling



CERTIFICATE FRONTIER

Perusahaan memiliki 5 sertifikasi BIM 5D dari Glodon, 3 Glodon Certified 5D BIM Frontier Adopter, dan 2 Glodon Certified 5D BIM Professional Adopter. Sertifikasi tersebut menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai poin penilaian pada beberapa tender

LEVEL PENERAPAN *BUILDING INFORMATION MODELING*

Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan *Building Information Modeling* (BIM) sebagai bagian integral dari transformasi digital di industri konstruksi. Penerapan BIM tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaksanaan proyek, tetapi juga mengintegrasikan manajemen informasi guna mendukung perencanaan dan pengendalian proyek yang lebih efektif.

FRONTIER CERTIFICATE

The Company holds five 5D BIM certifications from Glodon: three Glodon Certified 5D BIM Frontier Adopters, and two Glodon Certified 5D BIM Professional Adopters. These certifications are required for assessment in several tenders.

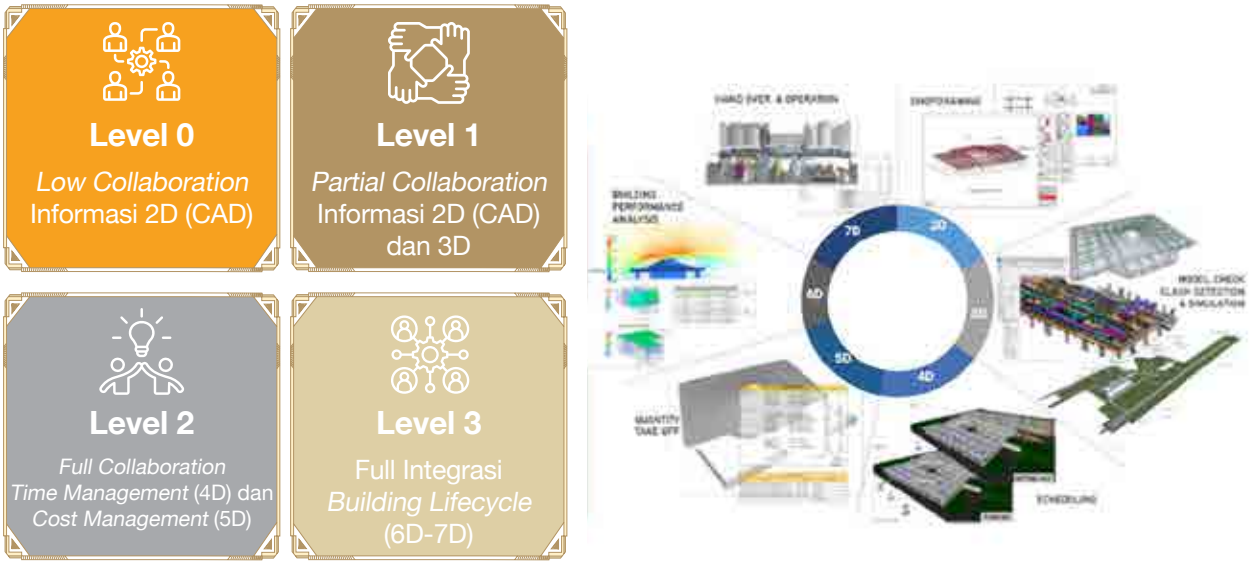
BUILDING INFORMATION MODELING IMPLEMENTATION LEVEL

The Company continuously develops Building Information Modeling (BIM) as an integral part of digital transformation in the construction industry. BIM implementation not only contributes to increased efficiency and accuracy in project implementation but also integrates information management to support more effective project planning and control.

Implementasi BIM dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses tender hingga tahap pelaksanaan konstruksi di lapangan, sehingga setiap fase proyek dapat dikelola secara terstruktur dan terkoordinasi. Proses penerapan BIM yang dijalankan Perseroan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari 3D hingga 7D, yang memungkinkan optimalisasi perencanaan, pengendalian biaya dan waktu, hingga pengelolaan siklus hidup aset. Pendekatan ini memperkuat daya saing serta mendorong inovasi Perseroan dalam menghadirkan solusi konstruksi yang bernilai tambah dan berkelanjutan.

BIM implementation is carried out comprehensively, from the tender process to the construction phase on site, so that each phase of the project can be managed in a structured and coordinated manner. The Company's BIM implementation process encompasses various levels, from 3D to 7D, enabling planning optimization, cost and time control, and asset lifecycle management. This approach strengthens the Company's competitiveness and drives innovation in delivering value-added and sustainable construction solutions.

Level Penerapan *Building Information Modeling*
Building Information Modeling Implementation Level



1. SURVEY PHOTOGRAMMETRY

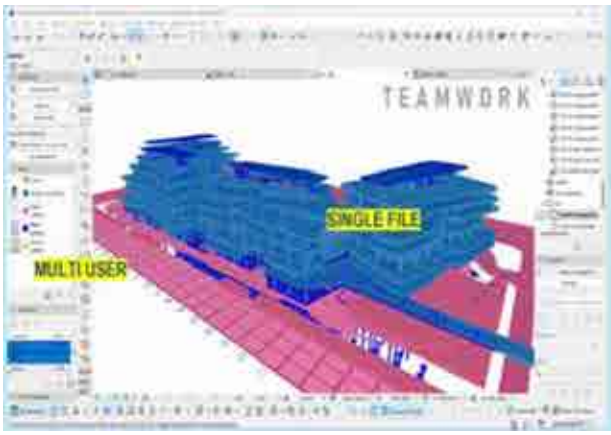
Photogrammetry atau *aerial surveying* merupakan teknik pemetaan yang memanfaatkan foto udara untuk menghasilkan representasi kondisi lapangan secara akurat. Proses ini diawali dengan pengambilan foto menggunakan drone yang telah diprogram dengan jalur terbang dan sudut pengambilan tertentu. Data foto yang diperoleh selanjutnya diolah menjadi *point cloud*, yang pada tahap akhir menghasilkan model tiga dimensi (3D) kondisi eksisting beserta data kontur.

Hasil pemetaan tersebut memberikan visualisasi yang komprehensif dan presisi, sehingga mendukung pemahaman kondisi lapangan secara menyeluruh serta menjadi dasar yang andal dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan proyek.

1. PHOTOGRAMMETRY SURVEY

Photogrammetry, or aerial surveying, is a mapping technique that utilizes aerial photography to produce an accurate representation of field conditions. The process begins with taking photos using a drone programmed with a specific flight path and angle. The resulting photo data is then processed into a point cloud, which ultimately produces a three-dimensional (3D) model of the existing conditions along with contour data.

The resulting mapping provides comprehensive and precise visualizations, supporting a comprehensive understanding of field conditions and providing a reliable basis for project planning, control, and decision-making.





2. KOORDINASI DESAIN

Koordinasi desain dilaksanakan melalui pembagian tugas yang terstruktur, sehingga setiap individu dapat bekerja secara simultan dengan memanfaatkan fitur *cloud* dan *file sharing*. Melalui sistem ini, para pengguna dapat berkolaborasi dalam satu model kerja yang sama kapan pun dan di mana pun.

Selain itu, koordinasi juga mencakup pertukaran informasi proyek yang dikelola melalui berbagai sistem dan perangkat (*tools*) oleh seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi berbasis *cloud* memungkinkan tim proyek bekerja secara lebih efektif dengan menghubungkan seluruh pihak terkait pada setiap tahapan siklus hidup proyek.

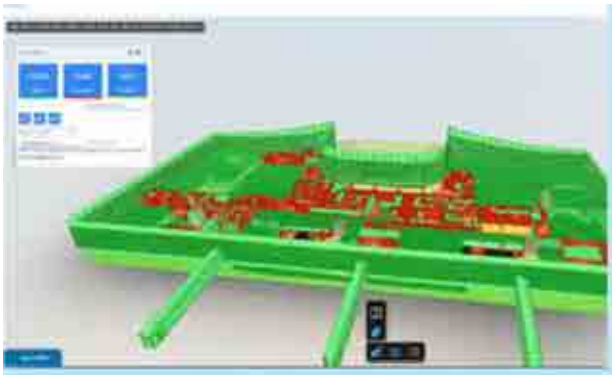
Untuk memastikan interoperabilitas antar disiplin, Perseroan menggunakan format file standar seperti *Industry Foundation Classes* (IFC), yang memungkinkan setiap tim proyek mengakses dan memanfaatkan data sesuai dengan kebutuhan fungsional masing-masing.

2. DESIGN COORDINATION

Design coordination is carried out through a structured division of tasks, allowing each individual to work simultaneously, utilizing cloud and file sharing features. Through this system, users can collaborate within a single work model anytime and anywhere.

Furthermore, coordination also includes the exchange of project information managed through various systems and tools by all stakeholders. Cloud-based collaboration enables project teams to work more effectively by connecting all relevant parties at every stage of the project lifecycle.

To ensure interoperability between disciplines, the Company utilizes standard file formats such as Industry Foundation Classes (IFC), which enable each project team to access and utilize data according to their respective functional needs.



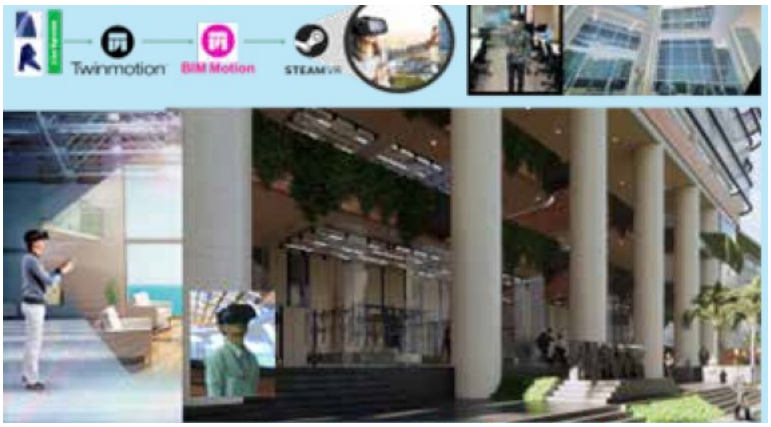


3. ***VIRTUAL REALITY***

Model yang dikembangkan menggunakan Archicad atau Revit disinkronisasikan secara langsung ke Twinmotion, kemudian diekspor dalam format BIM Motion untuk dapat dioperasikan dalam mode *Virtual Reality* (VR). Melalui pemanfaatan teknologi VR, perubahan kondisi bangunan dapat divisualisasikan secara *real-time*, termasuk simulasi berbagai faktor lingkungan seperti kondisi cuaca (hujan, musim kemarau, dan lainnya), sehingga menghasilkan representasi yang lebih dinamis, interaktif, dan mendetail.

3. **VIRTUAL REALITY**

Models developed using ArchiCAD or Revit are synced directly to Twinmotion and then exported in BIM Motion format for use in Virtual Reality (VR) mode. Through the use of VR technology, changes in building conditions can be visualized in real time, including simulations of various environmental factors such as weather conditions (rain, dry season, etc.), resulting in a more dynamic, interactive, and detailed representation.



4. ***AUGMENTED REALITY***

Pemodelan tiga dimensi (3D) dapat diekspor menjadi maket digital yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun dengan skala yang telah disesuaikan, sehingga memungkinkan visualisasi yang lebih interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. **AUGMENTED REALITY**

Three-dimensional (3D) models can be exported as digital mockups that can be accessed anytime and anywhere at a customized scale, enabling more interactive, flexible, and user-friendly visualizations.

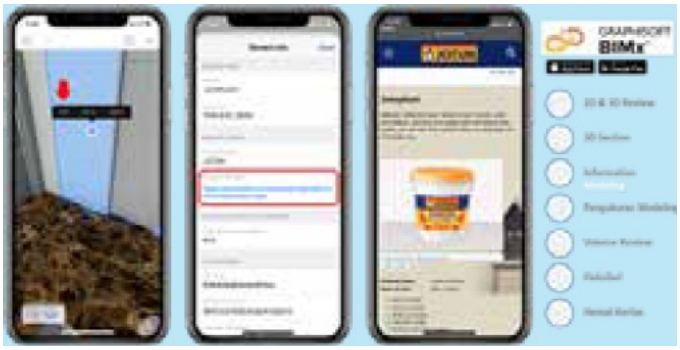


5. **BIMX**

BIMx menyajikan model bangunan dalam tampilan dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D), sehingga mendukung proses peninjauan bangunan di lapangan melalui berbagai perangkat. Selain itu, BIMx menyediakan informasi rinci mengenai posisi lokasi, spesifikasi teknis, serta referensi vendor, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengambilan keputusan.

5. **BIMX**

BIMx presents building models in two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) views, supporting the on-site building review process using various devices. Furthermore, BIMx provides detailed information on site location, technical specifications, and vendor references, overall improving efficiency and accuracy in the decision-making process.

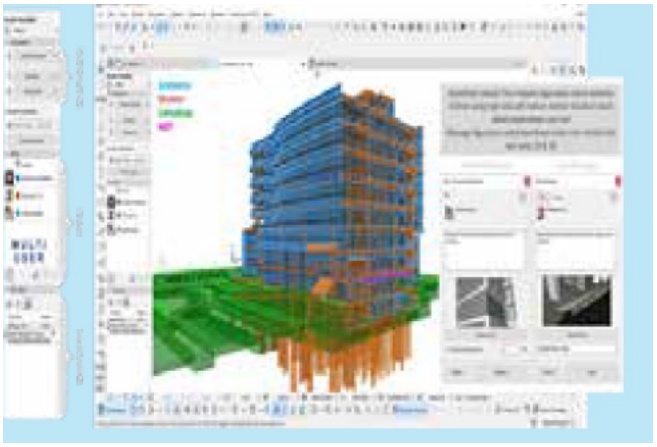


6. **BIM 3D**

BIM 3D merupakan representasi digital tiga dimensi yang memuat informasi komprehensif atas seluruh elemen fisik dalam proyek konstruksi. Teknologi ini mendukung koordinasi, integrasi, dan visualisasi yang akurat guna memastikan efektivitas dalam proses perencanaan serta pelaksanaan proyek.

6. **3D BIM**

3D BIM is a three-dimensional digital representation that contains comprehensive information on all physical elements within a construction project. This technology supports accurate coordination, integration, and visualization to ensure effectiveness in the planning and implementation process.



7. BIM 4D

BIM 4D menyajikan pemodelan tahapan konstruksi yang terintegrasi dengan dimensi waktu, sehingga memungkinkan pemantauan progres proyek secara *real-time*. Penerapan teknologi ini mendukung peningkatan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proyek, sekaligus meningkatkan transparansi pada setiap tahapan konstruksi.

7. 4D BIM

4D BIM provides integrated construction phase modeling with a time dimension, enabling real-time monitoring of project progress. The application of this technology supports increased efficiency in project planning, implementation, and control, while enhancing transparency at every stage of construction.

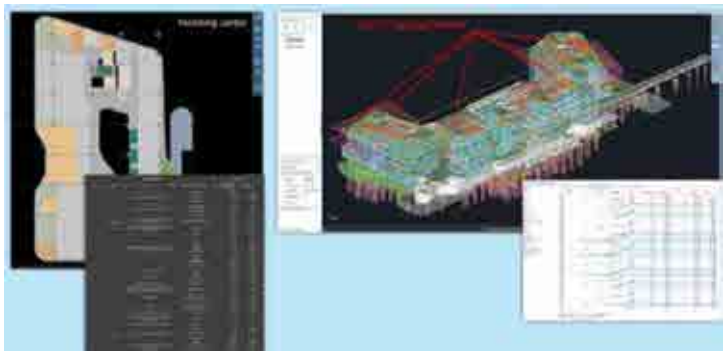


8. BIM 5D

Penerapan BIM 5D dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak Glodon Cubicost sebagai solusi khusus untuk proses *quantity take-off*. Teknologi ini mendukung tim estimasi dan *Quantity Surveyor* (QS) dalam pengendalian volume pekerjaan, pengelolaan segmentasi progres, serta proses klaim pembayaran secara lebih akurat dan efisien. Dengan demikian, penerapan BIM 5D meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam pengelolaan biaya konstruksi.

8. 5D BIM

5D BIM is implemented using Glodon Cubicost software as a specialized solution for the quantity take-off process. This technology supports the estimating team and Quantity Surveyors (QS) in controlling work volumes, managing progress segmentation, and processing payment claims more accurately and efficiently. Thus, the implementation of 5D BIM increases transparency and effectiveness in construction cost management.



9. BIM 6D

BIM 6D mendukung analisis energi bangunan melalui pemanfaatan perangkat lunak Rhinoceros yang terintegrasi dengan *Grasshopper, Ladybug, Honeybee, dan EnergyPlus*. Teknologi ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja bangunan, antara lain *heat transfer*, OTTV, pencahayaan alami, serta sistem pendingin.

Selain itu, penerapan BIM 6D berperan dalam mengoptimalkan desain bangunan agar memenuhi standar Green Building, mendukung peningkatan efisiensi energi, serta mendorong keberlanjutan bangunan secara menyeluruh.

9. 6D BIM

6D BIM supports building energy analysis through the use of Rhinoceros software integrated with Grasshopper, Ladybug, Honeybee, and EnergyPlus. This technology enables a comprehensive evaluation of building performance, including heat transfer, OTTV, natural lighting, and cooling systems.

Furthermore, the implementation of 6D BIM plays a role in optimizing building designs to meet Green Building standards, supporting increased energy efficiency, and promoting overall building sustainability.



10. BIM 7D

BIM 7D merupakan pendekatan terintegrasi dalam manajemen fasilitas, di mana seluruh informasi terkait pengoperasian dan pemeliharaan bangunan dikonsolidasikan dalam satu model informasi yang terpadu. Pendekatan ini memungkinkan pengelola gedung untuk memantau dan mengelola aset-aset penting, termasuk status operasional, manual pemeliharaan, informasi garansi, serta spesifikasi teknis, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung keberlanjutan pengelolaan fasilitas.

10. 7D BIM

7D BIM is an integrated approach to facility management, where all information related to building operations and maintenance is consolidated into a single, unified information model. This approach enables building managers to monitor and manage critical assets, including operational status, maintenance manuals, warranty information, and technical specifications, thereby improving operational efficiency and supporting sustainable facility management.



IMPLEMENTASI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Sebagai bagian dari strategi pengembangan teknologi dan inovasi, Perseroan secara berkelanjutan mengoptimalkan penerapan *Building Information Modeling* (BIM) untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi pada setiap tahapan pelaksanaan proyek. Penerapan BIM telah diintegrasikan sejak fase tender guna memperkuat daya saing Perseroan dalam proses perolehan proyek, antara lain melalui penyajian model digital dan perangkat pendukung dalam *beauty contest* tender.

Dalam implementasinya, Perseroan memanfaatkan berbagai teknologi pendukung, seperti *Virtual Reality* (VR) untuk menghadirkan simulasi lingkungan proyek secara imersif, *Augmented Reality* (AR) untuk menampilkan maket digital secara interaktif sehingga memberikan pemahaman desain yang lebih komprehensif, serta aplikasi BIMx yang memungkinkan visualisasi desain konstruksi secara *real-time* melalui perangkat seluler. Pemanfaatan teknologi tersebut mendukung peningkatan kualitas presentasi desain, memperkuat koordinasi di lapangan, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil menerapkan BIM secara menyeluruh pada seluruh proyek yang dikelola, sehingga mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan yang lebih terintegrasi serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar tim proyek. Selain itu, Perseroan juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi guna mendukung keberlanjutan implementasi BIM dan memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital di sektor konstruksi.

Komitmen Perseroan dalam penerapan BIM tercermin dari berbagai proyek yang telah dijalankan. Secara kumulatif, sejak tahun 2016 hingga 2024, Perseroan telah mengimplementasikan BIM pada sebanyak 53 proyek dengan beragam tipe dan tingkat kompleksitas, sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek.

Beberapa proyek utama yang telah mengadopsi *Building Information Modeling* (BIM) antara lain Jakarta International Stadium (JIS), Grha Pertamina Jakarta, Pelindo Office Surabaya, Pasar Rakyat Pariaman, UGM Paket 3, Bank Indonesia Palangkaraya, Hotel Domestik Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Gedung SGLC & ERIC Kampus UGM, Dhoho International Airport, Gedung Bio Farma Bandung, serta berbagai proyek lainnya. Selain itu, penerapan BIM juga telah dilakukan pada sejumlah proyek berskala besar dengan nilai kontrak di atas Rp1,0 triliun, di antaranya Jakarta International Stadium (JIS) senilai Rp1,89 triliun pada tahun 2019, Bandara Internasional Dhoho Kediri senilai Rp1,79 triliun pada tahun 2022, serta Rusun Paspampres IKN senilai Rp1,63 triliun pada tahun 2023.

Penerapan BIM pada berbagai proyek tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi perencanaan serta pelaksanaan konstruksi. Pemanfaatan teknologi digital ini sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di industri konstruksi yang semakin kompetitif dan dinamis.

BUILDING INFORMATION MODELING IMPLEMENTATION

As part of its technology development and innovation strategy, the Company continuously optimizes the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration at every stage of project implementation. BIM implementation has been integrated since the tender phase to strengthen the Company's competitiveness in the project acquisition process, including through the presentation of digital models and supporting tools in tender beauty contests.

In its implementation, the Company utilizes various supporting technologies, such as Virtual Reality (VR) to provide immersive simulations of the project environment, Augmented Reality (AR) to display interactive digital mockups for a more comprehensive understanding of the design, and the BIMx application, which enables real-time visualization of construction designs via mobile devices. The use of these technologies supports improved design presentation quality, strengthens field coordination, and encourages more effective decision-making.

Throughout 2025, the Company successfully implemented BIM comprehensively across all projects under its management, supporting a more integrated planning and implementation process and enhancing effective coordination between project teams. Furthermore, the Company is also focusing on technology-based human resource development to support the continued implementation of BIM and ensure workforce readiness for digital transformation in the construction sector.

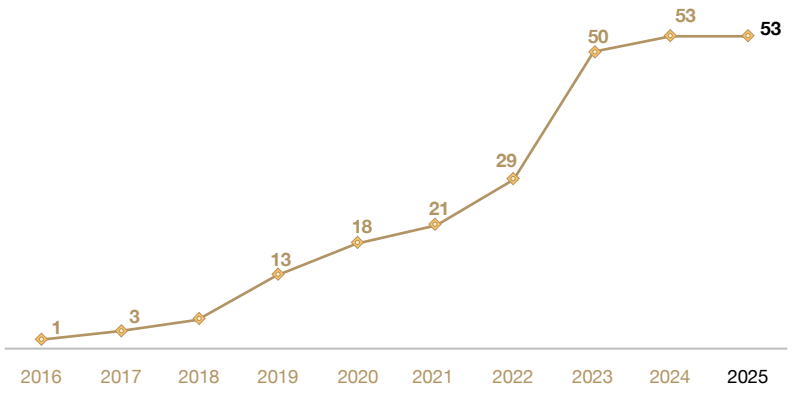
The Company's commitment to implementing BIM is reflected in a number of projects being handled. Cumulatively, from 2016 to 2024, the Company has implemented BIM in 53 projects of varying types and levels of complexity, tailored to the characteristics of each project.

Several key projects that have adopted Building Information Modeling (BIM) include Jakarta International Stadium (JIS), Grha Pertamina Jakarta, Pelindo Office Surabaya, Pasar Rakyat Pariaman, Gadjah Mada University Package 3, Bank Indonesia Palangkaraya, Terminal 3 Domestic Hotel at Soekarno-Hatta International Airport, SGLC & ERIC Building at Gadjah Mada University Campus, Dhoho International Airport, Bio Farma Building in Bandung, and various other projects. Furthermore, BIM has been implemented in several large-scale projects with contract values exceeding Rp1.0 trillion, including Jakarta International Stadium (JIS) worth Rp1.89 trillion in 2019, Dhoho International Airport in Kediri worth Rp1.79 trillion in 2022, and IKN Paspampres Flats worth Rp1.63 trillion in 2023.

The implementation of BIM in these various projects reflects the Company's commitment to improving the effectiveness, transparency, and accuracy of construction planning and implementation. This utilization of digital technology also strengthens the Company's competitiveness in the increasingly competitive and dynamic construction industry.

Implementasi BIM di Proyek 2016-2025
BIM Implementation in Projects in 2016-2025

(Jumlah Proyek) | (Number of Projects)



PENERAPAN *BUILDING INFORMATION MODELING* (BIM)

Sebagai bagian dari transformasi digital di industri konstruksi, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan Building Information Modeling (BIM) guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kolaborasi pada setiap tahapan proyek. Penerapan BIM memungkinkan integrasi data yang lebih komprehensif, visualisasi yang lebih detail, serta perencanaan yang lebih matang dalam proses konstruksi, sehingga mendukung penyelesaian proyek yang berkualitas dan tepat waktu.

Pada tahun 2025, Perseroan terus memperkuat implementasi BIM dalam pelaksanaan proyek sebagai bagian dari upaya peningkatan kapabilitas digital dan daya saing usaha. Meskipun pada tahun pelaporan ini Perseroan tidak menerima penghargaan terkait penerapan BIM, Perseroan tetap berkomitmen untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi tersebut secara berkelanjutan guna mendukung kinerja operasional yang lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan kegiatan benchmarking secara khusus terkait implementasi Building Information Modeling (BIM). Meskipun demikian, Perseroan tetap melakukan pemantauan dan pengembangan internal atas penerapan BIM sebagai bagian dari upaya peningkatan kapabilitas digital dan efektivitas pelaksanaan proyek.

Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan BIM, termasuk melalui peluang benchmarking dengan praktik terbaik di industri guna mendukung peningkatan kinerja operasional dan daya saing Perseroan

IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

As part of the digital transformation in the construction industry, the Company continuously develops and optimizes the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration at every stage of the project. The implementation of BIM enables more comprehensive data integration, more detailed visualization, and more thorough planning throughout the construction process, thus supporting quality and timely project completion.

In 2025, the Company continued to strengthen the implementation of BIM in project execution as part of its efforts to improve digital capabilities and business competitiveness. Although the Company did not receive any awards related to BIM implementation in this reporting year, the Company remains committed to continuously developing the use of this technology to support more effective and efficient operational performance.

In 2025, the Company did not conduct any specific benchmarking activities related to the implementation of Building Information Modeling (BIM). However, the Company continues to monitor and develop its BIM implementation internally as part of its efforts to improve digital capabilities and effectiveness of project execution.

Going forward, the Company is committed to continuously improving its BIM implementation, including through benchmarking opportunities with industry best practices to support operational performance and competitiveness.

INVESTASI TEKNOLOGI *BUILDING INFORMATION MODELING*

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan penerapan *Building Information Modeling* (BIM). Teknologi ini memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan proses perencanaan, desain, konstruksi, serta manajemen proyek secara terintegrasi dan presisi, sejalan dengan strategi transformasi digital Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak mengalokasikan anggaran secara spesifik untuk pengembangan teknologi BIM. Meskipun demikian, pengembangan dan penerapan BIM tetap dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan operasional dan program pengembangan teknologi Perseroan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur digital guna mendukung implementasi BIM yang lebih efektif.

RENCANA PENGEMBANGAN *BUILDING INFORMATION MODELING* KE DEPAN

Sebagai bagian dari strategi transformasi digital di industri konstruksi, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan penerapan *Building Information Modeling* (BIM) guna meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kolaborasi pada setiap tahapan proyek. Pada tahun 2025, Perseroan merencanakan penguatan integrasi BIM dengan berbagai teknologi konstruksi terkini, termasuk pemanfaatan drone, pemindaian laser tiga dimensi (3D), serta kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk meningkatkan akurasi pengumpulan dan pengolahan data lapangan. Selain itu, penerapan konsep *lean construction* akan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta mempercepat penyelesaian proyek dengan tetap menjaga kualitas hasil akhir.

Perseroan juga akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan mitra strategis, guna mendukung keberlanjutan dan peningkatan efisiensi operasional. Sejalan dengan agenda digitalisasi tersebut, Perseroan merencanakan peningkatan tingkat kematangan integrasi BIM Level 2 dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengoptimalkan efektivitas perencanaan dan pengendalian proyek. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran proyek melalui sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data *real-time*.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan sumber daya, memperkuat koordinasi antar tim proyek, serta memastikan pengelolaan proyek yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya proyek-proyek yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Perseroan dalam menghadapi tantangan industri konstruksi di masa depan.

INVESTMENT IN BUILDING INFORMATION MODELING TECHNOLOGY

As part of the Company's commitment to adopting technology to improve operational efficiency and effectiveness, the Company is continuously developing the implementation of Building Information Modeling (BIM). This technology plays a strategic role in optimizing the planning, design, construction, and project management processes in an integrated and precise manner, in line with the Company's digital transformation strategy.

In 2025, the Company did not allocate a specific budget for BIM technology development. However, BIM development and implementation will continue to be integrated into the Company's operational activities and technology development programs. These efforts include optimizing software utilization, enhancing human resource capabilities, and strengthening digital infrastructure to support more effective BIM implementation.

FUTURE BUILDING INFORMATION MODELING DEVELOPMENT PLAN

As part of its digital transformation strategy in the construction industry, the Company is continuously developing the implementation of Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency, accuracy, and collaboration at every stage of the project. In 2025, the Company plans to strengthen the integration of BIM with various advanced construction technologies, including the use of drones, three-dimensional (3D) laser scanning, and artificial intelligence to enhance the accuracy of site data collection and processing. Furthermore, the implementation of lean construction concepts will be a key focus in efforts to increase productivity, reduce waste, and accelerate project completion while maintaining the quality of the final result.

The Company will also strengthen collaboration with all stakeholders, including customers and strategic partners, to support sustainability and improve operational efficiency. In line with this digitalization agenda, the Company plans to increase the maturity level of BIM Level 2 integration with its Enterprise Resource Planning (ERP) system to optimize the effectiveness of project planning and control. This integration aims to ensure adherence to project schedules and budgets through a more structured system based on real-time data.

Through the use of this technology, the Company is committed to improving the accuracy of resource management, strengthening coordination between project teams, and ensuring more transparent and accountable project management. This step is expected to encourage the realization of innovative, efficient, and sustainable projects, in line with the Company's vision of facing future challenges in the construction industry.

Manajemen Pengetahuan dan Inovasi
Knowledge Management and Innovation



MANAJEMEN PENGETAHUAN

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan kinerja bisnis, Perseroan mengembangkan sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan proses transfer pengetahuan yang berkelanjutan serta penerapan praktik terbaik (*best practices*) secara konsisten di seluruh lini bisnis Perseroan.

Perseroan menerapkan Knowledge Management WIKA Gedung (KMWG) sebagai sistem manajemen pengetahuan yang bertujuan untuk mengelola, mendokumentasikan, dan mendistribusikan informasi strategis serta pengalaman kerja kepada seluruh karyawan. KMWG Online, yang diluncurkan pada 1 April 2020, berperan sebagai platform utama dalam mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Melalui KMWG, Perseroan memastikan penerapan praktik terbaik dalam konstruksi bangunan gedung, mendorong terciptanya inovasi, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional di seluruh proyek dan unit kerja.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

As part of the Company's commitment to improving the quality of its human capital and optimizing business performance, the Company has developed a structured and integrated knowledge management system. This system is designed to ensure continuous knowledge transfer and the consistent implementation of best practices across all of the Company's lines of business.

The Company has implemented Knowledge Management WIKA Gedung (KMWG) as a knowledge management system aimed at managing, documenting, and distributing strategic information and work experience to all employees. KMWG Online, launched on April 1, 2020, serves as the primary platform for supporting human capital competency development. Through KMWG, the Company ensures the implementation of best practices in building construction, encourages innovation, and improves operational effectiveness and productivity across all projects and work units.

Selain menyediakan akses terhadap Prosedur, Instruksi Kerja, Karya Inovasi, dan Artikel, KMWG Online juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi bagi karyawan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan masukan guna memperkaya kualitas konten yang tersedia. Selanjutnya, pada bulan September 2020, Perseroan mengembangkan WG Learning, yaitu aplikasi *e-learning* yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan program pelatihan bagi karyawan yang ditunjuk. Melalui WG Learning, pelatihan dapat diselenggarakan secara serentak di berbagai lokasi tanpa memerlukan pertemuan tatap muka, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran.

In addition to providing access to Procedures, Work Instructions, Innovation Works, and Articles, KMWG Online also serves as a collaborative platform for employees to share knowledge and provide input to enhance the quality of available content. Furthermore, in September 2020, the Company developed WG Learning, an e-learning application designed to facilitate the implementation of training programs for designated employees. Through WG Learning, training can be conducted simultaneously in various locations without the need for face-to-face meetings, thereby increasing the efficiency and effectiveness of the learning process.

Berbagai informasi yang diperbarui dalam KMWG, termasuk Prosedur, Instruksi Kerja, serta Karya Inovasi, disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui media komunikasi internal, antara lain *blast* WhatsApp, guna memastikan kemudahan akses dan pemanfaatan informasi. Melalui mekanisme ini, inovasi dan pengetahuan yang dikembangkan pada satu unit kerja dapat direplikasi dan diterapkan pada unit kerja lainnya, sehingga mendorong peningkatan berkelanjutan serta pemerataan pengetahuan di seluruh organisasi.

Various updated information in the KMWG, including Procedures, Work Instructions, and Innovation Projects, is disseminated to all employees through internal communication channels, including WhatsApp blasts, to ensure easy access and utilization of information. Through this mechanism, innovations and knowledge developed in one work unit can be replicated and applied to other work units, thereby encouraging continuous improvement and equitable knowledge sharing throughout the organization.

Sebagai bagian dari strategi penguatan manajemen pengetahuan, Perseroan juga menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi karyawan, antara lain:

1. ***Knowledge Sharing***

   Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam membangun budaya pembelajaran dan meningkatkan kapabilitas internal, program *Knowledge Sharing* diselenggarakan di tingkat perusahaan untuk memperkuat proses transfer pengetahuan serta penerapan *best practices* di seluruh unit kerja. Program ini difokuskan pada bidang engineering, quality, dan safety, yang memiliki peran strategis dalam menjaga standar mutu dan keselamatan pada setiap proyek.

   Melalui program *Knowledge Sharing*, Perseroan menyediakan forum bagi karyawan untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta inovasi yang telah terbukti efektif dalam pelaksanaan proyek. Program ini juga berfungsi sebagai sarana diskusi dan kolaborasi lintas unit kerja, sehingga solusi terbaik dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara lebih luas di lingkungan Perseroan.

As part of its knowledge management strengthening strategy, the Company also conducts a number of employee competency development programs, including:

1. **Knowledge Sharing**

   As a manifestation of the Company's commitment to building a learning culture and enhancing internal capabilities, a Knowledge Sharing program is held at the corporate level to strengthen the knowledge transfer process and the implementation of best practices across all work units. This program focuses on engineering, quality, and safety, which play a strategic role in maintaining quality and safety standards on every project.

   Through the Knowledge Sharing program, the Company provides a forum for employees to share insights, experiences, and innovations that have proven effective in project implementation. This program also serves as a platform for discussion and collaboration across work units, allowing the best solutions to be adapted and implemented more broadly within the Company.





Adapun pelaksanaan *Knowledge Sharing* di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The Knowledge Sharing organized in 2025 is as follows:

No.	Tema Knowledge Sharing Theme of Knowledge Sharing	Tanggal Pelaksanaan Date
1.	Penerapan Building Information Modeling (BIM) pada proyek Konstruksi PT.Wika Gedung Implementation of Building Information Modeling (BIM) in PT. Wika Gedung Construction Project	23 Maret 2025 March 23, 2025
2.	IAMKRI (Ikatan Ahli Manajemen Konstruksi Ramping) IAMKRI (Association of Lean Construction Management Experts)	26 April 2025 April 26, 2025
3.	Smart Work Start Here (Unlocking AI experience with Intel)	20 Agustus 2025 August 20, 2025
4.	Future Build Now, Kolaborasi Cerdas bersama Archicad Future Build Now, Smart Collaboration with ArchiCAD	17 September 2025 September 17, 2025

Melalui pelaksanaan program tersebut, Perseroan memastikan seluruh insan perusahaan memperoleh akses terhadap informasi dan praktik terbaik yang senantiasa diperbarui. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat penerapan standar operasional, serta mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis Perseroan.

Through these programs, the Company ensures that all of its employees have access to continuously updated information and best practices. This initiative is expected to improve performance quality, strengthen the implementation of operational standards, and encourage sustainable innovation across all of the Company's lines of business.

2. *Benchmarking Quality*

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan standardisasi, Perseroan melaksanakan program Benchmarking Quality untuk menetapkan tolok ukur standar mutu yang berlaku di lingkungan Perseroan. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi unit kerja yang telah berhasil menerapkan standar kualitas secara optimal, sehingga dapat dijadikan referensi dan praktik terbaik (*best practices*) bagi unit kerja lainnya dalam meningkatkan kinerja serta efektivitas operasional.

Pelaksanaan program Benchmarking Quality Excellence dikoordinasikan oleh QSHE Division dengan melibatkan fungsi *Quality Assurance/Quality Control* (QA/QC) serta fungsi Produksi dari masing-masing unit kerja. Melalui program ini, Perseroan memastikan bahwa praktik terbaik di bidang kualitas dapat dibagikan, dipelajari, dan diterapkan secara konsisten di seluruh proyek guna mendukung pencapaian standar mutu yang tinggi dan berkelanjutan. Kegiatan benchmarking dilaksanakan baik pada proyek yang sedang berjalan maupun melalui kunjungan ke area *mock-up* di WIKA Pratama Learning Center (WLC).

2. Quality Benchmarking

As part of its quality improvement and standardization efforts, the Company is carrying out a Quality Benchmarking program to establish benchmarks for applicable quality standards within the Company. This program aims to identify work units that have successfully implemented quality standards optimally, in order to serve as references and best practices for other work units to improve performance and operational effectiveness.

The Quality Excellence Benchmarking program is coordinated by the QSHE Division, involving the Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) and Production functions from each work unit. Through this program, the Company ensures that best practices in quality can be shared, learned, and consistently applied across all projects to support the achievement of high and sustainable quality standards. Benchmarking activities are carried out both on ongoing projects and through visits to mock-up areas at WIKA Pratama Learning Center (WLC).

3. *Quality Control Circle (QCC)*

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan proses kerja, Perseroan juga mengimplementasikan program *Quality Control Circle* (QCC) sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Program ini dilaksanakan melalui pembentukan kelompok kecil yang terdiri dari 3–7 orang dengan bidang pekerjaan yang serupa, yang secara berkala melakukan diskusi dan kolaborasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja.

3. Quality Control Circle (QCC)

To improve quality and optimize work processes, the Company also implements the Quality Control Circle (QCC) program as part of its continuous improvement efforts. This program is conducted through the formation of small groups of 3–7 people with similar work fields, who regularly discuss and collaborate to identify, analyze, and resolve issues related to work and the work environment.

Pelaksanaan *Quality Control Circle* (QCC) bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kepedulian dan keterlibatan karyawan terhadap kemajuan Perseroan;
b. Menyediakan wadah bagi karyawan untuk menyalurkan ide dan kreativitas dalam pengembangan inovasi proses kerja;
c. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (*problem-solving skills*); dan
d. Mendorong kerja sama tim serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan (*leadership*).

Melalui proses diskusi, analisis, dan perbaikan yang berkelanjutan, hasil pelaksanaan QCC selanjutnya dipresentasikan dalam Konvensi QCC sebagai sarana berbagi solusi inovatif serta penerapan praktik terbaik guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional di lingkungan Perseroan. Pada Konvensi QCC Tingkat Nasional (TKMPN) 2024 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 2–6 Desember 2024, Perseroan mengikutsertakan dua tim QCC, yaitu QCC Modular yang berhasil meraih penghargaan Gold dan QCC Vertikal yang meraih penghargaan Platinum. WG tidak mengikuti Konvensi QCC Nasional 2025.

4. *Knowledge Management Award* (KM *Award*)

Knowledge Management Award (KM Award) merupakan penghargaan yang diberikan kepada karyawan atau pengguna yang paling aktif dalam mengakses dan berkontribusi pada portal KMWG *Online*, serta berperan aktif dalam proses *knowledge creation*. Setiap pengguna yang secara aktif mengakses, menulis, dan memberikan umpan balik terhadap artikel yang dipublikasikan akan memperoleh poin yang diakumulasi secara tahunan.

Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif karyawan dalam memperoleh, mengelola, dan menyebarluaskan informasi terkini terkait Sistem Manajemen WIKA Gedung (SMWG), sehingga pengetahuan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan merata di seluruh unit kerja.

5. BRO *Project Award*

Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kolaborasi dan standardisasi di seluruh proyek, Perseroan mengembangkan BRO *Project Award*, yaitu program yang mengadopsi konsep *Sister City*. Konsep ini mendorong kolaborasi antara dua proyek dengan karakteristik yang berbeda untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik guna mempercepat penerapan standar perusahaan secara konsisten.

Setiap proyek memiliki keunikan dan keunggulan yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi proyek lainnya. Melalui *BRO Project Award*, Perseroan mendorong terwujudnya sinergi antar proyek dalam rangka mempercepat standarisasi operasional, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan penerapan standar perusahaan secara berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, program BRO Project Award telah diselenggarakan pada tanggal 10 September 2025 sebagai wujud komitmen Perseroan dalam membangun ekosistem kerja yang kolaboratif serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kinerja proyek.

The Quality Control Circle (QCC) aims to:
a. Increase employee awareness and involvement in the Company's progress;
b. Provide a forum for employees to channel ideas and creativity in developing innovative work processes;
c. Develop problem-solving skills; and
d. Encourage teamwork and leadership skills.

Through this process of discussion, analysis, and continuous improvement, the results of QCC implementation are then presented at the QCC Convention as a means of sharing innovative solutions and implementing best practices to improve operational effectiveness and productivity within the Company. At the 2024 National QCC Convention (TKMPN) held in Bali from December 2–6, 2024, the Company submitted two QCC teams: the Modular QCC, which won the Gold award, and the Vertical QCC, which won the Platinum award. WG did not attend the 2025 National QCC Convention.

4. Knowledge Management Award (KM Award)

The Knowledge Management Award (KM Award) is an award given to employees or users who are most active in accessing and contributing to the KMWG Online portal and playing an active role in the knowledge creation process. Every user who actively accesses, writes, and provides feedback on published articles will earn points that are accumulated annually.

This award aims to encourage active employee participation in obtaining, managing, and disseminating the latest information related to WIKA Gedung Management System (SMWG), so that available knowledge can be utilized optimally and equitably across all work units.

5. BRO Project Award

As part of its initiative to enhance collaboration and standardization across projects, the Company developed the BRO Project Award, a program that adopts the Sister City concept. This concept encourages collaboration between two projects with different characteristics to share knowledge, experiences, and best practices to accelerate the consistent implementation of company standards.

Each project has unique characteristics and strengths that can serve as learning resources for other projects. Through the BRO Project Award, the Company encourages synergy between projects to accelerate operational standardization, increase efficiency, and optimize sustainable implementation of company standards.

Throughout 2025, the BRO Project Award program was held on September 10, 2025 as a manifestation of the Company's commitment to building a collaborative work ecosystem oriented towards improving project quality and performance.

INOVASI YANG DILAKUKAN

Inovasi terus menjadi pilar utama dalam mendukung strategi pertumbuhan Perseroan di sektor konstruksi. Sepanjang tahun berjalan, Perseroan berfokus pada pengembangan solusi inovatif serta penerapan teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Berbagai inisiatif inovatif tersebut mencakup penerapan metode konstruksi yang lebih ramah lingkungan dan efisien waktu, serta penguatan ekosistem digital yang terintegrasi di seluruh proses bisnis.

Selain itu, Perseroan secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas operasional, antara lain melalui penggunaan material bangunan yang mendukung konsep bangunan hijau serta upaya pengurangan limbah konstruksi. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perseroan tidak hanya merespons dinamika dan kebutuhan pasar yang terus berkembang, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong transformasi industri konstruksi menuju masa depan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Perseroan secara berkelanjutan mendorong seluruh karyawan untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya mempermudah pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, kualitas hasil kerja, serta daya saing Perseroan. Implementasi inovasi tersebut dilakukan baik di lingkungan proyek maupun di kantor pusat, sehingga memberikan dampak positif yang merata di seluruh aktivitas bisnis Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif inovasi, antara lain sebagai berikut:

INNOVATION

Innovation continues to be a key pillar supporting the Company's growth strategy in the construction sector. Throughout the year, the Company focused on developing innovative solutions and implementing the latest technology to improve operational efficiency, strengthen competitiveness, and create added value for all stakeholders. These innovative initiatives include the implementation of more environmentally friendly and time-efficient construction methods, as well as strengthening an integrated digital ecosystem across all business processes.

Furthermore, the Company consistently integrates sustainability principles into its operational activities, including the use of building materials that support green building concepts and efforts to reduce construction waste. Through these initiatives, the Company not only responds to evolving market dynamics and needs but also plays an active role in driving the transformation of the construction industry towards a more innovative and sustainable future.

The Company continuously encourages all employees to produce innovations that not only simplify work but also improve operational efficiency, the quality of work results, and the Company's competitiveness. These innovations are carried out both within the project environment and at the head office, resulting in a positive impact across all of the Company's business activities.

Throughout 2025, the Company has implemented various innovation initiatives, including the following:

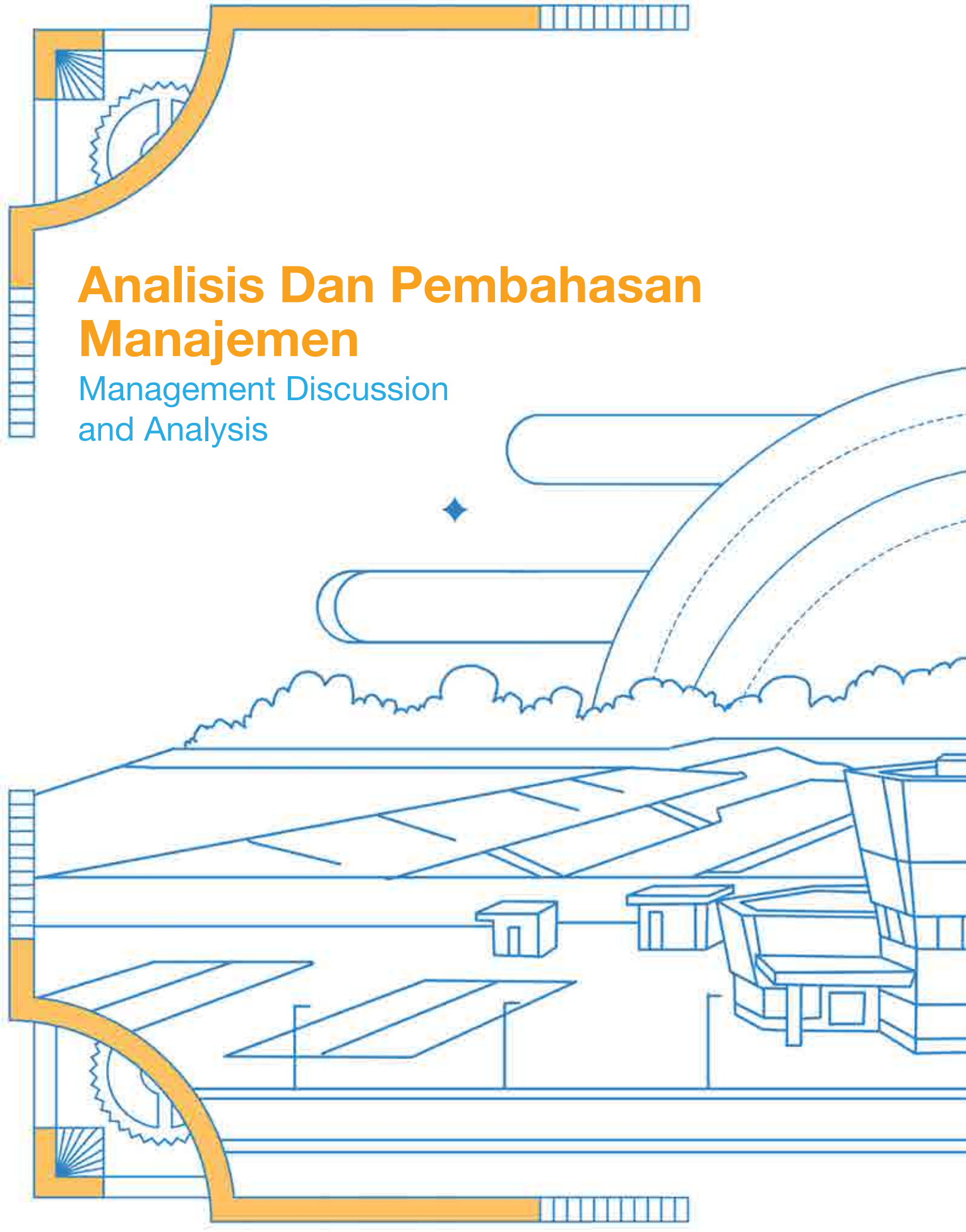
No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
1	Februari February	VE DPT Secant Pile menjadi DPT MSE Wall pada Tanah Berlereng VE: Converting DPT Secant Piles into DPT MSE Walls on Sloping Land	Proyek Kampus 2 Polman Bandung Polman Bandung Campus 2 Project
2	April April	QCC Sinergi - Mengoptimalkan Kualitas Nilai QPASS > 85% dari Hasil Pengecoran Balok & Plat dengan Inovasi Penampungan Serbuk Gergaji Potongan Bekisting QCC Sinergi - Optimizing Quality with a QPASS Value of >85% for Beam & Plate Casting Results with an Innovation in Formwork Sawdust Collection	Proyek RS UPT Vertikal UPT Vertikal Hospital Project
3	April April	VE Perubahan Sistem Angkur Baja menjadi Embedded pada Kolom Bulat VE: Changing the Steel Anchor System to Embedded in Round Columns	Proyek Pembangunan Gedung Fasilitas Pendukung FSTSO TLT Tower 1 FSTSO TLT Tower 1 Supporting Facilities Building Construction Project
4	April April	Energy Container as Fuel Efficiency	Proyek Depot Kas Utama Wilayah Timur (DKUT) Gresik Gresik Eastern Region Main Cash Depot (DKUT) Project
5	April April	Penerapan SMKK pada Pekerjaan Berisiko Tinggi Implementation of SMKK in High-Risk Work	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
6	Mei May	Inovasi Pembuatan Alat Perata Cor (*Screeder*) Innovation in the Manufacture of Concrete Leveling Equipment (Screeder)	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
7	Juni June	Human Capital Information Center	Human Capital Division

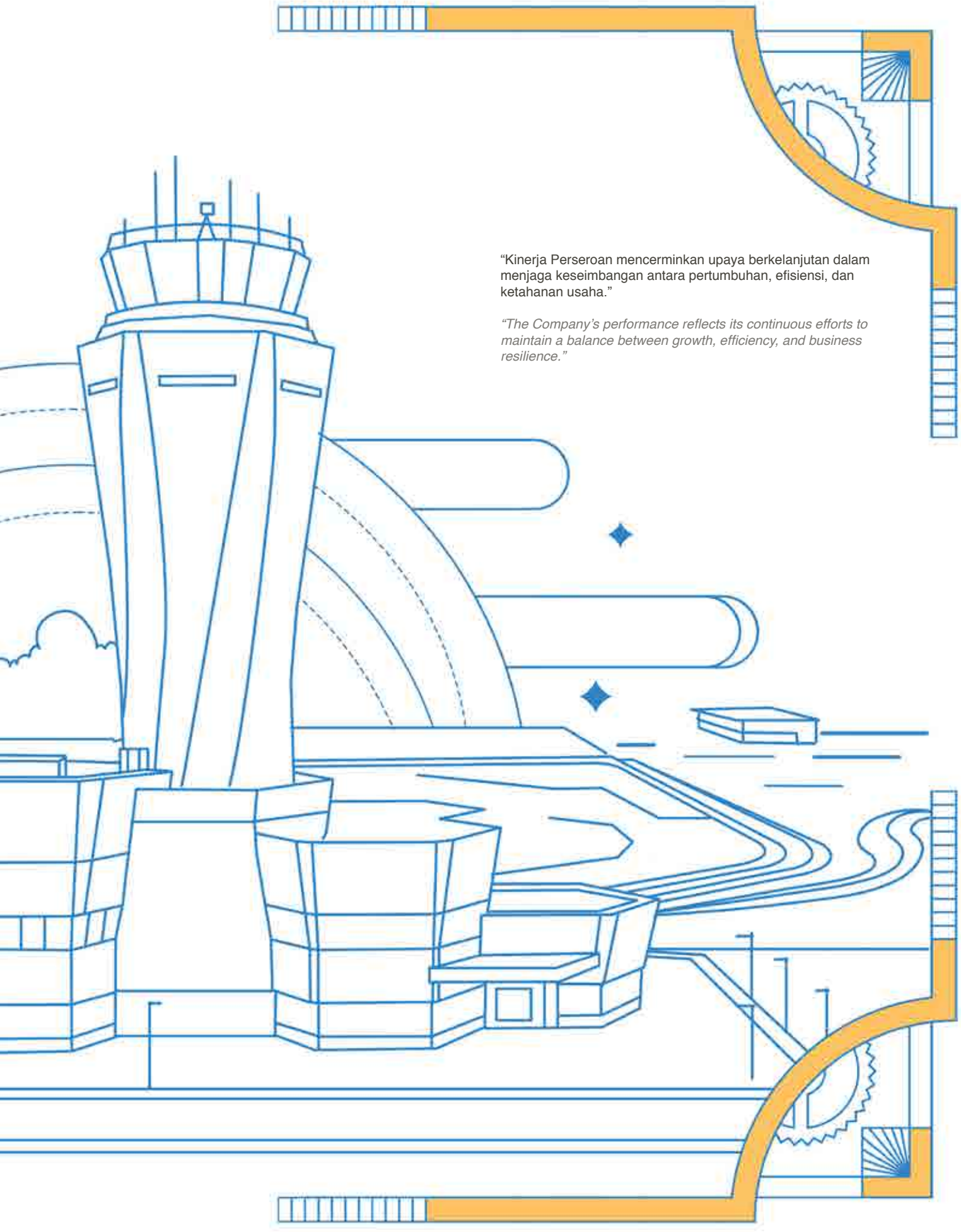
No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
8	Juni June	Cleanroom Construction	Proyek Biofarma Biofarma Project
9	Juni June	Metode Kerja Kolom Melengkung Curved Column Working Method	Proyek Labtek XV ITB Bandung Labtek XV ITB Bandung Project
10	Juni June	QCC Treatment Permukaan Beton pada Alumunium Formwork QCC Concrete Surface Treatment on Aluminum Formwork	Proyek Skyhouse Alam Sutra Skyhouse Alam Sutra Project
11	Juli July	VE Desain Pekerjaan Kaca Facade melalui Re-Analysis dan Re-Modelling mengacu Poin Pemenuhan Perencanaan dan Pelaksanaan VE Design of Facade Glass Work through Re-Analysis and Re-Modeling Referring to Planning and Implementation Compliance Points	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
12	Agustus August	Implementasi Bangunan Gedung Cerdas Proyek Kemenko 1 Implementation of Smart Building, Coordinating Ministry 1 Project	Proyek Kemenko 1 IKN IKN Coordinating Ministry 1 Project
13	Agustus August	Inovasi Safety Railing Modular	Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Bersama V, Universitas Muhammadiyah Malang Joint Lecture Building V Construction Project, University of Muhammadiyah Malang
14	Agustus August	Metode Pengetasan Friction Pendulum Friction Pendulum Testing Method	Proyek Pengembangan Sistem Operasional INATEWS Jakarta dan Bali INATEWS Operational System Development Project for Jakarta and Bali
15	Agustus August	Metode Pengetesan Lead Rubber Bearing Lead Rubber Bearing Testing Method	Proyek Pengembangan Sistem Operasional INATEWS Jakarta dan Bali INATEWS Operational System Development Project for Jakarta and Bali
16	Agustus August	Menurunkan Harga Produk Modular dengan Mengembangkan Produk Modular Lite (MOLI) Reducing Modular Product Prices by Developing Modular Lite (MOLI) Products	Modular
17	Agustus August	Inovasi Baja Minaret Steel Minaret Innovation	WPG
18	September September	QCC Integrasi Data Pekerjaan Area Hunian dengan Format Completion ABC dan Raport Merah QCC Integrating Residential Area Work Data with ABC Completion Format and Red Report Cards	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
19	September September	QCC Standarisasi Pinjam Kunci Unit sebagai Peningkatan Pengamanan dna Kebersihan Unit Rusun Paspampres QCC Standardization of Unit Key Borrowing to Improve Security and Cleanliness of Presidential Security Guard Apartment Units	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
20	September September	QCC Menurunkan Harga Produk Modular dengan Mengembangkan Produk WG Flatpack Thin (WGFT) di Produk Modular QCC Reducing Modular Product Prices by Developing WG Flatpack Thin (WGFT) Products in Modular Products	Modular
21	Oktober October	QCC Bak Rendam Sampel Beton Sistem Portable QCC Portable Concrete Sample Soaking Tank	Proyek Stadion Teladan Medan Medan's Teladan Stadium Project
22	Oktober October	Audio Visual Ruang Rapat Audio Visual for Meeting Rooms	Proyek Rusun Paspampres IKN IKN Presidential Security Guard Apartment Project
23	Oktober October	Inovasi Dashboard Tower Undip Undip Tower Dashboard Innovation	Proyek Undip Tembalang Undip Tembalang Project
24	Oktober October	Modular Volumetrik - Kajian Metode Konstruksi Modular Volumetrik dari Berbagai Sisi Volumetric Modular - A Study of Volumetric Modular Construction Methods from Various Perspectives	Modular
25	Oktober October	Inovasi Urinoir Portable untuk Tower Crane Portable Urinal Innovation for Tower Cranes	Proyek Undip Tembalang Undip Tembalang Project
26	November November	Meningkatkan Efisiensi Pelaksanaan Pekerjaan Atap Khazanah dengan Metode Kerja Improving the Efficiency of Khazanah Roofing Work with Work Methods	Proyek DKUT Gresik DKUT Gresik Project
27	November November	Penggunaan Alumunium Extrusion sebagai Sirip-Sirip Bangunan Pengganti Material Alumunium Composite Panel Using Aluminum Extrusions as Building Fins to Replace Aluminum Composite Panels	Proyek Pembangunan Gedung Kantor Area Gresik Modular Gresik Modular Area Office Building Construction Project

No	Bulan Month	Judul Inovasi Innovation Title	Karya Inovasi Innovation Works
28	Desember December	Penggunaan Aplikasi Firecek untuk Inspeksi APAR pada Proyek Divisi Operasi Using the Firecek Application for Fire Extinguisher Inspections in the Operations Division Project	Divisi Operasi Operations Division
29	Desember December	Monitoring Dashboard Divisi Transformasi Monitoring the Transformation Division Dashboard	Divisi Transformasi dan Pengembangan Portofolio Bisnis Business Transformation and Portfolio Development Division
30	Desember December	Pemanfaatan Cubicost dalam Membangun Big Data (AHSP & Harga Satuan Saumber Daya) Utilizing Cubicost in Building Big Data (AHSP & Resource Unit Prices)	Divisi Transformasi dan Pengembangan Portofolio Bisnis Business Transformation and Portfolio Development Division
31	Desember December	Optimalisasi Dashboard Proyek Berbasis Microsoft Project Optimizing the Microsoft Project-Based Project Dashboard	Divisi Transformasi dan Pengembangan Portofolio Bisnis Business Transformation and Portfolio Development Division
32	Desember December	DIGITIZE : Optimalisasi Monitoring TPS Division DIGITIZE: Optimizing the TPS Division Monitoring	Divisi Transformasi dan Pengembangan Portofolio Bisnis Business Transformation and Portfolio Development Division

Analisis Dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





"Kinerja Perseroan mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, dan ketahanan usaha."

"The Company's performance reflects its continuous efforts to maintain a balance between growth, efficiency, and business resilience."

Tinjauan Perekonomian
Economic Overview



Gereja Basilika IKN I IKN Basilica Church

TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global sepanjang tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang masih terbatas dan cenderung moderat di tengah proses normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju. Inflasi global secara umum melanjutkan tren penurunan dibandingkan periode puncaknya pada 2022–2023, meskipun di beberapa negara masih berada di atas target bank sentral akibat tekanan harga jasa dan energi.

Volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi sepanjang 2025, dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat, ketegangan geopolitik yang berlanjut di sejumlah kawasan, serta fragmentasi perdagangan global yang semakin nyata. Pergeseran pola pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia dan emerging markets terus berlangsung, namun dibayangi risiko suku bunga riil yang masih relatif tinggi, beban utang negara berkembang, serta perubahan arus investasi global menuju aset yang dianggap lebih aman *(safe haven)*.

Transformasi digital lintas negara berlangsung semakin cepat, mendorong efisiensi dan produktivitas, namun sekaligus meningkatkan risiko operasional, termasuk risiko siber *(cyber risk)*

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

Global economic growth throughout 2025 showed limited improvement and remained moderate amid the normalization of monetary policies across advanced economies. Global inflation generally continued its downward trend compared to its peak in 2022–2023, although remained above central bank targets in several countries due to persistent pressures from services and energy prices.

Volatility in global financial markets remained high throughout 2025, influenced by the dynamics of fiscal and monetary policies in the United States, ongoing geopolitical tensions in a number of regions, and increasing fragmentation in global trade. The shift in global economic growth toward Asia and emerging markets continued, although overshadowed by risks related to relatively high real interest rates, debt burdens in developing countries, and shifts in global investment flows toward safer assets (safe haven).

Cross-border digital transformation is accelerating, boosting efficiency and productivity, but simultaneously increasing operational risks, including cyber risk and technology-based supply chain

dan gangguan rantai pasok berbasis teknologi. Di sisi lain, dampak perubahan iklim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem menjadi faktor struktural yang memengaruhi ketahanan ekonomi global, khususnya pada sektor pangan, energi, dan asuransi.

disruptions. Meanwhile, the impact of climate change and the increasing frequency of extreme weather events are structural factors impacting global economic resilience, particularly in the food, energy, and insurance sectors.

Sepanjang tahun 2025, perekonomian Amerika Serikat tetap tumbuh relatif solid, meskipun melambat dibandingkan fase pemulihan pascapandemi, dengan konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama. Kebijakan fiskal ekspansif dan agenda ekonomi Presiden Donald Trump pada periode pemerintahan terbarunya turut memengaruhi dinamika pasar, termasuk ekspektasi inflasi dan arah suku bunga kebijakan Federal Reserve. Sentimen pasar terhadap kebijakan tersebut cenderung beragam memberikan dorongan pada pasar saham domestik AS, namun sekaligus meningkatkan ketidakpastian bagi negara berkembang melalui potensi tekanan nilai tukar dan arus modal keluar.

Throughout 2025, the United States economy continued to grow relatively solidly, although at a slower pace compared to the post-pandemic recovery phase, with domestic consumption remaining the main driver. Expansionary fiscal policy and economic agenda of President Donald Trump during his latest administration also influenced market dynamics, including inflation expectations and the direction of Federal Reserve policy rates. Market sentiment toward these policies was mixed—supporting the U.S. domestic stock market while also increasing uncertainty for emerging markets through potential exchange rate pressures and capital outflows.

Sementara itu, ekonomi Eropa dan Jepang menunjukkan pemulihan yang lebih gradual dengan pertumbuhan yang relatif terbatas akibat lemahnya permintaan domestik dan tekanan sektor manufaktur. Tiongkok mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kombinasi stimulus fiskal dan moneter serta penguatan sektor manufaktur dan ekspor, meskipun masih menghadapi tantangan struktural pada sektor properti dan konsumsi domestik.

Meanwhile, the economies of Europe and Japan experienced more gradual recovery with relatively limited growth due to weak domestic demand and pressure in the manufacturing sector. China maintained its growth momentum through a combination of fiscal and monetary stimulus, as well as strengthening in the manufacturing and export sectors, although continued to face structural challenges in the property sector and domestic consumption.

Kondisi "*higher for longer*" yang sempat mereda pada akhir 2024 kembali menjadi perhatian pasar pada 2025, seiring meningkatnya ekspektasi bahwa suku bunga global akan bertahan pada level yang relatif tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Hal ini mendorong penyesuaian strategi investasi global serta meningkatkan sensitivitas pasar terhadap setiap sinyal kebijakan bank sentral utama dunia.

The "higher for longer" condition, which had briefly eased at the end of 2024, re-emerged as a market concern in 2025, as expectations increased that global interest rates would remain at relatively high levels for longer than previously anticipated. This prompted adjustments in global investment strategies and increased market sensitivity to signals from major central banks.

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025, lanskap ekonomi global ditandai oleh proses transisi menuju stabilitas yang lebih berkelanjutan, namun tetap berada dalam lingkungan risiko yang tinggi dan kompleks, sehingga memerlukan kewaspadaan dan strategi adaptif dari pelaku usaha dan pembuat kebijakan di seluruh dunia

Overall, throughout 2025, the global economic landscape was characterized by a transition process towards more sustainable stability, yet remained within a high-risk and complex environment, requiring vigilance and adaptive strategies from business players and policymakers worldwide.

Memasuki tahun 2026, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global relatif stagnan pada kisaran sekitar 3,0%–3,2% (yoy), mencerminkan proses normalisasi ekonomi global yang berlangsung secara bertahap di tengah risiko suku bunga yang masih tinggi dan ketidakpastian geopolitik yang berlanjut. Pertumbuhan tersebut diperkirakan tetap ditopang oleh kawasan Asia dan beberapa emerging markets, sementara negara maju tumbuh lebih moderat.

Entering 2026, the International Monetary Fund (IMF) projects global economic growth to remain relatively stagnant at around 3.0%–3.2% (yoy), reflecting a gradual normalization process amid persistently high interest rate risks and ongoing geopolitical uncertainties. Growth is expected to continue to be supported by Asia and several emerging markets, while advanced economies will see more moderate growth.

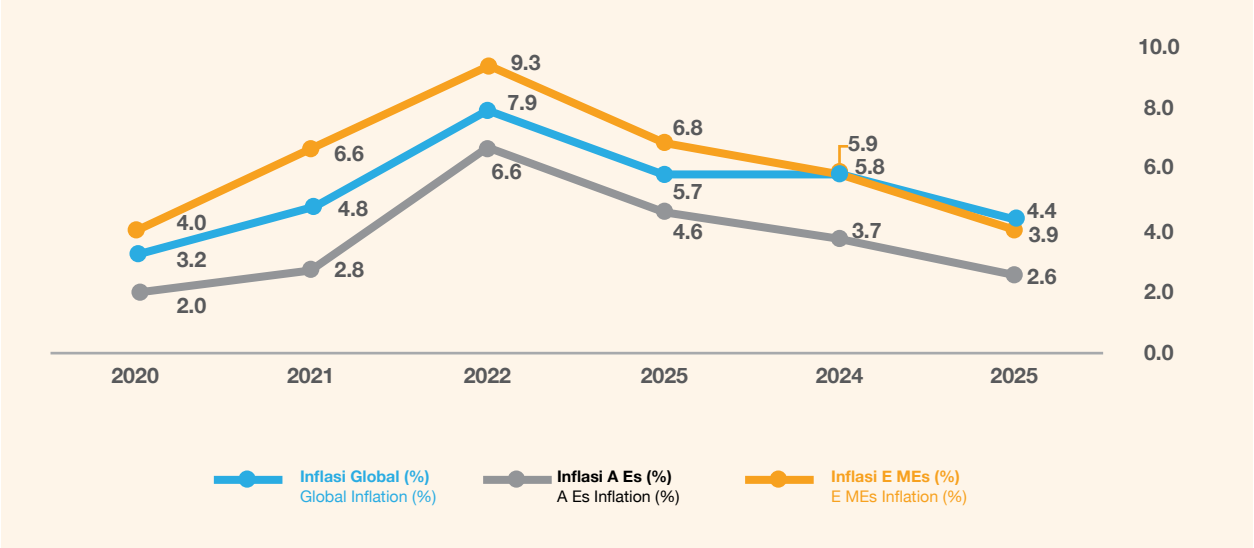
Di sisi lain, kebijakan Presiden Donald Trump yang diumumkan setelah pelantikan periode pemerintahannya dinilai lebih moderat dibandingkan ekspektasi awal pasar, khususnya terkait arah kebijakan perdagangan dan pajak. Meskipun demikian, dinamika kebijakan fiskal, perdagangan, dan hubungan internasional AS tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar keuangan global.

On the other hand, policies announced by President Donald Trump following the inauguration of his administration are considered more moderate than initial market expectations, particularly regarding trade and tax policies. Nevertheless, U.S. fiscal, trade, and international policy dynamics remain key factors influencing global financial market sentiment.

Perkembangan tersebut akan terus menjadi perhatian utama dan dipantau secara berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap stabilitas pasar keuangan global, arus modal internasional, serta prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada periode mendatang.

These developments will continue to be a major concern and closely monitored, given their impact on global financial market stability, international capital flows, and the outlook for global economic growth in the coming periods.

Grafik Inflasi Global
Global Inflation Chart



Sumber/Source: IMF

Sepanjang periode 2020–2025, dinamika inflasi global mencerminkan dampak signifikan pandemi, gangguan rantai pasok, serta eskalasi konflik geopolitik terhadap stabilitas harga dunia. Inflasi global yang semula berada pada level moderat sebesar 4,0% pada 2020 meningkat tajam hingga mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 7,9%. Tekanan tersebut terutama dipicu oleh lonjakan harga energi dan pangan, disrupsi logistik global, serta pemulihan permintaan yang berlangsung cepat.

Throughout the 2020–2025 period, global inflation dynamics reflected the significant impact of the pandemic, supply chain disruptions, and escalating geopolitical conflicts on global price stability. Global inflation, which was initially at a moderate level of 4.0% in 2020, rose sharply to peak at 7.9% in 2022. This pressure was primarily driven by surging energy and food prices, global logistics disruptions, and a rapid recovery in demand.

Kelompok *Emerging Market and Developing Economies* (EMEs) mencatat tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan *Advanced Economies* (AEs), dengan inflasi mencapai 9,3% pada 2022. Sementara itu, inflasi di negara maju meningkat menjadi 6,6% pada periode yang sama level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Emerging Market and Developing Economies (EMEs) recorded higher inflationary pressures compared to Advanced Economies (AEs), with inflation reaching 9.3% in 2022. Meanwhile, inflation in advanced economies increased to 6.6% during the same period—the highest level in several decades.

Memasuki 2023 hingga 2025, kebijakan moneter ketat yang diterapkan secara serempak oleh berbagai bank sentral, termasuk kenaikan suku bunga acuan secara agresif, mulai menunjukkan hasil. Inflasi global menurun menjadi 5,7% pada 2023 dan terus melandai hingga mencapai sekitar 4,4% pada FY 2025. Inflasi di AEs turun signifikan ke level 2,6% pada 2025, mendekati target jangka menengah bank sentral. Sementara itu, inflasi EMEs juga menurun menjadi 3,9%, meskipun masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara maju.

Entering the year of 2023 to 2025, the tight monetary policies implemented simultaneously by various central banks, including aggressive increases in benchmark interest rates, began to show results. Global inflation declined to 5.7% in 2023 and continued to ease to around 4.4% in FY 2025. Inflation in AEs dropped significantly to 2.6% in 2025, approaching central banks' medium-term targets. Meanwhile, inflation in EMEs also decreased to 3.9%, although remained relatively higher than in advanced economies.

Meskipun tren disinflasi berlangsung positif, lanskap ekonomi global sepanjang 2025 tetap dibayangi oleh risiko geopolitik, proteksionisme perdagangan, serta volatilitas pasar keuangan. Ketegangan politik antarnegara, kebijakan perdagangan yang lebih protektif, dan fragmentasi ekonomi global berpotensi menahan laju pemulihan pertumbuhan serta meningkatkan volatilitas nilai tukar, khususnya di negara berkembang.

Despite the positive disinflation trend, the global economic landscape throughout 2025 remained overshadowed by geopolitical risks, trade protectionism, and financial market volatility. Political tensions among countries, increasingly protectionist trade policies, and global economic fragmentation have the potential to hinder growth recovery and increase exchange rate volatility, particularly in developing countries.

Di sisi lain, perubahan iklim semakin menjadi risiko struktural jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi global. Peningkatan frekuensi cuaca ekstrem dan gangguan produksi pangan dapat memicu tekanan inflasi komoditas secara sporadis, meskipun tren inflasi umum menunjukkan penurunan.

Dengan demikian, meskipun FY 2025 mencerminkan fase stabilisasi harga yang lebih terkendali dibanding periode puncak krisis, tingkat inflasi global masih berada di atas rata-rata historis pra-pandemi. Proses normalisasi kebijakan moneter dan stabilisasi geopolitik akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan tren disinflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi global ke depan.

TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah berbagai sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang resilien dan stabil. Stabilitas ini didukung oleh konsumsi domestik yang tetap terjaga, serta kinerja investasi dan ekspor yang menunjukkan tren peningkatan. Capaian tersebut diraih di tengah berbagai dinamika global, seperti perlambatan ekonomi dunia, potensi perang dagang, meningkatnya proteksionisme, konflik geopolitik, serta volatilitas harga komoditas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,39% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,02% (yoy).

On the other hand, climate change is increasingly becoming a long-term structural risk to global economic stability. The rising frequency of extreme weather events and disruptions in food production may trigger sporadic commodity price pressures, even as overall inflation trend shows a decline.

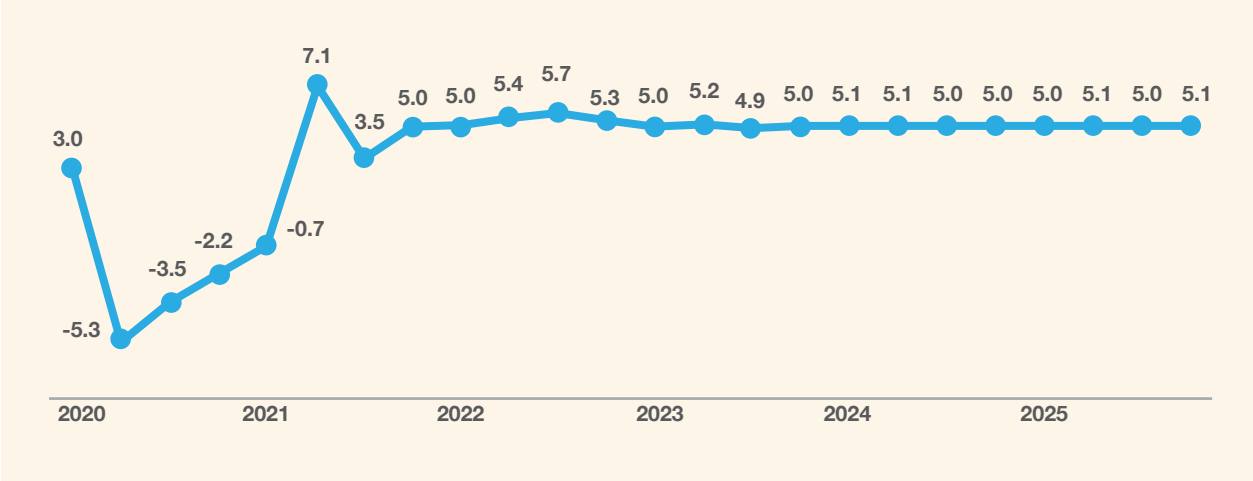
Therefore, although FY 2025 reflects a more controlled phase of price stabilization compared to the peak crisis period, global inflation levels remain above pre-pandemic historical averages. The normalization of monetary policy and geopolitical stabilization will be key factors in determining the sustainability of disinflation trend and future global economic growth prospects.

INDONESIA ECONOMIC OVERVIEW

Amid numerous negative sentiments surrounding global economic condition, Indonesia's economic growth in 2025 continued to demonstrate resilient and stable performance. This stability was supported by sustained domestic consumption, as well as improving investment and export performance. These achievements were realized despite various global dynamics, such as the global economic slowdown, potential trade wars, rising protectionism, geopolitical conflicts, and commodity price volatility.

Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew by 5.39% (yoy) in 2025, relatively stable compared to the previous year's growth of 5.02% (yoy).

Perumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesia's Economic Growth



Sumber/Source: IMF

Di tengah berbagai sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian global sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang resilien dan stabil. Ketahanan tersebut didukung oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, peningkatan realisasi investasi, serta kinerja ekspor yang relatif terjaga meskipun dihadapkan pada perlambatan permintaan global dan fluktuasi harga komoditas. Capaian tersebut diraih di tengah dinamika global yang kompleks, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik, serta volatilitas pasar keuangan global.

Amid numerous negative sentiments surrounding global economic condition throughout 2025, Indonesia's economic growth continued to demonstrate resilient and stable performance. This resilience was supported by strong domestic consumption, increased investment realization, and relatively maintained export performance despite facing slowing global demand and commodity price fluctuations. These achievements were attained in the midst of complex global dynamics, including a slowdown in global economic growth, rising protectionism and trade fragmentation, geopolitical tensions, and volatility in global financial markets.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,06% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,2%, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,1%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,4%, yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata.

Based on data from Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia's economy grew by 5.06% (yoy) in 2025, relatively stable compared to the 2024 growth of 5.03% (yoy). Economic growth occurred across almost all sectors. The sector with the highest growth was Other Services at 9.2%, followed by Transportation and Warehousing at 8.1%, and Accommodation and Food and Beverage Services at 7.4%, driven by increased community mobility and tourism activities.

Sementara itu, Industri Pengolahan, yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mencatat pertumbuhan sebesar 4,8%, menunjukkan kinerja yang tetap solid meskipun menghadapi tantangan permintaan eksternal. Adapun sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,1%, sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 3,6%, didukung oleh stabilitas produksi pangan domestik.

Meanwhile, the Manufacturing Industry, which has the largest contribution to the national Gross Domestic Product (GDP), recorded growth of 4.8%, demonstrating solid performance despite facing challenges from external demand. The Wholesale and Retail Trade and Automobile and Motorcycle Repair sectors grew by 5.1%, while the Agriculture, Forestry, and Fisheries sector grew by 3.6%, supported by stable domestic food production.

Dari sisi pengeluaran, permintaan domestik Indonesia hingga 31 Desember 2025 tumbuh sebesar 5,2% (yoy) dengan kontribusi sekitar 93,5% terhadap PDB. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,0%, sejalan dengan daya beli masyarakat yang terjaga dan stabilitas inflasi. Selain itu, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh sebesar 5,4%, ditopang oleh investasi swasta dan kelanjutan proyek infrastruktur strategis nasional.

In terms of expenditure, Indonesia's domestic demand as of December 31, 2025 grew by 5.2% (yoy), contributing approximately 93.5% to GDP. This growth was mainly driven by household consumption, which increased by 5.0%, in line with maintained purchasing power and inflation stability. In addition, investment (Gross Fixed Capital Formation/GFCF) grew by 5.4%, supported by private sector investment and the continuation of national strategic infrastructure projects.

Dari sisi inflasi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dalam kisaran sasaran 2,5% ±1%, dengan realisasi inflasi sebesar 2,8% (yoy) pada akhir tahun 2025. Kondisi inflasi yang terkendali ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap solid sebesar 5,06% (yoy). Meskipun demikian, sejumlah tantangan eksternal masih perlu diantisipasi, antara lain ketidakpastian geopolitik global, dinamika arah kebijakan suku bunga global, serta potensi tekanan nilai tukar.

In terms of inflation, Indonesia successfully maintained price stability within the target range of 2.5% ±1%, with realized inflation of 2.8% (yoy) at the end of 2025. This controlled inflation environment supported the country's solid economic growth of 5.06% (yoy). Nevertheless, several external challenges remain to be anticipated, including global geopolitical uncertainty, shifts in global interest rate policies, and potential exchange rate pressures.

Pada Desember 2025, tercatat inflasi sebesar 2,8% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,85. Inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, antara lain Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,4%, Pakaian dan alas kaki sebesar 1,9%, Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,3%, Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,1%, Kesehatan sebesar 2,5%, Rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,7%, Pendidikan sebesar 2,0%, Penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,1%, Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,3%.

In December 2025, inflation was recorded at 2.8% (yoy), with the Consumer Price Index (CPI) reaching 107.85. Inflation was driven by price increases across most expenditure groups, including Food, Beverages, and Tobacco at 3.4%; Clothing and Footwear at 1.9%; Housing, Water, Electricity, and Household Fuels at 2.3%; Furnishings, Household Equipment, and Routine Household Maintenance at 2.1%; Health at 2.5%; Recreation, Sports, and Culture at 2.7%; Education at 2.0%; Restaurants and Food Services at 3.1%; and Personal Care and Other Services at 3.3%.

Sementara itu, kelompok Transportasi mencatat kenaikan indeks sebesar 2,6%, sedangkan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami penurunan sebesar 0,4%, seiring efisiensi tarif layanan digital dan stabilitas biaya komunikasi.

Meanwhile, the Transportation group recorded an index increase of 2.6%, while the Information, Communication, and Financial Services group experienced a decline of 0.4%, in line with improved efficiency in digital service tariffs and stable communication costs.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi Indonesia pada FY 2025 menunjukkan fondasi domestik yang kuat dan ketahanan yang terjaga di tengah lingkungan eksternal yang masih penuh ketidakpastian. Stabilitas makroekonomi yang terpelihara menjadi modal penting bagi keberlanjutan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.

Overall, Indonesia's economic performance in FY 2025 reflects strong domestic fundamentals and sustained resilience amid an external environment that remains highly uncertain. Maintained macroeconomic stability serves as an important foundation for sustainable growth in the years ahead.

IHK dan Tingkat Inflasi (YoY) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2025 (%)
National CPI and Inflation Rate (YoY) by Expenditure Group in 2025 (%)

Kelompok Pengeluaran Expenditure Groups	IHK Desember 2025 December 2025 CPI	IHK Desember 2024 December 2024 CPI
Umum *(Headline)* *General (Headline)*	107,85	106,80
Makanan, Minuman & Tembakau Food, Beverages & Tobacco	113,53	110,41
Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear	107,20	103,38
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga Housing, Water, Electricity and Household Fuels	107,11	102,60
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Household Supplies, Equipment and Routine Maintenance	108,33	103,87
Kesehatan Healthcare	106,91	104,64
Transportasi Transportation	108,76	109,48
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Information, Communication, and Financial Services	100,60	99,48
Rekreasi, Olahraga dan Budaya Recreation, Sports, and Culture	107,42	104,26
Pendidikan Education	105,98	104,92
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Food and Beverage Services/Restaurants	113,82	106,64
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Personal Care and Other Services	111,77	113,92

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Sepanjang tahun 2025, program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pasokan pangan, optimalisasi distribusi antar daerah, serta pengendalian ekspektasi inflasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID). Upaya tersebut berkontribusi pada terkendalinya inflasi nasional di tengah dinamika harga pangan global dan gangguan cuaca ekstrem.

In order to maintain price stability and preserve people's purchasing power, Bank Indonesia (BI), together with the Central Government and Regional Governments, continued to strengthen synergy through the National Movement for Food Inflation Control (GNPIP) across various regions. Throughout 2025, this program focused on strengthening food supply resilience, optimizing inter-regional distribution, and managing inflation expectations through coordination between the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP/TPID). These efforts contributed to maintaining controlled national inflation amid global food price dynamics and disruptions caused by extreme weather.

Selain faktor inflasi, dinamika suku bunga acuan Bank Indonesia serta kebijakan suku bunga global turut memengaruhi perekonomian domestik. Sepanjang 2025, BI menerapkan kebijakan suku bunga yang berhati-hati guna menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi, dengan BI-Rate berada pada kisaran 6,00%–6,25% sebelum mulai diarahkan secara gradual sesuai perkembangan inflasi dan stabilitas eksternal. Kondisi suku bunga global yang masih relatif tinggi pada paruh awal tahun turut meningkatkan biaya dana dan biaya pinjaman domestik, yang berpotensi menekan ekspansi kredit dan konsumsi rumah tangga, meskipun dampaknya relatif terjaga oleh kuatnya permintaan domestik.

In addition to inflation factors, the dynamics of Bank Indonesia's benchmark interest rate and global interest rate policies also influenced the domestic economy. Throughout 2025, BI implemented a prudent interest rate policy to maintain exchange rate stability and inflation expectations, with the BI-Rate ranging between 6.00%–6.25% before being gradually adjusted in line with inflation developments and external stability. Relatively high global interest rates in the first half of the year also increased the cost of funds and domestic borrowing costs, potentially putting pressure on credit expansion and household consumption, although the impact remained manageable due to strong domestic demand.

Hingga 31 Desember 2025, nilai tukar Rupiah tercatat berada pada level Rp15.850 per dolar AS, atau melemah sekitar 2,3% (yoy) secara point-to-point (ptp) dibandingkan posisi akhir 2024. Pergerakan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh penguatan dolar AS di pasar global, volatilitas arus modal, serta dinamika sentimen risiko global. Meski demikian, stabilitas Rupiah tetap terjaga berkat bauran kebijakan stabilisasi BI, intervensi terukur di pasar valas, serta penguatan cadangan devisa.

As of December 31, 2025, the Rupiah exchange rate stood at Rp15,850 per US dollar, depreciating by approximately 2.3% (yoy) on a point-to-point (ptp) basis compared to the end of 2024. The exchange rate movement was influenced by the strengthening of the US dollar in global markets, capital flow volatility, and shifts in global risk sentiment. Nevertheless, Rupiah stability was maintained through BI's policy mix, measured foreign exchange market interventions, and strengthened foreign exchange reserves.

Di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional, Pemerintah terus menjaga stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Dari sisi fiskal, Pemerintah melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak dan kepabeanan, didukung oleh reformasi administrasi perpajakan dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Realisasi pendapatan negara pada 2025 tetap terjaga sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang stabil.

Amid diverging global economic growth and increasing uncertainty in international financial markets, the Government continued to maintain financial system stability through a coordinated mix of fiscal and monetary policies. On the fiscal side, the Government optimized state revenue through increased tax and customs receipts, supported by tax administration reforms and improved taxpayer compliance. State revenue realization in 2025 remained well maintained in line with stable domestic economic activity.

Di sisi belanja, Pemerintah melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui refocusing belanja, termasuk pada proyek infrastruktur yang kurang prioritas, guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Belanja negara tetap diarahkan pada program strategis seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan sumber daya manusia.

On the expenditure side, the Government implemented efficiency measures and sharpened budget priorities through spending refocusing, including on less-prioritized infrastructure projects, to ensure effective budget utilization in supporting quality economic growth. State spending remained directed toward strategic programs such as social protection, food security, industrial downstreaming, and human capital development.

Kebijakan fiskal tersebut memberikan dampak positif berupa terjaganya defisit fiskal dalam batas aman, peningkatan kapasitas pembiayaan program pembangunan, serta penguatan kualitas layanan publik. Langkah tersebut turut mendukung stabilitas makroekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

These fiscal policies had positive impacts, including maintaining the fiscal deficit within a safe threshold, enhancing the capacity to finance development programs, and improving the quality of public services. These measures also supported macroeconomic stability and sustainable improvements in public welfare.

Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia terus menerapkan kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga momentum pertumbuhan, penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta pengelolaan likuiditas perbankan guna memastikan kelancaran transmisi kebijakan moneter. Selain itu, penguatan bauran kebijakan makroprudensial dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko yang berasal dari tekanan eksternal.

Meanwhile, on the monetary side, Bank Indonesia continued to implement policies aimed at maintaining macroeconomic stability while encouraging inclusive economic growth. These policies included interest rate management to control inflation and sustain growth momentum, strengthening Rupiah exchange rate stabilization, and managing banking liquidity to ensure effective monetary policy transmission. In addition, macroprudential policy measures were strengthened to safeguard financial system stability and mitigate risks arising from external pressures.

Secara keseluruhan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sepanjang FY 2025 berhasil menjaga stabilitas makroekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,0%–5,1% (yoy).

Overall, the coordination of fiscal and monetary policies throughout FY 2025 successfully maintained national macroeconomic stability in the midst of persistent global pressures, while sustaining Indonesia's economic growth momentum in the range of 5.0%–5.1% (yoy).

Tinjauan Industri Konstruksi
Construction Industry Overview

Sektor konstruksi memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat ketersediaan infrastruktur yang andal berpengaruh langsung terhadap peningkatan produktivitas, konektivitas antarwilayah, serta aktivitas dunia usaha. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi, hilirisasi industri, dan penguatan daya saing nasional.

The construction sector plays a strategic role in driving national economic growth, as the availability of reliable infrastructure directly affects productivity, interregional connectivity, and business activities. Adequate infrastructure serves as a key foundation for supporting economic transformation, industrial downstreaming, and strengthening national competitiveness.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2025 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,07%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,17%, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,10%. Sektor Konstruksi menempati posisi keempat dengan kontribusi sebesar 9,83 %, sementara sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 8,75%. Secara keseluruhan, kelima lapangan usaha tersebut menyumbang sekitar 63,92% terhadap total perekonomian nasional pada tahun 2025.

Based on official data from the Central Statistics Agency (BPS), the structure of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) by business sector at current prices in 2025 remained dominated by the Manufacturing Industry at 19.07%, followed by Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repair at 13.17%, and Agriculture, Forestry, and Fisheries at 13.10%. The Construction sector is in fourth place with a contribution of 9.83%, while Mining and Quarrying sector contributes 8.75%. Overall, these five business sectors contribute around 63.92% to the total national economy in 2025.

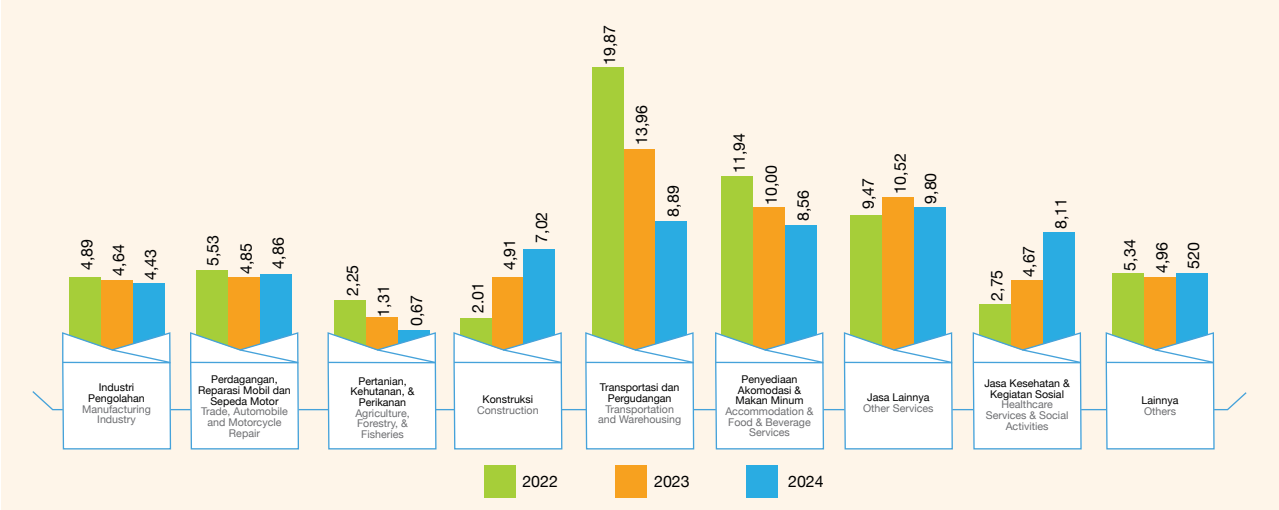
Dalam periode tiga tahun terakhir (2023–2025), sektor konstruksi secara konsisten menjadi kontributor terbesar keempat terhadap PDB nasional. Pada tahun 2025, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 3,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 7,02% (yoy). Kinerja tersebut didorong oleh keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan investasi swasta, serta pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri dan konektivitas logistik.

Over the past three years (2023–2025), the construction sector has consistently been the fourth-largest contributor to national GDP. In 2025, the construction sector recorded growth of 3.81% (yoy), compared to 7.02% (yoy) in 2024. This performance was driven by the continuation of National Strategic Projects (PSN), increased private investment, and the development of infrastructure supporting industrial areas and logistics connectivity.

Pada tahun 2025, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 9,83% terhadap PDB nasional atau setara dengan Rp 2.341,6 triliun, mencerminkan peran penting sektor ini dalam menopang aktivitas ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja.

In 2025, the construction sector contributed 9.83% to national GDP, equivalent to Rp2,341.6 trillion, reflecting its significant role in supporting domestic economic activity and job creation.

Grafik Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (C-to-C) (persen) Tahun 2024-2025
GDP Growth of Several Business Sectors (C-to-C) (percent) for 2024–2025



Sumber: Badan Pusat StatistiK (BPS)
Source: Central Statistics Agency (BPS))

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor konstruksi di Indonesia meningkat menjadi Rp346.567miliar pada kuartal IV-2025, dibandingkan Rp 333.634,90miliar pada kuartal III-2025. Secara historis, PDB sektor konstruksi Indonesia mencatat rata-rata sebesar Rp244.372,68 miliar selama periode 2010–2025, dengan capaian tertinggi sebesar Rp 346.567miliar pada kuartal IV-2025 dan terendah sebesar Rp149.919 miliar pada kuartal I-2010.

The Gross Domestic Product (GDP) of Indonesia's construction sector increased to Rp346,567 billion in the fourth quarter of 2025, compared to Rp333,634.90 billion in the third quarter of 2025. Historically, Indonesia's construction sector GDP averaged Rp244,372.68 billion during the 2010–2025 period, with a peak of Rp346,567 billion in the fourth quarter of 2025 and a low of Rp149,919 billion in the first quarter of 2010.

Grafik PDB dari Konstruksi Indonesia Tahun 2024-2025 (Rp Miliar)
GDP of Indonesia's Construction Sector 2024–2025 (Rp Trillion)



Upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor konstruksi sepanjang Tahun Buku 2025 tetap dilakukan melalui kebijakan fiskal yang terarah dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global serta kebutuhan konsolidasi fiskal yang hati-hati, Pemerintah tetap menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi nasional.

The Government's efforts to drive growth in the construction sector throughout fiscal year 2025 continued through targeted and sustainable fiscal policies. Amid global uncertainty and the need for prudent fiscal consolidation, the Government maintained the continuity of infrastructure development as one of the main drivers of national economic activity.

Berdasarkan APBN 2025, anggaran infrastruktur dialokasikan pada kisaran rata-rata Rp419 triliun, sedikit menurun dibandingkan alokasi APBN 2024 sebesar Rp423,4 triliun, atau turun sekitar 1,0% secara tahunan (yoy). Penyesuaian tersebut mencerminkan upaya Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan pengelolaan fiskal yang prudent, tanpa mengurangi fokus pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi signifikan.

Based on the 2025 State Budget (APBN), infrastructure spending was allocated at approximately Rp419 trillion, slightly lower than the 2024 APBN allocation of Rp423.4 trillion, representing a year-on-year (yoy) decrease of around 1.0%. This adjustment reflects the Government's effort to balance accelerated development with prudent fiscal management, without reducing the focus on strategic projects with significant economic impact.

Meskipun mengalami penyesuaian nominal, anggaran infrastruktur tahun 2025 tetap diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan layanan dasar. Pemerintah memprioritaskan penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jalan nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, serta prasarana perkeretaapian. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilaksanakan secara bertahap dan terukur. Penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti perumahan, air minum, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi fokus utama guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Despite nominal adjustment, the 2025 infrastructure budget remained directed toward supporting economic development and the provision of basic services. The Government prioritized strengthening national connectivity through the development and improvement of national roads, toll roads, ports, airports, and railway infrastructure. In addition, the development of the Nusantara Capital City (IKN) continued in a gradual and measured manner. The provision of basic service infrastructure, such as housing, water supply, sanitation, education, and healthcare, also remained a key focus to support human capital development.

Di sektor energi, alokasi anggaran tetap mendukung penguatan infrastruktur ketenagalistrikan serta pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari transisi energi nasional. Pemerintah juga terus memperluas pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna mendukung transformasi digital dan peningkatan inklusi ekonomi.

Selain melalui pembiayaan APBN, Pemerintah mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk memperluas kapasitas pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan efisiensi proyek.

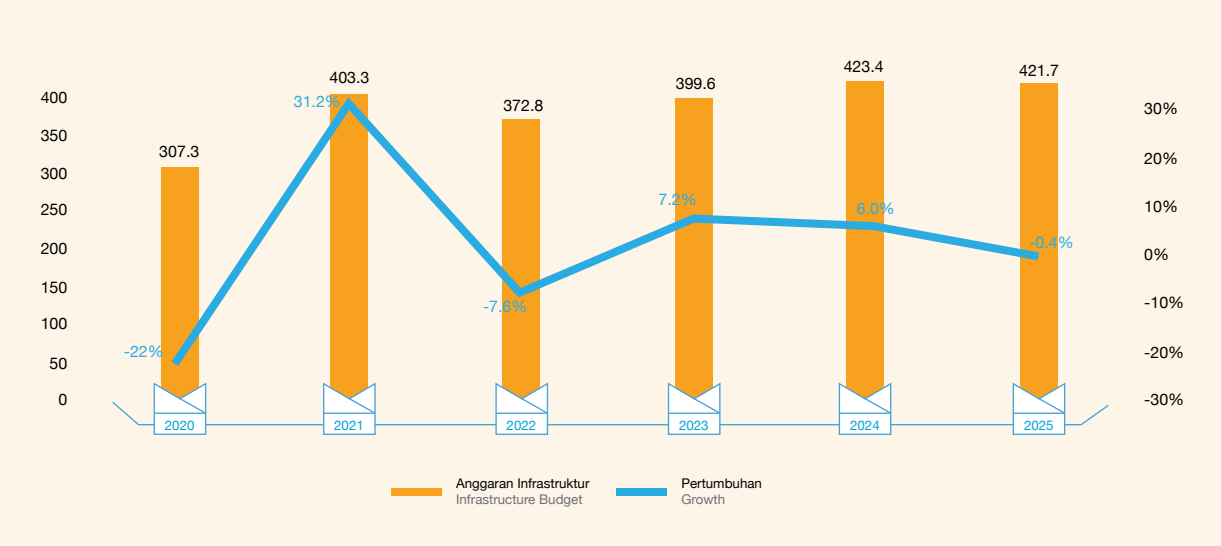
Secara keseluruhan, kebijakan fiskal pada FY 2025 menunjukkan pendekatan yang lebih selektif dan terarah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus pada optimalisasi kualitas belanja (spending better), penyelesaian proyek prioritas, serta penguatan fondasi transformasi ekonomi jangka panjang. Meskipun anggaran infrastruktur sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, sektor konstruksi tetap memiliki peran strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

In the energy sector, budget allocation continued to support the strengthening of electricity infrastructure and the development of New and Renewable Energy (NRE) as part of the national energy transition. The Government also continued expanding Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, particularly in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions, to support digital transformation and enhance economic inclusion.

In addition to state budget financing, the government is encouraging increased private sector participation through the Public-Private Partnership (PPP) scheme to expand infrastructure financing capacity and improve project efficiency.

Overall, fiscal policy in FY 2025 reflects a more selective and targeted approach compared to the previous year, focusing on optimizing the quality of spending (spending better), completing priority projects, and strengthening the foundation for long-term economic transformation. Although the infrastructure budget was slightly lower than in 2024, the construction sector continued to play a strategic role in maintaining national economic growth momentum.

Grafik APBN Konstruksi tahun 2020 – 2025 (Triliun)
2020–2025 Construction State Budget (Rp Trillion)



Selanjutnya, proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur tahun 2025 berdasarkan APBN, antara lain:

Furthermore, strategic projects that became priorities in infrastructure development in 2025 based on the APBN include:

Ketahanan Pangan & Sumber Daya Air (SDA) Food and Water Resources Security	**Konektivitas & Logistik** Connectivity and Logistics	**Infrastruktur Permukiman** Settlement Infrastructure	**Prasarana Strategis & Perumahan Rakyat** Strategic Infrastructure & Public Housing	**Keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN)** Sustainability of the Indonesian Capital City (IKN)
• Penyelesaian Bendungan: Pembangunan dan penyelesaian 14 bendungan, 1 bangunan pengarah (Bendungan Rukoh), serta revitalisasi berbagai danau dan situ. • Jaringan Irigasi: Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 9.550 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi eksisting seluas 29.000 hektare. • Penyediaan Air Baku: Pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas layanan 1,25 meter kubik per detik. • Pengendalian Daya Rusak Air: Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 19 km dan pengaman pantai sepanjang 4,5 km. • Padat Karya Tata Air: Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang tersebar di 12.000 lokasi.	• Jalan Nasional: Pembangunan jalan baru sepanjang 57 km, serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.102 km. • Jalan Bebas Hambatan (Tol): Pembangunan jalan tol yang didanai murni oleh APBN pada tahun ini disesuaikan menjadi sepanjang 7,36 km. • Jembatan: Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter. • Infrastruktur Persimpangan: Pembangunan jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan dengan total panjang 94 meter. • Preservasi Rutin: Pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km dan jembatan sepanjang 563.402 meter.	• Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Pembangunan dan peningkatan kapasitas SPAM sebesar 40 liter per detik, serta perluasan jaringan distribusi untuk 863 Sambungan Rumah (SR). • Sanitasi & Persampahan: Pembangunan fasilitas pengelolaan air limbah dan sistem persampahan yang ditargetkan melayani 9.540 Kepala Keluarga (KK). • Penataan Kawasan: Pengembangan kawasan permukiman seluas 118,5 hektare dan penataan infrastruktur kawasan pariwisata seluas 3 hektare.	• Fasilitas Pendidikan: Rehabilitasi dan renovasi fisik untuk sarana sekolah dasar hingga madrasah sebanyak 11.334 unit di berbagai daerah. • Bantuan Perumahan Swadaya: Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan peningkatan kualitas hunian di 34.289 lokasi. • Fasilitas Publik: Pembangunan dan perbaikan sarana ekonomi serta sosial, termasuk 2 unit pasar tradisional dan 3 unit prasarana olahraga.	• Fasilitas Hunian ASN & Hankam: Penuntasan dan *finishing* pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun). Ini merupakan target absolut untuk memastikan ketersediaan tempat tinggal bagi gelombang awal pemindahan aparatur negara dan pasukan pertahanan. • Infrastruktur Air Bersih (SPAM): Penyelesaian operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku tahap awal dengan target kapasitas distribusi sebesar 300 liter per detik untuk melayani seluruh gedung pemerintahan dan hunian di KIPP. • Konektivitas Akses (Jalan Tol IKN): Penyelesaian dan pengoperasian penuh 5 seksi utama Jalan Tol Akses IKN Tahap 1 (Seksi 3A, 3B, 5A, 6A, dan 6B) yang membentang lebih dari 35 km untuk memangkas waktu tempuh logistik dari Balikpapan. • Infrastruktur Transportasi Udara: Penuntasan landasan pacu (*runway*) Bandara Nusantara (VVIP/VIP) hingga mencapai target panjang maksimal 3.000 meter, serta penyelesaian terminal penumpang seluas kurang lebih 7.350 meter persegi. • Sanitasi dan Pengelolaan Limbah: Penyelesaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KIPP yang ditargetkan mampu mengolah limbah untuk populasi awal sekitar 100.000 hingga 150.000 jiwa ekuivalen. • Jalan Kawasan & Sumbu Kebangsaan: Penataan akhir *landscape* Sumbu Kebangsaan (Sisi Barat dan Timur) serta penyelesaian pengaspalan jalan *feeder* (pengumpan) antar-distrik di dalam KIPP sepanjang kurang lebih 10 km.

Ketahanan Pangan & Sumber Daya Air (SDA) Food and Water Resources Security	**Konektivitas & Logistik** Connectivity and Logistics	**Infrastruktur Permukiman** Settlement Infrastructure	**Prasarana Strategis & Perumahan Rakyat** Strategic Infrastructure & Public Housing	**Keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN)** Sustainability of the Indonesian Capital City (IKN)
• Dam Completion: Construction and completion of 14 dams, 1 control structure (Rukoh Dam), and revitalization of various lakes and reservoirs. • Irrigation Network: Construction of a new irrigation network covering 9,550 hectares and rehabilitation of existing irrigation network covering 29,000 hectares. • Raw Water Supply: Construction of raw water infrastructure with a service capacity of 1.25 cubic meters per second. • Water Damage Control: Construction of 19 km of flood control infrastructure and 4.5 km of coastal protection. • Water Management Labor-Intensive Program: Implementation of the Irrigation Water Use Improvement Acceleration Program (P3-TGAI) spread across 12,000 locations.	• National Roads: Construction of 57 km of new roads, as well as increasing the capacity and preserving 1,102 km of roads. • Toll Roads: Construction of toll roads funded solely by the State Budget this year has been adjusted to 7.36 km. • Bridges: Construction and duplication of 5,841 meters of bridges. • • Intersection Infrastructure: Construction of flyovers, underpasses, and tunnels with a total length of 94 meters. • Routine Preservation: Routine maintenance of 47,603 km of national roads and 563,402 meters of bridges.	• Drinking Water Supply System (SPAM): Construction and increase of SPAM capacity by 40 liters per second, as well as expansion of the distribution network for 863 House Connections (SR). • Sanitation & Waste Management: Construction of wastewater management facilities and a waste management system targeted to serve 9,540 families (KK). • Area Development: Development of a 118.5-hectare residential area and development of 3 hectares of tourism infrastructure.	• Educational Facilities: Rehabilitation and physical renovation of 11,334 elementary and madrasah school facilities in various regions. • Self-Help Housing Assistance: Implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program, which targets improving housing quality in 34,289 locations. • Public Facilities: Construction and improvement of economic and social facilities, including two traditional markets and three sports facilities.	• Civil Servant and Defense Housing Facilities: Completion and finishing of 47 tower apartments (Rusun). This is an absolute target to ensure housing availability for the initial wave of relocating state apparatus and defense forces. • Clean Water Infrastructure (SPAM): Completion of the initial operational phase of Sepaku Drinking Water Supply System (SPAM) with a target distribution capacity of 300 liters per second to serve all government buildings and residences in KIPP. • Access Connectivity (IKN Toll Road): Completion and full operation of the five main sections of IKN Access Toll Road Phase 1 (Sections 3A, 3B, 5A, 6A, and 6B) stretching over 35 km to reduce logistics travel time from Balikpapan. • Air Transportation Infrastructure: Completion of Nusantara Airport runway (VVIP/VIP) to reach the target maximum length of 3,000 meters, as well as the completion of a passenger terminal covering approximately 7,350 square meters. • Sanitation and Waste Management: Completion of Integrated Wastewater Treatment Plant (IPAL) and Integrated Waste Treatment Facility (TPST) at KIPP, targeted to be able to process waste for an initial population of approximately 100,000 to 150,000 people. • Regional Roads & National Axis: Final landscaping of National Axis (West and East Sides) and completion of the paving of approximately 10 km of inter-district feeder roads within KIPP.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview By Business Segment

SEGMEN USAHA

Pembahasan tinjauan per segmen usaha dalam Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, mengacu pada PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Kinerja masing-masing segmen usaha yang dijalankan Perseroan dianalisis antara lain berdasarkan perolehan kontrak baru serta nilai kontrak yang dikelola pada periode berjalan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen serta menentukan alokasi sumber daya. Segmentasi tersebut didasarkan pada aktivitas masing-masing entitas legal dalam Grup yang menjalankan kegiatan operasionalnya.

Segmen operasi merupakan komponen entitas yang:
1. Terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang berasal dari transaksi dengan komponen lain dalam entitas yang sama;
2. Hasil operasinya ditelaah secara berkala oleh manajemen operasional untuk pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya serta penilaian kinerja segmen; dan
3. Memiliki informasi keuangan yang tersedia secara terpisah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya ke dalam 4 (empat) segmen utama sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian, yaitu segmen Jasa Konstruksi, Industri, Konsesi, dan Properti.

SEGMEN JASA KONSTRUKSI

Segmen Jasa Konstruksi mencakup kegiatan utama Perseroan dalam bidang konstruksi bangunan gedung, termasuk pekerjaan rancang bangun *(design and build)* yang meliputi proses perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi. Ruang lingkup pekerjaan pada segmen ini meliputi pembangunan gedung perkantoran, komersial, dan residensial, serta berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, stadion olah raga, bandara, dan infrastruktur terkait, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Produksi: Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya

Proses produksi pada segmen Jasa Konstruksi dijalankan melalui tahapan pengelolaan proyek yang mencakup identifikasi kebutuhan pemberi kerja, perencanaan teknis, penyusunan metode kerja, pengadaan sumber daya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengendalian biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja, hingga serah terima pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memanfaatkan kapabilitas teknis, pengalaman proyek, sistem manajemen mutu, serta dukungan teknologi konstruksi, termasuk *Building Information Modeling* (BIM), untuk meningkatkan akurasi perencanaan, efektivitas koordinasi, dan pengendalian risiko proyek.

BUSINESS SEGMENT

The discussion of business segment overview in this Annual Report is presented in accordance with the segment classification set out in the Company's Consolidated Financial Statements, referring to PSAK No. 5 on Operating Segments. The performance of each business segment operated by the Company is analyzed, among others, based on new contract acquisitions and the value of contracts managed during the current period.

The Company presents operating segments based on financial information used by the operational decision maker in evaluating segment performance and determining resource allocation. The segmentation is based on the activities of each legal entity within the Group that carries out its operational activities.

An operating segment is a component of an entity that:
1. Engages in business activities that generate revenue and incur expenses, including revenue and expenses relating to transactions with other components of the same entity;
2. Has its operational results regularly reviewed by operational management for decisions regarding resource allocation and performance assessment; and
3. Has separately available financial information.

Based on these provisions, the Company classifies its business activities into 4 (four) main segments in accordance with the Consolidated Financial Statements, namely Construction Services, Industry, Concessions, and Property segments.

CONSTRUCTION SERVICES SEGMENT

The Construction Services segment covers the Company's core activities in building construction, including design and build services that encompass the entire process from planning to construction execution. The scope of work in this segment includes the construction of office, commercial, and residential buildings, as well as various public facilities such as hospitals, schools, sports stadiums, airports, and related infrastructure, in accordance with the Company's Articles of Association.

Production: Process, Capacity, and Development

The production process in the Construction Services segment is carried out thru project management stages that include identifying the client's needs, technical planning, work method preparation, resource procurement, construction work execution, cost, quality, time, and safety control, up to the handover of the work. In its implementation, the Company utilizes technical capabilities, project experience, quality management systems, and construction technology support, including Building Information Modeling (BIM), to enhance planning accuracy, coordination effectiveness, and project risk control.

Kapasitas operasional segmen Jasa Konstruksi tercermin dari kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio proyek dengan tingkat kompleksitas yang beragam, baik pada proyek gedung bertingkat, fasilitas publik, kawasan hunian, maupun infrastruktur pendukung. Kapasitas tersebut juga ditunjukkan melalui nilai kontrak baru dan kontrak dihadapi *(order book)* yang menggambarkan skala pekerjaan, kesinambungan produksi, serta kemampuan Perseroan dalam mempertahankan aktivitas usaha di tengah dinamika industri konstruksi.

The operational capacity of the Construction Services segment is reflected in the Company's ability to manage a project portfolio with varying levels of complexity, including high-rise building projects, public facilities, residential areas, and supporting infrastructure. This capacity is also demonstrated thru the value of new contracts and contracts on hand (order book) which reflect the scale of work, production continuity, and the Company's ability to maintain business activities amidst the dynamics of the construction industry.

Produktivitas Segmen Jasa Konstruksi 2024-2025
Construction Services Segment Productivity 2024–2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	1.653,9	2.102,23	(448,33)	21,33 ↓
Kontrak Dihadapi Order Book	5.607,8	8.304,65	(2.696,85)	32,47 ↓

Sepanjang tahun 2025, segmen Jasa Konstruksi mencatat kontrak baru sebesar Rp1.653,9 miliar, menurun Rp448,33 miliar atau 21,33% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2.102,23 miliar. Pada periode yang sama, nilai kontrak dihadapi *(order book)* tercatat sebesar Rp5.607,80 miliar, turun Rp2.696,85 miliar atau 32,47% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.304,65 miliar.

Throughout 2025, the Construction Services segment recorded new contracts amounting to Rp1,653.9 billion, a decrease of Rp448.33 billion or 21.33% compared to 2024, which reached Rp2,102.23 billion. In the same period, the value of contracts on hand (order book) was recorded at Rp5,607.80 billion, a decrease of Rp2,696.85 billion or 32.47% compared to 2024, which was Rp8,304.65 billion.

Penurunan perolehan kontrak baru pada segmen Jasa Konstruksi dipengaruhi oleh perubahan prioritas kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada program sosial dan ekonomi kerakyatan, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi lebih terbatas dan berdampak pada peluang proyek baru. Selain itu, beberapa proyek konstruksi telah memasuki tahap penyelesaian pada tahun 2025, sehingga turut memengaruhi nilai kontrak dihadapi pada periode berjalan.

The decline in new contract acquisitions in the Construction Services segment is influenced by changes in government policy priorities, which are more focused on social and economic programs for the people, such as Free Nutritious Meals (MBG) and the Red and White Cooperative. As a result, the budget allocation for infrastructure development has become more limited, impacting new project opportunities. In addition, several construction projects have entered the completion stage in 2025, thereby affecting the contract value faced in the current period.

Di tengah kondisi tersebut, Perseroan menerapkan pendekatan akuisisi proyek yang lebih selektif dengan mempertimbangkan profil risiko, kualitas arus kas, kepastian pendanaan, dan keberlanjutan margin. Pendekatan ini ditempuh untuk menjaga kualitas portofolio proyek, memperkuat pengendalian risiko, serta memastikan bahwa kegiatan produksi pada segmen Jasa Konstruksi tetap diarahkan pada proyek yang memiliki prospek penyelesaian dan kontribusi kinerja yang lebih sehat.

Amid these conditions, the Company is adopting a more selective project acquisition approach by considering risk profiles, cash flow quality, funding certainty, and margin sustainability. This approach is taken to maintain the quality of the project portfolio, strengthen risk control, and ensure that production activities in the Construction Services segment are directed toward projects with better completion prospects and performance contributions.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi

Construction Services Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi 2024-2025
Construction Services Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	1.520,80	3.368,27	(1.847,47)	54,85% ↓
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(1.387,08)	(3.087,14)	1.700,06	55,07 ↓

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Konstruksi 2024-2025
Construction Services Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Kotor Gross Profit	133,72	281,13	(147,41)	52,44 ↓
Beban Usaha Operating Expenses	(187,45)	(114,42)	(73,03)	(63,83%) ↑
Laba Usaha Other Income	(55,74)	163,59	(219,33)	134,07% ↓
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(35,22)	(89,26)	54,04	60,54% ↓
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	(112,95)	99,43	(212,38)	213,60% ↓
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(18,24)	(4,79)	(13,45)	(280,79%) ↑
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(411,04)	(138,97)	(272,07)	(195,78%) ↑
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(631,19)	30,00	(661,19)	2.203,97% ↓
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	(631,19)	30,00	(661,19)	2.203,97% ↓
Jumlah Aset Total Assets	3.363,26	5.055,26	(1.692,00)	33,47% ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.489,11	2.801,38	(1.312,27)	46,84% ↓

Pada tahun 2025, segmen Jasa Konstruksi mencatat pendapatan sebesar Rp1.520,80 miliar, menurun Rp1.847,47 miliar atau 54,85% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.368,27 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya volume pekerjaan yang diperoleh Perseroan, perlambatan realisasi proyek berjalan, serta meningkatnya selektivitas dalam perolehan kontrak baru sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko dan peningkatan kualitas portofolio proyek.

In 2025, the Construction Services segment recorded revenue of Rp1,520.80 billion, a decrease of Rp1,847.47 billion or 54.85% compared to Rp3,368.27 billion in 2024. The decline was attributable to lower project volumes, slower execution of ongoing projects, and a more selective approach to securing new contracts as part of the Company's efforts to strengthen risk management and improve the quality of its project portfolio.

Sementara itu, segmen Jasa Konstruksi membukukan rugi bersih sebesar Rp631,19 miliar, berbanding terbalik dibandingkan dengan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp30,00 miliar. Penurunan kinerja tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan usaha, peningkatan beban usaha, serta tekanan dari komponen non-operasional, khususnya rugi dari ventura bersama sebesar Rp112,95 miliar dan meningkatnya beban lain-lain menjadi Rp411,04 miliar. Kondisi tersebut turut berdampak pada penurunan laba usaha dan laba sebelum pajak, sehingga memengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan pada tahun 2025.

Meanwhile, the Construction Services segment reported a net loss of Rp631.19 billion, compared to a net profit of Rp30.00 billion in 2024. The decline in performance was primarily driven by lower operating revenues, higher operating expenses, and pressures from non-operating components, particularly losses from joint ventures amounting to Rp112.95 billion and an increase in other expenses to Rp411.04 billion. These factors also contributed to lower operating profit and profit before tax, thereby affecting the Company's overall financial performance in 2025.

Strategi Pengembangan Segmen Jasa Konstruksi

Segmen jasa konstruksi Perseroan tetap menjadi core business yang diarahkan pada pertumbuhan yang selektif dan berkualitas, dengan menitikberatkan pada peningkatan profitabilitas dan ketahanan arus kas. Dalam menghadapi dinamika industri, WIKA Gedung

Construction Services Segment Development Strategy

The construction services segment remains the Company's core business, with a focus on selective and quality-driven growth, emphasizing improved profitability and cash flow resilience. In navigating industry dynamics, WIKA Gedung applied a more

menerapkan strategi akuisisi proyek yang lebih disiplin melalui pendekatan risk-based, dengan prioritas pada proyek yang memiliki kepastian pendanaan, margin yang sehat, serta profil risiko yang terukur.

disciplined, risk-based project acquisition strategy, prioritizing projects with secured funding, healthy margins, and measurable risk profiles.

Dari sisi operasional, Perseroan memperkuat pengendalian proyek melalui optimalisasi perencanaan, penerapan Building Information Modeling (BIM), serta peningkatan efektivitas monitoring untuk memastikan ketepatan biaya, mutu, dan waktu. Transformasi proses bisnis juga dilakukan untuk mendorong efisiensi, termasuk pengendalian biaya operasional dan optimalisasi sumber daya.

In terms of operations, the Company strengthened project control through optimized planning, the implementation of Building Information Modeling (BIM), and enhanced monitoring effectiveness to ensure cost efficiency, quality, and timely delivery. Business process transformation was also carried out to drive efficiency, including tighter operational cost control and resource optimization.

Dalam pengembangan pasar, WIKA Gedung tetap memanfaatkan peluang pada proyek pemerintah dan BUMN, sekaligus meningkatkan penetrasi pada sektor swasta yang lebih resilient, seperti komersial, kesehatan, dan pendidikan. Perseroan juga mendorong integrasi dengan kapabilitas modular sebagai nilai tambah dalam penawaran proyek.

In terms of market development, WIKA Gedung continues to capitalize on opportunities in government and state-owned enterprise (SOE) projects, while also increasing penetration into more resilient private sectors, such as commercial, healthcare, and education. The Company also promotes integration with its modular capabilities as a value-added component in project offerings.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan segmen jasa konstruksi difokuskan pada penciptaan portofolio proyek yang lebih sehat, peningkatan daya saing, serta penguatan fundamental bisnis untuk mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan.

Overall, the development strategy for the construction services segment was focused on building a healthier project portfolio, enhancing competitiveness, and strengthening business fundamentals to support the Company's sustainable performance.

SEGMEN INDUSTRI

Segmen Industri mencakup kegiatan usaha Industri Modular yang menghasilkan berbagai produk modular, antara lain MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, dan Volumetrik. Produk-produk tersebut dirancang menggunakan sistem prefabrikasi berbasis modul yang dapat dirangkai menjadi bangunan sesuai kebutuhan. Segmen Industri Modular merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam penerapan *backward offsite construction* guna meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pembangunan.

INDUSTRY SEGMENT

The Industry segment covers Modular Industry business activities that produce various modular products, including MOLI (Modular Lite), WG Flatpack, and Volumetric. These products are designed using a module-based prefabrication system that can be assembled into buildings according to specific requirements. The Modular Industry segment is part of the Company's strategy in implementing backward offsite construction to enhance efficiency and quality in the construction process.

Produksi: Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya

Proses produksi pada segmen Industri Modular dijalankan melalui tahapan desain produk, rekayasa teknis, penyusunan modul, proses prefabrikasi, pengendalian mutu, pengemasan, pengiriman, hingga perakitan di lokasi proyek. Melalui sistem modular, sebagian proses konstruksi dapat dilakukan di luar lokasi proyek *(offsite)* sehingga mendukung percepatan waktu pelaksanaan, pengendalian kualitas yang lebih konsisten, efisiensi penggunaan material, serta pengurangan potensi pekerjaan ulang di lapangan.

Production: Process, Capacity, and Development

The production process in the Modular Industry segment is carried out thru stages of product design, technical engineering, module assembly, prefabrication, quality control, packaging, delivery, and assembly at the project site. Thru the modular system, part of the construction process can be done offsite, thereby supporting faster execution times, more consistent quality control, efficient material use, and reducing the potential for rework on-site.

Kapasitas operasional segmen Industri Modular tercermin dari kemampuan Perseroan dalam mengembangkan produk modular dengan variasi kebutuhan proyek, mulai dari bangunan ringan melalui MOLI *(Modular Lite),* solusi WG *Flatpack*, hingga produk *Volumetric* yang memiliki tingkat integrasi lebih tinggi. Kapasitas ini juga didukung oleh kapabilitas desain, standardisasi produk, pemanfaatan teknologi konstruksi, integrasi dengan *Building Information Modeling* (BIM), serta kemampuan Perseroan dalam menyediakan solusi modular untuk proyek yang membutuhkan kecepatan pembangunan, efisiensi biaya, dan konsistensi mutu.

The operational capacity of the Modular Industry segment is reflected in the Company's ability to develop modular products with varying project needs, ranging from lightweight buildings thru MOLI (Modular Lite), WG Flatpack solutions, to Volumetric products with a higher level of integration. This capacity is also supported by design capabilities, product standardization, the utilization of construction technology, integration with Building Information Modeling (BIM), as well as the Company's ability to provide modular solutions for projects that require construction speed, cost efficiency, and quality consistency.

Pada tahun 2025, perkembangan segmen Industri Modular dipengaruhi oleh terbatasnya perolehan proyek baru dan berkurangnya aktivitas proyek modular dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Perseroan tetap mempertahankan segmen ini sebagai salah satu kapabilitas strategis untuk mendukung transformasi konstruksi yang lebih efisien, inovatif, dan berorientasi keberlanjutan. Produk modular juga terus diarahkan untuk memperkuat nilai tambah Perseroan dalam penawaran proyek, khususnya pada segmen pasar yang membutuhkan solusi pembangunan cepat, fleksibel, dan ramah lingkungan.

In 2025, the development of the Modular Industry segment was influenced by the limited acquisition of new projects and a decrease in modular project activities compared to the previous year. Nevertheless, the Company continues to maintain this segment as one of its strategic capabilities to support a more efficient, innovative, and sustainability-oriented construction transformation. Modular products are also continuously directed to strengthen the Company's added value in project offerings, particularly in market segments that require fast, flexible, and environmentally friendly construction solutions.

Produktivitas Segmen Industri Modular 2024-2025
Modular Industry Segment Productivity 2024–2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	55,17	613,19	(558,02)	91 ↓
Kontrak Dihadapi Order Book	57,73	634,38	(576,65)	90,90 ↓

Sepanjang tahun 2025, segmen Industri Modular mencatat realisasi kontrak baru sebesar Rp55,17miliar, menurun signifikan sebesar Rp558,02miliar atau-91% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp613,19 miliar. Pada periode yang sama, nilai kontrak dihadapi segmen Industri Modular tercatat sebesar Rp57,73miliar, menurun Rp576,65miliar atau -90,90% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp634,38 miliar.

Throughout 2025, the Modular Industry segment recorded new contract realization of Rp55.17 billion, a significant decrease of Rp558.02 billion or 91% compared to the 2024 realization of Rp613.19 billion. In the same period, the order book for the Modular Industry segment was recorded at Rp57.73 billion, declining by Rp576.65 billion or 90.90% compared to Rp634.38 billion in 2024.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular

Modular Industry Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular 2024-2025
Modular Industry Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	3,05	237,35	(234,30)	(98,71) ↓
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(2,81)	(213,24)	210,43	(98,69) ↓
Laba Kotor Gross Profit	0,23	24,11	(23,88)	(99,05) ↓
Beban Usaha Operating Expenses	(0,24)	0,00	(0,24)	n/a
Laba Usaha Other Income	(0,01)	24,11	(24,12)	(100,05) ↓
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(0,08)	(4,27)	4,19	(98,13) ↓
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,00	0,00	0,00	n/a
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	n/a
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(8,51)	16,18	(24,69)	(152,60) ↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(8,36)	36,02	(44,38)	(123,20) ↓
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	-

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Industri Modular 2024-2025
Modular Industry Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	(6,36)	36,02	(42,38)	(117,67) ↓
Jumlah Aset Total Assets	43,45	134,48	(91,03)	(67,69) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	85,55	21,20	64,35	303,54 ↑

Pada tahun 2025, segmen Industri Modular mencatat pendapatan sebesar Rp3,05 miliar, menurun Rp234,30 miliar atau 98,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp237,35 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh signifikan berkurangnya aktivitas proyek modular serta terbatasnya perolehan proyek baru.

Sejalan dengan penurunan tersebut, segmen Industri Modular mencatatkan rugi bersih sebesar Rp6,36 miliar, berbalik dari laba bersih sebesar Rp36,02 miliar pada tahun 2024. Penurunan kinerja ini terutama disebabkan oleh turunnya volume pendapatan secara drastis serta tidak terserapnya biaya tetap secara optimal, yang berdampak langsung terhadap profitabilitas segmen.

Strategi Pengembangan Segmen Industri

Segmen industri modular Perseroan diarahkan sebagai salah satu pilar pertumbuhan melalui penguatan kapabilitas produksi, inovasi teknologi, dan perluasan pasar. WIKA Gedung terus mengembangkan sistem modular seperti MoLi, WG Flatpack, dan Volumetric untuk menghadirkan solusi konstruksi yang cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi operasional difokuskan pada optimalisasi fasilitas produksi, integrasi BIM, serta standarisasi produk agar lebih scalable dan kompetitif. Dari sisi pasar, Perseroan memperluas penetrasi ke sektor hunian, fasilitas publik, serta proyek dengan kebutuhan pembangunan cepat, termasuk melalui sinergi BUMN dan peluang swasta.

Selain itu, penguatan aspek keberlanjutan dilakukan melalui pengembangan solusi modular berbasis konsep Net-Zero Building dan penggunaan material ramah lingkungan, guna meningkatkan daya saing dan mendukung agenda ESG Perseroan.

Dengan penerapan strategi tersebut, Perseroan optimistis segmen jasa konstruksi dapat terus berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai kontributor utama pendapatan, tetapi juga sebagai pilar dalam memperkuat kinerja keuangan dan daya saing Perseroan di masa mendatang.

SEGMEN KONSESI

Segmen Konsesi mencakup kegiatan pengelolaan aset lahan milik pemerintah maupun BUMN/BUMD melalui skema investasi *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tujuan utama pengembangan bisnis ini adalah memperoleh peluang pekerjaan konstruksi sekaligus menghasilkan pendapatan berulang (*recurring income*). Segmen Konsesi

In 2025, the Modular Industry segment recorded revenue of Rp3.05 billion, a decrease of Rp234.30 billion or 98.71% compared to 2024, which amounted to Rp237.35 billion. This decline was driven by a significant reduction in modular project activities as well as limited acquisition of new projects.

In line with this decline, the Modular Industry segment recorded a net loss of Rp6.36 billion, reversing from a net profit of Rp36.02 billion in 2024. The decrease in performance was primarily due to a sharp decrease in revenue volume and the suboptimal absorption of fixed costs, which directly impacted the segment's profitability.

Industry Segment Development Strategy

The Company's modular industry segment is positioned as one of the growth pillars through strengthening production capabilities, technological innovation, and market expansion. WIKA Gedung continues to develop modular systems such as MoLi, WG Flatpack, and Volumetric to deliver construction solutions that are fast, efficient, and sustainable.

The operational strategy was focused on optimizing production facilities, integrating BIM, and standardizing products to enhance scalability and competitiveness. From a market perspective, the Company expanded its penetration into the residential sector, public facilities, and projects requiring rapid construction, including through synergies with SOEs and private sector opportunities.

In addition, the Company strengthened its sustainability aspect through the development of modular solutions based on the Net-Zero Building concept and the use of environmentally friendly materials, in order to enhance competitiveness and support the Company's ESG agenda.

Through the implementation of these strategies, the Company remains optimistic that the construction services segment will continue to grow sustainably, not only as a primary contributor to revenue but also as a key pillar in strengthening the Company's financial performance and competitiveness in the future.

CONCESSION SEGMENT

The Concession segment covers the management of land assets owned by the government as well as state-owned and regional-owned enterprises (SOEs/ROEs) through Public-Private Partnership (PPP) or Government and Business Entity Cooperation (KPBU) schemes. The primary objective of developing this business is to secure construction project opportunities while generating recurring

merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam menerapkan *forward integration*.

Saat ini, Perseroan memiliki dua proyek konsesi, yaitu proyek Hotel De Braga di Bandung yang dikerjakan bersama mitra PT Sarinah melalui skema *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 25 tahun, serta proyek konsesi Graha Mantap di Menteng, Jakarta, yang dikerjakan bersama mitra Bank Mandiri Taspen melalui skema BOT selama 30 tahun.

Produksi: Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya

Proses produksi pada segmen Konsesi dijalankan melalui tahapan identifikasi peluang aset, kajian kelayakan bisnis, penyusunan skema kerja sama, perencanaan investasi, pembangunan atau pengembangan aset, pengoperasian aset, pemeliharaan, hingga pengelolaan pendapatan selama masa konsesi. Berbeda dengan segmen konstruksi yang berorientasi pada penyelesaian proyek, aktivitas produksi pada segmen Konsesi lebih menitikberatkan pada kemampuan Perseroan dalam mengelola aset konsesi agar menghasilkan arus pendapatan berulang sepanjang periode kerja sama.

Kapasitas operasional segmen Konsesi tercermin dari portofolio proyek konsesi yang dimiliki Perseroan, jangka waktu pengelolaan aset, kemampuan pengelolaan kemitraan dengan pemilik aset, serta kapabilitas Perseroan dalam menjaga performa operasional dan nilai ekonomi aset selama masa konsesi. Kapasitas tersebut juga ditunjukkan melalui nilai kontrak dihadapi *(order book)* yang menggambarkan potensi pendapatan dari proyek konsesi yang sedang dikelola.

Pada tahun 2025, perkembangan segmen Konsesi masih ditopang oleh proyek eksisting, mengingat Perseroan tidak mencatat kontrak baru pada periode berjalan. Meskipun demikian, nilai kontrak dihadapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya kontribusi dari optimalisasi proyek konsesi yang telah berjalan. Dengan karakteristik pendapatan yang relatif berulang, segmen ini tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat keberlanjutan pendapatan Perseroan dalam jangka panjang.

income. The Concession segment is part of the Company's strategy in implementing forward integration.

Currently, the Company has two concession projects: Hotel De Braga project in Bandung, carried out in partnership with PT Sarinah under a Build-Operate-Transfer (BOT) scheme for 25 years, and Graha Mantap concession project in Menteng, Jakarta, undertaken in collaboration with Bank Mandiri Taspen under a BOT scheme for 30 years.

Production: Process, Capacity, and Development

The production process in the Concession segment is carried out thru stages of asset opportunity identification, business feasibility studies, partnership scheme formulation, investment planning, asset construction or development, asset operation, maintenance, and revenue management throughout the concession period. Unlike the construction segment, which is project-oriented, production activities in the Concession segment place more emphasis on the Company's ability to manage concession assets to generate recurring revenue streams throughout the cooperation period.

The operational capacity of the Concession segment is reflected in the portfolio of concession projects owned by the Company, the duration of asset management, the ability to manage partnerships with asset owners, and the Company's capability in maintaining operational performance and the economic value of assets during the concession period. This capacity is also demonstrated thru the value of contracts on hand (order book) which reflects the potential revenue from the concession projects being managed.

In 2025, the development of the Concession segment was still supported by existing projects, considering that the Company did not record any new contracts during the current period. Nevertheless, the contract value faced increased compared to the previous year, indicating a contribution from the optimization of ongoing concession projects. With relatively recurring revenue characteristics, this segment continues to play a strategic role in strengthening the sustainability of the Company's revenue in the long term.

Produktivitas Segmen Konsesi 2024-2025
Concession Segment Productivity 2024–2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	0	0	0	0
Kontrak Dihadapi Order Book	59,60	57,21	2.39	4.18 ↑

Sepanjang tahun 2025, segmen Konsesi tidak mencatat realisasi kontrak baru, namun membukukan nilai kontrak dihadapi sebesar Rp59,6 miliar, meningkat Rp 2,39 miliar atau 4,18% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp57,21 miliar. Peningkatan nilai kontrak dihadapi pada segmen konsesi didorong oleh optimalisasi kinerja proyek eksisting serta progres pekerjaan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Throughout 2025, the Concession segment did not record any new contract realization; however, it posted an order book of Rp59.6 billion, increased by Rp2.39 billion or 4.18% compared to Rp57.21 billion in 2024. The increase in the order book in the Concession segment was driven by the optimization of existing project performance and improved work progress compared to the previous year.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konsesi

Concession Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Konsesi 2024-2025
Concession Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	59,60	67,10	(7,50)	(11,18) ↓
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(53,44)	(61,84)	8,40	(13,58) ↓
Laba Kotor Gross Profit	6,16	5,26	0,90	17,11 ↑
Beban Usaha Operating Expenses	0,00	0,00	0,00	-
Laba Usaha Other Income	6,16	5,26	0,90	17,11 ↑
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(3,02)	(2,85)	(0,17)	5,96 ↑
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	164,45	(0,09)	164,54	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	3,30	2,32	0,98	42,24 ↑
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	3,30	2,32	0,98	42,24 ↑
Jumlah Aset Total Assets	**239,38**	**344,73**	**(105,35)**	**(30,56)** ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**263,46**	**318,75**	**(55,29)**	**(17,34)** ↓

Pada tahun 2025, segmen Konsesi mencatat pendapatan sebesar Rp59,60 miliar, menurun Rp7,50 miliar atau 11,18% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp67,10 miliar. Penurunan ini didorong oleh berkurangnya kontribusi pendapatan dari proyek konsesi serta belum optimalnya realisasi proyek baru pada periode berjalan.

In 2025, the Concession segment recorded revenue of Rp59.60 billion, a decrease of Rp7.50 billion, or 11.18%, compared to Rp67.10 billion in 2024. This decrease was driven by a reduced revenue contribution from concession projects and suboptimal realization of new projects in the current period.

Sejalan dengan kinerja tersebut, segmen Konsesi membukukan laba bersih sebesar Rp3,30 miliar, meningkat Rp0,98 miliar atau 42,24% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2,32 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh perbaikan margin operasional serta adanya kontribusi pendapatan non-operasional yang mendukung kinerja laba di tengah penurunan pendapatan usaha.

In line with this performance, the Concession segment recorded a net profit of Rp3.30 billion, an increase of Rp0.98 billion, or 42.24%, compared to RP2.32 billion in 2024. This increase was primarily driven by improved operating margins and the contribution of non-operating income, which supported profit performance amidst declining operating revenues.

Strategi Pengembangan Segmen Konsesi

Segmen jasa konsesi Perseroan dikembangkan sebagai sumber pendapatan berulang yang berkelanjutan, guna memperkuat struktur bisnis jangka panjang. Strategi difokuskan pada pengelolaan aset eksisting secara optimal serta pengembangan portofolio konsesi yang selektif dengan mempertimbangkan kelayakan finansial, profil risiko, dan potensi imbal hasil.

Concession Segment Development Strategy

The Company's concession services segment is developed as a source of sustainable recurring income to strengthen its long-term business structure. The strategy was focused on optimizing the management of existing assets and selectively expanding the concession portfolio by considering financial feasibility, risk profile, and return potential.

Perseroan memprioritaskan proyek konsesi pada sektor properti komersial, fasilitas publik, dan hospitality yang memiliki prospek permintaan stabil, sekaligus mengoptimalkan kinerja operasional melalui peningkatan tingkat okupansi, efisiensi biaya, dan kualitas layanan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi, termasuk penguatan struktur pembiayaan serta pengelolaan arus kas yang prudent. Dengan demikian, segmen jasa konsesi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang stabil terhadap pendapatan dan meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan dalam jangka panjang.

SEGMEN PROPERTI

Segmen Properti mencakup kegiatan penjualan dan/atau pengelolaan aset properti yang telah dimiliki Perseroan sebelumnya. Portofolio properti Perseroan antara lain meliputi Tamansari Tera, Tamansari Mahogany, Tamansari Prospero, Fave Hotel Karawang, serta beberapa aset properti lainnya. Ke depan, Perseroan tidak lagi menjadikan bisnis properti sebagai fokus utama pengembangan usaha.

Produksi: Proses, Kapasitas, dan Perkembangannya

Proses produksi pada segmen Properti dijalankan melalui tahapan pengelolaan aset dan portofolio properti, penyelesaian unit atau aset yang masih memerlukan pengembangan lanjutan, pemasaran, penjualan, serah terima unit, serta pengakuan pendapatan sesuai progres transaksi dan ketentuan akuntansi yang berlaku. Aktivitas pada segmen ini tidak lagi diarahkan pada pengembangan proyek properti baru secara agresif, melainkan pada optimalisasi aset eksisting, penyelesaian kewajiban proyek, dan monetisasi portofolio yang telah tersedia.

Kapasitas operasional segmen Properti tercermin dari portofolio aset yang dimiliki Perseroan, ketersediaan unit atau aset yang dapat dipasarkan, kemampuan pengelolaan penjualan, serta nilai kontrak dihadapi yang menunjukkan potensi pendapatan dari transaksi properti yang sedang berjalan. Kapasitas tersebut juga didukung oleh pengalaman Perseroan dalam mengembangkan proyek hunian, komersial, dan *hospitality*, serta kemampuan dalam mengelola aset properti agar tetap memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan.

Pada tahun 2025, perkembangan segmen Properti menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun Perseroan tidak mencatat kontrak baru pada periode berjalan. Peningkatan nilai kontrak dihadapi dan pendapatan menunjukkan adanya realisasi penjualan, pengakuan pendapatan, serta optimalisasi portofolio properti eksisting. Dengan arah bisnis yang lebih selektif, segmen Properti difokuskan untuk mendukung perbaikan arus kas dan penyelesaian portofolio lama, bukan lagi menjadi motor utama ekspansi usaha Perseroan.

The Company prioritized concession projects in the commercial property, public facilities, and hospitality sectors, which offer stable demand prospects, while also optimizing operational performance through increased occupancy rates, cost efficiency, and service quality.

To ensure sustainability, the Company applied a prudent approach to expansion, including strengthening its financing structure and maintaining disciplined cash flow management. Accordingly, the concession services segment is expected to provide stable revenue contributions and enhance long-term value for the Company.

PROPERTY SEGMENT

The Property segment covers the sale and/or management of property assets previously owned by the Company. The Company's property portfolio includes, among others, Tamansari Tera, Tamansari Mahogany, Tamansari Prospero, Fave Hotel Karawang, as well as several other property assets. Going forward, the Company will no longer position the property business as a primary focus of its business development.

Production: Process, Capacity, and Development

The production process in the Property segment is carried out thru stages of asset and property portfolio management, completion of units or assets that still require further development, marketing, sales, handover of units, and revenue recognition according to transaction progress and applicable accounting standards. Activities in this segment are no longer directed toward aggressively developing new property projects, but rather toward optimizing existing assets, fulfilling project obligations, and monetizing the available portfolio.

The operational capacity of the Property segment is reflected in the asset portfolio owned by the Company, the availability of marketable units or assets, sales management capabilities, and the value of contracts faced, which indicate the potential revenue from ongoing property transactions. This capacity is also supported by the Company's experience in developing residential, commercial, and hospitality projects, as well as its ability to manage property assets to continue contributing to financial performance.

In 2025, the development of the Property segment showed improvement compared to the previous year, although the Company did not record any new contracts during the current period. The increase in contract value and revenue indicates the realization of sales, revenue recognition, and optimization of the existing property portfolio. With a more selective business direction, the Property segment is focused on supporting cash flow improvement and the completion of the old portfolio, no longer serving as the main engine for the Company's business expansion.

Produktivitas Segmen Properti 2024-2025
Property Segment Productivity 2024–2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kontrak Baru New Contract	0,00	0,00	0	-
Kontrak Dihadapi Order Book	40,11	13,24	26,87	202,95% ↑

Sepanjang tahun 2025, segmen Properti mencatat nilai kontrak baru sebesar Rp 0 miliar, sama dengan tahun 2024 yang mencapai Rp0 miliar. Pada periode yang sama, nilai kontrak dihadapi segmen Properti tercatat sebesar Rp 40,11 miliar, meningkat Rp 26,87miliar atau 202,95% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 13,24 miliar.

Throughout 2025, the Property segment recorded new contract value of Rp0 billion, unchanged from 2024 at Rp0 billion. In the same period, the order book for the Property segment was recorded at Rp40.11 billion, an increase of Rp26.87 billion or 202.95% compared to Rp13.24 billion in 2024.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Properti

Property Segment Revenue and Profitability

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Properti 2024-2025
Property Segment Revenue and Profitability 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenue	40,11	0,82	39,29	4.791,46 ↑
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(34,80)	(0,70)	(34,10)	4.871,43 ↑
Laba Kotor Gross Profit	5,31	0,12	5,19	4.325,00 ↑
Beban Usaha Operating Expenses	0,00	0,00	0,00	n/a
Laba Usaha Other Income	5,31	0,12	5,19	4.325,00 ↑
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(0,74)	(0,02)	(0,72)	3.600,00 ↑
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	0,00	0,23	(0,23)	(100,00) ↓
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	0,00	0,00	0,00	n/a
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(0,24)	(0,71)	0,47	(66,20) ↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	4,33	(0,38)	4,71	berbalik positif turned positive
Pajak Penghasilan Income Tax	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	4,33	(0,38)	4,71	berbalik positif turned positive
Jumlah Aset Total Assets	**547,97**	453,95	94,02	20,71 ↑
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**382,19**	217,87	164,32	75,42 ↑

Pada tahun 2025, segmen Properti mencatat pendapatan sebesar Rp40,11 miliar, meningkat Rp39,29 miliar atau 4.791,46% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp0,82 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh mulai terealisasinya penjualan dan pengakuan pendapatan dari proyek properti yang sebelumnya masih dalam tahap pengembangan, serta peningkatan aktivitas bisnis pada segmen ini.

In 2025, the Property segment recorded revenue of Rp40.11 billion, an increase of Rp39.29 billion, or 4,791.46%, compared to Rp0.82 billion in 2024. This increase was due to the realization of sales and revenue recognition from property projects previously under development, as well as increased business activity in this segment.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, segmen Properti membukukan laba bersih sebesar Rp4,33 miliar, meningkat Rp4,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat rugi bersih sebesar Rp0,38 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pendapatan usaha yang mampu menutup beban operasional serta perbaikan kinerja proyek, sehingga segmen Properti berhasil berbalik mencatatkan laba pada tahun 2025.

In line with the revenue increase, the Property segment recorded a net profit of Rp4.33 billion, an increase of Rp4.71 billion compared to a net loss of Rp0.38 billion in 2024. This increase was due to a significant increase in operating revenue that was able to cover operating expenses and improved project performance, resulting in the Property segment successfully returning to profit in 2025.

Strategi Pengembangan Segmen Properti

Segmen jasa properti Perseroan pada periode pelaporan difokuskan pada optimalisasi kinerja aset eksisting, khususnya melalui percepatan penjualan sisa persediaan unit. Strategi ini ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga likuiditas, meningkatkan perputaran aset, serta memperkuat struktur keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Property Segment Development Strategy

The Company's property services segment during the reporting period was focused on optimizing the performance of existing assets, particularly through accelerating the sale of remaining unit inventory. This strategy was undertaken as part of efforts to maintain liquidity, increase asset turnover, and strengthen the Company's overall financial structure.

Perseroan mengarahkan pendekatan pemasaran yang lebih tersegmentasi dan adaptif, dengan memanfaatkan kanal digital, kerja sama dengan mitra penjualan, serta penyesuaian skema penawaran yang kompetitif guna mempercepat penyerapan pasar. Selain itu, pengelolaan biaya dan pemeliharaan aset tetap dijaga secara efisien untuk mempertahankan nilai properti yang dimiliki.

The Company adopted a more segmented and adaptive marketing approach by leveraging digital channels, collaborating with sales partners, and adjusting competitive offering schemes to accelerate market absorption. In addition, cost management and asset maintenance were carried out efficiently to preserve the value of owned properties.

Sejalan dengan strategi kehati-hatian, Perseroan belum melakukan pengembangan proyek baru pada segmen ini, dan lebih memprioritaskan konsolidasi portofolio yang ada. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas arus kas serta memberikan ruang yang lebih optimal bagi Perseroan dalam mengalokasikan sumber daya ke segmen bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi.

In line with a prudent strategy, the Company has not initiated new project developments in this segment and instead prioritizes the consolidation of its existing portfolio. This approach is expected to improve cash flow quality and provide greater flexibility for the Company to allocate resources toward business segments with higher growth potential.

SEGMEN GEOGRAFIS

Informasi segmen geografis Grup disajikan berdasarkan wilayah kegiatan usaha Perseroan. Pada periode 2024–2025, seluruh kinerja segmen geografis Perseroan berasal dari wilayah Indonesia, khususnya dari sisi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:

GEOGRAPHIC SEGMENT

The Group's geographic segment information is presented based on the Company's operational area. For the 2024–2025 period, all of the Company's geographic segment performance is derived from Indonesia, particularly in terms of revenue, as detailed below:

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Indonesia	1.623,56	3.673,53	(2.049,97)	(55,80)
Kalimantan	521,93	2.178,56	(1.656,63)	(76,05)
Jawa	677,36	939,24	(261,88)	(27,88)
DKI Jakarta	177,10	184,72	(7,62)	(4,12)
Banten	3,93	180,82	(176,89)	(97,83)
Sumatera	141,71	153,47	(11,76)	(7,66)

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Papua	47,88	35,10	12,78	36,41 ↑
Sulawesi	53,64	1,48	52,16	3.524,32 ↑
Aceh	0,00	0,09	(0,09)	(100,00) ↓
Ambon	0,00	0,05	(0,05)	(100,00) ↓
Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	0,00	0,00	0,00	-
Luar Negeri Overseas	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Total	**1.623,56**	**3.673,53**	**(2.049,97)**	**(55,80) ↓**

Kinerja Pendapatan per Segmen Geografis 2024-2025

Kinerja pendapatan per segmen geografis pada tahun 2025 mengalami pergeseran signifikan, di mana wilayah Jawa menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, yaitu sebesar Rp677,36 miliar atau 41,72% dari total pendapatan Rp1.623,56 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024, kontribusi terbesar berasal dari Kalimantan dengan kontribusi yaitu sebesar Rp2.178,56 miliar atau 59,30% dari total pendapatan sebesar Rp3.673,53 miliar.

Revenue Performance by Geographic Segment in 2024-2025

Revenue performance by geographic segment in 2025 experienced a significant shift, with Java becoming the region with the largest contribution, amounting to Rp677.36 billion, or 41.72% of total revenue of Rp1,623.56 billion. Meanwhile, in 2024, the largest contribution was originating from Kalimantan, with Rp2,178.56 billion, or 59.30% of total revenue of Rp3,673.53 billion.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview



Jakarta International Stadium (JIS)

Dalam penyusunan analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada Laporan Tahunan ini, Perseroan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan auditor Lith Alfansuri (Izin Akuntan Publik: Ap.1950) pada tanggal 27 Maret 2026.

Berdasarkan hasil audit, Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, mencakup posisi keuangan konsolidasian Grup, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In preparing the analysis and discussion of financial performance in this Annual Report, the Company refers to the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the year ended December 31, 2025. These statements were audited by Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, with Lith Alfansuri (Public Accountant License: Ap.1950) as the auditor on March 27, 2026.

Based on the audit results, the Public Accounting Firm declares that the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk are presented fairly, in all material respects, covering the Group's consolidated financial position, financial performance, and consolidated cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Aset

Assets

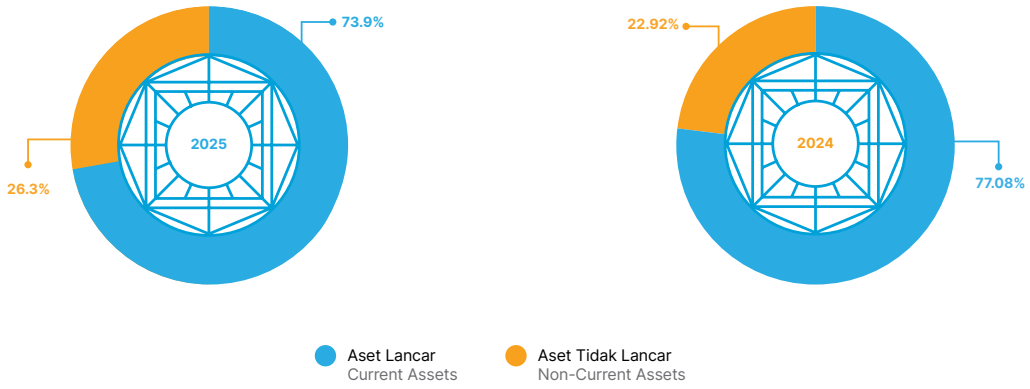
Tabel Aset 2024-2025
Assets Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets	2.991,15	4.414,67	(1.423,52)	(32,25)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.052,66	1.312,60	(259,94)	(19,80)
Jumlah Aset Total Assets	**4.043,81**	**5.727,27**	**(1.683,46)**	**(29,40)**

Per 31 Desember 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp4.043,81 miliar, menurun Rp1.683,46 miliar atau 29,40% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp5.727,27 miliar. Penurunan tersebut terutama didorong oleh berkurangnya aset lancar, khususnya pada kas dan setara kas serta piutang usaha, sejalan dengan penurunan aktivitas operasional dan upaya Perseroan dalam melakukan penyesuaian portofolio serta optimalisasi aset.

As of December 31, 2025, the Company's total assets were recorded at Rp4,043.81 billion, a decrease of Rp1,683.46 billion, or 29.40%, compared to the previous year's position of Rp5,727.27 billion. This decrease was primarily driven by a reduction in current assets, particularly cash and cash equivalents and trade receivables, in line with the decline in operational activities and the Company's efforts to adjust its portfolio and optimize assets.

Komposisi Aset 2024-2025
Asset Composition 2024-2025



Aset Lancar

Current Assets

Tabel Aset Lancar 2023-2024
Current Assets Table 2023-2024

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	391,13	1.030,73	(639,60)	(62,05) ↓
Piutang Usaha - Neto Trade Receivables - Net				
Pihak Berelasi Related Parties	167,68	263,20	(95,52)	(36,29) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	67,81	281,96	(214,15)	(75,95) ↓
Piutang Retensi - Neto				
Pihak Berelasi Related Parties	118,37	161,71	(43,34)	(26,80) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	216,72	398,24	(181,52)	(45,58) ↓
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers				
Pihak Berelasi Related Parties	130,49	195,12	(64,63)	(33,12) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	133,60	241,40	(107,80)	(44,65) ↓
Piutang Yang Belum Ditagih Unbilled Receivables	7,54	9,36	(1,82)	(19,44) ↓
Persediaan Inventories	306,09	350,03	(43,94)	(12,55) ↓
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	400,62	331,37	69,25	20,90 ↑
Uang Muka Advances	83,82	124,03	(40,21)	(32,42) ↓
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	127,83	215,02	(87,19)	(40,55) ↓
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi Construction Work in Progress				
Pihak Berelasi Related Parties	290,28	374,78	(84,50)	(22,54) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	549,18	437,71	111,47	25,47 ↓
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**2.991,15**	4.414,67	(1.423,52)	(32,25) ↓

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat jumlah aset lancar sebesar Rp2.991,15 miliar, menurun Rp1.423,52 miliar atau 32,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp4.414,67 miliar. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan kas dan setara kas, piutang usaha, serta tagihan bruto kepada pemberi kerja, seiring dengan menurunnya aktivitas operasional dan upaya percepatan penyelesaian proyek serta penagihan.

In 2025, the Company recorded current assets of Rp2,991.15 billion, a decrease of Rp1,423.52 billion, or 32.25%, compared to Rp4,414.67 billion in 2024. This decrease was primarily driven by a decrease in cash and cash equivalents, trade receivables, and gross amount due from customers, in line with reduced operational activities and efforts to accelerate project completion and collection.

Kas dan Setara Kas

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan kas dan setara kas sebesar Rp391,13 miliar, menurun Rp639,60 miliar atau 62,05% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp1.030,73 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk mendukung kebutuhan operasional, penyelesaian kewajiban, serta tekanan arus kas dari aktivitas usaha.

Cash and Cash Equivalents

As of December 31, 2025, the Company recorded cash and cash equivalents of Rp391.13 billion, a decrease of Rp639.60 billion, or 62.05%, compared to Rp1,030.73 billion in 2024. This decrease was primarily due to the use of cash to support operational needs, settle liabilities, and cash flow pressures from operating activities.

Piutang Usaha

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan piutang usaha sebesar Rp235,49 miliar, menurun Rp309,67 miliar atau 56,81% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp545,16 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume proyek serta upaya Perseroan dalam melakukan percepatan penagihan dan pengelolaan piutang secara lebih selektif.

Trade Receivables

As of December 31, 2025, the Company recorded trade receivables of Rp235.49 billion, a decrease of Rp309.67 billion, or 56.81%, compared to Rp545.16 billion in 2024. This decrease was mainly driven by a decrease in project volume and the Company's efforts to accelerate collection and manage receivables more selectively.

Persediaan

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan persediaan sebesar Rp306,09 miliar, menurun Rp43,94 miliar atau 12,55% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp350,03 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh optimalisasi pengelolaan persediaan serta penyesuaian kebutuhan material sejalan dengan penurunan aktivitas proyek.

Inventories

As of December 31, 2025, the Company recorded inventories of Rp306.09 billion, a decrease of Rp43.94 billion, or 12.55%, compared to Rp350.03 billion in 2024. This decrease was mainly driven by the optimization of inventory management and adjustments to material requirements in line with the decline in project activity.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets Table

Tabel Aset Tidak Lancar 2024-2025
Non-Current Assets 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Piutang Lain-Lain Other Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	112,75	165,41	(52,66)	(31,84) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	0,1	1,47	(1,37)	(93,20) ↓
Tanah Akan Dikembangkan Land For Development	66,73	46,68	20,05	42,95 ↑
Penyertaan Saham Investment In Shares	3,55	3,55	0,00	0,00
Properti Investasi Investment Property	259,57	259,41	0,16	0,06 ↑
Aset Kerja Sama Assets of Co-operation	226,41	237,49	(11,08)	(4,66) ↓
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	38,94	47,48	(8,54)	(17,99) ↓
Aset Takberwujud - Neto Intangible Assets - Net	9,09	13,53	(4,44)	(32,81) ↓
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate	0	18,24	(18,24)	(100,00) ↓
Investasi pada Ventura Bersama Investment of Joint Ventures	335,32	519,35	(184,03)	(35,43) ↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non Current Assets	**1.052,66**	**1.312,60**	**(259,94)**	**(19,80)** ↓

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat aset tidak lancar sebesar Rp1.052,66 miliar, menurun Rp259,94 miliar atau 19,80% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.312,60 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan investasi pada ventura bersama, entitas asosiasi, serta aset tetap, seiring dengan penyesuaian portofolio investasi dan optimalisasi aset non-operasional.

In 2025, the Company recorded non-current assets of Rp1,052.66 billion, a decrease of Rp259.94 billion, or 19.80%, compared to Rp1,312.60 billion in 2024. This decrease was primarily attributable to lower investments in joint ventures, associates, and fixed assets, in line with investment portfolio adjustments and optimization of non-operational assets.

Aset Tetap

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan aset tetap sebesar Rp38,94 miliar, menurun Rp8,54 miliar atau 17,99% dibandingkan dengan posisi tahun 2024 yang sebesar Rp47,48 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban penyusutan serta terbatasnya penambahan aset tetap baru sebagai bagian dari kebijakan efisiensi belanja modal (capex).

Fixed Assets

As of December 31, 2025, the Company recorded fixed assets of Rp38.94 billion, a decrease of Rp8.54 billion, or 17.99%, compared to Rp47.48 billion in 2024. This decrease was primarily attributable to depreciation expenses and limited additions of new fixed assets as part of the capital expenditure (capex) efficiency policy.

Aset Kerja Sama

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan aset kerja sama sebesar Rp226,41 miliar, menurun Rp11,08 miliar atau 4,66% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp237,49 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh realisasi proyek kerja sama serta penyesuaian nilai investasi pada proyek-proyek yang telah berjalan.

Joint Venture Assets

As of December 31, 2025, the Company recorded joint venture assets of Rp226.41 billion, a decrease of Rp11.08 billion, or 4.66%, compared to Rp237.49 billion in 2024. This decrease was driven by the realization of joint venture projects and adjustments to the investment value of ongoing projects.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp0,00 miliar, menurun Rp18,24 miliar atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp18,24 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh divestasi atau penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi.

Investment in Associated Entities

As of December 31, 2025, the Company recorded investments in associated entities of Rp0.00 billion, a decrease of Rp18.24 billion, or 100.00%, compared to Rp18.24 billion in 2024. This decrease was mainly driven by divestments or a decrease in the value of investments in associated entities.

Investasi pada Ventura Bersama

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan investasi pada ventura bersama sebesar Rp335,32 miliar, menurun Rp184,03 miliar atau 35,43% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp519,35 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh penyesuaian nilai investasi serta kinerja ventura bersama yang belum optimal dan/atau adanya distribusi hasil investasi.

Investment in Joint Ventures

As of December 31, 2025, the Company recorded investments in joint ventures of Rp335.32 billion, a decrease of Rp184.03 billion, or 35.43%, compared to Rp519.35 billion in 2024. This decrease was driven by adjustments in investment value, suboptimal joint venture performance, and/or distribution of investment returns.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas 2024-2025
Liabillities Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilites	1.733,97	2.515,36	(781,39)	(31,06) ↓
Liabilitas Jangka Panjang Non Current Liabilities	338,59	605,95	(267,36)	(44,14) ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**2.072,56**	**3.121,30**	**(1.048,74)**	**(33,59) ↓**

Per 31 Desember 2025, jumlah liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp2.072,56 miliar, menurun Rp1.048,74 miliar atau 33,59% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp3.121,30 miliar.

As of December 31, 2025, the Company's total liabilities were recorded at Rp2,072.56 billion, a decrease of Rp1,048.74 billion, or 33.59%, compared to Rp3,121.30 billion the previous year.

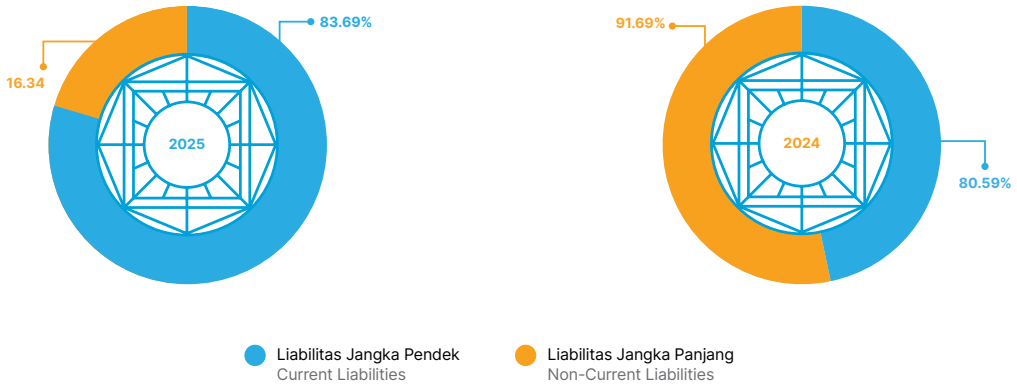
Penurunan tersebut didorong oleh penurunan signifikan pada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, terutama berasal dari:
1. penurunan utang usaha,
2. penurunan pinjaman bank,
3. serta penurunan liabilitas terkait proyek (advance/uang muka).

Hal ini mencerminkan upaya Perseroan dalam melakukan deleveraging dan pengelolaan kewajiban secara lebih konservatif, termasuk melalui pelunasan utang dan pengurangan eksposur pembiayaan di tengah tekanan likuiditas.

This decrease was driven by a significant decrease in current and non-current liabilities, primarily from:
1. a decrease in trade payables,
2. a decrease in bank loans,
3. and a decrease in project-related liabilities (advance payments).

This reflects the Company's efforts to deleverage and manage liabilities more conservatively, including through debt repayment and reduced financing exposure amidst liquidity pressures.

Komposisi Liabilitas 2024 – 2025
Liabilities Composition 2024 – 2025



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities 2024 – 2025

Tabel Liabilitas Jangka Pendek 2024-2025
Current Liabilities Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans				
Pihak Berelasi Related Parties	73,04	350,00	(276,96)	(79,13) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	0,00	22,00	(22,00)	(100,00) ↓
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Berelasi Related Parties	158,72	473,87	(315,15)	(66,51) ↓
Pihak Ketiga Third Parties	826,85	1.184,36	(357,51)	(30,19) ↓
Beban Akrual Accrued Expenses	284,81	356,41	(71,60)	(20,09) ↓
Utang Pajak Tax Payables	19,49	8,00	11,49	143,63 ↑
Liabilitas Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Liabilities	41,43	47,86	(6,43)	(13,43) ↓

Tabel Liabilitas Jangka Pendek 2024-2025
Current Liabilities Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Portion of Long Term Liability				
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances from Project Owners and Consumers	2,04	15,83	(13,79)	(87,11) ↓
Pinjaman Bank Bank Loan	75,65	9,42	66,23	703,29 ↑
Utang Lain-lain Other Payables				
Pihak Berelasi Related Parties	39,12	36,90	2,22	6,02 ↑
Pihak Ketiga Third Parties	3,79	3,42	0,37	10,91 ↑
Pendapatan Diterima Di Muka Advances Received	7,63	7,28	0,35	4,86 ↑
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilites	**1.733,97**	**2.515,36**	**(781,39)**	**(31,06)** ↓

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.733,97 miliar, menurun sebesar Rp781,39 miliar atau 31,06% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.515,36 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya utang usaha baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga, serta penurunan pinjaman bank jangka pendek, khususnya kepada pihak berelasi, seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan pengelolaan kewajiban secara lebih disiplin. Selain itu, penurunan juga dipengaruhi oleh berkurangnya uang muka dari pemberi kerja dan konsumen yang mencerminkan dinamika penyelesaian proyek berjalan.

In 2025, the Company recorded current liabilities of Rp1,733.97 billion, a decrease of Rp781.39 billion or 31.06% compared to 2024, which amounted to Rp2,515.36 billion. This decrease was mainly driven by a reduction in trade payables to both related and third parties, as well as a decline in short-term bank loans, particularly from related parties, in line with the Company's efforts to manage its obligations in a more disciplined manner. In addition, the decrease was also influenced by lower advances from employers and customers, reflecting the dynamics of ongoing project settlements.

Di sisi lain, Perseroan mencatat peningkatan pada pinjaman bank jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun serta utang pajak, yang menunjukkan adanya penyesuaian struktur kewajiban dan reklasifikasi liabilitas jangka panjang menjadi jangka pendek. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan langkah Perseroan dalam melakukan optimalisasi struktur liabilitas di tengah upaya menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan

On the other hand, the Company recorded an increase in short-term bank loans maturing within one year and tax payable, indicating adjustments in the structure of liabilities and the reclassification of non-current liabilities into current liabilities. Overall, these changes reflect the Company's efforts to optimize its liability structure while maintaining liquidity and financial stability.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp73,04 miliar, menurun Rp298,96 miliar atau 80,36% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp372,00 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman kepada pihak berelasi serta tidak adanya lagi pinjaman kepada pihak ketiga sebagai bagian dari upaya Perseroan dalam menurunkan beban bunga dan memperbaiki struktur liabilitas jangka pendek.

Short-Term Bank Loans

As of December 31, 2025, the Company recorded short-term bank loans of Rp73.04 billion, a decrease of Rp298.96 billion or 80.36% compared to 2024, which amounted to Rp372.00 billion. This decrease was mainly due to the repayment of loans to related parties and the absence of third-party borrowings, as part of the Company's efforts to reduce interest expenses and improve its short-term liability structure.

Utang Usaha

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan utang usaha sebesar Rp985,57 miliar, menurun Rp672,67 miliar atau 40,57% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.658,24 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan volume aktivitas proyek serta percepatan pembayaran kepada vendor dan pemasok sebagai bagian dari strategi pengelolaan kewajiban dan peningkatan hubungan dengan mitra usaha.

Trade Payables

As of December 31, 2025, the Company recorded trade payables of Rp985.57 billion, a decrease of Rp672.67 billion or 40.57% compared to 2024, which amounted to Rp1,658.24 billion. This decrease was driven by lower project activity volume and accelerated payments to vendors and suppliers as part of the Company's liability management strategy and efforts to strengthen business partner relationships.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang 2024-2025
Non-current Liabillities Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-term Liability Net of Current Maturities				
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances from Project Owners and Consumers	314,11	507,54	(193,43)	(38,11) ↓
Pinjaman Bank Bank Loan	0,00	75,65	(75,65)	(100,00) ↓
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	24,48	22,76	1,72	7,56 ↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non Current Liabilities	**338,59**	**605,95**	**(267,36)**	**(44,14)** ↓

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sebesar Rp338,59 miliar, menurun Rp267,36 miliar atau 44,14% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp605,95 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya kewajiban jangka panjang, terutama pada akun uang muka pemberi kerja dan konsumen serta pelunasan pinjaman bank jangka panjang, seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan penataan struktur liabilitas dan pengelolaan kewajiban secara lebih konservatif.

In 2025, the Company recorded non-current liabilities of Rp338.59 billion, a decrease of Rp267.36 billion or 44.14% compared to 2024, which amounted to Rp605.95 billion. This decrease was driven by a reduction in long-term obligations, particularly in the advances from employers and customers account, as well as the repayment of long-term bank loans, in line with the Company's efforts to restructure its liabilities and manage obligations in a more conservative manner.

Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan uang muka pemberi kerja dan konsumen jangka panjang sebesar Rp314,11 miliar, menurun Rp193,43 miliar atau 38,11% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp507,54 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi proyek berjalan serta pengakuan pendapatan atas uang muka yang sebelumnya diterima, sehingga saldo kewajiban berkurang seiring dengan progres penyelesaian proyek.

Advances from Owners and Customers

As of December 31, 2025, the Company recorded long-term advances from owners and customers of Rp314.11 billion, a decrease of Rp193.43 billion or 38.11% compared to 2024, which amounted to Rp507.54 billion. This decrease was mainly due to the realization of ongoing projects and the recognition of revenue from previously received advances, resulting in a reduction in the liability balance in line with project completion progress.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025, Perseroan tidak lagi memiliki pinjaman bank jangka panjang (Rp0,00 miliar), menurun Rp75,65 miliar atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp75,65 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh pelunasan seluruh fasilitas pinjaman jangka panjang sebagai bagian dari strategi Perseroan dalam menurunkan tingkat leverage dan beban keuangan.

Long-Term Bank Loans

As of December 31, 2025, the Company no longer had any long-term bank loans (Rp0.00 billion), a decrease of Rp75.65 billion or 100.00% compared to 2024, which amounted to Rp75.65 billion. This decrease was driven by the full repayment of long-term loan facilities as part of the Company's strategy to reduce leverage and financial burden.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas 2024-2025
Equity Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owner of the Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100. Modal Dasar 38.000.000.000 saham Share Capital - Par Value Rp100. Authorized Capital 38,000,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor 9.572.000.000 saham Issued and Paid Up Capital 9,572,000,000 shares	957,20	957,20	0,00	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid In Capital	524,08	524,08	0,00	0,00
Saldo Laba Retained Earnings				
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	172,32	165,53	6,79	4,10 ↑
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	319,29	963,25	(643,96)	(66,86) ↓
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income (Loss)	(3,77)	(6,09)	2,32	38,11 ↑
Sub Jumlah Sub Total	1.969,13	2.603,97	(634,84)	(24,38) ↓
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	2,12	2,00	0,12	5,72 ↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	**1.971,25**	**2.605,97**	**(634,72)**	**(24,36) ↓**

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan total ekuitas sebesar Rp1.971,25 miliar, menurun Rp634,72 miliar atau 24,36% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp2.605,97 miliar. Penurunan tersebut terutama didorong oleh penurunan signifikan pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebagai dampak dari rugi bersih tahun berjalan, meskipun sebagian diimbangi oleh peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya serta perbaikan pada komponen penghasilan komprehensif lainnya.

In 2025, the Company recorded total equity of Rp1,971.25 billion, a decrease of Rp634.72 billion or 24.36% compared to 2024, which amounted to Rp2,605.97 billion. This decline was primarily driven by a significant reduction in retained earnings due to the net loss for the year, although it was partially offset by an increase in appropriated retained earnings and improvements in other comprehensive income components.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2024-2025

Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Revenues	1.623,56	3.673,53	(2.049,97)	(55,80)
Beban Pokok Penjualan Cost of Revenues	(1.478,13)	(3.366,03)	1.887,90	56,08
Laba Kotor Gross Profit	145,42	307,50	(162,08)	(52,71)
Beban Usaha Operating Expenses	(187,45)	(114,42)	(73,03)	(63,83)
Pendapatan Lainnya Other Income	157,98	135,06	22,92	16,98
Beban Lainnya Other Expenses	(558,43)	(230,45)	(327,98)	(142,32)
Beban Keuangan Financial Expense	(17,52)	(28,25)	10,73	37,97
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expenses	(39,06)	(96,41)	57,35	59,49
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi Share in Profit (Loss) on Associate	(18,24)	(4,79)	(13,45)	(280,79)
Bagian Laba Ventura Bersama Share in Profit on Joint Venture	(112,95)	99,66	(212,61)	(213,33)
Laba (Rugi) Selisih Kurs Foreign Exchange Gain (Loss)	0,01	0,06	(0,05)	(85,23)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(630,25)	67,96	(698,21)	(1.027,33)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	-	-
Laba Neto Tahun Berjalan Net Profit For The Year	(630,25)	67,96	(698,21)	(1.027,33)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Profit (Loss) After Tax				
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss				
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement on Defined Benefit Plans	2,32	(11,35)	13,67	120,45
Jumlah Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Total Item that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit or Loss	2,32	(11,35)	13,67	120,45
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income For The Year	(627,93)	56,60	(684,53)	(1.209,15)
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Income For The Current Year Attributable to :				
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	(630,36)	67,89	(698,25)	(1.028,80)
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,11	0,07	0,04	65,84
Jumlah Total	(630,25)	67,96	(698,21)	(1.027,33)

Tabel Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 2024-2025
Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Table 2024-2025

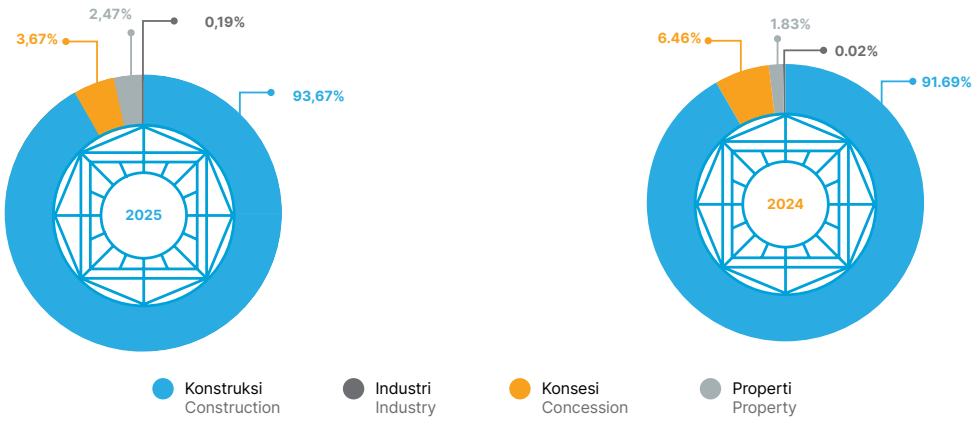
Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada : Total Comprehensive Income For The Year Attributable to :				
Pemilik Entitas Induk Equity Holders of The Parent Entity	(628,04)	56,54	(684,58)	(1.210,53)
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	0,11	0,07	0,04	65,84
Jumlah **Total**	(627,93)	56,60	(684,53)	(1.209,15)
Laba Bersih Per Saham (Rupiah Penuh) **Earnings Per Share (Full Rupiah)**	(65,86)	7,09	(72,95)	(1.028,64)

PENDAPATAN
REVENUE

Tabel Pendapatan 2024-2025
Revenue 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Jasa Konstruksi Construction Service	1.520,80	3.368,26	(1.847,46)	(54,85)
Industri Industry	3,05	237,35	(234,30)	(98,72)
Konsesi Concession	59,60	67,10	(7,50)	(11,18)
Properti Property	40,11	0,82	39,29	4.791,06
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**1.623,56**	3.673,53	(2.049,97)	(55,80)

Komposisi Pendapatan 2024 – 2025
Revenue Composition 2024 – 2025



Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp1.623,56 miliar, menurun Rp2.049,97 miliar atau 55,80% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.673,53 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya kontribusi dari segmen jasa konstruksi sebagai lini bisnis utama

As of December 31, 2025, the Company recorded total revenue of Rp1,623.56 billion, a decrease of Rp2,049.97 billion or 55.80% compared to 2024, which amounted to Rp3,673.53 billion. This decline was mainly driven by a reduction in contributions from the construction services segment as the Company's main line of

Perseroan, serta penurunan signifikan pada segmen industri modular seiring terbatasnya perolehan proyek baru dan penyesuaian strategi bisnis di tengah dinamika industri konstruksi.

business, as well as a significant decrease in the modular industry segment due to limited new project acquisitions and adjustments to the business strategy amid dynamics in the construction industry.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Tabel Beban Pokok Pendapatan 2023-2024
Cost of Revenue Table 2023-2024

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Jasa Konstruksi Construction Service	1.387,08	3.090,25	(1.703,17)	(55,10) ↓
Industri Industry	2,81	213,24	(210,43)	(98,68) ↓
Konsesi Concession	53,44	61,84	(8,40)	(13,58) ↓
Properti Property	34,80	0,70	34,10	4.871,43 ↑
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	**1.478,13**	**3.366,03**	**(1.887,90)**	**(56,09) ↓**

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp1.478,13 miliar, menurun sebesar Rp1.887,90 miliar atau 56,09% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp3.366,03 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan usaha, khususnya pada segmen jasa konstruksi sebagai kontributor utama, serta penurunan signifikan pada segmen industri modular akibat berkurangnya volume proyek yang dikerjakan. Di sisi lain, peningkatan pada segmen properti mencerminkan adanya aktivitas proyek yang mulai berjalan pada tahun 2025, meskipun kontribusinya terhadap total masih relatif terbatas.

As of December 31, 2025, the Company recorded cost of revenue of Rp1,478.13 billion, a decrease of Rp1,887.90 billion or 56.09% compared to 2024, which amounted to Rp3,366.03 billion. This decline was in line with the decrease in revenue, particularly from the construction services segment as the Company's main contributor, as well as a significant reduction in the modular industry segment due to lower project volumes. On the other hand, the increase in the property segment reflects the commencement of project activities in 2025, although its contribution to the total remained relatively limited.

Laba Kotor

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan laba kotor sebesar Rp145,42 miliar, menurun Rp162,08 miliar atau 52,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp307,50 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh turunnya pendapatan usaha yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan efisiensi beban pokok pendapatan.

Gross Profit

As of December 31, 2025, the Company recorded gross profit of Rp145.42 billion, a decrease of Rp162.08 billion or 52.71% compared to 2024, which amounted to Rp307.50 billion. This decline was mainly driven by the decrease in revenue, which was not fully offset by cost efficiency in cost of revenue.

Beban Usaha

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat beban usaha sebesar Rp187,45 miliar, meningkat Rp73,03 miliar atau 63,83% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp114,42 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan biaya operasional serta beban administrasi dan umum dalam mendukung aktivitas Perseroan.

Operating Expenses

As of December 31, 2025, the Company recorded operating expenses of Rp187.45 billion, an increase of Rp73.03 billion or 63.83% compared to 2024, which amounted to Rp114.42 billion. This increase was mainly driven by higher operating costs as well as general and administrative expenses in support of the Company's activities.

Beban Keuangan

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan beban keuangan sebesar Rp17,52 miliar, menurun Rp10,73 miliar atau 37,99% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp28,25 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo pinjaman berbunga seiring dengan upaya Perseroan dalam melakukan pelunasan pinjaman dan efisiensi struktur pendanaan.

Finance Costs

As of December 31, 2025, the Company recorded finance costs of Rp17.52 billion, a decrease of Rp10.73 billion or 37.99% compared to 2024, which amounted to Rp28.25 billion. This decline was mainly due to the reduction in interest-bearing loan balances in line with the Company's loan repayment efforts and optimization of its funding structure.

Bagian Laba Ventura Bersama

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan bagian rugi ventura bersama sebesar Rp112,95 miliar, menurun Rp212,61 miliar atau 213,33% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat laba sebesar Rp99,66 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kinerja ventura bersama yang mengalami tekanan akibat penurunan aktivitas proyek.

Share of Profit (Loss) from Joint Ventures

As of December 31, 2025, the Company recorded a share of loss from joint ventures of Rp112.95 billion, a decrease of Rp212.61 billion or 213.33% compared to 2024, which recorded a profit of Rp99.66 billion. This decline was mainly due to underperformance of joint ventures affected by reduced project activity.

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat rugi atas entitas asosiasi sebesar Rp18,24 miliar, memburuk Rp13,45 miliar atau 280,79% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat rugi sebesar Rp4,79 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh melemahnya kinerja operasional entitas asosiasi.

Share of Profit (Loss) from Associates

As of December 31, 2025, the Company recorded a loss from associates of Rp18.24 billion, a deterioration of Rp13.45 billion or 280.79% compared to 2024, which recorded a loss of Rp4.79 billion. This decline was mainly driven by weaker operational performance of the associated entities.

Pendapatan Lainnya

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan pendapatan lainnya sebesar Rp157,98 miliar, meningkat Rp22,92 miliar atau 16,97% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp135,06 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan non-operasional.

Other Income

As of December 31, 2025, the Company recorded other income of Rp157.98 billion, an increase of Rp22.92 billion or 16.97% compared to 2024, which amounted to Rp135.06 billion. This increase was mainly due to higher non-operating income.

Beban Pajak Penghasilan Final

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan beban pajak penghasilan final sebesar Rp39,06 miliar, menurun Rp57,35 miliar atau 59,49% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp96,41 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak final.

Final Income Tax Expense

As of December 31, 2025, the Company recorded final income tax expense of Rp39.06 billion, a decrease of Rp57.35 billion or 59.49% compared to 2024, which amounted to Rp96.41 billion. This decline was mainly due to lower revenue subject to final tax.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp630,25 miliar, menurun Rp698,21 miliar atau 1.027,56% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat laba sebesar Rp67,96 miliar. Penurunan ini terutama didorong oleh penurunan pendapatan, peningkatan beban usaha, serta rugi dari ventura bersama dan entitas asosiasi.

Profit (Loss) for the Year

As of December 31, 2025, the Company recorded a net loss for the year of Rp630.25 billion, a decline of Rp698.21 billion or 1,027.56% compared to 2024, which recorded a profit of Rp67.96 billion. This decline was mainly driven by lower revenue, higher operating expenses, as well as losses from joint ventures and associates.

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp627,93 miliar, menurun Rp684,53 miliar atau 1.209,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp56,60 miliar. Dibandingkan dengan rugi bersih tahun berjalan, jumlah laba komprehensif mengalami perbaikan yang terbatas akibat adanya penghasilan komprehensif lain dari pengukuran kembali program imbalan pasti.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

As of December 31, 2025, the Company recorded a comprehensive loss of Rp627.93 billion, a decrease of Rp684.53 billion or 1,209.41% compared to 2024, which amounted to Rp56.60 billion. Compared to net loss for the year, total comprehensive income showed a limited improvement due to other comprehensive income from remeasurement of defined benefit plans.

Laba Bersih per Saham

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi bersih per saham sebesar Rp(65,86), menurun Rp72,95 atau 1.028,21% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp7,09. Penurunan ini sejalan dengan penurunan signifikan laba bersih Perseroan pada tahun 2025.

Earnings per Share

As of December 31, 2025, the Company recorded a loss per share of Rp(65.86), a decrease of Rp72.95 or 1,028.21% compared to 2024, which amounted to Rp7.09. This decline was in line with the significant decrease in the Company's net profit in 2025.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Arus Kas Konsolidasian 2024-2025
Consolidated Cash Flow Table 2024-2025

Uraian Description	2025 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	2024 (Rp-Miliar) (Rp-Billion)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase (%) Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(445,15)	(256,58)	(188,57)	(73,50)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	136,91	53,04	83,87	158,16
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(331,38)	197,76	(529,14)	(267,57)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(639,61)	(5,79)	(633,82)	(10.948,53)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Impact of Exchange Differences	0,01	0,09	(0,08)	(90,77)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.030,73	1.036,43	(5,70)	(0,55)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	391,13	1.030,73	(639,60)	(62,05)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2025, arus kas dari aktivitas operasi Perseroan menurun sebesar Rp188,57 miliar atau 73,50%, dari negatif Rp256,58 miliar pada tahun 2024 menjadi negatif Rp445,15 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan serta peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban operasional seiring dengan tekanan pada kinerja usaha.

Cash Flows from Operating Activities

As of December 31, 2025, the Company's cash flows from operating activities decreased by Rp188.57 billion or 73.50%, from a negative Rp256.58 billion in 2024 to a negative Rp445.15 billion. This decline was mainly driven by lower cash receipts from customers and increased payments to suppliers and operating expenses amid pressure on business performance.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2025, arus kas dari aktivitas investasi Perseroan meningkat sebesar Rp83,87 miliar atau 158,16%, dari Rp53,04 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp136,91 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pengurangan investasi dan pengembalian uang muka setoran saham.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2025, the Company's cash flows from investing activities increased by Rp83.87 billion or 158.16%, from Rp53.04 billion in 2024 to Rp136.91 billion. This increase was mainly due to proceeds from the reduction of investments and the return of advances for share subscriptions.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2025, arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan menurun sebesar Rp529,14 miliar atau 267,57%, dari Rp197,76 miliar pada tahun 2024 menjadi negatif Rp331,38 miliar. Penurunan tersebut terutama didorong oleh pembayaran pinjaman bank dan bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan pinjaman baru.

Cash Flows from Financing Activities

As of December 31, 2025, the Company's cash flows from financing activities decreased by Rp529.14 billion or 267.57%, from Rp197.76 billion in 2024 to a negative Rp331.38 billion. This decline was mainly driven by higher repayments of bank loans and interest payments compared to new loan proceeds.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas merupakan hasil akumulasi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar negatif Rp639,61 miliar, turun Rp633,82 miliar atau 10.948,53% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat negatif Rp5,79 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tekanan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents represents the cumulative result of operating, investing, and financing cash flows. As of December 31, 2025, the Company recorded a net decrease in cash and cash equivalents of Rp639.61 billion, a decline of Rp633.82 billion or 10,948.53% compared to 2024, which recorded a negative Rp5.79 billion. This decline was mainly driven by pressure on operating and financing cash flows.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Per 31 Desember 2025, Perseroan membukukan kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp391,13 miliar, menurun Rp639,60 miliar atau 62,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.030,73 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh arus kas operasi yang negatif serta pembayaran kewajiban pendanaan selama tahun berjalan.

Cash and Cash Equivalents at End of Year

As of December 31, 2025, the Company recorded cash and cash equivalents at end of year amounting to Rp391.13 billion, a decrease of Rp639.60 billion or 62.05% compared to the previous year, which amounted to Rp1,030.73 billion. This decline was mainly affected by negative operating cash flows and debt repayments during the year.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Debt Repayment Capability and Receivables Collectibility Level

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Rasio Likuiditas

Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, Perseroan menggunakan indikator rasio likuiditas yang meliputi rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Rasio kas dihitung berdasarkan perbandingan antara kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan aset lancar setelah dikurangi persediaan terhadap liabilitas jangka pendek.

DEBT REPAYMENT CAPABILITY

The Company's ability to fulfill all its obligations, both short-term and long-term, is measured through liquidity ratios and solvency ratios. Liquidity ratios are used to assess the Company's ability to meet its short-term obligations, while solvency ratios are used to measure the Company's ability to meet all of its obligations.

Liquidity Ratios

To meet short-term obligations as they fall due, the Company uses liquidity ratio indicators, including current ratio, cash ratio, and quick ratio. The current ratio is the comparison between current assets and short-term liabilities. The cash ratio is calculated based on the comparison between cash and cash equivalents and short-term liabilities, while the quick ratio is calculated by comparing current assets excluding inventories to short-term liabilities.

Tabel Rasio Likuiditas 2024-2025
Liquidity Ratio Table 2024–2025

Rasio Ratio	2025 (%)	2024 (%)	Perubahan Changes (%)
Rasio Lancar Current Ratio	167,29	175,51	(4,68)
Rasio Kas Cash Ratio	22,56	40,98	(44,95)
Rasio Cepat Quick Ratio	150,01	161,59	(7,17)

Per 31 Desember 2025, rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 167,29%, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 175,51%. Rasio kas Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 22,56%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 40,98%. Sementara itu, rasio cepat Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 150,01%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 161,59%.

Penurunan rasio likuiditas pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas yang cukup signifikan, seiring dengan tekanan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan. Selain itu, penurunan aset lancar tertentu juga turut memengaruhi kemampuan likuiditas jangka pendek Perseroan.

Meskipun mengalami penurunan, rasio likuiditas yang tetap berada di atas 100% serta didukung oleh kepemilikan kas dan setara kas mencerminkan kondisi keuangan Perseroan yang masih cukup memadai dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

As of December 31, 2025, the Company's current ratio was recorded at 167.29%, a decrease compared to 2024, which stood at 175.51%. The Company's cash ratio in 2025 was recorded at 22.56%, lower than the previous year's 40.98%. Meanwhile, the Company's quick ratio in 2025 was recorded at 150.01%, also declining from 161.59% in the previous year.

The decline in liquidity ratios in 2025 was mainly caused by a significant reduction in cash and cash equivalents, in line with pressure on cash flows from operating and financing activities. In addition, decreases in certain current assets also affected the Company's short-term liquidity position.

Although these ratios declined, the liquidity ratios remaining above 100%, supported by cash and cash equivalents, reflect the Company's still adequate financial condition in meeting its short-term obligations.

Rasio Solvabilitas

Perseroan menggunakan rasio solvabilitas untuk menilai kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini mencerminkan tingkat kesehatan keuangan sekaligus efektivitas struktur permodalan Perseroan. Komponen utama dalam pengukuran rasio solvabilitas meliputi rasio utang berbunga terhadap ekuitas serta rasio liabilitas terhadap total aset.

Solvency Ratios

The Company uses solvency ratios to assess its ability to meet all obligations, both short-term and long-term. These ratios reflect the Company's financial soundness as well as the effectiveness of its capital structure. The main components in measuring solvency ratios include gearing ratio and debt to asset ratio.

Tabel Rasio Solvabilitas 2024-2025
Solvency Ratio Table 2024–2025

Rasio Ratio	2025 (kali I time)	2024 (kali I time)	Perubahan (kali I time) Changes
Rasio Total Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	1,05	1,20	(0,15) ↓
Rasio Total Liabilitas terhadap Aset Debt to Asset Ratio	0,51	0,55	(0,04) ↓
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas Gearing Ratio	0,18	0,18	0,00
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset Equity to Asset Ratio	0,49	0,45	0,04 ↑

Per 31 Desember 2025, rasio total liabilitas terhadap ekuitas Perseroan tercatat sebesar 1,05 kali, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,20 kali. Rasio total liabilitas terhadap aset Perseroan pada tahun 2025 mencapai 0,51 kali, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,55 kali. Sementara itu, rasio ekuitas terhadap total aset tercatat sebesar 0,49 kali, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,45 kali. Adapun rasio utang berbunga terhadap ekuitas Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,18 kali, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

As of December 31, 2025, the Company's debt-to-equity ratio was recorded at 1.05x, a decrease compared to 2024, which stood at 1.20x. The Company's debt-to-assets ratio in 2025 reached 0.51x, lower than the previous year's 0.55x. Meanwhile, the equity-to-assets ratio was recorded at 0.49x, an increase compared to the previous year's 0.45x. The gearing ratio in 2025 was recorded at 0.18x, relatively stable compared to the previous year.

Perubahan rasio solvabilitas pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan total liabilitas Perseroan, khususnya liabilitas jangka pendek, seiring dengan upaya pengelolaan kewajiban dan efisiensi struktur pendanaan. Di sisi lain, posisi ekuitas yang relatif terjaga turut memperbaiki struktur permodalan Perseroan.

The changes in solvency ratios in 2025 were mainly influenced by a decline in total liabilities, particularly current liabilities, in line with efforts to manage obligations and improve funding structure efficiency. On the other hand, the relatively stable equity position also contributed to the improvement of the Company's capital structure.

Meskipun demikian, tingkat solvabilitas Perseroan tetap terjaga dan mencerminkan kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban jangka panjang serta menjaga struktur permodalan yang sehat dan optimal.

Nevertheless, the Company's solvency position remains sound and reflects its adequate ability to meet long-term obligations while maintaining a healthy and optimal capital structure.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang mencerminkan efektivitas Perseroan dalam melakukan penagihan piutang. Semakin pendek periode penagihan, semakin baik kinerja Perseroan dalam mengelola piutang usaha serta mengoptimalkan arus kas yang berasal dari piutang tersebut.

Receivables Collectibility Level

The receivables collectibility level reflects the Company's effectiveness in collecting its receivables. The shorter the collection period, the better the Company's performance in managing trade receivables and optimizing cash flow generated from those receivables.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang 2024-2025
Receivables Collectibility Table 2024–2025

Uraian Description	2025 (hari) (days)	2024 (hari) (days)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (hari) Difference (day)	Persentase (%) Percentage (%)
Periode Penagihan Collection Period	54,17	63,83	(9,66)	(15,13) ↓

Per 31 Desember 2025, periode penagihan piutang Perseroan tercatat membaik dari 63,83 hari pada tahun 2024 menjadi 54,17 hari pada tahun 2025, atau lebih cepat sebesar 15,13%. Perbaikan ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan (*collection*) pada tahun 2025 menjadi lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan Perseroan dalam pengelolaan piutang dan optimalisasi arus kas.

As of December 31, 2025, the Company's receivable collection period improved from 63.83 days in 2024 to 54.17 days in 2025, or 15.13% faster. This improvement indicates that the time required for collection in 2025 was shorter compared to the previous year, reflecting the effectiveness of the Company's receivables management policies and the optimization of cash flows.

Tabel Umur Piutang Usaha Berdasarkan Tanggal Jatuh Tempo 2024-2025
Trade Receivables Aging Based on Maturity Date Table 2024-2025

Umur Piutang Usaha Age of Trade Receivables	2025 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
			Selisih (hari) Difference (day)	Persentase (%) Percentage (%)
Sudah jatuh tempo Overdue				
Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month	36,37	96,45	(60,09)	(62,28) ↓
>1 s.d. 3 bulan > 1 month up to 3 month	63,21	29,88	33,33	111,57 ↑
>3 bulan s.d. 6 bulan > 3 month up to 6 month	5,91	0,51	5,40	1.058,82 ↑
>6 bulan s.d. 1 tahun > 6 month up to 1 year	28,30	54,68	(26,38)	(48,23) ↓
>1 tahun > 1 year	302,21	468,97	(166,76)	(35,56) ↓
Sub Jumlah Subtotal	436,00	650,50	(214,50)	(32,97) ↓
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Less: Allowance for Impairment Losses	(200,52)	(105,34)	(95,18)	90,35 ↑
Jumlah Piutang Usaha – Bersih Total Trade Receivables - Net	235,49	545,16	(309,67)	(56,81) ↓

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari. Peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2025 juga mencerminkan langkah kehati-hatian Perseroan dalam mengantisipasi risiko kredit, terutama atas piutang dengan umur lebih dari satu tahun, meskipun secara umum kualitas piutang menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan penurunan saldo piutang jatuh tempo jangka panjang.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is sufficient to cover the potential uncollectibility of trade receivables in the future. The increase in the impairment allowance in 2025 also reflects the Company's prudent approach in anticipating credit risk, particularly for receivables aged more than one year, although overall receivable quality showed improvement, as indicated by a decline in long-term overdue receivable balances.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan
The Company›s New Contract Portfolio



JENIS PROYEK | PROJECT TYPE

Residensial Residential	Perkantoran Office	Fasilitas Publik Public Facilities	Komersial Commercial
39,06%	**19,08%**	**29,41%**	**12,46%**

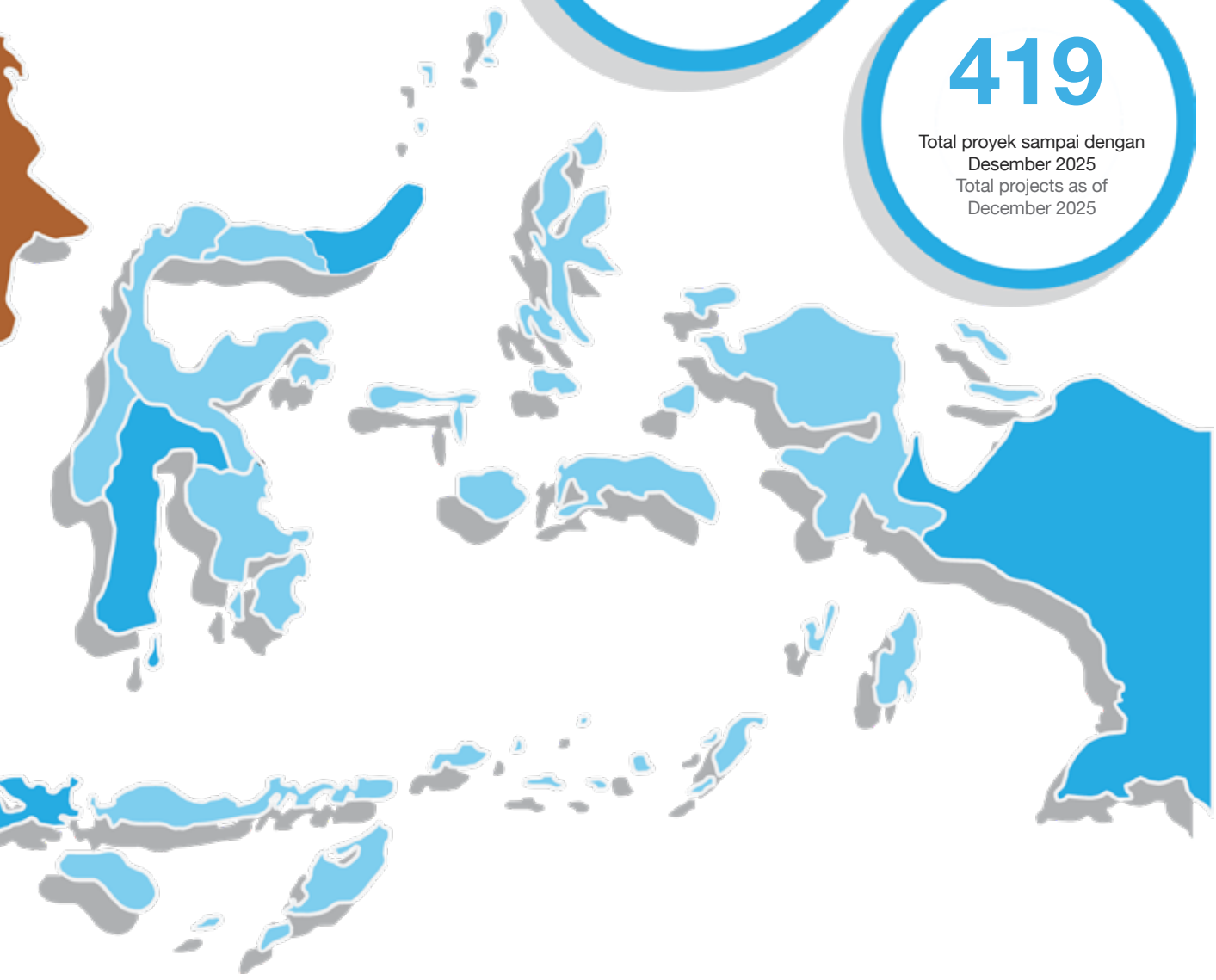
dari Perusahaan berdiri pada Oktober 2008 hingga Desember 2025 I from the company's estabilshment in October 2008 until December 2025

57,606 Triliun / Trillion

Total nilai kontrak sampai dengan Desember 2025
Total contract value as of December 2025

419

Total proyek sampai dengan Desember 2025
Total projects as of December 2025



PEMBERI KERJA | OWNER TYPE

Swasta / Private	Pemerintah / Government	BUMN / SOE
43,6%	27,2%	29,2%

EKSTERN/INTERN

Ekstern / Extern	Intern / Intern
92,58%	7,42%

Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam mengerjakan berbagai jenis proyek pembangunan gedung, dengan sejumlah pencapaian yang diraih atas proyek-proyek yang telah diselesaikan. Sejak pendirian Perseroan pada tahun 2008 hingga 2025, Perseroan mencatatkan perolehan proyek baru sepanjang tahun 2025 sebesar 11 proyek baru dengan total nilai sebesar Rp 1.7 triliun. Dengan tambahan kontrak tersebut, total nilai kontrak dihadapi dari seluruh proyek yang dikelola Perseroan mencapai Rp 5,76 triliun.

The Company has extensive experience in undertaking various types of building construction projects, with a number of achievements recorded from completed projects. Since its establishment in 2008 through 2025, the Company recorded the acquisition of 11 new projects in 2025 with a total value of Rp1.7 trillion. With these additional contracts, the total order book value for all projects managed by the Company reached Rp5.76 trillion.

Portofolio kontrak baru Perseroan dikelompokkan berdasarkan pemberi kerja (owner), jenis proyek, serta sumber perolehan proyek dari pihak eksternal maupun internal, yang mencerminkan keberagaman portofolio sekaligus kapasitas Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pasar.

The Company's new contract portfolio is categorized based on project owners, project types, and sources of acquisition from external and internal parties, reflecting the diversity of its portfolio as well as the Company's capacity to meet market demand.

PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERUSAHAAN BERDASARKAN PEMBERI KERJA

Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori pemberi kerja (owner) pada tahun pelaporan terbagi ke dalam tiga segmen utama. Proyek yang berasal dari Pemerintah tercatat sebanyak 94 proyek dengan total nilai mencapai Rp15,67 triliun, yang merepresentasikan sekitar 27,2 dari total nilai kontrak baru.

Sementara itu, proyek yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebanyak 119 proyek dengan total nilai sebesar Rp 16,82 triliun atau setara 29,2 dari total nilai kontrak baru Perseroan.

Adapun proyek dari sektor swasta menjadi kontributor terbesar dalam perolehan kontrak baru, dengan jumlah sebanyak 204 proyek dan total nilai mencapai Rp25,109 triliun, atau sekitar 43,6 dari total nilai kontrak baru pada periode pelaporan.

Komposisi tersebut mencerminkan strategi Perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek melalui diversifikasi sumber pemberi kerja, sekaligus memperkuat penetrasi pada segmen swasta yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.

NEW CONTRACT PORTFOLIO BY OWNER

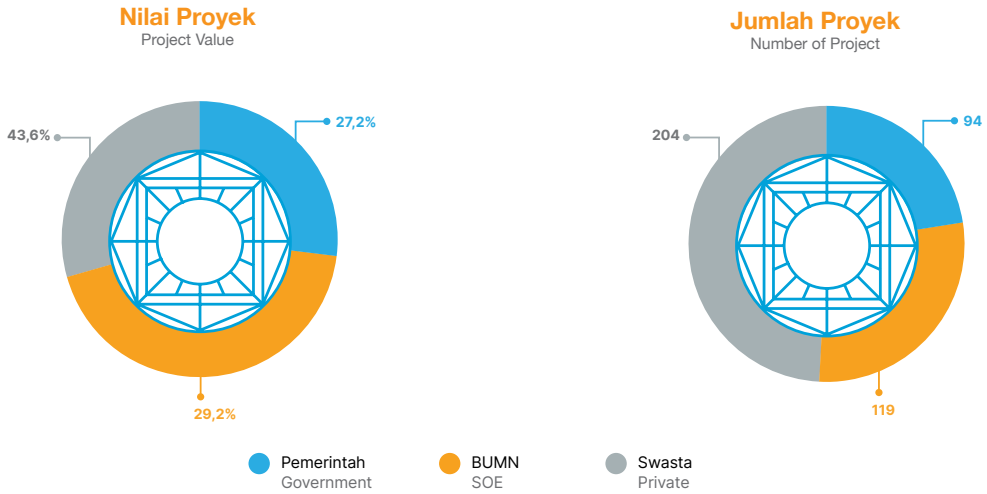
The Company's new contract portfolio by owner category during the reporting year is divided into three main segments. Projects originating from the Government amounted to 94 projects with a total value of Rp15.67 trillion, representing approximately 27.2% of the total new contract value.

Meanwhile, projects from State-Owned Enterprises (SOEs) totaled 119 projects with a total value of Rp16.82 trillion, equivalent to 29.2% of the Company's total new contract value.

Projects from the private sector were the largest contributor to new contract acquisition, with 204 projects and a total value of Rp25.109 trillion, or approximately 43.6% of the total new contract value during the reporting period.

This composition reflects the Company's strategy to maintain a balanced project portfolio through diversification of owner sources, while also strengthening penetration in the private sector, which has shown significant growth.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Pemberi Kerja (*Owner*)
New Contract Portfolio by Owner



Pemberi Kerja (Owner) Owner	Nilai Proyek Project Value	Persentase Proyek (%) Project Percentage (%)	Jumlah Proyek Number of Projects
Pemerintah Government	15.670.464	27,2	94
BUMN SOE	16.826.844	29,2	119
Swasta Private Sector	25.109.624	43,6	206
Jumlah Total	**57.606.932**	**100**	**419**

PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERSEROAN BERDASARKAN JENIS PROYEK

Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori jenis proyek pada tahun pelaporan menunjukkan komposisi yang beragam dan mencerminkan strategi diversifikasi usaha Perseroan. Proyek perkantoran tercatat sebanyak 132 proyek dengan total nilai mencapai Rp10,99 triliun atau berkontribusi sebesar 19,08 terhadap total nilai kontrak baru.

Selanjutnya, proyek residensial tercatat sebanyak 112 proyek dengan total nilai sebesar Rp22,5 triliun atau setara 39,06 dari total nilai kontrak baru. Proyek fasilitas publik mencatatkan 100 proyek dengan total nilai mencapai Rp16,94 triliun atau berkontribusi sebesar 29,41.

Sementara itu, proyek komersial tercatat sebanyak 75 proyek dengan total nilai Rp7,18 triliun atau setara 12,46 dari total nilai kontrak baru Perseroan.

Komposisi tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga keseimbangan portofolio proyek di berbagai segmen pasar, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan di sektor perkantoran, residensial, fasilitas publik, dan komersial.

NEW CONTRACT PORTFOLIO BY PROJECT TYPE

The Company's new contract portfolio by project type during the reporting year shows a diverse composition and reflects the Company's business diversification strategy. Office projects totaled 132 projects with a value of Rp10.99 trillion, contributing 19.08% to the total new contract value.

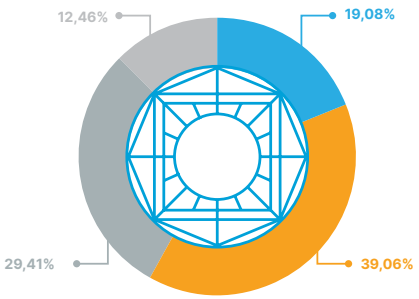
Residential projects amounted to 112 projects with a total value of Rp22.5 trillion, equivalent to 39.06% of the total new contract value. Public facility projects recorded 100 projects with a total value of Rp16.94 trillion, contributing 29.41%.

Meanwhile, commercial projects totaled 75 projects with a value of Rp7.18 trillion, representing 12.46% of the Company's total new contract value.

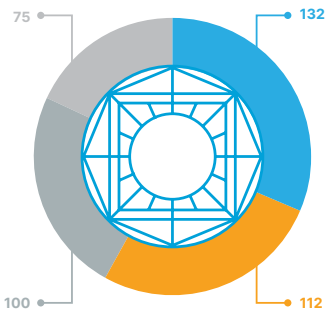
This composition reflects the Company's ability to maintain a balanced project portfolio across various market segments, while strengthening its position in capturing growth opportunities in the office, residential, public facilities, and commercial sectors.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Jenis Proyek
New Contract Portfolio by Project Type

Nilai Proyek
Project Value



Jumlah Proyek
Number of Project



Perkantoran
Offices

Residensial
Residential

Fasilitas Publik
Public Facilities

Komersial
Commercial

Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Pemberi Kerja (Owner) Employer (Owner)	Nilai Proyek (Rp-Juta) Project Value (Rp-Million)	Persentase Proyek (%) Project Percentage (%)	Jumlah Proyek Number of Projects
Perkantoran Office	10,989,598	19.08	132
Residensial Residential	22,500,994	39.06	112
Fasilitas Publik Public Facilities	16,940,886	29.41	100
Komersial Commercial	7,175,454	12.46	75
Jumlah Total	**57,606,932**	100.00	419

PORTOFOLIO KONTRAK BARU PERSEROAN BERDASARKAN PEROLEHAN PROYEK DARI EKSTERNAL DAN INTERNAL

Portofolio kontrak baru Perseroan berdasarkan kategori sumber perolehan proyek, baik eksternal maupun internal, menunjukkan komposisi yang seimbang dan mencerminkan strategi ekspansi usaha yang terarah. Proyek yang berasal dari pihak eksternal tercatat sebanyak 374 proyek dengan total nilai mencapai Rp 53,3 triliun atau berkontribusi sebesar 92,58 terhadap total nilai kontrak baru.

Sementara itu, proyek yang berasal dari internal tercatat sebanyak 45 proyek dengan total nilai sebesar Rp 4,27 triliun atau setara 7,42 dari total nilai kontrak baru Perseroan.

Komposisi tersebut mencerminkan kemandirian Perseroan sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam memperoleh proyek secara mandiri di pasar eksternal, sekaligus menunjukkan kapasitas operasional dan daya saing Perseroan yang semakin kuat. Peningkatan kontribusi proyek eksternal juga menjadi indikator positif atas kepercayaan pasar terhadap kompetensi dan rekam jejak Perseroan dalam industri konstruksi gedung.

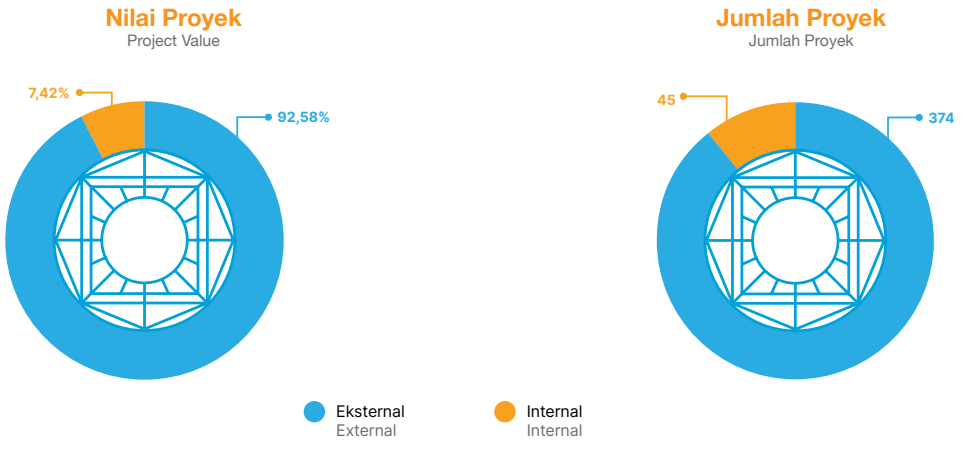
NEW CONTRACT PORTFOLIO BY SOURCE OF PROJECT ACQUISITION (EXTERNAL AND INTERNAL)

The Company's new contract portfolio based on the source of project acquisition, both external and internal, shows a balanced composition and reflects a well-directed business expansion strategy. Projects originating from external parties totaled 374 projects with a value of Rp53.3 trillion, contributing 92.58% to the total new contract value.

Meanwhile, projects originating from internal sources amounted to 45 projects with a total value of Rp4.27 trillion, equivalent to 7.42% of the Company's total new contract value.

This composition reflects the Company's independence as a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk in securing projects independently in the external market, while also demonstrating the Company's growing operational capacity and competitiveness. The increasing contribution from external projects also serves as a positive indicator of market confidence in the Company's capabilities and track record in the building construction industry.

Portofolio Kontrak Baru Perusahaan Berdasarkan Perolehan Proyek Dari Eksternal dan Internal
New Contract Portfolio by Source of Project Acquisition (External and Internal)



Dinyatakan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain
In billions of Rupiah, unless otherwise stated

Perolehan Proyek Eksternal dan Internal External and Internal Project Acquisition	**Nilai Proyek (Rp-Juta)** Project Value (Rp-Million)	**Persentase Proyek (%)** Project Percentage (%)	**Jumlah Proyek** Number of Projects
Eksternal External	53,333,512.96	92.58	374
Internal Internal	4,273,418.75	7.42	45
Jumlah **Total**	**57,606,931.72**	**100.00**	**419**

Struktur Modal
Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Struktur modal Perseroan merupakan kombinasi antara liabilitas dan ekuitas yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional serta pengembangan usaha secara berkelanjutan. Pengelolaan struktur modal dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan tingkat profitabilitas, guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Pada tahun 2025, struktur modal Perseroan terdiri atas liabilitas sebesar 51,27% dan ekuitas sebesar 48,73%. Komposisi ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencerminkan strategi Perseroan dalam mengelola permodalan secara lebih efektif.

DETAILS OF CAPITAL STRUCTURE

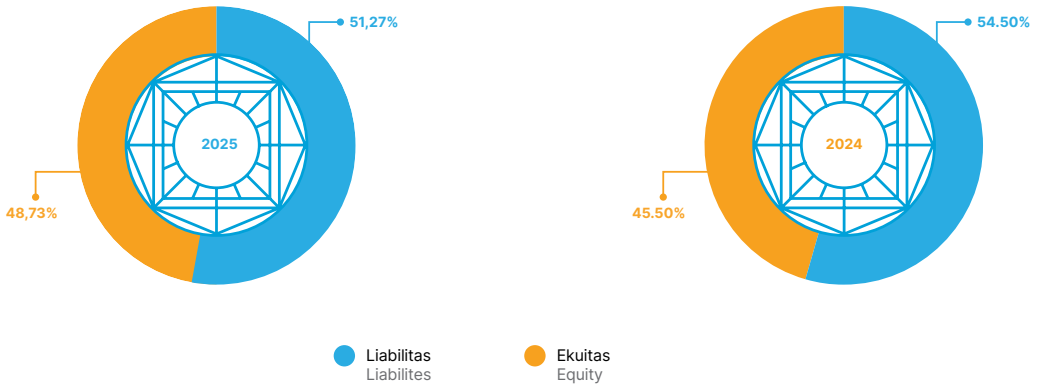
The Company's capital structure is a combination of liabilities and equity used to fund operational activities and sustainable business development. Capital structure management is carried out by considering the balance between risk and profitability, to ensure sustainable business growth while increasing shareholder value.

In 2025, the Company's capital structure consisted of 51.27% liabilities and 48.73% equity. This composition has changed compared to 2024, reflecting the Company's strategy to manage its capital more effectively.

Tabel Komposisi Struktur Modal 2024-2025
Capital Structure Composition Table 2024-2025

Uraian Description	2025		2024		Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Komposisi (%) Composition (%)	Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-Million)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Liabilities	2.072,56	51,27%	3.121,30	54,50%	(1.048,74)	(33,60%)
Ekuitas Equity	1.971,25	48,73%	2.605,97	45,50%	(634,72)	(24,36%)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**4.043,81**	**100,00%**	5.727,27	100,00%	(1.683,46)	(29,39%)

Komposisi Struktur Modal 2024-2025
Capital Structure Composition 2024-2025



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure Management Policy

Perseroan mengelola struktur modal secara strategis untuk memastikan keberlanjutan usaha sekaligus memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pengelolaan modal dilakukan dengan menjaga rasio keuangan tetap sehat, mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, serta mempertahankan keseimbangan yang proporsional antara liabilitas dan ekuitas.

The Company strategically manages its capital structure to ensure business sustainability while maximizing value for shareholders and stakeholders. Capital management is carried out by maintaining healthy financial ratios, optimizing the utilization of various funding sources, and preserving a proportional balance between liabilities and equity.

Sebagai bagian dari strategi keuangan, Perseroan secara berkala menelaah dan menyesuaikan struktur modal agar tetap optimal, sejalan dengan dinamika pasar serta kebutuhan investasi dan operasional. Dengan demikian, Perseroan dapat mempertahankan daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

As part of its financial strategy, the Company periodically reviews and adjusts its capital structure to maintain optimal performance, in line with market dynamics and investment and operational needs. This allows the Company to maintain competitiveness while creating sustainable added value for all stakeholders.

Perseroan juga memiliki kebijakan untuk memanfaatkan liabilitas sebagai salah satu sumber pendanaan utama. Pada tahun 2025, liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp1.733,97 miliar, sedangkan liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp338,59 miliar.

The Company also has a policy of utilizing liabilities as a primary funding source. In 2025, the Company's current liabilities were recorded at Rp1,733.97 billion, while non-current liabilities were recorded at Rp338.59 billion.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Basis For Selecting Capital Structure Management Policy

Perseroan menerapkan kebijakan struktur modal yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha, memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengoptimalkan keseimbangan antara utang dan ekuitas guna mencapai tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham sekaligus menjaga struktur permodalan yang efisien.

The Company applies a capital structure policy aimed at ensuring business continuity, maximizing shareholder value, and providing benefits to all stakeholders. In its implementation, the Company optimizes the balance between debt and equity to achieve optimal returns for shareholders while maintaining an efficient capital structure.

Kebijakan tersebut juga dirancang untuk mempertahankan struktur modal yang optimal dalam rangka meminimalkan biaya permodalan. Manajemen secara berkala melakukan evaluasi terhadap struktur permodalan dengan mempertimbangkan tingkat biaya modal serta risiko yang terkait.

This policy is also designed to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital. Management periodically evaluates the capital structure, taking into account the cost of capital and associated risks.

Adapun *gearing ratio* Perseroan untuk tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

The Company's gearing ratio for 2025 and 2024 is presented in the following table:

Tabel *Gearing Ratio* 2024-2025
Gearing Ratio Table 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Perubahan Changes
Pinjaman Berbunga (Rp-juta) Interest-bearing debt (Rp-million)	148,68	457,06	(308,38)
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	1.971,25	2.605,97	(634,72)
Gearing Ratio (kali) Gearing Ratio (times)	0,08	0,18	(0,1)

Per 31 Desember 2025, gearing ratio Perseroan tercatat sebesar 0,08 kali, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,18 kali.

Meskipun demikian, struktur modal Perseroan tetap berada dalam kondisi sehat dan konservatif, dengan komposisi yang seimbang antara liabilitas dan ekuitas. Proporsi utang berbunga terhadap ekuitas yang relatif rendah mencerminkan strategi manajemen dalam menjaga stabilitas keuangan, mengoptimalkan biaya modal, serta memastikan fleksibilitas pendanaan guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

As of December 31, 2025, the Company's gearing ratio was recorded at 0.08x, a decrease compared to 2024, which stood at 0.18x.

Nevertheless, the Company's capital structure remains healthy and conservative, with a balanced composition of liabilities and equity. The relatively low proportion of interest-bearing debt to equity reflects management's strategy to maintain financial stability, optimize the cost of capital, and ensure funding flexibility to support sustainable business growth.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak memiliki transaksi material yang berkaitan dengan investasi barang modal.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is categorized as material if its value reaches 20% or more of the Public Company's equity.

Until the end of 2025, the Company has no material transactions related to capital expenditure.

Realisasi Investasi Barang Modal
Capital Expenditure Realization

Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan pengeluaran yang dilakukan Perseroan untuk mendukung pengembangan bisnis, termasuk implementasi digitalisasi serta peningkatan aset tetap yang diperlukan guna menunjang operasional dan ekspansi usaha.

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis Perseroan. Jenis investasi yang dilaksanakan meliputi program transformasi digital, implementasi teknologi *Construction 4.0*, investasi pada aset tetap, inisiatif *Net Zero Emission*, serta berbagai investasi lainnya yang mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Capital Expenditure represents expenditures made by the Company to support business development, including the implementation of digitalization and the improvement of fixed assets necessary to support operations and business expansion.

TYPES AND PURPOSES OF CAPITAL EXPENDITURE

Capital expenditure is made as part of the Company's business development efforts. Types of investments undertaken include digital transformation programs, the implementation of Construction 4.0 technology, investments in fixed assets, Net Zero Emission initiatives, and various other investments that support sustainable business development.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp 852 juta, menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Dari total investasi tahun 2025, sebesar Rp 852 juta dialokasikan untuk program transformasi digital. Sementara itu, pada tahun 2024, total realisasi investasi barang modal mencapai Rp6.502 juta, dengan alokasi sebesar Rp5.609 juta untuk program transformasi digital, sementara Rp893 juta digunakan untuk mendukung program Net Zero Emission.

Perbandingan realisasi investasi barang modal pada tahun 2024 dan 2025 disajikan sebagai berikut.

CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT VALUE

In 2025, the Company realized capital expenditure investment amounting to Rp852 million, a decrease compared to the 2024 realization. Of the total investment in 2025, Rp852 million was allocated to the digital transformation program.Meanwhile, in 2024, total capital expenditure realization reached Rp6,502 million, with Rp5,609 million allocated to the digital transformation program, while Rp893 million was used to support the Net Zero Emission program.

A comparison of capital expenditure realization in 2024 and 2025 is presented as follows.

Nilai Investasi Barang Modal 2024-2025
Capital Expenditure Investment Value 2024–2025

Uraian Description	**2025 (Rp-Juta)** (Rp-Million)	**2024 (Rp-Juta)** (Rp-Million)	**Peningkatan/penurunan** Increase/Decrease	
			Selisih (Rp-Juta) Differences (Rp-Million)	**Persentase (%)** Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization Of Capital Expenditures	0,855	6.502	(5.650) ↓	(86,90) ↓

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After The Date of The Auditor's Report

Hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

As of the date of preparation of this Annual Report, the Company does not have any material information and facts that occurred after the date of the accounting report.

Kebijakan Dividen dan Pembagiannya

Dividend Policy and Distribution

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diadopsi dalam Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait penggunaan laba bersih, pembagian dividen interim, dan pembagian dividen. Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengajukan usulan kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian laba bersih yang belum dibagikan sebagaimana tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi untuk memperoleh persetujuan RUPS. Berdasarkan keputusan rapat, Direksi dapat membagikan dividen sementara (dividen interim) setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Dividen interim yang dibagikan akan diperhitungkan dengan dividen yang ditetapkan dalam RUPS Tahunan berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek tempat saham Perseroan tercatat. Pembayaran dividen juga mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan.

Apabila RUPS memutuskan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang menetapkan pembagian dividen tersebut.

Kronologis Pembagian dan Pembayaran Dividen

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, Perseroan senantiasa menyeimbangkan kebijakan pembagian dividen dengan kebutuhan penguatan permodalan serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kondisi arus kas, serta prospek industri, Perseroan secara konsisten melaksanakan pembagian dividen sebagai bagian dari strategi pengelolaan modal yang optimal.

Kronologi pembagian dan pembayaran dividen yang telah dilakukan Perseroan dalam lima tahun terakhir (2021–2025) adalah sebagai berikut:

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Company's dividend policy refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which has been adopted in the Company's Articles of Association, particularly with respect to the use of net profit, the distribution of interim dividends, and dividend payments. Dividend distribution is carried out based on resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Directors proposes to the AGMS regarding the use and/or distribution of retained earnings as stated in the balance sheet and income statement for AGMS approval. Based on the meeting resolution, the Board of Directors may distribute interim dividends upon obtaining approval from the Board of Commissioners, provided that such distribution does not cause the Company's net assets to fall below its issued and paid-up capital plus mandatory reserves. Interim dividends that have been distributed will be accounted for in the dividends determined at the next AGMS, while still complying with the prevailing capital market regulations and the stock exchange regulations where the Company's shares are listed. Dividend payments also take into account the Company's financial capability.

If the AGMS resolves to distribute cash dividends, the Company is required to make payment to eligible shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the AGMS minutes that approves the dividend distribution.

Chronology of Dividend Distribution and Payment

As part of its commitment to creating added value for shareholders, the Company consistently balances its dividend distribution policy with the need to strengthen capital and support sustainable business development. By considering financial performance, cash flow conditions, and industry prospects, the Company consistently carries out dividend distribution as part of its optimal capital management strategy.

The chronology of dividend distribution and payments carried out by the Company over the last five years (2021–2025) is as follows:

Tahun Pembagian Dividen Dividend Distribution Year	2025	2024	2023	2022	2021
Tahun Buku Dividen Dividend Fiscal Year	2024	2023	2022	2021	2020
Pelaksanaan RUPST AGMS Implementation	RUPST Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 The 2024 AGMS held on May 21, 2025.	RUPST Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 The 2023 AGMS held on May 20, 2024.	RUPST Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 The 2022 AGMS held on May 10, 2023.	RUPST Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2022 The 2021 AGMS held on April 19, 2022.	RUPST Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021 The 2020 AGMS held on May 28, 2021.
Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Net Profit Attributable to Owners of Parent Entity	Rp67.888.264.873	Rp46.702.158.528	Rp230.053.686.379	Rp213.880.324.310	Rp153.281.021.021
Dividen Kas yang Dibagikan Cash Dividends Distributed	Rp6.796.120.000	Rp9.380.560.000	Rp23.164.240.000	Rp42.786.840.000	Rp30.726.120.000
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (lembar saham) Number of Shares Entitled to Dividends (shares)	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000	9.572.000.000
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	0,71	0,98	2,42	4,47	3,21
Dividend Pay Out Ratio	10%	20%	10%	20%	20%
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen *(Recording Date)* Date of List of Shareholders Entitled to Dividends (Recording Date)	4 Juni 2025 June 4, 2025	3 Juni 2024 June 3, 2024	23 Mei 2023 May 23, 2023	9 Mei 2022 May 9, 2022	10 Juni 2021 June 10, 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payment Date	20 Juni 2025 June 20, 2025	19 Juni 2024 June 19, 2024	9 Juni 2023 June 9, 2023	20 Mei 2022 May 20, 2022	2 Juli 2021 July 2, 2021

Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Information on Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

Selama tahun 2025, Perseroan belum menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP). Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP, realisasinya, jangka waktu program, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise*.

Throughout 2025, the Company has not carried out an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP). Therefore, the Company does not provide information regarding the number of ESOP/MSOP shares, their exercise, program duration, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Use of Proceeds From The Public Offering

Pada tahun 2017, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) di Bursa Efek Indonesia. Perseroan memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017. Saham Perseroan kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 30 November 2017 dengan kode saham WEGE.

Dalam IPO tersebut, Perseroan menerbitkan 2.872.000.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang diterbitkan dari portepel Perseroan. Saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per saham dan mewakili 30,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp290 per saham, sehingga total dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh mencapai Rp832.880.000.000. Setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp23.014.188.360, dana bersih yang diperoleh Perseroan dari IPO tercatat sebesar Rp809.865.811.640.

Dalam rangka mengoptimalkan strategi bisnis untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, Perseroan telah melakukan perubahan komposisi penggunaan dana hasil IPO yang memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), sebagai berikut:

1. **RUPST 31 Maret 2020**
   Perseroan melakukan perubahan komposisi penggunaan dana hasil IPO untuk mempercepat pertumbuhan melalui strategi *forward integration* yang memberikan *multiplier effect*, serta strategi pertumbuhan berbasis teknologi (*technology driven*). Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dalam RUPST dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 31 tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

In 2017, the Company conducted an Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange. The Company obtained an effective statement based on Decree of Board of Commissioners of Financial Services Authority No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017. The Company's shares were subsequently listed on the Indonesia Stock Exchange on November 30, 2017, under the ticker code WEGE.

In the IPO, the Company issued 2,872,000,000 registered common shares, all of which were new shares issued from the Company's portfolio. These shares had a par value of Rp100 per share and represented 30.00% of the issued and fully paid-up capital after the IPO. The offering price was set at Rp290 per share, bringing total proceeds from the Initial Public Offering to Rp832,880,000,000. After deducting public offering expenses of Rp23,014,188,360, the Company's net proceeds from the IPO were recorded at Rp809,865,811,640.

In order to optimize its business strategy to achieve sustainable growth, the Company has made changes to the composition of the use of IPO proceeds, which were approved at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), as follows:

1. **AGMS on March 31, 2020**
   The Company changed the composition of the use of IPO proceeds to accelerate growth through a forward integration strategy that provides a multiplier effect, as well as a technology-driven growth strategy. This change was approved at the AGM and is outlined in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 31 dated March 31, 2020, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

2. RUPST 20 Mei 2024

Perubahan komposisi penggunaan dana hasil IPO dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang melemah, dampak pandemi, serta rencana penggunaan modal kerja untuk mendanai Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dalam RUPST dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 8 tanggal 20 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut adalah perubahan terakhir komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham beserta realisasi penggunaannya hingga tahun 2024.

2. AGMS on May 20, 2024

The change in the composition of the use of IPO proceeds was made taking into account the weakening property market conditions, the impact of the pandemic, and the planned use of working capital to fund National Strategic Projects. This change was approved at the AGMS and is outlined in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 31 dated March 31, 2020. 8 dated May 20, 2024, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta.

The following is the latest change in the composition of the use of proceeds from the Initial Public Offering and its realization through 2024.

PERUBAHAN KOMPOSISI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERAKHIR

CHANGES IN THE COMPOSITION OF USE OF PROCEEDS FROM THE LATEST PUBLIC OFFERING

Rencana Awal (RUPST 31 Maret 2020) Initial Plan (AGMS March 31, 2020)	Rencana Perubahan (RUPST 20 Mei 2024) Amendment Plan (AGMS May 20, 2024)	Alasan Reason	Keterangan Remarks
Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk: The Company intends to use the entire proceeds from the Initial Public Offering, after deducting the issuance costs associated with the Initial Public Offering, for:	Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk: The Company intends to use the entire proceeds from the Initial Public Offering, after deducting the issuance costs associated with the Initial Public Offering, for:	Dalam rangka mengoptimalkan bisnis Perseroan, dengan Mempertimbangkan kondisi pasar properti yang lesu, dampak kondisi pandemi serta adanya rencana penggunaan modal kerja digunakan untuk mendanai proyek strategis nasional. To optimize the Company's business, taking into account the sluggish property market conditions, the impact of the pandemic, and the planned use of working capital to fund national strategic projects.	Total Dana Hasil Penawaran Umum sebesar Rp832,880 Miliar, dengan Biaya Penawaran Umum sebesar Rp23,014 Miliar, maka Total Dana Bersih Penawaran Umum sebesar Rp809,866 Miliar. Total proceeds from the Initial Public Offering amounted to Rp832.880 billion, with the Initial Public Offering Costs amounting to Rp23.014 billion, resulting in total net proceeds from the Initial Public Offering amounting to Rp809.866 billion.
1. Sekitar 73,89% akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut: Approximately 73.89% will be used for business development, with the following breakdown:	1. Sekitar 55,56% akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan rincian sebagai berikut: Approximately 55.56% will be used for business development, with the following breakdown:		Per saat ini, untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp343,966 Miliar atau sebesar 76,44%, yang terdiri dari: As of now, Rp343.966 billion, or 76.44%, has been disbursed for these needs, consisting of:
a. Sekitar 50,80% akan digunakan untuk penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan, infrastruktur sosial dan bangunan kepariwisataan; Approximately 50.80% will be used to provide space for urban infrastructure, social infrastructure, and tourism buildings;	a. Sekitar 32,47% akan digunakan untuk penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan, infrastruktur sosial dan bangunan kepariwisataan; Approximately 32.47% will be used to provide space for urban infrastructure, social infrastructure, and tourism buildings;		Penggunaan (I), untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp262,980 Miliar atau sebesar 100%. Utilization (I), for the intended purpose, has been realized at Rp262.980 billion, or 100%.
b. Sekitar 13,09% akan digunakan untuk investasi berupa pengembangan entitas anak dan usaha konstruksi modular; dan Approximately 13.09% will be used for investment in the development of subsidiaries and modular construction businesses; and;	b. Sekitar 13,09% akan digunakan untuk investasi berupa pengembangan entitas anak dan usaha konstruksi modular; dan Approximately 13.09% will be used for investment in the development of subsidiaries and modular construction businesses; and;		Penggunaan (II), hingga saat ini belum ada realisasi. Utilization (II), to date, has not been realized.

Rencana Awal (RUPST 31 Maret 2020) Initial Plan (AGMS March 31, 2020)	Rencana Perubahan (RUPST 20 Mei 2024) Amendment Plan (AGMS May 20, 2024)	Alasan Reason	Keterangan Remarks
c. Sekitar 10,00% akan digunakan untuk investasi alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem teknologi informasi. Approximately 10.00% will be used for investment in construction production equipment and the development of information technology systems.	c. Sekitar 10,00% akan digunakan untuk investasi alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem teknologi informasi. Approximately 10.00% will be used for investment in construction production equipment and the development of information technology systems.		Penggunaan (III), untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp80,987 Miliar atau sebesar 100%. Utilization (III), for the intended purpose, has been realized at Rp80.987 billion, or 100%.
Sisanya sekitar 26,11% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. The remaining 26.11% will be used for the Company's working capital needs.	Sisanya sekitar 44,44% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. The remaining 44.44% will be used for the Company's working capital needs.		Modal Kerja, untuk kebutuhan dimaksud telah direalisasikan sebesar Rp211,456 Miliar atau sebesar 58,76%. Working Capital, for these needs, has been realized at Rp211.456 billion, or 58.76%.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM HINGGA TAHUN 2025

REPORT ON THE REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS UNTIL 2025

No	Jenis Penawaran Umum Type of Public Offering	Tanggal Efektif Effective Date	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Realized Value of Public Offering Proceeds			Rencana Penggunaan Dana Berdasarkan Perubahan pada RUPST Tahun Buku 2024 pada tanggal 28 November 2025 Planned Use of Proceeds Based on Amendments to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on November 28, 2025			
						Pengembangan Usaha Business Development			
			Jumlah Hasil Penawaran Umum Public Offering Proceeds	Biaya Penawaran UmumBiaya Public Offering Costs	Hasi Bersih Net Proceeds	Penyediaan Ruang pada Infrastruktur Perkotaan, Infrastruktur Sosial, dan Bangunan Kepariwisataan Provision of Space in Urban Infrastructure, Social Infrastructure, and Tourism Buildings	Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular Investment in Development of Subsidiaries and Modular Construction Businesses	Investasi Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Investment in Construction Production Equipment and Information Technology System Development	Modal Kerja Working Capital
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penawaran Umum Perdana Saham (IPO Saham) Initial Public Offering (IPO)	20 November 2017 November 20, 2017	832.880	23.014	809.866	262.980	0	80.987	465,899

Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember 2025 Actual Use of Proceeds as of December 31, 2025				**Total Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum** Total Use of Proceeds from the Public Offering	**Sisa Dana Hasil Penawaran Umum** Remaining Proceeds from the Public Offering
Pengembangan Usaha Business Development				**Total**	
Penyediaan Ruang pada Infrastruktur Perkotaan, Infrastruktur Sosial, dan Bangunan Kepariwisataan Provision of Space in Urban Infrastructure, Social Infrastructure, and Tourism Buildings	**Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular** Investment in Development of Subsidiaries and Modular Construction Businesses	**Investasi Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi** Investment in Construction Production Equipment and Information Technology System Development	**Modal Kerja** Working Capital	**(11+12**	**(6-15)**
(32,47%)	(0,00%)	(10,00%)	(44,44%)	+13+14)	
11.					
202.980	0	80.987	465,899	749,866	60,000

Hingga tahun 2025, realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan mencapai Rp749,866 miliar, dengan sisa dana yang belum digunakan sebesar Rp60,000 miliar. Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai bagian dari kewajiban yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

As of 2025, the realization of the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering amounted to Rp749.866 billion, with the remaining unused funds totaling Rp60.000 billion. The Company has submitted the Report on the Realization of the Use of Initial Public Offering Proceeds as part of its obligations as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Public Offerings Proceeds.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/Or Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang maupun modal yang berdampak material terhadap kinerja keuangan dan operasional. Dengan demikian, tidak terdapat informasi material yang perlu diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2025, the Company did not undertake any investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and/or debt or capital restructuring that had a material impact on its financial and operational performance. Therefore, there is no material information to be disclosed in this Annual Report.

Apabila di kemudian hari terdapat informasi material atau kegiatan terkait, Perseroan akan mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik.

Should any material information or related activities arise in the future, the Company will disclose them in accordance with the prevailing laws and regulations applicable to public companies.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated/Related Parties

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN SERTA KETENTUAN TERKAIT

Perseroan memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan telah melalui prosedur yang memadai serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran transaksi (*arm's length principle*). Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak berelasi.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Mekanisme penelaahan atas transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan melalui proses audit oleh Komite Audit, yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

POLICY AND REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS AND COMPLIANCE WITH RELEVANT REGULATIONS AND PROVISIONS

The Company ensures that all transactions undertaken have gone through adequate procedures and are carried out in accordance with the arm's length principle. The Company has policies governing material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated or related parties.

In practice, the Company consistently applies the prudence principle in line with generally accepted business practices and complies with Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, as well as Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 7 concerning Related Party Disclosures.

The review mechanism for material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties is conducted through an audit process by the Audit Committee, the results of which are then reported to the Board of Commissioners to ensure transparency and compliance with applicable regulations.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mengalami pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.

Throughout 2025, the Company did not experience any violations of laws and regulations related to material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties.

KOMITMEN PERUSAHAAN ATAU MANAJEMEN ATAS TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam pelaksanaan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi, Direksi memastikan bahwa seluruh proses transaksi telah melalui prosedur yang memadai serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran transaksi (*arm's length principle*).

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, telah melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan merupakan bagian dari transaksi afiliasi maupun transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

COMPANY OR MANAGEMENT COMMITMENT REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

In carrying out material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated parties, the Board of Directors ensures that all transaction processes have gone through adequate procedures and are conducted in accordance with the arm's length principle.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, has carried out adequate review procedures to ensure that affiliated transactions are conducted in accordance with the arm's length principle. This is done to ensure that such transactions are carried out based on generally accepted business practices, meet fairness principles, and comply with applicable regulatory provisions.

Business activities carried out to generate revenue on a routine, recurring, and/or continuous basis are part of affiliated transactions as well as material transactions conducted by the Company.

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Transaksi Perseroan yang tercatat pada tahun 2025 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan usaha Perseroan serta bebas dari konflik kepentingan.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang memiliki hubungan dengan Grup (entitas pelapor), antara lain sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dianggap memiliki relasi dengan entitas pelapor apabila orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas dianggap berelasi dengan entitas pelapor apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor merupakan anggota kelompok usaha yang sama (entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya);
   b. Satu entitas merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha);

POLICY ON AFFILIATED/RELATED PARTIES

The Company's transactions recorded in 2025 were conducted on an arm's length basis and in accordance with normal commercial terms. Each transaction is carried out based on the Company's business needs and is free from conflicts of interest.

The Company enters into transactions with related parties as regulated under PSAK No. 7 concerning Related Party Disclosures and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. A related party is a person or entity that has a relationship with the Group (reporting entity), including as follows:

1. A person or a close member of that person's family is considered to be related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is considered related to the reporting entity if any of the following conditions apply:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same group (parent entity, subsidiary, and fellow subsidiary);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group);

c. Kedua entitas merupakan ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d. Satu entitas merupakan ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas lainnya merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e. Entitas merupakan program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
f. Entitas dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan pada poin (1);
g. Orang yang diidentifikasikan pada poin (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok usaha tempat entitas tersebut berada, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

c. Both entities are joint ventures of the same third party;
d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in point (1);
g. A person identified in point (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or
h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mencakup instansi pemerintah dan badan sejenis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham, maupun entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the government. In this context, the government includes government agencies and similar bodies, whether at local, national, or international level. Government-related entities may include entities controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance as a shareholder, as well as entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder's proxy.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan pada laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta prinsip keterbukaan informasi. Pengungkapan ini disampaikan sebagai bentuk transparansi atas hubungan afiliasi yang dapat memengaruhi posisi keuangan maupun hasil usaha Perseroan.

Adapun nama pihak berelasi, sifat hubungan, serta jenis transaksi material yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

NAMES AND NATURE OF RELATIONSHIPS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

The Company conducts transactions with related parties in accordance with applicable regulatory provisions and the principle of information transparency. This disclosure is presented as a form of transparency regarding affiliated relationships that may affect the Company's financial position and results of operations.

The names of related parties, the nature of the relationships, and the types of material transactions conducted with related parties are as follows:

Tabel Nama-Nama Pihak Yang Berelasi, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi
Related Parties, Nature of Relationships, and Types of Transactions

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, utang usaha, pinjaman bank, dan pendapatan Cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables, gross amount due from customers, work in progress, accounts payable, bank loans, and revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas, pinjaman bank, dan utang usaha Cash and cash equivalents, bank loans, and accounts payable
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas dan utang usaha Cash and cash equivalents and accounts payable
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas, pinjaman bank, dan utang usaha Cash and cash equivalents, bank loans, and accounts payable
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas, pinjaman bank, dan utang usaha Cash and cash equivalents, bank loans, and accounts payable
Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang usaha, dan utang lain-lain Cash and cash equivalents, other receivables, accounts payable, and other payables
Koperasi Karyawan WEGE	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja, dan utang usaha Accounts receivable, gross amount due from customers, and accounts payable
PT Pertamina (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, dan pekerjaan dalam proses Retention receivables, gross amount due from customers, and work in progress
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, dan pendapatan Accounts receivable, retention receivables, gross amount due from customers, work in progress, and revenue
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kerja Sama Operasi (Joint Venture)	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, dan pendapatan Accounts receivable, retention receivables, gross amount due from customers, and revenue
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja, dan pendapatan Accounts receivable, gross amount due from customers, and revenue
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, dan pendapatan Retention receivables, gross amount due from customers, work in progress, and revenue
PT Angkasa Pura I	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, dan pendapatan Accounts receivables, retention receivables, gross amount due from customers, work in progress, and revenue
PT Graha Sarana Duta (Telkom Property)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Pendapatan Revenue
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha Accounts receivables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang Saham Mayoritas Major Shareholder	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan pendapatan Accounts receivables, retention receivables, gross amount due from customers, work in progress, other receivables, accounts payable, other payables, and revenue
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, utang usaha, dan pendapatan Gross amount due from customers, work in progress, accounts payable, and revenue

Tabel Nama-Nama Pihak Yang Berelasi, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi
Related Parties, Nature of Relationships, and Types of Transactions

Pihak Yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, pekerjaan dalam proses, piutang lain-lain, dan utang usaha Accounts receivable, retention receivable, gross amount due from customers, work in progress, other receivables, and accounts payable
PT Kurnia Realty Jaya	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, retention receivable, and gross amount due from customers
Kementerian BUMN	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Pekerjaan dalam proses Work in progress
PT Biofarma (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, retention receivable, and gross amount due from customers
PT Patra Jasa	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain, dan pendapatan Accounts receivable, retention receivable, gross amount due from customers, other receivables, and revenue
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, pekerjaan dalam proses, dan piutang lain-lain Accounts receivable, retention receivable, work in progress, and other receivables
PT PLN (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Telkom Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT PP (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain, dan pendapatan Accounts receivable, retention receivables, gross amount due from customers, other receivables, and revenue
PT Waskita Beton Precast	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan entitas terkait	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Sarinah (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Pendapatan Revenue
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Kas dan setara kas dan pendapatan Cash and cash equivalents and revenue
PT Bhirawa Steel	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Varia Usaha Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable
PT Krakatau Engineering	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-Related Entities	Utang usaha Accounts payable

SIFAT PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Sifat dan jenis transaksi material dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, secara tidak langsung Perseroan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
2. Perseroan menempatkan dana serta memiliki fasilitas pinjaman pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga yang berlaku secara normal, sebagaimana yang diterapkan kepada nasabah pihak ketiga.
3. Perseroan melakukan perjanjian kerja sama usaha dengan BUMN lain, entitas anak, serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan.

NATURE OF AFFILIATED PARTIES/ RELATED PARTIES

The nature and types of material transactions with related parties are as follows:

1. The Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of State-Owned Enterprises, is the major shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, the Company's shareholder. Therefore, the Company has an indirect affiliated relationship through capital participation of the Government of the Republic of Indonesia.
2. The Company places funds and maintains loan facilities with state-owned banks with normal terms and interest rates, as applied to third-party customers.
3. The Company enters into business cooperation agreements with other state-owned enterprises, subsidiaries, and authorized government agencies and institutions to support the Company's operational activities.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan transaksi berelasi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

RELATED PARTY TRANSACTION REALIZATION

The Company conducts transactions with related parties in accordance with applicable regulations. The related party transactions undertaken by the Company in 2023 and 2024 are presented in the following table:

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Aset dan Liabilitas 2024-2025
Related Party Transaction Realization: Assets and Liabilities Tabel 2024-2025

Jenis Transaksi Type of Transaction	2025		2024		Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	391,13	9,67%	1.016,50	17,75%	(625,37)	(61,55) ↓
Piutang Usaha Trade Receivables	235,49	5,82%	263,20	4,60%	(27,71)	(10,53) ↓
Piutang Retensi Retention Receivables	334,64	8,27%	161,71	2,82%	172,93	106,93 ↑
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Amount Due from Customers	420,77	10,40%	195,12	3,41%	225,65	115,64 ↑
Pekerjaan dalam Proses Proses Work in Progress	840,47	20,78%	374,78	6,54%	465,69	124,25 ↑
Piutang Lain-lain Other Receivables	112,85	2,79%	165,41	2,89%	(52,56)	(31,78) ↓
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	73,04	3,53%	350,00	11,21%	(276,96)	(79,13) ↓
Utang Usaha Trade Payables	159,3	7,69%	473,87	2,57%	(314,57)	(66,39) ↓
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen Advances from Owners and Customers	15,8	0,76%	93,07	2,99%	(77,27)	(83,02) ↓
Utang Lain-lain Other Payables	39,54	1,91%	36,90	1,18%	2,64	7,15 ↑

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Aset dan Liabilitas 2024-2025
Related Party Transaction Realization: Assets and Liabilities Tabel 2024-2025

Jenis Transaksi Type of Transaction	2025		2024		Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Portion of Long-Term Liabilities Due Within One Year	75,65	3,65%	9,42	0,30%	66,23	703,08 ↑
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Portion of Long-Term Liabilities	0	0,00%	75,65	2,42%	(75,65)	(100,00) ↓

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Pendapatan 2024-2025
Realization of Related Party Transactions Revenue Table 2024-2025

Jenis Transaksi Type of Transaction	2025		2024		Peningkatan/penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Percentage to Total Assets/ Liabilities	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Revenue	292,44	18,01%	641,97	17,48%	(349,53)	(54,45) ↓

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI PIHAK AFILIASI

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dengan demikian, tidak terdapat transaksi afiliasi yang perlu diungkapkan dalam laporan ini.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kegiatan transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

INFORMATION ON AFFILIATED PARTY TRANSACTIONS

Throughout 2025, the Company did not conduct any transactions with affiliated parties as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. Therefore, there are no affiliated transactions that need to be disclosed in this report.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS

Material transactions carried out by the Company have complied with the provisions set forth in Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. Throughout 2024, there were no material transaction activities conducted by the Company.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations That Have Significant Impact on The Company

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan serta dampaknya terhadap kinerja dan operasional Perseroan.

Throughout 2025, there were no changes in laws and regulations that had significant impact on the Company. Therefore, the Company does not present information regarding changes in laws and regulations and their impact on the Company's performance and operations.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on The Company

Pada tahun 2025, Perseroan telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

Hingga 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

In 2025, the Company prepared its accounting policies in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), which are effective for the financial year from January 1, 2025 to December 31, 2025.

As of December 31, 2025, there were no changes in accounting policies that had an impact on the Company's financial statements.

Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh terhadap Pendapatan dan Kinerja Keuangan Perusahaan

The Impact of Price Changes that Affect the Company›s Revenue and Financial Performance

Pada tahun 2025, terjadi kenaikan harga beberapa material utama dalam industri konstruksi di Indonesia, seperti semen, pasir, besi beton, baja, dan material lainnya, yang berdampak pada beban pokok pendapatan Perseroan. Fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, antara lain dinamika pasar global, perubahan biaya produksi, serta kebijakan perdagangan.

Untuk memitigasi dampak fluktuasi harga material, Perseroan secara aktif memantau pergerakan harga, menyesuaikan strategi pengadaan, serta mengoptimalkan efisiensi anggaran proyek. Langkah-langkah tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, informasi mengenai dampak perubahan harga material terhadap pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2025, there was an increase in the prices of several key materials in the construction industry in Indonesia, such as cement, sand, reinforcing steel, structural steel, and other materials, which affected the Company's cost of revenue. These price fluctuations were influenced by various external factors, including global market dynamics, changes in production costs, and trade policies.

To mitigate the impact of material price fluctuations, the Company actively monitors price movements, adjusts its procurement strategies, and optimizes project budget efficiency. These measures are taken to maintain the stability of the Company's revenue and financial performance on a sustainable basis. Therefore, information regarding the impact of changes in material prices on the Company's revenue and financial performance is presented in this Annual Report.

Informasi Tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing

Information on the Impact of Foreign Exchange Rates

Perseroan tidak memiliki transaksi dalam mata uang asing dalam kegiatan operasional dan bisnisnya. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar tidak memiliki dampak material terhadap posisi keuangan maupun kinerja Perseroan. Jika terdapat perubahan dalam kebijakan atau eksposur terhadap mata uang asing di masa mendatang, Perseroan akan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

The Company does not have transactions in foreign currencies in its operational and business activities. Therefore, exchange rate fluctuations do not have a material impact on the Company's financial position or performance. If there are changes in policy or exposure to foreign currencies in the future, the Company will implement the necessary mitigation measures in accordance with its applicable risk management policies.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa

Financial Information Containing Extraordinary Events

Perseroan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa.

The Company declares that throughout 2025 there was no financial information containing extraordinary events.

Kontribusi Pajak Terhadap Negara

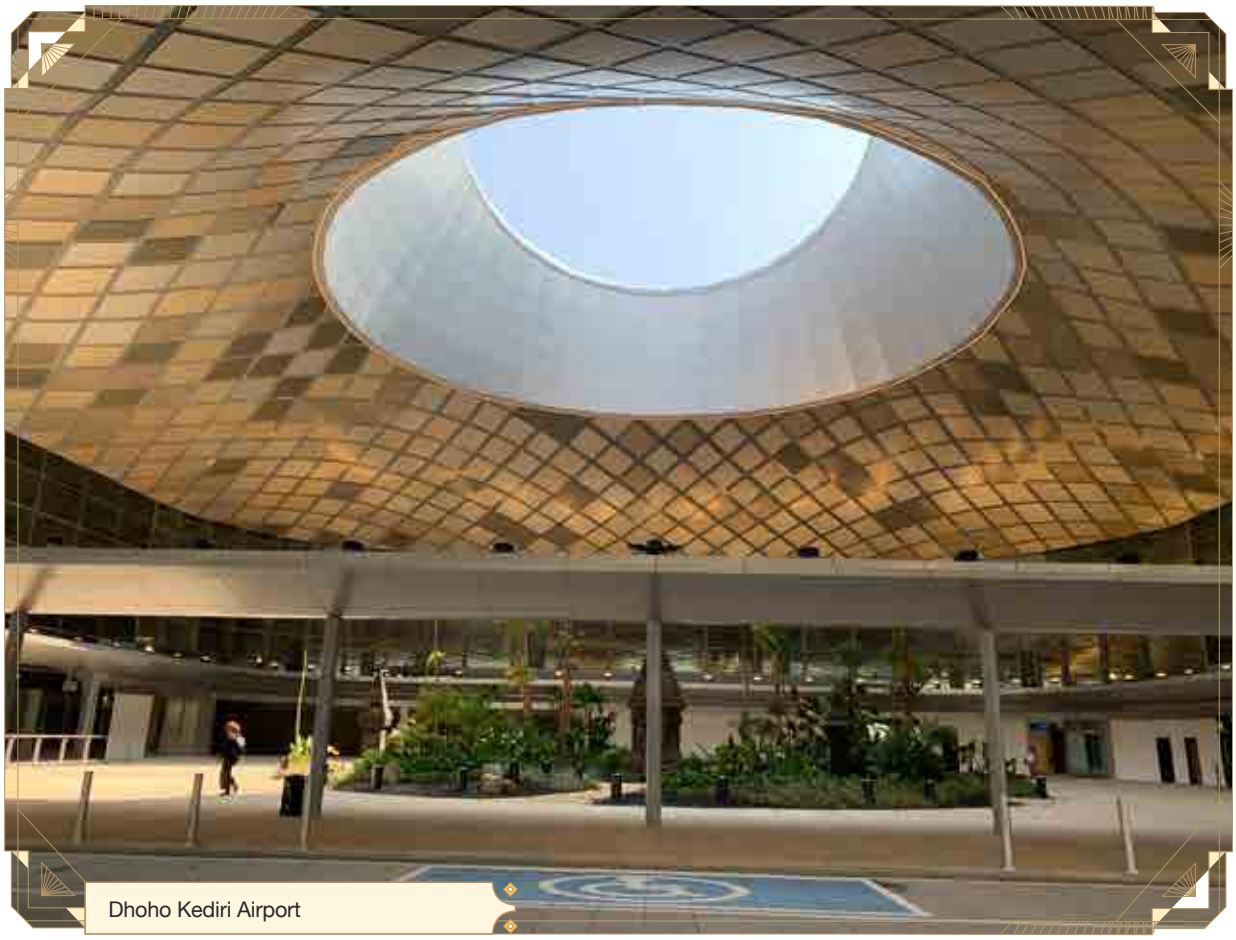
Tax Contribution to the State

Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional, Perseroan tidak hanya berperan melalui aktivitas bisnis utama di sektor konstruksi bangunan gedung, tetapi juga melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kontribusi pajak ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam mendukung pendapatan negara yang digunakan untuk berbagai program dan kebutuhan pembangunan nasional. Rincian pembayaran pajak yang telah dilakukan Perseroan dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

As part of its contribution to national development, the Company plays a role not only through its core business activities in the building construction sector but also through fulfilling its tax obligations as a form of responsibility to the state. This tax contribution reflects the Company's commitment to supporting state revenues, which are used for various national development programs and needs. Details of tax payments made by the Company over the past three years are presented in the following table:

Uraian Description	2025	2024	2023
PPH 21 I Income Tax Article 21	33.791.017.692	61.596.223.862	49.226.109.016
PPH 23 I Income Tax Article 23	3.030.724.873	5.111.867.620	5.594.452.798
PPH 42 I Income Tax Article 42	11.042.383.192	25.907.758.499	25.702.144.410
PPNK I VAT Tax Article 1	178.741.358.715	352.376.968.386	325.419.065.985
PB1 I VAT Article 11	3.211.443.099	4.134.021.797	2.917.816.649
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Amount of Tax Paid	**229.836.653.973**	444.992.818.367	408.859.588.858

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect



Dhoho Kediri Airport

STRATEGI PEMASARAN

Sepanjang tahun 2025, kondisi perekonomian nasional menunjukkan dinamika yang lebih selektif, ditandai dengan penyesuaian alokasi anggaran pada sejumlah kementerian/lembaga serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Dampak dari kebijakan tersebut antara lain terbatasnya pangsa pasar proyek pemerintah serta tertundanya beberapa paket pekerjaan yang sebelumnya direncanakan untuk ditenderkan. Selain itu, timeline pelaksanaan proyek pada sektor BUMN/BUMD maupun swasta mengalami penyesuaian sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi dan kehati-hatian dalam realisasi investasi.

Meskipun demikian, aktivitas pembangunan tetap menunjukkan pergerakan, terutama pada semester II 2025, seiring dengan percepatan realisasi anggaran dan prioritas penyelesaian proyek strategis nasional. Pada segmen gedung, peluang pasar masih terbuka pada proyek-proyek sektor pendidikan, fasilitas kesehatan, perkantoran, serta pembangunan dan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

MARKETING STRATEGY

Throughout 2025, national economic conditions exhibited more selective dynamics, marked by adjustments in budget allocations across several ministries/agencies as well as government spending efficiency policies. The impact of these policies included a limited share of government project markets and delays in several work packages that were previously planned for tender. In addition, project implementation timelines in both state-owned and regionally-owned enterprises (SOE/ROE) and private sector were adjusted in response to economic uncertainty and increased prudence in investment realization.

Nevertheless, development activities continued to show signs of movement, particularly in the second half of 2025, in line with the acceleration of budget realization and the prioritization of national strategic project completion. In the building segment, market opportunities remained open for projects in the education sector, healthcare facilities, offices, as well as the development of the Nusantara Capital City (IKN).

Dalam merespons dinamika tersebut, strategi pemasaran WIKA Gedung pada tahun 2025 diarahkan secara lebih adaptif dan kolaboratif. Perseroan memperkuat sinergi dengan entitas BUMN Karya lainnya melalui skema kerja sama operasi (KSO) maupun kolaborasi strategis guna meningkatkan daya saing dalam tender proyek berskala besar dan kompleks. Di sisi lain, pendekatan dan selektivitas penetrasi pasar swasta juga terus diperkuat, khususnya pada pengembang properti, kawasan industri, dan sektor manufaktur.

Selain mempertahankan pangsa pasar eksisting, WIKA Gedung juga secara aktif membuka peluang pasar baru melalui pendekatan solusi terintegrasi *(integrated building solution)*, termasuk skema *pre-financing* dan *creative financing* bekerja sama dengan investor strategis. Kolaborasi dengan fungsi *Transformation, Portfolio, and Sustainability Division* (TPSD) turut diperkuat dalam mengidentifikasi peluang investasi berbasis proyek yang berkelanjutan dan memiliki potensi *recurring income*.

Pendekatan pemasaran juga semakin mengedepankan diferensiasi berbasis keunggulan kompetitif Perseroan, seperti penerapan teknologi *Building Information Modeling* (BIM), *modular construction*, serta konsep *green building* yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan (ESG). Dengan strategi tersebut, WIKA Gedung berupaya menjaga kesinambungan perolehan kontrak baru di tengah kondisi pasar yang lebih kompetitif dan selektif.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat posisi Perseroan di industri, strategi pemasaran menjadi aspek fundamental dalam penetapan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan. Perseroan tetap berfokus pada bisnis utama di sektor konstruksi bangunan gedung, yang didukung oleh pengembangan segmen konstruksi *offsite* melalui bisnis modular, serta kegiatan investasi dan konsesi.

Adapun strategi utama Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan pengembangan pasar pada BUMN, Pemerintah, serta segmen swasta yang selektif, termasuk pasar captive melalui skema BOT dan BLT.
2. Mengembangkan konstruksi *offsite*, khususnya pada bisnis modular.
3. Meningkatkan digitalisasi dan efisiensi operasional.
4. Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aktivitas operasional bisnis.
5. Meningkatkan kolaborasi strategis dengan mitra bisnis
6. Mengoptimalkan perolehan pasar baru pada industri potensial

Selain itu, Perseroan terus mengutamakan kinerja baik pada proyek berjalan dari pelanggan eksisting, dengan tetap memberikan layanan prima kepada pelanggan baru. Kepuasan pelanggan diwujudkan melalui penyediaan layanan bernilai tambah yang berorientasi pada kualitas dan efisiensi. Perseroan juga menyadari bahwa tingginya permintaan pasar diiringi dengan meningkatnya persaingan, khususnya dalam aspek harga yang semakin kompetitif. Meskipun demikian, sebagai entitas yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, Perseroan tetap menempatkan kualitas pekerjaan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang dikerjakan.

In responding to these dynamics, WIKA Gedung's marketing strategy in 2025 was directed to be more adaptive and collaborative. The Company strengthened synergies with other state-owned construction entities through joint operation schemes (JO) and strategic collaborations to enhance competitiveness in large-scale and complex project tenders. On the other hand, the approach to and selectivity in the private sector and industrial estate markets continued to be strengthened, particularly among property developers, industrial estates, and manufacturing sector.

In addition to maintaining its existing market share, WIKA Gedung actively explored new market opportunities through an integrated building solution approach, including pre-financing schemes and creative financing in collaboration with strategic investors. Collaboration with the Transformation, Portfolio, and Sustainability Division (TPSD) was also strengthened to identify project-based investment opportunities that are sustainable and have recurring income potential.

The marketing approach increasingly emphasizes differentiation based on the Company's competitive advantages, such as the implementation of Building Information Modeling (BIM), modular construction, and green building concepts aligned with sustainability (ESG) principles. Through this strategy, WIKA Gedung aims to maintain the continuity of new contract acquisition amid increasingly competitive and selective market conditions.

To ensure business sustainability and strengthen the Company's position in the industry, marketing strategy serves as a fundamental aspect in determining the strategic steps to be implemented. The Company remains focused on its core business in the building construction sector, supported by the development of offsite construction segments through modular business, as well as investment and concession activities.

The Company's main strategies in 2025 are as follows:

1. Focusing market development on SOEs, Government, and selective private segments, including captive markets through BOT and BLT schemes.
2. Developing offsite construction, particularly in the modular business.
3. Enhancing digitalization and operational efficiency.
4. Implementing sustainability principles across all business operations.
5. Strengthening strategic collaboration with business partners.
6. Optimizing new market acquisition in potential industries.

In addition, the Company continues to prioritize good performance on ongoing projects, while still delivering excellent services to new customers. Customer satisfaction is achieved through the provision of value-added services oriented toward quality and efficiency. The Company also recognizes that increasing market demand is accompanied by intensified competition, particularly in pricing, which has become more competitive. Nevertheless, as a customer-oriented entity, the Company continues to prioritize quality of work in every project undertaken.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Perseroan pada tahun 2025 tercermin dari capaian perolehan kontrak. Sepanjang tahun 2025, Perseroan memperoleh 11 proyek baru dengan total nilai sebesar Rp1.709 triliun. Dengan tambahan kontrak tersebut, total nilai kontrak dihadapi dari seluruh proyek yang dikelola Perseroan mencapai Rp 5,76 triliun.

Kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.709 triliun, yang terdiri atas proyek konstruksi senilai Rp1.653 triliun dan proyek modular sebesar Rp55 miliar. Berdasarkan pemberi kerja, mayoritas kontrak baru berasal dari proyek Pemerintah sebesar Rp1.464 triliun, diikuti oleh proyek BUMN sebesar Rp225 miliar dan proyek swasta sebesar Rp18,9 miliar. Sementara itu, dari sisi jenis proyek, kontribusi terbesar berasal dari proyek perkantoran sebesar Rp1,1 triliun, diikuti oleh fasilitas publik sebesar Rp514 miliar, dan proyek residensial sebesar Rp36 miliar serta komersial sebesar Rp15,9 miliar.

Capaian tersebut mencerminkan WIKA Gedung tetap dapat menjaga tingkat kepercayaan pasar terhadap kompetensi Perseroan dalam industri konstruksi bangunan gedung, di tengah dinamika dan persaingan yang semakin ketat dalam industri konstruksi.

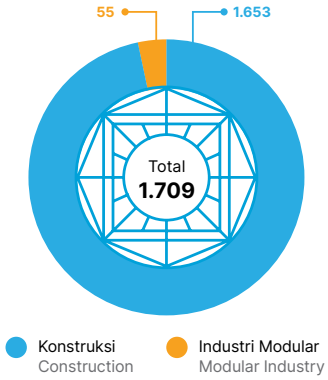
MARKET SHARE

The Company's market share in 2025 is reflected in its contract acquisition achievements. Throughout 2025, the Company secured 11 new projects with a total value of Rp1.709 trillion. With these additional contracts, the total contract value on hand from all projects managed by the Company reached Rp5.76 trillion.

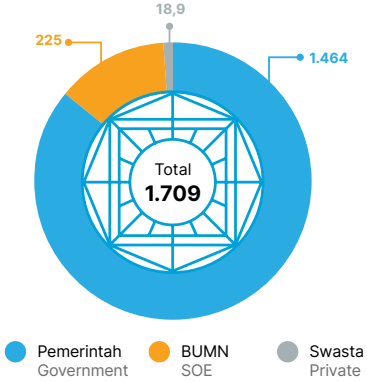
New contracts secured in 2025 amounted to Rp1,709 trillion, comprising construction projects worth Rp1,653 trillion and modular projects totaling Rp55 billion. Based on project owners, the majority of new contracts were contributed by Government projects amounting to Rp1,464 trillion, followed by State-Owned Enterprises (SOEs) at Rp225 billion and private sector projects at Rp18,9 billion. In terms of project type, the largest contribution came from office projects amounting to Rp1.1 trillion, followed by public facilities at Rp514 billion, residential projects at Rp37 billion and commercial of Rp15,9 billion.

These achievements reflect that WIKA Gedung has been able to maintain a high level of market trust in the Company's competencies within the building construction industry, amid increasingly dynamic and competitive industry conditions.

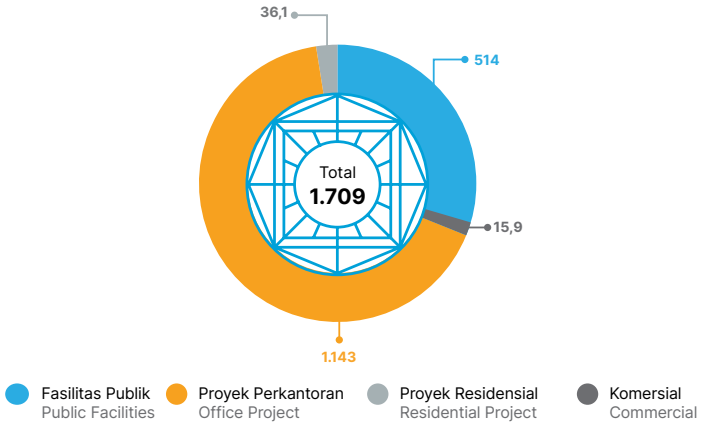
Kontrak Baru Berdasarkan Lini Bisnis (Rp-miliar)
New Contracts by Line of Business Line (Rp billion)



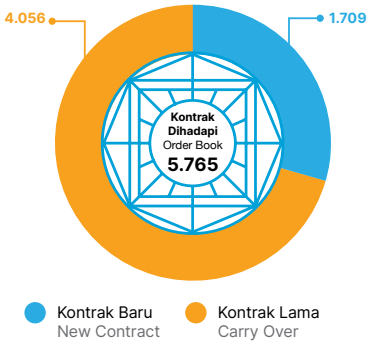
Kontrak Baru Berdasarkan Pemberi Kerja (Owner) (Rp-miliar)
New Contracts by Owner (Rp-billion)



Kontrak Baru Berdasarkan Jenis Proyek (Rp-miliar)
New Contracts by Project Type (Rp-billion)



Pencapaian Kontrak Tahun 2025 (Rp-miliar)
Contract Acquisition by 2025 (Rp-billion)



Perbandingan antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun ke Depan

Comparison Between Targets and Realizations and Projections for the Next 1 (One) Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sepanjang tahun berjalan. RKAP disusun sebagai bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Dalam RKAP Tahun 2025, Perseroan menetapkan sejumlah target yang dirancang dengan mempertimbangkan dinamika kondisi industri serta perkembangan ekonomi terkini. Berikut disajikan perbandingan antara target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerja Perseroan pada tahun buku 2025.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND ACTUAL PERFORMANCE

The Company's Work Plan and Budget (RKAP) serves as the primary reference for carrying out the Company's business activities throughout the year. The RKAP is prepared as a form of implementation and elaboration of the Company's Long-Term Plan (RJPP).

In the 2025 RKAP, the Company has established several targets designed to take into account the dynamics of industry conditions and current economic developments. The following is a comparison between the targets established in the 2025 RKAP and the Company's actual performance achievements in the 2025 fiscal year.

Uraian Description	Realisasi 2025 Realization 2025	Target 2025 Target 2025	Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2025 Achievement of Realization to the 2024 Target (%)
Kontrak Baru/Pemasaran New Contract/Marketing	1.709,10	3.580,00	47.74
Kontrak Lama Carry Over	4.056.,14	4.444,20	91.27
Kontrak Dihadapi Order Book	5.765,24	8.024,20	71.85
Total Pendapatan Total Revenue	2.173,89	4.408,73	49.31
Pendapatan Bersih/Pendapatan Non JO (Joint Operation) Net Revenue/Revenue Non JO (Joint Operation)	1.623,56	3.432,04	47.31
Laba Bersih Net Profit	(630,25)	46,35	(1359.81)
Jumlah Aset Total Assets	4.043,81	5.902,91	68.51
Struktur Modal Capital Structure			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.733,97	2.379,18	72.88
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	338,59	862,25	39.27
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	2.072,56	3.241,42	63.94
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.971,25	2.661,49	74.07
Belanja Modal Capital Expenditure (Capex)	0,85	14,55	5.86
Kebijakan Dividen Dividend Policy	10%	10%	100
SDM-Skor Keterlibatan Karyawan HC-Employee Engagement Score	60%	62%	96.77

KONTRAK BARU/PEMASARAN

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 1,709.10 miliar atau mencapai 47.74% dari target Rp 3,580 miliar. Mayoritas perolehan kontrak baru berasal dari segmen jasa konstruksi serta proyek Pemerintah. Capaian yang lebih rendah dari target dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, termasuk dampak penyelenggaraan pemilu, serta kebijakan Perseroan yang lebih selektif dalam memperoleh proyek baru.

KONTRAK DIHADAPI

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat nilai kontrak dihadapi sebesar Rp 5,765.24 miliar atau mencapai 71.85% dari target Rp 8,024.20 miliar. Kontrak dihadapi tersebut terdiri dari kontrak baru sebesar Rp 1,709.10miliar dan kontrak lama sebesar Rp 4,056.14miliar yang berasal dari proyek-proyek tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini terutama disebabkan oleh berkurangnya perolehan kontrak baru serta selesainya sejumlah proyek berjalan pada segmen jasa konstruksi selama tahun 2025.

PENDAPATAN BERSIH/PENDAPATAN *NON-JO (JOINT OPERATION)*

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp1.623,56 miliar atau mencapai 47.31% dari target sebesar Rp 3,432.04 miliar. Pencapaian tersebut didorong oleh penyelesaian sejumlah proyek berjalan serta kontribusi dari segmen modular, meskipun secara keseluruhan pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

LABA BERSIH

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp(630,25) miliar atau mencapai -1359.81% dari target sebesar Rp 46.35 miliar. Capaian yang lebih rendah dari target terutama disebabkan oleh menurunnya perolehan kontrak baru pada segmen jasa konstruksi serta meningkatnya beban usaha untuk mendukung aktivitas operasional.

Dibandingkan dengan realisasi laba bersih tahun 2024 sebesar Rp67,96 miliar, kinerja Perseroan mengalami penurunan signifikan sebesar (1.027,46%), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan bagian laba ventura bersama, peningkatan beban lainnya, serta peningkatan rugi entitas asosiasi.

JUMLAH ASET

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan total aset sebesar Rp 4,043.81 miliar atau mencapai 68.51% dari target sebesar Rp 5,902.91 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan setara kas serta penurunan aktivitas proyek dibandingkan tahun sebelumnya.

NEW CONTRACTS/MARKETING

In 2025, the Company recorded new contract acquisitions amounting to Rp1,709.10 billion, achieving 47.74% of the target of Rp3,580 billion. The majority of new contracts were derived from the construction services segment and Government projects. The lower-than-target achievement was influenced by macroeconomic conditions, including the impact of the general election, as well as the Company's more selective approach in securing new projects.

ORDER BOOK

In 2025, the Company recorded order book of Rp5,765.24 billion, achieving 71.85% of the target of Rp8,024.20 billion. The order book consisted of new contracts amounting to Rp1,709.10 billion and carry-over contracts amounting to Rp4,056.14 billion from projects in previous years. The decline in achievement was mainly due to reduced new contract acquisitions and the completion of several ongoing projects in the construction services segment during 2025.

NET REVENUE/NON-JO (JOINT OPERATION) REVENUE

In 2025, the Company recorded net revenue of Rp1,623.56 billion, achieving 47.31% of the target of Rp3,432.04 billion. This achievement was supported by the completion of several ongoing projects and contributions from the modular segment, although overall revenue declined compared to the previous year.

NET PROFIT

In 2025, the Company recorded a net loss of Rp(630.25) billion, or -1,359.81% of the target of Rp46.35 billion. The lower-than-target performance was primarily due to the decline in new contract acquisitions in the construction services segment and increased operating expenses to support operational activities.

Compared to the 2024 net profit realization of Rp67.96 billion, the Company's performance declined significantly by (1,027.46%), mainly due to a decrease in profit from joint ventures, an increase in other expenses, and higher losses from associated entities.

TOTAL ASSETS

In 2025, the Company recorded total assets of Rp4,043.81 billion, achieving 68.51% of the target of Rp5,902.91 billion. This decline was primarily due to reduced cash and cash equivalents as well as decreased project activity compared to the previous year.

JUMLAH LIABILITAS

Di tahun 2025, Perseroan membukukan jumlah liabilitas sebesar Rp 2,072.56 miliar atau mencapai 63.94% terhadap target sebesar Rp 3,241.42 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pinjaman bank jangka pendek serta penurunan utang usaha seiring dengan strategi deleveraging Perseroan.

JUMLAH EKUITAS

Pada tahun 2025, Perseroan membukukan total ekuitas sebesar Rp 1,971.25 miliar atau mencapai 74.07% dari target sebesar Rp 2,661.49 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh rugi bersih yang tercatat pada tahun berjalan.

BELANJA MODAL

Pada tahun 2025, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar Rp 0.85 miliar atau mencapai 5.86% dari total anggaran sebesar Rp14.55miliar. Realisasi belanja modal tersebut digunakan untuk investasi pada program transformasi digital.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada tahun 2025, Perseroan membagikan dividen dengan *dividend payout ratio* sebesar 10% dari laba bersih tahun buku 2024. Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen maksimal sebesar 30% dari laba bersih, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan serta ketentuan peraturan yang berlaku.

HUMAN CAPITAL – EMPLOYEE ENGAGEMENT

Pada tahun 2025, hasil survei keterlibatan karyawan (*employee engagement*) Perseroan mencapai skor 60% dari target 62% Hasil penilaian tersebut menunjukkan kategori *engaged* dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan keterlibatan dan produktivitas karyawan, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan di masa depan.

PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Pada tahun 2026, Perseroan memproyeksikan adanya perbaikan kinerja secara bertahap seiring dengan penguatan strategi operasional dan peningkatan kualitas perolehan kontrak baru. Fokus Perseroan tidak hanya pada peningkatan volume kontrak, namun juga pada selektivitas proyek dengan mempertimbangkan profil risiko, struktur pembayaran, serta potensi margin yang lebih sehat.

Dari sisi perolehan kontrak baru, Perseroan menargetkan pertumbuhan yang lebih berkualitas melalui optimalisasi pipeline proyek, khususnya pada segmen pemerintah dan BUMN yang relatif lebih stabil, serta peningkatan penetrasi pada proyek-proyek dengan pendekatan teknologi modular yang memberikan efisiensi waktu dan biaya.

Sejalan dengan peningkatan kontrak baru, pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang lebih solid, didukung oleh percepatan eksekusi proyek berjalan serta upaya intensif dalam peningkatan billing dan collection untuk menjaga arus kas tetap sehat.

TOTAL LIABILITIES

In 2025, the Company recorded total liabilities of Rp2,072.56 billion, achieving 63.94% of the target of Rp3,241.42 billion. This decline was mainly due to reduced short-term bank loans and a decrease in trade payables in line with the Company's deleveraging strategy.

TOTAL EQUITY

In 2025, the Company recorded total equity of Rp1,971.25 billion, achieving 74.07% of the target of Rp2,661.49 billion. This decline was primarily influenced by the net loss recorded during the year.

CAPITAL EXPENDITURE

In 2025, the Company realized capital expenditure of Rp0.85 billion, achieving 5.86% of the total budget of Rp14.55 billion. The capital expenditure realization was allocated to investments in digital transformation programs.

DIVIDEND POLICY

In 2025, the Company distributed dividends with a dividend payout ratio of 10% of the net profit for 2024 fiscal year. The Company has set a dividend distribution policy of up to a maximum of 30% of net profit, while considering the Company's financial condition and applicable regulatory requirements.

HUMAN CAPITAL – EMPLOYEE ENGAGEMENT

In 2025, the Company's employee engagement survey score reached 60% of the 62% target. This result falls within the "engaged" category and serves as the basis for formulating strategic policies focused on improving employee engagement and productivity, while strengthening the Company's future competitiveness.

PROJECTIONS FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR

In 2026, the Company projects a gradual improvement in performance in line with the strengthening of its operational strategy and the enhancement in the quality of new contract acquisitions. The Company's focus is not only on increasing contract volume, but also on project selectivity by considering risk profiles, payment structures, and the potential for healthier margins.

In terms of new contract acquisition, the Company targets higher-quality growth through the optimization of its project pipeline, particularly in the Government and State-Owned Enterprise (SOE) segments, which are relatively more stable, as well as increased penetration into projects utilizing modular technology approaches that offer time and cost efficiency.

In line with the increase in new contracts, the Company's revenue is projected to grow more solidly, supported by the acceleration of ongoing project execution and intensified efforts to improve billing and collection to maintain healthy cash flow.

Dari sisi posisi keuangan, total aset Perseroan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan yang terukur, didorong oleh pertumbuhan aktivitas operasional serta optimalisasi pemanfaatan aset produktif. Perseroan juga berfokus pada peningkatan kualitas aset, khususnya melalui pengelolaan piutang usaha yang lebih disiplin dan selektif.

From a financial position perspective, the Company's total assets in 2026 are projected to increase in a measured manner, driven by the growth in operational activities and the optimization of productive asset utilization. The Company also focuses on improving asset quality, particularly through more disciplined and selective management of trade receivables.

Di sisi lain, liabilitas Perseroan diproyeksikan tetap terjaga pada tingkat yang prudent, dengan fokus pada pengelolaan struktur utang yang lebih sehat melalui pengendalian penambahan utang baru, optimalisasi arus kas internal, serta percepatan penyelesaian kewajiban jangka pendek. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha dan stabilitas keuangan Perseroan.

On the other hand, the Company's liabilities are projected to remain at a prudent level, with a focus on maintaining a healthier debt structure through controlled addition of new debt, optimization of internal cash flow, and acceleration of short-term obligation settlements. These measures are taken to maintain a balance between business expansion and financial stability.

Perseroan juga terus melakukan penguatan fundamental operasional melalui penerapan risk-based project management, efisiensi biaya usaha, serta pengendalian ketat terhadap potensi cost overrun. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbaikan margin secara bertahap dan berkelanjutan.

The Company also continues to strengthen its operational fundamentals through the implementation of risk-based project management, cost efficiency initiatives, and strict control over potential cost overruns. These efforts are expected to gradually and sustainably improve margins.

Selain itu, transformasi bisnis berbasis inovasi, termasuk pengembangan teknologi modular dan digitalisasi proses, menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing Perseroan di tengah dinamika industri konstruksi yang semakin menantang.

In addition, business transformation driven by innovation, including the development of modular technology and process digitalization, serves as one of the key pillars in enhancing the Company's competitiveness amid increasingly challenging dynamics in the construction industry.

Dengan kombinasi strategi tersebut, Perseroan optimistis dapat memperbaiki kinerja secara berkelanjutan, memperkuat struktur keuangan, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

With this combination of strategies, the Company is optimistic about achieving sustainable performance improvement, strengthening its financial structure, and creating added value for all stakeholders.

Prospek Usaha
Business Prospects

Tahun 2025 menandai periode yang masih penuh tantangan bagi perekonomian global. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 3,1%, sementara Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan sekitar 2,9%. Angka tersebut menunjukkan moderasi pertumbuhan dibandingkan periode sebelum pandemi, sekaligus mencerminkan proses penyesuaian ekonomi global yang masih berlangsung di tengah ketidakpastian yang tinggi.

2025 marked a period of continued challenges for global economy. The International Monetary Fund (IMF) estimated global economic growth at around 3.1%, while the World Bank projected growth of around 2.9%. These figures indicate a moderation in growth compared to the pre-pandemic period and reflect the ongoing process of global economic adjustment amidst high uncertainty.

Kompleksitas tantangan global semakin meningkat seiring eratnya keterkaitan sistem ekonomi dunia yang melibatkan interaksi perdagangan, investasi, dan arus modal lintas negara. Ketidakpastian geopolitik, volatilitas nilai tukar, serta fluktuasi harga komoditas global menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas ekonomi internasional. Konflik Rusia–Ukraina yang masih berlangsung sepanjang 2025 tetap memberikan tekanan terhadap rantai pasok global, khususnya pada sektor energi dan pangan. Gangguan pasokan minyak, gas, serta komoditas pertanian seperti gandum turut mendorong volatilitas harga di pasar internasional dan meningkatkan risiko inflasi global yang persisten, meskipun tren disinflasi mulai terlihat dibandingkan puncaknya pada 2022–2023.

The complexity of global challenges is increasing along with the growing interconnectedness of global economic system, involving trade, investment, and cross-border capital flows. Geopolitical uncertainty, exchange rate volatility, and fluctuations in global commodity prices have become key factors impacting international economic stability. The ongoing Russia-Ukraine conflict throughout 2025 continued to put pressure on global supply chains, particularly in the energy and food sectors. Disruptions in the supply of oil, gas, and agricultural commodities such as wheat have contributed to price volatility in international markets and increased the risk of persistent global inflation, although the disinflationary trend has begun to emerge compared to its peak in 2022–2023.

Selain itu, meningkatnya ketegangan geopolitik antarnegara besar dan fragmentasi perdagangan global turut memperbesar risiko ketidakstabilan sistem keuangan internasional. Ketegangan tersebut berdampak pada arus investasi global, penguatan mata uang utama dunia, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi negara maju, tetapi juga negara berkembang yang sensitif terhadap perubahan arus modal dan nilai tukar.

In addition, rising geopolitical tensions among major countries and fragmentation in global trade have further increased the risk of instability in the international financial system. These tensions have impacted global investment flows, strengthened major world currencies, and heightened market caution. This condition affects not only developed countries but also developing countries that are sensitive to changes in capital flows and exchange rates.

Dampak dinamika global tersebut turut dirasakan oleh Indonesia, baik dari sisi ekonomi, politik, keamanan, maupun hubungan diplomatik. Namun demikian, di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,06%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03%. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi pertumbuhan yang stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

The impact of these global dynamics has also been felt by Indonesia, both economically, politically, and security-wise as well as in diplomatic relations. Nevertheless, amid the global economic slowdown, Indonesia's economy has continued to demonstrate strong resilience. In 2025, Indonesia's economy grew by 5.06%, slightly higher than the 2024 growth rate of 5.03%. This achievement reflects consistent and stable growth at around 5% over the past few years.

Keberhasilan mempertahankan pertumbuhan di atas 5% mencerminkan kuatnya permintaan domestik, stabilitas inflasi yang terkendali, serta efektivitas bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan pelaku usaha. Stabilitas tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global yang masih tinggi.

The ability to maintain growth above 5% reflects strong domestic demand, controlled inflation stability, and the effectiveness of the fiscal and monetary policy mix in maintaining purchasing power and business confidence. This stability positions Indonesia as one of the developing countries capable of maintaining growth momentum while preserving economic resilience amid ongoing global pressures.

Adapun asumsi-asumsi pertumbuhan ekonomi berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) menurut Kementerian Keuangan disajikan pada tabel berikut.

The economic growth assumptions based on the State Budget Draft (RAPBN) according to the Ministry of Finance are presented in the following table.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024-2025
Basic Macroeconomic Assumptions for 2024-2025

Indikator Indicator	2024		2025
	Nominal (Rp-Miliar) Nominal (Rp-Billion)	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas	Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	5,2	5,1	5,2
Inflasi (%, yoy) Inflation (% yoy)	2,8	2,7	2,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%, rata-rata) 10-Year Government Bond Yield (%, average)	6,7	6,9	7,1
Nilai Tukar (Rp/US$, rata-rata) Average Exchange Rate (IDR/USD)	15.000	16.000	16.100
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US$/barel, rata-rata) Indonesian Crude Price/ICP (US$/barrel, average)	82	82	82
Lifting Minyak (rbph) Oil Lifting (thousand barrels per day/kbpd)	635	592	600
Lifting Gas (rbsmph) Gas Lifting (million standard cubic feet per day/ MMscfd)	1.033	990	1.005

APBN Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, sekaligus diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung agenda transformasi struktural jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan fiskal tahun 2025 dirancang secara hati-hati melalui bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang guna memastikan kesinambungan pembangunan, penguatan daya saing nasional, serta peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*).

APBN 2025 juga memberikan ruang fiskal yang memadai bagi kesinambungan program prioritas nasional, termasuk dalam masa transisi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan keberlanjutan program pembangunan tetap berjalan secara optimal. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi domestik.

Sejalan dengan itu, realisasi perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid dengan pertumbuhan sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi harga, tingkat inflasi tetap terjaga dalam rentang sasaran, yaitu sekitar 2,7% (yoy), mencerminkan stabilitas daya beli masyarakat dan efektivitas pengendalian inflasi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah, yang pada tahun 2025 bergerak pada kisaran Rp16.000 per dolar AS. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dijaga dalam kisaran target 2,5% ±1%, sebagai prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

The State Budget (APBN) for Fiscal Year 2025 was prepared by taking into account global economic dynamics that remain characterized by uncertainty, while being directed to maintain macroeconomic stability and support the long-term structural transformation agenda toward the Indonesia Emas 2045 Vision. Fiscal policy in 2025 was carefully designed through a mix of short-, medium-, and long-term policy measures to ensure development continuity, strengthen national competitiveness, and improve the quality of government spending (spending better).

The 2025 State Budget also provides adequate fiscal space for the continuity of national priority programs, including during the government transition period. This aims to maintain economic stability and ensure that development programs continue to run optimally. This approach reflects the Government's commitment to maintaining fiscal policy credibility while supporting domestic economic growth momentum.

In line with this, Indonesia's economic performance in 2025 remained solid, with growth recorded at 5.11%, an increase compared to 2024's 5.03%. From a price stability perspective, inflation remained within the target range at around 2.7% (yoy), reflecting stable purchasing power and the effectiveness of inflation control by the Government and Bank Indonesia.

Bank Indonesia, together with the Government, continues to strengthen policy synergy and coordination to maintain inflation and exchange rate stability, with the Rupiah moving in the range of IDR 16,000 per US dollar in 2025. Consumer Price Index (CPI) inflation is maintained within the target range of 2.5% ±1%, as an important prerequisite for sustainable economic growth.

Pengendalian inflasi, khususnya pada komponen harga bergejolak (*volatile food*), tetap menjadi fokus utama melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Stabilitas inflasi volatile food ditargetkan berada dalam kisaran 3,0%–5,0%, didukung oleh implementasi Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), serta optimalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Inflation control, particularly for volatile food prices, remains a key focus through strengthened coordination between central and regional governments. Volatile food inflation is targeted to remain in the range of 3.0%–5.0%, supported by the implementation of the 2025–2027 Inflation Control Roadmap, the strengthening of the National and Regional Inflation Control Teams (TPIP/TPID), and the optimization of the National Food Inflation Control Movement (GNPIP).

Secara keseluruhan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi nasional sepanjang tahun 2025, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah volatilitas global yang masih berlangsung.

Overall, the synergy between fiscal and monetary policies serves as a key foundation in maintaining national macroeconomic stability throughout 2025, while strengthening Indonesia's economic resilience amid ongoing global volatility.

KEBIJAKAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,06% pada tahun 2025 memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas sektor konstruksi nasional. Stabilitas pertumbuhan tersebut, yang relatif terjaga di tengah dinamika global, turut mendorong peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta proyek-proyek strategis di berbagai sektor. Permintaan konstruksi tetap ditopang oleh pembangunan gedung, pengembangan kawasan industri, serta infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan produktivitas ekonomi.

Sejalan dengan kondisi tersebut, sektor konstruksi pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan sekitar 5,2% (yoy), menunjukkan ketahanan yang baik meskipun terjadi penyesuaian fiskal. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh proyek pembangunan gedung (building construction) serta pekerjaan sipil seperti jalan dan jembatan, bendungan, pelabuhan, dan infrastruktur energi. Aktivitas konstruksi juga mendapat dukungan dari investasi di sektor transportasi, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan fasilitas manufaktur, serta kebutuhan pembangunan perumahan dan fasilitas publik.

Namun demikian, penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 mendorong dilakukannya penyesuaian *(refocusing)* dan prioritisasi kembali sejumlah anggaran pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga keseimbangan fiskal dan meningkatkan kualitas belanja negara *(spending better).* Dampaknya, beberapa proyek infrastruktur mengalami penjadwalan ulang atau penyesuaian lingkup pekerjaan, sehingga pertumbuhan sektor konstruksi berlangsung lebih selektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, secara struktural prospek industri jasa konstruksi tetap positif. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, transisi energi, serta transformasi digital nasional tetap menjadi agenda jangka menengah dan panjang Pemerintah. Selain pembiayaan melalui APBN/APBD, peningkatan partisipasi swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung turut membuka peluang baru bagi pelaku industri.

INFRASTRUCTURE BUDGET POLICY

Indonesia's economic growth, recorded at 5.06% in 2025, provides a strong foundation for the sustainability of national construction sector activities. This relatively stable growth, maintained amid global dynamics, has driven increased demand for infrastructure development and strategic projects across various sectors. Construction demand continues to be supported by building construction, industrial estate development, and basic infrastructure that supports connectivity and economic productivity.

In line with these conditions, the construction sector in 2025 recorded growth of approximately 5.2% (yoy), indicating solid resilience despite fiscal adjustments. This growth was primarily driven by building construction projects as well as civil works such as roads and bridges, dams, ports, and energy infrastructure. Construction activities were also supported by investments in the transportation sector, the development of new and renewable energy (NRE), manufacturing facility development, and the need for housing and public facilities development.

However, the issuance of Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 concerning Spending Efficiency in the Implementation of the 2025 APBN and APBD prompted adjustments (refocusing) and reprioritization of several infrastructure development budgets. This policy is part of the Government's effort to maintain fiscal balance and improve the quality of public spending (spending better). As a result, several infrastructure projects experienced rescheduling or scope adjustments, making the growth of the construction sector more selective compared to previous years.

Nevertheless, structurally, the prospects of construction services industry remain positive. The need for basic infrastructure development, improvement of public services, energy transition, and national digital transformation remain part of the Government's medium- and long-term agenda. In addition to financing through APBN/APBD, increased private sector participation through Public-Private Partnership (PPP) schemes and direct investment also opens new opportunities for industry players.

Dengan demikian, sepanjang FY 2025 industri konstruksi menunjukkan karakter yang lebih adaptif dan berbasis efisiensi, di mana keberhasilan pelaku usaha sangat ditentukan oleh kemampuan melakukan diversifikasi pasar, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan manajemen biaya dan risiko proyek di tengah dinamika kebijakan fiskal.

Thus, throughout FY 2025, the construction industry demonstrated a more adaptive and efficiency-driven character, where the success of business players is largely determined by their ability to diversify markets, improve productivity, and optimize cost and project risk management amid fiscal policy dynamics.

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

1. jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung;
2. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi serta renovasi sekolah;
3. Pembangunan rumah sakit yang berkualitas;
4. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi;
5. Pembangunan jalan daerah guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; dan
7. Penyediaan serta renovasi rumah dengan sanitasi yang layak.

The Government has set the direction of infrastructure development policy as follows:

1. irrigation networks and supporting infrastructure;
2. development of integrated flagship schools and school renovation;
3. development of quality hospitals;
4. development of road network infrastructure, port and airport facilities, as well as railway connectivity to support downstream industries;
5. development of regional roads to encourage economic growth centers;
6. expansion of digital and technology infrastructure; and
7. provision and renovation of housing with proper sanitation.

Namun demikian, Kementerian Keuangan memprediksi bahwa sektor infrastruktur masih akan menghadapi sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, antara lain:

1. Pemenuhan layanan dasar, meliputi penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta penyediaan air minum, air bersih, dan sanitasi yang berkualitas guna mendukung kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif.
2. Infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara lain belum optimalnya pemerataan akses dan pasokan energi yang berkelanjutan, serta kebutuhan percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*).
3. Ketersediaan lahan, khususnya kendala pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas lainnya.
4. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk belum meratanya pemanfaatan teknologi digital, terutama di wilayah 3T, serta kebutuhan optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
5. Infrastruktur konektivitas dan transportasi, antara lain percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol dalam rangka pengembangan sistem jaringan jalan nasional, termasuk pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan dan layanan angkutan laut, serta peningkatan prasarana perkeretaapian yang terintegrasi untuk menghubungkan antarwilayah, mendukung kawasan strategis (KEK, kawasan industri, dan KSPN), pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

However, the Ministry of Finance projects that the infrastructure sector will still face several challenges that may affect the implementation of these policies, including:

1. Provision of basic services, including access to adequate, safe, and affordable housing and settlements, as well as the provision of clean water, drinking water, and quality sanitation to support healthy and productive communities.
2. Energy and electricity infrastructure, including the uneven distribution of access and sustainable energy supply, as well as the need to accelerate the development of new and renewable energy (NRE) and the utilization of environmentally friendly (green) energy.
3. Land availability, particularly challenges in land acquisition for National Strategic Projects (PSN) and other priority programs.
4. Information and communication technology (ICT) infrastructure, including uneven digital technology adoption, especially in frontier, outermost, and disadvantaged regions (3T), as well as the need to optimize digital services supporting the digital economy and electronic-based government systems (SPBE).
5. Connectivity and transportation infrastructure, including the acceleration of regional road and toll road connectivity development to support the national road network system, as well as the development of transportation networks through increased airport capacity, port facilities and sea transport services, and the improvement of integrated railway infrastructure to connect regions, support strategic areas (SEZs, industrial estates, and tourism strategic areas), new economic growth centers, including the Nusantara Capital City (IKN).

Adapun proyek-proyek yang menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran infrastruktur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The priority projects for infrastructure budget allocation in 2025 are as follows:

LAYANAN DASAR DAN PANGAN
BASIC SERVICE AND FOOD



Rumah Susun 3.884 unit, dan Rumah Khusus 596 unit
Apartment Buildings 3,884 units, and Special Housing 596 units



Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Menengah, dan Tinggi sebanyak 80 unit
Facilities and Infrastructure for Primary, Secondary, and Higher Education totaling 80 units



SPAM dengan Kapasitas 773 liter/detik
Water Treatment Plant (WTP) with a capacity of 773 liters/second



Jaringan irigasi (Pembangunan seluas 2.000 Ha, dan Rehabilitasi seluas 15.000 Ha)
(Irrigation network (Development covering 2,000 Ha, and Rehabilitation covering 15,000 Ha))

KONEKTIVITAS DAN TRANSPORTASI
TRANSPORTATION AND CONNECTION



Jalan Nasioal 159.1 km
Jalan TOL 207.8 km
National Roads 159.1 km
Toll Roads 207.8 km



Jembatan baru 4.993,4 m
Flyover/underpass 1.552,0 m
New Bridge 4.993,4
Flayover/under 1.552,0m



Bandar Udara 5 Lokasi
Airport 5 Location



Pelabuhan penyebrangan 10 Lokasi dan Pelabuhan Laut 39 Lokasi
Ferry Ports 10 Locations and Seaports 39 Locations

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
ENERGY AND ELECTRICITY



Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang
Natural Gas Transmission Pipeline Network, Cirebon - Semarang Section



Pembangunan Bendungan ongoing 18 unit (akumulatif)
Ongoing Dam Construction: 18 Units (Cumulative)



Bantuan Pasang Baru Listrik kepada 130.000 rumah tangga
New Electricity Connection Assistance for 130,000 households

INFRASTRUKTUR TIK
ICT INFRASTRUCTURE



Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 Lokasi
Digital Broadcasting System (DBS) totaling 6 locations



Penyediaan Akses Internet d 36.830 Lokasi layanan publik (akumulatif)
Provision of Internet Access at 36,830 public service locations (cumulative)



Operasional Satelit multifungsi SATRIA - 1 sebesar 150 Gbps
Operation of the SATRIA-1 multipurpose satellite with a capacity of 150 Gbps

Informasi Keberlangsungan Usaha
Information on Business Continuity

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Dalam proses penyusunan rencana strategis, manajemen secara berkala melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan Perseroan dalam mencapai target, sekaligus memastikan keberlangsungan serta pengembangan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Manajemen juga terus melakukan pembenahan dan transformasi pada aspek bisnis maupun operasional guna memperkuat tata kelola dan pengelolaan Perseroan.

Manajemen berperan aktif dalam melakukan asesmen berkelanjutan serta menjalankan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur yang memadai, serta perluasan jaringan bisnis. Infrastruktur yang dimiliki Perseroan juga telah terbukti mampu mendukung keberlangsungan berbagai aktivitas usaha di industri konstruksi.

Berdasarkan pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025, Manajemen menilai bahwa keberlangsungan usaha Perseroan berada dalam kondisi yang sangat baik. Dukungan dari pemegang saham turut menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan bisnis. Manajemen optimis bahwa Perseroan mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada sebagai dasar pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang.

ASSESSMENT MANAJEMEN TERHADAP FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELANGSUNGAN USAHA

Pada tahun 2025, Perseroan telah melakukan evaluasi atas kapabilitasnya dalam menjalankan operasi bisnis secara berkelanjutan dan meyakini bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan kegiatan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen tidak menemukan adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Manajemen menilai bahwa keberlangsungan usaha selama tahun buku 2025 didukung oleh pencapaian kinerja yang memuaskan, tercermin dari rasio-rasio keuangan serta tingkat kesehatan Perseroan yang berada dalam kondisi baik dan memadai untuk menopang kesinambungan usaha di masa depan.

MATTERS POTENTIALLY HAVING SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS CONTINUITY

In the process of preparing strategic plans, management periodically evaluates and assesses the Company's ability to achieve its targets, while ensuring business continuity and development as stipulated in the Company Work Plan and Budget (RKAP). Management also continuously carries out improvements and transformations in both business and operational aspects to strengthen governance and corporate management.

Management plays an active role in conducting continuous assessments and carrying out various improvement and enhancement efforts to maintain the continuity of business activities. Factors that significantly influence business sustainability include the availability of competent human capital, adequate infrastructure support, and the expansion of business networks. The infrastructure owned by the Company has also proven capable of supporting the continuity of various business activities in the construction industry.

Based on performance achievements throughout 2025, Management assesses that the Company's business continuity is in a very good condition. Support from shareholders also serves as an important foundation in maintaining business sustainability. Management is optimistic that the Company will be able to face various challenges while capitalizing on existing opportunities as a basis for sustainable business growth in the future.

MANAGEMENT'S ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING BUSINESS CONTINUITY

In 2025, the Company conducted an evaluation of its capability to carry out business operations on a sustainable basis and believes that it has adequate resources to continue its business activities in the future. In addition, Management did not identify any material uncertainties that could raise significant doubt regarding the Company's ability to maintain its business continuity.

Management assesses that business continuity during the 2025 fiscal year is supported by satisfactory performance achievements, as reflected in financial ratios and the Company's soundness level, which are in good condition and adequate to support future business sustainability.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Manajemen telah menetapkan asumsi keberlangsungan usaha Perseroan yang mengacu pada RKAP, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mendukung kesinambungan bisnis. Aspek-aspek tersebut antara lain mencakup permodalan, likuiditas, profitabilitas, pengelolaan proyek yang berkualitas, serta pemenuhan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Parameter penilaian tersebut digunakan sebagai dasar dalam menjaga dan meningkatkan kinerja Perseroan di industri konstruksi bangunan gedung. Selain itu, penetapan asumsi juga mengacu pada konsep *going concern*, yang memberikan gambaran akurat mengenai kondisi keuangan Perseroan melalui laporan keuangan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait Perseroan.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

Management has established assumptions regarding the Company's business continuity based on the RKAP, taking into account various key aspects that support business sustainability. These aspects include capital structure, liquidity, profitability, quality project management, and compliance with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

These assessment parameters serve as the basis for maintaining and improving the Company's performance in the building construction industry. In addition, the assumptions are based on the going concern concept, which provides an accurate overview of the Company's financial condition through its financial statements, thereby serving as a basis for stakeholders in making appropriate decisions regarding the Company.

Laporan Pemeringkat Perusahaan oleh Lembaga Rating

Company Rating Report by the Rating Agency

WEGE telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor SE.01.01/A.FIN.00134/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Penyusunan Penilaian Tingkat Kesehatan Entitas Anak WIKA. Penilaian tingkat kesehatan entitas anak dilakukan dengan menggunakan peringkat (*rating*) yang didasarkan pada pemeringkatan atau metode lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan WEGE mengacu pada indikator yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, yang mencakup aspek keuangan, operasional, dan administrasi.

Untuk tahun buku 2025, peringkat yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan WEGE merupakan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang diterbitkan pada 8 Mei 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*): idBBB(sa)
   Peringkat idBBB menunjukkan bahwa obligor memiliki kemampuan yang memadai dibandingkan obligor Indonesia lainnya dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, meskipun kemampuan tersebut relatif sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Tanda *(sa)* menunjukkan bahwa peringkat tersebut merupakan peringkat berdiri sendiri (*standalone rating*).
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): idBBB/*Stable Outlook*
   Peringkat idBBB dengan *stable outlook* menunjukkan bahwa obligor memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, dengan prospek yang relatif stabil dalam jangka menengah, meskipun tetap berpotensi dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tersebut, tingkat kesehatan WEGE untuk Tahun Buku 2025 dinyatakan berada dalam kategori "Sehat" dan termasuk dalam klasifikasi "*Investment Grade*."

WEGE has conducted a company soundness assessment in accordance with applicable laws and regulations, particularly the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Letter of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Number SE.01.01/A.FIN.00134/2024 dated July 3, 2024 regarding the Preparation of Soundless Level Assessment of WIKA Subsidiaries. The assessment of subsidiary soundness is carried out using ratings based on a rating system or other methods in accordance with prevailing regulations.

In the previous year, the assessment of WEGE's soundness level referred to the indicators set out in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Assessment of Soundness Level of State-Owned Enterprises, which includes financial, operational, and administrative aspects.

For the 2025 fiscal year, the rating used in assessing WEGE's soundness level is based on the rating results issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), published on May 8, 2025 with the following results:

1. Standalone Rating: idBBB(sa)
   The idBBB rating indicates that the obligor has adequate capacity compared to other Indonesian obligors in meeting its long-term financial commitments, although such capacity is relatively sensitive to adverse economic changes. The (sa) designation indicates that the rating is a standalone rating.
2. Final Rating: idBBB/Stable Outlook
   The idBBB rating with a stable outlook indicates that the obligor has adequate capacity to meet its long-term financial commitments, with relatively stable prospects in the medium term, although it remains potentially affected by changes in economic conditions.

Based on the rating results, WEGE's soundness level for the 2025 fiscal year is categorized as "Healthy" and falls within the "Investment Grade" classification.

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan
Company Key Performance Indicator (KPI)

Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris menggunakan dasar yang terukur. Penilaian tersebut antara lain didasarkan pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan untuk tahun 2025.

In assessing the performance of Board of Directors in managing the Company, the Board of Commissioners uses measurable benchmarks. The assessment is based, among others, on the achievement of targets set out in the Company's Key Performance Indicators (KPI) for 2025.

Key Performance Indicator Corporate Wege *Scorecard* – Tahun 2025
Key Performance Indicator Corporate Wege Scorecard – Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Performance Indicators	Satuan Unit	Nilai Point	Bobot KPI KPI Weight (%)	Skor (%) Score	
					Rencana Plan	Realisasi Realization
NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA				**50%**	**50%**	**43.0%**
1	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	6	5	5%	3,0%
2	Penjualan Sales	Rp Miliar Rp Billion	6	10	10%	6,0%
3	Efisiensi Biaya Usaha Cost Efficiency	Persen Percent	11	10	10%	11,0%
4	*Cashflow from Operation (CFO) & Cashflow from Investing (CFI)*	Rp Miliar Rp Billion	6	10	10%	6,0%
5	Perolehan Kontrak Baru New Contract Acquisition	Rp Miliar Rp Billion	6	10	10%	6,0%
6	*Total Recordable Incident Rate* (TRIR)	Index	11	5	5%	5,0%
INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION					**15%**	**15,5%**
7	Penyampaian Laporan Keuangan (termasuk) CALK kepada Induk tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya (posisi Maret, Juni, September) Submission of Financial Reports (including) CALK to the Parent Company no later than the 15th of the following month (March, June, September position)	Persen Percent	10	5	5%	5,0%
8	*Risk Maturity Index*	Index	10	5	5%	5,0%
9	*GCG Level*	Skor Score	11	5	5%	5,5%
KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI TECHNOLOGY LEADERSHIP					**15,0%**	**15,5%**
10	Implementasi ERP SAP *Integrated* Integrated ERP SAP Implementation	Persen Percent	10	10	10%	10,0%
11	IT *Maturity Level*	Skor Score	11	5	5%	5,5%
PENINGKATAN INVESTASI INVESTMENT INCREASE					**5,0%**	**3,0%**
12	*Asset Recycling*	Jumlah Amount	6	5	5%	3,0%
PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT					**15,0%**	**16,0%**
13	*Talent Diversity*	Persen Percent	8	10	10%	11,0%
14	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pemenuhan Risiko Risk Compliance Organ Qualification Fulfillment Ratio	Persen Percent	11	5	5%	5,0%
					100,0%	**87,0%**

Berdasarkan tabel di atas, *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan untuk tahun 2025 mencatatkan skor sebesar 87 dari total bobot 100,00. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Manajemen telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan arahan pemegang saham.

Based on the table above, the Company's Key Performance Indicators (KPI) for 2025 recorded a score of 87 out of a total weight of 100.00. This achievement indicates that Management has successfully carried out its duties and functions effectively, in line with the shareholders' directives.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Company Long Term Plan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama bagi Perseroan dalam menetapkan arah, kebijakan, serta prioritas kegiatan usaha untuk lima tahun mendatang. RJPP disusun dengan mempertimbangkan dinamika industri, tantangan eksternal, serta peluang yang dapat dioptimalkan guna mendukung pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Sebagai peta jalan strategis, RJPP memuat sasaran dan tujuan yang ingin dicapai Perseroan, termasuk langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Untuk periode 2024–2028, RJPP Perseroan mencakup:

1. Profil Organisasi, meliputi sejarah, visi dan misi, portofolio bisnis, struktur organisasi, lingkungan persaingan, pelanggan utama, serta konteks strategis (keunggulan dan tantangan).
2. Evaluasi Kinerja RJPP 2019–2023, meliputi kinerja kuantitatif dan kualitatif, kesenjangan (*gap*) dan pembelajaran, serta penghargaan atas hasil kinerja.
3. Analisis Lingkungan Usaha, mencakup analisis lingkungan usaha makro dan industri.
4. Analisis TOWS *(Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths)*.
5. Sasaran Utama Rencana Jangka Panjang 2024–2028, meliputi sasaran kualitatif, sasaran kuantitatif, dan sasaran investasi.
6. Matriks Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Pokok, dan Transformasi *Office*.
7. Program Pokok dan Skenario Implementasi.
8. Alokasi Sumber Daya Utama.
9. Manajemen Risiko, meliputi risiko operasional dan risiko kondisi makro.
10. Proyeksi Keuangan, meliputi asumsi penyusunan proyeksi keuangan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, program investasi, proyeksi rasio keuangan, serta *Key Performance Indicators*.
11. Kesimpulan.

Perseroan sebelumnya telah menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) periode 2019–2023 sebagai landasan pencapaian tujuan strategis sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, RJP tersebut diperbarui untuk periode 2024–2028 guna menyesuaikan dengan perkembangan kondisi usaha terkini serta tantangan yang dihadapi Perseroan.

The Long-Term Corporate Plan (RJPP) is a strategic planning document that serves as the main reference for the Company in determining direction, policies, and business activity priorities for the next five years. The RJPP is prepared by considering industry dynamics, external challenges, and opportunities that can be optimized to support the Company's sustainable growth.

As a strategic roadmap, the RJPP outlines the targets and objectives to be achieved by the Company, including strategic initiatives to enhance competitiveness, create added value for stakeholders, and ensure long-term business sustainability.

For the 2024–2028 period, the Company's RJPP includes:

1. Organizational Profile, covering history, vision and mission, business portfolio, organizational structure, competitive environment, key customers, and strategic context (strengths and challenges).
2. Evaluation of the 2019–2023 RJPP Performance, including quantitative and qualitative performance, gaps and lessons learned, as well as recognition of performance achievements.
3. Business Environment Analysis, covering macro and industry environment analysis.
4. TOWS Analysis (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths).
5. Main Targets of the 2024–2028 Long-Term Plan, including qualitative targets, quantitative targets, and investment targets.
6. Matrix of Targets, Strategies, Policies, Key Programs, and Transformation Office.
7. Key Programs and Implementation Scenarios.
8. Allocation of Key Resources.
9. Risk Management, including operational risks and macroeconomic risks.
10. Financial Projections, including assumptions used in preparing projections, projected income statements, projected balance sheets, projected cash flows, investment programs, projected financial ratios, and Key Performance Indicators.
11. Conclusion.

The Company had previously established the Long-Term Plan (RJP) for the 2019–2023 period as a foundation for achieving strategic objectives in line with its vision and mission. Subsequently, the plan has been updated for the 2024–2028 period to align with current business conditions and challenges faced by the Company.

Rumah Transformasi WEGE
WEGE House of Transformation



Rusun PASPAMPRES | PASPAMPRES Public Housing

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai entitas yang sehat, tumbuh, dan berkelanjutan, Perseroan mengimplementasikan kerangka kerja transformasi yang dikenal sebagai "Rumah Transformasi." Transformasi ini berlandaskan tiga pilar utama, yaitu *Cash Focus, Business Execution Excellence*, dan *Sustainable Business Development*.

Cash Focus berfokus pada pengelolaan likuiditas dan modal kerja secara efisien, yang didukung oleh kebijakan keuangan yang tepat, kemitraan strategis, serta kolaborasi dengan mitra keuangan. *Business Execution Excellence* menitikberatkan pada optimalisasi operasional melalui penerapan kebijakan bisnis yang kompetitif, sentralisasi *Building Information Modeling* (BIM), serta pemanfaatan teknologi konstruksi terkini (*Construction 4.0*). Sementara itu, *Sustainable Business Development* berfokus pada pengembangan kemitraan jangka panjang dengan pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan akademisi, pengelolaan modal kerja yang *prudent*, serta pengembangan produk modular berkelanjutan melalui *off-site construction*, manajemen konstruksi, dan *building management*.

Proses transformasi tersebut didukung oleh tiga lapis *enabler* yang memastikan efektivitas implementasi, yaitu *Lean Organization, Technology & Data*, dan *Risk Management. Lean Organization* mendorong terciptanya proses bisnis yang ramping dan terintegrasi melalui *Project Management Information System* (PMIS). Pemanfaatan *Technology & Data*, seperti *big data*, *cloud computing*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* (AI), mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, penerapan *Risk Management* berbasis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko secara proaktif.

In order to realize the Company's vision as a healthy, growing, and sustainable entity, the Company implements a transformation framework known as the "Transformation House." This transformation is based on three main pillars: Cash Focus, Business Execution Excellence, and Sustainable Business Development.

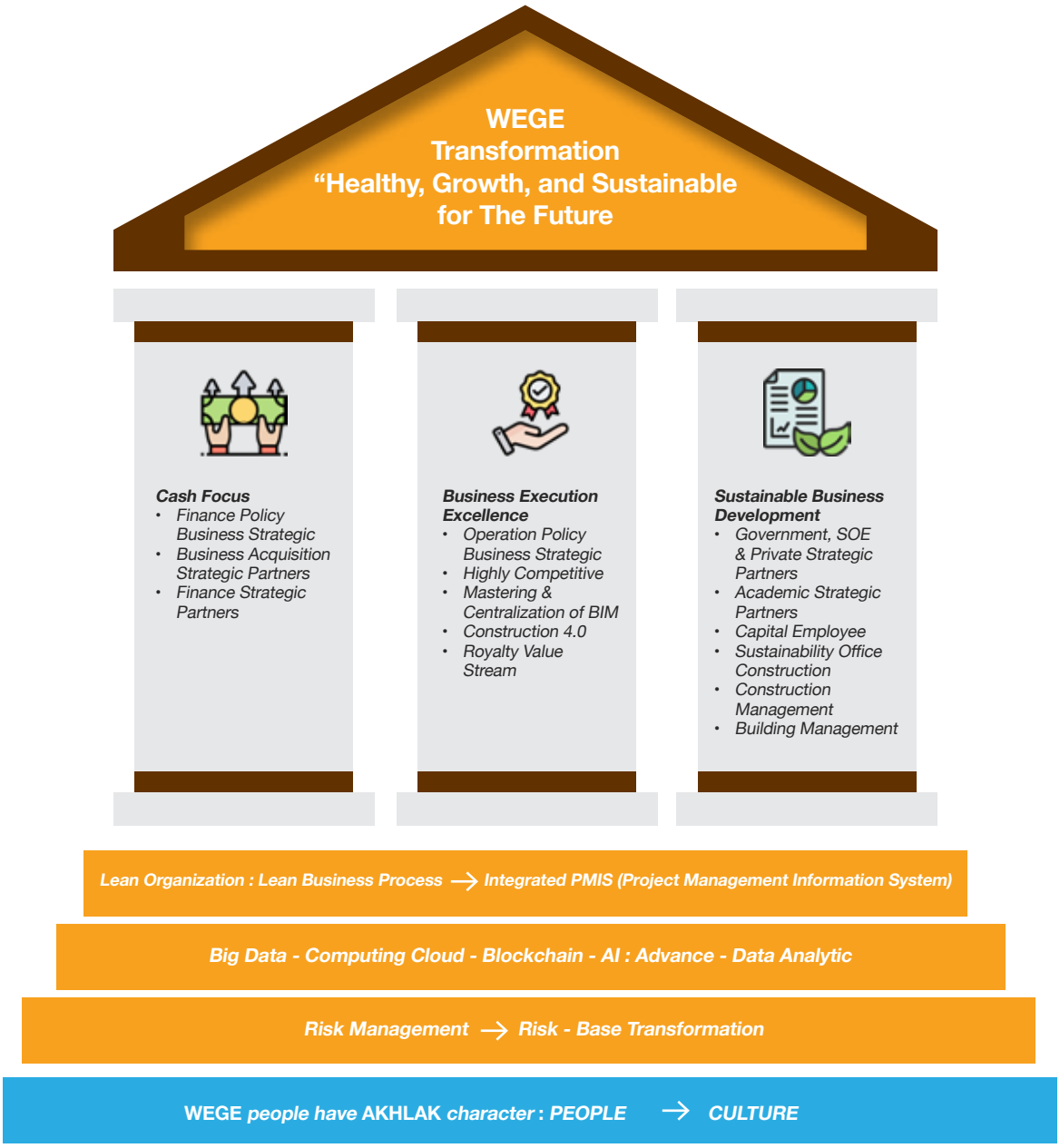
Cash Focus emphasizes efficient liquidity and working capital management, supported by sound financial policies, strategic partnerships, and collaboration with financial partners. Business Execution Excellence focuses on operational optimization through the implementation of competitive business policies, centralization of Building Information Modeling (BIM), and the utilization of the latest construction technologies (Construction 4.0). Meanwhile, Sustainable Business Development focuses on developing long-term partnerships with the government, state-owned enterprises, the private sector, and academia, prudent working capital management, and the development of sustainable modular products through off-site construction, construction management, and building management.

The transformation process is supported by three layers of enablers that ensure effective implementation: Lean Organization, Technology & Data, and Risk Management. Lean Organization promotes streamlined and integrated business processes through the Project Management Information System (PMIS). The utilization of Technology & Data, such as big data, cloud computing, blockchain, and artificial intelligence (AI), supports more accurate data-driven decision-making. In addition, risk-based Risk Management is implemented to identify, measure, and mitigate risks proactively.

Seluruh upaya transformasi tersebut berlandaskan nilai inti perusahaan AKHLAK, yang menjadi fondasi budaya Perseroan dengan menempatkan People sebagai pusat perubahan. Dengan landasan ini, Perseroan berkomitmen membangun karakter organisasi yang kuat di setiap level, guna mendukung tercapainya kinerja yang sehat, berkelanjutan, serta daya saing yang semakin kuat di masa depan.

All transformation efforts are grounded in the Company's core values, AKHLAK, which serve as the foundation of corporate culture by placing People at the center of change. With this foundation, the Company is committed to building strong organizational character at every level to support the achievement of healthy, sustainable performance and stronger competitiveness in the future.

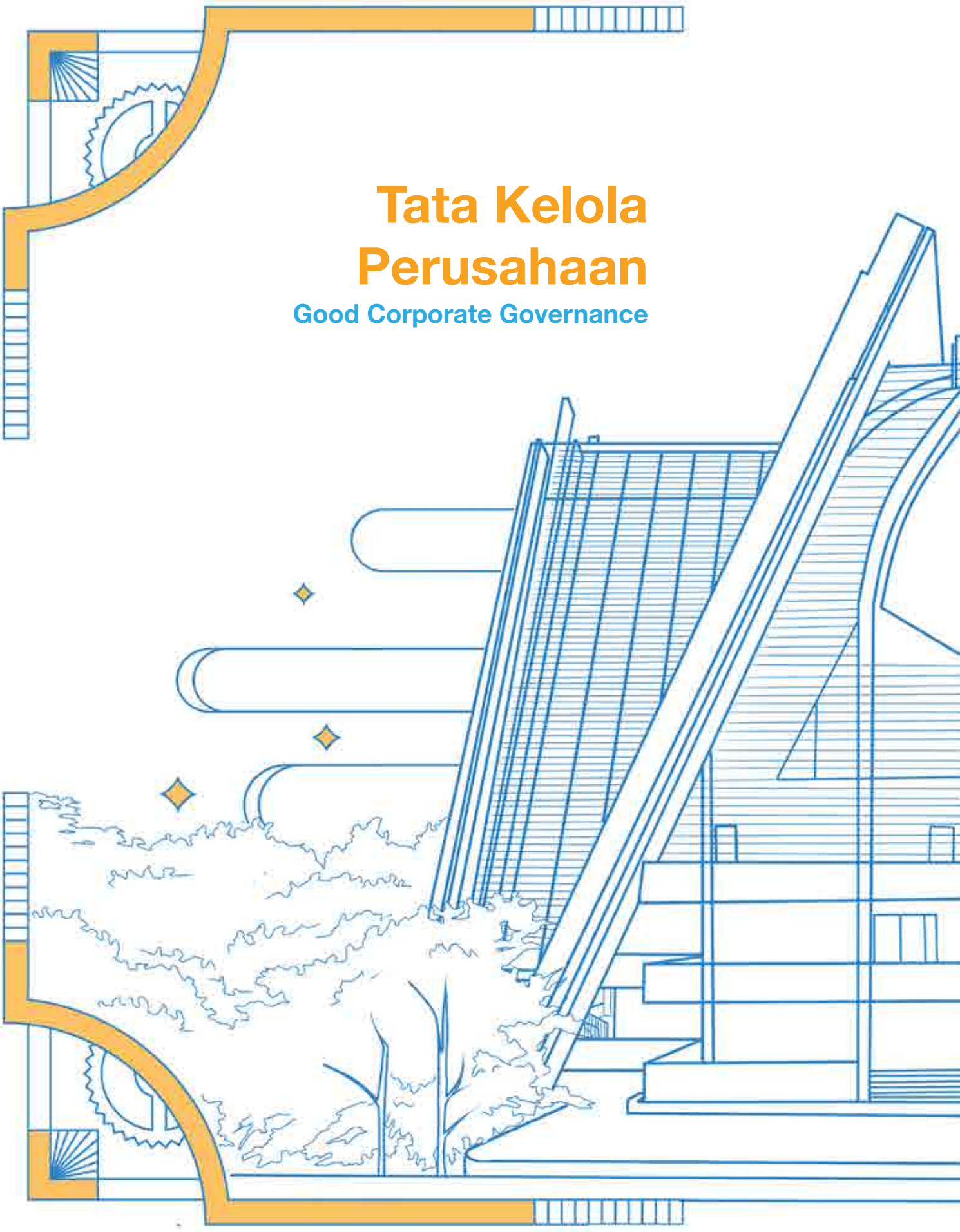
WEGE *House of Transformation*
WEGE House of Transformation



Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





“Penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha.”

“The implementation of good governance serves as the primary foundation for building trust and business sustainability.”

Pernyataan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Statement On The Implementation Of Corporate Governance



Jakarta International Stadium (JIS)

Perseroan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) secara konsisten sebagai kerangka pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan. Penerapan GCG diintegrasikan ke dalam strategi, tata nilai, serta kebijakan internal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha berjalan profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan.

Penerapan GCG dilaksanakan melalui kerangka tata kelola yang menegaskan peran, fungsi, serta akuntabilitas organ Perseroan, mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, hingga organ pendukung yang membantu efektivitas pengawasan dan pengendalian. Kerangka tersebut menjadi rujukan dalam pengelolaan risiko, kepatuhan, pengendalian internal, etika bisnis, serta keterbukaan informasi.

Untuk memastikan penerapan GCG terus meningkat dan tetap relevan dengan tantangan dan perkembangan industri, Perseroan melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala melalui penilaian mandiri (*self-assessment*) serta tindak lanjut atas rekomendasi organ pendukung dan arahan Dewan Komisaris. Perseroan juga mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan dan perkembangan praktik terbaik agar tata kelola terus adaptif terhadap dinamika usaha dan ketentuan yang berlaku.

The Company consistently implements Good Corporate Governance (GCG) as a framework for corporate management and decision-making. GCG implementation is integrated into its strategy, values, and internal policies to ensure that business activities are conducted professionally, transparently, accountably, responsibly, and aligned with stakeholder interests.

GCG implementation is performed through a governance framework that defines the roles, functions, and accountability of corporate organs, starting with General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors, as well as supporting organs that support effective supervision and control. This framework serves as a reference for risk management, compliance, internal control, business ethics, and information disclosure.

To ensure that GCG implementation continues to improve and remains relevant to industry challenges and developments, the Company conducts periodic evaluations and improvements through self-assessments and follow-up on recommendations from supporting organs and directives from the Board of Commissioners. The Company also considers input from stakeholders and developments in best practices to ensure that governance keeps on being adaptive to business dynamics and applicable regulations.

KOMITMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Komitmen terhadap penerapan GCG tercermin dalam Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perseroan. Di lingkungan Perseroan, GCG tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga telah menjadi budaya kerja serta pedoman perilaku bagi seluruh elemen organisasi. Visi Perseroan untuk menjadi mitra terpercaya dalam menciptakan ekosistem konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan diwujudkan melalui pelaksanaan misi perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai budaya Perseroan.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan internal yang diterbitkan Perseroan, yang secara jelas menggambarkan kerangka pengembangan struktur GCG, baik yang mencakup organ utama maupun organ pendukung. Melalui implementasi GCG yang efektif, Perseroan meyakini dapat menciptakan kesinambungan usaha dan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain berpedoman pada kebijakan internal yang telah ditetapkan, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola perusahaan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional guna memastikan penerapan GCG tetap relevan dan selaras dengan praktik terbaik.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA

Dasar hukum yang menjadi acuan Perseroan dalam penerapan GCG, antara lain:

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 November 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
8. Anggaran Dasar Perusahaan;
9. Lainnya:
   a. ASEAN Corporate Governance Scorecard; dan
   b. Pedoman Governansi Korporate Indonesia (PUGKI).

COMMITMENT TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Commitment to implementing GCG is reflected in the Company's Vision, Mission, and Cultural Values. Within the Company, GCG is not only understood as a form of compliance with laws and regulations, but has also become a work culture and code of conduct for all elements of the organization. The Company's vision to be a trusted partner in creating an innovative and sustainable construction ecosystem is realized through the implementation of the company's mission, which is based on the Company's cultural values.

This commitment is also reflected in numerous regulations and internal policies issued by the Company, which clearly outline the framework for developing a GCG structure, encompassing both primary and supporting organs. Through effective GCG implementation, the Company believes in its capability to create business continuity and long-term sustainable growth.

In addition to adhering to established internal policies, the Company continuously monitors developments in corporate governance practices at the national and international levels to ensure that GCG implementation remains relevant and aligned with best practices.

LEGAL BASIS FOR IMPLEMENTING GCG

The legal basis used by the Company in implementing GCG includes:

1. Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. Article 12B paragraphs (1) and (2) of Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation and stipulated by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as Law;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies;
4. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
5. Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER3/MBU/03/2023 concerning Organizations and Human Resources of State-Owned Enterprises;
7. Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
8. Company Articles of Association;
9. Others:
   a. ASEAN Corporate Governance Scorecard; and
   b. Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI).

TUJUAN PENERAPAN GCG

Sebagai anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara berkesinambungan. Penerapan GCG digambarkan dalam perspektif yang lebih luas dengan tujuan Perseroan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai-nilai inti Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan efisien;
3. Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut;
4. Memastikan setiap karyawan dalam Perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
5. Mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip (GCG) secara konsisten.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), the Company is strongly committed to implementing GCG on an ongoing basis. The implementation of GCG is described from a broader perspective with the Company's objectives as follows:

1. Maximizing the Company's core values by enhancing the principles of transparency, accountability, trustworthiness, and responsibility;
2. Ensuring that the Company is managed in a professional, transparent, and efficient manner;
3. Achieving independence in decision-making in accordance with the roles and responsibilities of each leader within the Company;
4. Ensuring that each employee within the Company fulfills their assigned roles and responsibilities;
5. Consistently undertaking business practices that align with GCG principles.

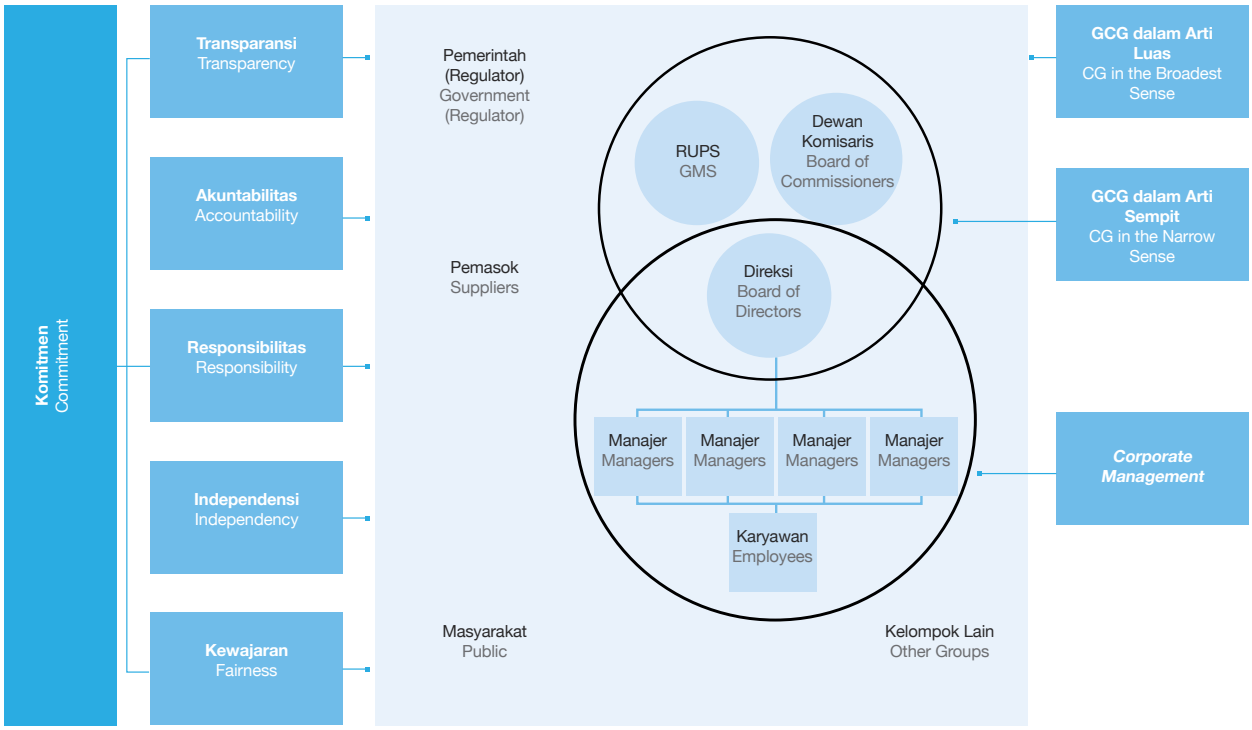
RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan kerangka ruang lingkup penerapan GCG yang komprehensif dan terintegrasi. Penerapan ini tidak hanya menyentuh aspek struktural di internal organisasi, namun juga menjangkau hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan eksternal.

SCOPE OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company has established a comprehensive and integrated framework for the implementation of GCG, which incorporates not only the internal structural aspects of the organization but also encompasses harmonious relationships with all external stakeholders.

Ruang Lingkup Penerapan GCG WEGE
WEGE GCG Implementation Scope



Ruang lingkup penerapan GCG meliputi tiga bagian, yaitu:

1. **GCG dalam Arti Luas**
   Perseroan memposisikan diri sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar, di mana penerapan GCG mencakup hubungan yang transparan dan akuntabel dengan Pemerintah (Regulator), Pemasok, Masyarakat, serta kelompok strategis lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan Perseroan memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. **GCG dalam Arti Sempit**
   Berfokus pada sinergi dan efektivitas hubungan kerja antar Organ Utama Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Struktur ini memastikan adanya mekanisme *check and balances* yang sehat dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis.
3. **Tata Kelola Operasional *(Corporate Management)***
   Merupakan derivasi prinsip GCG ke dalam aktivitas teknis sehari-hari yang dijalankan oleh Direksi, jajaran Manajer, hingga seluruh Karyawan. Lapisan ini memastikan bahwa setiap gerak operasional Perseroan senantiasa berpedoman pada standar profesionalisme yang tinggi.

Seluruh lapisan tersebut diikat oleh satu garis Komitmen yang kuat terhadap lima prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*/Kewajaran (TARIF). Dengan integrasi yang menyeluruh ini, Perseroan meyakini bahwa tata kelola yang baik akan menjadi akselerator dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The scope of GCG implementation covers three areas as follows:

1. **GCG in a Broad Sense**
   The Company positions itself as part of a broader economic ecosystem, where GCG implementation includes transparent and accountable relationships with the Government (Regulator), Suppliers, the Community, and other strategic groups. This is carried out to ensure that the Company's existence provides positive impact on social environment and complies with applicable regulations.
2. **GCG in a Narrow Sense**
   Focuses on the synergy and effectiveness of working relationships among the Company's Main Organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. This structure ensures a healthy check and balance mechanism in every strategic decision-making process.
3. **Operational Governance (Corporate Management)**
   Represents the derivation of GCG principles into daily technical activities carried out by the Board of Directors, management, and all employees. This layer ensures that all operational activities of the Company consistently adhere to high professional standards.

All these layers are bound by a strong Commitment to the five GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF). With this comprehensive integration, the Company believes that good governance will serve as an accelerator in creating sustainable added value for all stakeholders.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

Implementation Of Sustainable Corporate Governance

AKTIVITAS PENINGKATAN PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2025

GCG merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mengelola aktivitas perusahaan yang berpedoman prinsip-prinsip GCG. Implementasi penerapan GCG Perusahaan sepanjang tahun 2024 dijalankan melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Penerapan *Three Lines* Model dalam Tata Kelola:
   a. Manajemen Risiko: Dilakukan perangkapan organ pengelola risiko wajib mengikuti *Three Lines Model*, Penerapan Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini;
   b. Internal Audit: Menjaga akuntabilitas utama kepada organ pengurus dan independensinya dari pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajemen, mengomunikasikan asuransi dan penasehat yang independen dan objektif, melaporkan penilaian independensi dan objektivitas kepada organ pengurus dan menerapkan pengamanan yang dipersyaratkan;
   c. IT: Melaksanakan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) ISO 27001:2022.
2. Peningkatan Kontrol Proyek/Bisnis Berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP)
   a. Diterapkannya *single* sistem kontrol level proyek menggunakan *Enterprise Resource Planning* (ERP);
   b. Integrasi antara ERP dan sistem manajemen proyek (Primavera/Microsoft Project) untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek selalu berbasis data yang sama;
   c. Pemantauan *real-time* terhadap berbagai aspek proyek, seperti pengeluaran, waktu kerja, dan progres fisik proyek serta penggunaan perangkat *mobile* yang terintegrasi dengan ERP.
3. Penerapan Keberlanjutan
   a. Melaksanakan program-program Strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan;
   b. Melakukan penerapan terhadap target *Net Zero Emission*;
   c. Penggunaan *Electric Vehicle* sebagai kendaraan dinas pengganti kendaraan BBM.
   d. Parameter keberlanjutan merujuk pada beberapa Lembaga resmi Internasional, antara lain: S&P Global, Sustainalytics, IFRS sustainability, TFCD.
4. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
   Adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterapkan di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan.

ACTIVITIES TO ENHANCE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2025

GCG represents the Company's commitment to managing its activities in accordance with GCG principles. The implementation of GCG throughout 2024 was carried out through various activities, as follows:

1. Implementation of the Three Lines Model in Governance:
   a. Risk Management: The structuring of risk management functions must follow the Three Lines Model, including the implementation of Three Lines Risk Governance Model;
   b. Internal Audit: Maintaining primary accountability to the governing body and independence from management responsibilities, communicating independent and objective assurance and advisory, reporting assessments of independence and objectivity to the governing body, and implementing required safeguards;
   c. IT: Implementation of Information Security Management System (ISMS) ISO 27001:2022.
2. Enhancement of Project/Business Control Based on Enterprise Resource Planning (ERP)
   a. Implementation of a single project-level control system using Enterprise Resource Planning (ERP);
   b. Integration between ERP and project management systems (Primavera/Microsoft Project) to ensure that planning, execution, and reporting are always based on the same data;
   c. Real-time monitoring of various project aspects, such as expenditures, working hours, and physical progress, as well as the use of mobile devices integrated with ERP.
3. Sustainability Implementation
   a. Execution of strategic programs to support sustainable national economic growth;
   b. Implementation of Net Zero Emission targets;
   c. Use of Electric Vehicles as official vehicles to replace fuel-based vehicles;
   d. Sustainability parameters refer to several international institutions, including S&P Global, Sustainalytics, IFRS Sustainability, and TCFD.
4. Anti-Bribery Management System (ABMS)
   The Anti-Bribery Management System implemented at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) aims to prevent, detect, and address bribery risks across all business activities.

Perseroan telah melakukan Audit Internal dan Audit Eksternal ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh Divisi Ruang Lingkup dengan hasil tidak ada temuan major.

5. *Whistleblowing System* (WBS)
   Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* (WBS) telah diatur dalam kebijakan Perseroan. Berdasarkan resume hasil pengelolaan WBS sepanjang tahun 2025 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui mekanisme WBS.
6. Melakukan perbaikan *Portfolio Orderbook* konstruksi dengan focus pada proyek-proyek yang memiliki pembayaran *monthly progress* dengan tujuan untuk mengurangi defisit kas dan kebutuhan modal kerja;
7. Melakukan penurunan *Operating Expense* dengan penerapan *manning* tenaga kerja di proyek berbasis ERP.
8. Pengendalian Gratifikasi
   Pengendalian gratifikasi di Perseroan telah diatur dalam Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tertanggal 1 Maret 2024. Gratifikasi merupakan pemberian/ penerimaan uang/setara uang, barang, rabat *(discount),* komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Tata Kelola Terintegrasi
   Pada tahun 2024, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG DI PERUSAHAAN

Ruang lingkup penerapan prinsip-prinsip GCG mencakup seluruh aktivitas Perseroan, baik operasional bisnis maupun fungsi pendukung, serta melibatkan seluruh elemen organisasi. Penerapan tersebut dijabarkan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

The Company has conducted Internal and External Audits of ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems across all divisions, with no major findings identified.

5. Whistleblowing System (WBS)
   Reporting of violations of the Code of Conduct (WBS) has been regulated in the Company's policy. Based on the summary of WBS management results throughout 2025, there were no reports of alleged violations submitted through the WBS mechanism.
6. Improvement of the construction order book portfolio by focusing on projects with monthly progress payments, aimed at reducing cash deficits and working capital requirements;
7. Reduction of Operating Expenses through the implementation of ERP-based workforce management in projects;
8. Gratification Control
   Gratification control within the Company has been regulated under the Anti-Bribery Management System Policy dated March 1, 2024. Gratification refers to giving/receiving money or cash equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, tourism trips, free medical treatment, and other facilities of any value, whether received domestically or abroad, and conducted with or without electronic means.
9. Integrated Governance
   In 2024, the Company established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES IN THE COMPANY

The scope of GCG principles implementation covers all Company activities, including business operations and supporting functions, and involves all elements of the organization. The implementation is elaborated through the following principles:

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	**Penjelasan** Explanation	**Penerapan di Lingkungan Perusahaan** Implementation in the Company
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Transparency in the decision-making process, disclosing material and relevant information regarding the Company. The Company consistently provides true, accurate, and timely information to all stakeholders.	Perseroan telah memiliki situs web perusahaan yang berisikan informasi Perseroan pada https://www.wikagedung.co.id. The Company maintains a corporate website containing Company information at https://www.wikagedung.co.id.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perusahaan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis. Clarity of the functions, implementation, and accountability of organs ensures effective Company management. All corporate governance organs adhere to the principle of accountability, with clear functions, structures, systems, and systematic accountability.	Perseroan mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga manajemen telah memiliki rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan. The Company requires all leaders to be accountable for their performance in a transparent and fair manner, ensuring that management clearly defines the roles and responsibilities of each organ and employee, in accordance with the company's vision, mission, objectives, and strategy.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation	Penerapan di Lingkungan Perusahaan Implementation in the Company
Pertanggungjawaban Responsibility	Kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Compliance in business management with laws and regulations and sound corporate principles.	Perseroan berkomitmen untuk membangun kesesuaian dan keselarasan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The Company is committed to establishing compliance and alignment with applicable laws and regulations, as well as sound corporate principles.
Kemandirian Independence	Pengelolaan Perusahaan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat. Professional management of the Company without conflicts of interest or influence from any party inconsistent with laws and regulations and sound corporate principles.	Dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan, manajemen Perseroan senantiasa menghasilkan keputusan yang objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. In the decision-making and policy-making process, the Company's management consistently makes objective decisions free from conflicts of interest or pressure from any party.
Kewajaran Fairness	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan prinsip korporasi yang sehat. Fairness and equality in fulfilling the rights of all shareholders based on sound corporate principles.	Tidak melakukan tindakan diskriminatif guna menjamin pemenuhan hak seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Discriminatory actions are prohibited to ensure the fulfillment of the rights of all shareholders and other stakeholders in accordance with applicable laws and regulations.

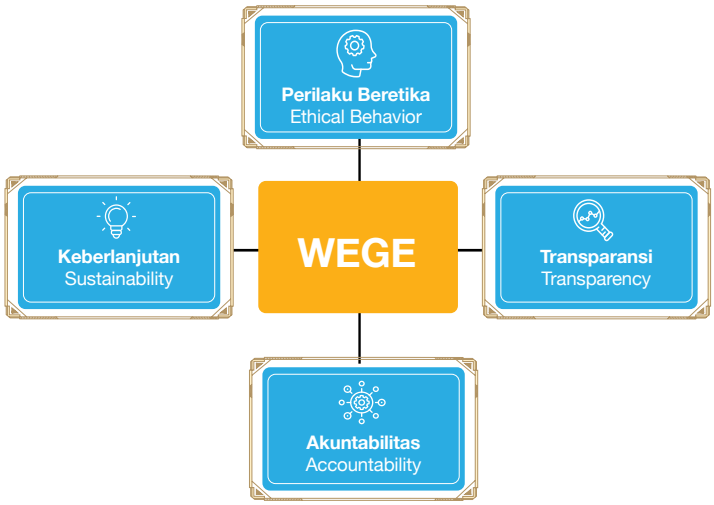
PENYELARASAN PRINSIP ETAK DI PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dengan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2021. PUGKI 2021 menekankan empat pilar governansi korporat, yaitu Etika Perilaku, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK), yang diadopsi Perseroan sebagai kerangka penguatan tata kelola. Melalui penyelarasan terhadap prinsip ETAK, Perseroan memperkuat integritas pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pengungkapan, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan perusahaan tetap terjaga dan selaras dengan orientasi nilai jangka panjang.

ALIGNMENT OF ETAK PRINCIPLES IN THE COMPANY

The Company implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) by referring to the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy (KNKG) in 2021. The 2021 PUGKI emphasizes four pillars of corporate governance: Ethical Conduct, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK), which the Company has adopted as a framework for strengthening governance. Through alignment with the ETAK principles, the Company strengthens the integrity of decision-making, improves the quality of disclosure, and ensures that corporate management accountability is maintained and aligned with long-term value orientation.

Pillar Governansi Korporat Indonesia
Pillars of Indonesian Corporate Governance



Perseroan memiliki tekad yang kuat untuk konsisten mengimplementasikan empat pilar governansi korporat dengan fokus pada adaptasi terhadap perkembangan terkini, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi kinerja secara transparan, serta menjaga independensi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan yakin mampu menciptakan praktik governansi yang lebih baik dan berkelanjutan di lingkungan korporat.

EVALUASI/PENILAIAN PENERAPAN GCG BERDASARKAN ACGS

Untuk memperkuat kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) serta menyelaraskannya dengan praktik terbaik di kawasan, Perseroan mengadopsi kerangka evaluasi tata kelola tingkat regional, yaitu ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

ACGS merupakan alat penilaian yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) untuk mengevaluasi tingkat penerapan praktik tata kelola perusahaan terbuka di negara-negara ASEAN. Melalui adopsi ACGS, Perseroan memperoleh acuan penilaian yang lebih terstruktur, komparabel, dan berorientasi pada penguatan kualitas pengungkapan serta efektivitas mekanisme tata kelola.

Mengacu pada Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), penerapan ACGS bertujuan untuk:

1. Meningkatkan standar dan praktik tata kelola korporasi perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN;
2. Mendorong pengakuan dan daya saing global perusahaan terbuka ASEAN yang menerapkan tata kelola yang baik, sehingga lebih kredibel dan menarik bagi investor; serta
3. Melengkapi inisiatif ACMF lainnya dan memperkuat *positioning* ASEAN sebagai suatu kelompok *asset class* di mata pasar global.

Pada tahun 2025, Perseroan melaksanakan asesmen terhadap praktik tata kelola berdasarkan ACGS yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Hasil asesmen ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi area penguatan, meningkatkan kualitas kebijakan dan implementasi, serta memperkuat konsistensi pengungkapan tata kelola.

Hasil Penilaian

Prinsip A: Hak-Hak dan Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham *(Rights Equitable Treatment of Shareholders)*

Praktik tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan para pemegang saham serta upaya Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham. Perusahaan perlu memberikan perhatian yang memadai kepada para pemegang saham melalui pemenuhan hak-hak mereka untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasional Perusahaan. Oleh karena itu, OECD menetapkan bahwa hak-hak pemegang saham serta perlakuan yang setara terhadap pemegang saham merupakan prinsip pertama dalam pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik oleh perusahaan.

The Company has a strong commitment to consistently implement the four pillars of corporate governance, with a focus on adapting to current developments, social and environmental responsibility, and sustainable development principles. In addition, the Company periodically conducts transparent performance evaluations and maintains the independence and remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners. Through these measures, the Company is confident in its ability to create better and more sustainable governance practices within the corporate environment.

EVALUATION/ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION BASED ON ACGS

To strengthen the quality of Good Corporate Governance (GCG) implementation and align it with regional best practices, the Company adopts a regional governance evaluation framework, namely the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

ACGS is an assessment tool developed by the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) to evaluate the level of corporate governance practices among publicly listed companies in ASEAN countries. Through the adoption of ACGS, the Company obtains a more structured, comparable, and quality-oriented reference for enhancing disclosure and governance effectiveness.

Referring to the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), the implementation of ACGS aims to:

1. Improve the standards and practices of corporate governance among publicly listed companies in ASEAN;
2. Encourage global recognition and competitiveness of ASEAN listed companies that implement good governance, making them more credible and attractive to investors; and
3. Complement other ACMF initiatives and strengthen ASEAN's positioning as an asset class in the global market.

In 2025, the Company conducted an assessment of its governance practices based on ACGS, carried out by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). The results of this assessment are used as evaluation material to identify areas for improvement, enhance policy quality and implementation, and strengthen consistency in governance disclosure.

Assessment Results

Principle A: Rights and Equitable Treatment of Shareholders

Good corporate governance practices cannot be separated from shareholder engagement and the Company's efforts to fulfill its responsibility in ensuring equal treatment for all shareholders. The Company must give adequate attention to shareholders by fulfilling their rights to participate and continuously monitor the Company's operational activities. Therefore, the OECD establishes shareholder rights and equitable treatment as the first principle in implementing good corporate governance in the Company.

Pada prinsip hak-hak pemegang saham *(Rights and Equitable Treatment of Shareholders)* terdiri dari 9 (sembilan) parameter kunci sebagai berikut:

1. Hak dasar pemegang saham;
2. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS (termasuk prosedur pemungutan suara);
3. Pasar untuk pengendalian/kontrol perusahaan harus dimungkinkan berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan;
4. Pelaksanaan hak kepemilikan pemegang saham, termasuk investor institusi difasilitasi perusahaan;
5. Kepemilikan saham dan hak suara;
6. Panggilan RUPST;
7. Perdagangan orang dalam dan *self-dealing abusive* (penyalahgunaan wewenang) haruslah dilarang;
8. Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris & Direksi;
9. Perlindungan kepada para pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan abusive.

Prinsip B: Keberlanjutan dan Ketangguhan *(Sustainability and Resilience)*

Pada Prinsip Keberlanjutan dan Ketangguhan *(Sustainability and Resilience)* terdiri atas 7 (tujuh) parameter kunci sebagai berikut.

1. Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan dan dapat diandalkan, serta mencakup materi informasi masa lalu dan masa depan yang wajar dan penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi atau menentukan suara;
2. Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan adanya dialog antara perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan;
3. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan Direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan perannya dalam menelaah, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, sistem manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi terkait perubahan iklim;
4. Hak-hak para pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh UU atau lewat kesepakatan bersama haruslah dihormati dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan keuangan berkelanjutan;
5. Para pemangku kepentingan haruslah memiliki peluang untuk mendapatkan ganti rugi efektif untuk pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak mereka;
6. Mekanisme-mekanisme meningkatkan kinerja untuk partisipasi karyawan haruslah dimungkinkan berkembang;
7. Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, haruslah dapat secara bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka kepada dewan atas praktik-praktik melanggar hukum dan tidak etis, serta hak-hak mereka melakukan ini haruslah dilindungi.

The principle of shareholder rights and equitable treatment consists of 9 (nine) key parameters as follows:

1. Basic rights of shareholders;
2. The right to participate effectively and vote in the GMS, as well as the right to obtain information regarding GMS rules (including voting procedures);
3. The market for corporate control should be allowed to function efficiently and transparently;
4. The exercise of ownership rights by shareholders, including institutional investors, is facilitated by the Company;
5. Share ownership and voting rights;
6. Notice of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS);
7. Insider trading and abusive self-dealing must be prohibited;
8. Related party transactions conducted by members of Board of Commissioners and Board of Directors;
9. Protection of minority shareholders from abusive actions.

Principle B: Sustainability and Resilience

The Sustainability and Resilience principle consists of 7 (seven) key parameters as follows:

1. Sustainability disclosures must be consistent, comparable, and reliable, and include relevant historical and forward-looking information important for investors in making investment or voting decisions;
2. The corporate governance framework should enable dialogue between the Company, shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability issues;
3. The governance framework must ensure that Board of Directors adequately considers material sustainability risks and opportunities in overseeing governance practices, disclosures, strategy, risk management systems, and internal controls, including those related to physical and transition risks of climate change;
4. Stakeholder rights established by law or mutual agreements must be respected, and active cooperation between the Company and stakeholders should be encouraged to create welfare, employment, and sustainable finance;
5. Stakeholders should have access to effective remedies for violations of their rights;
6. Mechanisms for enhancing employee participation should be allowed to develop;
7. Stakeholders, including individual employees and their representative bodies, should be able to freely communicate concerns regarding illegal and unethical practices to the Board, and their rights to do so must be protected.

Prinsip C: Pengungkapan dan Transparansi *(Disclosure and Transparency)*

Pada Prinsip Pengungkapan dan Transparansi *(Disclosure and Transparency*) terdiri atas 10 (sepuluh) parameter kunci sebagai berikut:

1. Transparansi Struktur Kepemilikan;
2. Kualitas Laporan Tahunan;
3. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pengungkapan atas Transaksi Hubungan Istimewa;
5. Pengungkapan atas Transaksi Saham Perusahaan yang Dilakukan oleh Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Eksternal Auditor dan Laporan Auditor;
7. Media Komunikasi Perusahaan;
8. Penyampaian Informasi Laporan Keuangan atau Laporan Tahunan secara Tepat Waktu;
9. *Website* Perusahaan;
10. Hubungan-hubungan Investor.

Prinsip D: Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*Responsibilities of The Board*)

Pada prinsip Tanggung Jawab Dewan Komisaris *(Responsibilities of The Board*) terdiri atas lima parameter kunci/utama, di mana untuk masing-masing parameter terdiri atas beberapa parameter pengukuran yakni sebagai berikut:

1. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris:
   a. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Kebijakan tata kelola harus dinyatakan secara jelas oleh perusahaan; dan
   b. Visi dan Misi Perusahaan.
2. Struktur Dewan Komisaris:
   a. Kode Etik atau Kode Perilaku;
   b. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris;
   c. Komite Nominasi;
   d. Komite Remunerasi/Komite Kompensasi; dan
   e. Komite Audit.
3. Proses Dewan Komisaris:
   a. Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris;
   b. Akses Informasi;
   c. Penunjukkan dan Pemilihan Kembali anggota Dewan Komisaris;
   d. Perihal Mengenai Remunerasi;
   e. Audit Internal; dan
   f. Pengawasan Risiko (*Risk Oversight*).
4. Individu Dalam Susunan Dewan Komisaris;
   a. Komisaris Utama Perusahaan; dan
   b. Keahlian dan Kompetensi Dewan Komisaris.
5. Kinerja Dewan Komisaris:
   a. Pelatihan/Pengembangan Dewan Komisaris;
   b. Penunjukkan dan Penilaian Kinerja Direktur Utama;
   c. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
   d. Penilaian Kinerja untuk anggota Dewan Komisaris; dan
   e. Penilaian Kinerja untuk Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Berikut rangkuman hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 1 (Prinsip A - D):

Principle C: Disclosure and Transparency

The Disclosure and Transparency principle consists of 10 (ten) key parameters as follows:

1. Transparency of ownership structure;
2. Quality of the annual report;
3. Remuneration of members of Board of Commissioners and Board of Directors;
4. Disclosure of related party transactions;
5. Disclosure of Company share transactions conducted by members of Board of Directors and Board of Commissioners;
6. External auditor and audit report;
7. Corporate communication channels;
8. Timely submission of financial statements or annual reports;
9. Company website;
10. Investor relations.

Principle D: Responsibilities of the Board

The Responsibilities of the Board principle consists of five main parameters, each of which includes several measurement indicators, as follows:

1. Duties and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners:
   a. The responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners, as well as governance policies, must be clearly stated by the Company; and
   b. The Company's vision and mission.
2. Structure of Board of Commissioners:
   a. Code of Ethics or Code of Conduct;
   b. Structure and composition of Board of Commissioners;
   c. Nomination Committee;
   d. Remuneration/Compensation Committee; and
   e. Audit Committee.
3. Board of Commissioners Processes:
   a. Meetings and attendance of Board of Commissioners;
   b. Access to information;
   c. Appointment and reappointment of Board of Commissioners members;
   d. Matters relating to remuneration;
   e. Internal audit; and
   f. Risk oversight.
4. Individuals within Board of Commissioners:
   a. President Commissioner; and
   b. Expertise and competencies of Board of Commissioners.
5. Performance of Board of Commissioners:
   a. Training/development of Board of Commissioners;
   b. Appointment and performance evaluation of President Director;
   c. Performance evaluation of Board of Commissioners;
   d. Performance evaluation of individual members of Board of Commissioners; and
   e. Performance evaluation of committees under Board of Commissioners.

The following is a summary of the results of Corporate Governance Practice Performance Assessment for Level 1 Assessment (Principles A–D):

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 1
Summary of Corporate Governance Practice Performance Assessment Results for Level 1 Assessment

Prinsip Principle	**Jumlah Item Penilaian** Number of Assessment Items	**Total item penilaian yang telah dipenuhi (complied)** Total number of assessment items fulfilled	**Bobot Penilaian** Assessment Weight	**Skor** Score
A	29	22	20%	15,17
B	22	19	15%	12,95
C	34	30	25%	22,06
D	62	58	40%	37,42
Level 1 *score*	147	129	100%	87,61

Hasil Pencapaian Total *Corporate Governance Score* perusahaan untuk penilaian tingkat 1 pada ASEAN Corporate Governance Scorecard 2025 mencapai sebesar 87,61 poin.

The Company's total Corporate Governance Score for Level 1 assessment on the ASEAN Corporate Governance Scorecard 2025 reached 87.61 points.

Bonus dan Penalti

- **Bonus Poin untuk Praktik GCG Perusahaan 10**
- **Penalti Poin untuk Praktik GCG Perusahaan -2**

Bonuses and Penalties

- **Bonus Points for Corporate GCG Practices: 10**
- **Penalty** Points for Corporate GCG Practices: -2

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan untuk Penilaian Tingkat 2
Summary of Corporate Governance Practice Performance Assessment Results for Level 2 Assessment

Deskripsi Description	**Jumlah Item Penilaian** Number of Assessment Items	**Total Item Penilaian** Total Assessment Items	**Skor** Score
Bonus	18	6	10
Penalti Penalty	26	1	-2
Level 2 *score*	44	7	8

Hasil pencapaian Total *Corporate Governance Score* Perusahaan untuk penilaian tingkat 2 berdasarkan ASEAN Scorecard 2025 adalah sebesar 8 poin. Skor tersebut lebih baik apabila dibandingkan dengan pencapaian skor rata-rata untuk penilaian tingkat 2 pada Perusahaan publik (Tbk) atau emiten yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*) yang nilainya sebesar 4,36.

The Company achieved a Total Corporate Governance Score for Level 2 assessment based on the ASEAN Scorecard 2025 of 8 points. This score is better than the average score for Level 2 assessment for public companies (Tbk) or issuers included in the 100 largest market capitalizations (Big Cap), which is 4.36.

Tabel Penilaian Kinerja Praktik Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan ACGS
Corporate Governance Practice Performance Assessment Based on ACGS

No.	Komponen Penilaian Assessment Components	Skor Tertimbang per Prinsip Weighted Score per Principle
1	Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Shareholder Rights and Equal Treatment	15,17
2	Keberlanjutan dan Ketangguhan Sustainability and Resilience	12,95
3	Keterbukaan Dan Transparansi Openness and Transparency	22,06
4	Tanggung Jawab Dewan Komisaris Board of Commissioners' Responsibilities	37,42
Total Skor Penilaian Tingkat 1 Total Level 1 Assessment Score		**87,61**
5	Bonus	10
6	Penalti Penalty	-2
Total Skor Penilaian Tingkat 2 Total Level 2 Assessment Score		**8**
Total Skor Tertimbang Total Weighted Score		**95,61**

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perseroan memperoleh skor keseluruhan tertimbang (*overall score*) sebesar 95,61 poin. Capaian ini menempatkan Perseroan pada predikat "*Very Good*" atau Level 4, yang menunjukkan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang diterapkan Perseroan telah mengadopsi standar internasional secara menyeluruh.

Based on the assessment results, the Company received an overall weighted score of 95.61 points. This achievement places the Company at "Very Good" or Level 4, indicating that the Company's Good Corporate Governance (GCG) practices have comprehensively adopted international standards.

Perseroan senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap praktik tata kelola perusahaan guna mengoptimalkan kinerja dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan perlindungan hak dan kepentingan Perseroan, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan.

The Company continuously improves its corporate governance practices to optimize performance and encourage sustainable growth. These efforts prioritize the protection of the rights and interests of the Company, shareholders, and all stakeholders.

Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance*
Corporate Governance Structure And Mechanisms

STRUKTUR TATA KELOLA DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTARORGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan memiliki organ utama yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai sarana komunikasi antara Perseroan dan pemegang saham, Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan, serta Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi. Masing-masing organ tersebut memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

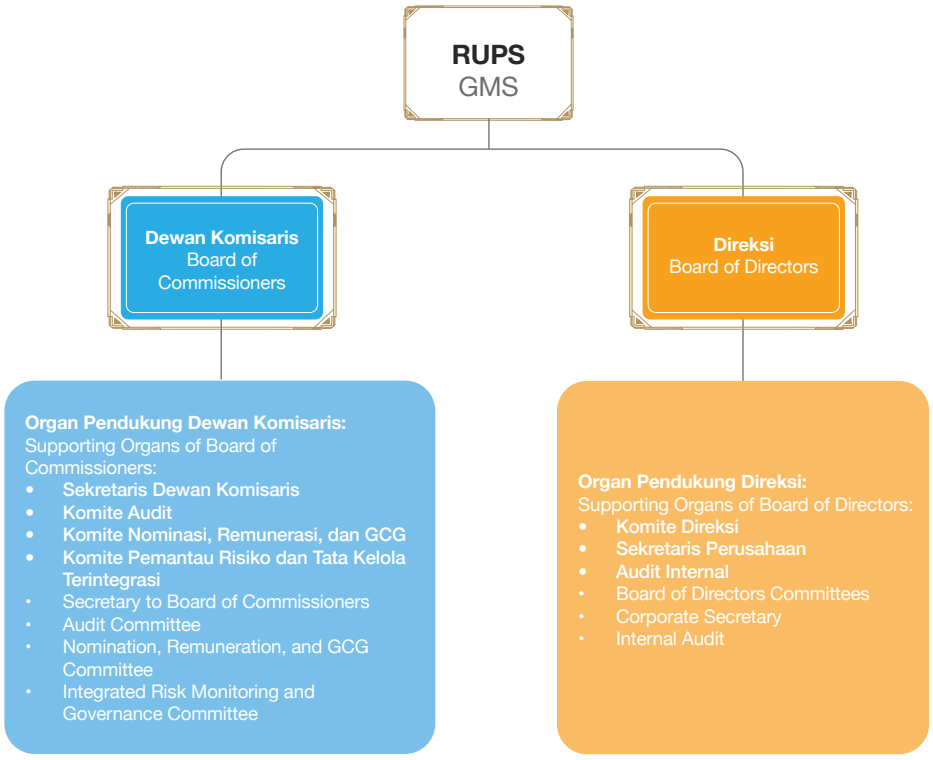
Sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) Perseroan juga dilengkapi dengan berbagai organ dan komite pendukung, baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi, guna memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan Perseroan.

GOVERNANCE STRUCTURE AND INTER-ORGAN RELATIONSHIP MECHANISMS

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company has main organs consisting of General Meeting of Shareholders (GMS) as a means of communication between the Company and its shareholders, Board of Directors, which is responsible for the management and administration of the Company, and Board of Commissioners, which carries out oversight of the policies and strategies established by the Board of Directors. Each of these organs has the authority, duties, and responsibilities as stipulated in applicable laws and regulations.

As a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Company's Good Corporate Governance (GCG) structure is complemented by various supporting organs and committees, both under Board of Commissioners and Board of Directors, to strengthen the Company's control and oversight functions.

Struktur GCG WEGE
WEGE GCG Structure



MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Mekanisme tersebut dijalankan dan didukung oleh organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam memastikan penerapan GCG secara efektif. Setiap organ Perseroan wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran.

RUPS merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan mewakili kepentingan pemegang saham. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang kewenangan tersebut ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan RUPS antara lain meliputi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, persetujuan perubahan Anggaran Dasar, pengesahan laporan tahunan, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengambilan keputusan atas tindakan korporasi tertentu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan usaha Perseroan sesuai dengan fungsi masing-masing. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kedua organ tersebut didukung oleh organ pendukung yang relevan. Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Sementara itu, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, Sistem Pengendalian Internal, serta organ pendukung lainnya guna memastikan pengelolaan Perseroan berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The corporate governance mechanism is a system that regulates the management of the Company in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). This mechanism is executed and supported by the Company's organs, namely General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Board of Directors, as well as other supporting organs that play an important role in ensuring effective implementation of GCG. Each Company organ is required to carry out its functions, duties, and responsibilities in accordance with applicable regulations, based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The GMS is the Company's organ holding the highest authority and representing the interests of shareholders. The GMS has authorities not granted to Board of Directors or Board of Commissioners, provided that such power is stipulated in laws and regulations and the Company's Articles of Association. These authorities include the appointment and dismissal of members of Board of Commissioners and Board of Directors, evaluation of their performance, approval of amendments to the Articles of Association, ratification of annual report, determination of remuneration, and decisions on certain corporate actions.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for maintaining the sustainability of the Company's business in accordance with their respective functions. Their duties are supported by relevant supporting organs. The Board of Commissioners is assisted by committees under its supervision, including Audit Committee, Nomination, Remuneration and GCG Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Meanwhile, the Board of Directors is supported by Corporate Secretary, Internal Audit, Internal Control System, and other supporting organs to ensure that the Company is managed effectively, measurably, and in accordance with GCG principles.

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah menetapkan kebijakan dan pedoman dengan standar tata kelola yang berlaku untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari struktur tata kelola, Perseroan juga mengembangkan *soft structure* yang mendukung penerapan GCG secara efektif. Berikut adalah *soft structure* GCG yang ada di WIKA:

1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of GCG)* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang berlaku;
3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
4. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku;
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berlaku;
6. Instruksi Kerja Pengendalian Gratifikasi;
7. Instruksi Kerja Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblowing System);*
8. Piagam Komite;
9. Piagam Satuan Pengendalian Internal;
10. Prosedur Sistem Manajemen Risiko; serta
11. Prosedur Perseroan lainnya.

CORPORATE GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

The Company has established policies and guidelines aligned with governance standards to assure the implementation of GCG principles. As part of its governance structure, the Company has also developed a soft structure to support effective GCG implementation. GCG soft structure at WIKA includes:

1. Deed of Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, updated based on applicable Board of Directors' Decree;
3. Guidelines for Work Procedures of Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, updated based on applicable Joint Decree;
4. Guidelines for Ethics and Behavior (Code of Conduct) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, updated based on applicable Decree;
5. Guidelines for Handling Conflicts of Interest of the Company, updated based on applicable Joint Decree;
6. Work Instructions for Gratification Control;
7. Work Instructions for Reporting Violations of the Code of Conduct (Whistleblowing System);
8. Committee Charter;
9. Internal Control Unit Charter;
10. Risk Management System Procedures; and
11. Other Company Procedures.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbuka yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Selain Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Perseroan dapat menyelenggarakan satu atau lebih Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) setiap saat apabila dipandang perlu oleh pemegang saham, Dewan Komisaris, atau Direksi.

RUPS juga menjadi forum utama bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, antara lain persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan pembagian dividen dan penggunaan laba, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar, serta pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menindaklanjuti keputusan RUPS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of public company that holds authority not granted to Board of Commissioners or Board of Directors, as regulated by laws concerning Limited Liability Companies and/or the Company's Articles of Association.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of GMS for Public Companies, the GMS must be held no later than six months after the end of the fiscal year. In addition to the Annual GMS (AGMS), the Company may hold one or more Extraordinary GMS (EGMS) at any time if deemed necessary by shareholders, Board of Commissioners, or Board of Directors.

The GMS also serves as the main forum for shareholders to make strategic decisions related to the Company's business and operations, including approval of financial statements and annual reports, determination of dividend distribution and profit allocation, determination of remuneration, appointment of independent auditors, amendments to the Articles of Association, and delegation of authority to Board of Commissioners and/or Board of Directors to follow up GMS Resolutions.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pihak yang memiliki kepemilikan atas saham Perseroan dan memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham berperan sebagai pemilik modal yang berhak memperoleh informasi yang wajar, transparan, dan tepat waktu terkait kinerja dan kondisi Perseroan.

SHAREHOLDERS

Shareholders are parties who own shares in the Company and have rights and obligations in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association. Shareholders act as capital owners and are entitled to fair, transparent, and timely information regarding the Company's performance and condition.

HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham:

- Mendapatkan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Berhak menghadiri RUPS, baik hadir secara langsung (sendiri) maupun diwakili oleh pihak lain berdasarkan surat kuasa.
- Berhak mengusulkan mata acara RUPS (berlaku bagi 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili minimal 1/20 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara).

SHAREHOLDER RIGHTS, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

Shareholder Rights:

- Obtain all rights granted to Shareholders under applicable laws and regulations, taking into account the provisions of the Articles of Association.
- Each share confers 1 (one) vote at the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Have the right to attend the GMS, either in person or represented by another party under a power of attorney.
- Have the right to propose GMS agenda items (applicable to 1 or more shareholders representing at least 1/20 of the total number of shares with voting rights).

- Berhak meminta Direksi atau Dewan Komisaris agar diselenggarakannya RUPS (berlaku bagi 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili minimal 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara).
- Berhak menerima pembagian dividen sesuai kemampuan keuangan perseroan berdasarkan ketetapan yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.

Wewenang Pemegang Saham (melalui forum RUPS):

- Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan, yang sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memutuskan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham:

- Menurut hukum, setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wajib memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan atau kuasa Direksi yang sah (seperti Biro Administrasi Efek).
- Pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS dan permintaannya dipenuhi, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS dilaksanakan.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PERLAKUAN YANG SETARA BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM

Mengenai poin kedua dan ketiga yang saling berkaitan, kebijakan Perseroan dalam memastikan kedudukan yang setara (prinsip perlakukan setara) bagi seluruh pemegang saham adalah sebagai berikut:

- Kesetaraan Hak Suara: Perseroan menetapkan prinsip kesetaraan mutlak di mana setiap 1 (satu) lembar saham yang dikeluarkan secara sah memberikan 1 (satu) hak suara yang sama besarnya tanpa ada perbedaan perlakuan.
- Kesepadanan Saham: Setiap saham yang berada dalam Penitipan Kolektif (di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya secara setara.
- Hak Atas Saham Baru: Setiap saham yang diterbitkan oleh Perseroan mempunyai hak-hak yang sama secara proporsional dengan saham lain yang memiliki klasifikasi yang sama. Perseroan juga wajib memberikan alokasi atas saham atau Efek Bersifat Ekuitas baru yang tidak dipesan dengan harga dan syarat pemesanan yang sama kepada pemegang saham lain yang menyatakan berminat (pembeli siaga).

- Have the right to request Board of Directors or Board of Commissioners to convene a GMS (applicable to 1 or more shareholders representing at least 1/10 of the total number of shares with voting rights).
- Have the right to receive dividend distributions in accordance with the company's financial capacity based on the provisions decided at the Annual GMS.

Shareholder Authorities (through the GMS):

- Appoint and dismiss members of Board of Directors and members of Board of Commissioners.
- Approve and ratify the Company's Annual Report and Financial Statements, while simultaneously providing full release and discharge of responsibility to the members of Board of Directors and Board of Commissioners.
- Decide on the appointment and dismissal of Public Accountant who will audit the company's financial statements.

Shareholder Responsibilities:

- By law, every shareholder must comply with the Articles of Association and all resolutions lawfully taken at the GMS, as well as comply with applicable laws and regulations.
- Must notify the Company's Board of Directors or their authorized representative (such as the Share Registrar) of any change of residence in writing.
- Shareholders who request a GMS and whose request is granted must not transfer their share ownership for a period of at least 6 (six) months from the GMS.

SHAREHOLDER RELATIONS POLICY AND EQUAL TREATMENT FOR ALL SHAREHOLDERS

Regarding the second and third interrelated points, the Company's policy to ensure equal status (the principle of equal treatment) for all shareholders is as follows:

- Equal Voting Rights: The Company establishes the principle of absolute equality, whereby each validly issued share provides one voting right of the same value without any distinction in treatment.
- Equivalence of Shares: Each share held in Collective Custody (at the Depository and Settlement Institution) with the same classification is equivalent and can be exchanged equally.
- Rights to New Shares: Each share issued by the Company has the same rights proportionally as other shares of the same classification. The Company is also required to allocate new unsubscribed shares or Equity Securities at the same price and on the same subscription terms to other shareholders who express interest (standby buyers).

- Pengakuan Kepemilikan Tunggal: Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dalam 1 (satu) lembar saham. Apabila 1 (satu) saham dimiliki oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak-hak pemegang saham (seperti hak suara dan hak pembayaran dividen) akan ditangguhkan hingga mereka menunjuk satu wakil tunggal secara tertulis untuk dicatat di Daftar Pemegang Saham.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan menyediakan akses informasi kepada pemegang saham melalui berbagai media komunikasi, antara lain:
- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
- Keterbukaan informasi melalui situs web resmi Perseroan.
- Paparan publik (*public expose*) dan kegiatan investor relations lainnya.
- Platform elektronik seperti eASY.KSEI untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik.

Seluruh informasi disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

WEWENANG RUPS

Setiap keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Beragam wewenang RUPS yang berlaku di Perseroan sebagai berikut:
1. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak;
2. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perusahaan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya;
3. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan;
4. Menyetujui penambahan modal Perusahaan;
5. Memutuskan pengurangan modal Perusahaan;
6. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
7. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;
8. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus;
9. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya dan pembubaran Perusahaan;
10. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih;
11. Mengangkat anggota Dewan Komisaris;
12. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;

- Recognition of Sole Ownership: The Company recognizes only one person or one legal entity as the owner of one share. If 1 (one) share is owned by several people jointly, then the rights of shareholders (such as voting rights and dividend payment rights) will be suspended until they appoint a single representative in writing to be recorded in the Register of Shareholders.

SHAREHOLDER ACCESS TO INFORMATION

The Company provides shareholders with access to information through various communication channels, including:
- The Company's Annual Report and Financial Statements.
- Information disclosure through the Company's official website.
- Public exposes and other investor relations activities.
- Electronic platforms such as eASY.KSEI for electronically holding GMSs.

All information is delivered in a timely, accurate, and accessible manner to all shareholders in accordance with applicable capital market laws and regulations.

GMS AUTHORITY

All decisions made at the GMS are based on the Company's long-term and short-term interests. Shareholders may not intervene in the duties and authorities of Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to the GMS' authority to execute its rights as stipulated in the Articles of Association and applicable regulations.

The GMS authorities that apply in the Company include:
1. Deciding on the payment of shares in cash and/or other forms, for example, in the form of immovable property;
2. Approving whether shareholders and other creditors with claims against the Company may exercise their claim rights as compensation for the obligation to pay the price of shares they have purchased;
3. Approving the repurchase of shares already issued;
4. Approving the increase in the Company's capital;
5. Deciding on the reduction of the Company's capital;
6. Approving the work plan proposed by the Board of Directors;
7. Deciding on the use of net profit, including determining the amount of reserves;
8. Regulating the procedures for collecting dividends that have been deposited into the special reserve;
9. Deciding on mergers, amalgamations, takeovers, or separations, filing applications for the Company to be declared bankrupt, extending the period of existence, and dissolving the Company;
10. Deciding on the division of duties and management authority among Board of Directors if Board of Directors consists of two or more members;
11. Appoint members of Board of Commissioners;
12. Determine provisions regarding the amount of salary or honorarium and allowances for members of Board of Commissioners;

13. Memutuskan dapat atau tidaknya Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
14. Mengangkat Komisaris Independen;
15. Mengangkat anggota Direksi;
16. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
17. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
18. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
19. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perusahaan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang;
20. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
21. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan kepada Pengadilan Niaga.

JENIS RUPS

Berpedoman kepada POJK tentang pelaksanaan RUPS dan Anggaran Dasar, RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), yaitu:

1. RUPS Tahunan, di mana wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas dapat menetapkan batas waktu selain ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan Perusahaan sebagai sebuah Perusahaan publik.
2. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

Ketentuan penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam POJK, berikut tata cara penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka:

A. Pemberitahuan

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST dan RUPSLB, pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB wajib disampaikan secara jelas dan rinci kepada OJK.

B. Pengumuman

- Pengumuman RUPST dan RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB.
- Pengumuman RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada para pemegang saham paling kurang melalui situs eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan. Selain itu, pengumuman RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
- Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersamasama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham diterima

13. Decide whether or not Board of Commissioners may carry out management actions for the Company under certain circumstances for a certain period;
14. Appoint Independent Commissioners;
15. Appoint members of Board of Directors;
16. Dismiss members of Board of Directors at any time, stating the reasons;
17. Revoke or confirm the decision to temporarily dismiss members of Board of Directors as determined by Board of Commissioners;
18. Decide provisions regarding the amount of salary and allowances for members of Board of Directors;
19. Decide on the authority of Board of Directors to represent the Company if there is more than one member of Board of Directors;
20. Approve the transfer of Company assets, or pledge Company assets as collateral for debt, which constitute more than 50% of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or unrelated;
21. Approve whether or not Board of Directors can submit a bankruptcy application for the Company to the Commercial Court.

TYPES OF GMS

As guided by OJK Regulation (POJK) concerning the implementation of GMS and the Articles of Association, the Company's GMS consists of Annual GMS (AGMS) and Extraordinary GMS (EGMS):

1. Annual GMS, which must be held no later than six months after the end of the fiscal year. Under certain circumstances, the Authority may set a time limit other than this provision, considering the Company's status as a public company.
2. Extraordinary GMS may be held at any time as needed for the benefit of the Company.

PROCEDURES FOR HOLDING THE GMS

The provisions for holding a GMS are regulated in OJK Regulation (POJK). The following are the procedures for holding a GMS for a public company:

A. Notification

No later than 5 (five) business days prior to the announcement of AGMS and EGMS, notification of the agenda items for AGMS and EGMS must be submitted clearly and in detail to the OJK.

B. Announcement

- The announcement of AGMS and EGMS must be made no later than 14 (fourteen) days prior to the summons of AGMS and EGMS.
- The announcement of AGMS and EGMS shall be delivered to shareholders at least through eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the Company's website. In addition, the announcement of AGMS and EGMS may be made in a nationally circulated daily newspaper.
- Individual or more shareholders who jointly represent 1/20 (one twentieth) or more of the total issued shares of the Company with valid voting rights may propose items for the GMS agenda. Proposals from shareholders must be received no later than 7 (seven) days prior to the date of the summons

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan dan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

C. Pemanggilan

- Jangka waktu pemanggilan RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan serta tanggal penyelenggaraan RUPSLB. Perseroan juga menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
- Pemanggilan RUPST dan RUPSLB dilakukan paling kurang melalui situs eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik *(e-Proxy),* situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan. Selain itu, pemanggilan RUPST dan RUPSLB dapat dilakukan melalui surat kabar harian berperedaran nasional.
- Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa *(proxy)* dapat diunduh pada situs web Perseroan bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan yang beralamat Gedung WIKA Tower 1, Lt.7-10, Jl. DI. Panjaitan No.Kav 9, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340.

D. Penyelenggaraan

- Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.15 WIB dan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 16.15 WIB.
- Untuk RUPST, sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, kecuali ditentukan lain.
- Untuk RUPSLB, sesuai dengan pasal Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2 /3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB.
- Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.

E. Risalah Rapat

- Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB diumumkan kepada publik melalui situs web Perseroan dalam 1 (satu) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan serta melalui surat kabar harian berperedaran nasional dan situs web BEI

and will be included in the GMS agenda if they comply with Article 16 of POJK No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

C. Summon

- The summon for GMS must be submitted no later than 21 (twenty-one) days prior to the holding of EGMS, excluding the date of the summon and the date of the EGMS. The Company will also provide an explanation for each agenda item requiring shareholder approval.
- The summon for AGMS and EGMS must be made at least through eASY.KSEI website, where Shareholders can grant electronic power of attorney (e-Proxy), the Indonesia Stock Exchange (IDX) website, and the Company's website. In addition, the summon for AGMS and EGMS may be published in nationally circulated daily newspapers.
- For shareholder convenience, the proxy form can be downloaded from the Company's website, under the Corporate Governance section, or obtained from the Company's Head Office at WIKA Tower 1 Building, 7th-10th Floor, Jl. DI. Panjaitan No. Kav 9, RT. 1/RW. 11, Cipinang Cempedak, Jatinegara District, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 13340.

D. Implementation

- Shareholders or shareholder proxies entitled to attend the AGMS are shareholders whose names are registered in the Shareholder Register on April 25, 2024, at 4:15 PM WIB. Shareholders or shareholder proxies entitled to attend the EGMS are shareholders whose names are registered in the Shareholder Register on February 11, 2024, at 4:15 PM WIB.
- For the AGMS, in accordance with Article 23 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the GMS is valid and has the right to make binding decisions if the shareholders or their authorized representatives, representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, are present and/or represented at the GMS, unless otherwise specified.
- For the EGMS, in accordance with Article 27 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the EGMS is valid and may be held and make binding decisions if the shareholders of the Company representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights are present and/or represented at the EGMS.
- Each issued share has 1 (one) vote, and the provisions of the Company's Articles of Association stipulate that there is no division of more than one class of shares that could affect different voting rights.

E. Minutes of Meeting

- The Summary of Minutes of AGMS and EGMS shall be announced to the public through the Company's website within 1 (one) business day after the AGMS and EGMS are held, as well as through nationally circulated daily newspapers

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Selain itu, Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dapat diumumkan melalui situs eASY. KSEI.

- Bukti pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan diunduh oleh publik di situs web Perseroan bagian Tata Kelola.

and the IDX website no later than 2 (two) business days after the AGMS and EGMS are held. In addition, the Summary of Minutes of AGMS and EGMS may be announced through KSEI eASY website.

- Proof of the announcement of Summary of Minutes of AGMS and EGMS shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) business days after the announcement.
- Minutes of AGMS and EGMS shall be submitted to the OJK and the IDX no later than 30 (thirty) days after the AGMS and EGMS are held. Copies of these Minutes can be accessed and downloaded by the public from the Governance section of the Company's website.

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik, Perseroan berpedoman pada ketentuan OJK dan Anggaran Dasar. Perseroan berkomitmen memenuhi ketentuan pengumuman, pemanggilan dan pengumuman ringkasan melalui situs web penyedia e-RUPS. Situs web bursa efek dan situs web Perseroan. Ketentuan lebih lengkap terkait penyelenggaraan RUPS dapat dilihat di Anggaran Dasar Perseroan terkini.

In holding electronic GMS, the Company is guided by OJK regulations and the Articles of Association. The Company is committed to complying with the provisions regarding announcements, summons, and summary announcements through the e-GMS provider's website, the stock exchange website, and the Company's website. Further details regarding the holding of GMS can be found in the Company's most recent Articles of Association.

PENYELENGGARAAN RUPS 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 2 kali RUPS, yang terdiri dari satu (1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 21 Mei 2025 dan satu (1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 November 2025.

IMPLEMENTATION OF GMS IN 2025

Throughout 2025, the Company held two GMS meetings, consisting of 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 28, 2025.

RUPS Tahunan 2025

RUPS Tahunan tahun buku 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025. Mata acara beserta ketentuan RUPS lainnya tersedia telah diunggah dalam situs web Perseroan dan tersedia di Divisi Sekretariat Perusahaan Perseroan, dengan kronologis sebagai berikut:

Annual General Meeting of Shareholders in 2025

The 2025 Annual GMS for 2024 fiscal year was held on May 21, 2025. The agenda and related provisions were published on the Company's website and made available through the Corporate Secretary Division, with the chronology as follows:

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulators	27 Maret 2025 March 27, 2025	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.00/A.DIR.00017.WEGE/2025. The Company has submitted the Notice of AGMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter SE.01.00/A.DIR.00017.WEGE/2025.
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	14 April 2025 April 14, 2025	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. The Company has published the Announcement of AGMS to Shareholders on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website, and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date: List of Shareholders entitled to attend AGMS	28 April 2025 April 28, 2025	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. Recorded 1 (one) business day before the Summons for AGMS.

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Summons and explanation of AGMS agenda	29 April 2025 April 29, 2025	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: 1. *Website* Bursa Efek Indonesia dan Website KSEI 2. *Website* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 3. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. Publikasi pemanggilan RUPST disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company issued the Summons of AGMS to Shareholders, and published in Indonesian and English through: 1. The Indonesia Stock Exchange website and KSEI website 2. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk website 3. The Company's website, the IDX website, and the e-AGMS provider's website through eASY.KSEI application. Publication of the AGMS Summons was accompanied by other meeting materials.
Pelaksanaan RUPST Holding of AGMS	21 Mei 2025 May 21, 2025	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The AGMS was held electronically using eASY.KSEI application and in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also held physical AGMS in several rooms. All participants, both physically and electronically, were able to attend and actively participate in the AGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Summary of AGMS Minutes (Results)	23 Mei 2025 May 23, 2025	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: 1. *Website* Bursa Efek Indonesia dan *Website* KSEI 2. *Website* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 3. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. The Company issued the Summons of AGMS to Shareholders, and published in Indonesian and English through: 1. The Indonesia Stock Exchange website and KSEI website 2. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk website 3. The Company's website, the IDX website, and the e-RUPS provider's website in eASY.KSEI application.
Akta Risalah RUPST Deed of AGMS Minutes	23 Mei 2025 May 23, 2025	Penyampaian Akta Risalah (Berita Acara) RUPST No. 2 yang dibuat oleh Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH Submission of the Deed of Minutes of AGMS No. 2 drawn up by Notary Diah Guntari L Soemarwoto, SH

RUPS Perseroan dilaksanakan secara luring dan elektronik *(hybrid),* yang dihadiri secara fisik oleh pemegang saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2025 pukul 16.00 WIB atau oleh kuasa yang sah. Perseroan juga menghimbau para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik *(e-proxy)* dalam Rapat.

The Company's General Meeting of Shareholders (GMS) was held both offline and electronically (hybrid), attended physically by shareholders whose names were officially recorded in the Company's Register of Shareholders as of April 28, 2025 at 16:00 WIB, or by their authorized proxies. The Company also encouraged shareholders to attend the Meeting electronically by granting authority through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI to an independent representative appointed by the Company as the electronic proxy (e-proxy) mechanism for the Meeting.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.042.541.100 (tujuh miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 73,5743951% (tujuh puluh tiga koma lima tujuh empat tiga sembilan lima satu persen.) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Quorum of Shareholders' Attendance

The Meeting was attended and represented by 7,042,541,100 (seven billion forty-two million five hundred forty-one thousand one hundred) shares, representing 73.5743951% (seventy-three point five seven four three nine five one percent) of the total valid voting rights from 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPST

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors at the Annual GMS

The Meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner	Joseph Prajogo	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Independen Independent Commissioner	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Hartanto Karti Raharjo
		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Tomo Dwi Hasputro
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who participated online		Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Commissioner	Danis Hidayat Sumadilaga		

Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan Pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan kedelapan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.'

Questions and Answers

For each Meeting Agenda, the Company provided an opportunity for Shareholders or their Proxies to raise questions or express opinions during the Question and Answer session. A maximum of three questioners, each with one question, were allowed.

For each AGMS agenda item, shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions related to the discussion of the Meeting agenda item. From the first to the eighth agenda item, there were no questions from shareholders.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan tercantum dalam tata tertib RUPS yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Pengambilan keputusan RUPST melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan:
4. Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-8 berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Untuk Mata Acara ke-5 hanya berupa laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

Decision-Making Mechanism

In accordance with the Company's Articles of Association and as stated in the AGMS Rules of Procedure distributed to Shareholders or their proxies, AGMS resolutions are made through the following mechanisms:

1. Voting is conducted verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise;
2. Meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus; and
3. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting. An abstention vote is deemed to be the same as the majority vote of the voting Shareholders, provided that:
4. For Agenda Items 1 to 4 and Agenda Items 6 to 8, pursuant to Article 21 paragraph (2) number (1) letter a of the Company's Articles of Association, a Meeting Resolution is valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
5. Agenda Item 5 is merely a report and therefore does not require Meeting approval.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPST, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu :

1. Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH,selaku Notaris Publik; dan
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Independent Parties for Vote Counting and/or Vote Validation

To count and validate votes at the AGMS, the Company has appointed independent parties, namely:

1. Notary Diah Guntari L Soemarwoto, SH, as Public Notary; and
2. PT Datindo Entrycom as Share Registrar.

These independent parties are appointed to count and/or validate votes at the AGMS.

Keputusan RUPST dan Realisasinya pada Tahun Buku

Keputusan dan ringkasan risalah RUPST diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025 dan telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta situs web Bursa Efek Indonesia. Sesuai Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 19 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://investor.wikagedung.co.id/general-meeting-of-shareholders?year=2025 sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Adapun informasi lengkap mengenai agenda dan keputusan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

AGMS Resolutions and Their Realization in the Fiscal Year

The resolutions and summary of minutes of AGMS were issued on May 23, 2025, and have been published on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website. In accordance with Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 19 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, the Company has provided materials related to the Meeting agenda, which can be downloaded from the Company's website at https://investor.wikagedung.co.id/general-meeting-of-shareholders?year=2025 as of the date of the Meeting Summons.

Complete information regarding the agenda and resolutions of AGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024. Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2024 Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2024, as well as the granting of a Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors for their Management of the Company and Board of Commissioners for their Supervisory Actions Carried Out During the 2024 FIscal Year.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI, namun tidak relevan dengan mata acara Rapat. 1 (one) shareholder submitted a question through KSEI eASY system, but it was not relevant to the Meeting agenda.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
7.039.984.600 saham atau 99,9636992% dari yang hadir shares or 99.9636992% of those present	2.006.500 saham atau 0,0284911% dari yang hadir 2,006,500 shares or 0.0284911% of those present	550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadir 550,000 shares or 0.0078097% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat disetujui dengan dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.100 saham atau 99,9921903% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dengan opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas. The Meeting approved by a majority vote of 7,041,991,100 shares, or 99.9921903% of the total number of votes present at the Meeting. The resolutions were: 1. To approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024. 2. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) in accordance with Report No. 00182/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025 dated March 14, 2025, with "unqualified" opinion. 3. To grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of Board of Directors for their management of the Company and to all members of Board of Commissioners for their supervisory actions for the Company that have been carried out during the 2024 Fiscal Year ending on December 31, 2024, as long as these actions do not constitute a criminal act and are reflected in the report mentioned above.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat); Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 (two thousand and twenty-four) Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** Disagree
7.039.984.600 saham atau 99,9636992% dari yang hadir 7,039,984,600 shares or 99.9636992% of those present	339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir 339,100 shares or 0.0048150% of those present	2.217.400 saham atau 0,0314858% dari yang hadir 2,217,400 shares or 0.0314858% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.040.323.700 saham 99,9685142 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menetapkan Laba Bersih Perseroan dengan rincian sebagai berikut Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp67.888.264.873,- (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2024. b. Sebesar 10% dari laba Bersih senilai Rp6.796.120.000,- (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas c. Sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp54.296.024.873,- (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya d. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. The Meeting, with a majority vote of 7,040,323,700 shares, representing 99.9685142% of the total votes present at the Meeting, resolved: 1. To determine the Company's Net Profit with the following details: To determine the use of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the Fiscal Year ending December 31, 2024, amounting to Rp67,888,264,873 (sixty-seven billion eight hundred eighty-eight million two hundred sixty-four thousand eight hundred seventy-three rupiah) as follows: a. 10% of Net Profit, or Rp6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-six million one hundred twenty thousand rupiah), shall be determined as Cash Dividends for the 2024 Fiscal Year. b. 10% of Net Profit, amounting to Rp6,796,120,000 (six billion seven hundred ninety-six million one hundred twenty thousand rupiah), is allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law. c. 80% of Net Profit, or Rp54,296,024,873 (fifty-four billion two hundred ninety-six million twenty-four thousand eight hundred seventy-three rupiah), is designated as Other Reserves. d. Approved to grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of Cash Dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding off dividend payments per share.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025; Stipulation of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Report for the 2025 Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI Nama pemegang saham: Rizky Hardian Adhinugraha Pertanyaan: KAP mana saja yang menjadi pilihan perusahaan? Atas pertanyaan tersebut telah dijawab secara lisan oleh Pimpinan Rapat dan Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko There is 1 (one) shareholder who submitted a question through the eASY KSEI system. Shareholder Name: Rizky Hardian Adhinugraha. Question: Which Public Accounting Firms (KAP) are the Company's options? The question has been answered orally by the Chairperson of the Meeting and the Director of Finance, Human Capital and Risk Management.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara:

Setuju Agree	Abstain	Tidak Setuju Disagree
7.041.652.000 saham atau 99,9873753% dari yang hadir 7,041,652,000 shares or 99.9873753% of those present	339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir 339,100 shares or 0.0048150% of those present	550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadir 550,000 shares or 0.0078097% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.100 atau 99,9921903 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk : a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. The Meeting, by a majority vote of 7,041,991,100 or 99.9921903% of the total votes attending the Meeting, resolved: 1. To approve the appointment of Public Accountants from the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) to audit the Company's Consolidated Financial Statements, as well as other Reports for the 2025 Fiscal Year. 2. To grant power and authority to the Company's Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Majority Shareholder, to: a. Appoint a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2025 Fiscal Year for the Company's purposes and interests; and b. Determine the audit fees and other terms for the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to appoint a Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), for any reason whatsoever, is unable to complete the audit services for the Company's Consolidated Financial Statements and/or other periods in the 2025 Fiscal Year, including determining the audit fees and other terms for the said Substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

Mata Acara Rapat Keempat Forth Meeting Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024 Determination of Salaries/Honorariums, Facilities, and Allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 Fiscal Year, as well as Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their Performance in the 2024 Fiscal Year
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju Agree	*Abstain*	Tidak Setuju Disagree
7.038.802.100 saham atau 99,9469084% dari yang hadir 7,038,802,100 shares or 99.9469084% of those present	2.006.500 saham atau 0,0284911% dari yang hadir 2,006,500 shares or 0.0284911% of those present	1.732.500 saham atau 0,0246005 % dari yang hadir 1,732,500 shares or 0.0246005% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.040.808.600 atau 99,9753995 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. The Meeting, with a majority vote of 7,040,808,600, or 99.9753995% of the total votes present, resolved: 1. To approve the granting of power and authority to the Major Shareholder to determine for members of the Board of Commissioners: a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for performance in the 2024 Fiscal Year, in accordance with applicable regulations; and b. Honorariums, including Facilities and Allowances for the 2025 Fiscal Year. 2. 2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners, with prior written approval from the Major Shareholder, to determine for members of Board of Directors: a. Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for performance in the 2024 Fiscal Year, in accordance with applicable regulations; and b. Salaries, including Facilities and Allowances for the 2025 Fiscal Year.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering;.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Terdapat 1(satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY KSEI Nama pemegang saham : Muhammad Badrum Pertanyaan : Mohon dijelaskan kenapa realisasi dana IPO ke pengembangan Modular belum dilaksanakan? Atas pertanyaan tersebut telah dijawab secara lisan oleh Pimpinan Rapat dan Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko 1 (one) shareholder submitted a question through KSEI eASY system. Shareholder Name: Muhammad Badrum. Question: Please explain why the realization of IPO proceeds for Modular development has not been implemented. This question has been answered verbally by the Meeting Chair and the Director of Finance, Human Capital, and Risk Management
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting: **Setuju** Agree | ***Abstain*** | **Tidak Setuju** Disagree - | - | -
Keputusan Rapat Meeting Resolution	Untuk mata acara ke-5, yang bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan, Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. For the 5th agenda item, which is a report and therefore does not involve decision-making, the Company's Board of Directors has submitted a Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering as required in Article 6 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Approval of Changes to the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or comments.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting: **Setuju** Agree | ***Abstain*** | **Tidak Setuju** Disagree 7.041.652.000 saham atau 99,9873753% dari yang hadir 7,041,652,000 shares or 99.9873753% of those present | 339.100 saham atau 0,0048150% dari yang hadir 339,100 shares or 0.0048150% of those present | 550.000 saham atau 0,0078097% dari yang hadi 550,000 shares or 0.0078097% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 7.041.991.000 99,9921903% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui menolak permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut: a. Sdri. Suli Fatimah selaku Komisaris sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025. b. Sdr. Dwi Purnomo selaku Direktur Operasi II sebagaimana surat permohonan pengunduran diri tertanggal 30 April 2025. Dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik dan untuk posisi jabatan yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Perseroan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan. Oleh karenanya yang bersangkutan tersebut di atas tetap menjabat pada posisi jabatan semula dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan sebelumnya. 2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut: a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I yang diangkat berdasarkan berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 10 Agustus 2020, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung. 3. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung sebagai berikut: a. Sdr.Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt. Komisaris Utama b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar WIKA Gedung, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi WIKA Gedung adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: a. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama; b. Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris; c. Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris; d. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen; Direksi: a. Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I; c. Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II; d. Sdr. Hartanto Karti Raharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko; e. Sdr. Tomo Dwi Hasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment, dan Pemasaran. 5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya WIKA Gedung dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris WIKA Gedung kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	The meeting, with a majority vote of 7,041,991,000 (99.9921903% of the total votes present), resolved: 1. To approve and reject the resignation requests of the following individuals: a. Suli Fatimah as Commissioner, as stated in resignation letter dated April 30, 2025. b. Dwi Purnomo as Director of Operations II, as stated in resignation letter dated April 30, 2025. Considering that the individuals concerned have performed well and the Company still requires their positions to support the achievement of the targets set by the Company in its Long-Term Plan, the individuals mentioned above will remain in their original positions, with a term of office extending from their previous terms. 2. 2. To honorably dismiss the following individuals as members of Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung: a. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner, appointed pursuant to Deed No. 7 dated August 10, 2020, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta; b. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I, appointed pursuant to Deed No. 7 dated August 10, 2020, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta; effective as of the closing of this GMS, with gratitude for all contributions of energy and thought given by the person concerned during his/her term as a Member of Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung. 3. To appoint the following names as Members of Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung: a. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner b. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I effective as of the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions of WIKA Gedung's Articles of Association, with due regard to laws and regulations and without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time. 4. In connection with points 1, 2, and 3 above, the composition of Board of Commissioners and Board of Directors of WIKA Gedung is as follows: Board of Commissioners: a. Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner; b. Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner; c. Suli Fatimah as Commissioner; d. Taufan Gestoro as Independent Commissioner; Board of Directors: a. Hadian Pramudita as President Director; b. Bagus Tri Setyana as Director of Operations I; c. Dwi Purnomo as Director of Operations II; d. Hartanto Karti Raharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; e. Tomo Dwi Hasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing. 5. Granting power and authority to the President Director and/or other Directors of WIKA Gedung with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the resolution of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of Board of Directors and Board of Commissioners of WIKA Gedung to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable provisions.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2025. Has been realized in 2025.

PENYELENGGARAAN RUPSLB TAHUN 2025

Kronologis Pelaksanaan RUPSLB

Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Tahun 2025 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025 di WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI).

Adapun tata cara penyelenggaraan RUPSLB Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Chronology of EGMS

The Company has held the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Friday, November 28, 2025 at WIKA Tower II, Auditorium, 17th Floor, Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta and was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI) facility.

The procedures for holding the Company's Extraordinary GMS are as follows:

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator Notification of EGMS to Regulators	15 Oktober 2025 October 15, 2025	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.00/A.CORSEC.00093/2025 The Company has submitted the Notification of Extraordinary GMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.00/A.CORSEC.00093/2025

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	22 Oktober 2025 October 22, 2025	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan The Company submitted the Announcement of Extraordinary GMS to Shareholders through: 1. the Indonesia Stock Exchange website; 2. the Indonesian Central Securities Depository website; and 3. the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Recording Date: List of Shareholders entitled to attend EGMS	5 November 2025 November 5, 2025	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPSLB. Recorded 1 (one) business day prior to the Summons of Extraordinary GMS.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPSLB Summons and information on the explanation of EGMS agenda	6 November 2025 November 6, 2025	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. Pemanggilan RUPSLB dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company issued the Summons of EGMS to Shareholders through: 1. The Indonesia Stock Exchange website; 2. The Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website. The Summons of EGMS were published in Indonesian and English, along with other meeting materials.
Pelaksanaan RUPSLB EGMS Holding	28 November 2025 November 28, 2025	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The EGMS was held electronically using the eASY.KSEI application and in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company held the EGMS physically in several rooms. All participants, both physically and electronically, were able to attend and actively participate in the EGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Summary of EGMS Minutes (Results)	2 Desember 2025 December 2, 2025	Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. The Company submitted a Summary of EGMS Minutes to Shareholders through: 1. The Indonesia Stock Exchange website; 2. The Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website.
Akta Risalah RUPSLB Deed of EGMS Minutes	19 Desember 2025 December 19, 2025	Akta RUPS No. No. 3 tanggal 28 November 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto Deed of GMS No. 3 dated November 28, 2025 made before Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto

RUPS Perseroan dilaksanakan secara luring dan elektronik (*hybrid*) serta dapat dihadiri secara fisik oleh pemegang saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 November 2025 pukul 16.00 WIB atau oleh kuasanya yang sah.

The Company's GMS was held both offline and electronically (hybrid) and may be attended in person by shareholders whose names are legally registered in the Company's Shareholder Register on November 5, 2025, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB), or by their authorized proxies.

Perseroan juga menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan menyediakan *proxy* elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) KSEI yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme *proxy* elektronik *(e-proxy)* di dalam Rapat.

The Company also encouraged shareholders to attend electronically by providing an electronic proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as an electronic proxy (e-proxy) at the Meeting.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPSLB

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors at the EGMS

The Meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Joseph Prajogo	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Commissioner	Suli Fatimah	Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Hartanto Karti Raharjo
Komisaris Independen Independent Commissioner	Taufan Gestoro	Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who participated online		Direktur Operasi II Director of Operations II	Dwi Purnomo
Komisaris Commissioner	Danis Hidayat Sumadilaga	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Tomo Dwi Hasputro

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.311.719.014 (tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat belas) saham atau mewakili 76,3865338% (Tujuh puluh enam koma tiga delapan enam lima tiga tiga delapan persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (Sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholder Attendance Quorum

The Meeting was attended and represented by 7,311,719,014 (seven billion three hundred eleven million seven hundred nineteen thousand fourteen) shares, representing 76.3865338% (seventy-six point three eight six five three three eight percent) of the total valid voting rights of 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat.

Questions and Answers

Prior to the adoption of resolutions on the Meeting Agenda, the Meeting Chairperson provided the opportunity for Shareholders or their Proxies to raise questions or express opinions during the Question and Answer session, with a maximum of three (3) questioners, each asking one (1) question. Questions or opinions may only be raised on matters related to the Meeting Agenda.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, berdasarkan Pasal 21 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Decision-Making Mechanism

1. Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus; and
2. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus cannot be reached, pursuant to Article 21 paragraph 2 number (1) letter c of the Company's Articles of Association, a Meeting decision is valid if approved by more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPSLB, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

1. Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH, selaku Notaris Publik; dan
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Independent Parties for Vote Counting and/or Vote Validation

To count and validate votes at the EGMS, the Company has appointed independent parties, namely:

1. Notary Diah Guntari L Soemarwoto, SH, as Public Notary; and
2. PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. These independent parties were appointed to count and/or validate votes at the EGMS.

Keputusan RUPSLB dan Realisasinya pada Tahun Buku 2025

Keputusan dan ringkasan risalah RUPSLB diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2025 dan telah dicantumkan dalam situs web Perseroan, pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Seluruh keputusan RUPSLB telah dimuat dalam Akta No. No. 3 tanggal 28 November 2025 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH, Notaris di Kota Jakarta.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

EGMS Resolutions and Their Implementation in the Fiscal Year 2025

The resolutions and summary of minutes of EGMS were issued on December 2, 2025, and have been posted on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website.

All EGMS resolutions have been included in Deed No. 3 dated November 28, 2025, made by and before Notary Diah Guntari L Soemarwoto, SH, Notary in Jakarta City.

The complete information regarding the agenda and resolutions of EGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Approval of Changes to the Use of Proceeds from Initial Public Offering.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or comments.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By voting:

Setuju Agree	**Abstain**	**Tidak Setuju** Disagree
7.311.719.014 saham atau 100% dari yang hadir 7,311,719,014 shares or 100% of those present	0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir 0 shares or 0.0000000% of those present	0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir 0 shares or 0.0000000% of those present

Keputusan Rapat
Meeting Resolutions

Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 7.311.719.014 saham atau 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk melakukan perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut:
1. Penyediaan Ruang pada Infrastruktur Perkotaan, Infrastruktur Sosial, dan Bangunan Kepariwisataan sebesar Rp262.980 miliar;
2. Investasi berupa Pengembangan Entitas Anak dan Usaha Konstruksi Modular Nihil atau Rp0;
3. Pembelian Alat Produksi Konstruksi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi sebesar Rp80.987 miliar;
4. Modal Kerja sebesar Rp465.899 miliar.

The meeting unanimously approved the resolution with 7,311,719,014 shares, representing 100% of the total votes present at the meeting.

Approved to amend the Use of Proceeds from Initial Public Offering as follows:
1. Provision of Space for Urban Infrastructure, Social Infrastructure, and Tourism Buildings amounting to Rp262,980 billion;
2. Investment in the Development of Subsidiaries and Modular Construction Businesses: Zero or Rp0;
3. Purchase of Construction Production Equipment and Development of Information Technology Systems: Rp80,987 billion;
4. Working Capital: Rp465,899 billion

PENYELENGGARAAN RUPST TAHUN 2024 UNTUK TAHUN BUKU 2023

Kronologis Pelaksanaan RUPST

Pada tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 20 Mei 2024 dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Februari 2024. Mata acara beserta ketentuan RUPS lainnya tersedia telah diunggah dalam situs web Perseroan dan tersedia di Divisi Sekretariat Perusahaan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2023

Chronology of AGMS Holding

In 2024, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024. The agenda items and other GMS provisions have been uploaded to the Company's website and are available from the Company's Corporate Secretariat Division, with details as follows:

Kegiatan Activity	**Tanggal Pelaksanaan** Date	**Keterangan** Remarks
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator Notification of AGMS to Regulators	13 Maret 2024 March 13, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.01/A. SEKPER.WG.01875/2024. The Company has submitted a Notice of AGMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.01875/2024.
Penundaan RUPST Postponement of AGMS	13 Maret 2024 March 13, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Penundaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No SE.01.01/A.SEKPER.WG.02055/2024. The Company has submitted a Notice of the Postponement of AGMS to the Financial Services Authority (OJK) as stated in Letter No. SE.01.01/A.SEKPER.WG.02055/2024.
Pengumuman RUPST Announcement of AGMS	9 April 2024 April 9, 2024	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan. The Company has published the AGMS Announcement to Shareholders on the Indonesia Stock Exchange website, the Indonesian Central Securities Depository website, and the Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST Recording Date: List of Shareholders entitled to attend AGMS	25 April 2024 April 25, 2024	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. Registered 1 (one) business day prior to the AGMS Summons.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPST Summons and explanation of AGMS agenda	26 April 2024 April 26, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: 1. *Website* Bursa Efek Indonesia 2. *Website* KSEI 3. *Website* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 4. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. Publikasi pemanggilan RUPST disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company delivered the AGMS Summons to Shareholders and published in Indonesian and English through: 1. The Indonesia Stock Exchange Website 2. KSEI Website 3. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Website 4. The Company's website, the IDX website, and the e-AGMS provider's website in the eASY. KSEI application. The AGMS Summons were published along with other meeting materials.
Pelaksanaan RUPST AGMS holding	20 Mei 2024 May 20, 2024	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The AGMS was held electronically using the eASY.KSEI application and in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2016 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company also held physical AGMS in several rooms. All participants presented physically or electronically may attend and actively participate in the AGMS.

Kegiatan Activity	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST Summary of Minutes (Results) of AGMS	22 Mei 2024 May 22, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dan dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada, melalui: 1. *Website* Bursa Efek Indonesia 2. *Website* KSEI 3. *Website* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 4. Situs web Perusahaan, situs web BEI, dan situs web penyedia e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI. The Company issued the Summons of AGMS to Shareholders and published n Indonesian and English through: 1. The Indonesia Stock Exchange website 2. KSEI website 3. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk website 4. The Company's website, the IDX website, and the e-AGMS provider's website in the eASY. KSEI application.
Akta Risalah RUPST Deed of AGMS Minutes	6 Juni 2024 June 6, 2024	Penyampaian Akta Risalah (Berita Acara) RUPST No. 15 yang dibuat oleh Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H. Submission of the Deed of AGMS Minutes No. 15 prepared by Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H.

RUPS Perseroan dilaksanakan luring (*hybrid*), pemegang saham yang memungkinkan kehadiran fisik dan namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2024 pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah. Perseroan juga menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik dengan menyediakan *proxy* elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) KSEI yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme *proxy* elektronik (*e-proxy*) di dalam Rapat.

The Company's General Meeting of Shareholders (GMS) was conducted offline (hybrid), allowing shareholders to attend physically, provided that their names were duly recorded in the Company's Register of Shareholders as of April 25, 2024 at 16:00 WIB, or represented by their authorized proxies. The Company also encouraged shareholders to attend electronically by providing an electronic proxy through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility offered by KSEI, granting authority to an independent representative appointed by the Company as the electronic proxy (e-proxy) mechanism in the Meeting.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.025.634.100 (tujuh miliar dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus) saham atau mewakili 73,398% (tujuh puluh tiga koma tiga ratus Sembilan puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholder Attendance Quorum

The Meeting was attended and represented by 7,025,634,100 (seven billion twenty-five million six hundred thirty-four thousand one hundred) shares, representing 73.398% (seventy-three point three hundred ninety-seven percent) of the total valid voting rights of the 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi PADA RUPST

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors at the AGMS

The meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner	Joseph Prajogo	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Commissioner	Suli Fatimah	Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen Independent Commissioner	Taufan Gestoro	DIrektur Operasi II Director of Operations II	Akhmadi Tricahyono
		Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Dwi Purnomo
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who participated online			
Komisaris Commissioner	Danis Hidayat		

Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan Pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan kedelapan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan tercantum dalam tata tertib RUPS yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya. Pengambilan keputusan RUPST melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan:
4. Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-8 berdasarkan Pasal 21 ayat (2) angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Untuk Mata Acara ke-5 hanya berupa laporan sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPST, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

1. Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., selaku Notaris Publik; dan
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPST.

Keputusan RUPST dan Realisasinya pada Tahun Buku

Keputusan dan ringkasan risalah RUPST diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025 dan telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta situs web Bursa Efek Indonesia. Sesuai Pasal 18 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 19 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan https://investor.wikagedung.co.id/general-meeting-of-shareholders?year=2025 sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

Questions and Answers

For each Meeting Agenda, the Company provided an opportunity for Shareholders or their Proxies to raise questions or express opinions during the Question and Answer session, with a maximum of three questioners, each asking one question.

For each AGMS agenda item, shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions related to the discussion of Meeting agenda. From the first to the eighth agenda, there were no questions from shareholders.

Decision-Making Mechanism

In accordance with the Company's Articles of Association and as stated in the AGMS Rules of Procedure distributed to Shareholders or their proxies, AGMS resolutions are made through the following mechanisms:

1. Voting is conducted verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise;
2. Meeting resolutions are made based on deliberation to reach consensus; and
3. In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the resolution shall be made through voting. Abstention votes shall be deemed to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their votes, with the following provisions:
4. For the 1st through 4th agenda and 6th through 8th agenda, based on Article 21 paragraph (2) point (1) letter a of the Company's Articles of Association, Meeting resolutions are valid if approved by more than ½ (one-half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

5. The 5th agenda is only a report and therefore does not require approval of the Meeting.

Independent Parties for Vote Counting and/or Vote Validation

To count and validate votes at the AGMS, the Company has appointed the following independent parties:

1. Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., as Public Notary; and
2. PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. These independent parties were appointed to count and/or validate votes at the AGMS.

AGMS Resolutions and Their Implementation in the Fiscal Year

The resolutions and summary of AGMS minutes were issued on May 23, 2025, and have been published on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website. In accordance with Article 18 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 19 paragraph (12) of the Company's Articles of Association, the Company has provided materials related to the Meeting agenda, which can be downloaded from the Company's website at https://investor.wikagedung.co.id/general-meeting-of-shareholders?year=2025 since the date of Meeting Summons.

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2023 (thirty-first of December, two thousand and twenty-three). Concurrently, the granting of a full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors for their management of the Company and Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders submitted questions or responses.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.025.057.100 saham atau 99,9917872% dari yang hadir 7,025,057,100 shares or 99.9917872% of those present	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those present	245.200 saham atau 0,0034901% dari yang hadir 245,200 shares or 0.0034901% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat disetujui dengan dengan suara terbanyak sebesar 99,9965099% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor: 00296/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/ III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material", posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. The Meeting approved by a majority vote of 99.9965099% of the total votes present at the Meeting, and resolved: 1. To approve the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and to ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, audited by Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, as stated in its Report No.: 00296/2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, with "unqualified" opinion. The consolidated financial position of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; 2. To approve the granting of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the Fiscal Year ending on December 31, 2023, as long as these actions do not constitute a criminal act and these actions are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 (two thousand and twenty-three) Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses.

Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir 7,025,302,100 shares or 99.9952744% of those in attendance	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those in attendance	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those in attendance

Keputusan Rapat
Meeting Resolution

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp46.702.158.528 (Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ,dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sebesar 20% dari Laba Bersih atau senilai Rp9.380.560.000 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2023.
   b. Sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp4.700.000.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang- Undang Perseroan Terbatas.
   c. Sebesar 70% dari Laba Bersih atau senilai Rp32.621.598.528 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

The Meeting, with a majority vote of 99.9999972% of the total votes present at the Meeting, resolved:
1. To approve the allocation of Net Profit attributable to Owners of the Parent Entity for the Fiscal Year ending December 31, 2023, amounting to Rp46,702,158,528 (Forty-Six Billion Seven Hundred Two Million One Hundred Fifty-Eight Thousand Five Hundred Twenty-Eight Rupiah), with the following details:
   a. 20% of Net Profit, or Rp9,380,560,000 (Nine Billion Three Hundred Eighty Million Five Hundred Sixty Thousand Rupiah), shall be allocated as Cash Dividends for the 2023 Fiscal Year.
   b. 10% of Net Profit, or Rp4,700,000,000 (Four Billion Seven Hundred Million Rupiah), is allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
   c. 70% of Net Profit, or Rp32,621,598,528 (Thirty-Two Billion Six Hundred Twenty-One Million Five Hundred Ninety-Eight Thousand Five Hundred Twenty-Eight Rupiah), is designated as Other Reserves.
2. To approve to grant authority and power to Board of Directors with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of Cash Dividend distribution in accordance with applicable regulations, including rounding up for dividend payments per share.

Status Pelaksanaan
Implementation Status

Telah direalisasikan pada tahun 2024.
Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; Determination of the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders submitted questions or responses.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.025.302.100 saham atau 99,9952744% dari yang hadir 7,025,302,100 shares or 99.9952744% of those present	331.800 saham atau 0,0047227% dari yang hadir 331,800 shares or 0.0047227% of those present	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those in attendance

Keputusan Rapat
Meeting Resolution

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

	The Meeting, with a majority vote of 99.9999972% of the total votes present at the Meeting, resolved: 1. To approve the reappointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) to perform audit services for the Company's Consolidated Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit, with a term ending on December 31, 2024; 2. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, any additional work scope required, and other reasonable requirements for the public accounting firm; 3. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, with prior approval from the Major Shareholders, to dismiss and appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) is unable, for any reason, to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2024 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Determination of Salaries/Honorariums, Allowances, and Other Facilities for 2024 and Performance Bonuses for 2023 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan Determination of Salaries/Honorariums, Allowances, and Other Facilities for 2024 and Performance Bonuses for 2023 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.024.050.700 saham atau 99,9774625% dari yang hadir 7,024,050,700 shares or 99.9774625% of those present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those present	288.800 saham atau 0,0041107 % dari yang hadir 288,800 shares or 0.0041107% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9958893 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun Buku 2024. The Meeting, with a majority vote of 99.9958893% of the total votes present at the Meeting, resolved: 1. To grant authority and power to the Major Shareholder to determine the amount of Bonus for the 2023 Fiscal Year, as well as to determine the honorarium, allowances, and facilities for members of Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year; 2. To grant authority and power to the Board of Commissioners, with prior written approval from the major shareholder, to determine the amount of Bonus for the 2023 Fiscal Year, as well as to determine the salaries, allowances, and facilities for Board of Directors for the 2024 Fiscal Year.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
-	-	-

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering is presented as a report; therefore, no resolution is made. The Company's Board of Directors has submitted Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering, in accordance with the requirements for Public Companies as stipulated in Article 6 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.4/2015 concerning Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Keenam Sixth Meeting Agenda	Perubahan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Changes to the Use of Proceeds from Public Offering
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. No Shareholders submitted questions or comments.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir 7,024,339,300 shares or 99.9815703% of those present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those present	200 saham atau 0,0000028% dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those present

Keputusan Rapat
Meeting Resolution

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk kegiatan terkait penyediaan ruang pada infrastruktur perkotaan dan infrastruktur sosial, dan bangunan kepariwisataan yang semula direncanakan sebesar 50,80% atau sebesar Rp411.412 miliar (Empat Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Dua Belas Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 32,47% atau sebesar Rp262.980 miliar (Dua Ratus Enam Puluh Dua Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah).
2. Menyetujui untuk kegiatan Investasi berupa pengembangan entitas anak, dan usaha konstruksi modular, tetap sesuai rencana awal yaitu sebesar 13,09% atau sebesar Rp106.011 miliar (Seratus Enam Koma Sebelas Miliar Rupiah).
3. Menyetujui untuk pembelian alat produksi konstruksi dan pengembangan sistem IT, Perseroan tidak memiliki usulan perubahan atau dengan kata lain besarannya tetap sesuai rencana awal, yaitu sebesar 10% atau sebesar Rp80.987 miliar (Delapan Puluh Koma Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Rupiah).
4. Menyetujui untuk Modal Kerja yang semula direncanakan sebesar 26,11% atau sebesar Rp211.456 miliar (Dua Ratus Sebelas Koma Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Rupiah), Perseroan mengusulkan untuk mengubah besarannya menjadi 44,44% atau sebesar Rp359.888 miliar (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah).

The meeting, with a majority vote of 99.9999972% of the total votes present, resolved: To approve the changes in the use of proceeds from Initial Public Offering to the following:

1. To approve activities related to the provision of space for urban and social infrastructure, and tourism buildings. The Company proposes to change the amount from the original planned 50.80%, or Rp411,412 billion (Four Hundred and Eleven Point Four Hundred and Twelve Billion Rupiah), to 32.47%, or Rp262,980 billion (Two Hundred and Sixty-Two Point Nine Hundred and Eighty Billion Rupiah).
2. To approve investment activities in the form of developing subsidiaries and modular construction businesses, to remain as originally planned at 13.09%, or Rp106,011 billion (One Hundred and Six Point Eleven Billion Rupiah).
3. To approve the purchase of construction production equipment and IT system development, the Company has no proposed changes or in other words the amount remains as per the initial plan, which is 10% or Rp80,987 billion (Eighty Point Nine Hundred Eighty Seven Billion Rupiah).
4. To approve the Working Capital which was originally planned at 26.11% or Rp211,456 billion (Two Hundred Eleven Point Four Hundred Fifty Six Billion Rupiah), the Company proposes to change the amount to 44.44% or Rp359,888 billion (Three Hundred Fifty Nine Point Eight Hundred Eighty Eight Billion Rupiah).

Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; Persetujuan Pengukuhan/Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; Report on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offering; Approval of the Confirmation/Ratification of Integrated Governance Policy and Guidelines for Management Principles of Subsidiaries and Integrated Governance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.024.295.700 saham atau 99,9809498% dari yang hadir 7,024,295,700 shares or 99.9809498% of those present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those present	43.800 saham atau 0,0006234% dari yang hadir 43,800 shares or 0.0006234% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9993766 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui mengukuhkan/meratifikasi pemberlakuan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam Dokumen Nomor WIKA-SUB-KP.01.01 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dalam dokumen Nomor WIKASUB- QM.01.01 Rev.01 berikut perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu sebagai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi di Perseroan; 2. Menyetujui meminta kepada Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas penerapan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, untuk selanjutnya hasil penerapan untuk dilaporkan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas secara berkala. The Meeting, with a majority vote of 99.9993766% of the total number of votes present at the Meeting, resolved: 1. To approve the confirmation/ratification of the implementation of Integrated Governance Policy as set out in Document No. WIKA-SUB-KP.01.01 and Guidelines for Subsidiary Management Principles and Integrated Governance as set out in Document No. WIKASUB-QM.01.01 Rev.01, including any amendments thereto, as the Integrated Governance Guidelines in the Company; 2. To request Board of Commissioners to supervise the implementation of the Company's Integrated Governance Policy and Guidelines by Board of Directors, with the implementation results to be reported periodically to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, as the Major Shareholder.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

Mata Acara Rapat Kedelapan Eighth Meeting Agenda	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Approval of Changes to the Company's Management Composition.
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or comments.
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju | Agree	***Abstain***	**Tidak Setuju** | Disagree
7.024.339.300 saham atau 99,9815703% dari yang hadir 7,024,339,300 shares or 99.9815703% of those present	1.294.600 saham atau 0,0184268% dari yang hadir 1,294,600 shares or 0.0184268% of those present	200 saham atau 0,0000028 % dari yang hadir 200 shares or 0.0000028% of those present

Keputusan Rapat Meeting Resolution	Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999972 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 16 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto. S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 21 Maret 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta Selatan, terhitung sejak 17 Mei 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan, dan mengesahkan serta menerima segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak 21 Maret 2019 sampai dengan 17 Mei 2024. 3. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 21 April 2022, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., di Jakarta Selatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. 4. Mengalihkan penugasan Sdr. Dwi Purnomo yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 16 Mei 2023, dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto S.H., Notaris di Jakarta dari semula Direktur Quality, Health, Safety, Environment, dan Pemasaran menjadi Direktur Operasi II, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; b. Sdr. Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris:** Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen sekaligus Plt Komisaris Utama; Suli Fatimah sebagai Komisaris; Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris; Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen; **Direksi:** Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; Hartanto Kartiraharjo sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko; Tomo Dwihasputro sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran; Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I; Dwi Purnomo sebagai Direktur Operasi II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	The meeting, with a majority vote of 99.9999972% of the total votes present, resolved: 1. To confirm the honorable dismissal of Sumadi as President Commissioner, appointed pursuant to Deed No. 4 dated May 16, 2023, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective May 15, 2024, with gratitude for all contributions of energy and thought made by the person concerned during tenure as President Commissioner of the Company. 2. To confirm the honorable dismissal of Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital and Risk Management appointed based on Deed No. 27 dated March 21, 2019 made before Fathiah Helmi, S.H., in South Jakarta, effective May 17, 2024, with gratitude for all contributions of energy and thoughts given by the person concerned during tenure as a Member of the Company's Board of Directors, and ratifying and accepting all actions taken by the person concerned during the implementation of duties and responsibilities as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management of the Company from March 21, 2019 to May 17, 2024. 3. To honorably dismiss Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II, appointed pursuant to Deed No. 6 dated April 21, 2022, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., in South Jakarta, effective as of the closing of this GMS. With gratitude for all contributions of energy and thought during tenure as a member of the Company's Board of Directors. 4. To transfer the assignment of Dwi Purnomo, appointed pursuant to Deed No. 4 dated May 16, 2023, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, from previous position as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing to Director of Operations II, with a term of office continuing the remaining term of office as determined by the GMS appointment of the person concerned without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time. 5. To appoint the following names as members of the Company's Board of Directors, as follows: a. Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; b. Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing, effective as of the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of laws and regulations and without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time. 6. With the confirmation of dismissal, removal, transfer, assignment, and appointment of members of Board of Directors mentioned above, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows: **Board of Commissioners:** Joseph Prajogo as Independent Commissioner and Acting President Commissioner; Suli Fatimah as Commissioner; Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner; Taufan Gestoro as Independent Commissioner; **Board of Directors:** Hadian Pramudita as President Director; Hartanto Kartiraharjo as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management; Tomo Dwihasputro as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing; Bagus Tri Setyana as Director of Operations I; Dwi Purnomo as Director of Operations II. Granting power and authority to the President Director and/or other Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary actions related to the resolution of this agenda item in accordance with applicable laws and regulations, including declaring this in a separate Notarial Deed and notifying the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.
Status Pelaksanaan Implementation Status	Telah direalisasikan pada tahun 2024. Has been realized in 2024.

PENYELENGGARAAN RUPSLB TAHUN 2024

Kronologis Pelaksanaan RUPSLB

Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 di WIKA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY KSEI).

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS) IN 2024

Chronology of EGMS

The Company has conducted the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on Thursday, February 29, 2024, at WIKA Tower II, Auditorium, 17th Floor, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta, and was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY KSEI) facility.

Adapun tata cara penyelenggaraan RUPSLB perseroan dengan rincian sebagai berikut:

The procedures for holding the Company's EGMS are as follows:

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator Notification of EGMS to Regulators	16 Januari 2024 January 16, 2024	Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat No. SE.01.01/A. WG.00305/2024. The Company has submitted the Notification of Extraordinary GMS Agenda to the Financial Services Authority (OJK) as stipulated in Letter No. SE.01.01/A. WG.00305/2024.
Pengumuman RUPSLB Announcement of EGMS	23 Januari 2024 January 23, 2024	Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan The Company submitted the Summons of Extraordinary GMS to Shareholders through: 1. The Indonesia Stock Exchange website; 2. The Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website.
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB Recording Date: List of Shareholders entitled to attend EGMS	11 Februari 2024 February 11, 2024	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPSLB. Recorded 1 (one) business day prior to the Summons of EGMS.
Pemanggilan dan informasi penjelasan mata acara RUPSLB Summons and Explanation of EGMS Agenda	12 Februari 2024 February 12, 2024	Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. Pemanggilan RUPSLB dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris disertai dengan bahan Rapat lainnya. The Company issued the Summons of EGMS to Shareholders through: 1. The Indonesia Stock Exchange website; 2. The Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website. The Summons of EGMS were published in Indonesian and English, along with other meeting materials.
Pelaksanaan RUPSLB EGMS Holding	29 Februari 2024 February 29, 2024	Penyelenggaraan RUPST secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan RUPST secara fisik dalam beberapa ruangan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The EGMS was held electronically using the eASY.KSEI application, in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association. In addition, the Company held the EGMS physically in several rooms. All participants, both physically and electronically, were able to attend and actively participate in the EGMS.
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB Summary of EGMS Minutes (Results)	4 Maret 2024 March 4, 2024	Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB kepada Pemegang Saham, melalui: 1. Situs web Bursa Efek Indonesia; 2. Situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan 3. Situs web Perseroan. The Company submitted the Summary of EGMS Minutes to Shareholders through: 1. The Indonesia Stock Exchange website; 2. The Indonesian Central Securities Depository website; and 3. The Company's website.
Akta Risalah RUPSLB Deed of EGMS Minutes	18 Maret 2024 March 18, 2024	Akta RUPS No. 6 yang dibuat di hadapan Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto S.H. Deed of EGMS No. 6, drawn up before Notary Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H.

RUPS Perseroan dilaksanakan secara luring dan elektronik (*hybrid*) serta dapat dihadiri secara fisik oleh pemegang saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 16.00 WIB atau oleh kuasanya yang sah.

The Company's GMS was held both offline and electronically (hybrid) and may be attended in person by shareholders whose names are legally registered in the Company's Shareholder Register on February 11, 2024, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB), or by their authorized proxies.

Perseroan juga menghimbau para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI kepada perwakilan independen yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam Rapat.

The Company also encouraged shareholders to attend the Meeting electronically by granting power of attorney through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by KSEI to independent representatives appointed by the Company as a mechanism for granting electronic power of attorney (e-proxy) at the Meeting.

Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Attendance of Board of Commissioners and Board of Directors

The Meeting was attended by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
Komisaris Utama President Commissioner	Sumadi	Direktur Utama President Director	Hadian Pramudita
Komisaris Commissioner	Suli Fatimah	Direktur Operasi I Director of Operations I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen Independent Commissioner	Joseph Prajogo	DIrektur Operasi II Director of Operations II	Akhmadi Tricahyono
		Direktur Quality, *Health, Safety, Environment* dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Dwi Purnomo
Dewan Komisaris yang mengikuti secara Daring Board of Commissioners who participated online		Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Syailendra Ogan
Komisaris Commissioner	Danis Hidayat		

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.099.253.200 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus) saham atau mewakili 74,167% (tujuh puluh empat koma serratus enam puluh tujuh persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Adapun persentase persetujuan atas setiap mata acara RUPSLB akan dijelaskan terpisah bersama agenda dan keputusan RUPSLB.

Shareholder Attendance Quorum

The Meeting was attended and represented by 7,099,253,200 (seven billion ninety-nine million two hundred fifty-three thousand two hundred) shares, representing 74.167% (seventy-four point one hundred sixty-seven percent) of the total valid voting rights of the 9,572,000,000 (nine billion five hundred seventy-two million) shares issued by the Company.

The percentage of approval for each EGMS agenda item will be explained separately, along with the EGMS agenda and resolutions.

Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mengajukan Pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

Dalam setiap mata acara RUPST para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Dari mata acara pertama sampai dengan kedelapan tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.

Questions and Answers

For each Meeting Agenda, the Company provided shareholders or their proxies with the opportunity to raise questions or express opinions during the Question and Answer session, with a maximum of three questioners, each asking one question.

For each AGMS agenda item, shareholders were given the opportunity to ask questions or express opinions related to the discussion of the Meeting agenda. From the first to the eighth agenda, there were no questions from shareholders.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan yang diambil dalam RUPSLB berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Decision-Making Mechanism

All resolutions made at the EGMS are based on deliberation and consensus. If a resolution based on deliberation and consensus cannot be reached, resolutions are made by voting.

Pihak Independen Penghitung Suara dan/atau Validasi Suara

Untuk menghitung dan memvalidasi suara dalam RUPST dan RUPSLB, Perseroan Telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

1. Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., selaku Notaris Publik; dan
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Pihak independen tersebut ditunjuk untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPSLB.

Independent Parties for Vote Counting and/or Vote Validation

To count and validate votes at the AGMS and EGMS, the Company has appointed the following independent parties:

1. Notary Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., as Public Notary; and
2. PT Datindo Entrycom as the Share Registrar. These independent parties were appointed to count and/or validate votes at the EGMS.

Keputusan RUPSLB dan Realisasinya pada Tahun Buku

Keputusan dan ringkasan risalah RUPST diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2024 dan telah dicantumkan dalam situs web Perseroan, pada situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Seluruh keputusan RUPSLB telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

EGMS Resolutions and Their Implementation in the Fiscal Year

The resolutions and summary of EGMS minutes were published on March 4, 2024, and have been posted on the Company's website, the Financial Services Authority (OJK) website, and the Indonesia Stock Exchange website.

All EGMS resolutions are contained in Deed No. 6 dated February 29, 2024, drawn up by and before Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta.

The complete information regarding the agenda and resolutions of EGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Perubahan Pengurus Perseroan Changes in the Board of Management
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Number of Shareholders Who Asked Questions	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan No Shareholders submitted questions or responses
Pengambilan Keputusan Decision-making	Dengan Pemungutan Suara: By Voting:

Setuju I Setuju	***Abstain***	**Tidak Setuju I** Tidak Setuju
7.099.253.100 saham atau 99,9999986% dari yang hadir 7.099.253.100 shares or 99,9999986% of those present	0 saham atau 0,0000000% dari yang hadir 0 shares or 0,0000000% of those present	100 saham atau 0,0000014 % dari yang hadir 100 shares or 0,0000014 % of those present

Keputusan Rapat
Meeting Resolutions

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9999986 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 Januari 2021 terhitung sejak tanggal 5 Desember 2023, dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pemberian pembebasan tanggung jawab secara penuh (*acquit et de charge*) akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan;
2. Mengangkat Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;
   Sdri. Suli Fatimah sebagai Komisaris;
   Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;
   Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;
   Sdr. Taufan Gestoro sebagai Komisaris Independen.

   Direksi:
   Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;
   Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;
   Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;
   Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;
   Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama atau Direktur WIKA Gedung lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The meeting, with a majority vote of 99.9999986% of the total votes present at the Meeting, resolved:

1. To confirm the honorable dismissal of Ance as an Independent Commissioner of the Company, appointed based on the resolution of Extraordinary GMS on January 15, 2021, effective December 5, 2023. With gratitude for all the contributions of energy and thought made by the person concerned during tenure as an Independent Commissioner of the Company, and with the granting of a full release and discharge (acquit et de charge) at the next Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the relevant term of office;
2. To appoint Taufan Gestoro as an Independent Commissioner effective as of the closing of this GMS, with a term of office in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, with due observance of laws and regulations in the Capital Market sector and any subsequent decisions, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time;
3. With the confirmation of dismissal and appointment of members of Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

   Board of Commissioners:
   Sumadi as President Commissioner;
   Suli Fatimah as Commissioner;
   Danis Hidayat Sumadilaga as Commissioner;
   Joseph Prajogo as Independent Commissioner;
   Taufan Gestoro as Independent Commissioner.

   Board of Directors:
   Hadian Pramudita as President Director;
   Bagus Tri Setyana as Director of Operations I;
   Akhmadi Tricahyono as Director of Operations II;
   Syailendra Ogan as Director of Finance, Human Capital, and Risk Management;
   Dwi Purnomo as Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing.

Granting power and authority to the President Director or other Directors of WIKA Gedung with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the resolution of this agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to state in a separate Notarial Deed and notify the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights in accordance with applicable provisions.

Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan bahwa Perseroan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris harus memiliki integritas dan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Board of Commissioners is a corporate organ tasked with and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors, including ensuring that the Company implements good corporate governance. Board of Commissioners must possess adequate integrity and competence in order to perform its functions effectively. Its supervisory and advisory functions include preventive actions, corrective measures, and temporary suspension in accordance with prevailing regulations.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
      ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

Individuals who may be appointed as members of Board of Commissioners are those who meet the following requirements at the time of appointment and during their tenure:

1. Have good character, morals, and integrity;
2. Be legally competent to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
   a. Have never been declared bankrupt;
   b. Have never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   c. Have never been convicted of a criminal offense that harmed state finances and/or was related to the financial sector; and
   d. Have never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during their tenure:
      i) Failed to hold an Annual GMS; and
      ii) Had their accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit accountability to the GMS; and
4. Have a commitment to comply with laws and regulations;
5. In addition to the above criteria, the appointment of members of Board of Commissioners shall consider integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to at least one management function, adequate knowledge of the Company's line of business, the ability to allocate sufficient time to perform their duties, and other requirements in accordance with applicable laws and regulations.

SELEKSI DAN NOMINASI DEWAN KOMISARIS

Proses seleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan afiliasi terkonsolidasi BUMN menggunakan sistem sebagaimana pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan melalui

SELECTION AND NOMINATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

The selection process for candidates for Board of Commissioners and Board of Directors in consolidated SOE-affiliated companies uses a system similar to the proposal process for Boards of

Talent & Succession Management sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/ MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

MASA JABATAN

Berdasarkan *Board manual*, masa jabatan Dewan Komisaris Adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan alasan:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara;
   d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
   e. Mengundurkan diri.
2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) a, b, dan c di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian dengan alasan sebagaimana butir c dan d di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka RUPS diselenggarakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi lowongan tersebut. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila;
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatan berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Pedoman Dewan Komisaris yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara efektif. Piagam tersebut mengatur antara lain peran, wewenang, tanggung jawab, mekanisme rapat, serta koordinasi dengan Direksi dan organ pendukung. Penyusunannya mengacu pada POJK No. 33/POJK.04/2014, Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan yang berlaku bagi BUMN dan perusahaan terbuka, serta peraturan lain yang relevan dan praktik terbaik GCG. Piagam Dewan

Commissioners and Board of Directors of Subsidiaries through Talent & Succession Management, as regulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/06/2020 concerning amendments to Regulation No. PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries of State-Owned Enterprises.

TERM OF OFFICE

Based on the Board Manual, the term of office of Board of Commissioners is as follows:

1. The term of office is 5 (five) years and members may be reappointed for 1 (one) additional term. However, members may be dismissed by a GMS resolution for the following reasons:
   a. Inability to properly perform their duties;
   b. Failure to comply with laws and regulations and/or the Articles of Association;
   c. Involvement in actions detrimental to the Company and/ or the State;
   d. Being found guilty by a court decision with permanent legal force; and/or
   e. Resignation.
2. In addition to the above, members may be dismissed by the GMS for other reasons deemed appropriate for the interests and objectives of the Company.
3. Decisions for dismissal based on points a, b, and c above shall be made after the concerned individual has been given the opportunity to defend themselves. Dismissal under points c and d constitutes dishonorable discharge.
4. If a vacancy of Board of Commissioners member occurs, a GMS must be held no later than 3 (three) days after the vacancy arises. The position of a Board of Commissioners member ends if:
   a. They pass away;
   b. Their term ends;
   c. They are dismissed by the GMS; and/or
   d. They no longer meet the requirements as stipulated in the Articles of Association and applicable regulations.
5. Board of Commissioners members who cease to hold office, whether before or after their term ends (except due to death), remain responsible for actions for which accountability has not yet been accepted by the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS MANUAL

The Board of Commissioners has a Board Manual that serves as a guideline in carrying out its supervisory and advisory duties effectively. The Manual regulates, among others, roles, authorities, responsibilities, meeting mechanisms, and coordination with the Board of Directors and supporting organs. It is prepared with reference to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014, the Company's Articles of Association, provisions applicable to SOEs and public companies, as well as other relevant regulations and GCG best

Komisaris ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.

Pedoman Dewan Komisaris secara umum mengatur tentang:
1. Tugas, wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris;
2. Hak Dewan Komisaris;
3. Masa Jabatan Dewan Komisaris;
4. Program Pengenalan atau Orientasi Dewan Komisaris;
5. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
6. Rapat Dewan Komisaris;
7. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
8. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris;
9. Hubungan Kerja dengan Direksi;
10. Komite yang membantu Dewan Komisaris; serta
11. Sekretaris Dewan Komisaris.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tata kerja Dewan Komisaris yang terakhir ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Nomor SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 Tentang Perubahan Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada tanggal 11 September 2023.

Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris diperbarui secara berkala. Untuk rincian lebih lanjut tentang pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris Perseroan, silakan kunjungi situs web Perseroan di https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah diatur secara jelas dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Komisaris dan Direksi Tahun 2025 dan dapat dilihat pada halaman 75–77 pada dokumen tersebut, dan dapat diakses pada situs web Perseroan di https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan atau konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) merupakan situasi di mana terdapat pertentangan kepentingan akibat pemanfaatan kedudukan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Perseroan berupaya menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta implikasi lanjutan yang dapat ditimbulkannya, Dewan Komisaris bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan memastikan setiap konflik yang timbul ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dewan Komisaris senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya serta tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak lain yang terkait.
2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat memengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan.

practices. The Manual is reviewed periodically to ensure alignment with regulatory developments and the Company's needs.

In general, the Board Manual governs:
1. Duties, authorities, and obligations of Board of Commissioners;
2. Rights of Board of Commissioners;
3. Term of office;
4. Introduction or orientation programs;
5. Code of ethics;
6. Meetings;
7. Performance evaluation;
8. Conflict of interest;
9. Working relationship with Board of Directors;
10. Supporting committees; and
11. Secretary to Board of Commissioners.

Matters regulated in the Board Manual, most recently established and signed by Board of Commissioners and Board of Directors under Decree No. SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 concerning Amendments to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk on September 11, 2023.

The Board of Commissioners' guidelines and rules of procedure are updated periodically. For further details on the Company's Board Manual, please visit the Company's website at https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

TYPES OF DECISIONS REQUIRING APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

The types of decisions requiring approval from the Board of Commissioners have been clearly stipulated in the2025 Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedure Guidelines and can be found on pages 75–77 of the document, and can be accessed in Company website https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST

A conflict of interest is a situation where there is a clash of interests arising from the misuse of position and authority owned for personal benefit. The Company strives to avoid conflicts of interest involving members of Board of Commissioners.

To prevent conflicts and their potential implications, Board of Commissioners is responsible for establishing policies and ensuring that any conflicts are handled in accordance with applicable laws and regulations.

1. Board of Commissioners members must avoid conflicts of interest and not misuse their position for personal or related parties' interests.
2. Board of Commissioners members must avoid activities that may affect their independence in carrying out their supervisory function over the Company.

3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang memuat kepemilikan sahamnya dan/atau kepemilikan saham anggota keluarganya pada perusahaan lain.
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, hal tersebut harus diungkapkan, dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak diperkenankan terlibat dalam proses pengambilan keputusan Perseroan.

Pernyataan mengenai benturan kepentingan Dewan Komisaris dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perseroan.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Board Manual.

Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima, maka dianggap tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima, tidak terdapat keputusan RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta atau setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris bertindak secara independen dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugasnya. Perseroan senantiasa berupaya menjaga independensi Dewan Komisaris, di mana hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dilakukan secara profesional dan bersifat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kinerja Direksi. Oleh karena itu, independensi sangat diperlukan agar Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat secara bebas dan profesional tanpa adanya benturan kepentingan.

Adapun kriteria independensi Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut :

3. Board of Commissioners members are required to fill a Special Register that disclose their share ownership and that of their family members in other companies.
4. In the event of a conflict, it must be disclosed, and the concerned Board of Commissioners member must not participate in decision-making.

Statements regarding conflicts of interest are included in the Company's Work Plan and Articles of Association.

RESIGNATION MECHANISM

A member of Board of Commissioners has the right to resign from his/her position by submitting written notification of such intention to the Company, with a copy to the Shareholders, other members of Board of Commissioners, and Board of Directors, no later than 30 (thirty) days prior to the effective date of resignation as stipulated in the Board Manual.

If the resignation letter states an effective date that is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to have included an effective date.

If no resolution has been reached by the date requested by the member of Board of Commissioners, or within 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received, the member of Board of Commissioners shall resign automatically on the requested date or after the 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring GMS approval.

INDEPENDENCE OF BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its functions, Board of Commissioners acts independently and has no personal interests that could influence the performance of its duties. The Company consistently strives to maintain the independence of Board of Commissioners. The relationship between Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties and responsibilities is conducted professionally and formally in accordance with applicable regulations.

Board of Commissioners is the Company's organ responsible for overseeing the performance of Board of Directors. Therefore, independence is essential to ensure Board of Commissioners can provide advice freely and professionally without any conflict of interest.

The independence criteria for the Company's Board of Commissioners are as follows:

Aspek Independensi Independence Aspect	Joseph Prayogo	Suli Fatimah	Danis Hidayat Sumadilaga	Taufan Gestoro
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi Has no management relationship in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√	√

Aspek Independensi Independence Aspect	Joseph Prayogo	Suli Fatimah	Danis Hidayat Sumadilaga	Taufan Gestoro
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris Has no family relationship with shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Board of Commissioners	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Direksi Has no financial relationship with shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Board of Directors	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as an administrator of a political party, official, or government official	√	√	√	√

ETIKA JABATAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman tata kerja di mana tertuang prinsip-prinsip berikut ini:

1. Anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman *Good Corporate Governance, Code of Conduct*, serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sebagai pengurus partai politik, calon atau anggota legislatif, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain honorarium, tunjangan, dan fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang bernilai ekonomis kepada klien atau rekanan Perseroan maupun pejabat Pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas tindakan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Anggota Dewan Komisaris harus mampu menjadi teladan yang baik bagi Direksi dan karyawan Perseroan.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
8. Informasi rahasia yang diperoleh selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris tetap harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CODE OF ETHICS

In carrying out its duties and functions, Board of Commissioners refers to the Board Manual, which contains the following principles:

1. Members of Board of Commissioners must comply with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, Code of Good Corporate Governance, Code of Conduct, and established Company policies.
2. Members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions that are restricted by laws and regulations, including as political party officials, candidates or members of the legislature, Regional Heads or Deputy Regional Heads, and other positions that may give rise to conflicts of interest.
3. Members of Board of Commissioners are prohibited from obtaining personal benefits from the Company's activities other than honorarium, allowances, and facilities determined by the GMS.
4. Members of Board of Commissioners are prohibited from giving, offering, or receiving, directly or indirectly, anything of economic value to clients, business partners, or government officials to influence or as compensation for certain actions, in accordance with applicable laws and regulations.
5. Members of Board of Commissioners must avoid actions that may harm the working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Members of Board of Commissioners must serve as good role models for Board of Directors and employees of the Company.
7. Members of Board of Commissioners are obliged to maintain the confidentiality of Company information.
8. Confidential information obtained during their tenure as a member of Board of Commissioners must continue to be kept confidential in accordance with applicable laws and regulations.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Perseroan memastikan bahwa pembentukan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Company ensured that the composition of Board of Commissioners complied with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, including:

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain dan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan *public* lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di emiten atau Perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur lebih ketat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memastikan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan benar.

Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan secara berkala terutama terkait pelaksanaan rencana kerja jangka panjang serta anggaran Perseroan.

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris menjalankan tugas dan Tanggung Jawab mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen lainnya, termasuk memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga lainnya, serta memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, dengan sepengetahuan Direksi, untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, termasuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite tersebut;

1. Members of Board of Commissioners may concurrently serve as members of Board of Directors in a maximum of 2 (two) other issuers or public companies and as members of Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other issuers or public companies.
2. If a member of Board of Commissioners does not concurrently serve as a member of Board of Directors, they may hold positions as a member of Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other issuers or public companies.
3. Members of Board of Commissioners may serve as committee members in a maximum of 5 (five) committees within issuers or public companies where they also serve as members of Board of Directors or Board of Commissioners. However, such concurrent positions must not conflict with other applicable laws and regulations.

In the event of differing provisions between laws and regulations and the Company's Articles of Association regarding concurrent positions, the stricter provisions shall prevail.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

As stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, Board of Commissioners is responsible for supervising the management of the Company by the Board of Directors and ensuring that corporate governance is properly implemented.

The supervisory and advisory roles of Board of Commissioners are carried out periodically, particularly in relation to the implementation of the Company's long-term plans and budget.

As regulated in the Board Manual, the duties and responsibilities of Board of Commissioners include:

1. Examining books, correspondence, and other documents, including verifying cash and other securities, as well as inspecting the Company's assets;
2. Entering premises, buildings, and offices used by the Company;
3. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the management of the Company;
4. Being informed of policies and actions taken or to be taken by the Board of Directors;
5. Requesting the Board of Directors and/or officials under the Board of Directors, with the Board's knowledge, to attend Board of Commissioners meetings;
6. Appointing and dismissing the Secretary to Board of Commissioners;
7. Temporarily suspending members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Establishing the Audit Committee, Nomination, Remuneration and GCG Committee, Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, and other committees as deemed necessary, including appointing and dismissing their members;

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, apabila dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi satu tingkat di bawah Direksi, termasuk Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
12. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan atas hal yang dibahas;
13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

9. Engaging experts for specific purposes and periods at the Company's expense when necessary, in accordance with applicable regulations;
10. Taking management actions of the Company under certain circumstances for a specific period in accordance with the Articles of Association;
11. Approving the appointment and dismissal of organizational structures one level below the Board of Directors, including the Corporate Secretary and/or Head of Internal Audit Unit;
12. Attending Board of Directors meetings and providing views on matters discussed;
13. Exercising other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan ini yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari: 1 (satu) Komisaris Independen sekaligus pelaksana tugas Komisaris Utama, 2 (dua) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen, dengan komposisi sebagai berikut:

COMPOSITION AND STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the number of members of Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the composition of the Company's Board of Commissioners complies with the regulation, consisting of 4 (four) members: 1 (one) Independent Commissioner who also serves as Acting President Commissioner, 2 (two) Commissioners, and 1 (one) Independent Commissioner, with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Februari 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024. Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 29, 2024, confirmed in Deed No. 6 dated February 29, 2024.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Untuk meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, Perseroan telah menentukan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai koordinator Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Memberikan perintah tertulis untuk pemberian tugas khusus kepada anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan rapat Dewan Komisaris, yang menerangkan:
   a. Nama anggota Dewan Komisaris yang diberi tugas;
   b. Sifat dan lingkup pekerjaan;
   c. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
   d. Waktu penugasan; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF PRESIDENT COMMISSIONER

To enhance the effectiveness of Board of Commissioners in supervising the Company, the Company has established the duties and responsibilities of President Commissioner as the coordinator of Board of Commissioners, as follows:

1. Issuing written instructions for the assignment of specific duties to members of Board of Commissioners in accordance with the decisions of Board of Commissioners' meeting, which shall specify:
   a. The name of the member assigned;
   b. The nature and scope of the assignment;
   c. The objectives and targets of the assignment;
   d. The duration of the assignment; and

e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus tersebut.

2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

e. Administrative matters related to the assignment.

2. Convening meetings of Board of Commissioners.
3. Presiding over meetings of Board of Commissioners and joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi. Pembagian tugas masing-masing anggota Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies of the Company carried out by the Board of Directors. The distribution of duties among members of Board of Commissioners is determined by Board of Commissioners, assisted by Secretary to Board of Commissioners.

The duties and responsibilities of each member of Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Assignment Field
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Komisaris Utama: 1. Mengoordinasikan kegiatan terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Utama; 3. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan Komisaris Independen: 1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Direktorat QHSE dan Pemasaran; 3. Mengoordinasikan kegiatan Komite Audit dan Risiko; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya. President Commissioner: 1. Coordinates activities related to the duties carried out by Board of Commissioners; 2. Provides supervision and advice to the Main Directorate; 3. Provides cross-sectoral coordination and interagency relations for the benefit of the Company. Independent Commissioner: 1. Provides cross-sectoral coordination and interagency relations for the benefit of the Company; 2. Provides supervision and advice to the Directorate of QHSE and Marketing; 3. Coordinates the activities of Audit and Risk Committee; 4. Reports to the President Commissioner on all efforts, work, and activities.
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko; 3. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya 1. Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company; 2. Supervise and advise the Directorate of Finance, Human Capital, and Risk Management; 3. Report to the President Commissioner on all efforts, work, and activities.
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Operasi II; 3. Mengoordinasikan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan dan kegiatannya. 1. Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company; 2. Supervise and advise the Directorate of Operations II; 3. Coordinate the activities of Nomination and Remuneration Committee; 4. Report to the President Com
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar lembaga untuk kepentingan Perusahaan; 2. Melakukan pengawasan dan penasihatan Bidang Direktorat Operasi I; 3. Melakukan pengawasan dan penasihatan terkait kepatuhan dan penerapan GCG; 4. Melaporkan kepada Komisaris Utama segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. 1. Conduct cross-sectoral coordination and inter-institutional relations for the benefit of the Company; 2. Supervise and advise the Directorate of Operations I; 3. Supervise and advise regarding compliance and implementation of GCG; 4. Report to the President Commissioner on all efforts, work, and activities.

Pembagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan tidak membebaskan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dan dilakukan secara sirkuler. Pembahasan mengenai keputusan Dewan Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar, *Board Manual, Code of Corporate Governance*. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Rapat internal Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat.

Hal-hal yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan Rencana dan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
3. Aksi Korporasi;
4. Kebijakan Strategis Perusahaan;
5. Implementasi GCG;
6. Pengambilan keputusan lainnya yang terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Usulan yang akan disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu disampaikan kepada Direksi secara tertulis disertai dengan seluruh dokumen pendukung secara lengkap.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melakukan pengambilan 12 kali keputusan pada saat rapat Dewan Komisaris termasuk dalam persetujuan secara sirkuler.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

Informasi Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi, dan RUPS

Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 12 kali rapat, dengan rincian sebagai berikut:

The division of duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners does not relieve the Board of Commissioners of its responsibilities as stipulated in Article 114 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

DECISION-MAKING MECHANISM OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' decision-making mechanism is carried out through Board of Commissioners Meetings and is conducted in a circular manner. Discussions regarding Board of Commissioners decisions are stipulated in the Articles of Association, Board Manual, and Code of Corporate Governance. All Board of Commissioners decisions are made in Joint Meetings of Board of Commissioners with Board of Directors and in internal Board of Commissioners meetings. Decisions may also be made outside of meetings.

Matters requiring a decision by Board of Commissioners are as follows:

1. Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
2. Approval of the Company's Long-Term Work Plan (RJPP);
3. Corporate Actions;
4. Company Strategic Policies;
5. Implementation of GCG;
6. Other decisions related to the Board of Commissioners' supervisory function.

Proposals to be submitted at a Board of Commissioners meeting must first be submitted to the Board of Directors in writing, accompanied by all complete supporting documents.

Throughout 2025, Board of Commissioners made 12 decisions at Board of Commissioners meetings, including circular approvals.

POLICY AND FREQUENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

As stipulated in the Board of Commissioners Manual, Board of Commissioners must convene at least once every two months, and may be held if attended by a majority of all members of Board of Commissioners.

Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is unable to attend, the meeting is chaired by a Commissioner selected by the members of Board of Commissioners present or represented at the meeting. A Board of Commissioners meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of Board of Commissioners is present or represented at the meeting.

Information on the Frequency and Attendance of Board of Commissioners Members in Board of Commissioners Meetings, Joint Board of Commissioners Meetings with Board of Directors, and GMS

Internal Board of Commissioners Meetings

Throughout 2025, Board of Commissioners held 12 meetings, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		
		Jumlah Rapat (kali) Number of Meetings (times)	Jumlah Kehadiran (kali) Number of Attendance (times)	Tingkat Kehadiran Attendance Level (%)
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	12	12	100
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	12	12	100
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	12	12	100
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100

RISALAH RAPAT

Adapun risalah dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

MINUTES OF MEETINGS

The minutes and list of members of Board of Commissioners present at internal Board of Commissioners meetings held throughout the 2025 fiscal year are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Des 2024 • Reviu Pengendalian Intern terkait Tata Kelola Divisi Operasi dan Modular Tahun 2024 • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until December 2024 • Review of Internal Controls related to the Governance of Operations and Modular Division in 2024 • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
2	24 Februari 2025 February 24, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Jan 2025 • Pembahasan usulan perubahan organisasi • Reviu pengendalian intern terkait tata kelola Divisi Pemasaran Tahun 2024 • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until January 2025 • Discussion of proposed organizational changes • Review of internal controls related to the governance of Marketing Division in 2024 • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
3	10 April 2025 April 10, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Feb 2025 • Reviu pengendalian intern terkait tata kelola Divisi Pemasaran Tahun 2025 pada Divisi QSHE dan Divisi SCM • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results as of February 2025 • Review of internal controls related to the 2025 Marketing Division's governance in the QSHE and SCM Divisions • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
4	30 April 2025 April 30, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Maret 2025 • Pembahasan manajemen risiko Maret 2025 • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results as of March 2025 • Discussion of risk management as of March 2025 • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
5	28 Mei 2025 May 28, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d April 2025 • Resume hasil temuan Internal Audit (SPI) • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results as of April 2025 • Summary of Internal Audit (SPI) findings • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
6	25 Juni 2025 June 25, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Mei 2025 • Reviu Pengendalian Intern Divisi Keuangan • Dll • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until May 2025 • Review of Internal Control in the Finance Division • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
7	25 Juli 2025 July 25, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juni 2025 • Pembahasan berkala fungsi yang ada didalam WIKA Gedung (Divisi Pemasaran) • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until June 2025 • Periodic discussion of functions within WIKA Gedung (Marketing Division)	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
8	26 Agustus 2025 August 26, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Juli 2025 • Reviu pengendalian intern Divisi Risk Management Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until July 2025 • Review of Internal Control in the Risk Management Division	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
9	24 September 2025 September 24, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Agustus 2025 • Reviu pengendalian intern Divisi Operasi dan Modular serta Divisi Operasi dan Konsesi Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until August 2025 • Review of Internal Controls for the Operations and Modular Division and the Operations and Concession Division	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
10	30 Oktober 2025 October 30, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d September 2025 • Pembahasan RKA Dekom tahun 2026 • Pembahasan Risiko Periode September 2025 • Dll Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until September 2025 • Discussion of the Board of Commissioners' 2026 Work Plan and Budget (RKA) • Discussion of Risks for September 2025 Period • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Peserta Participants
11	26 November 2025 November 26, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d Oktober 2025 • Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan perseroan s.d Oktober 2025 • Dll Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results until October 2025 • Discussion of the Company's Business and Financial Performance Results until October 2025 • Etc.	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan
12	8 Desember 2025 December 8, 2025	• Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d November 2025 dan Prognosa Desember 2025 • Laporan Hasil Pemeriksaan Internal Audit Divisi Keuangan dan WIKA Solusi Proklamasi • Reviu pengendalian intern Divisi HC dan Divisi Pemasaran Tindak Lanjut Hasil Rapat DEKOM sebelumnya • Follow-up on the Results of Previous Board of Commissioners Meeting • Discussion of the Company's Business Performance Results as of November 2025 and the December 2025 Prognosis • Internal Audit Report of Finance Division and WIKA Solusi Proklamasi • Review of Internal Controls in HC Division and Marketing Division	-	• Joseph Prajogo • Suli Fatimah • Danis H. Sumadilaga • Taufan Gestoro • Apridio R. • Darawati • Diah Sulistiorini • Mohamad Fadila • Devri Setiawan

Keputusan rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Risalah tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang menghadiri rapat maupun yang tidak. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, hal tersebut turut dicantumkan dalam risalah rapat disertai dengan alasan di balik perbedaan pendapat.

Meeting decisions are recorded and properly documented in minutes of the meeting, signed by the meeting chair and a member of Board of Commissioners. These minutes are distributed to all members of Board of Commissioners, both those who attended and those who did not. In the event of a difference of opinion, this is also included in minutes of the meeting, along with the reasons behind the difference of opinion.

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi sebagai bentuk pengenalan terhadap Perseroan. Program Pengenalan ini dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke area operasional Perseroan atau program lainnya.

Tujuannya agar anggota baru Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik. Program Pengenalan tersebut meliputi:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi GCG
2. Gambaran Perusahaan secara lengkap
3. Penjelasan terkait kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit
4. Penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program orientasi dikarenakan komposisi Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS ORIENTATION PROGRAM

A new member of Board of Commissioners participates in an orientation program as a form of introduction to the Company. This orientation program can include presentations, meetings, visits to the Company's operational areas, or other programs.

The objective is to ensure that new member of the Board of Commissioners is equipped to carry out his/her duties and responsibilities effectively. The orientation program includes:

1. GCG principles and implementation
2. A comprehensive overview of the Company
3. Explanation of delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and audit committee
4. Explanation of duties and responsibilities of the Commissioners and Directors
5. Various applicable laws and regulations and Company policies

In 2025, the Company did not hold an orientation program because the composition of Board of Commissioners remained unchanged from the previous year.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, Perseroan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik Dewan Komisaris dan kebutuhan strategis Perseroan, sehingga materi dan agenda yang disusun relevan untuk mendukung peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian arahan strategis.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT FOR BOARD OF COMMISSIONERS

Policy

As stipulated in the Board Manual, the Company organized competency development program for members of Board of Commissioners throughout 2025. This program was designed with the specific needs of Board of Commissioners and the Company's strategic objectives in mind, ensuring that the materials and agenda were relevant to support the Board of Commissioners' roles and responsibilities in oversight and providing strategic direction.

The training and competency development programs participated in by Board of Commissioners during 2025 were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Name	Waktu Date	Organizer Name
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	-	-	-
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV	Pelatihan: 27 – 28 Agustus 2025 Ujian : 3 September 2025 Training: August 27-28, 2025 Exam: September 3, 2025	PT. RAP Indonesia
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	11 - 12 Desember 2025 December 11-12, 2025	RAP Learning Center
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Business Continuity Based on ISO 22301	20 Oktober 2025 - 22 Oktober 2025 October 20, 2025 - October 22, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungnya sesuai dengan pedoman tata kerja. Secara berkala Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi atas pencapaian target bisnis dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Rapat internal, Dewan Komisaris memberikan beragam rekomendasi dan masukan kepada Direksi, sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan nasihat yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dan sejalan dengan maksud serta tujuan Perseroan;
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IMPLEMENTATION IN 2025

Throughout 2025, Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities in accordance with the work procedures guidelines. Board of Commissioners periodically advised the Board of Directors on achieving business targets while maintaining prudent risk management and complying with applicable laws and regulations.

Through internal meetings, Board of Commissioners provided various recommendations and input to the Board of Directors, as follows:

1. Provided advice to the Board of Directors regarding the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, the Articles of Association and GMS resolutions, and applicable laws and regulations;
2. Provided advice aimed at the interests of the Company and in line with the Company's purposes and objectives;
3. Supervised the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association and GMS resolutions;

4. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS;
5. Memenuhi tanggung jawab untuk melakukan analisis dan penelaahan atas laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi;
6. Bertanggung jawab atas evaluasi kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Di samping itu, Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan kunjungan ke proyek dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pembangunan proyek konstruksi bangunan selama tahun 2025; dan
7. Memberikan rekomendasi dan masukan lainnya sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS SERTA DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & GCG, serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas evaluasi kinerja ketiga Komite tersebut, yang dilaksanakan secara terstruktur dengan mengacu pada prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Prosedur Penilaian Kinerja Komite

Penilaian kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme yang terstruktur dan dilaksanakan secara berkala sepanjang tahun. Prosedur penilaian kinerja Komite mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Program Kerja Tahunan: di awal tahun, masing-masing Komite menyusun Program Kerja Tahunan yang memuat rencana kegiatan, target capaian, dan jadwal pelaksanaan selama satu tahun buku. Program Kerja Tahunan Komite ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan penilaian kinerja.

2. Pemantauan Berkala (Triwulanan): Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pelaksanaan Program Kerja Tahunan masing-masing Komite setiap triwulan melalui forum Rapat Dewan Komisaris. Dalam rapat tersebut, setiap Komite menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya, termasuk capaian program kerja, kegiatan yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut.
3. Evaluasi Kinerja Tahunan: pada akhir tahun buku, Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja komprehensif atas masing-masing Komite. Evaluasi ini mempertimbangkan seluruh aspek kinerja sepanjang tahun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi didokumentasikan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi: hasil evaluasi disampaikan kepada masing-masing Komite sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi Dewan Komisaris atas kinerja Komite menjadi masukan dalam penyusunan Program Kerja Tahunan periode selanjutnya, sehingga membentuk siklus perbaikan yang berkesinambungan.

Seluruh proses penilaian kinerja Komite dijalankan dengan mengacu pada Pedoman Kerja *(Board Manual)* Dewan Komisaris yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap organ-organ pendukung Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja Komite dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan sebagai bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris.

4. Submitted accountability to the GMS;
5. Fulfilled the responsibility for analyzing and reviewing the annual report prepared by the Board of Directors;
6. Responsible for evaluating the performance of committees under Board of Commissioners. In addition, Board of Commissioners and Board of Directors conducted project visits to oversee the construction of building projects throughout 2025; and
7. Provided recommendations and other input as needed by the Company.

BOARD OF COMMISSIONERS' ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by three Committees, namely Audit Committee, Nomination, Remuneration & GCG Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The Board of Commissioners bears full responsibility for evaluating the performance of these Committees, which is conducted in a structured manner based on established procedures and assessment criteria.

Committee Performance Assessment Procedures

The performance of Committees is assessed by the Board of Commissioners through a structured mechanism carried out periodically throughout the year. The Committee performance assessment process consists of the following stages:

1. Annual Work Program Establishment: At the beginning of each year, each Committee prepares an Annual Work Program outlining planned activities, performance targets, and implementation schedules for the fiscal year. The Annual Work Program is reviewed and approved by the Board of Commissioners and serves as the primary basis for performance evaluation.
2. Periodic Monitoring (Quarterly): The Board of Commissioners monitors the implementation of each Committee's Annual Work Program on a quarterly basis through meetings of the Board of Commissioners. During these meetings, each Committee presents progress reports covering work program achievements, activities undertaken, challenges encountered, and follow-up actions.
3. Annual Performance Evaluation: At the end of the fiscal year, the Board of Commissioners conducts a comprehensive evaluation of the performance of each Committee. The evaluation considers all aspects of performance throughout the year based on predetermined assessment criteria. The evaluation results are documented in the minutes of the Board of Commissioners' meetings.
4. Follow-up on Evaluation Results: The results of the evaluation are communicated to each Committee as feedback for performance improvement in the subsequent period. Recommendations provided by the Board of Commissioners serve as input for the preparation of the next Annual Work Program, thereby creating a cycle of continuous improvement.

The entire Committee performance assessment process is conducted in accordance with the Board of Commissioners' Board Manual, which governs the oversight mechanism for supporting organs of Board of Commissioners. The results of Committee performance evaluations are reported to the Shareholders through the Annual Report as part of the Board of Commissioners' accountability.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite

Dewan Komisaris menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi anggota Komite, dan kehadiran dalam rapat. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang akurat atas kontribusi masing-masing Komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Committee Performance Assessment Criteria

The Board of Commissioners has established performance assessment criteria for the Committees covering three primary dimensions: performance achievements during the fiscal year, competencies of Committee members, and meeting attendance. The assessment is conducted comprehensively to provide an accurate evaluation of each Committee's contribution in supporting the oversight function of Board of Commissioners.

Dimensi Penilaian Assessment Dimension	Kriteria Criteria	Bobot Weight
Capaian Kinerja Selama Tahun Buku Performance Achievements During the Fiscal Year	Tingkat penyelesaian Program Kerja Tahunan; kualitas dan ketepatan waktu penyampaian rekomendasi, pendapat, dan laporan kepada Dewan Komisaris; efektivitas tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi sebelumnya; serta kontribusi substantif dalam mendukung pengambilan keputusan Dewan Komisaris. The level of completion of Annual Work Program; the quality and timeliness of submission of recommendations, opinions, and reports to the Board of Commissioners; the effectiveness of follow-up on previous findings and recommendations; and substantive contributions in supporting the Board of Commissioners' decision-making.	Utama Main
Kompetensi Anggota Komite Committee Member Competencies	Penguasaan materi dan kualitas analisis dalam setiap penugasan; keluasan wawasan terkait isu-isu strategis, regulasi, dan praktik terbaik tata kelola perusahaan; serta upaya pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi profesi yang relevan. Mastery of material and quality of analysis in each assignment; breadth of insight regarding strategic issues, regulations, and best practices in corporate governance; and efforts to develop competencies through relevant professional training and certification.	Penunjang Supporting
Kehadiran dalam Rapat Meeting Attendance	Tingkat kehadiran anggota dalam rapat Komite dan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sepanjang tahun buku; keaktifan dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan rapat; serta kualitas partisipasi dalam pembahasan agenda rapat. Member attendance at Committee meetings and coordination meetings with Board of Commissioners throughout the fiscal year; active participation in discussions and decision-making process of the meetings; and the quality of participation in deliberations on meeting agendas.	Penunjang Supporting

Di samping tiga dimensi utama tersebut, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan aspek koordinasi dan sinergi antar-Komite dalam menjalankan fungsi pengawasan secara terintegrasi, serta kepatuhan pelaksanaan tugas Komite terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Pedoman Kerja yang berlaku.

In addition to these three main dimensions, the Board of Commissioners also considers coordination and synergy between Committees in carrying out their oversight function in an integrated manner, as well as compliance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, and Work Guidelines.

Hasil Penilaian Kinerja Komite Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Ringkasan hasil penilaian kinerja masing-masing Komite adalah sebagai berikut:

2025 Committee Performance Assessment Results

Based on the evaluation conducted throughout 2025, the Board of Commissioners assesses that the performance of all Committees under Board of Commissioners has been sound and effective in supporting the implementation of Board of Commissioners' oversight function. A summary of the performance assessment results for each Committee is as follows:

Komite Committee	**Capaian Program Kerja** Achievement of Work Program	**Kehadiran Rapat** Meeting Attendance (%)	**Penilaian Dewan Komisaris** Board of Commissioners' Assessment
Komite Audit Audit Committee	Seluruh program kerja terlaksana, termasuk penelaahan laporan keuangan, evaluasi auditor eksternal, dan pemantauan tindak lanjut temuan audit internal. All work programs have been implemented, including financial report reviews, external auditor evaluations, and follow-up monitoring of internal audit findings.	100% (30/30 rapat) 100% (30/30 meetings)	Baik Good
Komite Nominasi, Remunerasi & GCG Nomination, Remuneration & GCG Committee	Program kerja tahunan terealisasi, mencakup evaluasi kebijakan remunerasi, penilaian kompetensi calon anggota organ, dan pemantauan penerapan GCG. The annual work program has been realized, including evaluation of remuneration policies, competency assessments of prospective organ members, and monitoring of GCG implementation.	100% (23/23 rapat) 100% (23/23 meetings)	Baik Good
Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	Pelaksanaan tugas berjalan efektif, meliputi evaluasi berkala Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, pemantauan implementasi manajemen risiko, dan sosialisasi kepada unit kerja. Task implementation was effective, including periodic evaluation of Integrated Governance Guidelines, monitoring of risk management implementation, and dissemination to work units.	100% (23/23 rapat) 100% (23/23 meetings)	Baik Good

Hasil penilaian kinerja Komite di atas menjadi salah satu bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham mengenai susunan keanggotaan Komite pada periode mendatang, serta dalam merumuskan Program Kerja Komite untuk tahun buku berikutnya.

The results of the Committee's performance assessment above are one of the Board of Commissioners' considerations in providing recommendations to Shareholders regarding the composition of the Committee's membership in the coming period, as well as in formulating the Committee's Work Program for the following fiscal year.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham sehingga dapat memengaruhi kemampuannya bertindak independen. Komisaris Independen mengambil keputusan secara objektif dan independen tanpa adanya tekanan dan kepentingan pihak mana pun.

JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMISARIS INDEPENDEN

Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut di mana dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, 2 diantaranya adalah Komisaris Independen. Secara persentase jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari total anggota Dewan Komisaris. Anggota Komisaris Independen Perusahaan adalah Joseph Prajogo dan Taufan Gestoro. Penjelasan terkait profil Komisaris Independen dijelaskan di bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris.

MASA JABATAN

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam menentukan Komisaris Independen, Perseroan berpedoman pada Pasal 21 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Landasan Perseroan dalam mengangkat Komisaris Independen memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;

As stipulated in OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and outlined in the Board of Commissioners Manual, an Independent Commissioner is a member of Board of Commissioners from outside the Issuer or Public Company who has no financial, management, share ownership, and/or family relationships with other members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, and/or shareholders that could affect their ability to act independently. Independent Commissioners make decisions objectively and independently without any pressure or interest from any party.

NUMBER AND COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The Company has complied with these requirements, with two of the four members of Board of Commissioners being Independent Commissioners. In percentage terms, Independent Commissioners represent 50% of the total members of Board of Commissioners. The Company's Independent Commissioners are Joseph Prajogo and Taufan Gestoro. Further details regarding their profiles are provided in the Company Profile section under the Board of Commissioners Profile.

TERM OF OFFICE

An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms may be reappointed for a subsequent term, provided that the Independent Commissioner declares their continued independence to the GMS. If an Independent Commissioner also serves on the Audit Committee, they may only be reappointed to the Audit Committee for 1 (one) additional term.

CRITERIA FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

In determining Independent Commissioners, the Company refers to Article 21 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Company applies the following criteria in appointing Independent Commissioners:

1. Not an individual who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the subsequent term;
2. Does not own shares, either directly or indirectly, in the Company;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perusahaan.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Terkait dengan aspek independensi, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

3. Has no affiliation with the Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the Company's major shareholders;
4. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's main business activities.

INDEPENDENCE STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER

With regard to independence, the Company's Independent Commissioners have fulfilled the independence requirements as stipulated in the Company's Articles of Association. The independence statement of each Independent Commissioner is in line with Article 25 paragraph (1) of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as follows:

Persyaratan Independensi Independence Criteria	**Joseph Prajogo**	**Taufan Gestoro**
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya. Is not a person who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the following term.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold any shares, directly or indirectly, in the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan. Has no affiliation with the Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholders of the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perusahaan. Has no any direct or indirect business relationships related to the Company's core activities.	√	√

Direksi
Board of Directors

Direksi sebagai organ utama dalam struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan arah strategis serta mengelola kegiatan usaha Perseroan melalui perumusan dan implementasi berbagai strategi perusahaan. Setiap anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengurusan Perseroan tetap menjadi tanggung jawab kolektif seluruh anggota Direksi.

Direksi juga berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan atas segala peristiwa dan tindakan hukum, dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan kewenangannya, Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan pengurusan Perseroan dilaksanakan untuk kepentingan terbaik Perseroan serta sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan.

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; dan
      ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan.
   f. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The Board of Directors, as a key organ in the Good Corporate Governance (GCG) structure, is responsible for determining the Company's strategic direction and managing its business activities through the formulation and implementation of various corporate strategies. Each member of Board of Directors performs their duties and makes decisions in accordance with the established division of duties and authority; however, overall management of the Company remains collective responsibility of the entire members of Board of Directors.

The Board of Directors is also authorized to represent the Company both in and out of court in all legal matters and actions, subject to limitations stipulated in applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). In exercising its authority, the Board of Directors is responsible for ensuring that all management actions are carried out in the best interests of the Company and in line with the Company's purposes and objectives.

CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

Individuals who may be appointed as members of Board of Directors are those who meet the following requirements at the time of appointment and during their tenure:

1. a. Have good character, morals, and integrity;
2. b. Be legally competent to perform legal acts;
3. c. Within 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
   a. Have never been declared bankrupt;
   b. Have never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   c. Have never been convicted of a criminal offense that harmed state finances and/or was related to the financial sector; and
   d. Have never served as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during their tenure:
      i) Failed to hold an Annual GMS; and
      ii) Had their accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit accountability as a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and
   e. Have a commitment to comply with laws and regulations;
   f. In addition to the above criteria, the appointment of members of Board of Directors shall consider integrity, dedication, understanding of corporate management issues related to at least one management function, adequate knowledge of the Company's business sector, the ability to allocate sufficient time to perform their duties, and other requirements in accordance with applicable laws and regulations.

SELEKSI DAN NOMINASI DIREKSI

Proses seleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan afiliasi terkonsolidasi BUMN menggunakan sistem sebagaimana pengusulan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan melalui *Talent & Succession Management* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

SELECTION AND NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS

The selection process for candidates for Board of Commissioners and Board of Directors in consolidated SOE-affiliated companies follows the Talent & Succession Management system, as regulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/06/2020, which amends Regulation No. PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of SOE Subsidiaries.

MASA JABATAN

Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014 dan *Board manual*, masa jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan.

TERM OF OFFICE

Based on OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 and the Board Manual, the term of office of Board of Directors is as follows:

1. Members of Board of Directors may be appointed and dismissed by the GMS;
2. Members are appointed for a specific term and may be reappointed;
3. One term of office is set at 5 (five) years or until the closing of the Annual GMS at the end of the term.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi, Perseroan berpedoman pada Piagam Direksi sehingga Direksi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Isi dari pedoman kerja Direksi berpedoman pada POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait BUMN dan perusahaan terbuka serta peraturan-peraturan lain yang relevan serta praktik-praktik terbaik GCG. Pedoman Direksi secara umum mengatur tentang:

1. Tugas, wewenang dan Kewajiban Direksi;
2. Komposisi dan Pembagian Tugas Antar Direksi;
3. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi;
4. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Direksi;
5. Kriteria dan Pengangkatan Direksi;
6. Program Pengenalan atau Orientasi Direksi;
7. Pengembangan Direksi;
8. Etika Jabatan Direksi;
9. Pengelolaan Keuangan Perusahaan
10. Rapat Direksi;
11. Evaluasi Kinerja Direksi;
12. Benturan Kepentingan Direksi;
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris;
14. Sistem Pengendalian Internal;
15. Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Direksi;
16. Jabatan Anggota Direksi Lowong;
17. Berakhirnya Jabatan Direksi.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tata kerja Direksi yang terakhir ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Nomor SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 Tentang Perubahan *Board Manual* PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk pada tanggal 11 September 2023.

BOARD OF DIRECTORS MANUAL

In carrying out its duties and responsibilities, the Company's Board of Directors is guided by the Board Manual, hence the Board can carry out its functions effectively. The contents of the Board Manual refer to POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company's Articles of Association, regulations related to SOEs and public companies as well as other relevant regulations and GCG best practices. The Board Manual generally governs:

1. Duties, authorities, and obligations of Board of Directors;
2. Composition and division of duties among Directors;
3. Establishment of Company policies;
4. Delegation of duties and authority;
5. Criteria and appointment of Directors;
6. Orientation programs;
7. Development of Directors;
8. Code of ethics;
9. Financial management;
10. Board of Directors meetings;
11. Performance evaluation;
12. Conflict of interest;
13. Working relationship with Board of Commissioners;
14. Internal control system;
15. Dismissal and resignation mechanisms;
16. Vacancies in Board of Directors;
17. End of term of office.

Matters regulated in the Board Manual, most recently established and signed by Board of Commissioners and Board of Directors under Decree No. SK.02.01/A.KOM.WG.05533/2023 concerning Amendments to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk on September 11, 2023.

Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris diperbarui secara berkala. Untuk rincian lebih lanjut tentang pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris Perseroan, silakan kunjungi situs web Perseroan di https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Perseroan menerapkan beberapa prinsip untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan dengan langkah -langkah sebagai berikut:

1. Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip, yaitu:
   a. Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat;
   b. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat memengaruhi independensi nya dalam pengambilan keputusan;
   c. Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut;
2. Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Apabila terjadi sesuatu hal, di mana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; dan
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi;
   b. Adanya perubahan strategi bisnis;
   c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau keuangan Negara;
   e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

The Board guidelines and rules of procedure are updated periodically. For further details on the Company's Board Manual, please visit the Company's website at https://www.wikagedung.co.id/gcg/pedoman-gcg

MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

The Company applies several principles to prevent conflicts of interest and their potential implications, including:

1. Board of Directors must avoid potential conflicts of interest in carrying out their duties. To prevent this, Board of Directors must adhere to several principles, namely:
   a. Board of Directors must maintain and complete a Special Register containing the share ownership of themselves and/or their family in other companies, truthfully and accurately;
   b. Board of Directors must avoid any activity that could affect their independence in decision-making;
   c. They may not participate in any procurement activity involving a company in which they or their family have significant share ownership or a financial interest in the transaction;
2. Board of Directors must provide a statement regarding any conflict of interest regarding matters contained in the Company's Work Plan and Budget. If an event occurs where the interests of the Company conflict with the interests of a member of Board of Directors, then, with the approval of the Commissioner, the Company will be represented by another member of Board of Directors. If the conflict of interest involves all members of Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or a person appointed by the Board of Commissioners; and
3. In the absence of a Board of Commissioners, the General Meeting of Shareholders shall appoint one or more persons to represent the Company in carrying out the aforementioned duties.

RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

The mechanism for resignation and dismissal of Board of Directors is as follows:

1. Members of Board of Directors may be dismissed at any time based on a resolution of the GMS/Minister, stating the reasons.
2. The grounds for dismissal of members of Board of Directors as referred to in paragraph (1) are as follows:
   a. Unable to fulfill their obligations as agreed in the Management Contract and/or the Board of Directors' annual management contract;
   b. Changes in business strategy;
   c. Unable to carry out their duties properly;
   d. Involved in actions detrimental to the company and/or state finances;
   e. Violating provisions of laws and/or regulations and/or the articles of association;

f. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara;
g. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi;
i. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.

3. Selain alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

4. Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemberhentian Direksi memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.
5. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Masa jabatannya berakhir;
   c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
   d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.
6. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
7. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
   b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
   c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
   d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;

f. Having been named a suspect or defendant by the authorities in actions detrimental to the company and/or state finances;
g. Committing an act that violates ethics and/or propriety;
h. Committing an act that violates the Board of Directors' code of ethics;
i. Being found guilty by a legally binding court decision; or
j. Permanently impeded, including due to serious illness or prolonged illness.

3. In addition to the reasons for dismissal of Directors as referred to in paragraph (2), members of Board of Directors of a State-Owned Enterprise may be dismissed for other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the benefit of the company's interests and objectives.
4. In addition to the reasons for dismissal as referred to in paragraphs (2) and (3), the dismissal of a Director shall take into account the reasons stipulated in the company's articles of association.
5. A member of Board of Directors' office shall terminate if:
   a. He/she passed away;
   b. His/her term of office ends;
   c. He/she is dismissed based on a decision of the GMS/Minister; and/or
   d. He/she no longer meets the requirements as a Director based on the provisions of the articles of association and laws and regulations, including prohibited concurrent positions.
6. For members of Board of Directors who resign before or after the end of their term of office, unless they resign due to death, they are required to submit an accountability report for their actions for which the GMS has not yet accepted the accountability report.
7. Members of Board of Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners at any time, stating the reasons therefor, if they act in violation of the Company's Articles of Association, or if there are indications of committing actions detrimental to the Company, or neglecting their obligations, or if there are urgent reasons for the Company, taking into account the following provisions:
   a. Such temporary suspension must be notified in writing to the relevant member of Board of Directors, along with the reasons for such action, with a copy to the Board of Directors;
   b. The notification referred to in letter a must be submitted no later than 2 (two) business days after the temporary suspension is determined;
   c. A member of Board of Directors who is temporarily suspended is not authorized to manage the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, and to represent the Company both inside and outside the court;
   d. Within a period of no later than 90 (ninety) days after the temporary suspension, the Board of Commissioners must hold a GMS to revoke or confirm the decision on the temporary suspension;

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;

8. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
9. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
10. Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.
11. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
12. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
13. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
14. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
15. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    i) Keputusan pemberhentian sementara; dan
    ii) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

INDEPENDENSI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Sebagaimana tertuang dalam pedoman kerja Direksi, Perseroan telah menetapkan hal-hal yang perlu dijaga bagi Direksi dalam mengelola Perseroan, diantaranya dalam hal:

1. Direksi wajib mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang timbul berdasarkan pertimbangan independen;
2. Setiap hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam pengelolaan Perseroan merupakan hubungan yang bersifat formal atau harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjaga independensi Direksi sebagai salah satu Organ Perusahaan.

e. If the GMS period as referred to in letter d has lapsed or the GMS is unable to make a decision, the temporary suspension shall be void;

8. The limitation of authority in letter c of this paragraph shall apply from the date of the temporary dismissal decision by the Board of Commissioners until:
9. There is a GMS decision that confirms or cancels the temporary dismissal referred to in letter d of this paragraph; or
10. The expiry of the period referred to in letter d of this paragraph.
11. In the GMS as referred to in letter d of this paragraph, the member of Board of Directors concerned is given the opportunity to defend himself/herself;
12. The temporary dismissal cannot be extended or re-established for the same reason, if the temporary dismissal is declared null and void as referred to in letter e of this paragraph;
13. If the GMS cancels the temporary dismissal or the circumstances referred to in letter e of this paragraph arise, the member of Board of Directors concerned is obliged to resume his/her duties as intended;
14. If the GMS confirms the decision to suspend the temporary dismissal, the member of Board of Directors concerned is permanently dismissed;
15. If the temporarily suspended member of Board of Directors fails to attend the GMS after being summoned in writing, the temporarily suspended member of Board of Directors is deemed not to have exercised his/her right to defend himself/herself at the GMS and to have accepted the GMS;
16. The Company is required to disclose information to the public and submit to the OJK regarding:
    i) The decision on temporary dismissal; and
    ii) The results of the GMS to revoke or confirm the decision on temporary dismissal as referred to in letter d of this paragraph, or information regarding the cancellation of the temporary dismissal by the Board of Commissioners due to the failure to hold a GMS until the expiration of the period referred to in letter e of this paragraph, no later than 2 (two) business days after the event occurs.

INDEPENDENCE OF BOARD OF DIRECTORS

As stated in the Board of Directors manual, the Company has established the following principles that Board of Directors must adhere to when managing the Company:

1. Board of Directors is required to make policies or decisions regarding any issues that arise based on independent considerations;
2. Every relationship between Board of Directors and Board of Commissioners, in relation to their respective duties and responsibilities in managing the Company, is formal and must always be based on a mechanism or accountable correspondence to maintain the independence of Board of Directors as a corporate organ.

Aspek Independensi Independence Aspect	Hadian Pramudita	Hartanto Karti Raharjo	Tomo Dwihasputro	Dwi Purnomo	Bagus Tri Setyana
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Does not have any share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Direksi Does not have any family relationship with shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or fellow members of Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Direksi Does not have any financial relationship with shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and/ or fellow members of Board of Directors	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as an administrator of a political party, official, or government official	√	√	√	√	√

ETIKA JABATAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi berpedoman pada Pedoman tata kerja Direksi di mana tertuang prinsip-prinsip berikut ini:

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanggung jawab untuk kepentingan serta usaha Perseroan.
2. Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman *Good Corporate Governance, Code of Conduct*, serta kebijakan internal Perseroan yang telah ditetapkan.
3. Direksi dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang bernilai kepada klien, mitra usaha, atau pejabat pemerintah dengan tujuan memengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas tindakan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji, tunjangan, dan kompensasi berbasis saham yang diterima sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS.
5. Setiap anggota Direksi wajib menghormati hak, tugas, dan wewenang anggota Direksi lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan.
6. Direksi menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan kerja di antara sesama anggota Direksi maupun hubungan kerja dengan Dewan Komisaris.
7. Direksi wajib menjadi teladan yang baik bagi seluruh karyawan Perseroan, baik dari segi integritas, moral, maupun profesionalisme.
8. Direksi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi Perseroan serta memastikan penggunaannya hanya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

CODE OF ETHICS

In carrying out its duties and functions, the Board of Directors is guided by the Board Manual, which outline the following principles:

1. Each member of Board of Directors is required to carry out their duties in good faith, with due care, and responsibility for the interests and business of the Company.
2. Board of Directors is required to comply with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Code of Good Corporate Governance, the Code of Conduct, and the Company's established internal policies.
3. Board of Directors is prohibited from giving, offering, or accepting, directly or indirectly, anything of value to clients, business partners, or government officials with the aim of influencing decisions or as compensation for certain actions that violate applicable laws and regulations.
4. Board of Directors is prohibited from taking personal advantage of the Company's activities other than the salary, allowances, and share-based compensation received as a member of Board of Directors based on a resolution of the GMS.
5. Each member of Board of Directors is required to respect the rights, duties, and authorities of other members of Board of Directors in managing the Company.
6. Board of Directors avoids actions that could damage working relationships among fellow members of Board of Directors or with Board of Commissioners.
7. Board of Directors is obliged to be a good role model for all Company employees, both in terms of integrity, morals, and professionalism.
8. Board of Directors is responsible for maintaining the confidentiality of Company information and ensuring that it is used solely for the benefit of the Company in accordance with their authority.

9. Informasi rahasia yang diperoleh selama menjabat sebagai anggota Direksi tetap wajib dirahasiakan meskipun yang bersangkutan telah tidak lagi menjabat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam pedoman kerja Direksi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk itu termasuk karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
3. Mengatur ketentuan tentang karyawan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;
5. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang perusahaan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. Melakukan segala Tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar serta keputusan RUPS.

KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah Direksi Perseroan kini telah memenuhi peraturan yang berlaku yakni Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 2 ayat 1 di mana Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Komposisi

9. Confidential information obtained during their tenure as members of Board of Directors must remain confidential even after the relevant member has retired, in accordance with applicable laws and regulations.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to management for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both inside and outside the court regarding all matters and events, subject to the limitations stipulated in the Board Manual.

In carrying out these duties, the Board of Directors has the following rights and authorities:

1. Establishing policies deemed appropriate for the management of the Company;
2. Arranging the transfer of the Board of Directors' authority to represent the Company inside and outside the court to a designated person or several persons, including Company employees, either individually or jointly, and/or other entities;
3. Regulate employee provisions, including the determination of wages, pensions, old-age security, and other income for Company employees in accordance with applicable laws and regulations;
4. Appoint and dismiss Company employees in accordance with Company labor regulations and laws and regulations;
5. Appoint or dismiss the Corporate Secretary or Head of Internal Audit Unit with the approval of Board of Commissioners;
6. Write off bad debts in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association, which are then reported to the Board of Commissioners and accounted for in the Annual Report;
7. No longer collect interest, fines, fees, and other receivables other than the principal amount incurred for the restructuring and/or settlement of receivables, and undertake other actions in the settlement of the Company's receivables, with the obligation to report to the Board of Commissioners, the provisions and reporting procedures for which are determined by the Board of Commissioners;
8. Perform all other actions and deeds related to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and events, subject to limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and resolutions of the GMS.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

The composition and number of current Board of Directors of the Company has complied with applicable regulations, namely Article 2, paragraph 1 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which stipulates that the Board of Directors of Issuers

Direksi Perusahaan telah memenuhi ketentuan ini yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur. Penjelasan terkait dengan komposisi Direksi telah dijelaskan pada tabel di bawah ini:

or Public Companies must consist of at least two (2) members. The composition of the Company's Board of Directors complies with this requirement, with a total of five (5) members: one President Director and four (4) directors. The composition of Board of Directors is outlined in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 19 April 2022 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 5 tanggal 19 April 2022. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on April 19, 2022, confirmed in Deed No. 5 dated April 19, 2022
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Mei 2024 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 20 Mei 2024. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 20, 2024, confirmed in Deed No. 8 dated May 20, 2024.
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 21 Mei 2025 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 Mei 2025. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 21, 2025, confirmed in Deed No. 2 dated May 23, 2025.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 10 Mei 2023 dan dikukuhkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 10 Mei 2023. Resolution of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on May 10, 2023, confirmed in Deed No. 2 dated May 10, 2023.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI DAN NOMENKLATUR JABATAN

Seperti yang tertuang dalam Pedoman Kerja Direksi, Perseroan telah menetapkan komposisi Perusahaan terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran, serta Direktur keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK.01.01/A.DIR.WG.09838/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT WIjaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

DIVISION OF DUTIES OF BOARD OF DIRECTORS AND POSITION NOMENCLATURE

As stipulated in the Board Manual, the Company has established a composition consisting of President Director, Director of Operations I, Director of Operations II, Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing, and Director of Finance, Human Capital, and Risk Management.

The division of duties and authorities of Board of Directors is stipulated in Decree No. SK.01.01/A.DIR.WG.09838/2024 dated August 1, 2024, concerning the Division of Duties and Responsibilities of Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, as described in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Assignment Field
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	Mengoordinasikan dan mengoptimalkan peran serta fungsi di antara anggota Direksi, mengelola, mengembangkan, dan menumbuhkan usaha Perseroan sesuai dengan visi, misi rencana strategis dan target Perseroan, serta senantiasa mengupayakan peningkatan sinergi sumber daya yang dimiliki Perseroan secara efisien dan efektif; dan Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini Sekretariat Perseroan dan Pengawas Intern. Coordinating and optimizing the roles and functions among members of Board of Directors, as well as managing, developing, and growing the Company's business in line with the Company's vision, mission, strategic plans, and targets, while continuously striving to enhance the synergy of the Company's resources in an efficient and effective manner; and Carrying out management and supervision of functions under his/her coordination, namely the Corporate Secretariat and Internal Audit.

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Assignment Field
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini *Operation Division, Operation and Modular Division* serta Pembinaan Anak Perusahaan Perseroan dan Entitas Asosiasi Perseroan yaitu PT Patra Wijaya Realtindo. Carrying out management and supervision of functions under his/her s coordination, namely the Operation Division and Operation and Modular Division, as well as overseeing the Company's Subsidiaries and Associated Entities, namely PT Patra Wijaya Realtindo.
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini Operation and Concession Division, Transformation and Business Portfolio Development Division, Information Technology Division serta Pembinaan Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi Perseroan, yakni PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, PT WEGE Solusi Proklamasi dan PT Wijaya Karya Bitumen. Carrying out management and supervision of functions under his/her coordination, namely the Operation and Concession Division, Transformation and Business Portfolio Development Division, and Information Technology Division, as well as overseeing the Company's Subsidiaries and Associated Entities, namely PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, PT WEGE Solusi Proklamasi, and PT Wijaya Karya Bitumen.
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi di bawahnya, dalam hal ini Quality, Safety, Health and Environment Division, Supply Chain Management Division, Engineering Division serta *Marketing Division.* Carrying out management and supervision of functions under his/her coordination, namely the Quality, Safety, Health and Environment Division, Supply Chain Management Division, Engineering Division, and Marketing Division.
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, *Human Capital* dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Melakukan pengurusan dan pembinaan untuk fungsi dibawahnya, dalam hal ini *Finance Division, Human Capital Division* dan *Project Management Office and Risk Management Division* serta *Legal and Contract Management Division.* Carrying out management and supervision of functions under his/her coordination, namely the Finance Division, Human Capital Division, Project Management Office and Risk Management Division, as well as Legal and Contract Management Division.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi merupakan pertemuan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan.

Kebijakan Rapat Direksi

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi, Perseroan menetapkan kebijakan penyelenggaraan rapat Direksi diantaranya sebagai berikut:

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau bilamana berhalangan hadir, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyelenggarakan sebanyak 25 Kali rapat Direksi. Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors Meeting is a meeting held by the Company's Board of Directors in accordance with its duties and functions to make various business decisions, evaluate the Company's performance, and establish various policies in the management of the Company.

Board of Directors Meeting Policy

In accordance with the Board of Directors Work Guidelines, the Company has established a policy for holding Board of Directors meetings, including the following:

1. Board of Directors meetings must be held periodically at least once a month or at any time deemed necessary by the President Director or one or more other members of Board of Directors, or at the request of Board of Commissioners, or at the written request of one or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights.
2. Board of Directors meeting is chaired by the President Director, or, if he or she is unable to attend, by a Director elected by the members of Board of Directors present or represented at the meeting.
3. A Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of Directors is present or represented at the meeting.

Throughout 2025, the Company held 25 Board of Directors meetings. The frequency and attendance levels of Board of Directors were as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Level (%)
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	25	25	100
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	25	25	100
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	25	25	100
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	25	25	100
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	25	25	100

RISALAH RAPAT

Mengacu pada pedoman kerja yang berlaku, setiap hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta didokumentasikan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada Rapat Direksi, perbedaan pendapat tersebut wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat disertai dengan alasan yang mendasarinya.

Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh anggota Direksi serta pihak ketiga atas setiap keputusan dan hal-hal yang dibahas serta diputuskan dalam Rapat Direksi. Adapun risalah dan daftar kehadiran Direksi dalam rapat internal Direksi yang diselenggarakan sepanjang tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

MINUTES OF MEETINGS

In accordance with applicable work guidelines, the results of each Board of Directors meeting must be recorded in minutes of meeting, signed by all members of Board of Directors present and documented in an orderly manner in accordance with applicable laws and regulations. In the event of a dissenting opinion at a Board of Directors meeting, such dissenting opinion must be stated in writing in the minutes of meeting, along with the reasons for the dissent.

The minutes of Board of Directors meetings are valid and binding evidence for all members of Board of Directors and third parties regarding all decisions and matters discussed and decided upon at the Board of Directors meeting. The minutes and attendance list of Board of Directors at internal Board of Directors meetings held throughout the 2025 fiscal year are as follows:

No	Tanggal Date	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Agenda Agenda	Peserta Participants
	21 Januari 2025 January 21, 2025	MJ.01.00/A.DIR.00001.WEGE/2025	• *Release* Strategi • Release Strategy	15
	26 Februari 2025 February 26, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00001.A.WEGE/2025	• Pembahasan Proyek Gereja Basilika IKN • Pembahasan Proyek Kemenko 1 IKN • Discussion of IKN Basilica Church Project • Discussion of IKN Coordinating Ministry 1 Project	16
	27 Februari 2025 February 27, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00001.B.WEGE/2025	• *Stress Test* RKAP 2025 • 2025 Budget Work Plan and Budget Stress Test	12
	03 Maret 2025 March 3, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00001.C.WEGE/2025	• Pembahasan Proyek Rusun Paspampres • Discussion of the Paspampres Flats Project	11
	26 Maret 2025 March 26, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.0002.A.WEGE/2025	• Pembahasan Netro Modular • Discussion of the Netro Modular	11
	30 April 2025 April 30, 2025	MJ.01.00/A.DIR.00006.WEGE/2025	• Pembahasan Proyek Khay Ming School, Proyek Pullman, dan Proyek Bandara Kediri, RDBI, dan Bandara Makassar • Discussion of Khay Ming School, Pullman, and Kediri Airport, RDBI, and Makassar Airport Projects	14
	30 April 2025 April 30, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00002.C.WEGE/2025	• Pembahasan Proyek Kemenko 1 dan Proyek Wing 1 • Discussion of Coordinating Ministry Project 1 and Wing Project 1	18

No	Tanggal Date	No. Risalah Rapat No. Minutes of Meeting	Agenda Agenda	Peserta Participants
	19 Mei 2025 May 19, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00002.B.WEGE/2025	• Pembahasan Proyek Gereja Basilika • Pembahasan Proyek Kantor PUPR Wing 1 • Pembahasan Proyek Kemenko 1 • Discussion of Basilica Church Project • Discussion of PUPR Wing 1 Office Project • Discussion of Coordinating Ministry 1 Project	12
	22 Mei 2025 May 22, 2025	-	• Pembahasan SCM • Discussion of SCM	17
	10 Juni 2025 June 10, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00003.A.WEGE/2025	• Pembahasan Paspampres IKN • Discussion of IKN Presidential Security Guard	12
	18 Juni 2025 June 18, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00004.WEGE/2025	• Pembahasan Kantor PUPR Wing 1 • Pembahasan Kemenko I IKN • Discussion of PUPR Wing 1 Office • Discussion of IKN Coordinating Ministry 1	23
	5 Agustus 2025 August 5, 2025	-	Pembahasan Proyek BI Karawang Discussion of BI Karawang Project	15
	11 Agustus 2025 August 11, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00004.A.WEGE/2025	Hasil Usaha Bulan Juli 2025 Business Results for July 2025	10
	20 Agustus 2025 August 20, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00005.WEGE/2025	Pembahasan *Cash Flow* Cash Flow Discussion	10
	25 Agustus 2025 August 25, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00005.A.WEGE/2025	Performance *Review* Agustus 2025 Performance Review August 2025	10
	27 Agustus 2025 August 27, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00006.WEGE/2025	Paparan *Net Income Recovery Plan* Net Income Recovery Plan Presentation	20
	15 September 2025 September 15, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00007.WEGE/2025	Pembahasan RKAP WIKA Gedung 2026 Discussion of WIKA Gedung's 2026 Work Plan and Budget (RKAP)	15
	23 September 2025 September 23, 2025	-	Pembahasan Penyelesaian Proyek BI Karawang Discussion of BI Karawang Project Completion	10
	01 Oktober 2025 October 1, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00010.WEGE/2025	Pembahasan Discussion	10
	17 Oktober 2025 October 17, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00011.WEGE/2025	Pembahasan Likuiditas Perusahaan (*Cash Flow*) Discussion on Company Liquidity (Cash Flow)	8
	23 Oktober 2025 October 23, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00012.WEGE/2025	Reprofiling Kredit Bank Bank Credit Reprofiling	13
	30 Oktober 2025 October 30, 2025	-	Rencana Penyelesaian Proyek Sekolah Paket 1 School Project Completion Plan Package 1	10
	30 Oktober 2025 October 30, 2025	-	Rencana Penyelesaian Proyek UGM Paket 3 UGM Project Completion Plan Package 3	10
	17 November 2025 November 17, 2025	MJ.05.00/A.CORSEC.00001.WEGE/2025	Pembahasan Vendor Vendor Discussion	11
	16 Desember 2025 December 16, 2025	MJ.01.00/A.CORSEC.00024.WEGE/2025	Pembahasan Aset Puncak CBD Surabaya Discussion on Puncak CBD Surabaya Assets	11

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Perseroan mengikutsertakan anggota Direksi Baru dalam program orientasi untuk memberikan pemahaman tentang Perseroan sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi ini dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, atau program lainnya. Program Pengenalan tersebut meliputi :

1. Prinsip-prinsip dan implementasi GCG
2. Gambaran Perusahaan secara lengkap
3. Penjelasan terkait kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit
4. Penjelasan terkait tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program orientasi dikarenakan komposisi Direksi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

KEBIJAKAN PELATIHAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Board Manual, anggota Direksi secara berkelanjutan perlu meningkatkan dan memperbarui pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan menyediakan program pengembangan diri bagi Direksi dengan agenda dan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Direksi serta kebutuhan strategis Perseroan.

Program pengembangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, antara lain *self-study, workshop*, seminar, dan konferensi. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang relevan serta meningkatkan efektivitas Direksi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan secara optimal.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

POLICY AND IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION PROGRAM

The Company includes newly appointed members of Board of Directors in an orientation program to provide an understanding of the Company, enabling them to perform their duties and responsibilities effectively.

This orientation program may take the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities, or other programs. The orientation program includes:

1. Principles and implementation of Good Corporate Governance (GCG)
2. Comprehensive overview of the Company
3. Explanation of delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, as well as audit committee
4. Explanation of duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors
5. Applicable laws and regulations, as well as Company policies

In 2025, the Company did not hold an orientation program as there were no changes in the composition of Board of Directors compared to the previous year.

POLICY ON TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOARD OF DIRECTORS

As stipulated in the Board Manual, members of Board of Directors are required to continuously enhance and update their knowledge to support the execution of their management and operational responsibilities. To support this, the Company provides development programs for Board of Directors, with agendas and materials tailored to their specific needs as well as the Company's strategic requirements.

These development programs are conducted through various learning methods, including self-study, workshops, seminars, and conferences. This approach is designed to provide relevant insights and enhance the effectiveness of Board of Directors in carrying out their leadership and management functions optimally.

The training and competency development programs attended by Board of Directors during 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Pelatihan Training Name	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	Pelatihan ESG Awareness ESG Awareness Training	17 September 2025 September 17, 2025	PT Surveyor Indonesia
		Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Desember 25 Certified Risk Governance Professional (CRGP) Training and Certification - December 25	11-17 Desember 2025 December 11-17, 2025	PT RAP Indonesia
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	Pelatihan ESG Awareness ESG Awareness Training	17 September 2025 September 17, 2025	PT Surveyor Indonesia
		Webinar Menakar Tanggung Jawab Hukum Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Kunci BUMN dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan Webinar: Assessing the Legal Liability of Board of Directors, Board of Commissioners, and Key Employees of State-Owned Enterprises in the Financial Report Manipulation Scandal	18 September 2025 September 18, 2025	PT RAP Indonesia
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	Pelatihan ESG Awareness ESG Awareness Training	17 September 2025 September 17, 2025	PT Surveyor Indonesia
		Webinar Menakar Tanggung Jawab Hukum Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Kunci BUMN dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan Webinar: Assessing the Legal Liability of Board of Directors, Board of Commissioners, and Key Employees of State-Owned Enterprises in the Financial Report Manipulation Scandal	18 September 2025 September 18, 2025	PT RAP Indonesia
Tomo Dwi Hasputro	Direktur *Quality, Health, Safety, Environment* dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	Pelatihan ESG Awareness ESG Awareness Training	17 September 2025 September 17, 2025	PT Surveyor Indonesia
		Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) - Desember 25 Certified Risk Governance Professional (CRGP) Training and Certification - Dec 25	11-17 Desember 2025 December 11-17, 2025	PT RAP Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Pelatihan Training Name	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	Pelatihan Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Risk Mitigation Training in Digital Transformation	3-4 Juli 2025 July 3-4, 2025	PT RAP Indonesia
		Pelatihan ESG Awareness ESG Awareness Training	17 September 2025 September 17, 2025	PT Surveyor Indonesia
		Webinar Menakar Tanggung Jawab Hukum Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Kunci BUMN dalam Skandal Manipulasi Laporan Keuangan Webinar: Assessing the Legal Liability of Board of Directors, Board of Commissioners, and Key Employees of State-Owned Enterprises in the Financial Report Manipulation Scandal	18 September 2025 September 18, 2025	PT RAP Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai pedoman kerja dalam mengelola Perseroan, beberapa aktivitas yang telah dilakukan Direksi terdiri dari:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan;
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan;
3. Pengelolaan aset dan Keuangan;
4. Penyelenggaraan rapat Direksi selama tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 25 kali Rapat Direksi;
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir);
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada bulan Mei 2025 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada bulan November 2025;
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal;
8. Penerapan dan pengawasan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
9. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman terkait Tata Kelola Terintegrasi;
11. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IN 2025

Throughout 2025, Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Company's work guidelines. Several activities undertaken by the Board of Directors included:

1. Preparation of the Company's planning;
2. Fulfillment of the Company's performance targets;
3. Asset and Financial Management;
4. Holding 25 Board of Directors meetings during 2025;
5. Attending Board of Commissioners Meetings with Board of Directors (Board Meeting);
6. Holding 2 (two) General Meetings of Shareholders in 2025: 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders in May 2025 and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders in November 2025;
7. Supervision and improvement of internal business processes;
8. Implementation and supervision of Good Corporate Governance in all business activities;
9. Implementation of ISO 37001:2016 concerning the Anti-Bribery Management System;
10. Preparation of Policies and Guidelines related to Integrated Governance;
11. Implementation of other duties related to the management of the Company.

PENILAIAN DIREKSI TERHADAP KINERJA KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Tidak terdapat komite pendukung Direksi yang dibentuk secara khusus pada tahun buku 2025. Evaluasi Direksi dilakukan terhadap efektivitas fungsi-fungsi pendukung sesuai struktur organisasi dan mekanisme koordinasi manajemen.

BOARD OF DIRECTORS' ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF BOARD OF DIRECTORS' SUPPORTING COMMITTEES

There are no specific supporting committees of Board of Directors established in the 2025 fiscal year. The Board of Directors' evaluation is conducted on the effectiveness of supporting functions in accordance with the organizational structure and management coordination mechanisms.

Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency Of Information Related To Board Of Commissioners And The Board of Directors

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki independensi. Hal ini bertujuan untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Bab X Pasal 63, prinsip-prinsip yang diterapkan Perseroan untuk menjaga hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan serta pengawasan Perseroan dilakukan secara formal, yaitu melalui mekanisme dan korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal tetap dimungkinkan, namun tidak dapat dijadikan dasar kebijakan resmi sebelum melalui mekanisme formal yang berlaku.
2. Direksi senantiasa menghormati fungsi dan peran Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja sehari-hari antara Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Pedoman *Good Corporate Governance, Code of Conduct*, maupun ketentuan internal lainnya, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Direksi berkomitmen untuk menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

RAPAT GABUNGAN

Sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, POJK 33 Tahun 2014, rapat gabungan Dewan Komisaris dan DIreksi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan. Pemanggilan rapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak, atau orang yang khusus ditunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis dan disampaikan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, kecuali rapat mengenai sesuatu hal penting yang mendesak.

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their functions, duties, and responsibilities, members of Board of Commissioners and Board of Directors must maintain independence. This aims to avoid any form of conflict of interest, whether for personal or group interests. Therefore, referring to Financial Services Authority Regulation No. Pursuant to Article 63 of POJK No. 55/POJK.03/2016, Chapter X, and Article 63, the principles applied by by the Company to maintain the working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

1. To maintain the independence of each Company organ, the relationship between Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities for managing and supervising the Company is conducted formally, namely through accountable mechanisms and correspondence. Informal relationships are still possible, but cannot be used as the basis for official policy without going through prevailing formal mechanisms.
2. Board of Directors always respects the function and role of Board of Commissioners in supervising the Company, as stipulated in the Company's Articles of Association. Matters relating to day-to-day working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners that are not regulated by laws and regulations, the Articles of Association, the Code of Good Corporate Governance, the Code of Conduct, or other internal provisions will be further regulated by mutual agreement between Board of Directors and Board of Commissioners, based on the principles of Good Corporate Governance.
3. Board of Directors is committed to providing complete, accurate, and timely information to Board of Commissioners in accordance with the Board's needs in carrying out its supervisory and advisory functions.

JOINT MEETINGS

In accordance with the Board Manual, POJK 33 of 2014, joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors shall be held at least once every 2 (two) months. Meeting notices shall be issued by authorized members of Board of Commissioners or a person specifically appointed to act for and on behalf of Board of Commissioners. Notices for Board of Commissioners meetings shall be submitted in writing and delivered electronically no later than three days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the meeting date. The notice must include the day, date, time, place, and agenda of the meeting, unless the meeting concerns an urgent matter.

Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

The results of meetings between Board of Commissioners and Board of Directors must be recorded in minutes of the meeting, signed by members of Board of Directors and Board of Commissioners present, and distributed to all members of Board of Directors and Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2025, rapat gabungan Perseroan terselenggara 12 kali rapat. Adapun realisasi dari Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris yang diselenggarakan di sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company held 12 joint meetings. The results of Coordination Meetings between Board of Directors and Board of Commissioners held throughout 2025 are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Internal** Internal Meetings		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Level (%)
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissione	12	12	100%
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko	12	12	100%
Tomo Dwi Hasputro	Direktur *Quality, Health, Safety, Environmen*t dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	12	12	100%
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	12	12	100%
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	12	12	100%

Adapun risalah rapat dan daftar hadir dalam Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2025 telah disusun, didokumentasikan, dan diadministrasikan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah rapat tersebut memuat secara lengkap agenda pembahasan, pokok-pokok keputusan, serta arahan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat, sehingga dapat menjadi dasar tindak lanjut bagi Direksi maupun Dewan Komisaris.

The minutes of meetings and attendance lists of the Coordination Meetings between Board of Directors and Board of Commissioners held throughout the 2025 fiscal year have been prepared, documented, and administered in an orderly manner in accordance with applicable regulations. These meeting minutes contain a complete discussion agenda, key decisions, and directions and recommendations resulting from the meetings, thus providing a basis for follow-up actions by both Board of Directors and Board of Commissioners.

Seluruh risalah dan daftar hadir Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 disajikan pada tabel berikut:

The complete minutes and attendance lists of the Coordination Meetings between Board of Directors and Board of Commissioners during the 2025 fiscal year are presented in the following table:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Meeting Minutes	Peserta Participants
1	5 Februari 2025 February 5, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Desember 2024; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi QHSE); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until December 2024; 3. Periodic discussions on functions within WIKA Gedung organization (QHSE Division); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00001.A.WEGE/2025	9
2	4 Maret 2025 March 4, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Januari 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Pemasaran); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until January 2025; 3. Periodic discussions on existing functions within WIKA Gedung organization (Marketing Division); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00001.B.WEGE/2025	9
3	22 April 2025 April 22, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Februari 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi PMO dan Manrisk); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until February 2025; 3. Periodic discussions on functions within WIKA Gedung organization (PMO and Risk Management Divisions); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00002.WEGE/2025	9
4	16 Mei 2025 May 16, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Maret 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi PMO dan Manrisk); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until March 2025; 3. Periodic discussions on existing functions within WIKA Gedung organization (PMO and Risk Management Divisions); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00002.A.WEGE/2025	9

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Meeting Minutes	Peserta Participants
5	13 Juni 2025 June 13, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan April 2025; 3. Pembahasan Temuan Hasil Joint Internal Audit WIKA, WIKA Beton, dan WIKA Gedung; 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi IT); 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until April 2025; 3. Discussion of findings from Joint Internal Audit of WIKA, WIKA Beton, and WIKA Gedung; 4. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (IT Division); 5. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00004.WEGE/2025	9
6	9 Juli 2025 July 9, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Mei 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Pemasaran); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until May 2025; 3. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (Marketing Division); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00011.WEGE/2025	9
7	5 Agustus 2025 August 5, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Juni 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Legal, Divisi Manrisk PMO dan Tim Task Force Piutang); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until June 2025; 3. Periodic discussions on functions within WIKA Gedung organization (Legal Division, PMO Riskman Division and Accounts Receivable Task Force Team); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00007.WEGE/2025	9
8	4 September 2025 September 4, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Juli 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Tim Task Force Piutang); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until July 2025; 3. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (Accounts Receivable Task Force Team); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.0009.WEGE/2025	9

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	No. Risalah Rapat No. Meeting Minutes	Peserta Participants
9	7 Oktober 2025 October 7, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Agustus 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi IT); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until August 2025; 3. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (IT Division); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00012.WEGE/2025	9
10	14 November 2025 November 14, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan September 2025; 3. Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan III 2025 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Operasi); 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until September 2025; 3. Risk Management Discussion for Quarter III 2025 4. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (Operations Division); 5. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00014.A.WEGE/2025	9
11	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan Oktober 2025; 3. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Engineering); 4. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until October 2025; 3. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (Engineering Division); 4. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00001.WEGE/2026	9
12	23 Desember 2025 December 23, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sebelumnya; 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Kinerja WIKA Gedung dan Anak Perusahaan sampai dengan Bulan November 2025; 3. Pembahasan RKAP Tahun 2026 4. Pembahasan berkala Fungsi yang ada di dalam Organisasi WIKA Gedung (Divisi Keuangan); 5. Lain-lain. 1. Follow-up to the results of previous Board of Commissioners Meeting, which included Board of Directors (Board Meeting); 2. Discussion and input from Board of Commissioners on the performance results of WIKA Gedung and its subsidiaries until November 2025; 3. Discussion of the 2026 RKAP 4. Periodic discussion of functions within WIKA Gedung organization (Finance Division); 5. Other matters.	SE.01.03/A.KOM.00015.A.WEGE/2025	9

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkapkan di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini yang juga menjelaskan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Terkait dengan hal tersebut, tabel di bawah ini adalah ringkasan dari hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali.

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/ OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The profiles of each member of Board of Commissioners and Board of Directors are disclosed in the Company Profile section of this annual report, which also explains the affiliation between Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/or Controlling Shareholders. In this regard, the table below summarizes the affiliation with controlling shareholders.

Rekapitulasi Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, Dan Pemegang Saham Utama Dan/Atau Pemegang Saham Mayoritas

Summary of Affiliation Between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Major and/ or Controlling Shareholders

Dewan Komisaris / **Board of Commissioners**

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan** Financial Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan** Family Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Utama/ Pengendali** Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No	**Ya** Yes	**Tidak** No
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	-	√	-	√	-	√
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Family Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	√	-	√	-	√
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	√	-	√	-	√

Direksi

Board of DIrectorst

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Family Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	√	-	√	-	√
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	√	-	√	-	√
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	-	√	-	√	-	√
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	-	√	-	√	-	√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Family Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	√	-	√	-	√
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	√	-	√	-	√

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Afiliasi Keuangan Dengan Family Affiliation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	-	√	-	√	-	√
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	-	√	-	√	-	√

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Ketentuan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi diatur secara jelas dalam POJK No. 21/.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Perusahaan berkomitmen memenuhi ketentuan tersebut dan kesesuaian dengan peraturan tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Provisions regarding concurrent positions held by Board of Commissioners and Board of Directors are clearly regulated in POJK No. 21/.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance. The Company is committed to complying with these provisions, and compliance with these regulations is explained in the following table.

Concurrent Positions of Board of Commissioners and Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Position at Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a member of Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a member of Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Komisaris Utama PT Berdikari Manajemen Investasi President Commissioner of PT Berdikari Manajemen Investasi	Direktur PT Petro Inovasi Indonesia Director of PT Petro Inovasi Indonesia	-
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	-	*Senior Vice President of* Human Capital Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Senior Vice President of Human Capital Division at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	-
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	-	-	1. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN (Otoritas Ibu Kota Nusantara 2. Widyaiswara Ahli Utama Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Acting Deputy for Facilities and Infrastructure, OIKN (Nusantara Capital City Authority) 2. Lead Expert Lecturer for Human Resource Development, Ministry of Public Works and Public Housing
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-

Nama Name	Jabatan Position	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Position at Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a member of Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a member of Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	-	-	-
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	-	-	-
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	-	-	-
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	-	Komisaris PT Wege Solusi Proklamasi (Entitas Anak) Commissioner of PT Wege Solusi Proklamasi (Subsidiary)	-
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	-	-	-

Informasi mengenai rincian rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan.

Information regarding the details of concurrent positions of Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Company Profile chapter of the annual report.

REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dan Mekanisme Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi Nomor MJ.05.00/A.DIR.WG.03435/2023 tanggal 3 Juli 2023. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pemberian remunerasi dilaksanakan secara adil, kompetitif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penetapan remunerasi dilakukan melalui tahapan penyusunan, analisis, pengajuan, dan penetapan. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan dalam menyusun kebijakan serta memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, skala dan kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kinerja perusahaan, serta faktor relevan lainnya. Rekomendasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan kemudian diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memperoleh persetujuan.

REMUNERATION OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Policy and Mechanism for Determining Remuneration for Board of Commissioners and Board of Directors

The Company establishes a remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Determining the Remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as well as Work Instructions for Proposing and Determining the Remuneration of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Associated Companies No. MJ.05.00/A.DIR.WG.03435/2023 dated July 3, 2023. This policy is designed to ensure that remuneration is provided fairly, competitively, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations.

The remuneration determination process involves the stages of preparation, analysis, submission, and determination. The Nomination and Remuneration Committee plays a role in formulating the policy and providing recommendations, taking into account the Company's financial condition, business scale and complexity, inflation rate, company performance, and other relevant factors. These recommendations are then submitted to the Board of Commissioners for review and then submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas komponen tetap, seperti gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas, serta komponen variabel berupa tantiem atau insentif berbasis kinerja. Penetapan komponen tetap mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas bisnis, serta kemampuan keuangan Perseroan, sedangkan komponen variabel diberikan berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan yang diukur melalui *merit rating* dan evaluasi kinerja individu.

The remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors consists of fixed components, such as salary or honorarium, allowances, and facilities, as well as variable components in the form of bonuses or performance-based incentives. The determination of fixed component takes into account the Company's business scale, business complexity, and financial capacity, while the variable component is awarded based on the Company's performance achievements, as measured by merit ratings and individual performance evaluations.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap regulasi, kondisi pasar industri, serta daya saing remunerasi di sektor sejenis. Melalui kebijakan remunerasi yang komprehensif, transparan, dan berbasis kinerja, Perseroan berkomitmen memberikan penghargaan yang proporsional atas kontribusi Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis serta keberlanjutan kinerja Perseroan.

In practice, the remuneration policy also considers regulatory compliance, industry market conditions, and the competitiveness of remuneration in similar sectors. Through a comprehensive, transparent, and performance-based remuneration policy, the Company is committed to providing proportional rewards for the contributions of Board of Commissioners and Board of Directors in supporting the achievement of strategic objectives and the sustainability of the Company's performance.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure of Board of Commissioners and Board of Directors

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 serta Instruksi Kerja Usulan dan Penetapan Penghasilan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi No. WIKA-HCEIK- 06.10, yang berlaku sejak 3 Juli 2020.

The remuneration structure of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is determined by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/05/2019 and Work Instruction No. 10/2019 on the Proposal and Determination of Income for Directors and Commissioners of Subsidiaries/Associated Companies. WIKA-HCEIK-06.10, effective July 3, 2020.

Komponen remunerasi ini dirancang untuk mencerminkan tanggung jawab, kinerja, dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan. Adapun struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

These remuneration components are designed to reflect the responsibilities, performance, and contributions of each member of Board of Commissioners and Board of Directors in supporting the achievement of the Company's strategic objectives. The remuneration structure for Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Remuneration Structure

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Jabatan** Position	**Penghasilan per Bulan** Monthly Income		**Jumlah Penghasilan per Bulan** Total Monthly Income
		Honorarium	**Tunjangan Transportasi** Transportation Allowance	
Joseph Prajogo	Komisaris Independen sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	53.095.500	10.619.100	63.714.600
Suli Fatimah	Komisaris Commissioner	53.095.500	0	53.095.500
Danis Hidayat Sumadilaga	Komisaris Commissioner	53.095.500	10.619.100	63.714.600
Taufan Gestoro	Komisaris Independen Independent Commissioner	53.095.500	10.619.100	63.714.600
Jumlah Total		**53.095.500**	**10.619.100**	**63.714.600**

Jumlah Penghasilan per Tahun Total Remuneration per Year	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2025 Remuneration Amount in 2025
764.575.200	53.095.500	198.694.044	132.109.968	949.780.668
637.146.000	0	169.367.916	0	637.146.000
764.575.200	53.095.500	197.678.616	159.286.500	976.957.200
764.575.200	53.095.500	198.649.044	132.271.500	949.942.200
2.930.871.600	159.285.000	764.389.620	423.667.968	3.513.826.068

Struktur Remunerasi Direksi

Board of Directors' Remuneration Structure

Direksi Board of Directors	Jabatan Position	Penghasilan per Bulan Monthly Income		Jumlah Penghasilan per Bulan Total Monthly Income
		Honorarium	Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	
Hadian Pramudita	Direktur Utama President Director	131.100.000	28.000.000	159.100.000
Hartanto Karti Raharjo	Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Capital, and Risk Management	111.435.000	17.500.000	128.935.000
Tomo Dwi Hasputro	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran Director of Quality, Health, Safety, Environment, and Marketing	111.435.000	17.500.000	128.935.000
Bagus Tri Setyana	Direktur Operasi I Director of Operations I	111.435.000	17.500.000	128.935.000
Dwi Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	111.435.000	14.375.000	125.810.000
Jumlah Total		**576.840.000**	**94.875.000**	**671.715.000**

Jumlah Penghasilan per Tahun Total Remuneration per Year	Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan Remuneration Tax Borne by the Company	Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2025 Remuneration Amount in 2025
1.909.200.000	131.100.000	815.677.044	326.596.320	2.366.896.320
1.547.220.000	111.435.000	641.416.788	192.708.684	1.851.363.684
1.547.220.000	111.435.000	641.416.788	218.473.620	1.877.128.620
1.547.220.000	111.435.000	641.416.788	275.075.496	1.933.730.496
1.509.720.000	111.435.000	627.546.936	211.725.456	1.832.880.456
8.060.580.000	576.840.000	3.367.474.344	1.224.579.576	9.861.999.576

Rasio Gaji/Honorarium

Struktur gaji atau honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan prinsip kewajaran, transparansi, dan kesesuaian dengan peran, tanggung jawab, serta kompleksitas jabatan masing-masing. Penetapan struktur dan rasio remunerasi tersebut bertujuan untuk memastikan terciptanya keseimbangan

Salary/Honorarium

The salary or honorarium structure for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is established in accordance with applicable regulations and takes into account the principles of fairness, transparency, and appropriateness to the roles, responsibilities, and complexity of each position. The determination of this remuneration structure and ratio aims to ensure

yang proporsional, sekaligus mendorong motivasi, peningkatan kinerja, dan sinergi antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Adapun rasio gaji/honorarium tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a proportional balance, while also encouraging motivation, improved performance, and synergy between the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities to support the achievement of the Company's strategic objectives.

The salary/honorarium ratio for 2025 is as follows:

Rasio Gaji/Honorarium

Salary/Honorarium Ratio

No	Perihal Description	2025	2024
1	Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	Direktur Utama: 100% Direktur: 85% dari Direktur Utama President Director: 100% Director: 85% of President Director	Direktur Utama: 100% Direktur: 85% dari Direktur Utama President Director: 100% Director: 85% of President Director
2	Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama President Commissioner: 45% of President Director	Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama President Commissioner: 45% of President Director
3	Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Member of Board of Commissioners	Komisaris Utama: 45% Komisaris: 90% dari Komisaris Utama President Commissioner: 45% Commissioner: 90% of President Commissioner	Komisaris Utama: 45% Komisaris: 90% dari Komisaris Utama President Commissioner: 45% Commissioner: 90% of President Commissioner

Mekanisme Pemberian Kompensasi Direktur Utama

Pemberian kompensasi bagi Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, serta memperhatikan kebijakan dan keputusan internal yang relevan di lingkungan Perseroan dan induk usaha.

Sebagai bagian dari proses penetapan remunerasi, Perseroan telah menyampaikan usulan terkait Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2025 serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 melalui surat Nomor MJ.05.00/A.KOM.0004.WEGE/2025 tanggal 20 Mei 2025. Usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, kondisi industri, serta prinsip kewajaran dan daya saing.

Selanjutnya, pembahasan dan penyelarasan terkait aspek remunerasi juga merujuk pada hasil Notulen Rapat Direksi Terbatas PT Wijaya Karya Tbk Pekan 24/2025 tanggal 12 Juni 2025, yang pada pokoknya memberikan arahan strategis terkait kebijakan kompensasi di lingkungan grup, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kinerja dan kondisi usaha.

Struktur kompensasi Direktur Utama terdiri atas komponen tetap dan variabel. Komponen variabel, khususnya tantiem atau insentif kinerja, ditentukan berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Penilaian kinerja dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan indikator finansial seperti EBITDA, serta indikator operasional, strategis, dan non-keuangan lainnya yang mencerminkan keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai jangka panjang.

Compensation Mechanism for President Director

Compensation for the President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk is granted in accordance with the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023, while also taking into account relevant internal policies and decisions within the Company and its parent company.

As part of the remuneration determination process, the Company has submitted a proposal regarding 2025 Salary for Directors and Honorarium for Commissioners, as well as Bonuses for Directors and Commissioners for the 2024 Fiscal Year, through Letter Number MJ.05.00/A.KOM.0004.WEGE/2025 dated May 20, 2025. The proposal was prepared with considerations regarding Company performance, industry conditions, and the principles of fairness and competitiveness.

Furthermore, discussions and alignment regarding remuneration aspects also referred to the Minutes of Limited Board of Directors Meeting of PT Wijaya Karya Tbk Week 24/2025, held on June 12, 2025, which essentially provided strategic direction regarding compensation policies within the group, including adjustments to performance dynamics and business conditions.

The President Director's compensation structure consists of fixed and variable components. The variable component, specifically bonus or performance incentive, is determined based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Performance assessment is conducted comprehensively, taking into account financial indicators such as EBITDA, as well as other operational, strategic, and non-financial indicators that reflect business sustainability and long-term value creation.

Dalam implementasinya, matriks pemberian kompensasi mempertimbangkan tingkat pencapaian KPI dengan pembobotan antara kinerja perusahaan dan kontribusi individual Direktur Utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sekaligus memastikan bahwa sistem remunerasi tetap adaptif terhadap perkembangan bisnis.

In its implementation, the compensation matrix considers the level of KPI achievement, weighting the Company's performance against the President Director's individual contribution. This approach aims to maintain alignment of interests between management and shareholders, while ensuring that the remuneration system remains adaptive to business developments.

Adapun terkait dengan skema *long-term ince*ntive (LTI), hingga saat ini PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk belum menerapkan skema tersebut. Dengan demikian, mekanisme insentif yang berlaku masih berfokus pada pencapaian kinerja tahunan (*short-term performance*), sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dan mengacu pada prinsip tata kelola yang berlaku.

Regarding the long-term incentive (LTI) scheme, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk has not yet implemented it. Therefore, the existing incentive mechanism still focuses on annual performance (short-term performance), in accordance with internal company policies and applicable governance principles.

Ke depan, pengembangan skema insentif jangka panjang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penyempurnaan sistem remunerasi, dengan tetap memperhatikan keselarasan regulasi, kondisi keuangan Perseroan, serta dinamika kebijakan di tingkat grup.

Going forward, the development of a long-term incentive scheme can be considered as part of the remuneration system refinement, while still taking into account regulatory alignment, the Company's financial condition, and group-level policy dynamics.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan variasi dalam komposisi anggota dewan. Perseroan secara konsisten mengedepankan prinsip keberagaman dalam pembentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Kebijakan ini menekankan pentingnya keberagaman dalam struktur organisasi guna memastikan Dewan Komisaris dan Direksi dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan pengawasan, arahan, serta nasihat yang tepat.

Keberagaman yang dimaksud meliputi perbedaan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap komposisi Dewan Komisaris dan Direksi serta efektivitas penerapan kebijakan keberagaman tersebut.

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan juga tercermin dari latar belakang anggota dewan, antara lain pendidikan, pengalaman kerja, usia, etnis, dan jenis kelamin. Penerapan prinsip keberagaman ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja Perseroan melalui perspektif yang lebih beragam serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan berkualitas.

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The diversity of Board of Commissioners and Board of Directors reflects the diversity in the composition of board members. The Company consistently prioritizes the principle of diversity in the formation of Board of Commissioners and Board of Directors, referring to the guidelines stipulated in Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance. This policy emphasizes the importance of diversity in the organizational structure to ensure Board of Commissioners and Board of Directors can function effectively in providing appropriate oversight, direction, and advice.

This diversity includes differences in the expertise, knowledge, and experience of members of Board of Commissioners and Board of Directors. The Company regularly monitors and evaluates the composition of Board of Commissioners and Board of Directors and the effectiveness of diversity policy implementation.

The diversity of Board of Commissioners and Board of Directors is also reflected in the backgrounds of board members, including education, work experience, age, ethnicity, and gender. The application of this diversity principle plays a crucial role in improving the Company's performance through more diverse perspectives and more comprehensive and quality decision-making.

Perseroan memiliki anggota Dewan Komisaris dengan latar belakang keahlian di bidang hukum, ekonomi, dan manajemen. Selain itu, Perseroan juga memiliki satu orang Komisaris perempuan di antara tiga Komisaris laki-laki lainnya.

The Company has members of Board of Commissioners with expertise in law, economics, and management. Furthermore, the Company has one female Commissioner among three male Commissioners.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

The diversity of members of Board of Commissioners and Board of Directors is presented in the following table:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity in Board of Commissioners Composition

Riwayat Pendidikan Educational Background	Kapabilitas anggota Dewan Komisaris Perusahaan didukung oleh latar belakang yang terdiversifikasi dari Teknik Sipil, Akuntansi, Manajemen Perusahaan, dan Psikologi dari level S1 hingga S3. Gelar akademik tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri. Latar belakang yang beragam tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Dewan Komisaris dari berbagai sudut pandang. The capabilities of members of the Company's Board of Commissioners are supported by diversified backgrounds spanning Civil Engineering, Accounting, Corporate Management, and Psychology from undergraduate to doctoral levels. These academic degrees were obtained both domestically and internationally. This diverse background is essential for Board of Commissioners to carry out its oversight function over the Company's management from various perspectives.
Usia Age	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berusia antara 50-63 tahun pada akhir tahun buku 2025. Cakupan umur tersebut menunjukkan kematangan dan merefleksikan rekam jejak yang lama di dunia usaha khususnya di industri konstruksi. Members of the Company's Board of Commissioners is between 50 and 63 years old by the end of the 2025 fiscal year. This age range demonstrates maturity and reflects a long track record in the business world, particularly in the construction industry.
Karier dan Pengalaman Career and Experience	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagian besar memiliki rekam jejak karier dan pengalaman kerja di industri konstruksi dengan pernah bekerja di entitas induk Perusahaan. Kapabilitas tersebut diperkuat dengan anggota Dewan Komisaris lainnya yang pernah bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan IKN – PUPR. Selain itu, diversifikasi karir dan pengalam juga diperkaya oleh pengalaman anggota Dewan Komisaris yang pernah berkarier di sektor jasa dan perusahaan non-BUMN. Most members of the Company's Board of Commissioners have career track records and work experience in the construction industry, having previously worked at the Company's parent entity. This capability is strengthened by other members of Board of Commissioners having worked at the Ministry of Public Works and Public Housing and as Chair of IKN-PUPR Development Implementation Task Force. Furthermore, the diversified careers and experience are further enhanced by the experience of members of Board of Commissioners who have worked in the service sector and non-state-owned enterprises.
Jenis Kelamin Gender	Perusahaan mengakomodir kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan kualitas dan kapabilitas individu untuk menduduki posisi tertentu termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris. Meski bergerak di industri konstruksi bangunan, Perusahaan mengangkat salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bergender perempuan menjadi salah satu komisaris Perusahan. Secara persentase, keterwakilan Perempuan dalam Dewan Komisaris Perusahaan mencapai 25%. The Company accommodates gender equality by maintaining the quality and capabilities of individuals to hold certain positions, including as members of Board of Commissioners. Despite operating in the building construction industry, the Company appointed a female member of its Board of Commissioners as a commissioner. In percentage terms, female representation on the Company's Board of Commissioners reached 25%.
Etnis dan Ras Ethnicity and Race	Joseph Prajogo: Jawa Suli Fatimah: Jawa Danis Hidayat Sumadilaga: Sunda Taufan Gestoro: Jawa Joseph Prajogo: Javanese Suli Fatimah: Javanese Danis Hidayat Sumadilaga: Sundanese Taufan Gestoro: Javanese

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

Riwayat Pendidikan Educational Background	Komposisi Direksi Perusahaan sebagian besar berasal dari Teknik Sipil sesuai dengan karakteristik usaha Perusahaan di industri konstruksi gedung. Namun demikian, mengingat aspek pengelolaan Perusahaan juga mencakup aspek lainnya seperti keuangan, maka Direksi Perusahaan juga diisi oleh individu yang memiliki rekam jejak pendidikan dari bidang keuangan dan manajemen. Gelar akademik yang diperoleh anggota Direksi adalah S1 hingga S2 dari universitas di dalam dan luar negeri. The Company's Board of Directors is primarily composed of Civil Engineering graduates, in keeping with the Company's business characteristics, particularly in the building construction industry. However, considering that the Company's management encompasses other aspects, such as finance, the Board of Directors is also comprised of individuals with educational backgrounds in finance and management. The academic degrees held by the Board members range from bachelor's degrees to master's degrees from domestic and international universities.
Usia Age	Anggota Direksi berusia antara 43-62 tahun pada akhir tahun buku 2025. Cakupan umur tersebut menunjukkan kematangan dan merefleksikan rekam jejak yang lama di dunia usaha khususnya di industri konstruksi di samping mengakomodir suksesi dari usia muda tetapi didukung dengan rekam jejak dan prestasi yang mendukung pencapaian Perusahaan. Board members' age is between 43 and 62 years old by the end of the 2025 fiscal year. This age range demonstrates maturity and reflects a long track record in the business world, particularly in the construction industry. It also accommodates young succession, supported by a track record and achievements that support the Company's achievements.
Karir dan Pengalaman Career and Experience	Semua anggota Direksi memiliki rekam jejak yang panjang dan teruji di industri konstruksi serta berkarier di Group Wijaya Karya. Hal ini menunjukkan suksesi kepemimpinan yang berhasil dari internal Group. All Board members have long and proven track records in the construction industry and have been pursuing careers within Wijaya Karya Group. This demonstrates successful leadership succession within the Group.
Jenis Kelamin Gender	Komposisi Direksi Perusahaan semuanya berjenis kelamin laki-laki terkait dengan karakteristik usaha di bidang konstruksi. Namun demikian, Perusahaan tetap menghargai dan mengakomodasi kesetaraan gender dalam kegiatan operasionalnya. The Company's Board of Directors is entirely male, reflecting the nature of its construction business. However, the Company continues to respect and accommodate gender equality in its operations.
Etnis dan Ras Ethnicity and Race	Hadian Pramudita: Sunda Bagus Tri Setyana: Jawa Dwi Purnomo: Jawa Hartanto Karti Raharjo: Jawa Tomo Dwi Hasputro W: Jawa Hadian Pramudita: Sundanese Bagus Tri Setyana: Javanese Dwi Purnomo: Javanese Hartanto Karti Raharjo: Javanese Tomo Dwi Hasputro W: Javanese

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah disepakati dalam perjanjian penunjukan mereka. Proses evaluasi dilakukan setiap tahun melalui RUPS, dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait penunjukkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun individu. Selain berpengaruh pada keputusan penunjukan kembali, hasil evaluasi juga berperan penting dalam penentuan struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan *Board Manual* dan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

PERFORMANCE APPRAISAL OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The performance appraisal of Board of Commissioners and Board of Directors is conducted based on evaluation criteria agreed upon in their appointment agreements. The evaluation process is carried out annually through General Meeting of Shareholders (GMS), referring to predetermined criteria. The results of this evaluation serve as a basis for decision-making regarding reappointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors, both collectively and individually. In addition to influencing reappointment decisions, the evaluation results also play an important role in determining remuneration structure for Board of Commissioners and Board of Directors.

Performance Appraisal of Board of Commissioners

The performance of Board of Commissioners and its members is evaluated annually by Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMS).

Performance Appraisal of Board of Commissioners by GMS

In general, the performance of Board of Commissioners is determined based on duties and responsibilities stipulated in applicable laws and regulations, Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., and mandates of Shareholders. Formal evaluation criteria are communicated transparently to Board of Commissioners upon their appointment. Results of evaluation of both collective performance of the Board and individual performance of each member constitute an integral part of compensation and incentive scheme for Board of Commissioners.

The evaluation results of each individual member of Board of Commissioners serve as one of the considerations for Shareholders in deciding on dismissal and/or reappointment of respective members. These evaluation results also function as a tool to assess and enhance the effectiveness of Board of Commissioners.

Procedure for Conducting Performance Appraisal of Board of Commissioners

The performance of Board of Commissioners is reported to Shareholders through GMS based on Board Manual and Annual Work Plan of Board of Commissioners.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu;
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan; dan
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Pemegang Saham untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, independen, serta selaras dengan kepentingan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penilaian ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penetapan remunerasi, masa jabatan, maupun kebijakan strategis lainnya yang berkaitan dengan Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Untuk Tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja tahunan Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah menggunakan rencana kerja tahunan Dewan Komisaris tersebut sebagai perdoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan Perseroan.

Dewan Komisaris memastikan untuk terus berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi dengan memberikan arahan yang konstruktif untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional Perseroan.

Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dan masing-masing anggota Direksi dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan, termasuk pencapaian kinerja keuangan dan operasional, implementasi strategi perusahaan, serta kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemegang Saham dalam menetapkan kebijakan terkait remunerasi, keberlanjutan masa jabatan, maupun keputusan strategis lainnya yang berkaitan dengan Direksi.

Performance Evaluation Criteria for Board of Commissioners

GMS determines performance criteria for both Board of Commissioners as a whole and its individual members. Evaluation criteria for individual members include:

1. Attendance at Board of Commissioners meetings and meetings with committees;
2. Contribution to Company's supervisory processes;
3. Involvement in specific assignments;
4. Commitment to advancing Company's interests; and
5. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies.

Assessor

The performance appraisal of Board of Commissioners is conducted by Shareholders through GMS mechanism. This appraisal is part part of Shareholders' oversight function to ensure that the Board of Commissioners has performed its duties and responsibilities effectively, independently, and in alignment with Company's interests and applicable regulations. The results also serve as a basis for decisions regarding remuneration, tenure, and other strategic policies related to Board of Commissioners.

Results of Performance Appraisal of Board of Commissioners

For 2025, Board of Commissioners has prepared an annual work plan, taking into account its duties, authorities, and obligations, in accordance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, Board of Commissioners has used this annual work plan as a guideline for each member of Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties for the Company.

Board of Commissioners ensures that the Board will continue to play an active role in monitoring and evaluating the performance of Board of Directors by providing constructive guidance to maintain the sustainability and success of the Company's operations.

Performance Appraisal of Board of Directors

The performance of Board of Directors and each of its members is evaluated annually by Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism. The evaluation aims to assess the effectiveness of Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities in managing Company, including financial and operational performance achievements, implementation of corporate strategies, and compliance with Good Corporate Governance principles and applicable laws and regulations. Evaluation results serve as one of the bases for Shareholders in determining policies related to remuneration, continuation of tenure, and other strategic decisions concerning Board of Directors.

Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS

Secara umum, kinerja Direksi ditetapkan berdasarkan pencapaian target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta amanat yang diberikan oleh Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatan, sehingga setiap anggota Direksi memiliki pemahaman yang jelas mengenai indikator kinerja yang harus dicapai.

Hasil evaluasi kinerja Direksi, baik secara kolektif maupun individu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan skema kompensasi Direksi. Selain itu, hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi juga menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham dalam menetapkan keputusan terkait pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi yang bersangkutan, serta sebagai sarana peningkatan efektivitas kinerja Direksi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Direksi menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, berdasarkan target yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen yang tercantum dalam RKAP, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja masing-masing anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam *Board Manual* dan target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Laporan tersebut memuat pencapaian kinerja Perseroan secara keseluruhan maupun kinerja masing-masing Direktorat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Perseroan selama periode berjalan.

Performance Appraisal of Board of Directors by GMS

In general, the performance of Board of Directors is determined based on achievement of targets set forth in Company's Work Plan and Budget (RKAP), execution of duties and responsibilities as stipulated in applicable laws and regulations and Articles of Association, as well as mandates given by Shareholders. Formal evaluation criteria are communicated transparently to Board of Directors upon their appointment, ensuring that each member clearly understands performance indicators to be achieved.

The results of performance evaluation of Board of Directors, both collectively and individually, form an integral part of determination of Board of Directors' compensation scheme. Additionally, evaluation results of each individual member serve as one of considerations for Shareholders in deciding on dismissal and/or reappointment of respective Directors, as well as a means to continuously improve effectiveness of Board of Directors' performance.

In practice, Board of Directors prepares and submits performance achievement reports for each Directorate to Board of Commissioners/Supervisory Board in a timely manner, based on targets set in Management Contract as stipulated in the RKAP, as a form of accountability for each Director's performance.

Procedure for Conducting Performance Appraisal of Board of Directors

The performance of Board of Directors is reported to Shareholders through General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism by referring to provisions set out in Board Manual and targets stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The report includes overall performance achievements of the Company as well as the performance of each Directorate as a form of accountability of Board of Directors in managing and administering the Company during the reporting period.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris;
2. Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam rapat;
3. Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun dalam pengambilan keputusan;
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan;
5. Pencapaian target yang tertuang dalam Kontrak Manajemen pada RKAP; dan
6. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indikator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2025 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bagian dari proses akuntabilitas kepada Pemegang Saham. Melalui proses evaluasi tersebut, Pemegang Saham dapat menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Perseroan serta memastikan keselarasan antara strategi yang dijalankan dengan tujuan jangka panjang Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Direksi dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan. Direksi berfokus pada penerapan pendekatan strategis yang terencana dan terarah melalui implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, disertai dengan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan atas setiap langkah strategis yang diambil, guna memastikan tercapainya target kinerja serta tujuan jangka panjang Perseroan secara berkelanjutan.

Performance Evaluation Criteria for Board of Directors

The GMS determines performance criteria for both Board of Directors and individual members. Evaluation criteria for individual Directors include:

1. Attendance at Board of Directors meetings and coordination meetings with Board of Commissioners;
2. Preparedness regarding materials to be discussed in meetings;
3. Participation in discussions and decision-making processes;
4. Compliance with applicable laws and Company policies;
5. Achievement of targets set in Management Contract within RKAP; and
6. Commitment to jointly agreed decisions.

Assessor

The performance appraisal of Board of Directors is conducted by Board of Commissioners and GMS. The appraisal is based on Key Performance Indicators (KPI). The implementation of duties and responsibilities of both Board of Commissioners and Board of Directors, as well as performance achievements in 2025, will be presented and accounted for at GMS.

Results of Performance Appraisal of Board of Directors

The performance appraisal of Board of Directors is conducted continuously and integrated with GMS mechanism as part of accountability to Shareholders. Through this evaluation process, Shareholders are able to assess the effectiveness of Board of Directors in managing Company and ensure alignment between implemented strategies and the Company's long-term objectives.

Throughout 2025, Board of Directors is considered to have made positive contribution to the sustainability of the Company's business. Board of Directors is focused on implementing a structured and well-directed strategic approach through the execution of established policies, accompanied by continuous monitoring and evaluation of each strategic initiative, in order to ensure the achievement of performance targets and long-term objectives of the Company in a sustainable manner.

Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs of Board of Commissioners

Dalam rangka membantu Dewan komisaris dan sebagai penunjang tugas pengawasan, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung di bawah Dewan Komisaris. Organ-organ pendukung ini dibentuk dan bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan Perseroan.

Berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan dan pedoman kerja Perseroan, Dewan Komisaris telah membentuk beberapa organ antara lain:

1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit;
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG;
4. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

Seluruh organ tersebut memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan lainnya dan bekerja berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang berlaku.

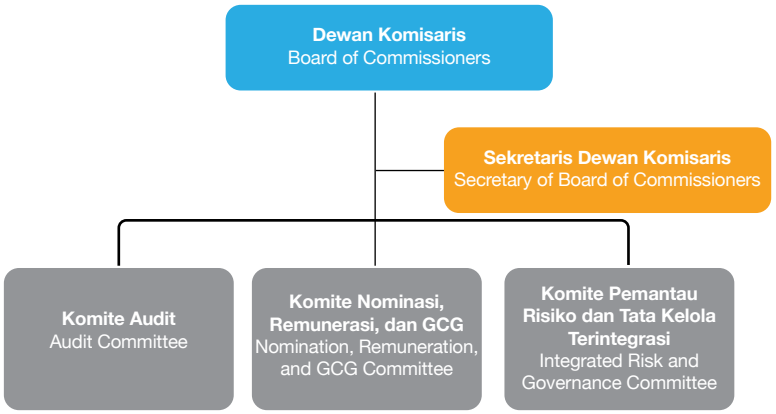
In order to assist Board of Commissioners and to support its supervisory duties, Board of Commissioners has established supporting organs under its authority. These supporting organs are formed and are responsible for carrying out supervisory and advisory functions for Company.

Based on the Company's Articles of Association and internal guidelines, Board of Commissioners has established several supporting organs, namely:

1. Secretary of Board of Commissioners;
2. Audit Committee;
3. Nomination, Remuneration and GCG Committee;
4. Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

All of these organs are interrelated and operate in accordance with applicable principles of corporate governance.

Bagan Organ Pendukung Dewan Komisaris
Structure of Supporting Organs of Board of Commissioners



SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris berperan sebagai bagian penting yang mendukung Dewan Komisaris dalam memastikan kelancaran administrasi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Organ ini dibentuk untuk mengoptimalkan fungsi administrasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

1. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) WEGE;
2. Panduan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* WEGE; dan
3. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris WEGE Tahun 2024.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretary of Board of Commissioners plays a vital role in supporting the Board of Commissioners in ensuring smooth administration and effective implementation of the Board's duties and responsibilities. This organ was established to optimize the administrative function in the decision-making and oversight processes carried out by the Board of Commissioners.

Work Guidelines for Secretary of Board of Commissioners

1. WEGE Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners;
2. WEGE Code of Good Corporate Governance; and
3. WEGE Board of Commissioners Work Plan and Budget Plan for 2024.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Criteria for Secretary of Board of Commissioners

In accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, No.: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Secretary of Board of Commissioners must meet the following requirements:

1. Understand the management, supervision, and development systems of State-Owned Enterprises;
2. Possess good integrity;
3. Understand secretarial functions;
4. Possess strong communication and coordination skills.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada periode yang sama, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office of Secretary of Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office of Secretary of Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a period of 3 (three) years and may be reappointed for another 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss the Secretary at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary of Board of Commissioners

Apridio Rizak Karunia

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Usia Age	33 tahun pada akhir tahun buku 2025	33 years old at the end of the 2025 fiscal year
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Akuntansi – Universitas Airlangga	Bachelor's Degree in Accounting – Airlangga University
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President of Finance Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024 – saat ini | present) • Senior Manager of Strategic Finance & Planning PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 – 2024) • Portfolio Manager PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022 – 2023) • Portfolio Coordinator PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021 – 2022) • Finance Section Head PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019 – 2021)	• Bachelor's Degree in Accounting – Airlangga University • Vice President of Finance Division, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2024 – present) • Senior Manager of Strategic Finance & Planning, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2023 – 2024) • Portfolio Manager, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2022 – 2023) • Portfolio Coordinator, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2021 – 2022) • Finance Section Head, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2019 – 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor SK.02.01/A. KOM.03022/2023	Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.02.01/A. KOM.03022/2023

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Menyiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;

Duties and Responsibilities of Secretary of Board of Commissioners

The duties and responsibilities of Secretary of Board of Commissioners include:

1. Secretary of Board of Commissioners is responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties, including:
   a. Preparing meetings, including briefing sheets for Board of Commissioners;

b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;

c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan tugas lain berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik;
   b. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
   c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris harus memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perseroan.

b. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
c. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;
d. Preparing drafts of Board of Commissioners' work plans and budgets;
e. Preparing drafts of Board of Commissioners' reports; and
f. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners.

2. In addition to carrying out the duties referred to above, the Secretary to the Board of Commissioners, as the head of Board of Commissioners Secretariat, performs other duties, including:
   a. Ensuring that Board of Commissioners complies with laws and regulations and implements the principles of good corporate governance;
   b. Coordinating committee members, if necessary, to facilitate Board of Commissioners' duties; and
   c. Acting as a liaison officer between Board of Commissioners and other parties.
3. To ensure orderly administration and the implementation of good corporate governance, Secretary of Board of Commissioners must ensure that documents regarding the implementation of activities are properly stored within the Company.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, Perseroan memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris. Perseroan memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kelancaran operasional serta memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan Sekretaris Dewan Komisaris memiliki keahlian yang memadai dalam menjalankan peran secara optimal.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Competency Development of Secretary to Board of Commissioners

To support the effectiveness of the Board of Commissioners' supervisory function, the Company prioritizes the competency development of Secretary of Board of Commissioners. The Company facilitates the improvement of knowledge and skills to support smooth operations and strengthen the implementation of supervisory duties. This support aims to ensure that the Secretary of Board of Commissioners possesses adequate expertise to optimally carry out his role.

The training and competency development programs participated in by Secretary of Board of Commissioners during 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Pelatihan Training Name	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Apridio Rizak Karunia	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of Board of Commissioners	Pelatihan Satria Pratama Satria Pratama Training	3 - 5 Juni 2025 June 3-5, 2025	WIKA Satrian

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris berperan aktif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris, khususnya dalam memastikan kelancaran proses pengawasan serta tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan. Peran tersebut dilaksanakan melalui penyediaan dukungan administratif, koordinasi komunikasi antarorgan Perseroan, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi yang diperlukan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

2025 Duties Implementation Report

Throughout 2025, Secretary of Board of Commissioners played an active role in supporting effective implementation of Board of Commissioners' functions and responsibilities, particularly in ensuring the smooth running of supervisory process and the achievement of established strategic objectives. This role was carried out through providing administrative support, coordinating communication between Corporate organs, and managing the documentation and information required by Board of Commissioners in carrying out its duties.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan berbagai aktivitas yang dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan nonrutin. Kegiatan rutin mencakup dukungan administratif dan operasional yang dilaksanakan secara berkala, sementara kegiatan nonrutin meliputi aktivitas yang bersifat insidental atau strategis sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai masing-masing kegiatan tersebut:

1. Kegiatan Rutin Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:
   a. Kegiatan Rapat Dewan Komisaris:
      - Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi.
   b. Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
      - Penyiapan Bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Dukungan Kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Dukungan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris;
      - Penyiapan Konsep Dokumen Persuratan untuk Kebutuhan Dewan Komisaris dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris;
      - Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dewan Komisaris;
      - dan lain-lain.
2. Kegiatan Penyiapan dan Dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris:
   a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan Dewan Komisaris;
   b. Penyusunan Konsep *Standard Operating Procedure* (SOP) atas kegiatan yang dilakukan di lingkungan Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa fungsi kesekretariatan berjalan secara efektif serta mampu mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara optimal. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas dukungan administratif kepada Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban, antara lain meliputi:

In carrying out its duties, Secretary of Board of Commissioners carried out various activities grouped into two main categories: routine activities and non-routine activities. Routine activities include administrative and operational support carried out periodically, while non-routine activities include incidental or strategic activities according to the needs of Board of Commissioners. The following is a further explanation of each of these activities:

1. Routine Activities of Secretary of Board of Commissioners include:
   a. Board of Commissioners Meeting Activities:
      - Preparation of Minutes of Internal Board of Commissioners Meetings;
      - Preparation of Minutes of Board of Commissioners Meetings Including Board of Directors.
   b. Activities for Preparing and Supporting the Activities of Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees:
      - Preparation of Meeting Materials for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees;
      - Preparation of Support for Official Travel Activities for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees;
      - Preparation of Support for Education and Training Activities for Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees;
      - Preparation of Draft Documents for Correspondence for the Needs of Board of Commissioners and/or Supporting Organs of Board of Commissioners;
      - Administration of Incoming and Outgoing Mail for Board of Commissioners;
      - and others.
2. Activities for Preparing and Supporting the Activities of Board of Commissioners and Board of Commissioners Committees:
   a. Education and Training Activities and other activities provided according to the direction and needs of Board of Commissioners;
   b. Preparation of Draft Standard Operating Procedures (SOPs) for activities carried out within Board of Commissioners and its Supporting Organs.

Performance Evaluation and Assessment of Secretary to Board of Commissioners by the Board of Commissioners

The Board of Commissioners periodically evaluates the performance of Secretary of Board of Commissioners to ensure that the secretarial function is running effectively and is able to optimally support the implementation of Board of Commissioners' supervisory duties. This evaluation is also part of the efforts to improve the quality of governance and the effectiveness of administrative support to the Board of Commissioners.

The performance assessment of Secretary of Board of Commissioners is conducted directly by the Board of Commissioners, taking into account the appropriateness of the implementation of assigned duties and responsibilities, including:

1. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;
2. Menghadiri seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal Dewan Komisaris, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, maupun rapat khusus Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun melalui pejabat lain yang ditunjuk sebagai notulis, kecuali rapat khusus yang hanya dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
3. Bertanggung jawab atas pendistribusian informasi yang terkait dengan agenda rapat, serta bertanggung jawab atas penyusunan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris;
4. Merencanakan pelaksanaan teknis program pengenalan dan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat bersama dengan Corporate Secretary.

Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, kinerja Sekretaris Dewan Komisaris telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta mencapai target yang telah direncanakan pada Rencana Kegiatan tahun 2025.

Berikut hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris di tahun 2025:
1. Melakukan penyelenggaraan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali;
2. Melakukan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak 12 kali;
3. Melakukan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025.

KOMITE AUDIT

Pedoman Kerja Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja atau Piagam Komite Audit yang diperbarui dan disahkan terakhir pada 13 November 2023 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/A.KOM. WG.07670/2023. Pedoman ini disusun secara selaras dan sinergis dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang ditetapkan pada 20 Maret 2023 mengenai Organ dan Sumber Daya Manusia di BUMN.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan juga berpedoman pada Board Manual, yang telah diperbarui dan disahkan terakhir pada 11 September 2023. Pedoman ini memberikan landasan operasional yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit

Pada tahun 2025, Komite Audit Perseroan terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang relevan di bidang keuangan dan audit. Komposisi dan susunan anggota Komite Audit disusun secara cermat untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap laporan

1. Carrying out administrative and secretarial duties related to all activities of Board of Commissioners;
2. Attending all Board of Commissioners meetings, including internal Board of Commissioners meetings, Coordination Meetings between Board of Commissioners and Board of Directors, and special Board of Commissioners meetings, either directly or through another official appointed as a note-taker, except for special meetings attended only by Board of Commissioners and/or Board of Directors;
3. Responsible for distributing information related to the meeting agenda, as well as for the preparation, administration, and distribution of the Minutes of Board of Commissioners Meetings;
4. Plan the technical implementation of the induction and training program for newly appointed members of the Board of Commissioners, together with the Corporate Secretary.

Based on the 4 (four) points above, the performance of Secretary of Board of Commissioners has been in accordance with his duties and responsibilities, and has achieved the targets planned in the 2025 Activity Plan.

The following are the performance results of Secretary of Board of Commissioners in 2025:
1. Conducted Internal Board of Commissioners Meetings 12 times;
2. Conducted Board of Commissioners Meetings involving Board of Directors 12 times;
3. Performed administrative and secretarial duties related to all Board of Commissioners activities throughout 2025.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee Work Guidelines

The Company's Audit Committee has a Work Guideline or Audit Committee Charter, which was updated and last ratified on November 13, 2023, based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.KOM.WG.07670/2023. This guideline was developed in harmony and synergy with Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation of Audit Committees, as well as Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) No. PER-3/MBU/03/2023, issued on March 20, 2023, concerning Organs and Human Resources in SOE.

In carrying out its duties, the Company's Audit Committee is also guided by the Board Manual, which was updated and last ratified on September 11, 2023. This guideline provides an operational foundation in accordance with the principles of good corporate governance.

Number, Composition, and Structure of Audit Committee

In 2025, the Company's Audit Committee comprised a number of members selected based on their qualifications, expertise, and relevant experience in finance and auditing. The composition and structure of Audit Committee were carefully designed to support the implementation of its oversight function regarding financial reporting,

keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan. Hal ini dilakukan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menjadi landasan operasional Perseroan.

compliance with applicable regulations, and the effectiveness of the Company's internal control system. This is in line with the implementation of the principles of Good Corporate Governance, which underpin the Company's operations.

Komite Audit dibentuk dengan memperhatikan keberagaman keahlian di berbagai bidang, termasuk akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan, guna memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaporan keuangan, audit internal, dan audit eksternal dilaksanakan secara independen dan objektif. Penunjukan anggota Komite Audit dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kontribusi strategis yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota.

The Audit Committee was formed with a diversity of expertise in various fields, including accounting, auditing, and corporate governance, to ensure that oversight of financial reporting, internal audit, and external audit is carried out independently and objectively. The appointment of Audit Committee members was made through a transparent selection process, taking into account the competencies, integrity, and strategic contributions of each member.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024, susunan dan komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Determination of Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024, the composition and structure of Audit Committee are as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Remarks	**Keahlian** Expertise	**Periode dan Masa Jabatan** Period and Term of Office
Joseph Prajogo	Ketua Komite Audit merangkap anggota Chairman of Audit Committee (also serving as member)	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Akuntansi • Keuangan • Audit • Manajemen Risiko • Manajemen • Accounting • Finance • Audit • Risk Management • Management	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First term
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Risk Management • Strategic Intelligence and Security • Risk Assessment and Mitigation • Conflict Resolution	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First term
Darawati	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pihak Independen Independent Party	• Operasi • Administrasi Bisnis • Audit • Manajemen Risiko • Operations • Business Administration • Audit • Risk Management	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First term

Profil Komite Audit

Profile of Audit Committee

Joseph Prajogo

Ketua merangkap Anggota Komite Audit
Chairman and Member of Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Establishment of Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, beliau ditunjuk sebagai Ketua yang merangkap sebagai Anggota Komite Audit. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Audit Committee, appointed as Chairman and also serves as a Member of Audit Committee. Profile can be found in the Company Profile chapter within the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Taufan Gestoro

Anggota Komite Audit
Chairman and Member of Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Establishment of Audit Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, beliau memiliki peran sebagai Anggota Komite Audit. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Audit Committee, serves as a Member of Audit Committee. Profile can be found in the Company Profile chapter within the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Darawati

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Periode Jabatan pertama Masa Jabatan 11 Juni 2024 - 2027
First Term of Office for the Period of June 11, 2024 - 2027

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Usia Age	60 tahun pada akhir tahun buku 2025	60 years old by the end of fiscal year 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Sipil dari Politeknik Universitas Indonesia, Depok	Bachelor of Civil Engineering from the Polytechnic of the University of Indonesia, Depok
Sertifikasi Profesi Professional Certification	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	
Pengalaman Kerja Work Experience	• Manajer Komersial Operasi DBG WIKA (2007) • Kepala Bagian Komersial WEGE (2011) • Manajer Bidang Komersial Risiko Wilayah I WEGE (2014) • Manajer Biro Evaluasi Hasil Usaha (2016)	• Commercial Operations Manager, DBG WIKA (2007) • Head of Commercial Division, WEGE (2011) • Commercial Risk Manager, Region I, WEGE (2014) • Manager of Business Outcome Evaluation Bureau (2016)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 tentang Penetapan Organ Komite Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A.KOM.WG.07815/2024 concerning the Establishment of Audit Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini Komite Audit tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Currently the Audit Committee does not hold concurrent positions in other companies.	

Pernyataan Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence Statement of Audit Committee

All members of Audit Committee, who are independent parties, have no financial, management, share ownership, or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Independence Aspect	Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Does not have any financial relationship with Board of Commissioners or Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not hold any management position in the Company, its subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have any familial relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as a political party official or as a government official	√	√	√

Rapat Komite Audit

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat

Pada tahun 2025, Komite Audit Perseroan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 30 kali. Setiap rapat membahas berbagai agenda strategis, termasuk evaluasi laporan keuangan, pengawasan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta peninjauan atas kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tingkat kehadiran anggota dalam setiap rapat adalah sebagai berikut:

Audit Committee Meetings

Policy and Frequency of Audit Committee Meeting and Attendance of Audit Committee Members in the Meetings

In 2025, the Company's Audit Committee held a total of 30 meetings. Each meeting discussed various strategic agenda items, including financial statement evaluation, oversight of internal and external audits, and review of compliance with applicable regulations and policies. Member attendance at each meeting was as follows:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	Pembahasan Kinerja Hasil Usaha Perseroan s.d. Desember 2024 dan Perkembangan Proses Audit Keuangan Tahun Buku 2024 Discussion of the Company's Business Results and Performance as of 2024 and the Progress of Financial Audit Process for 2024 Fiscal Year	√	√	√
2	31 Januari 2025 January 31, 2025	Pembahasan *Progress* Audit *External* KAP RSM atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT WIKA Gedung Tbk Tahun Buku s.d. Desember 2024 Discussion of the Progress of External Audit by KAP RSM on the Consolidated Financial Statements of PT Wika Gedung Tbk for the Fiscal Year as of December 2024	√	√	√
3	5 Februari 2025 February 5, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Bagaimana Kesiapan WEGE untuk Menuju *Single System* Pembukuan. 3. Perkembangan Proses Audit Tahun Buku 2024 oleh KAP RSM 4. Pembahasan Berkala Fungsi Perseroan 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. WEGE's Readiness for Moving Toward a Single Accounting System. 3. Progress of the Audit Process for 2024 Fiscal Year by KAP RSM 4. Periodic Discussion of the Company's Functions	√	√	√
4	24 Februari 2025 February 24, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan Perseroan s.d. Januari 2025 2. Pembahasan Usulan Perubahan Organisasi 3. *Review* Pengendalian Intern Tata Kelola Divisi Pemasaran. 1. Discussion of the Company's Business Results and Financial Performance as of January 2025 2. Discussion of Proposed Organizational Changes 3. Review of Internal Control Governance of Marketing Division.	√	√	√

No.	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Kehadiran** Attendance		
			Joseph Prajogo	**Taufan Gestoro**	**Darawati**
5	4 Maret 2025 March 4, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Bulan Januari 2025. 3. Pembahasan Risiko Strategis Perusahaan Menghadapi Pengurangan Anggaran Kementerian. 4. Kinerja Divisi Pemasaran 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Involving Board of Directors. 2. Discussion and Input from Board of Commissioners on Business and Financial Results as of January 2025. 3. Discussion of the Company's Strategic Risks Facing Ministry Budget Reductions. 4. Marketing Division Performance	√	√	√
6.	10 April 2025 April 10, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan Perseroan s.d. Februari 2025 2. *Review* Pengendalian Intern Tata Kelola Divisi QSHE dan SCM 1. Discussion of the Company's Business and Financial Results as of February 2025. 2. Review of Internal Control Governance of QSHE and SCM Divisions.	√	√	√
7.	22 April 2025 April 22, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Bulan Februari 2025. 3. *Stress Test* Hasil Usaha 2025. 4. Perkembangan Pasar Konstruksi dan Issue Global 5. Proyeksi *Cash Flow* 2025 dan Aging Piutang. 6. Perkembangan Piutang dalam Proses Litigasi 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Involving Board of Directors. 2. Discussion and Input from Board of Commissioners on Business and Financial Results as of February 2025. 3. Stress Test of 2025 Business Results. 4. Construction Market Developments and Global Issues 5. 2025 Cash Flow Projections and Receivables Aging. 6. Development of Receivables in the Litigation Process	√	√	√
8.	30 April 2025 April 30, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan Perseroan s.d. Maret 2025. 2. Pembahasan Manajemen Risiko s.d. Maret 2025 1. Discussion of the Company's Business and Financial Results until March 2025. 2. Discussion of Risk Management until March 2025.	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
9.	16 Mei 2025 May 16, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Pembahasan dan Masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Bulan Maret 2025. 3. Pembahasan Fungsi Divisi Manrisk 4. *Review* Target Omzet Kontrak 2025 5. Strategi Pencairan Piutang 6. Strategi Menyikapi Vendor dan Meningkatkan *Altman Z-Score* 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. Discussion and Input from Board of Commissioners on Business and Financial Results until March 2025. March 2025. 3. Discussion of the Risk Management Division's Function 4. Review of 2025 Contract Revenue Targets 5. Accounts Receivable Disbursement Strategy 6. Strategy for Dealing with Vendors and Improving the Altman Z-Score	√	√	√
10.	20 Mei 2025 May 20, 2025	1. Pembahasan *Progress* Audit SPI hingga Bulan April-Mei 2025, Proyek: 2. Pembangunan Stadion Suralaya Lamongan 3. Pembangunan Gedung Fasilitas Biofarma Bandung 4. PT Wika Pracetak Gedung 5. Revitalisasi Gedung BNI (Proyek WPG) 6. *Precast* Struktur Rusun Paspamres (Proyek WPG) 7. Mandiri Matraman (WPG) 1. Discussion of SPI Audit Progress until April-May 2025, Projects: 2. Construction of Suralaya Stadium in Lamongan 3. Construction of Biofarma Facility Building in Bandung 4. PT Wika Pracetak Gedung 5. Revitalization of BNI Building (WPG Project) 6. Precast Structure for Paspamres Apartment (WPG Project) 7. Mandiri Matraman (WPG)	√	√	√
11.	28 Mei 2025 May 28, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. April 2025. 2. Piutang dan PDPK dengan Umur *Aging* >1 tahun 3. Review Pengendalian Intern Divisi IT Dan SPI 1. Discussion of Business and Financial Performance as of April 2025. 2. Accounts Receivable and PDPK with Aging Age >1 Year 3. Review of Internal Controls of IT Division and SPI	√	√	√
12.	13 Juni 2025 June 13, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Pembahasan Hasil Temuan *Joint Internal Audit* WIKA Beton dan WIKA Gedung. 3. Penjelasan Kenaikan PDPK, BDD, dan Piutang Lain Lain. 4. Proyeksi Pencairan Piutang 2025 dan *Update* Proyeksi *Cash Flow* 5. Paparan Divisi Manrisk 6. Mitigasi dan *Punishment* terkait Penurunan Laba Proyek 7. Pembahasan Divisi IT 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. Discussion of the Findings of Joint Internal Audit of Wika Beton and Wika Gedung. 3. Explanation of the Increase in PDPK, BDD, and Other Receivables. 4. Projected 2025 Receivables Disbursement and Updated Cash Flow Projections 5. Presentation from Risk Management Division 6. Mitigation and Punishment Related to Declining Project Profits 7. Discussion of IT Division	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
13.	25 Juni 2025 June 25, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Mei 2025. 2. Perolehan Omzet Kerja Baru Belum Optimal, Divisi Pemasaran Memaparkan *Exit* Strateginya. 3. *Review* Pengendalian Intern 1. Discussion of Business and Financial Performance as of May 2025. 2. New Business Revenue Not Yet Optimal, the Marketing Division Presents its Exit Strategy. 3. Review of Internal Controls	√	√	√
14.	3 Juli 2025 July 3, 2025	1. Pembahasan *Progress* Audit SPI Hingga Bulan Juni 2025, Proyek : 2. Rehabilitasi & Renovasi Stadion Medan 3. *Modern Office* MSP Koperbi Jakarta 4. Gedung Kantor Bank Mandiri Gresik 5. Hotel Ombilin Heritage 1. Discussion of SPI Audit Progress Until June 2025, Projects: 2. Rehabilitation & Renovation of Medan Stadium 3. Modern Office of MSP Koperbi Jakarta 4. Bank Mandiri Office Building in Gresik 5. Ombilin Heritage Hotele	√	√	√
15.	9 Juli 2025 July 9, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. *Exit Strategy* Perusahaan Untuk Perolehan Omzet Kerja Baru 3. Penjelasan Laba Bersih Setelah Pajak 4. Prognosa Laba Usaha Bulan Juni, September, dan Desember 2025 5. *Update* Tim Legal atas Penanganan Piutang Bermasalah Aging >12 Bulan 6. *Update* Divisi Pemasaran 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. Exit Strategy of the Company for Acquiring New Business Revenue 3. Explanation of Net Profit After Tax 4. Operating Profit Forecast for June, September, and December 2025 5. Legal Team Update on Handling of Non-Performance Receivables Aging >12 Months 6. Marketing Division Update	√	√	√
16.	25 Juli 2025 July 25, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Juni 2025. 2. Dominasi Nilai PDPK pada Piutang. 3. Analisis *Cash In* vs *Cash Out* 4. *Review* Pengendalian Intern Divisi Operasi. 1. Discussion of Business and Financial Performance Results until June 2025. 2. Dominance of PDPK Value in Receivables. 3. Cash In vs. Cash Out Analysis 4. Review of Internal Control in Operations Division.	√	√	√
17.	30 Juli 2025 July 30, 2025	1. Pembahasan *Progress* Audit SPI Hingga Bulan Juli 2025, Proyek: a. WING 1 – IKN b. BI Kerawang c. BI Nuansa Cilangkap d. Pabrik Modular 1. Discussion of SPI Audit Progress Until July 2025, Projects: a. WING 1 – IKN b. BI Kerawang c. BI Nuansa Cilangkap d. Modular Factory	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
18.	5 Agustus 2025 August 5, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Penjelasan Rincian PDPK dengan *Agingnya* Serta Strategi dalam Mengelola Penumpukan PDPK 3. Penjelasan *Locking* PDPK 4. *Highlight* Kinerja Keuangan 5. Paparan Proyek *Cash In<Cash Out* 6. Risiko *Shortfall Cashflow* 7. Paparan Divisi Legal dan Adkon 1. Follow-up to the Results of Board of Commissioners Meeting Involving Board of Directors. 2. Explanation of PDPK Details with Aging and Strategies for Managing PDPK Accumulation 3. Explanation of PDPK Locking 4. Financial Performance Highlights 5. Cash In < Cash Out Project Presentation 6. Cash Flow Shortfall Risk 7. Legal and Adkon Division Presentation	√	√	√
19.	12 Agustus 2025 August 12, 2025	*Kick Off Meeting* Audit KAP oleh RSM atas Laporan Keuangan Perusahaan s.d. Bulan Juni 2025 KAP Audit Kick-Off Meeting by RSM for the Company's Financial Statements until June 2025	√	√	√
20.	26 Agustus 2025 August 26, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Juli 2025. 2. *Review* Pengendalian Intern Divisi Risk Manajemen 1. Discussion of Business and Financial Performance Results until July 2025. 2. Internal Control Review of Risk Management Division	√	√	√
21.	4 September 2025 September 4, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Kerugian atas Beban Masa Lalu *Set Off* Utang Vendor dengan Aset. 3. Bagaimana Tingkat Kedisiplinan dan Keakuratan Pelaporan Keuangan dan Komersial dari Unit Kerja. 4. Performa *Review* per Divisi Operasi. 5. *Update* Saldo Piutang dan Statusnya s.d. Juli 2025. 1. Follow-up to the Results of Board of Commissioners Meeting Involving Board of Directors. 2. Losses on Past Expenses Set Off Vendor Liabilities with Assets. 3. The Level of Discipline and Accuracy of Financial and Commercial Reporting of Work Unit. 4. Performance Review per Operational Division. 5. Update of Accounts Receivable Balances and Status as of July 2025.	√	√	√
22.	18 September 2025 September 18, 2025	1. Pembahasan *Progress* Audit SPI Hingga Bulan Agustus 2025, atas Pemeriksaan: 2. Divisi Operasi 3. Divisi Operasi Modular 4. Divisi Operasi dan Konsesi 5. Divisi Risiko Manajemen 1. Discussion of Internal Audit Progress Until August 2025, Regarding the Audit of: 2. Operations Division 3. Modular Operations Division 4. Operations and Concession Division 5. Risk Management Division	√	√	√
23.	26 September 2025 September 26, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Agustus 2025. 2. *Review* Pengendalian Intern Divisi Operasi Modular dan Divisi Operasi Konsesi 1. Discussion of Business and Financial Results Performance until August 2025. 2. Internal Control Review of Modular Operations Division and Concession Operations Division	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
24.	7 Oktober 2025 October 7, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Paparan Prognosa Desember 2025 3. Paparan RKAP 2026 4. Strategi dan Program Detail Perolehan Omzet Kerja Baru 2025. 5. *Lesson Learn* dan *Gap* atas Perolehan Omzet Kerja Baru. 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. Presentation of December 2025 Prognosis 3. Presentation of the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) 4. Detailed Strategy and Program for Acquiring New Work Revenue in 2025. 5. Lessons Learned and Gaps in Acquiring New Work Revenue.	√	√	√
25.	16 Oktober 2025 October 16, 2025	*Kick Off Meeting* Audit Eksternal KAP RSM atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wika Gedung Tbk Tahun Buku Hingga 31 Des 2025. Kick-Off Meeting of External Audit Office of RSM for the Consolidated Financial Statements of PT Wika Gedung Tbk for the Fiscal Year Until December 31, 2025.	√	√	√
26.	30 Oktober 2025 October 30, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. September 2025. 2. Prognosa Hasil Usaha Desember 2025 dan Rincian Beban Lain Lain. 3. Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun 2026 4. Pembahasan Risiko Periode September 2025 1. Discussion of Business and Financial Results as of September 2025. 2. Business Results Prognosis for December 2025 and Details of Other Expenses. 3. Discussion of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) for 2026 4. Discussion of Risks for September 2025 Period	√	√	√
27.	14 November 2025 November 14, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Proyeksi Perolehan Omzet Kerja Baru Tahun 2025 3. Mitigasi Risiko Pembukuan Kerugian terhadap Bisnis Perusahaan. Paparan Prognosa Desember 2025 4. Strategi Direksi dalam Memitigasi Risiko Denda Keterlambatan Proyek Basilika IKN 5. Rencana Perbaikan terhadap Proyek *Delay* dan Proyek *Overbudget.* 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners' Meetings Involving Board of Directors. 2. Projection of New Business Revenue for 2025 3. Mitigation of the Risk of Booking Losses on the Company's Business. Presentation of the December 2025 Prognosis 4. The Board of Directors' Strategy in Mitigating the Risk of Fines for IKN Basilica Project Delay 5. Improvement Plan for Delayed and Overbudgeted Projects.	√	√	√
28.	26 November 2025 November 26, 2025	1. Pembahasan Kinerja Hasil Usaha dan Keuangan s.d. Oktober 2025. 2. Proyeksi Desember 2025 dan Sasaran Pokok 2026 dan Laporan Laba Rugi 1. Discussion of Business and Financial Results as of October 2025. 2. Projection for December 2025 and Main Targets for 2026 and Profit and Loss Statement	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Taufan Gestoro	Darawati
29.	10 Desember 2025 December 10, 2025	1. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi Sebelumnya. 2. Hasil Usaha dan *Cashflow* s.d. Oktober 2025 3. Kinerja Keuangan 4. Grafik Ra/Ri Perolehan Omzet Kerja Baru s.d. Desember 2025 5. Paparan Divisi *Engineering*. 1. Follow-up to the Results of Previous Board of Commissioners Meeting Including Board of Directors. 2. Business Results and Cash Flow as of October 2025 3. Financial Performance 4. Ra/Ri Graph of New Work Revenue as of December 2025 5. Engineering Division Presentation.	√	√	√
30.	17 Desember 2025 December 17, 2025	1. Pembahasan Progress Audit SPI Hingga Bulan Desember 2025, atas Pemeriksaan: 2. Proyek Tower Undip Semarang 3. Proyek RS Klaten 4. PT Wege Solusi Proklamasi 5. Divisi Pemasaran 6. Divisi Keuangan 7. PKPT 2026 1. Discussion of SPI Audit Progress as of December 2025, regarding the Audit of: 2. Undip Semarang Tower Project 3. Klaten Hospital Project 4. PT Wege Solusi Proklamasi 5. Marketing Division 6. Finance Division 7. PKPT 2026	√	√	√

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Audit

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Audit dalam setiap rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Recapitulation of Audit Committee Meeting Attendance

The following is a summary of Audit Committee members' attendance at each meeting held throughout 2025:

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Joseph Prajogo	Ketua merangkap anggota Komite Audit Chairman and Member of Audit Committee	30	30	100
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	30	30	100
Darawati	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	30	30	100

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi untuk anggota Komite Audit, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komite dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Program ini bertujuan agar Komite Audit dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, seiring dengan perubahan regulasi dan penerapan praktik terbaik di industri.

Pada tahun 2025, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

Training and/or Competency Development of Audit Committee

The Company provides competency improvement programs for Audit Committee members, aimed at enhancing the committee's ability to carry out its oversight function over the management of the Company by the Board of Directors. This program is intended to enable Audit Committee to perform its roles and responsibilities more effectively, in line with regulatory changes and the implementation of industry best practices.

By 2025, Audit Committee participated in the following competency development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pendidikan/ Pelatihan Education/Training Program	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Joseph Prajogo	Ketua merangkap anggota Komite Audit Chairman and Member of Audit Committee	-	-	-
Taufan Gestoro	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Pelatihan *Business Continuity Based on* ISO 22301 ISO 22301-Based Business Continuity Training	20-22 Oktober 2025 October 20-22, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
Darawati	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Sertifikasi Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP)	14-15 Mei 2025 May 14-15, 2025	Risk Advisory & Performance (RAP)
		Diskusi Panel GRC Terintegrasi 2025 Integrated GRC Panel Discussion 2025	26 Juni 2025 June 26, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Risk Management Professional Certification Body

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan sepanjang tahun 2025, yang bertujuan untuk memastikan pengawasan yang efektif atas pengelolaan keuangan dan operasional Perseroan.

Adapun tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of Audit Committee's Duties and Activities in 2025

Audit Committee carried out various duties and activities throughout 2025, aimed at ensuring effective oversight of the Company's financial and operational management.

The duties and activities performed by Audit Committee in 2025 were as follows:

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
1	Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.	Sepanjang tahun 2025, Komite Audit dan Risiko telah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan kepada publik dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: • Penelaahan Laporan Keuangan Konsolidasian: • Komite Audit dan Risiko telah melakukan reviu atas: • *Draft* Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 31 Desember 2024 pada tanggal 23 Januari 2025 • *Draft* Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 31 Maret 2025 pada tanggal 25 April 2025 • *Draft* Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 30 Juni 2025 pada tanggal 25 Juli 2025 • *Draft* Laporan Keuangan Konsolidasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 30 September 2025 pada tanggal 24 Oktober 2025 Penelaahan dilakukan melalui: a. Analisis atas akun-akun signifikan b. Verifikasi atas kecukupan dan kewajaran pengungkapan (*disclosure*) c. Evaluasi atas konsistensi penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) • Penelaahan atas Analisis *Executive Summary* Bulanan Komite Audit dan Risiko melakukan review dan memberikan tanggapan tertulis atas *Executive Summary* bulanan sepanjang tahun 2025 (Desember 2024–November 2025), termasuk penyampaian surat tanggapan resmi kepada Direksi melalui Dewan Komisaris. Fokus penelaahan mencakup: d. Kinerja hasil usaha dan posisi keuangan e. Profil risiko korporasi dan top 5 risiko proyek f. *Cash flow* g. *Monitoring* Piutang h. Kenaikan signifikan akun PDPK, BDD, dan piutang lainnya i. Strategi mitigasi risiko terhadap tekanan likuiditas dan litigasi vendor

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
	Conducting a review of financial information to be disclosed by the Company to the public and/or regulatory authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information.	Throughout 2025, Audit and Risk Committee conducted reviews of financial information to be published to the public and submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX), including: • Review of Consolidated Financial Statements: • Audit and Risk Committee reviewed: • Draft Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of December 31, 2024, on January 23, 2025 • Draft Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of March 31, 2025, on April 25, 2025 • Draft Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of June 30, 2025, on July 25, 2025 • Draft Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk as of September 30, 2025, on October 24, 2025 The review was conducted through: a. Analysis of significant accounts b. Verification of the adequacy and fairness of disclosures c. Evaluation of the consistency in the application of Financial Accounting Standards (SAK) • Review of Monthly Executive Summary Analysis Audit and Risk Committee reviewed and provided written responses to the monthly Executive Summary throughout 2025 (December 2024–November 2025), including the submission of formal response letters to Board of Directors through Board of Commissioners. The scope of the review included: 1. Operating performance and financial position 2. Corporate risk profile and top 5 project risks 3. Cash flow 4. Receivables monitoring 5. Significant increases in PDPK, BDD, and other receivables accounts 6. Risk mitigation strategies in response to liquidity pressures and vendor litigation
2	Melakukan penelaahan atas ketaatan PT Wijaya Karya Realisasi Kegiatan Realization of Activities Dari hasil telaahan dapat disimpulkan bahwa PT Wijaya Karya Bangunan Bangunan Gedung Tbk terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Conducting a review of the compliance of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk with laws and regulations related to its business activities. Based on the review results, it can be concluded that PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk has complied with applicable laws and regulations governing its operations.	Komite Audit dan Risiko melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan melalui: 1. Evaluasi atas laporan hasil pemeriksaan Internal Audit 2. Pemantauan implementasi pengendalian internal dan tata kelola 3. Reviu atas kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan pasar modal Berdasarkan hasil telaahan, dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Komite Audit juga memberikan perhatian khusus pada: 1. Kepatuhan dalam pelaporan keuangan 2. Proses transisi *single system* (ERP Wika Gedung ke SAP Wika *Holding*) 3. Konsistensi data antara laporan Internal Audit dan *Executive Summary* Audit and Risk Committee reviewed the Company's compliance with laws and regulations through: 1. Evaluation of Internal Audit reports 2. Monitoring the implementation of internal controls and governance 3. Reviewing compliance with Financial Accounting Standards and capital market regulations Based on the review, it can be concluded that the Company has complied with laws and regulations related to the Company's business activities. In addition, Audit Committee also pays special attention to: 1. Compliance in financial reporting 2. Single system transition process (ERP Wika Gedung to SAP Wika Holding) 3. Data consistency between the Internal Audit report and the Executive Summary

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
3	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya. Providing an independent opinion in the event of a disagreement between the management of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and the External Auditor/Public Accountant regarding the services rendered.	1. Komite Audit telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tahun Buku 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KAP telah menugaskan tim audit yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit. Selama proses audit berlangsung, tidak terdapat benturan kepentingan antara AP dan/atau KAP dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi auditor. Dalam pelaksanaan penugasannya, AP dan/atau KAP telah menerapkan keahlian profesional secara cermat dan seksama sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). 2. Komite Audit menilai bahwa waktu pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP telah memadai. Proses audit dimulai sejak 1 November 2024 dan diselesaikan pada 14 Maret 2025, sehingga laporan auditor independen dapat diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan yaitu 20 Maret 2025. Pelaksanaan audit tersebut juga telah memenuhi ketentuan terkait publikasi laporan keuangan serta penyampaian laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 3. Dalam pelaksanaan audit tersebut, AP dan/atau KAP juga memberikan beberapa masukan dan rekomendasi kepada Perseroan terkait dengan area pengendalian internal dan area signifikan lainnya. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam bentuk management letter, yang menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal serta perbaikan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. 1. Audit Committee has evaluated the audit conducted by Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) on the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for 2024 Fiscal Year. Based on the evaluation results, KAP has assigned an audit team with sufficient competence and experience to conduct the audit. During the audit process, there was no conflict of interest between AP and/or KAP and the Company that could affect the auditor's independence. In carrying out their assignments, AP and/or KAP have applied professional expertise carefully and thoroughly in accordance with the Public Accountant Professional Standards (SPAP). 2. Audit Committee assessed that the audit time by AP and/or KAP was adequate. The audit process began on November 1, 2024, and was completed on March 14, 2025, allowing the independent auditor's report to be issued by the Company's deadline of March 20, 2025. The audit also complied with the requirements for the publication of financial statements and the submission of financial statements to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX). 3. During the audit, Public Accountant and/or Public Accountant Office (KAP) also provided input and recommendations to the Company regarding internal control and other significant areas. These recommendations were presented in a management letter, which is part of an effort to improve the effectiveness of internal control and continuously improve corporate governance.
4	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of External Auditor/Public Accountant, based on independence, scope of engagement, and fees.	Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas proses pengadaan jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan mempertimbangkan aspek independensi, ruang lingkup penugasan, kompetensi auditor, serta kewajaran imbalan jasa audit. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Surat Nomor MJ.05.00/A.KOM.00002.D.WEGE/2025 tanggal 23 April 2025 untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai Auditor Eksternal Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris mengusulkan penunjukan kembali KAP tersebut kepada Pemegang Saham untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak, evaluasi kinerja Perseroan, serta audit kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. In order to carry out its duties, Audit Committee has conducted an evaluation of the procurement process for the Company's financial statement audit services for the 2025 Fiscal Year by considering the aspects of independence, scope of assignment, auditor competence, and the fairness of audit service fee. Based on the evaluation results, Audit Committee submitted a recommendation to the Board of Commissioners through Letter Number MJ.05.00/A.KOM.00002.D.WEGE/2025 dated April 23, 2025 to appoint Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) as the Company's External Auditor. Furthermore, Board of Commissioners proposed the reappointment of Public Accounting Firm to the Shareholders to conduct an audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries, an evaluation of the Company's performance, and an audit of compliance with applicable regulations for the fiscal year ending December 31, 2025.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
5	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI. Conducting a review of the implementation of audit by Internal Audit Unit (SPI) and supervising the implementation of follow-up actions by Board of Directors on SPI audit findings.	Komite Audit dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 1. Pelaksanaan PKPT 2025 Pemeriksaan mencakup: a. Proyek konstruksi b. Divisi Operasi c. Divisi Fungsional d. Anak Perusahaan dan *Joint Operation* Realisasi pemeriksaan dibandingkan dengan rencana PKPT 2025 dimonitor secara berkala melalui rapat koordinasi dengan Internal Audit 2. *Monitoring* Tindak Lanjut Temuan Audit Sepanjang tahun 2025: a. Total temuan: 114 b. Telah ditindaklanjuti: 102 temuan c. Tingkat penyelesaian: 89,47% (*close*) Komite Audit memberikan berbagai rekomendasi strategis kepada Internal Audit dan Direksi, antara lain: a. Penguatan pengawalan pengendalian internal proyek b. Fokus audit pada Divisi Keuangan dan Akuntansi c. Monitoring efisiensi dan in-efisiensi proyek d. Penguatan integrasi sistem (ERP ke SAP *Holding*) e. Mitigasi risiko proyek dengan pemberi kerja yang mengalami tekanan likuiditas Audit and Risk Committee monitored and evaluated: 1. Implementation of 2025 PKPT Audit covers: a. Construction projects b. Operations Division c. Functional Division d. Subsidiaries and Joint Operations Audit performance compared to the 2025 PKPT plan is monitored periodically through coordination meetings with Internal Audit. 2. Monitoring Follow-up on Audit Findings Throughout 2025: a. Total findings: 114 b. Follow-up actions: 102 findings c. Completion rate: 89.47% (closed) Audit Committee provided various strategic recommendations to Internal Audit and Board of Directors, including: a. Strengthening project internal control oversight b. Focusing audit on Finance and Accounting Division c. Monitoring project efficiency and inefficiencies d. Strengthening system integration (ERP to SAP Holding) e. Mitigating project risks with employers experiencing liquidity pressures

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Audit Items in the Audit Committee Charter	Realisasi Kegiatan Realization of Activities
6	Melakukan penelaahan dan Analisis serta memberikan rekomendasi kepada Perusahaan melalui Dewan Komisaris atas *Executive Summary* bulanan. Conducting reviews and analyses, and providing recommendations to the Company through Board of Commissioners on monthly Executive Summary.	Sepanjang tahun 2025, Komite Audit dan Risiko secara aktif melakukan analisis dan memberikan rekomendasi atas Executive Summary bulanan, yang mencakup: 1. Strategi pengelolaan risiko korporasi 2. Mitigasi dampak efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga 3. Strategi penurunan HPP dan peningkatan kualitas laporan proyek 4. Strategi penurunan piutang dan pengelolaan litigasi 5. Penguatan pengelolaan cash flow Penelaahan tersebut dilakukan melalui: 1. 30 kali rapat sepanjang tahun 2025 2. Penyampaian surat tanggapan resmi kepada Direksi melalui Dewan Komisaris Hasil Penelaahan dan Analisa serta rekomendasi tersebut dituangkan Dalam surat tanggapan resmi sebagai berikut: • Laporan *Executive Summary* bulan Desember 2024 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00001.A.WEGE /2025 tertanggal 23 Januari 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Januari 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.0001.B.WEGE /2025 tertanggal 21 Februari 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Februari 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00002.A.WEGE /2025 tertanggal 25 Maret 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Maret 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00002.B.WEGE /2025 tertanggal 25 April 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan April 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00004.A.WEGE /2025 tertanggal 26 Mei 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Mei 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00005.WEGE /2025 tertanggal 25 Juni 2025. • Laporan Executive *Summary* bulan Juni 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00009.WEGE /2025 tertanggal 25 Juli 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Juli 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00012.A.WEGE /2025 tertanggal 22 Agustus 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Agustus 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00013.WEGE /2025 tertanggal 25 September 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan September 2025 melalui Nomor Surat MJ.05.00/A.KOM.WG.00016.WEGE /2025 tertanggal 24 Oktober 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan Oktober 2025 melalui Nomor Surat DK.01.00/A.KOM.WG.00016.A.WEGE /2025 tertanggal 24 November 2025. • Laporan *Executive Summary* bulan November 2025 melalui Nomor Surat DK.01.00/A.KOM.00017.WEGE/2025 tertanggal 23 Desember 2025. Throughout 2025, Audit and Risk Committee actively analyzed and provided recommendations on monthly Executive Summary, which includes: 1. Corporate risk management strategy 2. Mitigating the impact of Ministry/Agency budget efficiency 3. Strategy for reducing COGS and improving the quality of project reports 4. Strategy for reducing receivables and managing litigation 5. Strengthening cash flow management The review was conducted through: 1. 30 meetings throughout 2025 2. Submission of an official response letter to Board of Directors through Board of Commissioners The results of the review, analysis, and recommendations were outlined in the following official response letters: • Executive Summary Report for December 2024 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00001.A.WEGE/2025 dated January 23, 2025. • Executive Summary Report for January 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.0001.B.WEGE /2025 dated February 21, 2025. • Executive Summary Report for February 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00002.A.WEGE /2025 dated March 25, 2025. • Executive Summary Report for March 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00002.B.WEGE /2025 dated April 25, 2025. • Executive Summary Report for April 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00004.A.WEGE /2025 dated May 26, 2025. • Executive Summary Report for May 2025 through letter number Letter MJ.05.00/A.KOM.WG.00005.WEGE /2025 dated June 25, 2025. • Executive Summary Report for June 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00009.WEGE /2025 dated July 25, 2025. • Executive Summary Report for July 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00012.A.WEGE /2025 dated August 22, 2025. • Executive Summary Report for August 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00013.WEGE /2025 dated September 25, 2025. • Executive Summary Report for September 2025 through letter number MJ.05.00/A.KOM.WG.00016.WEGE/2025 dated October 24, 2025. • Executive Summary Report for October 2025 through letter number DK.01.00/A.KOM.WG.00016.A.WEGE/2025 dated November 24, 2025. • Executive Summary Report for November 2025 through letter number DK.01.00/A.KOM.00017.WEGE/2025 dated December 23, 2025.

Rencana Program Kerja Komite Audit Tahun 2026

Pada tahun 2026, kegiatan Komite Audit akan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non-Rutin.

Kegiatan Rutin Komite Audit yang direncanakan meliputi:

1. Penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang akan ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi antara Komite Audit dan SPI.
2. Pengawasan atas capaian kinerja auditor eksternal (KAP), yang akan diikuti dengan Rapat Koordinasi antara Komite Audit, Manajemen WIKA, SPI, dan KAP.
3. Penelaahan terhadap hasil capaian kinerja Perseroan, yang akan ditindaklanjuti dengan Rapat Internal Komite Audit, serta kontribusi Komite Audit dalam Rapat Internal Dewan Komisaris atau Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penelaahan terhadap pelaksanaan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Perseroan.
5. Penelaahan terhadap sistem manajemen risiko yang ada, serta evaluasi atas pelaksanaannya.
6. Penelaahan terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026, serta kesesuaiannya dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan 2024-2028.

Kegiatan Non-Rutin Komite Audit antara lain meliputi:

1. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Komite Audit dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi yang mendalam terhadap aspek-aspek tertentu dari pengelolaan Perseroan.
2. Program pendidikan dan pelatihan yang disusun khusus untuk anggota Komite Audit, guna memperkuat kompetensi dan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penerapan praktik tata kelola yang baik di Perseroan.

Audit Committee Work Plan for 2026

In 2026, the Audit Committee's activities will be divided into two main categories: Routine Activities and Non-Routine Activities.

Planned routine activities of Audit Committee include:

1. Review of Audit Reports conducted by the Internal Audit Unit (SPI), which will be followed up with a Coordination Meeting between Audit Committee and SPI.
2. Monitoring the performance of the external auditor (KAP), which will be followed up with a Coordination Meeting between Audit Committee, WIKA Management, SPI, and KAP.
3. Review of the Company's performance, which will be followed up with Internal Audit Committee Meeting, as well as the Committee's contribution to Internal Board of Commissioners Meetings or Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Review of the implementation and effectiveness of the Company's Internal Control System.
5. Review of the existing risk management system and evaluation of its implementation.
6. Review of the Draft of Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for 2026, and its alignment with the Company's Long-Term Plan 2024-2028.

Non-Routine Activities of Audit Committee include, among others:

1. Business travel undertaken by Audit Committee to carry out in-depth oversight and evaluation of certain aspects of the Company's management.
2. Education and training programs specifically designed for Audit Committee members to strengthen their competence and capacity in carrying out their oversight function and ensuring the implementation of good governance practices in the Company.

No	Nama Kegiatan Name of Activity	Rencana Plan
1	Kunjungan ke proyek RS Klaten untuk meninjau secara langsung perkembangan pelaksanaan proyek, mengidentifikasi potensi risiko operasional, serta memperoleh masukan terkait implementasi pengendalian internal dan tata kelola proyek. Visit to Klaten Hospital project to directly review the progress of project implementation, identify potential operational risks, and obtain input regarding the implementation of internal controls and project governance.	1 kali 1 time

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite pendukung yang dibentuk untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap pengelolaan Perseroan. Komite-komite tersebut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, meliputi Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG), dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite tambahan sesuai dengan kebutuhan strategis Perseroan, dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

NOMINATION, REMUNERATION, AND GCG COMMITTEE

Board of Commissioners is supported by committees established to ensure effective implementation of its supervisory and advisory functions over the management of the Company. These committees report directly to the Board of Commissioners and include the Audit Committee, Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. If necessary, Board of Commissioners may establish additional committees in accordance with the Company's strategic needs, while taking into account existing capacity and capabilities.

Selain dukungan dari komite-komite tersebut, Dewan Komisaris juga didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran komunikasi antara Dewan Komisaris dan manajemen, mendukung pelaksanaan fungsi administratif, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pedoman Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. telah menetapkan pedoman kerja yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.08250/2023 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG.

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan tata kelola Perusahaan yang baik, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG juga mengacu pada Board Manual PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang diterbitkan pada tanggal 11 September 2023, serta mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 34/ POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik.

Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Pada tahun 2025, Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perseroan terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih berdasarkan kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang relevan di bidang tata kelola perusahaan, manajemen sumber daya manusia, serta kebijakan remunerasi. Komposisi dan susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG disusun secara cermat untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan nominasi, kebijakan remunerasi, serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dibentuk dengan memperhatikan keberagaman keahlian di berbagai bidang, termasuk manajemen sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, dan remunerasi, guna memastikan bahwa pengawasan terhadap kebijakan nominasi, kebijakan remunerasi, serta implementasi prinsip GCG dilaksanakan secara independen, objektif, dan transparan. Penunjukan anggota Komite dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta kontribusi strategis yang dapat diberikan oleh masing-masing anggota dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik serta pengembangan sumber daya manusia Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024, susunan dan komposisi Komite Nominasi, Remunerasi, GCG adalah sebagai berikut:

In addition to support from these committees, Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of Board of Commissioners. The of Board of Commissioners plays a strategic role in ensuring smooth communication between the Board of Commissioners and management, supporting administrative functions, and ensuring compliance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter

The Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. has established a charter ratified through the Board of Commissioners' Decree No. SK.02.01/A.KOM.WG.08250/2023 regarding the Charter of Nomination, Remuneration, and GCG Committee.

As part of efforts to ensure good corporate governance, Nomination, Remuneration, and GCG Committee also refers to the Board Manual of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., issued on September 11, 2023, and complies with the provisions stipulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees for Issuers or Public Companies.

Number, Composition, and Structure of Nomination, Remuneration, and GCG Committee

In 2025, the Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee consists of several members selected based on qualifications, expertise, and relevant experience in corporate governance, human resource management, and remuneration policies. The composition and structure of the Committee are carefully arranged to support effective oversight of nomination policies, remuneration policies, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company in accordance with applicable regulations.

The Committee is formed with due consideration of diverse expertise across various fields, including human resource management, corporate governance, and remuneration, to ensure that oversight of nomination and remuneration policies, as well as the implementation of GCG principles, is carried out independently, objectively, and transparently. Committee members are appointed through a transparent selection process, taking into account their competence, integrity, and potential strategic contributions in strengthening good corporate governance practices and developing the Company's human resources.

Based on the Board of Commissioners' Decree of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.WG.07817/2024 regarding the Establishment of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., dated June 11, 2024, the composition and structure of Nomination, Remuneration, and GCG Committee are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Period of Office
Taufan Gestoro	Ketua merangkap anggota Chairman and member	Komisaris Independen Independent Commissioner	• *Risk Management* • *Strategic Intelligence and Security* • *Risk Assessment and Mitigation* • *Conflict Resolution*	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First Period
Suli Fatimah	Anggota Member	Komisaris Commissioner	• Psikologi • SDM • Psychology • Human Resources	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First Period
Diah Sulistiorini	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	• Akuntansi • Manajemen Risiko • Audit • Accounting • Risk Management • Audit	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First Period
Mohamad Fadila	Anggota Member	Internal Perusahaan Internal Company	• SDM • Pengembangan • Organisasi • Human Resources • Development • Organization	Januari 2025 s/d Desember 2025, Periode ke satu January 2025 to December 2025, First Period

Profil Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

Profile of Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee

Taufan Gestoro

Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Chairman and Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM. WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A. KOM. WG.07817/2024 concerning the Establishment of Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau di tunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee, appointed as Chairman and Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee. Profile can be seen in the Company Profile Chapter within the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Suli Fatimah

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A.KOM. WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A. KOM. WG.07817/2024 concerning the Establishment of Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee, appointed as Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee. Profile can be seen in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Diah Sulistiorini

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

Periode Jabatan pertama Masa Jabatan 11 Juni 2024 - 2027
First Term of Office for the Period of Juni 11, 2024 - 2027

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Usia Age	65 tahun pada akhir tahun buku 2024	65 years old at the end of the 2024 fiscal year
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1987)	Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1987)
Sertifikasi Profesi Professional Certifications	• Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, 1987. • No. Register Akuntan Negara : D-8.056 • No. Keanggotaan IAI : 11.D8056 • No. Register Negara Akuntan : RNA 3908	• Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, 1987. • No. Register Akuntan Negara : D-8.056 • No. Keanggotaan IAI : 11.D8056 • No. Register Negara Akuntan : RNA 3908
Pengalaman Kerja Work Experience	• Fungsional Auditor dan Konsultan GCG, KPI, Manajemen Risiko di BPKP (1993-2017) • Komite Audit PT Jakarta Propertindo (2007) • Pengajar Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (2000-2006) • Pengajar Auditing di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2003-2004) • Pengajar Diklat BNI dan Perum Pegadaian mata ajaran Pengantar Akuntansi, Anggaran, Perpajakan • di Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2004)	• Functional Auditor and GCG, KPI, and Risk Management Consultant at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1993-2017) • Audit Committee of PT Jakarta Propertindo (2007) • Accounting Lecturer at the College of Risk Management and Insurance (2000-2006) • Auditing Lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia (2003-2004) • Training Lecturer for BNI and Perum Pegadaian, Introduction to Accounting, Budgeting, and Taxation • Management Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia (2000-2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A. KOM. WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A. KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Currently Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee does not hold concurrent positions in other companies.	

Mohamad Fadila

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Nomor: SK.02.01/A. KOM.WG.07817/2024 tentang Penetapan Organ Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No.: SK.02.01/A. KOM.WG.07817/2024 concerning the Establishment of Nomination, Remuneration, Good Corporate Governance (GCG) Committee Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG). Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Pejabat Eksekutif di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee, appointed as a Member of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee. Profile can be seen in the Company Profile chapter under Executive Officer Profiles in this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence Statement of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

Members of Audit Committee from independent parties have no financial, managerial, share ownership, and/or family relationships with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, nor any relationship with the Company that could affect their ability to act independently.

Aspek Independensi Aspek Independensi	Taufan Gestoro	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Mohamad Fadila
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship with the company, subsidiaries, or affiliated companies	√	_	√	_
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as an administrator for a political party, official, or government official	√	√	√	√

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat serta Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat

Ketentuan Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG sebagai berikut:

- Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG;
- Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
- Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, bilamana rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau anggota senior rapat dianggap batal;
- Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;
- Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati;
- Keputusan rapat Komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
- Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;

Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Meetings

Policy and Frequency of Meeting and Attendance of Committee Members

The terms for Nomination, Remuneration, and GCG Committee Meetings are as follows:

- Nomination, Remuneration, and GCG Committee shall hold a meeting at least once every 3 (three) months to finalize the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Work Program;
- If deemed necessary, the Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the meeting with the knowledge of the relevant member of Board of Directors;
- Committee meetings shall be chaired by the Committee Chairman. If the Committee Chairman is unable to attend, the meeting shall be chaired by the most senior member of Nomination, Remuneration, and GCG Committee. If the Chairman and/or senior member cannot attend, the meeting shall be deemed cancelled;
- Committee Chairman shall issue a summons for the meeting;
- The meeting summons shall be issued at least seven (7) days in advance, and in urgent cases, at least two (2) days in advance, stating the day, date, time, venue, and agenda to be discussed. The meeting shall be held at the Company's domicile or at another agreed-upon location within the Republic of Indonesia.
- Decisions of Committee meetings deemed by the meeting chairman to be strategic in nature are only effective if they have been approved by the Board of Commissioners;
- Everything discussed and decided at Committee meetings, including dissenting opinions, is recorded in the Minutes of Meeting, which are signed by all Committee members present, as valid evidence of the decisions taken at the meeting;

- Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
- Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
- Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*);
- Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

- Each Committee member is given the broadest possible freedom to express their professional opinions in the discussion of each meeting agenda without any intervention;
- Each Committee member has the right to receive a copy of the Minutes of Meeting, even if they are not present at the meeting;
- The attendance of Committee members at meetings is reported in the Committee's quarterly and annual reports;
- The number of meetings, attendance of each Committee member, and a brief report of the Committee containing important issues discussed by the Committee must be disclosed in the Annual Report;
- The rules of procedure for Committee meetings are set out in separate regulations.

Pada tahun 2025, Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan menyelenggarakan rapat sebanyak 23 kali sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam rapat-rapat tersebut, Komite membahas berbagai agenda strategis, antara lain evaluasi kebijakan nominasi dan remunerasi, pengawasan atas implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), penelaahan struktur organisasi dan kebutuhan kompetensi, serta peninjauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perseroan yang berlaku.

In 2025, the Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee held a total of 23 meetings as part of its oversight function and to provide recommendations to the Board of Commissioners. During these meetings, the Committee discussed various strategic agendas, including the evaluation of nomination and remuneration policies, oversight of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, review of the organizational structure and competency needs, and review of compliance with applicable laws and regulations and the Company's internal policies.

Pelaksanaan rapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap rekomendasi dan keputusan yang dihasilkan dapat mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, serta selaras dengan strategi dan visi jangka panjang Perseroan.

Meetings were conducted with a focus on the principles of transparency, independence, and accountability to ensure that every recommendation and decision supported the strengthening of good corporate governance, increased the effectiveness of human resource management, and aligned with the Company's long-term strategy and vision.

Adapun tingkat kehadiran anggota dalam setiap rapat adalah sebagai berikut:

The attendance rate for each meeting is as follows:

No.	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Kehadiran** Attendance			
			Taufan Gestoro	**Suli Fatimah**	**Diah Sulistiorini**	**Moh. Fadila**
1	23 Januari 2025 January 23, 2025	Pembahasan Kinerja hasil usaha Perseroan s/d Desember 2024 dan perkembangan proses audit keuangan tahun buku 2024. Discussion of the Company's business performance as of December 2024 and the progress of the 2024 financial audit process.	√	√	√	√
2	5 Februari 2025 February 5, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Bagaimana kesiapan WEGE untuk menuju *Single System* pembukuan. • Perkembangan proses Audit tahun buku 2024 oleh KAP RSM. • Pembahasan berkala Fungsi Perseroan. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • WEGE's readiness to move towards a Single Accounting System. • Development of the 2024 financial audit process by KAP RSM. • Periodic discussion of the Company's functions.	√	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance			
			Taufan Gestoro	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Moh. Fadila
3	24 Februari 2025 February 24, 2025	• Pembahasan Kinerja hasil usaha dan Keuangan Perseroan s/d Januari 2025. • Pembahasan usulan perubahan organisasi. • *Review* Pengendalian Intern Tata Kelola Divisi Pemasaran. • Discussion of the Company's business and financial performance as of January 2025. • Discussion of proposed organizational changes. • Review of Internal Control Governance of Marketing Division.	√	√	√	√
4	4 Maret 2025 March 4, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Pembahasan dan masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s/d bulan Januari 2025. • Pembahasan Risiko Strategis Perusahaan menghadapi pengurangan anggaran Kementerian. • Kinerja Divisi Pemasaran. • Follow-up on the results of previous Board of Commissioners (BoC) meetings involving Board of Directors. • Discussion and input from Board of Commissioners on operating results and financial performance up to January 2025. • Discussion on the Company's strategic risks in response to reductions in ministerial budgets. • Performance of Marketing Division.	√	√	√	√
5	10 April 2025 April 10, 2025	• Pembahasan Kinerja hasil usaha dan Keuangan Perseroan s/d Februari 2025. • *Review* Pengendalian Intern Tata Kelola Div QSHE dan SCM. • Discussion on the Company's operating results and financial performance up to February 2025. • Review of internal control and governance in QSHE and SCM Divisions.	√	√	√	√
6	22 April 2025 April 22, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Pembahasan dan masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s/d bulan Februari 2025. • *Stress Test* Hasil Usaha 2025. • Perkembagan Pasar Konstruksi dan issue *Global*. • Proyeksi *Cash Flow* 2025 dan Aging Piutang. • Perkembangan Piutang dalam proses Litigasi. • Follow-up on the results of previous Board of Commissioners (BoC) meetings involving Board of Directors. • Discussion and input from Board of Commissioners on operating results and financial performance up to February 2025. • Stress test of the Company's 2025 operating results. • Developments in the construction market and global issues. • 2025 cash flow projections and receivables aging. • Developments of receivables under litigation.	√	√	√	√
7	30 April 2025 April 30, 2025	• Pembahasan Kinerja hasil usaha dan Keuangan Perseroan sd Maret 2025. • Pembahasan Manajemen Risiko s/d Maret 2025. • Discussion of the Company's business and financial performance as of March 2025. • Discussion of Risk Management as of March 2025.				

No.	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Kehadiran** Attendance			
			Taufan Gestoro	**Suli Fatimah**	**Diah Sulistiorini**	**Moh. Fadila**
8	16 Mei 2025 May 16, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Pembahasan dan masukan Dewan Komisaris atas Hasil Usaha dan Keuangan s/d bulan Maret 2025. • Pembahasan Fungsi Divisi *Manrisk*. • *Review* Target OK 2025. • Strategi Pencairan Piutang. • Strategi menyikapi Vendor dan meningkatkan altman Z *Score*. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Discussion and input from Board of Commissioners on the Business and Financial Results as of March 2025. • Discussion of Risk Management Division Function. • Review of the 2025 OK Target. • Receivables Disbursement Strategy. • Strategy for addressing vendors and improving the Altman Z Score.	√	√	√	√
9	20 Mei 2025 May 20, 2025	• Pembahasan progress Audit SPI hingga bulan April-Mei 2025, Proyek : a. Pembangunan Stadion Suralaya Lamongan; b. Pembangunan Gedung Fasilitas Biofarma Bandung; c. PT Wika Pracetak Gedung; d. Revitalisasi Gedung BNI (Proyek WPG); e. Precast Struktur Rusun Paspamres (Proyek WPG); f. Mandiri Matraman (WPG); • Discussion of SPI Audit progress as of April-May 2025, Projects: a. Construction of Suralaya Stadium in Lamongan; b. Construction of Biofarma Facility Building in Bandung; c. PT Wika Pracetak Gedung; d. Revitalization of BNI Building (WPG Project); e. Precast Structure for Presidential Security Forces Apartments (WPG Project); f. Mandiri Matraman (WPG);	√	√	√	√
10	28 Mei 2025 May 28, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d April 2025. • Piutang dan PDPK dengan aging>1tahun. • *Review* pengendalian intern divisi IT dan SPI . • Discussion of business and financial performance through April 2025. • Accounts receivable and PDPK with aging >1 year. • Review of internal controls in IT and SPI divisions.	√	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance			
			Taufan Gestoro	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Moh. Fadila
11	13 Juni 2025 June 13, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Pembahasan hasil temuan *joint internal audit* WIKA Beton dan WIKA Gedung. • Penjelasan kenaikan PDPK, BDD & Piutang lain lain. • Proyeksi pencairan piutang 2025 dan update proyeksi *cash flow*. • Paparan Divisi Manrisk. • Mitigasi dan *punishment* terkait Penurunan Laba Proyek. • Pembahasan Divisi IT. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Discussion of the findings of joint internal audit of Wika Beton and Wika Gedung. • Explanation of the increase in PDPK, BDD, and other receivables. • Projected disbursement of receivables for 2025 and updated cash flow projections. • Presentation from Risk Management Division. • Mitigation and punishment related to the decline in project profits. • Discussion with IT Division.	√	√	√	√
12	25 Juni 2025 June 25, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d Mei 2025. • Perolehan OK Baru blm optimal, Divisi Pemasaran memaparkan *exit* strateginya. • *Review* Pengendalian Intern. • Discussion of business and financial performance through May 2025. • New OK acquisition is not yet optimal, Marketing Division presents its exit strategy. • Internal Control Review.	√	√	√	√
13	9 Juli 2025 July 9, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • *Exit Strategy* Perusahaan untuk Perolehan OK Baru. • Penjelasan Laba Bersih setelah Pajak. • Prognosa Laba Usaha Juni, September dan Desember 2025. • *Update* Tim Legal atas penanganan Piutang bermasalah *aging*>12 bln. • Update Divisi Pemasaran. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • The Company's Exit Strategy for Acquiring New OKs. • Explanation of Net Profit after Tax. • Operating Profit Forecast for June, September, and December 2025. • Legal Team Update on the handling of non-performing receivables aging >12 months. • Marketing Division Update.	√	√	√	√
14	25 Juli 2025 July 25, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d Juni 2025. • Dominasi nilai PDPK pada Piutang. • Analisa *Cash in* vs *Cash Out*. • *Review* Pengendalian Intern Divisi Operasi. • Discussion of business and financial performance as of June 2025. • Dominance of PDPK value in Receivables. • Cash-in vs. Cash-out Analysis. • Review of Internal Control in Operations Division.	√	√	√	√

No.	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Kehadiran** Attendance			
			Taufan Gestoro	**Suli Fatimah**	**Diah Sulistiorini**	**Moh. Fadila**
15	5 Agustus 2025 August 5, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Penjelasan rincian PDPK dengan *Agingnya* serta strategi dalam mengelola penumpunkan PDPK. • Penjelasan *Locking* PDPK. • Highlight Kinerja Keuangan. • Paparan proyek *cash in<cash out* . • Risiko *Shortfall cashflow*. • Paparan Divisi Legal & Andkon. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Explanation of PDPK details with their aging and strategies for managing PDPK accumulation. • Explanation of PDPK Locking. • Financial Performance Highlights. • Explanation of cash-in < cash-out projects. • Cash flow shortfall risk. • Legal & Accounting Division exposure.	√	√	√	√
16	26 Agustus 2025 August 26, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d Juli 2025. • *Review* Pengendalian Intern Divisi Risk Manajemen. • Discussion of business and financial performance until July 2025. • Review of Internal Controls in Risk Management Division.	√	√	√	√
17	4 September 2025 September 4, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Kerugian atas Beban masa lalu *Sett off* hutang vendor dengan Aset. • Bagaimana Tingkat kedisiplinan dan keakuratan pelaporan keuangan dan komersial dari unit kerja. • Performa *review* per divisi operasi. • *Update* saldo piutang dan statusnya s/d Juli 2025. • Follow-up on the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Losses on past expenses, set off vendor debts with assets. • The level of discipline and accuracy of financial and commercial reporting by work units. • Performance review per operating division. • Update on accounts receivable balances and their status through July 2025.	√	√	√	√
18	26 September 2025 September 26, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d Agustus 2025. • *Review* Pengendalian Intern Divisi Operasi Modular dan Divisi Operasi Konsesi. • Discussion of business and financial performance until August 2025. • Review of Internal Controls in Modular Operations Division and Concession Operations Division.	√	√	√	√
19	7 Oktober 2025 October 7, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Paparan Prognosa Des 2025. • Paparan RKAP 2026. • Strategi dan program detail perolehan OK Baru 2025. • *Lesson learn* dan *Gap* atas perolehan OK Baru. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Presentation of December 2025 Prognosis. • Presentation of the 2026 Work Plan and Budget (RKAP). • Detailed strategy and program for acquiring New OKs in 2025. • Lessons learned and gaps in acquiring New OKs.	√	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance			
			Taufan Gestoro	Suli Fatimah	Diah Sulistiorini	Moh. Fadila
20	30 Oktober 2025 October 30, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d September 2025. • Prognosa Hasil Usaha Des 2025 dan rincian beban lain lain. • Pembahasan RKA Dewan Komisaris tahun 2026. • Pembahasan Risiko periode September 2025. • Discussion of business and financial performance as of September 2025. • Prognosis of Business Results for December 2025 and details of other expenses. • Discussion of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA) for 2026. • Discussion of risks for September 2025 period.	√	√	√	√
21	14 November 2025 November 14, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Proyeksi Perolehan OK Baru tahun 2025. • Mitigasi risiko pembukuan kerugian terhadap bisnis Perusahaan. • Paparan Prognosa Desember 2025. • Strategi Direksi dalam memitigasi risiko denda keterlambatan proyek Basilika IKN. • Rencana perbaikan terhadap proyek Delay dan proyek *overbudget*. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Projection of New OK Acquisition in 2025. • Mitigation of the risk of book losses on the Company's business. • Presentation of December 2025 Prognosis. • Board of Directors' strategy in mitigating the risk of fines for delays in IKN Basilica project. • Improvement plan for delayed projects and overbudget projects.	√	√	√	√
22	26 November 2025 November 26, 2025	• Pembahasan kinerja hasil usaha dan keuangan s/d Oktober 2025. • Proyeksi Desember 2025 dan Sasaran Pokok 2026 dan Laporan Laba Rugi. • Discussion of business and financial performance through October 2025. • December 2025 Projections and 2026 Main Targets and Profit and Loss Statement.	√	√	√	√
23	10 Desember 2025 December 10, 2025	• Tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi sebelumnya. • Hasil Usaha dan *Cash Flow* sd Oktober 2025. • Kinerja Keuangan. • Grafik Ra/Ri Perolehan OK Baru sd Desember 2025. • Paparan Divisi Engineering. • Follow-up to the results of previous Board of Commissioners meeting, which included Board of Directors. • Business Results and Cash Flow through October 2025. • Financial Performance. • Ra/Ri Graph of New OK Acquisition through December 2025. • Engineering Division Presentation.				

Rekapitulasi Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

Rekapitulasi kehadiran anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap rapat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Recapitulation of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Meeting Attendance

The following is a summary of the attendance of members of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee at each meeting held throughout 2025:

Nama Name	Posisi Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Taufan Gestoro	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	23	23	100%
Suli Fatimah	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	23	23	100%
Diah Sulistiorini	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	23	23	100%
Mohamad Fadila	Anggota, Internal Perusahaan Member, Internal Company	23	23	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG)

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Komite dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Program ini dirancang untuk memperkuat kapabilitas anggota Komite dalam memberikan rekomendasi strategis terkait kebijakan nominasi, remunerasi, serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Melalui program pengembangan kompetensi tersebut, Perseroan juga memastikan bahwa anggota Komite senantiasa mengikuti perkembangan regulasi, standar tata kelola, serta praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku di industri, sehingga Komite dapat menjalankan perannya secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain:

Training and/or Competency Development for Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee

The Company provides competency development programs for members of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee to support effective implementation of the Committee's duties in assisting the Board of Commissioners in carrying out its oversight function over the management of the Company by the Board of Directors. This program is designed to strengthen the capabilities of Committee members in providing strategic recommendations regarding nomination and remuneration policies, as well as the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles.

Through this competency development program, the Company also ensures that Committee members remain abreast of regulatory developments, governance standards, and industry best practices, so that the Committee can carry out its role optimally, adaptively, and sustainably.

By 2025, the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee participated in the following competency development programs:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pendidikan/ Pelatihan Education/Training Program	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Taufan Gestoro	Ketua, Komisaris Independen Chairman, Independent Commissioner	Pelatihan Business Continuity Based on ISO 22301 ISO 22301-Based Business Continuity Training	20 Oktober 2025 - 22 Oktober 2025 October 20, 2025 - October 22, 2025	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability
Suli Fatimah	Anggota, Komisaris Member, Commissioner	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV Certified Risk Governance Professional (CRGP) Level IV Certification	Pelatihan: 27 – 28 Agustus 2025 Ujian : 3 September 2025 Training: August 27-28, 2025 Exam: September 3, 2025	PT. RAP Indonesia
Diah Sulistiorini	Anggota, Pihak Independen Member, Independent Party	-	-	-
Mohamad Fadila	Anggota, Internal Perusahaan Member, Internal Company	Pelatihan ESG *Awareness* ESG Awareness Training	16 September 2025 September 16, 2025	PT. Surveyor Indonesia

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2025

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan sepanjang tahun 2025 untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk di bidang nominasi, remunerasi, serta pengawasan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan.

Adapun tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Implementation of Duties and Activities of Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee in 2025

The Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee carried out various duties and activities throughout 2025 to ensure the implementation of good corporate governance principles, including in the areas of nomination, remuneration, and oversight of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company.

The duties and activities carried out by the Nomination, Remuneration, and GCG Committee during 2025 are as follows:

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG Items in the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter	Realisasi Kegiatan Activity Realization
1	Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi tahun 2024. Evaluate the 2024 remuneration policy.	Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas remunerasi untuk tahun 2025 berdasarkan hasil kinerja 2024. Provided input to the Board of Commissioners regarding remuneration for 2025 based on 2024 performance results.
2	Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan *Good Corporate Governance* di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Conduct a review, evaluation, and recommendations to the Board of Commissioners regarding the implementation of Good Corporate Governance at PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern dengan mereviu: penerapan SOP, pengorganisasian unit kerja, sinergi fungsi-fungsi terkait dalam manajemen proyek, pengintegrasian data terkait antar unit kerja, penerapan manajemen risiko, program kerja unit kerja dan realisasi pelaksanaannya, Laporan hasil audit internal dan eksternal. Evaluated the implementation of internal control by reviewing: the implementation of SOPs, the organization of work units, the synergy of related functions in project management, the integration of related data between work units, the implementation of risk management, work unit work programs and their implementation, and reports on internal and external audit results.
3	Memberikan pendapat dan/atau masukan yang objektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG. Provide objective, professional, and independent opinions and/or input on matters requiring attention, follow-up, or other matters that may assist the Board of Commissioners in carrying out their duties related to GCG practices.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern melalui kontrol hubungan data terkait antar unit kerja dan kendala-kendala operasional yang dihadapi unit kerja. Monitored and evaluated internal control by monitoring the relationship between related data between work units and the operational constraints faced by work units.
4	Menyusun *self-assessment* tool dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Develop a self-assessment tool and conduct a self-assessment of the Committee's performance, and report it to the Board of Commissioners.	Mengusulkan penilaian kinerja individu Komisaris. Proposed individual performance assessments for Commissioners.
5	Melakukan kajian/evaluasi atas restrukturisasi organisasi WG, berikut mekanisme kerja, kriteria jabatan dan program diklat Conduct a review/evaluation of WG organizational restructuring, including its work mechanisms, job criteria, and training programs.	Melakukan penyesuaian struktur organisasi difokuskan pada penyederhanaan organisasi, pengurangan lapisan struktural, penggabungan fungsi yang memiliki irisan peran, serta optimalisasi peran dan beban kerja, tanpa mengurangi fungsi strategis dan pengendalian. Dengan pendekatan tersebut, perubahan struktur diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat pengambilan keputusan, dan tetap mendukung pencapaian target kinerja perusahaan. Made adjustments to the organizational structure was focused on simplifying the organization, reducing structural layers, consolidating overlapping functions, and optimizing roles and workloads, without compromising strategic and control functions. This approach aims to improve cost efficiency, accelerate decision-making, and support the achievement of company performance targets.

No	Butir-Butir dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG Items in the Nomination, Remuneration, and GCG Committee Charter	Realisasi Kegiatan Activity Realization
6	Evaluasi capaian KPI individu Direksi, manajer/ pejabat satu level di bawah Direksi dan pegawai lainnya Evaluate the achievement of individual KPIs for Directors, managers/officials at one level below Directors, and other employees.	• Menilai capaian KPI Individu Direksi akhir tahun 2024 untuk perhitungan usulan Remunerasi dan Tantiem tahun 2025. • Melakukan Penilaian Karya dan Evaluasi Kompetensi Pegawai Tahun 2025 secara berjenjang mulai dari tingkat korporat, direktorat, hingga individu karyawan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar evaluasi pencapaian KPI perusahaan, unit kerja, serta program kerja individu, sekaligus sebagai input dalam pengembangan SDM dan pengelolaan kinerja berkelanjutan. • Assessed the achievement of individual KPIs for Directors at the end of 2024 to calculate the proposed remuneration and bonuses for 2025. • Conducted a hierarchical performance assessment and employee competency evaluation for 2025, starting at the corporate level, through directorates, and down to individual employees. The assessment results were used as the basis for evaluating the achievement of KPIs for the company, work units, and individual work programs, as well as as input for human resource development and sustainable performance management.
7	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris. Prepare the Board of Commissioners' Work Plan and Budget, including the Work Plan of Board of Commissioners' Organs.	Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berikut Rencana Kerja Organ Dewan Komisaris tahun 2026. The Board of Commissioners' Work Plan and Budget, including the Board of Commissioners' Work Plan for 2026.
8	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perform other duties assigned by the Board of Commissioners.	Membantu persiapan *assessment* GCG 2025. Assisting in the preparation of the 2025 GCG assessment.

Rencana Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2026

Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perseroan telah menyusun program kerja untuk tahun 2026 yang mencakup berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mendukung pengelolaan perusahaan yang efektif dan transparan.

Adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Internal Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG Bersama Manajemen, dengan agenda sebagai berikut:
   a. Reviu terhadap ketentuan internal, termasuk *Standard Operating Procedures* (SOP), Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan dokumen terkait lainnya;
   b. Kajian atas pelaksanaan sistem manajemen di lingkungan perusahaan, mencakup Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen Risiko, Manajemen Informasi, SDM, Akuntansi, dan Pengadaan;
   c. Kajian atas aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan;
   d. Kajian terhadap penyesuaian *Board Manual*;
   e. *Monitoring* kegiatan penyelesaian piutang yang membutuhkan perhatian khusus;
   f. Penelaahan atas aspek GCG dalam laporan kinerja perusahaan;
   g. Penelaahan atas aspek GCG dalam rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta kesesuaiannya dengan rencana jangka panjang perusahaan;
   h. Pengusulan kepada Dewan Komisaris terkait penetapan gaji dan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
   i. Me-reviu rencana suksesi calon Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan pada RUPS dan Pemegang Saham;

Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee Work Plan for 2026

The Company's Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee has prepared a work program for 2026, encompassing various strategic activities aimed at strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and supporting effective and transparent company management.

The planned work program is as follows:

1. Internal Meeting of Nomination, Remuneration, and GCG Committee with Management, with the following agenda:
   a. Review of internal regulations, including Standard Operating Procedures (SOPs), Activity Implementation Guidelines, and other related documents;
   b. Review of the implementation of management systems within the company, including the Quality Management System, Occupational Safety and Health, Risk Management, Information Management, HR, Accounting, and Procurement;
   c. Review of corporate actions undertaken by the Company;
   d. Review of adjustments to the Board Manual;
   e. Monitoring of receivables settlement activities requiring special attention;
   f. Reviewing GCG aspects in the company's performance report;
   g. Reviewing GCG aspects in the draft of company work plan and budget and their alignment with the company's long-term plan;
   h. Making proposals to the Board of Commissioners regarding the determination of salaries and bonuses for Directors and Commissioners;
   i. Reviewing succession plans for candidates for Directors and Commissioners for submission to the GMS and Shareholders;

j. *Monitoring* kegiatan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG melalui pemberian masukan, nasehat, rekomendasi, atau saran atas permohonan persetujuan dari Direksi;
k. Evaluasi kinerja perusahaan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap keputusan RKAP Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2028;
l. Mempersiapkan *assessment* GCG untuk tahun buku 2025

2. Penyusunan rencana kerja Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG untuk tahun 2026.
3. Penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
4. Penyusunan Laporan Tahunan Komite untuk tahun 2026.
5. Pelaksanaan diklat, *workshop*, atau seminar terkait implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tata Kelola Terintegrasi merupakan suatu sistem tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran secara terintegrasi dalam grup entitas induk. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris di bidang penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (TKT).

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyampaian laporan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite ini berperan dalam membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi di lingkungan grup perusahaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Pembentukan Komite

Dasar hukum pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/MBU/20212 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi signifikan BUMN;
4. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.0027786.AH.01.02 tanggal 22 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, AKta Nomor 3 tanggal 16 Mei 2023
5. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 15 tanggal 27 Mei 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

j. Monitoring company activities to ensure compliance with GCG principles by providing input, advice, recommendations, or suggestions upon request for approval from the Board of Directors;
k. Evaluating company performance, with a focus on compliance with the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) and the Company's 2024-2028 Long-Term Plan;
l. Preparing a GCG assessment for the 2025 financial year.

2. Preparing the Nomination, Remuneration, and GCG Committee's work plan for 2026.
3. Other assignments assigned by the Board of Commissioners.
4. Preparation of the Committee's Annual Report for 2026.
5. Implementation of training, workshops, or seminars related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

RISK MONITORING AND INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Integrated Governance is a governance system that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in an integrated manner within the parent entity group. To support effective implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities in the areas of risk management and Integrated Governance, Board of Commissioners has established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee (TKT).

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee operates collectively and independently, both in carrying out its duties and in reporting, and is directly accountable to Board of Commissioners. The Committee plays a role in assisting Board of Commissioners in ensuring that the implementation of risk management and integrated governance within the group environment is carried out effectively and in accordance with applicable regulations.

Legal Basis for Establishment of the Committee

The legal basis for the establishment of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee is as follows:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021, on amendments to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
4. Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.0027786.AH.01.02 dated May 22, 2023, regarding the Approval of Amendments to the Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., Deed No. 3 dated May 16, 2023;
5. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. No. 15 dated May 27, 2024, drawn up before Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notary in South Jakarta;

6. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nomor SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

6. Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. No. SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2024 regarding the Charter of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

FRAMEWORK TATA KELOLA TERINTEGRASI WIKA GROUP

INTEGRATED GOVERNANCE FRAMEWORK OF WIKA GROUP

Ketua | Chairman
Komisaris Utama Induk
President Commissioners of The Parent Company

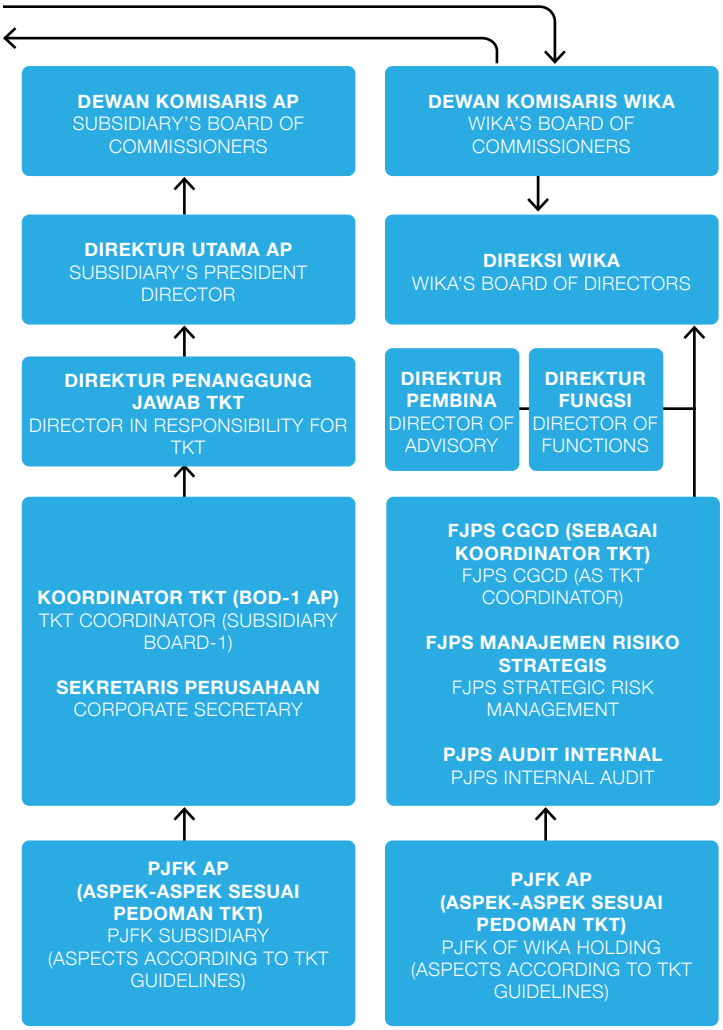
Wakil Ketua (merangkap anggota)
Vice Chairman (also member)

Komisaris Independen Induk
Independent Commissioners of The Parent Company

Anggota | Member
- **Komisaris Induk**
  Independent Commissioners of The Parent Company
- **Komisaris Utama Anak Perusahaan**
  Independent Commissioners of The Subsidiary
- **Profesional**
  Professional

- Komisaris Utama Anak Perusahaan menjadi Anggota Komite Bidang Tata Kelola Terintegrasi WIKA
- DKHCMR Anak Perusahaan menjadi Penanggung Jawab TKT di Anak Perusahaan
- Sekretaris Anak Perusahaan menjadi Koordinator TKT di Anak Perusahaan
- Masing-masing BOD-1 Anak Perusahaan menjadi *counterpart* PIC TKT WIKA di setiap aspek

- President Commissioner of Subsidiary becomes a Member of Integrated Governance Committee of WIKA
- DKHCMR of Subsidiary becomes the Person in Charge of TKT in the Subsidiary
- Secretary of Subsidiary becomes the Coordinator of TKT in the Subsidiary
- Each BOD-1 of Subsidiary becomes the counterpart of PIC TKT WIKA in every aspect



PT WIjaya Karya (Persero) Tbk sebagai entitas induk memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-KP-01.01 tanggal 13 November 2023 dan Pedoman Prinsip Pengelolaan Anak Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi Nomor WIKA-SUB-QM-01.01. Program Kerja Tata Kelola Terintegrasi entitas induk antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Internal Audit;
2. Aspek Manajemen Risiko;
3. Aspek Keuangan;
4. Aspek Finance;
5. Aspek Sinergi Bisnis;
6. Aspek Pengadaan;
7. Aspek Human Capital;
8. Aspek SMAP, WBS, Benturan Kepentingan dan TJSL;
9. Aspek Hukum dan Kepatuhan;
10. Aspek Quality, Health, Safety, dan Environment;
11. Aspek Information Technology.

Perseroan sebagai bagian dari anak perusahaan BUMN yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian memiliki komitmen untuk terus menciptakan nilai-nilai konglomerasi secara terukur, terarah dan efektif. Tidak hanya dengan entitas induk, Perseroan juga menerapkan tata kelola terintegrasi dengan anak Perusahaan PT WEGE Solusi Proklamasi.

Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) di Perseroan memenuhi unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko. Selain itu, Komite juga memastikan bahwa praktik tata kelola yang diterapkan telah memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesionalisme, dan kewajaran, serta terintegrasi dengan induk Perseroan sehingga dapat berjalan secara efektif dan selaras di tingkat grup.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor: SK.02.01/A.KOM.0001.WEGE/2024 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 14 Mei 2024, serta mengacu pada ketentuan yang diatur dalam *Board Manual* Perseroan.

Pedoman kerja tersebut menjadi landasan bagi Komite dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, termasuk dalam melakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi di lingkungan Perseroan. Selain itu, pedoman ini juga mengatur mengenai struktur organisasi, kewenangan, serta mekanisme kerja sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan secara sistematis, independen, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., as the parent entity, has established an Integrated Governance Policy No. WIKA-SUB-KP-01.01 dated November 13, 2023, and Guidelines on Subsidiary Management Principles and Integrated Governance No. WIKA-SUB-QM-01.01. The Integrated Governance Work Program of the parent entity includes, among others:

1. Internal Audit Aspect;
2. Risk Management Aspect;
3. Financial Aspect;
4. Finance Aspect;
5. Business Synergy Aspect;
6. Procurement Aspect;
7. Human Capital Aspect;
8. SMAP, WBS, Conflict of Interest, and CSR Aspect;
9. Legal and Compliance Aspect;
10. Quality, Health, Safety, and Environment Aspect;
11. Information Technology Aspect.

The Company, as part of a State-Owned Enterprise (SOE) subsidiary with ownership and/or control relationships, is committed to continuously creating conglomerate value in a measurable, targeted, and effective manner. Not only with the parent entity, the Company also implements integrated governance with its subsidiary, PT WEGE Solusi Proklamasi.

Purpose of Establishment of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee was established to assist Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in supervising, evaluating, and ensuring that the implementation of Risk Management and Integrated Governance (TKT) within the Company meets the adequacy requirements of risk management procedures and methodologies. In addition, the Committee ensures that governance practices adhere to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism, and fairness, and are integrated with the parent entity to ensure effective and aligned implementation at the group level.

Charter of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee charter is prepared based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. No. SK.02.01/A.KOM.0001.WEGE/2024 regarding the Charter of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, ratified on May 14, 2024, and refers to the provisions set out in the Company's Board Manual.

This charter serves as the foundation for the Committee in carrying out its duties, functions, and responsibilities effectively, including monitoring the implementation of risk management and integrated governance within the Company. It also governs the organizational structure, authority, and working mechanisms to ensure that supervisory functions are carried out systematically, independently, and in accordance with good corporate governance principles.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang masing-masing telah dikukuhkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2023, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan ketentuan tata kelola perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi secara berkala, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna perbaikan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko;
2. Menganalisis dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, laporan profil risiko, serta laporan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko Perseroan;
4. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan fungsi kepatuhan (*compliance*) Perseroan dalam penerapan manajemen risiko;
5. Mengevaluasi secara berkala serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) dalam lingkup Perseroan;
6. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Perseroan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang antara lain:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal;
2. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perseroan untuk memperoleh informasi dan data, mendapatkan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
3. Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan;
4. Memberi pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektifitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi manajemen risiko;
5. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko Perseroan
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian dengan kebijakan Perseroan;

Term of Office of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

In accordance with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, and Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs, both ratified through the Company's General Meeting of Shareholders on May 20, 2023, the Company is committed to implementing corporate governance provisions in accordance with prevailing regulations.

Duties and Responsibilities of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

As stipulated in the charter, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has the following duties and responsibilities:

1. Periodically evaluate, in accordance with applicable provisions and procedures, to oversee and ensure the adequacy of Risk Management policies, and provide advice and/or recommendations to the Board of Commissioners for improvements to the risk management framework and policies;
2. Analyze and evaluate Risk Management reports, risk profile reports, and other reports related to the Company's risk management;
3. Monitor and evaluate the adequacy of the Company's risk identification, measurement, monitoring, control processes, and risk management information systems;
4. Evaluate and analyze the implementation of the Company's compliance function in the application of risk management;
5. Periodically evaluate and provide input to the Board of Commissioners regarding the approval of Integrated Governance (TKT) policies within the Company;
6. Monitor and evaluate the implementation of the Company's Integrated Governance (TKT) policies;
7. Perform other duties assigned by the Board of Commissioners from time to time in accordance with applicable authority.

Authority of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has, among others, the authority to:

1. Obtain relevant information related to the execution of its duties from internal and external parties;
2. Communicate with heads of work units and other parties within the Company to obtain information and data, seek clarification, and request necessary documents and reports;
3. Provide opinions and recommendations to the Board of Commissioners to enhance the Company's risk management;
4. Provide opinions and recommendations to the Board of Commissioners to improve the effectiveness of risk management implemented by the relevant work units;
5. Monitor and review the Company's risk management reports;
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners on matters supporting the effectiveness of risk management implementation and alignment with Company policies;

7. Mendapat masukan dari tenaga ahli baik dari pihak internal Perseroan maupun dari pihak eksternal Perseroan;
8. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit serta Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2025

Berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Komposisi komite ini terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi berasal dari:

1. Anggota Dewan Komisaris;
2. Pihak yang berasal dari luar;
3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Manajemen Risiko dan TKT.

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite. Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan Perseroan pada periode yang sama.

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi dibentuk pada tahun 2024 yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

7. Obtain input from experts, both internal and external to the Company;
8. Coordinate with the Audit Committee as well as the Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee.

Number, Composition, and Structure of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2025

In accordance with the Company's Articles of Association, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee consists of at least 3 (three) members. The composition includes 1 (one) member of Board of Commissioners serving as Chairman and 2 (two) other members. Members of the Committee may come from:]

1. Members of Board of Commissioners;
2. External parties;
3. Individuals holding managerial positions under Board of Directors responsible for Risk Management and Integrated Governance (TKT).

A Committee member who is an Independent Commissioner serves as the Chairman. Members who are not part of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of other committees within the Company during the same period.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee was established in 2024, as presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Remarks	Keahlian Expertise	Periode Jabatan Office Period
Joseph Prajogo	Ketua Chairman	Komisaris Independen sekaligus Pelaksana Tugas Komisaris Utama Independent Commissioner and Acting President Commissioner	Keuangan dan Manajemen Finance and Management	Mengikuti Periode Jabatan Sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the office period as a Member of Board of Commissioners
Danish S. Sumadilaga	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Strategi Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resource Management and Development Strategy	Mengikuti Periode Jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Following the office period as a Member of Board of Commissioners
Devri Setyawan	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi dan Manajemen Risiko Accounting and Risk Management	Periode ke-1 1st Period

Profil Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Adapun profil anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut: Profil Joseph Prajogo dan Danish S. Sumadilaga sebagai anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini.

Profile of Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

The profiles of members of Integrated Risk and Governance Monitoring Committee are as follows: The profiles of Joseph Prajogo and Danish S. Sumadilaga, members of Board of Commissioners, can be found in the Company Profile section of this annual report.

Joseph Prajogo
Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Chairman and member of Integrated Risk Monitoring and Governance Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.WG.07816/2024 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 concerning the Establishment of Risk Monitoring and Integrated Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite, beliau ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the Committee's duties, appointed as Chairman and member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Profile can be found in the Company Profile chapter within the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Danish S. Sumadilaga
Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Risk and Governance Monitoring Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 11 Juni 2024.
Legal Basis for Appointment	Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM. WG.07816/2024 concerning the Establishment of Risk Monitoring and Integrated Governance Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated June 11, 2024.

Dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, appointed as a Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Profile can be seen in the Company Profile chapter under the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Devri Setyawan
Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi
Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Dasar Hukum Pengangkatan	Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 Tentang Penetapan Organ Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 05 Februari 2025.
Legal Basis for Appointment	Based on the Decree of Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung No. SK.02.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 concerning the Establishment of Integrated Risk and Governance Monitoring Organ of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated February 5, 2025

Dalam pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Adapun profil beliau dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian Sekretaris Dewan Komisaris di dalam Laporan Tahunan ini.

In carrying out the duties of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, appointed as a Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. Profile can be seen in the Corporate Governance Chapter in the Secretary of Board of Commissioners section in this Annual Report.

Independensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Independence of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

All members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, who are independent parties, have no financial, managerial, shareholding, or family relationships with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any relationship with the Company that could affect their ability to act independently.

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Joseph Prajogo	Danish S. Sumadilaga	Apridio Rizak K.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no management relationship in the company, subsidiaries, or affiliated companies	√	√	√

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Joseph Prajogo	Danish S. Sumadilaga	Apridio Rizak K.
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has no share ownership relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Has no family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau pejabat Pemerintah Does not serve as a political party administrator and/or government official	√	√	√

Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat serta Tingkat Kehadiran Anggota Komite dalam Rapat

Penyelenggaraan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, bilamana rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau anggota senior rapat dianggap batal;
4. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;
5. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati;
6. Keputusan rapat Komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas Keputusan yang diambil dalam rapat;
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
9. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
10. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
11. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report);
12. Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam aturan tersendiri.

Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Meetings

Policy and Frequency of Meetings and Attendance of Committee Members in the Meetings

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee must meet the following requirements:

1. Risk Monitoring and Integrated Governance Committee must convene at least once every three months to complete the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee Work Program;
2. If deemed necessary, the Committee may invite other parties related to the meeting material to attend the meeting with the knowledge of relevant member of Board of Directors;
3. Committee meetings are chaired by the Committee Chairman. If the Committee Chairman is unable to attend, the meeting is chaired by the most senior member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. If the Chairman and/or senior member cannot attend, the meeting is deemed cancelled;
4. The Committee Chairman shall issue a summons for the meeting;
5. Meeting notices must be issued at least 7 (seven) days in advance, and in urgent cases, at least 2 (two) days before the meeting date, stating the day, date, time, venue, and agenda of the meeting to be discussed and held at the Company's domicile or at another agreed-upon location within the Republic of Indonesia;
6. The decisions of committee meeting deemed by the meeting chairman to be strategic in nature will only be effective if they have been approved by the Board of Commissioners;
7. Everything discussed and decided at the Committee meeting, including dissenting opinions, will be recorded in the Minutes of Meeting, signed by all Committee members present, as valid evidence of the decisions taken at the meeting;
8. Each Committee member is given the broadest possible freedom to express their professional opinions in the discussion of each meeting agenda without any intervention from anyone;
9. Each Committee member has the right to receive a copy of the Minutes of Meeting, even if they are not present at the meeting;
10. The attendance of Committee members at meetings is reported in the Committee's quarterly and annual reports;
11. The number of meetings and attendance of each Committee member, as well as a brief report of the Committee containing important issues discussed by the Committee, must be disclosed in the Annual Report.
12. The Committee's meeting procedures are set out in separate regulations.

Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2025, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee held 1 (one) meeting with the following agenda and attendance levels:

No.	**Tanggal Rapat** Meeting Date	**Agenda Rapat** Meeting Agenda	**Kehadiran** Attendance		
			Joseph Prajogo	**Danish Sumadilaga**	**Apridio Rizak**
1	4 Maret 2025 March 4, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Risiko dan Strategi Manajemen dalam Menghadapi Efisiensi/Pengurangan Anggaran Kementerian/Lembaga Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Risk and Management Strategy in Addressing Efficiency/ Budget Reductions at Ministries/Institutions	√	√	√
2	10 April 2025 April 10, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Strategi Risiko Korporat Internal Board of Commissioners Meeting: Discussion of Corporate Risk Strategy	√	√	√
3	22 April 2025 April 22, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Risiko Strategis WIKA Gedung Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of WIKA Gedung's Strategic Risk	√	√	√
4	4 April 2025 April 4, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode Maret 2025 Internal Board of Commissioners Meeting: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for March 2025	√	√	√
5	16 Mei 2025 May 16, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode April 2025 Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for April 2025	√	√	√
6	13 Juni 2025 June 13, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode Mei 2025 Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for May 2025	√	√	√
7	25 Juni 2025 June 25, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Strategi Risiko Korporat Internal Board of Commissioners Meeting: Discussion of Corporate Risk Strategy	√	√	√
8	8 Juli 2025 July 8, 2025	Rapat Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Meeting	√	√	√
9	25 Juli 2025 July 25, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2025 Internal Meeting of the Board of Commissioners: Discussion of Risk Management for the First Half of 2025	√	-	√
10	5 Agustus 2025 August 5, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode Juni 2025 Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for the Period of June 2025	√	√	√
11	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode September 2025 Internal Meeting of Board of Commissioners: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for the Period of September 2025	√	√	√

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Joseph Prajogo	Danish Sumadilaga	Apridio Rizak
12	6 November 2025 November 6, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Manajemen Risiko Triwulan III 2025 Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Risk Management for the Period of Q3 2025	√	√	√
13	8 Desember 2025 December 8, 2025	Rapat Internal Dewan Komisaris : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode November 2025 Internal Meeting of Board of Commissioners: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for the Period of November 2025	√	-	√
14	23 Desember 2025 December 23, 2025	Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi : Pembahasan Manajemen Risiko Operasi dan Korporat Periode November 2025 Board of Commissioners Meeting Including the Board of Directors: Discussion of Operational and Corporate Risk Management for the Period of November 2025	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini bertujuan supaya dapat meningkatkan kemampuan komite ini dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Training and/or Competency Development for Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

The Company provides competency development programs for Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. This program aims to enhance the committee's ability to carry out its oversight function over the management of the Company by the Board of Directors.

The Risk Monitoring and Integrated Governance Committee participated in the following training and competency development programs during 2025:

Nama *Name*	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Pelatihan Training Title	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Joseph Prajogo	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Chairman and Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	-	-	-
Danis Hidayat Sumadilaga	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	11 - 12 Desember 2025 December 11-12, 2025	RAP Learning Center
Apridio Rizak Karunia	Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Member of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee	-	-	-

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Beragam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Pedoman Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta praktik terbaik yang berlaku, dengan hasil evaluasi disampaikan kepada manajemen sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan;

Implementation of Duties and Activities of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Various duties and activities carried out by the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2025 include the following:

1. Conducting periodic evaluations of the Company's Integrated Governance Management Guidelines to ensure alignment with prevailing laws and regulations, internal policies, and best practices, with evaluation results submitted to management for improvement and refinement;

2. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Prinsip Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan kepada unit kerja terkait guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta konsistensi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi di seluruh lingkungan Perseroan;
3. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup aspek kinerja operasional, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan hukum melalui pembahasan dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta menyampaikan hasil pemantauan dan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris dan manajemen sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Evaluasi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Evaluasi terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko dan TKT secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self assessment* menggunakan metode evaluasi dengan indikator sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kehadiran pada rapat;
2. Penilaian kontribusi dalam penyampaian usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris dalam rapat;
3. Penilaian kualitas usulan pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris.

Rencana Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2026

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui penerbitan Pedoman Kerja Komite pada tanggal 14 Mei 2024. Sejak pembentukannya, Komite Pemantau Risiko dan TKT terus mengembangkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam memperkuat implementasi Tata Kelola Terintegrasi di lingkungan Perseroan, termasuk pada entitas anak perusahaan.

Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui penyusunan mekanisme koordinasi, pemantauan penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta evaluasi keselarasan kebijakan tata kelola antara Perseroan dan entitas anak, sehingga penerapan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan secara konsisten dan efektif di tingkat grup.

KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2025, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG), serta Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan komite-komite tersebut bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan komite-komite tersebut, Dewan Komisaris diharapkan dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Conducting dissemination of the Company's Integrated Governance Principles Guidelines to relevant work units to enhance understanding, awareness, and consistency in the implementation of Integrated Governance principles across the Company;
3. Monitoring the implementation of Integrated Governance Policies covering operational performance, risk management, corporate governance, and legal compliance through discussions in Committee meetings, and submitting monitoring results along with recommendations for improvement to Board of Commissioners and management in accordance with applicable authority.

Evaluation of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee

Evaluation of the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee's performance, both individually and collectively, is conducted annually through a self-assessment method using the following indicators:

1. Assessment of attendance levels at meetings;
2. Assessment of contributions in providing recommendations or advice to the Board of Commissioners during meetings;
3. Assessment of the quality of recommendations or advice provided to the Board of Commissioners.

Work Program Plan of Risk Monitoring and Integrated Governance Committee for 2026

The Company established the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee in 2024, formalized through the issuance of the Committee Charter on May 14, 2024. Since its establishment, the Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has continuously developed the implementation of its duties and responsibilities, particularly in strengthening the application of Integrated Governance within the Company, including its subsidiaries.

These development efforts are carried out through the formulation of coordination mechanisms, monitoring the implementation of integrated risk management, and evaluating the alignment of governance policies between the Company and its subsidiaries, ensuring that Integrated Governance is implemented consistently and effectively at the group level.

OTHER COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

As of the end of 2025, the Board of Commissioners has three (3) committees: Audit Committee, Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance (GCG) Committee, and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee. The establishment of these committees aims to strengthen the supervisory and advisory functions of Board of Commissioners over the management of the Company in accordance with applicable regulations.

With the support of these committees, the Board of Commissioners is expected to perform its functions, duties, and responsibilities more effectively in ensuring the implementation of transparent, accountable, and sustainable corporate governance.

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of Board of Directors

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary)* merupakan orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik oleh Perseroan, peran *Corporate Secretary* sangat penting memastikan kelancaran komunikasi antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemangku kepentingan.

Landasan Hukum

Pembentukan *Corporate Secretary* Perseroan mengacu pada beberapa peraturan baik internal maupun eksternal, yakni:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Publik atau Emiten;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pasal 29, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012;
3. Pedoman Tata Kelola Perseroan;
4. Pedoman Kerja *(Board Manual).*

Struktur Organ Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Perseroan berada langsung dibawah Direktur Utama dimana dalam setiap pelaksanaan fungsinya secara langsung dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama. Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan mengacu kepada struktur organisasi Perusahaan yang dijelaskan di bab Profil Perusahaan.

Struktur Organisasi *Corporate Secretariat* Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR. WG.00802/2024 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2024.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is an individual or the person in charge of the work unit responsible for performing the corporate secretarial function. In order to enhance transparency, services, and communication with stakeholders as part of implementing good corporate governance principles, the role of Corporate Secretary is essential in ensuring effective communication between the Issuer or Public Company and its stakeholders.

Legal Basis

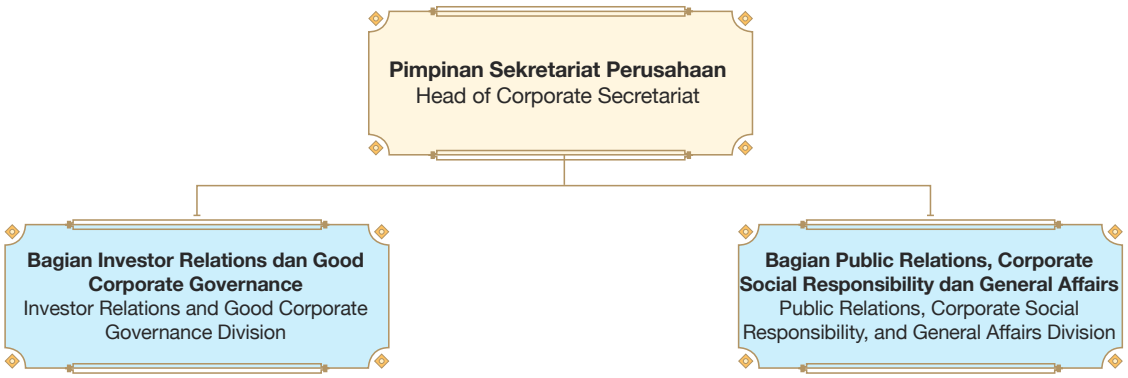
The establishment of the Company's Corporate Secretary refers to several internal and external regulations, including:

1. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Public Companies or Issuers;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, Article 29, as amended by PER-09/MBU/2012;
3. The Company's Code of Corporate Governance;
4. The Board Manual.

Corporate Secretary Organizational Structure

The Company's Corporate Secretary reports directly to the President Director, and in carrying out its functions is directly accountable to the President Director. The organizational structure of Corporate Secretary refers to the Company's organizational structure as described in the Company Profile chapter.

The organizational structure of the Company's Corporate Secretariat is established based on the Board of Directors' Decree No. SK.01.01/A.DIR.WG.00802/2024 issued on March 18, 2024.



Profil Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.02.01/A.DIR. WG.6328/2022 efektif sejak tanggal 27 Juli 2022, *Corporate Secretary* Perseroan dijabat oleh Purba Yudha Tama. Profil ringkas *Corporate Secretary* dapat dilihat di bab profil Perusahaan dari laporan tahunan ini.

Profile of Corporate Secretary

Based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR. WG.6328/2022, effective July 27, 2022, the Company's Corporate Secretary is held by Purba Yudha Tama. A brief profile of the Corporate Secretary can be found in the Company Profile section of this annual report.

Purba Yudha Tama Corporate Secretary		
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Usia Age	42 tahun pada akhir tahun buku 2025	42 years old at the end of fiscal year 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Magister Applied Finance dari Universitas Binus, Jakarta (2023)	Master of Applied Finance from Binus University, Jakarta (2023)
Pengalaman Kerja Work Experience	• General Manager Investor Relations WIKA (2020- 2022) • Manajer Investor Relations WIKA (2019-2020) • Ahli Madya 2 Investor Relations WIKA (2018-2019).	• General Manager of Investor Relations at WIKA (2020-2022) • Manager of Investor Relations at WIKA (2019-2020) • Associate Expert 2 in Investor Relations at WIKA (2018-2019).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK.02.01/A. DIR.WG.6328/2022	Served as Corporate Secretary since July 27, 2022, based on Board of Directors Decree No.: SK.02.01/A. DIR.WG.6328/2022

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.01.01/A.DIR. WG.00029/2025 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 18 Maret 2024, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Proyek (RKAP) Perseroan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Terimplementasinya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di seluruh lingkungan Perseroan;
3. Terlaksananya kegiatan publisitas perusahaan, protokoler, serta komunikasi internal dan eksternal secara efektif;
4. Terwakilinya kepentingan Perseroan dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional yang dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan;
5. Terselenggaranya rapat tingkat Perseroan serta penyusunan risalah rapat secara tertib dan akurat, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Komisaris–Direksi, dan Rapat Direksi;
6. Terkelolanya hubungan investor secara efektif melalui komunikasi berbagai informasi terkait saham, kinerja perusahaan, dan laporan keuangan kepada investor, calon investor, analis, fund manager, serta masyarakat pasar modal;
7. Terimplementasinya Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara efektif di lingkungan Perseroan;
8. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ Perseroan dalam lingkup Sekretariat Perusahaan;
9. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawab;
10. Terlaksananya pembinaan fungsi di unit kerja terkait serta pengembangan Human Capital sesuai dengan arah perkembangan Perseroan;

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Based on Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR. WG.00029/2025 concerning the Organizational Structure of Corporate Secretariat of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated March 18, 2024, the duties and responsibilities of Corporate Secretary are as follows:

1. Preparing the Company's Work Plan and Project Budget (RKAP) in a timely manner and in accordance with applicable regulations;
2. Implementing the principles of Good Corporate Governance throughout the Company;
3. Effectively implementing company publicity, protocol, and internal and external communications;
4. Representing the Company's interests in various national and international activities that enhance the company's image and reputation;
5. Organizing company-level meetings and preparing accurate and orderly minutes, including General Meetings of Shareholders, Board of Commissioners-Board of Directors Meetings, and Board of Directors Meetings;
6. Effective management of investor relations through the communication of various information related to shares, company performance, and financial reports to investors, potential investors, analysts, fund managers, and the capital market community;
7. Effective implementation of the Anti-Bribery Management System within the Company;
8. Integrated services, assistance, advice, support, and audits (SASAA) across all work units/organs of the Company within the Corporate Secretariat;
9. Implementation of orderly administration, including the preparation of monthly, semi-annual, and annual reports in accordance with the scope of responsibilities;
10. Implementation of functional coaching in related work units and development of Human Capital in accordance with the Company's development direction;

11. Terlaksananya pembinaan profesionalisme dan peningkatan kompetensi bagi personel yang memiliki sertifikasi keahlian;
12. Terimplementasinya Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerja;
13. Terlaksananya digitalisasi proses bisnis di lingkungan Perseroan secara berkelanjutan;
14. Terlaksananya aktivitas coaching dan mentoring secara aktif kepada minimal satu level di bawahnya; dan
15. Terlaksananya proses penyiapan kader pengganti (suksesi) pada satu level di bawahnya, termasuk pengembangan tenaga ahli.

Sedangkan, berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014, *Corporate Secretary* memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
    b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretariat

Perseroan menyediakan program peningkatan kompetensi bagi Corporate Secretary beserta seluruh personel yang berada di bawah koordinasi Corporate Secretary sebagai bagian dari upaya memperkuat kapabilitas fungsi kesekretariatan perusahaan. Program pengembangan tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika regulasi, perkembangan pasar, dan kebutuhan strategis Perseroan.

Pelaksanaan program peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran, antara lain pelatihan, *workshop*, seminar, sertifikasi profesi, serta program pembelajaran berkelanjutan yang relevan dengan bidang hubungan investor, keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan komunikasi korporasi. Dengan penguatan kompetensi tersebut, Corporate Secretary diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kualitas layanan informasi kepada pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan secara berkelanjutan.

11. Implementation of professional development and competency improvement for personnel with expertise certification;
12. Implementation of the Company's Management System and its derivatives in every work activity within the work environment;
13. Implementation of sustainable digitalization of business processes within the Company;
14. Active implementation of coaching and mentoring activities for at least one level below; and
15. Implementation of the process of preparing replacement cadres (succession) at one level below, including the development of expert staff.

Meanwhile, based on POJK No. 35/POJK.04/2014, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Keeping abreast of developments in the Capital Market, particularly applicable laws and regulations in the Capital Market sector;
2. Providing input to Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies to ensure compliance with laws and regulations in the Capital Market sector;
3. Assisting Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance, including:
    a. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Issuer's or Public Company's website;
    b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
    c. Holding and documenting General Meetings of Shareholders;
    d. Holding and documenting meetings of Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
    e. Implementing company orientation programs for Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Acting as a liaison between the Issuer or Public Company and its shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Corporate Secretariat Training and Competency Development

The Company provides competency development programs for the Corporate Secretary and all personnel under the Corporate Secretary's coordination as part of the efforts to strengthen the capabilities of corporate secretariat function. This development program is designed to support optimal implementation of duties and responsibilities, enhance professionalism, and ensure the organization's readiness to address regulatory dynamics, market developments, and the Company's strategic needs.

The competency development program is carried out through various learning methods, including training, workshops, seminars, professional certification, and ongoing learning programs relevant to investor relations, information disclosure, corporate governance, compliance, and corporate communications. With this competency development, the Corporate Secretary is expected to be able to effectively carry out his or her role in supporting the implementation of good corporate governance, improving the quality of information services to stakeholders, and supporting the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Corporate Secretary dan personel di bawah koordinasi Corporate Secretary selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The training and competency development programs participated in by the Corporate Secretary and personnel under the Corporate Secretary's coordination during 2025 are as follows:

Nama Nama	Jabatan Jabatan	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Corporate Secretariat Training and Competency Development of the Corporate Secretariat		
		Nama Pelatihan Training Title	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Purba Yudha Tama	Corporate Secretary	ESG *Awareness* - VP	16 September 2026 September 16, 2026	PT Surveyor Indonesia
Firlan	Manager Of Public Relations, CSR and General Affair Department	ESG *Awareness* - Manager	18 September 2026 September 18, 2026	PT Surveyor Indonesia
		Leader as Coach	22-23 Oktober 2025 October 22-23, 2025	Wikasatrian Pusat Kepemimpinan
Adimas Anggoro P	Manager Of Investor Relation and Good Corporate Governance Department	ESG *Awareness* - Manager	18 September 2026 September 18, 2026	PT Surveyor Indonesia
Saidul Ulum	Junior Expert Public Relations, Csr and General Affair Department	-	-	-
Rafli Dinansah	Junior Expert Investor Relation and Good Corporate Governance Department	-	-	-
Hendika Darma Listianto	Junior Expert Investor Relation and Good Corporate Governance Department	-	-	-
Ratih Perwita Sari	Staff Of Public Relations, CSR and General Affair Department	-	-	-
Reny Agtriani	Staff Of Investor Relation and Good Corporate Governance Department	*Feed Forward Assessment Soft Competency*	9-23 Desember 2025 December 9-23, 2025	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
		Risk Awareness	19 Februari 2025 February 19, 2025	PMO & Risk Management Division – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Tbk
Jihan Yultan Azzahra	Staff Of Public Relations, CSR and General Affair Department	Staff Of Investor Relation And Good Corporate Governance Department	Training Internal Auditor ISO 37001:2016	
Mutiara Bunga Cantika	Staff Public Relations, Csr and General Affair Department	Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Training	25 September – 21 Oktober 2025 September 25 – October 21, 2025	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Aqilla Fadia Wahono	Staff Public Relations, CSR and General Affair Department	Key User Training (KUT) WIKA Digital Invoice	8-11 Agustus 2025 August 8-11, 2025	Information Technology Division - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Riski Islahuddyn	Staff Public Relations, CSR and General Affair Department	Pelatihan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Training	25 September – 21 Oktober 2025 September 25 – October 21, 2025	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Tahun 2025

Corporate Secretary bertugas memastikan terjalinnya hubungan yang efektif antara Perseroan dan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, investor, serta masyarakat luas. Dalam melaksanakan fungsinya, *Corporate Secretary* bertanggung jawab mengelola komunikasi korporasi, memastikan keterbukaan informasi, serta mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan.

Brief Description of Implementation of Duties in 2025

The Corporate Secretary is responsible for ensuring effective relationships between the Company and its stakeholders, including shareholders, regulators, investors, and the general public. In carrying out its functions, the Corporate Secretary is tasked with managing corporate communications, ensuring information disclosure, and supporting the implementation of good corporate governance principles within the Company.

Secara fungsional, *Corporate Secretary* melaporkan seluruh aktivitas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama. Selain itu, Corporate Secretary memiliki kewenangan tertentu untuk mewakili Direksi dalam mewakili Perseroan sesuai dengan penugasan dan batasan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi serta ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, dalam pelaksanaan tugasnya, *Corporate Secretary* dibantu oleh fungsi-fungsi bagian dibawahnya. Adapun aktivitas yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Bagian Investor Relation & *Good Corporate Governance*
   a. Tersusunnya kebijakan Perseroan, kebijakan pokok, serta anggaran perusahaan dalam lingkup Investor Relations dan *Good Corporate Governance*;
   b. Terjalinnya hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan regulator, pemegang saham, perusahaan sekuritas, serta manajer investasi/fund manager;
   c. Tersusunnya perencanaan serta terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham beserta dokumentasi yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik;
   d. Tersusunnya standar dan terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perseroan melalui koordinasi dengan unit kerja terkait;
   e. Tersusunnya analisis strategis dalam rangka meningkatkan citra Perseroan yang berdampak pada peningkatan nilai saham Perseroan;
   f. Tersusunnya standar materi presentasi Perseroan (*Corporate Presentation*) dalam lingkup Corporate Secretary;
   g. Tersusunnya perencanaan serta terlaksananya kepatuhan terhadap penerapan peraturan *Good Corporate Governance* (GCG);
   h. Terlaksananya pengendalian terhadap kepatuhan atas undang-undang, peraturan, serta etika berusaha di seluruh unit kerja Perseroan;
   i. Terimplementasinya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di tingkat Perseroan;
   j. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ Perseroan dalam lingkup Sekretariat Perusahaan;
   k. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawab;
   l. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungan kerja terkait serta pengembangan *Human Capital* sesuai dengan arah perkembangan Perseroan;
   m. Terlaksananya pembinaan profesionalisme dan peningkatan kompetensi bagi personel yang memiliki sertifikasi keahlian;
   n. Terimplementasinya Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerja; dan
   o. Terlaksananya digitalisasi proses bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Functionally, the Corporate Secretary reports all activities related to the execution of its duties to the President Director. In addition, the Corporate Secretary is granted certain authority to represent the Board of Directors in representing the Company in accordance with the assignments and authority limits set by the Board of Directors and prevailing regulations.

In 2025, in performing its duties, the Corporate Secretary was supported by the functions under its supervision. The activities carried out include the following:

1. Investor Relations & Good Corporate Governance Function
   a. Formulation of Company policies, key policies, and corporate budgets within the scope of Investor Relations and Good Corporate Governance;
   b. Establishment of strong and sustainable relationships with regulators, shareholders, securities companies, and investment managers/fund managers;
   c. Preparation and execution of the General Meeting of Shareholders, including complete and well-documented records;
   d. Establishment of standards and preparation of the Company's Annual Report through coordination with relevant work units;
   e. Development of strategic analysis aimed at enhancing the Company's image, contributing to an increase in the Company's share value;
   f. Preparation of standard corporate presentation materials within the Corporate Secretary scope;
   g. Planning and ensuring compliance with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) regulations;
   h. Implementation of controls to ensure compliance with laws, regulations, and business ethics across all Company work units;
   i. Implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) at the Company level;
   j. Integration of services, assistance, advice, support, and audit (SASAA) across all Company work units/organs within the Corporate Secretariat scope;
   k. Proper administrative management, including the preparation of monthly, semi-annual, and annual reports in accordance with the scope of responsibility;
   l. Implementation of functional development within the relevant work environment and Human Capital development aligned with the Company's direction;
   m. Enhancement of professionalism and competency development for personnel holding professional certifications;
   n. Implementation of the Company Management System and its derivatives in all work activities; and
   o. Continuous digitalization of the Company's business processes.

2. Fungsi Bagian *Public Relations, Corporate Secretary* (CSR) dan *General Affairs*
   a. Terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal Perseroan serta kegiatan publisitas perusahaan secara efektif dan efisien;
   b. Merencanakan dan melaksanakan program tata kelola keberlanjutan perusahaan secara terarah dan berkelanjutan;
   c. Melakukan evaluasi dan pengembangan program keberlanjutan perusahaan serta melakukan peningkatan (*improvement*) terhadap sistem tata kelola keberlanjutan;
   d. Menyusun, menelaah, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan sebagai salah satu strategi komunikasi perusahaan;
   e. Tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan lingkungan dalam rangka pelaksanaan fungsi *Corporate Social Responsibility*, termasuk pengendalian biaya unit usaha PKBL;
   f. Mengembangkan kinerja CSR/Program PKBL sesuai dengan konsep keberlanjutan, pertimbangan efisiensi biaya dan efektivitas program, serta respons terhadap isu global guna meminimalkan risiko perusahaan;
   g. Tersusunnya kebijakan Perseroan, kebijakan pokok, serta anggaran perusahaan dalam lingkup Hubungan Masyarakat, Kesekretariatan, dan Umum;
   h. Terlaksananya pengendalian administrasi dokumen masuk dan keluar Perseroan, pelayanan kesekretariatan tingkat perusahaan, serta kegiatan protokoler perusahaan;
   i. Terselenggaranya fungsi Kesekretariatan dan Umum secara efektif dan efisien;
   j. Terlaksananya tugas-tugas keprotokolan bagi pihak internal maupun eksternal, termasuk penyelenggaraan acara dan rapat perusahaan serta layanan akomodasi;
   k. Terlaksananya peredaran dan pengarsipan dokumen/surat masuk dan keluar secara tertib, tepat waktu, serta efektif dan efisien;
   l. Terlaksananya pembinaan, pengembangan, dan koordinasi terhadap Sekretaris Direksi guna mengoptimalkan dukungan terhadap kegiatan operasional Direksi;
   m. Terlaksananya pelayanan terkait penyediaan alat tulis kantor (ATK), ruang rapat, konsumsi rapat, protokoler acara perusahaan, fasilitas air conditioner (AC), telepon, listrik, air bersih, lift, keamanan, serta ruang kerja;
   n. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ Perseroan dalam lingkup Sekretariat Perusahaan;
   o. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan, dan audit (SASAA) di seluruh unit kerja/organ Perseroan dalam lingkup Sekretariat Perusahaan;
   p. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan lingkup Sekretariat Perusahaan;
   q. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungan kerja terkait serta pengembangan *Human Capital* sesuai dengan arah perkembangan Perseroan;
   r. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi *Human Capital* yang menjadi tanggung jawab unit kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi;

2. Public Relations, Corporate Secretary (CSR), and General Affairs Function
   a. Effective and efficient implementation of internal and external corporate communication and publicity activities;
   b. Planning and implementation of structured and sustainable corporate sustainability governance programs;
   c. Evaluation and development of sustainability programs, including continuous improvement of sustainability governance systems;
   d. Preparation, review, evaluation, and enhancement of sustainability reports as part of the Company's communication strategy;
   e. Planning and control of small business and cooperative development programs, as well as environmental development within the Corporate Social Responsibility framework, including cost control of the PKBL unit;
   f. Development of CSR/PKBL performance in line with sustainability concepts, cost efficiency considerations, program effectiveness, and responsiveness to global issues to minimize Company risks;
   g. Formulation of Company policies, key policies, and corporate budgets within the scope of Public Relations, Corporate Secretariat, and General Affairs;
   h. Implementation of administrative control over incoming and outgoing documents, corporate secretarial services, and corporate protocol activities;
   i. Effective and efficient execution of Corporate Secretariat and General Affairs functions;
   j. Implementation of protocol duties for both internal and external parties, including organization of corporate events and meetings, as well as accommodation services;
   k. Orderly, timely, and efficient circulation and archiving of incoming and outgoing documents/correspondence;
   l. Development, coordination, and optimization of support provided by the Board of Directors' Secretary to enhance operational effectiveness;
   m. Provision of services related to office supplies, meeting rooms, meeting consumption, corporate event protocol, air conditioning facilities, telephone, electricity, clean water, elevators, security, and workspace;
   n. Implementation of services, assistance, advice, support, and audit (SASAA) across all Company work units/organs within the Corporate Secretariat scope;
   o. Integration of SASAA services across all Company work units/organs within the Corporate Secretariat scope;
   p. Proper administrative management, including preparation of monthly, semi-annual, and annual reports within the Corporate Secretariat scope;
   q. Implementation of functional development and Human Capital development aligned with the Company's direction;
   r. Development and enhancement of Human Capital competencies in accordance with organizational needs;

s. Terimplementasinya Sistem Manajemen Perseroan beserta turunannya dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerja; dan
t. Terlaksananya digitalisasi proses bisnis di Perseroan secara berkelanjutan.

s. Implementation of the Company Management System and its derivatives in all work activities; and
t. Continuous digitalization of the Company's business processes.

HUBUNGAN INVESTOR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Corporate Secretary Perseroan juga mengelola fungsi Hubungan Investor (*Investor Relations*) sebagai penghubung antara Perseroan dengan investor dan calon investor, pemegang saham, perusahaan sekuritas, manajer investasi, serta analis pasar modal. Melalui fungsi ini, Perseroan berupaya membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal guna memperkuat kepercayaan investor serta mendukung terciptanya pasar yang transparan dan berintegritas.

Fungsi Hubungan Investor berperan sebagai media komunikasi yang menjembatani Perseroan dengan analis dan pelaku pasar modal untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu mengenai kinerja, strategi, serta perkembangan usaha Perseroan. Penyampaian informasi tersebut diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara tepat dan objektif.

Dalam pelaksanaannya, aktivitas Hubungan Investor senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan serta perlakuan yang setara (*equal treatment*) bagi seluruh investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh investor dan calon investor melalui situs web resmi Perseroan di https://investor.wikagedung.co.id/?q=about_us.html. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana surat menyurat perusahaan kepada masyarakat atau sebaliknya melalui *email Investor Relation*: investorrelations@wikagedung.id

Adapun kegiatan Hubungan Investor Perseroan selama Tahun 2025 secara ringkas disajikan sebagai berikut:

INVESTOR RELATIONS

In carrying out its duties and functions, the Company's Corporate Secretary also manages the Investor Relations function as a liaison between the Company and investors, prospective investors, shareholders, securities companies, investment managers, and capital market analysts. Through this function, the Company strives to build effective and sustainable communication with stakeholders in the capital market to strengthen investor confidence and support the creation of a transparent and credible market.

The Investor Relations function serves as a communication bridge between the Company and analysts as well as capital market participants to ensure the availability of accurate, transparent, and timely information regarding the Company's performance, strategy, and business developments. This information is expected to assist investors in making informed and objective investment decisions.

In practice, Investor Relations activities consistently uphold the principles of confidentiality and equal treatment for all investors in accordance with prevailing laws and regulations. The Company provides various information accessible to investors and prospective investors through its official website at https://investor.wikagedung.co.id/?q=about_us.html. In addition, the Company also facilitates correspondence with the public through the Investor Relations email: investorrelations@wikagedung.id.

A summary of the Company's Investor Relations activities during 2025 is presented as follows:

No.	Jenis Kegiatan Type of Activity	Realisasi Kegiatan Realization of Activity
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (RUPST) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for Fiscal Year 2024	Tanggal 21 Mei 2025, di WIKA Tower I Lantai 11 May 21, 2025, at WIKA Tower I, 11th Floor
2	Tanggal Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024 Dividend Payment Date for Fiscal Year 2024	Jumat, 20 Juni 2025 Friday, June 20, 2025
3	Public Expose Tahun 2025 Public Expose for 2025	28 November 2025 dilaksanakan secara Hybrid, dengan lokasi di WITO II Ruang Auditorium Lantai 17 dan daring melalui Zoom Meeting November 28, 2025, held as a hybrid event, located at WITO II Auditorium, 17th Floor, and online via Zoom Meeting
4	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 Investor & Analyst Group Meeting Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2025	Dilaksanakan secara langsung dan daring melalui sistem eASY KSEI pada 28 November 2025 Held onsite and online via KSEI eASY system on November 28, 2025
5	*Investor & Analyst Group Meeting*	Dilaksanakan pada 2 Desember 2025 di Proyek Netro House IPB Held on December 2, 2025, at IPB Netro House Project
6	*Investor & Analyst Group Visit*	Dilaksanakan pada 2 Desember 2025 di Proyek Netro House IPB setelah Investor & Analyst Group Meeting Held on December 2, 2025, at IPB Netro House Project after the Investor & Analyst Group Meeting

Sebagai bentuk apresiasi atas kualitas penyajian informasi, transparansi, serta penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Laporan Tahunan Perseroan berhasil memperoleh Penghargaan berupa Finalis *Annual Report Award* Tahun Buku 2024 yang diselanggarakan *Annual Report Award* (ARA). Pencapaian ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menghadirkan laporan tahunan yang informatif, akurat, dan memenuhi standar.

As a token of appreciation for the quality of information presentation, transparency, and implementation of good corporate governance practices, the Company's Annual Report was recognized as a Finalist for the 2024 Annual Report Award held by the Annual Report Awards (ARA). This achievement reflects the Company's commitment to presenting an informative, accurate, and standards-compliant annual report.

AUDIT INTERNAL

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui pembentukan dan penguatan fungsi Internal Audit guna memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Internal Audit menjalankan kegiatan audit secara independen dan objektif sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal, dengan tujuan melindungi aset dan kepentingan Perseroan melalui evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, serta penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menerapkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), Internal Audit berperan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, menilai kecukupan proses pengendalian, serta memberikan rekomendasi yang bernilai tambah dan bersifat strategis kepada manajemen. Melalui peran tersebut, Internal Audit turut mendukung peningkatan kinerja operasional, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta memastikan pencapaian tujuan bisnis Perseroan secara berkelanjutan.

Landasan Hukum

Pembentukan Internal Audit perusahaan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Bab VI.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
4. Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Susunan Organisasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
5. Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi Tahun 2018 (IACM 2018).

Piagam Internal Audit

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan landasan formal dan legal bagi Internal Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Piagam ini memuat visi, misi, dan tujuan; struktur dan kedudukan; tugas, tanggung jawab, peran, serta wewenang; kode etik, kompetensi, dan independensi; mekanisme pertanggungjawaban; serta pengaturan hubungan kerja antara Internal Audit dengan Manajemen, Komite Audit, dan Auditor Eksternal.

INTERNAL AUDIT

The Company is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance by establishing and strengthening the Internal Audit function to ensure the effectiveness of internal control system as well as compliance with internal policies and applicable laws and regulations. The Internal Audit function conducts audit activities independently and objectively as part of the internal control mechanism, with the aim of safeguarding the Company's assets and interests through the evaluation of risk management effectiveness, internal controls, and the implementation of good corporate governance practices.

By applying a risk-based audit approach, Internal Audit plays a role in identifying areas that require improvement, assessing the adequacy of control processes, and providing value-added and strategic recommendations to management. Through this role, Internal Audit also supports the improvement of operational performance, strengthens organizational accountability, and assures the sustainable achievement of the Company's business objectives.

Legal Basis

The establishment of the Company's Internal Audit is based on:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Chapter VI.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
3. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
4. Board of Directors Decree of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.09365/2024 dated July 31, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
5. Technical Guidelines for Self-Assessment of Corporate Internal Audit Capability 2018 (IACM 2018).

Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter serves as the formal and legal foundation for Internal Audit in carrying out its duties and functions. The Charter outlines the vision, mission, and objectives; structure and position; duties, responsibilities, roles, and authorities; code of ethics, competence, and independence; accountability mechanisms; as well as the working relationship between Internal Audit and Management, Audit Committee, and External Auditors.

Visi dan Misi Internal Audit

Visi

Menjadi Auditor Internal yang profesional dan berperan aktif di bidang pengawasan yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam rangka mendukung kemajuan perusahaan.

Misi

1. Membantu perusahaan dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perusahaan secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan dan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), melalui penerapan *risk-based audit*.
2. Meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan menjalankan peran dan fungsi *assurance* dan *consulting* dengan memberikan rekomendasi yang independen, objektif, inovatif dan konstruktif serta memberikan nilai tambah dengan menggunakan teknologi informasi terkini.
3. Mengembangkan kompetensi auditor secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan sinergi fungsi audit intern dan eksternal audit.
5. Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien.

Tujuan Internal Audit

Memberikan kontribusi strategis kepada Manajemen melalui jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna meningkatkan nilai tambah serta memperbaiki kinerja operasional Perseroan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, serta proses tata kelola perusahaan melalui pelaksanaan pemeriksaan dalam lingkup audit operasional, keuangan, kepatuhan (*compliance*), serta audit khusus, termasuk investigasi atas penugasan Direktur Utama.

Kegiatan *assurance* mencakup pemeriksaan dalam lingkup audit operasional, keuangan, kepatuhan, serta audit dengan tujuan tertentu atau penugasan khusus, baik atas perintah Direktur Utama maupun berdasarkan penugasan Internal Audit sesuai dengan tingkat urgensinya. Kegiatan ini meliputi evaluasi dan penilaian atas kecukupan serta efektivitas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan praktik tata kelola perusahaan guna memastikan tercapainya standar pengendalian yang memadai.

Sementara itu, kegiatan *consulting* dilaksanakan melalui diskusi, kajian, dan *brainstorming* bersama unit kerja terkait untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi terbaik berdasarkan penilaian manfaat dan risiko atas permasalahan yang dikonsultasikan. Ruang lingkup kegiatan *consulting* mencakup peningkatan efektivitas operasional, penguatan manajemen risiko, penyempurnaan pengendalian internal, serta peningkatan kualitas proses tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup Audit Internal Audit

Ruang lingkup kegiatan internal audit mencakup semua unit kerja di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, entitas anak dan afiliasi, serta sesuai dengan implementasi tata kelola terintegrasi Internal Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Vision and Mission of Internal Audit

Vision

To become a professional Internal Auditor that plays an active role in the field of supervision based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) in supporting the Company's advancement.

Mission

1. Assisting the company in ensuring effective and sustainable achievement of its objectives through the implementation and evaluation of operational control processes, risk management, and good corporate governance (GCG) practices using a risk-based audit.
2. Enhancing and protecting organizational value by carrying out assurance and consulting roles and functions by providing independent, objective, innovative, and constructive recommendations and delivering added value using the latest information technology.
3. Continuously developing auditor competency.
4. Enhancing synergy between the internal and external audit functions.
5. Managing internal audit activities effectively and efficiently.

Objectives of Internal Audit

To provide strategic contributions to Management through independent and objective assurance and consulting services in order to enhance added value and improve the Company's operational performance through a systematic and structured approach. These efforts are carried out by improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance processes through audits covering operational, financial, compliance, and special audits, including investigations based on assignments from the President Director.

Assurance activities include audits in the areas of operational, financial, compliance, and specific purpose audits or special assignments, either based on the President Director's instruction or Internal Audit assignments according to their urgency level. These activities involve evaluating and assessing the adequacy and effectiveness of internal controls, risk management implementation, and corporate governance practices to ensure that adequate control standards are achieved.

Meanwhile, consulting activities are conducted through discussions, studies, and brainstorming sessions with relevant work units to obtain the best conclusions and recommendations based on the assessment of benefits and risks related to the issues consulted. The scope of consulting activities includes improving operational effectiveness, strengthening risk management, enhancing internal controls, and continuously improving the quality of corporate governance processes.

Scope of Internal Audit

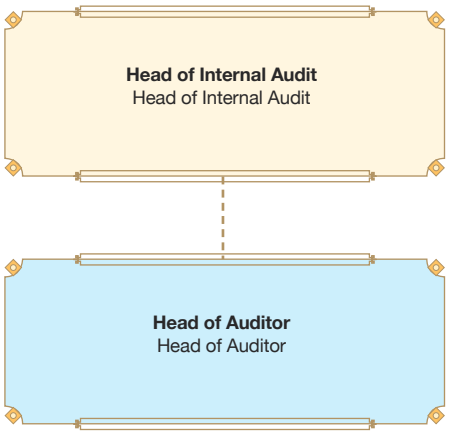
The scope of Internal Audit activities covers all work units within PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, its subsidiaries and affiliates, and aligns with the implementation of integrated governance of Internal Audit of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., based on the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Struktur Organisasi Internal Audit

Susunan Organisasi Internal Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Organizational Structure

The composition of Internal Audit Organization as of December 31, 2025 is as follows:



Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Hal-hal yang diatur terkait dengan kedudukan Internal Audit dalam struktur organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit, yang kedudukan dalam organisasi perusahaan setingkat dengan "Vice President" dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.
2. Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, dan setiap pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Head of Internal Audit diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan Perusahaan dibantu oleh Auditor Intern yang terdiri dari Head of Auditor dan Auditor.
4. Kedudukan Internal Audit sebagai organ yang membantu Direktur Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.
5. Internal Audit menjalankan fungsi sebagai organ internal audit terintegrasi dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi konstruksi.

Internal Audit's Position within the Organizational Structure

The matters regulated regarding the position of Internal Audit in the Company's organizational structure are as follows:

1. Internal Audit organization is led by a Head of Internal Audit, whose position within the Company's organizational structure is equivalent to a "Vice President" and who reports directly to President Director, as well as assists Board of Commissioners in carrying out the supervisory function to realize the Company's vision and mission.
2. Head of Internal Audit is appointed and dismissed by President Director with the approval of Board of Commissioners, taking into account the recommendation of Audit Committee. Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit is reported to the Financial Services Authority.
3. To support the Company's supervisory function, Internal Audit is supported by Internal Auditors consisting of Head of Auditor and Auditors.
4. The position of Internal Audit as an organ assisting President Director must be placed within the organizational structure in accordance with its roles and responsibilities, ensuring independence in expressing views and opinions without influence or pressure from management or other parties.
5. Internal Audit performs its function as an integrated internal audit organ in the implementation of integrated governance within the construction conglomeration.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) berbasis risiko yang direviu secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika perubahan bisnis Perseroan, termasuk penyusunan anggaran biaya audit yang disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan serta jumlah unit kerja yang diprogramkan untuk diperiksa, baik pada tingkat entitas maupun operasional.
2. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai jadwal yang tercantum dalam PKPT, melalui pengujian dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko berdasarkan sistem, prosedur, dan kebijakan operasional Perseroan secara berkesinambungan.

Duties and Responsibilities of Internal Audit

Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. To prepare an Annual Audit Work Program (PKPT) based on risk, which is periodically reviewed by considering changes in the Company's business dynamics, including the preparation of audit budget adjusted to the audit scope and the number of work units to be audited at both entity and operational levels.
2. To conduct routine audits in accordance with PKPT schedule through testing and evaluation of internal control implementation and risk management practices based on the Company's systems, procedures, and operational policies on an ongoing basis.

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi serta efektivitas kegiatan, antara lain pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, Human Capital, Pemasaran, Engineering, Produktivitas, dan Teknologi Informasi, termasuk melakukan evaluasi atas sistem, prosedur, serta kebijakan operasional Perseroan secara berkelanjutan.
4. Menyusun dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) secara sistematis sebagai dasar pendukung hasil pemeriksaan.
5. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikannya kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Menyusun *draft* surat tindak lanjut Direktur Utama yang berfokus pada permasalahan utama yang memerlukan penanganan segera oleh pimpinan unit kerja yang diperiksa, untuk kemudian ditandatangani oleh Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan.
7. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas LHP yang telah disampaikan kepada pimpinan unit kerja sesuai disposisi Direktur Utama, guna memastikan rekomendasi audit ditindaklanjuti secara efektif.
8. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor atau konsultan eksternal, guna memastikan penyelesaian temuan audit secara tepat waktu dan sesuai rekomendasi.
9. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil IA melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Forensic Auditor (Cfra) dan lain-lain yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha perusahaan.
10. Menyusun dan melakukan program jaminan mutu kegiatan audit internal sesuai dengan prosedur pengawasan internal berupa:
    a. Melakukan supervisi rutin dalam penugasan pemeriksaan.
    b. Melakukan penilaian mandiri kualitas internal audit minimum setahun sekali.
    c. Melakukan eksternal asesmen paling sedikit tiga tahun sekali oleh pihak independen.
11. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan.
12. Bekerja sama dengan Komite Audit.
13. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan.
14. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit akan ditetapkan dalam surat penugasan tersendiri.
15. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan intern yaitu terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Internal Audit. Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Internal Audit dan pihak eksternal mematuhi piagam audit intern perusahaan
16. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Internal Audit terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Internal Audit mengacu pada pedoman tata kelola terintegrasi:

3. To examine and assess the efficiency and effectiveness of activities in areas such as Accounting, Finance, Operations, Human Capital, Marketing, Engineering, Productivity, and Information Technology, including continuous evaluation of systems, procedures, and operational policies.
4. To prepare and document Audit Working Papers (KKP) systematically as supporting evidence for audit results.
5. To prepare Audit Reports (LHP) and submit them to the President Director and Board of Commissioners through Audit Committee.
6. To prepare a draft of a follow-up letter from the President Director that focuses on key problems that require immediate handling by the head of work unit being audited, to then be signed by the President Director after obtaining approval.
7. To monitor the follow-up of Audit Report (LHP) submitted to the work unit heads, as directed by the President Director, to ensure that audit recommendations are effectively followed up.
8. To monitor the follow-up of audit results conducted by external auditors or consultants to ensure timely resolution of audit findings and recommendations.
9. To improve the competencies and capabilities of Internal Audit personnel through ongoing education/training and professional expertise certification, such as Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Forensic Auditor (CFRA), and other programs, both domestically and internationally, in line with the evolving complexity and business activities of the company.
10. To prepare and carry out quality assurance program for internal audit activities in accordance with internal control procedures in the form of:
    a. Routine supervision during audit assignments;
    b. Internal self-assessment of audit quality at least once a year;
    c. External assessment at least once every three years by an independent party.
11. To provide objective opinions, input, considerations, and consulting services to management and other work units related to supervisory functions.
12. To collaborate with Audit Committee.
13. To conduct special audits when necessary.
14. If assigned to collaborate with supporting organs of Board of Commissioners other than the Audit Committee, will be stipulated in a separate assignment letter.
15. To ensure that, in the case of the use of external services for internal audit activities, knowledge transfer between the external party and the Internal Audit members is carried out. The use of external services does not affect the independence and objectivity of Internal Audit function, and the external party complies with the Company's internal audit charter.
16. In implementing the integrated Internal Audit function, the duties and responsibilities of Internal Audit refer to the integrated governance guidelines:

a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern dengan entitas anak dan afiliasi, merumuskan prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing entitas anak dan afiliasi dalam konglomerasi konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
c. Dapat melaksanakan audit pada entitas anak dan atau afiliasi baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari Internal Audit entitas anak.
d. Terkait hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan wajib menyampaikan laporan berikut ke induk secara berkala;

17. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern.
18. Laporan Tindak Lanjut Audit Intern, BPK, BPKP, dan Auditor Independen.
19. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Head of Internal Audit (jika ada).
20. Laporan khusus mengenai temuan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha.
21. Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang *independent (Quality Assurance Review*).
22. Memberikan layanan penjaminan (assurance) yang dilaksanakan seperti: Audit Kepatuhan (*compliance auditing*), *self-assessment* GCG, Audit tujuan tertentu, dan kegiatan *assurance* lainnya.

Peran Internal Audit

Dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, Internal Audit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun peran Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan rekomendasi strategis kepada Direktur Utama dalam proses pengurusan dan pengelolaan Perseroan guna mendukung peningkatan kinerja serta efektivitas operasional.
2. Membantu Direktur Utama dalam memastikan kecukupan serta melakukan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian manajemen Perseroan pada seluruh level operasional.
3. Mendukung Direktur Utama dalam upaya mengamankan aset Perseroan melalui evaluasi atas kecukupan pengendalian internal serta penerapan mekanisme pengawasan yang memadai.
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas sistem, prosedur, dan kebijakan operasional pada seluruh lini organisasi Perseroan untuk memastikan proses bisnis berjalan secara optimal.
5. Berperan sebagai mitra pengawasan bagi unit kerja dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mendukung sosialisasi serta implementasi kebijakan Perseroan agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.
7. Membantu menciptakan sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi manajemen untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan secara tepat waktu.
8. Berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, berintegritas, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Determine the strategy for carrying out internal audits with subsidiaries and affiliates, formulate internal audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps.
b. Monitor the implementation of internal audits at each subsidiary and affiliate within the construction conglomerate PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
c. May conduct audits of subsidiaries and/or affiliates, either individually, jointly, or based on reports from the subsidiary's Internal Audit.
d. Regarding the relationship between the parent company and its subsidiaries, the following reports must be submitted to the parent company periodically:

17. Internal Audit Implementation and Key Findings Report;
18. Audit Follow-Up Report by Internal, BPK, BPKP, and Independent Auditors;
19. Appointment/dismissal report of Head of Internal Audit (if any);
20. Special reports on findings that may endanger business continuity;
21. Independent external Quality Assurance Review reports.
22. To provide assurance services which are implemented such as: Compliance Audits, GCG self-assessments, Specific Purpose Audits, and other assurance activities.

Role of Internal Audit

In supporting the achievement of corporate goals, the Internal Audit plays a crucial role in ensuring the effectiveness of internal controls and good corporate governance. The Internal Audit function is as follows:

1. Providing strategic input and recommendations to the President Director regarding the management and administration of the Company to support improved performance and operational effectiveness.
2. Assisting the President Director in ensuring the adequacy and assessing the effectiveness of the Company's management control system at all operational levels.
3. Supporting the President Director in safeguarding the Company's assets by evaluating the adequacy of internal controls and implementing adequate oversight mechanisms.
4. Analyzing and evaluating the effectiveness of operational systems, procedures, and policies across all levels of the Company's organization to ensure optimal business processes.
5. Acting as a supervisory partner for work units in carrying out the Company's operational activities effectively, efficiently, and in accordance with applicable regulations.
6. Supporting the dissemination and implementation of Company policies to ensure they are understood and consistently applied across all work units.
7. Assisting in creating an early warning system for management to identify potential deviations, so that corrective actions can be taken in a timely manner.
8. Act as an agent of change in encouraging the creation of a work culture that is clean, has integrity, and complies with applicable laws and regulations.

Wewenang Internal Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Internal Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menyusun, memperbarui, dan melaksanakan kebijakan audit internal, termasuk menetapkan prosedur serta ruang lingkup pelaksanaan kegiatan audit.
2. Memasuki seluruh area Perseroan serta meninjau tempat usaha, lingkungan kerja, dan lokasi aset Perseroan dalam rangka pelaksanaan audit.
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen maupun karyawan yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan.
4. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, auditor memiliki akses penuh terhadap seluruh informasi, aset, dokumen, catatan, serta personel Perseroan yang relevan dengan ruang lingkup audit.
5. Meminta dukungan tenaga auditor dari internal Perseroan apabila diperlukan, serta menggunakan tenaga ahli atau auditor eksternal apabila kompetensi yang dibutuhkan belum tersedia di lingkungan Internal Audit, dengan biaya menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit, termasuk anggota dari masing-masing organ tersebut, dalam rangka pelaksanaan tugas audit.
7. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan auditor eksternal untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta sinergi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
8. Melakukan Joint Audit pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Head of Internal Audit Perusahaan wajib melakukan koordinasi dengan kepala Internal Audit Anak Perusahaan untuk meminta keterangan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah pengawasan dan menyelaraskan program Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dengan Internal Audit Anak Perusahaan dalam rangka untuk memastikan berjalannya aspek pengendalian pada Anak Perusahaan, dan Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dapat melakukan pemeriksaan ke Anak Perusahaan Bersama Internal Audit Perusahaan Anak dan atau Internal Audit entitas lain yang mempunyai kepemilikan bersama pada Anak Perusahaan dengan penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
   b. Atas hasil pemeriksaan Internal Audit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. Dan Direktur Anak Perusahaan.
9. Dapat mengikuti rapat-rapat manajemen yang bersifat strategis.
10. Melakukan pemilihan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.
11. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik (*code of conduct*).

Authority of Internal Audit

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit has the following authorities:

1. Develop, update, and implement internal audit policies, including establishing procedures and the scope of audit activities.
2. Enter all areas of the Company and inspect the Company's business premises, work environment, and asset locations for the purpose of conducting audit.
3. Request information and clarification from all levels of management and employees related to the audit activities.
4. During the audit, the auditor has full access to all information, assets, documents, records, and Company personnel relevant to the audit scope.
5. Request support from internal auditors if necessary, and utilize experts or external auditors if the required competencies are not yet available within the Internal Audit, at the Company's expense in accordance with applicable regulations.
6. Communicate directly with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, including members of each of these organs, regarding the implementation of audit duties.
7. Coordinate audit activities with external auditors to ensure effectiveness, efficiency, and synergy in the implementation of oversight function.
8. Conduct Joint Audit of Subsidiaries within PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., subject to the following provisions:
   a. The Head of Internal Audit of the Company is required to coordinate with the Head of Internal Audit of Subsidiary to request information and documents as required in accordance with supervisory procedures and to align the Internal Audit program of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. with the Internal Audit of the Subsidiary to ensure the implementation of control aspects within the Subsidiary. The Internal Audit of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. may conduct audits of the Subsidiary together with the Internal Audit of the Subsidiary and/or the Internal Audit of other entities with joint ownership of the Subsidiary, upon assignment by the President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
   b. The results of Internal Audit of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. shall be reported directly to the President Commissioner of the Subsidiary, with a copy to the President Director of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk. and the Director of the Subsidiary.
9. May participate in strategic management meetings.
10. Select competent human capital as needed to carry out Internal Audit duties.
11. Conduct investigative activities on cases/problems in every aspect and element of activities that indicate fraud and violations of the code of conduct.

Kode Etik Internal Audit

Untuk mengatur perilaku dan kepatuhan auditor internal, termasuk Head of Internal Audit dan Auditor, Perseroan menetapkan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kode Etik Internal Audit bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam Internal Audit menjalankan tugas dengan integritas, objektivitas, dan independensi yang tinggi. Adapun prinsip dasar yang dijadikan panduan selama pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Auditor Internal wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama dan/atau Head of Internal Audit.
2. Auditor Internal harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan.
3. Auditor Internal harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya.
4. Audit Internal harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan korps.
5. Audit Internal harus membangun komunikasi yang intens dengan sesame pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.
6. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Auditor Internal harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan prosedur umum pemeriksaan oleh Internal Audit dan Tindak Lanjut PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.
7. Auditor Internal harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas illegal atau yang tidak sepantasnya dilakukan.
8. Auditor Internal berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertindak secara independen.
9. Dalam menerima penugasan diluar kegiatan pemeriksaan dan operasional perusahaan, Auditor Internal wajib menanggalkan identitas dan atributnya selaku Auditor Internal.
10. Head of Internal Audit dan tim Auditor Internal dilarang untuk merangkap tugas secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk.

Profil Pejabat Internal Audit

Internal Audit diketuai oleh Head of Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A.DIR.WG.09593/2024. Profil dari pejabat Internal Audit dapat dilihat di bab Profil Perseroan dari laporan tahunan ini. Jumlah pegawai yang tergabung dalam unit Internal Audit sebanyak 9 (sembilan) orang per 31 Desember 2025.

Internal Audit Code of Ethics

To regulate the behavior and compliance of internal auditors, including the Head of Internal Audit and Auditors, the Company has established basic principles that serve as guidelines for carrying out their duties. The Internal Audit Code of Ethics aims to ensure that every individual in the Internal Audit performs their duties with integrity, objectivity, and independence. The basic principles that serve as guidelines during the performance of their duties are as follows:

1. Internal auditors must be honest, objective, careful, wise, responsible, courageous, and possess high integrity. They must be able to act independently in carrying out their duties and obligations and must be able to maintain the trust placed in them by the President Director and/or Head of Internal Audit.
2. Internal auditors must be able to maintain the trust placed in them during their audit assignments.
3. Internal auditors must use all available resources to obtain sufficient evidence to support their statements.
4. Internal auditors must strive to improve their work skills by maintaining job competence, morality, and upholding the honor of the corps.
5. Internal auditors must establish close communication with fellow auditors and external auditors, for the benefit of the company in carrying out their duties.
6. In carrying out their duties as Internal Auditors, they must adhere to the audit standards and general audit procedures of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Internal Audit and Follow-Up.
7. Internal Auditors must refrain from participating in illegal or inappropriate activities.
8. Internal Auditors strive to avoid involvement in activities that could give rise to a conflict of interest or prejudice that could question their ability to act independently.
9. When accepting assignments outside of audit and company operations, Internal Auditors must relinquish their identity and attributes as Internal Auditors.
10. The Head of Internal Audit and the Internal Audit team are prohibited from concurrently serving directly in the operational activities of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Profile of Internal Audit Officials

The Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit based on Board of Directors Decree No. SK.02.01/A.DIR.WG.09593/2024. The profile of the Internal Audit official can be found in the Company Profile section of this Annual Report. As of December 31, 2025, the Internal Audit unit consists of a total of 9 (nine) personnel.

Andi Sugiarto Head of Internal Audit		
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	
Usia Age	53 tahun pada akhir tahun buku 2025	53 years old by the end of fiscal year 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1994)	Associate Expert in Accounting from Diponegoro University, Semarang (1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Satuan Pengawas Internal WIKA Rekayasa Konstruksi (2019) • Kepala Pemeriksa Satuan Pengawas Internal WIKA (2019) • Manajer Bidang Keuangan dan Human Capital Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas dari Gresik • Semarang Divisi Industrial Plant WIKA (2015).	• Head of Internal Audit Unit of WIKA Construction Engineering (2019) • Chief Auditor of Internal Audit Unit of WIKA (2019) • Finance and Human Capital Manager for Gresik Gas Transmission Pipeline Construction Project • Semarang Industrial Plant Division of WIKA (2015).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Kepala Satuan Pengawas Internal sejak 2 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.01/A. DIR.WG.3603/2021	Head of Internal Audit Unit since June 2, 2021, based on Board of Directors' Decree No.: SK.02.01/A.DIR. WG.3603/2021

Sertifikasi Kompetensi Internal Audit

Seluruh pegawai Internal Audit diwajibkan untuk memiliki sertifikasi yang relevan guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk meningkatkan kompetensi, Perseroan mengikutsertakan pegawai Internal Audit dalam program sertifikasi profesi, khususnya yang terkait dengan auditor internal. Per 31 Desember 2025, sertifikasi profesi yang dimiliki oleh pegawai Internal Audit adalah sebagai berikut:

Internal Audit Competency Certification

All Internal Audit employees are required to hold relevant certifications to create sustainable added value. As part of the Company's commitment to improving competency, the Company enrolls Internal Audit employees in professional certification programs, specifically those related to internal auditors. As of December 31, 2025, the professional certifications held by Internal Audit employees are as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certifications
1	Andi Sugiarto	Head of Internal Audit	QIA, CRMP
2	Ardi Novianto	Head of Auditor	CRMP, PMP, QIA Tingkat Dasar CRMP, PMP, QIA Basic Level
3	Noor Prihartanto	Head of Auditor	CRMP, PMP, QIA Tingkat Dasar CRMP, PMP, QIA Basic Level
4	Ferdian Aprim Nugroho	Head of Auditor	QIA

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Perseroan menyediakan program pengembangan kompetensi bagi personel Internal Audit guna mendukung pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal secara efektif dan profesional.

Adapun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Internal Audit Training and Competency Development

The Company provides competency development programs for Internal Audit personnel to support effective and professional implementation of the Internal Audit Work Unit's duties.

The Internal Audit participated in the following training and competency development programs during 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
		Nama Pelatihan Training Title	Waktu Date	Penyelenggara Organizer
Andi Sugiarto	Head of Internal Audit	CRMP	Mei 2025 May 2025	BSMR
Noor Prihartanto	Head of Auditor	CRMP	Agustus 2025 August 2025	BSMR
		QIA Tingkat Dasar *QIA Basic Level*	Desember 2025 December 2025	YPIA
		PMP	November 2025 November 2025	PMI
Ardi Novianto	Head of Auditor	PMP	November 2025 November 2025	PMI
Bopriari Kusumawijaya	Head of Auditor	CRMP	Mei 2025 May 2025	BSMR
Martin Ulpan	Auditor	SMAP Awareness	September 2025 September 2025	Internal WEGE

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2025

Pada tahun 2025, Internal Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tercermin dari realisasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap sebanyak 23 objek pemeriksaan sesuai dengan hasil reviu dan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), yang terdiri dari:

1. Proyek Pembangunan Stadion Surajaya Lamongan.
2. Proyek Revitalisasi Hotel Ombilin Heritage Tahap 2 dan Sarana Penunjang.
3. Proyek Pembangunan Gedung Fasilitas Pengembangan Produk Skala Pilot (Gedung No.34), Renovasi Pembangunan Fasilitas Adenovirus Gedung 14, Pembangunan Perluasan Bangunan Gardu Hubung dan Jaringan Listrik PT Bio Farma.
4. Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan, Kota Medan.
5. Proyek Pekerjaan Rancang dan Bangun Modern Office di MSP KOPERBI Jakarta.
6. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Bank Mandiri Gresik.
7. Proyek Precast Struktur Rusun Paspampres PT WPG.
8. Proyek Pekerjaan Revitalisasi Gedung BNI KC Cirebon PT WPG.
9. Proyek Rumah Fungsional Bank Mandiri Jakarta PT WPG.
10. Proyek Pembangunan Hunian Terjangkau Tower B Nuansa Cilangkap.
11. Proyek Pembangunan Bangunan Pendukung Kawasan Bank Indonesia di Karawang (PK-12).
12. Proyek Pekerjaan Rancang dan Bangun Bangunan Gedung Wing 1 dan Kawasan Kantor Kementerian PUPR.
13. Proyek Universitas Diponegoro.
14. Proyek Pembangunan Gedung Pusat Onkologi RS Soeradji Tirtonegoro.
15. Pabrik Modular.
16. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG).
17. PT Wege Solusi Proklamasi.
18. Operation Division.
19. Operation and Modular Division.
20. Operation and Concession Division.
21. Risk Management Division.
22. Marketing Division.
23. Finance Division.

Brief Description of Internal Audit Duties Implementation in 2025

In 2025, Internal Audit successfully carried out its duties and responsibilities, as reflected in the realization of audit for 23 audit objects in accordance with the review results and the Annual Audit Work Program (PKPT), consisting of:

1. Surajaya Stadium Development Project in Lamongan.
2. Ombilin Heritage Hotel Revitalization Project Phase 2 and Supporting Facilities.
3. Pilot-Scale Product Development Facility Building Construction Project (Building No. 34), Renovation of Adenovirus Facilities in Building 14, Construction of Substation and Electrical Network Expansion Project at PT Bio Farma.
4. Teladan Stadium Rehabilitation and Renovation Project, Medan City.
5. Modern Office Design and Construction Project at MSP KOPERBI Jakarta.
6. Bank Mandiri Gresik Office Building Construction Project.
7. Precast Structure Project for Paspampres Flats at PT WPG.
8. Revitalization Project for BNI Branch Building in Cirebon at PT WPG.
9. Functional Housing Project Bank Mandiri Jakarta PT WPG.
10. Tower B Nuansa Cilangkap Affordable Housing Development Project.
11. Bank Indonesia Supporting Building Development Project in Karawang (PK-12).
12. Wing 1 Building Design and Construction Project and the Ministry of Public Works and Public Housing Office Area.
13. Diponegoro University Project.
14. Soeradji Tirtonegoro Hospital Oncology Center Building Construction Project.
15. Modular Factory.
16. PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG).
17. PT Wege Solusi Proklamasi.
18. Operation Division.
19. Operation and Modular Division.
20. Operation and Concession Division.
21. Risk Management Division.
22. Marketing Division.
23. Finance Division.

Selain melaksanakan kegiatan audit, Internal Audit juga melaksanakan pendampingan Audit KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025.

In addition to conducting audit activities, Internal Audit also provided audit assistance to the Public Accounting Firm (KAP) for the audit of 2025 Financial Statements.

Kebijakan dan Pelaksanaan Frekuensi Rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Berdasarkan *Internal Audit Charter*, dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit dan Komite Audit (KA) merupakan mitra kerja, dimana Komite Audit melakukan penilaian atas aktifitas hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit dan memberikan masukan yang konstruktif kepada Internal Audit sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang dilakukan Internal Audit yang diwujudkan dengan rapat koordinasi.

Policy and Frequency of Meetings with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Based on the Internal Audit Charter, in carrying out their duties, Internal Audit and Audit Committee (KA) are Partners, where the Audit Committee assesses the audit results of Internal Audit and provides constructive input to Internal Audit as feedback on the implementation of its duties, which is realized through coordination meetings.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Internal Audit

Selama tahun 2025, Internal Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda pencapaian program kerja pemeriksaan tahunan dan tindak lanjutnya. Berikut adalah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit:

Internal Audit Meeting Frequency and Attendance

During 2025, Internal Audit held six meetings, with the agenda being the achievement of annual audit work program and its follow-up. The attendance of each Audit Committee member is as follows:

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Kehadiran Attendance		
			Taufan Gestoro	Danis Hidayat Sumadilaga	Joseph Prayogo
1	14 Maret 2025 March 14, 2025	Rapat Closing Audit Laporan Keuangan WEGE WEGE's Financial Statements Audit Closing Meeting	Hadir Present		Hadir Present
2	20 Mei 2025 May 20, 2025	Rapat Koordinasi Coordination Meeting	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
3	03 Juli 2025 July 3, 2025	Rapat Koordinasi Coordination Meeting	Hadir Present		Hadir Present
4	30 Juli 2025 July 30, 2025	Rapat Koordinasi Coordination Meeting	Hadir Present		Hadir Present
5	16 Desember 2025 December 16, 2025	Rapat KAP RSM KAP RSM Meeting	Hadir Present		Hadir Present
6	17 Desember 2025 December 17, 2025	Rapat Koordinasi Coordination Meeting	Hadir Present		Hadir Present

Komite Lain di bawah Direksi
Other Committees Under Board of Directors

Hingga 31 Desember 2025, Direksi Perseroan belum membentuk komite di bawah Direksi. Direksi mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Direksi telah didukung secara memadai oleh berbagai fungsi penunjang, antara lain Corporate Secretary, Internal Audit, Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, serta fungsi-fungsi strategis lainnya yang berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan.

Melalui dukungan fungsi-fungsi tersebut, Direksi tetap memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pengawasan internal, serta pengelolaan risiko dan kepatuhan dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Ke depan, Direksi akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pembentukan komite di bawah Direksi dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis, kompleksitas operasional, serta kebutuhan strategis Perseroan.

As of December 31, 2025, the Company's Board of Directors has not established any committees under the Board of Directors. Board of Directors considers that in carrying out its functions, duties, and responsibilities, Board of Directors is adequately supported by various supporting functions, including the Corporate Secretary, Internal Audit, Internal Control System, Risk Management, and other strategic functions that play a role in supporting the Company's effective management.

Through the support of these functions, Board of Directors continues to ensure that the decision-making process, internal oversight, and risk and compliance management are optimal, coordinated, and aligned with the principles of Good Corporate Governance. Going forward, Board of Directors will continue to evaluate the need to establish committees under Board of Directors, taking into account business developments, operational complexity, and the Company's strategic needs.

Auditor Eksternal
External Auditor

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang berwenang memberikan jasa audit atas laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Akuntan Publik (AP) adalah individu yang memiliki izin resmi untuk memberikan jasa audit dan jasa profesional lainnya di bidang akuntansi, berdasarkan kompetensi dan standar etika profesi.

Penerapan praktik terbaik dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan Perseroan tidak terlepas dari peran KAP dan AP. Melalui audit eksternal yang dilakukan secara periodic terhadap laporan keuangan Perseroan, KAP dan AP memberikan penilaian independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Audit eksternal ini juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas laporan keuangan Perseroan.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik, sebagai pihak independen dari luar Perseroan, memiliki peran penting dalam memberikan opini profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Akuntan Publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dari Komite Audit.

Proses pemilihan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Untuk menjamin independensi dan integritas hasil audit, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki hubungan yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance/ CoCG) dan *Board Manual* Perseroan. Seluruh ketentuan tersebut menjadi acuan dalam memastikan bahwa proses penunjukan dilaksanakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

A Public Accounting Firm (KAP) is a business entity authorized to provide audit services for financial statements, in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile, a Public Accountant (PA) is an individual officially licensed to provide audit services and other professional services in the accounting field, based on competency and professional ethical standards.

The implementation of best practices of Good Corporate Governance (GCG) principles within a Company is inseparable from the role of Public Accountant Firms (KAP) and Public Accountants (PA). Through periodic external audits of the Company's financial statements, Public Accountants (KAP) and Public Accountants (PA) provide an independent assessment of the fairness of the presentation of the financial statements in accordance with applicable Financial Accounting Standards.

These external audits also play a crucial role in increasing transparency, accountability, and stakeholder confidence in the integrity of the Company's financial statements.

POLICY OF PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT

Public Accountant, as an independent external party to the Company, plays an important role in providing a professional opinion on the fairness of the presentation of the Company's financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. The appointment of Public Accountant is carried out through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), based on the recommendation of Board of Commissioners after considering the evaluation results from Audit Committee.

Public Accountant selection process is conducted in accordance with applicable procurement procedures, while upholding the principles of transparency, accountability, and objectivity. To ensure the independence and integrity of the audit results, the appointed External Auditor is not permitted to have any relationship that could create a conflict of interest with the Company.

The basis for appointing a Public Accounting Firm and/or Public Accountant is based on Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, as well as the Company's Code of Corporate Governance (CoCG) and Board Manual. All these provisions serve as a reference to ensure that the appointment process is carried out professionally, independently, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

PROSES PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT PROCESS

1	**Komite Audit** Audit Committee
2	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners
3	**Direksi** Board of Directors
4	**RUPS** GMS
5	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm

Komite Audit Audit Committee	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Dewan Komisaris** Board of Commissioners	**RUPS** GMS
Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan KAP tahun sebelumnya dan kemudian mengadakan rapat pembahasan pengadaan jasa audit KAP. Hasil evaluasi KAP kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan memberikan saran terkait pengadaan jasa audit KAP berdasarkan rapat Komite Audit. Audit Committee evaluates the KAP's performance in the previous year and then holds a meeting to discuss the procurement of KAP audit services. The results of KAP evaluation are then submitted to the Board of Commissioners, who provide recommendations regarding the procurement of KAP audit services based on the Audit Committee meeting.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melakukan proses pengadaan Jasa Audit KAP berdasarkan hasil evaluasi KAP dan sesuai dengan ketentuan. Board of Commissioners requests the Board of Directors to conduct the procurement process for Public Accounting Firm (KAP) Audit Services based on the results of KAP evaluation and in accordance with the provisions.	Melakukan proses pengadaan. Conduct the procurement process.	Mengajukan usulan jasa Audit KAP kepada RUPS. Submit a proposal for KAP Audit Services to the GMS.	Menetapkan jasa audit KAP. Determine the KAP audit services.

TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit telah melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi atas penunjukan dan/atau pemberhentian auditor eksternal berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, Komite Audit memberikan rekomendasi dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Rekomendasi ini dituangkan secara resmi dalam Laporan Komite Audit tertanggal 8 Januari 2026.

AUDIT COMMITTEE RESPONSIBILITIES IN PROVIDING RECOMMENDATIONS ON THE APPOINTMENT AND DISMISSAL OF EXTERNAL AUDITORS

Audit Committee has carried out its responsibility to provide recommendations on the appointment and/or dismissal of external auditors based on the evaluation of audit services provided on annual historical financial information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms. Furthermore, Audit Committee provided recommendations on the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms, Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia), to audit the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the period ending December 31, 2025. This recommendation was officially outlined in the Audit Committee Report dated January 8, 2026.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Penerapan fungsi Audit Eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada standar dan pedoman yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Perseroan secara konsisten menjalin komunikasi dengan Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, mematuhi perjanjian kerja, serta memenuhi ruang lingkup audit yang telah disepakati. Perseroan juga memastikan bahwa seluruh tahapan audit diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan audit, Perseroan bersama Auditor Eksternal menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan pelaksanaan audit, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memastikan kebutuhan koordinasi selama proses audit dapat terpenuhi secara efektif.

IMPLEMENTATION OF EXTERNAL AUDIT FUNCTION

The implementation of External Audit function appointed by the Company is carried out in accordance with applicable standards and guidelines, including Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 9 of 2023 dated July 11, 2023, concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, specifically Article 7 paragraph (1). This provision stipulates that commercial banks, issuers, and public companies are required to limit the use of audit services for annual historical financial information from the same Public Accountant to a maximum of seven cumulative years.

The Company consistently communicates with the External Auditor to ensure that the audit process is carried out in accordance with the Public Accountant Professional Standards, complies with the work agreement, and meets the agreed audit scope. The Company also ensures that all audit stages are completed within the established timelines.

To support smooth implementation of the audit, the Company and the External Auditor hold regular meetings to discuss audit progress, identify any challenges encountered, and ensure that coordination needs during the audit process are met effectively.

AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Merujuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024, Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penunjukan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek independensi, kompetensi, serta kualitas hasil pemeriksaan, dengan memastikan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan sehingga dapat melaksanakan proses audit secara objektif dan profesional.

PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT IN THE LAST 5 (FIVE) YEARS

In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) held on May 20, 2024, the Company has approved the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia) to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the period ending December 31, 2025.

The appointment was made taking into account the independence, competence, and quality of the audit results, ensuring that the appointed Public Accountant has no conflict of interest with the Company and can carry out the audit process objectively and professionally.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountant and Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar Dan Rekan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
Tahun Audit Audit Year	2025
Periode Penugasan Assignment Period	01 November 2025 - 23 Februari 2026 November 1, 2025 - February 23, 2026

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Public Accounting Firm	
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Audit umum atas Laporan Keuangan WEGE, dan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 Reviu atas Evaluasi Kinerja (Key Performance Indicator) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern sebagai wujud penerapan Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 General Audit of WEGE's Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year Ending December 31, 2025 Review of the Performance Evaluation (Key Performance Indicators) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year Ending December 31, 2025 Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control as a manifestation of the implementation of Statement on Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ended December 31, 2025
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	-
Biaya Jasa Service Fees	Rp470.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Information regarding the Public Accounting Firm (KAP) and Public Accountants (AP) who carried out the audit of the Company's Consolidated Financial Statements in the last 5 (five) years is presented as follows:

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik (KAP)** Public Accounting Firm (KAP)		**Akuntan Publik (AP)** Public Accountant (AP)		**Jasa** Services	**Jasa Lainnya** Other Services	**Biaya Jasa (Rp)** Service Fee (Rp)
	Nama Name	**Izin KAP** Izin KAP	**Nama** Name	**Nomor Izin AP** AP License Number			
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, Dan Rekan	477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba	AP.0501	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31,	• *Review* atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. • Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2022. • Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2022.	Rp 393.984.375

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)		Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
	Nama Name	Izin KAP Izin KAP	Nama Name	Nomor Izin AP AP License Number			
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, Dan Rekan	477/ KM.1/2015	Rudi Hartono Purba	AP.0501	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2023.	• *Review* atas Evaluasi Kinerja PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. • Review of the Performance Evaluation of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2023. • Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2023.	Rp 455.803.906
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, Dan Rekan	477/ KM.1/2015	Lith Alfansuri	AP.1950	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2024	• Melakukan prosedur *Assurance* atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. • Performing Assurance Procedures on the Assessment Report of Key Performance Indicator (KPI) Achievement Levels for the Fiscal Year ending December 31, 2024. • Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2024.	Rp 470.000.000

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)		Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)		Jasa Services	Jasa Lainnya Other Services	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
	Nama Name	Izin KAP Izin KAP	Nama Name	Nomor Izin AP AP License Number			
2025	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, Dan Rekan	477/ KM.1/2015	Lith Alfansuri	AP.1950	Audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the Fiscal Year ending December 31, 2025	• Melakukan prosedur *Assurance* atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. • Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. • Performing Assurance Procedures on the Assessment Report of Key Performance Indicator (KPI) Achievement Levels for the Fiscal Year ending December 31, 2025. • Compliance Audit of Laws and Regulations and Internal Control for the year ending December 31, 2025.	470.000.000

JASA LAIN YANG DIBERIKAN

Selain melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik juga memberikan jasa profesional lainnya dengan tetap mengacu pada prinsip independensi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun jasa lain yang diberikan selama tahun buku 2025 meliputi:
1. Pelaksanaan prosedur assurance atas Laporan Penilaian Tingkat Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
2. Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern sebagai implementasi Pernyataan *Standar Auditing* (PSA) No. 62 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Ruang lingkup pekerjaan, baik untuk jasa audit atas laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir maupun jasa lainnya, diatur dalam Perjanjian Kerja antara PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan tanggal 23-Mei-2025 tentang Pekerjaan Jasa Audit Laporan Keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan Konsolidasian Tahun Buku 2025.

Seluruh jasa tersebut diberikan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, serta profesionalisme sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

OTHER SERVICES PROVIDED

In addition to conducting a general audit of the Consolidated Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk for the financial year ending December 31, 2025, the Public Accounting Firm and/or Public Accountant also provided other professional services while adhering to the principle of independence and in accordance with applicable regulations.

Other services provided during the 2025 fiscal year include:
1. Assurance procedures for the Key Performance Indicators (KPI) Achievement Assessment Report for the financial year ending December 31, 2025.
2. Audit of compliance with laws and regulations and internal control as an implementation of Statement on Auditing Standards (PSA) No. 62 for the year ending December 31, 2025.

The scope of work, including audit services for the annual financial statements for the most recent fiscal year and other services, is stipulated in the Work Agreement between PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners dated May 23, 2025, concerning Audit Services for the Financial Statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2025.

All services are provided while upholding the principles of independence, objectivity, and professionalism as part of the Company's commitment to implementing good corporate governance.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal sebagai mekanisme pengendalian yang terintegrasi dalam proses bisnis, pelaporan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, serta pengamanan aset Perseroan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal menjadi bagian penting dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui sistem ini, Perseroan memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan dalam koridor kewenangan, prosedur, dan standar pengendalian yang telah ditetapkan, sehingga setiap proses bisnis dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, terkendali, dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

DASAR PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar Perseroan, serta kebijakan internal yang berlaku di lingkungan Perseroan. Dasar penerapan tersebut diperkuat melalui Pedoman Tata Kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance*, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi atau *Board Manual*, Piagam Satuan Pengawasan Intern, Piagam Komite Audit, Pedoman Etika dan Perilaku atau *Code of Conduct*, serta kebijakan dan prosedur internal lainnya yang mengatur proses bisnis, pelaporan, pengawasan, kepatuhan, manajemen risiko, pengadaan, pengelolaan aset, teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan Perseroan.

Berdasarkan landasan tersebut, Perseroan membentuk dan memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, operasional, dan kepatuhan, serta menilai efektivitas pengendalian internal di seluruh lini organisasi. SPI menjalankan fungsi pengawasan internal secara independen dan objektif, memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen, serta memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan untuk mendukung efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pengamanan aset, dan penguatan tata kelola perusahaan.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan bertujuan untuk:

1. memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, termasuk proses bisnis, pelaksanaan proyek, pengadaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pendukung lainnya;

The Company applies Internal Control System as an integrated control mechanism embedded within its business processes, reporting, oversight, and decision-making activities. This system is designed to provide reasonable assurance regarding the effectiveness and efficiency of operations, the reliability of financial reporting, compliance with laws, regulations, and internal policies, as well as the safeguarding of the Company's assets.

The Internal Control System constitutes an essential element of Good Corporate Governance (GCG). Through this system, the Company ensures that business activities are conducted within established authorities, procedures, and control standards, enabling all business processes to be carried out transparently, accountably, effectively, and in support of the Company's long-term objectives.

BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System is implemented in accordance with applicable laws and regulations, including regulations in the capital market sector, Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company's Articles of Association, and applicable internal policies. The implementation framework is further strengthened through the Company's Code of Corporate Governance, the Board of Commissioners and Board of Directors Manual, the Internal Audit Charter, the Audit Committee Charter, the Code of Conduct, as well as various internal policies and procedures governing business processes, reporting, supervision, compliance, risk management, procurement, asset management, information technology, and financial management.

Based on this framework, the Company has established and strengthened the Internal Audit Unit (IAU), which assists the President Director in conducting financial, operational, and compliance audits, as well as assessing the effectiveness of internal controls throughout the organization. The IAU performs its functions independently and objectively, provides recommendations for improvement to management, and monitors the implementation of corrective actions arising from audit findings. These activities support operational effectiveness, reliable financial reporting, regulatory compliance, asset protection, and the enhancement of corporate governance practices.

OBJECTIVES OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The implementation of the Company's Internal Control System aims to:

1. Ensure the effectiveness and efficiency of operational activities, including business processes, project execution, procurement, financial management, asset management, and supporting functions;

2. meningkatkan keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan keuangan, laporan tahunan, serta pengungkapan keberlanjutan;
3. memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, kebijakan internal, standar akuntansi, kode etik, serta prosedur operasional yang berlaku;
4. melindungi aset Perseroan dari risiko penyalahgunaan, kehilangan, ketidakefisienan, dan penyimpangan;
5. memperkuat budaya akuntabilitas, integritas, dan kepatuhan di seluruh jenjang organisasi;
6. mendukung efektivitas pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

KERANGKA DAN KOMPONEN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal Perseroan diterapkan melalui lima komponen utama yang saling terhubung, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
   a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi pegawai.
   b. Filosofi dan gaya manajemen.
   c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab.
   d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
   e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha yang relevan dengan kegiatan operasional Perseroan.
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain terkait kewenangan, otorisasi, verifikasi, penilaian kinerja, pembagian tugas, serta pengamanan aset Perseroan.
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.
5. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi Internal Audit pada setiap tingkat dan unit organisasi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Setiap penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komite Audit.

Untuk membantu Direksi dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, koordinasi pengawasan, serta penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan kegiatan Perseroan, dibentuk fungsi Internal Audit yang juga memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.

Fungsi Internal Audit dipimpin oleh Head of Internal Audit yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Internal Audit diatur dalam Keputusan Direksi.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sistem Pengendalian Internal melibatkan seluruh organ Perusahaan dan sesuai dengan visi misi Perusahaan. Proses pengendalian dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural,

2. Enhance the reliability, consistency, and credibility of financial statements, annual reports, and sustainability disclosures;
3. Ensure compliance with laws and regulations, the Articles of Association, internal policies, accounting standards, codes of ethics, and applicable operational procedures;
4. Safeguard Company assets against misuse, loss, inefficiency, and irregularities;
5. Strengthen a culture of accountability, integrity, and compliance throughout the organization; and
6. Support effective risk management and the implementation of Good Corporate Governance.

FRAMEWORK AND COMPONENTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's Internal Control System is implemented through five interrelated components:

1. Control Environment within the Company, which is disciplined and structured, consisting of:
   a. Integrity, ethical values, and employee competence;
   b. Management philosophy and operating style;
   c. Management's approach to exercising authority and responsibility;
   d. Human resource organization and development; and
   e. Oversight and direction provided by the Board of Directors.
2. Risk Assessment and Risk Management, namely a process to identify, analyze, assess, and manage business risks relevant to the Company's operational activities.
3. Control Activities, namely actions undertaken to control Company activities at every level and organizational unit, including authorities, approvals, verification procedures, performance evaluations, segregation of duties, and asset safeguarding measures.
4. Information and Communication Systems, namely processes for generating and communicating reports on operational activities, financial performance, and compliance with applicable regulations and internal policies.
5. Monitoring, namely a process for assessing the quality and effectiveness of the Internal Control System, including the Internal Audit function across all organizational levels and units. Any deviations identified are reported to the Board of Directors, with copies submitted to the Audit Committee.

To support the Board of Directors in carrying out planning, control, supervisory coordination, and evaluation of management control systems and Company activities, the Internal Audit function has been established to provide continuous recommendations for improvement.

The Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit, who reports directly to the President Director. Further details regarding the duties and functions of Internal Audit are stipulated in a Board of Directors Decree.

The effectiveness of Internal Control System involves all Company organs and is aligned with the Company's vision and mission. Control processes are continuously carried out by the Board of Directors, structural officers, functional officers, and employees to provide

Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Perusahaan.

PENGENDALIAN KEUANGAN, OPERASIONAL, DAN KEPATUHAN

Perseroan menerapkan pengendalian internal pada aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pada aspek keuangan, pengendalian internal mencakup proses penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, otorisasi pengeluaran, pengelolaan kas, penyajian laporan keuangan, rekonsiliasi, penelaahan transaksi, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga keandalan laporan keuangan dan memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki dasar pencatatan yang memadai.

Pada aspek operasional, pengendalian internal diterapkan dalam proses bisnis utama Perseroan, termasuk akuisisi proyek, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengendalian biaya, mutu, waktu, keselamatan kerja, pengelolaan aset, serta pemantauan kinerja proyek. Pengendalian operasional diarahkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pencapaian sasaran kinerja Perseroan.

Pada aspek kepatuhan, Perseroan memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan pasar modal, Anggaran Dasar, Pedoman GCG, Kode Etik, kebijakan anti-korupsi, kebijakan benturan kepentingan, kebijakan pengadaan, serta prosedur internal lainnya. Pengendalian kepatuhan juga diperkuat melalui fungsi SPI, fungsi kepatuhan pada unit terkait, serta pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

PERAN ORGAN PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab menetapkan, memelihara, dan memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal di seluruh proses bisnis Perseroan. Direksi memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian dijalankan oleh seluruh unit kerja, serta menindaklanjuti hasil evaluasi, temuan audit, dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SPI maupun organ pengawasan lainnya.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, terutama dalam menelaah kecukupan pengendalian internal, efektivitas manajemen risiko, kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta tindak lanjut atas temuan audit.

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan, menilai efektivitas pengendalian internal, mengevaluasi pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Komite

reasonable assurance regarding the achievement of the Company's vision, mission, goals, and objectives.

FINANCIAL, OPERATIONAL, AND COMPLIANCE CONTROLS

The Company implements internal controls over financial, operational, and compliance aspects to ensure that all business activities are conducted in accordance with established objectives and applicable requirements. In financial aspect, the internal control encompasses budgeting processes, transaction recording, expenditure authorization, cash management, financial statement preparation, reconciliations, transaction reviews, and compliance with financial accounting standards. These controls are intended to ensure the reliability of financial reporting and that financial information presented to shareholders, regulators, and other stakeholders is adequately supported.

In operational aspect, the internal control is applied throughout the Company's core business processes, including project acquisition, procurement of goods and services, project execution, cost control, quality management, schedule management, occupational health and safety, asset management, and project performance monitoring. These controls are intended to ensure operational effectiveness, efficient utilization of resources, and achievement of performance targets.

In compliance aspect, the Company ensures that all business activities are conducted in accordance with applicable laws and regulations, capital market regulations, the Articles of Association, GCG Guidelines, the Code of Ethics, anti-corruption policies, conflict-of-interest policies, procurement policies, and other internal procedures. Compliance controls are reinforced through the Internal Audit Unit, compliance functions within relevant business units, and oversight by the Board of Commissioners through Audit Committee and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee.

ROLES OF CORPORATE ORGANS IN THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is responsible for establishing, maintaining, and ensuring the effectiveness of the Internal Control System across all Company business processes. The Board of Directors ensures that control policies and procedures are implemented by all work units and follows up on evaluation results, audit findings, and recommendations issued by Internal Audit and other supervisory bodies.

The Board of Commissioners oversees the adequacy and effectiveness of Internal Control System. In carrying out this function, the Board of Commissioners is assisted by Audit Committee and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, particularly in reviewing internal controls, risk management effectiveness, financial reporting quality, regulatory compliance, and audit follow-up actions.

The Audit Committee assists Board of Commissioners in reviewing financial statements, assessing the effectiveness of internal controls, evaluating internal and external audit activities, and monitoring follow-up actions on audit findings. The Committee also coordinates with

Audit juga melakukan koordinasi dengan SPI, Auditor Eksternal, dan manajemen untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan pengawasan berjalan secara memadai.

SPI berperan sebagai fungsi pengawasan internal yang membantu Direktur Utama melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kepatuhan. SPI juga menilai efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta proses pemantauan. Atas hasil pemeriksaan tersebut, SPI memberikan rekomendasi perbaikan dan memantau tindak lanjutnya untuk memperkuat efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan.

MEKANISME *ASSURANCE* DAN PENGAWASAN ATAS PELAPORAN

Untuk memastikan keandalan, konsistensi, dan kredibilitas pelaporan keuangan, Laporan Tahunan, serta pengungkapan keberlanjutan, Perseroan menerapkan mekanisme pengendalian dan *assurance* secara berlapis. Pada tingkat pertama, setiap unit kerja bertanggung jawab atas ketepatan data, kelengkapan dokumen pendukung, konsistensi informasi, serta kepatuhan terhadap prosedur pelaporan yang berlaku. Pada tingkat kedua, fungsi keuangan, manajemen risiko, kepatuhan, sekretaris perusahaan, keberlanjutan, dan fungsi pendukung lainnya melakukan penelaahan atas akurasi data, keselarasan antar-informasi, kecukupan dokumentasi, serta kepatuhan proses terhadap ketentuan internal dan regulasi yang berlaku. Pada tingkat ketiga, Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan evaluasi independen melalui audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dan memberikan rekomendasi perbaikan atas efektivitas proses pengendalian, kepatuhan, serta tata kelola pelaporan.

Dalam pelaporan keuangan, Perseroan memastikan bahwa proses penyusunan laporan dilakukan sesuai standar akuntansi keuangan, kebijakan akuntansi Perseroan, prosedur otorisasi transaksi, rekonsiliasi, dan dokumentasi pendukung yang memadai. Laporan keuangan Perseroan juga diperiksa oleh Auditor Eksternal independen sesuai standar audit yang berlaku. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan penelaahan atas laporan keuangan, hasil audit eksternal, hasil audit internal, serta tindak lanjut rekomendasi audit untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan andal, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyusunan Laporan Tahunan dan pengungkapan keberlanjutan, Perseroan menerapkan koordinasi lintas fungsi untuk memastikan kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan keterhubungan informasi mengenai kinerja keuangan, operasional, tata kelola, risiko, sumber daya manusia, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan. Setiap data dan narasi yang disajikan ditelaah berdasarkan sumber informasi internal, laporan manajemen, dokumen pendukung, hasil audit, serta ketentuan pelaporan yang berlaku, sehingga informasi yang diungkapkan mencerminkan kondisi Perseroan secara akurat dan berimbang.

Melalui mekanisme pengendalian, *assurance*, dan pengawasan tersebut, Perseroan memperkuat integritas pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas kepada pemegang saham, regulator, serta pemangku kepentingan. Penguatan ini tidak hanya mendukung

Internal Audit, External Auditors, and management to ensure that reporting and oversight processes operate effectively.

The Internal Audit Unit (IAU) functions as the Company's internal assurance provider and supports the President Director through financial, operational, and compliance audits. The IAU evaluates the effectiveness of internal controls, risk management, control activities, information and communication systems, and monitoring processes. Based on audit results, the IAU provides recommendations and monitors corrective actions to continuously strengthen the effectiveness of internal controls.

ASSURANCE AND OVERSIGHT MECHANISMS FOR REPORTING

To ensure the reliability, consistency, and credibility of financial reporting, Annual Reports, and sustainability disclosures, the Company implements a layered control and assurance mechanism. At the first level, each business unit is responsible for the accuracy of data, completeness of supporting documentation, consistency of information, and compliance with reporting procedures. At the second level, the finance, risk management, compliance, corporate secretary, sustainability, and other supporting functions review data accuracy, consistency among information sources, adequacy of documentation, and compliance with applicable internal and external requirements. At the third level, the Internal Audit Unit performs independent evaluations through risk-based audits and provides recommendations to improve the effectiveness of controls, compliance, and reporting governance.

In financial reporting, the Company ensures that reports are prepared in accordance with financial accounting standards, accounting policies, transaction authorization procedures, reconciliation processes, and adequate supporting documentation. The Company's financial statements are also audited by an independent External Auditor in accordance with applicable auditing standards. The Board of Commissioners, through Audit Committee, reviews financial statements, external audit results, internal audit reports, and the implementation of audit recommendations to ensure that the financial reporting process is reliable, fair, and accountable.

In preparing the Annual Report and sustainability disclosures, the Company adopts a cross-functional coordination approach to ensure the completeness, accuracy, consistency, and connectivity of information relating to financial performance, operations, governance, risk management, human capital, social and environmental performance, and sustainability matters. All disclosed data and narratives are reviewed against internal information sources, management reports, supporting documentation, audit results, and applicable reporting requirements to ensure that disclosures accurately and fairly represent the Company's condition and performance.

Through these control, assurance, and oversight mechanisms, the Company strengthens reporting integrity, transparency, and accountability to shareholders, regulators, and stakeholders. These efforts not only support compliance with reporting requirements

kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, kualitas pengambilan keputusan, reputasi Perseroan, serta penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan.

KOMITMEN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Perusahaan memandang Sistem Pengendalian Internal berperan penting dalam implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk fokus dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan secara aktif diikuti oleh seluruh organ Perusahaan dengan komponen sebagai berikut:

1. Membangun lingkungan pengendalian yang mendukung efektivitas penerapan seluruh komponen pengendalian internal lainnya.
2. Melakukan penilaian risiko secara berkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan secara optimal.
4. Mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung kelancaran pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kegiatan.
5. Menilai kualitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan melalui pemantauan berkelanjutan atas seluruh kegiatan usaha yang berjalan, serta melalui pelaksanaan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern atau pihak independen yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki risiko yang akan terjadi. Komitmen penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan antara lain:

1. Penerapan Manajemen *lean construction*.
2. Penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi (TKT)
3. Penetapan, Monitoring, Evaluasi, dan Efektivitas Risiko Strategis dan Operasional serta Self-Assessment Risk Maturity Level (SARML).
4. Melaksanakan Reviu Reguler Prosedur & IK (instruksi kerja) secara berkala.
5. Melaporkan Evaluasi Hasil Usaha setiap periodik melalui *Executive Summary*.
6. Menjadi *Counterpart* Audit Internal dan Eksternal perusahaan.
7. Penerapan transformasi digital dengan implementasi ERP & SAP WEGE.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL

Komponen utama dalam penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan dilakukan dengan menggunakan metode standar *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) – *Internal Control Framework* yang meliputi:

but also enhance stakeholder confidence, decision-making quality, corporate reputation, and sustainable long-term value creation.

MANAGEMENT AND EMPLOYEE COMMITMENT TO THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company recognizes that the Internal Control System plays a vital role in implementing Good Corporate Governance practices. Accordingly, the Company remains committed to strengthening and consistently implementing its Internal Control System in accordance with the Company's Internal Control System Guidelines.

The Internal Control System is actively supported by all Company organs through the following measures:

1. Establishing a control environment that supports the effectiveness of all internal control components;
2. Conducting periodic risk assessments in the execution of duties and responsibilities;
3. Developing and implementing policies and procedures to ensure the effective execution of Board of Directors' directives;
4. Identifying, recording, and communicating information related to the performance of duties and functions to support implementation, control, and accountability; and
5. Assessing the quality of the Internal Control System through ongoing monitoring of business activities and comprehensive evaluations conducted by Internal Audit or independent parties appointed by the President Director.

The Company is committed to complying with applicable laws and regulations and taking proactive measures to mitigate potential risks. Key initiatives supporting the implementation of the Internal Control System include:

1. Implementation of lean construction management practices;
2. Adoption of Integrated Governance Principles;
3. Establishment, monitoring, evaluation, and effectiveness assessment of strategic and operational risks, including the Self-Assessment Risk Maturity Level (SARML);
4. Regular review of procedures and work instructions;
5. Periodic reporting of business performance evaluations through Executive Summaries;
6. Serving as a counterpart for internal and external audits; and
7. Implementation of digital transformation initiatives through ERP and SAP WEGE systems.

ALIGNMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED FRAMEWORKS

The Company's Internal Control System is primarily implemented based on the internationally recognized Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) – Internal Control Framework, which comprises:

No	Komponen Pengendalian Internal WEGE Sejalan dengan COSO Internal Control Integrated Framework WEGE Internal Control Components Align with the COSO Internal Control Integrated Framework	Penerapan Tahun 2025 Implementation in 2025
1	**Lingkungan Pengendalian** Control Environment	
	Merupakan dasar komponen pengendalian internal yang menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam Perusahaan. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam *Control Environment* antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, Direksi dan Komite Audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan SDM. A fundamental component of internal control that provides direction for the organization and influences the control awareness of individuals within the Company. Several factors influencing the Control Environment include integrity and ethical values, commitment to competence, Board of Directors and Audit Committee, management and operating style, organizational structure, delegation of authority and responsibility, and HC practices and policies.	Selama tahun 2025 dalam berbagai macam aktivitas pelaksanaan tugas internal audit, telah melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan kecukupan dalam mengatasi risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta merekomendasikan peningkatan kontrol internal berdasarkan temuan audit, memberikan dukungan yang kuat untuk pelatihan staf mengenai kepatuhan dan pengendalian internal serta memantau kepatuhan prosedur dan peraturan yang berlaku, dst. During 2025, in carrying out various internal audit tasks, we evaluated policies and procedures to ensure their adequacy in addressing risks, identified and analyzed risks, recommended internal control improvements based on audit findings, provided strong support for staff training on compliance and internal control, and monitored compliance with applicable procedures and regulations.
2	**Penilaian Risiko** Risk Assessment	
	Menganalisa risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Analyzing relevant risks to achieve objectives and establishing a basis for determining how risks should be managed.	Terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas penilaian risiko yang berkaitan dengan penjadwalan dan pengelolaan proyek yang menyebabkan terganggunya produksi. Yang dilakukan dengan *improvement* sistem penilaian risiko yang sudah berjalan, khususnya dalam mengintegrasikan jadwal pengadaan dengan proyek yang berlangsung. Efforts are made to improve the effectiveness of risk assessments related to scheduling and project management that can disrupt production. This is being done by improving the existing risk assessment system, particularly in integrating procurement schedules with ongoing projects.
3	**Aktivitas Pengendalian** Control Activities	
	Memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko terdiri dari tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah Tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung. Ensuring that necessary actions are taken to mitigate risks in achieving the Company's objectives. Actions taken to mitigate risks consist of preventive and mitigating actions. Preventive actions are taken before a risky event occurs, while mitigating actions are taken after a risky event occurs.	Aktivitas pengendalian diperkuat dengan penerapan control yang lebih ketat terhadap proses pengadaan dan kontrak, yang merupakan upaya untuk peningkatan tindakan mitigasi risiko dan pengawasan proyek dalam hal meminimalisir gangguan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Control activities are strengthened by implementing tighter controls on procurement and contracting processes, which is an effort to improve risk mitigation measures and project oversight to minimize disruptions to the achievement of Company objectives.
4	**Informasi dan Komunikasi** Information and Communication	
	Menyediakan informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi, mencatat dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Informasi tersebut harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah form dan *time frame* yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Providing relevant information in financial reporting includes an accounting system containing methods for identifying, combining, analyzing, classifying, recording, and reporting transactions, as well as maintaining accountability for assets and liabilities. This information must be identified, depicted, and communicated in a form and timeframe that enable individuals to carry out their responsibilities.	Upaya untuk peningkatan komunikasi dan informasi terkait pelaporan keuangan telah dilakukan melalui penyajian laporan keuangan yang berintegritas. Efforts to improve communication and information related to financial reporting have been made through the presentation of financial statements with integrity.
5	**Pemantauan Pengendalian Internal** Internal Control Monitoring	
	Merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan meliputi penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Dalam hal ini Audit Internal Perusahaan memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas Perusahaan. A process that determines the quality of internal control performance over time. Monitoring includes determining the design and timely operation of controls and taking corrective actions. This process is implemented through ongoing activities, separate evaluations, or a combination of both. In this regard, the Company's Internal Audit contributes to monitoring the Company's activities.	Proses pemantauan internal telah menunjukkan hasil yang memadai, dimana peningkatan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan diimplementasikan secara efektif dan kelemahan yang sama tidak terulang di masa depan. The internal monitoring process has demonstrated adequate results, and continuous improvement is needed to ensure that corrective actions are implemented effectively and that similar weaknesses do not recur in the future.

TINJAUAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam pelaksanaannya, Internal Audit bertugas melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, antara lain melalui evaluasi atas penyajian laporan kegiatan operasional, keuangan, dan kepatuhan yang disusun secara periodik setiap triwulan guna memastikan proses pengendalian berjalan secara optimal. Hasil pengawasan dan penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Direksi, yang bertanggung jawab memastikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian internal Perseroan.

Selain itu, Internal Audit secara berkala melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas implementasi Sistem Pengawasan Intern secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan bagi Direksi dalam menetapkan kebijakan terkait efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit Perseroan telah melakukan penelaahan secara mendalam atas kecukupan dan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal dan menilai bahwa sistem tersebut telah berjalan secara efektif.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan Perseroan sepanjang tahun 2025 telah memadai dan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Sistem tersebut telah mencakup pengendalian keuangan, operasional, dan kepatuhan, serta didukung oleh mekanisme pemantauan, pelaporan, audit internal, audit eksternal, dan pengawasan berjenjang.

Direksi berkomitmen untuk terus menjaga dan menyempurnakan struktur pengendalian internal, termasuk prosedur pelaporan keuangan, pengendalian proses bisnis, dan tindak lanjut atas rekomendasi audit. Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan tetap berjalan secara efektif, adaptif, dan selaras dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION RESULTS

In carrying out its duties, the Internal Audit function is responsible for monitoring and assessing the quality of Internal Control System, including evaluating the operational, financial, and compliance reports prepared on a quarterly basis to ensure that control processes are functioning effectively. The results of such monitoring and assessments are subsequently reported to the Board of Directors, which is responsible for ensuring that the implementation of Internal Control System achieves its intended objectives. The Board of Commissioners, with the support of Audit Committee and Integrated Governance Committee, also performs an oversight function over the implementation of the Company's Internal Control System.

In addition, Internal Audit periodically evaluates the adequacy and effectiveness of overall implementation of Internal Control System. The results of these evaluations serve as a basis for the Board of Directors in formulating policies aimed at enhancing the effectiveness of the Company's Internal Control System.

Throughout 2025, the Company's Audit Committee conducted a comprehensive review of the adequacy and effectiveness of Internal Control System and concluded that the system had been implemented effectively.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors and Board of Commissioners are of the opinion that the Internal Control System implemented by the Company throughout 2025 was adequate and effective in supporting the achievement of the Company's objectives. The system encompasses financial, operational, and compliance controls and is supported by monitoring mechanisms, reporting processes, internal audits, external audits, and a structured oversight framework.

The Board of Directors remains committed to maintaining and continuously enhancing the internal control structure, including financial reporting procedures, business process controls, and the implementation of audit recommendations. The Board of Commissioners, with the support of Audit Committee and Risk Monitoring and Integrated Governance Committee, continues to exercise its oversight function to ensure that the Company's Internal Control System remains effective, adaptive, and aligned with the principles of integrity, transparency, and accountability.

Manajemen Risiko
Risk Management

Perseroan membangun dan memelihara sistem manajemen risiko sebagai bagian integral dari Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan, berlandaskan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Implementasi manajemen risiko Perseroan menerapkan *Three Lines Model* sebagai pendekatan pertahanan internal yang terstruktur: Lini Pertama dijalankan oleh unit pemilik risiko yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis; Lini Kedua dijalankan oleh fungsi Manajemen Risiko yang mengukur, memantau, dan mengembangkan metodologi serta kebijakan risiko secara agregat dan independen; serta Lini Ketiga dijalankan oleh fungsi Audit Internal yang memastikan tata kelola dan pengendalian risiko diterapkan secara efektif di seluruh lini organisasi.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko Perseroan adalah melindungi dan menciptakan nilai bagi perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadikan budaya sadar risiko sebagai landasan dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam pelaksanaannya, organ pengelola risiko melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Risiko, Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan, serta Internal Audit, masing-masing dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan secara jelas dalam Piagam Manajemen Risiko Perseroan. Keseluruhan sistem ini ditinjau secara berkala, paling sedikit satu kali dalam tiga tahun, guna memastikan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan senantiasa berada pada tingkat yang optimal dan adaptif terhadap dinamika bisnis yang terus berkembang.

DASAR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari tata kelola dan proses pengelolaan usaha guna menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika dan ketidakpastian yang terus berkembang. Melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkelanjutan, Perseroan berupaya meminimalkan potensi kerugian, melindungi aset, serta mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih optimal.

Dalam penerapannya, Perseroan mengembangkan Sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi di seluruh lini organisasi dengan melibatkan setiap satuan kerja sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang relevan dapat diidentifikasi dan dikelola secara terukur, sejalan dengan kebijakan manajemen risiko dan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan Perseroan.

The Company establishes and maintains a risk management system as an integral part of its Corporate Governance Framework, based on Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Company's risk management implementation employs the Three Lines Model as a structured internal defense approach: The First Line is executed by the risk owner unit, which directly identifies and manages risks within business processes; the Second Line is executed by the Risk Management function, which measures, monitors, and develops risk methodologies and policies in an aggregate and independent manner; and the Third Line is executed by the Internal Audit function, which ensures the effective implementation of risk governance and controls across the organization.

The primary objective of implementing the Company's risk management is to protect and create value for the company and all stakeholders, while establishing a risk-aware culture as the foundation of all business activities and decision-making. In its implementation, the risk management body involves the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, the Director in Charge of Risk Management, the Director in Charge of Financial Management, and Internal Audit, each with authority, duties, and responsibilities that have been clearly defined in the Company's Risk Management Charter. This entire system is reviewed periodically, at least once every three years, to ensure that the Company's risk management implementation is always at an optimal level and adaptive to the ever-evolving business dynamics.

BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company implements risk management as an integral part of its governance and business management processes to maintain business resilience amidst ever-evolving dynamics and uncertainty. Through continuous risk identification, measurement, monitoring, and control, the Company strives to minimize potential losses, protect assets, and support the optimal achievement of strategic objectives.

To implement this, the Company has developed an integrated Risk Management System across all organizational levels, involving each work unit according to its function and responsibilities. This system is designed to ensure that all relevant risks are identified and managed in a measurable manner, in line with the Company's established risk management policies and risk tolerance levels.

Perseroan juga telah melakukan penyempurnaan Prosedur Sistem Manajemen Risiko pada tanggal 21 Mei 2024 melalui penerbitan Prosedur Sistem Manajemen Risiko Perseroan No. Dok. WG-ERM-PM-01, No. Rev 08 tanggal 1 September 2025, yang disetujui oleh seluruh Direksi dan disahkan oleh Direktur Utama, dengan mengacu pada standar ISO 31000:2018. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan juga menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 1 Januari 2025, yang di setujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan kerangka kerja ISO 31000:2018.

Sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko, Perseroan mengantisipasi dampak negatif dari ketidakpastian sekaligus mengelola peluang yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, dengan berlandaskan pada berbagai standar internasional, antara lain ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016, dan ISO 31000:2018.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.01.01/A.DIR.00013. WEGE/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Susunan Organisasi Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, struktur organisasi Risk Management Division mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.01.01/A.DIR.00041. WEGE/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Susunan Organisasi Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. dengan fungsi utama masing-masing sebagai berikut:

1. Risk Management Division merupakan organ perusahaan setingkat Divisi Korporasi yang memiliki fungsi utama untuk memastikan penerapan, pengembangan, dan implementasi sistem manajemen risiko serta penerapan *Four Eyes Principles* secara terintegrasi pada seluruh fungsi manajemen di tingkat perusahaan. Selain itu, divisi ini juga bertugas menyajikan laporan dan evaluasi atas kinerja korporasi maupun proyek guna mendukung optimalisasi hasil usaha perusahaan dalam mewujudkan WEGE yang berkelanjutan.

2. Risk Management Department yaitu memastikan berjalannya penerapan, pengembangan, pengendalian, implementasi sistem dan prosedur terkait manajemen risiko di Tingkat perusahaan yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen, untuk mendukung keberlanjutan perusahaan denga menerapkan Sistem Manajemen WIKA Gedung untuk menuju WIKA Gedung yang berkelanjutan.
3. Project Control Department yaitu memastikan ketercapaian kinerja hasil usaha proyek untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan keberlanjutan perusahaan dengan menerapkan Sistem Manajemen WIKA Gedung yang berlaku di Perusahaan untuk menuju WIKA Gedung yang berkelanjutan.

The Company has also refined its Risk Management System Procedures on May 21, 2024, through the issuance of Risk Management System Procedure Document No. WG-ERM-PM-01, No. Rev 08 dated September 1, 2025, which was approved by all members of the Board of Directors and ratified by the President Director, with reference to ISO 31000:2018 standards. In line with this, the Company also established its Risk Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dated January 1, 2025, which was approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners,, based on the principles of Good Corporate Governance and the ISO 31000:2018 framework.

As a guideline for implementation, the Company anticipates the negative impacts of uncertainty while managing opportunities that may affect the achievement of corporate goals and objectives, based on various international standards, including ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016, and ISO 31000:2018.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR.00013. WEGE/2025 dated March 24, 2025, concerning the Organizational Structure of Risk Management Division of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, the organizational structure of Risk Management Division experienced changes based on Board of Directors Decree No. SK.01.01/A.DIR.00041.WEGE/2025 dated December 31, 2025, concerning the Organizational Structure of Risk Management Division of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., with the following main functions:

1. The Risk Management Division is a corporate body at the Corporate Division level. Its key function is to ensure the application, development, and implementation of risk management system and integrated application of the Four Eyes Principles across all management functions at the corporate level. Furthermore, this division is also tasked with presenting reports and evaluations on corporate and project performance to support the optimization of the company's business results in realizing sustainable WEGE.
2. The Risk Management Department ensures the application, development, control, and implementation of risk management systems and procedures at the corporate level, integrated across all management functions, to support the company's sustainability by implementing WIKA Gedung Management System, leading to a sustainable WIKA Gedung.

3. The Project Control Department ensures the achievement of project performance results to support the company's Vision, Mission, and sustainability by implementing WIKA Gedung Management System applicable throughout the company, leading to a sustainable WIKA Gedung.

Adapun struktur manajemen risiko Perseroan dijelaskan pada bagan berikut ini:

The Company's risk management structure is illustrated in the following diagram:

Struktur Organisasi Risk Management Division PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Organizational Structure of Risk Management Division of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

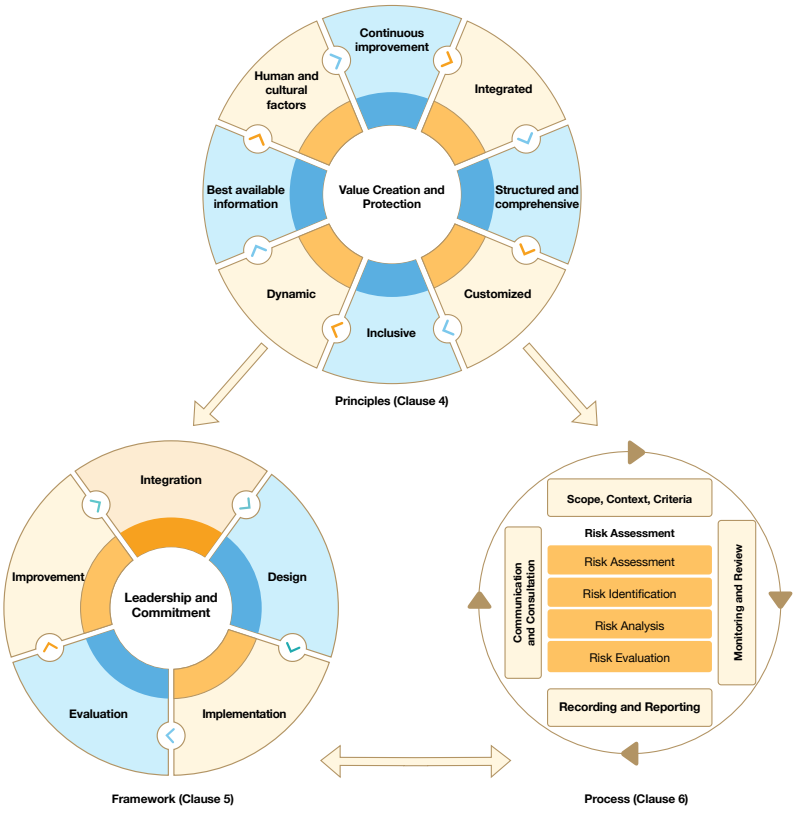
Dalam penerapan Manajemen Risiko, Perseroan mengacu pada standar ISO 31000:2018 yang mencakup tiga elemen utama, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Ketiga elemen tersebut menjadi fondasi dalam memastikan bahwa pengelolaan risiko dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh kegiatan operasional Perseroan.

Prinsip manajemen risiko menjadi pedoman dasar dalam penerapan pengelolaan risiko yang efektif. Sementara itu, kerangka kerja manajemen risiko memberikan struktur serta mekanisme implementasi yang terintegrasi dengan proses bisnis Perseroan. Adapun proses manajemen risiko memastikan bahwa kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga elemen tersebut disajikan secara skematis pada bagan berikut.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In implementing Risk Management, the Company refers to ISO 31000:2018, which comprises three key elements, namely principles, framework, and risk management processes. These three elements serve as the foundation for ensuring that risk management is implemented systematically, in an integrated manner, and on a sustainable basis across all operational activities of the Company.

Risk management principles serve as the fundamental guidelines for the effective implementation of risk management. Meanwhile, the risk management framework provides the structure and implementation mechanism integrated with the Company's business processes. Furthermore, the risk management process ensures that risk identification, analysis, evaluation, mitigation, monitoring, and reporting activities are carried out consistently in accordance with applicable standards. These three elements are presented schematically in the following diagram.

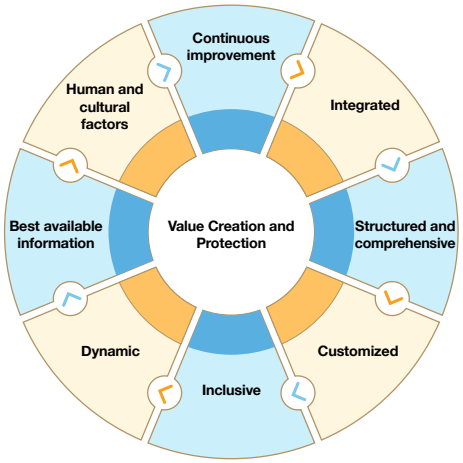


Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip manajemen risiko Perseroan terdiri dari 8 prinsip yang menjadi dasar penerapan manajemen risiko dan harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko Perseroan dan seluruh tahapan proses bisnisnya.

Risk Management Principles

The Company's risk management principles consist of eight principles that serve as the basis for implementing risk management and must be considered in developing the Company's risk management framework and all stages of its business processes.



1. Terintegrasi
   Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi di dalam seluruh aktivitas proses bisnis Perseroan.
2. Terstruktur dan Komprehensif
   Perseroan melakukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
3. Dapat Menyesuaikan
   Kerangka kerja manajemen risiko dan prosesnya dapat disesuaikan dan menyesuaikan dengan konteks eksternal dan internal Perseroan terkait sasarannya.
4. Inklusif
   Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan terkait dengan pengetahuan, pandangan, persepsi harus selalu dipertimbangkan.
5. Dinamis
   Penerapan manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon terhadap perubahan dan peristiwa dengan cara yang sesuai dan tepat waktu.
6. Informasi Terbaik yang Tersedia
   Informasi Manajemen risiko mempertimbangkan segala Batasan dan ketidakpastian yang terkait dengan informasi. Informasi harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk pemangku kepentingan terkait.
7. Faktor Manusia dan Budaya
   Perilaku manusia dan faktor budaya secara signifikan mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko Perseroan pada setiap tingkatan dan tahapan.
8. Perbaikan Berkesinambungan
   Manajemen Risiko Perseroan secara terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

1. Integrated
   Risk management is an integrated part of all of the Company's business processes.
2. Structured and Comprehensive
   The Company adopts a structured and comprehensive approach to deliver consistent and comparable results.
3. Adaptable
   The risk management framework and processes can be adapted and adjusted to the Company's external and internal contexts related to its objectives.
4. Inclusive
   The timeliness and involvement of each stakeholder, with their knowledge, perspectives, and perceptions, must always be taken into account.
5. Dynamic
   The implementation of risk management anticipates, detects, acknowledges, and responds to changes and events in an appropriate and timely manner.
6. Best Available Information
   Risk management information takes into account all limitations and uncertainties associated with information. Information must be timely, clear, and available to relevant stakeholders.
7. Human and Cultural Factors
   Human behavior and cultural factors significantly influence all aspects of the Company's Risk Management at every level and stage.
8. Continuous Improvement
   The Company's risk management is continuously enhanced through learning and experience.

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko bertujuan membantu Perseroan dalam mengintegrasikan risiko ke dalam aktivitas proses bisnis. Efektivitas manajemen risiko bergantung pada integrasinya ke dalam manajemen organisasi, termasuk pengambilan keputusan. Ini membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya manajemen puncak.

Risk Management Framework

The risk management framework aims to assist the Company in integrating risk into its business process activities. The effectiveness of risk management depends on its integration into organizational management, including decision-making. This requires support from stakeholders, particularly top management.

Pengembangan kerangka kerja mencakup pengintegrasian, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi. Untuk pelaksanaan kelima aspek tersebut dibutuhkan kepemimpinan dan komitmen.

1. Integrasi
   Parameter integrasi dalam komitmen dan kepemimpinan wajib memenuhi kriteria yang ditentukan Perseroan.
2. Perencanaan
   Dalam menyusun rencana Kerangka Manajemen Risiko, Perseroan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti:
   a. Pemahaman konteks organisasi, baik kondisi internal maupun eksternal Perseroan;
   b. Mengartikulasikan bentuk komitmen terkait Manajemen Risiko;
   c. Menetapkan peran, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas;
   d. Mengalokasi sumber daya yang sesuai; dan
   e. Membangun proses komunikasi dan konsultasi.
3. Penerapan
   Menerapkan kerangka Manajemen Risiko dengan cara:
   a. Mengembangkan rencana yang sesuai dengan waktu dan sumber daya;
   b. Mengidentifikasi dimana, kapan dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh level organisasi, dan oleh siapa;
   c. Memodifikasi proses pembuatan dan atau pengambilan keputusan yang berlaku;
   d. Memastikan bahwa pengaturan seluruh level organisasi untuk mengelola Risiko dipahami dan diterapkan dengan jelas.
4. Evaluasi
   Dalam penerapan evaluasi efektifitas dari kerangka kerja maka Perseroan harus mengukur kemajuan penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, rencana, indikator dan budaya yang diharapkan serta memastikan kerangka kerja tetap sesuai dalam mendukung pencapaian sasaran Perseroan.
5. Penyempurnaan
   Proses kegiatan penyempurnaan proses Manajemen Risiko dilakukan melalui adaptasi atau penyesuaian kerangka kerja dan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kerangka kerja Manajemen Risiko dan cara proses Manajemen Risiko yang terintegrasi.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko melibatkan secara sistematis seluruh kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja sebagai aktivitas proses komunikasi dan konsultasi, ketetapan konteks dan penilaian, penanganan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko.

Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari manajemen dan atau proses pembuatan dan atau pengambilan keputusan yang terintegrasi ke dalam struktur, operasi dan proses organisasi. Proses ini diterapkan di seluruh level dan di tingkatan strategis, tingkat operasional, unit usaha atau proyek.

Developing the framework includes integrating, designing, implementing, evaluating, and improving risk management throughout the organization. Implementing these five aspects requires leadership and commitment.

1. Integration
   Integration parameters in terms of commitment and leadership must meet the criteria determined by the Company.
2. Planning
   In developing the Risk Management Framework plan, the Company must consider several factors, such as:
   a. Understanding the organizational context, both internal and external;
   b. Articulating the form of commitment related to Risk Management;
   c. Establishing roles, authorities, responsibilities, and accountabilities;
   d. Allocating appropriate resources; and
   e. Establishing communication and consultation processes.
3. Implementation
   Implement the Risk Management framework by:
   a. Developing a plan that is appropriate to the time and resources;
   b. Identifying where, when, and how various types of decisions are made at all levels of the organization, and by whom;
   c. Modifying existing decision-making and/or decision-making processes;
   d. Ensuring that the arrangements for managing Risk at all levels of the organization are clearly understood and implemented.
4. Evaluation
   In implementing the effectiveness evaluation of the framework, the Company must periodically measure the progress of the Risk Management framework implementation in accordance with established objectives, plans, indicators, and the expected culture, and ensure that the framework remains appropriate in supporting the achievement of the Company's targets.
5. Improvement
   The Risk Management process improvement process is carried out through adaptation or adjustment of the framework and continuous improvement to enhance the suitability, adequacy, and effectiveness of the Risk Management framework and the integrated Risk Management process.

Risk Management Process

The implementation of risk management systematically involves all policies, procedures, and work instructions, including communication and consultation, contextualization, and risk assessment, handling, monitoring, review, recording, and reporting.

The risk management process must be part of the management and/or decision-making process, integrated into the organization's structure, operations, and processes. This process is implemented at all levels, including strategic, operational, business unit, and project levels.



Proses manajemen risiko mempertimbangkan beberapa aspek risiko, sebagai berikut:

Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal dilakukan secara berkelanjutan untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang objektif, faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan mudah dipahami, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan, integritas informasi, serta perlindungan privasi individu.

Menentukan Konteks, Lingkup, dan Kriteria
Penetapan lingkup, konteks, dan kriteria bertujuan menyesuaikan proses Manajemen Risiko agar memungkinkan pelaksanaan penilaian risiko yang efektif serta penentuan perlakuan risiko yang tepat. Tahapan ini meliputi pendefinisian ruang lingkup proses serta pemahaman terhadap konteks eksternal dan internal Perseroan.

Penilaian Risiko
Penilaian risiko mencakup proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan perspektif para pemangku kepentingan serta menggunakan informasi terbaik yang tersedia, disertai investigasi lebih lanjut apabila diperlukan.

Perlakuan Risiko
Perlakuan risiko dilaksanakan melalui proses yang berulang dengan merumuskan langkah-langkah mitigasi serta menilai efektivitas perlakuan risiko yang dipilih, sehingga risiko residual dapat diminimalkan sesuai dengan tingkat toleransi risiko Perseroan.

The risk management process considers several risk aspects, as follows:

Communication and Consultation
Communication and consultation with internal and external stakeholders are conducted on an ongoing basis to facilitate the exchange of objective, factual, timely, relevant, accurate, and understandable information, while maintaining confidentiality, information integrity, and the protection of individual privacy.

Determining Context, Scope, and Criteria
Determining the scope, context, and criteria aims to align the Risk Management process to enable effective risk assessment and the determination of appropriate risk treatment. This stage includes defining the scope of the process and understanding the Company's external and internal context.

Risk Assessment
Risk assessment encompasses the systematic, iterative, and collaborative process of risk identification, analysis, and evaluation, based on stakeholder knowledge and perspectives and using the best available information, with further investigations if necessary.

Risk Treatment
Risk treatment is implemented through an iterative process that involves formulating mitigation measures and assessing the effectiveness of the selected risk treatment, so that residual risk can be minimized in accordance with the Company's risk tolerance level.

Monitoring and Review
Monitoring and review are conducted continuously at all stages of the

Pemantauan dan Peninjauan
Pemantauan dan peninjauan dilakukan secara berkelanjutan pada seluruh tahapan proses Manajemen Risiko guna memastikan bahwa perlakuan risiko berjalan efektif dan tetap relevan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Pendokumentasian dan Pelaporan
Seluruh hasil proses Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai sebagai bagian dari upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kualitas pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PROSES MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan manajemen risiko dengan berpedoman pada SNI ISO 31000:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi. Penerapan standar ini dilakukan secara terintegrasi pada seluruh lini bisnis dan proses operasional Perseroan, sehingga pengelolaan risiko dapat dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Pengaplikasian pedoman tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing unit kerja, sehingga memungkinkan identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan terhadap berbagai jenis risiko,baik risiko strategis, operasional, keuangan, maupun kepatuhan, dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui penerapan manajemen risiko yang terstruktur, Perseroan berupaya meningkatkan ketahanan organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, serta memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui pelatihan berkala yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko secara lebih transparan. Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan frekuensi serta kedalaman proses peninjauan risiko guna memastikan setiap potensi risiko strategis dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara lebih komprehensif, sehingga mendukung keberlanjutan kinerja dan ketahanan usaha Perseroan di masa mendatang.

Risk Management process to ensure that risk treatment is effective and remains relevant to changing internal and external conditions.

Documentation and Reporting
All results of the Risk Management process are documented and reported through appropriate mechanisms as part of efforts to ensure accountability, transparency, and continuous improvement in the quality of risk management.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT PROCESS IN 2025

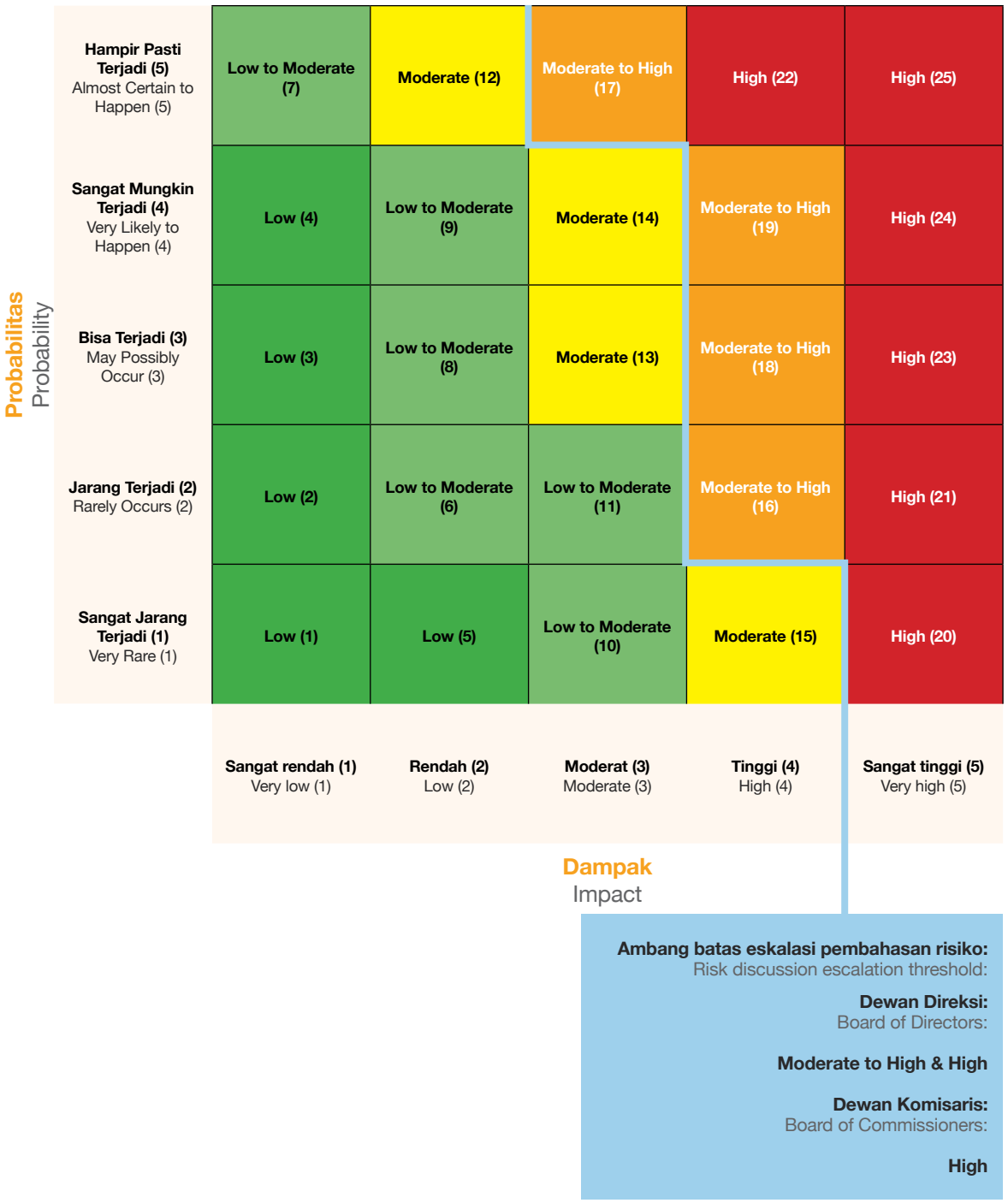
Throughout 2025, the Company implemented risk management based on SNI ISO 31000:2018 as the primary framework for managing the various risks faced. This standard is implemented in an integrated manner across all business lines and operational processes of the Company, ensuring systematic, consistent, and sustainable risk management.

The application of these guidelines is tailored to the characteristics and needs of each work unit, enabling more effective identification, analysis, evaluation, and treatment of various types of risks, including strategic, operational, financial, and compliance risks. Through the implementation of structured risk management, the Company strives to enhance organizational resilience, support more informed decision-making, and ensure long-term business continuity.

As part of strengthening governance and ongoing risk management, the Company is committed to improving the quality of oversight through regular training conducted by the Board of Commissioners related to more transparent risk management. Furthermore, the Company continues to increase the frequency and depth of its risk review process to ensure that every potential strategic risk can be identified, analyzed, and mitigated more comprehensively, thereby supporting the Company's sustainable performance and business resilience in the future.

MATRIKS RISIKO SIGNIFIKAN WEGE 2025

WEGE SIGNIFICANT RISK MATRIX 2025



Dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko yang terintegrasi, Perseroan menyusun Matriks Risiko Signifikan WEGE 2025 sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi, mengukur, dan memetakan tingkat eksposur risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran strategis. Matriks ini disusun berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan mempertimbangkan dua parameter utama, yaitu probabilitas terjadinya risiko dan tingkat dampaknya terhadap kinerja operasional, keuangan, hukum, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Melalui pemetaan dalam skala bertingkat, Perseroan dapat mengklasifikasikan risiko ke dalam kategori rendah hingga tinggi, sehingga prioritas mitigasi, pengendalian, dan alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah, proporsional, dan selaras dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan.

In order to strengthen the implementation of integrated risk management, the Company has developed the WEGE 2025 Significant Risk Matrix as the primary instrument for identifying, measuring, and mapping risk exposure levels that may potentially affect the achievement of strategic objectives. This matrix has been developed based on both quantitative and qualitative approaches by considering two key parameters, namely the probability of risk occurrence and the level of impact on operational, financial, legal, reputational, and business sustainability performance. Through a tiered mapping scale, the Company is able to classify risks into low to high categories into low to high categories, thereby enabling mitigation priorities, control measures, and resource allocation to be implemented in a more targeted, proportional, and aligned manner with the established risk appetite.

PROFIL RISIKO DAN UPAYA MITIGASI

RISK PROFILE AND MITIGATION EFFORTS

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
1	Potensi akan terjadinya perubahan dinamika pasar	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah terkait anggaran infrastruktur	1. Mempertajam sasaran proyek dengan pendanaan swasta dan Capex BUMN 2. Sinergi dengan WIKA Group (*captive market*) khusus proyek strategis nasional 3. Menargetkan pelanggan potensial untuk meningkatkan perolehan omzet kontrak 4. Peningkatan strategi pemasaran produk modular 5. Melakukan Kerjasama dengan pemilik modal (investor) untuk meng*create* proyek-proyek: a. UNHAS b. Unbraw c. Unand d. UGM e. IPB 6. Transformasi fungsi pendukung pemasaran HC, SCM, Engineering, Keuangan, Operasi	**1. Mempertajam sasaran proyek dengan pendanaan swasta dan Capex BUMN** Realisasi perolehan order kontrak masih didominasi oleh proyek sektor Pemerintah, yang menunjukkan adanya peningkatan fokus dan keberhasilan penetrasi pada proyek-proyek berbasis anggaran pemerintah. Sementara itu, pencapaian pada sektor BUMN dan Swasta belum optimal akibat penurunan aktivitas investasi dan selektivitas pasar terhadap proyek baru. Pada sektor Internal, terdapat tambahan kontribusi proyek di luar rencana awal yang mendukung diversifikasi sumber perolehan kontrak. **2. Sinergi dengan WIKA Group (captive market) khusus proyek strategis nasional** Perseroan telah memperkuat sinergi dengan Grup WIKA melalui keterlibatan pada berbagai proyek strategis nasional, termasuk proyek IKN, Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, Penataan DOB Papua, dan proyek industri. Meskipun terdapat pembatalan partisipasi tender pada proyek Kilang Minyak Tuban, Perseroan tetap berhasil menjaga pipeline proyek melalui konsorsium dan kolaborasi internal Grup. **3. Menargetkan pelanggan potensial untuk meningkatkan** perolehan omzet kontrak Perseroan secara aktif memperluas pendekatan kepada pelanggan potensial, khususnya pada sektor pendidikan dan pengembangan kawasan. Upaya tersebut terealisasi melalui pembentukan konsorsium pada proyek-proyek BUMN dan sektor pendidikan, serta penjajakan kerja sama dengan berbagai institusi dan mitra strategis untuk mendukung pengembangan proyek ke depan. **4. Peningkatan strategi pemasaran produk modular** Perseroan terus melakukan penguatan pemasaran produk modular melalui pengembangan konsep hunian modular, partisipasi dalam program pemerintah, serta dukungan penawaran kepada berbagai pihak. Namun demikian, realisasi perolehan kontrak modular masih belum optimal akibat proses pengambilan keputusan proyek yang relatif panjang dan masih terbatasnya realisasi proyek skala besar pada tahun berjalan. **5. Melakukan kerja sama dengan pemilik modal (investor) untuk menggarap proyek-proyek strategis** Perseroan telah merealisasikan sejumlah kerja sama strategis dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai institusi dan mitra usaha, antara lain kerja sama pengembangan hunian dan kawasan bersama institusi pendidikan, pengembang, serta mitra swasta. Selain itu, Perseroan turut mendorong keterlibatan pada program pemerintah terkait pengembangan kawasan permukiman vertikal, pembangunan rumah MBR, dan dukungan program Dapur MBG melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. **6. Transformasi fungsi pendukung pemasaran HC, SCM, Engineering, Keuangan, dan Operasi** Implementasi kolaborasi internal antar fungsi pendukung belum terealisasi sesuai rencana awal sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan integrasi sistem yang saat ini mengacu pada sistem SAP milik WIKA Induk. Perseroan tetap melakukan penyesuaian proses bisnis guna mendukung efektivitas koordinasi dan operasional ke depan.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
	Potential changes in market dynamics	Changes in government policy regarding infrastructure budgets	1. Sharpening project targets with private funding and state-owned enterprise capital expenditure (Capex) 2. Synergizing with WIKA Group (captive market) specifically for national strategic projects 3. Targeting potential customers to increase contract revenue 4. Improving modular product marketing strategies 5. Collaborating with capital owners (investors) to create projects: a. UNHAS b. Unbraw c. Unand d. UGM e. IPB 6. Transforming marketing support functions in HC, SCM, Engineering, Finance, and Operations	1. **Sharpening project targets with private funding and State-Owned Enterprise Capex** Contract order acquisition is still dominated by government sector projects, indicating an increased focus and successful penetration of government-funded projects. Meanwhile, achievement in the state-owned enterprise and private sector has not been optimal due to decreased investment activity and market selectivity towards new projects. In the internal sector, there have been additional project contributions beyond the initial plan, supporting the diversification of contract acquisition sources. 2. **Synergy with WIKA Group (captive market) specifically for national strategic projects** The Company has strengthened synergy with WIKA Group through involvement in various national strategic projects, including the National Capital City (IKN), the People's School (Sekolah Rakyat), the Garuda Superior High School (SMA Unggul Garuda), the Papua New Region Development Project (Penerapan DOB Papua), and industrial projects. Despite the cancellation of tender participation in the Tuban Oil Refinery project, the Company has successfully maintained its project pipeline through consortiums and internal Group collaboration. 3. **Targeting potential customers to increase contract revenue** The Company is actively expanding its approach to potential customers, particularly in the education and regional development sectors. These efforts were realized through the formation of consortiums for state-owned enterprise projects and the education sector, as well as exploring collaborations with various institutions and strategic partners to support future project development. 4. **Improving modular product marketing strategy** The Company continues to strengthen the marketing of its modular products through the development of modular housing concepts, participation in government programs, and support for tenders to various parties. However, the realization of modular contract acquisitions has not been optimal due to relatively lengthy project decision-making process and limited implementation of large-scale projects in the current year. 5. **Collaborating with capital owners (investors) to develop strategic projects** The Company has realized a number of strategic collaborations and signed memoranda of understanding with various institutions and business partners, including residential and area development collaborations with educational institutions, developers, and private partners. Furthermore, the Company has encouraged involvement in government programs related to the development of vertical residential areas, the construction of low-income housing, and support for the Dapur MBG program through collaboration with various parties. 6. **Transformation of marketing support functions: Human Capital, Supply Chain Management, Engineering, Finance, and Operations** The implementation of internal collaboration between support functions has not yet been realized according to the initial plan due to policy changes and system integration, which currently relies on WIKA's parent company's SAP system. The Company continues to adjust its business processes to support effective coordination and operations going forward.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
2	Keterlambatan realisasi progres proyek Delays in project progress	1. Serah terima lahan, perizinan (IMB dan AMDAL), uang muka mundur 2. Perubahan desain 3. Tidak terpenuhinya kewajiban kepada partner strategis 1. Land handover, permits (IMB and AMDAL), and delayed down payments 2. Design changes 3. Failure to fulfill obligations to strategic partners	1. Evaluasi klausul kontrak 2. *Refreshment* Prosedur Manajemen Proyek (terkait komitmen SOP bersama dengan pihak eksternal) 3. Pemenuhan sumber daya secara bertahap (Pengendalian biaya *overhead*) 4. *Supporting* Keuangan (Pemenuhan kebutuhan proyek dan pemenuhan kewajiban kepada *partner* strategis 1. Contract clause evaluation 2. Refreshment of Project Management Procedures (related to SOP commitments with external parties) 3. Gradual resource allocation (overhead cost control) 4. Financial Support (Meeting project needs and fulfilling obligations to strategic partners)	**1. Negosiasi Kontrak** Perseroan melakukan penguatan aspek contractual melalui revisi dan penyesuaian klausul kontrak, antara lain terkait mekanisme serah terima parsial, perpanjangan waktu pelaksanaan (*Extension of Time/EoT*) dan biaya *overhead*, pengenaan denda keterlambatan, serta ketentuan penghentian sementara pekerjaan. **2. Kesiapan Proyek** Perseroan meningkatkan pengendalian kesiapan proyek dengan memastikan kesiapan lahan, kelengkapan perizinan, serta pemenuhan uang muka proyek sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. **3. Prosedur Revisi** Perseroan melakukan harmonisasi dan penyempurnaan sejumlah prosedur operasional, termasuk prosedur manajemen proyek, keuangan, pemasaran, dan fungsi pendukung lainnya, yang diselaraskan dengan proses digitalisasi melalui implementasi sistem SAP dan *surrounding system*. **4. Efisiensi Operasional** Perseroan melaksanakan program efisiensi biaya melalui implementasi inisiatif *Below The Line (BTL)* guna meningkatkan efektivitas operasional dan menjaga pengendalian biaya perusahaan. **5. Pengendalian Biaya** Perseroan menerapkan pemenuhan sumber daya secara bertahap sesuai kebutuhan proyek dan ketentuan dalam SOP Prosedur Manajemen Proyek WG, guna menjaga efektivitas utilisasi sumber daya dan pengendalian biaya *overhead*. **6. Pendanaan Progres Proyek** Perseroan melakukan pembahasan dan pemantauan kebutuhan pendanaan proyek secara berkala melalui forum Rapat Direksi Khusus (*Radirsus*) guna memastikan kelancaran progres pelaksanaan proyek. 1. **Contract Negotiations** The Company strengthened contractual aspects by revising and adjusting contract clauses, including those related to partial handover mechanisms, extensions of time (EoT) and overhead costs, late fees, and provisions for temporary work suspension. 2. **Project Readiness** The Company improved project readiness control by ensuring land readiness, complete permits, and payment of project down payments before work commences. 3. **Revised Procedures** The Company harmonized and refined several operational procedures, including project management, finance, marketing, and other supporting functions, aligned with the digitalization process through the implementation of SAP and surrounding systems. 4. **Operational Efficiency** The Company applied a cost efficiency program through the Below the Line (BTL) initiatives to improve operational effectiveness and maintain cost control. 5. **Cost Control** The Company implemented a gradual allocation of resources according to project needs and the provisions of WG Project Management Procedure Standard Operating Procedures (SOPs), to maintain effective resource utilization and control overhead costs. 6. **Project Progress Funding** The Company periodically discusses and monitors project funding requirements through Special Board of Directors Meetings (Radirsus) to ensure smooth project progress.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
3	Potensi terjadinya *cost overrun* Potential for cost overruns	1. Ketidaktepatan dalam pengelolaan proyek selama pelaksanaan, 2. Kurangnya keandalan tim proyek dalam mengajukan klaim biaya kepada pemberi kerja, terutama terkait dengan pekerjaan tambahan (*Variation Order*/ VO). 3. Inaccuracy in project management during implementation, 4. Lack of reliability in the project team in submitting cost claims to the employer, especially related to additional work (Variation Orders/ VOs).	1. Pengendalian biaya, waktu, dan mutu secara terintegrasi menggunakan *Building Information Modeling* (BIM) level 2 5D dan implementasi ERP/SAP (*system locking budget* 2. Sentralisasi dan digitalisasi proses SCM 3. Meningkatkan *Awareness* terhadap semua kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual yang berkaitan dengan adanya perubahan baik yang berdampak waktu dan biaya 4. Mengevaluasi negosiasi klausul kontrak yang mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme pemberian kompensasi 5. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi tim proyek dalam hal klaim dan negosiasi kepada pihak eksternal 1. Integrated cost, time, and quality control using Building Information Modeling (BIM) level 2 5D and ERP/SAP implementation (budget locking system). 2. Centralization and digitization of SCM processes. 3. Increased awareness of all contractual work activities related to changes that impact time and costs. 4. Evaluating contract clause negotiations governing rights and obligations and compensation mechanisms. 5. Improved project team communication and coordination capabilities in terms of claims and negotiations with external parties.	Transformasi Digital & Evaluasi Proyek 1. **Implementasi BIM:** Wajib di seluruh proyek. 2. **ERP & SAP:** Tahap transisi dari dual system single system. 3. **Sentralisasi Perolehan:** Stage 1 – Item strategis: sudah berlaku di seluruh proyek dan Stage 2 – Material > Rp200 juta: baru diterapkan di pilot project (BI Karawang). 4. **Digitalisasi SCM:** Pengaplikasian SAP modul MM, Roll Out Sistem WIKA yaitu VMS, WISE, Wdigi, dan WMaster sudah dilaksanakan, Aplikasi WISE untuk menunjang proses perolehan sudah dilaksanakan Go Live dan dilanjutkan untuk implementasi pada pilot project yaitu proyek RS Klaten dan Undip Semarang 5. **Evaluasi Proyek Aktif:** Melaksanakan CP Proyek 20%,40%,60%,80% dan juga melaksanakan 4EP proyek-proyek yang mengalami turun margin (Gereja Basilika CP 20%, 4EP stadion teladan medan, 4EP proyek RDBI,CP Pabrik Modular, RS Klaten CP 40%,CP 80% Bio Farma,CP 20% UNDIP,CP Fave Hotel) 6. **Radirtas:** Penanganan penurunan performa proyek akibat masalah pembayaran. Penguatan Administrasi Kontrak 1. **Administrasi Kontrak:** Dilaksanakan secara komprehensif sejak masa tender hingga kontrak berakhir. 2. **Klinik Manajemen Kontrak:** Rutin di setiap proyek berjalan, sesuai check point pelaksanaan kontrak. 3. **Pelatihan Legal Adkon:** Sudah dilaksanakan untuk pegawai tingkat Manajer (Bidang Divisi & Proyek) serta Kasie Komersial. Digital Transformation & Project Evaluation 1. **BIM Implementation:** Mandatory across all projects. 2. **ERP & SAP:** Transition stage from dual system to single system. 3. **Centralized Procurement:** Stage 1 – Strategic Items: Applied across all projects, and Stage 2 – Materials > Rp200 million: newly implemented in the pilot project (BI Karawang). 4. **SCM Digitalization:** Application of SAP MM module, rollout of WIKA's systems, namely VMS, WISE, Wdigi, and WMaster, has been implemented. WISE application to support the procurement process has gone live and is being implemented in pilot projects, namely Klaten Hospital and Diponegoro University Semarang projects. 5. **Active Project Evaluation:** Implementing Project CP of 20%, 40%, 60%, and 80%, as well as implementing 4EP projects experiencing declining margins (Basilica Church 20% CP, 4EP Medan Stadium 4EP, 4EP RDBI project, Modular Factory CP, Klaten Hospital 40% CP, Bio Farma 80% CP, UNDIP 20% CP, Fave Hotel CP). 6. **Radirtas:** Handling declining project performance due to payment issues. Strengthening Contract Administration 1. **Contract Administration:** applied comprehensively from the tender period until the contract expires. 2. **Contract Management Clinic:** Routinely conducted for each ongoing project, according to contract implementation checkpoints. 3. **Legal Adkon Training:** Implemented for Manager-level employees (Division & Project) and Head of Commercial Section.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
4	Defisit *cashflow* operasi Operating cash flow deficit	Gagalnya pencapaian target Cash in akibat piutang tidak tertagih Failure to achieve the cash-in target due to uncollectible receivables	1.a. Mempercepat proses penagihan piutang kepada pihak pemberi tugas secara periodik 1.b. Mempercepat proses pencairan piutang retensi dan piutang macet bermasalah 2. *Reprofiling* hutang *bank non cash loan* dan *cash loan* 3. Implementasi *Lean Construction* proyek berjalan 4.a. Menjalin kerja sama dengan mitra strategis non-perbankan untuk pembiayaan proyek 4.b. Memilih secara selektif proyek yang didanai menggunakan fasilitas perbankan	**1. Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Proyek Percepatan Pencairan Piutang** Perseroan terus melakukan percepatan pencairan piutang, termasuk pada proyek berjalan, piutang retensi, dan piutang bermasalah, guna menjaga ketersediaan arus kas operasional perusahaan. **2. Pembentukan Task Force Piutang** Perseroan telah membentuk tim task force piutang untuk mempercepat proses penagihan dan meningkatkan efektivitas monitoring terhadap outstanding piutang proyek. **3. Penanganan Piutang Bermasalah** Perseroan melakukan penguatan upaya penagihan melalui penyampaian reminder pembayaran kepada owner bermasalah, termasuk tindak lanjut berupa pengiriman somasi dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai ketentuan yang berlaku. **4. Reprofiling Hutang Bank** Perseroan melakukan pendekatan dan komunikasi intensif dengan pihak perbankan guna memperoleh relaksasi atas kewajiban pinjaman Perseroan sebagai bagian dari upaya menjaga fleksibilitas pendanaan dan likuiditas perusahaan. **5. Implementasi Lean Construction** Perseroan telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan konsultan Glodon dan saat ini tengah melaksanakan pilot project lean construction pada beberapa proyek, antara lain Proyek UNDIP, Gereja Basilika, dan Stadion Teladan Medan. **6. Pemenuhan Persyaratan Pembiayaan BPKH** Perseroan telah memenuhi seluruh tambahan data dan dokumen yang diminta dalam proses penjajakan pembiayaan BPKH. Namun demikian, proses tersebut masih dalam status hold karena belum terdapat proyek baru yang akan dijadikan objek pembiayaan. **7. Analisa Plafon Kredit** Perseroan telah melakukan analisa plafon kredit guna memastikan kapasitas pembiayaan dan kecukupan fasilitas pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasional dan proyek berjalan. **8. Pendanaan Proyek Berjalan** Saat ini seluruh proyek berjalan masih didanai melalui fasilitas perbankan sesuai dengan skema pembiayaan yang telah disepakati. **9. Alternatif Pembiayaan** Perseroan masih melakukan kajian terhadap alternatif pembiayaan dan skema penjaminan sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pendanaan perusahaan.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
			1.a. Accelerate the process of collecting receivables from the assigning party on a periodic basis 1.b. Accelerate the disbursement process for retained receivables and problematic bad debts 2. Reprofiling non-cash bank loans and cash loans 3. Implementing Lean Construction for ongoing projects 4.a. Collaborating with strategic non-banking partners for project financing 4.b. Selectively selecting projects to be funded using banking facilities	1. **Accelerating Receivables Disbursement** The Company continues to accelerate the disbursement of receivables, including ongoing projects, retained receivables, and problem receivables, to maintain the company's operational cash flow. 2. **2. Establishing an Accounts Receivables Task Force** The Company has established an accounts receivables task force to expedite the collection process and improve the effectiveness of monitoring outstanding project receivables. 3. **Handling Problem Receivables** The Company is strengthening collection efforts by sending payment reminders to problem owners, including follow-up actions such as sending warning letters and processing Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in accordance with applicable regulations. 4. **Reprofiling Bank Debt** The Company is engaging and communicating intensively with banks to obtain relaxation on its loan obligations as part of its efforts to maintain funding flexibility and liquidity. 5. **Implementing Lean Construction** The Company has established a partnership through the signing of an MoU with consultant Glodon and is currently implementing lean construction pilot projects on several projects, including UNDIP Project, Basilica Church, and Teladan Stadium in Medan. 6. **Fulfillment of BPKH Financing Requirements** The Company has fulfilled all additional data and documentation requested in BPKH financing exploration process. However, the process is still on hold because there are no new projects to be financed. 7. **Credit Ceiling Analysis** The Company has conducted a credit ceiling analysis to ensure financing capacity and the adequacy of funding facilities to support operational needs and ongoing projects. 8. **Funding for Ongoing Projects** Currently, all ongoing projects are still being funded through banking facilities in accordance with the agreed financing scheme. 9. **Financing Alternatives** The Company is still reviewing alternative financing and guarantee schemes as part of its efforts to diversify its funding sources.

No.	Risiko Risk	Penyebab Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plan	Realisasi Mitigasi Risiko Realization of Risk Mitigation
5	Kegagalan memenuhi standar ESG dapat menghambat pencapaian Sustainability Development Goals (SDGs). Failure to meet ESG standards can hinder the achievement of the Sustainability Development Goals (SDGs).	Belum terpenuhinya maturity ESG. ESG maturity has not been achieved.	1. Menerapkan aktivitas ESG untuk memperoleh sertifikasi LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) dan/atau greenship 2. Program Pelatihan ESG tahunan 3. Kolaborasi dengan Konsultan ESG 1. Implement ESG activities to obtain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) and/or greenship certification. 2. Annual ESG Training Program. 3. Collaboration with ESG Consultants.	**1. Penerapan ESG dan Penguatan Sustainability Sertifikasi Sistem Manajemen Energi** Perseroan telah melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Energi sebagai bagian dari komitmen dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan peningkatan efisiensi energi operasional perusahaan. **2. Peningkatan Kompetensi dan Keselamatan Kerja** Perseroan berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan aspek keselamatan kerja melalui pelaksanaan program sertifikasi pekerja pada berbagai bidang sesuai kebutuhan operasional perusahaan. **3. Penguatan Sistem K3 dan Audit Berkala** Perseroan terus meningkatkan implementasi sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pelaksanaan audit secara berkala serta penerapan standar ISO 45001 guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar. **4. Penerapan Tata Kelola dan Anti-Suap** Perseroan telah menerapkan kebijakan anti-suap dan mekanisme *Whistleblowing System* sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). **5. Pelaksanaan Training ESG** Perseroan telah melaksanakan pelatihan ESG pada tanggal 17–18 September 2025 dengan pendampingan dari konsultan terpilih, yaitu PT Surveyor Indonesia, guna meningkatkan pemahaman dan implementasi ESG di lingkungan perusahaan. **6. Penyusunan Pedoman ESG** Saat ini Perseroan sedang menyusun pedoman ESG dengan pendampingan konsultan PT Surveyor Indonesia sebagai bagian dari penguatan implementasi ESG secara terstruktur dan berkelanjutan. **1. Energy Management System Certification** The Company has applied Energy Management System certification as part of its commitment to implementing sustainability principles and improving the energy efficiency of its operations. **2. 2. Competency Improvement and Occupational Safety** The Company plays an active role in improving workforce competency and occupational safety aspects through implementing worker certification programs in various fields according to the company's operational needs. **3. 3. Strengthening the Occupational Health and Safety System and Periodic Audits** The Company continues to improve the implementation of its Occupational Health and Safety (OHS) system through regular audits and the implementation of ISO 45001 standard to ensure a safe and compliant work environment. **4. Governance and Anti-Bribery** The Company has applied an anti-bribery policy and a Whistleblowing System mechanism as part of strengthening corporate governance. In addition, the Company has also applied an Anti-Bribery Management System (ABMS) certification. **5. ESG Training** The Company conducted ESG training on September 17–18, 2025, with assistance from a selected consultant, PT Surveyor Indonesia, to improve the understanding and implementation of ESG within the company. **6. Preparation of ESG Guidelines** The Company is currently developing ESG guidelines with assistance from a consultant, PT Surveyor Indonesia, as part of strengthening the structured and sustainable implementation of ESG.

MATRIKS RISIKO STRATEGIS TERHADAP ASPEK MAKRO EKONOMI

Risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan serta upaya untuk mitigasi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

STRATEGIC RISK MATRIX FOR MACROECONOMIC ASPECTS

The risks faced by the Company and the efforts to mitigate these risks are as follows:

No.	Aspek Makro Ekonomi Macroeconomic Aspects	Risiko Risks	Penyebab Causes	Potensi Dampak Potential Impacts
1	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	• Berkurangnya alokasi anggaran infrastruktur • Penurunan permintaan proyek konstruksi • Penundaan atau pembatalan investasi baru • Reduced infrastructure budget allocation • Declining demand for construction projects • Delays or cancellations of new investments	• Perlambatan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik • Ketidakpastian politik dan regulasi, sehingga investor menahan belanja modal • Keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah dan swasta • Slowing global and domestic economic growth • Political and regulatory uncertainty, causing investors to hold back on capital expenditure • Financing constraints for the government and private sector	• Penurunan backlog proyek • Potensi *idle resources* (mesin, tenaga kerja) • Turunnya pendapatan dan profitabilitas Perseroan • Reduction in project backlog • Potential idle resources (machinery, labor) • Decrease in the Company's revenue and profitability
2	Inflasi Inflation	• Kenaikan biaya produksi (material, upah tenaga kerja, transportasi) • Penurunan margin keuntungan, terutama pada proyek dengan *fixed- price contract* • Melemahnya daya beli masyarakat (berkurangnya potensi pasar) • Increased production costs (materials, labor, transportation) • Declining profit margins, especially for projects with fixed-price contracts • Weakening public purchasing power (reduced market potential))	• Kenaikan harga bahan baku (material impor dan domestik) • Peningkatan biaya energi dan transportasi • Jumlah uang beredar yang tinggi, Melebihi pertumbuhan produksi barang/jasa • Rising raw material prices (imported and domestic materials) • Rising energy and transportation costs • High money supply, exceeding growth in goods/services production	• Penurunan profitabilitas proyek • Peningkatan risiko Keterlambatan penyelesaian proyek (karena biaya melonjak) • Kemungkinan renegosiasi kontrak atau Pembengkakan biaya tambahan (*cost overrun*) • Decrease in project profitability • Increased risk of project completion delays (due to cost overruns) • Possible contract renegotiation or cost overruns
3	Suku Bunga Interest Rates	• Kenaikan biaya pinjaman modal kerja dan investasi • Penurunan minat investor dalam proyek jangka panjang • Beban bunga lebih tinggi yang dapat mengurangi arus kas • Increased working capital and investment loan costs • Declining investor interest in long-term projects • Higher interest expenses that can reduce cash flow	• Kebijakan moneter ketat oleh Bank Indonesia (peningkatan suku bunga acuan) • Tekanan inflasi yang mendorong penyesuaian suku bunga • Volatilitas pasar keuangan global • Tight monetary policy by Bank Indonesia (increase in the benchmark interest rate) • Inflationary pressures driving interest rate adjustments • Global financial market volatility	• Peningkatan biaya pendanaan ( ) • Penundaan proyek baru karena biaya investasi lebih mahal • Penurunan laba bersih Perseroan • Peningkatan biaya pendanaan ( ) • Penundaan proyek baru karena biaya investasi lebih mahal • Penurunan laba bersih Perseroan

No.	Aspek Makro Ekonomi Macroeconomic Aspects	Risiko Risks	Penyebab Causes	Potensi Dampak Potential Impacts
4	Volatilitas Nilai Tukar Exchange Rate Volatility	• Peningkatan biaya impor material dan alat berat • Fluktuasi laba/ rugi akibat selisih kurs pada transaksi internasional • Kesulitan melakukan perencanaan anggaran jangka panjang. • Increased costs for importing materials and heavy equipment • Fluctuations in profits and losses due to exchange rate differences in international transactions • Difficulty in long-term budget planning.	• Perubahan sentimen pasar terhadap mata uang (*capital inflow/outflow*) • Perbedaan suku bunga antarnegara • Ketergantungan pada bahan baku impor • Changes in market sentiment towards currencies (capital inflow/outflow) • Differences in interest rates between countries • Dependence on imported raw materials	• Peningkatan total biaya proyek (terutama proyek dengan komponen impor besar) • Tergerusnya margin keuntungan • Keterlambatan pengadaan material karena penyesuaian anggaran • Increased total project costs (especially for projects with large imported components) • Eroded profit margins • Delays in material procurement due to budget adjustments
5	Kebijakan Fiskal Fiscal Policy	• Perubahan alokasi anggaran infrastruktur (pemotongan/ pengalihan dana) • Perubahan tarif pajak atau Regulasi konstruksi yang dapat meningkatkan biaya • Penundaan pembayaran pemerintah pada proyek-proyek yang didanai APBN/ APBD • Changes in infrastructure budget allocations (fund cuts/ redirections) • Changes in tax rates or construction regulations that could increase costs • Delays in government payments for projects funded by the state budget (APBN/APBD)	• Perubahan prioritas pemerintah dalam APBN/ APBD (misalnya pemotongan hingga 50% pada kementerian/lembaga) • Program transformasi ekonomi (misalnya fokus pada ketahanan pangan/energi) yang menggeser alokasi dana infrastruktur • Kebijakan pengendalian defisit fiskal yang membatasi belanja modal • Changes in government priorities in the state/regional budgets (e.g., cuts of up to 50% in ministries/agencies) • Economic transformation programs (e.g., focusing on food/energy security) that shift the allocation of infrastructure funds • Fiscal deficit control policies that limit capital spending	• Ketidakpastian dalam perencanaan proyek dan penundaan investasi • Turunnya volume proyek konstruksi dari sisi pemerintah • Potensi akibat tertundanya pembayaran • Uncertainty in project planning and investment delays • Decrease in construction project volume from the government's perspective • Potential cash flow mismatch due to delayed payments

Strategi Mitigasi Risiko

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari dinamika makro ekonomi, Perseroan telah menyusun serangkaian strategi mitigasi yang komprehensif. Dalam menghadapi risiko pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat berkurangnya alokasi anggaran infrastruktur dan penurunan permintaan proyek, Perseroan melakukan diversifikasi portofolio proyek dengan menggali peluang di sektor swasta, memperkuat kemitraan finansial, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna menghindari *idle resources*.

Untuk mengurangi dampak inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan penurunan margin keuntungan, Perseroan menyertakan klausul perlindungan inflasi dalam kontrak, mengoptimalkan proses pengadaan melalui negosiasi harga, serta mencari alternatif material lokal sebagai pengganti bahan impor. Dalam konteks kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan biaya pinjaman, Perseroan mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan, memanfaatkan instrumen keuangan seperti *hedging*, serta menegosiasikan syarat pinjaman yang lebih kompetitif untuk menjaga arus kas.

Risk Mitigation Strategy

To anticipate the negative impacts of macroeconomic dynamics, the Company has formulated a series of comprehensive mitigation strategies. In addressing the risk of declining economic growth due to reduced infrastructure budget allocation and decreased project demand, the Company diversifies its project portfolio by exploring opportunities in the private sector, strengthening financial partnerships, and optimizing resource utilization to avoid idle resources.

To mitigate the impact of inflation, which leads to increased production costs and reduced profit margins, the Company incorporates inflation protection clauses in contracts, optimizes procurement processes through price negotiations, and seeks alternative local materials to replace imported goods. In response to rising interest rates that may increase borrowing costs, the Company pursues diversification of funding sources, utilizes financial instruments such as hedging, and negotiates more competitive loan terms to maintain cash flow stability.

Selain itu, dalam menghadapi volatilitas nilai tukar yang berpotensi menambah beban biaya impor material dan alat berat, Perseroan menerapkan strategi *hedging* mata uang, melakukan negosiasi kontrak multi valuta, dan mengoptimalkan penggunaan material lokal guna meredam dampak fluktuasi kurs.

Terakhir, untuk mengantisipasi perubahan kebijakan fiskal yang menimbulkan ketidakpastian perencanaan proyek dan penundaan pembayaran, Perseroan meningkatkan pemantauan dan analisis regulasi, memperluas portofolio proyek ke sektor swasta, Menyusun kontrak dengan fleksibilitas pembayaran, serta mengelola likuiditas secara ketat. Melalui serangkaian strategi mitigasi ini, Perseroan berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan meningkatkan daya saingnya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi makro.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Dewan Komisaris secara berkala melakukan peninjauan atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dalam memastikan keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Berdasarkan hasil peninjauan, secara umum sistem manajemen risiko Perseroan telah berjalan dan diimplementasikan dalam proses bisnis, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan serta pengendalian terhadap potensi risiko yang dihadapi. Penerapan manajemen risiko juga telah terintegrasi dengan aktivitas operasional, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Namun demikian, Perseroan menyadari bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal konsistensi implementasi di seluruh unit kerja, peningkatan kualitas identifikasi dan mitigasi risiko, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus meningkatkan penerapan sistem manajemen risiko melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan budaya sadar risiko, serta optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi sebagai alat bantu pengendalian.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem manajemen risiko Perseroan dapat semakin efektif dalam mendukung ketahanan bisnis serta meningkatkan kualitas kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sebagai wujud komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta pengelolaan risiko yang terintegrasi, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Risiko yang menjadi pedoman utama dalam proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko di seluruh lini organisasi. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada standar yang berlaku dan prinsip Risk Based Thinking, serta selaras dengan strategi bisnis dan risk appetite Perseroan.

Furthermore, in dealing with exchange rate volatility that may increase the cost burden of imported materials and heavy equipment, the Company implements currency hedging strategies, negotiates multi-currency contracts, and optimizes the use of local materials to mitigate the impact of exchange rate fluctuations.

Lastly, to anticipate changes in fiscal policies that may create uncertainty in project planning and delay payments, the Company enhances regulatory monitoring and analysis, expands its project portfolio into the private sector, structures contracts with flexible payment terms, and manages liquidity prudently. Through these mitigation strategies, the Company aims to maintain operational continuity and enhance its competitiveness amid macroeconomic uncertainties.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

Board of Commissioners periodically reviews the effectiveness of the risk management system within the Company, as part of its supervisory function to ensure business continuity and the achievement of the Company's strategic objectives.

Based on the review results, in general, the Company's risk management system has been implemented and integrated into business processes, particularly in supporting decision-making and controlling potential risks faced by the Company. The implementation of risk management has also been integrated into operational activities, including project planning and execution.

However, the Company acknowledges that the effectiveness of risk management still requires further strengthening, particularly in terms of consistent implementation across all work units, improving the quality of risk identification and mitigation, as well as strengthening monitoring and evaluation functions on an ongoing basis.

Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously enhance the implementation of risk management system through policy refinement, strengthening a risk-aware culture, and optimizing the use of technology and information systems as control tools.

Through these measures, the Company's risk management system is expected to become more effective in supporting business resilience and improving the quality of the Company's performance on a sustainable basis.

DISCLOSURE OF RISK MANAGEMENT SYSTEM POLICY

As a manifestation of its commitment to implementing good corporate governance and integrated risk management, the Company has established Risk Management System Policy, which serves as the key guideline for identifying, measuring, controlling, and monitoring risks across all levels of the organization. This policy was developed in accordance with applicable standards and the principles of Risk-Based Thinking, and aligns with the Company's business strategy and risk appetite.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko tersebut telah ditelaah dan disetujui oleh Direksi serta Dewan Komisaris, dan secara resmi ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai bentuk komitmen dan dukungan penuh manajemen puncak terhadap efektivitas implementasinya.

The Risk Management System Policy has been reviewed and approved by the Board of Directors and Board of Commissioners, and officially signed by the President Director and President Commissioner, demonstrating full commitment and support of top management for its effective implementation.



ORGAN PENGELOLA RISIKO

RISK MANAGEMENT ORGANS

Danantara Indonesia

Gedung

KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO S.D DESEMBER 2025
QUALIFICATION OF RISK MANAGEMENT ORGANS UNTIL DECEMBER 2025

No	Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ	Jumlah Sertifikasi Number of Certifications		
		Rencana (Orang) Plan (Persons)	Realisasi (Orang) Realization (Persons)	Rasio Ratio (%)
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100
2	Dewan Direksi Board of Directors	5	5	100
3	Komite Audit Audit Committee	3	3	100
4	Komite Pemantau Risiko dan TKT Risk Monitoring Committee and Integrated Risk Management Committee	3	2	66
5	Unit Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit	7	7	100
6	Internal Audit	4	4	100
	Jumlah | Total	**26**	**25**	**96**

Organ Pengelola Risiko diatur dalam: Juknis No. SK-3/DKU.MBU/10/2023
Risk Management Organ is regulated in: Technical Guidelines No. SK-3/DKU.MBU/10/2023

Dokumen ini menetapkan pedoman mengenai:
- Komposisi organ pengelola risiko.
- Standar kualifikasi, termasuk pelatihan dan sertifikasi wajib bagi masing-masing anggota (seperti Dewan Komisaris, Direksi, SPI, komite-komite, dll.).

This document establishes guidelines regarding:
- The composition of risk management organ.
- Qualification standards, including mandatory training and certification for each member (such as Board of Commissioners, Directors, Internal Audit Unit, committees, etc.).

Note: Rencana Sertifikasi Unit Kerja Manajemen Risiko memperhitungkan sebelum perubahan SKSO menjadi RMD
Note: The Risk Management Work Unit Certification Plan takes into account the changes made before the SKSO (Standard Operating Procedure) to RMD.

Ketentuan pada kualifikasi Pelatihan Sesuai:
Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023
Juknis No. SK-3/DKU.MBU/10/2023
Terms of Training Qualifications In accordance with:
SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023
Technical Guidelines No. SK-3/DKU.MBU/10/2023

1

Pelatihan yang di ikuti merupakan PPL yang di selengarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan atau lembaga pelatihan milik atau di kendalikan oleh BUMN.
The training attended is PPL (Practice Training) conducted by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation bodies, and/or training institutions owned or controlled by State-Owned Enterprises.

2

Jam Pelatihan: | Training Hours:
1. Dekom 20 Jam/thn | Board of Commissioners 20 Hours/year
2. Direksi 40 Jam/thn (DKU & DMRL 3 Topik/thn) | Board of Directors 40 Hours/year (DKU & DMRL 3 Topics/year)
3. Komite 20 Jam/thn | Committee 20 Hours/year
4. RMD 60 Jam/thn (Menjabat > 1 thn: 3 Topik, > 3thn: semua topik) | RMD 60 Hours/Year (Position > 1 year: 3 Topics, > 3 years: all topics)
5. SPI 40 Jam/thn u/ Head dan 20 Jam/thn u/ Anggota | SPI 40 Hours/Year for Head and 20 Hours/Year for Member

3

Setiap tahun wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik antara lain sebagai berikut: manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi dan atau audit, K3, Data Analytic, ESG.
Annually, one training session is required with topics including: risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting and/or auditing, OHS, Data Analytics, ESG.

Sampai dengan tahun 2025, Perseroan telah memastikan pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko sesuai dengan ketentuan Juknis No. SK-3/DKU.MBU/10/2023 serta Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Organ Pengelola Risiko Perseroan terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, Unit Kerja Manajemen Risiko, serta Internal Audit. Seluruh organ pengelola risiko telah mengikuti pelatihan, sementara dari total rencana 26 orang yang tersertifikasi, telah terealisasi sebanyak 25 orang tersertifikasi atau mencapai 96% dari target yang ditetapkan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Unit Kerja Manajemen Risiko, dan Internal Audit telah memenuhi 100% rencana sertifikasi, sementara Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi mencapai 66% dari rencana yang ditetapkan, dan direncanakan akan dilaksanakan sepenuhnya di tahun 2026.

Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi tersebut mengacu pada ketentuan bahwa program pengembangan kompetensi (PPL) diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, atau lembaga pelatihan yang terakreditasi, termasuk lembaga pelatihan milik atau yang dikendalikan oleh BUMN. Selain itu, setiap organ diwajibkan memenuhi ketentuan minimal jam pelatihan per tahun sesuai peran dan tanggung jawabnya, serta mengikuti paling sedikit satu pelatihan tahunan dengan topik yang relevan, antara lain manajemen risiko, fraud, bisnis dan kegiatan usaha korporasi, hukum dan kepatuhan, keuangan, akuntansi dan/atau audit, K3, data analytic, serta ESG.

Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam memastikan kecukupan kompetensi dan kapabilitas Organ Pengelola Risiko guna mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Hasil evaluasi tahunan terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan telah berjalan secara memadai dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Perseroan. Evaluasi tersebut mencakup penelaahan atas kebijakan, kerangka kerja, proses, serta infrastruktur pendukung manajemen risiko yang diterapkan secara terintegrasi di seluruh lini organisasi.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perseroan telah memiliki keselarasan yang memadai antara struktur tata kelola, proses identifikasi dan pengendalian risiko, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan risiko. Dengan demikian, sistem manajemen risiko dinilai mampu memberikan keyakinan yang wajar atas pengelolaan risiko usaha secara terkendali, terukur, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta risk appetite yang telah ditetapkan.

By 2025, the Company has ensured the fulfillment of Risk Management Organ qualifications in accordance with the terms of Technical Instruction No. SK-3/DKU.MBU/10/2023 and SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. The Company's Risk Management Organ consists of Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Integrated Risk Monitoring and Governance Committee, Risk Management Work Unit, and Internal Audit. All risk management organs have participated in training, while of the total planned 26 persons to be certified, 25 have been certified or reached 96% of the set target. All members of Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Management Work Unit, and Internal Audit have 100% fulfilled their certification plan, while Risk Monitoring and Integrated Governance Committee has achieved 66% of its stated plan and is scheduled for full implementation in 2026.

These trainings and certifications are based on the requirement that competency development programs (PPL), conducted by professional institutions, regulators, or accredited training institutions, including training institutions owned or controlled by state-owned enterprises (SOEs). Furthermore, each organ is required to meet the minimum training hours per year required for its roles and responsibilities, and to participate in at least one annual training session on relevant topics, including risk management, fraud, business and corporate activities, law and compliance, finance, accounting and/or auditing, OHS, data analytics, and ESG.

This implementation demonstrates the Company's commitment to ensuring the adequacy of competency and capability within the Risk Management Organs to support effective implementation of risk management, in line with the principles of good corporate governance.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Based on the results of annual evaluation of the effectiveness of the Company's risk management system implementation, Board of Directors and Board of Commissioners stated that the risk management system implemented has been adequate and effective in supporting the achievement of the Company's strategic objectives. The evaluation includes a review of policies, frameworks, processes, and supporting infrastructure of risk management implemented in an integrated manner across all organizational lines.

The assessment results indicate that the Company has achieved adequate alignment between governance structures, risk identification and control processes, as well as risk monitoring and reporting mechanisms. Accordingly, the risk management system is considered capable of providing reasonable assurance that business risks are managed in a controlled, measurable manner and in accordance with prudential principles and the established risk appetite.

Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Legal Cases with Material Impact Faced by the Company, Subsidiaries, Members of Board of Directors, and Members of Board of Commissioners

PERMASALAHAN HUKUM

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki maupun sedang menghadapi perkara hukum yang berdampak material terhadap keberlangsungan usaha. Informasi mengenai jenis perkara, baik yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam proses penyelesaian, disajikan pada tabel berikut:

LEGAL ISSUES

As of December 31, 2025, the Company has not been involved in nor is currently facing any legal cases that have a material impact on its business continuity. Information regarding the types of cases, both those with final and binding legal decisions and those still in process, is presented in the following table:

Status Status	Jenis Perkara Type of Cases			
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perpajakan Taxation	Hubungan Industri Industrial Relations
Telah selesai (berkekuatan hukum tetap) Resolved (legally binding)	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian Under resolution (in progress)	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Details of the legal issues faced by the Company during 2025 are as follows:

No	Nomor Perkara Case Number	Posisi Perusahaan Company Position	Pokok Gugatan Main Points of the Lawsuit	Status Perkara Case Status	Risiko bagi Perusahaan Risks to the Company
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2025, Perseroan meyakini bahwa setiap putusan atas perkara-perkara yang dihadapi tidak akan menimbulkan dampak material terhadap kondisi usaha maupun kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting, baik pidana maupun perdata.

Throughout 2025, the Company believes that any decisions on the cases faced will not have material impact on the Company's business conditions or financial performance. Furthermore, all members of Board of Directors and Board of Commissioners in office have never been involved in any significant cases, either criminal or civil.

Adapun jumlah perkara penting yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta entitas anak selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The number of important cases faced by members of Board of Commissioners and/or Board of Directors and subsidiaries during 2025 is as follows:

Keterangan Remarks	Perkara Penting Yang Dihadapi Important Cases Faced
Anggota Dewan Komisaris Members of Board of Commissioners	-
Anggota Direksi Members of Board of Directors	-
Entitas Anak Subsidiaries	-

PERMASALAHAN HUKUM ENTITAS ANAK

LEGAL ISSUES OF SUBSIDIARY ENTITIES

Entitas Anak Subsidiaries	Status Perkara Case Status	Jumlah Perkara Perdata Number of Civil Cases	Jumlah Perkara Pidana Number of Criminal Cases
-	-	-	-
-	-	-	-

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi maupun terlibat dalam perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan sebagai organisasi, entitas anak, Dewan Komisaris, maupun Direksi.

NON-LEGAL IMPORTANT CASES

Throughout 2025, the Company did not face or become involved in any non-legal important cases involving the Company as an organization, its subsidiaries, Board of Commissioners, or Board of Directors.

Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Disclosures of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

Sepanjang tahun 2025, Perseroan, entitas anak, serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima 1 (satu) sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Keterlambatan Biaya Tahunan : Tahap IV - 2025 Otoritas Jasa Keuangan

Throughout 2025, the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Directors and the Board of Commissioners received one administrative sanction from the Financial Services Authority (OJK) related to Late Payment of Annual Fees: Phase IV - 2025 Financial Services Authority

Informasi Tentang Sanksi Perkara Pajak

Information About Tax Case Sanctions

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah dijatuhi sanksi atau dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait sengketa atau permasalahan pajak.

Over the past five years, the Company has never been sanctioned or found guilty in a supreme tax court ruling related to tax disputes or issues.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access To Company Information and Data

Perseroan memandang keterbukaan informasi sebagai aspek fundamental dalam membangun hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan secara konsisten menyediakan akses informasi yang mudah, terbuka, dan setara terhadap informasi serta data yang relevan, baik bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

The Company views information transparency as a fundamental aspect in building constructive and sustainable relationships with all stakeholders. In line with this commitment, the Company consistently provides easy, open, and equal access to relevant information and data for both internal and external stakeholders.

Komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan tanggung jawab Perseroan kepada pemegang saham dan publik, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun reputasi yang positif serta menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan. Perseroan meyakini bahwa citra perusahaan yang kuat hanya dapat terwujud melalui komunikasi yang transparan, akurat, dan berkesinambungan.

This commitment to information transparency not only reflects the Company's responsibility to shareholders and the public but also forms part of its long-term strategy to build a positive reputation and foster stakeholder trust. The Company believes that a strong corporate image can only be achieved through transparent, accurate, and continuous communication.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyediaan situs web resmi yang memuat informasi dan data relevan mengenai kegiatan usaha, kinerja keuangan, aksi korporasi, serta berbagai bentuk keterbukaan informasi lainnya. Situs web tersebut disediakan agar dapat diakses secara luas oleh publik guna memastikan kemudahan akses informasi bagi pemegang saham dan masyarakat.

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies, the Company has fulfilled its obligation to provide an official website containing relevant information and data regarding business activities, financial performance, corporate actions, and various other forms of information disclosure. The website is provided for wide public access to ensure easy access to information for shareholders and the public.

Di samping itu, Perseroan menjunjung tinggi prinsip perlindungan data perusahaan dengan menerapkan kebijakan perlindungan data serta standar keamanan informasi yang memadai untuk melindungi data sensitif dari potensi risiko penyalahgunaan, kebocoran, maupun akses yang tidak sah. Langkah-langkah perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam menjaga integritas informasi dan kepercayaan pemangku kepentingan, sekaligus memastikan kerahasiaan data yang dikelola dan dipublikasikan.

In addition, the Company upholds the principle of corporate data protection by implementing adequate data protection policies and information security standards to protect sensitive data from potential risks of misuse, leakage, or unauthorized access. These protective measures are part of the Company's commitment to maintaining the integrity of information and stakeholder trust, while ensuring the confidentiality of the data it manages and publishes.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Perseroan menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, antara lain:

As a manifestation of this commitment, the Company provides various information accessible to shareholders and other stakeholders, including:

1. **MEDIA ELEKTRONIK**

Perseroan menyadari pentingnya pemanfaatan media elektronik dalam mendukung penyampaian informasi kepada publik, baik internal maupun eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang efektif dan efisien, Perseroan senantiasa memastikan ketersediaan serta kemudahan akses data melalui berbagai media elektronik yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan akses informasi melalui platform-platform berikut:
Situs Web: www.wikagedung.co.id
Instagram: @ptwikagedungid
Facebook: @ptwikagedungID
Twitter/X: @ptwikagedungID
LinkedIn: @ptwikagedungid
YouTube: @ptwikagedungid
TikTok: @ptwikagedungID
Spotify: WEGE Podcast

Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan berbagai media komunikasi internal guna memastikan kelancaran penyampaian informasi di lingkungan perusahaan. Adapun media komunikasi internal yang digunakan antara lain:

a. Majalah Space for Life, yang memberikan informasi terkait aktivitas dan pencapaian Perseroan.
b. Dashboard WG, yang berisi informasi terbaru tentang aktivitas dan kinerja Perseroan.
c. Group WhatsApp, sebagai media komunikasi langsung dan cepat dalam menyampaikan informasi.
d. TV Plasma, yang tersedia di setiap lantai kantor pusat WEGE yang menampilkan informasi terbaru terkait kegiatan dan kinerja Perseroan.
e. E-mail Blast, yang digunakan untuk distribusi informasi secara luas kepada karyawan dan stakeholder internal.
f. Dan berbagai saluran lainnya yang mendukung kelancaran komunikasi internal.

2. **SIARAN PERS**

Sebagai wujud transparansi dan komitmen terhadap keterbukaan informasi, Perseroan secara rutin menyampaikan pembaruan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menyampaikan berbagai informasi kepada publik, termasuk melalui media dalam bentuk siaran pers yang memuat beragam informasi terkait kegiatan dan kinerja Perseroan, sebagai berikut:

1. **ELECTRONIC MEDIA**

The Company recognizes the importance of utilizing electronic media in supporting the delivery of information to the public, both internally and externally. To meet the need for effective and efficient communication, the Company consistently ensures the availability and ease of access to data through various evolving electronic media.

As part of its implementation of information transparency, the Company provides access to information through the following platforms:
Website: www.wikagedung.co.id
Instagram: @ptwikagedungid
Facebook: @ptwikagedungID
Twitter/X: @ptwikagedungID
LinkedIn: @ptwikagedungid
YouTube: @ptwikagedungid
TikTok: @ptwikagedungID
Spotify: WEGE Podcast

Furthermore, the Company utilizes various internal communication channels to ensure the smooth dissemination of information within the company. These internal communication channels include:

a. Space for Life Magazine, which provides information on the Company's activities and achievements.
b. The WG Dashboard, which contains the latest information on the Company's activities and performance.
c. WhatsApp Group, as a direct and fast communication channel for conveying information.
d. Plasma TVs, available on every floor of WEGE's headquarters, display the latest information regarding the Company's activities and performance.
e. Email blasts, used to widely distribute information to employees and internal stakeholders.
f. And various other channels that support smooth internal communication.

2. **PRESS RELEASES**

As a manifestation of transparency and a commitment to information disclosure, the Company regularly provides information updates through various communication channels. Throughout 2025, the Company has provided various information to the public, including through the media in the form of press releases containing various information related to the Company's activities and performance, as follows:

No	Tanggal Date	*Press Release Title*	*Category*
1	6 Januari 2025 January 6, 2025	WEGE Bangun Tower UNDIP Berkonsep Green Building WEGE Builds UNDIP Tower with a Green Building Concept	*Construction*
2	20 Januari 2025 January 20, 2025	WEGE Targetkan Kontrak Baru Rp3,5 Triliun pada 2025 WEGE is Targeting Rp3.5 Trillion in New Contracts by 202	*Corporate*
3	23 Januari 2025 January 23, 2025	Fit to Work: Komitmen CSR WEGE untuk Pekerja Sehat dan Produktif Fit to Work: WEGE's CSR Commitment to Healthy and Productive Workers	CSR
4	12 Februari 2025 February 12, 2025	Kolaborasi WEGE bersama Entitas WIKA Group dalam Aksi Donor Darah di Kabupaten Bogor WEGE Collaborated with WIKA Group Entities in a Blood Donation Drive in Bogor Regency	CSR

No	Tanggal Date	*Press Release Title*	*Category*
5	11 Maret 2025 March 11, 2025	WEGE & DEX Luncurkan Netro : Revolusi Sistem Hunian Modular Cerdas Berkonsep *Net Zero* Pertama di Indonesia WEGE & DEX Launched Netro: Indonesia's First Revolutionary Smart Modular Housing System with a Net Zero Concept	*Construction*
6	17 Maret 2025 March 17, 2025	WEGE Komitmen Terhadap *Green Construction* Pada Proyek Menara Mandiri Kendari WEGE is Committed to Green Construction for Kendari Mandiri Tower Project	*Construction*
7	21 Maret 2025 March 21, 2025	WEGE Hadirkan Inovasi Konstruksi Hijau: *Groundbreaking* Tower UNDIP WEGE Presents Green Construction Innovation: Groundbreaking for UNDIP Tower	*Construction*
8	30 April 2025 April 30, 2025	Pendapatan WEGE Q1/2025 Tumbuh 14,56% Sebesar Rp543,26 Miliar WEGE Revenue in Q1/2025 Grew 14.56% to Rp543.26 Billion	*Corporate*
9	8 Mei 2025 May 8, 2025	WEGE Raih Peringkat idBBB/*Stable Outlook* Pertama dari PEFINDO WEGE Achieved First idBBB/Stable Outlook Rating from PEFINDO	*Corporate*
10	9 Mei 2025 May 9, 2025	WIKA Gedung Hadirkan NETRO, Rumah Modular Cerdas & Ramah Lingkungan untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat WIKA Gedung Presented NETRO, a Smart & Eco-Friendly Modular Home to Achieve Community Welfare	*Construction*
11	21 Mei 2025 May 21, 2025	RUPST Tahun Buku 2024, WEGE Bagikan Dividen Tunai 10% dari Laba Bersih WEGE's 2024 Annual General Meeting of Shareholders Distributed Cash Dividends amounted to 10% of Net Profit	*Corporate*
12	12 Juni 2025 June 12, 2025	WEGE Bantu Korban Kebakaran di Kapuk Muara dan Distribusikan Kurban Idul Adha WEGE Helped Fire Victims in Kapuk Muara and Distributed Eid al-Adha Sacrificial Animals	*CSR*
13	12 Juni 2025 June 12, 2025	WEGE Usung NETRO di Forum ICI 2025 WEGE Promoted NETRO at the 2025 ICI Forum	*Corporate*
14	15 Juni 2025 June 15, 2025	WEGE Rampungkan Gedung Backup of Multi Hazard EWS milik BMKG WEGE Completed BMKG's Multi-Hazard EWS Backup Building	*Construction*
15	25 Juni 2025 June 25, 2025	Dukung UMKM Naik Kelas, WEGE Raih The Most Committed BUMN Pembina UMKM 2025 Supporting MSMEs to Upgrade, WEGE Achieved the Most Committed SOE for MSME Development in 2025	*Awards*
16	21 Juli 2025 July 21, 2025	WEGE Rampungkan Proyek Strategis Nasional Gedung Indonesia Multi Hazard Early Warning System BMKG Jakarta WEGE Completed the National Strategic Project of Indonesia Multi-Hazard Early Warning System Building at BMKG Jakarta	*Construction*
17	22 Juli 2025 July 22, 2025	Kinerja Q2 2025 *Gross Profit Margin* WEGE Tumbuh Menjadi 11,87% WEGE's Q2 2025 Gross Profit Margin Grew to 11.87%	*Corporate*
18	29 Juli 2025 July 29, 2025	Produk Modular WEGE Raih Sertifikasi EPD Internasional, Pertama dari Indonesia untuk Bangunan Prefabrikasi WEGE Modular Products Achieve International EPD Certification, the First in Indonesia for Prefabricated Buildings	*Construction*
19	8 Agustus 2025 August 8, 2025	WEGE Selesaikan Pembangunan Gedung Labtek XV ITB, Dukung Kemajuan Riset dan Pendidikan Nasional WEGE Completed the Construction of ITB Labtek XV Building, Supporting the Advancement of National Research and Education	*Construction*
20	8 Agustus 2025 August 8, 2025	WIKA Gedung Tingkatkan Pengembangan Marina Bay Lombok dengan Pembangunan Villa Modular WIKA Gedung Enhanced the Development of Marina Bay Lombok with the Construction of Modular Villas	*Construction*
21	16 Agustus 2025 August 16, 2025	WEGE Turut Resmikan Gedung Prof. Setijadi Universitas Terbuka (UT), Fasilitas Modern Penunjang Pendidikan Tinggi Indonesia WEGE Also Inaugurated Prof. Dr. Ir. Setijadi Open University (UT), a Modern Facility Supporting Higher Education in Indonesia	*Construction*
22	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Kolaborasi Global dalam Kunjungan GBCI dan CABR: WEGE Perkenalkan Netro Global Collaboration in GBCI and CABR Visit: WEGE Introduced Netro	*Construction*
23	18 September 2025 September 18, 2025	Teknologi Cerdas BAS & CPC di Grha Pertamina, Bukti Inovasi WEGE untuk Masa Depan Smart BAS & CPC Technology at Grha Pertamina, Evidence of WEGE's Innovation for the Future	*Construction*
24	19 September 2025 September 19, 2025	Parsavika: Kolaborasi Inovasi Material dan Modular untuk Masa Depan Berkelanjutan Parsavika: Collaborative Material and Modular Innovation for a Sustainable Future	*Construction*
25	29 September 2025 September 29, 2025	Wamen PU Apresiasi Teknologi Tahan Gempa Gedung Ina-MHEWS BMKG Garapan WEGE Deputy Minister of Public Works Appreciates WEGE's Earthquake-Resistant Technology in BMKG Ina-MHEWS Building	*Construction*

No	Tanggal Date	*Press Release Title*	*Category*
26	30 September 2025 September 30, 2025	WEGE Selesaikan Pekerjaan Struktur *Oncology Centre Building* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan Prosesi Topping Off WEGE Completed the Structural Work on Oncology Center Building at Dr. Soetomo General Hospital Soeradji Tirtonegoro Klaten with Topping Off Ceremony	*Construction*
27	2 Oktober 2025 October 2, 2025	Inovasi PAUD Modular WIKA Gedung Raih Penghargaan CSR 2025 Kategori Pendidikan WIKA Gedung's Modular Early Childhood Education Innovation Won the 2025 CSR Award in the Education Category	CSR
28	13 Oktober 2025 October 13, 2025	Modular WEGE: Inovasi *Off-Site Construction* Menuju Era *Net-Zero* WEGE Modular: Off-Site Construction Innovation Towards the Net-Zero Era	*Construction*
29	15 Oktober 2025 October 15, 2025	WEGE Perkuat Komitmen terhadap Keberlanjutan Bisnis WEGE Strengthens Commitment to Business Sustainability	*Corporate*
30	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Rangkaian Kegiatan CSR WEGE dalam Memperingati HUT ke-17: Berbagi, Berkarya, dan Bangkit Bersama WEGE's Series of CSR Activities to Commemorate its 17th Anniversary: Sharing, Creating, and Rising Together	*Corporate*
31	28 Oktober 2025 October 28, 2025	WEGE Tandatangani Kontrak Kerja Pembangunan Kantor OJK Sumatera Utara WEGE Signed Work Contract for the Construction of North Sumatra OJK Office	*Construction*
32	30 Oktober 2025 October 30, 2025	WEGE Bukukan Pendapatan Rp1,17 Triliun pada Q3-2025, Tetap Jaga Struktur Keuangan yang Sehat WEGE Recorded Rp1.17 Trillion in Revenue in Q3 2025, Maintaining a Healthy Financial Structure	*Corporate*
33	10 November 2025 November 10, 2025	WEGE Mulai Bangun Kantor OJK Sumatera Utara WEGE Began the Construction of North Sumatra OJK Office	*Construction*
34	25 November 2025 November 25, 2025	WEGE Berikan Stigma Modular sebagai Hunian Adaptif dengan Desain Tanpa Batas WEGE Promotes Modular Housing as Adaptive Housing with Limitless Design	*Construction*
35	28 November 2025 November 28, 2025	WEGE Gelar *Public Expose* 2025: Perkuat Transparansi, Adaptasi Bisnis, dan Strategi Permodalan WEGE Held 2025 Public Expose: Strengthening Transparency, Business Adaptability, and Capital Strategy	*Corporate*
36	30 November 2025 November 30, 2025	WEGE Raih Penghargaan Bergengsi CSA Award 2025, Menjadi Perusahaan Infrastruktur Terunggul WEGE Won the Prestigious 2025 CSA Award, Becoming a Leading Infrastructure Company	*Awards*
37	3 Desember 2025 December 3, 2025	WEGE Bangun Mess Transmigrasi Modular di Pulau Rempang WEGE Builds Transmigration Mess Modular Buildings on Rempang Island	*Construction*
38	4 Desember 2025 December 4, 2025	Kejar Target *Net Zero Emission*, WEGE Seimbangkan Emisi Konstruksi Lewat Penanaman Mangrove Achieving Net Zero Emission Target, WEGE Balances Construction Emissions Through Mangrove Planting	CSR
39	7 Desember 2025 December 7, 2025	WEGE, Brand paling Populer di anak Perusahaan BUMN Karya Kategori Jasa Konstruksi & Infrastruktur WEGE, the Most Popular Brand in State-Owned Construction Companies in the Construction & Infrastructure Services Category	*Awards*
40	8 Desember 2025 December 8, 2025	WEGE (KSO) Raih Kontrak Pembangunan Gedung dan Kawasan DPR II di IKN Senilai Rp1,96 Triliun WEGE (KSO) Secured Rp1.96 Trillion Contract for the Construction of DPR II Building and Area in the New Capital City	*Construction*
41	10 Desember 2025 December 10, 2025	Jasmine *Integrated Farming* Binaan WEGE Tembus ProKlim Utama 2025, Siap Melaju ke Kategori Lestari WEGE's Jasmine Integrated Farming Program Reached the Main ProKlim 2025 Selection, Ready to Advance to the Sustainable Category	CSR
42	31 Desember 2025 December 31, 2025	WEGE Hadirkan Bantuan Kemanusiaan dan Hunian Modular untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera WEGE Provided Humanitarian Aid and Modular Housing for Post-Disaster Recovery in Sumatra	CSR
43	31 Desember 2025 December 31, 2025	WEGE Kukuhkan Posisi di Konstruksi Gedung Berkelanjutan WEGE Strengthens Its Position In Sustainable Building Construction	*Corporate*

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Sebagai anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung, teknologi informasi memiliki peran strategis dalam mendukung proses bisnis internal maupun pelaksanaan proyek konstruksi. Ketersediaan sistem teknologi informasi yang andal dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting bagi Perseroan untuk tetap kompetitif di era digital. Oleh karena itu, Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi guna mendukung produktivitas kerja yang optimal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan digitalisasi, Perseroan terus mengoptimalkan penerapan aspek tata kelola teknologi informasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut mengenai tata kelola teknologi informasi dapat dilihat pada bab Tinjauan Pendukung Bisnis dalam laporan tahunan ini.

KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Perseroan menempatkan ketahanan dan keamanan siber sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan dan manajemen risiko untuk memastikan keberlangsungan bisnis serta perlindungan data strategis. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman digital, Perseroan secara konsisten memperkuat sistem keamanan informasi yang terintegrasi, adaptif, dan selaras mengacu ke standar internasional ISO 27001. Kegiatan tersebut dibangun, diimplementasikan, dipantau, ditinjau secara berkala, dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian antara standar keamanan yang diterapkan dengan kebutuhan operasional Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk melindungi data dan privasi pemangku kepentingan melalui penerapan kontrol keamanan yang komprehensif, pengelolaan risiko siber secara proaktif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini diperkuat melalui pelaksanaan *vulnerability assessment* dan penetration testing secara berkala, penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh lini organisasi, serta pengelolaan risiko pihak ketiga untuk memastikan keamanan ekosistem digital secara menyeluruh.

Selain itu, Perseroan menerapkan mekanisme penanganan dan pemulihan insiden keamanan siber untuk memastikan gangguan dapat ditangani secara cepat serta sistem dapat kembali beroperasi secara normal dengan risiko minimal. Upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam membangun sistem digital yang aman, andal, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

As a subsidiary of a state-owned enterprise (SOE) engaged in building construction, information technology plays a strategic role in supporting both internal business processes and the execution of construction projects. The availability of reliable and high-quality information technology systems is a key factor for the Company to remain competitive in the digital era. Therefore, the Company continuously enhances its information technology capacity and capabilities to support optimal work productivity.

In line with the rapid development of digitalization, the Company continues to optimize the implementation of integrated and sustainable information technology governance. Further details regarding IT governance can be found in the Business Support Review chapter of this annual report.

CYBERSECURITY AND RESILIENCE

The Company places cybersecurity and resilience as an integral part of corporate governance and risk management to ensure business continuity and strategic data protection. As the complexity of digital threats increases, the Company consistently strengthens its integrated, adaptive, and aligned information security system, as guided by the international standard ISO 27001. These activities are developed, implemented, monitored, periodically reviewed, and continuously improved to ensure alignment between the applied security standards and the Company's operational needs.

The Company is committed to protecting stakeholder data and privacy through the implementation of comprehensive security controls, proactive cyber risk management, and compliance with applicable regulations. This approach is reinforced through regular vulnerability assessments and penetration testing, strengthening information security awareness across the organization, and managing third-party risks to ensure the security of the digital ecosystem as a whole.

Furthermore, the Company applies a cybersecurity incident handling and recovery mechanism to ensure disruptions can be quickly addressed and the system can return to normal operations with minimal risk. These efforts reflect the Company's commitment to building a secure, reliable, and sustainable digital system as part of creating long-term value for its stakeholders.

Kode Etik
Code of Conduct

Perseroan memiliki komitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara konsisten, salah satunya melalui penerapan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*). Pedoman ini menjadi landasan perilaku bagi seluruh insan Perseroan dalam bertindak dan mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman Etika Perusahaan terakhir kali disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 11 September 2023. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam membangun dan memelihara hubungan yang profesional serta berintegritas dengan konsumen, pemegang saham, pemasok atau rekanan, pemerintah, serta masyarakat di lingkungan operasional Perseroan.

DASAR HUKUM

Penyusunan Pedoman Etika Perseroan berpedoman pada peraturan dan ketentuan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
10. Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
11. Surat Menteri BUMN No S- 35/MBU/91/2020 Tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN;
12. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya;
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

The Company is committed to consistently implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), one of which is through the application of the Company's Code of Conduct. This guideline serves as a behavioral foundation for all Company personnel in acting and making decisions aligned with GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Code of Conduct was last ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors on September 11, 2023. This guidelines serve as a reference in building and maintaining professional and ethical relationships with customers, shareholders, suppliers or partners, the government, and the communities within the Company's operational environment.

LEGAL BASIS

The preparation of the Company's Code of Conduct refers to the following laws and regulations:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption;
3. Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure;
4. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
5. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
6. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committees of Issuers or Public Companies;
7. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
8. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance of Public Companies;
9. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Corporate Governance Guidelines for Public Companies;
10. Financial Services Authority Circular Letter No. 30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
11. Letter of the Minister of SOEs No. S-35/MBU/91/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of Anti-Bribery Management Systems in SOEs;
12. The Company's Articles of Association and its amendments;
13. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;

14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
15. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Pasal 17 ayat 5 mengenai Kode Etik Perseroan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pedoman Etika Perusahaan memuat ketentuan mengenai komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha secara beretika serta menjaga keseimbangan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, Perseroan berpedoman pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 dan No. DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tanggal 15 Januari 2025.

Adapun beberapa aspek kebijakan yang diatur dalam Pedoman Etika Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan Perseroan Mengenai Etika dan Perilaku
   a. Integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerjaan;
   b. Manajemen Risiko;
   c. Sistem Pemasaran;
   d. Sistem Pengadaan dan Kontrak Kerja;
   e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai;
   f. Pengelolaan Lingkungan;
   g. Keterlibatan dalam Politik;
   h. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi;
   i. Benturan Kepentingan;
   j. Etika usaha Anti KKN dan Kebijakan tentang Larangan Suap;
   k. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan, dan Sumbangan yang tidak dibenarkan;
   l. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi;
   m. Keterbukaan Informasi; Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya;
   n. Perlindungan Aset Perseroan;
   o. Integritas Keuangan;
   p. *Insider Trading*;
   q. Penggunaan Aplikasi Sosial Media Di Kantor;
   r. Integritas Penggunaan Sosial Media dan Citra Perusahaan;
   s. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
2. Etika Dengan Pemangku Kepentingan
   a. Hubungan dengan Pemegang Saham;
   b. Hubungan dengan Kreditur;
   c. Hubungan dengan Pemberi Kerja (Klien);
   d. Hubungan dengan Rekanan;
   e. Hubungan dengan Pengguna Akhir;
   f. Hubungan dengan Pegawai (Industrial);
   g. Hubungan dengan Pejabat Negara;
   h. Hubungan dengan Masyarakat.
3. Mekanisme Pelaporan dan Penegakan Etika;
4. Sistem Pelaporan dan Penegakan Etika dan Perilaku;
5. Mekanisme Penegakan Kepatuhan terhadap *Code Of Conduct*.

14. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs; and
15. Articles of Association of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Article 17 paragraph 5 regarding the Company's Code of Conduct.

KEY PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct outlines the Company's commitment to conducting business ethically while maintaining a balance between the Company's interests and those of its stakeholders. In its implementation, the Company refers to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 and No. DK.01.01/A.KOM.00001.WEGE/2025 dated January 15, 2025 concerning the Code of Conduct of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

The policy aspects regulated in the Code of Conduct include:

1. Company Policies on Ethics and Conduct
   a. Integrity in business activities and work;
   b. Risk Management;
   c. Marketing Systems;
   d. Procurement and Contracting Systems;
   e. Employee Occupational Health and Safety;
   f. Environmental Management;
   g. Political Involvement;
   h. False Statements, False Claims, and Conspiracy;
   i. Conflict of Interest;
   j. Anti-Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) Ethics and Anti-Bribery Policy;
   k. Policy on Improper Gifts, Benefits, and Donations;
   l. Company Data and Confidentiality of Information;
   m. Information Disclosure; Fraud and Similar Misconduct;
   n. Protection of Company Assets;
   o. Financial Integrity;
   p. Insider Trading;
   q. Use of Social Media Applications in the Workplace;
   r. Integrity in Social Media Usage and Corporate Image;
   s. Intellectual Property Rights (IPR).
2. Ethics with Stakeholders
   a. Relations with Shareholders;
   b. Relations with Creditors;
   c. Relations with Employers (Clients);
   d. Relations with Business Partners;
   e. Relations with End Users;
   f. Relations with Employees (Industrial Relations);
   g. Relations with Government Officials;
   h. Relations with the Community.
3. Reporting and Enforcement Mechanisms
4. Reporting System and Enforcement of Ethics and Conduct;
5. Mechanism for Enforcing Compliance with the Code of Conduct.

TIM PENGADUAN PELANGGARAN

Adapun susunan Tim Pengaduan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Tim Kepatuhan
   Tim Kepatuhan merupakan tim yang dibentuk oleh Perseroan dan bertanggung jawab untuk menerima, menelaah, serta menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap *Code of Conduct*, termasuk menyampaikan hasil telaah awal kepada Tim Pencari Fakta.
2. Tim Pencari Fakta
   Tim Pencari Fakta adalah tim yang dibentuk atau direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan dan disetujui oleh Direksi untuk melakukan penelusuran serta investigasi atas indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan Code of Conduct. Tim ini dapat terdiri atas tenaga ahli yang independen, baik dari dalam maupun luar fungsi/organisasi, sesuai kewenangan Direksi.
3. Majelis Kehormatan Pegawai
   Majelis Kehormatan Pegawai merupakan pejabat dan/atau pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan aturan serta pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan atau diduga melanggar peraturan perusahaan dan/atau *Code of Conduct*.

VIOLATION REPORTING TEAM

The composition of the Violation Reporting Team is as follows:

1. Compliance Team
   The Compliance Team is established by the Company and is responsible for receiving, reviewing, and following up on reports related to violations and/or deviations from the Code of Conduct, including submitting initial review results to the Fact-Finding Team.
2. Fact-Finding Team
   The Fact-Finding Team is established or recommended by the Compliance Team and approved by the Board of Directors to conduct investigations into alleged violations of the Code of Conduct. This team may consist of independent experts from within or outside the organization, in accordance with the authority of the Board of Directors.
3. Employee Honor Council
   The Employee Honor Council consists of officials and/or employees authorized to enforce regulations and conduct examinations of employees reported or suspected of violating company regulations and/or the Code of Conduct.

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN KODE ETIK OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bagian dari entitas anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pedoman Etika dan Perilaku menjadi landasan utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, sebagai Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pedoman tersebut juga merupakan salah satu elemen penting dalam pemenuhan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku memiliki peran strategis dalam menjaga reputasi Perseroan, khususnya terkait integritas, keadilan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap sesama, yang merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan bisnis Perseroan.

Pemberlakuan pedoman tersebut ditetapkan secara resmi melalui peraturan Direksi dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai saluran komunikasi perusahaan, termasuk situs web resmi dan media komunikasi internal, sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami komitmen Perseroan dalam menerapkan standar etika dan perilaku bagi seluruh jajaran perusahaan.

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Kode Etik Perseroan, pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, komitmen terhadap kepatuhan Kode Etik juga diwujudkan melalui penandatanganan surat pernyataan komitmen oleh setiap insan Perseroan sebagai bentuk pakta integritas untuk senantiasa mematuhi Kode Etik Perusahaan.

STATEMENT OF COMMITMENT TO IMPLEMENTING THE CODE OF CONDUCT BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As a subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE), the Code of Conduct serves as the primary foundation for implementing good corporate governance. Furthermore, as a Public Company listed on the Indonesia Stock Exchange, the Code of Conduct is a crucial element in meeting the ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment.

Compliance with the Code of Conduct plays a strategic role in maintaining the Company's reputation, particularly regarding integrity, fairness, accountability, and respect for others, which are the primary foundations for the Company's business sustainability.

The implementation of these guidelines is officially stipulated through a Board of Directors regulation and has been disseminated to all employees through various company communication channels, including the official website and internal communication media, so that all stakeholders understand the Company's commitment to implementing ethical and behavioral standards across the company.

In the event of a violation or non-compliance with the Company's Code of Conduct, the perpetrator will be subject to sanctions commensurate with the severity of the violation. In addition, the commitment to compliance with the Code of Conduct is also demonstrated through the signing of a statement of commitment by each Company employee as a form of integrity pact to always comply with the Company's Code of Conduct.



PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT/COC)

STATEMENT OF COMMITMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT (COC)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK







Lembar Pengesahan Pedoman Etika dan Perilaku

Approval Sheet for the Code of Conduct

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Jakarta, 15 Januari 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors

Joseph Prajogo
Ph. Komisaris Utama

Hadian Pramudita
Direktur Utama

Suli Fatimah
Komisaris

Hartanto Karli Raharjo
Direktur Keuangan, Human Capital & Manajemen Risiko

Denis H. Sumadilaga
Komisaris

Tono Dwihapsoro
Direktur QHSE & Pemasaran

Taufan Gestoro
Komisaris Independen

Bagus Tri Setyana
Direktur Operasi I

Dwi Purnomo
Direktur Operasi II

BENTUK SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKAN

Kode Etik Perseroan berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh karyawan hingga tingkat Direksi. Agar seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, Perseroan secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi, implementasi, serta evaluasi atas penerapan Kode Etik. Pemantauan implementasi Kode Etik dilakukan oleh Tim Kepatuhan GCG yang diketuai oleh Direktur yang bertanggung jawab atas implementasi GCG di lingkungan Perseroan.

Perseroan telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan melalui beberapa media, antara lain:
1. Situs web Perseroan;
2. Surat Keputusan Bersama;
3. Aplikasi MyWG Mobile;
4. Aplikasi WhatsApp karyawan pada tanggal 14 Februari 2025.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan tercipta pemahaman, kesadaran, serta kontribusi aktif seluruh jajaran dan insan Perseroan dalam membangun proses bisnis dan budaya kerja yang mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta etika bisnis. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka, tetapi juga melalui berbagai media komunikasi internal dan sarana keterbukaan informasi yang tersedia di lingkungan Perseroan.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:
1. Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh atasan langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, berdasarkan laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
2. Direksi memberikan arahan terkait tindakan pembinaan, pemberian sanksi disiplin, dan/atau tindakan lain yang diperlukan, termasuk langkah-langkah pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan kerja masing-masing.
3. Sanksi bagi anggota Direksi yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi anggota Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pemegang Saham.
5. Apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau pemangku kepentingan lainnya, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana, maka dapat diteruskan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT EFFORTS OF THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct applies without exception to all employees up to the Board of Directors level. To ensure that all provisions contained in the Code of Conduct are understood and optimally implemented, the Company continuously conducts socialization, implementation, and evaluation activities for the Code of Conduct. Monitoring of the Code of Conduct implementation is carried out by the GCG Compliance Team, chaired by the Director responsible for GCG implementation within the Company.

The Company has socialized the Code of Conduct to all employees through several media, including:
1. The Company's website;
2. Joint Decree;
3. MyWG Mobile application;
4. The employee WhatsApp application on February 14, 2025.

Through these socialization activities, it is hoped that understanding, awareness, and active contributions from all levels and employees of the Company will be fostered in building business processes and a work culture that prioritizes the implementation of good corporate governance and business ethics. Socialization is carried out not only through face-to-face forums, but also through various internal communication media and information disclosure channels available within the Company.

SANCTIONS FOR CODE OF CONDUCT VIOLATIONS

Any employee of the Company found to have committed a violation will be subject to sanctions in accordance with the Company's internal policies and applicable laws and regulations. The provisions for imposing sanctions for violations of the Code of Ethics are as follows:
1. Sanctions for employees who commit violations are determined by their immediate superiors or the Board of Directors, according to the severity of the violation, based on reports of violations committed by the employee concerned.
2. The Board of Directors provides direction regarding coaching actions, disciplinary sanctions, and/or other necessary actions, including preventative measures that must be implemented by their immediate superiors in their respective work environments.
3. Sanctions for members of Board of Directors who commit violations are determined by the Board of Commissioners.
4. Sanctions for members of Board of Commissioners who commit violations are determined by the Shareholders.
5. If violations are committed by business partners or other stakeholders, they will be subject to the provisions stipulated in the applicable cooperation agreement. If the violation is related to a criminal offense, it can be forwarded to the authorities in accordance with applicable regulations.

JENIS SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan Serikat Karyawan WEGE, terhadap karyawan yang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan melakukan pelanggaran, Perseroan berhak menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yang dapat meliputi:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis I, II, dan III;
3. Pemotongan gaji;
4. Penurunan grade;
5. Pemberhentian dari jabatan;
6. Pemutusan hubungan kerja.

TYPES OF SANCTIONS FOR EACH TYPE OF VIOLATION REGULATED IN THE CODE OF CONDUCT

In accordance with the provisions of the Collective Labor Agreement between the Company and WEGE Employees Union, the Company reserves the right to impose sanctions on employees who have undergone an investigation and are found to have committed a violation, depending on the severity of the violation. These sanctions may include:

1. Verbal warning;
2. Written warnings I, II, and III;
3. Salary deduction;
4. Demotion;
5. Dismissal from office;
6. Termination of employment.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola dan kepatuhan, Perseroan secara berkala mengungkapkan metrik tahunan terkait penanganan isu pelanggaran, termasuk perlindungan data pribadi (*privacy data*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), pencucian uang (*money laundering*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Pengungkapan ini mencakup jumlah laporan yang diterima, kasus yang terverifikasi, tindakan yang diambil, serta tingkat pemenuhan standar waktu penyelesaian (*service level agreement*/SLA), sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED IN THE LAST FISCAL YEAR

As part of the Company's commitment to strengthening governance and compliance, the Company regularly discloses annual metrics related to the handling of violation issues, including data privacy, conflicts of interest, money laundering, and insider trading. This disclosure includes the number of reports received, verified cases, actions taken, and the level of compliance with service level agreement (SLA) standards, as a form of transparency and accountability to stakeholders.

Klausul 8 Operasi, meliputi: Clause 8 Operations, including	
• Klausul 8.1 – Perencanaan dan Pengendalian Operasi Organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, ketentuan sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. • Klausul 8.2 – Uji Kelayakan Bila penilaian risiko penyuapan di organisasi dilaksanakan sesuai klausul 4.5, telah dinilai risiko penyuapan di atas batas rendah yang berhubungan dengan: a. Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas; b. Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis; atau c. Kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu (lihat klausul 7.2.2.2). • Klausul 8.3 – Pengendalian Keuangan Organisasi harus menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan. • Klausul 8.4 – Pengandalian Non Keuangan Organisasi harus menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi. • Klausul 8.5 – Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang Dikendalikan Organisasi dan Rekan Bisnisnya a. Klausul 8.5.1: Organisasi harus menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lainnya yang dikendalikan untuk: i) Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan; atau ii) Menerapkan pengendalian anti penyuapan mereka sendiri. b. Klausul 8.5.2: Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh organisasi yang penilaian risiko penyuapan (lihat klausul 4.5) atau uji kelayakan (lihat klausul 8.2) telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah, dan dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan, organisasi harus menerapkan prosedur sebagai berikut: i) Organisasi harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan; ii) Di mana rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada:	**Klausul 8 – Diterapkan** Clause 8 - Applied

- Bila dapat diterapkan, organisasi harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan, atau
- Jika tidak dapat diterapkan, mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis ini (lihat klausul 4.5 dan 8.2) dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut (lihat klausul 8.3, 8.4 dan 8.5).

- Klausul 8.6 – Komitmen Anti Penyuapan
  Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan, hal itu sedapat mungkin:
  a. Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan;
  b. Organisasi mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.
- Klausul 8.7 – Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan dan Keuntungan Serupa
  Organisasi harus menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, di mana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan.
- Klausul 8.8 – Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan
  Ketika uji kelayakan (lihat klausul 8.2) dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan agar organisasi dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan), sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016.
- Klausul 8.9 – Meningkatkan Kepedulian
  Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Organisasi juga harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.
- Klausul 8.10 – Investigasi dan Penanganan Penyuapan
  Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. Organisasi dapat menunjuk rekan bisnis untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.

- Clause 8.1 – Planning and Controlling Operations
  The organization shall plan, implement, review, and control the processes necessary to meet the requirements of the anti-bribery management system and to implement the actions specified in clause 6.1, as set out in ISO 37001:2016.
- Clause 8.2 – Due Diligence
  When a bribery risk assessment of the organization is carried out in accordance with clause 4.5, the bribery risk has been assessed as being above the low threshold in relation to:
  a. Specific categories of transactions, projects, or activities;
  b. Planned or ongoing relationships with specific categories of business partners; or
  c. Specific categories of personnel in specific positions (see clause 7.2.2.2).
- Clause 8.3 – Financial Controls
  The organization shall implement financial controls that manage the risk of bribery.
- Clause 8.4 – Non-Financial Controls
  The organization shall implement non-financial controls to manage bribery risks related to areas such as procurement, operations, sales, commercial, human resources, legal and regulatory activities.
- Clause 8.5 – Implementation of Anti-Bribery Controls Controlled by the Organization and its Business Associates
  a. Clause 8.5.1: The organization shall implement the procedures required for other organizations it controls to:
     i) Implement an anti-bribery management system; or
     ii) Implement their own anti-bribery controls.
  b. Clause 8.5.2: With respect to business associates not controlled by the organization whose bribery risk assessment (see clause 4.5) or due diligence (see clause 8.2) has identified a bribery risk above the low threshold, and where anti-bribery controls implemented by the business associate would help mitigate the relevant bribery risk, the organization shall implement the following procedures:
     i) The organization shall determine whether the business associate has anti-bribery controls in place that manage the relevant bribery risk;
     ii) Where a business associate does not have anti-bribery controls, or it is not possible to verify whether controls are in place:
        - Where practicable, the organization shall require the business associate to implement anti-bribery controls in relation to the relevant transaction, project, or activity; or
        - Where practicable, require the business associate to implement anti-bribery controls. This shall be a factor taken into account in evaluating the bribery risks associated with this business associate (see clauses 4.5 and 8.2) and how the organization manages those risks (see clauses 8.3, 8.4, and 8.5).
- Clause 8.6 – Anti-Bribery Commitment
  For business associates that pose a bribery risk above the low threshold, the organization shall implement procedures that require, to the extent practicable:
  a. The business associate commits to preventing bribery by, on behalf of, or for the benefit of the business associate in relation to the relevant transaction, project, activity, or relationship;
  b. The organization is able to terminate relationships with business associates where bribery has been offered by, on behalf of, or for the benefit of the business associate in connection with the relevant transaction, project, activity, or relationship
- Clause 8.7 – Gifts, Favors, Donations, and Similar Advantages
  The organization shall implement procedures designed to prevent the offer, provision, or acceptance of gifts, favors, donations, and similar advantages where the offer, provision, or acceptance constitutes, or could reasonably be considered, bribery.

- Clause 8.8 – Managing Inadequate Anti-Bribery Controls
  When due diligence (see clause 8.2) performed on a specific transaction, project, activity, or relationship with a business associate determines that the bribery risks cannot be managed by existing anti-bribery controls, and the organization is unable or unwilling to implement additional or enhanced anti-bribery controls or take other appropriate action (such as changing the nature of the transaction, project, activity, or relationship to enable the organization to manage the relevant bribery risks), as specified in ISO 37001:2016.
- Clause 8.9 – Raising Awareness
  The organization shall implement the procedures as outlined in ISO 37001:2016. The organization shall also ensure that all personnel are aware of, are able to use, and are aware of their rights and protections under the procedures.
- Clause 8.10 – Bribery Investigations and Responses
  The organization shall implement the procedures as outlined in ISO 37001:2016. Investigations shall be conducted by, and reported to, personnel not within the role or function being investigated. The organization may appoint a business partner to conduct the investigation and report the results to personnel not within the role or function being investigated.

Klausul 9 – Evaluasi Kinerja, meliputi:
Clause 9 – Performance Evaluation, including:

- Klausul 9.1 – Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Organisasi harus menentukan:
  - Apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur;
  - Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan;
  - Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid;
  - Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
  - Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi;
  - Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.

  Klausul 9.2.1: Organisasi harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen anti penyuapan:
  a. Memenuhi untuk:
     i) Persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen anti penyuapan;
     ii) Persyaratan dari standar ini.
  b. Secara efektif diterapkan dan dipelihara.

  Klausul 9.2.2: Organisasi harus:
  a. Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memeliharan program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya;
  b. Menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit;
  c. Memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari proses audit;
  d. Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak, jika sesuai, dewan pengarah (jika ada);
  e. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.

  Klausul 9.2.3: Audit harus wajar, proporsional dan berbasis risiko. Audit ini harus terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur, pengendalian dan system untuk:
  a. Penyuapan atau dugaan penyuapan;
  b. Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
  c. Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku di organisasi; dan
  d. Kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuapan.

  Klausul 9.2.4: Untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari program audit, organisasi harus memastikan audit dilaksanakan oleh:
  a. Fungsi yang mandiri atau penerapan personel atau yang ditunjuk untuk proses ini; atau
  b. Fungsi kepatuhan anti penyuapan (kecuali lingkup audit mencakup evaluasi system manajemen anti penyuapan itu sendiri, atau pekerjaan serupa dimana fungsi kepatuhan anti penyuapan bertanggung jawab); atau
  c. Orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain dari yang sedang diaudit; atau
  d. Pihak ketiga yang sesuai; atau
  e. Suatu grup yang terdiri dari a) sampai d). Organisasi harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerjanya sendiri.
- Klausul 9.3 – Tinjauan Manajemen
  Klausul 9.3.1: Tinjauan Manajemen Puncak. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuapan organisasi, pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan.

  Tinjauan manajemen puncak harus mencakup pertimbangan dari:
  a. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
  b. Perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
  c. Informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam:
     i) Ketidak sesuaian dan tindakan korektif;
     ii) Hasil pemantauan dan pengukuran;
     iii) Hasil audit;
     iv) Laporan penyuapan;
     v) Penyelidikan;
     vi) Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi.
        - Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan;
        - Peluang peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan, seperti yang diacu pada klausul 10.2.

  Keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan keberlanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyuapan.

Klausul 9 - Diterapkan
Clause 9 - Applied

Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada dewan pengarah (jika ada).

Klausul 9.3.2: Tinjauan Dewan Pengarah.
Dewan pengarah (jika ada) harus melakukan tinjauan secara berkala sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh dewan pengarah.
Klausul 9.4 – Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan:

a. Cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi;
b. Diterapkan secara efektif.

Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus melaporkan pada rentang waktu terencana dan pada panitia tidak tetap, jika sesuai, kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak, atau komite yang sesuai dari dewan pengarah atau manajemen puncak, pada kecukupan dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan, termasuk hasil investigasi dan audit.

- Clause 9.1 – Monitoring, Measurement, Analysis, and Evaluation The organization shall determine:
  - What needs to be monitored and measured;
  - Who is responsible for monitoring;
  - Methods for monitoring, measurement, analysis, and evaluation, if applicable, to ensure valid results;
  - When monitoring and measurement should be conducted;
  - When the results of monitoring and measurement should be analyzed and evaluated;
  - To whom and how this information should be reported

  Clause 9.2.1: The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the anti-bribery management system
  a. Meets:
     i) The organization's own requirements for an anti-bribery management system;
     ii) The requirements of this standard.
  b. Is effectively implemented and maintained.

  Clause 9.2.2: The organization shall:
  c. Plan, establish, implement, and maintain an audit program, including frequency, methods, responsibilities, planning requirements, and reporting, which shall take into account the importance of the process and the results of previous audits;
  d. Determine the audit criteria and scope for each audit;
  e. Select competent auditors and conduct audits to ensure the objectivity and impartiality of the audit process;
  f. Ensure that audit results are reported to relevant management, the anti-bribery compliance function, top management, and, where appropriate, the governing board (if any);
  g. Retain documented information as evidence of the implementation of the audit program and audit results.

  Clause 9.2.3: Audits shall be reasonable, proportionate, and risk-based. These audits shall consist of internal audit processes or other procedures that review procedures, controls, and systems for:
  a. Bribery or suspected bribery;
  b. Violations of the anti-bribery policy or anti-bribery management system requirements;
  c. Failure of business partners to comply with the organization's applicable anti-bribery requirements; and
  d. Weaknesses in, or opportunities for improvement in, the anti-bribery management system.

  Clause 9.2.4: To ensure the objectivity and impartiality of the audit program, the organization shall ensure that audits are carried out by:
  a. An independent function or personnel implementing or designated for this process; or
  b. The anti-bribery compliance function (unless the scope of the audit includes an evaluation of the anti-bribery management system itself, or similar work for which the anti-bribery compliance function is responsible); or
  c. An appropriate person from a department or function other than the one being audited; or
  d. An appropriate third party; or
  e. A group consisting of a) through d). The organization shall ensure that no auditor audits its own scope of work.
- Clause 9.3 – Management Review

  Clause 9.3.1: Top Management Review. Top management shall review the organization's anti-bribery management system, at planned intervals, to ensure its continuity, suitability, adequacy, and effectiveness.

  The top management review shall include consideration of:
  a. The status of actions from previous management reviews;
  b. Changes in internal and external issues relevant to the anti-bribery management system;
  c. Information on the performance of the anti-bribery management system, including trends in:
     i) Non-conformities and corrective actions;
     ii) Monitoring and measurement results;
     iii) Audit results;
     iv) Bribery reports;
     v) Investigations;
     vi) The nature and extent of the bribery risks faced by the organization;
        - The effectiveness of actions taken to address bribery risks
        - Opportunities for sustainable improvement of the anti-bribery management system, as referred to in clause 10.2.

  The output of the top management review shall include decisions regarding sustainable improvement opportunities and any need for changes to the anti-bribery management system.

A summary of the results of the top management review shall be reported to the governing board (if any). Clause 9.3.2: Governing Board Review. The governing board (if any) shall conduct a periodic review of the anti-bribery management system based on information provided by top management and the anti-bribery compliance function and any other information requested or obtained by the governing board. Clause 9.4 – Review of the Anti-Bribery Compliance Function The anti-bribery compliance function must continuously assess whether the anti-bribery management system: a. Cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi; b. Diterapkan secara efektif. The anti-bribery compliance function must report at planned intervals and to a standing committee, if appropriate, to the board (if any) and top management, or an appropriate committee of the board or top management, on the adequacy and implementation of the anti-bribery management system, including the results of investigations and audits.	
Klausul 10 - Peningkatan, meliputi: Clause 10 - Improvement, including:	
• Klausul 10.1 – Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Ketika ketidak sesuaian terjadi, organisasi harus: a. Segera bereaksi terhadap ketidak sesuaian, dan jika berlaku: i) Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; ii) Sepakat terhadap konsekuensi. b. b) Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian, agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain, dengan: i) Meninjau ketidak sesuaian; ii) Menentukan penyebab ketidak sesuaian; iii) Menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau dapat secara potensial terjadi. iv) Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan; v) Meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil; vi) Membuat perubahan terhadap sistem manajemen anti penyuapan, bila diperlukan. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidak sesuaian yang ditemui. • Klausul 10.2 – Peningkatan Berkelanjutan Organisasi harus secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. • Clause 10.1 – Nonconformities and Corrective Action When a nonconformity occurs, the organization shall: a. Respond promptly to the nonconformity, and, if applicable, shall: i) Take action to control and correct it; ii) Agree on the consequences. b. Evaluate the need for action to eliminate the cause of the nonconformity, so that it does not recur or occur elsewhere, by: i) Reviewing the nonconformity; ii) Determining the cause of the nonconformity; iii) Determining if similar nonconformities have existed, or could potentially occur. iv) Implement any necessary action; v) Review the effectiveness of any corrective action taken; vi) Make changes to the anti-bribery management system, if necessary. Corrective action shall be appropriate to the effect of the nonconformity identified. • Clause 10.2 – Continual Improvement The organization shall continually improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the anti-bribery management system.	**Klausul 10 - Diterapkan** Clause 10 - Applied

TABEL METRIK PELANGGARAN TAHUNAN 2025 METRICS OF VIOLATION IN 2025

Area Kepatuhan Compliance Area	Jumlah Kasus Dilaporkan Number of Cases Reported	Kasus Terbukti (*Substantiated*) Substantiated Cases	Tindakan yang Diambil Actions Taken	SLA Penyelesaian (hari) Resolution SLA (days)
Privacy Data	0	0	0	0
Conflict of Interest	0	0	0	0
Money Laundering	0	0	0	0
Insider Trading	0	0	0	0

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menemukan adanya kasus pelanggaran yang terverifikasi (*zero case*) pada aspek *Privacy Data, Conflict of Interest, Money Laundering*, maupun *Insider Trading*. Capaian ini mencerminkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, budaya kepatuhan, serta komitmen seluruh insan Perseroan dalam menjunjung tinggi integritas, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan terus memperkuat mekanisme pengawasan, sosialisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan standar tata kelola dan kepatuhan tetap terjaga secara berkelanjutan.

Throughout 2025, the Company did not identify any verified cases (zero cases) in the areas of Data Privacy, Conflict of Interest, Money Laundering, or Insider Trading. This achievement reflects the effectiveness of the implementation of internal control systems, a strong compliance culture, and the commitment of all Company People to uphold integrity, business ethics, and compliance with applicable laws and regulations. The Company will continue to strengthen its supervision mechanisms, policy dissemination, and human capital capacity development to ensure that governance and compliance standards are consistently maintained.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees

KEBIJAKAN KOMPENSASI BERBASIS SAHAM (MSOP/ESOP)

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum menerapkan program kompensasi jangka panjang, baik melalui Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Option Program*/MSOP) maupun Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employees Stock Option Program*/ESOP). Seluruh kepemilikan saham Perusahaan saat ini sepenuhnya berada pada Pemerintah Republik Indonesia.

STOCK-BASED COMPENSATION POLICY (MSOP/ESOP)

As of the end of 2025, the Company has not implemented any long-term compensation programs, either through the Management Stock Option Program (MSOP) or the Employee Stock Option Program (ESOP). All of the Company's shares are currently fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

KEBIJAKAN PENGHARGAAN/KOMPENSASI YANG MEMPERHITUNGKAN KINERJA PERUSAHAAN JANGKA PANJANG

Perseroan memandang bahwa kebijakan penghargaan dan kompensasi memiliki peran penting dalam mendorong kinerja berkelanjutan serta meningkatkan keterikatan pegawai terhadap tujuan jangka panjang perusahaan.

Dalam lingkup Grup WIKA, telah terdapat skema penghargaan jangka panjang berupa pemberian saham bonus kepada pegawai. Namun demikian, hingga saat ini Perseroan belum mengimplementasikan skema kompensasi jangka panjang serupa bagi pegawai di lingkungan WIKA Gedung.

Ke depan, Perseroan akan terus mengkaji pengembangan skema penghargaan yang lebih komprehensif guna mendukung retensi talenta dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

REWARD/COMPENSATION POLICY BASED ON LONG-TERM COMPANY PERFORMANCE

The Company believes that reward and compensation policies play a critical role in driving sustainable performance and enhancing employee engagement with the company's long-term goals.

Within WIKA Group, a long-term reward scheme exists, providing employees with bonus shares. However, to date, the Company has not implemented a similar long-term compensation scheme for employees within WIKA Gedung.

Going forward, the Company will continue to review the development of a more comprehensive reward scheme to support talent retention and sustainable performance improvement.

Kebijakan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership Policy of Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi terkait kepemilikan serta setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan diatur dalam Board Manual Perseroan. Berdasarkan kebijakan tersebut, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan maupun perubahan kepemilikan saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan internal tersebut, setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan diwajibkan menyampaikan laporan kepemilikannya kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Namun demikian, pada tahun buku 2025 tidak terdapat anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

The policy regarding the obligation of members of Board of Directors and Board of Commissioners to disclose information related to their share ownership and any changes in ownership of the Company's shares is regulated in the Company's Board Manual. Based on this policy, each member of Board of Directors and Board of Commissioners is required to report their share ownership and any changes therein no later than 3 (three) working days after such ownership or change occurs.

In accordance with these internal provisions, each member of Board of Directors and Board of Commissioners who owns shares in the Company is required to submit a report of such ownership within a maximum of 3 (three) working days. However, during the 2025 fiscal year, none of the members of Board of Directors or Board of Commissioners held shares in the Company, either directly or indirectly.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti-Bribery Management System (ABMS)

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan perusahaan, Perseroan merancang dan menerapkan mekanisme untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko penyuapan, sekaligus mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi terjadinya praktik penyuapan.

Penerapan mekanisme tersebut merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), serta menegakkan Kode Etik *(Code of Conduct)* melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang efektif dan berkelanjutan.

In order to enhance stakeholder trust, particularly in relation to the efforts to prevent and eradicate corruption, collusion, and nepotism within the Company, the Company has designed and implemented mechanisms to identify and evaluate bribery risks, as well as to prevent, detect, and respond to potential bribery practices.

The implementation of these mechanisms reflects the Company's commitment to complying with all applicable laws and regulations, conducting business activities based on Good Corporate Governance (GCG) principles, and enforcing the Code of Conduct through the effective and sustainable implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS).

DASAR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Implementasi dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal Perseroan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan sebagian ketentuannya telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Surat Menteri BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;
5. Pedoman SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan;
6. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
7. Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Nomor WGGEA-PM-02 yang mulai diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2024; dan

BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of the Anti-Bribery Management System (ABMS) within the Company refers to applicable laws and regulations as well as internal Company policies, including:

1. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3874), as amended by Law No. 20 of 2001, and Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as last amended by Law No. 19 of 2019, and some of its provisions have been revoked through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code;
2. Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions for the Prevention and Eradication of Corruption;
3. Letter of the Minister of SOEs No. S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of Anti-Bribery Management Systems in SOEs as part of Presidential Regulation No. 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention;
4. Letter of the Minister of SOEs No. S-17/S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 concerning ISO 37001 Certification for Anti-Bribery Management Systems in SOEs;
5. SNI ISO 37001:2016 Guidelines on Anti-Bribery Management Systems – Requirements with Guidance for Use;
6. Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 dated May 21, 2024 concerning the Organizational Structure of the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001:2016);
7. Anti-Bribery Management System (ABMS) Procedure No. WGGEA-PM-02, effective October 28, 2024; and

8. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2024. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada standar internasional SNI ISO 37001:2016 sebagai pedoman utama, yang merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjunjung tinggi prinsip integritas serta mencegah segala bentuk penyuapan di seluruh lini kegiatan usaha.

Dalam implementasinya, Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melarang dan mencegah segala bentuk penyuapan yang dilakukan oleh dan/atau kepada karyawan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan SNI ISO 37001:2016 dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyuapan dan korupsi, serta melibatkan seluruh pegawai dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan penyuapan melalui proses peningkatan berkelanjutan;
3. Menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan, mendorong pelaporan yang aman tanpa rasa takut terhadap pembalasan, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan maupun pemangku kepentingan; dan
4. Menetapkan kewenangan serta kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, termasuk pengaturan konsekuensi atas setiap ketidaksesuaian terhadap kebijakan anti penyuapan.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk secara berkelanjutan melakukan peningkatan dan pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta persyaratan lain yang berlaku.

8. The Anti-Bribery Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM POLICY

The Company has established an Anti-Bribery Management System (ABMS) Policy ratified on December 18, 2024. This policy is developed in reference to the international standard SNI ISO 37001:2016 as the primary guideline, reflecting the Company's commitment to upholding integrity and preventing all forms of bribery across its business operations.

In its implementation, the Company is committed to fostering a clean and integrity-driven organization and supporting anti-corruption efforts through the following measures:

1. Prohibiting and preventing all forms of bribery conducted by and/or directed toward employees of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
2. Implementing the Anti-Bribery Management System in accordance with SNI ISO 37001:2016 requirements by complying with all applicable laws and regulations related to bribery and corruption, while involving all employees in prevention, detection, and handling efforts through continuous improvement processes;
3. Providing a framework for establishing, reviewing, and achieving anti-bribery objectives, encouraging secure reporting without fear of retaliation, and enhancing trust and satisfaction among customers and stakeholders; and
4. Establishing the authority and independence of the Anti-Bribery Compliance Function, including defining consequences for any non-compliance with anti-bribery policies.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk continuously enhances and develops its Anti-Bribery Management System based on the principles of Good Corporate Governance, applicable laws and regulations, and other relevant requirements.

Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Anti-Bribery Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 tanggal 21 Mei 2024.

The organizational structure of the Anti-Bribery Management System (ABMS) of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk was established based on the Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. SK.01.01/A.DIR.WG.06516/2024 dated May 21, 2024.

Adapun struktur organisasi SMAP Perseroan adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Company's ABMS is as follows:



Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perseroan mengacu pada standar SNI ISO 37001:2016 yang mencakup seluruh aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Implementasi SMAP dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi, baik pada tingkat strategis maupun operasional, menerapkan prinsip-prinsip anti penyuapan secara efektif dan berkelanjutan.

The scope of the Anti-Bribery Management System (ABMS) implementation within the Company refers to the SNI ISO 37001:2016 standard, which covers all of the Company's business and operational activities. The ABMS is designed to ensure that all organizational functions, both at strategic and operational levels, implement anti-bribery principles effectively and sustainably.

Adapun ruang lingkup implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan meliputi klausul-klausul utama sebagai berikut:

The scope of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) implementation within the Company includes the following key clauses:

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
1. Klausul 4 – Konteks Organisasi, meliputi: a. Klausul 4.1 – Memahami Organisasi dan Konteksnya Organisasi harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuannya dan yang dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari sistem manajemen anti penyuapan. Isu ini akan meliputi, tanpa Batasan, faktor berikut: i) Ukuran, struktur dan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dari organisasi; ii) Lokasi dan sektor dimana organisasi itu beroperasi atau antisipasi pengoperasian; iii) Sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi organisasi; iv) Model bisnis organisasi; v) Entitas di mana organisasi mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap organisasi; vi) Rekan bisnis organisasi; vii) Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat public; viii) Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas profesional. b. Klausul 4.2 – Memahami Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Organisasi harus menentukan: i) Pemangku kepentingan yang relevan terhadap sistem manajemen anti penyuapan; ii) Persyaratan yang relevan dari pemangku kepentingan. c. Klausul 4.3 – Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Anti Penyuapan Organisasi harus menentukan batas dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan untuk menetapkan lingkupnya. Ketika menentukan lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan: i) Isu internal dan eksternal yang dimaksud dalam klausul 4.1; ii) Persyaratan yang dimaksud dalam klausul 4.2; iii) Hasil dari penilaian risiko penyuapan yang dimaksud dalam klausul 4.5. d. Klausul 4.4 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, dan jika diperlukan, meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan standar ini. Sistem manajemen anti penyuapan harus memuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi terhadap penyuapan. e. Klausul 4.5 – Penilaian Risiko Penyuapan, meliputi: i) Klausul 4.5.1: Organisasi harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur, yang harus: • Mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi yang wajar untuk antisipasi faktor yang tercantum pada klausul 4.1. • Menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi; • Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai. ii) Klausul 4.5.2: Organisasi harus menetapkan kriteria untuk mengecaluasi tingkat risiko penyuapan, dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi. iii) Klausul 4.5.3: Penilaian risiko penyuapan harus ditinjau: • Secara teratur sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh organisasi; • Pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas organisasi. iv) Klausul 4.5.4: Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi untuk memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.	**Klausul 4 – Diterapkan** Clause 4 – Applied
1. Clause 4 – Organizational Context, including: a. Clause 4.1 – Understanding the Organization and Its Context The organization shall determine the internal and external issues that are relevant to its objectives and that may impact its ability to achieve the intended outcomes of its anti-bribery management system. These issues shall include, without limitation, the following factors: i) The size, structure, and delegation of decision-making authority of the organization; ii) The locations and sectors in which the organization operates or anticipates operating; iii) The nature, scale, and complexity of the organization's activities and operations; iv) The organization's business model; v) Entities over which the organization has control and entities that exercise control over the organization; vi) The organization's business partners; vii) The nature and extent of interactions with public officials; viii) Legislation, contractual regulations, and professional obligations and duties. b. Clause 4.2 – Understanding Stakeholder Needs and Expectations The organization shall determine: i) The stakeholders relevant to the anti-bribery management system; ii) Relevant stakeholder requirements. c. Determining the Scope of the Anti-Bribery Management System The organization shall determine the boundaries and application of its anti-bribery management system to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider: i) The internal and external issues referred to in clause 4.1; ii) The requirements referred to in clause 4.2; iii) The results of the bribery risk assessment referred to in clause 4.5. d. Clause 4.4 – Anti-Bribery Management System The organization shall establish, document, implement, maintain, and continually review, and where necessary, improve, an anti-bribery management system, including its necessary processes and interactions, in accordance with the requirements of this standard. The anti-bribery management system shall include measures designed to identify and evaluate risks from, and to prevent, detect, and respond to, bribery. e. Clause 4.5 – Bribery Risk Assessment, including: i) Clause 4.5.1: The organization shall conduct a regular bribery risk assessment, which shall: • Identify the organization's reasonable bribery risks in light of the factors listed in clause 4.1. • Analyze, assess, and prioritize the identified bribery risks; • Evaluate the suitability and effectiveness of the organization's existing controls to mitigate the assessed bribery risks.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
ii) Clause 4.5.2: The organization shall establish criteria for evaluating the level of bribery risk, and shall take into account the organization's policies and objectives. iii) Clause 4.5.3: The bribery risk assessment shall be reviewed: • Regularly so that changes and new information can be appropriately assessed at a time and frequency determined by the organization; • When significant changes to the organization's structure or activities occur. iv) Clause 4.5.4: The organization shall retain documented information to demonstrate that a bribery risk assessment has been carried out and is used to design or improve the anti-bribery management system.	
2. Klausul 5 – Kepemimpinan, meliputi: a. Klausul 5.1 – Kepemimpinan dan Komitmen, meliputi: i) Klausul 5.1.1: Dewan pengarah. Bila organisasi mempunyai dewan pengarah, dewan ini harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan: • Menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi; • Memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan; • Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan; • Membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi system manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan; • Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan system manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak. Aktivitas ini harus dilaksanaan oleh manajemen puncak, jika organisasi tidak mempunyai dewan pengarah. ii) Klausul 5.1.2: Manajemen Puncak Manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap system manajemen anti penyuapan dengan: • Memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi; • Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan kedalam proses organisasi; • Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari system manajemen anti penyuapan; • Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal; • Mengkomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; • Memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sasarannya; • Mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan system manajemen anti penyuapan; • Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi; • Mempromosikan peningkatan berkelanjutan; • Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka; • Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan actual (lihat klausul 8.9); • Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner (lihat klausul 7.2.2.1 d) terhadap laporan yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi (kecuali jika ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini); • Pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke dewan pengarah (jika ada) mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan tersturktur. b. Klausul 5.2 – Kebijakan Anti Penyuapan Manajemen puncak harus menetapkan, memelihara dan meninjau kebijakan anti penyuapan yang: i) Melarang penyuapan; ii) Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada organisasi; iii) Sesuai dengan tujuan organisasi; iv) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan; v) Termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; vi) Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan; vii) Termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan; viii) Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan; ix) Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan. Kebijakan anti penyuapan harus: • Tersedia sebagai informasi terdokumentasi; • Dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai didalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah; • Tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan, jika sesuai. c. Klausul 5.3 – Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang Organisasi, meliputi: i) Klausul 5.3.1: Peran dan Tanggung Jawab Manajemen puncak harus mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan atas dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan seperti yang dijelaskan dalam klausul 5.1.2. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi. Manajer pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan diaplikasikan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka.	**Klausul 5 – Diterapkan** Clause 5 – Applied

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
Dewan pengarah (jika ada), manajemen puncak dan seluruh personel lain harus bertanggung jawab untuk pemahaman, pemenuhan, dan penerapan persyaratan system manajemen anti penyuapan, sebagaimana terkait terhadap perannya didalam organisasi. ii) Klausul 5.3.2: Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Manajemen puncak harus menugaskan pada fungsi kepatuhan anti penyuapan tanggung jawab dan wewenang untuk: • a) Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi; • b) Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan; • c) Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini; • d) Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya, jika sesuai. Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai kecukupan sumber daya dan ditugaskan pada orang (kelompok) yang mempunyai kesesuaian kompetensi, status, tanggung jawab dan mandiri. Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai akses langsung dan cepat kepada dewan pengarah (jika ada) dan pada manajemen puncak ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau system manajemen anti penyuapan. Manajemen puncak dapat menugaskan beberapa atau seluruh fungsi kepatuhan anti penyuapan kepada orang diluar organisasi. Jika hal ini terjadi, manajemen puncak harus memastikan personel khusus mempunyai tanggung jawab dan kewenanganan terhadap penugasan eksternal yang merupakan bagian dari fungsi. iii) Klausul 5.3.3: Pengambilan Keputusan yang Didelegasikan Ketika manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada personel untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus menetapkan dan memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang actual atau potensial. Manajemen puncak harus memastikan proses ini ditinjau secara berkala sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan yang dijelaskan pada klausul 5.3.1. 1. Clause 5 – Leadership, includes: a. Clause 5.1 – Leadership and Commitment, includes: i) Clause 5.1.1: Governing Body. If the organization has a governing body, it shall demonstrate leadership and commitment to the anti-bribery management system by • Approving the organization's anti-bribery policy; • Ensuring that the organization's anti-bribery strategy and policy are aligned; • Receiving and reviewing information on the content and operation of the anti-bribery management system at planned intervals; • Ensuring that adequate and appropriate resources required for the operation of the anti-bribery management system are allocated and assigned; • Exercising reasonable oversight over the implementation and effectiveness of the anti-bribery management system by top management. These activities shall be carried out by top management if the organization does not have a governing body. ii) Clause 5.1.2: Top Management Top management shall demonstrate leadership and commitment to the anti-bribery management system by: • Ensuring that the anti-bribery management system, including policies and objectives, is adequately established to address bribery risks within the organization; • Ensuring the integration of anti-bribery management system requirements into the organization's processes; • Providing adequate and appropriate resources for the effective operation of the anti-bribery management system; • Communicating the anti-bribery policy internally and externally; • Communicating internally the importance of effective anti-bribery management and compliance with the anti-bribery management system requirements; • Ensuring that the anti-bribery management system is appropriately designed to achieve its objectives; • Directing and supporting personnel to contribute to the effectiveness of the anti-bribery management system; • Promoting an appropriate anti-bribery culture within the organization; • Promoting continual improvement; • Supporting other relevant management roles to demonstrate leadership in preventing and detecting bribery within their areas of responsibility; • Encouraging the use of reporting procedures for suspected and actual bribery (see Clause 8.9); • Ensuring that no personnel suffer retaliation, discrimination, or disciplinary action (see Clause 7.2.2.1 d)) for reports made in good faith or based on reasonable belief of violations or suspected violations of the organization's anti-bribery policy, or for refusing to engage in bribery even if such refusal may result in loss of business (except where the individual participated in the violation); • Reporting, at planned intervals, to the governing body (if any) on the content and operation of the anti-bribery management system and on serious allegations or structured bribery. b. Clause 5.2 – Anti-Bribery Policy Top management shall establish, maintain, and review an anti-bribery policy that:	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
i) Prohibits bribery; ii) Requires compliance with applicable anti-bribery laws and regulations; iii) Is appropriate to the organization's purpose; iv) Provides a framework for setting, reviewing, and achieving anti-bribery objectives; v) Includes a commitment to meeting the requirements of the anti-bribery management system; vi) Encourages raising concerns in good faith or based on reasonable belief without fear of retaliation; vii) Includes a commitment to continual improvement of the anti-bribery management system; viii) Explains the authority and independence of the anti-bribery compliance function; ix) Explains the consequences of non-compliance with the anti-bribery policy. The anti-bribery policy shall: • Be available as documented information; • Be communicated in appropriate languages within the organization and to business associates with more than low bribery risk; • Be available to relevant stakeholders, where appropriate. c. Clause 5.3 – Organizational Roles, Responsibilities, and Authorities, includes: i) Clause 5.3.1: Roles and Responsibilities Top management shall have overall responsibility for the implementation of and compliance with the anti-bribery management system as described in Clause 5.1.2. Top management shall ensure that responsibilities and authorities for relevant roles are defined and communicated within and throughout all levels of the organization. Managers at all levels shall be responsible for ensuring that the anti-bribery management system requirements are applied and complied with in their departments or functions. The governing body (if any), top management, and all other personnel shall be responsible for understanding, complying with, and implementing the requirements of the anti-bribery management system as relevant to their roles within the organization. ii) Clause 5.3.2: Anti-Bribery Compliance Function Top management shall assign the anti-bribery compliance function with responsibility and authority to: • Oversee the design and implementation of the organization's anti-bribery management system; • Provide advice and guidance to personnel on the anti-bribery management system and bribery-related issues; • Ensure that the anti-bribery management system conforms to the requirements of this standard; • Report on the performance of the anti-bribery management system to the governing body (if any), top management, and other compliance functions, where appropriate. The anti-bribery compliance function shall be provided with adequate resources and assigned to persons with appropriate competence, status, responsibility, and independence. The anti-bribery compliance function shall have direct and prompt access to the governing body (if any) and top management where there are issues or concerns that need to be addressed regarding bribery or the anti-bribery management system. Top management may assign some or all of the anti-bribery compliance function to persons external to the organization. Where this occurs, top management shall ensure that designated personnel retain responsibility and authority over the externally assigned functions. iii) Clause 5.3.3: Delegated Decision-Making Where top management delegates authority to personnel to make decisions where there is more than a low bribery risk, the organization shall establish and maintain a decision-making process or require appropriate controls for the decision-making process and the level of authority of decision-makers, ensuring they are free from actual or potential conflicts of interest. Top management shall ensure that this process is reviewed periodically as part of its roles and responsibilities for implementation and compliance with the anti-bribery management system as described in Clause 5.3.1.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
2. Klausul 6 – Perencanaan, meliputi: a. Klausul 6.1 – Tindakan yang Ditujukan pada Risiko dan Peluang Ketika merencanakan sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus mempertimbangkan isu yang mengacu pada klausul 4.1, persyaratan yang mengacu pada klausul 4.2, identifikasi risiko pada klausul 4.5, dan peluang peningkatan yang ditujukan untuk: i) Memberi kepastian yang wajar bahwa sistem manajemen anti penyuapan dapat mencapai sasaran yang dimaksud; ii) Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan; iii) Memantau keefektifan sistem manajemen anti penyuapan; iv) Mencapai peningkatan keberlanjutan. Organisasi harus merencanakan: • Tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan; • Bagaimana untuk mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ini pada proses system manajemen anti penyuapan; dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan tersebut. b. Klausul 6.2 – Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk Mencapainya Organisasi harus menetapkan sasaran sistem manajemen anti penyuapan pada fungsi dan Tingkat yang relevan. Sasaran sistem manajemen anti penyuapan harus: i) Konsisten dengan kebijakan anti penyuapan; ii) Terukur (jika sesuai); iii) Memperhitungkan faktor yang berlaku didalam klausul 4.1, persyaratan didalam klausul 4.2, dan risiko penyuapan yang teridentifikasi didalam klausul 4.5. iv) Dapat dicapai; v) Dipantau; vi) Dikomunikasikan sesuai dengan klausul 7.4; vii) Diperbaharui jika sesuai. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari sasaran sistem manajemen anti penyuapan. Ketika merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus menetapkan: i) Apa yang akan dikerjakan; ii) Sumber daya apa yang dipersyaratkan; iii) Siapa yang akan bertanggung jawab; iv) Kapan sasaran akan dicapai; v) Bagaimana hasil akan dievaluasi dan dilaporkan; vi) Siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman. 1. Clause 6 – Planning, including: a. Clause 6.1 – Actions Addressing Risks and Opportunities When planning the anti-bribery management system, the organization shall consider the issues referred to in clause 4.1, the requirements referred to in clause 4.2, the risks identified in clause 4.5, and opportunities for improvement aimed at: i) Providing reasonable assurance that the anti-bribery management system can achieve its intended objectives; ii) Preventing, or mitigating, undesirable effects relevant to the anti-bribery policy and objectives; iii) Monitoring the effectiveness of the anti-bribery management system; iv) Achieving continuous improvement. The organization shall plan: • Actions to address bribery risks and opportunities for improvement; • How to integrate and implement these actions into the anti-bribery management system processes; and evaluate the effectiveness of these actions. b. Clause 6.2 – Anti-Bribery Objectives and Planning to Achieve Them The organization shall establish anti-bribery management system objectives at relevant functions and levels. The anti-bribery management system objectives must: i) Be consistent with the anti-bribery policy; ii) Be measurable (if appropriate); iii) Take into account the applicable factors in clause 4.1, the requirements in clause 4.2, and the bribery risks identified in clause 4.5. iv) Be achievable; v) Be monitored; vi) Be communicated in accordance with clause 7.4; vii) Be updated as appropriate. The organization shall retain documented information on the anti-bribery management system objectives. When planning how to achieve the anti-bribery management system objectives, the organization shall determine: i) What will be done; ii) What resources will be required; iii) Who will be accountable; iv) When the objectives will be achieved; v) How results will be evaluated and reported; vi) Who will impose sanctions or penalties	**Klausul 6 – Diterapkan** Clause 6 – Applied
1. Klausul 7 – Dukungan, meliputi: a. Klausul 7.1 – Sumber Daya Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan.	**Klausul 7 - Diterapkan** Clause 7 - Applied

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
2. Klausul 7.2 – Kompetensi, meliputi: a. Klausul 7.2.1: Umum Organisasi harus: i) Menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan dibawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan; ii) Memastikan orang ini kompeten berdasarkan Pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai; iii) Jika bisa diterapkan, mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil; iv) Menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti dari kompetensi. b. Klausul 7.2.2: Proses mempekerjakan i) Dalam hubungannya terhadap semua personel, organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. (klausul 7.2.2.1) ii) Suhubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan (klausul 4.5), dan untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan, organisasi harus menerapkan prosedur yang isinya sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. (klausul 7.2.2.2) 3. Klausul 7.3 - Kepedulian dan Pelatihan. Organisasi harus memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai serta pelatihan untuk personel. Pelatihan tersebut harus menunjukkan isu berikut yang sesuai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan (lihat klausul 4.5), sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. Personel harus dilengkapi dengan kepedulian anti penyuapan dan pelatihan secara teratur (pada selang waktu terencana ditentukan oleh organisasi) yang sesuai untuk peran mereka, risiko penyuapan di lingkungan mereka berada, dan setiap keadaan yang berubah. Program kepedulian dan pelatihan akan diperbarui secara berkala jika diperlukan untuk mencerminkan informasi baru yang relevan. Memperhitungkan risiko penyuapan teridentifikasi (lihat klausul 4.5), organisasi harus menerapkan prosedur yang ditujukan pada kepedulian dan pelatihan anti penyuapan untuk rekan bisnis yang bertindak atas nama atau untuk keuntungannya yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah untuk organisasi. Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis Dimana kepedulian dan pelatihan seperti itu diperlukan, isinya, dan sarana pelatihan harus disediakan. 4. Klausul 7.4 – Komunikasi, meliputi: a. Klausul 7.4.1: Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan. b. Klausul 7.4.2: Kebijakan anti penyuapan harus dibuat tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis, dikomunikasikan secara langsung baik pada personel dan rekan bisnis yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, dan harus dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal jika sesuai. 5. Klausul 7.5 – Informasi terdokumentasi, meliputi: a. Klausul 7.5.1: Umum. Sistem manajemen anti penyuapan organisasi harus mencakup: i) Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini; ii) nformasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. b. Klausul 7.5.2: Membuat dan memperbaharui. Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaian: i) Identifikasi dan deskripsi (missal judul, tanggal, penulis, atau nomor refefensi); ii) Format (missal bahasa, versi piranti lunak, grafik) dan media (missal kertas, elektronik); iii) Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan. c. Klausul 7.5.3: Pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen anti penyuapan dan oleh dokumen ini harus dikendalikan untuk memastikan: i) Tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan; ii) Dilindungi secara cukup (missal dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak sesuai, atau kehilangan integritas). 1. Clause 7 – Support, including: a. Clause 7.1 – Resources The organization shall determine and provide the resources necessary for the establishment, implementation, maintenance, and ongoing improvement of the anti-bribery management system. 2. Clause 7.2 – Competence, including: a. Clause 7.2.1: General The organization shall: i) Determine the sufficient competence of persons performing work under the organization's control that impacts its anti-bribery performance; ii) Ensure that these persons are competent based on adequate education, training, or experience; iii) Where applicable, take action to acquire and maintain the necessary competence, and evaluate the effectiveness of the actions taken; iv) Retain appropriate documented information as evidence of competence.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
b. Clause 7.2.2: Hiring Process i) In relation to all personnel, the organization shall implement the procedures as set out in ISO 37001:2016. (clause 7.2.2.1) ii) In relation to all positions exposed to bribery risks above the low threshold as determined in the bribery risk assessment (clause 4.5), and for the anti-bribery compliance function, the organization shall implement procedures whose content is as set out in ISO 37001:2016. (clause 7.2.2.2) 3. Clause 7.3 - Awareness and Training The organization shall provide adequate and appropriate anti-bribery awareness and training for personnel. Such training shall address the following issues, as appropriate, taking into account the results of the bribery risk assessment (see clause 4.5), as set out in ISO 37001:2016. Personnel shall be provided with anti-bribery awareness and training on a regular basis (at planned intervals determined by the organization) appropriate to their role, the bribery risks in their environment, and any changing circumstances. The awareness and training program shall be updated periodically as necessary to reflect new, relevant information. Taking into account identified bribery risks (see clause 4.5), the organization shall implement procedures aimed at anti-bribery awareness and training for business associates acting on its behalf or for its benefit who may pose a bribery risk above the low threshold for the organization. These procedures shall identify the business associates where such awareness and training is required, its content, and the means by which such training should be provided. 4. Clause 7.4 – Communication, including: a. Clause 7.4.1: The organization shall determine internal and external communications relevant to the anti-bribery management system. b. Clause 7.4.2: The anti-bribery policy shall be made available to all organizational personnel and business partners, communicated directly to both personnel and business partners who may pose a bribery risk above a low threshold, and shall be published through internal and external communication channels, where appropriate. 5. Clause 7.5 – Documented Information, including: a. Clause 7.5.1: General. The organization's anti-bribery management system shall include: i) Documented information required by this standard; ii) Documented information determined by the organization to be necessary for the effectiveness of the anti-bribery management system.. b. Clause 7.5.2: Creating and Updating. When creating and updating documented information, the organization shall ensure the appropriateness of: i) Identification and description (e.g., title, date, author, or reference number); ii) Format (e.g., language, software version, graphics) and media (e.g., paper, electronic); iii) Review and approval for suitability and adequacy. c. Clause 7.5.3: Control of documented information. Documented information required by the anti-bribery management system and by this document shall be controlled to ensure that: i) It is available and suitable for use, when and where needed; ii) It is adequately protected (e.g., from loss of confidentiality, inappropriate use, or loss of integrity).	
1. Klausul 8 Operasi, meliputi: a. Klausul 8.1 – Perencanaan dan Pengendalian Operasi Organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6.1, ketentuan sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. b. Klausul 8.2 – Uji Kelayakan Bila penilaian risiko penyuapan di organisasi dilaksanakan sesuai klausul 4.5, telah dinilai risiko penyuapan di atas batas rendah yang berhubungan dengan: i) Kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas; ii) Hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis; atau iii) Kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu (lihat klausul 7.2.2.2). c. Klausul 8.3 – Pengendalian Keuangan Organisasi harus menerapkan pengendalian keuangan yang mengelola risiko penyuapan. d. Klausul 8.4 – Pengandalian Non Keuangan Organisasi harus menerapkan pengendalian non keuangan untuk mengelola risiko penyuapan yang berhubungan dengan area seperti aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi. e. Klausul 8.5 – Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang Dikendalikan Organisasi dan Rekan Bisnisnya i) Klausul 8.5.1: Organisasi harus menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lainnya yang dikendalikan untuk: • Menerapkan sistem manajemen anti penyuapan; atau • Menerapkan pengendalian anti penyuapan mereka sendiri. ii) Klausul 8.5.2: Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh organisasi yang penilaian risiko penyuapan (lihat klausul 4.5) atau uji kelayakan (lihat klausul 8.2) telah mengidentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah, dan dimana kendali anti penyuapan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuapan yang relevan, organisasi harus menerapkan prosedur sebagai berikut: • Organisasi harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuapan yang mengelola risiko penyuapan yang relevan; • Di mana rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuapan, atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada:	**Klausul 8 - Diterapkan** Clause 8 - Applied

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
• Bila dapat diterapkan, organisasi harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan, atau • Jika tidak dapat diterapkan, mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuapan, hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis ini (lihat klausul 4.5 dan 8.2) dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut (lihat klausul 8.3, 8.4 dan 8.5). f. Klausul 8.6 – Komitmen Anti Penyuapan Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan, hal itu sedapat mungkin: i) Rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan; ii) Organisasi mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan. g. Klausul 8.7 – Hadiah, Kemurahan Hati, Sumbangan dan Keuntungan Serupa Organisasi harus menerapkan prosedur yang dirancang untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, di mana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai penyuapan. h. Klausul 8.8 – Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan Ketika uji kelayakan (lihat klausul 8.2) dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan agar organisasi dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan), sebagaimana diatur dalam ISO 37001:2016. i. Klausul 8.9 – Meningkatkan Kepedulian Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Organisasi juga harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur. j. Klausul 8.10 – Investigasi dan Penanganan Penyuapan Organisasi harus menerapkan prosedur sebagaimana di atur dalam ISO 37001:2016. Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. Organisasi dapat menunjuk rekan bisnis untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. 1. Clause 8 Operations, including: a. Clause 8.1 – Planning and Controlling Operations The organization shall plan, implement, review, and control the processes necessary to meet the requirements of the anti-bribery management system and to implement the actions specified in clause 6.1, as set out in ISO 37001:2016. b. Clause 8.2 – Due Diligence When a bribery risk assessment of the organization is carried out in accordance with clause 4.5, the bribery risk has been assessed as being above the low threshold in relation to: i) Specific categories of transactions, projects, or activities; ii) Planned or ongoing relationships with specific categories of business partners; or iii) Specific categories of personnel in specific positions (see clause 7.2.2.2). c. Clause 8.3 – Financial Controls The organization shall implement financial controls that manage the risk of bribery. d. Clause 8.4 – Non-Financial Controls The organization shall implement non-financial controls to manage bribery risks related to areas such as procurement, operations, sales, commercial, human resources, legal and regulatory activities. e. Clause 8.5 – Implementation of Anti-Bribery Controls Controlled by the Organization and its Business Associates i) Clause 8.5.1: The organization shall implement the procedures required for other organizations it controls to: • Implement an anti-bribery management system; or • Implement their own anti-bribery controls. ii) Clause 8.5.2: With respect to business associates not controlled by the organization whose bribery risk assessment (see clause 4.5) or due diligence (see clause 8.2) has identified a bribery risk above the low threshold, and where anti-bribery controls implemented by the business associate would help mitigate the relevant bribery risk, the organization shall implement the following procedures: • The organization shall determine whether the business associate has anti-bribery controls in place that manage the relevant bribery risk; • Where a business associate does not have anti-bribery controls, or it is not possible to verify whether controls are in place:	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
• Where practicable, the organization shall require the business associate to implement anti-bribery controls in relation to the relevant transaction, project, or activity; or • Where practicable, require the business associate to implement anti-bribery controls. This shall be a factor taken into account in evaluating the bribery risks associated with this business associate (see clauses 4.5 and 8.2) and how the organization manages those risks (see clauses 8.3, 8.4, and 8.5). f. Clause 8.6 – Anti-Bribery Commitment For business associates that pose a bribery risk above the low threshold, the organization shall implement procedures that require, to the extent practicable: i) The business associate commits to preventing bribery by, on behalf of, or for the benefit of the business associate in relation to the relevant transaction, project, activity, or relationship; ii) The organization is able to terminate relationships with business associates where bribery has been offered by, on behalf of, or for the benefit of the business associate in connection with the relevant transaction, project, activity, or relationship. g. Clause 8.7 – Gifts, Favors, Donations, and Similar Advantages The organization shall implement procedures designed to prevent the offer, provision, or acceptance of gifts, favors, donations, and similar advantages where the offer, provision, or acceptance constitutes, or could reasonably be considered, bribery. h. Clause 8.8 – Managing Inadequate Anti-Bribery Controls When due diligence (see clause 8.2) performed on a specific transaction, project, activity, or relationship with a business associate determines that the bribery risks cannot be managed by existing anti-bribery controls, and the organization is unable or unwilling to implement additional or enhanced anti-bribery controls or take other appropriate action (such as changing the nature of the transaction, project, activity, or relationship to enable the organization to manage the relevant bribery risks), as specified in ISO 37001:2016. i. Clause 8.9 – Raising Awareness The organization shall implement the procedures as outlined in ISO 37001:2016. The organization shall also ensure that all personnel are aware of, are able to use, and are aware of their rights and protections under the procedures. j. Clause 8.10 – Bribery Investigations and Responses The organization shall implement the procedures as outlined in ISO 37001:2016. Investigations shall be conducted by, and reported to, personnel not within the role or function being investigated. The organization may appoint a business partner to conduct the investigation and report the results to personnel not within the role or function being investigated.	
2. Klausul 9 – Evaluasi Kinerja, meliputi: a. Klausul 9.1 – Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Organisasi harus menentukan: i) Apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur; ii) Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan; iii) Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, jika berlaku, untuk memastikan hasil yang valid; iv) Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan; v) Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi; vi) Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan. b. Klausul 9.2.1: Organisasi harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen anti penyuapan: i) Memenuhi untuk: • Persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen anti penyuapan; • Persyaratan dari standar ini. • Secara efektif diterapkan dan dipelihara. c. Klausul 9.2.2: Organisasi harus: i) Merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memeliharan program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya; ii) Menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit; iii) Memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari proses audit; iv) Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak, jika sesuai, dewan pengarah (jika ada); v) Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit. d. Klausul 9.2.3: Audit harus wajar, proporsional dan berbasis risiko. Audit ini harus terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur, pengendalian dan system untuk: i) Penyuapan atau dugaan penyuapan; ii) Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuapan; iii) Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuapan yang berlaku di organisasi; dan iv) Kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuapan. e. Klausul 9.2.4: Untuk memastikan objektivitas dan ketidak berpihakan dari program audit, organisasi harus memastikan audit dilaksanakan oleh: i) Fungsi yang mandiri atau penerapan personel atau yang ditunjuk untuk proses ini; atau ii) Fungsi kepatuhan anti penyuapan (kecuali lingkup audit mencakup evaluasi system manajemen anti penyuapan itu sendiri, atau pekerjaan serupa dimana fungsi kepatuhan anti penyuapan bertanggung jawab); atau iii) Orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain dari yang sedang diaudit; atau iv) Pihak ketiga yang sesuai; atau v) Suatu grup yang terdiri dari a) sampai d). Organisasi harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerjanya sendiri.	**Klausul 9 - Diterapkan** Clause 9 - Applied

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
3. Klausul 9.3 – Tinjauan Manajemen a. Klausul 9.3.1: Tinjauan Manajemen Puncak. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuapan organisasi, pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan. Tinjauan manajemen puncak harus mencakup pertimbangan dari: i) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; ii) Perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan; iii) Informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kecenderungan dalam: • Ketidak sesuaian dan tindakan korektif; • Hasil pemantauan dan pengukuran; • Hasil audit; • Laporan penyuapan; • Penyelidikan; • Sifat dan tingkat risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi. iv) Keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuapan; v) Peluang peningkatan keberlanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan, seperti yang diacu pada klausul 10.2. Keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan terkait dengan peluang peningkatan keberlanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyuapan. Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada dewan pengarah (jika ada). b. Klausul 9.3.2: Tinjauan Dewan Pengarah. Dewan pengarah (jika ada) harus melakukan tinjauan secara berkala sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh dewan pengarah. 4. Klausul 9.4 – Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus menilai secara berkelanjutan apakah sistem manajemen anti penyuapan: a. Cukup secara efektif mengelola risiko penyuapan yang dihadapi oleh organisasi; b. Diterapkan secara efektif. Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus melaporkan pada rentang waktu terencana dan pada panitia tidak tetap, jika sesuai, kepada dewan pengarah (jika ada) dan manajemen puncak, atau komite yang sesuai dari dewan pengarah atau manajemen puncak, pada kecukupan dan penerapan dari sistem manajemen anti penyuapan, termasuk hasil investigasi dan audit. 1. Clause 9 – Performance Evaluation, including: a. Clause 9.1 – Monitoring, Measurement, Analysis, and Evaluation The organization shall determine: i) What needs to be monitored and measured; ii) Who is responsible for monitoring; iii) Methods for monitoring, measurement, analysis, and evaluation, if applicable, to ensure valid results; iv) When monitoring and measurement should be conducted; v) When the results of monitoring and measurement should be analyzed and evaluated; vi) To whom and how this information should be reported b. Clause 9.2.1: The organization shall conduct internal audits at planned intervals to provide information on whether the anti-bribery management system: i) Meets: • The organization's own requirements for an anti-bribery management system; • The requirements of this standard. • Is effectively implemented and maintained. c. Clause 9.2.2: The organization shall: i) Plan, establish, implement, and maintain an audit program, including frequency, methods, responsibilities, planning requirements, and reporting, which shall take into account the importance of the process and the results of previous audits; ii) Determine the audit criteria and scope for each audit; iii) Select competent auditors and conduct audits to ensure the objectivity and impartiality of the audit process; iv) Ensure that audit results are reported to relevant management, the anti-bribery compliance function, top management, and, where appropriate, the governing board (if any); v) Retain documented information as evidence of the implementation of the audit program and audit results. d. Clause 9.2.3: Audits shall be reasonable, proportionate, and risk-based. These audits shall consist of internal audit processes or other procedures that review procedures, controls, and systems for: i) Bribery or suspected bribery; ii) Violations of the anti-bribery policy or anti-bribery management system requirements; iii) Failure of business partners to comply with the organization's applicable anti-bribery requirements; and iv) Weaknesses in, or opportunities for improvement in, the anti-bribery management system. e. Clause 9.2.4: To ensure the objectivity and impartiality of the audit program, the organization shall ensure that audits are carried out by: i) An independent function or personnel implementing or designated for this process; or ii) The anti-bribery compliance function (unless the scope of the audit includes an evaluation of the anti-bribery management system itself, or similar work for which the anti-bribery compliance function is responsible); or iii) An appropriate person from a department or function other than the one being audited; or iv) An appropriate third party; or v) A group consisting of a) through d). The organization shall ensure that no auditor audits its own scope of work.	

Ruang Lingkup Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perseroan Scope of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation in the Company	Penerapan ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 Implementation
2. Clause 9.3 – Management Review a. Clause 9.3.1: Top Management Review. Top management shall review the organization's anti-bribery management system, at planned intervals, to ensure its continuity, suitability, adequacy, and effectiveness. The top management review shall include consideration of: i) The status of actions from previous management reviews; ii) Changes in internal and external issues relevant to the anti-bribery management system; iii) Information on the performance of the anti-bribery management system, including trends in: • Non-conformities and corrective actions; • Monitoring and measurement results; • Audit results; • Bribery reports; • Investigations; • The nature and extent of the bribery risks faced by the organization. iv) The effectiveness of actions taken to address bribery risks; v) Opportunities for sustainable improvement of the anti-bribery management system, as referred to in clause 10.2. The output of the top management review shall include decisions regarding sustainable improvement opportunities and any need for changes to the anti-bribery management system. A summary of the results of the top management review shall be reported to the governing board (if any). b. Clause 9.3.2: Governing Board Review. The governing board (if any) shall conduct a periodic review of the anti-bribery management system based on information provided by top management and the anti-bribery compliance function and any other information requested or obtained by the governing board. 3. Clause 9.4 – Review of the Anti-Bribery Compliance Function The anti-bribery compliance function must continuously assess whether the anti-bribery management system: a. Adequately and effectively manages the bribery risks faced by the organization; b. Is effectively implemented. The anti-bribery compliance function must report at planned intervals and to a standing committee, if appropriate, to the board (if any) and top management, or an appropriate committee of the board or top management, on the adequacy and implementation of the anti-bribery management system, including the results of investigations and audits.	
1. Klausul 10 - Peningkatan, meliputi: a. Klausul 10.1 – Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Ketika ketidak sesuaian terjadi, organisasi harus: i) Segera bereaksi terhadap ketidak sesuaian, dan jika berlaku: • Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksinya; • Sepakat terhadap konsekuensi. ii) Mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan penyebab ketidak sesuaian, agar hal ini tidak terulang kembali atau terjadi ditempat lain, dengan: • Meninjau ketidak sesuaian; • Menentukan penyebab ketidak sesuaian; • Menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau dapat secara potensial terjadi. iii) Menerapkan setiap tindakan yang diperlukan; iv) Meninjau keefektifan dari setiap tindakan korektif yang diambil; v) Membuat perubahan terhadap sistem manajemen anti penyuapan, bila diperlukan. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek dari ketidak sesuaian yang ditemui. 2. Klausul 10.2 – Peningkatan Berkelanjutan Organisasi harus secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. 1. Clause 10 - Improvement, including a. Clause 10.1 – Nonconformities and Corrective Action When a nonconformity occurs, the organization shall: i) Respond promptly to the nonconformity, and, if applicable, shall: • Take action to control and correct it; • Agree on the consequences. ii) Evaluate the need for action to eliminate the cause of the nonconformity, so that it does not recur or occur elsewhere, by: • Reviewing the nonconformity; • Determining the cause of the nonconformity; • Determining if similar nonconformities have existed, or could potentially occur. iii) Implement any necessary action; iv) Review the effectiveness of any corrective action taken; v) Make changes to the anti-bribery management system, if necessary. Corrective action shall be appropriate to the effect of the nonconformity identified. 2. Clause 10.2 – Continual Improvement The organization shall continually improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the anti-bribery management system.	**Klausul 10 - Diterapkan** Klausul 10 - Diterapkan

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Perseroan telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas implementasi selama tahun buku 2025 yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi PT Sucofindo pada tanggal 6-7 Februari 2025. Sertifikasi ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan SMAP berjalan secara efektif dan selaras dengan standar ISO 37001:2016, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Melalui proses sertifikasi tersebut, Perseroan terus berupaya meningkatkan integritas operasional, mencegah terjadinya praktik penyuapan, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan.

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

The Company conducted an Anti-Bribery Management System (ABMS) audit of its implementation during the 2025 fiscal year by the Certification Institute PT Sucofindo on February 6-7, 2025. This certification is part of the Company's commitment to ensuring effective implementation of the ABMS and aligning with the ISO 37001:2016 standard, as well as demonstrating compliance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Through this certification process, the Company continues to strive to improve operational integrity, prevent bribery practices, and strengthen stakeholder trust in its internal control system.

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Anti-Bribery Management System Certification of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Perseroan secara berkelanjutan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kesesuaian, kecukupan, serta efektivitas penerapan SMAP. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan sekaligus memastikan bahwa implementasi SMAP senantiasa memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan serta mendorong peran aktif dalam pencegahan praktik penyuapan, Perseroan secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selain melalui kegiatan tatap muka, upaya peningkatan berkelanjutan juga dilakukan melalui pengiriman pesan singkat (*blast* WhatsApp) kepada seluruh karyawan, kampanye melalui media sosial, serta penyampaian imbauan dari jajaran Direksi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Perseroan juga menyediakan saluran pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan maupun pihak eksternal. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan WBS disampaikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

The Company continuously conducts identification and evaluation of the suitability, adequacy, and effectiveness of the implementation of Anti-Bribery Management System (ABMS). This evaluation aims to identify improvement opportunities while ensuring that the ABMS implementation consistently complies with applicable requirements and regulations.

To enhance employee awareness and encourage active participation in preventing bribery practices, the Company regularly organizes socialization activities. In addition to face-to-face sessions, continuous improvement efforts are also carried out through blast WhatsApp messages to all employees, social media campaigns, and official communications from the Board of Directors to all employees and stakeholders.

As part of its commitment to transparency and accountability, the Company also provides a Whistleblowing System (WBS) reporting channel that can be utilized by employees as well as external parties. Further details regarding the WBS mechanism and implementation are presented in a separate section of this Annual Report.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*

Whistleblowing System Policy

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/ WBS) diterapkan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam memperkuat kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini dirancang untuk memudahkan seluruh pihak, baik pimpinan maupun karyawan, dalam melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

The Whistleblowing System (WBS) Policy is implemented as part of the Company's commitment to strengthening the quality of Good Corporate Governance practices. This policy is designed to facilitate all parties, both management and employees, in reporting any form of violation occurring within the Company.

Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, di mana setiap individu didorong untuk berperan aktif dalam menjaga integritas Perseroan. Melalui mekanisme pelaporan yang terbuka, aman, dan transparan, Perseroan berupaya menangani setiap pelanggaran secara cepat dan tepat, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan keberlanjutan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

The main objective of this policy is to create a safe and conducive working environment, where every individual is encouraged to actively participate in maintaining the Company's integrity. Through an open, secure, and transparent reporting mechanism, the Company aims to handle violations promptly and appropriately, enhance accountability, and ensure the sustainability of good corporate governance practices.

Pelaporan pelanggaran di Perseroan diatur dalam Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistleblower)* No. Dok: WGGEA-PM-07, No. Rev: 02, tanggal 31 Juli 2024. Prosedur ini mencakup mekanisme pelaporan, proses tindak lanjut atas laporan, serta perlindungan bagi pelapor guna memastikan setiap pengaduan diproses secara profesional, objektif, dan rahasia.

The reporting of violations within the Company is governed by the Procedure for Reporting Violations of the Code of Conduct (Whistleblower) No. WGGEA-PM-07, Rev. 02, dated July 31, 2024. This procedure covers reporting mechanisms, follow-up processes, and protection for whistleblowers to ensure that every report is handled professionally, objectively, and confidentially.

Dengan penerapan kebijakan ini, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga integritas, memperkuat budaya anti-fraud dan anti-penyuapan, serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

By implementing this policy, the Company is committed to maintaining integrity, strengthening an anti-fraud and anti-bribery culture, and enhancing the trust of all stakeholders.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Perseroan telah menyediakan kanal pelaporan pelanggaran melalui *platform Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui wbs.wikagedung.co.id. Mekanisme penyampaian laporan dapat dimanfaatkan oleh seluruh organ Perseroan untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang diterima melalui kanal WBS akan ditindaklanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG yang, dalam pelaksanaannya, dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan organ terkait di lingkungan Perseroan. Seluruh organ Perseroan wajib memberikan dukungan penuh guna memastikan proses tindak lanjut laporan berjalan efektif dan profesional.

SUBMISSION OF VIOLATION REPORTS

The Company has provided a violation reporting channel through the Whistleblowing System platform, accessible via wbs.wikagedung.co.id. This mechanism can be utilized by all Company organs to report alleged violations in a safe and responsible manner. Every report received through the WBS channel will be followed up by the GCG Compliance Team, which may coordinate or collaborate with relevant units within the Company. All Company organs are required to provide full support to ensure that the follow-up process is carried out effectively and professionally.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, antara lain:

1. Pada prinsipnya, setiap pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya secara jelas.
2. Laporan tanpa identitas (surat anonim) akan diperlakukan sebagai informasi awal, dengan tindak lanjut yang bergantung pada tingkat keyakinan terhadap kebenaran substansi laporan yang disampaikan.

In its implementation, there are several important provisions that must be considered in the implementation of the Whistleblowing System, including:

1. In principle, every whistleblower is expected to clearly disclose their identity.
2. Whistleblower without identification (anonymous letters) will be treated as initial information, with follow-up action depending on the level of confidence in the substance of report submitted.

3. Pelapor tidak akan dikenakan sanksi apabila laporan yang disampaikan terbukti benar, kecuali apabila pelapor turut terlibat dalam pelanggaran terhadap *Code of Conduct*. Dalam hal pelapor juga terlibat, pengungkapan tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran terbukti terjadi dan pelapor tidak terlibat, Perseroan dapat memberikan penghargaan yang sesuai kepada pelapor.
4. Tim Kepatuhan GCG dalam melakukan penanganan laporan senantiasa berpegang pada asas praduga tidak bersalah.

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Perseroan mewajibkan pelapor (*whistleblower*) untuk menyertakan identitas lengkap dalam setiap laporan, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar pelapor merasa aman dalam menyampaikan informasi. Perlindungan bagi pelapor juga dimaksudkan untuk mendorong seluruh karyawan Perseroan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Perseroan menetapkan bahwa kerahasiaan pelapor tetap dijaga, kecuali apabila pengungkapan identitas diperlukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Diperlukan dalam kaitannya dengan proses pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
2. Diperlukan dan sejalan dengan kepentingan Perseroan serta tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Diperlukan oleh fungsi atau unit hukum Perseroan dalam rangka mempertahankan posisi Perseroan di hadapan hukum.

Perseroan menjamin perlindungan bagi pelapor dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang timbul akibat penyampaian laporan pelanggaran, serta menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan yang layak kepada pelapor dan/atau pihak yang menjadi saksi atas pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi pengelola sistem pelaporan pelanggaran, pihak yang melaksanakan investigasi, serta pihak-pihak lain yang memberikan informasi terkait pengaduan tersebut.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Perseroan dilaksanakan oleh Tim Kepatuhan GCG. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diproses secara objektif, profesional, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun tugas Tim Kepatuhan GCG meliputi:
1. Mengadministrasikan dan menyusun laporan atas dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan karyawan maupun rekanan bisnis;

3. Whistleblower will not be subject to sanctions if the report is proven to be true, unless the whistleblower is also involved in the violation of the Code of Conduct. If the whistleblower is also involved, such disclosure may be a mitigating factor. If the violation is proven to have occurred and the whistleblower was not involved, the Company may provide an appropriate reward to the whistleblower.
4. GCG Compliance Team constantly adheres to the presumption of innocence in handling reports.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The Company requires whistleblowers to include complete identity information in each report, while ensuring the confidentiality of their identity so that they feel safe in submitting information. This protection is intended to encourage all employees to report any suspected violations.

The Company ensures that whistleblower confidentiality is maintained, except where disclosure of identity is necessary under the following circumstances:
1. Required in relation to reporting or investigation processes conducted by the Government;
2. Necessary and aligned with the Company's interests and the objectives of implementing Good Corporate Governance;
3. Required by the Company's legal function or unit in defending the Company's legal position.

The Company guarantees protection for whistleblowers against any threats or retaliatory actions arising from reporting violations and ensures confidentiality and adequate protection for whistleblowers and/or witnesses of violations or criminal acts within the Company. This protection also applies to system administrators, investigators, and other parties providing information related to such reports.

PARTIES RESPONSIBLE FOR HANDLING REPORTS

The management of violation reports within the Company is carried out by the GCG Compliance Team. This team is responsible for ensuring that every report is processed objectively, professionally, and in accordance with Good Corporate Governance principles. Their duties include:
1. Administering and compiling reports of alleged violations originating from employee and business partner complaints;

2. Melakukan penelaahan, penilaian, serta seleksi awal atas laporan dugaan pelanggaran untuk menentukan kelayakan proses tindak lanjut;
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Merekomendasikan pembentukan Tim Pencari Fakta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan;
5. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Majelis Kehormatan untuk memperoleh rekomendasi, yang selanjutnya diteruskan kepada Manajemen Puncak, yaitu Direksi Perseroan; dan
6. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima beserta proses penanganannya.

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan telah mengembangkan mekanisme pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System)* yang terstruktur, sistematis, dan transparan. Sistem ini memberikan ruang bagi seluruh insan Perseroan maupun pemangku kepentingan eksternal untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja.

Melalui mekanisme tersebut, Perseroan memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara profesional, rahasia, dan objektif, sehingga dapat menjaga integritas organisasi sekaligus mendorong terbentuknya budaya perusahaan yang berlandaskan etika, transparansi, dan akuntabilitas.

ALUR PROSES PENGADUAN PELANGGARAN

Berikut merupakan alur proses pengaduan pelanggaran yang diterapkan oleh Perseroan untuk memastikan setiap laporan diterima, diproses, serta ditindaklanjuti secara akuntabel dan bertanggung jawab:

2. Conducting reviews, assessments, and initial selection of reports to determine eligibility for further action;
3. Maintaining the confidentiality of whistleblowers' identities;
4. Recommending the establishment of a Fact-Finding Team for further investigation if necessary;
5. Submitting reports of alleged violations to the Honor Council for recommendations, which are then forwarded to Top Management, namely the Board of Directors; and
6. Documenting all reports of alleged violations along with their handling processes.

MECHANISM FOR HANDLING VIOLATION REPORTS

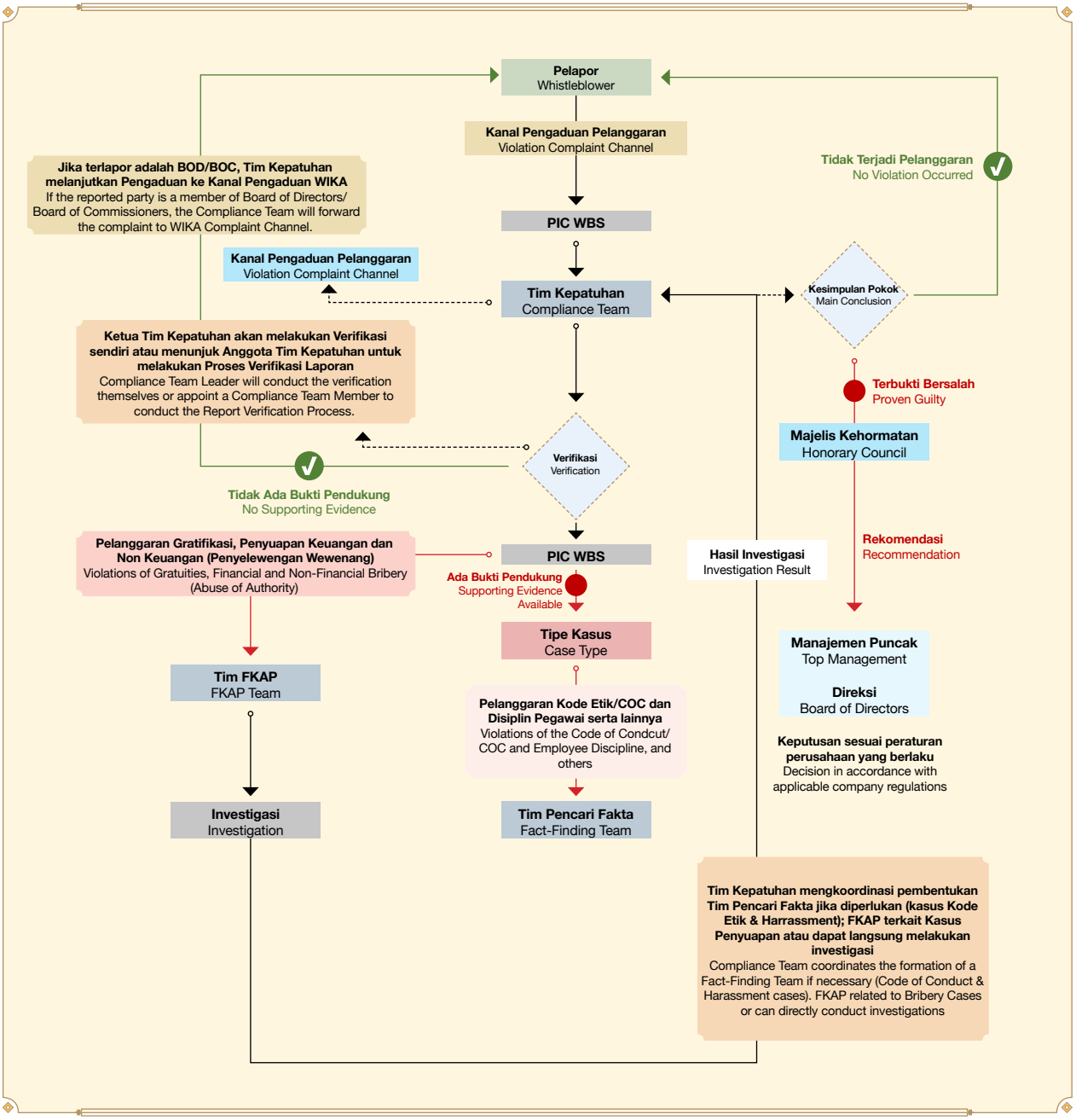
As part of its commitment to implementing Good Corporate Governance principles, the Company has developed a structured, systematic, and transparent Whistleblowing System mechanism. This system provides a channel for all Company people and external stakeholders to report alleged violations occurring within the work environment.

Through this mechanism, the Company ensures that every report is handled professionally, confidentially, and objectively, thereby maintaining organizational integrity and fostering a corporate culture based on ethics, transparency, and accountability.

VIOLATION REPORT HANDLING PROCESS FLOW

The following is the process flow applied by the Company to ensure that every report is received, processed, and followed up in an accountable and responsible manner:

Alur Proses Pengaduan Pelanggaran PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Violation Reporting Process Flow of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaporkan terdapat 7 (tujuh) pengaduan kasus pelanggaran yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Perseroan tetap secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pelaporan pelanggaran. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk memastikan sistem pengaduan berjalan secara optimal, menjamin perlindungan terhadap pelapor, serta menjaga budaya integritas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi.

HANDLING OF COMPLAINTS IN 2025

Throughout 2025, the Company reported a total of 7 (seven) complaints of violation cases submitted through the Whistleblowing System mechanism.

The Company continues to actively monitor and evaluate the effectiveness of the implementation of its whistleblowing policy. This effort is part of the Company's commitment to ensuring that the complaint system operates optimally, provides protection for whistleblowers, and maintains a culture of integrity and compliance across all organizational levels.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagai bagian integral dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan memastikan setiap aktivitas Perseroan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi menjaga integritas organisasi, tetapi juga melindungi Perseroan dari potensi risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat praktik yang tidak etis.

Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, Perseroan secara konsisten mengedepankan kepentingan perusahaan di atas kepentingan individu, keluarga, maupun kelompok tertentu. Untuk itu, Perseroan mengacu pada kebijakan anti-korupsi yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai wujud komitmen manajemen terhadap penerapan kebijakan tersebut, seluruh jajaran manajemen diwajibkan menandatangani pakta integritas. Langkah ini mencerminkan keseriusan Perseroan dalam menegakkan standar etika yang tinggi serta mencegah terjadinya praktik korupsi di seluruh aspek operasional perusahaan.

The Company is consistently committed to preventing and avoiding practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) as an integral part of implementing Good Corporate Governance principles. This commitment is realized through various strategic measures aimed at ensuring that all Company activities are carried out in a transparent, accountable manner and in compliance with applicable laws and regulations. This policy not only safeguards organizational integrity but also protects the Company from potential risks and losses arising from unethical practices.

In every decision-making process and policy formulation, the Company consistently prioritizes corporate interests over individual, family, or group interests. Accordingly, the Company refers to an anti-corruption policy aligned with Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption.

As a manifestation of management's commitment to implementing this policy, all members of management are required to sign an integrity pact. This step reflects the Company's seriousness in upholding high ethical standards and preventing corrupt practices in all aspects of its operations.

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA *(KICKBACKS)*, *FRAUD*, SUAP DAN/ ATAU GRATIFIKASI DALAM PERUSAHAAN

1. Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No. WGGEA- PM-02 yang diberlakukan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Prosedur Pengaduan Pelanggaran Terhadap *Code of Conduct* (*Whistle Blower)* No. Dok: WG-GEA-PM-07, No. Rev: 02, tanggal 31 Juli 2024;
3. Prosedur Pengendalian Gratifikasi Nomor: WG-GEA-PM-06, No. Rev: 04 tanggal 2 Desember 2024;
4. Pedoman Etika Dan Perilaku (*Code of Conduct*) Nomor: SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 tanggal 15 Januari 2025;
5. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Nomor: DK.01.01/A. KOM.00001.WEGE/2024 dan Nomor: SK.01.01/A. DIR.00001. WEGE/2024 tanggal 19 Desember 2024;
6. Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance Nomor: SK.01.09/WG.419/2021 tanggal 30 September 2021;
7. Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
8. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
9. Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Penandatanganan Bebas Benturan Kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan

PROGRAMS AND PROCEDURES CARRIED OUT TO ADDRESS CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND/OR GRATIFICATION WITHIN THE COMPANY

1. Anti-Bribery Management System Procedure (ABMS) No. WGGEA-PM-02, effective October 28, 2024;
2. Whistleblowing Procedure for Violations of the Code of Conduct No. Doc: WG-GEA-PM-07, Rev. 02, dated July 31, 2024;
3. Gratification Control Procedure No. WG-GEA-PM-06, Rev. 04, dated December 2, 2024;
4. Code of Conduct Guideline No. SK.01.01/A.DIR.00001. WEGE/2025 dated January 15, 2025;
5. Conflict of Interest Handling Guideline No. DK.01.01/A. KOM.00001.WEGE/2024 and No. SK.01.01/A.DIR.00001. WEGE/2024 dated December 19, 2024;
6. Good Corporate Governance Implementation Guideline No. SK.01.09/WG.419/2021 dated September 30, 2021;
7. Anti-Bribery Management System Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
8. Integrated Governance Policy of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
9. Signing of Commitment to Implement the Code of Conduct by the Board of Directors and Board of Commissioners;
10. Signing of Conflict of Interest-Free Statement by the Board of Directors and Board of Commissioners; and

11. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI-KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Selama tahun 2025, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh karyawan. Melalui fungsi Corporate Secretary, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang mencakup informasi terkait praktik suap dan gratifikasi, baik secara rutin maupun insidental, guna mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Kegiatan tersebut antara lain meliputi sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengendalian gratifikasi, *Code of Conduct, Whistleblowing System* (WBS), serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) baik di kantor pusat maupun di seluruh unit operasional. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam menciptakan budaya yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, serta memastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi memahami dan menerapkan standar etika yang tinggi.

11. Signing of Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners.

ANTI-CORRUPTION TRAINING/ SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

Throughout 2025, the Company remained committed to strengthening corruption prevention efforts through comprehensive training and socialization for all employees. Through the Corporate Secretary function, the Company conducted various socialization activities covering information on bribery and gratification practices, both regularly and incidentally, to create a corruption-free work environment. These activities included the socialization of the Anti-Bribery Management System (SMAP), gratification control, Code of Conduct, Whistleblowing System (WBS), and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, both at the head office and across all operational units. This reflects the Company's strong commitment to fostering a transparent, accountable, and corruption-free culture, ensuring that every individual within the organization understands and upholds high ethical standards.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

Pengendalian gratifikasi di Perseroan diatur dalam Prosedur Pengendalian Gratifikasi Nomor Dokumen WG-GEA-PM-06 Revisi 04 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2024. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dan/atau penerimaan uang atau setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya dengan nilai berapa pun, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik gratifikasi, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan gratifikasi serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan menetapkan batasan atas pemberian yang diperbolehkan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah, cenderamata, dan/atau jamuan berupa makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas kewajaran, memperhatikan prinsip hubungan yang setara, saling menghormati, serta tidak bertujuan untuk menyuap atau memengaruhi pihak tertentu agar memberikan keuntungan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum. Frekuensi pemberian juga tidak boleh dilakukan secara berulang atau berlebihan sehingga menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik pemberian tersebut.
2. Pemberian hadiah atau cendera mata berupa barang untuk keperluan promosi Perseroan wajib mencantumkan logo Perseroan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud, tidak dapat dihilangkan, serta memiliki nilai yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian honorarium rapat kepada pihak ketiga diperbolehkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran dan keahlian yang diberikan kepada Perseroan berdasarkan undangan resmi Perseroan, sepanjang pemberian tersebut tidak dilarang oleh kode etik maupun peraturan internal instansi pihak ketiga yang bersangkutan.
4. Setiap penolakan, penerimaan, pemberian, atau permintaan gratifikasi yang diduga sebagai suap maupun gratifikasi terkait kedinasan wajib dilaporkan dan dicatat dalam formulir yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan serta diketahui oleh atasan langsung dan Corporate Secretary.
5. Setiap pemberian yang dilakukan wajib dicatat dan didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi serta diketahui oleh atasan langsung dan Corporate Secretary.

Gratification control within the Company is governed by Gratification Control Procedure No. WG-GEA-PM-06 Revision 04, effective December 2, 2024. Gratification is defined as giving and/or receiving money or cash equivalents, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, accommodation facilities, holiday trips, free medical services, and other facilities of any value, whether received domestically or internationally, and whether conducted with or without electronic means.

To prevent gratification practices, the Company continuously conducts socialization activities to enhance employees' understanding and awareness of the importance of preventing gratification and complying with applicable policies and procedures.

MANAGEMENT OF GRATIFICATION CONTROL

The Company establishes the following limits for permissible giving:

1. Gifts, souvenirs, and/or hospitality in the form of meals and/or entertainment is permitted as long as it is intended to foster good relations within reasonable limits, adheres to the principles of equal relationships and mutual respect, and is not intended to bribe or influence certain parties to provide benefits to which the Company is not legally entitled. The frequency of such gifts should also not be repeated or excessive, giving rise to suspicions of a particular interest behind the gift.
2. Gifts or souvenirs in the form of goods for Company promotional purposes must include the Company's logo as an integral part of the goods, cannot be removed, and must have a reasonable value in accordance with applicable regulations.
3. Meeting honorariums to third parties is permitted as a form of appreciation for the contribution of ideas and expertise provided to the Company based on the Company's official invitation, as long as such provision is not prohibited by the code of ethics or internal regulations of the third party concerned.
4. Any refusal, acceptance, provision, or request for gratuities suspected of being bribes or official-related gratuities must be reported and recorded on a form completed by the employee concerned and acknowledged by the immediate superior and the Corporate Secretary.
5. Every gift given must be recorded and documented on a form completed by the employee as the giver and acknowledged by their immediate superior and the Corporate Secretary.

Perseroan juga menetapkan batasan atas penerimaan yang diperbolehkan sebagai berikut:

1. Penerimaan hadiah, cenderamata, dan/atau jamuan berupa makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang masih dalam batas kewajaran serta dengan frekuensi yang tidak terlalu sering, sehingga tidak dimaksudkan sebagai upaya penyuapan.
2. Penerimaan hadiah atau cenderamata yang mencantumkan logo atau nama perusahaan pemberi diperbolehkan dengan ketentuan:
   a. Logo atau nama perusahaan pemberi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan promosi;
   b. Nilai hadiah atau cenderamata berada dalam batas kewajaran dengan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019; dan
   c. Pemberian tersebut tidak melanggar ketentuan kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap penerimaan hadiah, cenderamata, atau fasilitas lainnya wajib dicatat dalam formulir yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak penerima serta diketahui oleh atasan langsung dan Corporate Secretary.
4. Penerimaan honorarium sebagai pembicara atau narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga diperbolehkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran dan keahlian, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta tidak bertentangan dengan kode etik atau peraturan internal Perseroan.
5. Penerimaan hiburan dalam batas kewajaran diperbolehkan dengan ketentuan:
   a. Tidak dilakukan secara terus-menerus;
   b. Tidak mencakup pembiayaan bagi anggota keluarga atau teman;
   c. Tidak mencakup pembayaran biaya liburan;
   d. Pembiayaan perjalanan, akomodasi, dan konsumsi dibatasi pada kebutuhan yang wajar dan relevan dengan tujuan kegiatan;
   e. Tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam hubungan bisnis antara Perseroan dan pihak ketiga yang menawarkan hiburan;
   f. Tidak mengganggu waktu kerja pegawai yang bersangkutan; dan
   g. Tidak disertai pembahasan atau permintaan informasi internal Perseroan yang berpotensi menimbulkan kecurangan (*fraud*) atau benturan kepentingan.
6. Dalam hal terdapat penerimaan hadiah, cenderamata, dan/atau hiburan di luar batasan yang telah ditetapkan, karyawan wajib melaporkan hal tersebut melalui mekanisme berikut:
   a. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), untuk penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, yang selanjutnya diteruskan oleh UPG kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku;
   b. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System),* apabila pelapor merupakan karyawan Perseroan atau pihak lain yang mengetahui adanya gratifikasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan
   c. Formulir laporan penolakan/penerimaan/pemberian/permintaan gratifikasi yang diisi oleh pegawai yang

The Company also sets the following limits on permissible receipts:

1. Acceptance of gifts, souvenirs, and/or meals and/or entertainment is permitted as long as it is within reasonable limits and not too frequent and is not intended as an attempt to bribe.
2. Acceptance of gifts or souvenirs bearing the logo or name of the giving company is permitted provided that:
   a. The logo or name of the giving company is an integral part of the promotional activity;
   b. The value of gift or souvenir is within reasonable limits, as stipulated in KPK Regulation No. 2 of 2019; and
   c. The gift does not violate morality or applicable laws and regulations.
3. Every acceptance of gifts, souvenirs, or other facilities must be recorded on a form completed by the employee as the recipient and acknowledged by their immediate superior and the Corporate Secretary.
4. Accepting an honorarium as a speaker or resource person officially invited by a third party is permitted as a form of appreciation for contributions of thought and expertise, as long as it is not intended to influence employees in carrying out their duties and positions and does not conflict with the Company's code of ethics or internal regulations.
5. Accepting entertainment within reasonable limits is permitted provided that:
   a. It is not done on a continuous basis;
   b. It does not include expenses for family members or friends;
   c. It does not include payment for vacation expenses;
   d. The cost of travel, accommodation, and meals is limited to reasonable needs and relevant to the purpose of the activity;
   e. It does not create a conflict of interest in the business relationship between the Company and the third party offering the entertainment;
   f. It does not interfere with the employee's work time; and
   g. It is not accompanied by discussions or requests for internal Company information that could potentially lead to fraud or a conflict of interest.
6. In the event of receiving gifts, souvenirs, and/or entertainment beyond the established limits, employees are required to report the matter through the following mechanisms:
   a. The Gratification Control Unit (UPG), for receipts related to their position and contrary to their obligations or duties, must report the receipt within 10 (ten) working days from the date of receipt, which the UPG will then forward to the Corruption Eradication Commission (KPK) in accordance with applicable regulations;
   b. The Whistleblowing System, if the reporter is a Company employee or another party aware of a gratuity that could potentially lead to abuse of authority or position; and
   c. A gratuity rejection/acceptance/granting/request report form completed by the employee concerned as the recipient

bersangkutan sebagai pihak penerima serta diketahui oleh atasan langsung dan Corporate Secretary.

7. Dalam kondisi tertentu, apabila personel Perseroan tidak dapat menghindari penerimaan pemberian dari mitra kerja tanpa sepengetahuannya, atau apabila barang, uang, atau setara uang telah dititipkan melalui pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka personel tersebut wajib melaporkan penerimaan dimaksud kepada UPG.
8. Terhadap gratifikasi berupa barang yang mudah rusak, busuk, atau kedaluwarsa (seperti makanan, minuman, dan buah-buahan), barang tersebut wajib diserahkan kepada UPG untuk ditetapkan pemanfaatannya dengan disertai bukti penyerahan. Pemanfaatan dapat dilakukan melalui penyaluran kepada panti asuhan, panti sosial, dan/atau pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan pelapor. Dalam hal barang telah rusak, busuk, atau kedaluwarsa, UPG berwenang melakukan pemusnahan terhadap barang dimaksud.

and acknowledged by their immediate superior and the Corporate Secretary.

7. Under certain circumstances, if Company personnel cannot avoid accepting gifts from business partners without their knowledge, or if goods, money, or cash equivalents have been entrusted to another party without the person's knowledge, the personnel are required to report the receipt to the UPG.
8. For gratifications in the form of perishable, rotten, or expired goods (such as food, drinks, and fruit), these goods must be submitted to the UPG to determine their use, accompanied by proof of delivery. Utilization can be carried out through distribution to orphanages, social institutions, and/or other parties who do not have a conflict of interest with the reporter. If the goods are damaged, rotten, or expired, the UPG has the authority to destroy the goods in question.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Prosedur Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Selain sanksi internal, pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

Any violation of the Gratification Control Procedure will be subject to sanctions in accordance with the Company's internal policies and regulations. In addition to internal sanctions, such violations may also be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 12B paragraphs (1) and (2) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Diagram Alir Urutan Kerja & Tanggaung Jawab Memberi Hadiah/Bingkisan/Cinderamata/Hiburan
Flowchart of Sequence & Responsibilities for Giving Gifts/Parcels/Souvenirs/Entertainment

No.	Alur Proses Process Flow	Uraian Kegiatan Activity Description	Matriks Penanggung Jawab PIC Matrix R	A	S	C	I	Input	Output
A		Pemberian Hadiah/Bingkisan/ Cinderamata/Hiburan Giving Gifts/Parcels/Souvenirs/ Entertainment Reporting to immediate superior within 7 days of the gift							
1		Pelaporan kepada atasan langsung maksimal 7 hari setelah pemberian Reporting to the relevant Acting Head of FFS within 2 working days	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)		Atasan Langsung Direct Supervisor				
2		Pelaporan kepada Pimpinan PjFs terkait maksimal 2 hari kerja	Atasan Langsung Pelapor Reporter's Direct Supervisor		Pimpinan PjFs Head of PjFs				
3		Penerimaan Laporan Report Receipt	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)		UPG				

Diagram Alir Urutan Kerja & Tanggaung Jawab Memberi Hadiah/Bingkisan/Cinderamata/Hiburan
Flowchart of Sequence & Responsibilities for Giving Gifts/Parcels/Souvenirs/Entertainment

No.	Alur Proses Process Flow	Uraian Kegiatan Activity Description	Matriks Penanggung Jawab PIC Matrix R	A	S	C	I	Input	Output
4		Pemberian ke pihak ketiga dikabulkan UPG yang dikembalikan ke atasan langsung untuk dikembalikan kepada pemberi dan bukti pengiriman pemberian diberikan ke Pimpinan PjFs terkait, Finance Division, Corporate Secretariat dan Direktur Keuangan, HC dan Manajemen Risiko Gifts to third parties are approved by the UPG and returned to immediate superior for return to the giver. Proof of delivery is provided to the relevant Acting Head of FFS, Finance Division, Corporate Secretariat, Director of Finance, Human Capital Department, and Risk Management.	UPG	Atasan Langsung Pelapor Reporter's Direct Supervisor	Pimpinan PjFk Finance, Corporate Secretary Head of PjFk Finance, Corporate Secretary		DKHCMR		Bukti Pengiriman Proof of delivery
5		Pemberian ke pihak ketiga tidak dikabulkan UPG juga dikembalikan ke atasan langsung If the gift to a third party is not approved, the UPG will also return it to the immediate superior.	UPG	Atasan Langsung Pelapor Reporter's Direct Supervisor	Pimpinan PjFk Finance, Corporate Secretary Head of PjFk Finance, Corporate Secretary		DKHCMR		
6		Pengiriman (untuk gratifikasi yang dikabulkan) Delivery (for approved gratuities)	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)	Atasan Langsung Pelapor Reporter's Direct Supervisor			UPG		
7		Penyerahan Bukti Pengiriman Submission of Proof of Delivery	Pelapor (Pegawai) Reporter (Employee)	Atasan Langsung Pelapor Reporter's Direct Supervisor			UPG		

R (*Responsible*): adalah pihak yang melaksanakan kegiatan
A (*Accountable*): adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
S (*Support*): adalah pihak yang mendukung kegiatan
I (*Inform*): adalah pihak yang diinformasikan terhadap perkembangan kegiatan
R (Responsible): is the party carrying out the activity
A (Accountable): is the party responsible for the activity
S (Support): is the party supporting the activity
I (Inform): is the party that is informed about the progress of the activity

LAPORAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memastikan pelaporan gratifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GRATIFICATION MANAGEMENT REPORT IN 2025

Throughout 2025, there were no reports of gratification received by the Gratification Control Unit (UPG). The Company remains committed to ensuring that gratification reporting is conducted transparently and accountably in accordance with applicable laws and regulations.

Hubungan dengan Kreditur
Relations With Creditors

Sebagai wujud penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan senantiasa menjaga hubungan yang profesional, transparan, dan berlandaskan kepercayaan dengan para kreditur. Perseroan meyakini bahwa hubungan yang didukung oleh keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap perjanjian, serta pemenuhan komitmen secara konsisten merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

Kebijakan Perseroan terkait hubungan dengan kreditur antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan menetapkan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban Perseroan terhadap kreditur, termasuk pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati, pengungkapan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permohonan maupun selama penggunaan fasilitas pinjaman, serta pemenuhan covenant sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu guna melindungi kepentingan kreditur.
2. Perseroan memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) atau penyimpangan dalam penggunaan dan penyediaan dana, serta menjamin bahwa pendapatan operasional digunakan secara proporsional untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang jangka panjang.
3. Perseroan secara konsisten menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

Prinsip-prinsip hubungan dengan kreditur tersebut tercantum dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris WEGE Nomor SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 tanggal 15 Januari 2025. Komitmen terhadap penerapan pedoman tersebut diperkuat melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal yang sama.

Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan seluruh kreditur guna mendukung pertumbuhan usaha serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

As a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance principles, the Company consistently maintains professional, transparent, and trust-based relationships with its creditors. The Company believes that relationships supported by information transparency, compliance with agreements, and consistent fulfillment of commitments are essential factors in maintaining financial stability and supporting long-term business sustainability.

The Company's policies regarding relations with creditors include the following:

1. The Company establishes policies governing the Company's rights and obligations towards creditors, including the fulfillment of obligations in accordance with agreed agreements, transparent, accurate, and timely disclosure of information both at the time of application and during the use of loan facilities, and the fulfillment of covenants as a form of the Company's commitment to take or not take certain actions to protect the interests of creditors.
2. The Company ensures that there are no mismatches or irregularities in the use and provision of funds, and guarantees that operating income is used proportionally to meet long-term debt interest and principal payments.
3. The Company consistently provides complete, accurate, and timely information to creditors in accordance with the provisions stipulated in the agreement.

The principles of relations with creditors are set out in the Company's Code of Conduct, as stipulated in Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners of WEGE No. SK.01.01/A.DIR.00001.WEGE/2025 dated January 15, 2025. Commitment to implementing these guidelines is reinforced by the signing of the Statement of Commitment to Implement the Code of Conduct by all members of Board of Directors and Board of Commissioners on the same date.

The Company is committed to continuing to foster healthy and sustainable relationships with all creditors to support business growth and maintain stakeholder trust.

Tata Kelola Pengadaan dan Kemitraan
Procurement and Partnership Governance

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Komitmen tersebut diperkuat melalui penerapan kebijakan dan pedoman baku yang mengatur pelaksanaan pengadaan di lingkungan Perseroan, termasuk ketentuan dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemasok dan mitra usaha.

Komitmen tersebut diimplementasikan secara konsisten melalui prosedur pengadaan yang berlaku di seluruh lini operasional Perseroan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong praktik pengadaan yang berintegritas serta mendukung terwujudnya tata kelola yang bersih (*clean governance*) pada setiap tahapan proses pengadaan.

Dalam pemberian pekerjaan kepada mitra kerja, Perseroan menetapkan kriteria penilaian yang antara lain meliputi:
1. Memiliki keahlian, pengalaman, serta kemampuan teknis dan manajerial yang memadai sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, yang dibuktikan melalui kualifikasi dari asosiasi atau lembaga yang berwenang;
2. Memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal;
3. Memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Tidak pernah memberikan pernyataan yang tidak benar terkait kualifikasi yang dimiliki; dan
5. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Perseroan menyadari bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional serta pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Perseroan senantiasa berpegang pada filosofi pengadaan barang dan jasa, mematuhi etika dan norma yang berlaku, serta menerapkan prinsip, metode, dan proses pengadaan yang baku dan terstandarisasi.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan peningkatan kemampuan pemasok bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasok Perseroan berjalan secara efisien, wajar, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan, mengingat kemampuan pemasok dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja dan output Perseroan.

Sebagai pedoman, Perseroan menetapkan nilai dan prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang wajib dipatuhi oleh seluruh pemasok, yaitu:

The Company is committed to implementing procurement processes for goods and services in a transparent and accountable manner, in line with the principles of Good Corporate Governance. This commitment is reinforced through the implementation of standard policies and guidelines governing procurement within the Company, including the provisions of the Code of Conduct, which must be adhered to by all suppliers and business partners.

This commitment is consistently implemented through procurement procedures applicable across all lines of the Company's operations. This step aims to encourage procurement practices with integrity and support the realization of clean governance at every stage of the procurement process.

In giving any work to partners, the Company establishes assessment criteria, including:
1. Possess adequate expertise, experience, and technical and managerial capabilities in accordance with the business field, as evidenced by qualifications from authorized associations or institutions;
2. Possess the necessary resources to carry out the work optimally;
3. Possess a strong and accountable track record;
4. Never make false statements regarding their qualifications; and
5. Establish mutually beneficial cooperation.

The Company recognizes that procurement of goods and services plays a strategic role in supporting smooth operations and achieving national development goals. Therefore, in its implementation, the Company consistently adheres to the procurement philosophy of goods and services, adheres to applicable ethics and norms, and applies standardized procurement principles, methods, and processes.

PRINCIPLES OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The supplier capability development policy aims to ensure that the Company's supply chain operates efficiently, fairly, transparently, and accountably. This policy plays an important role in supporting the sustainability of the Company's business activities, considering that suppliers' ability to provide the required goods and/or services directly affects the quality of the Company's performance and output.

As a guideline, the Company establishes core values and principles in the procurement of goods and services that must be adhered to by all suppliers, namely:

1. Efisien, pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan dana dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan;
3. Terbuka dan bersaing, pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan secara terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan serta melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang jelas;
4. Transparan, seluruh ketentuan dan informasi terkait pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk persyaratan teknis dan administrasi, metode evaluasi, serta penetapan calon penyedia, disampaikan secara terbuka kepada peserta dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan;
5. Adil dan tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh calon penyedia barang dan/atau jasa tanpa memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apa pun; dan
6. Akuntabel, seluruh proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan finansial serta memberikan manfaat bagi kelancaran operasional Perseroan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEMASOK

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa guna memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan secara efektif serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga kualitas proses pengadaan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan yang berkelanjutan dengan pemasok dan mitra kerja.

Selama tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan tanggung jawab terhadap pemasok dan mitra kerja, antara lain:

1. Melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
2. Melaksanakan proses kualifikasi mitra kerja secara adil, setara, dan terukur melalui sistem aplikasi pengadaan (dppm.wikagedung.co.id), yang dilengkapi dengan evaluasi kinerja serta program pembinaan vendor;
3. Mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa sesuai dengan nilai, kriteria, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) guna memperluas kesempatan kerja dan memperkuat industri nasional;
5. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk nilai dan kategori tertentu sesuai dengan ketentuan prosedur Perseroan;
6. Mengintegrasikan sistem kualifikasi mitra kerja dengan sistem pembuatan kontrak serta mengintegrasikan proses pembayaran dengan sistem keuangan Perseroan;

1. Efficient, procurement of goods and/or services is carried out by optimizing the use of available funds and resources to achieve predetermined targets in a timely and accountable manner;
2. Effective, procurement must be aligned with established needs and provide optimal benefits in accordance with the intended objectives;
3. Open and competitive, procurement is conducted openly for eligible providers and through fair competition based on clear criteria and procedures;
4. Transparent, all provisions and information related to procurement, including technical and administrative requirements, evaluation methods, and supplier selection, are disclosed openly to participants and accessible to relevant stakeholders;
5. Fair and non-discriminatory, equal treatment is given to all prospective providers without granting undue advantage to any party by any means or for any reason; and
6. Accountable, all procurement processes can be accounted for administratively, technically, and financially, and provide benefits to the Company's operational continuity in accordance with applicable principles and regulations.

CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES TOWARD SUPPLIERS

The Company periodically evaluates its procurement processes to ensure that all stages are carried out effectively and in compliance with applicable requirements and regulations. This evaluation is part of the Company's efforts to maintain procurement quality while strengthening sustainable partnerships with suppliers and business partners.

Throughout 2025, the Company carried out various responsibilities toward suppliers and partners, including:

1. Conducting all procurement processes in accordance with applicable procedures and regulations;
2. Implementing a fair, equal, and measurable partner qualification process through the procurement application system (dppm.wikagedung.co.id), supported by performance evaluations and vendor development programs;
3. Encouraging the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in procurement activities in accordance with applicable laws and regulations;
4. Increasing the use of domestic products (Domestic Component Level/TKDN) to expand employment opportunities and strengthen national industry;
5. Optimizing procurement processes through the use of information technology and electronic transactions for certain values and categories in accordance with Company procedures;
6. Integrating partner qualification systems with contract generation systems and aligning payment processes with the Company's financial system;

7. Menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerja dan/atau divisi secara transparan sesuai kewenangan yang berlaku;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan;
9. Menyelenggarakan kegiatan *Vendor Gathering* secara berkala sebagai sarana untuk memperkuat hubungan kemitraan, meningkatkan sinergi, serta berbagi informasi mengenai perkembangan dan inovasi dalam pengadaan barang dan jasa;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja mitra kerja secara periodik untuk menjaga kualitas pekerjaan serta penerapan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (HSE). Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam menyaring mitra kerja yang berkinerja baik dan mengidentifikasi mitra kerja yang tidak memenuhi standar kredibilitas;
11. Memberikan kesempatan kepada mitra kerja untuk menilai kinerja Perseroan sebagai kontraktor dari aspek keterbukaan, keadilan (*fairness*), dan komitmen pembayaran. Berdasarkan hasil penilaian kepuasan mitra kerja tahun 2024, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kepuasan, khususnya pada aspek komitmen pembayaran sebagai prioritas utama;
12. Menyediakan platform berbasis web untuk menerima pengaduan dan keluhan dari pemangku kepentingan dan mitra kerja sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016, yang mencerminkan komitmen Perseroan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas; dan
13. Melaksanakan penilaian *Vendor Satisfaction Index* setiap enam bulan sekali guna memungkinkan mitra kerja membandingkan kualitas kinerja Perseroan dengan kontraktor lain, baik BUMN maupun swasta, serta mendorong perbaikan berkelanjutan atas layanan dan kinerja Perseroan.

7. Conducting procurement activities within each work unit and/or division transparently in accordance with delegated authority;
8. Maintaining the confidentiality of sensitive procurement documents to prevent irregularities in the procurement process;
9. Organizing regular Vendor Gathering events as a means to strengthen partnerships, enhance synergy, and share information on developments and innovations in procurement;
10. Monitoring and evaluating partner performance periodically to ensure work quality and the implementation of Health, Safety, and Environment (HSE) aspects. The results are used to identify high-performing partners and filter out those that do not meet credibility standards;
11. Providing opportunities for partners to assess the Company's performance as a contractor in terms of transparency, fairness, and payment commitment. Based on the 2024 partner satisfaction assessment, the Company is committed to improving satisfaction, particularly in payment commitment as a top priority;
12. Providing a web-based platform to receive complaints and feedback from stakeholders and partners as part of the Anti-Bribery Management System (SMAP) implementation in accordance with ISO 37001:2016, reflecting the Company's commitment to transparency, accountability, and integrity; and
13. Conducting Vendor Satisfaction Index assessments every six months to enable partners to benchmark the Company's performance against other contractors, both state-owned and private, and to drive continuous improvement in services and performance.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions

Perseroan senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya melalui publikasi laporan yang transparan dan akuntabel, baik melalui situs web Perseroan maupun kegiatan paparan publik, untuk periode tahunan maupun triwulanan. Penyusunan dan penyajian laporan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

The Company consistently discloses its financial and non-financial conditions to shareholders and other stakeholders through transparent and accountable reporting, both via the Company's website and public expose activities, on an annual and quarterly basis. The preparation and presentation of these reports are carried out in accordance with the procedures, types, and scope stipulated by the Financial Services Authority regulations.

Berikut beberapa informasi terkait transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Perseroan sepanjang tahun 2025 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan:

The following are several pieces of information related to the transparency of the Company's financial and non-financial conditions throughout 2025, which can be accessed through the Company's website:

No.	Jenis Informasi Type of Information	Periode Penerbitan Issuance Period	Pelaporan Reporting	Isi pengungkapan Disclosure Content
Informasi Keuangan Financial Information				
1	Laporan Publikasi Publication Report	Triwulanan Quarterly	Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia Financial Services Authority Indonesia Stock Exchange	Ringkasan Kinerja keuangan Sesuai persyaratan yang berlaku Performance Summary in accordance with applicable requirements
2	Laporan Publikasi Publication Report	Tahunan Annual	Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia Financial Services Authority Indonesia Stock Exchange	Ringkasan Kinerja keuangan sesuai persyaratan yang berlaku Financial Performance Summary in accordance with applicable requirements
Informasi Non Keuangan				
3	Lini Bisnis Line of Business	Insidentil Incidental	-	Jika terdapat informasi Mengenai perubahan lini bisnis perusahaan atas produk dan jasa If there is information regarding changes in the company's line of business for products and services
4	Kepengurusan Management	Insidentil Incidental	-	Jika terdapat informasi perubahan manajemen If there is information regarding changes in management
5	Kepemilikan	Bulanan Monthly	-	Informasi mengenai struktur kepemilikan saham Information regarding the share ownership structure

Keterlibatan dalam Aktivitas Politik
Involvement in Political Activities

Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta seluruh pegawai yang mewakili Perseroan dalam urusan pemerintahan dan politik untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

Perseroan mengakui dan menghormati hak setiap pegawai untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, Perseroan tidak membenarkan adanya tindakan pemaksaan, tekanan, maupun bentuk pembatasan lainnya yang dapat mengurangi kebebasan individu dalam menggunakan hak-hak politiknya.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menetapkan kebijakan bahwa pegawai yang aktif sebagai pengurus atau anggota partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah diwajibkan untuk mengundurkan diri dari Perseroan.

Selain itu, Perseroan menegaskan komitmennya terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan tidak memberikan kontribusi dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada kegiatan politik, partai politik, maupun pejabat publik. Sepanjang tahun pelaporan, Perseroan juga tidak menyalurkan dana perusahaan untuk mendukung aktivitas politik dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga independensi, integritas, serta memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company has a policy requiring Board of Commissioners, Board of Directors, management, and all employees representing the Company in governmental and political matters to always comply with applicable laws and regulations governing corporate involvement in public affairs.

The Company recognizes and respects the right of each employee to express their political aspirations in accordance with their respective beliefs. Therefore, the Company does not tolerate any form of coercion, pressure, or other restrictions that may limit individual freedom in exercising political rights.

In line with prevailing laws and regulations, the Company stipulates that employees who are actively serving as administrators or members of political parties and/or who run as candidates in general elections or regional head elections are required to resign from the Company.

Furthermore, the Company reaffirms its commitment to good corporate governance practices by not providing financial contributions, either directly or indirectly, to political activities, political parties, or public officials. During the reporting year, the Company did not allocate any corporate funds to support political activities in any form. This policy is part of the Company's efforts to maintain independence, integrity, and ensure that all business activities are conducted professionally, transparently, and in compliance with applicable laws and regulations.

Pencegahan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*)
Prevention of Insider Trading

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan menyediakan akses terhadap data dan informasi strategis kepada karyawan yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan optimal.

Perseroan juga menerapkan pengaturan yang ketat terkait batasan akses, penggunaan, dan penyebarluasan informasi tersebut. Setiap karyawan dilarang menggunakan maupun mengungkapkan data dan informasi strategis kepada pihak yang tidak berwenang, khususnya apabila informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi atau mengarah pada praktik transaksi berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*).

Dalam rangka mencegah terjadinya *insider trading*, Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan telah mengatur kebijakan khusus mengenai pengelolaan informasi material dan strategis. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa setiap informasi harus diperoleh melalui cara yang sah, dikelola secara bertanggung jawab, serta dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip etika, integritas, dan kepatuhan. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dipandang sebagai pelanggaran serius yang berpotensi merugikan Perseroan maupun pemegang saham.

As part of its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), the Company provides access to strategic data and information to employees who are authorized in accordance with their roles and responsibilities to support effective and optimal job performance.

The Company also enforces strict controls regarding limitation of access, use, and dissemination of such information. Employees are prohibited from using or disclosing strategic data and information to unauthorized parties, especially if such information could influence investment decisions or lead to insider trading practices.

To prevent insider trading, the Company's Code of Conduct establishes specific policies on the management of material and strategic information. These policies emphasize that all information must be obtained lawfully, managed responsibly, and kept confidential in accordance with principles of ethics, integrity, and compliance. Any violation of these provisions is considered a serious offense that may harm the Company and its shareholders.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Management of State Officials' Wealth Report (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan wujud komitmen Perseroan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). LHKPN juga merupakan program pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, khususnya Pasal 41 yang mewajibkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; dan
5. Peraturan internal Perseroan yang mengatur kewajiban dan tata kelola pelaporan LHKPN.

LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menjunjung tinggi asas umum penyelenggaraan negara serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya.

Setiap Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya melalui formulir LHKPN yang disediakan oleh KPK secara jujur, benar, dan lengkap. Laporan tersebut digunakan oleh KPK untuk melakukan analisis, evaluasi, dan penilaian atas jumlah, jenis, serta nilai harta kekayaan yang dilaporkan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BASIC PRINCIPLES OF THE STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

The management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) reflects the Company's commitment to preventing and eradicating corruption, as well as implementing Good Corporate Governance principles. LHKPN is also a government program aimed at ensuring clean governance, including within State-Owned Enterprises (SOEs), as stipulated in the following regulations:

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators Who Are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises, specifically Article 41, which requires members of Board of Directors, members of Board of Commissioners/Supervisory Board, and certain SOE officials appointed by the Board of Directors to submit an Asset Report in accordance with statutory provisions;
3. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 3 of 2024 on Second Amendment to Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement, and Examination of the Assets of State Administrators;
4. Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 on Amendments to Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 7 of 2016; and
5. The Company's internal regulations governing the obligations and governance of LHKPN reporting.

LHKPN is an important instrument in preventing Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices, managed by the Corruption Eradication Commission (KPK). The examination of LHKPN submitted to the KPK aims to ensure that State Officials uphold general principles of governance and remain free from corruption, collusion, nepotism, and other unethical conduct.

Each State Official is required to report their assets through the LHKPN form provided by the KPK in an honest, accurate, and complete manner. These reports are used by the KPK to analyze, evaluate, and assess the amount, type, and value of assets reported in an accurate, timely, and accountable manner.

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian LHKPN di lingkungan Perseroan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.01.09/A.DIR.01739/2023. Adapun pejabat Perseroan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi; dan
3. Vice President atau pejabat setingkat BOD-1.

TRANSPARANSI LHKPN PERUSAHAAN TAHUN 2025

Perseroan melaporkan transparansi kepatuhan penyampaian LHKPN oleh pejabat Perseroan untuk tahun 2025 sebagai berikut:

The procedures for submitting LHKPN within the Company are further regulated in Board of Directors Decree No. SK.01.09/A.DIR.01739/2023. The Company officials required to submit LHKPN are as follows:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors; and
3. Vice Presidents or officials at BOD-1 level.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S LHKPN IN 2025

The Company reported the transparency of compliance with LHKPN submissions by its officials for 2025 as follows:

No	Pejabat Official	Jumlah Wajib Lapor Number of Persons Required to Report	Jumlah yang Telah Melaporkan Number of Persons Reported	
			Jumlah Amount	%
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100%
2	Direksi Board of Directors	5	5	100%
3	Vice President atau pejabat setingkat BOD-1 Vice President or BOD-1 level official	12	12	100%
4	**Total**	**21**	**21**	**100%**

Pada tahun 2025, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN pejabat Perseroan kepada KPK untuk tahun pelaporan 2025 sebagai bagian dari implementasi praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan Perseroan.

In 2025, the Company has fulfilled its obligation to submit the LHKPN reports of its officials to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2025 reporting year, as part of implementing best practices in Good Corporate Governance (GCG) within the Company.

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Perseroan menyadari bahwa praktik *Bad Corporate Governance* dapat menghambat penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) serta berdampak negatif terhadap kinerja, reputasi, dan keberlanjutan usaha Perseroan.

The Company recognizes that Bad Corporate Governance practices may hinder the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and negatively impact the Company's performance, reputation, and business sustainability.

Sebagai wujud komitmen dalam menerapkan GCG secara konsisten dan berintegritas, Perseroan secara proaktif melakukan evaluasi internal guna mengidentifikasi serta mencegah potensi praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.

As part of its commitment to consistently and with integrity implement GCG, the Company proactively conducts internal evaluations to identify and prevent potential practices that deviate from established corporate governance principles.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan tindakan maupun menerapkan kebijakan yang termasuk dalam kategori *Bad Corporate Governance*. Hal tersebut tercermin pada tabel berikut:

Throughout 2025, the Company did not engage in any actions nor implement any policies categorized as Bad Corporate Governance. This is reflected in the following table:

No	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan Reports on the Company's activities polluting the environment	Tidak terdapat laporan atau indikasi pencemaran lingkungan oleh Perseroan There were no reports or indications of environmental pollution by the Company
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important matters currently being faced by the Company, its subsidiaries, members of Board of Directors, and/or members of Board of Commissioners are not disclosed in the Annual Report	Seluruh perkara material telah diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku All material matters have been disclosed in accordance with applicable regulations
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance in the disclosure of tax obligations	Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai peraturan The Company has fulfilled all tax obligations in a timely manner and in accordance with regulations
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-conformity of the presentation of Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK	Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan dan SAK The Annual Report and Financial Statements are presented in accordance with regulations and SAK
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan No disclosure of operating segments in the Financial Statements	Pengungkapan segmen operasi telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku Operating segment disclosures are presented in accordance with applicable regulations
6	Kasus terkait buruh dan karyawan Cases related to labor and employees	Tidak terdapat kasus perselisihan hubungan industrial atau pelanggaran ketenagakerjaan sepanjang tahun There were no cases of industrial relations disputes or labor violations throughout the year
7	Ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital Discrepancies between the Annual Report Book and the Digital Annual Report	Laporan Tahunan versi cetak dan digital telah disajikan secara konsisten dan sesuai The printed and digital versions of the Annual Report have been presented consistently and in accordance with regulations

Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Implementation of Aspects and Principles of Corporate Governance In Accordance with Financial Services Authority Regulations

Perseroan senantiasa menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan serta menjadikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasional. Komitmen tersebut menjadi landasan Perseroan dalam membangun sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab guna menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

The Company consistently implements Good Corporate Governance (GCG) practices by adhering to established standards and prioritizing compliance with laws and regulations in every operational aspect. This commitment serves as the foundation for the Company's development of a transparent, accountable, and responsible management system to create sustainable corporate value.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Perseroan secara konsisten berupaya memenuhi seluruh rekomendasi dan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

As a concrete manifestation of this commitment, the Company consistently strives to comply with all recommendations and guidelines stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Public Company Governance and Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS Increasing the Value of Holding GMS			
1	Perseroan memiliki metode atau prosedur teknis untuk mengumpulkan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. The Company has technical methods or procedures for collecting votes, both openly and secretly, that prioritize the independence and interests of Shareholders.	Diterapkan Applied	• Perseroan telah memiliki prosedur teknis pengumpulan suara yang terdapat dalam tata tertib RUPS. • Perusahaan melibatkan pihak ketiga yakni Notaris dan Biro Administrasi Efek untuk menjaga indepensi dan kepentingan Pemegang Saham dalam penghitungan suara di RUPS. • The Company has technical procedures for collecting votes, as outlined in the GMS rules of procedure. • The Company engages third parties, namely a Notary and a Share Registrar, to safeguard the independence and interests of Shareholders in the vote count at the GMS.
2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies must attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).	Diterapkan Applied	Semua anggota pengurus Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Company's management were present at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).
3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of GMS is available on Public Companies' website for at least one year.	Diterapkan Applied	Perseroan telah menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam situs web resmi Perseroan pada bagian Hubungan Investor dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. The Company has provided a summary of the minutes of AGM on its official website under the Investor Relations section in both Indonesian and English.
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors			
4	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public companies have a communication policy with shareholders or investors.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki wadah komunikasi kepada pemegang saham melalui Paparan Publik, Siaran Pers dan email pada situs web resmi Perusahaan. The Company maintains communication channel for shareholders through Public Exposes, Press Releases, and emails on its official website.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
5	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. Public companies disclose their communication policy with shareholders or investors on their websites.	Diterapkan Applied	Perseroan menyediakan akses keterbukaan informasi melalui situs web resmi Perusahaan. The Company provides access to information disclosure through its official website.
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners			
6	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 5 (lima) orang atau melebihi ketentuan minimal terdiri dari 2 (dua) orang, Jumlah tersebut sudah sesuai dengan berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014. The Company has a total of 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners or exceeding the minimum requirement of 2 (two) people. This number is in accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014.
7	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan berdasarkan POJK No. 33/ POJK.04/2014. Jumlah anggota Direksi Perusahaan adalah 5 (lima) orang atau melebihi ketentuan minimal terdiri dari 2 (dua) orang. The Company has complied with the provisions applicable to the company based on POJK No. 33/ POJK.04/2014. The number of members of the Company's Board of Directors is 5 (five) people or exceeds the minimum requirement of 2 (two) people.
8	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of Board of Commissioners takes into account the diversity of required expertise, knowledge, and experience.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan berdasarkan POJK No. 33/ POJK.04/2014. Keberagaman anggota Dewan Komisaris telah dijelaskan di bab GCG dari laporan tahunan ini. The Company has complied with the applicable regulations for the company under POJK No. 33/POJK.04/2014. The diversity of Board of Commissioners is explained in the GCG chapter of this annual report.
9	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of Board of Directors takes into account the diversity of required expertise, knowledge, and experience.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perseroan berdasarkan POJK No. 33/ POJK.04/2014. Keberagaman anggota Direksi telah dijelaskan di bab GCG dari laporan tahunan ini. The Company has complied with the applicable regulations for the company under POJK No. 33/ POJK.04/2014. The diversity of Board of Directors is explained in the GCG chapter of this annual report.
10	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of Board of Directors overseeing accounting or finance must possess expertise and/or knowledge in accounting.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan berdasarkan POJK No. 33/ POJK.04/2014. Perusahaan memiliki seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dengan latar belakang Pendidikan Akuntansi sebagaimana telah dijelaskan di bab Profil Perusahaan. The Company has complied with the applicable regulations for the companu under POJK No. 33/ POJK.04/2014. The Company has a member of Board of Directors who serves as Director of Finance with an educational background in Accounting, as explained in the Company Profile chapter.
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors			
11	Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memiliki Kebijakan *Assessment* Dewan Komisaris sebagaimana yang dijelaskan di Board Manual Dewan Komisaris bagian Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. The Company has a Board of Commissioners Assessment Policy, as explained in the Board Manual section on Board of Commissioners Performance Evaluation.
12	Direksi memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memiliki Kebijakan *Assessment* Direksi sebagaimana yang dijelaskan di *Board Manual* Direksi bagian Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. The Company has a Board of Directors Assessment Policy, as explained in the Board Manual section on Board of Commissioners Performance Evaluation.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
13	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Diterapkan Applied	Kebijakan dan implementasi penilaian kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan di bab GCG bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Commissioners performance assessment policy and implementation are disclosed in the GCG chapter section on Transparency of Information Related to Board of Commissioners and Board of Directors.
14	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Diterapkan Applied	Kebijakan dan implementasi penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan di bab GCG bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi. The Board of Directors performance assessment policy and implementation are disclosed in the GCG chapter section on Transparency of Information Related to Board of Commissioners and Board of Directors.
15	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board of Commissioners members if they are involved in financial crimes.	Diterapkan Applied	Board Manual Dewan Komisaris mengatur ketentuan bahwa anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya termasuk di dalamnya terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara. The Board Manual for Board of Commissioners stipulates that members of Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a resolution of the GMS, stating the reasons, including involvement in actions detrimental to the Company and/or the State.
16	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board of Directors members if they are involved in financial crimes.	Diterapkan Applied	Board Manual Direksi mengatur ketentuan bahwa anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya termasuk di dalamnya terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara. The Board Manual for Board of Directors stipulates that members of Board of Directors may be dismissed at any time based on a resolution of the GMS, stating the reasons, including involvement in actions detrimental to the Company and/or the State.
17	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function develops a succession policy for the nomination process for members of Board of Directors.	Diterapkan Applied	Perseroan telah memiliki kebijakan suksesi dan nominasi untuk calon anggota Direksi. The Company has a succession and nomination policy for prospective members of Board of Directors.
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation			
18	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider *trading*. Public companies have policies to prevent insider trading.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has a policy to prevent insider trading, as stipulated in the Company's Code of Conduct.
19	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan *anti-fraud*. Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya antikorupsi dan *anti-fraud* sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has a policy to prevent anti-corruption and anti-fraud, as stipulated in the Company's Code of Conduct.
20	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. Public Companies have policies regarding the selection and development of suppliers or vendors.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has policies regarding the selection and development of suppliers or vendors, as stipulated in the Company's Code of Conduct.
21	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Companies have policies regarding the fulfillment of creditors' rights.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur sebagaimana diatur di dalam *Code of Conduct* Perusahaan. The Company has policies regarding the fulfillment of creditors' rights, as stipulated in the Company's Code of Conduct.

No.	Rekomendasi Recommendation	Tanggapan Response	Penerapan Implementation
22	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*. Public Companies have whistleblowing policies.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. The Company has a whistleblowing system, as disclosed in this Annual Report.
23	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Companies have policies regarding the provision of long-term incentives to Directors and employees.	Diterapkan Applied	Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagaimana secara teknik diungkapkan didalam Prosedur Perseroan. The Company has a policy regarding the provision of long-term incentives to Directors and employees, as technically disclosed in the Company's Procedures.
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improving the Implementation of Information Disclosure			
24	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Public companies utilize information technology more extensively, in addition to websites, as a means of information disclosure.	Diterapkan Applied	Perseroan menggunakan media sosial, situs web resmi Perseroan, situs BEI, dan situs website eASY.KSEI sebagai pemenuhan aspek keterbukaan informasi. The Company utilizes social media, the Company's official website, the IDX website, and the eASY.KSEI website to fulfill its information disclosure requirements.
25	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of Public Companies discloses the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the Public Company's shares, in addition to disclosing the ultimate beneficial owners of the Public Company's shares through major and controlling shareholders.	Diterapkan Applied	Perseroan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan Sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan ini. The Company discloses the ultimate beneficial owner of the Company's shares as stated in this Annual Report.

Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021

Implementation of the 8 (Eight) Principles of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi** Roles and Responsibilities of Board of Directors		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: • berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; • beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; • berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta • berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) To achieve sustainable value creation, Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: • competitiveness and focus on long-term performance; • ethical and responsible conduct in conducting business; • contributing positively to society and the environment; and • ability to survive and grow (corporate resilience).	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi telah menjalankan pengelolaan perusahaan dengan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, dengan menyeimbangkan aspek kinerja keuangan, keberlanjutan usaha, serta kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Board of Directors has carried out company management with an orientation towards creating long-term value through the application of good governance principles, by balancing aspects of financial performance, business sustainability, and contributions to society and the environment.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by utilizing innovation and technology effectively.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi Perseroan telah disusun dan dijalankan secara selaras dalam rencana jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Board of Directors ensures that the Company's vision, mission, objectives and strategies have been formulated and implemented in harmony in short-term and long-term plans, with the support of innovation and the use of technology to increase the company's competitiveness.
Rekomendasi 3 & 4 Recommendation 3 & 4			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and that they comply with applicable laws and regulations and standards.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi telah menerapkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal secara terintegrasi dalam proses bisnis, guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board of Directors has implemented an integrated risk management and internal control system within business processes to support the achievement of company objectives and ensure compliance with applicable laws and regulations.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi memastikan bahwa sistem pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi telah dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan. Board of Directors ensures that the financial reporting and information disclosure system is implemented in a timely, accurate, and compliant manner, demonstrating transparency to stakeholders.
Rekomendasi 5 Recommendation 5			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi telah menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan. Board of Directors has prepared and submitted a sustainability report as part of the Company's commitment to integrating economic, social and environmental aspects into the company's operational activities.
Rekomendasi 6 Recommendation 6			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate objectives and strategies.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi telah membangun dan mengembangkan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis Perseroan, guna mendukung efisiensi operasional, pengelolaan risiko, serta peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Board of Directors has built and developed an information technology governance framework that is aligned with the Company's business needs and strategies, to support operational efficiency, risk management, and continuous improvement of the company's performance.
Rekomendasi 7, 8 & 9 Recommendation 7, 8 & 9			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations conducting business activities based on Sharia principles, Board of Directors must ensure adequate authority and the availability of supporting instruments to enable the Sharia Supervisory Board to effectively carry out its role.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional. The Company conducts its business activities by prioritizing the principles of good corporate governance and compliance with applicable laws and regulations, as the basis for all decision-making and operational implementation.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles for individual Directors, which can be stipulated in the Board of Directors Charter or through a Board of Directors Decree.	*Apply/Explain*	***Apply*** Direksi secara berkala melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap Piagam Direksi guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis, regulasi, serta kebutuhan organisasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Board of Directors periodically reviews and refines the Board of Directors Charter to ensure its alignment with business developments, regulations, and organizational needs to support effective implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes and proven guilty.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perseroan telah memiliki kebijakan terkait etika dan integritas, termasuk pengaturan mengenai pengunduran diri anggota Direksi dalam kondisi tertentu, sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. The Company has policies related to ethics and integrity, including provisions regarding the resignation of members of Board of Directors under certain circumstances, as part of its commitment to implementing good corporate governance principles.
1.2	**Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya** Performance Assessment – Board of Directors and its Members		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of Board of Directors and each individual director.	*Apply/Explain*	***Apply*** Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi secara berkala melalui mekanisme rapat dan penelaahan atas kinerja Perseroan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian target perusahaan, aspek strategis, serta kontribusi masing-masing anggota Direksi dalam mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan Board of Commissioners periodically evaluates the performance of Board of Directors through meetings and reviews of the Company's performance. Evaluations are conducted by considering the achievement of company targets, strategic aspects, and the contribution of each member of Board of Directors to supporting the company's overall performance.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. Board of Commissioners, with the advice of Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of President Director and other members of Board of Directors.	*Apply/Explain*	***Apply*** Dalam melakukan evaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, serta mengacu pada indikator kinerja yang relevan dengan strategi dan tujuan Perseroan, termasuk kinerja keuangan, operasional, dan aspek tata kelola. In evaluating the performance of Board of Directors, Board of Commissioners considers input from Nomination and Remuneration Committee, and refers to performance indicators relevant to the Company's strategy and objectives, including financial performance, operational performance, and governance aspects.
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of Board of Commissioners		
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 Recommendation 1, 2, 3, 4, 5 & 6			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, advises, and approves the corporation's long-term and short-term business and financial plans. Board of Commissioners provides advice and monitors the management of their implementation. Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are critical to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	*Apply/Explain*	***Apply*** Dewan Komisaris secara aktif melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap strategi korporasi yang disusun oleh Direksi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris memberikan arahan strategis, masukan, serta persetujuan atas rencana bisnis dan rencana keuangan Perseroan, serta melakukan pemantauan terhadap implementasinya guna memastikan keselarasan dengan tujuan dan kepentingan Perseroan. Board of Commissioners actively reviews and evaluates the corporate strategies formulated by Board of Directors, both short-term and long-term. Board of Commissioners provides strategic direction, input, and approval of the Company's business and financial plans, and monitors their implementation to ensure alignment with the Company's goals and interests.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require the Board of Commissioners' approval must be disclosed in the annual report.	*Apply/Explain*	***Apply*** Telah diinformasikan dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, pembahasan Dewan Komisaris. This has been disclosed in the Annual Report, under the GCG chapter, regarding the Board of Commissioners' discussions.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Taking into account the recommendations of Nomination and Remuneration Committee, Board of Commissioners proposes to, and for decision by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of Board of Directors and Board of Commissioners. In making these proposals, Board of Commissioners considers diversity, non-discrimination, and provides equal opportunities without distinction of ethnicity, religion, race, social class, or gender. Board of Commissioners ensures that the nomination and selection process for members of Board of Directors and Board of Commissioners is formal and transparent.	*Apply/Explain*	***Apply*** Rekomendasi ini dilakukan setiap tahun dan merupakan hal yang diminta oleh pemegang saham. This recommendation is made annually and is requested by shareholders.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. Board of Commissioners or the committee responsible for the nomination function develops a succession policy for the nomination process for members of Board of Directors. Board of Commissioners annually reviews the report on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019. Pada setiap tahunnya dilakukan pembahasan dengan Direksi dalam rapat Dewan komisaris. As stipulated in Board of Commissioners Policy Number 126/DK/WIKA/2019 dated December 20, 2019. Discussions with the Board of Directors are held annually during a Board of Commissioners meeting.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.5	Dewan Komisaris • Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; • secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners • Submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of Board of Directors and members of Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; • Periodically review the remuneration system for Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** • Hasil reviu KNRG dan usulan manajemen disampaikan pada Dewan Komisaris yang kemudian menjadi usulan kepada RUPS/ Pemegang saham seri A. • Bahan usulan didapatkan dari manajemen dan dilakukan diskusi dengan KNRG setiap tahun sekali. • The results of KNRG review and management proposals are submitted to the Board of Commissioners, which then become proposals to the GMS/Series A shareholders. • Proposal materials are obtained from management and discussed with the KNRG annually.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes when necessary.	*Apply/Explain*	***Apply*** Permintaan laporan pelaksanaan kepatuhan atas aturan baru dari manajemen. Kemudian ditindaklanjuti oleh KNRG dalam bentuk rapat. Apabila ada isu yang beresiko disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Requests reports on compliance with new regulations from management. The KNRG then follows up with meetings. Any risky issues are raised and placed on the agenda of a Board of Commissioners meeting, which is attended by the Board of Directors. As outlined in the Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
Rekomendasi 7 Recommendation 7			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that align with the corporation's goals, objectives, and strategies, while also complying with applicable laws and regulations, codes of conduct, and standards.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019. Melalui rapat KNRG dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/yang membidangi. Apabila ada isu yang beresiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi. As outlined in Board of Commissioners policy No. 126/DK/WIKA/2019 dated December 20, 2019. Discussions are held through KNRG meetings with relevant divisions. Any risky issues will be raised and placed on the agenda of Board of Commissioners meetings, which are attended by the Board of Directors.
Rekomendasi 8 Recommendation 8			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. Board of Commissioners oversees and directs the achievement of integrity in the corporate accounting and financial reporting systems, as well as the independence of the internal and external audit functions.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019. Melalui rapat Komite Audit ("KA") dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/yang membidangi. Apabila ada isu yang beresiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi As outlined in Board of Commissioners Policy Number 126/DK/WIKA/2019 dated December 20, 2019. Through Audit Committee ("AC") meetings, discussions are held with relevant divisions. If there are any risky issues, they will be brought to the agenda of Board of Commissioners meetings, which are attended by the Board of Directors.
Rekomendasi 9,10,11 & 12 Recommendation 9, 10, 11 & 12			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the Corporation's annual and sustainability reports, ensuring their integrity, and oversees the corporation's disclosure and communication processes.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hal ini tertuang dalam kebijakan Dewan Komisaris Nomor: 126/DK/WIKA/2019 tanggal 20 Desember 2019. Melalui rapat KA dilakukan pembahasan dengan divisi terkait/yang membidangi. Apabila ada isu yang beresiko akan disampaikan menjadi agenda rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi As stipulated in Board of Commissioners Policy Number 126/DK/WIKA/2019 dated December 20, 2019. Through Audit Committee meeting, discussions are held with relevant divisions/those in charge. If there are any risky, they will be brought to the agenda of the Board of Commissioners meeting, which will be attended by Board of Directors.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	*Apply/Explain*	***Apply*** Reviu piagam Dewan Komisaris termasuk organ dilakukan secara periodik minimal 3 (tiga) tahun sekali. Reviews of Board of Commissioners charter, including its organs, are conducted periodically, at least once every three years.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board of Commissioners members if they are involved in financial crimes and proven to have committed wrongdoing.	*Apply/Explain*	***Apply*** Mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. *Following applicable legal provisions.*
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are strongly encouraged to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tercantum dalam ketentuan *Board Manual* dan ketentuan hukum korporasi. As stated in the Board Manual and corporate law.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 13 Recommendation 13			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. President Commissioner serves as the coordinator of Board of Commissioners and ensures its effectiveness. President Commissioner fosters a culture of openness and constructive dialogue that allows for the expression of diverse views, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available for discussion of all items. Furthermore, Board of Commissioners must be provided with opportunities to meet with Board of Directors and senior management.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tercantum dalam ketentuan *Board Manual* dan Tata Cara Rapat Dewan Komisaris. Listed in the provisions of the Board Manual and the Procedures for Board of Commissioners Meetings.
Panduan Guidelines			
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the President Commissioner's duties are disclosed in the annual report and on the corporate website.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris, pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Listed in the provisions of the Board Manual and the Procedures for Board of Commissioners Meetings.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. President Commissioner coordinates the division of supervisory roles among the members of Board of Commissioners, leads Board meetings, and represents Board of Commissioners in matters with parties outside the Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam keputusan Dewan Komisaris, Nomor: 85/DK/WIKA/2021 tanggal 01 Oktober 2021. As stated in the Board of Commissioners' Decision Number 85/DK/WIKA/2021 dated October 1, 2021.
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of Board of Commissioners who are elected to the Board of Commissioners cannot be immediately appointed as President Commissioners. A two-year grace period is required before reappointment as President Commissioner. If Board of Commissioners decides that a former President Director/member of Board of Commissioners should become President Commissioner, Board of Commissioners shall provide the reasons and explanation in the Annual Report.	*Apply/Explain*	***Apply*** Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan No 5 Tanggal 4 Februari 2022. As stated in the Company's Articles of Association No. 5 dated February 4, 2022.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.4	**Pembentukan Komite** Committee Formation		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The corporation has committees under Board of Commissioners, consisting of at least the following: an Audit Committee, a Nomination and Remuneration Committee, and a Risk Management Monitoring Committee.	*Apply/Explain*	***Apply*** Dewan Komisaris WIKA telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai pelaksanaan ketentuan permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. WIKA's Board of Commissioners has established an Audit Committee, a Nomination, Remuneration, and Good Corporate Governance Committee, a Risk Monitoring Committee, and an Integrated Governance Committee to implement the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen . Board of Commissioners ensures that all members of Audit Committee are independent, and that other committees formed by Board of Commissioners are predominantly composed of independent parties. All committee members possess the competence, commitment, and sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan termasuk mengenai masa jabatan. Implementation has been carried out in accordance with regulations, including regarding terms of office.
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan To ensure objective and independent monitoring of the Audit Committee's duties, the President Commissioner may not serve as Chairman of Audit Committee, except in exceptional circumstances, which must be disclosed in the annual report.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Implementation has been carried out in accordance with the provisions.
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Board of Commissioners conducts an annual formal, objective evaluation to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Implementation has been carried out in accordance with the provisions.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
1.6	**Benturan Kepentingan** Conflict of Interest		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from Board of Commissioners. A Commissioner shall notify Board of Commissioners and chairman of committee that performs the nominating function before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, another directorship, or any other position with a significant time commitment.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Saat ini tidak ada yang menjalani rangkap jabatan. *Implementation has been carried out in accordance with the provisions. Currently, no one is serving concurrent positions.*
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest between management, members of Board of Directors, Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and decision-making regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or their affiliates.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Ada penandatanganan Piagam Benturan Kepentingan yang dilakukan pembaharuan setiap tahun. Implementation has been carried out in accordance with regulations. A Conflict of Interest Charter has been signed, which is renewed annually.
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** Competency Development of Members of Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. Board of Commissioners ensures that members of Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards, and other applicable obligations. Board of Directors, through corporate secretary, supports all members of Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Anggaran Dewan Komisaris salah satunya tentang pelatihan untuk peningkatan dan penyegaran pengetahuan. Implementation has been carried out in accordance with regulations. One of the Board of Commissioners' budget allocations is for training to improve and refresh knowledge.
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	**Komposisi Direksi** Composition of Board of Directors		

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidate for directors, Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, does not rely solely on recommendations from Board of Commissioners, management, or major shareholders. Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may utilize independent sources to identify qualified candidates.	*Apply/Explain*	***Apply*** Dilakukan rapat khusus pada KNRG untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris, manajemen dan pemegang saham mayoritas. Hasilnya diberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. A special meeting of the KNRG (National Board of Commissioners) was held to validate the proposals submitted by Board of Commissioners, management, and majority shareholders. The resulting recommendations were submitted to he Board of Commissioners. As outlined in the Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019, dated October 4, 2019.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of Board of Directors include, at a minimum, the knowledge, abilities, and expertise required to appropriately fulfill the role of Board of Directors and ensures the diversity of Board of Directors.	*Apply/Explain*	***Apply*** Kriteria evaluasi sudah mempertimbangkan usulan KNRG dan mengikuti surat dari Deputi bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor S-34/DSI. MBU/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Updating Talent Pool Direksi BUMN. Usul KNRG kemudian menjadi dasar Dewan Komisaris sekaligus memastikan hal strategik terakomodir, misalnya keberagamaan Direksi. The evaluation criteria took into account the KNRG's proposals and followed the letter from the Deputy for Human Capital, Technology, and Information No. S-34/DSI.MBU/02/2023, dated February 10, 2023, concerning Updating the Talent Pool for SOE Directors. The KNRG's proposals then became the basis for Board of Commissioners' decisions and ensured that strategic issues, such as the diversity of Board of Directors, were accommodated.
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporate policy on diversity among Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	*Apply/Explain*	***Apply*** Mengacu pada lampiran SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan tertuang dalam Laporan Tahunan serta Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 41/DK/ WIKA/2021 dan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0617/2021. Referring to the attachment to SEOJK No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance and contained in the Annual Report and the Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., which have been updated based on Joint Decrees No. 41/DK/WIKA/2021 and No. SK.02.09/A.DIR.0617/2021.
Rekomendasi 4 Recommendation 4			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent to achieve the desired Board composition. Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process was carried out by the major shareholder.
Rekomendasi 5 & 6 Recommendation 5 & 6			
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix approved by Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in the expertise matrix and nomination criteria.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process was carried out by the major shareholder.
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to appropriately fulfill the role of Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process was carried out by the major shareholder.
Panduan Guidelines			
2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi At least one Commissioner must have prior experience in the primary sector in which the corporation operates.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process was carried out by the major shareholder.
2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. The determination of the number of members of Board of Commissioners takes into account the specific circumstances of the corporation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process was carried out by the major shareholder.
Rekomendasi 7 Recommendation 7			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to Board of Directors and for roles with potential conflicts of interest, Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the terms of Board of Commissioners membership and their independence from a corporate perspective.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Dewan Komisaris melakukan supervisi dan penasehatan dalam rapat Dewan Komisaris yang menghadirkan Direksi. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. Board of Commissioners provides supervision and advice at Board of Commissioners meetings attended by Board of Directors. As stipulated in the Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate effective functioning of Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the appointment and promotion of members of Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG dengan bahan dari manajemen. Penentuan kriteria dibuat transparan dan mengikuti ketentuan yang ada. Implementation has been carried out in accordance with regulations. This process was conducted by Nomination, Remuneration, and GCG Committee using materials from management. The criteria were made transparently and adhered to existing regulations.
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	*Apply/Explain*	**Apply** ***Apply***Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. This process was conducted by the KNRG in a special meeting, with materials provided by management and the involvement of independent consultants, if necessary. The result is a remuneration proposal for Series A shareholders. As stipulated in the Board of Commissioners Policy, Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
Panduan Guidelines			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. The remuneration policy is fair and equitable, both in structure and amount, and is determined within the context of corporate values, internal reward structures, and encourages competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and societal norms.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. This process was conducted by the KNRG in a special meeting, with materials provided by management and the involvement of independent consultants, if necessary. The result is a remuneration proposal for Series A shareholders. As stipulated in the Board of Commissioners Policy, Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (clawback). The corporation has a performance-based remuneration policy for its Board of Directors that aligns with the achievement of the corporation's long-term interests, including the following performance measures: stock ownership options, deferred bonuses, and provisions for the return of part or all of the bonuses/incentives already paid (clawback).	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019.
2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. Board of Directors does not receive any benefits beyond those granted by the corporation's General Meeting of Shareholders.	*Apply/Explain*	***Apply*** Penetapan Remunerasi dan Fasilitas untuk Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. The determination of remuneration and benefits for Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014, as amended by the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-13/MBU/09/2021 concerning guidelines for determining the remuneration of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprises.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of Board of Commissioners comprises a remuneration structure oriented towards sustainable corporate development and encouraging the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance. Furthermore, their positions as President Commissioner and chairman, as well as their membership in committees, must be taken into account.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. This process was conducted by the KNRG in a special meeting, with materials provided by management and the involvement of independent consultants, if necessary. The result is a remuneration proposal for Series A shareholders. As stipulated in the Board of Commissioners Policy, Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications, and competencies of directors and commissioners, taking into account corporate operational performance, individual performance, and market conditions, Nomination and Remuneration Committee ensures that fair and transparent procedures are in place for determining remuneration policies for members of Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh KNRG dalam rapat khusus, dengan materi dari manajemen yang melibatkan konsultan independen, jika diperlukan. Hasilnya usulan remunerasi kepada pemegang saham seri A. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. This process was conducted by the KNRG in a special meeting, with materials provided by management and independent consultants, if necessary. The result was a proposed remuneration for Series A shareholders. As outlined in the Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** Working Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1	**Sifat Hubungan Kerja** *Nature of Working Relationship*		
Rekomendasi 1, 2 & 3 Recommendation 1, 2 & 3			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between Board of Directors and Board of Commissioners, as well as between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners. However, it is important to maintain confidentiality to prevent leakage of confidential information.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hal yang sifatnya khusus dan rahasia dibuat dalam Rapat Dewan Komisaris khusus. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Special and confidential matters are discussed at a special Board of Commissioners Meeting. As outlined in Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, Board of Directors collaborates with Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision, and strategy and regularly discusses their implementation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam *board manual* Perseroan. Implementation has been carried out in accordance with the provisions and is outlined in the Company's board manual.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Corporate Secretary plays a crucial role in supporting the effectiveness of working relationship between Board of Directors and Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam: • Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan secara berkala. • Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2021-2023, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 As outlined in: • The Board Manual of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.'s Board of Directors and Board of Commissioners, which has been updated periodically. • The Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2021-2023, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
3.2	**Akses informasi Dewan Komisaris** Board of Commissioners access to information		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. Board of Directors is responsible for ensuring that Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. Board of Directors provides information to Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. Board of Commissioners may request additional information from Board of Directors at any time.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam board manual serta code of conduct perseroan Implementation has been carried out in accordance with the provisions and is stated in the board manual and the company's code of conduct.
3.3	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** Responsibility of Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the corporation's share ownership structure and the relationships between shareholders that may impact the management and operations of the corporation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan tertuang dalam *board manual* perseroan Implementation has been carried out in accordance with the provisions and is stated in the company's board manual.
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and Responsible Behavior		
4.1.1	**Pernyataan ini dituangkan dalam** This statement is set out in		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: • Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; • Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; • Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. • Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; • Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; • Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; • Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. • Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. • Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. • Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. • Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics, which must clearly express the corporation's expectation that every member of Board of Directors, Board of Commissioners, and employee will: • Act in the best interests of the corporation; • Act honestly and with a high standard of integrity; • Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence, and due care. • Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; • Avoid actions that violate laws and regulations or are unethical based on the corporation's ethical guidelines; • Not engage in or participate in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively impact the corporation's reputation; • Not take advantage of the corporation's property or information, other assets, or its customers for personal gain or that would cause harm to the corporation or its customers. • Not exploit their position or the opportunities afforded by their position for personal gain. • Avoid soliciting or accepting payments, gratuities, or other benefits from third parties for oneself or others that create a conflict of interest or provide benefits to third parties in violation of laws and regulations. • Respect the differences of opinion and the rights of every member of Board of Directors, Board of Commissioners, and employee. • Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam C*ode of Conduct* Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 As stated in the Code of Conduct of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. Board of Directors establishes policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement, in accordance with national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *code of conduct* Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 As stated in the code of conduct of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
4.2	**Nilai – nilai dan Budaya Organisasi** Organizational Values and Culture		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi Corporations articulate, cultivate, and express their corporate culture and values.	*Apply/Explain*	***Apply*** Penerapan nilai – nilai dan budaya AKHLAK dalam seluruh kegiatan pekerjaan oleh seluruh pegawai Perusahaan yang telah diawali oleh sosialisasi penerapan AKHLAK yang diberikan langsung oleh Direktur *Human Capital* dan Pengembangan Perusahaan The implementation of AKHLAK values and culture in all work activities by all Company employees, which was initiated by the socialization of AKHLAK which was given directly by the Director of Human Capital and Company Development.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values, and Culture		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and code of ethics are effectively communicated to Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *code of conduct* Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.00619/2021 Pakta Integritas Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Pernyataan Komitmen Kepatuhan terhadap *Code of Conduct* yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai As stated in the Code of Conduct of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., which has been updated based on Decree Number: SK.02.09/A.DIR.00619/2021. Integrity Pact of Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees Statement of Commitment to Compliance with the Code of Conduct by Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Risk Management, Internal Control, and Compliance		
5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. Board of Directors regularly reviews the design accuracy and operational effectiveness of governance systems, risk management, internal control, and corporate compliance, and reports the implementation and results of these reviews to shareholders through the Corporation's annual report.	*Apply/Explain*	***Apply*** Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang terbit secara berkala setiap tahun memuat hasil reviu Direksi atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The Annual Report and Sustainability Report, which are published periodically every year, contain the results of Board of Directors' review of the appropriateness of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and the Company's compliance with the principles of Corporate Governance and applicable laws and regulations.
5.2	**Manajemen Risiko** Risk Management		

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are a single entity, expressed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners, and in discussions at meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rapat Dewan Komisaris selalu berbasiskan risiko dalam pembahasan isu strategik. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Dewan Komisaris, Nomor: 103/DK/WIKA/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Implementation has been carried out in accordance with regulations. Board of Commissioners meetings are always risk-based when discussing strategic issues. This is outlined in Board of Commissioners Policy Number 103/DK/WIKA/2019 dated October 4, 2019.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. Risk Management Monitoring Committee assists Board of Commissioners in carrying out its duties by creating a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing corporate risk management.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan fungsi/peran dan tupoksinya sudah dilaksanakan akan tetapi tidak oleh Komite Khusus/ Komite Pemantau Manajemen Risiko *Implementation of its functions/roles and duties has been carried out but not by Special Committee/Risk Management Monitoring Committee*
5.3.	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure the corporation achieves its objectives.	*Apply/Explain*	***Apply***Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan dibuktikan bahwa perusahaan telah menerima TOP GRC Award mendapat bintang 5 di tahun 2022 Implementation has been carried out according to the provisions and is proven that the company receiving the TOP GRC Award with 5 stars in 2022.
Panduan Guidelines			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. Board of Directors ensures coordination and capability enhancement among the core GRC systems, including governance, strategic management, performance management, risk management, compliance management, and internal audit systems, to ensure the corporation remains on track to achieve its objectives.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *Code of Corporate Governance*, yaitu Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 As stipulated in the Code of Corporate Governance, namely Code of Good Corporate Governance (GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2023-2025, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Board of Directors ensures that the department responsible for compliance does not concurrently perform functions that could potentially create a conflict of interest.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *code of conduct governance* perseroan As stated in the company's code of conduct governance

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
5.4.	**Audit Internal** Internal Audit		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. Board of Commissioners, through Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation achieve its objectives by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Implementation has been carried out in accordance with regulations.
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
6.1	**Kebijakan Pengungkapan** Disclosure Policy		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendation 1 & 2			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive and confidential corporate information.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *board manual* investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 As stated in the investment and divestment board manual dated October 27, 2022.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain relevant material information about the corporation on a regular and timely basis must be respected.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada ketentuan POJK No 42 tahun 2020 & POJK No 17 tahun 2022 *The Company complies with the provisions of POJK No. 42 of 2020 and POJK No. 17 of 2022.*
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial statements, not audited or reviewed by external auditors, are materially accurate, complete, and provide investors with the appropriate information to make informed investment decisions.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada ketentuan psak, peraturan bursa X.K.2, Dan POJK No 14 tahun 2022 *The Company complies with the provisions of PSAK, Stock Exchange Regulation X.K.2, and POJK No. 14 of 2022.*
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Audit Committee ensures the quality of financial statement audits performed by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of external auditors.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Rekomendasi penunjukan auditor eksternal dilakukan setiap tahun oleh Komite Audit *Implementation has been carried out in accordance with regulations. Audit Committee makes recommendations on the appointment of external auditors annually.*
Rekomendasi 3 Recommendation 3			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability report must be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply/Explain*	***Apply*** Laporan Keberlanjutan WIKA telah disiapkan dan diungkapkan dengan jelas dan akurat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Consolidated GRI Standards 2021 dan GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate. *WIKA's Sustainability Report has been prepared and disclosed clearly and accurately in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, the 2021 Consolidated GRI Standards, and the GRI G4 Sector Disclosures for Construction and Real Estate.*
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report, which is an integral part of the Annual Report. The Sustainability Report outlines the Company's sustainability performance, encompassing economic, social, environmental, and governance aspects. It is presented in a three-year comparison. This report is intended to help shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply/Explain*	***Apply*** Laporan Keberlanjutan WIKA telah disiapkan dan diungkapkan dengan jelas dan akurat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Consolidated GRI Standards 2021 dan GRI G4 Sector Disclosures Construction and Real Estate *WIKA's Sustainability Report has been prepared and disclosed clearly and accurately in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, the Consolidated GRI Standards 2021, and the GRI G4 Sector Disclosures for Construction and Real Estate.*
6.3	**Diseminasi Informasi** Information Dissemination		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. *Information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively affordable access to relevant information for users.*	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada ketentuan POJK No 31 tahun 2015 tentang keterbukaan informasi *The company complies with the provisions of POJK No. 31 of 2015 concerning information disclosure.*
Rekomendasi 2 & 3 Recommendation 2 & 3			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation must ensure that an annual statement on the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on their website for a minimum period of five years.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hingga Tahun Buku 2024 perusahaan belum menerapkan pedoman umum governansi korporat indonesia Until the 2024 Fiscal Year, the company has not implemented the general guidelines for Indonesian corporate governance.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listings, the criteria and procedures for cross-listings, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for primary listings, must be transparent and documented.	*Apply/Explain*	***Apply*** Hingga akhir tahun buku 2023, Perusahaan hanya mencatatkan/memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia, tempat domisili Perusahaan. Until the end of the 2023 financial year, the Company only listed/traded shares on the Indonesia Stock Exchange, the Company's domicile.
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholder Rights		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Melalui *website* perusahaan dan *public expose* yang diselenggarakan tiap tahun *Through the company website and annual public expose.*
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation that is a parent entity ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation has significant investments.	*Apply/Explain*	***Apply*** • Tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan secara berkala. • Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 • Set out in the Board Manual of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., which has been updated periodically. • Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2023-2025, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The Corporation must have rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure that transactions occur transparently and on fair terms, while protecting the rights of all shareholders, regardless of their class.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *board manual* investasi & divestasi tanggal 27 oktober 2022 *As stated in the investment & divestment board manual dated October 27, 2022.*
Panduan Guidelines			

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. The Corporation must clearly discloses these rules and procedures so that investors understand their rights and entitlements to compensation.	*Apply/Explain*	***Apply*** Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. In accordance with Article 5, paragraph 4, letter a of the Company's Articles of Association, which states that "Shareholders have equal rights; each share is entitled to one vote." This provision of the Articles of Association is implemented through the voting procedure for making decisions on an agenda item as outlined in the GMS Rules of Procedure. The GMS Rules of Procedure are provided to the Shareholders present and re-explained by the Chairman of GMS at the opening of the GMS. The Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar and a Notary, to conduct the vote counting and/or validation process. The procedures for this procedure are as follows: Voting takes place after all questions have been answered and/or the question and answer period has expired. Each share entitles its holder to cast one vote. If a Shareholder owns more than one share, they are only required to cast one vote, and that vote represents all the shares they own or represent.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (anti-take-over devices) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Anti-takeover devices should not be used to shield management and Board of Commissioners from accountability.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *board manual* investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 *As stated in the investment & divestment board manual dated October 27, 2022.*
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** Fair Treatment of Shareholders		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			

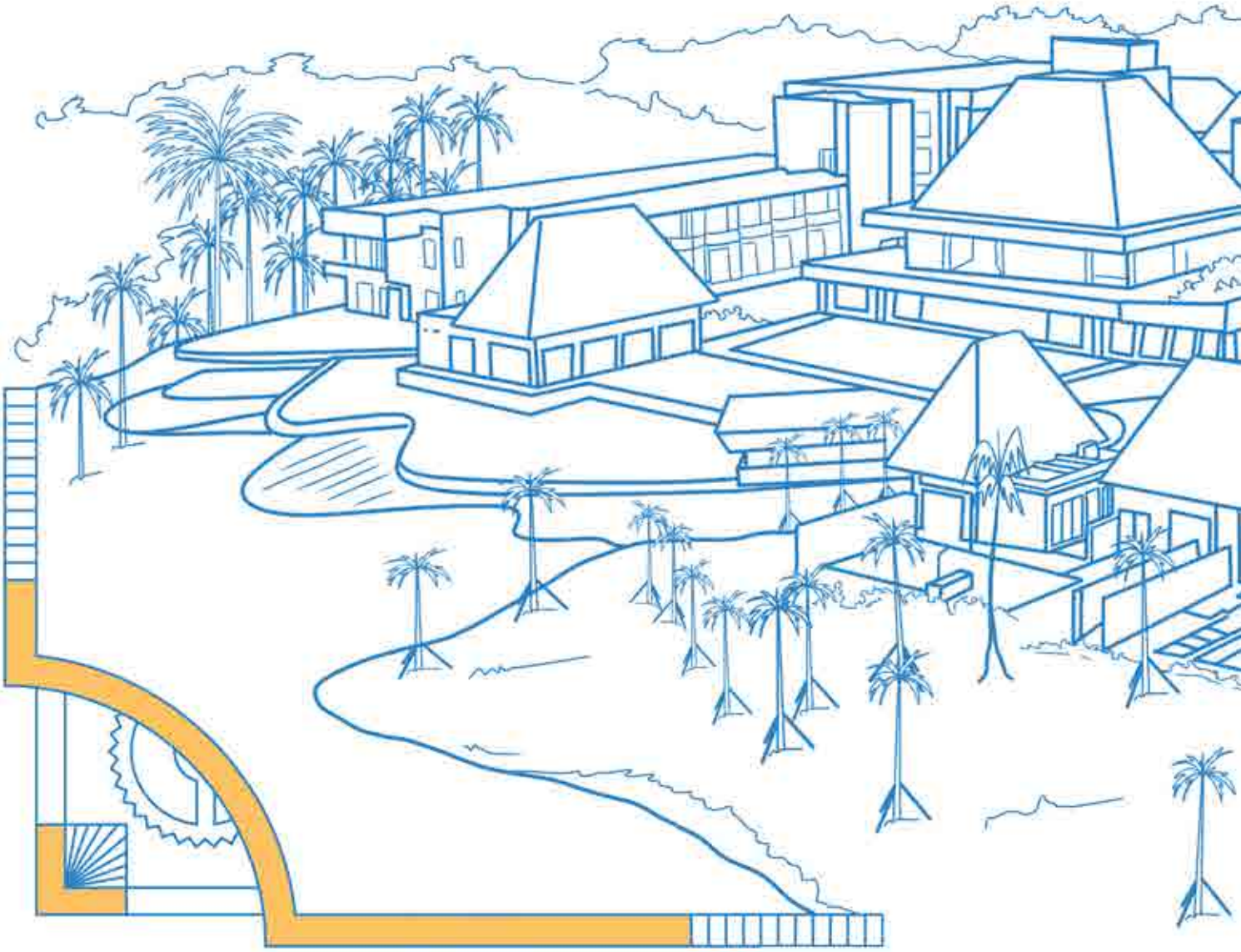
No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan • semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, • pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation must have rules and procedures that ensure • that all shareholders of the same series within a class of stock are treated equally, • that such rules and procedures are disclosed, and that the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control disproportionate to their shareholdings are disclosed.	*Apply/Explain*	***Apply*** Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "Para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya In accordance with Article 5 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association, which states that "Shareholders have equal rights to each share, giving 1 vote." The derivative provisions of the Articles of Association are implemented through the voting procedure in making decisions on an agenda item contained in the GMS Rules of Procedure, where the GMS Rules of Procedure are given to the Shareholders present and explained again by the Chairman of GMS at the opening of the GMS. The Company has appointed independent parties, namely the Share Registrar and Notary to carry out the vote counting and/or validation process. The implementation has the following procedures: Voting is carried out after all questions have been answered and/or the question and answer time has expired. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, then he is only asked to vote 1 (one) time and that vote represents all the shares he owns or represents.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are appropriately managed and protects the interests of the corporation and its shareholders.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *board manual* investasi & divestasi tanggal 27 Oktober 2022 As stated in the investment and divestment board manual dated October 27, 2022.
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners, and insiders to ensure that no one can directly or indirectly benefit from information that is not yet available to the market.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam *code of conduct* Perseroan tahun 2023 As stated in the Company's 2023 code of conduct

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation issues a notice for a General Meeting of Shareholders (GMS) with the agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to thoroughly review the meeting agenda. The meeting invitation and all GMS information are disclosed electronically, such as through the corporation's website.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada POJK No. 15 dan 16 tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka di mana panggilan RUPS dan materi RUPS ditayangkan paling lambat 21 hari sebelum RUPS. The company complies with OJK Regulations No. 15 and 16 of 2020 concerning GMS for Public Companies, which require that the notice for a GMS and GMS materials be published no later than 21 days prior to the GMS.
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders' effective participation and voting at the General Meeting of Shareholders (GMS).	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka secara elektronik di mana Pemegang Saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The Company complies with OJK Regulations No. 15 & 16 of 2020 concerning electronic GMS for public companies, which allow shareholders to participate and vote effectively at the GMS.
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 Stated in the Code of Good Corporate Governance (GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2023-2025, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023.
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 As stated in the Code of Good Corporate Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2023-2025, which has been updated based on the Decree of Board of Directors Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
Rekomendasi 5 Recommendation 5			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The complete voting results and summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following business day.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perusahaan patuh pada POJK No. 15 & 16 Tahun 2020 tentang RUPS perusahaan terbuka The company complies with POJK No. 15 & 16 of 2020 concerning the GMS of public companies

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Implementation Description
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** Other Stakeholders		
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)** Key Stakeholder Engagement		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. Through the Corporate Secretary, the Corporation conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages with them to understand their expectations and concerns, as well as the corporation's impact on them.	*Apply/Explain*	***Apply*** Perseroan menyediakan kanal pelaporan keterbukaan informasi publik pada *website* perseroan, dan kanal *whistleblowing system* (wbs.wika.co.id) The company provides a public information disclosure reporting channel on the company's website and a whistleblowing system channel (wbs.wika.co.id).
8.2	**Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis** Sustainability Commitment in Business Model		
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. Board of Commissioners, together with Board of Directors, is responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including establishing the corporation's sustainability strategy, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.	*Apply/Explain*	***Apply*** Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan Implementation has been carried out in accordance with regulations.
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** Stakeholder Protection		
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the implementation of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang dalam Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2023-2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.01288/2023 Stated in the Code of Good Corporate Governance (GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. for 2023-2025, which has been updated based on Board of Directors Decree Number: SK.02.09/A.DIR.01288/2023
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability.	*Apply/Explain*	***Apply*** Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan Stated in the Company's Collective Labor Agreement.

Komitmen Keberlanjutan

Sustainability Commitment



“Keberlanjutan bukan hanya komitmen, tetapi bagian integral dari setiap proses bisnis Perseroan.”

“Sustainability is not merely a commitment, but an integral part of every business process of the Company.”



Komitmen dan Kebijakan Pelaksanaan Program Keberlanjutan di Lingkup Perusahaan

Commitment and Policy for Implementing Sustainability Programs Within the Company

Perseroan menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi dan pengelolaan operasional dalam menjalankan bisnis konstruksi bangunan gedung. Industri ini menuntut ketepatan eksekusi, pengendalian risiko lapangan, serta pengelolaan dampak lingkungan yang melekat pada penggunaan energi, emisi, material, dan limbah konstruksi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi aspek ESG ke dalam proses bisnis, mulai dari perencanaan dan metode kerja, pengelolaan rantai pasok dan mitra kerja, hingga pengendalian pelaksanaan proyek dan evaluasi kinerja, serta penangkapan peluang pertumbuhan melalui penguatan portofolio *green building* dan inovasi konstruksi modular (PPVC).

Informasi terperinci mengenai strategi, program strategis, dan inisiatif keberlanjutan Perseroan disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara terpisah, namun tetap merupakan satu kesatuan informasi dengan Laporan Tahunan ini. Pelaporan berkelanjutan Perseroan disusun mengacu pada GRI Standards 2021 dan pada tahap awal mengadopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), sehingga pengungkapan ESG Perseroan disampaikan secara konsisten, relevan, dan dapat diperbandingan (*comparable*) bagi para pemangku kepentingan.

Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan, Perseroan memperkuat penerapan keberlanjutan melalui sistem dan standar yang relevan, termasuk pengelolaan energi yang lebih sistematis melalui sertifikasi ISO 50001:2018, disertai langkah efisiensi pada fasilitas serta inisiatif transisi rendah karbon seperti pemanfaatan kendaraan listrik. Perseroan juga menjalankan program *zero waste* di kantor pusat dan inisiatif pelestarian lingkungan serta keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi dan penanaman pohon. Seluruh upaya tersebut didukung oleh penyusunan *baseline* kinerja, mencakup energi, emisi, air, dan limbah, sebagai dasar penguatan kinerja pada periode berikutnya, yang diringkas pada bagian Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan berikut.

The Company places sustainability as an integral part of its strategy and operational management in running its building construction business. This industry demands precise execution, site risk control, and management of environmental impacts inherent in the use of energy, emissions, materials, and construction waste. This commitment is realized through the integration of ESG aspects into business processes, from planning and work methods, supply chain and partner management, to project implementation control and performance evaluation, and seizing growth opportunities through strengthening its green building portfolio and modular construction innovations (PPVC).

Detailed information regarding the Company's sustainability strategy, strategic programs, and initiatives is presented in the Sustainability Report, which is published separately but remains integral to this Annual Report. The Company's sustainability reporting is prepared in accordance with the 2021 GRI Standards and, in the initial stages, adopted the IFRS Sustainability Disclosure Standards, namely IFRS S1 and IFRS S2, issued by the International Sustainability Standards Board (ISSB). This ensures that the Company's ESG disclosures are delivered consistently, relevantly, and comparable for its stakeholders.

To ensure consistent implementation, the Company is strengthening its sustainability practices through relevant systems and standards, including more systematic energy management through ISO 50001:2018 certification, along with efficiency measures at its facilities and low-carbon transition initiatives such as the use of electric vehicles. The Company also carries out a zero-waste program at its head office as well as biodiversity conservation initiatives through conservation and tree planting activities. All of these efforts are supported by the development of a performance baseline, covering energy, emissions, water, and waste, as a basis for strengthening performance in the following period, which is summarized in the Sustainability Performance Highlights section below.





Gereja Basilika IKN

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2025
Sustainability Performance Highlights For 2025

KINERJA EKONOtMI I ECONOMIC PERFORMANCE

Capaian Perolehan Proyek
Project Acquisition Achievements

Kontrak Baru
New Contracts

Rp 1.709 miliar I billion

Kontrak Dihadapi
Order Book

Rp 5.765 miliar I billion

Corporate Rating
Corporate Rating

idBBB

"Sehat"

Kategori Layak Investasi
Investment Grade

Pefindo

Produk Ramah Lingkungan
Environmentally-Friendly Products

Modular I Modular

Rp **3.047** miliar I billion

Pemasok Lokal
Local Suppliers

100% pemasok WIKA Gedung adalah pemasok lokal, yaitu yang berasal dari Indonesia.

100% of WIKA Gedung's suppliers are local, originating from Indonesia.

Total anggaran ke pemasok lokal sebesar
Total budget for local suppliers is

Rp **489** miliar I billion

KINERJA LINGKUNGAN I ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Komitmen Net Zero Emission (NZE)
Net Zero Emissions (NZE) Commitment

WIKA Gedung menargetkan NZE atau emisi nol bersih pada tahun 2060 untuk Cakupan 1, 2, dan 3.
WIKA Gedung is targeting NZE, or net zero emissions, by 2060 for Scopes 1, 2, and 3.

Pengelolaan Emisi Karbon
Carbon Emission Management

405. 367,56 ▲▼ Gigajoule (GJ)

0,2497 ▲▼ GJ/Juta Rupiah
GJ/Juta Rupiah

Pengurangan Konsumsi Energi: 405.367,56 Gigajoule (GJ)
Energy Consumption Reduction: 405,367.56 Gigajoules (GJ)

Pengurangan Intensitas Energi per Pendapatan: 0,186 (GJ/Juta Rupiah)
Energy Intensity Reduction per Income: 0.186 (GJ/Million Rupiah)

Eko-Efisiensi Program
Eco-Efficiency Program

7 Unit I Units
Mobil Listrik
Electric Car

1 Unit I Units
Motor Listrik
Electric Motorcycle

16%
Proyek Green Building
Green Building Projects

Penerapan Sistem Modular dalam proyek WEGE melalui metode *Prefabricated Prefinished Volumetric Construction* (PPVC) yang ramah lingkungan dan mengusung prinsip *lean construction*
Implementation of a Modular System in WEGE project using the environmentally friendly Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) method and lean construction principles

Air keran siap minum menggunakan alat pemurni air.
Drinking tap water using a water purifier

2 Unit I Units

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di hotel dan apartemen milik WIKA Gedung
Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in hotels and apartments owned by WIKA Gedung

80%

Penggunaan lampu LED & Lampu Sensor
use of LED and Sensor Lights

Konservasi Fauna Beruang Madu, Balikpapan
Honey Bear Conservation, Balikpapan

1,3 hektar / hectare

7 beruang madu / honey bear

Revitalisasi taman bermain Pusat Konservasi Beruang Madu di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai dukungan terhadap pusat pendidikan dan konservasi Beruang Madu di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) seluas 1,3 hektar dengan total 7 beruang madu.
Revitalization of the Honey Bear Conservation Center in Balikpapan Environmental Education Tourism Area (KWPLH), East Kalimantan, as a support for the Honey Bear education and conservation center in the Indonesian Capital City (IKN) area, covering an area of 1.3 hectares with a total of 7 honey bears.

Pelestarian Lingkungan & Konservasi
Environmental Preservation & Conservation

Bibit Pohon / Tree Seedlings

4.310

Bibit Pohon I Tree Seedlings

Penanaman Pohon Langka Dalam Program Penanaman Pohon Langka Endemik Nusantara, Sinergi Dengan Grup Wika Meliputi Sonokeling, Kemuning Hutan, Terap Hijau, Belimbing Papua, Randu Alas.
Planting of Rare Trees in the Endemic Rare Tree Planting Program in Indonesia, in Synergy with Wika Group, Includes Sonokeling, Kemuning Hutan, Terap Hijau, Belimbing Papua, and Randu Alas.

Program Zero Waste
Zero Waste Program

Inisiatif untuk mengurangi timbulan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan kembali, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar limbah tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.

WEGE menerapkan *Program Zero Waste* melalui:
- Bar Bending Schedule untuk optimalisasi skema potongan besi
- Monitoring waste concrete
- Penggunaan BIM dalam pengendalian dokumen di lapangan
- Monitoring penggunaan kertas, air, listrik dan BBM
- Penggunaan kertas bekas untuk administrasi internal
- Digitalisasi surat dan administrasi

An initiative to reduce waste generation through sorting, recycling, and collaboration with various parties to prevent waste from ending up in landfills.

WEGE implements the Zero Waste Program through:
- Bar Bending Schedule to optimize the steel cutting scheme
- Monitoring waste concrete
- Use of BIM for field document control
- Monitoring paper, water, electricity, and fuel usage
- Use of waste paper for internal administration
- Digitizing letters and administration

Total Konsumsi Air
Total Water Consumption

43.605.306 m^3

Biaya Lingkungan Hidup
Environmental Costs

Mencakup biaya untuk penanaman pohon dan upaya konservasi.
Includes costs for tree planting and conservation efforts.

Rp **96.557.394**



WEGE menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang meraih sertifikasi ISO 50001:2018 sebagai bentuk komitmen dalam pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan.
WEGE became the first construction company in Indonesia to achieve ISO 50001:2018 certification as a form of commitment to efficient and sustainable energy management.

KINERJA SOSIAL I SOCIAL PERFORMANCE

Tumbuh Bersama Karyawan
Growing with Employees

Komitmen Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Penerapan *Respectful Workplace Policy* (RWP)
- Tidak terdapat kejadian pelanggaran HAM di WIKA Gedung

Commitment to Upholding Human Rights
- Implementation of the Respectful Workplace Policy (RWP)
- No incidents of human rights violations at WIKA Gedung

Komitmen Kesetaraan Gender
Commitment to Gender Equality

Jumlah Karyawan Number of Employees	Karyawan Perempuan Female Employees	Karyawan Perempuan di Tingkat Manajemen Female Employees at Management Level
460	11.96%	2%

Tingkat Keterikatan Karyawan
Employee Engagement Lev

60%

Tingkat Turnover Karyawan
Employee Turnover Rate

7,08%

Kinerja K3
Occupational Health and Safety Performance

14,478,472 jam I jam

14,478,472 jam kerja tanpa kecelakaan
14,478,472 accident-free work hours

50

Pemberian sertifikasi melalui Program Sertifikasi Tukang kepada 50 tenaga kerja proyek
Certification through the Craftsman Certification Program for 50 project workers

Pengembangan dan Evaluasi Karyawan
Employee Development and Evaluation

Rp 586.680.372

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Costs

100%

Karyawan mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja dalam rangka mendukung pengembangan karier
Employees receive performance assessments and evaluations to support career development

Kontribusi Kepada Masyarakat
Contribution to Society

UMKM Binaan
Fostered MSMEs

60

Total UMKM Binaan I Total Fostered MSMEs

Mendukung UMKM, baik dari karyawan internal maupun masyarakat eksternal, untuk meningkatkan perekonomian melalui pelatihan, sertifikasi, kesempatan mengikuti bazaar, dan berbagai kegiatan lainnya.

Supporting MSMEs, both internal employees and external community, to improve their economic well-being through training, certification, opportunities to participate in bazaars, and various other activities.

Pemberdayaan Disabilitas
Empowerment of Persons with Disabilities

0

Penerima Manfaat I Beneficiaries

Meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan advokasi dengan memanfaatkan daur ulang barang bekas menjadi produk bernilai ekonomi.

Improving the skills and quality of life of persons with disabilities through training, mentoring, and advocacy activities by utilizing recycled materials to create products with economic value.

Pengukuran dan Penilaian Dampak Program CSR
CSR Program Impact Measurement and Assessment

83,03%

Indeks Kepuasan Masyarakat
Community Satisfaction Index

Kategori **"Sangat Puas"**
Category **"Very Satisfied"**

Sosial Retur non Investment (SROI)

Jasmine Integrated Farming	Teras Braga	WEGE Lapak & Pendidikan Anak Usia Dini WEGE Stall & Early Childhood Education
6,62	4,56	3,42

Realisasi Anggaran CSR
CSR Budget Realization

Rp **1.218.133.280** meningkat increased **21,41%** (YoY) ▲

Building Future	**Building Prosperity**
Rp 208.397.120	Rp 53.439.333
Building Hope	**Building Wellness**
Rp 547.227.280	Rp 29.012.715
Building Nature	**Report**
Rp 96.557.394	Rp 283.500.000

Komitmen Pelayanan Unggul Kepada Pelanggan
Commitment to Excellent Service to Customers

Indeks Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Index

93,3%

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat tingkat kepuasan pelanggan sebesar 80,1%. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas layanan, ketepatan waktu penyelesaian proyek, serta pemenuhan standar mutu, keselamatan, dan keberlanjutan. Hasil tersebut sejalan dengan komitmen WEGE untuk memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, mengutamakan solusi bagi pelanggan, serta menjalankan operasional yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
In 2025, the Company recorded a customer satisfaction index of 80.1%. This achievement reflects consistency in maintaining service quality, timely project completion, and meeting quality, safety, and sustainability standards. These results align with WEGE's commitment to strengthening stakeholder trust, prioritizing customer solutions, and implementing transparent, innovative, and sustainability-oriented operations.

KINERJA TATA KELOLA I GOVERNANCE PERFORMANCE

Kepatuhan Terhadap Hukum
Compliance with the Law

100%

Tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyebabkan sanksi/denda [GRI 2-27]
Tidak terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyebabkan sanksi/denda [GRI 2-27]

Penilaian Implementasi GCG
GCG Assessment

ASEAN *Corporate Governance Scorecard* **(ACGS)**

Skor I Score

95,61

Predikat sangat baik
Very Good Predicate

Whistleblowing System

100%

Laporan Ditindaklanjuti dan Diselesaikan
Reports Followed Up and Resolved

Rating ESG
ESG Rating

31.1 SUSTAINALYTICS RATING - Kategori High Risk
Perseroan mencatat skor ESG sebesar 31,1 (High Risk) berdasarkan penilaian Sustainalytics yang diterbitkan pada tahun 2023 (data terakhir yang tersedia). Hingga akhir tahun 2025, belum terdapat pembaruan penilaian ESG. Penilaian berikutnya direncanakan dilakukan oleh S&P Global pada tahun 2026, dengan hasil yang diharapkan mencerminkan peningkatan kinerja keberlanjutan Perseroan.

31.1 SUSTAINALYTICS RATING - High Risk Category
The Company recorded an ESG score of 31.1 (High Risk) based on the Sustainalytics assessment published in 2023 (the latest data available). As of the end of 2025, there has been no ESG assessment update. The next assessment is planned for S&P Global in 2026, with the results expected to reflect improvements in the Company's sustainability performance.

Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Support Towards The Sustainable Development Goals

Perseroan berkomitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/ SDGs) melalui integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh proses bisnis dan operasional. Komitmen ini diwujudkan melalui pendekatan yang selaras dengan strategi perusahaan, khususnya dalam menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

The Company is committed to supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the integration of sustainability principles into all business processes and operations. This commitment is realized through an approach aligned with the Company's strategy, particularly in creating sustainable economic, social, and environmental value.

Dalam aspek lingkungan, WIKA Gedung mendorong penerapan konstruksi ramah lingkungan melalui pengembangan teknologi modular, efisiensi penggunaan material, serta pengelolaan limbah konstruksi yang lebih terstruktur. Perseroan juga menginisiasi berbagai program pengurangan emisi dan efisiensi energi sebagai bagian dari kontribusi terhadap agenda *Net Zero Emissions*.

In the environmental aspect, WIKA Gedung promotes the implementation of environmentally friendly construction through the development of modular technology, efficient use of materials, and more structured construction waste management. The Company also initiates various emission reduction and energy efficiency programs as part of its contribution to the Net Zero Emissions agenda.

Dari sisi sosial, Perseroan secara aktif menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas hidup melalui program berbasis komunitas. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

From a social perspective, the Company actively carries out the Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on community empowerment, MSME development, and improving quality of life through community-based programs. These programs are designed to deliver sustainable impacts, both economically and socially.

Sementara itu, dalam aspek tata kelola, Perseroan memperkuat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna memastikan praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini menjadi landasan dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan serta menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.

Meanwhile, in the governance aspect, the Company strengthens the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the Anti-Bribery Management System (ABMS) to ensure transparent, accountable, and integrity-driven business practices. This serves as the foundation for building stakeholder trust and maintaining the sustainability of the Company's business.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perseroan berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs, sekaligus memperkuat posisi sebagai perusahaan konstruksi yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Through these initiatives, the Company strives to make a tangible contribution to the achievement of the SDGs, while strengthening its position as a construction company that is adaptive, responsible, and oriented toward long-term sustainability.

Benchmarking dan ESG *Assessment* (S&P Global CSA *Readiness*)

Benchmarking and ESG Assessment (S&P Global CSA Readiness)

Perseroan melakukan *benchmarking* dan penilaian kesiapan pengelolaan ESG dengan mengacu pada praktik terbaik global, termasuk pendekatan *Corporate Sustainability Assessment* (CSA) S&P Global sebagai referensi pemetaan gap. Penilaian kesiapan ini difokuskan pada keselarasan kebijakan, tata kelola, implementasi, serta kualitas data dan pengungkapan pada isu-isu ESG yang material bagi industri.

The Company conducted benchmarking and assessments of its ESG management readiness using global best practices, including the S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) approach as a gap mapping reference. This readiness assessment focused on the alignment of policies, governance, implementation, and data and disclosure quality on ESG issues material to the industry.

Berikut ini, ringkasan penilaian kesiapan (*readiness*) dalam bentuk scorecard untuk mengidentifikasi area yang sudah memadai (*ready*), area yang perlu penguatan (*progress*), serta area yang masih memerlukan pengembangan (*gap*), sebagai dasar penyusunan prioritas penguatan pada tahun berikutnya.

The following is a summary of the readiness assessment in scorecard format to identify areas of readiness (readiness), areas requiring strengthening (progress), and areas requiring further development (gaps), as a basis for prioritizing strengthening for the following year.

GAP ANALYSIS ESG

1.	***Board Diversity Policy***	
	Baseline WEGE belum memiliki komitmen mendukung keberagaman dewan. WEGE has not yet committed to supporting board diversity.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 400 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 400
	Ruang Perbaikan WEGE dapat membuat dan mengungkapkan Kebijakan Keberagaman Dewan atau melakukan pengungkapan ke dalam Annual Report berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk menerapkan Keberagaman dalam Perusahaan (Ras, Gender, Agama, Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman, Keahlian, dsb.) *Output* Pengungkapan Komitmen atau Kebijakan Keberagaman Dewan yang mencakup faktor seperti gender, etnis, maupun ras melalui Annual Report atau Website Perusahaan. Room for Improvement WEGE can create and disclose a Board Diversity Policy or disclose in the Annual Report the company's commitment to implementing diversity within the company (race, gender, religion, educational background, experience, expertise, etc.). Output Disclosure of the Board Diversity Commitment or Policy, which includes factors such as gender, ethnicity, and race, through the Annual Report or the Company Website.	*Impact* Tinggi Impact High
2.	**Board Gender Diversity**	
	Baseline WEGE belum memiliki komitmen mendukung keberagaman dewan dan hanya ada 1 perempuan dalam struktur dewan komisaris. WEGE has not yet committed to supporting board diversity, and there is only one woman on the board of commissioners.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 400 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 400
	Ruang Perbaikan Komposisi Direksi dan Komisaris WEGE sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan tidak dapat dilakukan secara internal. Memperoleh skor penuh S&P pada indikator keberagaman ini sulit tercapai dalam kondisi saat ini, mengingat regulasi yang berlaku lebih menekankan pada penetapan anggota berdasarkan keputusan pemerintah daripada kebijakan internal perusahaan* Room for Improvement The composition of WEGE's Board of Directors and Board of Commissioners is highly dependent on government policy and cannot be determined internally. Achieving a full S&P score on this diversity indicator is difficult to achieve under current conditions, given that existing regulations place greater emphasis on appointing members based on government decisions rather than internal company policies.*	*Impact* Tinggi Impact High

3.	***CEO Compensation – Success Metrics***	
	Baseline Penentuan Remunerasi dan Kompensasi Direksi salah satunya didasari berdasarkan ketercapaian KPI Perseroan. EBITDA, ROIC, dsb berkaitan dengan target kinerja ekonomi untuk mengukur keberhasilan kinerja Perseroan. Determination of Directors' Remuneration and Compensation is based, among other things, on the achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPIs). EBITDA, ROIC, etc., relate to economic performance targets used to measure the Company's success.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 397 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 397
	Ruang Perbaikan Belum adanya penjelasan terkait matriks pemberian kompensasi Direktur Utama WEGE selain EBITDA pada KPI Perusahaan yang mempertimbangkan faktor capaian kinerja berdasarkan KPI, maupun kemampuan keuangan. *Output* Penjelasan dan mekanisme/matriks pemberian kompensasi Direktur Utama. Room for Improvement There is no explanation regarding WEGE President Director compensation matrix, which considers performance achievement factors based on KPIs, as well as financial capacity, beyond EBITDA. Output Explanation and mechanism/matrix for President Director compensation.	*Impact* Tinggi Impact High
4.	***CEO Compensation – Long-Term Alignment***	
	Baseline WEGE belum mengungkapkan terkait dengan kompensasi long-term atas pencapaian kinerja. WEGE has not disclosed long-term compensation for performance achievements.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 518 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 518
	Ruang Perbaikan WEGE perlu mengungkapkan terkait dengan pemberian long term incentives/compensation yang diberikan kepada Direktur utama pada dokumen public. *Output* Pengungkapan skema pemberian long-term incentives sesuai dengan penilaian kinerja yang telah dilakukan. Room for Improvement WEGE needs to disclose the long-term incentives/compensation provided to the President Director in public documents. Output Disclosure of the long-term incentive scheme in accordance with the performance assessment conducted.	*Impact* Tinggi Impact High
5.	**Risk Management Processes**	
	Baseline WEGE telah memiliki adanya tinjauan berkala paparan risiko serta proses atau kerangka kerja untuk menentukan risiko melalui: • *Risk Review*: Tinjauan risiko rutin, termasuk identifi kasi eksposur dan mitigasi. • *Risk Exposure*: Peninjauan tahunan terhadap eksposur risiko. • Audit Proses: Audit eksternal dilakukan dalam dua tahun terakhir. • Budaya Risiko: Pendidikan manajemen risiko rutin untuk direksi non-eksekutif dan seluruh organisasi. WEGE has established a periodic review of risk exposures and a process or framework for determining risk through: • Risk Review: Regular risk review, including exposure identification and mitigation. • Risk Exposure: Annual review of risk exposures. • Audit Process: External audits conducted within the last two years. • Risk Culture: Regular risk management education for non-executive directors and the entire organization.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 481 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 481
	Ruang Perbaikan • Mengungkapkan daftar pelatihan dewan komisaris terkait manajemen risiko • Meningkatkan frekuensi dan kedalaman peninjauan risiko Room for Improvement • Disclosing a list of board of commissioners' training related to risk management. • Increasing the frequency and depth of risk reviews.	*Impact* Tinggi Impact High

6.	***Reporting on Breaches***	
	Baseline WEGE sudah mengungkapkan data pelanggaran korupsi, maupun diskriminasi dan tidak adanya kejadian pelanggaran. WEGE has disclosed data on corruption and discrimination violations, and has not reported any violations.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 512 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 512
	Ruang Perbaikan Mengungkapkan metrik tahunan (jumlah, substantiated, tindakan, SLA) untuk: • Privacy Data, • Conflict of Interest, • Money Laundering • Insider Trading *Output* Pelaporan pelanggaran yang dilengkapi dengan pernyataan nol kasus (zero case) untuk masing-masing aspek dan diungkapkan dalam Annual Report atau Sustainability Report. Room for Improvement Disclose annual metrics (number, substantiated, actions, SLA) for: • Data Privacy, • Conflict of Interest, • Money Laundering • Insider Trading Output Violation reporting, accompanied by a statement of zero cases for each aspect, and disclosed in the Annual Report or Sustainability Report.	*Impact* Sedang
7.	***Contributions & Other Spending***	
	Baseline WEGE telah menyatakan dalam Code of Conduct dan Annual Report bahwa tidak memberikan bantuan dana kepada partai politik atau pejabat public. WEGE has stated in its Code of Conduct and Annual Report that it does not provide financial assistance to political parties or public officials.	Evidence BAB GCG AR 2025 halaman 550 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 550
	Ruang Perbaikan Mengungkapkan informasi dalam Annual Report maupun Sustainability Report mengenai bahwa perusahaan tidak kontribusi dana Perusahaan untuk kegiatan politik atau pejabat publik. *Output* Mengungkapkan secara eksplisit dalam Sustainability Report maupun Annual Report bahwa tidak ada kontribusi politik maupun pengeluaran serupa yang dilakukan. Room for Improvement Disclose information in the Annual Report and Sustainability Report that the company does not contribute funds to political activities or public officials. Output Explicitly disclose in the Sustainability Report and Annual Report that no political contributions or similar expenditures have been made.	*Impact* Sedang Impact Moderate
8.	***Largest Contributions & Expenditures***	
	Baseline WEGE tidak memberikan kontribusi dan pengeluaran yang berasal dari dana apapun dalam jumlah besar untuk kegiatan politik. WEGE does not make substantial contributions or expenditures from any fund for political activities.	*Evidence* BAB GCG AR 2025 halaman 550 Evidence CHAPTER GCG AR 2025 page 550
	Ruang Perbaikan Mengungkapkan informasi dalam *Annual Report* maupun *Sustainability Report* mengenai bahwa tidak adanya kontribusi dana tidak adanya untuk kegiatan politik. *Output* Mengungkapkan secara eksplisit dalam *Sustainability Report* maupun *Annual Report* bahwa tidak ada kontribusi politik maupun pengeluaran serupa yang dilakukan. Room for Improvement Disclose information in the Annual Report and Sustainability Report that the company does not contribute company funds to political activities. Output Explicitly disclose in the Sustainability Report and Annual Report that no political contributions or similar expenditures have been made.	*Impact* Rendah

INITIAL MAPPING INDICATOR – S&P GLOBAL

Governance Dimension

INDICATOR	SUB-INDICATOR	Halaman REMARKS
Business Ethics	Codes of Conduct	AR page 509
	Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy	AR page 539
	Whistleblowing Mechanism	AR page 535
	Reporting on breaches	AR page 535
Corporate Governance	Board Independence	AR page 112
	Board Type	AR page 112
	Non-Executive Chairperson/ Lead Director	AR page 112
	Board Diversity Policy	AR page 401
	Board Gender Diversity	AR page 401
	Board Accountability	AR page 112
	Board Average Tenure	AR page 112
	Board Industry Experience	AR page 112
	CEO Compensation - Success Metrics	AR page 518
	CEO Compensation - Long-Term Performance Alignment	AR page 518
	Management Ownership	AR page 166
	Management Ownership Requirements	AR page 166
	Government Ownership	AR page 170
	Family Ownership	AR page 166
	CEO-to-Employee Pay Ratio	AR page 518
Risk & Crisis Management	Risk Governance	AR page 481
	Risk Management Processes	AR page 481
	Emerging Risks	AR page 481

INDICATOR	SUB-INDICATOR	Halaman REMARKS
Supply Chain Management	Supplier Code of Conduct	SR page 68
	Supplier ESG Programs	SR page 68-71
	KPIs for Supplier Screening	SR page 68-71
	KPIs for Supplier Assessment and/or Development	SR page 68-71
Materiality	Materiality Analysis	SR page 36-51
	Material Issues for Enterprise Value Creation	SR page 36-51
	Materiality Metrics for Enterprise Value Creation	SR page 36-51
	Material Issues for External Stakeholders	SR page 36-51
	Materiality Metrics for External Stakeholders	SR page 36-51
Policy Influence	Contributions & Other Spending	SR Page 237
	Largest Contributions & Expenditures	SR Page 237
	Lobbying and Trade Associations - Climate Alignment	SR Page 237
Information Security	Information Security Governance	AR page 507
	Information Security Policy	AR page 507
	Information Security Management Programs	AR page 507
Transparency & Reporting	Sustainability Reporting Boundaries	SR page 35
	Sustainability Reporting Assurance	SR page 238-239

Environmental Dimension

INDICATOR	SUB-INDICATOR	Halaman REMARKS
Climate Strategy	Direct Greenhouse Gas Emissions (Scope 1)	SR page 93-95
	Indirect Greenhouse Gas Emissions (Scope 2)	SR page 93-95
	Indirect Greenhouse Gas Emissions (Scope 3)	SR page 93-95
	Climate Governance	SR page 216-218
	TCFD Disclosure	SR page 80-81
	Climate-Related Management Incentives	-
	Climate Risk Management	SR page 81-85
	Financial Risks of Climate Change	SR page 81-85
	Financial Opportunities Arising from Climate Change	SR page 81-85
	Climate-Related Scenario Analysis	SR page 81-85
	Physical Climate Risk Adaptation	SR page 81-85
	Emissions Reduction Targets	SR page 96-97
	Internal Carbon Pricing	-
	Net Zero Commitment	SR page 93
Environmental Policy & Management	Environmental Policy	SR page 90-91
	Environmental Management Systems Verification	-
	Environmental Violations	SR page 111
Product Stewardship	Revenues from Energy Efficient Buildings	SR page 74
	Certified Sustainable Buildings	SR page 74-75
Biodiversity	Biodiversity Risk Assessment	SR page 109-110
	Biodiversity Commitment	SR page 106-109
	No Deforestation Commitment	SR page 108
Waste & Pollutants	Construction Waste Management	SR page 89
	Waste Disposal	SR page 102-106
	Hazardous Waste	SR page 102-106
Energy	Energy Management Programs	SR page 90-93
	Energy Consumption	SR page 90-93
Water	Water Consumption	SR page 97-98
	Water Efficiency Programs in Construction	SR page 98-99
Sustainable Raw Materials	Recycled Building Materials	SR page 86

Social Dimension

INDICATOR	SUB-INDICATOR	Halaman REMARKS
Human Capital Management	Training & Development Inputs	SR page 135-144
	Employee Development Programs	SR page 135-144
	Human Capital Return on Investment	SR page 145-146
	Hiring	SR page 127-128
	Type of Performance Appraisal	SR page 144-145
	Long-Term Incentives for Employees	SR page 214
	Employee Support Programs	SR page 137
	Employee Turnover Rate	SR page 128
	Trend of Employee Wellbeing	-
Occupational Health & Safety	OHS Policy	SR page 148-149
	OHS Programs	SR page 150
	Fatalities	SR page 159
	Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - Employees	SR page 159
	Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR) - Contractors	SR page 159
Labor Practices	Labor Practices Commitment	SR page 215
	Labor Practices Programs	SR page 129-145
	Discrimination & Harassment	SR page 122-123
	Workforce Breakdown: Gender	SR page 123
	Workforce Breakdown: Race/ Ethnicity & Nationality	SR page 125
	Gender Pay Indicators	SR page 129
	Freedom of Association	SR page 120-121
Human Rights	Human Rights Commitment	SR page 120-121
	Human Rights Due Diligence Process	SR page 121
	Human Rights Assessment	-
	Human Rights Mitigation & Remediation	-
Customer Relations	Customer Satisfaction Measurement	SR page 116

Laporan Keuangan

Financial Report

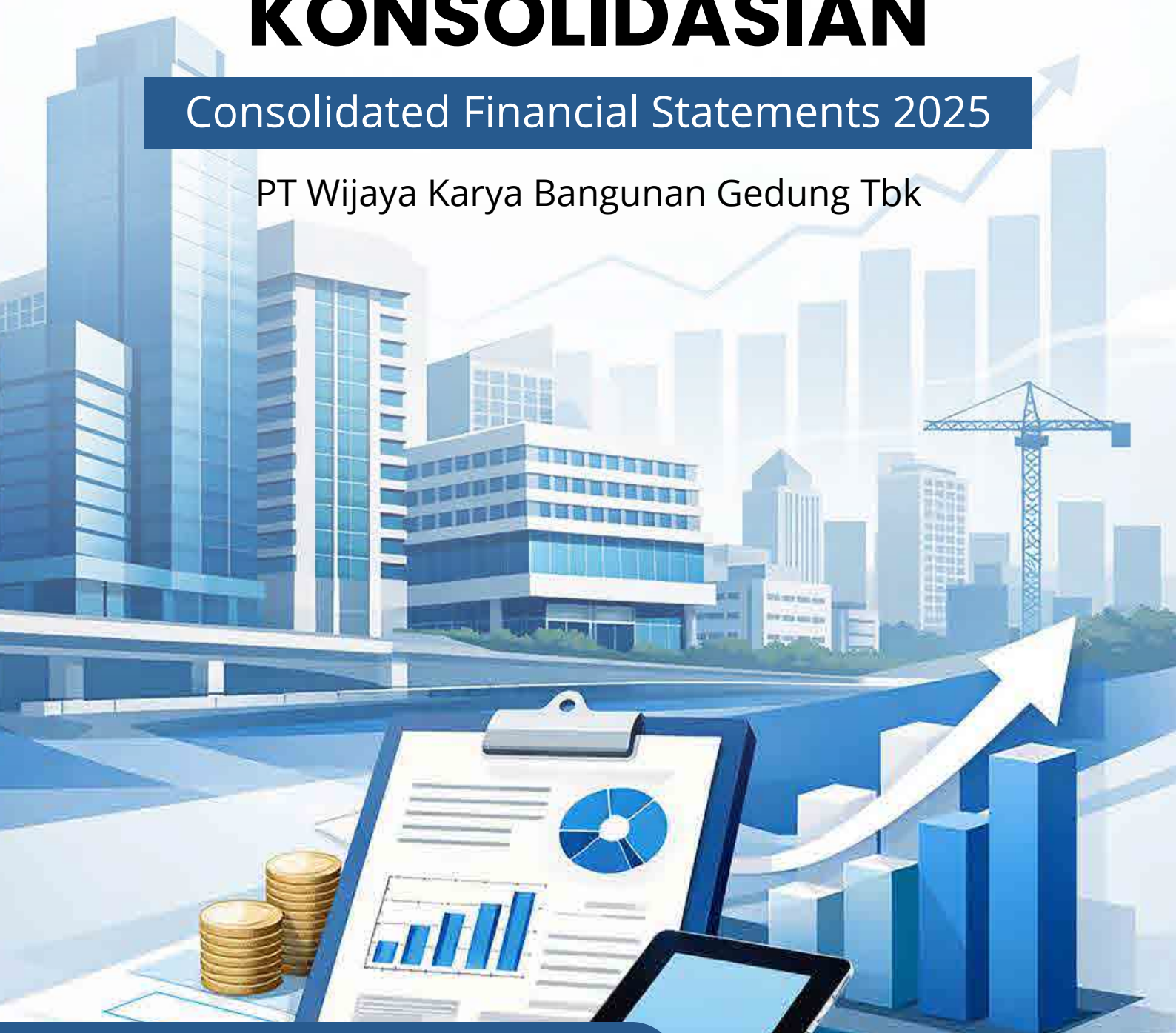




LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Statements 2025

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk



Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun - tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY

Daftar Isi	**Halaman/ *Pages***	***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2025 and 2024***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan-Laporan Keuangan Tersendiri:		***Supplementary Information-Separate Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	Lampiran/ *Attachment* 1	*Statements of Financial Position (Parent Entity)*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	Lampiran/ *Attachment* 2	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)*
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	Lampiran/ *Attachment* 3	*Statements of Changes in Equity (Parent Entity)*
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	Lampiran/ *Attachment* 4	*Statements of Cash Flows (Parent Entity)*
Pengungkapan Lainnya (Entitas Induk)	Lampiran/ *Attachment* 5	*Other Disclosure (Parent Entity)*

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Jl. Dl Panjaitan Kav 9, WIKA Tower I, 7th - 10th Floor, Jakarta 13340
corsec@wikagedung.co.id
+6221 8590 8862
www.wikagedung.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI ATAS TANGGUNG JAWAB UNTUK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
No. KU.01.00/A.DIR.00011.WEGE/2026

THE DIRECTORS' STATEMENT OF THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

No. KU.01.00/A.DIR.00011.WEGE/2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We the undersigned:*

1.	Nama	Hadian Pramudita	*Name*
	Alamat Kantor	Gedung WIKA Lt.8-10, Jl.D.I. Panjaitan Kav 9 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur	*Office Address*
	Alamat domisili sesuai KTP	Jl. Kemang Utara VIII No 46 ZZ RT. 05 RW. 04 Jakarta Selatan - 12730	*Domicile as Stated in ID Card*
	Nomor Telepon	021 - 80679200	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
2.	Nama	Hartanto Karti Raharjo	*Name*
	Alamat Kantor	Gedung WIKA Lt.8-10, Jl.D.I. Panjaitan Kav 9 Cipinang Cimpedak Jatinegara Jakarta Timur	*Office Address*
	Alamat domisili sesuai KTP	Timoho Regency No. C 5 Miliran UH 2 Umbulharjo, Kota Yogyakarta	*Domicile as Stated in ID Card*
	Nomor Telepon	081289177654	*Phone Number*
	Jabatan	Direktur/ *Director*	*Title*

Menyatakan bahwa: / *Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasiaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan") dan entitas anak ("bersama-sama disebut Grup"); / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("the Company") and its subsidiaries (together the "Group");*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; / *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia;*
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan akurat; / *All information published in the Group's consolidated financial statements are complete and accurate;*
4. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup; / *The Group's consolidated financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the Group's consolidated financial statements;*
5. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal Grup. / *We are responsible for the Group's internal control.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Atas Nama dan Mewakili Direksi/*For and on Behalf of the Directors*
Jakarta, 27 Maret 2026/*March 27, 2026*

Hadian Pramudita	**Hartanto Karti Raharjo**
Direktur Utama/*President Director*	Direktur/ *Director*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00324/2.1030/AU.1/03/1950-2/1/III/2026

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IAPI"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by IAPI, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Jumlah Terpulihkan Nilai Pos Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK)

PDPK merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat dipulihkan. Grup menelaah jumlah terpulihkan PDPK setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin dapat diperoleh kembali. Grup membandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat untuk mengukur penurunan nilai PDPK. Grup menelaah estimasi terpulihkan PDPK berdasarkan kondisi masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau ekspektasi kondisi masa depan. Perubahan probabilitas kegagalan untuk mengklaim dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mencatat PDPK sebesar Rp839.467.788.217.

Pengungkapan Grup mengenai PDPK dijelaskan dalam Catatan 2.m, 3, 13 dan 39 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami merespon hal audit utama dengan melakukan:

- Kami memahami pengendalian dan proses manajemen untuk menentukan jumlah terpulihkan PDPK dan menilai risiko salah saji material yang melekat dengan mempertimbangkan yang digunakan dalam menentukan asumsi yang akan diterapkan;
- Kami fokus pada pos PDPK terbesar dengan nilai pengujian lebih dari 55%;
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa dokumen pendukung PDPK;
- Mengevaluasi kewajaran cadangan penurunan nilai PDPK dengan menguji nilai terpulihkannya dan kerugian penghapusannya;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Recoverable Amount of Construction Work in Process (CWIP)

CWIP represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognised as an asset, that relate directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the CWIP for recoverable amount whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may be recoverables. The Group compares the recoverable amount with the carrying amount to measure the impairment of CWIP. The Group reviews the estimated recoverable of CWIP based on the conditions of each project by considering historical data, assumptions or expectations of future conditions. The changes in the probability of failure to claim could have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

On December 31, 2025, the Group recorded CWIP amounting to Rp839,467,788,217.

The Group's disclosures regarding CWIP are described in Notes 2.m, 3, 13 and 39 to the consolidated financial statements.

We addressed the key audit matter by performing:

- *Understand the management's controls and processes in determining the recoverable amount of CWIP and assessed inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and the judgement used in determining assumptions to be applied;*
- *We focused on the highest CWIP balances with a test amount of more than 55%;*
- *Based on the sampling test, we examined the supporting documents of the CWIP;*
- *Evaluated the reasonableness of the allowance for impairment of CWIP by testing its recoverable and loss on write-off amount;*

- Memeriksa dokumen pendukung dan berdiskusi dengan Grup untuk cadangan penurunan nilai dan kerugian penghapusan nilai PDPK;
- Kami menguji penghentian pengakuan PDPK ke dokumen pendukungnya; dan
- Untuk estimasi cadangan penurunan nilai, kami mengevaluasi kecukupan cadangan penurunan nilai PDPK yang diterapkan oleh manajemen berdasarkan pengalaman gagal klaim masa lalu.

- *Checked the supporting documents and discussed with the Group for any allowance for impairment and loss on write-off of CWIP;*
- *We have tested the CWIP derecognition to its supporting documents; and*
- *For the estimation of the allowance for impairment, we evaluated the adequacy of the allowance for impairment of CWIP applied by the management based on past experience of failed claims.*

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2025, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang diasjikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk Menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk and its subsidiary as of December 31, 2025 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2025 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended and notes on investment in subsidiary (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which are presented as supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, are presented for the purposes of additional analysis and are not required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information are the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information have been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be available to us after the date of this auditor's report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance on the conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami, membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

When we read the 2025 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations, or Standards on Auditing established by the IAPI.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu level keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Lith Alfansuri
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1950/
Public Accountant License Number: AP.1950

Jakarta, 27 Maret 2026/*March 27, 2026*

00324

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4, 39	391,127,569,575	1,030,732,161,959	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha - Neto	5			*Trade Receivables - Net*
Pihak Berelasi	39	167,675,382,205	263,199,908,162	*Related Parties*
Pihak Ketiga		67,810,014,111	281,960,718,345	*Third Parties*
Piutang Retensi - Neto	6			*Retention Receivables - Net*
Pihak Berelasi	39	118,369,075,407	161,712,929,070	*Related Parties*
Pihak Ketiga		216,724,076,511	398,243,281,899	*Third Parties*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	7			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	39	130,489,978,709	195,121,768,325	*Related Parties*
Pihak Ketiga		133,603,704,787	241,398,057,671	*Third Parties*
Piutang Yang Belum Ditagih	8	7,535,206,405	9,360,579,793	*Unbilled Receivables*
Persediaan	9	306,086,847,338	350,027,596,576	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	10.a	400,617,175,942	331,372,454,133	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	11	83,815,231,549	124,034,728,295	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	12	127,831,278,985	215,023,413,531	*Prepaid Expenses*
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi	13			*Construction Work in Progress*
Pihak Berelasi	39	290,283,809,397	374,776,508,359	*Related Parties*
Pihak Ketiga		549,183,978,820	437,710,349,000	*Third Parties*
Jumlah Aset Lancar		**2,991,153,329,741**	**4,414,674,455,118**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang Lain-Lain	14			*Other Receivables*
Pihak Berelasi	39	112,745,180,359	165,407,608,905	*Related Parties*
Pihak Ketiga		103,490,614	1,472,904,624	*Third Parties*
Tanah Akan Dikembangkan	9	66,726,550,000	46,677,650,000	*Land For Development*
Penyertaan Saham	15	3,546,062,692	3,546,062,692	*Investment In Shares*
Properti Investasi	16	259,571,775,000	259,413,425,000	*Investment Property*
Aset Kerja Sama	17	226,406,589,707	237,488,457,311	*Assets of Co-operation*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	18	38,943,222,642	47,475,979,663	*Fixed Assets - Net of Accumulated Depreciation*
Aset Takberwujud- Setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi	19	9,091,266,260	13,527,567,059	*Intangible Assets - Net of Accumulated Amortization*
Investasi pada Entitas Asosiasi	20	--	18,236,878,682	*Investment in Associate*
Investasi pada Ventura Bersama	21.a.	335,323,623,832	519,352,569,206	*Investment of Joint Ventures*
Aset Lain-lain		200,000,000	--	*Other Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**1,052,657,761,106**	**1,312,599,103,142**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**4,043,811,090,847**	**5,727,273,558,260**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang pada Ventura Bersama	21.b.	201,415,515,598	--	*Joint Venture Payable*
Pinjaman Bank Jangka Pendek	22			*Short-term Bank Loans*
Pihak Berelasi	39	73,038,256,757	350,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga		--	22,000,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha	23			*Trade Payables*
Pihak Berelasi	39	158,719,269,313	473,871,107,934	*Related Parties*
Pihak Ketiga		826,845,570,434	1,184,364,168,681	*Third Parties*
Beban Akrual	24	284,811,981,173	356,409,528,252	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	10.b	19,490,262,844	8,004,172,611	*Tax Payables*
Liabilitas Pajak Penghasilan Final	10.c	41,427,549,056	47,860,115,224	*Final Income Tax Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				*Current Portion of Long Term Liability -*
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen	25	2,040,897,663	15,829,560,667	*Advances from Project Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	27, 39	75,646,000,000	9,417,600,000	*Bank Loan*
Utang Lain-lain	26			*Other Payables*
Pihak Berelasi	39	39,119,031,725	36,899,710,813	*Related Parties*
Pihak Ketiga		3,786,575,107	3,422,504,884	*Third Parties*
Pendapatan Diterima Di Muka		7,630,359,657	7,277,128,245	*Advances Received*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1,733,971,269,327**	**2,515,355,597,311**	***Total Current Liabilites***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun				*Long-term Liability Net of Current Maturities*
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen	25	314,109,686,809	507,541,582,961	*Advances from Project Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	27, 39	--	75,646,000,000	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Kerja	28	24,482,589,254	22,759,500,319	*Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**338,592,276,063**	**605,947,083,280**	***Total Non Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**2,072,563,545,390**	**3,121,302,680,591**	***TOTAL LIABILITES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				***Equity Attributable to Owner of the Parent Entity***
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100				*Share Capital-par value Rp100*
Modal Dasar 38.000.000.000 saham				*Authorized Capital 38,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor - 9.572.000.000 saham	29	957,200,000,000	957,200,000,000	*Issued and Paid Up Capital 9,572,000,000 shares*
Tambahan Modal Disetor	30	524,082,899,858	524,082,899,858	*Additional Paid In Capital*
Saldo Laba				*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	31	172,324,647,000	165,528,527,000	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	31	319,289,343,048	963,245,785,686	*Unappropriated*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lainnya		(3,765,511,162)	(6,088,098,420)	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Subjumlah		1,969,131,378,744	2,603,969,114,124	*Subtotal*
Kepentingan Non Pengendali	33	2,116,166,713	2,001,763,545	*Non Controlling Interest*
JUMLAH EKUITAS		**1,971,247,545,457**	**2,605,970,877,669**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**4,043,811,090,847**	**5,727,273,558,260**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
PENDAPATAN	34	1,623,555,133,947	3,673,527,175,483	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	35	(1,478,133,873,380)	(3,366,025,710,507)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO		**145,421,260,567**	**307,501,464,976**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	36	(187,452,523,088)	(114,423,879,780)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lainnya	37	157,975,842,146	135,058,450,113	*Other Income*
Beban Lainnya	37	(558,425,610,331)	(230,447,912,801)	*Other Expenses*
Beban Keuangan	38	(17,524,477,333)	(28,254,570,874)	*Financial Expense*
Beban Pajak Penghasilan Final	10.c	(39,062,653,205)	(96,407,074,797)	*Final Income Tax Expenses*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	20	(18,236,878,682)	(4,790,231,331)	*Share in Loss on Associate*
Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama	21.a.	(112,953,068,297)	99,664,321,780	*Share in Profit / (Loss) on Joint Venture*
Laba Selisih Kurs	40	8,308,753	56,682,663	*Foreign Exchange Gain*
LABA/ (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**(630,249,799,470)**	**67,957,249,949**	***PROFIT/ (LOSS) BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10.d	--	--	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA/ (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN		**(630,249,799,470)**	**67,957,249,949**	***NET PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) AFTER TAX***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				***Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	28	2,322,587,258	(11,352,907,510)	*Remeasurement on Defined Benefit Plans*
Jumlah Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		**2,322,587,258**	**(11,352,907,510)**	***Total Item that Will Not Be Reclassified Subsequently to Profit or Loss***
JUMLAH LABA/ (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		**(627,927,212,212)**	**56,604,342,439**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) FOR THE YEAR***
LABA / (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME / (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		(630,364,202,638)	67,888,264,873	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali	33	114,403,168	68,985,076	*Non Controlling Interest*
JUMLAH		**(630,249,799,470)**	**67,957,249,949**	***TOTAL***
JUMLAH PENGHASILAN/ (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/ (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik Entitas Induk		(628,041,615,380)	56,535,357,363	*Equity Holders of The Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali	33	114,403,168	68,985,076	*Non Controlling Interest*
JUMLAH		**(627,927,212,212)**	**56,604,342,439**	***TOTAL***
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM	32	**(65.86)**	**7.09**	***NET INCOME (LOSS) PER SHARE***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / *Attributable to Owners of the Parent*							Kepentingan Non Pengendali / *Non Controlling Interest* Rp	Jumlah Ekuitas / *Total Equity* Rp	
				Saldo Laba / *Retained Earnings*		Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*					
		Modal Ditempatkan dan Disetor / *Subscribed and Paid-In Capital* Rp	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital* Rp	Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Unappropriated* Rp	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti / *Actuarial Gain (Loss) of Defined Benefits Plans* Rp	Keuntungan Atas Nilai Pasar Saham / *Gain on Share Market Value* Rp	Jumlah / *Total* Rp			
Saldo per 31 Desember 2023		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**160,828,527,000**	**909,438,080,813**	**5,049,322,156**	**215,486,934**	**2,556,814,316,761**	**1,932,778,469**	**2,558,747,095,230**	***Balance as of December 31, 2023***
Dividen	31	--	--	--	(9,380,560,000)	--	--	(9,380,560,000)	--	(9,380,560,000)	*Dividends*
Cadangan	31	--	--	4,700,000,000	(4,700,000,000)	--	--	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	67,888,264,873	(11,352,907,510)	--	56,535,357,363	68,985,076	56,604,342,439	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2024		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**165,528,527,000**	**963,245,785,686**	**(6,303,585,354)**	**215,486,934**	**2,603,969,114,124**	**2,001,763,545**	**2,605,970,877,669**	***Balance as of December 31, 2024***
Dividen	31	--	--	--	(6,796,120,000)	--	--	(6,796,120,000)	--	(6,796,120,000)	*Dividends*
Cadangan	31	--	--	6,796,120,000	(6,796,120,000)	--	--	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan		--	--	--	(630,364,202,638)	2,322,587,258	--	(628,041,615,380)	114,403,168	(627,927,212,212)	*Total Comprehensive Loss for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2025		**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**172,324,647,000**	**319,289,343,048**	**(3,980,998,096)**	**215,486,934**	**1,969,131,378,744**	**2,116,166,713**	**1,971,247,545,457**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan		1,751,300,356,245	3,438,249,913,161	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Pemasok		(1,917,428,483,655)	(3,357,436,333,564)	*Cash Payments to Suppliers*
Pembayaran Beban Usaha		(184,245,703,753)	(114,423,879,780)	*Payments for Operating Expenses*
Pembayaran Pajak Penghasilan		(94,774,967,709)	(222,969,376,324)	*Payment For Income Tax*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(445,148,798,872)**	**(256,579,676,507)**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengurangan Investasi				*Deduction of Investment in*
Ventura Bersama	21.a.	103,696,578,219	78,441,800,867	*Joint Ventures*
Pengembalian Uang Muka Setoran Saham	14, 15	60,000,000,000	--	*Refund of Advance Payment for Shares*
Pendapatan Bunga		13,404,991,919	11,066,906,027	*Interest Income*
Pinjaman kepada Entitas Asosiasi	14, 39	(22,498,232,333)	(18,000,000,000)	*Loan to Associates*
Penambahan Investasi				*Addition of Investment in*
Ventura Bersama	21.a.	(16,834,487,541)	(13,525,941,367)	*Joint Ventures*
Penambahan Aset Takberwujud	19	(852,190,000)	(3,020,977,696)	*Intangible Assets Acquisition*
Penambahan Aset Tetap	18	(2,900,000)	(2,587,808,524)	*Fixed Assets Acquisition*
Pengurangan Investasi Lainnya		--	662,959,464	*Deductions in Other Investments*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi		**136,913,760,264**	**53,036,938,771**	***Net Cash Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Bank	22, 41	68,124,603,387	463,186,818,225	*Receipts of Bank Loan*
Penerimaan Pinjaman Induk	39, 41	4,019,546,547	1,828,139,889	*Receipts of Parent's Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	22, 41	(367,086,346,630)	(220,686,818,225)	*Payments of Bank Loan*
Pembayaran Bunga Pinjaman		(20,231,573,333)	(28,254,570,874)	*Interest Payments*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	27, 41	(9,417,600,000)	(8,938,000,000)	*Payments of Long term - Bank Loan*
Pembayaran Dividen	31	(6,748,550,000)	(9,380,560,000)	*Payment of Dividends*
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali		(37,942,500)	--	*Payment of Dividends to Non Controlling Interest*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**(331,377,862,529)**	**197,755,009,015**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		**(639,612,901,137)**	**(5,787,728,721)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KAS DAN SETARA KAS		**8,308,753**	**90,855,447**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGES RATES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**1,030,732,161,959**	**1,036,429,035,233**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	**391,127,569,575**	**1,030,732,161,959**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR***

Lihat Catatan 41 atas laporan keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See Note 41 to the financial statement for supplemental disclosures of cash flow information

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perusahaan") berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-92223.AH.01.01 tanggal 1 Desember 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir terkait dengan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22 Mei 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagai berikut:

a. industri konstruksi dan engineering;
b. jasa pemborongan dengan pola progress termin maupun *turnkey/build-operate transfer*;
c. pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu;
d. perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi;
e. layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan *engineering* pada khususnya sesuai dengan prinsip perseroan terbatas;
f. sebagai pengembang realti;
g. sebagai pengembang properti;
h. industri pendukung konstruksi bangunan gedung;
i. sebagai investor baik langsung maupun melalui penyertaan saham pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
j. penyediaan ruang pada sarana infrastruktur transportasi bandar udara, pelabuhan, transportasi masal, dan infrastruktur sosial; dan
k. pembangunan dan pengembangan kawasan.

1. General

a. The Company's Estabilishment

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("the Company") is domicile in South Jakarta, established by Deed No. 43, dated October 24, 2008 made in the presence of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment has been approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with its Decision Letter No. AHU-92223.AH.01.01 on December 1, 2008.

The Company's Articles of Association was amended several times, the latest amendment related to the Company's changes in Article 3 of Association as set forth in the Deed No. 3 dated May 16, 2023 made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notary in Jakarta, which recorded in the Legal Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter dated May 22, 2023 No. AHU-0092341.AH.01.11.

According to Article 3 of the Company's Article of Association, aims and objectives and business activities of the Company are as follows:

a. construction and engineering;
b. contractor service with terms, turnkey, or build-operate-transfer pattern;
c. management and rental of business district;
d. trading and maintaining construction material;
e. improvement service on construction and engineering according to company principles;
f. realty developer;
g. property developer;
h. supporting industry of building construction;
i. as direct investor or indirect investor through share ownership and/or joint venture;
j. section provider on infrastructure of airports, ports, mass transportation, and social infrastructure; and
k. construction and development of district.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan saat ini adalah jasa konstruksi, properti dan pracetak.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan entitas induk terakhir dari Perusahaan.

Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur, dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Penawaran Umum Perdana Perusahaan
Penawaran umum perdana Perusahaan sejumlah 2.872.000.000 saham biasa kepada masyarakat telah dinyatakan efektif sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-444/D.04/2017 tanggal 20 November 2017, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017.

The current business activities of the Company are in construction services, real estate (developer) and precast.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk is the ultimate parent company of the Company.

The Company's head office is located at Jl. DI Panjaitan Kav. 9, East Jakarta, with the main activities located throughout Indonesia. The Company started its operational activities commercially in 2009.

The Company's Initial Public Offering
The Company's initial public offering of 2,872,000,000 shares was declared effective by the Board of Commissioners of the Financial Services Authority in his Decree No. S-444/D.04/2017 dated November 20, 2017, and listed in the Indonesian Stock Exchange on November 30, 2017.

b. Susunan Pengurus
Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 27 Mei 2024 dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0207454 tanggal 29 Mei 2024, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

b. Management of the Company
Board of Commisioners and Directors
According to the Deed of the General Meeting of Company No. 15 dated May 27, 2024 made in the presence of Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta which notice has been approved by the Ministry of Law and Human Right Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0207454 dated May 29, 2024, the composition of the board of the Company on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Dewan Komisaris:		***Board of Commisioners:***
Komisaris Utama*	Joseph Prajogo	*President Commissioner**
Komisaris Independen	Joseph Prajogo	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Taufan Gestoro	*Independent Commissioner*
Komisaris	Suli Fatimah	*Commissioner*
Komisaris	Danis Hidayat Sumadilaga	*Commissioner*
Dewan Direksi:		***Board of Directors:***
Direktur Utama	Hadian Pramudita	*President Director*
Direktur QHSE dan Pemasaran	Tomo Dwi Hasputro W.	*Director of QSHE and Marketing*
Direktur Operasi 1	Bagus Tri Setyana	*Director of Operations 1*
Direktur Operasi 2	Dwi Purnomo	*Director of Operations 2*
Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko	Hartanto Karti Raharjo	*Director of Finance, Human Capital and Risk Management*

*Plt Komisaris Utama

**Acting President Commissioner*

Jumlah Remunerasi Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Commissioners and Directors Remuneration for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Komisaris			***Commissioners***
Imbalan Kerja Jangka Pendek	4,802,042,132	4,946,388,404	*Short Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	444,851,368	326,971,562	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**5,246,893,500**	**5,273,359,966**	***Total***
Direksi			***Directors***
Imbalan Kerja Jangka Pendek	12,082,533,793	11,238,346,184	*Short Term Benefit*
Imbalan Pascakerja	1,292,324,800	828,312,521	*Post-employment Benefit*
Jumlah	**13,374,858,593**	**12,066,658,705**	***Total***

Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK.02.01/A.KOM.WG.01837/2024 tanggal 13 Maret tentang Pengangkatan Penggantian Organ Komite Audit Perusahaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Audit Committee
Based on the Decree of Board of Commissioners No.SK.02.01/A.KOM.WG. 01387/2024 dated March 13, 2024 regarding the Appointment of Replacement of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025 and 2024 are as follow:

Ketua	Joseph Prajogo	*Chairman*
Anggota	Taufan Gestoro	*Member*
Anggota	Darawati	*Member*

Audit Internal
Dalam memastikan operasional Perusahaan berjalan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar, diperlukan fungsi Audit Internal yang bekerja secara independen membantu Direktur Utama dalam pengawasan dan pengendalian. Fungsi audit internal Perusahaan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern ("SPI").

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021 tanggal 21 Mei 2021 kepala SPI per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Andi Sugiarto.

Internal Audit
To ensure that the Company's operational activities comply with the Standard Operating Procedure requires the SPI functions that independently assist the President Director in supervision and control. Internal Audit function carried out by the Internal Audit Unit ("SPI").

Based on a Decree of Board of Directors No.SK.02.01/A.DIR.WG.3603/2021 dated May 21, 2021 head of SPI as of December 31, 2025 and 2024 is Andi Sugiarto.

Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Penempatan dan Pengangkatan Pejabat-pejabat di Lingkungan Perusahaan, sekretaris perusahaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Purba Yudha Tama.

Corporate Secretary
Based on the Decree of the Company's Board of Directors No.SK.02.01/A.DIR.WG.6328/2022 dated July 27, 2022 regarding on Placement and Appointment of the Officials of the Company, the corporate secretary as of December 31, 2025 and 2024 is Purba Yudha Tama.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Personalia
Jumlah pegawai (tidak diaudit) Perusahaan dan entitas anak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 460 dan 500.

Employees
The number of employees (unaudited) of the Company and subsidiary as of December 31, 2025 and 2024 amounted to 460 and 500, respectively.

c. Entitas Anak
Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak, yaitu:

c. Subsidiary
The Company directly owned more than 50% shares on subsidiary as follows:

Entitas Anak / *Subsidiary*	Jenis Usaha / *Type of Business*	Tahun Mulai Beroperasi Komersial / *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2025 %	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2024 %	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / *Total Assets (Before Elimination)* 2025 Rp	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) / *Total Assets (Before Elimination)* 2024 Rp
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*						
PT Wege Solusi Proklamasi (WSP)	Konsesi/ *Concession*	2019	90	90	149,996,096,458	157,866,279,953

PT Wege Solusi Proklamasi ("WSP")
PT Wege Solusi Proklamasi untuk selanjutnya disebut dengan WSP, didirikan di Jakarta dengan Akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019 ("Akta No. 85"), dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Wege Solusi Proklamasi ("WSP")
PT Wege Solusi Proklamasi hereinafter referred to a WSP established in Jakarta based on Deed No.85 on May 28, 2019 ("Deed No. 85"), made in the presence of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

WSP mulai beroperasi secara komersial tahun 2019.

WSP started its operational activities commercially in 2019.

Berdasarkan Anggaran Dasar WSP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WSP adalah sebagai berikut:

According to WSP Articles of Association, the capital structure and shareholders of WSP are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Saham/ *Shares*	Rupiah Penuh/ *Full Rupiah*	%
Modal Dasar/*Authorized Capital*	100,000	100,000,000,000	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Paid-in Capital*:			
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	22,500	22,500,000,000	90.00
- PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	2,500	2,500,000,000	10.00
Jumlah / *Total*	**25,000**	**25,000,000,000**	**100.00**
Saham dalam Portepel / *Portofolio Stock*	75,000	75,000,000,000	

Ikhtisar Data Keuangan

Summary of Financial Information

	2025 Rp	2024 Rp	
Jumlah Aset	149,996,096,458	157,866,279,953	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas	128,679,771,929	137,314,562,101	*Total Liabilities*
Jumlah Ekuitas	21,316,324,529	20,551,717,852	*Total Equity*

Perusahaan dan Entitas Anak, selanjutnya disebut sebagai "Grup".

The Company and Subsidiary, hereinafter reffered as "The Group".

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material / *2. Material Accounting Policies Information*

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, sepanjang tidak bertentangan dengan suatu PSAK atau ISAK.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Sevices Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company, to the extent it does not in conflict with PSAK and ISAK.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. The Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts, which have been prepare based on other measurements as described in their respective policies. Historical cost based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on direct method and classified into operating, investing, and financing activities.

For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash includes cash on hand, cash in banks and short-term investments of maturity of three months or less from the date of placement, net of overdrafts and not pledged as a collateral.

The consolidated financial statements are denominated in Rupiah currency, which is the functional currency of Group.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah suatu entitas dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan entitas lain ketika perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

Seluruh transaksi, saldo keuntungan dan kerugian Perusahaan dan entitas anak yang belum direalisasikan dan material, dieliminasi.

Perusahaan mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Perusahaan menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian, maka Perusahaan:

(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

c. *The Principles of Consolidation*

The consolidated financial statements include the financial statements of Group as described in Note 1.c.

Subsidiary is an entity over which the Company has control. The Company controls an entity when the Company is exposed or has the rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiary is fully consolidated since the date when the control transferred to the Company. Subsidiary is no consolidated anymore from the date when that control ceases.

Changes in the ownership of the parent entity in the subsidiary that do not result in loss of control is accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, the remaining interest in entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss are recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

The accounting policies used in preparing the consolidated financial statements are consistently applied by the subsidiary, unless otherwise stated.

All material intercompany transaction, unrealized surplus or deficits on transaction between the Company and its subsidiary, are eliminated.

The Company attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non controlling interests having a deficit balance. The Company presents non controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

If the Company loses control, the Company:

(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;

(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

(b) Derecognizes the carrying amount of any non controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss in the profit or loss attributable to the parent entity.

d. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif;
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran;

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;

d. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 117: Insurance Contract;*
- *Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information;*
- *Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability;*

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 103: Business Combinations;*
- *PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;*
- *PSAK 109: Financial Instruments;*
- *PSAK 115: Income from Contracts with Customers;*
- *PSAK 201: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 207: Statement of Cash Flows;*

- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- *PSAK 216: Fixed Assets;*
- *PSAK 219: Employee Benefits;*
- *PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 236 Impairment of Asset;*
- *PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 238: Intangible Assets; and*
- *PSAK 240: Investment Property*

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

e. Transaksi dan Saldo dalam Valuta Asing

Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal posisi keuangan. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currencies recorded in Rupiah at the prevailing rate at the time of transactions.

At the date of the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies adjusted to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date. The resulting exchange differences recorded as gain (loss) on foreign exchange for the year.

As of December 31, 2025 and 2024 the exchange rates used are as rate follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16,782	16,162	*1 United States Dollar*

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

f. Transactions with Related Parties

Related parties is the person or entity that is related to the reporting entity.

1) A person or a close members to the persons family is related to the reporting entity if that person:
   a. Has control or joint control over the reporting entity;
   b. Has significant influence over the reporting entity; or
   c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.
2) An entity is related to the reporting entity if any of the following condition applies:

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1);
g. Orang yang diidentifikasikan dalam nomor (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries is related to the others);
b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
c. Both of these entities are joint ventures of the same third party;
d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
f. The number is controlled or jointly controlled by a person who identified in the (1);
g. A person identified in point (1) (a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the entity's parent entity); or
h. The entity, or any members of the group which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity could be an entity, which is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that represents the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclose in the relevant notes.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalent are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not use as collateral or are not restricted.

h. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

h. Retention Receivable

Retention receivable represents receivable of the Group from owner of the project which will be settled after the completion of the contract or fulfillment of the contractual terms. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every billing which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

i. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

i. Gross Amount Due from Customer

Gross amount due from customers represents the receivables of the Group originated from construction of contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

j. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (dengan Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode Grup melakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

j. Inventories

Inventories are recognized at the lower of cost and realizable value.

Inventory of Construction Materials

Materials purchased for construction projects are recorded as project's material inventories, each use of material (with Material Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At end of period the Group does inventory taking, and will adjust differences between inventory records and physical existence.

Persediaan Aset Real Estat
Aset real estat terdiri dari tanah belum dikembangkan yang dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

Pembayaran atas pembelian tanah yang masih dalam proses dicatat dalam akun uang muka pada aset lancar. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang dikembangkan ditambah biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pengembangan real estat serta biaya pinjaman dan akan dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai sepenuhnya dan siap untuk dijual.

Biaya aktivitas pengembangan real estat yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat termasuk biaya tanah pra-akuisisi, biaya pembebasan tanah, biaya yang secara langsung terkait dengan proyek, biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek-proyek pembangunan. Kapitalisasi berhenti ketika proyek pembangunan tertunda/ ditunda atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya yang dialokasikan sebagai beban proyek termasuk biaya pra-perolehan tanah yang tidak berhasil diperoleh, biaya kelebihan yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas publik yang diperdagangkan, dijual atau dialihkan, sehubungan dengan penjualan unit.

Grup masih mencatat akumulasi biaya untuk biaya proyek pembangunan meskipun realisasi pendapatan pada masa mendatang lebih rendah dari nilai tercatat proyek. Namun terkait dengan perbedaan yang terjadi, Grup membuat penyisihan secara periodik. Jumlah penyisihan akan mengurangi nilai tercatat proyek dan dibebankan pada laporan laba rugi tahun

Real Estate Assets Inventory
Real estate assets consists of undeveloped land that stated at cost and net realizable value, whichever is lower.

The cost of land for development consists of pre-acquisition costs and land acquisition. Cost will be transferred to the land that is being developed at the time of development of the land has started or moved to a building under construction at the time the land is ready for development.

Payment for the purchase of land, which is still in the process recorded in advance on current assets. The cost of buildings under construction include the cost of land development plus construction costs, other costs that are attributable to real estate development activities as well as the cost of the loan and will be transferred to the building ready for sale when fully completed and ready for sale.

The cost of real estate development activities are capitalized to real estate development projects including pre-acquisition cost of land, land acquisition costs, costs that are directly related to the project, the costs associated with real estate development activities and the cost of borrowing.

Borrowing costs that are directly attributable to development activities are capitalized to development projects. Capitalization stopped when the construction project is delayed/ postponed or substantially ready for their intended use.

Costs that are allocated as expenses including the cost of pre-project land acquisition which is not successfully obtained, the cost advantages gained from the construction of public facilities are traded, sold or transferred, in connection with the sale of units.

The Group posted an accumulated charge for the cost of development projects despite the realization of future revenues is lower than the carrying value of the project. Due to the differences, the Group performs periodic provisions. The amount of the allowance will reduce the carrying value of the project and charged to the statement of comprehensive

berjalan komprehensif. Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasikan ke setiap unit real estat dengan identifikasi yang unik didasarkan pada area yang luas.

income for the year. Costs that have been capitalize to real estate development projects is allocate to each unit of real estate with a unique identification, which is base on a large area.

Penilaian terhadap estimasi biaya dan alokasi dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan sampai proyek selesai secara substansial. Dalam hal perubahan mendasar terjadi, Grup akan merevisi dan mengalokasikan kembali biayanya. Beban yang diakui adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proyek real estat.

Assessment of the estimated costs and the allocation done at the end of each reporting period until the project is substantially completed. If fundamental change occur, the Group will revise and re-allocate the costs. Expense recognized are expenses that are not relate to real estate development.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka terdiri dari biaya tidak langsung, biaya sewa dan asuransi.

Untuk biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek.

Biaya sewa dan asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses include indirect cost, rent and insurance expense.

The indirect cost is charge proportionally to recognized income during projects construction.

The rent and insurance expense are amortize during their benefit period on straight-line method.

l. Aset Kerja Sama

Aset kerjasama operasi merupakan aset atas kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem Bangun Kelola Serah dan Bangun Sewa Serah, Perusahaan mencatat aset kerjasama sebesar harga perolehan pada saat melakukan pembangunan. Aset tersebut dilakukan penyusutan selama masa perjanjian kerjasama.

l. Asset of Co-operation

The operating asset is an asset of the merger with a third party under the Build Operate Transfer system and Build Lease Transfer, the Company records the operating asset at cost at the time of construction. The asset is depreciated during the term of the cooperation agreement.

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Nilai perolehan aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi, akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat asset takberwujud dengan umur tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat masih mendukung dan terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai.

m. Intangible Assets

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired from business combinations is initially recognized at fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and if any, accumulated impairment loss. The useful lives of intangible assets are assessed to be either finite or indefinite.

Intangible assets with indefinite life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable and when circumstances indicate that the carrying amount may be impaired.

n. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi (PDPK)

Pekerjaan Dalam Proses merupakan biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan yang diakui sebagai aset, yang berhubungan langsung dengan kontrak dimana Grup dapat mengidentifikasi secara spesifik, menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Grup yang akan digunakan dalam memenuhi (atau terus memenuhi) kewajiban pekerjaan dalam masa depan dan diharapkan dapat dipulihkan. Grup menelaah penurunan nilai Pekerjaan Dalam Proses setiap kali peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat diperoleh kembali.

n. Construction Work in Progress (CWIP)

Work In Progress represents costs incurred in fulfilling contract with customers which recognized as an asset, that relate directly to a contract that the Group can specifically identify, generate or enhance resources of the Group that will be used in satisfying (or continuing to satisfy) performance obligations in the future and are expected to be recovered. The Group reviews the Work In Progress for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awal nya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan data pasar.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment properties are measured initially at its cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, the Group's investment property was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such valuation was based on market data approach.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, including:

a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;

b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Tanah dan bangunan disajikan dengan metode nilai wajar dan tidak disusutkan.

p. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus *(straight line method)*, sedangkan untuk peralatan kantor dan peralatan proyek menggunakan presentase tetap dari nilai buku metode angka *tahun (sum of the year method)* dengan presentase penyusutan sebagai berikut:

b. Commencement of development with a view to sell, for a transfer from investment property to inventories;
c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and
d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventory to investment property.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

Land and building are measured using fair value model and is not depreciated.

p. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition fixed assets except land and building, are carry at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Buildings are depreciated using the straight line method, while the office equipment and project equipment are depreciated using sum of the year method at the following rates of depreciation:

Jenis Aset Tetap / *Fixed Assets*	**Metode Penyusutan / *Depreciation Method***	**Masa Manfaat / *Useful Lives***
Bangunan Gedung / *Buildings*	Garis Lurus / *Straight Line*	20 Tahun / *Years*
Peralatan Kantor / *Office Equipments*	Garis Lurus / *Straight Line*	4 Tahun / *Years*
Peralatan Proyek / *Project Equipment*	Angka Tahun / *Sum of the Year*	3 - 8 Tahun / *Years*
Kendaraan / *Vehicles*	Garis Lurus / *Straight Line*	5 Tahun / *Years*

Pada akhir tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of reporting year, the Group periodically reviews the useful life of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical conditions.

Aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset.

Fixed assets and other non-current assets, including intangible assets reviewed to look for whether there is loss caused by impairment, when there are events or changes in circumstances indicating that carrying amount may not be recoverable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying values of the assets with recoverable value of the assets. The recoverable values are the higher value between net sale value and value in use of the assets.

q. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan kecuali *Goodwill*

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

q. Impairment of Nonfinancial Assets except Goodwill

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if it is not possible; the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit.

Present values are compute using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduce to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognize immediately in profit or loss.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increase to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

r. Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima atas proyek yang dikerjakan serta atas penjualan barang dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diperhitungkan pada saat proyek diselesaikan atau terjadinya transaksi penjualan.

Uang muka konsumen properti merupakan uang muka yang diterima dari konsumen sehubungan dengan penjualan apartemen.

r. Advances from Project Owners and Customers

Advances from project owner represents advances, which are received for projects in progress and for the sales of goods, are being recognized as unearned income and would calculated when the projects are finished or when the goods have been sold.

Advance from customers of property represents advances received from consumers in connection with the sale of apartments.

s. Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
   - Kontrak memiliki substansi komersial
   - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.

s. Revenues and Expenses

In determining revenue recognition, the Group performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
   - *The contract has commercial substance*
   - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*

5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:
- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Kriteria berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan Konstruksi dan Beban Konstruksi
Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*

- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and,*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

The following recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Construction Revenues and Construction Costs
Revenues related to construction contracts are recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be realiably measured.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the consolidated financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non proyek (beban usaha).

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Real Estat
Grup memperoleh pendapatan real estatnya dari penjualan unit kondominium. Pendapatan dari penjualan proyek real estat ini diakui pada saat ketika Grup telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan yang biasa kepada pembeli dalam suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan tidak memiliki keterlibatan berkelanjutan yang substansial. dengan properti.

Real Estate
The Group derives its real estate revenue from sale of condominium units. Revenues from the sale of these real estate projects are recognized at point in time which is when the Group has already transferred to the buyer the usual risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property.

Pengakuan Beban
Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Expense Recognition
Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from

Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

t. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:
a) Pengakuan awal *goodwill;* atau
b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
   (i) bukan kombinasi bisnis;

t. Income Tax

The tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a) The initial recognition of goodwill; or
b) At the time of initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:
   (i) not business combination;

(ii) pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
(iii) pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalan jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud kecuali jika pengakuan awal asset dari transaksi yang:
(i) bukan kombinasi bisnis;
(ii) pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak); dan
(iii) pada saat transaksi, tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

(ii) at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit (tax loss); and
(iii) at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deducted temporary difference.

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized at the time of initial recognition of an asset in a transaction which is:

(i) not business combination;
(ii) at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction; and
(iii) it does not give rise to taxable temporary differences and the temporary differences can be deducted in the same amount.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a) The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Penghasilan Final
Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 21 Februari 2022 yang merupakan perubahan (revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2022 dikenakan tarif pajak final sebesar 2,65% untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku.

Pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan non subsidi dari 5% menjadi 2,5% berlaku efektif per tanggal 7 September 2016 atau 30 hari sejak diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.

b) The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
   i. the same taxable entity; or
   ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and

b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Final Income Tax
Due to the enactment of Government Regulation Republic of Indonesia No. 9 Year 2022, which was enacted on February 21, 2022 which is the change (revision) of Government Regulation RI No. 51 Year 2008, which was passed July 23, 2008 on Tax on Income From Construction Services as a substitute Government Regulation RI No. 140 Year 2000, the Company as the contractor in accordance with Article 3 of Government Regulation No. 9 Year 2022 is charged at 2.65% final tax for contract payments or parts of contract which received after this regulation becomes effective.

The Government lowered the income tax (PPh) final over the sale of land and buildings other non subsidy from 5% became 2.5% effective on September 7, 2016 or 30 days from the enactment of Government Regulation (PP) No. 34 Year 2016 about Income Taxes on the Income from the Transfer of Land Rights and/or Building, and an Increase in the Sale of Land and/ or Buildings Along with the Revised Document.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

u. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pensiun

Grup memiliki program pensiun manfaat pasti dan pensiun iuran pasti.

Program iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah.

Seluruh karyawan tetap yang dipekerjakan sebelum tahun 2007 diikutsertakan pada program pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya 1.

Seluruh karyawan tetap yang dipekerjakan mulai tahun 2007 dan seterusnya diikutsertakan pada program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya 2.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2023.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

u. Employee Benefits

Short Term Employee Benefit

Short-term employee benefits recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Pension Benefits

The Group has a defined benefit and a defined contribution pension plan.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity.

All permanent employees who hired before 2007 covered by a defined benefit plan managed by Dana Pensiun Wijaya Karya 1.

All permanent employees who hired on year 2007 onwards covered by a defined contribution plan managed by Dana Pensiun Wijaya Karya 2.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as post-retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 6 Year 2023.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognize in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang diukur dengan menggunakan metode yang sama dengan imbalan pascakerja, kecuali untuk pengukuran kembali liabilitas diakui dalam laba rugi.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognize in other comprehensive income.

Other Long Term Employee Benefits
Other long-term benefits such as long service leave measured using the same method as post-employment benefits, except for the remeasurement of the liability recognized in profit or loss.

v. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.
Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

v. Operating Segment

The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.
An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *separate financial information is available.*

w. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

w. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi

Subsequent Measurement of Financial Assets
The financial assets of the Group are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs
Financial assets are measured at amortized costs if both of the following conditions are met:
(1) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal ("SPPI") and interest on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")
The financial assets are measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:
(1) The financial asset is held within a business model whose objective is

dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and

(2) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, which are recognized in profit or loss. When such financial asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet the criteria to be measured at amortized costs or to be measured at FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. Gain or loss arising from changes in fair value of the financial assets are recognized in profit or loss.

Financial assets in the form of derivatives and investment in equity instrument do not meet the criteria to be measured at amortized costs or to be measured at FVTOCI, therefore, these are measured at FVTPL. However, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in the near future to be measured at FVTOCI. This designation will result to gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is continuous to be recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified through retained earnings, not through profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
(b) Liabilitas keuangan yang timbul Ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
    (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
    (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

(a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost, except for:

(a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
(b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

(c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

    (i) The amount of the loss allowance; and
    (ii) The amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with the principles of PSAK 115.

(d) Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognized in profit or loss.

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

(a) Eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on them on different bases; or

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment

informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Grup's key management personnel.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi
Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Reclassification
The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes therefore its previous model assessment would no longer apply.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies its financial assets, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost measurement category into FVTPL measurement category, its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses arising from the difference between the previous amortized cost of the financial asset and its fair value is recognized in profit or loss.

diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Grup tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan.

Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL measurement category into amortized cost measurement category, its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost measurement category into FVTOCI measurement category, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost of the financial asset and the fair value is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and the measurement of expected credit loss are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI measurement category into amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is removed from equity and adjusted against the fair value of the financial asset at the reclassification date. As a result, the financial asset is measured at the reclassification date as if it had always been measured at amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but does not affect profit or loss and therefore is not a reclassification adjustment. The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVPTL measurement category into FVTOCI measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI measurement category into FVPTL measurement category, the financial asset continues to be measured at fair value. The cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

The Group does not reclassify any financial liability.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:
i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Impairment of Financial Assets
The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12-months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability
A financial asset and financial liability shall be offset if and only if, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

(i) *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*

(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

(ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
(iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

x. Sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu dimana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

x. Lease

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentikan jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak-guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, the Group shall measure the right-of-use assets applying a cost model.

If the lease transfers the ownership of the underlying asset at the end of the lease term, then the asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right-of-use assets with buy options executed should refer to the policy for the fixed assets useful life time.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group incremental borrowing rate. Generally,

inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas dengan:
a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:
a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimates of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

The Group applies the exemption for low-value assets on a lease-by-lease basis; and for all other leases of low value asset.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments which comprise of computers, tablets, mobile phones and small items of office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

y. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

i. Jika investasi menjadi entitas anak, Grup mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 103 dan PSAK 110;

ii. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan

iii. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama-sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut.

y. Investments in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

i. If the investment becomes a subsidiary, the Group accounts for its investment in accordance with PSAK 103 and PSAK 110;

ii. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value; and

iii. When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

If the Group's share of losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its carrying value in the associate or joint venture, the Group discontinues recognizing its share of further losses. The interest in an associate or a joint

Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode ekuitas atas selisih lebih investasi Grup pada saham biasa diterapkan untuk komponen lain dari bagian Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan terbalik dengan tingkat senioritasnya (yaitu prioritas dalam likuidasi).

venture is the carrying amount of the investment in the associate or joint venture determined using the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture. Losses recognized using the equity method in excess of the Group's investment in ordinary shares are applied to the other components of the Group's interest in an associate or a joint venture in the reverse order of their seniority (i.e. priority in liquidation).

Setelah kepentingan Grup dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

After the Group's carrying value is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognized, only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture. If the associate or joint venture subsequently reports profits, the Group resumes recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

Grup mengakui kelebihan rugi tersebut sebagai pengurang kepentingan jangka panjang pada entitas asosiasi tersebut.

The Group recognizes the excess as a deduction of long-term interest in the associate entity.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classifies joint arrangement as:

1) Operasi Bersama
   Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

   Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

1) *Joint Operation*
   Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement *have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.*

   A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
(d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

(a) Its assets, including its share of any assets held jointly;
(b) Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
(c) Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
(d) Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
(e) Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Ventura Bersama
Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2) Joint Venture
The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

z. Biaya Emisi Obligasi dan Saham
Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

z. Bond and Shares Issuance Costs
Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

aa. Laba per Saham
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

aa. Earnings per Share
Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculation diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

3. Pertimbangan Akuntansi Kritis dan Sumber Ketidakpastian Estimasi

3. *Critical Accounting Judgments and Source of Estimates Uncertainty*

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Group accounting policies, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi
Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana Direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies
Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the Directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama
Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Interests in Joint Arrangements
Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*

- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
  c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

Sumber Ketidakpastian Estimasi
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan Pendapatan Konstruksi dan Beban Pokok Pendapatan
Grup mengakui pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Jumlah pendapatan konstruksi dan beban pokok pendapatan yang terkait disajikan di Catatan 34 dan 35.

- *When the arrangement is structured through a* separate *vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  a. The legal form of the separate vehicle;
  b. The terms of the contractual arrangement; and
  c. Other relevant facts and circumstances.

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Sources of Estimation Uncertainty
The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Construction Revenue and Cost of Revenue Recognition
The Group recognizes revenues from construction and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluates them based on past experience and with the assistance of specialist. Total construction revenues and related cost of revenues are presented in Notes 34 and 35.

Rugi Penurunan Nilai pada Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 4, 5, 6, 7, 8 dan 14.

Impairment Loss on Financial Asset Measured at Amortized Cost

The Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using roll rate dan discounted cash flow to measuring account receivable, retention receivable, gross amount due from customers and other receivables. The carrying mounts of financial assets are disclosed in Notes 4, 5, 6, 7, 8 and 14.

Penyisihan Penurunan Pekerjaan dalam Proses Konstruksi (PDPK)

Rugi penurunan nilai diakui sebesar nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Perhitungan manajemen atas estimasi penurunan nilai PDPK melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup membandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatat untuk mengukur penurunan nilai PDPK. Grup menelaah estimasi penurunan nilai PDPK berdasarkan kondisi masing-masing proyek dengan mempertimbangkan data historis, asumsi atau ekspektasi kondisi masa depan. Nilai tercatat pekerjaan dalam proses konstruksi diungkapkan dalam Catatan 13.

Allowance Impairment for Construction Work in Progress (CWIP)

An impairment loss is recognized at the carrying amount of the asset in excess of its recoverable amount. Management's calculation of the estimated impairment of CWIP involves significant estimation and judgment. The Group compares the recoverable amount with the carrying amount to measure the impairment of CWIP. The Group reviews the estimated impairment of CWIP based on the conditions of each project by considering historical data, assumptions or expectations of future conditions. The carrying amount of construction work in progress is disclosed in Note 13.

Penyisihan Penurunan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 9.

Allowance Impairment for Obsolescence of Inventories

Allowance for impairment for obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 9.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the Group's fixed assets is determined based on the expected use of the assets. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of

setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 18.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets. The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 18.

Pengukuran Nilai Wajar untuk Properti Investasi

Properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut didasarkan pada pendekatan pendapatan, biaya, dan data pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 16.

Fair Value Measurements of Investment Properties
The Group's investment properties was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such valuation was based on income, cost, and market data approaches. The carrying amount of the investment properties are disclosed in Note 16.

Imbalan Kerja
Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 28.

Employee Benefits
The determination of employee benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's employee benefit liabilites. The carrying amounts of employee benefits liabilites are disclosed in Note 28.

4. Kas dan Setara Kas / *4. Cash and Cash Equivalents*

	2025 Rp	2024 Rp
Kas/ *Cash on Hand*	2,362,218,089	2,451,780,735
Kas di Bank/ *Cash in Bank*	320,215,841,655	882,318,243,856
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*	68,549,509,831	145,962,137,368
Jumlah/ *Total*	**391,127,569,575**	**1,030,732,161,959**

Rincian kas di bank dan setara kas berdasarkan bank adalah sebagai berikut:

Details of cash in bank and cash equivalents based on bank are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Kas di Bank/ *Cash in Bank*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**319,224,671,672**	**870,542,726,079**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Rupiah		
PT Bank DKI	793,586,363	10,124,360,039
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	76,038,147	77,831,993
PT Bank CIMB Niaga Tbk	62,252,507	63,027,153
PT Bank Central Asia Tbk	52,175,716	848,843,021
PT Bank Nationalnobu Tbk	7,117,250	7,117,250
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	654,338,321
Subjumlah/ Subtotal	**991,169,983**	**11,775,517,777**
Jumlah Kas di Bank/ *Total Cash in Bank*	**320,215,841,655**	**882,318,243,856**
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**68,549,509,831**	**145,962,137,368**
Jangka Waktu Deposito Berjangka/ *Time Deposits Period*	1-6 bulan/ *months*	1-3 bulan/ months
Tingkat Bunga Deposito Berjangka/ *Time Deposits Interest Rate*		
Rupiah	2,25% - 4,50%	2,25% - 4,25%

5. Piutang Usaha – Neto / *5. Trade Receivables – Net*

Piutang usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

Trade receivables by type of business are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Jasa Konstruksi	411,105,705,602	548,167,264,415	*Construction*
Properti	13,965,717,269	82,286,552,484	*Property*
Industri	7,693,397,802	31,826,906	*Industry*
Konsesi	3,237,849,742	20,013,224,630	*Concession*
Subjumlah	**436,002,670,415**	**650,498,868,435**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(200,517,274,099)	(105,338,241,928)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Neto	**235,485,396,316**	**545,160,626,507**	***Total Trade Receivables - Net***

Piutang usaha seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All trade receivables are transactions in Rupiah currency.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on customer are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**178,032,058,353**	**264,426,455,139**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(10,356,676,148)	(1,226,546,977)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**167,675,382,205**	**263,199,908,162**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**257,970,612,062**	**386,072,413,296**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(190,160,597,951)	(104,111,694,951)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**67,810,014,111**	**281,960,718,345**
Jumlah Piutang Usaha - Bersih/ *Total Trade Receivables - Net*	**235,485,396,316**	**545,160,626,507**

Rincian umur piutang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of trade receivables based on the due date are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	36,365,982,624	96,453,676,883	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	63,214,027,623	29,884,376,112	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	5,912,258,479	508,718,875	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	28,299,975,501	54,683,049,763	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	302,210,426,188	468,969,046,802	*> 1 Year*
Subjumlah	**436,002,670,415**	**650,498,868,435**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(200,517,274,099)	(105,338,241,928)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**235,485,396,316**	**545,160,626,507**	***Total Trade Receivables - Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss of trade receivable are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	105,338,241,928	106,042,459,775	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	137,943,501,241	67,851,023,353	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(42,764,469,070)	(68,555,241,200)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**200,517,274,099**	**105,338,241,928**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Per 31 Desember 2025 dan 2024, piutang usaha masing-masing sebesar Rp124.917.268.511 dan Rp254.801.970.779 telah dijaminkan atas pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 27 dan 43).

As of December 31, 2025 and 2024, trade receivables amounting to Rp124,917,268,511 and Rp254,801,970,779, respectively, were secured as collateral for loans to banks and other financial institutions (Notes 27 and 43).

Jumlah piutang usaha mencukupi untuk memenuhi persyaratan penjaminan piutang usaha atas fasilitas pinjaman yang diterima.

The total amount of trade receivables satisfies guarantee receivable provisions of loan facilities granted to the Company.

6. Piutang Retensi – Neto / *6. Retention Receivables – Net*

Rincian piutang retensi berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables based on customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**125,593,606,267**	**164,883,573,491**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(7,224,530,860)	(3,170,644,421)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**118,369,075,407**	**161,712,929,070**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**296,019,926,412**	**465,058,788,254**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(79,295,849,901)	(66,815,506,355)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**216,724,076,511**	**398,243,281,899**
Jumlah Piutang Retensi - Bersih/ *Total Retention Receivables - Net*	**335,093,151,918**	**559,956,210,969**

Rincian umur piutang retensi berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of retention receivables based on the due date are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	3,804,125,491	8,783,810,867	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	5,988,342,801	31,378,251,950	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	4,829,140,051	10,246,569,407	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	12,886,151,776	26,626,072,056	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	394,105,772,560	552,907,657,465	*> 1 Year*
Subjumlah	**421,613,532,679**	**629,942,361,745**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(86,520,380,761)	(69,986,150,776)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Piutang Retensi - Bersih	**335,093,151,918**	**559,956,210,969**	***Total Retention Receivables - Net***

Piutang retensi seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All retention receivables are transactions in Rupiah currency.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss of retention receivables are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	69,986,150,776	60,465,754,048	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	63,536,024,435	39,111,880,761	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(47,001,794,450)	(29,591,484,033)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**86,520,380,761**	**69,986,150,776**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang retensi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang retensi tersebut.

Management believes that allowances for impairment losses on retention receivables are adequate to cover possible losses from uncollectible of retention receivables.

7. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja – Neto / *7. Gross Amount Due from Customers – Net*

Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of gross amount due from customers based on customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ *Gross Amount Due from Customers*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**186,702,507,065**	**195,252,862,245**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(56,212,528,356)	(131,093,920)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**130,489,978,709**	**195,121,768,325**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**152,452,703,616**	**266,326,847,260**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(18,848,998,829)	(24,928,789,589)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**133,603,704,787**	**241,398,057,671**
Total Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja - Bersih/ *Gross Amount Due from Customers - Net*	**264,093,683,496**	**436,519,825,996**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah.

All gross amount due from customers are transactions in Rupiah.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss on gross amount due from customers are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	25,059,883,509	28,016,944,431	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	75,450,086,050	23,689,574,204	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(25,448,442,374)	(26,646,635,126)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**75,061,527,185**	**25,059,883,509**	***Balance at End of the Year***

Rincian umur tagihan bruto berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The details of the age of gross amount based on the due date are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	26,896,566,308	160,941,125,440	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	26,244,388,302	28,005,781,506	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	19,496,958,455	14,656,101,601	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	118,370,454,754	1,683,316,330	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	148,146,842,862	256,293,384,628	*> 1 Year*
Subjumlah	**339,155,210,681**	**461,579,709,505**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(75,061,527,185)	(25,059,883,509)	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Tagihan Bruto - Bersih	**264,093,683,496**	**436,519,825,996**	***Total Gross Amount - Net***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai tagihan bruto cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya tagihan bruto tersebut.

The Management believes that allowance for impairment losses on gross amount are adequate to cover possible losses from uncollectible of gross amount accounts.

8. Piutang yang Belum Ditagih / *8. Unbilled Receivables*

	2025 Rp	2024 Rp
Piutang yang Belum Ditagih/ *Unbilled Receivables*		
Pelanggan/ *Customer* KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	5,844,319,535	3,854,695,314
Pelanggan/ *Customer* KOKAR WEGE	2,404,915,651	2,404,915,651
Pelanggan/ *Customer* PT Hutama Karya (Persero) Tbk	106,400,000	106,400,000
Pelanggan/ *Customer* Institut Pertanian Bogor	45,005,811	--
Pelanggan/ *Customer* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	25,500,000	25,500,000
Pelanggan/ *Customer* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	2,328,828,828
Pelanggan/ *Customer* KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	--	640,240,000
Subjumlah/ *Subtotal*	**8,426,140,997**	**9,360,579,793**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(890,934,592)	--
Total Piutang Yang Belum Ditagih/ *Unbilled Receivables*	**7,535,206,405**	**9,360,579,793**

Akun ini merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek.

This account represents unbilled account receivables arising from activities other than project construction activities.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang belum ditagih adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment loss on unbilled receivables are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	890,934,592	--	*Impairment During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**890,934,592**	**--**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai piutang yang belum ditagih cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang yang belum ditagih tersebut.

Management believes that allowances for impairment losses on unbilled receivables are adequate to cover possible losses from uncollectible of unbilled receivables accounts.

9. Persediaan / *9. Inventories*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Persediaan Lancar			***Current Inventory***
Persediaan Jasa Konstruksi			***Inventory of Construction***
Persediaan Bahan untuk Konstruksi	96,210,633,143	142,121,081,520	*Inventory of Construction Materials*
Persediaan Properti			***Inventory of Property***
Bangunan Jadi	206,421,519,563	203,344,170,119	*Building*
Persediaan Industri			***Inventory of Industry***
Barang *Assembly*	3,454,694,632	3,306,510,915	*Assembly Goods*
Persediaan Bahan untuk Industri	--	1,255,834,022	*Inventory of Industry Materials*
Jumlah Persediaan Lancar	**306,086,847,338**	**350,027,596,576**	***Total Current Inventory***

	2025 Rp	2024 Rp	
Persediaan Tidak Lancar			***Non Current Inventory***
Tanah akan Dikembangkan	66,726,550,000	46,677,650,000	*Land for Development*
Jumlah Persediaan	**372,813,397,338**	**396,705,246,576**	***Total Inventory***

Persediaan bahan untuk konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perusahaan.

Inventories of construction materials are projects materials inventory stored at project warehouses owned by the Company.

Tingkat penyelesaian bangunan telah mencapai 100% dari nilai kontrak serta tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

The progress of the buildings has reached 100% of the contract value and no borrowing costs capitalized.

Persediaan bangunan jadi terdiri dari:

Inventories of building consist of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Tamansari Tera	76,233,868,517	93,028,841,611	*Tamansari Tera*
Tamansari Mahogany	73,778,154,554	74,486,487,635	*Tamansari Mahogany*
Apartemen Capitol Park	20,580,655,619	--	*Capitol Park Apartment*
Apartemen Bale Hinggil	17,222,727,273	17,222,727,273	*Bale Hinggil Apartment*
Apartemen Sentra Land	15,606,113,600	15,606,113,600	*Sentra Land Apartment*
Apartemen Sudirman Hill	3,000,000,000	3,000,000,000	*Sudirman Hill Apartment*
Jumlah	**206,421,519,563**	**203,344,170,119**	***Total***

Tamansari Tera
Persediaan Tamansari Tera merupakan persediaan bangunan jadi yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 764 seluas 2.149 m^2 atas nama Perusahaan yang berlokasi di Jalan Tera No. 28, Kelurahan Braga, Bandung, sesuai dengan Akta Memorandum Kesepakatan tanggal 1 Maret 2013 antara Perusahaan dengan Tuan Andi Ahsan Nasrudin. Persediaan bangunan jadi terdiri dari 47 unit apartemen dan 17 unit komersial.

Tamansari Tera
Tamansari Tera is a finished building inventory located on the land with right of use certificate (HGB) letter No. 764 covering an area of 2,149 sqm on behalf of the Company, located at Tera No. 28, Braga, Bandung, in accordance with the Deed of Memorandum of Understanding dated March 1, 2013 between the Company with Mr. Andi Ahsan Nasrudin. Finished building inventories consist of 47 apartment units and 17 commercial units.

Persediaan bangunan dalam konstruksi seluruhnya telah menjadi persediaan bangunan jadi.

Building in construction inventories have all become finished building inventories.

Tamansari Mahogany
Persediaan Tamansari Mahogany merupakan persediaan bangunan jadi yang berlokasi di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Persediaan bangunan jadi terdiri dari 117 unit apartemen dan 9 unit komersial.

Tamansari Mahogany
Tamansari Mahogany is a finished building inventory located in Margakaya Village, Teluk Jambe District, Karawang Regency, West Java Province. Finished building inventories consist of 117 apartment units and 9 commercial units.

Apartemen Bale Hinggil
Persediaan Apartemen Bale Hinggil sebanyak 99 unit yang terletak di Jalan Dr. Sukarno, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Bale Hinggil Apartment
Inventories of Apartment Bale Hinggil are 99 units located in Jalan Dr. Sukarno, Medokan Semampir Sub-district, Sukolilo District, Surabaya.

Apartemen Bale Hinggil diperoleh dari Pihak Pengembang *(Developer)* yaitu PT Tlatah Gema Anugrah sesuai dengan Perjanjian Pokok Jual Beli Unit Khusus Atas Unit Satuan Rumah Susun

Bale Hinggil Apartment was obtained from developer PT Tlatah Gema Anugrah in accordance with the principal Agreement of Sale and Purchase Special Unit on Apartment Units "Apartment Bale

"Apartemen Bale Hinggil" No: 060/MKHT-IH/TGA/15- III/2013 tanggal 1 Maret 2013, dimana Perusahaan sebagai kontraktor atas pembangunan apartemen tersebut.

Hinggil" No: 060/MKHT-IH/TGA/15-III/2013 dated March 1, 2013, where the Company is a contractor on the construction of the apartments.

Apartemen Sentra Land
Persediaan Apartemen Sentra Land sebanyak 30 unit yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang.

Sentra Land Apartment
Inventory Sentra Land Apartment consists of 30 units located in Jalan Ki Mangunsarkoro No. 36, Semarang.

Apartemen Sentra Land diperoleh dari Kerjasama Usaha (KSU) antara Perum Perumnas dan PT Propernas Griya Utama sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Apartemen nomor: 014/PPJB-SL/PGU/III/2014 tanggal 7 Maret 2014, dimana Perusahaan sebagai kontraktor atas pembangunan apartemen tersebut.

Sentra Land Apartment was acquired from Kerjasama Usaha (KSU) Perum Perumnas and PT Propernas Griya Utama in accordance with the Sale and Purchase Agreement Unit Apartment number: 014/PPJB- SL/PGU/III/2014 dated March 7, 2014, where the Company is a contractor on the apartment building.

Apartemen Sudirman Hill
Persediaan Apartemen Sudirman Hill sebanyak 1 unit seluas 120 meter persegi yang terletak di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sudirman Hill Apartment
Inventory Sudirman Hill Apartment consists of 1 unit 120 meter square wide located at Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Central Jakarta.

Apartemen Sudirman Hill diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Apartemen nomor: PPJB.256/SH-APT/XI/2022 tanggal 17 November 2022.

Sudirman Hill Apartment was acquired in accordance with the Sale and Purchase Agreement Unit Apartment number: PPJB.256/SH-APT/XI/2022 dated November 17, 2022.

Apartemen Capitol Park
Persediaan Apartemen Capitol Park sebanyak 10 unit seluas 581,25 meter persegi yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 16, Kenari, Jakarta Pusat

Capitol Park Apartment
Inventory Capitol Park Apartment consists of 10 unit 581.25 meter square wide located at Jalan Salemba Raya No. 10, Kenari, Central Jakarta.

Apartemen Capitol Park diperoleh berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran pada 23 Desember 2025 antara Perusahaan dan PT Wikaraga Sapta Utama dengan harga perolehan sebesar Rp28.615.940.527. Berdasarkan Laporan KJPP No. 00114/2.0095-04/PI/05/0090/1/X/2025 oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan pada tanggal 30 Oktober 2025, nilai wajar persediaan adalah sebesar Rp30.021.310.000. Penilaian dilakukan dengan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar.

Capitol Park Apartment was acquired in accordance with Payment Agreement Minutes dated December 23, 2025 between the Company and PT Wikaraga Sapta Utama with a carrying amount of Rp28,615,940,527. Based on KJPP Report No. 0014/2.0095-04/PI/05/0090/1/X/2025 by KJPP Ruky, Safrudin & Rekan dated October 30, 2025, the fair value of inventory is amounting to Rp30,021,310,000. The valuation was conducted using a market approach with a market data comparison method.

Tanah akan Dikembangkan
Tanah HGB No. 3320 atas nama Perusahaan seluas 11.556 m^2 yang berada di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, senilai Rp37.157.450.000.

Land for Development
Land HGB No. 3320 on behalf of the Company of 11,556 sqm that is located in MT. Haryono, Air Putih Sub-Destrict, Samarinda Ulu District, Samarinda City, Province East Kalimantan worth Rp37,157,450,000.

Tanah HGB No.394 seluas 592 m^2 yang berada di Kampung Pasir Luhur RT.001 RW.010, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat senilai Rp281.200.000.

Land HGB No.394 covering an area of 592 sqm wide located at Kampung Pasir Luhur RT.001 RW.010, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Bandung, West Java amounted to Rp281,200,000.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Tanah HGB No. 01198 seluas 2.200 m^2 dan HGB No. 01343 seluas 84 m^2 atas nama Perusahaan yang berada di Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp10.089.000.000.

Land HGB No. 01198 covering an area of 2,200 sqm wide and HGB No. 01343 84 sqm wide located at Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan amounted to Rp10,089,200,000.

Tanah SHM sebanyak 16 bidang dengan total luasan sebesar 227.666 m^2 yang berada di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tengara Barat dengan nilai perolehan sebesar Rp14.965.086.579. Tanah tersebut diperoleh Perusahaan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban PT Indraco kepada Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh KJPP Iskandar dan Rekan dalam Laporan KJPP No. 00213/2.0118-00/PI/03/0463/1/VII/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, nilai wajar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp19.198.000.000. Penilaian dilakukan dengan pendekatan pasar melalui metode perbandingan data pasar.

16 land plots under SHM title with a total area of 227,666 meter square wide located in Kecamatan Sekotong and Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat with an acquisition cost of Rp14,965,086,579. The land was acquired by the Company as part of the settlement of PT Indraco's obligations to the Company. Based on the assessment conducted by KJPP Iskandar and Partners in KJPP Report No. 00213/2.0118-00/PI/03/0463/1/VII/2024 dated February 15, 2024, the fair value of the land is Rp19,198,000,000. The valuation was conducted using the market approach through a market data comparison method.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan dan tidak ada penghapusan persediaan yang rusak atau usang.

Based on the review on the condition of the inventories, the Company's management believes that no alowance for impairment of inventories is necessary and there is no removal of damaged or obsolete inventory.

10. Perpajakan / *10. Taxation*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPN-Masukan	369,769,939,797	301,002,925,044	*VAT-In*
PPh Final	29,880,181,698	29,641,816,275	*Final Income Tax*
Subjumlah	399,650,121,495	330,644,741,319	***Subtotal***
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPN-Masukan	197,716,846	--	*VAT-In*
PPh Final	769,337,601	727,712,814	*Final Income Tax*
Subjumlah	967,054,447	727,712,814	***Subtotal***
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	**400,617,175,942**	**331,372,454,133**	***Total Prepaid Taxes***

b. Utang Pajak / *b. Tax Payable*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 4 (2)	3,145,303,804	4,704,989,809	*Tax Article 4 (2)*
PPh Pasal 21	12,018,976,639	2,016,164,529	*Tax Article 21*
PPh Pasal 23	976,786,149	343,187,480	*Tax Article 23*
PB-1	968,153,842	419,404,055	*PB-1*
PPh Final	1,374,937,251	378,174,564	*Final Income Tax*
Subjumlah	18,484,157,685	7,861,920,437	***Subtotal***

	2025 Rp	2024 Rp	
Entitas Anak			***Subsidiary***
PPN Keluaran	945,859,163	85,632,944	*VAT-Out*
PPh Pasal 21	1,159,124	21,553,694	*Tax Article 21*
PPh Pasal 23	45,003,230	25,156,585	*Tax Article 23*
PPh Pasal 4 (2)	14,083,642	9,908,951	*Tax Article 4 (2)*
Subjumlah	1,006,105,159	142,252,174	***Subtotal***
Jumlah Utang Pajak	**19,490,262,844**	**8,004,172,611**	***Total Tax Payable***

c. Pajak Penghasilan Final / *c. Final Income Tax*

Liabilitas Pajak Penghasilan Final / *Final Income Tax Liabilities*

	2025 Rp	2024 Rp	
PPh Final	41,427,549,056	47,860,115,224	*Final Income Tax*
Jumlah Liabilitas Pajak Penghasilan Final	**41,427,549,056**	**47,860,115,224**	***Total Final Income Tax Liability***

Beban Pajak Final / *Final Tax Expense*

	2025 Rp	2024 Rp	
Perusahaan	36,043,482,752	93,554,137,222	*The Company*
Entitas Anak	3,019,170,453	2,852,937,575	*Subsidiary*
Jumlah Beban Pajak Final	**39,062,653,205**	**96,407,074,797**	***Total Final Tax Expense***

11. Uang Muka / *11. Advances*

Akun ini terdiri dari: / *This account consist of:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Uang Muka Pemasok	70,683,113,876	97,363,610,656	*Advances to Suppliers*
Uang Muka Subkontraktor	13,132,117,673	21,712,715,414	*Advances to Subcontractors*
Persekot Pekerjaan	--	4,958,402,225	*Advances to Employee*
Jumlah	**83,815,231,549**	**124,034,728,295**	***Total***

Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

Advances to suppliers are advances given to the suppliers in connection with the procurement of raw materials and construction materials for the project.

Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perusahaan pada saat pembayaran prestasi kerja.

Advances to subcontractors represents advances given to the subcontractor in connection with the execution of the contract project work, the subcontractor will repay the Company at the time of payment of work performance.

Persekot pekerjaan merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional proyek.

Advances to employees are advances given to employees for project operational activities.

12. Biaya Dibayar di Muka / *12. Prepaid Expense*

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan seperti biaya pelaksanaan proyek dan biaya usaha lainnya.

Prepaid expenses are expenses to be incurre in connection with business activities such as the project implementation cost and other business expenses.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Proyek	127,831,278,985	214,555,656,116	*Project Expense*
Biaya Sewa	--	467,757,415	*Rent Expense*
Jumlah	**127,831,278,985**	**215,023,413,531**	***Total***

Biaya proyek dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proyek yang belum dapat diperhitungkan dengan pendapatan usaha karena pada tanggal laporan posisi keuangan, berita acara kemajuan fisik belum dapat ditandatangani pengawas lapangan dan atau berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.

Prepaid project expenses are related to costs to be incurred for project purposes that are not yet accounted for with operating revenue because as of the date of the statement of financial position, the minutes of physical progress are not yet signed by the field supervisor and or the delivery of goods has not been signed.

Biaya sewa dibayar dimuka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sewa mess karyawan.

Prepaid rent expenses are related to costs to be incurred for rental of employee's housing.

13. Pekerjaan dalam Proses Konstruksi / *13. Construction Work in Progress*

	2025 Rp	2024 Rp
Pekerjaan Dalam Proses/ *Work In Progress*		
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note 39*)	**423,416,902,314**	**374,776,508,359**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(133,133,092,917)	--
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**290,283,809,397**	**374,776,508,359**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**668,993,871,984**	**437,710,349,000**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(119,809,893,164)	--
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**549,183,978,820**	**437,710,349,000**
Jumlah Pekerjaan dalam Proses Konstruksi/ *Total Construction Work in Progress*	**839,467,788,217**	**812,486,857,359**

Akun pekerjaan dalam proses merupakan klaim atas pekerjaan yang masih dalam proses addendum kontrak kerja, proses arbitrase dan proses mediasi.

The work in progress account represents claims for work that is still in the addendum process on the work contract, arbitration process, and mediation process.

Rincian umur pekerjaan dalam proses berdasarkan tanggal pengeluaran sampai dengan tanggal laporan keuangan adalah sebagai berikut:

The details of the age of work in progress based on the issuance date up to date of financial statements are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Sudah Jatuh Tempo:			*Overdue:*
Sampai dengan 1 Bulan	92,787,396,532	140,585,804,690	*Up to 1 Month*
>1 s.d 3 Bulan	176,868,670,603	206,314,498,227	*> 1 Month - 3 Month*
>3 bulan s.d 6 Bulan	92,563,309,991	81,872,115,118	*> 3 Month - 6 Month*
>6 Bulan s.d 1 Tahun	182,740,503,682	13,324,029,329	*> 6 Month - 1 Year*
>1 Tahun	547,450,893,490	370,390,409,995	*> 1 Year*
Subjumlah	**1,092,410,774,298**	**812,486,857,359**	***Subtotal***
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(252,942,986,081)	--	*Less: Allowance for Impairment Losses*
Jumlah Pekerjaan dalam Proses - Bersih	**839,467,788,217**	**812,486,857,359**	***Total Work in Progress - Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pekerjaan dalam proses adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment loss on work in progress are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	--	--	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	252,942,986,081	--	*Impairment During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**252,942,986,081**	**--**	***Balance at End of the Year***

Manajemen berpendapat bahwa kerugian penurunan nilai pekerjaan dalam proses cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya pekerjaan dalam proses tersebut.

Management believes that allowances for impairment losses on work in progress are adequate to cover possible losses from uncollectible of work in progress accounts.

14. Piutang Lain-lain / *14. Other Receivables*

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**112,745,180,359**	**165,407,608,905**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	**5,405,671,896**	**6,481,549,963**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*	(5,302,181,282)	(5,008,645,339)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**103,490,614**	**1,472,904,624**
Jumlah/ *Total*	**112,848,670,973**	**166,880,513,529**

Mutasi cadangan kerugian penurunan piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in allowance for impairment loss on other receivables are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo Awal Tahun	5,008,645,339	4,109,109,456	*Balance at Beginning of the Year*
Penurunan Nilai Tahun Berjalan	525,787,941	1,014,498,098	*Impairment During the Year*
Pemulihan Tahun Berjalan	(232,251,998)	(114,962,215)	*Recovery During the Year*
Saldo Akhir Tahun	**5,302,181,282**	**5,008,645,339**	***Balance at End of the Year***

15. Penyertaan Saham / *15. Investment in Shares*

31 Desember 2025 dan 2024/ *December 31, 2025 and 2024*

Penyertaan Saham/ *Investment in Shares*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Addition* Rp	Pengurangan/ *Deduction* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Patra Wijaya Realtindo	1,250,000,000	--	--	1,250,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	2,296,062,692
Jumlah/ *Total*	**3,546,062,692**	**--**	**--**	**3,546,062,692**

PT Patra Wijaya Realtindo

Perusahaan memiliki investasi kepada PT Patra Wijaya Realtindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diaktakan oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan akta No. 67 tanggal 7 Agustus 2019. PT Patra Wijaya Realtindo bergerak dalam bidang Pembangunan, Pengembangan dan Properti di Jakarta Selatan dengan kepemilikan sebanyak 1.250 saham atau 10% dari saham yang beredar dengan harga sebesar Rp1.250.000.000.

PT Patra Wijaya Realtindo

The Company has investments in PT Patra Wijaya Realtindo based on a Deed of Establishment of a Limited Company that has deed by Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, with deed No. 67 dated August 7, 2019. PT Patra Wijaya Realtindo which is engaged in Construction, Development and Property in South Jakarta with ownership of 1,250 shares or 10% of the outstanding shares amounting to Rp1,250,000,000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 16 Desember 2019, pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo sepakat untuk melakukan penambahan penyertaan saham. Atas kesepakatan tersebut Perusahaan akan menambahkan penyertaan saham di PT Patra Wijaya Realtindo sebesar Rp123.750.000.000.

Based on the Minutes of Shareholders' Agreement dated December 16, 2019, PT Patra Wijaya Realtindo's shareholders agreed to increase their investment in shares. Based on this agreement, the Company will increase its investment in shares amounting to Rp123,750,000,000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Para Pemegang Saham tanggal 22 November 2023, pemegang saham PT Patra Wijaya Realtindo sepakat untuk melakukan pengakhiran kesepakatan bersama atas uang muka setoran saham. Atas kesepakatan tersebut Perusahaan akan mendapatkan pengembalian uang atas setoran modal sebesar Rp123.750.000.000 yang dicatat sebagai Piutang Lain-lain (Catatan 14). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian dari PT Patra Wijaya Realtindo sebesar Rp60.000.000.000.

Based on the Minutes of Shareholders' Agreement dated November 22, 2023, PT Patra Wijaya Realtindo's shareholders agreed to terminate the mutual agreement regarding the advance payment for shares. Based on this agreement, the Company will receive a refund of the share investment. The balance of investment in shares amounting to Rp123,750,000,000 which recorded as Other Receivables (Note 14). As of December 31, 2025, the Company has received a refund from PT Patra Wijaya Realtindo amounting to Rp60,000,000,000.

Saldo penyertaan saham PT Patra Wijaya Realtindo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.250.000.000.

The balance of investment in shares of PT Patra Wijaya Realtindo as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp1,250,000,000, respectively.

PT Wijaya Karya Bitumen
Perusahaan memiliki investasi kepada PT Wijaya Karya Bitumen yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan pengolahan batuan aspal di kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

PT Wijaya Karya Bitumen
The Company has investments in PT Wijaya Karya Bitumen which is engaged in the exploration and processing of asphalt rock in Buton district, Southeast Sulawesi.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Sri Ismiyati, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta, dengan akta No. 112 tanggal 31 Agustus 2018, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 637 saham atau sebesar Rp637.000.000 kepada Perusahaan.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Sri Ismiyati, S.H., the Notary and Land Deed Official (PPAT) in Jakarta with deed No. 112 dated August 31, 2018 decided that the Company agreed to increase the capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 637 shares or amounting to Rp637,000,000 to the Company.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan akta No. 102 tanggal 30 November 2020, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 757 saham atau sebesar Rp757.575.758 kepada Perusahaan. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082483.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Desember 2020.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 102 dated November 30, 2020 decided that it agreed to increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 757 shares or amounting to Rp757,575,758 to the Company. This deed has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0082483.AH.01.02.TAHUN 2020 dated December 10, 2020.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. Mkn., Notaris di Jakarta dengan akta No. 72 tanggal 22 Desember 2021, diputuskan bahwa menyetujui

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 72 dated December 22, 2021 decided that it agreed to

untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 150 saham atau sebesar Rp150.000.000.

increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 150 shares or amounting to Rp150,000,000.

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham PT Wijaya Karya Bitumen per 30 Juni 2020 KJPP Iskandar dan Rekan No. 00384/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2020 tanggal 4 September 2020, nilai pasar saham per 30 Juni 2020 sebesar Rp1.486.193 per saham. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp486.193 per saham. Kenaikan nilai per saham ini telah dicatat dalam penghasilan komprehensif lain.

Based on the PT Wijaya Karya Bitumen Share Valuation Report as of June 30, 2020 KJPP Iskandar and Rekan No. 00384/2.0118-00/BS/03/0520/1/IX/2020 dated September 4, 2020, the market value of shares as of June 30, 2020 was Rp1,486,193 per share. Based on this report, there was gain amounted to of Rp486,193 per share. The gain was recorded in other comprehensive income.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Ryan Bayu Candra, S.H. Mkn., Notaris di Jakarta dengan akta No. 28 tanggal 19 April 2024, diputuskan bahwa menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar PT Wijaya Karya Bitumen yaitu sebanyak 100.000 saham atau sebesar Rp1.000.000.000.

According to the extraordinary general meeting of shareholder of PT Wijaya Karya Bitumen that was notarized by Ryan Bayu Candra, S.H. M.Kn., a Notary in Jakarta with deed No. 28 dated April 19, 2024 decided that it agreed to increase the authorized capital of PT Wijaya Karya Bitumen as much as 100,000 shares or amounting to Rp1,000,000,000.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 saldo kepemilikan masing-masing sebanyak 1.594 lembar saham atau 0,61% dan 1% dari saham yang beredar masing-masing sebesar Rp2.296.062.692.

As of December 31, 2025 and 2024, the balance of ownership is 1,594 shares or 0.61% and 1% of the shares outstanding amounting to Rp2,296,062,692.

16. Properti Investasi / *16. Investment Properties*

	2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Perubahan Nilai Wajar/ *Change in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***Fair Value***
Tanah	170,006,625,000	--	--	108,250,000	170,114,875,000	*Land*
Bangunan	89,406,800,000	--	--	50,100,000	89,456,900,000	*Building*
Jumlah	**259,413,425,000**	**--**	**--**	**158,350,000**	**259,571,775,000**	***Total***

	2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Perubahan Nilai Wajar/ *Change in Fair Value* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Nilai Wajar						***Fair Value***
Tanah	170,006,625,000	--	--	--	170,006,625,000	*Land*
Bangunan	89,406,800,000	--	--	--	89,406,800,000	*Building*
Jumlah	**259,413,425,000**	**--**	**--**	**--**	**259,413,425,000**	***Total***

Properti Investasi terdiri dari tanah di Jalan Ngagel, Surabaya sebesar Rp170.114.875.000 dan Rp170.006.625.000 per 31 Desember 2025 dan 2024, dan bangunan Fave Hotel Karawang masing-masing dengan saldo Rp89.456.900.000 dan Rp89.406.800.000 per 31 Desember 2025 dan 2024.

Investment Properties consist of land on Jalan Ngagel, Surabaya amounting to Rp170,114,875,000 and Rp170,006,625,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively, and Fave Hotel Karawang building, each with a balance of Rp89,456,900,000 and Rp89,406,800,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Tanah terletak di Jalan Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tanah tersebut merupakan reklasifikasi dari tanah yang sedang dikembangkan. Tanah tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp99.577.897.051 dan setelah dinilai oleh kantor penilai independen memiliki nilai wajar sebesar Rp170.006.625.000.

The land is located at Jalan Ngagel No. 155-157, Kelurahan Ngagel, Wonokromo District, Surabaya City, East Java Province. The land is a reclassification of the land under development. The land has an acquisition value of Rp99,577,897,051 and after being assessed by an independent appraisal office, it has a fair value of Rp170,006,625,000.

Berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan dalam laporannya pada tanggal 11 September 2025 No. 00715/2.0132-00/PI/03/0353/1/IX/2025 dan No. 00716/2.0132-00/PI/03/0353/1/IX/2025 sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal, kenaikan nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.350.000 (Catatan 37).

Based on the assessment of of the independent appraiser KJPP Mushofah Mono Igfirly & Partners in its report on September 11, 2025 with No. 00715/2.0132-00/PI/03/0353/1/IX/2025 and No. 00716/2.0132-00/PI/03/0353/1/IX/2025 in accordance with Bapepam-LK regulations No. VIII.C.4 regarding guidelines for valuation and presentation of property valuation reports on the capital market, the increase of investment property's fair value as of December 31, 2025 amounted to Rp158,350,000 (Note 37).

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Metode yang digunakan adalah perbandingan data pasar dan arus kas terdiskonto. Nilai wajar properti investasi tersebut telah didukung oleh bukti pasar.

The approach used in determining the fair value of the property is market approach, income approach, and cost approach. Methods used are market comparison and discounted cash flows. The fair value of the investment property has been supported by market evidence.

17. Aset Kerja Sama / *17. Assets of Co-operation*

	2025				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Bangunan	443,479,118,632	--	--	443,479,118,632	*Building*
Jumlah	**443,479,118,632**	**--**	**--**	**443,479,118,632**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan	205,990,661,321	11,081,867,604	--	217,072,528,925	*Building*
Jumlah	**205,990,661,321**	**11,081,867,604**	**--**	**217,072,528,925**	***Total***
Nilai Tercatat	**237,488,457,311**			**226,406,589,707**	***Carrying Value***

	2024				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan / *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Bangunan	443,479,118,632	--	--	443,479,118,632	*Building*
Jumlah	**443,479,118,632**	**--**	**--**	**443,479,118,632**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Bangunan	195,144,428,573	10,846,232,748	--	205,990,661,321	*Building*
Jumlah	**195,144,428,573**	**10,846,232,748**	**--**	**205,990,661,321**	***Total***
Nilai Tercatat	**248,334,690,059**			**237,488,457,311**	***Carrying Value***

Aset kerja sama operasi bangunan merupakan bangunan hotel De Braga. Hotel De Braga terletak diatas tanah HGB No. 649, atas nama PT Sarinah (Persero) seluas 1.763 m^2 di Jalan Braga No. 10, Bandung, Jawa Barat, pembangunan hotel tersebut merupakan kerjasama operasi antara Perusahaan dengan PT Sarinah (Persero), yang tertuang dalam

Asset of joint operation building consists of the De Braga Hotel. De Braga Hotel is located on HGB land No. 649, on behalf of PT Sarinah (Persero) covering an area of 1,763 sqm on Jalan Braga No. 10, Bandung, West Java, the construction of the hotel is a joint operation between the Company and PT Sarinah (Persero), which is stated in the Build,

Perjanjian Bangun, guna, serah (*Build, Operate And Transfer / BOT*) yang telah diaktakan dengan akta No.1, tanggal 10 Maret 2016, oleh Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta (Catatan 43).

Operate And Transfer (BOT) agreement which was notarized with deed No.1, dated March 10, 2016, by Yunita Permatasari, S.H., Notary in Jakarta (Note 43).

Bangunan Graha Mantap merupakan aset kerjasama operasi antara WSP dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diaktakan dengan akta No. 85 tanggal 28 Mei 2019, oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pengembangan Lahan Mandiri Proklamasi Nomor: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 tanggal 2 Agustus 2019. Bangunan tersebut dilakukan di atas tanah dengan luas lebih kurang 4.428 m^2, dengan Sertifikat Hak Milik, No. 787 atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terletak di kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta (Catatan 43).

Building Graha Mantap is an asset of joint cooperation between WSP with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk notarized by deed No. 85 dated May 28, 2019, by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta and Agreement on the Delegation of Land Development Work for Mandiri Proklamasi Number: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/2019 dated August 2, 2019. The building was carried out on land with an area of approximately 4,428 sqm, with Certificate of Ownership, No. 787 on behalf of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, located in Pegangsaan, Menteng District, Central Jakarta City, DKI Jakarta (Note 43).

Bangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan aset kerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC. Perjanjian Kerjasama ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 termasuk lampiran-lampirannya ("SPK"). Bangunan tersebut terletak di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Catatan 43).

The Pertamina Mandalika International Street Circuit building is a collaboration asset with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) or ITDC. The Cooperation Agreement is determined based on the Work Order No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021, including the attachments ("SPK"). The building is located at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara (Note 43).

18. Aset Tetap / *18. Fixed Assets*

	2025					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	19,348,292,500	--	--	--	19,348,292,500	*Land*
Bangunan Gedung	21,543,145,188	--	--	--	21,543,145,188	*Building*
Peralatan Kantor	20,722,634,847	2,900,000	--	--	20,725,534,847	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	219,031,976,397	--	--	--	219,031,976,397	*Project Equipment*
Jumlah	**280,646,048,932**	**2,900,000**	**--**	**--**	**280,648,948,932**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan Gedung	8,254,839,099	1,077,157,380	--	--	9,331,996,479	*Building*
Peralatan Kantor	14,901,590,538	3,004,978,164	--	--	17,906,568,702	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	210,013,639,632	4,453,521,477	--	--	214,467,161,109	*Project Equipment*
Jumlah	**233,170,069,269**	**8,535,657,021**	**--**	**--**	**241,705,726,290**	***Total***
Nilai Tercatat	**47,475,979,663**				**38,943,222,642**	***Carrying Value***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2024					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	Penambahan / *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	19,348,292,500	--	--	--	19,348,292,500	*Land*
Bangunan Gedung	21,543,145,188	--	--	--	21,543,145,188	*Building*
Peralatan Kantor	35,714,130,136	2,587,808,524	--	(17,579,303,813)	20,722,634,847	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	219,031,976,397	--	--	--	219,031,976,397	*Project Equipment*
Jumlah	**295,637,544,221**	**2,587,808,524**	**--**	**(17,579,303,813)**	**280,646,048,932**	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan Gedung	7,177,681,394	1,077,157,705	--	--	8,254,839,099	*Building*
Peralatan Kantor	14,083,591,212	4,984,616,627	--	(4,166,617,301)	14,901,590,538	*Office Equipment*
Peralatan Proyek	203,059,045,252	6,954,594,380	--	--	210,013,639,632	*Project Equipment*
Jumlah	**224,320,317,858**	**13,016,368,712**	**--**	**(4,166,617,301)**	**233,170,069,269**	***Total***
Nilai Tercatat	**71,317,226,363**				**47,475,979,663**	***Carrying Value***

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp8.535.657.021 dan Rp13.016.368.712 dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 35).

Depreciation expenses for the year ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp8,535,657,021 and Rp13,016,368,712, respectively, is allocated to cost of revenue (Note 35).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp144.295.949.207 dan Rp132.367.819.294.

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has fixed assets which are fully depreciated and are still used with cost amounting to Rp144,295,949,207 and Rp132,367,819,294, respectively.

Jumlah aset tetap di atas telah dijaminkan atas fasilitas pinjaman dari Bank (Catatan 43).

The total fixed assets mentioned above are pledged as collaterals for credit facilities from banks (Note 43).

Aset tanah milik Perusahaan terletak di Cibungur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan luas tanah 26.490 m^2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 0068 dan No. 0069 tanggal 30 April 2019.

Land assets owned by the Company are located in Cibungur, Purwakarta, West Java, covering an area of 26,490 sqm with certificate of (HGB) No. 0068 and No. 0069 dated April 30, 2019.

Aset tanah milik Perusahaan terletak di Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 4.316 m^2 dengan pelepasan setifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01197, 01198, 01343, 01547 dan 01553.

Land assets owned by the Company are located in Gambut, Banjar, South Kalimantan, covering an area of 4,316 sqm. With the release of certificate of (HGB) No. 01197, 01198, 01343, 01547 and 01553.

Pada 31 Desember 2024, Grup melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi aset takberwujud berupa perangkat lunak dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp17.579.303.813 dan Rp4.166.617.301 (Catatan 19).

As of December 31, 2024, the Group reclassified fixed assets into intangible assets in the form of software with acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp17,579,303,813 and Rp4,166,617,30, respectively (Note 19).

Aset tetap peralatan telah diasuransikan dengan polis standar kebakaran di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

The equipment fixed assets were insured with a standard fire policy in Indonesia with details as follows:

2025				
Perusahaan Asuransi / *Insurance Company*	Jenis Aset / *Type of Assets*	Nomor Polis / *Policy Number*	Jangka Waktu / *Period*	Nilai / *Amount* Rp
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Peralatan / *Equipment*	00001/CN/MKT-KBJ/01/25	1/1/25 - 1/1/26	98,845,500,000
Jumlah/ *Total*				**98,845,500,000**

2024				
Perusahaan Asuransi / *Insurance Company*	**Jenis Aset / *Type of Assets***	**Nomor Polis / *Policy Number***	**Jangka Waktu / *Period***	**Nilai / *Amount* Rp**
PT Asuransi Asei Indonesia	Peralatan / *Equipment*	C020905062400002	1/8/24 - 1/8/25	88,960,950,000
Jumlah/ *Total*				**88,960,950,000**

Sifat hubungan perusahaan asuransi dengan Perusahaan merupakan pihak ketiga.

The relationship of the Company with the insurance company is third parties.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible losses on the assets insured.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the management's review, there are no events or changes in circumstances, which indicated impairment on the carrying amount of the fixed assets, therefore management did not provide allowance of impairment on fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

19. Aset Takberwujud / *19. Intangible Assets*

	2025					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	**Penambahan / *Additions* Rp**	**Pengurangan/ *Deductions* Rp**	**Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp**	**Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp**	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak	20,600,281,509	852,190,000	--	--	21,452,471,509	*Software*
Jumlah	**20,600,281,509**	**852,190,000**	**--**	**--**	**21,452,471,509**	***Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak	7,072,714,450	5,288,490,799	--	--	12,361,205,249	*Software*
Jumlah	**7,072,714,450**	**5,288,490,799**	**--**	**--**	**12,361,205,249**	***Total***
Nilai Tercatat	**13,527,567,059**				**9,091,266,260**	***Carrying Value***

	2024					
	Saldo Awal / *Beginning Balance* Rp	**Penambahan / *Additions* Rp**	**Pengurangan/ *Deductions* Rp**	**Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp**	**Saldo Akhir / *Ending Balance* Rp**	
Nilai Perolehan						***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak	--	3,020,977,696	--	17,579,303,813	20,600,281,509	*Software*
Jumlah	**--**	**3,020,977,696**	**--**	**17,579,303,813**	**20,600,281,509**	***Total***
Akumulasi Amortisasi						***Accumulated Amortization***
Perangkat Lunak	--	2,906,097,149	--	4,166,617,301	7,072,714,450	*Software*
Jumlah	**--**	**2,906,097,149**	**--**	**4,166,617,301**	**7,072,714,450**	***Total***
Nilai Tercatat	**--**				**13,527,567,059**	***Carrying Value***

Pada 31 Desember 2024, Grup melakukan reklasifikasi atas aset tetap menjadi aset takberwujud berupa perangkat lunak dengan harga perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp17.579.303.813 dan Rp4.166.617.301 (Catatan 18).

As of December 31, 2024, the Group reclassified fixed assets into intangible assets in the form of software with acquisition cost and accumulated depreciation amounting to Rp17,579,303,813 and Rp4,166,617,30, respectively (Note 18).

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp5.288.490.799 dan Rp2.906.097.149 dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 35).

Amortization expenses for the year ended December 31, 2025 and 2024, amounted to Rp5,288,490,799 and Rp2,906,097,149, respectively, is allocated to cost of revenue (Note 35).

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

20. Investasi pada Entitas Asosiasi / *20. Investment in Associates*

2025

Nama Entitas Asosiasi/ *Name of Associate*	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership* %	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	49.00	18,236,878,682	(18,236,878,682)	--
Jumlah/ *Total*	**49.00**	**18,236,878,682**	**(18,236,878,682)**	**--**

2024

Nama Entitas Asosiasi/ *Name of Associate*	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership* %	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	49.00	23,027,110,013	(4,790,231,331)	18,236,878,682
Jumlah/ *Total*	**49.00**	**23,027,110,013**	**(4,790,231,331)**	**18,236,878,682**

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) didirikan di Jakarta dengan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016 ("Akta No. 142"), dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU- 0001918.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017. Berdasarkan susunan pemegang saham, Perusahaan memiliki 51% kepemilikan dengan nilai penyertaan saham sebesar Rp25.500.000.000.

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perusahaan melakukan penjualan kepemilikan WPG sebesar 2% kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk, entitas sepengendali, dan telah diaktakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Wijaya Karya Pracetak Gedung oleh Fatma, S.H., M.Kn., M.H. Notaris di Jakarta dengan akta No. 13. Sisa penyertaan saham WPG milik Perusahaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.500.000.000 atau setara dengan kepemilikan 49% dan mencatat transaksi investasi tersebut sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba (rugi) entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) established in Jakarta based on Deed No. 142 dated December 23, 2016 ("Deed No. 142"), made in the presence of Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and have been approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0001918.AH.01.01 year 2017 dated January 17, 2017. According to composition of shareholders, the Company owns 51% of ownership with share investment value amounted to Rp25,500,000,000.

On July 25, 2022, the Company sold 2% of WPG ownership to PT Wijaya Karya Beton Tbk, an entity under common control, and has been notarized based on Deed of Share Trade PT Wijaya Karya Pracetak Gedung by Fatma, S.H., M,Kn., M.H. notary in Jakarta No. 13. The remainder of Company's investment on WPG as of December 31, 2022 amounted to Rp24,500,000,000 or equivalent to 49% of ownership and record the investment transaction as investment in associate.

Total assets, liabilities, revenues and net income (loss) of the associate entity are as follows:

	2025	2024	
Aset	248,196,356,397	339,984,258,803	*Assets*
Liabilitas	278,382,730,630	302,754,327,164	*Liabilities*
Pendapatan	64,906,988,192	262,433,783,344	*Revenue*
Laba (Rugi)	(67,416,305,875)	(9,775,982,309)	*Profit (Loss)*

21. Ventura Bersama / *21. Joint Ventures*

21.a. Investasi pada Ventura Bersama / *21.a. Investment in Joint Ventures*

2025

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Investasi pada Ventura Bersama/ ***Investment in Joint Ventures***					
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Tamansari Prospero Konstruksi	183,429,576,713	113,640,281	568,807,134	184,112,024,128
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	Gedung Sekolah Paket 1	96,805,832,611	(52,861,687,513)	--	43,944,145,098
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mahoni Citra Persada	Tamansari Mahogany Konstruksi	36,948,615,930	--	--	36,948,615,930
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	26,339,393,888	--	--	26,339,393,888
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	KSO Venue PON Aceh	28,092,123,267	801,022	(16,996,451,767)	11,096,472,522
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM	15,506,617,079	(7,772,313,067)	(58,542,800)	7,675,761,212
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	KSO PMJ Land	3,592,675,160	2,965,835,185	(388,814,631)	6,169,695,714
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	Gedung Sekolah Paket 5	53,066,145,652	(46,993,868,921)	--	6,072,276,731
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	KSO DKUT GRESIK	2,119,608,327	6,432,722,612	(4,684,589,138)	3,867,741,801
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT PP (Persero) Tbk	Perluasan Bandara Banjarmasin	3,071,416,829	--	360,961,522	3,432,378,351
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	Gedung Sekolah Paket 2	26,993,528,262	(23,884,629,040)	--	3,108,899,222
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rumah Dinas Prajurit TNI AD	5,711,520,584	--	(3,338,552,335)	2,372,968,249
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	BI Manokwari	8,283,458,270	(2,151,991,671)	(5,355,827,239)	775,639,360
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Shimizu Corporatic	KSO Benhil Hotel Service Apartement	2,183,672,706	2,417,568	(1,500,000,000)	686,090,274
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA KONSTRUKSI 2 (IKN)	11,317,735,409	259,496,807	(10,948,460,021)	628,772,195
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA TNI (IKN)	6,050,550,115	55,317,350	(5,723,002,266)	382,865,199
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Proyek Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	2,322,402,308	72,105,432	(2,322,402,306)	72,105,434
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	Sekolah Rakyat Jawa Tengah	--	10,746,773	--	10,746,773
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	KSO RSUPT Vertikal Surabaya	13,286,078,507	--	(13,286,078,507)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	KSO BMKG 2	11,644,037,627	10,507,265,016	(22,151,302,643)	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Pembangunan SGLC & ERIC UGM	11,959,622,474	(23,929,639,250)	11,970,016,776	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	KSO TELKOM LANDMARK TOWER	2,437,467,140	4,528,782,476	(6,966,249,616)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	KSO GEREJA BASILIKA	27,294,615	17,697,977,676	(17,725,272,291)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT FYP Karya Perdana	Mess Transmigrasi Patriot	--	1,993,952,967	(1,993,952,967)	--
Subjumlah/ Sub*total*		551,189,373,473	(112,953,068,297)	(100,539,713,095)	337,696,592,081
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*		(31,836,804,267)	--	29,463,836,018	(2,372,968,249)
Jumlah/ *Total*		**519,352,569,206**	**(112,953,068,297)**	**(71,075,877,077)**	**335,323,623,832**

2024

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp	Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
Investasi pada Ventura Bersama/ ***Investment in Joint Ventures***					
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Tamansari Prospero Konstruksi	182,660,583,147	230,742,243	538,251,323	183,429,576,713
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	Gedung Sekolah Paket 1	96,805,832,611	--	--	96,805,832,611
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	Gedung Sekolah Paket 5	53,066,145,652	--	--	53,066,145,652
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mahoni Citra Persada	Tamansari Mahogany Konstruksi	36,948,615,930	--	--	36,948,615,930
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya	KSO Venue PON Aceh	8,031,000	24,118,500,429	3,965,591,838	28,092,123,267
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	KSO Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (IKN)	24,472,222,880	--	1,867,171,008	26,339,393,888
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	Gedung Sekolah Paket 2	26,993,528,262	--	--	26,993,528,262

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

2024					
Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	**Proyek/ *Project***	**Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp**	**Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Share in Income (Loss) on Current Year* Rp**	**Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp**	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp**
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Paket 3 Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM	14,921,008,110	--	585,608,969	15,506,617,079
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	KSO RSUPT Vertikal Surabaya	22,292,235,197	19,549,336,822	(28,555,493,512)	13,286,078,507
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	KSO BMKG 2	3,696,838	8,891,376,074	2,748,964,715	11,644,037,627
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA KONSTRUKSI 2 (IKN)	--	23,950,003,211	(12,632,267,802)	11,317,735,409
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Pembangunan SGLC & ERIC UGM	11,875,817,786	--	83,804,688	11,959,622,474
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	BI Manokwari	3,045,383,075	4,445,979,209	792,095,986	8,283,458,270
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	KSO PEMBANGUNAN HUNIAN PEKERJA TNI (IKN)	--	10,281,901,965	(4,231,351,850)	6,050,550,115
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Rumah Dinas Prajurit TNI AD	5,631,920,929	--	79,599,655	5,711,520,584
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	KSO PMJ Land	4,276,840	2,746,505,120	841,893,200	3,592,675,160
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT PP (Persero) Tbk	Perluasan Bandara Banjarmasin	3,071,416,829	--	--	3,071,416,829
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	KSO TELKOM LANDMARK TOWER	--	1,281,194,195	1,156,272,945	2,437,467,140
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Proyek Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis	745,656,540	1,305,502,845	271,242,923	2,322,402,308
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Shimizu Corporati	KSO Benhil Hotel Service Apartement	539,520,038	1,423,741,479	220,411,189	2,183,672,706
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi	KSO DKUT GRESIK	--	1,771,870,014	347,738,313	2,119,608,327
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	KSO GEREJA BASILIKA	--	--	27,294,615	27,294,615
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk - PT PP (Persero) Tbk	Pembangunan Jakarta Internasional Stadium	25,442,842,769	--	(25,442,842,769)	--
KSO PT Wijaya Karya Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	Proyek Pengembangan RSUD Kalideres	3,766,635,862	(332,331,826)	(3,434,304,036)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pembangunan Hotel T3	1,774,680,293	--	(1,774,680,293)	--
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	UIN Serang	1,512,583,993	--	(1,512,583,993)	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	Renovasi Gedung Sekolah Paket 1 Mamuju	858,276,612	--	(858,276,612)	--
Subjumlah/ *Subtotal*		516,440,911,193	99,664,321,780	(64,915,859,500)	551,189,373,473
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Losses*		(11,001,496,411)	--	(20,835,307,856)	(31,836,804,267)
Jumlah/ *Total*		**505,439,414,782**	**99,664,321,780**	**(85,751,167,356)**	**519,352,569,206**

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba (rugi) entitas Ventura Bersama adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities, revenues and net income (loss) of Joint Venture entities are as follows:

	2025			
	Aset/ *Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Pendapatan/ *Revenue***	**Laba (Rugi)/ *Income (Loss)***
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera (Prospero)	257,554,931,970	201,597,469,440	152,554,955	189,400,468
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	1,079,543,741	89,968,294,593	--	(106,791,287,905)
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	167,430,114	34,378,544,317	--	(48,251,775,839)
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	1,536,410,475	79,427,913,959		(94,937,108,931)
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (BMKG 2)	38,073,597,739	26,398,858,832	13,852,939,969	11,674,738,907
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa (Telkom Landmark)	14,233,226,976	13,648,531,078	119,768,823,000	6,469,689,252
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (BI Manokwari)	34,212,657,365	33,950,120,456	141,945,886,428	(3,586,652,785)
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Vertikal SBY)	176,487,443,523	171,309,840,434	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 1)	20,553,868	48,602,796,933		(48,835,998,469)
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (ITB)	10,256,402,536	10,136,226,816	--	120,175,720
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 3)	693,508,968	16,075,758,597	--	(15,701,642,561)
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Hunian Pekerja TNI (IKN)	5,125,929,787	5,066,948,996	--	85,103,615
KSO PT Wika Gedung - PT Abadi Prima Inti Karya (Hunian IKN Paket 2)	27,431,810,243	27,425,829,019	3,648,095,050	370,709,725
KSO PT Wika Gedung - PT Adhi Karya (Hunian IKN Paket 1)	46,592,299,884	46,139,054,756	340,815,056,765	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (DKUT Gresik)	113,381,821,760	104,370,340,194	238,298,862,751	16,121,594,139
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi (PMJ Land)	59,089,792,419	48,703,719,137	169,970,716,938	5,392,427,609
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (PON Aceh)	75,810,755,286	62,866,570,830	499,457,494,594	1,456,458
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation (Benhil)	16,485,644,272	15,754,142,535	87,483,684,535	8,058,563

	2025			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba (Rugi)/ *Income (Loss)*
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Basilika)	271,906,522,904	242,409,893,434	421,351,148,896	29,496,629,470
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Apik (Sekolah Rakyat Jateng)	175,383,632,441	175,347,809,863	2,136,221,234	35,822,578
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT FYP Karya Perdana (Mess Transmigrasi Patriot)	39,842,976,207	36,994,471,968	38,783,783,784	2,848,504,239
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Rumdis TNI AD)	2,865,514,673	2,865,514,673	558,831,818,182	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (DPR II)	387,360,870,321	387,360,870,321	--	--

	2024			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba (Rugi)/ *Income (Loss)*
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera (Prospero)	257,265,284,611	201,497,222,549	1,244,031,553	384,570,406
KSO PT Wika Gedung - PT Mahoni Citra Persada (Mahogany)	55,240,954,575	55,240,954,575	--	--
KSO PT Wika Gedung - Jakarta Konsultindo (PKP Ciracas)	17,658,551,039	11,492,422,957	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 1)	107,951,133,276	90,048,596,223	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 2)	49,249,472,524	35,208,810,888	--	--
KSO PT Wika Gedung - Pemprov DKI (Gedung Sekolah 5)	96,662,767,592	79,617,162,145	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT Pembangunan Perumahan (Bandara BDJ)	340,786,308,746	340,786,308,746	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Hotel T3)	4,060,905,941	4,060,905,941	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 3)	300,063,584,358	29,744,191,426	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UIN Serang)	14,062,941	14,062,941	396,274,257,826	251,103,587
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (UGM Paket 1)	58,071,733,493	58,071,733,493	--	--
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Rumdis TNI AD)	14,331,957,567	3,267,670,857	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Sekolah Mamuju)	10,218,107	10,218,107	70,713,692,658	2,116,451,406
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation (Benhil)	21,477,585,709	15,754,142,535	87,483,684,535	5,723,443,174
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi (RSUD Kalideres)	486,823,942	486,823,942	--	(604,239,683)
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (Vertikal SBY)	346,306,991,338	281,142,535,261	563,915,742,716	65,164,456,077
KSO PT Wika Gedung - PT WIKA (Persero) (ITB)	94,042,384,125	91,866,546,050	240,249,201,244	2,175,838,075
KSO PT Wika Gedung - PT Adhi Karya (Hunian IKN)	124,582,632,536	122,652,957,501	84,050,740,000	4,429,657,035
KSO PT Wijaya Karya Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (BI Manokwari)	106,875,563,501	105,884,540,126	171,044,144,124	7,409,965,349
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi (PMJ Land)	57,738,707,146	52,745,061,475	121,238,424,974	4,993,645,671
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (PON Aceh)	72,541,013,511	28,689,194,550	499,457,494,594	43,851,818,961
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (BMKG 2)	155,393,071,440	145,513,764,691	238,900,474,067	9,879,306,749
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	38,360,060,717	36,529,783,296	40,161,177,000	1,830,277,421
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Hunian Pekerja TNI (IKN)	58,949,538,222	50,703,620,818	208,194,705,071	15,818,310,715
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (DKUT Gresik)	124,582,632,536	122,652,957,501	84,050,740,000	4,429,675,035
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	182,759,030,929	16,979,442,07	342,142,904,950	34,214,290,275

Perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

Cooperation agreements are as follows:

	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership*	Status/ *Status*	
Benhil Hotel Service Apartment PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Shimizu Corporation	30% : 70%	Berjalan/ *in Progress*	*Benhil Hotel Service Apartment* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Shimizu Corporation*
PMJ Land PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	55% : 45%	Berjalan/ *in Progress*	*PMJ Land* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk*
Kahuripan - Prospero PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Mutiara Masyhur Sejahtera	60% : 40%	Berjalan/ *in Progress*	*Kahuripan - Prospero* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Mutiara Masyhur Sejahtera*
DKUT Gresik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Adhi Karya (Persero) Tbk	40% : 60%	Berjalan/ *in Progress*	*DKUT Gresik* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
Gereja Basilika IKN PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Brantas Abipraya	60% : 40%	Berjalan/ *in Progress*	*IKN Basilica Church* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Brantas Abipraya*
Gedung DPR II IKN PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Nindya Karya : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	50% : 35% : 15%	Berjalan/ *in Progress*	*IKN DPR Building II* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Nindya Karya : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Porsi Kepemilikan/ *Portion of Ownership*	**Status/ *Status***	
Mess Transmigrasi Patriot PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT FYP Karya Perdana	70% : 30%	Berjalan/ *in Progress*	*Patriot Transmigration House* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT FYP Karya Perdana*
Sekolah Rakyat Jawa Tengah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk : PT Abadi Prima Inti Karya	30% : 40% : 30%	Berjalan/ *in Progress*	*Central Java Public School* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk :* *PT Abadi Prima Inti Karya*
Sekolah Rakyat Kalimantan Barat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk : PT Cipta Sentosa	15% : 45% : 40%	Berjalan/ *in Progress*	*West Kalimantan Public School* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk : PT Cipta Sentosa*
Venue PON Aceh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Nindya Karya	55% : 45%	Selesai/ *Finished*	*PON Aceh Venue* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Nindya Karya*
BMKG 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	90% : 10%	Selesai/ *Finished*	*BMKG 2* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Telkom Landmark Tower PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pelitamaju Multiswakarsa	70% : 30%	Selesai/ *Finished*	*Telkom Landmark Tower* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Pelitamaju Multiswakarsa*
BI Manokwari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	60% : 40%	Selesai/ *Finished*	*BI Manokwari* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
RSUPT Vertikal Surabaya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	30% : 70%	Selesai/ *Finished*	*RSUPT Vertikal Surabaya* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan Gedung *Smart and Green Learning Center* (SGLC) dan *Engineering Research Innovation Center* (ERIC) (UGM Paket 1) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49% : 51%	Selesai/ *Finished*	*Construction of UGM Smart and Green Learning Center (SGLC) and Engineering Research Innovation Center (ERIC) (UGM Package 1)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB *Innovation Park* (IIP) Bandung Teknopolis PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	60% : 40%	Selesai/ *Finished*	*Construction of Building 1 and 2 ITB Innovation Park (IIP) Bandung Teknopolis* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Rumah Dinas TNI AD PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49% : 51%	Selesai/ *Finished*	*TNI AD Official Residence* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan AGLC, ASLC, IFFLC UGM (UGM Paket 3) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49.5% : 50.5%	Selesai/ *Finished*	*Construction of AGLC, ASLC, IFFLC UGM (UGM Package 3)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Perluasan Bandara Banjarmasin PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	47.5% : 52.5%	Selesai/ *Finished*	*Banjarmasin Airport Expansion* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk*
Pembangunan Gedung Sekolah di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur (Gedung Sekolah Paket 5) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49.5% : 50.5%	Selesai/ *Finished*	*Construction of School Building in Central Jakarta and East Jakarta (School Building Package 5)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan Gedung Sekolah di Jakarta Barat (Gedung Sekolah Paket 2) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49.5% : 50.5%	Selesai/ *Finished*	*Construction of School Building in West Jakarta (School Building Package 2)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan Gedung Sekolah di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu (Gedung Sekolah Paket 1) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49.5% : 50.5%	Selesai/ *Finished*	*Construction of School Building in North Jakarta and Kepulauan Seribu (School Building Package 1)* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
Pengembangan Proyek Tamansari Mahogany PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Mahoni Citra Persada	60% : 40%	Selesai/ *Finished*	*Development of Tamansari Mahogany Project* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Mahoni Citra Persada*
Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Adhi Karya (Persero) Tbk	60% : 40%	Selesai/ *Finished*	*IKN Construction Worker Housing Development* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
Pembangunan Hunian Pekerja TNI IKN PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Brantas Abipraya	65% : 35%	Selesai/ *Finished*	*IKN TNI Worker Housing Development* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Brantas Abipraya*
Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN 2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : PT Abadi Prima Inti Karya	70% : 30%	Selesai/ *Finished*	*IKN TNI Worker Housing 2 Development* *PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :* *PT Abadi Prima Inti Karya*

21.b. Utang pada Ventura Bersama / *21.b. Joint Venture Payables*

Nama Ventura Bersama/ *Name of Joint Venture*	Proyek/ *Project*	2025 Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	2025 Penambahan (Pengurangan)/ *Addition (Deduction)* Rp	2025 Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Gedung DPR II IKN	--	150,000,000,000	150,000,000,000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Cipta Sentosa	Sekolah Rakyat Kalimantan Barat	--	15,000,000,000	15,000,000,000
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	BMKG 2	--	13,843,647,534	13,843,647,534
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pembangunan Gedung SGLC dan ERIC UGM Paket 1	--	11,727,630,183	11,727,630,183
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya	Gereja Basilika IKN	--	8,090,316,432	8,090,316,432
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT FYP Karya Perdana	Mess Transmigrasi Patriot	--	2,542,257,028	2,542,257,028
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	Telkom Landmark Tower	--	211,664,421	211,664,421
Jumlah/ *Total*		**--**	**201,415,515,598**	**201,415,515,598**

KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – PT Nindya Karya – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan menerima uang muka dari pemberi kerja sebesar Rp150.000.000.000 terkait dengan proyek Gedung DPR II IKN yang dilaksanakan oleh KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan belum meneruskan uang muka kepada KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – PT Nindya Karya – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
On December 31, 2025, the Company received an advance payment from the project owner related to Gedung DPR II IKN Project carried out by KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Tbk) – PT Nindya Karya – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. As of December 31, 2025, the Company has not disbursed the advance payment to KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk – PT Nindya Karya – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

22. Pinjaman Bank Jangka Pendek / *22. Short-term Bank Loans*

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**73,038,256,757**	**350,000,000,000**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank DKI		
Cash Loan	--	22,000,000,000
Subjumlah/ *Subtotal*	**--**	**22,000,000,000**
Jumlah/ *Total*	**73,038,256,757**	**372,000,000,000**

Informasi fasilitas utang bank disajikan di Catatan 43.

Information on bank loan facilities is presented in Note 43.

23. Utang Usaha / *23. Trade Payables*

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: / *Details of trade payables are as follows:*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pemasok	404,654,799,656	588,359,136,381	*Supplier*
Mitra	109,832,302,522	463,888,520,336	*Partners*
Subkontraktor	385,815,553,519	429,280,766,688	*Subcontractor*
Mandor	72,978,507,879	175,319,892,213	*Foremen*
Usaha Lain	12,283,676,171	1,386,960,997	*Other Trade*
Jumlah	**985,564,839,747**	**1,658,235,276,615**	***Total***

Utang usaha seluruhnya merupakan transaksi dalam mata uang Rupiah. / *All trade payable transactions are in Rupiah.*

Rincian utang pemasok, utang subkontraktor, utang mandor dan utang usaha lain adalah sebagai berikut: / *Details of supplier payable, subcontractor payable, foreman payable, other trade payable and partners payable are as follows:*

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/*Related Parties* (Catatan/*Note* 39)	**158,719,269,313**	**473,871,107,934**
Pihak Ketiga/*Third Parties*	**826,845,570,434**	**1,143,509,090,324**
Utang Mitra Pihak Ketiga/ *Third Parties Partners Payable*		
PT Bank DKI		
Non Cash Loan	--	40,855,078,357
Subjumlah/ *Subtotal*	**--**	**40,855,078,357**
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**826,845,570,434**	**1,184,364,168,681**
Total/ *Total*	**985,564,839,747**	**1,658,235,276,615**

Jumlah utang usaha berdasarkan umur: / *Total trade payable based on aging:*

	2025 Rp	2024 Rp
Sampai dengan 1 Bulan/ *Up to 1 Month*	295,799,405,517	386,112,795,404
> 1 - 3 Bulan/ *Month*	113,620,850,713	573,085,383,031
> 3 - 6 Bulan/ *Month*	214,452,024,071	337,493,202,878
> 6 Bulan/ *Month* - 1 Tahun/ *Year*	212,093,881,282	107,894,364,795
> 1 Tahun/ *Year*	149,598,678,164	253,649,530,507
Jumlah/ *Total*	**985,564,839,747**	**1,658,235,276,615**

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek. / *Supplier payable is payable to suppliers for procurement of building materials in connection with the implementation of a project.*

Utang subkontraktor merupakan utang kepada subkontraktor berdasarkan berita acara *progress* fisik pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek. / *Subcontractor payable is payable to subcontractors based on the minutes of the physical progress of work in connection with the implementation of the project.*

Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir periode laporan belum dibayar. / *Foreman payable is salary of the foreman at the end of the reporting period that has not been paid.*

Utang usaha lain merupakan utang atas sewa alat, pemeliharaan dan perbaikan proyek.

Other trade payable is payable on rent equipment, maintenance and repair projects.

Utang usaha mitra merupakan utang atas fasilitas *Non-Cash Loan* Perusahaan kepada bank mitra (Catatan 43).

Partners payables are payable on the Company's Non-Cash Loan facility to partner banks (Note 43).

24. Beban Akrual / *24. Accrued Expenses*

Akun ini merupakan beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

This account is an expense incurred but not yet paid with details as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pekerjaan Proyek	272,987,772,708	321,671,870,991	*Project Work*
Bonus dan Tantiem	11,824,208,465	34,737,657,261	*Bonus and Tantiem*
Jumlah	**284,811,981,173**	**356,409,528,252**	***Total***

Pekerjaan proyek merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek dan pembelian barang yang dibutuhkan untuk proyek yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Project works are allowance for current year maintenance expenses disbursable at project maintenance period and purchase of goods required for the projects that are not yet paid as of the date of the statement of financial position.

Bonus dan tantiem merupakan pencadangan bonus karyawan serta tantiem Direksi dan Komisaris.

Bonus and tantiem are allowances for bonuses of employee and for members of the Directors and Commissioners.

25. Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen / *25. Advances from Projects Owners and Consumers*

Merupakan saldo uang muka dari pemberi kerja dan konsumen per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Represents advances from project owners and customers as of December 31, 2025 and 2024 with the following details:

	2025 Rp	2024 Rp	
Uang Muka Pemberi Kerja (Jasa Konstruksi)	300,344,825,373	507,541,582,961	*Advances from Project Owners (Construction Service)*
Uang Muka Konsumen (Properti)	15,805,759,099	15,829,560,667	*Advances from Consumers (Property)*
Jumlah	**316,150,584,472**	**523,371,143,628**	***Total***

Rincian uang muka pemberi kerja berdasarkan waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Details of advance from project owner and customer based on maturity are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			*Maturity within One Year*
Uang Muka Konsumen (Properti)	2,040,897,663	15,829,560,667	*Advances from Consumers (Property)*
Subjumlah	**2,040,897,663**	**15,829,560,667**	***Subtotal***
Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun			*Due in More than One Year*
Uang Muka Pemberi Kerja (Jasa Konstruksi)	300,344,825,373	494,420,693,754	*Advances from Project Owners (Construction Service)*
Uang Muka Konsumen (Properti)	13,764,861,436	13,120,889,207	*Advances from Consumers (Property)*
Subjumlah	**314,109,686,809**	**507,541,582,961**	***Subtotal***
Jumlah	**316,150,584,472**	**523,371,143,628**	***Total***

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atau pemilik proyek atas pekerjaan konstruksi yang memiliki jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai dengan rincian proyek sebagai berikut:

Advance from project owners consist of advance received from project owners and consumers regarding construction project that have completion date more than a year. The amount will be proportionally compensated with billings made based on physical progress with the following project detail:

	2025 Rp	2024 Rp
Proyek dari Pihak Berelasi/ *Projects from Related Parties* (Catatan/ *Note* 38)	**110,858,953,299**	**93,067,556,515**
Proyek dari Pihak Ketiga/ *Projects from Third Parties*		
Cental Business District Surabaya	26,483,980,422	26,483,980,422
Apartemen Nayumi	21,363,636,364	21,363,636,364
Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara	19,510,540,540	--
Proyek Pembangunan Bangunan Pendukung Kawasan Bank Indonesia di Karawang (PK-12)	18,205,263,054	45,075,000,000
UNDIP Semarang	17,681,105,872	--
Apartemen Puncak Merr	16,998,866,333	65,122,549,870
The MAJ Collections Hotel & Residences	14,005,160,000	14,005,160,000
Pembangunan Hunian Terjangkau Tower B Nuansa Cilangkap	12,587,837,838	20,979,729,730
RSUD KLATEN	12,353,597,702	49,686,400,000
Gedung Bank Mandiri Cabang Masjid Agung	--	38,501,486,487
Kantor PUPR Wing 1 IKN	--	25,633,063,885
Rusun Paspampres IKN	--	24,741,807,764
BI Modern Office	--	18,895,896,110
BI Papua Barat	--	14,508,000,000
Lain-lain (Di Bawah Rp10 Milyar)/ *Others (Below Rp10 Billion)*	46,101,643,048	65,306,876,481
Subjumlah/ *Subtotal*	**205,291,631,173**	**430,303,587,113**
Jumlah/ *Total*	**316,150,584,472**	**523,371,143,628**

26. Utang Lain-Lain / *26. Other Payables*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**39,119,031,725**	**36,899,710,813**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Iuran Hari Tua Dana Pensiun	1,947,725,581	1,904,018,677
Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	97,695,634	97,695,637
Lain-lain/ *Others*	1,741,153,892	1,420,790,570
Jumlah Pihak Ketiga/ *Total Third Parties*	**3,786,575,107**	**3,422,504,884**
Jumlah/ *Total*	**42,905,606,832**	**40,322,215,697**

27. Pinjaman Bank / *27. Bank Loans*

Akun ini merupakan pinjaman bank atas fasilitas kredit investasi Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 43). Saldo pinjaman bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

This account represents bank loan of credit investment facilities of the Company to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 43). The balance of bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75,646,000,000	85,063,600,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah	**75,646,000,000**	**85,063,600,000**	***Total***
Bagian Jangka Pendek	(75,646,000,000)	(9,417,600,000)	*Short Term Portion*
Bagian Jangka Panjang	**--**	**75,646,000,000**	***Long Term Portion***

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit untuk modal kerja Nomor: CBG.CB2/SCD.SPPK.074/2020 tanggal 16 September 2020 dan Akta No. 28 tanggal 25 September 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan persyaratan sebagai berikut:

Limit Kredit	Rp116.000.000.000
Jangka Waktu	Sampai 24 September 2030 termasuk masa penarikan dan *grace period* pokok selama 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian kredit
Tingkat Bunga	9,5 % per tahun
Provisi	1% per tahun dari limit kredit
Annual Servicing Fee	1% per tahun dari limit kredit
Biaya Administrasi	Rp50.000.000 dibayarkan sebelum penandatanganan perjanjian
Commitment Fee	2% dari jumlah porsi yang belum ditarik sampai dengan masa penarikan
Agunan	Sebesar Rp145.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut: - Gadai Rekening Penampung Pendapatan dan *Debt Service Account* (Rekening *Escrow*) - Fidusia Piutang Sewa dan Piutang Proyek Graha Mantap - Fidusia Hasil Klaim Asuransi atas Bangunan Proyek Graha Mantap - Fidusia Hasil Klaim Bank Garansi atas Bangunan Proyek Graha Mantap

Pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur pada setiap tanggal 23 untuk setiap triwulan.

Debitur wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal 100%, *leverage* maksimal 500% dan EBITDA to *Interest* minimal sebesar 200%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Letter of Credit Offering for working capital Number: CBG.CB2/SCD.SPPK.074/2020 dated September 16, 2020 and Deed No. 28 dated September 25, 2020 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta terms and conditions:

Credit Limit	*Rp116,000,000,000*
Time Period	*Until September 24, 2030, including the principal drawdown period and grace period of 6 months after signing the credit agreement*
Interest Rate	*9.5% per annum*
Provision	*1% per annum of credit limit*
Annual Servicing Fee	*1% per annum of credit limit*
Administration Fee	*Rp50,000,000 paid before signing of agreement*
Commitment Fee	*2% of the undisbursed portion of the portion until the withdrawal period*
Collateral	*Amounted to Rp145,000,000,000 with the details are as follows:* - *Revenue Accounts and Debt Service Accounts (Escrow Account)* - *Rent and Receivables for the Graha Mantap Project* - *Rent and Receivables for the Graha Mantap Project* - *Bank Guarantee Claims on Graha Mantap Building Projects*

Repayment of credit facilities is made in installments on the 23rd for each of the quarterly.

Debtors are required to maintain financial ratios, namely a minimum current ratio of 100%, a maximum leverage of 500% and a minimum EBITDA to Interest of 200%.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan tidak dapat memenuhi syarat dan kondisi pinjaman berupa rasio EBITDA to *interest*.

As of December 31, 2025, the Company has not complied with the terms and conditions regarding the EBITDA to interest ratio.

Saldo pinjaman bank per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp75.646.000.000 dan Rp85.063.600.000.

Balance of bank loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp75,646,000,000 and Rp85,063,600,000, respectively.

Pembayaran pokok pinjaman bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.417.600.000 dan Rp8.938.000.000.

Payments made for bank loan facility principal for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp9,417,600,000 and Rp8,938,000,000, respectively.

Pembayaran bunga pinjaman bank yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.852.184.993 dan Rp18.073.841.715.

Payments made for bank loan facility interest for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp7,852,184,993 and Rp18,073,841,715, respectively.

28. Liabilitas Imbalan Kerja / *28. Employee Benefits Liabilities*

	2025 Rp	2024 Rp	
Imbalan Pascakerja	15,965,628,020	18,374,374,295	*Post-employment Benefits*
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	8,516,961,234	4,385,126,024	*Other Long-term Employee Benefits*
Jumlah	**24,482,589,254**	**22,759,500,319**	***Total***

Imbalan Pascakerja / *Post-employment Benefits*

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap, berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

The Group established defined benefit pension plan for permanent employees, based on years of service and salaries of the employees.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Nilai Kini dari Kewajiban	26,914,648,312	30,060,355,982	*Present Value of Obligations*
Nilai Wajar dari Aset Program	(10,949,020,292)	(11,685,981,687)	*Fair Value of Plan Assets*
Jumlah	**15,965,628,020**	**18,374,374,295**	***Total***

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pada Awal Tahun	30,060,355,982	22,386,443,490	*At Beginning of The Year*
Biaya Jasa Kini	1,172,425,066	1,247,337,984	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	1,065,639,620	1,589,437,488	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(3,276,688,231)	(307,618,791)	*Benefits Paid*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	(2,107,084,125)	5,144,755,811	*Net Actuarial (Gain) / Losses Recognised During the Year*
Jumlah	**26,914,648,312**	**30,060,355,982**	***Total***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pada Awal Tahun	11,685,981,687	17,005,296,586	*At Beginning of The Year*
Transfer Aset	--	--	*Asset Transfer*
Hasil Aset Program yang Diharapkan	390,464,631	1,196,455,591	*Expected Return on Plan Assets*
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial Bersih Diakui Selama Tahun Berjalan	215,503,133	(6,208,151,699)	*Net Actuarial (Gains) Losses Recognized During the Year*
Pembayaran Manfaat	(1,342,929,159)	(307,618,791)	*Benefit Payment*
Jumlah	**10,949,020,292**	**11,685,981,687**	***Total***

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Jasa Kini	1,172,425,066	1,247,337,984	*Current Service Cost*
Biaya Bunga - Neto	1,065,639,620	392,981,897	*Interest Cost - Net*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	(2,322,587,258)	11,352,907,510	*Net Actuarial (Gain) / Losses Recognised During the Year*
Jumlah	**(84,522,572)**	**12,993,227,391**	***Total***

Rekonsiliasi keuntungan (kerugian) aktuaria dari program imbalan pasca kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya sebagai berikut:

Reconciliation of profit (loss) of the actuarial program post-employee benefits are recognized in other comprehensive income are following:

	2025 Rp	2024 Rp	
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Tahun	6,303,585,354	(5,049,322,156)	*Other Comprehensive Income - Beginning of Year*
(Keuntungan) / Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	(2,322,587,258)	11,352,907,510	*Net Actuarial (Gains) Losses Recognized During the Year*
Jumlah Rugi Komprehensif Lain Akhir Tahun	**3,980,998,096**	**6,303,585,354**	***Total Other Comprehensive Loss - Ending of Year***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit are as follows:

	2025				
	Dalam 1 Tahun/ *Within 1 Years* Rp	2 - 5 Tahun/ *2 - 5 Years* Rp	5 - 10 Tahun/ *5 - 10 Years* Rp	Di atas 10 Tahun/ *Over 10 Years* Rp	
Manfaat Pasti	1,294,470,097	2,476,113,653	2,733,928,697	48,696,468,612	*Defined Benefit*

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Other Long-term Employee Benefits

Grup memberikan imbalan kerja jangka Panjang lainnya berupa tunjangan cuti besar dan satya karya.

The Group provides other long-term benefit in form of long service leave and long service award.

Grup memberikan ekstra hari cuti dan ekstra uang cuti untuk karyawan aktif setiap kelipatan 5 tahun masa kerja. Grup memberikan penghargaan satya karya kepada karyawan yang telah mencapai masa kerja tertentu.

The Group provides extra leave and extra leave allowance for active employee every 5 years of service. The Group provides long leave award to employee that reached certain year of service.

Liabilitas imbalan kerja panjang lainnya yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Other long-term employee benefits liabilities recognized in the statements of financial position are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pada Awal Tahun	4,385,126,024	6,507,509,303	*At Beginning of The Year*
Biaya Jasa Kini	611,018,515	652,952,374	*Current Service Cost*
Biaya Bunga	554,929,397	438,280,752	*Interest Cost*
Pembayaran Manfaat	(1,116,168,045)	(1,214,859,112)	*Benefits Paid*
(Keuntungan)/ Kerugian Aktuarial Bersih yang Diakui Selama Tahun Berjalan	294,436,195	(1,998,757,293)	*Net Actuarial Gains Recognised During the Year*
Penyesuaian Tahun Lalu	3,787,619,148	--	*Prior Year Adjustment*
Jumlah	**8,516,961,234**	**4,385,126,024**	***Total***

Biaya bersih yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expenses recognized in the profit or loss are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Biaya Jasa Kini	611,018,515	652,952,374	*Current Service Cost*
Biaya Bunga - Neto	554,929,397	438,280,752	*Interest Cost - Net*
(Keuntungan)/ Kerugian Aktuarial Bersih Diakui Selama Tahun Berjalan	294,436,195	(1,998,757,293)	*Net Actuarial (Gains)/ Losses Recognised During the Year*
Jumlah	**1,460,384,107**	**(907,524,167)**	***Total***

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit are as follows:

	2025				
	Dalam 1 Tahun/ *Within 1 Years* Rp	2 - 5 Tahun/ *2 - 5 Years* Rp	5 - 10 Tahun/ *5 - 10 Years* Rp	Di atas 10 Tahun/ *Over 10 Years* Rp	
Manfaat Pasti	965,586,244	2,544,025,182	7,309,286,773	10,997,456,856	*Defined Benefit*

Program pensiun imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The post-employment benefits and other long-term benefits typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga
Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-*offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk
A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments

Risiko Harapan Hidup
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk
The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Analisis Sensitivitas

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Sensitivity Analysis

Significant actuarial assumptions for the determination of the present value of defined benefit obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2025 Rp	2024 Rp	
Tingkat Diskonto Awal	35,431,609,546	34,445,482,006	*Initial Discount Rate*
Tingkat Diskonto +1%	26,913,559,636	32,074,974,553	*Discount Rate + 1%*
Tingkat Diskonto -1%	26,915,885,918	37,055,809,780	*Discount Rate - 1%*
Tingkat Gaji Awal	35,431,609,546	34,445,482,006	*Initial Salary Rate*
Tingkat Gaji +1%	26,938,673,065	36,970,588,982	*Salary rate +1%*
Tingkat Gaji -1%	26,895,602,484	31,423,403,566	*Salary rate -1%*

Berdasarkan perhitungan imbalan kerja yang dilakukan oleh aktuaris KKA Tubagis Syafrial & Amran Nangasan dan KKA Azwir Arifin dan Rekan aktuaris independen dengan laporannya No. 077/ IPK/KKA TBA /II 2025 tanggal 11 Februari 2025 dan No732/II/22/KKA-RM tanggal 20 Februari 2024 dengan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai berikut:

Based on the calculation of employee benefits performed by the actuary of KKA Tubagis Syafrial & Amran Nangasan and KKA Azwir Arifin and Partners, an independent actuary with its reports No. 077/ IPK/KKA TBA /II 2025 dated February 11, 2025 and No732/II/22/KKA-RM dated February 20, 2024 with the following assumptions used:

	2025	2024	
Mortalita	100% TMI IV	100% TMI IV	*Mortality*
Usia Pensiun	55/56/57/58 tahun/ *years*	55/56/57/58 tahun/ years	*Pension Age*
Tingkat Cacat	5% TMI IV	5% TMI IV	*Disability Rate*
Tingkat Diskonto	4,59% - 7,06% per tahun / *per year*	6,70% - 7,13% per tahun / per year	*Discount Rate*
Kenaikan Gaji	6,0% per tahun / *per year*	6,0% per tahun / per year	*Future Salary Increase*
Tingkat Pengunduran Diri			*Resignation Rate*
Usia < 35 tahun	1% per tahun / *per year*	1% per tahun / per year	*Age <35 years*
Usia 45-55 tahun	0% per tahun / *per year linear*	0% per tahun / per year linear	*Age 45-55 years*

29. Modal Saham / *29. Share Capital*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the shareholders of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham/ *Total Stock*	Kepemilikan/ *Ownership* %	Nilai Nominal/ *Par Value* Rp
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	6,633,000,000	69.30	663,300,000,000
Koperasi Karyawan WIKA	67,000,000	0.70	6,700,000,000
Publik/ *Public*	2,872,000,000	30.00	287,200,000,000
Jumlah/ *Total*	**9,572,000,000**	**100.00**	**957,200,000,000**

30. Tambahan Modal Disetor / *30. Additional Paid-In Capital*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kelebihan Penerimaan di atas Nilai Nominal Saham	545,876,957,519	545,876,957,519	*Excess of Proceeds from Issuance of Share Capital over Par Value*
Biaya Emisi Saham	(23,014,188,361)	(23,014,188,361)	*Share Issuance Costs*
Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali	1,220,130,700	1,220,130,700	*Difference in Restructuring Transaction of Entity under Common Control*
Tambahan Modal Disetor - Bersih	**524,082,899,858**	**524,082,899,858**	***Additional Paid in Capital - Net***

Biaya emisi saham merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penawaran saham perdana tahun 2017.

Share issuance costs represent costs incurred for initial public offering activity in 2017.

Selisih nilai transaksi entitas sepengendali merupakan selisih antara nilai imbalan yang diterima Perusahaan dengan jumlah tercatat pada saat penjualan kepemilikan saham WPG oleh Perusahaan (Catatan 1.c).

The difference in restructuring transaction of entities under common control is the difference between the value of the compensation received by the Company and the carrying amount at the time of the sale of WPG share ownership by the Company (Note 1.c).

31. Saldo Laba / *31. Retained Earnings*

	2025 Rp	2024 Rp	
Ditentukan Penggunaannya:			*Appropriated:*
Saldo Awal	165,528,527,000	160,828,527,000	*Beginning Balance*
Cadangan	6,796,120,000	4,700,000,000	*Reserve*
Saldo Akhir	**172,324,647,000**	**165,528,527,000**	***Ending Balance***
Belum Ditentukan Penggunaannya:			*Unappropriated:*
Saldo Laba Awal	963,245,785,686	909,438,080,813	*Beginning Balance*
Penambahan (Pengurangan):			*Increase (Decrease):*
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(630,364,202,638)	67,888,264,873	*Comprehensive Income for the Year*
Cadangan	(6,796,120,000)	(4,700,000,000)	*Reserve*
Dividen Tunai	(6,796,120,000)	(9,380,560,000)	*Cash Dividends*
Saldo Akhir	**319,289,343,048**	**963,245,785,686**	***Ending Balance***

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 1 tanggal 21 Mei 2025, dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku 2024 sebesar Rp67.888.264.873 akan

In accordance with Deed of the Annual General Meeting of Shareholders PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 1 dated May 21, 2025, made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta that from the Company's net profit for the financial year 2024

digunakan sebesar 10% dari laba bersih sebagai dividen tahun buku 2024, sebesar Rp6.796.120.000 atau 10% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sebesar 80% akan ditetapkan sebagai cadangan lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah membayar dividen sebesar Rp6.748.550.000 dan mencatat dividen yang belum dibayar pada Utang Lain-lain (Catatan 26).

of Rp67,888,264,873, 10% of the net profit will be used as dividends for the fiscal year 2024, Rp6,796,120,000 or 10% of the net profit will be allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law and 80% will be set as other reserves. As of December 31, 2025, the Company has paid the dividend amounting to Rp6,748,550,000 and recorded the outstanding dividend as Other Payables (Note 26).

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 8 tanggal 20 Mei 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku 2023 sebesar Rp46.702.158.528 akan digunakan sebesar 20% dari laba bersih sebagai dividen tahun buku 2023, sebesar Rp9.380.560.000 atau 10% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sebesar 70% akan ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

In accordance with Deed of the Annual General Meeting of Shareholders PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk No. 8 dated May 20, 2024, made in the presence of Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., the Notary in Jakarta that from the Company's net profit for the financial year 2023 of Rp46,702,158,528, 20% of the net profit will be used as dividends for the fiscal year 2023, Rp9,380,560,000 or 10% of the net profit will be allocated as Mandatory Reserves in order to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law and 70% will be set as other reserves.

Perusahaan menetapkan pembagian dividen Perusahaan untuk tahun buku 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

The Company declared dividend for the financial year December 31, 2024 and 2023 as follows:

	Tanggal Dideklarasikan/ *Date Declared*	Tanggal Pembayaran/ *Date Paid*	Saham (Nilai Penuh)/ *Dividend per Share (Full amount)*	Jumlah/ *Total* Rp	
Dividen Tahun Buku 2024	21 Mei/*May* 2025	30 Desember/ *December 2025*	0.49	4,757,000,000	*Dividends for the Financial Year 2024*
Dividen Tahun Buku 2024	21 Mei/*May* 2025	18 Juni/*June* 2025	0.21	2,039,120,000	*Dividends for the Financial Year 2024*
Dividen Tahun Buku 2023	20 Mei/*May* 2024	13 Juni/*June* 2024	0.98	9,380,560,000	*Dividends for the Financial Year 2023*

32. Laba per Saham / *32. Earnings per Share*

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Earning per share is calculated by dividing income for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2025 Rp	2024 Rp	
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(630,364,202,638)	67,888,264,873	*Income / (Loss) for the Current Year Attributable to Owners of the Parent Entity*
Rata-rata Tertimbang Saham untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar	9,572,000,000	9,572,000,000	*Weighted Average Number Shares for the Computation of Earnings per Share*
Laba / (Rugi) per Saham	**(65.86)**	**7.09**	***Earnings / (Loss) per Share***

33. Kepentingan Non Pengendali / *33. Non Controlling Interests*

	2025 Rp	2024 Rp	
Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak PT Wege Solusi Proklamasi	2,116,166,713	2,001,763,545	*Non Controlling Interest in Net Assets of Subsidiary PT Wege Solusi Proklamasi*
Total	**2,116,166,713**	**2,001,763,545**	***Total***
Kepentingan Non Pengendali atas Jumlah Penghasilan Komprehensif Entitas Anak PT Wege Solusi Proklamasi	114,403,168	68,985,076	*Non Controlling Interest in Subsidiary's Total Comprehensive Income PT Wege Solusi Proklamasi*
Total	**114,403,168**	**68,985,076**	***Total***

34. Pendapatan / *34. Revenue*

Pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Revenue for the years ended December 31, 2025 and 2024 consist of:

	2025 Rp	2024 Rp
Jasa Konstruksi/ *Construction Service*	1,520,795,160,215	3,368,260,613,129
Konsesi/ *Concession*	59,600,045,551	67,099,233,183
Properti/ *Property*	40,113,387,743	818,284,502
Industri/ *Industry*	3,046,540,438	237,349,044,669
Jumlah Pendapatan Usaha/ *Total Revenue*	**1,623,555,133,947**	**3,673,527,175,483**

Rincian pendapatan usaha dengan jumlah pendapatan kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Details of revenue with cumulative total revenues exceeding 10% of total revenues for the years ended December 31, 2025 and 2024 consists of:

	2025 Rp	2024 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 39)	**292,436,713,243**	**641,971,263,951**
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	677,198,500,358	2,474,685,268,117
Bank Indonesia	212,537,681,697	188,792,130,887
Kementerian Kesehatan	192,441,507,695	44,128,184,137
Lain-lain di bawah 10 Persen Jumlah Pendapatan/ *Others below 10 Percent Total Revenue*	248,940,730,954	323,950,328,391
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih/ *Total Third Parties - Net*	**1,331,118,420,704**	**3,031,555,911,532**
Jumlah/ *Total*	**1,623,555,133,947**	**3,673,527,175,483**

35. Beban Pokok Pendapatan / *35. Cost of Revenue*

Beban pokok pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Cost of revenue for the years ended December 31, 2025 and 2024 consists of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Jasa Konstruksi	1,387,078,309,411	3,090,248,186,125	*Construction Service*
Konsesi	53,443,055,621	61,839,280,602	*Concession*
Properti	34,799,474,501	701,299,836	*Property*
Industri	2,813,033,847	213,236,943,944	*Industry*
Jumlah	**1,478,133,873,380**	**3,366,025,710,507**	***Total***

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat transaksi pembelian dari pemasok dengan jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha.

For the years ended December 31, 2025 and 2024 there are no purchase transactions from suppliers with cumulative total purchases exceeding 10% of total revenues.

Beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dicatat pada beban jasa konstruksi senilai Rp13.824.147.820 dan Rp15.922.465.861.

Depreciation and amortization expense for the years ended December 31, 2025 and 2024, is recorded in construction service cost of revenue amounted to Rp13,824,147,820 and Rp15,922,465,861, respectively.

36. Beban Usaha / *36. Operating Expenses*

Beban usaha untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Operating expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 consists of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pegawai	136,504,542,652	85,702,649,013	*Employees*
Umum	46,696,164,173	28,172,483,118	*General Administrative Expenses*
Pemasaran	4,251,816,263	548,747,649	*Marketing Expenses*
Jumlah	**187,452,523,088**	**114,423,879,780**	***Total***

Beban umum merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai, biaya perjalanan dinas dan biaya lainnya.

General expenses represent expenses for stationery, electricity and phone bill, human resources development, business trip and other costs.

37. Pendapatan/ (Beban) Lainnya / *37. Other Income/ (Expenses)*

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan Lainnya			***Other Income***
Pemulihan Nilai Aset Keuangan	115,446,957,892	124,877,924,162	*Recovery of Impairment on Financial Assets*
Pemulihan Nilai Investasi Ventura Bersama	29,463,836,018	--	*Recovery of Impairment on Investment in Joint Ventures*
Bunga Deposito dan Jasa Giro	12,906,698,236	10,180,525,951	*Interest on Time Deposit and Current Account*
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi (Catatan 16)	158,350,000	--	*Different on Fair Value Investment Property (Note 16)*
Jumlah	**157,975,842,146**	**135,058,450,113**	***Total***
Beban Lainnya			***Other Expenses***
Penurunan Nilai Aset Keuangan	(531,290,987,867)	(123,006,382,312)	*Impairment of Financial Assets*
Penurunan Nilai Investasi Ventura Bersama	--	(29,463,836,018)	*Impairment of Investment in Joint Ventures*
Tanggung Jawab Sosial	(1,218,133,842)	(1,003,346,500)	*Corporate Social Responsibility*
Lain-lain	(25,916,488,622)	(76,974,347,971)	*Others*
Jumlah	**(558,425,610,331)**	**(230,447,912,801)**	***Total***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

38. Beban Keuangan / *38. Financial Expense*

Beban keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Financial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 consist of:

	2025 Rp	2024 Rp	
Beban Bunga	(17,524,477,333)	(28,254,570,874)	*Interest Expenses*

39. Saldo dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi / *39. Balance and Nature of Related Parties Transactions*

Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang menjadi pemegang saham Perusahaan. Oleh karena itu secara tidak langsung Perusahaan memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.
b. Perusahaan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
c. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perusahaan dengan BUMN lain maupun entitas anak serta badan dan institusi pemerintah yang berwenang.

The characteristic and type of significant transactions with related parties are as follows:

a. The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State Owned Enterprise is the majority shareholder of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk which becomes the shareholders of the Company. Therefore, indirectly other companies an affiliate connection through the inclusion of government capital of the Indonesia.
b. The Company puts funds and gets loans from the State Owned Enterprise banks at normal terms and interest rates equal to other third party customers.
c. The Company enters into agreements in relation to the Company's operations with other State Owned Enterprise and subsidiary and with other authorized government bodies and institutions.

Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:

The following are details of characteristic of the relationship and types of significant transactions with the related parties:

Pihak-pihak yang Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan/ *Nature of Relationship*	Transaksi/ *Transaction*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha, Pinjaman Bank, dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalent, Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables, Bank Loans and Revenue*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent and Trade Payables*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha, Pinjaman Bank, dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalent, Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables, Bank Loans and Revenue*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent and Trade Payables*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank, dan Utang Usaha / *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans, and Trade Payables*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Pinjaman Bank dan Utang Usaha/ *Cash and Cash Equivalent, Bank Loans and Trade Payables*
Koperasi Karyawan WIKA	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas, Piutang Lain-lain, Utang Usaha dan Utang Lain-lain/ *Cash and Cash Equivalent, Other Receivables, Trade Payables and Other Payables*
Koperasi Karyawan WEGE	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Utang Usaha / *Trade Receivables, Gross Amount Due from Customers and Trade Payables*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak yang Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Transaksi/** ***Transaction***
PT Pertamina (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pekerjaan dalam Proses/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Work in Progress*
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government Related Entity	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Revenue*
PT Pertamina Bina Medika	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Pendapatan/ *Account Receivables, Gross Amount Due From Customers and Revenue*
PT Brantas Abiparaya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
PT Angkasa Pura I	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government Related Entity	Pendapatan / *Revenue*
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha / *Account Receivables*
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Mahoni	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja dan Piutang Lain-lain/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers and Other Receivables*
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, dan Piutang Lain-lain / *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, and Other Receivables*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pemegang Saham Mayoritas Perseroan / *Ultimate Shareholder*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain-lain, Utang Usaha, Utang Lain-lain dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Other Receivables, Trade Payables, Other Payables and Revenue*
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Utang Usaha dan Pendapatan/ *Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Trade Payables and Revenue*
PT Wijaya Karya Realty	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses, Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress, Other Receivables and Trade Payables*
PT Kurnia Realty Jaya	Entitas Asosiasi / *Associate Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, dan Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja / *Account Receivables, Retention Receivables, and Gross Amount Due from Customers*
Kementerian BUMN	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Pekerjaan dalam Proses / *Work in Progress*
PT Biofarma (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja/ *Accounts Receivable, Retention Receivables and Gross Amount Due from Customers*
PT Patra Jasa	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Account Receivables, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Other Receivables and Revenue*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain / *Account Receivables, Retention Receivables, Work in Progress and Other Receivables*
KSU PT Wika (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero)	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain / *Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Other Receivables*
PT Patra Wijaya Realtindo	*Afiliasi / Affiliated*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*
KSO PT Wika Bangunan Gedung - PT Jakarta Konsultindo	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*
PT Wika Industri Energi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Telkom Indonesia	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT PLN (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT PP (Persero)	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables and Revenue*
PT PP (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Other Receivables and Revenue*
KSO Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - Kahuripan Nirwana	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Pendapatan/ *Accounts Receivable, Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Revenue*
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Tbk - Hakaaston	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain/ *Accounts Receivable and Other Receivables*
KSO PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Tbk- Bringin Karya Sejahtera	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain/ *Accounts Receivable and Other Receivables*
High Speed Railway Conctractor Consortium	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Retensi, Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja, Pekerjaan dalam Proses dan Piutang Lain-lain/ *Retention Receivables, Gross Amount Due from Customers, Work in Progress and Other Receivables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Chakra	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Retensi/ *Retention Receivables*
PT Brantas Abipraya Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Piutang Retensi/ *Retention Receivables*
KSO PT Wika Gedung - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain / *Other Receivables*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak yang Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Transaksi/** ***Transaction***
KSO PT Wika Gedung - PT Jaya Konstruksi - PT PP (Persero) Tbk	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain dan Pendapatan/ *Other Receivables and Revenue*
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Waskita Beton Precast	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Sarinah (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Adhi Karya	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Kas dan Setara Kas dan Pendapatan / *Cash and Cash Equivalents and Revenue*
KSO Wika-Hutama-Adipatria	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
KSO Wika - Aneka Dharma Persada	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
KSO Wika-Hutama	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Pendapatan / *Revenue*
PT Telkom Akses	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Pendapatan / *Revenue*
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
KSO PT Wika Gedung - PT Shimizu Corporation	Kerja Sama Operasi / *Joint Venture*	Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*
PT Wijaya Karya Precast Gedung	Entitas Sepengendali/ *Entity under Common Control*	Piutang Lain-lain dan Utang Usaha/ *Other Receivables and Trade Payables*
PT Propernas Griya Utama	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Bhirawa Steel	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Varia Usaha Beton	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / *Government Related Entity*	Utang Usaha / *Trade Payables*

Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

There are no differences in pricing policy and terms of transaction between related parties and third parties.

Rincian akun yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The following is the breakdown of transactions with related parties as follows:

	2025 **Rp**	**2024** **Rp**	**Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities*** **2025** **%**	**2024** **%**
ASET/ *ASSET*				
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*				
Bank/ *Cash in Banks*				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	260,224,281,531	283,838,661,891	6.44	4.96
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	45,837,784,019	139,667,629,022	1.13	2.44
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,115,211,620	279,208,821,238	0.23	4.88
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3,715,389,505	165,770,391,660	0.09	2.89
PT Bank Mandiri Taspen	302,356,878	757,735,498	0.01	0.01
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8,175,214	72,152,248	--	--
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21,472,905	1,227,334,522	--	0.02
Subjumlah/ Subtotal	**319,224,671,672**	**870,542,726,079**	**7.89**	**15.20**
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	40,000,000,000	75,000,000,000	0.99	1.31
Koperasi Karyawan WIKA	28,549,509,831	30,462,137,368	0.71	0.53
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	40,500,000,000	--	0.71
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	--
Subjumlah/ Subtotal	**68,549,509,831**	**145,962,137,368**	**1.70**	**2.55**
Jumlah/ *Total*	**387,774,181,503**	**1,016,504,863,447**	**9.59**	**17.75**

	2025 Rp	2024 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / Percentage from Total Assets/Liabilities 2025 %	2024 %
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*				
PT Kurnia Realty Jaya	62,168,542,981	62,168,542,981	1.54	1.09
PT Bio Farma (Persero)	53,112,722,603	17,493,104,000	1.31	0.31
PT Wijaya Karya Realty	26,940,756,803	27,907,003,333	0.67	0.49
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - High Speed Railway Conctractor Consortium	15,366,001,197	42,389,137,398	0.38	0.74
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5,906,346,996	6,054,073,716	0.15	0.11
Koperasi Karyawan WEGE	4,522,402,500	4,522,402,500	0.11	0.08
PT Kereta Cepat Indonesia China	3,644,438,339	3,644,438,339	0.09	0.06
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,570,753,085	2,197,012,030	0.06	0.04
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,268,735,586	1,268,735,586	0.03	0.02
PT PP (Persero) Tbk	946,813,251	1,546,813,251	0.02	0.03
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	439,200,000	185,962,081	0.01	--
PT Hotel Karya Indonesia	293,207,569	3,225,283,268	0.01	0.06
PT Pertamina Bina Medika	193,230,000	21,161,820,000	--	0.37
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	192,422,872	53,575,052,241	--	0.94
PT Bukit Asam Tbk	144,935,721	1,016,369,723	--	0.02
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka	119,142,633	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - PT Nindya Karya	103,235,550	103,235,550	--	--
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	57,806,667	57,806,667	--	--
PT Bank Mandiri Taspen	41,364,000	--	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	--	13,798,707,641	--	0.24
PT Patra Jasa	--	1,999,250,000	--	0.03
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	--	91,670,908	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunang Gedung Tbk - PT Pelitamaju Multiswakarsa	--	20,033,926	--	--
Jumlah/ *Total*	**178,032,058,353**	**264,426,455,139**	**4.40**	**4.62**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(10,356,676,148)	(1,226,546,977)	(0.26)	(0.02)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**167,675,382,205**	**263,199,908,162**	**4.15**	**4.60**
Piutang Retensi/ *Retention Receivables*				
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	33,013,507,921	33,013,507,921	0.82	0.58
PT Bio Farma (Persero)	26,127,720,964	27,259,265,964	0.65	0.48
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	23,425,123,718	23,425,123,718	0.58	0.41
PT Wijaya Karya Realty	20,127,548,485	20,127,548,485	0.50	0.35
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Mutiara Masyhur	8,338,583,159	8,338,583,159	0.21	0.15
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,472,766,914	250,308,559	0.16	--
PT Kurnia Realty Jaya	3,201,979,464	3,201,979,464	0.08	0.06
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung - Kahuripan Nirwarna	2,656,900,000	2,656,900,000	0.07	0.05
PT Bukit Asam Tbk	2,229,475,642	978,074,561	0.06	0.02
High Speed Railway Conctractor Consortium	--	44,747,001,122	--	0.78
PT Hotel Karya Indonesia	--	885,280,538	--	0.02
Jumlah/ *Total*	**125,593,606,267**	**164,883,573,491**	**3.11**	**2.88**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(7,224,530,860)	(3,170,644,421)	(0.18)	(0.06)
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**118,369,075,407**	**161,712,929,070**	**2.93**	**2.82**
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja/ *Gross Amount Due from Customers*				
PT Wijaya Karya Realty	78,935,043,254	78,935,043,254	1.95	1.38
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	69,912,505,078	76,222,877,492	1.73	1.33
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28,364,823,879	--	0.70	--
KSO PT Wika Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	6,956,780,834	5,208,168,022	0.17	0.09
PT Bukit Asam Tbk	2,132,319,593	8,256,774,156	0.05	0.14
PT Bio Farma (Persero)	401,034,427	15,259,227,630	0.01	0.27
High Speed Railway Conctractor Consortium	--	6,051,185,905	--	0.11
PT Pertamina Bina Medika	--	3,570,972,973	--	0.06
KSO Wika Gedung - Kahuripan Nirwarna	--	1,748,612,813	--	0.03
Jumlah/ *Total*	**186,702,507,065**	**195,252,862,245**	**4.62**	**3.41**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(56,212,528,356)	(131,093,920)	(1.39)	--
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**130,489,978,709**	**195,121,768,325**	**3.23**	**3.41**
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi/ *Construction Work in Progress*				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	177,796,517,885	205,213,598,795	4.40	3.58
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	66,097,936,440	66,097,936,440	1.63	1.15
High Speed Railway Conctractor Consortium	62,598,515,177	51,748,995,621	1.55	0.90
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27,969,454,699	2,851,992,755	0.69	0.05
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - DBG	21,916,182,279	--	0.54	--
PT Bio Farma (Persero)	21,732,760,630	6,436,615,787	0.54	0.11
PT Wijaya Karya Realty	18,994,597,105	18,994,597,105	0.47	0.33
KSO WIKA Gedung - Kahuripan Nirwarna	12,989,404,560	12,989,404,560	0.32	0.23
PT Bukit Asam Tbk	10,552,501,506	6,048,704,782	0.26	0.11
PT Hotel Karya Indonesia	1,610,760,665	1,610,760,665	0.04	0.03
PT Pertamina (Persero)	1,158,271,368	2,783,901,849	0.03	0.05
Jumlah/ *Total*	**423,416,902,314**	**374,776,508,359**	**10.47**	**6.54**
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Less: Allowance for Impairment Loss*	(133,133,092,917)	--	(3.29)	--
Jumlah Pihak Berelasi - Bersih/ *Total Related Parties - Net*	**290,283,809,397**	**374,776,508,359**	**7.18**	**6.54**

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities* 2025 %	2024 %
Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*				
PT Patra Wijaya Realtindo	66,527,777,950	126,527,777,950	1.65	2.21
PT Wijaya Karya Precast Gedung	22,498,232,333	18,112,500,000	0.56	0.32
PT Patra Jasa	7,600,000,000	8,500,000,000	0.19	0.15
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Intikarya	3,894,833,722	1,562,293,099	0.10	0.03
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Brantas Abipraya (Persero)	3,543,257,608	1,121,599,075	0.09	0.02
PT Wijaya Karya Realty	3,054,710,366	3,054,710,366	0.08	0.05
Building Management Tamansari Mahogany	2,791,608,571	2,875,578,766	0.07	0.05
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk	2,244,815,489	1,690,564,374	0.06	0.03
PT Hotel Karya Indonesia	278,752,423	--		
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	127,453,900	1,753,708,676	--	0.03
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Cipta Solusi	78,933,618		--	--
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	104,804,379	26,749,999	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Pelita	--	182,126,600	--	--
Jumlah/ *Total*	**112,745,180,359**	**165,407,608,905**	**2.80**	**2.89**
LIABILITAS/ *LIABILITIES*				
Utang Bank Jangka Pendek/				
Short Term Bank Loans				
Rupiah/ *Indonesian Rupiah*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Cash Loan	42,000,000,000	95,000,000,000	2.03	3.04
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
Cash Loan	31,038,256,757	200,000,000,000	1.50	6.41
PT Bank Syariah Indonesia Tbk				
Cash Loan	--	55,000,000,000	--	1.76
Jumlah/ *Total*	**73,038,256,757**	**350,000,000,000**	**1.50**	**11.21**
Utang Usaha/ *Trade Payables*				
Pemasok Subkontraktor dan Mandor/				
Supplier Subcontractor and Foreman				
PT Wijaya Karya Beton Tbk	10,069,606,929	25,639,180,264	0.49	0.82
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung	6,590,861,349	1,691,788,405	0.32	0.05
Koperasi Karyawan WIKA	5,530,468,088	4,264,764,233	0.27	0.14
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	5,217,500,000	--	0.25	--
PT Wijaya Karya Realty	5,012,232,954	2,239,114,576	0.24	0.07
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	3,502,711,614	3,520,595,896	0.17	0.11
Koperasi Karyawan WEGE	3,263,400,756	1,452,758,046	0.16	0.05
PT Adhi Karya (Persero)	1,975,390,000	401,000,000	0.10	0.01
PT Varia Usaha Beton	1,792,662,500	856,639,550	0.09	0.03
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	1,166,666,667	--	0.06	--
PT BGR Logistik Indonesia	1,006,550,000	206,500,000	0.05	0.01
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	886,042,577	--	0.04	--
PT Jasa Prima Logistik BULOG	826,092,504	--	0.04	--
PT BNI Life Insurance	519,188,493	--	0.03	--
PT Pos Logistik Indonesia	497,986,543	103,747,525	0.02	--
PT Angkasa Pura Logistik	363,124,900	--	0.02	--
PT Bhanda Graha Reksa	330,000,000	--	0.02	--
PT Wika Industri Energi	160,510,350	1,523,364,485	0.01	0.05
PT Sucofindo	106,589,300	--	0.01	--
PT Kawasan Industri Makassar	48,645,455	--	--	--
PT Patra Jasa	20,735,812	--	--	--
PT Solusi Bangun Beton	--	5,962,669,075	--	0.19
PT Propernas Griya Utama	--	1,267,680,282	--	0.04
PT Bhirawa Steel	--	766,269,798	--	0.02
PT Semen Indonesia Beton	--	682,637,500	--	0.02
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	--	208,800,000	--	0.01
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan	--	26,500,000	--	--
PT PLN (Persero)	--	23,656,320	--	--
Subjumlah/ Subtotal	**48,886,966,791**	**50,837,665,955**	**2.39**	**1.62**
Utang Mitra (Catatan 42)/ *Partners Payables (Note 42)*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	43,445,277,293	45,929,158,120	2.10	1.47
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	34,946,295,376	296,115,025,456	1.69	9.49
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	24,077,146,960	29,333,064,905	1.16	0.94
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	7,363,582,893	51,244,775,498	0.36	1.64
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Non Cash Loan	--	411,418,000	--	0.01
Subjumlah/ Subtotal	**109,832,302,522**	**423,033,441,979**	**1.52**	**0.95**
Jumlah/ *Total*	**158,719,269,313**	**473,871,107,934**	**3.91**	**2.57**

	2025 Rp	2024 Rp	Persentase dari Total Aset/Liabilitas / *Percentage from Total Assets/Liabilities* 2025 %	2024 %
Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen/ *Advances From Projects and Consumers*				
Proyek Tamansari Emerald Surabaya	34,275,100,845	34,275,100,845	1.65	1.10
Gedung Bank Mandiri Cabang Masjid Agung Kendari	33,977,848,559	--	1.64	--
Proyek Tamansari Cendekia - Semarang	16,919,802,195	16,919,802,195	0.82	0.54
Bandara Makassar II	10,089,908,191	--	0.49	--
Proyek Bio Farma 2 Bandung	8,098,629,376	19,892,025,150	0.39	0.64
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Gresik (Mandiri Gresik)	2,571,845,045	17,557,324,325	0.12	0.56
Inna Sanur Bali	2,081,734,671	--	0.10	--
Tamansari Prospero	1,742,760,000	1,742,760,000	0.08	0.06
Keet Office Rorotan	596,887,267	--	0.03	--
Ofiice Benhill Central	500,000,000	500,000,000	0.02	0.02
Graha Mantap	4,437,150	--	--	--
Perluasan Bangunan dan Jaringan Kelistrikan Gardu Hubung Bio Farma	--	2,180,544,000	--	0.07
Jumlah/ *Total*	**110,858,953,299**	**93,067,556,515**	**5.34**	**2.99**
Utang Lain-lain/ *Other Payables*				
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	37,156,004,496	33,364,986,194	1.79	1.07
Koperasi Karyawan WIKA Gedung	1,915,457,229	--	0.09	--
Koperasi Karyawan WIKA	47,570,000	3,534,724,619	--	0.11
Jumlah/ *Total*	**39,119,031,725**	**36,899,710,813**	**1.89**	**1.18**
Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun/ *Long-term Payables Current Maturity Portion*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75,646,000,000	9,417,600,000	3.65	0.30
Bagian Liabilitas Jangka Panjang/ *Long-term Payables Long-term Portion :*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	75,646,000,000	--	2.42
Jumlah/ *Total*	**75,646,000,000**	**85,063,600,000**	**3.65**	**2.72**

	2025 Rp	2024 Rp	Persentase dari Total Penjualan Neto/ Beban / *Percentage from Total Net Sales/ Expenses* 2025 %	2024 %
Pendapatan/ *Revenue*				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	116,805,243,248	21,820,882,882	7.19	0.59
PT Bio Farma (Persero)	98,368,584,191	184,035,013,721	6.06	5.01
PT Bank Mandiri Taspen	30,377,250,563	28,611,325,452	1.87	0.78
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	21,070,927,798	1,161,310,000	1.30	0.03
PT Bukit Asam Tbk	18,903,567,005	27,818,265,269	1.16	0.76
PT Pertamina Bina Medika	3,864,600,000	58,127,504,504	0.24	1.58
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Jaya Konstruksi Tbk	3,046,540,438	720,000,000	0.19	0.02
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	--	125,077,886,911	--	3.40
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abadi Prima Inti Karya	--	110,811,240,000	--	3.02
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Abipraya	--	74,088,574,000	--	2.02
Koperasi Karyawan WEGE	--	2,404,915,651	--	0.07
PT Hutama Karya (Persero)	--	2,128,000,000	--	0.06
PT Brantas Abipraya (Persero)	--	1,771,000,000	--	0.05
High Speed Railway Conctractor Consortium	--	966,340,561	--	0.03
KSO Wika-Minarta-Karta Utama	--	837,000,000	--	0.02
KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Jaya Konstruksi	--	640,000,000	--	0.02
KSO PT PP (Persero) - WAA	--	461,000,000	--	0.01
SRBGC - PT Wijaya Karya (Persero) - PT Adhi Karya JO	--	318,000,000	--	0.01
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Nindya Karya (Persero)	--	93,005,000	--	--
KSO PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	80,000,000	--	--
Jumlah/ *Total*	**292,436,713,243**	**641,971,263,951**	**10.82**	**17.48**

40. Laba Selisih Kurs / *40. Foreign Exchange Gain*

Akun ini merupakan laba selisih kurs untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

This account represents gain on exchanges rate for the years ended December 31, 2025 and 2024 as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Laba Selisih Kurs	8,308,753	56,682,663	*Gain on Exchanges Rate*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

41. Informasi Tambahan Arus Kas / *41. Supplemental Cash Flow Information*

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan
Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024:

Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities
The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Penerimaan/ *Receipt* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Pembayaran/ *Payment* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
2025					***2025***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	372,000,000,000	68,124,603,387	(367,086,346,630)	73,038,256,757	*Short-term Bank Loan*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	85,063,600,000	--	(9,417,600,000)	75,646,000,000	*Long-term Bank Loan*
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	**457,063,600,000**	**68,124,603,387**	**(376,503,946,630)**	**148,684,256,757**	***Total Liabilities from Financing Activities***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Penerimaan/ *Receipt* Rp	Arus Kas/ *Cash Flows* Pembayaran/ *Payment* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
2024					***2024***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	129,500,000,000	463,186,818,225	(220,686,818,225)	372,000,000,000	*Short-term Bank Loan*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	94,001,600,000	--	(8,938,000,000)	85,063,600,000	*Long-term Bank Loan*
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	**223,501,600,000**	**463,186,818,225**	**(229,624,818,225)**	**457,063,600,000**	***Total Liabilities from Financing Activities***

42. Informasi Segmen / *42. Segment Information*

a. Segmen Operasi / ***a. Operation Segment***

Segmen operasi Grup dikelompokkan berdasarkan jenis usaha/ produk yang dihasilkan.

The operating segments of the Group classified based on type of business/products.

Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/ produk adalah sebagai berikut:

Segment information based on type of business/ product are as follows:

	2025						
	Konstruksi/ *Construction* Rp	Properti/ *Property* Rp	Konsesi/ *Concession* Rp	Modular/ *Modular* Rp	Eliminasi/ *Elimination* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan Bersih	1,520,795,160,215	40,113,387,743	59,600,045,551	3,046,540,438	--	1,623,555,133,947	***Revenue***
Beban Pokok Penjualan	(1,387,078,309,411)	(34,799,474,501)	(53,443,055,621)	(2,813,033,847)	--	(1,478,133,873,380)	***Cost of Revenue***
Laba Kotor	133,716,850,804	5,313,913,242	6,156,989,930	233,506,591	--	145,421,260,567	***Gross Profit***
Beban Usaha	(187,452,286,288)	--	(236,800)	--	--	(187,452,523,088)	***Operating Expenses***
LABA USAHA	(53,735,435,484)	5,313,913,242	6,156,753,130	233,506,591	--	(42,031,262,521)	***OPERATING INCOME***
Beban Pajak Final	(35,222,918,734)	(739,830,860)	(3,019,170,453)	(80,733,158)	--	(39,062,653,205)	*Final Tax Expenses*
Bagian Rugi Ventura Bersama	(112,953,068,297)	--	--	--	--	(112,953,068,297)	*Loss from Joint Venture*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(18,236,878,682)	--	--	--	--	(18,236,878,682)	*Loss from Associates Entity*
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(411,037,108,180)	(242,677,125)	164,454,615	(6,509,123,575)	(341,482,500)	(417,965,936,765)	*Other Income (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(631,185,409,377)	4,331,405,257	3,302,037,292	(6,356,350,142)	(341,482,500)	(630,249,799,470)	***Profit Before Income Tax***
Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	*Income Tax*
Laba Tahun Berjalan Bersih	**(631,185,409,377)**	**4,331,405,257**	**3,302,037,292**	**(6,356,350,142)**	**(341,482,500)**	**(630,249,799,470)**	***Net Profit for the Year***
Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak	--	--	--	--	114,403,168	114,403,168	***Non Controlling Interest of Net Profit or Loss of Subsidiary***
Laba Bersih Kepemilikan Entitas Induk	**(631,185,409,377)**	**4,331,405,257**	**3,302,037,292**	**(6,356,350,142)**	**(227,079,332)**	**(630,135,396,302)**	***Net Income to Owners of the Parent***
Aset Segmen	3,363,256,500,189	547,971,304,387	239,378,268,667	43,451,216,301	(150,246,198,697)	4,043,811,090,847	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	1,489,105,925,750	382,192,972,687	263,460,383,891	65,550,461,759	(127,746,198,697)	2,072,563,545,390	*Segment Liabilities*

	2024						
	Konstruksi/ *Construction* Rp	Properti/ *Property* Rp	Konsesi/ *Concession* Rp	Modular/ *Modular* Rp	Eliminasi/ *Elimination* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Pendapatan Bersih	3,370,060,829,345	818,284,502	67,099,233,183	237,349,044,669	(1,800,216,216)	3,673,527,175,483	***Revenue***
Beban Pokok Penjualan	(3,092,048,402,341)	(701,299,836)	(61,839,280,602)	(213,236,943,944)	1,800,216,216	(3,366,025,710,507)	***Cost of Revenue***
Laba Kotor	278,012,427,004	116,984,666	5,259,952,581	24,112,100,725	--	307,501,464,976	***Gross Profit***
Beban Usaha	(114,423,879,780)	--	--	--	--	(114,423,879,780)	***Operating Expenses***
LABA USAHA	163,588,547,224	116,984,666	5,259,952,581	24,112,100,725	--	193,077,585,196	***OPERATING INCOME***
Beban Pajak Final	(89,258,906,248)	(20,270,863)	(2,852,937,575)	(4,274,960,111)	--	(96,407,074,797)	*Final Tax Expenses*
Bagian Laba Ventura Bersama	99,433,579,537	230,742,243	--	--	--	99,664,321,780	*Profit from Joint Venture*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(4,790,231,331)	--	--	--	--	(4,790,231,331)	*Loss from Associates Entity*
Pendapatan/ (Beban) Lain-lain	(138,970,161,247)	(707,382,571)	(89,568,863)	16,179,761,782	--	(123,587,350,899)	*Other Income/ (Expenses)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**30,002,827,935**	**(379,926,525)**	**2,317,446,143**	**36,016,902,396**	**--**	**67,957,249,949**	***Profit Before Income Tax***
Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	*Income Tax*
Laba Tahun Berjalan Bersih	**30,002,827,935**	**(379,926,525)**	**2,317,446,143**	**36,016,902,396**	**--**	**67,957,249,949**	***Net Profit for the Year***
Kepentingan Non Pengendali atas Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak	--	--	--	--	(68,985,076)	(68,985,076)	***Non Controlling Interest of Net Profit or Loss of Subsidiary***
Laba Bersih Kepemilikan Entitas Induk	**30,002,827,935**	**(379,926,525)**	**2,317,446,143**	**36,016,902,396**	**(68,985,076)**	**67,888,264,873**	***Net Income to Owners of the Parent***
Aset Segmen	5,055,257,286,604	453,953,466,763	344,726,591,314	134,479,553,175	(22,500,000,000)	5,965,916,897,856	*Segment Assets*
Liabilitas Segmen	2,801,381,896,910	217,869,727,184	318,753,600,521	21,201,741,097	--	3,359,206,965,712	*Segment Liabilities*

b. Segmen Geografis

Informasi segmen geografis Grup dikelompokkan berdasarkan daerah geografis, yaitu berdasarkan wilayah kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

b. Geographical Segment

The Group's geographical segment information is grouped based on geographic area, which is based on the area of business activities as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pendapatan			***Revenue***
Jawa	677,362,499,985	939,242,220,694	*Jawa*
Kalimantan	521,927,166,928	2,178,558,047,720	*Kalimantan*
DKI Jakarta	177,102,774,012	184,719,872,030	*DKI Jakarta*
Sumatera	141,714,389,734	153,467,885,143	*Sumatera*
Sulawesi	53,637,799,502	1,477,477,477	*Sulawesi*
Papua	47,884,372,515	35,098,795,200	*Papua*
Banten	3,926,131,271	180,821,872,219	*Banten*
Aceh	--	93,005,000	*Aceh*
Ambon	--	48,000,000	*Ambon*
Jumlah	**1,623,555,133,947**	**3,673,527,175,483**	***Total***

43. Perjanjian dan Komitmen

43. Agreements and Commitments

Perjanjian Kegiatan Konstruksi

Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Construction Activities Agreements

The Company has commitments to carry out the following construction works:

Perjanjian kerjasama operasi

a. Hotel De Braga

Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah *(Bulid, Operate, and Transfer/BOT)* dengan PT Sarinah (Persero) tentang Pengembangan Properti di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat. Pembangunan tersebut tertuang dalam sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 649 seluas 1.763 m^2, sedangkan Perusahaan sebagai investornya.

Untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan, PT Sarinah (Persero) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara seperti tertuang dalam

Coorporation agreements between operation

a. Hotel De Braga

The Company has entered into a Build, Operate, and Transfer / BOT agreement with PT Sarinah (Persero) regarding the development of Property in Jalan Braga No. 10 Bandung - West Java. The development is contained in Building Use Right Certificate No. 649 covering an area of 1,763 sqm, while the Company as its investor.

To have cooperation with the Company, PT Sarinah (Persero) obtained approval from the Ministry of State-Owned Enterprise as stated in the General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham No. S-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah (Persero) di Jl. Braga No. 10, Bandung Jawa barat. Sedangkan Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat PT Wijaya Karya Gedung Tbk No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015.

Letter No. S-89 / MBU/01 / 2016 dated January 25, 2016 regarding the Approval for the Utilization Assets Owned by PT Sarinah (Persero) in Jl. Braga No. 10, Bandung West Java. Whereas the Company has obtained approval from the shareholders as stated in the Decision of Shareholders of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk outside meeting No: MJ.01.00 / PS.WG.037 / 2015 dated November 13, 2015.

Perusahaan telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp115.479.780.769 dengan jangka waktu pengelolaan selama 25 tahun sampai dengan 10 Maret 2041. Sedangkan PT Sarinah (Persero) berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33% dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementrian Keuangan No.33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan ruang komersial seluas 132 m^2 selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan *service charge*.

The Company has planned the amount of investments that will be injected to build hotel and supporting facilities with an initial investment amounting to Rp115,479,780,769, with a management terms of 25 years until March 10, 2041. Whereas PT Sarinah (Persero) is entitled to land rental payments of 3.33% of the value of land based on NJOP every year as stated in the Ministry of Finance Regulation No.33/PMK.06/2012 and is entitled to receive commercial space of 132 sqm during the validity period of the cooperation agreement not subject to rent space fees and service charges.

Perusahaan berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah tanpa kewajiban PT Sarinah (Persero) untuk memberikan ganti rugi kepada Perusahaan sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer, yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini.

The Company is obligated to turnover and transfer the objects of BOT on the date of transfer of the buildings and handover of the land without obligation from PT Sarinah (Persero) to pay compensation to the Company as a form of the turnover and or transfer arising in the cooperation agreement.

b. Graha Mantap
Akta Perjanjian BOT

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 28 Desember 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Guna, Serah (Bulid, Operate, and Transfer/BOT) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengoptimalkan fungsi dan kegunaan tanah milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jalan Proklamasi Nomor 31, Jakarta Pusat SHGB Nomor 295/Pegangsaan seluas 4.482 m^2 tanggal 31 Agustus 2009.

b. Graha Mantap
BOT Agreement Deed

Based on Deed No. 78 dated December 28, 2018 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into a Build, Operate, and Transfer (BOT) agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to optimize the functions and uses of the land owned by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at Jalan Proklamasi No. 31, Central Jakarta, SHGB Number 295/Pegangsaan covering an area of 4,482 sqm dated August 31, 2009.

Perusahaan telah merencanakan jumlah investasi sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi gedung sekurang-kurangnya sebesar Rp172.224.325.971.

The Company has planned that the total investment related to the preparation, execution, and completion of the construction of the building amounted to at least Rp172,224,325,971.

Jangka waktu BOT maksimal 27 tahun sejak tanggal efektif yang meliputi jangka waktu pembangunan, jangka waktu pengoperasian hingga gedung diserahkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jangka waktu pembangunan maksimal 24 bulan sejak tanggal efektif dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pembangunan Gedung. Jangka waktu pengoperasian gedung sampai dengan 27 Desember 2045.

BOT period is for a maximum of 27 years from the effective date, which includes the construction period and the operating period until the building is handed over to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The maximum construction period is 24 months from the effective date and proven by Minutes of Building Construction Completion. The building operation period until December 27, 2045.

Luas area gedung yang disewakan kepada umum adalah sisa area yang telah disewakan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tarif sewa dan *service charge* kepada umum tidak boleh sama atau lebih rendah daripada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The area of the building rented to the public is the remaining area that has been rented to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rent charges and service charges to the public cannot be the same or lower than PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perusahaan diperkenankan membentuk badan hukum untuk melaksanakan sebagian atau seluruh hak, kewajiban dan/atau kewenangan Perusahaan, dimana Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali yang disebut dengan *Special Purpose Vehicle* (“SPV”).

The Company is allowed to establishing a legal entity to perform part or all of the rights, obligations and/or authorities of the Company, in which the Company is the majority and controlling shareholder, which is called a Special Purpose Vehicle ("SPV").

Perusahaan wajib menyediakan *sinking fund* dalam rekening *escrow* yang dibayarkan di Bulan Desember setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dengan total sebesar Rp13.243.625.584.

The Company is required to provide sinking funds in an escrow account which is paid in December each year during the operating period for a total amount of Rp13,243,625,584.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berhak menerima kompensasi yang dibayarkan di Bulan Desember setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dengan total sebesar Rp49.200.000.000 dan *signing fee* sebesar Rp1.000.000.000 paling lambat 30 hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is entitled to receive compensation payment in December each year during the operating period with a total amounting to Rp49,200,000,000 and signing fee amounting to Rp1,000,000,000 no later than 30 calendar days after the signing of the agreement.

Perjanjian Pendelegasian BOT
Berdasaran Perjanjian Pendelegasian Pekerjaan Pengembangan Lahan Mandiri Proklamasi Nomor: HK.02.09/A.DIR.WG.6445/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019, Perusahaan menyerahkan hak, kewenangan, dan kewajiban Perusahaan terkait pekerjaan BOT terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada WSP sebagai SPV, selama Jangka Waktu Pembangunan serta Pengoperasian Gedung di atas Tanah oleh dan sepenuhnya atas biaya WSP sesuai ketentuan Perjanjian dan Perjanjian BOT, meliputi penyerahan Tanah dan Gedung, pembiayaan Pembangunan Gedung, Pengoperasian Gedung, termasuk penarikan manfaat dari hasil

BOT Delegation Agreement
Based on the Agreement on the Delegation of Land Development Work for Mandiri Proklamasi Number: HK.02.09 / A.DIR.WG.6445 / 2019 dated August 2, 2019, the Company handed over the rights, authorities, and obligations of the Company regarding BOT work for PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to WSP as SPV, during the Construction Period and Operation of the Building on the Land by and fully at the expense of WSP in accordance with the provisions of the BOT Agreement and Agreement, including the surrender of Land and Buildings, financing for Building Construction, Building Operations, including the withdrawal of benefits from the results Building Operations, to the Handover of

Pengoperasian Gedung, hingga Penyerahan Gedung kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat Jangka Waktu BOT berakhir, baik langsung maupun melalui Perusahaan.

the Building to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk when the BOT Period ends, either directly or through the Company.

Lingkup Pekerjaan BOT yang telah dilaksanakan Perusahaan, termasuk biaya yang telah dan akan dikeluarkan, diambilalih dan dilanjutkan oleh WSP.

The scope of BOT work that has been carried out by the Company, including costs that have been and will be incurred, is taken over and continued by WSP.

Pelaksanaan Pembangunan Gedung tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan selaku Kontraktor Pelaksana.

Execution of Building Construction remains the responsibility of the Company as the Executor Contractor.

Perusahaan berhak melakukan pengawasan, evaluasi, memberikan masukan dan instruksi guna mendukung terlaksananya perjanjian BOT oleh WSP sekaligus memastikan kewajiban Perusahaan terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Company has the right to supervise, evaluate, provide input and instructions to support the implementation of the BOT agreement by WSP while ensuring the Company's obligations to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian ini telah diberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui surat No. SE.01.01/A.DP.WG.4415/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Pekerjaan BOT Graha Mantap.

This agreement has been notified to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk through letter No. SE.01.01/A.DP.WG.4415/2019 dated August 21, 2019 concerning Delegation of BOT Graha Mantap.

c. Pertamina Mandalika International Street Circuit

Perusahaan melakukan perjanjian Bangun, Sewa, Serah (*Build, Lease, and Transfer/BLT*) dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (ITDC) tentang Pembangunan *Paddock* di ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan nilai kerjasama sebesar Rp155.775.011.892.

c. Pertamina Mandalika International Street Circuit

The Company entered into a Build, Lease, and Transfer (BLT) agreement with PT Pembangunan Wisata Indonesia (Persero) (ITDC) regarding Paddock Development at ITDC Mandalika Tourism Complex, Kuta, Pujut, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara with the value of cooperation is Rp155,775,011,892.

Untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan, ITDC telah menetapkan Perusahaan sebagai mitra Kerja Sama berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

To cooperate with the Company, ITDC has appointed the Company as a Cooperation partner based on the Work Order No. 318/DIR/ITDC.01/X/2021 dated October 7, 2021.

Perusahaan telah menyelesaikan pembangunan obyek kerjasama tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, pada tanggal 24 Desember 2021 dan ITDC memulai masa sewa atas Obyek Kerjasama tersebut hingga 30 Juni 2023.

The Company has completed the construction of the object of cooperation as evidenced by the Minutes of Handover, on December 24, 2021, and ITDC started the lease period for the object of cooperation until June 30, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

As of December 31, 2023, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

Pada akhir Periode Sewa dan setelah ITDC melakukan pembayaran penuh atas Nilai

At the end of the Lease Period and after ITDC makes full payment of the Cooperation Value,

Kerjasama, maka kepemilikan atas obyek kerjasama akan secara otomatis beralih ke ITDC.

Pada tanggal 31 Desember 2024, obyek kerjasama belum diserahkan kepada ITDC karena pembayaran termin terakhir dari nilai kerjasama belum dilunasi.

the ownership of the object of cooperation will automatically transfer to ITDC.

As of December 31, 2024, the object of cooperation has not yet transferred to ITDC due to outstanding receivable terms.

Perjanjian Pinjaman Entitas Anak
WSP

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Perusahaan dengan WSP No. KU.09.09/A.DIR.WG.6498/2020 dan No. KU.09.09/A.WSP.275/2020 tanggal 28 September 2020, Perusahaan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada WSP. Pinjaman tersebut adalah kredit terusan berupa kredit investasi milik Perusahaan sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor 28 tanggal 25 September 2020 antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Limit kredit pinjaman sebesar Rp116.000.000.000 dengan tingkat bunga 2% di atas Suku Bunga Kredit Investasi tersebut dan berjangka waktu 10 tahun sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan 27 September 2030.

Subsidiaries' Loan Agreements
WSP

Based on the Company's Shareholders Agreement with WSP No. KU.09.09/A.DIR.WG.6498/2020 and No. KU.09.09/A.WSP.275/2020 dated September 28, 2020, the Company provided a Financing Facility to WSP. The loan is a continuous credit in the form of an investment credit owned by the Company in accordance with the Investment Credit Agreement Deed Number 28 dated September 25, 2020 between the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Credit limit amounting to Rp116,000,000,000 with an interest rate of 2% above the Investment Credit Interest Rate and a term of 10 years from September 28, 2020 to September 27, 2030.

Perjanjian Fasilitas Kredit
Perusahaan

Perusahaan memiliki perjanjian fasilitas kredit kepada bank mitra diantaranya sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian nomor R.II.297-CRO/COD/LAD/11/2024 tertanggal 21 November 2024, Perusahaan mendapatkan persetujuan Perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dan perpanjangan fasilitas *Non-Cash Loan* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan persyaratan kredit sebagai berikut:

Fasilitas *Non-Cash Loan*	
Limit Kredit:	Rp800.000.000.000
Batas Akhir Pendaftaran:	30 November 2024 s/d 30 November 2025
Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi, LC/SKBDN dan KMK *Buyer*, dan SCF A/P
Agunan:	Agunan terkait fasilitas KMK Konstruksi.

Selama masa pembiayaan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait perjanjian yaitu mengajukan permohonan pailit debitur kepada pengadilan niaga dan mengadakan transaksi dengan pihak yang berafiliasi maupun pihak ketiga diluar aspek kewajaran.

Credit Facility Agreements
The Company

The Company has credit facility agreements to partner banks are as follows:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the agreement number number R.II.297-CRO/COD/LAD/11/2024 dated November 21, 2024, the Company have approved of the Extension of Working Capital Credit facility and extension of Non-Cash Loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with the following credit terms:

Non-Cash Loan Facility	
Credit Limit:	*Rp800,000,000,000*
Registration Deadline:	*November 30, 2024 until November 30, 2025*
Intended Use:	*Bank Guarantee, LC/SKBDN, KMK Buyer, and SCF A/P*
Collateral:	*Collateral related to KMK facilities Construction.*

During the loan period, there are matters not allowed to be carried on as stated in the covenants namely, declaration of bankruptcy of the debtor to the Commercial Court and enter into transactions with affiliated parties and third parties outside the aspect of fairness.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil.

Balance of cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to nil, respectively.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil.

Payments made of cash loan facility for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to nil, respectively.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.946.295.376 dan Rp296.115.025.456.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp34,946,295,376 and Rp296,115,025,456, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Jangka Pendek
Berdasarkan Addendum perjanjian kredit Modal Kerja No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.234/2025 tanggal 28 Mei 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dengan persyaratan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Short-term Bank Loans
Based on Addendum Credit Working Capital agreement No. CBG.CB5/SIC2.SPPK.234/2025 dated May 28, 2025, the Company obtain credit facility with the following terms and conditions:

a. Fasilitas KMK Transaksional

Limit Kredit:	Rp95.000.000.000 (Tranche A) Rp95.000.000.000 (Tranche B)
Jangka Waktu:	28 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2026
Tingkat Bunga:	8,50% per tahun (Tranche A) 8,25% per tahun (Tranche B)
Tujuan Penggunaan:	Tambahan modal kerja

a. Transactional of Working Capital Facility

Credit Limit:	*Rp95,000,000,000 (Tranche A)* *Rp95,000,000,000 (Tranche B)*
Time Period:	*May 28, 2025 until June 10, 2026*
Interest Rate:	*8.50% per year (Tranche A)* *8.25% per year (Tranche B)*
Intended Use:	*Additional working capital*

b. Fasilitas *Non-Cash Loan*

Limit Kredit:	Rp900.000.000.000
Jangka Waktu:	28 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2026
Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi *and Letter of Credit* (L/C)

b. Non-Cash Loan Facility

Credit Limit:	*Rp900,000,000,000*
Time Period:	*May 28, 2025 until June 10, 2026*
Intended Use:	*Bank Guarantee and Letter of Credit (L/C)*

c. *Supplier Financing*

Limit Kredit:	Rp300.000.000.000
Jangka Waktu:	28 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2026
Tujuan Penggunaan:	Pembiayaan untuk Pemasok/ Subkontraktor atas dasar akseptasi *Invoice* secara *without recourse*

c. Supplier Financing

Credit Limit:	*Rp300,000,000,000*
Time Period:	*May 28, 2025 until June 10, 2026*
Intended Use:	*Financing for Supplier/ Sub-contractor on the basis of acceptance of invoices without recourse*

d. *Supplier Financing* dengan Jaminan Tunai

Limit Kredit:	Rp100.000.000.000
Jangka Waktu:	28 Mei 2025 sampai dengan 10 Juni 2026
Tujuan Penggunaan:	Pembiayaan untuk Pemasok/ Subkontraktor atas dasar akseptasi *Invoice* secara *without recourse*

d. Supplier Financing with Cash Collateral

Credit Limit:	*Rp100,000,000,000*
Time Period:	*May 28, 2025 until June 10, 2026*
Intended Use:	*Financing for Supplier/ Sub-contractor on the basis of acceptance of invoices without recourse*

Joint collateral dan *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal sebesar 100%, *leverage* maksimal 500%, EBITDA to *interest* minimal sebesar 200%, dan DSCR minimal sebesar 100%. Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp42.000.000.000 dan Rp95.000.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp121.124.603.387 dan Rp53.000.000.000.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp43.445.277.293 dan Rp45.929.158.120.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 108 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional No. COB3/4/037/R tanggal 27 Mei 2025 Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Fasilitas *Cash Loan*

Plafon:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	1 (satu) tahun, Periode tanggal 30 Mei 2025 s/d 29 Mei 2026
Tingkat Bunga:	9,75% per tahun
Jaminan:	Atas piutang usaha, tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara *Cessie*.

b. Fasilitas *Non-Cash Loan*

Plafon:	Rp550.000.000.000
Jangka Waktu:	1 (satu) tahun, Periode tanggal 30 Mei 2025 s/d 29 Mei 2026
Tingkat Bunga:	9,75% per tahun

Joint collateral and cross default with all credit facilities PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

During the period of financing, the Company is required to maintain the financial ratio of the current ratio of at least 100%, maximum leverage of 500%, EBITDA to interest at least 200%, and DSCR at least 100%. Notify in writing to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon changes in working capital and change of management.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Balance of cash loan as of December 31, 2025 and 2024 is amounted to Rp42,000,000,000 and Rp95,000,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp121,124,603,387 and Rp53,000,000,000, respectively.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp43,445,277,293 and Rp45,929,158,120, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Based on Transactional of Working Capital Capital Agreement No. 108 dated May 30, 2016 made in the presence of Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approval of the Extension of Transactional of Working Capital Capital Facility No. COB3/4/037/R dated May 27, 2025 the Company obtained credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, with the following conditions:

a. Cash Loan Facility

Plafond:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*1 (one) year period from May 30, 2025 May 29, 2026*
Interest:	*9.75% per annum*
Warranty:	*The accounts receivable, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie.*

b. Non-Cash Loan Facility

Plafond:	*Rp550,000,000,000*
Time Period:	*1 (one) year period from May 30, 2025 until May 29, 2026*
Interest:	*9.75% per year*

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

Jaminan:	Atas piutang usaha, tagihan bruto dan tagihan termin yang telah diikat secara *Cessie*.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp168.961.743.243 dan nihil.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp31.038.256.757 dan Rp200.000.000.000.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.363.582.893 dan Rp51.244.775.498.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Berdasarkan Addendum perjanjian kredit No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 tanggal 25 April 2018, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Non-Cash Loan* dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut sebagai berikut:

Fasilitas *Non-Cash Loan*	
Limit Kredit:	Rp700.000.000.000
Batas Akhir Pendaftaran:	sampai dengan 31 Januari 2023 dan tidak diperpanjang
Tujuan Penggunaan:	Bank Garansi (*Bid bond*), *Advance Payment* Penggunaan *Bond*, *Performance Bond* dan *Maintenance Bond*
Agunan:	*Cessie* atas tagihan/ piutang usaha *Cash Collateral/* minimal dana tersedia pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perusahaan dapat mendaftarkan proyek yang akan menggunakan fasilitas *non-cash loan* sebelum batas akhir pendaftaran. Setelah batas akhir pendaftaran, Perusahaan melakukan pembayaran atas fasilitas yang digunakan tersebut.

Warranty:	*The accounts receivable, gross amount due from customers, and installment receivables projects in Connective is Cessie.*

The Company shall maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100%.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Payments made for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp168,961,743,243 and nil, respectively.

Balance of cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp31,038,256,757 dan Rp200,000,000,000, respectively.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp7,363,582,893 and Rp51,244,775,498, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Based on Addendum credit agreement No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 dated April 25, 2018, the Company received Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the following terms and conditions:

Non-Cash Loan Facility	
Credit Limit:	*Rp700,000,000,000*
Registration Deadline:	*until January 31, 2023 and not extended*
Intended Use:	*Bank Guarantee (Bid bond), Advance Payment Bond, Performance Bond and Maintenance Bond*
Collateral:	*Cessie on accounts receivables* *Cash Collateral/ minimum fund available in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*

The Company may register projects that will utilise non-cash loan facilities before the registration deadline. After the registration deadline, the Company makes payments for the facilities used.

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100% serta memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

The Company shall maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100% and notifying in writing to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk of changes working capital and replacement of management.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar nihil dan Rp411.418.000.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to nil and Rp411,418,000, respectively.

PT Bank DKI

Berdasarkan SPPK No 1763/SPPK/925/XI/2023 tanggal 6 November 2023, Perusahaan menerima fasilitas kredit *Cash Loan* dan *Non-Cash Loan* dari PT Bank Bank DKI dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PT Bank DKI

Based on SPPK No 1763/SPPK/925/XI/2023 dated November 6, 2023, the Company received Cash Loan and Non-Cash Loan credit facility from PT Bank DKI with the following terms and conditions:

a. Fasilitas *Non-Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp200.000.000.000
Jangka Waktu:	7 November 2023 – 7 November 2025
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor
Agunan:	Rasio kecukupan nilai jaminan setiap saat harus bernilai 100% dari jumlah fasilitas terutang pada bank

a. Non-Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp200,000,000,000*
Time Period:	*November 7, 2023 until November 7, 2025*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*
Collateral:	*The adequacy ratio of the collateral value must be worth 100% of the total facility owed to the bank at any time*

b. Fasilitas *Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp50.000.000.000
Jangka Waktu:	7 November 2023 – 7 November 2025
Tingkat Bunga:	9,25% p.a
Provisi:	0,50% p.a
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap *supplier* dari obligor

b. Cash Loan Facility:

Credit Limit:	*Rp50,000,000,000*
Time Period:	*November 7, 2023 until November 7, 2025*
Interest:	*9.25% p.a*
Provision:	*0.50% p.a*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100%.

The Company required to maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 1 time; Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 4 times and Debt Service Coverage of at least 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp22.000.000.000.

Balance of cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to nil and Rp22,000,000,000, respectively.

Pembayaran fasilitas *cash loan* yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp47.800.000.000.

Payments made for cash loan for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to nil and Rp47,800,000,000.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.000.000.000 dan Rp40.855.078.357.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp22,000,000,000 and Rp40,855,078,357, respectively.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Berdasarkan Surat No. 04/130-3/SP3/CB2 Tanggal 23 Oktober 2024 Perusahaan menerima fasilitas kredit *non-cash loan* dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Based on Letter No. 04/130-3/SP3/CB2 dated October 23, 2024 the Company received non-cash loan credit facility from PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Tbk with terms and conditions as follows:

a. Fasilitas *Non-Cash Loan*:

Limit Kredit:	Rp 400.000.000.000
Jangka Waktu:	23 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2026
Tujuan Penggunaan:	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

a. *Non-Cash Loan Facility:*

Credit Limit:	*Rp400,000,000,000*
Time Period:	*October 23, 2024 until October 23, 2026*
Intended Use:	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

b. Fasilitas *Cash Loan*:

Limit Kredit	Rp300.000.000.000
Jangka Waktu:	23 Oktober 2024 sampai dengan 23 Oktober 2026
Tujuan Penggunaan	Untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan melalui pembiayaan terhadap supplier dari obligor

b. *Cash Loan Facility:*

Credit Limit	*Rp300,000,000,000*
Time Period:	*October 23, 2024 until October 23, 2026*
Intended Use	*For the Company's working capital needs through financing the obligor supplier*

Selama masa pembiayaan Perusahaan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: Current Ratio minimal 100%, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 300%, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) min 100%.

The Company required to maintain financial performance indicators as follows: Current Ratio of at least 100%, Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 300% and Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2025, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

Saldo *cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp55.000.000.000.

Balance of cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to nil and Rp55,000,000,000, respectively.

Saldo *non-cash loan* per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp24.077.146.960 dan Rp29.333.064.905.

Balance of non-cash loan as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp24,077,146,960 and Rp29,333,064,905, respectively.

Pembayaran fasilitas cash loan yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.000.000.000 dan Rp119.886.818.225.

Payments made for cash loan for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp55,000,000,000 and Rp119,886,818,225, respectively.

44. Kontinjensi / *44. Contingencies*

Gugatan Perusahaan kepada PT Maju Gemilang Serpong terkait Wanprestasi melalui BANI

Perusahaan membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Mengadakan Arbitrase dan/atau Permohonan Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Jakarta terhadap PT Maju Gemilang Serpong, sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Maju Gemilang Serpong atas Surat Perjanjian Kerja No. B-Residence-040/SPK/MGS/III/17 tanggal 6 April 2017 tentang Proyek Apartemen B Residence, Serpong atas Pekerjaan Struktur dan *Plumbing.*

The Company's lawsuit against PT Maju Gemilang Serpong regarding Default through BANI

The Company made, signed and submitted an Request for Arbitration and / or Statement of Claim at the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") Jakarta against PT Maju Gemilang Serpong, in connection with the default action committed by PT Maju Gemilang Serpong on the Work Agreement Letter No. B-Residence-040 / SPK / MGS / III / 17 dated April 6, 2017 concerning the B Residence Apartment Project, Serpong for Structural and Plumbing Work.

Adapun terhadap Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud di atas, telah diputus yang pada intinya menyatakan Pekerjaan Perseroan telah selesai dan menghukum Termohon Arbritase untuk mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp15.000.990.733.

As for the request of arbitration stated above, a verdict has been issued. The verdict states that the Company has already completed the project and punishes the defendant to pay the Company Rp15.000.990.733 worth of loss.

Selanjutnya, terhadap Putusan Arbritase sebagaimana pada Paragraf 2 di atas, PT Maju Gemilang Serpong mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI No.43031/V/ARB-BANI/2020 tertanggal 6 April 2021, sebagaimana perkara No: 444/Pdt.Sus.Arbi/2021/PN.Jkt.Brt, yang mana pada intinya menguatkan Putusan BANI tersebut ("Putusan Pembatalan").

Furthermore, regarding Arbitrary Verdict stated in the second paragraph above, PT Maju Gemilang Serpong submitted verdict revocation against BANI No.43031/V/ARB-BANI/2020 dated April 6, 2021, as for the case No: 444/Pdt.Sus.Arbi/2021/PN.Jkt.Brt, that affirms the BANI verdict ("Revocation Verdict").

Selanjutnya, berdasarkan penetapan No.42/Eks.Arb/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Tangerang sedang dalam proses sita eksekusi dan pelelangan atas aset PT Maju Gemilang Serpong.

Furthermore, regarding resolution No.42/Eks.Arb/2022/PN.Jkt.Brt dated August 25, 2023, Civil Court of Tangerang is in process of seizure and auction of assets belong to PT Maju Gemilang Serpong.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan masih menunggu putusan atas proses sita eksekusi dan pelelangan atas asset PT Maju Gemilang Serpong.

For the year ended December 31, 2025, the Company is still waiting for the verdict on the process of seizure and auction of assets belong to PT Maju Gemilang Serpong.

Gugatan Perusahaan kepada PT Trans Retail Indonesia terkait Penyelesaian Piutang *Outstanding* melalui PKPU

Perusahaan telah mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Trans Retail Indonesia pada tanggal 15 Februari 2022 sehubungan dengan tindakan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

The Company's lawsuit against PT Trans Retail Indonesia Related to the Settlement of Outstanding Receivables through PKPU

The Company has submitted a PKPU application against PT Trans Retail Indonesia on February 15, 2022 in connection with the postponement of the obligation to pay debts with No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada tanggal 1 April 2022, Perusahaan mencabut permohonan PKPU tersebut dan menyepakati skema penyelesaian piutang yang diajukan oleh PT Trans Retail Indonesia. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, PT Trans Retail Indonesia telah menyelesaikan sebagian besar kewajibannya kepada Perusahaan.

On April 1, 2022, the Company withdrew the PKPU application and agreed to the receivables settlement scheme proposed by PT Trans Retail Indonesia. For the year ended December 31, 2023, PT Trans Retail Indonesia has completed most of its obligations to the Company.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT Trans Retail Indonesia telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perusahaan.

As of publishment date of consolidated financial statements, PT Trans Retail Indonesia has completed all its obligations to the Company.

Gugatan Perusahaan kepada PT Alumindo Cipta Persada terkait Wanprestasi
Pada 3 Maret 2023, Perusahaan menggugat PT Alumindo Cipta Persada kepada PN Jakarta Selatan atas wanprestasi yang dilakukan pemberi kerja dengan nilai tagihan sebesar Rp14.535.482.220.

The Company's lawsuit against PT Alumindo Cipta Persada related to Contract Default
In March 3, 2023, the Company filed lawsuit against PT Alumindo Cipta Persada to South Jakarta Civil Court regarding default of contract from project owner with due amount of Rp14,535,482,220.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, PT Alumindo Cipta Persada mengajukan kasasi dengan putusan bahwa Perusahaan diminta untuk memperbaiki mutu dan spesifikasi teknis pelat, balok, dan balok pondasi/ *pile cap* Proyek Mangga Besar Town Square.

For the year ended December 31, 2025, PT Alumindo Cipta Persada filed an appeal with the ruling that the Company was required to improve the quality and technical specifications of the plates, beams, and foundation beams/ pile caps for the Mangga Besar Town Square Project.

Saat ini, Perusahaan sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan Upaya hukum peninjauan kembali.

Currently, the Company is in the process of preparing for a judicial review.

Pemberi Kerja yang Berstatus Pailit
Pada tanggal 31 Oktober 2024, PT Dago Trisinergi Properti ("PT DTP") selaku pengembang proyek The Maj Collections telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan ini diambil menyusul gugatan yang diajukan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Bankruptcy of PT Dago Trisinergi Properti
On October 31, 2024, PT Dago Trisinergi Properti ("PT DTP"), the developer of The Maj Collections project, was officially declared bankrupt by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. This decision was a result of a lawsuit filed by PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah).

Sehubungan dengan Putusan Pailit tersebut, Perusahaan telah mengajukan tagihan kepada PT DTP, dan tagihan dimaksud telah diverifikasi pada tanggal 12 Desember 2024.

In connection with the bankruptcy ruling, the Company has submitted a claim against PT DTP, which was verified on December 12, 2024.

Adapun tindak lanjut atas verifikasi tersebut adalah pelaksanaan Rapat seluruh Kreditur PT Dago Trisinergi Properti dalam rangka *going concern* sebagai tindaklanjut dari rapat kreditur tanggal 8 Oktober 2025 dengan agenda pengenalan calon investor.

Following this verification, a meeting of all creditors of PT Dago Trisinergi Properti in the context of going concern as a follow-up to the creditors' meeting on October 8, 2025, with the agenda of introducing potential investors.

Proses-proses ini pun merupakan bagian dari upaya manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan terkait kepailitan dimaksud terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

These processes are part of management's efforts to ensure that all activities related to the bankruptcy are carried out in accordance with applicable legal provisions.

Sengketa Perusahaan kepada PT Indraco terkait Wanprestasi
Perusahaan membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Surabaya terhadap PT Indraco, sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase yang diajukan oleh PT Indraco atas Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Suncity Residence Apartemen No. 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

The Company's Lawsuit against PT Indraco Regarding Default
The Company has prepared, signed, and submitted a Counterclaim to the Indonesian National Board of Arbitration ("BANI") Surabaya against PT Indraco in relation to the Request for Dispute Resolution through Arbitration filed by PT Indraco concerning the Construction Contract Agreement for the Suncity Residence Apartment Project, No. 0302/LGL/IDR-SCP/SDA/V/2019 dated May 17, 2019.

Adapun terhadap Gugatan Rekonvensi sebagaimana dimaksud di atas, telah diputus oleh BANI Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Perusahaan berhak atas nilai pembayaran dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk melakukan pembayaran total sebesar Rp50.062.530.255.

With respect to the Counterclaim as mentioned above, BANI Surabaya rendered its decision on March 25, 2022, essentially stating that the Company is entitled to the payment amount and ordering the Respondent in the Counterclaim to make a total payment of Rp50,062,530,255.

Selanjutnya, terhadap Putusan BANI sebagaimana pada Paragraf 2 di atas, PT Indraco mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI No. 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 tertanggal 25 Maret 2022 ("Putusan BANI"), sebagaimana perkara Nomor: 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, yang mana pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan Putusan BANI tersebut ("Putusan Pembatalan").

Subsequently, with respect to the BANI Decision as mentioned in Paragraph 2 above, PT Indraco filed a request for the annulment of BANI Decision No. 56/ARB/BANI-SBY/V/2021 dated March 25, 2022 ("BANI Decision"), as registered under Case No. 283/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, which the East Jakarta District Court ultimately annulled the BANI Decision ("Annulment Decision").

Selanjutnya, terhadap Putusan Pembatalan tersebut, Perusahaan mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana perkara No.258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, yang pada intinya membatalkan Putusan Pembatalan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menguatkan Putusan BANI.

Subsequently, in response to the Annulment Decision, the Company filed a Petition for Cassation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia, registered under Case No. 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023, which ultimately annulled the Annulment Decision from East Jakarta District Court and upheld the BANI Decision.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT Indraco telah melakukan pembayaran Total Kewajiban sebesar Rp10.103.040.000 secara tunai, dan sebesar Rp14.965.086.579 secara penyerahan asset tanah yang berlokasi di Sekotong, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sehingga sisa dari Total Kewajiban PT Indraco yang belum selesai adalah Rp25.034.913.421, yang diusulkan diselesaikan melalui set off aset tanah yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan saat ini sedang dalam proses penilaian oleh konsultan penilai publik.

As of the date of publication of the consolidated financial stpatements, PT Indraco has paid a total liability of Rp10,103,040,000 in cash and Rpp14,965,086,579 in the form of land assets located in Sekotong, Lombok, West Nusa Tenggara. leaving PT Indraco with outstanding Total Liabilities of Rp25,034,913,421, which it proposes to settle through a set-off of land assets located in Pasuruan Regency, East Java, currently being appraised by a public appraisal consultant.

45. Manajemen Risiko Keuangan / *45. Financial Risk Management*

Grup memandang bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Seiring bahwa keberhasilan usaha juga ditentukan oleh efektivitas pengelolaan risiko, Grup terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko melalui pendekatan yang proaktif.

The Group perceives that risk is by nature an indivisible part of business operation. Realizing that business success is also determined on the effectivity of risk management, therefore the Group continually strives to improve its risk management capability through proactive and systematic approach.

Grup telah mengidentifikasi risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah sebagai berikut:

The Group identified the main financial risk facing the Group as follows:

Risiko Kredit
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Credit Risk
Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, tagihan bruto pemberi kerja, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, gross amount due from customers trade, retention receivables and other accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties.

Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan pihak lawan yang di reviu dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Sebagian besar kewajiban dalam mata uang Rupiah, karena itu Grup tidak terekspos secara signifikan.

Foreign Exchange Risk
Most of the liabilities are denominated in rupiah, thus the Group is not expose significantly.

Grup menggunakan bahan baku dalam negeri serta mengerjakan dan akan terus mengembangkan proyek berlokasi di dalam negeri, sehingga dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

The Group use local raw materials as well as work and continue to develop projects that are located in the country, thus the effect of changes in foreign exchange rates are not significant.

Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank yang digunakan untuk modal kerja dan investasi.

Interest Rate Risk
Interest rate risk of the cash flows is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuates due to changes in market interest rates. Current exposure mainly comes from bank loans, which are use for working capital and investment. Policies taken by management in anticipation of

Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan tingkat suku bunga dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survey diperbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

interest rate risk is to evaluate periodically the interest rate with the change in relevant interest rates in the market. Management also conducted a survey in bank in to get an estimate of the relevant interest rates.

Rincian utang bank per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of bank loan payable as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pinjaman Bank	148,684,256,757	457,063,600,000	*Bank Loan*

Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba sebelum pajak dengan semua variabel lain tetap:

Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income before tax with all other variables constant:

	2025 Rp	2024 Rp	
Naik 100 bps	1,486,842,568	4,570,636,000	*Increase 100 bps*
Turun 100 bps	(1,486,842,568)	(4,570,636,000)	*Decrease 100 bps*

Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku
Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya untuk suatu proyek, estimasi biaya mengacu kepada informasi dari pemasok dan juga proyek sejenis yang pernah ditangani.

The Price Increase Risk and Availability of Materials
In the Budget Plan for the project, the estimated costs refer to the information from suppliers as well as similar projects handled.

Hal ini tidak menjamin bahwa estimasi tersebut tepat. Risiko kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi peningkatan beban pokok penjualan yang jika tidak diimbangi efisiensi maka dapat berakibat secara negatif pada laba kotor Grup.

This does not guarantee that the estimate is correct. The risk of increase in prices of raw material will affect the increase in cost of revenue which if not offset with efficiency it could result negatively on the Group's gross profit.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko Grup tidak dapat memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk when the Group is unable to meet liabilities as they fall due.

Grup memonitor secara ketat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.

The Group closely monitors cash inflows and outflows to ensure the availability of funds to meet the needs of liability payments that are due.

Berikut ini adalah ikhtisar umur liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following is the summary of aging of financial liabilities based on undiscounted contractual payments:

	2025			
	<1 tahun/ *year*	>1 tahun/ *year*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	73,038,256,757	--	73,038,256,757	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	835,966,161,583	149,598,678,164	985,564,839,747	*Trade Payables*
Beban Akrual	284,811,981,173	--	284,811,981,173	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	42,905,606,832	--	42,905,606,832	*Other Payable*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	75,646,000,000	--	75,646,000,000	*Long-term Bank Loans*

	2024			
	<1 tahun/ *year*	>1 tahun/ *year*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	372,000,000,000	--	372,000,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	1,404,585,746,108	253,649,530,507	1,658,235,276,615	*Trade Payables*
Beban Akrual	356,409,528,252	--	356,409,528,252	*Accrued Expenses*
Utang Lain-lain	40,322,215,697	--	40,322,215,697	*Other Payable*
Pinjaman Bank Jangka Panjang	9,417,600,000	75,646,000,000	85,063,600,000	*Long-term Bank Loans*

Risiko Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas, Selain itu, Grup juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipertimbangkan oleh Perusahaan serta telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit *(gearing ratio),* dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari Perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Termasuk dalam total pinjaman berdampak bunga adalah pinjaman bank jangka pendek.

Rasio *gearing* pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Capital Management

The primary objective of the capital management of the Group is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Group required under its respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities, In addition, the Group is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities to allocate and maintain a reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considere by the Company decided at the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS).

The Group manages its capital structure and adjusts it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payments to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No change made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2025 and 2024.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing interest-bearing loan to total equity attributable to owners of the parent. The Group's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. Including in interest bearing loan are short-term bank loans.

The gearing ratios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
Pinjaman	148,684,256,757	457,063,600,000	*Loan*
Jumlah Ekuitas	1,971,247,545,457	2,605,970,877,669	*Total Equity*
Rasio *Gearing*	**7.54%**	**17.86%**	***Gearing Ratio***

46. Aset dan Liabilitas Keuangan / *46. Financial Asset and Liabilities*

Grup memiliki berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja piutang yang belum ditagih, penyertaan saham dan piutang lain-lain. Liabilitas keuangan pokok Perusahaan terdiri dari pinjaman bank, utang usaha, beban akrual dan utang lain-lain.

The Group has various financial assets such as cash and cash equivalents, trade receivables, retention receivables, gross amount due from customers, unbilled receivables, investment in shares and other receivables. Basic financial liabilities company consisting of bank loans, trade payables, accrued expenses and other payables.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan posisi keuangan:

The following table sets forth the carrying values and estimates fair value of The Group's financial instruments that are carried in the consolidated statement of financial position:

	2025		2024		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	
Aset Keuangan Lancar					***Current Financial Assets***
Kas dan setara kas	391,127,569,575	391,127,569,575	1,030,732,161,959	1,030,732,161,959	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	235,485,396,316	235,485,396,316	545,160,626,507	545,160,626,507	*Trade receivable - net*
Piutang retensi - neto	335,093,151,918	335,093,151,918	559,956,210,969	559,956,210,969	*Retention receivable - net*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja	264,093,683,496	264,093,683,496	436,519,825,996	436,519,825,996	*Gross Amount Due From Custoemers*
Piutang Yang Belum Ditagih	7,535,206,405	7,535,206,405	9,360,579,793	9,360,579,793	*Unbilled Receivables*
Jumlah Aset Keuangan Lancar	**1,233,335,007,710**	**1,233,335,007,710**	**2,811,025,282,156**	**2,811,025,282,156**	***Total Current Financial Assets***
Aset Keuangan Tidak Lancar					***Non Current Financial Assets***
Penyertaan saham	3,546,062,692	3,546,062,692	3,546,062,692	3,546,062,692	*Investment in Shares*
Piutang lain-lain - neto	112,848,670,973	112,848,670,973	166,880,513,529	166,880,513,529	*Other Receivable - net*
Jumlah Aset Keuangan Tidak Lancar	**116,394,733,665**	**116,394,733,665**	**146,253,867,026**	**146,253,867,026**	***Total Non Current Financial Assets***
Jumlah Aset Keuangan	**1,349,729,741,375**	**1,349,729,741,375**	**2,957,279,149,182**	**2,957,279,149,182**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek					***Short-term Financial Liabilities***
Pinjaman Bank Jangka Pendek	73,038,256,757	73,038,256,757	372,000,000,000	372,000,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	985,564,839,747	985,564,839,747	1,658,235,276,615	1,658,235,276,615	*Trade Payable*
Beban Akrual	284,811,981,173	284,811,981,173	356,409,528,252	356,409,528,252	*Accrued Expenses*
Utang Lain Lain	42,905,606,832	42,905,606,832	40,322,215,697	40,322,215,697	*Other Payable*
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang	--	--	9,417,600,000	9,417,600,000	*Current Portion of Long Term Bank Loans*
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	**1,386,320,684,509**	**1,386,320,684,509**	**2,436,384,620,564**	**2,436,384,620,564**	***Total Short-term Financial Liabilities***
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang					***Long-term Financial Liabilities***
Pinjaman Bank Jangka Panjang	75,646,000,000	75,646,000,000	85,063,600,000	85,063,600,000	*Long Term Bank Loans*
Jumlah Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	**75,646,000,000**	**75,646,000,000**	**85,063,600,000**	**85,063,600,000**	***Total Long-term Financial Liabilities***
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1,461,966,684,509**	**1,461,966,684,509**	**2,146,001,435,464**	**2,146,001,435,464**	***Total Financial Liabilities***

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut:

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument which is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

- Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi, aset tidak lancar lainnya, pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual). Instrumen keuangan ini sangat mendekati nilai tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities:

- *Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash and cash equivalens, trade receivables, due from related parties, other non-current assets, short term loan, trade payables, other payables and accrued expenses). These financial instruments approximate to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.*

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap dan variabel (liabilitas jangka panjang yang tidak dikuotasikan).
  Nilai wajar liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang dengan menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Aset keuangan jangka panjang lainnya (piutang lain-lain).
  Estimasi nilai wajar didasarkan pada nilai diskonto dari arus kas masa datang yang disesuaikan untuk mencerminkan risiko pihak lawan (untuk aset keuangan) dan risiko kredit Grup (untuk liabilitas keuangan) dan menggunakan suku bunga bebas risiko *(risk-free rates)* dari instrumen yang serupa.

Kas dan setara kas, piutang retensi, piutang lain-lain dan aset lain-lain, seluruh aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.

Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain- lain, seluruh kewajiban keuangan tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan dari kewajiban keuangan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Berikut hierarki nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang pada akhir tahun/ periode dicatat menggunakan nilai wajar, yaitu:

Long-term financial assets and liabilities:

- *Long-term fixed-rate and variable-rate financial liabilities (unquoted long-term liabilities).*

  The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- *Other long-term financial assets (other receivables).*
  Estimated fair value is based on discounted value of future cash flows adjusted to reflect counterparty risk (for financial assets) and the Group's own credit risk (for financial liabilities) and using risk-free rates for similar instruments.

Cash and cash equivalents, retention receivables, other receivables and other assets, all financial assets are short- term financial assets that will mature in 12 months so that the carrying value of financial assets reflected in the fair value of financial assets.

Trade payables, accrued expenses and other payables, all noted that financial liability is a short-term obligations that will mature in 12 months so that the carrying value of financial assets has been reflected from the financial obligations.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

The following is the fair value hierarchy of financial assets measured at fair value through other comprehensive income which at the end of the year/ period is recorded using fair value, namely:

	2025 Rp	Tingkat I/ *Level I* Rp	Tingkat II/ *Level II* Rp	Tingkat III/ *Level III* Rp
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Penghasilan Komprehensif Lain/ *Financial Assets Through Other Comprehensive Income*				
Penyertaan Saham/ *Investment in Shares*				
PT Patra Wijaya Realtindo	125,000,000,000	--	--	125,000,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	2,296,062,692

	2024 Rp	Tingkat I/ *Level I* Rp	Tingkat II/ *Level II* Rp	Tingkat III/ *Level III* Rp
Aset Keuangan yang Diukur Dengan Penghasilan Komprehensif Lain/ *Financial Assets Through Other Comprehensive Income*				
Penyertaan Saham/ *Investment in Shares*				
PT Patra Wijaya Realtindo	125,000,000,000	--	--	125,000,000,000
PT Wijaya Karya Bitumen	2,296,062,692	--	--	2,296,062,692

47. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Penarikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Berdasarkan Surat Permohonan Penarikan Kredit Modal Kerja Transaksional Tranche B Nomor KU.02.01/A.DIR.00020.WEGE/2026 tanggal 29 Januari 2026 dan Surat Permohonan Penarikan Kredit Nomor KU.02.01/A.DIR.00027.WEGE/2026 tanggal 2 Februari 2026, Perusahaan telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman masing-masing senilai Rp55.993.180.390 dan Rp10.371.491.929.

Pembayaran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pada tanggal 23 Februari 2026 dan 6 Maret 2026, Perusahaan melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing senilai Rp1.400.000.000 dan Rp11.221.491.929.

47. Events After the Reporting Period

Withdrawal of Short-term Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Based on the Application Letters for Withdrawal of Transactional Working Capital Credit Tranche B No. KU.02.01/A.DIR.00020.WEGE/2026 dated January 29, 2026, and the Credit Withdrawal Application Letters No. KU.02.01/A.DIR.00027.WEGE/2026 dated February 2, 2026, the Company has drawn down loan facilities amounting to Rp55,993,180,390 and Rp10,371,491,929, respectively.

Payment of Short-term Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
On February 23, 2026 and March 6, 2026, the Company made repayments on its short-term loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp1,400,000,000 and Rp11,221,491,929, respectively.

48. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:
- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;

48. New Accounting Standard and Interpretation of Standards Issued but Not Yet Effective

New standards and amendments to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early adoption is permitted, are as follows:
- *Amendments PSAK 109 and PSAK 107 regarding Classification and Measurement of Financial Instruments;*

- Penyesuaian Tahunan PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; dan
- Revisi PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali terkait ruang lingkup dan penerapan metode penyatuan kepemilikan.

- *Annual Improvements on PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207; and*
- *Revised PSAK 338: Business Combination of Entity Under Common Control regarding the scope and application of the method of pooling of interest.*

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:
- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- PSAK 119 : Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan;
- Revisi PSAK 401: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah;
- ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah Yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah;
- PSAK 413: Penurunan Nilai; dan
- PSAK 414: Penurunan Nilai Aset Keuangan Syariah bagi Entitas yang Menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP).

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:
- *PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements;*
- *PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Amendment PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures;*
- *Revised PSAK 401: Presentation and Disclosure in Sharia Financial Statements;*
- *ISAK 403: Components of Financial Reports of Sharia Entities That Apply Indonesian SAK for Private Entities and Indonesian SAK for Micro, Small, and Medium Entities;*
- *PSAK 413: Impairment; and*
- *PSAK 414: Impairment of Sharia Financial Assets for Entities Implementing Indonesian SAK for Private Entities (SAK EP).*

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

49. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

49. Supplementary of Financial Information on The Consolidated Financial Statements

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir (Lampiran 1-5), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying financial information (Attachments 1-5) of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2025 and 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2025 and 2024, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

50. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa Grup akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mencatat rugi bersih sebesar Rp630.249.799.470, arus kas operasional negatif sebesar Rp435.148.798.872, dan pinjaman bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 sebesar Rp75.646.000.000. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, manajemen telah mengambil tindakan-tindakan dan rencana-rencana untuk mengatasi isu kelangsungan usaha melalui, yang antara lain meliputi, langkah-langkah sebagai berikut:

1. Proses pemilihan proyek yang lebih selektif dengan memilih proyek dengan pembayaran secara bulanan;
2. Meningkatkan pengendalian internal atas PDPK sehingga dapat menghindari saldo PDPK yang signifikan; dan
3. Menyelesaikan proyek yang belum selesai sampai dengan tahun 2026.

Manajemen berkeyakinan bahwa kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dapat diatasi melalui langkah-langkah tersebut di atas.

Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin harus dilakukan yang berasal dari kondisi ketidakpastian tersebut.

50. Going Concern

The consolidated financial statements have been prepared assuming that the Group will continue to operate as an entity that is able to maintain a going concern status. As of December 31, 2025 the Group recorded a net loss amounting to Rp630,249,799,470, negative operating cash flows amounting to Rp435,148,798,872, and bank loan due in 2026 amounting to Rp75,646,000,000. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Group's ability to continue as a going concern.

In relation to such matters, management has taken actions and plans to mitigate this going concern issue through the following steps, which include, among others:

1. *More selective project selection process by choosing projects with monthly payment;*
2. *Strengthening internal control over PDPK to avoid significant PDPK balances; and*
3. *Completing unfinished projects by 2026.*

Management believes that the Group's ability to continue as a going concern can be achieved through implementation of the above steps.

The consolidated financial statements do not include any adjustments that might result from the outcome of this uncertainty.

51. Pertanggungjawaban Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 27 Maret 2026.

51. Management Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized by the Directors for issuance on March 27, 2026.

LAMPIRAN 1 | ***ATTACHMENT 1***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	388,410,261,357	1,025,417,332,744	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha - Neto			*Trade Receivables - Net*
Pihak Berelasi	167,634,018,205	263,199,908,162	*Related Parties*
Pihak Ketiga	67,685,169,204	281,933,265,667	*Third Parties*
Piutang Retensi - Neto			*Retention Receivables - Net*
Pihak Berelasi	118,369,075,407	161,712,929,070	*Related Parties*
Pihak Ketiga	216,724,076,511	398,243,281,899	*Third Parties*
Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja			*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	130,489,978,709	195,121,768,324	*Related Parties*
Pihak Ketiga	133,603,704,787	241,398,057,672	*Third Parties*
Piutang Yang Belum Ditagih	7,540,736,405	9,360,579,793	*Unbilled Receivables*
Persediaan	306,086,847,338	350,027,596,576	*Inventories*
Pajak Dibayar di Muka	399,650,121,495	330,644,741,319	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	83,815,231,549	124,034,728,295	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	126,644,128,485	213,923,413,531	*Prepaid Expenses*
Pekerjaan dalam Proses Konstruksi			*Construction Work in Progress*
Pihak Berelasi	290,283,809,397	393,238,453,533	*Related Parties*
Pihak Ketiga	549,183,978,820	419,248,403,826	*Third Parties*
Jumlah Aset Lancar	**2,986,121,137,669**	**4,407,504,460,411**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang Lain-Lain			*Other Receivables*
Pihak Berelasi	240,485,849,056	284,729,225,791	*Related Parties*
Pihak Ketiga	103,490,614	20,952,979	*Third Parties*
Tanah Akan Dikembangkan	66,726,550,000	46,677,650,000	*Land For Development*
Penyertaan Saham	3,546,062,692	3,546,062,692	*Investment in Shares*
Penyertaan pada Entitas Anak	22,500,000,000	22,500,000,000	*Investment in Subsidiaries*
Properti Investasi	259,571,775,000	259,413,425,000	*Investment Property*
Aset Lain-lain	200,000,000	--	*Other Assets*
Aset Kerja Sama	81,451,115,321	86,792,172,065	*Assets of Co-operation*
Aset Tetap - Setelah Dikurangi			*Fixed Assets - Net of*
Akumulasi Penyusutan	38,940,322,642	47,475,979,663	*Accumulated Depreciation*
Aset Takberwujud- Setelah Dikurangi			*Intangible Assets - Net of*
Akumulasi Penyusutan	9,091,266,260	13,527,567,059	*Accumulated Depreciation*
Investasi pada Entitas Asosiasi	--	18,236,878,682	*Investment in Associate*
Investasi pada Ventura Bersama	335,323,623,833	519,352,569,206	*Investment of Joint Ventures*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1,057,940,055,418**	**1,302,272,483,137**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET	**4,044,061,193,087**	**5,709,776,943,548**	***TOTAL ASSETS***

LAMPIRAN 1
(Lanjutan)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT 1
(Continued)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Pinjaman Bank Jangka Pendek			*Short-term Bank Loans*
Pihak Berelasi	73,038,256,757	350,000,000,000	*Related Parties*
Pihak Ketiga	--	22,000,000,000	*Third Parties*
Utang Usaha			*Trade Payables*
Pihak Berelasi	159,299,400,560	473,717,438,934	*Related Parties*
Pihak Ketiga	825,857,119,368	1,184,125,934,472	*Third Parties*
Beban Akrual	292,927,629,730	344,781,876,171	*Accrued Expenses*
Utang Pajak	18,484,157,685	7,861,920,437	*Tax Payables*
Liabilitas Pajak Penghasilan Final	41,427,549,056	47,860,115,224	*Final Income Tax Liabilities*
Liabilitas Jangka Pendek Yang			
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun			*Current Portion of Long Term Liability -*
Uang Muka Pemberi Kerja dan			*Advances from Project*
Konsumen	15,801,321,949	15,823,599,517	*Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	75,646,000,000	9,417,600,000	*Bank Loan*
Utang pada Ventura Bersama	201,415,515,598	--	*Joint Venture Payable*
Utang Lain-lain			*Other Payables*
Pihak Berelasi	39,544,320,329	36,899,710,813	*Related Parties*
Pihak Ketiga	3,361,286,503	3,422,504,884	*Third Parties*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1,746,802,557,535**	**2,495,910,700,452**	***Total Current Liabilites***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi			*Long-term Liability Net of*
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun			*Current Maturities*
Uang Muka Pemberi Kerja dan			*Advances from Project*
Konsumen	300,344,825,373	507,541,582,961	*Owners and Consumers*
Pinjaman Bank	--	75,645,999,999	*Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Kerja	24,482,589,254	22,759,500,319	*Employee Benefit Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**324,827,414,627**	**605,947,083,279**	***Total Non Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**2,071,629,972,162**	**3,101,857,783,731**	***TOTAL LIABILITES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada			***Equity Attributable to***
Pemilik Entitas Induk			***Owner of the Parent Entity***
Modal Saham - Nilai Nominal Rp100			*Share Capital-par value Rp100*
Modal Dasar 38.000.000.000 saham			*Authorized Capital 38,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor -			*Issued and Paid Up Capital*
9.572.000.000 saham	957,200,000,000	957,200,000,000	*9,572,000,000 shares*
Tambahan Modal Disetor	524,082,899,858	524,082,899,858	*Additional Paid In Capital*
Saldo Laba			*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	172,324,647,000	165,528,527,000	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	322,589,185,229	967,195,831,379	*Unappropriated*
Penghasilan Komprehensif Lainnya	(3,765,511,162)	(6,088,098,420)	*Other Comprehensive Income*
JUMLAH EKUITAS	**1,972,431,220,925**	**2,607,919,159,817**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4,044,061,193,087**	**5,709,776,943,548**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

LAMPIRAN 3

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT 3

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (PARENT)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
PENDAPATAN	1,592,744,592,233	3,644,557,606,685	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1,451,445,912,030)	(3,340,566,164,159)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**141,298,680,203**	**303,991,442,526**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	(187,452,286,288)	(114,423,879,780)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lainnya	158,424,892,008	135,900,363,473	*Other Income*
Beban Lainnya	(558,536,093,766)	(231,322,592,048)	*Other Expenses*
Beban Keuangan	(17,524,477,333)	(28,254,570,874)	*Financial Expense*
Beban Pajak Penghasilan Final	(36,043,482,752)	(93,554,137,222)	*Final Income Tax Expenses*
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(18,236,878,682)	(4,790,231,331)	*Share in Loss on Associate*
Bagian Laba (Rugi) Ventura Bersama	(112,953,068,293)	99,664,321,780	*Share in Profit (Loss) on Joint Venture*
Laba (Rugi) Selisih Kurs	8,308,753	56,682,663	*Foreign Exchange Gain (Loss)*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(631,014,406,150)**	**67,267,399,187**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	--	--	***INCOME TAX EXPENSES***
LABA NETO TAHUN BERJALAN	**(631,014,406,150)**	**67,267,399,187**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			***OTHER COMPREHENSIVE LOSS AFTER TAX***
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			***Item that will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	2,322,587,258	(11,352,907,510)	*Remeasurement on Defined Benefit Plans*
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(628,691,818,892)**	**55,914,491,677**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

LAMPIRAN 4

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT 4

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (PARENT)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor / *Subscribed and Paid-In Capital* Rp	Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital* Rp	Saldo Laba / *Retained Earnings*		Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*		Jumlah Ekuitas / *Total Equity* Rp	
			Ditentukan Penggunaannya / *Appropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya / *Unappropriated* Rp	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbalan Pasti / *Actuarial Gain (Loss) of Defined Benefits Plans* Rp	Keuntungan Atas Nilai Pasar Saham / *Gain on Share Market Value* Rp		
Saldo per 31 Desember 2023	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**160,828,527,000**	**914,008,992,192**	**5,049,322,156**	**215,486,934**	**2,561,385,228,140**	***Balance as of December 31, 2023***
Dividen	--	--	--	(9,380,560,000)	--	--	(9,380,560,000)	*Dividends*
Cadangan	--	--	4,700,000,000	(4,700,000,000)	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	67,267,399,187	(11,352,907,510)	--	55,914,491,677	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2024	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**165,528,527,000**	**967,195,831,379**	**(6,303,585,354)**	**215,486,934**	**2,607,919,159,817**	***Balance as of December 31, 2024***
Dividen	--	--	--	(6,796,120,000)	--	--	(6,796,120,000)	*Dividends*
Cadangan	--	--	6,796,120,000	(6,796,120,000)	--	--	--	*Reserve*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	--	--	--	(631,014,406,150)	2,322,587,258	--	(628,691,818,892)	*Total Comprehensive Income for the Current Year*
Saldo per 31 Desember 2025	**957,200,000,000**	**524,082,899,858**	**172,324,647,000**	**322,589,185,229**	**(3,980,998,096)**	**215,486,934**	**1,972,431,220,925**	***Balance as of December 31, 2025***

LAMPIRAN 5 | ***ATTACHMENT 5***

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
(PARENT)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

	2025 Rp	2024 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1,592,527,957,953	3,438,249,913,161	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(1,780,945,761,176)	(3,363,067,520,365)	*Cash Payments to Suppliers*
Pembayaran Beban Usaha	(184,245,703,753)	(114,423,879,780)	*Payments for Operating Expenses*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(92,380,308,608)	(222,969,376,324)	*Payment For Income Tax*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(465,043,815,584)**	**(262,210,863,308)**	***Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengurangan Investasi Ventura Bersama	103,696,578,219	78,441,800,867	*Deduction of Investment in Joint Ventures*
Pengembalian Uang Muka Setoran Saham	60,000,000,000	--	*Refund of Advance Payment for Shares*
Pendapatan Bunga	13,358,454,796	11,066,906,027	*Interest Income*
Penambahan Investasi Ventura Bersama	(16,834,487,541)	(13,525,941,367)	*Addition of Investment in Joint Ventures*
Penambahan Aset Takberwujud	(852,190,000)	(3,020,977,696)	*Intangible Assets Acquisition*
Penambahan Aset Tetap	--	(2,587,808,524)	*Fixed Assets Acquisition*
Pengurangan Investasi Lainnya	--	662,959,464	*Deductions in Other Investments*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**159,368,355,474**	**71,036,938,771**	***Net Cash Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Pinjaman Induk	4,019,546,547	2,144,497,475	*Receipts of Parent's Loan*
Pembayaran Pinjaman Bank	(298,961,743,243)	(220,686,818,225)	*Payments of Bank Loan*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(20,231,573,333)	(28,254,570,874)	*Interest Payments*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	(9,417,600,001)	(8,938,000,000)	*Payments of Long term - Bank Loan*
Pembayaran Dividen	(6,748,550,000)	(9,380,560,000)	*Payment of Dividends*
Penerimaan Pinjaman Bank	--	463,186,818,225	*Receipts of Bank Loan*
Pinjaman kepada Entitas Asosiasi	--	(18,000,000,000)	*Loan to Associates*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(331,339,920,030)**	**180,071,366,601**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(637,015,380,140)**	**(11,102,557,936)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA ASING KAS DAN SETARA KAS	**8,308,753**	**90,855,447**	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGES RATES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1,025,417,332,744**	**1,036,429,035,233**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**388,410,261,357**	**1,025,417,332,744**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR***

LAMPIRAN 6

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (INDUK)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

ATTACHMENT 6

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk (PARENT)
OTHER DISCLOSURE
Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Full Rupiah, unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri / *1. Separate Financial Statements*

Berdasarkan PSAK 227, Perusahaan memilih untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk sebagai laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

In accordance with PSAK 227, the Company elected to present the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent entity as a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by parent entity which recorded investments in subsidiary on direct equity ownership basis rather than basis of reported results and investee's net asset.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity's financial information are same as the accounting policies adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiary.

Sesuai dengan PSAK 227, Perusahaan mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

In accordance with PSAK 227, the Company records investment in subsidiary using cost method.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak / *2. Schedule of Investment in Subsidiaries*

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Lokasi/ *Domicile*	Harga Perolehan/ *Acquisition Cost*	
		2025 Rp	2024 Rp
PT WEGE Solusi Proklamasi	Indonesia	22,500,000,000	22,500,000,000
Jumlah/ *Total*		**22,500,000,000**	**22,500,000,000**

LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Statements 2025



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

WIKA Tower I, Jl D.I. Panjaitan Kav. 9, Lantai 7-10, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340

Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	AR 86-87
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	AR 274
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	AR 164
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	AR 49
e. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	Perseroan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang terpisah dalam Laporan Tahunan. The Company has published a separate Sustainability Report as part of its Annual Report.
f. Direksi: Board of Directors:	
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	AR 374-387
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan 1) for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	AR 371-356

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	AR 371-356
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	AR 325-355
• bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	Diterapkan Implemented
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	Diterapkan Implemented
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	Diterapkan Implemented
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	Diterapkan Implemented
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	Diterapkan Implemented
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	Diterapkan Implemented
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	Diterapkan Implemented
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	Diterapkan Implemented
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	36
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	49
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	73

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	57
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	90
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	220
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	308
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	587
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	600
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	86
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
• pendapatan/penjualan; income/sales;	37-38
• laba bruto; gross profit;	37-38
• laba (rugi); profit (loss);	37-38
• jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	37-38
• total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	37-38
• jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	37-38
• laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	37-38
• jumlah aset; total assets;	39
• jumlah liabilitas; total liabilities;	39-40
• jumlah ekuitas; total equity;	39-40
• rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	43
• rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	43
• rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	43
• rasio lancar; current ratio;	43
• rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	43
• rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	43

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	43
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	
• saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	
a. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	51
b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	51
c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	51
d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	51
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	51
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	52
b. rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	52
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	52
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	52
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	52
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	52
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	52
c. Laporan Direksi Board of Directors' Report	73
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	76
• strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	76

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	76
• proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	77
• perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	77
• kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	78
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	79
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	80
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	57
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	58
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 2) views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	58
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	64
d. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Profile	90
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	90
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
• alamat; address;	90
• nomor telepon; telephone number;	90
• alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	90
• alamat situs web; website address;	90
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	92
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	98
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	103

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	106
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	108
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	107
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	
• nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	120-124
• foto terbaru; recent photograph;	120-124
• usia; age;	120-124
• kewarganegaraan; nationality;	120-124
• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	120-124
• riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	120-124
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	120-124
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	120-124
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	120-124
• hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	120-124
• perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	120-124
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	
• nama dan jabatan; name and position;	112-115
• foto terbaru; recent photograph;	112-115
• usia; age;	112-115
• kewarganegaraan; nationality;	112-115

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	112-115
• riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	112-115
a. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	112-115
b. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	112-115
c. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	112-115
d. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	112-115
• hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	112-115
• pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	112-115
• perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	112-115
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	116
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	158
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	164
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	165
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	165
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	167

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	168
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	168
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	168
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	168
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	168
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	168
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	169
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	171
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	178
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	179
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	
a. nama dan alamat; name and address;	180
b. periode penugasan; assignment period;	180
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	180
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	180
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	181

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	181
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	181
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	218
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	232-243
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	232-243
c. profitabilitas; profitability;	232-243
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	245
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	248
c. ekuitas; equity;	252
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	253
e. arus kas; cash flows;	257
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	259
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	259
struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	268
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	270
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	270
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	270
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	270
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	271

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	270
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	271
d. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	271
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	295
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	291
b. laba (rugi); profit (loss);	291
c. struktur modal (capital structure); atau capital structure; or	291
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	291
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	290
b. laba (rugi); profit (loss);	290
c. struktur modal (capital structure); capital structure;	290
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	290
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	290
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	285
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	272
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	272
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	272
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	272
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	272
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan a) in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	275

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	275
informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	279
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	279
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	279
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	279
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	279
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	279
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	282
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	282
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	282
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	282
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	282
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	282
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	285
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	285

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik g. Issuer or Public Company Governance	308
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	323
• Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	330
keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	325
keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	330
b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	330
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;	381
b. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form	381
c. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	375
d. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	382
e. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	383
f. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	385
• kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	385
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	386
g. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	
• prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	387
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	387
h. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	387

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	361
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	357
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	365
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	366
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
• kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	368
• pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	368
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
• prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	403
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	403
• pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	403
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
• prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	369
• kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	369
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	356 & 374
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
• prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	396-398
• struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	396-398

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	396-398
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	
a. nama; name;	WEGE tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah WEGE does not have a Sharia Supervisory Board
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	413
b. usia; age;	413
c. kewarganegaraan; nationality;	413
d. riwayat pendidikan; educational history;	413
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	413
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	413
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	413
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	413
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	413
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	413
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	413
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	414
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	421
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	428
b. usia; age;	428

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
c. kewarganegaraan; nationality;	428
d. riwayat pendidikan; educational history;	428
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	428
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	428
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	428
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	428
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	428
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	437
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	437
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); a statement that it has a guideline or charter;	427
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	430
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	438
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
• alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	-
• pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	428
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	444
b. usia; age;	444
c. kewarganegaraan; nationality;	444
d. riwayat pendidikan; educational history;	444
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
• dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	444
• rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	444

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	444
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	444
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	444
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	444
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	444
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	444
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	444
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	444
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	
a. nama; name;	450
b. domisili; domicile;	450
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	450
• dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	450
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	450
d. riwayat pendidikan; educational history;	450
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	450
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	450
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	464
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
• dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	464
• pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	464
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	464
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	464
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	464
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	464
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	457

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	465
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	474-477
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	478
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	480
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	481-488
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	489-497
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	498
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	500
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	501
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	501
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	501
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	501
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	509
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	512
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	510
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	518
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	518

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	518
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	518
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	518
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	518
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	519
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	519
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	535
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	536
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	537
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	536
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	538
• jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	538
• tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	538
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	-
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	539
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	540
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	-
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	555-583
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	555-583
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	555-583
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	586

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	591
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	591
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	87

Penerapan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Implementation of Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

LEVEL 1

A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

Bagian ini merupakan gabungan dari Bagian A dan B sebelumnya dari ASEAN Corporate Governance Scorecard tahun 2017.

LEVEL 1

A. Rights and Equitable Treatment of Shareholders

This section is a combination of the previous Parts A and B of the 2017 ASEAN Corporate Governance Scorecard

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.1	**Hak Dasar Pemegang Saham** **Basic Shareholder Rights**		
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.A. Hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk: 6) berbagi keuntungan perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.A. Basic shareholder rights should include the right to: 6) share in the profits of the corporation.	272
A.2	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** **Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.**		
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, dibuktikan dengan agenda rapat, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur non-eksekutif/komisaris? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-inkind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.5. Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval.	333-355
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/ commissioners?		
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih direktur/komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?		
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberi tahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C. Shareholders should have the opportunity to participate effectively and vote in general shareholder meetings, and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	333-355

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.2.5	Apakah risalah Rapat Umum Tahunan terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	333-355
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara menyetujui, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/setiap agenda Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.10 Pengungkapan suara Dewan direksi harus memastikan bahwa suara yang diberikan secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh yang sama dan semua suara harus dihitung dan dicatat dengan benar melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara, instruksi pemungutan suara (dilaporkan secara terpisah untuk, menentang, atau abstain) dan tingkat pemungutan suara untuk setiap resolusi harus dipublikasikan segera setelah rapat di situs web perusahaan. Jika resolusi yang didukung dewan direksi ditentang oleh sebagian besar suara (misalnya, 20% atau lebih), perusahaan harus menjelaskan selanjutnya tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi kekhawatiran yang menyebabkan pemegang saham memberikan suara menentang rekomendasi dewan direksi. Pada Rapat Umum Tahunan berikutnya, dewan direksi harus melaporkan bagaimana pandangan dari pemegang saham dipertimbangkan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dan tindakan apa pun yang diambil. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.10 Vote disclosure The board should ensure that equal effect is given to votes whether cast in person or in absentia and all votes should be properly counted and recorded via ballot. The outcome of the vote, the vote instruction (reported separately for, against or abstain) and voting levels for each resolution should be published promptly after the meeting on the company website. If a board-endorsed resolution has been opposed by a significant proportion of votes (e.g., 20% or more), the company should explain subsequently what actions were taken to understand and respond to the concerns that led shareholders to vote against the board's recommendation. At the following AGM, the board should report how the views from shareholders were considered to address the concern and any actions taken.	333-355
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang hadir pada Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	332
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri Rapat Umum Tahunan terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent		
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara tidak langsung? Does the company allow voting in absentia?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.6. Pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau tidak hadir, dan efek yang sama harus diberikan pada suara yang diberikan baik secara langsung maupun tidak hadir. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.6. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect should be given to votes whether cast in person or in absentia.	333-355

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengangkat tangan) untuk semua resolusi pada Rapat Umum Tahunan terakhir? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.9 Pelaksanaan pemungutan suara Dewan direksi harus mengumumkan dengan jelas tanggal di mana pemegang saham harus memberikan instruksi pemungutan suara mereka. Praktik pemblokiran saham atau persyaratan untuk kepemilikan saham jangka panjang harus dihentikan. Perusahaan harus memastikan keakuratan pelacakan dan rekonsiliasi suara awal yang diterima sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan suara langsung yang diberikan selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan itu sendiri. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: 10.9 Vote execution the board should clearly publicize a date by which shareholders should cast their voting instructions. The practice of share blocking or requirements for lengthy shareholdings should be discontinued. Companies should ensure accuracy of tracking and reconciling any advance votes received pre-AGM with any live votes cast during the AGM itself.	333-355
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/ inspektur) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada Rapat Umum Tahunan? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?		333-355
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Umum Tahunan/ Rapat Umum Luar Biasa terakhir untuk semua keputusan paling lambat pada hari kerja berikutnya? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/ EGM for all resolutions?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang terperinci dan tepat waktu mengenai isu-isu yang akan diputuskan dalam rapat. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.1. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information concerning the date, format, location and agenda of general meetings, as well as fully detailed and timely information regarding the issues to be decided at the meeting.	333
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? Does the company provide at least 21 days' notice for all AGMs and EGMs?		330-331
A.2.14	Apakah perusahaan menyampaikan dasar pemikiran dan penjelasan setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pengumuman RUPS/sirkuler dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?		333-355
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan item/mata acara dalam agenda rapat umum dan/atau meminta diselenggarakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, dengan batasan yang wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.4. Shareholders should have the opportunity to ask questions to the board, including on the annual external audit, to place items on the agenda of general meetings, and to propose resolutions, subject to reasonable limitations.	333-355
A.3	**Pasar untuk pengendalian perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan.** **Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.**		
A.3.1	Dalam hal terjadi penggabungan, akuisisi, dan/ atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.H.1. Aturan dan prosedur yang mengatur perolehan kendali perusahaan di pasar modal, transaksi luar biasa seperti merger, dan penjualan sebagian besar aset perusahaan, harus dijabarkan dan diungkapkan dengan jelas sehingga investor memahami hak dan jalan keluar mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan dan dalam kondisi yang wajar yang melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan golongannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.H.1. The rules and procedures governing the acquisition of corporate control in capital markets, extraordinary transactions such as mergers, and sales of substantial portions of corporate assets, should be clearly articulated and disclosed so that investors understand their rights and recourse. Transactions should occur at transparent prices and under fair conditions that protect the rights of all shareholders according to their class.	333-355

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.4	**Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.** **The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.**		
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.4 Dialog Dewan direksi, khususnya ketua, direktur independen utama (atau senior) dan ketua komite, harus terlibat secara konstruktif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait (terutama tenaga kerja) untuk dialog yang bermakna. Hal ini menyiratkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pemegang saham/pemangku kepentingan dan bukan presentasi sepihak dari satu pihak saja. Dialog tersebut harus mencakup semua hal yang relevan secara material dengan tata kelola, strategi, inovasi, manajemen risiko dan kinerja perusahaan serta kebijakan dan praktik lingkungan dan sosial. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: 1.4 Dialogue The board, particularly the chair, lead (or senior) independent director and committee chairs, should constructively engage with shareholders and relevant stakeholders (particularly the workforce) for meaningful dialogue. This infers two-way communication between companies and shareholders/ stakeholders and not a unilateral presentation from just one party. Such dialogue should encompass all matters of material relevance to a company's governance, strategy, innovation, risk management and performance as well as environmental and social policies and practices.	333-355
A.5	**Saham dan hak suara** **Shares and voting rights**		
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mengumumkan hak suara yang melekat pada setiap jenis saham (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa efek/situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicize the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.1. Kelas saham Saham biasa atau biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan atau kendali yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus dihindari atau jika ada kelas seperti itu, harus diungkapkan dan dijelaskan dan mekanisme penghentian harus diberlakukan. Struktur saham kelas ganda harus dicegah, dan jika ada, harus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan. Dewan direksi harus mengungkapkan informasi yang cukup tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan secara tepat waktu. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.1. Share classes Ordinary or common shares should feature one vote for each share. Divergence from a 'one-share, one-vote' standard which gives certain shareholders power or control disproportionate to their economic interests should be avoided or in the event of the existence of such classes, they should be disclosed and explained and sunset mechanisms should be put into place. Dual class share structures should be discouraged, and where they are in place kept under review and should be accompanied by commensurate extra protections for minority shareholders, particularly in the event of a takeover bid. The board should disclose sufficient information about the material attributes of all of the company's classes and series of shares on a timely basis.	333-355

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.6	**Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan** **Notice of AGM**		
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi yang diajukan pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu item, yaitu tidak ada penggabungan beberapa item ke dalam resolusi yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberi tahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang terperinci dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan dalam rapat. II.C.2. Proses, format, dan prosedur untuk rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membuat pemungutan suara menjadi mahal. II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. II.C.6. Pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau tidak langsung, dan efek yang sama harus diberikan pada suara yang diberikan secara langsung atau tidak langsung. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Shareholders should have the opportunity to participate effectively and vote in general shareholder meetings, and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings. Shareholders should be furnished with sufficient and timely information concerning the date, format, location and agenda of general meetings, as well as fully detailed and timely information regarding the issues to be decided at the meeting. Processes, format and procedures for general shareholder meetings should allow for equitable treatment of all shareholders. Company procedures should not make it unduly difficult or expensive to cast votes. II.C.5. Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. II.C.6. Shareholders should be able to vote in person or in absentia, and equal effect should be given to votes whether cast in person or in absentia.	333-355
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan mengenai Rapat Umum Tahunan/surat edaran terkini diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/ circulars fully translated into English and published on the same date as the local- language version?		330-331
	Apakah pemberitahuan Rapat Umum Tahunan/surat edaran memiliki rincian berikut ini: Does the notice of AGM/circulars have the following details:		
A.6.3	Apakah profil direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di perusahaan tercatat lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/reelection included?		330-331
A.6.4	Apakah auditor yang mencari pengangkatan/ pengangkatan kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?		333-355
A.6.5	Apakah dokumen proksi dibuat tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?		330-331
A.7	Perdagangan orang dalam dan praktik jual-beli kepentingan pribadi yang merugikan harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) III.E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku harus ditegakkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023) III.E. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham oleh karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: 4.4 Employee share dealing The board should develop clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	
A.7.1	Apakah direktur/komisaris diharuskan melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?		519
A.8	Transaksi pihak berelasi oleh direktur dan eksekutif kunci. Related party transactions by directors and key executives.		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan suatu komite direktur/komisaris independen untuk meninjau RPT material guna menentukan apakah RPT tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. II.F.1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi dengan pihak terkait harus ditangani. II.F.2. Anggota dewan dan eksekutif utama harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung memengaruhi perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Related party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflicts of interest and protects the interests of the company and its shareholders. Conflicts of interest inherent in related party transactions should be addressed. Members of the board and key executives should be required to disclose to the board whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the corporation.	282
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk abstain dari berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu ketika mereka sedang berkonflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?		278
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan secara wajar dan pada suku bunga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.3 Conflicts of interest The board should ensure that policies and procedures on conflicts of interest are established, understood and implemented by directors, management, workers and other relevant parties, including members of related business groups. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence. The use of relationship agreements with controlling shareholders are encouraged to ensure that real or potential conflicts of interest are avoided or mitigated and should confirm that transactions involving conflicted parties will be based on customary market terms. 9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi mengatur ketentuan ini. The Board Manual of the Board of Commissioners and Directors regulates these provisions.

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan Protecting minority shareholders from abusive actions		
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan tidak melanggar prinsip kewajaran? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. II.F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. II.F. Related party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflicts of interest and protects the interests of the company and its shareholders. II.G. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Abusive self-dealing should be prohibited. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.3 Conflicts of interest The board should ensure that policies and procedures on conflicts of interest are established, understood and implemented by directors, management, workers and other relevant parties, including members of related business groups. If a director has an interest in a matter under consideration by the board, then the director should promptly declare such an interest and be precluded from voting on the subject or exerting influence. The use of relationship agreements with controlling shareholders are encouraged to ensure that real or potential conflicts of interest are avoided or mitigated and should confirm that transactions involving conflicted parties will be based on customary market terms.	

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	278

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.5 Persetujuan pemegang saham atas RPT Pemegang saham harus memiliki hak untuk menyetujui RPT yang signifikan di atas ambang materialitas yang sesuai, dan ini harus didasarkan pada persetujuan mayoritas pemegang saham yang tidak memihak. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.G. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Abusive self-dealing should be prohibited. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.5 Shareholder approval of RPTs Shareholders should have the right to approve significant RPTs above an appropriate materiality threshold, and this should be based on the approval of a majority of disinterested shareholders. 9.7 Kesetaraan dan ganti rugi Dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham dari seri atau kelas yang sama diperlakukan sama dan diberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan modal yang mereka berikan karena perilaku dewan direksi perusahaan, manajemennya, atau pemegang saham pengendali, termasuk manipulasi pasar, informasi palsu atau menyesatkan, kelalaian material, dan perdagangan orang dalam. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana ganti rugi yang efektif. Pemulihan dan aturan prosedural yang tepat harus ditetapkan untuk membuat perlindungan efektif dan terjangkau. Jika pemulihan hukum nasional tidak diberikan, dewan direksi didorong untuk memastikan bahwa perlindungan pemegang saham yang memadai diberikan dalam anggaran dasar perusahaan. 9.7 Equality and redress The board should ensure that shareholders of the same series or class are treated equally and afforded protection against misuse or misappropriation of the capital they provide due to conduct by the company's board, its management or controlling shareholder, including market manipulation, false or misleading information, material omissions and insider trading. Minority shareholders should be protected from abusive actions by, or in the interest of, controlling shareholders acting either directly or indirectly, and should have effective means of redress. Proper remedies and procedural rules should be put in place to make the protection effective and affordable. Where national legal remedies are not afforded the board is encouraged to ensure that sufficient shareholder protections are provided in the company's bylaws.	278
B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience		
B.1	**Pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.** **Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision**		
	Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan Material Sustainability-related information should be specified		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1. Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat secara wajar diharapkan memengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau Keputusan pemungutan suara perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1. Sustainability-related information could be considered material if it can reasonably be expected to influence an investor's assessment of a company's value, investment or voting decisions. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.7 Materialitas dan keberlanjutan Pengungkapan keberlanjutan harus berfokus pada faktor-faktor yang relevan secara material, dengan banyak faktor lingkungan dan sosial yang bersifat khusus untuk setiap sektor, yang terkait dengan pengelolaan perusahaan atas modal alam dan manusianya. Jika memungkinkan, pelaporan terkait keberlanjutan juga harus berupaya mengatasi "materialitas ganda", untuk pelaporan tentang dampak eksternal perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta dampak internal terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selain itu, dewan direksi harus membangun kesadaran akan "materialitas dinamis", dengan menyadari bahwa materialitas berkembang seiring waktu seiring dengan faktor-faktor seperti teknologi yang sedang berkembang, inovasi produk, dan perkembangan peraturan. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.7 Materiality and sustainability Sustainability disclosures should focus on materially relevant factors, with many environmental and social factors being sector specific, linked to the company's management of its natural and human capital. Where possible, sustainability related reporting should also seek to address "double materiality", for reporting on the company's external impacts on society and the environment, as well as internal impacts on the company's own financial performance. Moreover, boards should build an awareness of "dynamic materiality", recognizing that materiality evolves over time alongside factors including emerging technology, product innovation and regulatory developments.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai masalah? Does the company identify climate change as an issue?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI Investor semakin mempertimbangkan pengungkapan tentang bagaimana perusahaan menilai, mengidentifikasi, dan mengelola perubahan iklim yang material serta risiko dan peluang keberlanjutan lainnya, termasuk untuk manajemen sumber daya manusia. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI Investors are increasingly considering disclosures about how companies assess, identify and manage material climate change and other sustainability risks and opportunities, including for human capital management. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.5 Perubahan iklim Dewan direksi harus menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nol emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini mencakup penetapan dan pengungkapan target untuk mengurangi emisi karbon dan periode pencapaian. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai material dan relevan, pelaporan harus mencakup pembahasan tentang proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko. Pengungkapan seputar tindakan ini akan membantu investor memahami ketahanan perusahaan yang menghadapi risiko perubahan iklim dan menilai kemajuan dalam mencapai target nol emisi. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.5 Climate change The board should assess the impact of climate change on the company business model and how it will be adapted to meet the needs of a net zero economy as part of a long-term strategy. This includes setting and disclosing targets to reduce carbon emissions and a period for achievement. Where climate change risks, whether physical or transitional, are identified as material and relevant, reporting should include discussion of the diligence process, strategy, metrics, targets and initiatives used to manage the risks. Disclosure around these actions would help investors understand the resilience of companies facing climate change risks and to assess progress towards achieving net zero targets.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.3. Pengungkapan masalah keberlanjutan, pelaporan keuangan, dan informasi lainnya harus saling terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.3. Disclosure of sustainability matters, financial reporting and other information should be connected. Kerangka kerja pengungkapan perusahaan, termasuk standar pelaporan keuangan dan persyaratan pelaporan peraturan (misalnya prospektus penawaran umum), harus memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan informasi yang dianggap penting oleh investor yang wajar dalam membuat keputusan investasi dan pemungutan suara. Oleh karena itu, informasi yang dipahami sebagai material dalam laporan terkait keberlanjutan juga harus dipertimbangkan dan dinilai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tingkat ketelitian yang sama yang diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi keuangan harus diterapkan pada pengukuran dan pelaporan informasi terkait keberlanjutan. Corporate disclosure frameworks, including financial reporting standards and regulatory filing requirements (e.g. public offering prospectuses), should have the same goal of providing information that a reasonable investor would consider important in making an investment and voting decision. It follows that information understood as material in a sustainability-related report should also be considered and assessed in the preparation and presentation of the financial statements. The same level of rigor applied to the measurement and reporting of financial information should be applied to the measurement and reporting of sustainability-related information.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
	Jika sebuah perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.		
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form to allow investors to assess the credibility and progress toward meeting the announced goal or target.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika perusahaan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should ensure that verifiable metrics are disclosed to allow investors to assess the credibility and progress toward meeting the announced goal or target. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.4 Laporan keberlanjutan Dewan direksi harus menyediakan pelaporan keberlanjutan untuk mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan modal finansial, manusia, dan alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan. Pengungkapan tersebut harus: a. menempatkan kinerja historis dalam konteks, dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek perusahaan di masa depan; b. menjelaskan indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target terkait keberlanjutan; ICGN (2021) PRINCIPLE 7: 7.4 Sustainability reports The board should provide sustainability reporting to reflect the complexities inherent in a contemporary business by blending financial, human and natural capital considerations in the context of a company's current and future strategic direction. Such disclosures should: a. put historical performance into context, and portray the risks, opportunities and prospects for the company in the future; b. explains key performance indicators to measure progress towards achieving sustainability related targets;	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan/ Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report/Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?		Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.2	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.** **Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters**		
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Penentuan informasi mana yang material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sesuai dengan konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1: The determination of which information is material may vary over time, and according to the local context, company-specific circumstances, and jurisdictional requirements. The assessment of material information may also consider sustainability matters that are critical to a company's workforce and other key stakeholders. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang harus dianggap material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.B: Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters as relevant for the company's business strategy and its assessment of what matters ought to be considered material.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.1: Informasi terkait keberlanjutan dapat dianggap material jika informasi tersebut dapat secara wajar diharapkan memengaruhi penilaian investor terhadap nilai, investasi, atau keputusan pemungutan suara suatu perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.1: Sustainability-related information could be considered material if it can reasonably be expected to influence an investor's assessment of a company's value, investment or voting decisions. Penentuan informasi yang mana material dapat berubah dari waktu ke waktu, dan sesuai dengan konteks lokal, keadaan khusus perusahaan, dan persyaratan yurisdiksi. Penilaian informasi material juga dapat mempertimbangkan masalah keberlanjutan yang penting bagi tenaga kerja perusahaan dan pemangku kepentingan utama lainnya. The determination of which information is material may vary over time, and according to the local context, company-specific circumstances, and jurisdictional requirements. The assessment of material information may also consider sustainability matters that are critical to a company's workforce and other key stakeholders. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B: Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya tentang masalah apa yang harus dianggap material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.B: Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters as relevant for the company's business strategy and its assessment of what matters ought to be considered material.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.3	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material secara memadai ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim.** **The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate- related physical and transition risks.**		
	Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait untuk memastikan ketahanan Perusahaan terhadap berbagai skenario. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios		Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau setiap tahun bahwa struktur modal dan utang Perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C.2. Dewan direksi harus menilai apakah struktur modal perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan perusahaan terhadap berbagai skenario. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C.2. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios. Manajemen dan anggota dewan direksi merupakan pihak yang paling tepat untuk memutuskan apakah struktur modal suatu perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemegang saham. Untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan, dewan direksi harus memantau struktur modal dan kecukupan modal dengan mempertimbangkan berbagai skenario, termasuk skenario dengan probabilitas rendah tetapi berdampak tinggi. The management and board members are best placed to decide if the capital structure of a company is compatible with the strategic goals and its associated risk appetite, within existing restrictions established by shareholders. In order to ensure the company's financial soundness, the board should monitor the capital structure and capital sufficiency with due consideration to different scenarios, including those with low probability but high impact.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.4	**Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial.** **The corporate governance framework should recognize the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.**		
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:		
B.4.1	Adanya dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.1: Hak-hak pemangku kepentingan sebagian besar ditetapkan oleh hukum (misalnya undang-undang ketenagakerjaan, bisnis, komersial, lingkungan, dan kepailitan) atau oleh hubungan kontraktual yang harus dihormati oleh perusahaan. Di beberapa yurisdiksi, perusahaan wajib melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan. Namun demikian, bahkan di area di mana kepentingan pemangku kepentingan tidak diatur dalam undang-undang atau ditetapkan melalui kontrak, banyak perusahaan membuat komitmen tambahan kepada pemangku kepentingan, mengingat bahwa perhatian terhadap reputasi perusahaan dan kinerja perusahaan sering kali memerlukan pengakuan kepentingan yang lebih luas. Di beberapa yurisdiksi, hal ini dapat dicapai oleh perusahaan yang menggunakan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait untuk uji tuntas berbasis risiko guna mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak buruk aktual dan potensial dari bisnis mereka, serta memperhitungkan bagaimana dampak ini ditangani. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.1: The rights of stakeholders are to a large extent established by law (e.g. labor, business, commercial, environmental, and insolvency laws) or by contractual relations that companies must respect. In some jurisdictions, it is mandatory for companies to carry out human rights and environmental due diligence. Nevertheless, even in areas where stakeholder interests are not legislated or established by contract, many companies make additional commitments to stakeholders, given that concern over corporate reputation and corporate performance often requires the recognition of broader interests. This may in some jurisdictions be achieved by companies using the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and associated due diligence standards for risk-based due diligence to identify, prevent and mitigate actual and potential adverse impacts of their businesses, and account for how these impacts are addressed.	Merujuk pada Laporan Keberlanjutan yang disusun secara terpisah dari Laporan Tahunan ini Referring to the Sustainability Report prepared separately from this Annual Report
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?		
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?		
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?		
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programs and procedures?		
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditor dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?		
B.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?		
B.5	**Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.** **Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.**		
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.2: Kerangka hukum dan proses harus transparan dan tidak menghalangi kemampuan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.2: The legal framework and process should be transparent and not impede the ability of stakeholders to communicate and to obtain redress for the violation of rights at a reasonable cost and without excessive delay.	Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan tercantum dalam situs web The Company's Annual Report and Sustainability Report are listed on the website

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.6	**Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang.** **Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.**		
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.3: Tingkat partisipasi karyawan dalam tata kelola perusahaan bergantung pada undang-undang dan praktik nasional, dan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam konteks tata kelola perusahaan, mekanisme partisipasi dapat menguntungkan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung melalui kesiapan karyawan untuk berinvestasi dalam keterampilan khusus perusahaan. Contoh mekanisme partisipasi karyawan meliputi representasi karyawan di dewan direksi dan proses tata kelola seperti dewan kerja yang mempertimbangkan sudut pandang karyawan dalam keputusan penting tertentu. Konvensi internasional dan norma nasional juga mengakui hak karyawan atas informasi, konsultasi, dan negosiasi. Sehubungan dengan mekanisme peningkatan kinerja, rencana kepemilikan saham karyawan atau mekanisme pembagian keuntungan lainnya dapat ditemukan di banyak yurisdiksi. Komitmen pensiun juga sering kali menjadi elemen hubungan antara perusahaan dan karyawannya di masa lalu dan saat ini. Jika komitmen tersebut melibatkan pembentukan dana independen, wali amanatnya harus independen dari manajemen perusahaan dan mengelola dana tersebut demi kepentingan semua penerima manfaat. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.3: The degree to which employees participate in corporate governance depends on national laws and practices, and may vary from company to company as well. In the context of corporate governance, mechanisms for participation may benefit companies directly as well as indirectly through the readiness by employees to invest in firm specific skills. Examples of mechanisms for employee participation include employee representation on boards and governance processes such as works councils that consider employee viewpoints in certain key decisions. International conventions and national norms also recognize the rights of employees to information, consultation and negotiation. With respect to performance enhancing mechanisms, employee stock ownership plans or other profit sharing mechanisms can be found in many jurisdictions. Pension commitments are also often an element of the relationship between the company and its past and present employees. Where such commitments involve establishing an independent fund, its trustees should be independent of the company's management and manage the fund in the interest of all beneficiaries.	
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programs for its employees?		
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/ kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?		518
B.7	**Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan karena melakukan hal ini.** **Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.**		
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behavior and provide contact details via the company's website or annual report?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.5. Praktik tidak etis dan ilegal yang dilakukan oleh pejabat perusahaan tidak hanya dapat melanggar hak-hak pemangku kepentingan, tetapi juga dapat merugikan perusahaan dalam hal reputasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan pengungkapan pelanggaran rahasia dengan prosedur dan tempat berlindung yang aman untuk pengaduan oleh pekerja, baik secara pribadi maupun melalui badan perwakilan mereka, dan pihak lain di luar perusahaan, mengenai perilaku ilegal dan tidak etis. Dewan direksi harus didorong untuk melindungi individu dan badan perwakilan ini serta memberi mereka akses langsung yang rahasia kepada seseorang yang independen di dewan direksi, yang sering kali merupakan anggota komite audit atau komite etik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.D.5. Unethical and illegal practices by corporate officers may not only violate the rights of stakeholders but also be detrimental to the company in terms of reputational effects. It is therefore important for companies to establish a confidential whistleblowing policy with procedures and safe-harbors for complaints by workers, either personally or through their representative bodies, and others outside the company, concerning illegal and unethical behavior. The board should be encouraged to protect these individuals and representative bodies and to give them confidential direct access to someone independent on the board, often a member of an audit or an ethics committee.	535
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behavior from retaliation?		535

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
C.1	**Struktur kepemilikan yang transparan** **Transparent ownership structure**		
C.1.1	Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memegang 5% saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.4. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights. Salah satu hak dasar investor adalah untuk mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan dan hak-hak mereka terhadap hak-hak pemilik lainnya. Hak atas informasi tersebut juga harus mencakup informasi tentang struktur suatu kelompok perusahaan dan hubungan intra-kelompok. Pengungkapan tersebut harus membuat tujuan, sifat, dan struktur kelompok tersebut menjadi transparan. Pengungkapan data kepemilikan harus diberikan setelah ambang batas kepemilikan tertentu terlampaui. Di pasar ekuitas yang dicirikan oleh struktur kepemilikan yang tersebar di mana kepemilikan saham kecil dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suatu perusahaan, ambang batas ini dapat ditetapkan lebih rendah. Pengungkapan tersebut dapat mencakup data tentang pemegang saham utama dan pihak lain yang, secara langsung atau tidak langsung, dapat secara signifikan memengaruhi atau mengendalikan perusahaan melalui, misalnya, hak suara khusus, perjanjian pemegang saham, kepemilikan saham pengendali atau saham dalam jumlah besar, penggunaan struktur perusahaan induk yang melibatkan pelapisan perusahaan atau hubungan kepemilikan saham silang yang signifikan dan jaminan silang. Di beberapa yurisdiksi, pengungkapan kepemilikan saham direktur, termasuk non-eksekutif, juga diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik, dan merupakan praktik yang baik bahwa pengungkapan tersebut dilakukan secara berkelanjutan. One of the basic rights of investors is to be informed about the ownership structure of the company and their rights vis-a-vis the rights of other owners. The right to such information should also extend to information about the structure of a group of companies and intra-group relations. Such disclosures should make the objectives, nature and structure of the group transparent. Disclosure of ownership data should be provided once certain thresholds of ownership are passed. In equity markets characterized by dispersed ownership structures where small shareholdings may exert significant influence over a company, these thresholds could be set lower. Such disclosure might include data on major shareholders and others that, directly or indirectly, may significantly influence or control the company through, for example, special voting rights, shareholder agreements, the ownership of controlling or large blocks of shares, the use of holding company structures involving layering of companies or significant cross-shareholding relationships and cross guarantees. It is also required or considered good practice in some jurisdictions to disclose shareholdings of directors, including non-executives, and it is good practice that such disclosure is made on an ongoing basis.	

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Khususnya untuk tujuan penegakan hukum, dan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, transaksi pihak terkait, perdagangan orang dalam, dan manipulasi pasar, informasi tentang kepemilikan catatan perlu dilengkapi dengan informasi terkini tentang kepemilikan manfaat. Semakin banyak yurisdiksi menggunakan registri nasional terpusat sementara yang lain mungkin memerlukan registri tingkat perusahaan untuk memfasilitasi akses ke informasi terkini dan akurat tentang kepemilikan manfaat. Dalam kasus di mana registri tersebut tidak tersedia, informasi tentang pemilik manfaat harus dapat diperoleh setidaknya oleh lembaga regulasi dan penegakan hukum dan/atau melalui proses peradilan. Selain itu, panduan yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan dan IMF yang menganjurkan pendekatan multi-cabang untuk memastikan ketersediaan informasi tentang kepemilikan manfaat dapat berguna dalam hal ini. For enforcement purposes in particular, and to identify potential conflicts of interest, related party transactions, insider trading, and market manipulation information about record ownership needs to be complemented with current information about beneficial ownership. An increasing number of jurisdictions use a centralized national registry while others may require a company-level registry to facilitate access to up-to-date and accurate information on beneficial ownership. In cases where such registries are not available, information about the beneficial owners should be obtainable at least by regulatory and enforcement agencies and/or through the judicial process. In addition, guidance issued by the Financial Action Task Force and the IMF that advocates a multi-pronged approach to ensure availability of information on beneficial ownership can be useful in this regard.	164-177
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari direktur (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?		164-177 164-177
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?		164-177
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian mengenai perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/(SPV)? Does the company disclose details of the parent/ holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?		164-177
C.2	**Kualitas Laporan Tahunan** **Quality of Annual Report** **Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut:** **Does the company's annual report disclose the following items:**		
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. IV.A.2. Tujuan perusahaan dan informasi terkait keberlanjutan. IV.A.5. Informasi tentang susunan dewan dan anggotanya, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, jabatan direktur perusahaan lainnya, dan apakah mereka dianggap independen oleh dewan. IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama. IV.A.8. Faktor risiko yang dapat diperkirakan. IV.A.10. Kontrak utang, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap perjanjian. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company. Company objectives and sustainability-related information. Information about the composition of the board and its members, including their qualifications, the selection process, other company directorships and whether they are regarded as independent by the board. Remuneration of members of the board and key executives. IV.A.8. Foreseeable risk factors. IV.A.10. Debt contracts, including the risk of non-compliance with covenants. ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi ICGN (2021) PRINCIPLE 5: Remuneration	98
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators		36-43
C.2.3	Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators		44-48
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy		272
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman relevan, dan jabatan direktur lain dari perusahaan tercatat) dari semua direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners		110-124
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan **Corporate Governance Confirmation Statement**		
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata Kelola perusahaan dan jika ada ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk tingkat kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not limited to, material information on: IV.A.9. Governance structures and policies, including the extent of compliance with national corporate governance codes or policies and the process by which they are implemented.	555-583

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.3	**Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama** **Remuneration of Members of the Board and Key Executives**		
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.9. Remunerasi direktur non-eksekutif Dewan direksi, atau pemegang saham sebagaimana diwajibkan oleh hukum di beberapa yurisdiksi, harus menentukan tingkat gaji untuk direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif dan memastikan bahwa gaji tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjamin independensi, objektivitas, dan keselarasan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan semua pemegang sahamnya. Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur non-eksekutif harus diungkapkan kepada publik. Gaji berbasis kinerja atau opsi saham tidak boleh diberikan kepada direktur non-eksekutif dan ketua non-eksekutif. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: 5.9. Non-executive director remuneration The board, or shareholders as required by law in some jurisdictions, should determine levels of pay for non-executive directors and the non-executive chair and ensure that it is structured in a way which ensures independence, objectivity and alignment with the long-term interests of the company and all its shareholders. Remuneration paid to non-executive directors should be publicly disclosed. Performance-based pay or share options should not be granted to non-executive directors and non-executive chairs.	396-399
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya] laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur non-eksekutif/komisaris? Does the company publicly disclose [i.e.] annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non- executive director/ commissioner?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.6 Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama. Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan sekarang diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain dibatasi pada posisi tertentu. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.6 Remuneration of members of the board and key executives. Disclosure on an individual basis (including termination and retirement provisions) is increasingly regarded as good practice and is now required or recommended in most jurisdictions. Some of these jurisdictions call for remuneration of a certain number of the highest paid executives to be disclosed, while in others it is confined to specified positions.	396-399

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar terukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada pertimbangan jangka pendek. Standar terukur tersebut antara lain dapat terkait dengan total pengembalian pemegang saham dan sasaran serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Mereka juga sering menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan juga dapat memantau penerapan pernyataan kebijakan tentang remunerasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. It is regarded as good practice for boards to develop and disclose a remuneration policy statement covering board members and key executives, as well as to disclose their remuneration levels set pursuant to this policy. Such policy statements may specify, especially with respect to executives, the relationship between remuneration and performance with ex ante criteria linked to performance, and include measurable standards that emphasize the long-term interests of the company and the shareholders over short-term considerations. Such measurable standards among others may relate to total shareholder return and appropriate sustainability goals and metrics. Policy statements generally tend to set conditions for payments to board members for extra-board activities, such as consulting. They also often specify terms to be observed by board members and key executives about holding and trading the stock of the company, and the procedures to be followed in granting and re-pricing options. In some jurisdictions, policy statements also provide guidance on the payments to be made when hiring and/or terminating the contract of an executive. The board may also monitor the implementation of the policy statement on remuneration.	396-399
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepada publik [misalnya laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika yang bersangkutan bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.6. Remunerasi anggota dewan dan eksekutif utama Pengungkapan secara individual (termasuk ketentuan pemberhentian dan pensiun) semakin dianggap sebagai praktik yang baik dan kini diwajibkan atau direkomendasikan di sebagian besar yurisdiksi. Beberapa yurisdiksi ini mengharuskan pengungkapan remunerasi sejumlah eksekutif dengan gaji tertinggi, sementara di yurisdiksi lain, pengungkapan dibatasi pada posisi tertentu. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A.6. Remuneration of members of the board and key executives Disclosure on an individual basis (including termination and retirement provisions) is increasingly regarded as good practice and is now required or recommended in most jurisdictions. Some of these jurisdictions call for remuneration of a certain number of the highest paid executives to be disclosed, while in others it is confined to specified positions.	396-399

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.4	**Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT)** **Disclosure of related party transactions (RPT)**		
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.7. Transaksi dengan pihak terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not limited to, material information on: IV.A.7. Related party transactions. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.4 Transaksi pihak terkait Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: 9.4 Related party transactions The board should develop, adopt and disclose a related party transactions (RPT) Policy and have a robust process for approving, reviewing and monitoring RPTs and any inherent conflicts of interest. This includes establishing a committee of independent directors, either as a separate committee, or an existing committee comprised of independent directors, for example the audit committee. The committee should review significant related party transactions to determine whether they are in the best interests of the company and, if so, to determine what terms are fair and reasonable. The conclusion of committee deliberations on significant related party transactions should be disclosed in the company's annual report to shareholders.	281-285
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai untuk setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?		281-285
C.5	**Direktur dan komisaris yang bertransaksi dalam saham perusahaan** **Directors and commissioners dealings in shares of the company**		
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.4. Kepemilikan saham utama, termasuk pemilik manfaat, dan hak suara. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.4. Major share ownership, including beneficial owners, and voting rights. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham oleh karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas terkait perdagangan saham oleh direktur dan karyawan perusahaan. Individu tidak boleh memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: 4.4 Employee share dealing The Board should develop clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	551

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
		ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.5 Kepemilikan saham Dewan direksi harus mengungkapkan kebijakan perusahaan mengenai kepemilikan saham perusahaan oleh CEO, direktur non-eksekutif, dan eksekutif. Kebijakan ini harus mencakup kebijakan perusahaan tentang bagaimana persyaratan kepemilikan saham harus dipenuhi dan berapa lama kepemilikan saham tersebut harus dipertahankan. Meskipun kepemilikan saham oleh CEO dan eksekutif dianjurkan, penggunaan derivatif atau struktur lain yang memungkinkan lindung nilai atas eksposur individu terhadap saham perusahaan harus dilarang. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: 5.5 Share ownership The board should disclose the company policy concerning ownership of shares of the company by the CEO, non-executive directors and executives. This should include the company policy as to how share ownership requirements are to be achieved and for how long they are to be retained. While CEO and executive share ownership is encouraged, the use of derivatives or other structures that enable the hedging of an individual's exposure to the company's shares should be prohibited.	551
C.6	**Auditor Eksternal dan Laporan Auditor** **External auditor and Auditor Report**		
	Ketika perusahaan audit yang sama digunakan untuk melakukan jasa audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services		
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian profesional dalam pelaksanaan audit demi kepentingan publik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D. External auditors should be accountable to the shareholders and owe a duty to the company to exercise due professional care in the conduct of the audit in the public interest. ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Ketentuan acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: 8.3 Audit Committee The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: f) Recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured.	180-181

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.3 Komite Audit Ketentuan acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: f) Merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu memberikan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: 8.3 Audit Committee The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: f) Recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured.	180-181
C.7	**Media komunikasi** **Medium of communications**		
	Apakah perusahaan menggunakan mode komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?		
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users. ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects.	182-185
C.7.2	Situs web perusahaan Company website		
C.7.3	Arahan analis Analyst's briefing		182-185
C.7.4	Arahan media/konferensi pers Media briefings/press conferences		182-185
C.8	**Pengarsipan/rilis laporan tahunan/keuangan tepat waktu** **Timely filing/release of annual/financial reports**		
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework.	86-87

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
C.8.2	Apakah laporan tahunan dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users. ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects	86-87
C.8.3	Apakah kebenaran dan kewajaran/kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan telah ditegaskan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat terkait di perusahaan? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?		86-87
C.9	**Situs web perusahaan** **Company website**		
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:		
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): Disclosure should include, but not be limited to, material information on: The financial and operating results of the company. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.E. Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan hemat biaya terhadap informasi yang relevan bagi pengguna. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.E. Channels for disseminating information should provide for equal, timely and cost-efficient access to relevant information by users.	86-87
C.9.2	Materi yang diberikan dalam pengarahan kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media		86-87
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report		86-87
C.9.4	Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa Notice of AGM and/or EGM	ICGN (2021) PRINSIP 7: Pelaporan Perusahaan Dewan direksi harus mengawasi pengungkapan perusahaan yang tepat waktu dan dapat diandalkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait terkait posisi keuangan perusahaan, pendekatan terhadap keberlanjutan, kinerja, model bisnis, strategi, dan prospek jangka panjang. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Corporate Reporting Boards should oversee timely and reliable company disclosures for shareholders and relevant stakeholders relating to the company's financial position, approach to sustainability, performance, business model, strategy, and long-term prospects.	330-331
C.9.5	Risalah Rapat Umum Tahunan dan/atau Rapat Umum Luar Biasa Minutes of AGM and/or EGM		330-331
C.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran dasar perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's Constitution (Company's By-Laws, Memorandum and Articles of Association)		182-185
C.10	**Hubungan investor** **Investor relations**		
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.9. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. Fungsi dan tanggung jawab dewan direksi dan manajemen terkait pengungkapan dan komunikasi perlu ditetapkan dengan jelas oleh dewan direksi. Di beberapa yurisdiksi, penunjukan pejabat hubungan investor yang melapor langsung kepada dewan direksi dianggap sebagai praktik yang baik bagi perusahaan yang diperdagangkan secara publik. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.9. Overseeing the process of disclosure and communications. The functions and responsibilities of the board and management with respect to disclosure and communication need to be clearly established by the board. In some jurisdictions, the appointment of an investor relations officer who reports directly to the board is considered good practice for publicly traded companies.	182-185

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.	**Tanggung Jawab Dewan** **Responsibilities of the Board**		
	Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang ditetapkan dengan jelas Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy		
D1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV. Pengungkapan dan transparansi IV.A. Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: 9. Struktur dan kebijakan tata kelola, termasuk sejauh mana kepatuhan terhadap kode atau kebijakan tata kelola perusahaan nasional dan proses penerapannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV. Disclosure and transparency IV.A. Disclosure should include, but not be limited to, material information on: 9. Governance structures and policies, including the extent of compliance with national corporate governance codes or policies and the process by which they are implemented.	182-185
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/ commissioners' approval disclosed ?	1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi 2. V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: 3. Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. 4. Meninjau dan menilai kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 5. Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. 6. Memilih, mengawasi, dan memantau kinerja eksekutif utama, dan, jika perlu, menggantinya dan mengawasi perencanaan suksesi. 7. Menyelaraskan remunerasi eksekutif utama dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. 8. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. 9. Memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota dewan direksi, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi dengan pihak terkait. 10. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. 11. Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi. 1. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board 2. V.D. The board should fulfil certain key functions, including: 3. Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures. 4. Reviewing and assessing risk management policies and procedures. 5. Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. 6. Selecting, overseeing and monitoring the performance of key executives, and, when necessary, replacing them and overseeing succession planning. 7. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. 8. Ensuring a formal and transparent board nomination and election process. 9. Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, board members and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions. 10. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. 11. Overseeing the process of disclosure and communications.	358
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/ komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?		363 & 380

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission		
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.	98-99
D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setahun sekali? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?		98-99
D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi utama, anggaran tahunan, dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal utama, akuisisi, dan divestasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, annual budgets and business plans; setting performance objectives; monitoring implementation and corporate performance; and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestitures.	98-99
D.2	**Struktur Dewan** **Board structure**		
	Kode Etik atau Perilaku Code of Ethics or Conduct		
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.C. Dewan direksi harus menerapkan standar etika yang tinggi. Dewan direksi memiliki peran penting dalam menetapkan standar etika perusahaan, tidak hanya melalui tindakannya sendiri, tetapi juga dalam menunjuk dan mengawasi eksekutif utama dan akibatnya manajemen secara umum. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.C. The board should apply high ethical standards. The board has a key role in setting the ethical tone of a company, not only through its own actions, but also in appointing and overseeing key executives and consequently the management in general.	508
D.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?		508

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	Standar etika yang tinggi adalah kepentingan jangka panjang perusahaan sebagai sarana untuk membuatnya kredibel dan dapat dipercaya, tidak hanya dalam operasi sehari-hari, tetapi juga berkenaan dengan komitmen jangka panjang. Untuk membuat tujuan dewan jelas dan operasional, banyak perusahaan telah merasa berguna untuk mengembangkan kode etik perusahaan berdasarkan, antara lain, standar profesional dan terkadang kode perilaku yang lebih luas, dan untuk mengomunikasikannya ke seluruh organisasi. Ini dapat mencakup komitmen oleh perusahaan (termasuk anak perusahaannya) untuk mematuhi Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dan standar uji tuntas terkait. Demikian pula, yurisdiksi semakin menuntut agar dewan mengawasi strategi lobi, keuangan, dan perencanaan pajak, sehingga memberikan otoritas informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran dan mencegah praktik, misalnya mengejar skema perencanaan pajak yang agresif, yang tidak berkontribusi pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya, dan dapat menyebabkan risiko hukum dan reputasi. High ethical standards are in the long-term interests of the company as a means to make it credible and trustworthy, not only in day-to-day operations, but also with respect to longer term commitments. To make the objectives of the board clear and operational, many companies have found it useful to develop company codes of conduct based on, among others, professional standards and sometimes broader codes of behavior, and to communicate them throughout the organization. This may include a commitment by the company (including its subsidiaries) to comply with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and associated due diligence standards. Similarly, jurisdictions are increasingly demanding that boards oversee the lobbying, finance and tax planning strategies, thus providing authorities with timely and targeted information and discouraging practices, for example the pursuit of aggressive tax planning schemes, that do not contribute to the long-term interests of the company and its shareholders, and can cause legal and reputational risks. Kode etik di seluruh perusahaan berfungsi sebagai standar perilaku oleh dewan direksi dan eksekutif utama, yang menetapkan kerangka kerja untuk penerapan penilaian dalam berurusan dengan berbagai konstituen yang sering kali saling bertentangan. Paling tidak, kode etik harus menetapkan batasan yang jelas tentang pengejaran kepentingan pribadi, termasuk transaksi saham perusahaan. Kerangka kerja keseluruhan untuk perilaku etis melampaui kepatuhan terhadap hukum, yang seharusnya selalu menjadi persyaratan mendasar. Company-wide codes serve as a standard for conduct by both the board and key executives, setting the framework for the exercise of judgement in dealing with varying and often conflicting constituencies. At a minimum, the code of ethics should set clear limits on the pursuit of private interests, including dealings in the shares of the company. An overall framework for ethical conduct goes beyond compliance with the law, which should always be a fundamental requirement.	508
	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
D.2.4	Apakah direktur/komisaris independen membentuk setidaknya 50% dari dewan direktur/komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs.	

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan selama lima tahun, masing-masing 1 masa jabatan untuk direktur/komisaris independen? Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years 1 each for its independent directors/ commissioners? 1 Jangka waktu lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 1 The five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Meskipun pendekatan nasional untuk mendefinisikan independensi bervariasi, berbagai kriteria digunakan, seperti tidak adanya hubungan dengan perusahaan, grupnya, dan manajemennya, auditor eksternal perusahaan, dan pemegang saham utama, serta tidak adanya remunerasi, secara langsung atau tidak langsung, dari perusahaan atau grupnya selain biaya jabatan direktur. Dewan direksi juga mungkin diminta untuk membuat temuan afirmatif bahwa seorang direktur independen terhadap perusahaan karena mereka tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan atau bahwa direktur tidak memiliki hubungan yang akan mengganggu pelaksanaan penilaian independen dalam melaksanakan tanggung jawab seorang direktur. Banyak yurisdiksi juga menetapkan masa jabatan maksimum bagi direktur untuk dianggap independen. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. While national approaches to defining independence vary, a range of criteria are used, such as the absence of relationships with the company, its group and its management, the external auditor of the company and substantial shareholders, as well as the absence of remuneration, directly or indirectly, from the company or its group other than directorship fees. The board may also be required to make an affirmative finding that a director is independent of the company because they have no material relationship with the company or that the director has no relationship which would interfere with the exercise of independent judgement in carrying out the responsibilities of a director. Many jurisdictions also set a maximum tenure for directors to be considered independent. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.4 Masa Jabatan Direktur non-eksekutif independen harus menjabat dalam jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak pada diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batasan tersebut (dan dengan demikian tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi yang memuaskan atas kontribusinya terhadap dewan. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.4 Tenure Independent non-executive directors should serve for an appropriate length of time to ensure they contribute an impartial perspective to board discussion and decision-making. Term limits, where they exist, and the identity of directors who have exceeded such limits (and thus no longer deemed independent) should be disclosed. Director tenure should be reviewed by the Nomination Committee annually and director re-election contingent on a satisfactory evaluation of his or her contribution to the board.	372

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batasan lima kursi dewan yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi dan komite lainnya serta tanggung jawab ketua kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi dan komite. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board and committee memberships and chair responsibilities to shareholders is therefore a key instrument to improve board and committee nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration.	372
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan direksi perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?		108
	Komite Nominasi Nominating Committee		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II: Hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, tentang remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II: The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions II.C.5 Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval. Terkait pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan direksi independen untuk memiliki peran kunci dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan penuh dan tepat waktu atas pengalaman dan latar belakang kandidat untuk dewan direksi dan proses pencalonan, yang akan memungkinkan penilaian yang tepat atas kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa wilayah hukum, diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk juga mengungkapkan informasi tentang posisi dewan direksi atau keanggotaan komite lainnya yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa wilayah hukum juga posisi yang mereka lamar. With respect to nomination of candidates, boards in many companies have established nomination committees to ensure proper compliance and transparency with established nomination procedures and to facilitate and co-ordinate the search for a balanced, diverse and qualified board. It is regarded as good practice for independent board members to have a key role on this committee. To further improve the selection process, the Principles also call for full and timely disclosure of the experience and background of candidates for the board and the nomination process, which will allow an informed assessment of the abilities and suitability of each candidate. It is required or considered good practice in some jurisdictions to also disclose information about any other board positions or committee memberships that nominees hold, and in some jurisdictions also positions that they are nominated for.	428
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E.1 Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E.1 Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	428
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?		428

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan ketentuan acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.2. Boards should consider setting up specialized committees to support the full board in performing its functions, in particular the audit committee – or equivalent body – for overseeing disclosure, internal controls and audit-related matters. Other committees, such as remuneration, nomination or risk management, may provide support to the board depending upon the company's size, structure, complexity and risk profile. Their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board which retains full responsibility for the decisions taken. Jika dibenarkan dalam hal ukuran, struktur, sektor atau tingkat perkembangan perusahaan serta kebutuhan dewan dan profil anggotanya, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan dan memungkinkan fokus yang lebih dalam pada area tertentu. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan, penting bagi pasar untuk menerima gambaran yang lengkap dan jelas tentang mandat, ruang lingkup, prosedur kerja, dan komposisi mereka. Informasi tersebut sangat penting di banyak yurisdiksi tempat dewan diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. Where justified in terms of the size, structure, sector or level of development of the company as well as the board's needs and the profile of its members, the use of committees may improve the work of the board and allow for a deeper focus on specific areas. In order to evaluate the merits of board committees, it is important that the market receives a full and clear picture of their mandate, scope, working procedures and composition. Such information is particularly important in the many jurisdictions where boards are required to establish independent audit committees with powers to oversee the relationship with the external auditor.	427
D.2.12	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?		428
	Komite Remunerasi / Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi dewan direksi untuk mengembangkan dan mengungkapkan pernyataan kebijakan remunerasi yang mencakup anggota dewan direksi dan eksekutif utama, serta mengungkapkan tingkat remunerasi mereka yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan ini. Pernyataan kebijakan tersebut dapat menentukan, khususnya yang berkaitan dengan eksekutif, hubungan antara remunerasi dan kinerja dengan kriteria ex ante yang terkait dengan kinerja, dan mencakup standar yang dapat diukur yang menekankan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham daripada pertimbangan jangka pendek. Standar yang dapat diukur tersebut antara lain dapat berkaitan dengan total pengembalian pemegang saham dan tujuan serta metrik keberlanjutan yang sesuai. Pernyataan kebijakan umumnya cenderung menetapkan ketentuan pembayaran kepada anggota dewan direksi untuk kegiatan di luar dewan direksi, seperti konsultasi. Pernyataan kebijakan tersebut juga sering menentukan ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota dewan direksi dan eksekutif utama tentang kepemilikan dan perdagangan saham perusahaan, serta prosedur yang harus diikuti dalam pemberian dan penetapan harga ulang opsi. Di beberapa yurisdiksi, pernyataan kebijakan juga memberikan panduan tentang pembayaran yang harus dilakukan saat mempekerjakan dan/atau mengakhiri kontrak seorang eksekutif. Dewan direksi juga dapat memantau penerapan pernyataan kebijakan tentang remunerasi. It is regarded as good practice for boards to develop and disclose a remuneration policy statement covering board members and key executives, as well as to disclose their remuneration levels set pursuant to this policy. Such policy statements may specify, especially with respect to executives, the relationship between remuneration and performance with ex ante criteria linked to performance, and include measurable standards that emphasize the long-term interests of the company and the shareholders over short-term considerations. Such measurable standards among others may relate to total shareholder return and appropriate sustainability goals and metrics. Policy statements generally tend to set conditions for payments to board members for extra-board activities, such as consulting. They also often specify terms to be observed by board members and key executives about holding and trading the stock of the company, and the procedures to be followed in granting and re-pricing options. In some jurisdictions, policy statements also provide guidance on the payments to be made when hiring and/or terminating the contract of an executive. The board may also monitor the implementation of the policy statement on remuneration.	428

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri seluruhnya dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non- executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan dan kontrak remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau sebagian besar direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi masing-masing, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan tersebut memberikan perusahaan hak untuk menahan dan memulihkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. Many jurisdictions recommend or require that remuneration policy and contracts for board members and key executives be handled by a special committee of the board comprising either wholly or a majority of independent directors and excluding executives that serve on each other's remuneration committees, which could lead to conflicts of interest. The introduction of malus and claw-back provisions is considered good practice. They grant the company the right to withhold and recover compensation from executives in cases of managerial fraud and other circumstances, for example when the company is required to restate its financial statements due to material noncompliance with financial reporting requirements.	428
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi seorang direktur/ komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?		428
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.2. Dewan direksi harus mempertimbangkan pembentukan komite khusus untuk mendukung seluruh dewan direksi dalam menjalankan fungsinya, khususnya komite audit – atau badan yang setara – untuk mengawasi pengungkapan, pengendalian internal, dan masalah terkait audit. Komite lain, seperti remunerasi, nominasi, atau manajemen risiko, dapat memberikan dukungan kepada dewan direksi tergantung pada ukuran, struktur, kompleksitas, dan profil risiko perusahaan. Mandat, komposisi, dan prosedur kerja mereka harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan direksi yang memegang tanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.2. Boards should consider setting up specialized committees to support the full board in performing its functions, in particular the audit committee – or equivalent body – for overseeing disclosure, internal controls and audit-related matters. Other committees, such as remuneration, nomination or risk management, may provide support to the board depending upon the company's size, structure, complexity and risk profile. Their mandate, composition and working procedures should be well defined and disclosed by the board which retains full responsibility for the decisions taken. Jika dibenarkan dalam hal ukuran dan struktur perusahaan dan dewan direksinya, serta sektor atau tingkat perkembangan perusahaan, penggunaan komite dapat meningkatkan kinerja dewan direksi. Untuk mengevaluasi manfaat komite dewan direksi, penting bagi pasar untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang tujuan, tugas, dan komposisi mereka. Informasi tersebut khususnya penting di banyak yurisdiksi tempat dewan direksi diharuskan membentuk komite audit independen dengan kewenangan untuk mengawasi hubungan dengan auditor eksternal. Komite audit juga harus mampu mengawasi efektivitas dan integritas sistem pengendalian internal. Where justified in terms of the size and structure of the company and its board, as well as the company's sector or level of development, the use of committees may improve the work of the board. In order to evaluate the merits of board committees it is important that the market receives a full and clear picture of their purpose, duties and composition. Such information is particularly important in the many jurisdictions where boards are required to establish independent audit committees with powers to oversee the relationship with the external auditor. Audit committees should also be able to oversee the effectiveness and integrity of the internal control system.	427
D.2.17	Apakah kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi bertemu setidaknya dua kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?		428

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Komite Audit Audit Committee		
D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.1 Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan direksi independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	413
D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk menugaskan sejumlah anggota dewan direksi independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Boards should consider assigning a sufficient number of independent board members capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflicts of interest. Examples of such key responsibilities are ensuring the integrity of financial and other corporate reporting, the review of related party transactions, and nomination and remuneration of board members and key executives.	413
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit seorang direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?		413
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3. Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include:	411

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.22	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris independen dari komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/ commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3. Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3. Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include:	413
D.2.23	Apakah kehadiran Komite Audit dalam rapat diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit bertemu setidaknya empat kali selama setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?		414
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	ICGN (2021) PRINSIP 8: Audit internal dan eksternal 8.3 Komite audit Dewan direksi harus membentuk komite audit yang seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen. Setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian keuangan terkini dan relevan dan semua anggota komite audit harus melek finansial, termasuk pemahaman dasar tentang akuntansi. Komite audit juga harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana faktor keberlanjutan dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kerangka acuan untuk komite harus diungkapkan kepada publik dan mencakup: (f) merekomendasikan pengangkatan, pengangkatan kembali dan, jika perlu, pemberhentian auditor eksternal, serta menyetujui biaya audit. Setiap biaya non-audit biasanya harus lebih rendah dari biaya audit dan, jika tidak, harus ada penjelasan yang jelas tentang mengapa auditor perlu menyediakan layanan ini dan bagaimana independensi dan objektivitas audit dipastikan; ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Internal and external audit 8.3 Audit committee The board should establish an audit committee comprised entirely of independent non-executive directors. At least one member of the audit committee should have recent and relevant financial expertise and all audit committee members should be financially literate, including a basic understanding of accounting. Audit committees should also have a clear understanding of how sustainability factors can impact the company's financial statements. The terms of reference for the committee should be publicly disclosed and include: (f) recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the removal of the external auditor, as well as the approving audit fees. Any non-audit fees should normally be less than the audit fee and, if not, there should be a clear explanation as to why it was necessary for the auditor to provide these services and how the independence and objectivity of the audit was assured;	421-426
D.3	**Proses Dewan** **Board Processes**		
	Rapat dewan dan kehadiran Board meetings and attendance		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Penjadwalan rapat dewan direksi sebelum atau di awal tahun akan memungkinkan para direktur untuk merencanakan lebih awal untuk menghadiri rapat tersebut, sehingga membantu memaksimalkan partisipasi, terutama karena direktur non-eksekutif sering kali memiliki komitmen lain. Rapat ad hoc tambahan selalu dapat dijadwalkan jika dan ketika diperlukan. Merupakan praktik umum bagi dewan direksi di pasar maju untuk menjadwalkan rapat dengan cara ini. Scheduling board meetings before or at the beginning of the year would allow directors to plan ahead to attend such meetings, thereby helping to maximize participation, especially as nonexecutive directors often have other commitments. Additional ad hoc meetings can always be scheduled if and when necessary. It is common practice for boards in developed markets to schedule meetings in this way.	388-392
D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris bertemu setidaknya enam kali dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration. ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.5 Komitmen Dewan direksi harus mengadakan rapat secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan direksi. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.5 Commitment The board should meet regularly to discharge its duties and directors should commit adequate time to board meeting preparation and attendance.	388-392

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan selama tahun tersebut? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi menikmati legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi dan komite lainnya serta tanggung jawab ketua kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi dan komite. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya, apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.3 Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board and committee memberships and chair responsibilities to shareholders is therefore a key instrument to improve board and committee nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a significant number of meetings) and any other work undertaken on behalf of the board and the associated remuneration.	388-392

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Anggota dewan direksi yang independen dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan dewan direksi. Mereka dapat memberikan pandangan yang objektif terhadap evaluasi kinerja dewan direksi dan manajemen. Selain itu, mereka dapat memainkan peran penting dalam bidang-bidang yang mungkin memiliki perbedaan kepentingan antara manajemen, perusahaan, dan pemegang sahamnya, seperti remunerasi eksekutif, perencanaan suksesi, perubahan kendali perusahaan, pembelaan terhadap pengambilalihan, akuisisi besar, dan fungsi audit. Agar mereka dapat memainkan peran penting ini, dewan direksi sebaiknya menyatakan siapa yang mereka anggap independen dan kriteria untuk penilaian ini. Beberapa yurisdiksi juga mengharuskan rapat terpisah dari direktur independen secara berkala. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. Independent board members can contribute significantly to the decision making of the board. They can bring an objective view to the evaluation of the performance of the board and management. In addition, they can play an important role in areas where the interests of management, the company and its shareholders may diverge such as executive remuneration, succession planning, changes of corporate control, take-over defenses, large acquisitions and the audit function. In order for them to play this key role, it is desirable that boards declare who they consider to be independent and the criterion for this judgement. Some jurisdictions also require separate meetings of independent directors on a periodic basis. ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.7. Rapat independen Pimpinan harus secara rutin mengadakan rapat dengan direktur non-eksekutif tanpa kehadiran direktur eksekutif. Selain itu, direktur non-eksekutif (yang dipimpin oleh LID) harus bertemu setidaknya setahun sekali, tanpa kehadiran pimpinan, untuk menilai kinerja pimpinan atau jika diperlukan. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.7. Independent meetings The chair should regularly hold meetings with the non-executive directors without executive directors present. In addition, the non-executive directors (led by the LID) should meet at least annually, without the chair present, to appraise the chair's performance or as appropriate.	388-392
D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran satu pun eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?		388-392
	Akses terhadap informasi Access to information		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.6	Apakah berkas rapat direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.F. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses ke manajer kunci tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan nasihat eksternal yang independen dengan biaya perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.F. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to accurate, relevant and timely information. Board members require relevant information on a timely basis in order to support their decision-making. Non-executive board members do not typically have the same access to information as key managers within the company. The contributions of non-executive board members to the company can be enhanced by providing access to certain key managers within the company such as, for example, the company secretary, the internal auditor, and the head of risk management or chief risk officer, and recourse to independent external advice at the expense of the company. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses dan memastikan bahwa mereka memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Dalam kasus ketika perusahaan yang diperdagangkan secara publik merupakan bagian dari suatu grup, kerangka peraturan juga harus memastikan akses anggota dewan direksi terhadap informasi penting tentang aktivitas anak perusahaannya untuk mengelola risiko di seluruh grup dan menerapkan tujuan di seluruh grup. Pada saat yang sama, kerangka peraturan harus menjaga perlindungan untuk memastikan bahwa orang dalam tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi mereka atau orang lain. Jika perusahaan mengandalkan model manajemen risiko yang kompleks, anggota dewan direksi harus diberi tahu tentang kemungkinan kekurangan model tersebut. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to and ensure that they obtain accurate, relevant and timely information. In cases when a publicly traded company is a part of a group, the regulatory framework should also ensure board members' access to key information about the activities of its subsidiaries to manage group-wide risks and implement group-wide objectives. At the same time, the regulatory framework should maintain safeguards to ensure that insiders will not use such information for their personal gain or of others. Where companies rely on complex risk management models, board members should be made aware of the possible shortcomings of such models.	Diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.F. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan direksi harus memiliki akses ke informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Anggota dewan direksi memerlukan informasi yang relevan secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Anggota dewan direksi non-eksekutif biasanya tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi seperti manajer kunci dalam perusahaan. Kontribusi anggota dewan direksi non-eksekutif terhadap perusahaan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses ke manajer kunci tertentu dalam perusahaan seperti, misalnya, sekretaris perusahaan, auditor internal, dan kepala manajemen risiko atau kepala petugas risiko, dan menggunakan nasihat eksternal yang independen dengan biaya perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.F. In order to fulfil their responsibilities, board members should have access to accurate, relevant and timely information. Board members require relevant information on a timely basis in order to support their decision-making. Non-executive board members do not typically have the same access to information as key managers within the company. The contributions of non-executive board members to the company can be enhanced by providing access to certain key managers within the company such as, for example, the company secretary, the internal auditor, and the head of risk management or chief risk officer, and recourse to independent external advice at the expense of the company. ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.8. Nasihat Dewan direksi harus memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan. Dewan direksi harus memiliki akses terhadap nasihat dari sekretaris perusahaan (atau penasihat umum) dan/atau nasihat independen yang sesuai dengan biaya perusahaan. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.8. Advice The board should have adequate resources to fulfil its responsibilities efficiently and effectively under relevant law and regulation. The board should have access to advice from a company secretary (or general counsel) and/or independent advice as appropriate at the company's expense.	450-456
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?		450-456
	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Direksi Board Appointments and Re-Election		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II. Hak dan perlakuan yang adil bagi pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, tentang remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham. Pemilihan anggota dewan adalah hak dasar pemegang saham. Agar proses pemilihan efektif, pemegang saham harus dapat berpartisipasi dalam pencalonan anggota dewan dan memberikan suara pada masing-masing calon atau pada daftar yang berbeda. Untuk tujuan ini, pemegang saham memiliki akses di sejumlah negara ke materi pemungutan suara perusahaan yang disediakan bagi pemegang saham, dengan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan. Terkait pencalonan kandidat, dewan direksi di banyak perusahaan telah membentuk komite pencalonan untuk memastikan kepatuhan dan transparansi yang tepat terhadap prosedur pencalonan yang ditetapkan dan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian dewan direksi yang seimbang, beragam, dan berkualitas. Merupakan praktik yang baik bagi anggota dewan direksi independen untuk memiliki peran penting dalam komite ini. Untuk lebih meningkatkan proses seleksi, Prinsip-prinsip tersebut juga menyerukan pengungkapan penuh dan tepat waktu atas pengalaman dan latar belakang kandidat untuk dewan direksi dan proses pencalonan, yang akan memungkinkan penilaian yang tepat atas kemampuan dan kesesuaian setiap kandidat. Di beberapa wilayah hukum, diwajibkan atau dianggap sebagai praktik yang baik untuk juga mengungkapkan informasi tentang posisi dewan direksi lain yang dipegang oleh para kandidat, dan di beberapa wilayah hukum juga posisi yang mereka lamar.	
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?		375
		G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II. The rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions II.C.5 Effective shareholder participation in key corporate governance decisions, such as the nomination and election of board members, should be facilitated. Shareholders should be able to make their views known, including through votes at shareholder meetings, on the remuneration of board members and/or key executives, as applicable. The equity component of compensation schemes for board members and employees should be subject to shareholder approval. Electing the members of the board is a basic shareholder right. For the election process to be effective, shareholders should be able to participate in the nomination of board members and vote on individual nominees or on different lists of them. To this end, shareholders have access in a number of countries to the company's voting materials which are made available to shareholders, subject to conditions to prevent abuse. With respect to nomination of candidates, boards in many companies have established nomination committees to ensure proper compliance and transparency with established nomination procedures and to facilitate and co-ordinate the search for a balanced, diverse and qualified board. It is regarded as good practice for independent board members to have a key role on this committee. To further improve the selection process, the Principles also call for full and timely disclosure of the experience and background of candidates for the board and the nomination process, which will allow an informed assessment of the abilities and suitability of each candidate. It is required or considered good practice in some jurisdictions to also disclose information about any other board positions that nominees hold, and in some jurisdictions also positions that they are nominated for.	

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.6 Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut mendorong peran aktif pemegang saham dalam nominasi dan pemilihan anggota dewan direksi. Dewan direksi, dengan dukungan komite nominasi jika dibentuk, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan dipatuhi. Pertama, meskipun prosedur aktual untuk nominasi mungkin berbeda di setiap negara, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dipatuhi. Kedua, dewan direksi memiliki peran utama dalam menentukan profil umum atau individu anggota dewan direksi yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan direksi yang ada. Ketiga, dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkannya kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham. Keterlibatan dan dialog dewan direksi dengan pemegang saham dianggap sebagai praktik yang baik dalam proses ini, dengan syarat dewan direksi memastikan transparansi, perlakuan yang sama, dan informasi sensitif internal dan bisnis tidak diungkapkan. Dianggap sebagai praktik yang baik untuk melakukan proses pencarian terbuka yang mencakup berbagai latar belakang untuk menanggapi tujuan keberagaman dan sifat risiko yang terus berkembang. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.6 Ensuring a formal and transparent board nomination and election process. The Principles promote an active role for shareholders in the nomination and election of board members. The board, with the support of a nomination committee if established, has an essential role to play in ensuring that the nomination and election processes are respected. First, while actual procedures for nomination may differ among countries, the board has the responsibility to make sure that established procedures are transparent and respected. Second, the board has a key role in defining the general or individual profile of board members that the company may need at any given time, considering the appropriate knowledge, competencies and expertise to complement the existing skills of the board. Third, the board or nomination committee has the responsibility to identify potential candidates to meet desired profiles and propose them to shareholders, and/or consider those candidates advanced by shareholders. The board's engagement and dialogue with shareholders is considered good practice in this process, provided that the board ensures transparency, equal treatment and that inside and business sensitive information is not disclosed. It is considered good practice to conduct open search processes extending to a broad range of backgrounds to respond to diversity objectives and the evolving nature of risks.	

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.11	Apakah semua direktur/komisaris tunduk pada pemilihan ulang setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun2 masing-masing? Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years2 each? 2 Jangka waktu lima tahun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. 2 The five years term must be required by legislation which pre- existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	PRINSIP 3 ICGS (2021): Komposisi dan pengangkatan 3.7 Proses pemilihan direktur Para direktur sebaiknya dipilih menjadi anggota dewan setiap tahun, atau dipilih setiap tiga tahun sekali, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara mendukung pada setiap resolusi. ICGS (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.7 Director election process Directors should be elected to the board preferably on an annual basis, or stand for election once every three years, and be accountable to shareholders by approval of a majority of shares voted in favor on each resolution.	375
	Masalah Remunerasi Remuneration Matters		
D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5. Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5. Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. ICGN (2021) PRINSIP 5: Remunerasi Remunerasi harus dirancang untuk menyelaraskan kepentingan CEO, pejabat eksekutif, dan tenaga kerja secara adil dan efektif dengan strategi dan tujuan perusahaan untuk membantu memastikan pelestarian dan penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Remunerasi agregat harus diimbangi dengan tepat dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan retensi modal untuk investasi masa depan dan tingkat kuantum harus dapat dipertahankan relatif terhadap pertimbangan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. ICGN (2021) PRINCIPLE 5: Remuneration Remuneration should be designed to equitably and effectively align the interests of the CEO, executive officers and workforce with a company's strategy and purpose to help ensure long-term sustainable value preservation and creation. Aggregate remuneration should be appropriately balanced with the payment of dividends to shareholders and retention of capital for future investment and the level of quantum should be defendable relative to social considerations relating to income inequality.	396-399
D.3.12	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?		396-399

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan penarikan kembali dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.5 Menyelaraskan remunerasi eksekutif dan dewan direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang sahamnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.5 Aligning key executive and board remuneration with the longer term interests of the company and its shareholders. Banyak yurisdiksi merekomendasikan atau mengharuskan agar kebijakan dan kontrak remunerasi untuk anggota dewan dan eksekutif utama ditangani oleh komite khusus dewan yang terdiri dari seluruh atau sebagian besar direktur independen dan mengecualikan eksekutif yang bertugas di komite remunerasi masing-masing, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Pengenalan ketentuan malus dan claw-back dianggap sebagai praktik yang baik. Ketentuan tersebut memberikan perusahaan hak untuk menahan dan memulihkan kompensasi dari para eksekutif dalam kasus penipuan manajerial dan keadaan lainnya, misalnya ketika perusahaan diharuskan untuk menyatakan kembali laporan keuangannya karena ketidakpatuhan material terhadap persyaratan pelaporan keuangan. Many jurisdictions recommend or require that remuneration policy and contracts for board members and key executives be handled by a special committee of the board comprising either wholly or a majority of independent directors and excluding executives that serve on each other's remuneration committees, which could lead to conflicts of interest. The introduction of malus and claw-back provisions is considered good practice. They grant the company the right to withhold and recover compensation from executives in cases of managerial fraud and other circumstances, for example when the company is required to restate its financial statements due to material noncompliance with financial reporting requirements.	518
	Audit Internal Internal Audit		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Dewan direksi harus menunjukkan peran kepemimpinan untuk memastikan bahwa sarana pengawasan risiko yang efektif telah tersedia. Memastikan integritas sistem pelaporan dan pemantauan yang penting akan mengharuskan dewan direksi menetapkan dan menegakkan garis tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas di seluruh organisasi. Dewan direksi juga perlu memastikan bahwa ada pengawasan yang tepat oleh manajemen senior. The board should demonstrate a leadership role to ensure that an effective means of risk oversight is in place. Ensuring the integrity of the essential reporting and monitoring systems will require that the board sets and enforces clear lines of responsibility and accountability throughout the organization. The board will also need to ensure that there is appropriate oversight by senior management. Biasanya, hal ini mencakup pembentukan fungsi audit internal. Fungsi ini dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan berkelanjutan kepada komite audit dewan atau badan setara dalam pengawasan komprehensifnya terhadap kontrol internal dan operasi perusahaan. Peran dan fungsi audit internal bervariasi di berbagai yurisdiksi, tetapi dapat mencakup penilaian dan evaluasi tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol internal. Normally, this includes the establishment of an internal audit function. This function can play a critical role in providing ongoing support to the audit committee of the board or an equivalent body of its comprehensive oversight of the internal controls and operations of the company. The role and functions of internal audit vary across jurisdictions, but they can include assessment and evaluation of governance, risk management, and internal control processes.	457-466
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama firma eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Perusahaan sering kali mengungkapkan bahwa mereka memiliki audit internal, tetapi dalam praktiknya, audit internal lebih banyak bersifat formal daripada substansi. Misalnya, audit internal internal dapat ditugaskan kepada seseorang dengan tanggung jawab operasional lainnya. Karena audit internal tidak diatur, tidak seperti audit eksternal, ada firma yang menyediakan layanan audit internal yang dialihdayakan yang tidak memiliki kualifikasi yang tepat untuk melakukannya. Memublikasikan identitas kepala audit internal atau penyedia layanan eksternal akan memberikan sejumlah perlindungan bahwa audit internal bersifat substantif. Companies often disclose that they have an internal audit but, in practice, it is not uncommon for it to exist more in form than in substance. For example, the in-house internal audit may be assigned to someone with other operational responsibilities. As internal audit is unregulated, unlike external audit, there are firms providing outsourced internal audit services which are not properly qualified to do so. Making the identity of the head of internal audit or the external service provider public would provide some level of safeguard that the internal audit is substantive.	457-466

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Dianggap sebagai praktik yang baik bagi auditor internal untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan tanggapan terkoordinasi oleh dewan. It is considered good practice for the internal auditors to report to an independent audit committee of the board or an equivalent body which is also responsible for managing the relationship with the external auditor, thereby allowing a co-ordinated response by the board.	457-466
	Pengawasan Risiko Risk Oversight		
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.2. Meninjau dan menilai kebijakan serta prosedur manajemen risiko. V.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.2. Reviewing and assessing risk management policies and procedures. V.D.8. Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards.	481-498
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	ICGN (2021) PRINSIP 6: Pengawasan risiko Dewan direksi harus secara proaktif mengawasi penilaian dan pengungkapan risiko utama perusahaan dan menyetujui pendekatan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala jika terjadi perubahan bisnis yang signifikan dan memastikan bahwa pendekatan tersebut berfungsi secara efektif. ICGN (2021) PRINCIPLE 6: Risk oversight The board should proactively oversee the assessment and disclosure of the company's key risks and approve the approach to risk management and internal controls regularly with any significant business change and satisfy itself that the approach is functioning effectively.	498

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang secara material dihadapi perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV: Pengungkapan dan Transparansi IV. A Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi material tentang: IV.A.8 Faktor risiko yang dapat diperkirakan Pengguna informasi keuangan dan pelaku pasar memerlukan informasi tentang risiko material yang dapat diperkirakan secara wajar yang dapat mencakup: risiko yang khusus untuk industri atau wilayah geografis tempat perusahaan beroperasi; ketergantungan pada komoditas dan rantai nilai; risiko pasar keuangan termasuk risiko suku bunga atau mata uang; risiko yang terkait dengan derivatif dan transaksi di luar neraca; risiko perilaku bisnis; risiko keamanan digital; dan risiko keberlanjutan, terutama risiko terkait iklim. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV: Disclosure and Transparency IV. A Disclosure should include, but not be limited to, material information on: IV.A.8 Foreseeable risk factors Users of financial information and market participants need information on reasonably foreseeable material risks that may include: risks that are specific to the industry or the geographical areas in which the company operates; dependence on commodities and value chains; financial market risks including interest rate or currency risk; risks related to derivatives and off-balance sheet transactions; business conduct risks; digital security risks; and sustainability risks, notably climate-related risks. Prinsip-prinsip tersebut membayangkan pengungkapan informasi yang memadai dan menyeluruh untuk sepenuhnya memberi tahu investor dan pengguna lain tentang risiko material dan yang dapat diperkirakan dari perusahaan. Pengungkapan risiko paling efektif bila disesuaikan dengan perusahaan dan industri tertentu yang bersangkutan. Pengungkapan tentang sistem untuk memantau dan mengelola risiko semakin dianggap sebagai praktik yang baik, termasuk sifat dan efektivitas proses uji tuntas terkait. The Principles envision the disclosure of sufficient and comprehensive information to fully inform investors and other users of the material and foreseeable risks of the company. Disclosure of risk is most effective when it is tailored to the particular company and industry in question. Disclosure about the system for monitoring and managing risk is increasingly regarded as good practice, including the nature and effectiveness of related due diligence processes.	496-497

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.8 Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.8 Ensuring the integrity of the corporation's accounting and reporting systems for disclosure, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in compliance with the law and relevant standards. Auditor internal dianggap sebagai praktik yang baik untuk melapor kepada komite audit independen dari dewan direksi atau badan setara yang juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan auditor eksternal, sehingga memungkinkan respons yang terkoordinasi oleh dewan direksi. Fungsi audit internal dan eksternal harus diartikulasikan dengan jelas sehingga dewan direksi dapat memaksimalkan kualitas jaminan yang diterimanya. Komite audit, atau badan setara, juga harus dianggap sebagai praktik yang baik untuk meninjau dan melaporkan kepada dewan direksi kebijakan paling kritis yang menjadi dasar laporan keuangan dan laporan perusahaan lainnya. Namun, dewan direksi harus tetap memegang tanggung jawab akhir untuk mengawasi sistem manajemen risiko perusahaan dan untuk memastikan integritas sistem pelaporan. Beberapa yurisdiksi telah menetapkan ketentuan bagi ketua dewan direksi untuk melaporkan proses pengendalian internal. It is considered good practice for the internal auditors to report to an independent audit committee of the board or an equivalent body which is also responsible for managing the relationship with the external auditor, thereby allowing a co-ordinated response by the board. Both internal and external audit functions should be clearly articulated so that the board can maximize the quality of assurance it receives. It should also be regarded as good practice for the audit committee, or equivalent body, to review and report to the board the most critical policies which are the basis for financial and other corporate reports. However, the board should retain final responsibility for oversight of the company's risk management system and for ensuring the integrity of the reporting systems. Some jurisdictions have provided for the chair of the board to report on the internal control process.	500
D.4	Orang-orang di Dewan People on the Board		
	Ketua Dewan Board Chairman		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.4.1	Apakah orang yang berbeda memegang peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Di wilayah hukum dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan Ketua. Pemisahan kedua jabatan tersebut secara umum dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa wilayah hukum jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. Mekanisme semacam itu juga dapat membantu memastikan tata kelola perusahaan yang berkualitas tinggi dan fungsi dewan direksi yang efektif. Ketua atau direktur independen utama dapat, di beberapa wilayah hukum, didukung oleh sekretaris perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. In jurisdictions with single tier board systems, the objectivity of the board and its independence from management may be strengthened by the separation of the role of chief executive and Chair. Separation of the two posts is generally regarded as good practice, as it can help to achieve an appropriate balance of power, increase accountability and improve the board's capacity for decision making independent of management. The designation of a lead director who is independent of management is also regarded as a good practice alternative in some jurisdictions if that role is defined with sufficient authority to lead the board in cases where management has clear conflicts. Such mechanisms can also help to ensure high quality governance of the company and the effective functioning of the board. The chair or lead independent director may, in some jurisdictions, be supported by a company secretary.	120
D.4.2	Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/ commissioner?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.1 Kepemimpinan independen Harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara peran ketua dewan dan CEO untuk menghindari kewenangan pengambilan keputusan yang tidak terbatas pada satu individu. Hal ini khususnya relevan dalam perusahaan yang dikendalikan ketika ketua atau CEO merupakan pemegang saham yang signifikan. Dewan harus diketuai oleh direktur independen yang harus independen pada tanggal pengangkatan. Jika peran ketua dan CEO digabungkan, dewan harus menjelaskan alasan mengapa hal ini merupakan kepentingan terbaik perusahaan dalam laporan tahunan dan terus meninjau strukturnya. Tanggung jawab ketua, CEO, direktur independen utama, dan ketua komite harus dijelaskan dengan jelas dan diungkapkan kepada publik. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.1 Independent leadership There should be a clear division of responsibilities between the role of the chair of the board and the CEO to avoid unfettered powers of decision-making in any one individual. This is particularly relevant in controlled companies when either the chair or CEO are significant shareholders. The Board should be chaired by an independent director who should be independent on the date of appointment. Should the role of the chair and CEO be combined, the board should explain the reasons why this is in the best interests of the company in the annual report and keep the structure under review. The responsibilities of the chair, CEO, lead independent director and committee chairs should be clearly described and publicly disclosed.	120

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.4.3	Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.5 Suksesi CEO menjadi Ketua Praktik CEO perusahaan yang pensiun tetap berada di dewan direksi sebagai direktur harus dicegah, terlepas dari adanya masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikan posisi ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran (misalnya, periode dua tahun) ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.5 CEO succession to Chair The practice of a company's retiring CEO remaining on the board as a director should be discouraged, regardless of any cooling off period, or in the event this practice does take place, the retiring CEO should not serve on board committees that require independent representation. If, exceptionally, the board decides that a retiring CEO should succeed to become chair, the board should consult with shareholders in advance setting out a convincing rationale and provide detailed explanation in the annual report. Unless there are extraordinary circumstances, there should be a break in service between the roles (e.g., a period of two years)	120
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.3 Peran Ketua Ketua harus memimpin dewan dan memastikan efektivitasnya sambil mengilhami komitmen bersama di antara para direktur terhadap tujuan dan strategi jangka panjang perusahaan. Ini termasuk mendorong budaya keterbukaan untuk memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan dan waktu yang cukup untuk membahas semua agenda. Ketua harus menetapkan agenda rapat, memastikan bahwa anggota dewan memiliki informasi yang cukup dan tepat waktu untuk menantang dan memperdebatkan proposal manajerial secara konstruktif. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.3 Role of the Chair The chair should lead the board and ensure its effectiveness while inspiring a shared commitment among directors to the company's purpose and long-term strategy. This includes encouraging a culture of openness to allow a range of views to be expressed and adequate time for discussion of all agenda items. The chair should set the meeting agenda, ensuring that board members have sufficient and timely information to constructively challenge and debate managerial proposal.	380-382
	Direktur Independen Utama Lead Independent Director		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Direktur Utama/Senior Independen dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	ICGN (2021) PRINSIP 2: Kepemimpinan dan independensi 2.4 Direktur independen utama Dewan direksi harus menunjuk Direktur Independen Utama (DIU) meskipun ketua dewan direksi bersifat independen. DIU menyediakan saluran komunikasi yang berharga bagi pemegang saham, pemangku kepentingan terkait, dan direktur untuk membahas masalah yang mungkin melibatkan konflik kepentingan bagi ketua dewan direksi yang dapat mencakup pemegang saham signifikan jika ada hubungan di antara mereka. DIU tidak boleh memiliki masa jabatan direktur di perusahaan yang menimbulkan pertanyaan mengenai independensi DIU sebagaimana ditetapkan dalam Panduan 2.6.h. Dalam dewan direksi dua tingkat, peran DIU dapat diambil alih oleh wakil ketua. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Leadership and independence 2.4 Lead independent director The Board should appoint a Lead Independent Director (LID) even when the chair is independent. The LID provides shareholders, relevant stakeholders and directors with a valuable channel of communication to discuss matters that may involve a conflict of interest for the board chair which may include significant shareholders if there is a connection between them. The LID should not have directorship tenure in the company that raises questions as to the LID's independence as set out in Guidance 2.6.h. In a two-tier board the LID role could be assumed by a vice chair	380-382
	Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies		
D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan Dewan Direksi harus terdiri dari cukup banyak direktur dengan pengetahuan, independensi, kompetensi, pengalaman industri, dan keberagaman perspektif yang relevan untuk menghasilkan tantangan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan objektif yang sejalan dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang, dan pemangku kepentingan yang relevan. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment The Board should comprise a sufficient mix of directors with relevant knowledge, independence, competence, industry experience and diversity of perspectives to generate effective challenge, discussion and objective decision-making in alignment with the company's purpose, long-term strategy and relevant stakeholders.	380-382
D.5	**Kinerja Dewan** **Board Performance**		
	Pengembangan Direktur Directors Development		
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru? Does the company have orientation programs for new directors/commissioners?	ICGN (2021) PRINSIP 1: Peran dan tanggung jawab dewan direksi 1.5 Komitmen Dewan direksi harus mengadakan rapat secara berkala untuk melaksanakan tugasnya dan para direktur harus menyediakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan menghadiri rapat dewan direksi. Harus ada induksi formal bagi semua direktur dewan direksi baru untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan, model bisnis, dan strategi perusahaan sesegera mungkin setelah pengangkatan mereka. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Board role and responsibilities 1.5 Commitment The board should meet regularly to discharge its duties and directors should commit adequate time to board meeting preparation and attendance. There should be a formal induction for all new board directors to ensure they have a comprehensive understanding of the company's purpose, business model and strategy as soon as possible after their appointment.	385

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direktur/komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang berkelanjutan atau berkesinambungan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/ commissioners to attend ongoing or continuous professional education programs?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung jawab dewan direksi V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.4 Dewan direksi harus secara berkala melakukan evaluasi untuk menilai kinerja mereka dan menilai apakah mereka memiliki perpaduan latar belakang dan kompetensi yang tepat, termasuk berkenaan dengan gender dan bentuk keberagaman lainnya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The responsibilities of the board V.E. The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. V.E.4 Boards should regularly carry out evaluations to appraise their performance and assess whether they possess the right mix of background and competences, including with respect to gender and other forms of diversity.	385
	Pengangkatan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance		
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Pelaksana/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/ Managing Director/President and key management?		385
D.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Pelaksana/ Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/ President?	V.D. Dewan direksi harus menjalankan beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Pemantauan tata kelola oleh dewan direksi mencakup tinjauan berkelanjutan terhadap struktur internal perusahaan untuk memastikan adanya garis akuntabilitas yang jelas bagi manajemen di seluruh organisasi. Pemantauan tersebut juga harus mencakup apakah kerangka tata kelola perusahaan tetap sesuai dengan perubahan material pada ukuran, kompleksitas, strategi bisnis, pasar, dan persyaratan peraturan perusahaan. Selain mewajibkan pemantauan dan pengungkapan praktik tata kelola perusahaan secara berkala, setidaknya dalam bentuk ringkasan, banyak yurisdiksi telah merekomendasikan, atau bahkan mewajibkan, penilaian oleh dewan direksi atas kinerja mereka dan kinerja komite mereka, masing-masing anggota dewan direksi, ketua dewan direksi, dan CEO. V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. Monitoring of governance by the board includes continuous review of the internal structure of the company to ensure that there are clear lines of accountability for management throughout the organization. Such monitoring should also include whether the company's governance framework remains appropriate in light of material changes to the company's size, complexity, business strategy, markets, and regulatory requirements. In addition to requiring the monitoring and disclosure of corporate governance practices on a regular basis, at least in summary form, many jurisdictions have moved to recommend, or indeed mandate, assessment by boards of their performance and of the performance of their committees, individual board members, the chair and the CEO.	403-406
	Penilaian Dewan Board Appraisal		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V: Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V: The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika ada posisi seperti itu), komite dewan direksi, dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan direksi harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Direktur Independen Utama dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan direksi harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.3 Evaluation Board evaluation should be conducted annually to review composition in alignment with the company's long-term strategy, succession planning and policy on diversity, equity and inclusion. The board should undertake a rigorous review of its performance (as a collective body), the company secretary (where such a position exists), the board's committees and individual directors prior to being proposed for election. The board should periodically (preferably every three years) engage an independent outside consultant to undertake an external evaluation. The Lead Independent Director and Nomination Committee should be responsible for performance evaluation of the chair. The board should disclose the process for evaluation and, as far as reasonably possible, any material issues of relevance arising from the conclusions and/or actions taken as a consequence	403-406
	Penilaian Direktur Director Appraisal		
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?		403-406
	Penilaian Komite Committee Appraisal		

Prinsip Principle		Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V. Tanggung Jawab Dewan Direksi V.D. Dewan Direksi harus memenuhi beberapa fungsi utama, termasuk: V.D.3 Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V. The Responsibilities of the Board V.D. The board should fulfil certain key functions, including: V.D.3 Monitoring the effectiveness of the company's governance practices and making changes as needed. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan pengangkatan 3.3 Evaluasi Evaluasi dewan direksi harus dilakukan setiap tahun untuk meninjau komposisi yang selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan, perencanaan suksesi, dan kebijakan tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dewan direksi harus melakukan tinjauan ketat terhadap kinerjanya (sebagai badan kolektif), sekretaris perusahaan (jika ada posisi seperti itu), komite dewan direksi, dan direktur individu sebelum diusulkan untuk dipilih. Dewan direksi harus secara berkala (sebaiknya setiap tiga tahun) melibatkan konsultan eksternal independen untuk melakukan evaluasi eksternal. Direktur Independen Utama dan Komite Nominasi harus bertanggung jawab atas evaluasi kinerja ketua. Dewan direksi harus mengungkapkan proses evaluasi dan, sejauh mungkin, setiap masalah material yang relevan yang timbul dari kesimpulan dan/atau tindakan yang diambil sebagai konsekuensinya. ICGN (2021) PRINCIPLE 3: Composition and appointment 3.3 Evaluation Board evaluation should be conducted annually to review composition in alignment with the company's long-term strategy, succession planning and policy on diversity, equity and inclusion. The board should undertake a rigorous review of its performance (as a collective body), the company secretary (where such a position exists), the board's committees and individual directors prior to being proposed for election. The board should periodically (preferably every three years) engage an independent outside consultant to undertake an external evaluation. The Lead Independent Director and Nomination Committee should be responsible for performance evaluation of the chair. The board should disclose the process for evaluation and, as far as reasonably possible, any material issues of relevance arising from the conclusions and/or actions taken as a consequence.	369-371

TINGKAT 2 – ITEM TAMBAHAN

LEVEL 2 – BONUS ITEMS

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(B)A.1.1 Apakah perusahaan melaksanakan pemungutan suara elektronik secara langsung dan aman secara tidak langsung pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Hak pemegang saham II.C.6 Fasilitasi identifikasi dan partisipasi pemegang saham mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik yang aman baik untuk rapat jarak jauh maupun tatap muka. Pemungutan suara melalui kuasa juga direkomendasikan untuk mempermudah partisipasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C. Shareholder rights II.C.6 Encourages the use of information technology in voting, including secure electronic voting for both remote and in-person meetings, and supports proxy voting mechanisms.	326
(B)A.2.1 Apakah perusahaan merilis pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Hak pemegang saham II.C.1 Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang memadai terkait isu yang akan diputuskan. II.C.5 Partisipasi pemegang saham dalam keputusan penting harus difasilitasi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C. Shareholder rights II.C.1 Shareholders should receive sufficient and timely information regarding general meetings. II.C.5 Effective shareholder participation in key decisions should be facilitated. ICGN (2021) PRINCIPLE 10: Pemberitahuan Rapat Agenda rapat sebaiknya dipublikasikan di situs web perusahaan paling lambat satu bulan sebelum rapat berlangsung.	182
(B)B.1.1 Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4 Jika perusahaan menetapkan target keberlanjutan secara publik, maka metrik yang andal perlu diungkapkan secara berkala dalam format yang mudah diakses untuk menilai kredibilitas dan kemajuan pencapaian target. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.4 Disclosure of sustainability-related targets should be supported by reliable metrics disclosed regularly in an accessible format. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Perubahan iklim Dewan perlu menilai dampak perubahan iklim terhadap model bisnis serta mengungkapkan strategi, metrik, target, dan inisiatif untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Climate change The board should assess climate impact and disclose strategy, metrics, targets, and initiatives to manage climate-related risks and opportunities. TCFD – Metrics and Targets: Pengungkapan metrik, emisi (Scope 1, 2, dan jika relevan Scope 3), serta target dan kinerja terkait pengelolaan risiko dan peluang iklim.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
(B)B.1.2 Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya dijamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/ Sustainability Reporting is externally assured?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.5 Penerapan persyaratan secara bertahap untuk pengesahan jaminan tahunan oleh penyedia jasa independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai standar internasional untuk memberikan penilaian eksternal dan objektif atas pengungkapan keberlanjutan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.A.5 Phasing in requirements for annual assurance by an independent and qualified assurance provider to provide an external and objective assessment of sustainability disclosures. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Laporan keberlanjutan Pengungkapan keberlanjutan sebaiknya diperkuat melalui audit atau jaminan independen yang dilakukan secara berkala sesuai standar yang berlaku. ICGN (2021) PRINCIPLE 7: Sustainability reports Sustainability disclosures should be strengthened through periodic independent assurance in accordance with established standards. GRI 2-5: Jaminan eksternal Organisasi perlu mengungkapkan kebijakan, proses, standar, dan hasil jaminan eksternal atas laporan keberlanjutan, termasuk hubungan dengan penyedia jaminan.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(B)B.1.3 Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG para pemangku kepentingan? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.B Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan terkait isu keberlanjutan yang material. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.B Corporate governance frameworks should allow for dialogue between the company, shareholders and stakeholders on sustainability matters relevant to business strategy and materiality. GRI 2-29: Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan Organisasi harus mengungkapkan kategori pemangku kepentingan, tujuan keterlibatan, serta bagaimana keterlibatan dilakukan secara bermakna. GRI 2-29: Approach to stakeholder engagement The organization shall disclose stakeholder categories, engagement purposes, and how meaningful engagement is ensured.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
(B)B.1.4 Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan? Does the company have a unit/division/committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dalam fungsi pengawasan, strategi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C The corporate governance framework should ensure that boards consider material sustainability risks and opportunities in oversight, strategy, risk management and internal control systems. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Tanggung jawab Dewan bertanggung jawab atas tata kelola keberlanjutan, termasuk integrasi aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam strategi dan pengelolaan risiko perusahaan.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
(B)B.1.5 Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dalam fungsi pengawasan, strategi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C The corporate governance framework should ensure that boards consider material sustainability risks and opportunities in oversight, strategy, risk management and internal control systems. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Tanggung jawab Dewan bertanggung jawab dalam pengawasan penilaian dan pengelolaan risiko perusahaan, termasuk risiko keberlanjutan yang relevan. TCFD – Governance: Pengungkapan peran dewan dalam mengawasi risiko dan peluang terkait perubahan iklim.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
(B)B.1.6 Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C Dewan harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam penilaian kinerja dan pengambilan keputusan strategis, termasuk keterkaitannya dengan remunerasi eksekutif. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C Boards should consider sustainability factors in performance assessment and strategic decision-making, including linkage to executive remuneration. ICGN (2021) PRINCIPLE 1: Tanggung jawab Dewan perlu memastikan bahwa kebijakan remunerasi selaras dengan penciptaan nilai jangka panjang, termasuk aspek keberlanjutan.	Merujuk Kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.
(B)B.1.7 Apakah Sistem Whistle Blowing di perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties/institutions?	ICGN (2021) PRINCIPLE 4: Budaya perusahaan 4.2 Pengungkapan pelanggaran Perusahaan perlu memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran yang independen dan bersifat rahasia, yang memungkinkan pemangku kepentingan menyampaikan dugaan pelanggaran tanpa risiko pembalasan. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: Corporate culture 4.2 Whistleblowing The company should have an independent and confidential mechanism for reporting concerns regarding potential or suspected breaches without fear of retaliation.	535

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(B)C.1.1 Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report/statement released within 60 days from the financial year end?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A Pengungkapan dan transparansi IV.A.1 Pengungkapan harus mencakup informasi material mengenai hasil keuangan dan operasional perusahaan, termasuk laporan keuangan yang diaudit. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A Disclosure and transparency IV.A.1 Disclosure should include material information on financial and operating results, including audited financial statements. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan bagian dari praktik transparansi dan kepatuha	185
(B)D.1.1 Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. V.E.4 Perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan untuk meningkatkan keberagaman dewan, termasuk keterwakilan perempuan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E The board should exercise objective independent judgement. V.E.4 Companies should consider measures to enhance board diversity, including gender diversity.	372
(B)D.1.2 Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E.4 Perusahaan didorong untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan keberagaman dewan serta mengungkapkan kemajuannya. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E.4 Companies are encouraged to adopt policies and disclose progress on board diversity.	400
(B)D.2.1 Apakah Komite Nominasi sepenuhnya terdiri dari direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Tingkat independensi Dewan sebaiknya memiliki mayoritas direktur independen, dan komite penting seperti komite nominasi perlu didominasi oleh anggota independen untuk menjaga objektivitas. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.6 Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan.	426
(B)D.2.2 Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.6 Dewan harus memastikan proses nominasi yang transparan dan mempertimbangkan kompetensi serta kesesuaian dengan kebutuhan strategis perusahaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D.6 The board should ensure a transparent nomination process and consider competencies aligned with company strategy.	426
(B)D.3.1 Apakah perusahaan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh badan direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.6 Dewan direksi atau komite nominasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi profil yang dibutuhkan dan memastikan proses nominasi dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D.6 The board or nomination committee is responsible for identifying potential candidates that meet desired profiles and ensuring a transparent nomination process.	426
(B)D.4.1 Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% dari dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E.1 Dewan direksi harus mempertimbangkan penunjukan jumlah anggota independen yang memadai untuk memastikan penilaian yang objektif dan independen, khususnya dalam menangani potensi konflik kepentingan. ICGN (2021) PRINCIPLE 2: Tingkat independensi Dewan sebaiknya memiliki mayoritas direktur non-eksekutif independen untuk memperkuat objektivitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan.	120
(B)D.5.1 Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.D.2 Dewan direksi harus memastikan bahwa risiko material, termasuk risiko terkait teknologi dan keamanan digital, dipertimbangkan serta dikelola dalam kerangka manajemen risiko perusahaan, baik secara ex-ante maupun ex-post. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.D.2 The board should ensure that material risks, including digital and cyber risks, are considered and managed within the company's risk management framework.	190

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(B)D.6.1 Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	ICGN (2021) PRINCIPLE 6: Komite Risiko Komite risiko dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk meningkatkan transparansi, fokus, dan penilaian independen dalam pengawasan manajemen risiko dan pengendalian internal. ICGN (2021) PRINCIPLE 6: A risk committee can enhance transparency, focus, and independent judgment in overseeing risk management and internal controls.	436

TINGKAT 2 – PENALTI

LEVEL 2 – PENALTY

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(P)A.1.1 Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.A Pemegang saham harus diperlakukan secara setara. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.A Shareholders should be treated equitably.	Tidak No
(P)A.2.1 Apakah ada bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain terkait hak dasar mereka, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D Shareholders should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights.	Tidak No
(P)A.3.1 Apakah perusahaan memasukkan agenda tambahan yang tidak diumumkan dalam pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.2 Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai agenda rapat. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C.2 Shareholders should be furnished with sufficient and timely information regarding meeting agendas.	Tidak No
(P)A.3.2 Apakah Ketua Dewan dan Ketua semua Komite Dewan dan CEO tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairman of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C Dewan dan manajemen harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan hadir dalam RUPS. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.C Board members and key executives should be accountable to shareholders and attend general meetings.	Ketua Dewan, Ketua seluruh Komite Dewan, dan CEO hadir dalam RUPS. The Chair of the Board, all Committee Chairs, and the CEO were present at the GMS.
(P)A.4.1 Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan perjanjian pemegang saham? Did the company fail to disclose the existence of shareholders agreement?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D Struktur kepemilikan dan pengaturan yang memungkinkan pengendalian harus diungkapkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D Ownership structures and arrangements that enable control should be disclosed.	Tidak No
(P)A.4.2 Apakah perusahaan gagal mengungkapkan batasan pemungutan suara? Did the company fail to disclose voting caps?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D Hak suara dan pembatasannya harus diungkapkan secara transparan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D Voting rights and any limitations should be disclosed transparently.	Tidak No

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(P)A.4.3 Apakah perusahaan gagal mengungkapkan hak suara ganda? Did the company fail to disclose multiple voting rights?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D Struktur yang memberikan hak kontrol yang tidak proporsional harus diungkapkan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.D Structures that enable disproportionate control should be disclosed.	Tidak No
(P)A.5.1 Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/or cross holding structure apparent?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.3 Struktur modal seperti piramida, kepemilikan silang, dan saham dengan hak suara tidak proporsional dapat memungkinkan pengendalian yang tidak sebanding dengan kepemilikan ekuitas, sehingga perlu diungkapkan secara transparan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.A.3 Capital structures such as pyramid structures, cross-shareholdings and shares with multiple voting rights should be disclosed as they may enable disproportionate control.	Tidak No
(P)A.6.1 Pernahkah terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III.E.3 Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan ditegakkan melalui regulasi yang berlaku. ICGN (2021) PRINCIPLE 4: Transaksi saham oleh karyawan Dewan harus menetapkan aturan yang jelas untuk mencegah pemanfaatan informasi non-publik oleh direktur dan karyawan dalam perdagangan saham. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): III.E.3 Insider trading and market manipulation should be prohibited and enforced.	Tidak No
(P)A.7.1 Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi material dengan pihak berelasi dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non-compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	ICGN (2021) PRINCIPLE 9: Konflik kepentingan Dewan harus memastikan kebijakan dan prosedur terkait konflik kepentingan diterapkan secara efektif, termasuk pengungkapan dan pembatasan peran pihak yang memiliki kepentingan. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: Transaksi pihak berelasi Dewan harus memiliki kebijakan dan proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau transaksi pihak berelasi. ICGN (2021) PRINCIPLE 9: The board should ensure effective policies on conflicts of interest and robust processes for reviewing related party transactions.	281
(P)A.7.2 Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain perusahaan anak yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh pemegang saham pengendali, termasuk transaksi yang tidak wajar. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): II.G Minority shareholders should be protected from abusive actions, including non-arm's length transactions.	281
(P)B.1.1 Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau masalah lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labor/employment/consumer/insolvency/commercial/competition or environmental issues?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): Perusahaan juga didorong untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk terkait ketenagakerjaan, lingkungan, dan persaingan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D The rights of stakeholders established by law or through mutual agreements are to be respected.	281
(P)B.2.1 Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D.4 Pemangku kepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.D.4 Stakeholders should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	501
(P)B.2.2 Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C Dewan direksi harus memastikan bahwa praktik dan komunikasi perusahaan, termasuk terkait keberlanjutan, mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan selaras dengan tujuan serta strategi jangka panjang. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.C Boards should ensure that disclosures and communications, including on sustainability, are accurate and aligned with the company's strategy and objectives.	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(P)C.1.1 Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.B & IV.C Informasi keuangan harus disusun dan diungkapkan sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh auditor independen untuk memberikan keyakinan yang memadai. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.B & IV.C Financial information should be prepared in accordance with recognized standards and audited by an independent auditor.	Tidak No
(P)C.1.2 Apakah perusahaan menerima "pendapat tidak wajar" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.B & IV.C Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang wajar dan andal, didukung oleh audit eksternal yang independen dan berkualitas. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.B & IV.C Financial statements should present a true and fair view and be subject to high-quality independent audit.	Tidak No
(P)C.1.3 Apakah perusahaan menerima "pendapat tidak setuju" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C Audit eksternal harus memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan; opini yang tidak dapat diberikan menunjukkan kelemahan signifikan dalam pelaporan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C External audit should provide reasonable assurance on the reliability of financial statements.	Tidak No
(P)C.1.4 Apakah perusahaan pada tahun lalu telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.B Informasi keuangan harus disajikan secara akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sesuai standar yang berlaku. ICGN (2021) PRINCIPLE 8: Audit eksternal Dewan harus memastikan proses audit yang efektif untuk menjaga integritas laporan keuangan. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.B Financial information should be accurate, consistent and reliable.	Tidak No
(P)D.2.1 Apakah terdapat direktur/komisaris independen yang menjabat lebih dari 9 tahun atau lebih dari 2 periode (masing-masing 5 tahun) dalam kapasitas yang sama? Does the company have any independent directors/ commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity?	ICGN (2021) PRINCIPLE 3: 3.4 Tenure Direktur non-eksekutif independen harus menjabat selama jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan perspektif yang tidak memihak pada diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batas tersebut harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi yang memuaskan atas kontribusinya terhadap dewan. Independent non-executive directors should serve for an appropriate length of time to ensure they contribute an impartial perspective to board discussion and decision-making. Term limits, where they exist, and the identity of directors who have exceeded such limits should be disclosed. Director tenure should be reviewed by the Nomination Committee annually and re-election contingent on a satisfactory evaluation of contribution to the board.	Tidak No
(P)D.2.2 Apakah perusahaan tidak mengungkapkan secara tepat klasifikasi direktur (independen, non-eksekutif, eksekutif)? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	ICGN (2021) PRINCIPLE 2: 2.6 Independence criteria Dewan direksi harus mengidentifikasi dalam laporan tahunan nama-nama direktur yang dianggap independen dan yang mampu menjalankan penilaian independen tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. The board should identify in the annual report the names of directors considered by the board to be independent and who are able to exercise independent judgment free from any external influence.	Tidak No
(P)D.2.3 Apakah terdapat direktur independen/non-eksekutif/ komisaris yang menjabat di lebih dari 5 dewan perusahaan publik? Does the company have independent directors/non-executive/ commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly listed companies?	G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): VI.E.3 Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Jabatan di terlalu banyak dewan atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan. Beberapa yurisdiksi membatasi jumlah jabatan yang dapat dipegang. Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards or committees can interfere with the performance of board members. Some jurisdictions have limited the number of board positions that can be held.	Tidak No

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(P)D.3.1 Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): IV.C. An annual external audit should be conducted by an independent, competent and qualified auditor in accordance with internationally recognized auditing, ethical and independence standards in order to provide reasonable assurance to the board and shareholders on whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework. Penyediaan layanan non-audit oleh auditor eksternal kepada suatu perusahaan dapat mengganggu independensi mereka dan mungkin melibatkan mereka dalam mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau menimbulkan ancaman lain terhadap independensi. Untuk menghadapi ancaman potensial tersebut, beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan pembayaran kepada auditor eksternal untuk layanan non-audit. Contoh ketentuan lain yang dirancang untuk mendorong independensi auditor eksternal mencakup larangan atau pembatasan ketat pada sifat pekerjaan non-audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk klien audit mereka; komunikasi berkala kepada komite audit yang membahas sifat, waktu, dan biaya pekerjaan non-audit (termasuk persetujuan pekerjaan tersebut) serta hubungan yang dapat mengancam independensi auditor; rotasi wajib auditor (baik mitra atau dalam beberapa kasus perusahaan audit); masa kerja tetap untuk auditor; audit bersama; larangan sementara atas pekerjaan mantan auditor oleh perusahaan yang diaudit; dan melarang auditor atau tanggungan mereka memiliki saham finansial atau peran manajemen di perusahaan yang mereka audit. Beberapa yurisdiksi mengambil pendekatan regulasi yang lebih langsung dan membatasi persentase pendapatan non-audit yang dapat diterima auditor dari klien tertentu atau membatasi persentase total pendapatan auditor yang dapat berasal dari satu klien. Provision of non-audit services by the external auditor to a company can impair their independence and might involve them auditing their own work or present other threats to independence. To deal with such potential threats, some jurisdictions require the disclosure of payments to external auditors for non-audit services. Examples of other provisions designed to promote external auditor independence include bans or severe limitation on the nature of non-audit work which can be undertaken by an auditor for their audit client; periodic communications to the audit committee discussing the nature, timing and fees of the non-audit work (including the approval of such work) as well as relationships that may threaten auditor independence; mandatory rotation of auditors (either partners or in some cases the audit company); a fixed tenure for auditors; joint audits; a temporary ban on the employment of an ex-auditor by the audited company; and prohibiting auditors or their dependents from having a financial stake or management role in the companies they audit. Some jurisdictions take a more direct regulatory approach and limit the percentage of non-audit income that the auditor can receive from a particular client or limit the total percentage of auditor income that can come from one client.	Tidak No

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
(P)D.4.1 Apakah ketua pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): V.E. Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. Di wilayah hukum dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan ketua. Pemisahan kedua jabatan tersebut dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai praktik yang baik di beberapa wilayah hukum jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023): V.E. The board should be able to exercise objective independent judgment on corporate affairs. In jurisdictions with single tier board systems, the objectivity of the board and its independence from management may be strengthened by the separation of the role of chief executive and chair. Separation of the two posts is regarded as good practice, as it can help to achieve an appropriate balance of power, increase accountability and improve the board's capacity for decision-making independent of management. The designation of a lead director who is independent of management is also regarded as good practice alternative in some jurisdictions if that role is defined with sufficient authority to lead the board in cases where management has clear conflicts. ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.5 Suksesi CEO menjadi Ketua Praktik CEO perusahaan yang pensiun tetap berada di dewan direksi sebagai direktur harus dicegah, terlepas dari adanya masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikan posisi ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran-peran tersebut (misalnya, periode dua tahun). ICGN (2021) PRINCIPLE 2: 2.5 CEO succession to Chair The practice of a company's retiring CEO remaining on the board as a director should be discouraged, regardless of any cooling off period, or in the event this practice does take place, the retiring CEO should not serve on board committees that require independent representation. If, exceptionally, the board decides that a retiring CEO should succeed to become chair, the board should consult with shareholders in advance setting out a convincing rationale and provide detailed explanation in the annual report. Unless there are extraordinary circumstances, there should be a break in service between the roles (e.g. a period of two years).	Tidak No
A.2.1 Perubahan pada anggaran dasar perusahaan? Amendments to the company's constitution?	G20/OECD (2015) Prinsip II (B) Pemegang saham harus memperoleh informasi yang cukup mengenai, dan memiliki hak untuk menyetujui atau berpartisipasi dalam, keputusan yang berkaitan dengan perubahan fundamental perusahaan seperti: (1) amandemen anggaran dasar, atau akta pendirian atau dokumen serupa yang mengatur perusahaan. G20/OECD (2015) Principle II (B) Shareholders should be sufficiently informed about, and have the right to approve or participate in, decisions concerning fundamental corporate changes such as: (1) amendments to the statutes, or articles of incorporation or similar governing documents of the company.	Tidak No
A.2.2 Otorisasi saham tambahan? The authorization of additional shares?	G20/OECD (2015) Prinsip II (B): (2) otorisasi penambahan saham. G20/OECD (2015) Principle II (B): (2) the authorization of additional shares.	Tidak No
A.2.3 Pengalihan semua atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan? The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	Prinsip II (B) G20/OECD (2015): (3) transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan. G20/OECD (2015) Principle II (B): (3) extraordinary transactions, including the transfer of all or substantially all assets, that in effect result in the sale of the company.	Tidak No

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
B.1.1 Apakah saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham? Does the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	Prinsip II OECD E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan. 1. Dalam seri kelas apa pun, semua saham harus memiliki hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan oleh kelas saham yang terkena dampak negatif. OECD Principle II E. All shareholders of the same series of a class should be treated equally. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of influence or control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. 1. Within any series of a class, all shares should carry the same rights. All investors should be able to obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase. Any changes in economic or voting rights should be subject to approval by those classes of shares which are negatively affected. Prinsip 9.1 ICGN Kelas saham Informasi yang memadai tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu. Saham biasa atau saham biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus diungkapkan dan dijelaskan. Struktur saham kelas ganda harus terus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan. ICGN Principle 9.1 Share classes Sufficient information about the material attributes of all of the company's classes and series of shares should be disclosed on a timely basis. Ordinary or common shares should feature one vote for each share. Divergence from a 'one-share, one-vote' standard which gives certain shareholders power disproportionate to their economic interests should be disclosed and explained. Dual class share structures should be kept under review and should be accompanied by commensurate extra protections for minority shareholders, particularly in the event of a takeover bid.	Tidak No
B.3.1 Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar? Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	Prinsip III OECD E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan peraturan yang berlaku harus ditegakkan. OECD Principle III E. Insider trading and market manipulation should be prohibited and the applicable rules enforced. Prinsip 4 ICGN. Budaya Perusahaan 4.5 Transaksi saham oleh karyawan Harus ada aturan yang jelas mengenai perdagangan saham oleh direktur dan karyawan perusahaan itu sendiri. Individu tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar. ICGN Principle 4. Corporate Culture 4.5 Employee share dealing There should be clear rules regarding any trading by directors and employees in the company's own securities. Individuals should not benefit directly or indirectly from knowledge which is not generally available to the market.	551
B.4.1 Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan direktur/komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan konflik kepentingan lainnya? Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	Prinsip II OECD F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. 1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi dengan pihak terkait harus ditangani. 2. Anggota dewan dan eksekutif utama harus diminta untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung memengaruhi perusahaan. OECD Principle II F. Related-party transactions should be approved and conducted in a manner that ensures proper management of conflict of interest and protects the interest of the company and its shareholders. Conflicts of interest inherent in related-party transactions should be addressed. Members of the board and key executives should be required to disclose to the board whether they, directly, indirectly or on behalf of third parties, have a material interest in any transaction or matter directly affecting the corporation.	551

Prinsip Principle	Referensi Panduan Guiding Reference	Halaman Page
D.2.6 Rincian kehadiran masing-masing direktur/komisaris pada seluruh rapat direktur/komisaris yang diadakan selama tahun tersebut Attendance details of each director/commissioner in all directors/commissioners' meetings held during the year	PRINSIP VI G20/OECD: Tanggung Jawab Dewan Direksi (E) Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen yang objektif terhadap urusan perusahaan. 3. Anggota dewan direksi harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawab mereka. Pengabdian di terlalu banyak dewan direksi dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa negara telah membatasi jumlah posisi dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi lainnya kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya apakah mereka telah melewatkan sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait. G20/OECD PRINCIPLE VI: Responsibilities of the Board (E) The board should be able to exercise objective independent judgement on corporate affairs. 3. Board members should be able to commit themselves effectively to their responsibilities. Service on too many boards can interfere with the performance of board members. Some countries have limited the number of board positions that can be held. Specific limitations may be less important than ensuring that members of the board enjoy legitimacy and confidence in the eyes of shareholders. Disclosure about other board memberships to shareholders is therefore a key instrument to improve board nominations. Achieving legitimacy would also be facilitated by the publication of attendance records for individual board members (e.g. whether they have missed a sign	382

Pedoman Umum Governansi Korporat

Indonesia (PUGKI) General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengertian Prinsip Governansi Korporat

Governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Pada dasarnya, governansi korporat mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pemangku kepentingan korporasi. Governansi korporat tidak hanya menyangkut kepentingan pemegang saham tetapi juga menjaga keseimbangan dengan kebutuhan pemangku kepentingan lain seperti pemberi pinjaman, karyawan, pelanggan, pemasok, otoritas, masyarakat umum, serta komunitas tempat korporasi menjalankan bisnisnya.

PUGKI menggunakan istilah governansi, bukan tata kelola, karena frasa tata kelola dalam korporasi lebih berfokus pada pengurusan internal korporasi, sedangkan governansi berkaitan dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, antara lain hak-hak para pemegang saham dan pihak lainnya yang berada di luar ruang lingkup pengelolaan Direksi.

Dalam Pedoman Umum Governansi Korporat ini yang dimaksud sebagai korporasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut menetapkan struktur governansi korporat yang meliputi tiga organ korporasi, yaitu: organ kepemilikan, organ pengelolaan, dan organ pengawasan.

RUPS merupakan organ kepemilikan korporasi. Sebagai organ kepemilikan, RUPS merupakan kumpulan para pemegang saham korporasi yang secara bersama-sama mewujudkan sebagian hak-hak mereka melalui RUPS. Di lain pihak, RUPS digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai forum untuk mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan dan pengawasan korporasi, sekaligus untuk memenuhi sebagian hak-hak pemegang saham.

Seperti telah disebutkan di atas, korporasi diurus oleh dua organ, yaitu:
(1) organ yang terdiri dari para direktur yang disebut dengan Direksi, yang berperan sebagai organ pengelolaan korporasi; dan
(2) organ yang terdiri dari para komisaris yang disebut dengan Dewan Komisaris, yang berperan sebagai organ pengawasan dalam mengawasi aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi.

Direksi mempertanggungjawabkan peran pengelolaannya dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan peran pengawasannya kepada para pemegang saham melalui organ RUPS.

CHAPTER 1 INTRODUCTION

Understanding the Principles of Corporate Governance

Corporate governance is a structure and process used to direct and manage a business to achieve business progress and corporate accountability with the ultimate goal of creating corporate value and shareholder wealth in a sustainable manner by taking into account the interests of stakeholders.

Basically, corporate governance includes the rights and responsibilities and relationships between corporate stakeholders. Corporate governance not only concerns the interests of shareholders but also maintains a balance with the needs of other stakeholders such as lenders, employees, customers, suppliers, authorities, the general public, and the community in which the corporation runs its business.

PUGKI uses the term governance, not Governance, because the phrase governance in corporations focuses more on the internal management of the corporation, while governance relates to broader stakeholders, including the rights of shareholders and other parties outside the scope of management of the Board of Directors.

In this General Guideline for Corporate Governance, what is meant by a corporation is a legal entity formed based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The law stipulates the corporate governance structure which includes three organs of the corporation, namely: ownership organs, management organs, and supervisory organs.

GMS is an organ of corporate ownership. As an ownership organ, GMS is a collection of corporate shareholders who jointly realize some of their rights through GMS. On the other hand, GMS is used by the Board of Directors and the Board of Commissioners as a forum to be accountable for corporate management activities and supervisory activities, which also fulfills some of the rights of shareholders.

As mentioned above, a corporation is managed by two organs, namely:
(1) an organ consisting of directors called the Board of Directors, which acts as the corporate management organ; and
(2) an organ consisting of commissioners called the Board of Commissioners, which acts as a supervisory organ in supervising management activities carried out by the Board of Directors.

The Board of Directors is responsible for its management role and the Board of Commissioners is responsible for its supervisory role to shareholders through the GMS organ.

Maksud Penerapan Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Prinsip, rekomendasi, dan panduan dalam Pedoman ini dimaksudkan untuk menetapkan praktik governansi korporat berstandar global yang direkomendasikan bagi korporasi yang terdaftar di pasar modal serta dalam mengelola dana masyarakat. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan serta memenuhi harapan pemegang saham, kreditur, debitur, dan para pemangku kepentingan lainnya, guna mendorong penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, implementasi Pedoman ini diharapkan dapat mendorong percepatan perkembangan pasar modal dan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pedoman Governansi Korporat ini menjadi acuan bagi korporasi dalam menyusun kebijakan internal governansi korporat serta dalam penerapannya. Korporasi dapat mengadopsi praktik governansi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dengan mempertimbangkan lingkungan operasional, ukuran dan kompleksitas usaha, serta karakteristik risiko dan tantangan yang dihadapi.

Penjelasan Singkat Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Prinsip Governansi Korporat Indonesia mencakup hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, serta ketentuan dasar mengenai pengelolaan dan pengawasan korporasi di Indonesia. Prinsip ini juga meliputi aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan informasi.

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi (Direksi dan Dewan Komisaris),
2. prinsip yang mengatur proses dan hasil yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta
3. prinsip yang mengatur pemilik sumber daya sebagai pihak yang menerima manfaat utama dari penerapan governansi korporat.

Prinsip-prinsip tersebut dilandasi oleh empat pilar utama governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan, yang secara keseluruhan mendorong penciptaan nilai jangka panjang korporasi.

Empat Pilar Governansi Korporat

Perilaku Beretika

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, korporasi mengedepankan kejujuran, menghormati seluruh pihak, memenuhi komitmen, serta membangun dan menjaga nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan, serta dikelola secara independen sehingga tidak terjadi dominasi maupun intervensi oleh pihak lain.

Purpose of Implementing the Principles of Indonesian Corporate Governance

The principles, recommendations, and guidelines in these Guidelines are intended to establish globally recognized corporate governance practices for corporations listed on the capital market and managing public funds. Their implementation aims to protect the interests and meet the expectations of shareholders, creditors, debtors, and other stakeholders, in order to support sustainable long-term corporate value creation. Furthermore, the implementation of these Guidelines is expected to accelerate the development of the capital market and financial services sector in Indonesia.

These Corporate Governance Guidelines serve as a reference for corporations in formulating internal governance policies and implementing them. Corporations may adopt governance practices that suit their specific needs, taking into account the operating environment, the size and complexity of the business, and the nature of the risks and challenges faced.

A Brief Explanation of the Principles of Indonesian Corporate Governance

The Indonesian Corporate Governance Principles encompass the rights of shareholders, stakeholders and their fulfillment, as well as fundamental rules on the management and supervision of corporations in Indonesia. These principles also include aspects of ethics, risk management, and disclosure.

The Indonesian Corporate Governance Principles consist of eight principles grouped into three main categories:

1. principles governing corporate management and supervision functions (Board of Directors and Board of Commissioners),
2. principles governing the processes and outcomes produced by the Board of Directors and the Board of Commissioners, and
3. principles governing resource owners as the primary beneficiaries of corporate governance implementation.

These principles are underpinned by four key pillars of corporate governance, namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability, which collectively support long-term value creation.

Four Pillars of Corporate Governance

Ethical Behavior

In conducting its business activities, the corporation prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and consistently upholds moral values and trust. The corporation considers the interests of shareholders and other stakeholders based on fairness and equality principles and is managed independently to prevent domination or undue intervention by any party.

Akuntabilitas

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, korporasi harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan korporasi dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberlanjutan

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Penyusunan pedoman ini mengacu pada prinsip-prinsip governansi korporat berstandar global, pedoman governansi, serta Corporate Governance Codes dari berbagai negara.

Struktur dan Penerapan Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Struktur Pedoman adalah sebagai berikut: Prinsip, Rekomendasi, dan Panduan. Prinsip menjelaskan substansi keluaran yang diharapkan dari implementasi governansi korporat. Rekomendasi adalah praktik governansi korporat yang sebaiknya diterapkan korporasi untuk mencapai substansi keluaran yang tercermin dalam Prinsip. Untuk sebagian Rekomendasi terdapat Panduan yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas Rekomendasi dan praktik-praktik yang direkomendasikan untuk diimplementasikan. Selain melaksanakan praktik-praktik tersebut, korporasi diharapkan mengembangkan dan menjalankan praktik lainnya sesuai kebutuhan korporasi.

Penerapan Pedoman Governansi Korporat berlandaskan pada prinsip “Terapkan atau Jelaskan” (*apply or explain*). Korporasi didorong untuk menerapkan setiap Prinsip, Rekomendasi, dan Panduan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Rekomendasi dan panduan yang disampaikan adalah praktik governansi korporat berstandar global yang melengkapi praktik yang wajib untuk dilaksanakan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku. Dengan demikian, praktik governansi korporat yang diwajibkan dalam aturan perundangan tidak tercakup dalam pedoman ini. Aturan perundangan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Rekomendasi dan Panduan yang dianjurkan. Rekomendasi dan Panduan dimaksudkan untuk mendorong praktik governansi korporat terbaik sesuai dengan kebutuhan korporasi dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan. Penerapan

Accountability

The corporation can be accountable for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, the corporation must be managed properly, measurably, and in accordance with corporate interests while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance.

Transparency

To maintain objectivity in running a business, the corporation provides material and relevant information in a manner that is easily accessible and understood by stakeholders. The corporation takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations, but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Sustainability

The corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities toward society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their quality of life in a manner that is aligned with business interests and the sustainable development agenda. The preparation of this guideline refers to globally recognized corporate governance principles, governance guidelines, and Corporate Governance Codes from various countries.

Structure and Implementation of Indonesian Corporate Governance Principles

The structure of the Guidelines is as follows: Principles, Recommendations, and Guidelines. Principles explain the substance of the expected outputs from the implementation of corporate governance. Recommendations are corporate governance practices that should be implemented by corporations to achieve the substance of the outputs reflected in the principles. For some Recommendations, there are Guidelines that provide further explanation of the Recommendations and recommended practices to be implemented. In addition to implementing these practices, corporations are expected to develop and implement other practices according to their needs.

The implementation of the Corporate Governance Guidelines is based on the principle of “Apply or Explain.” Corporations are encouraged to implement each Principle, Recommendation, and Guideline in a manner appropriate to their business characteristics.

The recommendations and guidelines provided are global standard corporate governance practices that complement the practices that must be implemented in applicable laws and regulations. Thus, corporate governance practices required by laws and regulations are not covered in these guidelines. These laws and regulations are used as the basis for determining the Recommendations and Guidelines. The Recommendations and Guidelines are intended to encourage best corporate governance practices in accordance with the needs of the corporation in order to create sustainable value. The implementation of the Recommendations and Guidelines is not

Rekomendasi dan Panduan bukan hanya sekadar mematuhi prinsip governansi dalam bentuk penyusunan seperangkat aturan internal korporasi. Penerapan dilaksanakan secara substansi, yang mencakup pergeseran pola pikir dan budaya serta model bisnis dan bukan sekadar merupakan pendekatan daftar pengecekan (checklist).

Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris perlu mempelajari dan memahami Pedoman ini sehingga dapat menerapkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik jangka panjang korporasi. Direksi memastikan karyawan sepenuhnya memahami dan menghargai manfaat governansi korporat, proses, prosedur yang baik melalui program pelatihan dan komunikasi yang kuat. Kepercayaan para pemangku kepentingan hanya dapat diperoleh jika korporasi dengan sungguh-sungguh dan transparan menerapkan Prinsip, Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman ini sesuai kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang korporasi dengan menghargai kepentingan para pemangku kepentingan. Kesungguhan dan transparansi tersebut akan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk calon investor kepada korporasi.

Untuk Rekomendasi dan Panduan yang telah diterapkan, korporasi harus mengungkapkan dalam laporan tahunan bagaimana Rekomendasi dan Panduan dilaksanakan dengan menyertakan bukti (seperti aturan korporasi, piagam, kebijakan) di situs web korporasi. Jika ada Rekomendasi dan Panduan yang tidak dapat/belum diterapkan atau tidak relevan, korporasi harus memberikan penjelasan mengapa tidak/belum dapat menerapkan serta menyampaikan alternatif mekanisme yang dilaksanakan sebagai pengganti Rekomendasi/Panduan untuk dapat mencapai keluaran yang diharapkan. Jika korporasi akan menerapkan Rekomendasi dan Panduan di masa datang, korporasi harus mengungkapkan target penerapannya.

Apply or Explain adalah pengembangan lebih lanjut dari Comply or Explain. Berbeda dengan dasar "Patuhi atau Jelaskan" (comply or explain), dasar "Terapkan atau Jelaskan" (apply or explain) dimaksudkan untuk mendorong korporasi agar menerapkan Pedoman Governansi Korporat secara komprehensif dan substantif pada bisnis korporasi untuk kepentingan penciptaan nilai berkelanjutan jangka panjang, bukan hanya sekadar dalam rangka mematuhi Pedoman.

Korporasi memandang pengungkapan informatif praktik governansi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka menerapkan prinsip governansi korporat secara holistik dan efektif, dengan demikian, pengungkapan governansi korporat dapat, dalam jangka panjang, membantu korporasi menarik modal dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di pasar modal dan sektor jasa keuangan.

Setiap tahun Dewan Komisaris bersama Direksi harus meninjau implementasi Pedoman ini. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan tahunan apakah Direksi dan Dewan Komisaris telah meninjau implementasi Pedoman dengan cara yang sesuai dengan bisnis perusahaan.

just a matter of complying with governance principles in the form of compiling a set of internal corporate rules. The implementation is carried out in substance, which includes a shift in mindset and culture as well as a business model and is not just a checklist approach.

For this reason, the Board of Directors and the Board of Commissioners need to study and understand these Guidelines so that they can apply them in accordance with the needs and long-term best interests of the corporation. The Board of Directors ensures that employees fully understand and appreciate the benefits of good corporate governance, processes, procedures through strong training and communication programs. Stakeholder trust can only be obtained if the corporation seriously and transparently implements the Principles, Recommendations and Guidelines in these Guidelines as needed in order to achieve the corporation's long-term goals by respecting the interests of stakeholders. This seriousness and transparency will build the trust of stakeholders, including potential investors, in the corporation.

For the Recommendations and Guidelines that have been implemented, the corporation must disclose in its annual report how the Recommendations and Guidelines are implemented by including evidence (such as corporate rules, charters, policies) on the corporation's website. If there are Recommendations and Guidelines that cannot/have not been implemented or are not relevant, the corporation must provide an explanation as to why it cannot/has not been implemented and convey alternative mechanisms implemented as a replacement for the Recommendations/Guidelines to achieve the expected output. If the corporation will implement the Recommendations and Guidelines in the future, the corporation must disclose the target for implementation.

Apply or Explain is a further development of Comply or Explain. Different from the "Comply or Explain" basis, the "Apply or Explain" basis is intended to encourage corporations to implement the Corporate Governance Guidelines comprehensively and substantively in the corporation's business for the sake of creating long-term sustainable value, not just in order to comply with the Guidelines.

Corporations view informative disclosure of governance practices as an opportunity to demonstrate to stakeholders that they implement corporate governance principles holistically and effectively, thus, corporate governance disclosure can, in the long term, help corporations attract capital and maintain stakeholder trust in the capital market and financial services sector.

Every year, the Board of Commissioners together with the Board of Directors must review the implementation of these Guidelines. Companies must disclose in their annual reports whether the Board of Directors and Board of Commissioners have reviewed the implementation of the Guidelines in a manner appropriate to the company's business.

Berlaku untuk Siapa Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia ini?

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia utamanya berlaku bagi korporasi terbuka serta korporasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat yaitu korporasi yang mengeluarkan instrumen keuangan (obligasi, surat utang jangka menengah) dan korporasi yang berusaha di sektor jasa keuangan.

Pedoman ini dapat diterapkan pada korporasi lain termasuk korporasi milik negara, korporasi milik daerah yang telah menyadari pentingnya untuk mewujudkan governansi korporat yang baik. Pedoman ini juga dapat diterapkan pada korporasi yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta korporasi yang kegiatan bisnisnya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat.

Dengan memperhatikan aturan perundangan yang bersangkutan, pedoman ini juga dapat diterapkan pada badan hukum yang berbentuk selain perseroan terbatas, jika kegiatannya adalah menghimpun dan mengelola dana masyarakat, produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, dan kegiatannya berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan Masyarakat.

Pemutakhiran Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

Komite Nasional Kebijakan Governansi berkewajiban dan berkomitmen untuk mereviu Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia paling tidak setiap dua tahun berdasarkan perkembangan governansi domestik dan internasional serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

BAB 2 RINGKASAN PRINSIP GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA

Prinsip Governansi Korporat Indonesia terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok: (1) prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ penyelenggara governansi korporat, dan (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh organ-organ di atas, (3) kelompok prinsip yang mengatur penerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat

Prinsip kelompok pertama disajikan dalam prinsip 1 sampai dengan 3. Prinsip kelompok kedua disajikan dalam prinsip 4 sampai dengan 6. Prinsip kelompok ketiga disajikan dalam prinsip 7 dan 8.

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.

Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian

Who are the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance Applicable to?

The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance are primarily applicable to public corporations and corporations that collect and manage public funds, namely corporations that issue financial instruments (bonds, medium-term debt securities) and corporations that operate in the financial services sector.

These guidelines can be applied to other corporations, including state-owned corporations, regional-owned corporations that have realized the importance of realizing good corporate governance. These guidelines can also be applied to corporations whose products or services are used by the wider community, as well as corporations whose business activities have a broad impact on environmental and community sustainability.

By taking into account the relevant laws and regulations, these guidelines can also be applied to legal entities in the form of other than limited liability companies, if their activities are collecting and managing public funds, their products or services are used by the wider community, and their activities have a broad impact on environmental and community sustainability.

Update of General Guidelines for Indonesian Corporate Governance

The National Committee for Governance Policy is obliged and committed to review the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance at least every two years based on domestic and international governance developments and make necessary adjustments.

CHAPTER 2 SUMMARY OF PRINCIPLES OF INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE

The Principles of Indonesian Corporate Governance consist of eight principles divided into three groups: (1) principles that regulate the organs that organize corporate governance, and (2) principles that regulate the processes and outputs produced by the above organs, (3) a group of principles that regulate the beneficiaries of the implementation of corporate governance

The first group of principles are presented in principles 1 to 3. The second group of principles are presented in principles 4 to 6. The third group of principles are presented in principles 7 and 8.

Principle 1: Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Directors and Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently to create sustainable value for the best long-term interests of the corporation and shareholders, taking into account the interests of stakeholders.

Principle 1 relates to the roles and responsibilities of the Board of Directors in managing the corporation and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising the management of the corporation by the Board of Directors.

kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

In addition, this Principle regulates the performance assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners and their respective members, handling of conflicts of interest that occur in members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and improving the competence of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.

Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.

Principle 2: Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are selected and appointed in such a way that the composition of the Board of Directors as a management organ and the composition of the Board of Commissioners as a supervisory organ are diverse and each consists of Directors and Commissioners who have the commitment, knowledge, ability, experience and expertise needed to properly fulfill the management role of the Board of Directors and the supervisory role of the Board of Commissioners.

Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners with the long-term interests of the corporation and the creation of sustainable value.

Principle 2 requires that the selection and appointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners be carried out in such a way that the Board of Directors and Board of Commissioners each as management and supervisory organs have a composition of members with the knowledge, ability and expertise needed according to their respective roles. In addition, this Principle emphasizes the importance of remuneration policies to encourage members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to prioritize the long-term interests of the corporation based on the principle of sustainability, and requires disclosure of remuneration policies and information received by the Board of Directors and Board of Commissioners in a transparent and accountable manner.

Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.

Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Principle 3: Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Directors and Board of Commissioners have a close, open, constructive, professional and trusting working relationship for the best interests of the corporation.

Principle 3 emphasizes the importance of a close, open, constructive, professional and trusting working relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners in achieving the best interests of the corporation. Principle 3 also regulates the need for the Board of Commissioners to access complete information and the importance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners understanding the implications of the corporate ownership structure on the implementation of their roles.

Prinsip 4: Perilaku Etis

Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Principle 4: Ethical Behavior

The corporation is committed to acting ethically and responsibly, upholding the values and culture of the organization.

Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.

Principle 4 requires the corporation to make periodic statements about the corporation's commitment not only to comply with applicable laws and regulations, but also to act ethically and responsibly.

Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.

Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (responsible business) sebagai warga korporat yang baik (good corporate citizen). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.

Principle 5: Risk Management, Internal Control and Compliance

The corporation implements integrated corporate governance practices with the implementation of an effective internal control and risk management system, as well as a compliance management system in order to support the achievement of corporate goals, vision, mission, objectives, and performance targets in conducting business with integrity.

Principle 5 requires the Board of Directors to implement governance, internal control and risk management systems, and compliance management systems in an integrated manner as part of the strategy, management tools, and practices carried out by the corporation in conducting responsible business as a good corporate citizen. The Board of Commissioners monitors and provides input on the effectiveness of the implementation of governance, internal control and risk management systems, and corporate compliance management systems implemented in an integrated manner by the Board of Directors.

Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi

Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.

Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.

Principle 6: Disclosure and Transparency

The corporation makes accurate and timely disclosures on all material matters about the corporation.

Principle 6 requires the corporation to have a governance framework that provides assurance that accurate and timely disclosures on all material matters about the corporation are made, including financial condition and performance, ownership of the corporation, and corporate governance.

Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham

Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerjasama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.

Principle 7: Shareholder Rights

The corporation protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to obtain effective redress for violations of their rights.

Principle 7 explains the fulfillment of shareholder rights and fair treatment for shareholders, how active cooperation between the corporation and its shareholders is implemented and the effective exercise of some shareholder rights through the GMS.

Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan

Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.

Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Principle 8: Stakeholder Rights

The corporation recognizes the rights of stakeholders as set out in applicable laws and regulations or an agreement entered into by the corporation and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, jobs, and financially sound business sustainability.

Principle 8 explains the role of the Board of Directors and the Board of Commissioners in integrating sustainability aspects into the corporation's business model, implementing stakeholder engagement, and ensuring the protection of stakeholder rights. The Board of Commissioners monitors the integration of all of the above aspects carried out by the Board of Directors

Prinsip Principle		**Kriteria** Criteria		**Halaman** Page
1.	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners			
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Role and Responsibilities of the Board of Directors	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: 1. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; 2. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; 3. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta 4. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (corporate resilience) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: 1. competitive and focused on long-term performance; 2. ethical and responsible in running the business; 3. contributing positively to society and the environment; and 4. capable of surviving and growing (corporate resilience)	120
		1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's plans, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	98
		1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporation's vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	555-583
		1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	86
		1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	Merujuk kepada Laporan Keberlanjutan WEGE yang disusun secara terpisah. Referring to the WEGE Sustainability Report, which is prepared separately.

Prinsip Principle		Kriteria Criteria		Halaman Page
		1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate objectives and strategies.	190
		1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure adequate authority and availability of supporting devices so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	-
		1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Board of Directors Charter or by a Board of Directors Decree.	375
		1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	375
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Directors and its Members	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individual direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	403
		1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	403
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Role and Responsibilities of the Board of Commissioners	1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advice dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves the business plan and the long-term financial plan and short-term financial plan of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the management of its implementation to the Board of Directors. The Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions that are very important to the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	380
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	358
		1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan jender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinguishing between ethnicity, religion, race, inter-group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	403

Prinsip Principle	Kriteria Criteria		Halaman Page
	1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews the reporting on the implementation of the development and succession plan submitted by the President Director.	Diterapkan Implemented
	1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners a). submits to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee that carries out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	363
	1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	363
	1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporation's goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	363
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Diterapkan / Implemented
	1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual report and sustainability report and ensures its integrity, and oversees the corporate disclosure and communication process.	Diterapkan / Implemented
	1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	357
	1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	357
	1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	372
	1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows various views to be expressed, including coordinating the determination of the appropriate board meeting agenda and ensuring sufficient time is available to discuss all agendas. In addition, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Diterapkan / Implemented

Prinsip Principle	Kriteria Criteria		Halaman Page
1.4		Pembentukan Komite Formation of the Committee	
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	411, 426, 440
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that other committees formed by the Board of Commissioners are a majority independent parties, and that all members of the committee have the competence, commitment, and sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	411
	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is carried out objectively and independently, the President Commissioner may not be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances that must be explained in the annual report.	Diterapkan / Implemented
1.5		Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members	403
	1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. / The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	403
1.6		Benturan Kepentingan / Conflict of Interest	
	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner shall notify the Board of Commissioners and the chairman of the committee that carries out the nomination function, before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, other directorships or other positions with significant time commitments.	Diterapkan / Implemented
	1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and decision-making on potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	Diterapkan / Implemented
1.7		Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris / Improving the Competence of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners	
	1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards and other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge required to carry out their roles on the Board.	363 & 380

Prinsip Principle	Kriteria Criteria		Halaman Page
2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners			
	2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors	120
	2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau mayoritas pemegang saham. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining candidate candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not rely only on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.	426
	2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities, and expertise needed to properly fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of diversity in the Board of Directors.	Diterapkan / Implemented
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. / The corporate policy on diversity in the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	400
	2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so that they can produce the desired composition of the Board. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	Diterapkan / Implemented
	2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee carrying out the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate's profile meets the requirements set out in the expertise matrix and nomination criteria.	426
	2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan jender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect diversity in terms of ability, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender required to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	112
	2.1.7	Untuk memungkinkan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles that have the potential for conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	112

Prinsip Principle	Kriteria Criteria		Halaman Page
	2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and the Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	426
	2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Directors and Board of Commissioners	396-398
	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The remuneration of the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Diterapkan / Implemented
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. In addition, their position as President Commissioner and chairman and their membership in committees must also be considered.	396-398
	2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by considering the performance of corporate operations, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure for determining the remuneration policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Diterapkan / Implemented
3. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners			
	3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Employment Relationship	
	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is an open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leakage of confidential information.	Diterapkan / Implemented
	3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors works together with the Board of Commissioners in formulating the mission, vision and corporate strategy and regularly discusses its implementation.	380

Prinsip Principle		Kriteria Criteria		Halaman Page
		3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	450
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access to Board of Commissioners information	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may request the Board of Directors to provide additional information at any time.	Diterapkan / Implemented
3.3	Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders that may impact the management and operations of the corporation.	Diterapkan / Implemented
4	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** Ethical and responsible behavior	**4.1**	**Pedoman Etika dan Perilaku** Ethics and Conduct Guidelines	

Prinsip Principle		Kriteria Criteria		Halaman Page
4.1.1			Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: 1. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; 2. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; 3. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; 4. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; 5. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; 6. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. 7. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. 8. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. 9. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. 10. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Conduct and Business Ethics which must clearly express the corporation's expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employee will: 1. Act in the best interests of the corporation; 2. Act honestly and with high standards of integrity; 3. Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence; 4. Comply with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; 5. Avoid actions that violate laws and regulations or actions that are unethical based on the corporate ethics guidelines; 6. Not engage or participate in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively impact the corporation's reputation; 7. Not take advantage of the property or information owned by the corporation, other asset ownership or its customers for personal gain or that causes losses to the corporation and its customers; 8. Not take advantage of his position or opportunities generated by his position for personal gain; 9. Avoid the act of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for others that cause a conflict of interest/ provide benefits to third parties in violation of laws and regulations; 10. Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; 11. Ensure complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	509
4.1.2			Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	Diterapkan / Implemented
4.2	Nilai–nilai dan Budaya Organisasi Organizational Values and Culture	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, fosters and expresses corporate culture and values.	98
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethical Guidelines, Values and Culture	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and code of ethics are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	509

Prinsip Principle		Kriteria Criteria		Halaman Page
6.3	Diseminasi Informasi Dissemination of Information	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Channels for dissemination of information should provide equal, timely and cost-efficient access to relevant information for users.	
		6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that the annual statement on the implementation of the Indonesian Corporate Governance Code, including explanations on the implementation of each Recommendation and Guideline, is available on the website for a minimum period of five years.	555
		6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed in capital markets in jurisdictions other than the home jurisdiction, applicable corporate governance regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for cross listing, as well as for recognizing listing requirements for primary listing, must be transparent and documented.	Diterapkan Implemented
7	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** Protection of Shareholder Rights	**7.1**	**Hak Pemegang Saham** Shareholder Rights	
		7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	326
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. A corporation that is a parent entity ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and controlled entities in which the corporation has significant investments.	311
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial asset sales to ensure such transactions are conducted transparently, under fair conditions, and protect the rights of all shareholders according to their class.	311
		7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders	326
		7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures ensuring that a). all shareholders of the same series within a class are treated equally, b). disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structure and arrangements that enable certain shareholders to obtain disproportionate control relative to their ownership.	326
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures ensuring that related party transactions are approved and conducted in a manner that ensures conflicts of interest are properly managed and protects the interests of the corporation and shareholders.	281

Prinsip Principle	Kriteria Criteria		Halaman Page
	7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may gain direct or indirect advantage from information not yet available in the market.	551
	7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	
	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation calls the GMS with complete agenda and materials as early as possible (at the latest 28 days before the GMS) to provide sufficient time and information for shareholders to properly review the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as the corporate website.	328
	7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	328
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	328
	7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	328
	7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The results of voting and summary minutes of the GMS are fully disclosed to the public on the next working day.	329

Referensi Kriteria Annual Report Award (ARA)

Annual Report Award (ARA) Criteria Reference

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 Isi Laporan Tahunan Annual Report Content	Ketersediaan Availability
1		**Uraian Isi Laporan Tahunan** Annual Report Disclosure	
1		Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Audited Annual Financial Statements	AR 603-820
2		Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan Statement of Responsibility for the Annual Report by the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	AR 86-87
2		**Ikhtisar data keuangan penting** Financial Highlights	
		Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun Comparative Financial Information for the Last Three Fiscal Years, or Since Commencement of Operations if the Company Has Been in Operation for Less Than Three Years	AR 36
1		Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Profit (Loss) to Total Assets Ratio	AR 42
2		Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Profit (Loss) to Equity Ratio	AR 42
3		Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Profit (Loss) to Revenue/Sales Ratio	AR 42
4		Rasio lancar Current Ratio	AR 42
5		Rasio liabilitas terhadap ekuitas Liabilities to Equity Ratio	AR 42
6		Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Liabilities to Total Assets Ratio	AR 42
7		Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Perusahaan dan jenis industrinya Other Financial Information and Ratios Relevant to the Company and Its Industry Sector	AR 42
3		**Informasi Saham (Jika Ada)** Stock Information (If Any)	
1		Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir Issued Shares for Each Quarter Presented in Comparative Form for the Last Two Fiscal Years	AR 49
	a)	Jumlah saham yang beredar Number of Shares Outstanding	AR 49
	b)	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Market Capitalization Based on the Share Price Quoted on the Stock Exchange Where the Shares Are Listed	AR 49
	c)	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan Highest, Lowest, and Closing Share Prices Based on the Prices Quoted on the Stock Exchange Where the Shares Are Listed	AR 49
	d)	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan Trading Volume on the Stock Exchange Where the Shares Are Listed	AR 49
2		Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal In the Event of Corporate Actions Resulting in Changes to the Shares, Such as Stock Splits, Reverse Stock Splits, Stock Dividends, Bonus Shares, Changes in Par Value, Issuance of Convertible Securities, Capital Increases, and Capital Reductions	AR 52
	a)	tanggal pelaksanaan aksi korporasi Date of the Corporate Action	AR 52

			Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
		b)	rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham Stock Split Ratio, Reverse Stock Split Ratio, Stock Dividend Ratio, Bonus Share Ratio, Number of Convertible Securities Issued, and Changes in Share Par Value	AR 52
		c)	jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi Number of Shares Outstanding Before and After the Corporate Action	AR 52
		d)	jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada) Number of Convertible Securities Exercised (If Any)	AR 52
		e)	harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi Share Price Before and After the Corporate Action	AR 52
	3		Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut In the Event of a Trading Suspension and/or Delisting During the Fiscal Year, the Reasons for the Trading Suspension and/or Delisting	AR 52
	4		Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. If the Trading Suspension and/or Delisting Process Remains Ongoing Until the End of the Annual Report Period, the Actions Taken to Resolve the Trading Suspension and/or Delisting Process.	AR 52
4			**Laporan Direksi** Report of the Board of Directors	
	1		Kinerja Perusahaan Company Performance	
		a)	Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan Corporate Strategy and Strategic Policies	AR 76
		b)	peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan Role of the Board of Directors in Formulating the Company's Strategy and Strategic Policies	AR 76
		c)	proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Process Undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation	AR 76
		d)	perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perusahaan Comparison Between Actual Results and the Company's Targets	AR 77
		e)	kendala yang dihadapi Challenges Encountered	AR 78
	2		Gambaran tentang prospek usaha Perusahaan Overview of the Company's Business Prospects	AR 79
	3		Penerapan governansi Perusahaan Implementation of Corporate Governance	AR 80
5			**Laporan Dewan Komisaris** Report of the Board of Commissioners	
	1		Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan Perusahaan, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Perusahaan Assessment of the Board of Directors' Performance in Managing the Company, Including the Board of Commissioners' Oversight of the Formulation and Implementation of the Company's Strategy	AR 59
	2		Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yg disusun oleh Direksi View on the Company's Business Prospects Prepared by the Board of Directors	AR 63
	3		Pandangan atas penerapan governansi Perusahaan View on the Implementation of Corporate Governance	AR 64
6			**Profil Perusahaan** Company Profile	
	1		Akses terhadap Perusahaan termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Perusahaan Company Access Information, Including Branch Offices or Representative Offices, Enabling the Public to Obtain Information About the Company	AR 91
		a)	Alamat Address	AR 91

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	b)	nomor telepon Telephone Number	AR 91
	c)	alamat surat elektronik Email Address	AR 91
	d)	alamat situs web Website Address	AR 91
2		Riwayat singkat Perusahaan Brief History of the Company	AR 92
3		Visi dan misi Perusahaan serta budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; Company Vision and Mission, as well as Corporate Culture or Corporate Values	AR 98
4		Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan Business Activities Based on the Latest Articles of Association, Business Activities Conducted During the Fiscal Year, and Types of Products and/or Services Provided	AR 103
5		Wilayah operasional Perusahaan; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan Operational Areas; Operational Areas Refer to the Regions or Locations Where the Company Conducts Its Operations or the Scope of Its Operational Activities	AR 106
6		Struktur organisasi Perusahaan dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan Company Organizational Structure in Diagram Form, Covering at Least One Level Below the Board of Directors, Including Committees Under the Board of Directors (if any) and Committees Under the Board of Commissioners, Accompanied by Names and Positions	AR 108
7		Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan List of Memberships in Industry Associations at the National and International Levels Related to Sustainable Finance Implementation	AR 107
8		Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel Number of Employees by Gender, Position, Age Group, Educational Background, and Employment Status (Permanent/Contract) During the Fiscal Year; Information May Be Presented in Tabular Form.	AR 160
9		Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: Information on the Engagement of the Public Accountant (PA) and Public Accounting Firm (PAF), Including Their Network/Association/Alliance, Covering:	AR 180
	a)	Nama dan alamat Name and Address	AR 180
	b)	Periode penugasan Engagement Period	AR 180
	c)	informasi jasa audit yang diberikan; Information on Audit Services Provided	AR 180
	d)	biaya jasa (fee) audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit Fees for Each Engagement During the Fiscal Year	AR 180
	e)	informasi jasa non audit yang diberikan; Information on Non-Audit Services Provided	AR 180
	f)	biaya jasa (fee) non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Non-Audit Fees for Each Engagement During the Fiscal Year	AR 180
	g)	Catatan: dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut (atas poin A.1.6.9.e & f) Note: If the Appointed PA and PAF, Including Their Network/Association/Alliance, Did Not Provide Non-Audit Services, Such Information Shall Be Disclosed	AR 180
10		Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and Address of Other Capital Market Supporting Institutions and/or Professions Other Than the PA and PAF	AR 180

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
7		**Profil Direksi** Profile of the Board of Directors	
1		Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Name and Position in Accordance with Duties and Responsibilities	AR 120
2		Usia Age	AR 120
3		Kewarganegaraan Nationality	AR 120
4		Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Educational Background and/or Professional Certifications	AR 120
5		Riwayat jabatan, meliputi informasi Career History, Including:	AR 120
	a)	dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan Legal Basis for Appointment as a Member of the Board of Directors of the Company	AR 120
	b)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan. Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Committees, as well as Other Positions Within or Outside the Company	AR 120
	c)	Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.7.5.b) Note: If a Member of the Board of Directors Does Not Hold Any Concurrent Position, Such Information Shall Be Disclosed	AR 120
	d)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including the Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 120
6		Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Affiliation Relationships with Other Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, and Controlling Shareholders, Whether Directly or Indirectly, Up to the Ultimate Individual Beneficial Owner, Including the Names of the Affiliated Parties	AR 120
		Catatan: Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.7.6) Note: If a Member of the Board of Directors Has No Affiliation Relationship, Such Information Shall Be Disclosed	AR 120
7		Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Changes in the Composition of the Board of Directors and the Reasons for Such Changes	AR 125
		Catatan: (atas poin A.1.7.7) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Direksi terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi yang terakhir dan sebelumnya; Note: If There Were No Changes in the Composition of the Board of Directors, Such Information Shall Be Disclosed. If Changes in the Composition of the Board of Directors Occurred After the End of the Fiscal Year but Before the Deadline for Submission of the Annual Report, the Annual Report Shall Present Both the Latest and the Previous Composition of the Board of Directors.	AR 125
8		**Profil Dewan Komisaris** Profile of the Board of Commissioners	
1		Nama dan jabatan Name and Position	AR 112
2		Usia Age	AR 112
3		Kewarganegaraan Nationality	AR 112
4		Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi Educational Background and/or Professional Certifications	AR 112
5		Riwayat jabatan, meliputi informasi Career History, Including:	AR 112

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	a)	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris Legal Basis for Appointment as a Member of the Board of Commissioners	AR 112
	b)	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Perusahaan yang bersangkutan Legal Basis for the Initial Appointment as an Independent Commissioner of the Company	AR 112
	c)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Committees, as well as Other Positions Within or Outside the Company	AR 112
	c1)	Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.8.5.c) Note: If a Member of the Board of Commissioners Does Not Hold Any Concurrent Position, Such Information Shall Be Disclosed	AR 112
	d)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including the Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 112
6		Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Affiliation Relationships with Other Members of the Board of Commissioners, Major Shareholders, and Controlling Shareholders, Whether Directly or Indirectly, Up to the Ultimate Individual Beneficial Owner, Including the Names of the Affiliated Parties	AR 112
		Catatan: Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Perusahaan mengungkapkan hal tersebut (atas poin A.1.8.6) Note: If a Member of the Board of Commissioners Has No Affiliation Relationship, Such Information Shall Be Disclosed	AR 112
7		Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode Statement of Independence of the Independent Commissioner, If the Independent Commissioner Has Served for More Than Two Terms of Office	AR 373
8	a)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya Changes in the Composition of the Board of Commissioners and the Reasons for Such Changes	AR 116
	b)	Catatan: (atas poin A.1.8.8) 1. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 2. Dalam hal perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; Note: If There Were No Changes in the Composition of the Board of Commissioners, Such Information Shall Be Disclosed. If Changes in the Composition of the Board of Commissioners Occurred After the End of the Fiscal Year but Before the Deadline for Submission of the Annual Report, the Annual Report Shall Present Both the Latest and the Previous Composition of the Board of Commissioners.	AR 116
9		**Informasi pemegang saham** Shareholder Information	
1		Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Names of Shareholders and Their Ownership Percentages at the Beginning and End of the Fiscal Year, Consisting of:	
	a)	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Shareholders Owning 5% (Five Percent) or More of the Company's Shares	AR 164
	b1)	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perusahaan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Holding Shares in the Company	AR 165
	b2)	Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.1.b) Note: If None of the Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Hold Shares in the Company, Such Information Shall Be Disclosed	A R 165
	c)	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Public Shareholder Group, Consisting of Shareholders Each Holding Less Than 5% (Five Percent) of the Shares of the Issuer or Public Company	AR 164

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
2	a)	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Percentage of Indirect Ownership of the Company's Shares by Members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the Beginning and End of the Fiscal Year, Including Information on Shareholders Recorded in the Shareholders Register for the Purpose of Such Indirect Ownership	AR 165
	b)	Catatan: Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Perusahaan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas poin A.1.9.2) Note: If None of the Members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners Have Indirect Ownership of the Company's Shares, Such Information Shall Be Disclosed	AR 165
3		Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi Number of Shareholders and Ownership Percentages, Based on the Following Classifications:	
	a)	kepemilikan institusi lokal Local Institutional Ownership	AR 166
	b)	kepemilikan institusi asing Foreign Institutional Ownership	AR 166
	c)	kepemilikan individu lokal Local Individual Ownership	AR 166
	d)	kepemilikan individu asing Foreign Individual Ownership	AR 166
4		Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information on the Company's Major and Controlling Shareholders, Both Direct and Indirect, Up to the Ultimate Individual Beneficial Owner, Presented in the Form of a Scheme or Diagram	AR 168
5	a)	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Perusahaan memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut Names of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures in Which the Company Exercises Joint Control (If Any), Including Share Ownership Percentage, Business Activities, Total Assets, and Operational Status. For Subsidiaries, the Address of the Subsidiary Shall Also Be Disclosed	AR 171
6	a)	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada) Chronology of Share Listings, Number of Shares, Par Value, and Offering Price from Initial Listing Through the End of the Fiscal Year, Including the Name of the Stock Exchange Where the Issuer's or Public Company's Shares Are Listed, as well as Stock Splits, Reverse Stock Splits, Stock Dividends, Bonus Shares, Changes in Par Value, Conversion of Securities, and Capital Increases or Reductions (If Any)	AR 178
7		Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud sebelumnya, yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada) Information on the Listing of Other Outstanding Securities, Other Than Those Mentioned Above, That Have Not Matured During the Fiscal Year, Including at a Minimum the Name of the Security, Year of Issuance, Interest Rate/Yield, Maturity Date, Offering Value, and Credit Rating (If Any)	AR 179
10		**Analisa dan Pembahasan Manajemen** Management Discussion and Analysis	
1		Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Perusahaan, Operational Review by Business Segment in Accordance with the Company's Industry Classification	AR 232-243
	a)	Produksi, yg meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya Production, Including Processes, Capacity, and Developments	AR 232-243
	b)	Pendapatan/penjualan Revenue/Sales	AR 232-243
	c)	Profitabilitas Profitability	AR 232-243

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
2		Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, Comprehensive Financial Performance, Including a Comparison of Financial Performance for the Last Two Fiscal Years, Along with Explanations of the Causes and Impacts of Any Changes, Covering:	AR 242-256
	a)	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset Current Assets, Non-Current Assets, and Total Assets	AR 245
	b)	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas Current Liabilities, Non-Current Liabilities, and Total Liabilities	AR 245
	c)	Ekuitas Equity	AR 245
	d)	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi), komprehensif; dan Revenue/Sales, Expenses, Profit (Loss), Other Comprehensive Income, and Total Comprehensive Income (Loss)	AR 245
	e)	Arus kas Cash Flows	AR 246
3		Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan Ability to Meet Debt Obligations and Liabilities, Including the Presentation of Relevant Financial Ratios	AR 259
4		Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan Collectability of the Company's Receivables, Including the Presentation of Relevant Ratios	AR 261
5		Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud Capital Structure and Capital Management Policies, Including the Basis for Determining Such Policies	AR 268
6		Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan Discussion of Material Commitments for Capital Expenditures, Including:	AR 270
	a)	Tujuan dari ikatan tersebut Purpose of the Commitments	AR 270
	b)	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut Expected Sources of Funding to Fulfill Such Commitments	AR 270
	c)	Mata uang yang menjadi denominasi Currency Denomination	AR 270
	d)	Langkah yang direncanakan Perubahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Planned Measures to Mitigate Foreign Exchange Risks Associated with Foreign Currency Exposure	AR 270
7		Bahasan mengenai investasi barang modal yang yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir: Discussion of Capital Expenditure Investments Realized During the Most Recent Fiscal Year, Including:	AR 271
	a)	Jenis investasi barang modal Type of Capital Expenditure Investment	AR 271
	b)	Tujuan investasi barang modal Purpose of the Capital Expenditure Investment	AR 271
	c)	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan Value of the Capital Expenditure Investment Incurred	AR 271
8		Prospek usaha dari Perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya Business Prospects of the Company in Relation to Industry Conditions, the General Economy, and International Markets, Supported by Quantitative Data from Reliable Sources	AR 295
9		Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) Comparison Between Targets/Projections at the Beginning of the Fiscal Year and Actual Results Achieved, Including:	AR 291
	a)	Pendapatan/penjualan Revenue/Sales	AR 291
	b)	Laba (rugi) Profit (Loss)	AR 291

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	c)	Struktur modal (capital structure) Capital Structure	AR 291
	d)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other Matters Considered Material to the Company	AR 291
10		Target/proyeksi yang ingin dicapai Perusahaan untuk 1 (satu) tahun mendatang, Targets/Projections for the Following Fiscal Year, Including:	AR 291
	a)	Pendapatan/penjualan Revenue/Sales	AR 291
	b)	Laba (rugi) Profit (Loss)	AR 291
	c)	Struktur modal (capital structure) Capital Structure	AR 291
	d)	Kebijakan dividen Dividend Policy	AR 291
	e)	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Perusahaan Other Matters Considered Material to the Company	AR 291
11		Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Perusahaan, paling sedikit mengenai Strategi pemasaran dan Pangsa pasar Marketing Aspects of the Company's Products and/or Services, Including at Least:	AR 287
12		Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir Description of Dividend Distribution During the Last Two Fiscal Years	AR 272
	a)	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend Policy, Including Information on the Percentage of Dividends Distributed Relative to Net Profit	AR 272
	b)	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Cash Dividend Payment Date and/or Non-Cash Dividend Distribution Date	AR 272
	c)	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan Dividend per Share (Cash and/or Non-Cash)	AR 272
	d)	Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Total Dividends Paid Per Year	AR 272
	d1)	Catatan: Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut Note: If the Issuer or Public Company Did Not Distribute Dividends During the Last Two Fiscal Years, Such Information Shall Be Disclosed.	AR 272
13		Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, with the Following Provisions:	AR 274
	a)	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku If, during the fiscal year, the Issuer is required to submit a report on the realization of the use of proceeds, the cumulative realization of the use of proceeds from the public offering up to the end of the fiscal year shall be disclosed.	AR 274
	b)	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut If there are changes in the use of proceeds as regulated under the OJK Regulation concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Issuer shall disclose and explain such changes.	AR 274
14		Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku Material Information (If Any), Including Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Business Combinations, Acquisitions, Debt/Capital Restructuring, Material Transactions, Affiliated Party Transactions, and Conflict of Interest Transactions Occurring During the Fiscal Year	AR 278
	a)	Tanggal, nilai, dan objek transaksi Date, Value, and Object of the Transaction	AR 278
	b)	Nama pihak yang melakukan transaksi; Name of the Parties Involved in the Transaction	AR 278

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	c)	Sifat hubungan afiliasi (jika ada); Nature of the Affiliation Relationship (If Any)	AR 278
	d)	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the Fairness of the Transaction	AR 278
	e)	Pemenuhan ketentuan terkait; dan Compliance with Applicable Regulatory Requirements	AR 278
	f)	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Perusahaan juga mengungkapkan informasi: For Affiliated Party Transactions, in Addition to the Information Disclosed Above, the Company Shall Also Disclose:	AR 284
	f1)	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); A Statement from the Board of Directors Confirming that the Affiliated Party Transaction Has Undergone Adequate Procedures to Ensure That It Was Conducted in Accordance with Prevailing Business Practices, Including Compliance with the Arm's-Length Principle	AR 284
	f2)	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle); The Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in Conducting Adequate Procedures to Ensure That the Affiliated Party Transaction Was Conducted in Accordance with Prevailing Business Practices, Including Compliance with the Arm's-Length Principle	AR 284
	g)	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; For Affiliated Party Transactions or Material Transactions That Constitute Revenue-Generating Business Activities Conducted on a Routine, Recurring, and/or Ongoing Basis, a Statement Confirming That Such Transactions Are Revenue-Generating Activities Conducted on a Routine, Recurring, and/or Ongoing Basis	AR 284
	h)	Catatan: Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut (atas point A.1.10.14.g) Note: If Such Affiliated Party Transactions or Material Transactions Have Been Disclosed in the Annual Financial Statements, a Reference to the Relevant Disclosure in the Annual Financial Statements Shall Be Provided	AR 284
	i)	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi tersebut For the Disclosure of Affiliated Party Transactions and/or Conflict of Interest Transactions Resulting from Transactions Approved by Independent Shareholders, the Date of the General Meeting of Shareholders (GMS) Approving the Transaction Shall Also Be Disclosed	AR 284
	j)	Catatan: dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (atas point A.1.10.14.i) Note: If There Were No Affiliated Party Transactions and/or Conflict of Interest Transactions During the Fiscal Year, Such Information Shall Be Disclosed	AR 284
15		Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); Changes in Laws and Regulations That Have a Significant Impact on the Company and Their Impact on the Financial Statements (If Any)	AR 285
11		**Governansi Perusahaan** Corporate Governance	
1		**Pengungkapan terkait RUPS:** Disclosure Relating to the General Meeting of Shareholders (GMS):	
	a)	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku Information on Resolutions of the GMS During the Fiscal Year and One Fiscal Year Prior to the Reporting Year	AR 333-355
	a1)	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku GMS Resolutions from the Fiscal Year and One Fiscal Year Prior to the Reporting Year That Were Implemented During the Fiscal Year	AR 333-355

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	a2)	Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan GMS Resolutions from the Fiscal Year and One Fiscal Year Prior to the Reporting Year That Have Not Yet Been Implemented, Including the Reasons for Non-Implementation	AR 333-355
	b)	Dalam hal Perusahaan menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; If the Company Engaged an Independent Party to Conduct Vote Counting at the GMS, Such Information Shall Be Disclosed.	AR 333-355
2		**Pengungkapan terkait Direksi** Disclosure Relating to the Board of Directors	
V	a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors	AR 380
V	b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi Statement Confirming That the Board of Directors Has a Board Charter	AR 375
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan dalam RUPS (dapat disajikan dalam bentuk tabel). Policies and Implementation of the Frequency of Board of Directors Meetings, Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and Attendance Rates of Members of the Board of Directors at Such Meetings, Including Attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS); Information on Directors' Attendance at Board Meetings, Joint Board Meetings, and GMS May Be Presented in Tabular Form	AR 382
	c1)	Kebijakan terkait frekuensi rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Policy on the Frequency of Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners	AR 383
	c2)	Frekuensi pelaksanaan rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris Frequency of Board of Directors Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners Held During the Fiscal Year	AR 383
	c3)	Informasi tingkat kehadiran direksi dalam rapat direksi, rapat direksi dekom, RUPS Attendance of Members of the Board of Directors at Board Meetings, Joint Meetings with the Board of Commissioners, and the GMS	AR 383
	d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi Training and/or Competency Development Programs for Members of the Board of Directors	AR 385
	d1)	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); Policy on Training and/or Competency Development for Members of the Board of Directors, Including Orientation Programs for Newly Appointed Directors (If Any)	AR 385
	d2)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended by Members of the Board of Directors During the Fiscal Year (If Any)	AR 385
	e)	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku Assessment by the Board of Directors of the Performance of Committees Supporting the Execution of the Board of Directors' Duties During the Fiscal Year	AR 387
	e1)	Prosedur penilaian kinerja Performance Evaluation Procedures	AR 387
	e2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat Criteria Used, Such as Performance Achievement During the Fiscal Year, Competencies, and Attendance at Meetings	AR 387
	f)	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.2.e1 & e2) Note: If the Company Does Not Have Committees Supporting the Execution of the Board of Directors' Duties, Such Information Shall Be Disclosed.	AR 387
3		**Pengungkapan terkait Dewan Komisaris** Disclosure Relating to the Board of Commissioners	
	a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners	AR 363

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris Statement Confirming That the Board of Commissioners Has a Board Charter	AR 357
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and Implementation of the Frequency of Board of Commissioners Meetings, Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and Attendance Rates of Members of the Board of Commissioners at Such Meetings, Including Attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS)	AR 364
	d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris Training and/or Competency Development Programs for Members of the Board of Commissioners	AR 368
	d1)	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat Policy on Training and/or Competency Development for Members of the Board of Commissioners, Including Orientation Programs for Newly Appointed Commissioners	AR 368
	d2)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended by Members of the Board of Commissioners During the Fiscal Year (If Any)	AR 368
	e)	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Performance Evaluation of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Individual Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	AR 403
	e1)	Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Performance Evaluation Procedures	AR 403
	e2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan Criteria Used, Such as Performance Achievement During the Fiscal Year, Competencies, and Attendance at Meetings	AR 403
	e3)	Pihak yang melakukan penilaian; Parties Conducting the Evaluation	AR 403
	f)	Penilaian Dewan komisaris terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku, meliputi Assessment by the Board of Commissioners of the Performance of Committees Supporting the Execution of the Board of Commissioners' Duties During the Fiscal Year, Including:	AR 369
	f1)	Prosedur penilaian kinerja; dan Performance Evaluation Procedures	AR 369
	f2)	Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; Criteria Used, Such as Performance Achievement During the Fiscal Year, Competencies, and Attendance at Meetings	AR 369
4		**Pengungkapan terkait Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** Disclosure Relating to the Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	
	a)	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Nomination Procedures, Including a Brief Description of the Policies and Processes for the Nomination of Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners	AR 426
	b)	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Remuneration Procedures and Implementation for the Board of Directors and the Board of Commissioners, Including:	AR 396-398
	b1)	Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedures for Determining the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	AR 396-398
	b2)	Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Remuneration Structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Such as Salaries, Allowances, Tantiem/Bonuses, and Other Benefits	AR 396-398
	b3)	Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Remuneration Amounts of Individual Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners	AR 396-398

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
5		**Pengungkapan terkait Dewan pengawas syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar** Disclosure Relating to the Sharia Supervisory Board, for Companies Conducting Business Activities Based on Sharia Principles as Stipulated in Their Articles of Association	-
	a)	Nama Name	
	b)	dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah Legal Basis for the Appointment of the Sharia Supervisory Board	
	c)	periode penugasan dewan pengawas syariah Term of Office of the Sharia Supervisory Board	
	d)	Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board	
	e)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Perusahaan Frequency and Methods of Providing Advice, Recommendations, and Supervision of Compliance with Sharia Principles in the Capital Market	
6		**Pengungkapan terkait Komite audit** Disclosure Relating to the Audit Committee	
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and Position within the Audit Committee	AR 413
	b)	Usia Age	AR 413
	c)	Kewarganegaraan Nationality	AR 413
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	AR 413
	e)	Riwayat jabatan Career History	AR 413
	e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee	AR 413
	e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Other Committees, as well as Other Positions (If Any)	AR 413
	e3)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (atas point A.1.11.6.e2) Note: If There Are No Concurrent Positions, Such Information Shall Be Disclosed	AR 413
	e4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan; Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 413
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite audit Term and Tenure of Audit Committee Members	AR 413
	g)	Pernyataan independensi komite audit Statement of Independence of the Audit Committee	AR 413
	h)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year (If Any)	AR 413
	i)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; Policies and Implementation of the Frequency of Audit Committee Meetings and Attendance Rates of Audit Committee Members at Such Meetings	AR 414
	j)	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku Activities Performed by the Audit Committee During the Fiscal Year	AR 421
7a		Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosure Relating to the Company's Nomination and Remuneration Committee or Function	
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and Position within the Committee	AR 428
	b)	Usia Age	AR 428

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	c)	Kewarganegaraan Nationality	AR 428
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	AR 428
	e)	Riwayat jabatan Career History	AR 428
	e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal Basis for Appointment as a Committee Member	AR 428
	e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Other Committees, as well as Other Positions (If Any)	AR 428
	e3)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7a. e2) Note: If There Are No Concurrent Positions, Such Information Shall Be Disclosed	AR 428
	e4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 428
	f)	periode dan masa jabatan anggota komite audit Term and Tenure of Committee Members	AR 428
	g)	Pernyataan independensi komite; Statement of Independence of the Committee	AR 430
	h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year (If Any)	AR 437
	i)	uraian tugas dan tanggung jawab Description of Duties and Responsibilities	AR 437
	j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement Confirming That the Committee Has a Charter	AR 427
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and Implementation of Meeting Frequency and Attendance Rates of Committee Members at Such Meetings	AR 430
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; Brief Description of Activities Performed During the Fiscal Year	AR 438
	m)	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: If the Committee Has Not Been Established:	AR 428
	m1)	Alasan tidak dibentuknya komite Reason for Not Establishing the Committee	AR 428
	m2)	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Party Responsible for Performing the Nomination and Remuneration Function	AR 428
7b		Pengungkapan terkait Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Disclosure Relating to the Company's Nomination and Remuneration Committee or Function	AR 428
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and Position within the Committee	AR 428
	b)	Usia Age	AR 428
	c)	Kewarganegaraan Nationality	AR 428
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	AR 428
	e)	Riwayat jabatan Career History	AR 428
	e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal Basis for Appointment as a Committee Member	AR 428
	e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Other Committees, as well as Other Positions (If Any)	AR 428

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	e3)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.7b. e2) Note: If There Are No Concurrent Positions, Such Information Shall Be Disclosed	AR 428
	e4)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 428
	f)	periode dan masa jabatan anggota komite audit Term and Tenure of Committee Members	AR 428
	g)	Pernyataan independensi komite; Statement of Independence of the Committee	AR 428
	h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year (If Any)	AR 428
	i)	uraian tugas dan tanggung jawab Description of Duties and Responsibilities	AR 438
	j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement Confirming That the Committee Has a Charter	AR 427
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and Implementation of Meeting Frequency and Attendance Rates of Committee Members at Such Meetings	AR 430
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; Brief Description of Activities Performed During the Fiscal Year	AR 438
	m)	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: If the Committee Has Not Been Established:	AR 428
	m1)	Alasan tidak dibentuknya komite Reason for Not Establishing the Committee	AR 428
	m2)	Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Party Responsible for Performing the Nomination and Remuneration Function	AR 428
8a		Pengungkapan terkait Komite Manajemen Risiko Disclosure Relating to the Risk Management Committee	
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and Position within the Committee	AR 444
	b)	Usia Age	AR 444
	c)	Kewarganegaraan Nationality	AR 444
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	AR 444
	e)	Riwayat jabatan Career History	AR 444
	e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal Basis for Appointment as a Committee Member	AR 444
	e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Other Committees, as well as Other Positions (If Any)	AR 444
	e2)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; (A.1.11.8a. e2) Note: If There Are No Concurrent Positions, Such Information Shall Be Disclosed	AR 444
	e3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 444
	f)	periode dan masa jabatan anggota komite manajemen risiko Term and Tenure of Risk Management Committee Members	AR 444
	g)	Pernyataan independensi komite; Statement of Independence of the Committee	AR 444
	h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year (If Any)	AR 447
	i)	uraian tugas dan tanggung jawab Description of Duties and Responsibilities	AR 447

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement Confirming That the Committee Has a Charter	AR 447
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and Implementation of Meeting Frequency and Attendance Rates of Committee Members at Such Meetings	AR 445
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; Brief Description of Activities Performed During the Fiscal Year	AR 447
	m)	Catatan: Dalam hal tidak dibentuk komite: Note: If the Committee Has Not Been Established:	-
	m1)	Alasan tidak dibentuknya komite Reason for Not Establishing the Committee	-
	m2)	Pihak yang melaksanakan fungsi manajemen risiko Party Responsible for Performing the Risk Management Function	-
8b		Pengungkapan terkait Komite lain yang dimiliki Perusahaan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris: Disclosure Relating to Other Committees Established by the Company to Support the Functions and Duties of the Board of Directors (If Any) and/or Committees Supporting the Functions and Duties of the Board of Commissioners	
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite Name and Position within the Committee	-
	b)	Usia Age	-
	c)	Kewarganegaraan Nationality	-
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	-
	e)	Riwayat jabatan Career History	-
	e1)	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite Legal Basis for Appointment as a Committee Member	-
	e2)	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); Concurrent Positions, Including Positions as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Other Committees, as well as Other Positions (If Any)	-
	e2)	Catatan: Dalam tidak ada rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Note: If There Are No Concurrent Positions, Such Information Shall Be Disclosed	-
	e3)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	-
	f)	periode dan masa jabatan anggota komite lain Term and Tenure of Committee Members	-
	g)	Pernyataan independensi komite; Statement of Independence of the Committee	-
	h)	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada) Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year (If Any)	-
	i)	uraian tugas dan tanggung jawab Description of Duties and Responsibilities	-
	j)	pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Statement Confirming That the Committee Has a Charter	-
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and Implementation of Meeting Frequency and Attendance Rates of Committee Members at Such Meetings	-
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; Brief Description of Activities Performed During the Fiscal Year	-
9		**Pengungkapan terkait Sekretaris perusahaan** Disclosure Relating to the Corporate Secretary	
	a)	Nama Name	AR 450

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	b)	Domisili Domicile	AR 450
	c)	Riwayat Jabatan Career History	AR 450
	c1)	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan Legal Basis for Appointment as Corporate Secretary	AR 450
	c2)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 450
	d)	Riwayat pendidikan Educational Background	AR 450
	e)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year	AR 452
	f)	uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; Brief Description of the Corporate Secretary's Duties and Activities During the Fiscal Year	AR 450
10		**Pengungkapan terkait Unit audit internal, paling sedikit memuat** Disclosure Relating to the Internal Audit Unit, Including at Least:	
	a)	Nama kepala unit audit internal Name of the Head of the Internal Audit Unit	AR 464
	b)	Riwayat jabatan Career History	AR 464
	b1a)	Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal Legal Basis for Appointment as Head of the Internal Audit Unit	AR 464
	b1)	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Perusahaan Professional Experience, Including Relevant Periods, Both Within and Outside the Company	AR 464
	c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal Qualifications and/or Certifications as an Internal Audit Professional	AR 464
	d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku Training and/or Competency Development Programs Attended During the Fiscal Year	AR 464
	e)	Struktur dan kedudukan unit audit internal; Structure and Position of the Internal Audit Unit	AR 459
	f)	Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of Duties and Responsibilities	AR 459
	g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal Statement Confirming That the Internal Audit Unit Has an Internal Audit Charter	AR 457
	h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; Brief Description of the Activities Performed by the Internal Audit Unit During the Fiscal Year, Including Policies and Implementation of Meeting Frequency with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.	AR 465
11		**Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Perusahaan** Description of the Internal Control System Implemented by the Company	
	a)	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and Operational Controls, as well as Compliance with Applicable Laws and Regulations	AR 474-477
	b)	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal Review of the Effectiveness of the Internal Control System	AR 478
	c)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System	AR 480
12		**Uraian mengenai Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan** Description of the Risk Management System Implemented by the Company	
	a)	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perusahaan; Overview of the Company's Risk Management System	AR 481-488
	b)	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Types of Risks and Their Management Approaches	AR 489-497

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	c)	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Perusahaan Review of the Effectiveness of the Company's Risk Management System	AR 498
	d)	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement by the Board of Directors and/or Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System	AR 500
14		**informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku** Information on Administrative Sanctions and/or Other Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners, and Members of the Board of Directors by the Financial Services Authority (OJK) and Other Regulatory Authorities During the Fiscal Year.	**AR 503**
15		**Informasi mengenai kode etik Perusahaan** Information on the Company's Code of Conduct	
	a)	Pokok-pokok kode etik Key Principles of the Code of Conduct	AR 509
	b)	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya Methods of Socialization and Enforcement of the Code of Conduct	AR 512
	c)	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan Statement Confirming That the Code of Conduct Applies to Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Employees of the Company	AR 510
16	**a)**	**Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP)** Brief Description of the Company's Long-Term Performance-Based Compensation Policy for Management and/or Employees (If Any), Including Management Stock Ownership Programs (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Programs (ESOP)	**AR 518**
	b)	Dalam hal terdapat pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: (atas point A.1.11.16) If the Company Provides Compensation Through an MSOP and/or ESOP, the Following Information Shall Be Disclosed at a Minimum:	AR 518
	b1)	jumlah saham dan/atau opsi Number of Shares and/or Options	AR 518
	b2)	jangka waktu pelaksanaan Implementation Period	AR 518
	b3)	persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak Eligibility Requirements for Employees and/or Management	AR 518
	b4)	harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan Exercise Price or Methodology for Determining the Exercise Price	AR 518
17		**Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai** Brief Description of the Disclosure Policy Regarding:	
	a)	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; Share Ownership by Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners No Later Than Three Business Days After Acquisition of Ownership or Any Change in Ownership of Shares in the Public Company	AR 519
	b)	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud Implementation of Such Policy	AR 519
18		**Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Perusahaan:** Description of the Company's Whistleblowing System, Including:	
	a)	Cara penyampaian laporan pelanggaran; Procedures for Submitting Reports of Violations	AR 535
	b)	Perlindungan bagi pelapor; Protection for Whistleblowers	AR 536

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	c)	Penanganan pengaduan; Complaint Handling Procedures	AR 537
	d)	Pihak yang mengelola pengaduan; Party Responsible for Managing Complaints	AR 536
	e)	Hasil dari penanganan pengaduan: Results of Complaint Handling, Including:	AR 538
	e1)	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku Number of Complaints Received and Processed During the Fiscal Year	AR 538
	e2)	Tindak lanjut pengaduan; Follow-Up Actions Taken on Complaints	AR 538
	e3)	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. (atas point A.1.11.18) Note: If the Company Does Not Have a Whistleblowing System, Such Information Shall Be Disclosed.	-
19		**Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Perusahaan** Description of the Company's Anti-Corruption Policy	
	a)	Program dan prosedur yang dilakukan Programs and Procedures Implemented	AR 539
	b)	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Perusahaan; Anti-Corruption Training and/or Awareness Programs for Employees	AR 540
	c)	Catatan: Dalam hal Perusahaan tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud (atas point A.1.11.19) Note: If the Company Does Not Have an Anti-Corruption Policy, the Reasons for the Absence of Such Policy Shall Be Explained.	-
20a		Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: Implementation of the Corporate Governance Guidelines for Public Companies by Issuers of Equity Securities or Public Companies, Including:	
	a)	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan Statement of Recommendations That Have Been Implemented	AR 555-583
	b)	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence and/or Explanations Demonstrating That the Company Has Implemented Such Recommendations	AR 555-583
	c)	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of Recommendations That Have Not Yet Been Implemented, Including Reasons and Alternative Measures	AR 555-583
20b		Pengungkapan terkait penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dengan pendekatan "comply or explain " atau "apply or explain ", meliputi: Disclosure Relating to the Implementation of Corporate Governance Guidelines Based on the "Comply or Explain" or "Apply or Explain" Approach, Including:	AR 555-583
	a)	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau Statement of Recommendations That Have Been Implemented; and/or	AR 555-583
	b)	Bukti/penjelasan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan rekomendasi tersebut Evidence and/or Explanations Demonstrating That the Company Has Implemented Such Recommendations	AR 555-583
	c)	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif Explanation of Recommendations That Have Not Yet Been Implemented, Including Reasons and Alternative Measures.	AR 555-583
		ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY REPORT CONTENT	
1		**Strategi Keberlanjutan** Sustainability Strategy	**SR 28**
1		Penjelasan Strategi Keberlanjutan Description of Sustainability Strategy	SR 28
2		**Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan** Overview of Sustainability Performance	**SR 6**
1		Aspek Ekonomi, paling sedikit memuat: Economic Aspects, Including at a Minimum:	SR 6

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
	a)	Kuantitas produksi atau jasa yang dijual; Quantity of Products Manufactured or Services Provided	SR 6
	b)	Produk ramah lingkungan; Environmentally Friendly Products	SR 6
	c)	Pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan Engagement of Local Parties Related to Sustainable Finance Business Processes	SR 6
2		Aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat: Environmental Aspects, Including at a Minimum:	SR 7
	a)	Penggunaan energi; Energy Consumption	SR 7-9
	b)	Pengurangan emisi yang dihasilkan; Reduction of Emissions Generated	SR 7-9
	c)	Pengurangan limbah dan efluen; dan Economic Aspects, at a minimum, include the quantity of products manufactured or services delivered, environmentally friendly products, and the involvement of local parties related to Sustainable Finance business processes.	SR 7-9
	d)	Pelestarian keanekaragaman hayati. Environmental Aspects, at a minimum, include energy consumption, reduction of emissions generated, reduction of waste and effluents, and biodiversity conservation.	SR 9
3		Aspek Sosial Social Aspects	SR 10
3		**Profil Perusahaan** Company Profile	**SR 54**
1		Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan Vision, Mission, and Sustainability Values	SR 55
2		Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan Products, Services, and Business Activities	SR 59
3		Perubahan Perusahaan yang Bersifat Signifikan Significant Corporate Changes	SR 55
4		**Penjelasan Direksi** Board of Directors' Statement	**SR 19**
1		Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan Policies to Address Challenges in Achieving Sustainability Strategies	SR 18-21
2		Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sustainable Finance Implementation	SR 18-21
3		Strategi pencapaian target Strategy for Achieving Sustainability Targets	SR 18-21
5		**Governansi Berkelanjutan** Sustainability Governance	**SR 202**
1		Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan Persons Responsible for Sustainable Finance Implementation	SR 217
2		Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan Competency Development Related to Sustainable Finance	SR 218
3		Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Risk Assessment of Sustainable Finance Implementation	SR 28, 31, 219
4		Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	SR 229
5		Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Challenges in the Implementation of Sustainable Finance	SR 236
6		**Kinerja Keberlanjutan** Sustainability Performance	**SR 65, 179**
1		Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Sustainability Culture Development Initiatives	SR 65, 179
	a)	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Activities to Foster a Sustainability Culture	SR 65, 179

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	**Ketersediaan** Availability
2		Kinerja Ekonomi Economic Performance	SR 63
	a)	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi Comparison of Targets and Performance in Production, Portfolio, Financing or Investment Targets, Revenue, and Profit/Loss	SR 66
	b)	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan Comparison of Targets and Performance of Portfolios, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects Aligned with Sustainable Finance	SR 72-73
3		Kinerja Lingkungan Hidup Environmental Performance	SR 78
	a)	Aspek Umum General Aspects	SR 78
	a1)	Biaya Lingkungan Hidup Environmental Expenditures	SR 9, 86
	b)	Aspek Material Material Aspects	SR 86
	b1)	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan Use of Environmentally Friendly Materials	SR 86
	c)	Aspek Energi Energy Aspects	SR 90
	c1)	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan Total Energy Consumption and Energy Intensity	SR 90, 92
	c2)	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan Efforts and Achievements in Energy Efficiency and Renewable Energy Utilization	SR 90, 92
	d)	Aspek Air Water Aspects	SR 97
	d1)	Penggunaan air Water Consumption	SR 97
	e)	Aspek Keragaman Hayati Biodiversity Aspects	SR 106
	e1)	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Keanekaragaman Hayati Impacts of Operational Areas Located Near or Within Conservation Areas or Biodiversity-Sensitive Areas	SR 106
	e2)	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati Biodiversity Conservation Initiatives	SR 106, 108
	f)	Aspek Emisi Emissions Aspects	SR 93
	f1)	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya Total Emissions and Emissions Intensity by Type	SR 93
	f2)	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan Efforts and Achievements in Emissions Reduction	SR 94, 96
	g)	Aspek Limbah Dan Efluen Waste and Effluent Aspects	SR 102
	g1)	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis Total Waste and Effluent Generated by Type	SR 102
	g2)	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management Mechanisms	SR 102, 104
	h)	Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Environmental Complaints	SR 111
	h1	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan Number and Nature of Environmental Complaints Received and Resolved	SR 111
4		Kinerja Sosial Social Performance	SR 112

		Item Penilaian dari SE OJK 016/2021 Assessment Items Based on OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 **Isi Laporan Tahunan** Annual Report Content	Ketersediaan Availability
	a)	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen Commitment to Providing Equal Access to Products and/or Services for Customers	SR 112
	b)	Aspek Ketenagakerjaan Employment Aspects	SR 120
	b1)	Kesetaraan Kesempatan Bekerja Equal Employment Opportunities	SR 122
	b2)	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa Child Labor and Forced Labor	SR 121
	b3)	Upah Minimum Regional Regional Minimum Wage Compliance	SR 129
	b4)	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman Safe and Decent Working Environment	SR 147
	b5)	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai Employee Training and Development	SR 135, 144
	c)	Aspek Masyarakat Community Aspects	SR 175
	c1)	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar Impact of Operations on Local Communities	SR 175
	c2)	Pengaduan Masyarakat Community Complaints	SR 233, 236
	c3)	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) Activities	SR 175
	d)	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Responsibility for the Development of Sustainable Products/Services	SR 112
	d1)	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services	SR 113
	d2)	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan Products/Services Evaluated for Customer Safety	SR 115
	d3)	Dampak Produk/Jasa Product/Service Impacts	SR 115
	d4)	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali Number of Product Recalls	SR 116
	e)	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Customer Satisfaction Surveys on Sustainable Financial Products and/or Services	SR 116
7		**Lain-lain** Others	
1		Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen Independent Written Verification	SR 238
2		Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada Reader Feedback Form (If Any)	SR 240
3		Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya Response to Feedback on the Previous Year's Sustainability Report	SR 35
4		Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Disclosure Index in Accordance with Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.	SR 242

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Gedung WIKA Tower 1, Lt.7-10, Jl. DI. Panjaitan
No.Kav 9, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13340

Email : investorrelations@wikagedung.id
Phone : (021) 85908862/85909003

www.wikagedung.co.id